



**PERATURAN WALI KOTA
MAGELANG NOMOR 11
TAHUN 2025**

TENTANG

**RENCANA KERJA
PEMERINTAH DAERAH
KOTA MAGELANG
TAHUN 2026**

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN,
RISET DAN INOVASI DAERAH KOTA MAGELANG



WALI KOTA MAGELANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN WALI KOTA MAGELANG
NOMOR 11 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA MAGELANG,

Menimbang : a. bahwa perencanaan pembangunan dibutuhkan untuk memastikan pembangunan di Daerah terlaksana dengan baik guna mewujudkan kesejahteraan umum sebagaimana amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

b. bahwa dalam rangka menjamin pembangunan di Daerah terlaksana dengan baik perlu adanya keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan pembangunan dengan penganggaran, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi dalam suatu Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Pasal 264 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Rencana Kerja Pemerintah Daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa;

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2026.

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Magelang.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Magelang.
4. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Pasal 2

- (1) RKPD Tahun 2026 merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029.
- (2) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai jangka waktu pelaksanaan terhitung sejak Januari 2026 sampai dengan Desember 2026.

Pasal 3

RKPD Tahun 2026 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 menjadi pedoman dalam:

- a. penyusunan rancangan anggaran pendapatan dan belanja Daerah tahun anggaran 2026;
- b. penyusunan rencana kerja perangkat Daerah tahun anggaran 2026; dan
- c. penyusunan rancangan kebijakan umum anggaran dan prioritas dan plafon anggaran sementara dengan dewan perwakilan rakyat Daerah.

Pasal 4

RKPD Tahun 2026 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

- a. bab I berisi pendahuluan;
- b. bab II berisi gambaran umum kondisi Daerah;
- c. bab III berisi kerangka ekonomi dan keuangan Daerah;

- d. bab IV berisi sasaran dan prioritas pembangunan Daerah;
- e. bab V berisi rencana kerja dan pendanaan Daerah;
- f. bab VI berisi kinerja penyelenggaraan pemerintahan Daerah; dan
- g. bab VII berisi penutup.

Pasal 5

Dokumen RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 6

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Magelang.

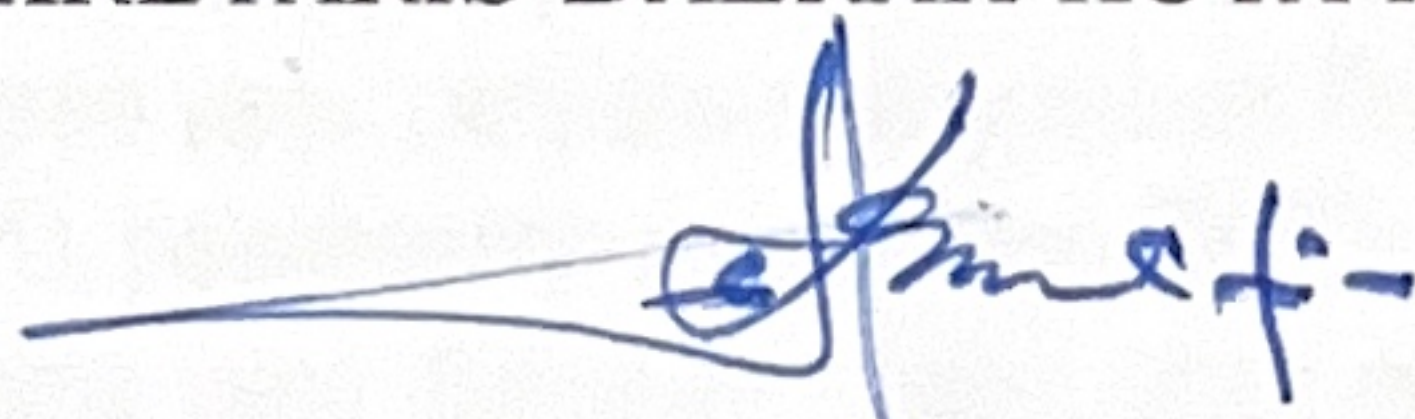
Ditetapkan di Magelang
pada tanggal 4 Juli 2025

WALI KOTA MAGELANG,


DAMAR PRASETYONO

Diundangkan di Magelang
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KOTA MAGELANG,


HAMZAH KHOLIFI



BERITA DAERAH KOTA MAGELANG TAHUN 2025 NOMOR 12

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	xiv
BAB 1 PENDAHULUAN	1-1
1.1 LATAR BELAKANG	1-1
1.1.1 Proses Penyusunan	1-1
1.1.2 Prinsip dan Pendekatan Penyusunan	1-2
1.2 LANDASAN HUKUM	1-4
1.3 HUBUNGAN ANTAR DOKUMEN	1-6
1.3.1 RTRW Kota Magelang Tahun 2011-2031	1-8
1.3.2 RPJMD Kota Magelang	1-8
1.3.3 Rencana Pembangunan Sektoral	1-8
1.3.4 Rencana Kerja Perangkat Daerah	1-8
1.4 MAKSUD DAN TUJUAN	1-9
1.4.1 Maksud	1-9
1.4.2 Tujuan	1-9
1.5 SISTEMATIKA RKPD	1-9
BAB 2 GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH	2-1
2.1 KONDISI UMUM DAERAH	2-1
2.1.1 Aspek Geografi dan Demografi	2-1
2.1.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat	2-25
2.1.3 Aspek Layanan Umum	2-50
2.1.4 Aspek Daya Saing Daerah	2-215
2.1.5 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)	2-223
2.1.6 Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM)	2-233
2.2 EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN RKPD SAMPAI TAHUN BERJALAN DAN REALISASI RPJMD	2-238
2.2.1 Evaluasi Kinerja Utama	2-239
2.2.2 Evaluasi Kinerja Urusan Wajib Pelayanan Dasar	2-241
2.2.3 Evaluasi Kinerja Urusan Wajib Non-Pelayanan Dasar	2-248
2.2.4 Evaluasi Kinerja Urusan Pilihan	2-263
2.2.5 Evaluasi Kinerja Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan	2-267
2.2.6 Evaluasi Kinerja Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan	2-269
2.2.7 Evaluasi Kinerja Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan	2-272
2.2.8 Evaluasi Kinerja Unsur Kewilayahan	2-273
2.2.9 Evaluasi Kinerja Unsur Pemerintahan Umum	2-273
2.3 PERMASALAHAN PEMBANGUNAN DAERAH	2-274
2.3.1 Permasalahan Daerah Yang Berhubungan Dengan Prioritas Dan Sasaran Pembangunan Daerah	2-274

2.3.2	Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah	2-274
2.3.3	Permasalahan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)	2-288
2.4	ISU STRATEGIS	2-291
2.5	INOVASI DAERAH	2-291
2.6	PENGHARGAAN YANG DITERIMA KOTA MAGELANG	2-293
BAB 3	RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH	3-1
3.1	ARAH KEBIJAKAN EKONOMI DAERAH	3-1
3.1.1	Kondisi Perekonomian Global	3-1
3.1.2	Kondisi Perekonomian Nasional dan Jawa Tengah	3-2
3.1.3	Kondisi Perekonomian Kota Magelang	3-4
3.1.4	Pemerataan Pendapatan.....	3-4
3.1.5	Pertumbuhan Ekonomi.....	3-5
3.1.6	Tingkat Pengangguran Terbuka.....	3-6
3.1.7	Kontribusi Sektor Perekonomian terhadap PDRB	3-6
3.1.8	PDRB per Kapita.....	3-8
3.1.9	Inflasi	3-9
3.1.10	Tantangan dan Prospek Perekonomian Kota Magelang Tahun 2025	3-9
3.2	ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH	3-10
3.2.1	Kebijakan Pendapatan Daerah	3-11
3.2.2	Kebijakan Pendapatan Asli Daerah.....	3-11
3.2.3	Kebijakan Pendapatan Transfer	3-13
3.2.4	Kebijakan Lain-lain Pendapatan yang Sah	3-15
3.2.5	Arah Kebijakan Belanja Daerah	3-15
3.2.6	Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah	3-17
BAB 4	SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH.....	4-1
4.1	TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN.....	4-1
4.1.1	Visi Pembangunan Daerah	4-1
4.1.2	Misi Pembangunan Daerah	4-2
4.1.3	Tujuan dan Sasaran	4-4
4.1.4	Keselarasan dengan RPJPD Kota Magelang Tahun 2025-2045 dan Rancangan RPJMD Kota Magelang 2025-2029	4-17
4.2	PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN TAHUN 2026	4-19
4.2.1	Tema Pembangunan Tahun 2026.....	4-19
4.2.2	Prioritas Pembangunan Tahun 2026	4-20
4.3	SASARAN DAN PRIORITAS DAERAH DALAM MENDUKUNG PENCAPAIAN <i>SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS</i> (SDGs)	4-76
4.4	SASARAN DAN PRIORITAS DALAM MENDUKUNG TARGET PENGARUSUTAMAAN GENDER (PUG) DAN INKLUSI SOSIAL	4-81
4.5	SASARAN DAN PRIORITAS DALAM MENDUKUNG PENGARUSUTAMAAN KERENTANAN BENCANA DAN PERUBAHAN IKLIM	4-83
4.6	SASARAN DAN PRIORITAS DALAM MENDUKUNG PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL.....	4-84
4.7	SASARAN DAN PRIORITAS DALAM MENDUKUNG PENCAPAIAN TRANSFORMASI DIGITAL	4-86

BAB 5	RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH	5-1
5.1	RENCANA KERJA	5-1
5.1.1	Dukungan Program RKPD Kota Magelang Tahun 2026 terhadap Prioritas Nasional dan Arah Kebijakan RKP 2026	5-1
5.1.2	Dukungan Program RKPD Kota Magelang Tahun 2026 Terhadap Program Prioritas Pembangunan Kota Magelang Tahun 2026	5-24
5.1.3	Dukungan Program RKPD Kota Magelang Tahun 2026 yang Menerapkan Konsep Tematik, Holistik, Integratif dan Spasial (THIS)	5-28
5.1.4	Dukungan Program RKPD Kota Magelang Tahun 2026 Terhadap Destinasi Pariwisata Super Prioritas Borobudur	5-31
5.1.5	Dukungan Program RKPD Kota Magelang Tahun 2026 Terhadap Pembangunan Jalan Tol Yogyakarta-Bawen	5-32
5.1.6	Dukungan Program RKPD Kota Magelang Tahun 2026 Terhadap Aksi Konvergensi Stunting	5-33
5.1.7	Dukungan Program RKPD Kota Magelang Tahun 2026 Untuk Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	5-34
5.1.8	Dukungan Program RKPD Kota Magelang Tahun 2025 Terhadap Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim	5-59
5.2	PENDANAAN DAERAH	5-60
5.2.1	Indikator Kinerja per Program berdasarkan Urusan	5-60
5.2.2	Pagu Indikatif Berdasarkan Urusan dan Bidang	5-80
BAB 6	KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	6-1
BAB 7	PENUTUP	7-1

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Prinsip Penyusunan RKPD Kota Magelang Tahun 2026	1-2
Tabel 1.2	Pendekatan Penyusunan RKPD Kota Magelang Tahun 2026 yang Berorientasi pada Proses	1-3
Tabel 1.3	Pendekatan Substansi RKPD Kota Magelang Tahun 2026	1-3
Tabel 2.1	Luas Kecamatan dan Kelurahan di Kota Magelang	2-2
Tabel 2.2	Tabel Kemiringan Lereng	2-5
Tabel 2.3	Curah Hujan Tahunan Kota Magelang (mm), 2019-2023	2-8
Tabel 2.4	Luas Lahan Menurut Penggunaannya di Kota Magelang (hektar), 2019-2023	2-9
Tabel 2.5	Kejadian Bencana di Kota Magelang, 2021-2024	2-17
Tabel 2.6	Jumlah dan Kepadatan Penduduk per Kelurahan di Kota Magelang, 2020-2024	2-19
Tabel 2.7	Perkembangan Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin dan Tingkat Pertumbuhan Penduduk di Kota Magelang, 2020-2024	2-19
Tabel 2.8	Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur di Kota Magelang, 2020-2024	2-20
Tabel 2.9	Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencarian di Kota Magelang, 2021-2024	2-21
Tabel 2.10	Penduduk Berdasarkan Agama dan Keyakinan yang Dipeluk di Kota Magelang, 2020-2024	2-24
Tabel 2.11	Pendidikan Penduduk Kota Magelang, 2021-2024	2-24
Tabel 2.12	Target RKPD dan Capaian Pertumbuhan Ekonomi Kota Magelang (Persen), 2020-2024	2-26

Tabel 2.13	Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Kota Magelang dengan Kota-kota di Jawa Tengah, Provinsi Jawa Tengah, dan Indonesia (Persen), 2019-2023	2-26
Tabel 2.14	Sumber Pertumbuhan PDRB Kota Magelang (Persen) Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) (Persen), 2020-2024	2-27
Tabel 2.15	PDRB Kota Magelang Menurut Pengeluaran ADHB (dalam Miliar Rupiah), 2019 - 2023	2-28
Tabel 2.16	Pembentukan Modal Tetap Bruto terhadap PDRB, 2019-2023	2-28
Tabel 2.17	PDRB per Kapita (Ribu Rupiah/tahun) Kota Magelang, 2020 - 2024	2-30
Tabel 2.18	Distribusi Pengeluaran Berdasarkan Kriteria Bank Dunia Kota Magelang, 2019-2023	2-31
Tabel 2.19	Perbandingan IPM Kota Magelang dengan Kota-Kota di Jawa Tengah, 2020-2024	2-32
Tabel 2.20	Realisasi Indikator Pembentuk IPM Kota Magelang, Jawa Tengah dan Indonesia, 2022-2023	2-33
Tabel 2.21	Target dan Realisasi Indikator Pembentuk IPM Kota Magelang, 2023-2024	2-35
Tabel 2.22	Komponen Pembentuk Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kota Magelang, 2020-2024	2-35
Tabel 2.23	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Kota Magelang, 2019-2023	2-36
Tabel 2.24	Target dan Realisasi Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kota Magelang, 2020-2024	2-37
Tabel 2.25	Tingkat Pengangguran Terbuka Kota-kota di Jawa Tengah dan Indonesia, 2020-2024	2-38
Tabel 2.26	Perkembangan Perubahan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dan Pertumbuhan Ekonomi Kota Magelang, Jawa Tengah dan Indonesia, 2020-2024	2-39
Tabel 2.27	Indikator Ketenagakerjaan di Kota Magelang, 2020-2024	2-40
Tabel 2.28	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan, 2019-2023	2-40
Tabel 2.29	Angka Beban Tanggungan Penduduk Kota Magelang, 2020-2024	2-41
Tabel 2.30	Perkembangan Persentase Konsumsi dan Rata-rata Pengeluaran Per Kapita Kota Magelang, 2020-2024	2-42
Tabel 2.31	Target dan Realisasi Tingkat Kemiskinan Kota Magelang, 2020-2024	2-43
Tabel 2.32	Persentase Penduduk Miskin (P0) Kota-kota di Jawa Tengah dan Indonesia, 2020-2024	2-44
Tabel 2.33	Perkembangan Perubahan Tingkat Kemiskinan dan Pertumbuhan Ekonomi Kota Magelang, Jawa Tengah dan Indonesia, 2020-2024	2-45
Tabel 2.34	Jumlah dan Pertumbuhan Penduduk Miskin Kota-kota di Jawa Tengah dan Indonesia, 2020-2024	2-46
Tabel 2.35	Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Kota-kota di Jawa Tengah dan Indonesia, 2020-2024	2-46
Tabel 2.36	Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Kota-kota di Jawa Tengah dan Indonesia, 2020-2024	2-47
Tabel 2.37	Persentase Penduduk Miskin Usia 15 Tahun Ke Atas Menurut Tingkat Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan di Kota Magelang 2020-2024	2-48
Tabel 2.38	Persentase Penduduk Miskin Usia 15 Tahun ke Atas menurut Status Bekerja di Kota Magelang, 2020-2024	2-49
Tabel 2.39	Persentase Rumah Tangga Miskin yang Menggunakan Air Layak dan Jamban Sendiri/Bersama di Kota Magelang, 2020-2024	2-49
Tabel 2.40	Angka Harapan Lama Sekolah di Kota Magelang, Provinsi Jawa Tengah, dan Nasional; 2020-2024	2-50
Tabel 2.41	Rata-rata Lama Sekolah Kota Magelang, Jawa Tengah, dan Nasional; 2020-2024	2-50
Tabel 2.42	Angka Partisipasi Kasar (APK) Kota Magelang dan Jawa Tengah, 2020-2024	2-51
Tabel 2.43	Angka Partisipasi Murni (APM) Kota Magelang dan Jawa Tengah, 2020-2024	2-52
Tabel 2.44	Angka Partisipasi Sekolah Kota Magelang, 2020-2024	2-52

Tabel 2.45	Angka Putus Sekolah Kota Magelang, 2020-2024	2-53
Tabel 2.46	Peserta Didik PKBM dan SKB PNF di Kota Magelang Berdasarkan Usia, 2024	2-53
Tabel 2.47	Hasil Verifikasi dan Validasi Data Anak Tidak Sekolah (ATS), 2024	2-54
Tabel 2.48	Angka Kelulusan SD/MI dan SMP/MTs Kota Magelang, 2020-2024.....	2-54
Tabel 2.49	Persentase Angka Melanjutkan SD/MI ke SMP/MTs Kota Magelang, 2020-2024	2-55
Tabel 2.50	Rasio Guru-Murid Kota Magelang, 2020-2024	2-55
Tabel 2.51	Jumlah Guru dan Pendidikan Guru Kota Magelang, 2020-2024.....	2-56
Tabel 2.52	Kondisi Ruang Kelas Sekolah (SD, MI, SMP, dan MTs) Kota Magelang, 2020-2024	2-57
Tabel 2.53	Akreditasi PAUD, SD, SMP, PKBM, dan LKP Kota Magelang; 2020-2024.....	2-58
Tabel 2.54	Akreditasi SD SMP Kota Magelang, 2024.....	2-59
Tabel 2.55	Perizinan PAUD, SD, dan SMP Kota Magelang, 2020-2024	2-59
Tabel 2.56	Persentase Pendidik pada Satuan Pendidikan Dasar yang Membuat Karya Sastra (Dalam Bentuk Buku), 2020-2024.....	2-60
Tabel 2.57	Persentase Siswa yang Mencapai Standar Kompetensi Minimum pada Asesmen Tingkat Nasional (Seluruh Jenjang), 2020-2024	2-61
Tabel 2.58	Persentase Siswa yang Mencapai Standar Kompetensi Minimum pada Asesmen Tingkat Nasional (Seluruh Jenjang), 2020-2024	2-61
Tabel 2.59	Indeks Kesehatan Kota Magelang, 2020-2024	2-62
Tabel 2.60	Kasus Kematian Ibu Melahirkan di Kota Magelang, 2020-2024	2-62
Tabel 2.61	Kematian Bayi dan Balita Kota Magelang, 2020-2024.....	2-63
Tabel 2.62	Persentase Frekuensi Imunisasi Balita di Kota Magelang, 2020-2024	2-64
Tabel 2.63	Prevalensi Stunting dan Gizi Buruk Kota Magelang, 2020-2024	2-65
Tabel 2.64	Jumlah Dokter, Bidan, dan Perawat Kota Magelang; 2020-2024.....	2-66
Tabel 2.65	Persentase Pemenuhan SDM Kesehatan Sesuai Standar di Kota Magelang, 2020-2024.....	2-66
Tabel 2.66	Persentase Pemenuhan Fasilitas Kesehatan Sesuai Standar di Kota Magelang, 2020- 2024	2-67
Tabel 2.67	Cakupan Pengawasan Kefarmasian, Alat Kesehatan dan TPM di Kota Magelang, 2020- 2024	2-67
Tabel 2.68	Cakupan Penemuan dan Pengobatan Penyakit di Kota Magelang, 2020-2024	2-68
Tabel 2.69	Penemuan dan Penanganan Kasus Tuberkulosis di Kota Magelang, 2020-2024	2-69
Tabel 2.70	Persentase Kelurahan Siaga Aktif Strata Mandiri di Kota Magelang, 2020-2024.....	2-69
Tabel 2.71	Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional di Kota Magelang, 2020-2024.....	2-69
Tabel 2.72	Kondisi Jalan Kota Magelang, 2020-2024	2-70
Tabel 2.73	Persentase Panjang Jalan Kondisi Permukaan Mantap Kewenangan Kota, 2020-2024.....	2-70
Tabel 2.74	Kondisi Jembatan Kota Magelang, 2020-2024	2-73
Tabel 2.75	Rasio Bangunan Gedung ber-PBG di Kota Magelang, 2020-2024	2-74
Tabel 2.76	Kondisi Saluran Drainase di Kota Magelang, 2020-2024	2-75
Tabel 2.77	Kegiatan Peningkatan Sistem Drainase Perkotaan, 2024	2-76
Tabel 2.78	Kondisi Saluran Irigasi Kota Magelang, 2020 -2024.....	2-76
Tabel 2.79	Kegiatan Peningkatan Sistem Irigasi Perkotaan, 2024.....	2-77
Tabel 2.80	Akses Sanitasi Layak Kota Magelang, 2020-2024	2-78
Tabel 2.81	Sebaran BABS dan Rumah Tangga Belum Terakses Sanitasi Layak Kota Magelang, 2024	2-78
Tabel 2.82	Sebaran SPALDS Komunal dan SPALDS Individu Kota Magelang, 2024.....	2-79
Tabel 2.83	Sumber Pendanaan SPALDS Kota Magelang, 2024	2-80

Tabel 2.84	Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Layanan Sanitasi Aman, 2020-2024	2-82
Tabel 2.85	Retribusi UPT PALD, 2020-2024	2-82
Tabel 2.86	Distribusi Hasil Lelang Sanitasi, 2024	2-83
Tabel 2.87	Sebaran SPALDS Individu dan Komunal di Kota Magelang, 2024	2-83
Tabel 2.88	Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Air Minum Layak, 2020-2024	2-86
Tabel 2.89	Persentase Non-Revenue Water (NRW) Kota Magelang, 2020-2024	2-86
Tabel 2.90	Sebaran Sasaran Penerima Bantuan DAK Air Minum, 2024	2-87
Tabel 2.91	Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Layanan Sumber Air Minum Aman dan Berkelanjutan, 2020-2024	2-89
Tabel 2.92	Sebaran Pelanggan PDAM Kota Magelang, 2024	2-89
Tabel 2.93	Kapasitas Sumber Air dan Produksi Sumber Mata Air PDAM Kota Magelang, 2024	2-90
Tabel 2.94	Sebaran Penerima Manfaat Zona Air Minum Prima (ZAMP), 2024	2-90
Tabel 2.95	Sebaran Sumber Air Baku Kota Magelang, 2024	2-91
Tabel 2.96	Kemajuan Tahapan Aspek Administrasi Penyusunan RDTR Kota Magelang Hingga Akhir 2024	2-97
Tabel 2.97	Kondisi Sarana milik Pemerintah Daerah yang Memenuhi Universal Design, 2022-2024	2-100
Tabel 2.98	Pertimbangan Penentuan TPS 3R/TPST/PDU di Kampung Bojong Kota Magelang	2-101
Tabel 2.99	Luas Kawasan Kumuh Kota Magelang, 2020-2024	2-102
Tabel 2.100	Luas Kawasan Kumuh per Kelurahan di Kota Magelang, 2024	2-103
Tabel 2.101	Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Layak Huni Bagi Korban Bencana, 2019-2023	2-105
Tabel 2.102	Persentase Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Layak Huni Bagi Korban Relokasi Program Pemerintah Kabupaten/Kota, 2020-2024	2-106
Tabel 2.103	Kawasan Permukiman Kumuh Kota Magelang yang Ditata, 2020-2024	2-107
Tabel 2.104	Penanganan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Kota Magelang, 2020-2024	2-107
Tabel 2.105	Pembiayaan Penanganan RTLH Kota Magelang, 2020-2024	2-108
Tabel 2.106	Sebaran Penganganan RTLH Kota Magelang dengan Berbagai Sumber Pembiayaan, 2024	2-108
Tabel 2.107	Rumah Susun dan Rumah Khusus di Kota Magelang, 2023	2-109
Tabel 2.108	Persentase Lingkungan yang Sehat dan Aman yang Didukung dengan PSU, 2020-2024	2-109
Tabel 2.109	Serah Terima Prasarana dan Sarana Umum Perumahan, 2024	2-110
Tabel 2.110	Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, 2019-2023	2-110
Tabel 2.111	Penyelesaian Pelanggaran K3, 2020-2024	2-111
Tabel 2.112	Peningkatan Kapasitas Linmas dan Siskamling di Kota Magelang, 2020-2024	2-111
Tabel 2.113	Indeks Risiko Bencana Kota Magelang, 2020-2024	2-112
Tabel 2.114	Indeks Ketahanan Daerah Kota Magelang, 2023-2024	2-112
Tabel 2.115	Persentase Layanan Penanggulangan Bencana Kota Magelang, 2020-2024	2-113
Tabel 2.116	Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang mendapatkan Bantuan Kota Magelang, 2020-2024	2-113
Tabel 2.117	Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) Kota Magelang, 2020-2024	2-114
Tabel 2.118	Jenis dan Jumlah Peserta Pelatihan Kewirausahaan, 2021-2024	2-115
Tabel 2.119	Jenis dan Jumlah Peserta Pelatihan Berbasis Kompetensi, 2021-2024	2-116
Tabel 2.120	Rasio Kewirausahaan Daerah, 2019-2023	2-117

Tabel 2.121	Fasilitasi Penempatan Tenaga Kerja Kota Magelang, 2024	2-117
Tabel 2.122	Jumlah Peserta Pelatihan dan Pencari Kerja yang Mendapatkan Fasilitas Penempatan Kerja, 2020-2024.....	2-117
Tabel 2.123	Jumlah Perusahaan yang memiliki PP/PKB, LKS Bipartit, Permasalahan Hubungan Industrial dan Pemutusan Hubungan Kerja Kota Magelang, 2020-2024	2-118
Tabel 2.124	Jumlah Pekerja/Buruh yang Menjadi Peserta Jamsostek di Kota Magelang, 2020-2024.....	2-118
Tabel 2.125	Peningkatan Kapasitas Perempuan di Kota Magelang, 2020-2024	2-119
Tabel 2.126	Lembaga Perempuan yang Diberdayakan di Kota Magelang, 2020-2024.....	2-120
Tabel 2.127	Persentase Proporsi Kursi yang Diduduki Perempuan di DPRD Kota Magelang, 2020-2024	2-120
Tabel 2.128	Persentase Capaian Empat Kluster Pemenuhan Hak Anak, 2020-2024	2-121
Tabel 2.129	Jumlah Kasus Kekerasan terhadap Anak Kota Magelang, 2020-2024	2-122
Tabel 2.130	Indeks Ketahanan Pangan Kota Magelang, 2019-2023	2-122
Tabel 2.131	Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment), 2019-2023	2-122
Tabel 2.132	Persentase Ketersediaan Pangan Kota Magelang, 2020-2024	2-123
Tabel 2.133	Persentase Kerawanan Pangan Kota Magelang, 2020-2024	2-123
Tabel 2.134	Persentase Pangan Segar yang Aman Kota Magelang, 2020-2024	2-124
Tabel 2.135	Hasil Pemeriksaan Pangan Segar Asal Tumbuhan, 2024	2-124
Tabel 2.136	Kasus Sengketa Tanah yang Tertangani Kota Magelang, 2019-2023	2-125
Tabel 2.137	Kasus Permasalahan Pengadaan Tanah yang Mendapat Penyelesaian Ganti Rugi/Santunan Tanah di Kota Magelang, 2019-2023	2-125
Tabel 2.138	Masalah pada Tanah Kosong yang terselesaikan di Kota Magelang, 2019-2023	2-126
Tabel 2.139	Luas Lahan Pemerintah Kota Magelang yang Bersertifikat, 2019-2023.....	2-126
Tabel 2.140	Daftar Tanah yang Berhasil Disertifikasi, 2023	2-126
Tabel 2.141	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kota Magelang, 2020-2024	2-127
Tabel 2.142	Tabel Uji Sampel Air Sungai di Kota Magelang, 2021-2024.....	2-128
Tabel 2.143	Hasil Pengujian Sampel NO ₂ dan SO ₂ , 2021-2024	2-128
Tabel 2.144	Lokasi Uji Sampling Kualitas Udara Kota Magelang, 2024.....	2-128
Tabel 2.145	Perhitungan Indeks Kualitas Udara Kota Magelang, 2024	2-129
Tabel 2.146	Perhitungan Indeks Kualitas Tutupan Lahan	2-130
Tabel 2.147	Luasan Jenis Tutupan Lahan Kota Magelang, 2024	2-130
Tabel 2.148	Dokumen Perencanaan yang Disusun, 2020-2024	2-131
Tabel 2.149	Proporsi RTH Publik untuk Pengelolaan Keanekaragaman Hayati, 2020-2024.....	2-131
Tabel 2.150	Luasan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Kota Magelang, 2024.....	2-131
Tabel 2.151	Persentase Usaha dan atau Kegiatan yang Mempunyai Rincian Teknis Penyimpanan Sementara LB3, 2020-2024.....	2-132
Tabel 2.152	Persentase Ketaatan Penanggungjawab Usaha dan/ atau Kegiatan terhadap Pelaksanaan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan, 2020-2024	2-132
Tabel 2.153	Peningkatan Lembaga Masyarakat dan Lembaga Pendidikan yang Mengikuti Pendidikan Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup, 2020-2024	2-133
Tabel 2.154	Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Lingkungan Hidup, 2024	2-133
Tabel 2.155	Persentase Cakupan Penghargaan yang Diterima Masyarakat, 2020-2024.....	2-134
Tabel 2.156	Persentase Pengaduan Kasus Lingkungan Hidup yang terselesaikan, 2020-2024.....	2-134
Tabel 2.157	Pengolahan Sampah Kota Magelang, 2020-2024	2-135

Tabel 2.158	Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah, 2019-2023	2-135
Tabel 2.159	Kepemilikan KTP, KK, dan KIA Warga Kota Magelang, 2020-2024	2-135
Tabel 2.160	Kepemilikan Akta Kelahiran, Akta Kematian, dan Akta Perceraian, 2020-2024.....	2-136
Tabel 2.161	Persentase Data Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang Terkelola Berbasis Teknologi Informasi, 2020-2024	2-137
Tabel 2.162	Persentase Jenis Data yang Tersaji dalam Profil Kependudukan, 2020-2024	2-137
Tabel 2.163	Jumlah PKK Aktif Kota Magelang, 2020-2024.....	2-137
Tabel 2.164	Hasil Evaluasi Perkembangan Desa/Kelurahan Kota Magelang, 2024	2-138
Tabel 2.165	Nilai Indeks Pembangunan Keluarga Kota Magelang, 2020-2024.....	2-139
Tabel 2.166	Anggota Keluarga Tribina yang Ber-KB, Kota Magelang, 2020-2024.....	2-139
Tabel 2.167	Pemakaian Kontrasepsi oleh Pasangan Usia Subur Kota Magelang, 2020-2024.....	2-140
Tabel 2.168	Komposisi Penduduk (%) dan Angka Beban Ketergantungan Kota Magelang, 2020- 2024	2-140
Tabel 2.169	Indeks SPBE Kota Magelang, 2020-2024	2-150
Tabel 2.170	Keterbukaan Informasi Publik, 2020-2024	2-150
Tabel 2.171	Persentase Rumah Tangga dengan Akses Internet, 2019-2023	2-151
Tabel 2.172	Jenis Koperasi di Kota Magelang, 2020-2024	2-151
Tabel 2.173	Perkembangan Keragaman Koperasi di Kota Magelang, 2020-2024	2-152
Tabel 2.174	Volume Koperasi di Kota Magelang, 2020-2024	2-152
Tabel 2.175	Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB, 2019-2023.....	2-152
Tabel 2.176	Jumlah KSP/USP yang Memiliki Ijin Usaha, 2020-2024	2-152
Tabel 2.177	Jumlah Koperasi Sehat dan Tidak Sehat di Kota Magelang, 2020-2024.....	2-153
Tabel 2.178	Persentase SDM Pengelola Koperasi yang Meningkatkan Kapasitasnya, 2020-2024	2-153
Tabel 2.179	Jumlah UMKM di Kota Magelang, 2018-2024	2-154
Tabel 2.180	Jumlah Omzet UMKM di Kota Magelang, 2020-2024.....	2-154
Tabel 2.181	Jumlah Pelaku Usaha (selain Pedagang Pasar dan PKL) dan Penyerapan Tenaga Kerja di Kota Magelang, 2019-2024.....	2-155
Tabel 2.182	Kelompok Usaha Mikro (KUM) yang Mendapat akses Layanan Perbankan, 2020-2024	2-155
Tabel 2.183	Realisasi Investasi di Kota Magelang, 2020-2024	2-156
Tabel 2.184	Realisasi Kegiatan PMDN dan PMA Kota Magelang, 2024	2-156
Tabel 2.185	Investor Baru Skala Usaha Besar di Kota Magelang, 2024	2-157
Tabel 2.186	Letter of Intent yang Ditindaklanjuti, 2024	2-157
Tabel 2.187	Potensi Lahan Pengembangan untuk Perdagangan dan Perumahan di Kota Magelang, 2024	2-159
Tabel 2.188	Optimalisasi Media Promosi Investasi Kota Magelang, 2022-2024.....	2-160
Tabel 2.189	Rekapitulasi Permohonan Perizinan yang Melebihi SOP, 2024.....	2-160
Tabel 2.190	Penghargaan Pelayanan Publik yang Diperoleh Kota Magelang, 2023-2024	2-161
Tabel 2.191	Pengembangan Organisasi Pemuda Kota Magelang, 2020-2024.....	2-162
Tabel 2.192	Pembinaan Organisasi Pemuda Kota Magelang, 2020-2024.....	2-162
Tabel 2.193	Pembinaan Organisasi Kepramukaan Kota Magelang, 2019-2023.....	2-162
Tabel 2.194	Cabang Olahraga yang Aktif Kepengurusannya di Kota Magelang, 2023.....	2-163
Tabel 2.195	Sarana dan Prasarana Olahraga yang Ada di Kota Magelang, 2020-2024.....	2-164
Tabel 2.196	Prestasi Olahraga Kota Magelang, 2020-2024.....	2-164
Tabel 2.197	Pembinaan Atlit Kota Magelang, 2020-2024.....	2-165
Tabel 2.198	Sertifikat Pelatih di Kota Magelang, 2020-2024	2-165

Tabel 2.199	Kondisi Publikasi Data Sektoral dalam Portal Open Data, 2020-2024.....	2-166
Tabel 2.200	Nilai Komponen Indeks KAMI Kota Magelang, 2020-2024.....	2-166
Tabel 2.201	Perkembangan Jumlah Kelompok Seni di Kota Magelang, 2020-2024	2-168
Tabel 2.202	Persentase Kelompok Kesenian yang Aktif Terlibat/Mengadakan Pertunjukan Kesenian dalam 1 Tahun Terakhir, 2020-2024	2-169
Tabel 2.203	Kondisi Pengembangan Kesenian Tradisional di Kota Magelang, 2020-2024	2-170
Tabel 2.204	Kondisi Pengembangan Kebudayaan Lokal di Kota Magelang, 2020-2024	2-171
Tabel 2.205	Kondisi Pembinaan Sejarah di Kota Magelang, 2020-2024	2-171
Tabel 2.206	Kondisi Pengelolaan dan Pelestarian di Kota Magelang, 2020-2024.....	2-172
Tabel 2.207	Daftar Cagar Budaya Kota Magelang, 2024	2-172
Tabel 2.208	Jumlah Pengunjung Tempat Bersejarah, 2020-2024	2-173
Tabel 2.209	Jumlah Pengunjung Museum di Kota Magelang, 2020-2024	2-174
Tabel 2.210	Nilai Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat Kota Magelang, 2024.....	2-174
Tabel 2.211	Jumlah Perpustakaan di Kota Magelang, 2020-2024	2-176
Tabel 2.212	Jumlah Koleksi Jumlah Buku di Perpustakaan Daerah Kota Magelang, 2020-2024	2-176
Tabel 2.213	Jumlah Tenaga Perpustakaan di Kota Magelang, 2020-2024.....	2-176
Tabel 2.214	Jumlah Kunjungan Masyarakat ke Perpustakaan di Kota Magelang, 2020-2024.....	2-177
Tabel 2.215	Jumlah Perpustakaan ber-SNP di Kota Magelang, 2020-2024	2-177
Tabel 2.216	Keterlibatan Masyarakat dalam Kegiatan Perpustakaan, 2020-2024	2-177
Tabel 2.217	Jumlah Anggota Perpustakaan Kota Magelang, 2020-2024	2-178
Tabel 2.218	Tingkat Pemanfaatan Perpustakaan di Kota Magelang, 2020-2024	2-178
Tabel 2.219	Pengelolaan Arsip Kota Magelang, 2020-2024.....	2-179
Tabel 2.220	Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Kota Magelang, 2020-2024	2-180
Tabel 2.221	Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya, 2020-2024	2-180
Tabel 2.222	Jumlah Total Produksi Olahan Perikanan, 2020-2024	2-181
Tabel 2.223	Tabel Kunjungan Destinasi Wisata Kota Magelang, 2021-2024	2-181
Tabel 2.224	Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara, 2019-2023.....	2-182
Tabel 2.225	Jumlah Hotel di Kota Magelang, 2020-2024.....	2-182
Tabel 2.226	Data Rumah Makan/Restoran Menurut Kecamatan di Kota Magelang, 2024	2-182
Tabel 2.227	Data Pokdarwis Kota Magelang, 2024.....	2-182
Tabel 2.228	Rasio PDRB Akomodasi Makan dan Minum di Kota Magelang, 2019-2023	2-183
Tabel 2.229	Persentase Sarana Pembibitan yang Terpelihara, 2019-2023.....	2-184
Tabel 2.230	Persentase Peningkatan Sarana Peternakan, 2020-2024.....	2-184
Tabel 2.231	Persentase Prasarana Pertanian yang Terpelihara, 2019-2023.....	2-184
Tabel 2.232	Persentase Peningkatan Prasarana Peternakan, 2019-2023.....	2-184
Tabel 2.233	Persentase Penurunan Jumlah Kasus Penyakit Hewan, 2020-2024	2-185
Tabel 2.234	Persentase Peningkatan Produk Pangan Asal Hewan yang ASUH, 2020-2024	2-185
Tabel 2.235	Persentase Luasan Lahan Bencana Pertanian yang Tertangani, 2020-2024	2-186
Tabel 2.236	Persentase Peningkatan Kelayakan Usaha Peternakan dan Kesehatan Hewan yang Diawasi Pelaksanaannya secara Berkala, 2020-2024	2-186
Tabel 2.237	Persentase Kelompok Tani yang Meningkatkan Kapasitasnya, 2020-2024	2-186
Tabel 2.238	Persentase Kelompok Tani yang Naik Kelas, 2020-2024	2-187
Tabel 2.239	Jumlah Pedagang Pasar Tradisional di Kota Magelang, 2020-2024	2-187
Tabel 2.240	Persentase Alat-Alat Ukur Takar, Timbang dan Perlengkapannya Tertanda Tera; 2020- 2024 (1).....	2-187

Tabel 2.241	Persentase Alat-Alat Ukur Takar, Timbang dan Perlengkapannya Tertanda Tera; 2020-2024 (2).....	2-188
Tabel 2.242	Persentase Pelaku Usaha yang Memiliki Izin Usaha, 2020-2024.....	2-188
Tabel 2.243	Jumlah Shelter dan PKL di Kota Magelang, 2020-2024	2-188
Tabel 2.244	Kondisi Shelter di Kota Magelang, 2021-2024.....	2-189
Tabel 2.245	Sarana Distribusi Perdagangan dalam Kondisi Baik, 2020-2024	2-190
Tabel 2.246	Koefisien Harga Antar Waktu/Disparitas Harga, 2020-2024	2-190
Tabel 2.247	Perkembangan Ekspor Komoditi Kota Magelang, 2020-2024	2-190
Tabel 2.248	Kontribusi Lapangan Usaha Industri Pengolahan terhadap PDRB Kota Magelang beserta Laju Pertumbuhan, 2020-2024	2-191
Tabel 2.249	Perkembangan Industri Kecil Kota Magelang, 2020-2024.....	2-191
Tabel 2.250	Jumlah Industri Menengah dan Jumlah Tenaga Kerja Industri Menengah Kota Magelang, 2020-2024	2-192
Tabel 2.251	Pertambahan Jumlah Industri Kecil Menengah, 2020-2024.....	2-192
Tabel 2.252	Persentase Industri Kecil Menengah yang Memiliki Legalitas Usaha, 2020-2024.....	2-192
Tabel 2.253	Jumlah Hasil Pemantauan dan Pengawasan Perijinan Industri, 2020-2024.....	2-193
Tabel 2.254	Persentase Kebijakan Administrasi Tata Pemerintahan yang Terfasilitasi, 2019-2024.....	2-193
Tabel 2.255	Persentase Kerja Sama Daerah yang Terfasilitasi, 2019-2024.....	2-194
Tabel 2.256	Capaian Indikator di Bidang Kesejahteraan Rakyat, 2020-2024.....	2-194
Tabel 2.257	Indeks Reformasi Hukum, 2019-2023.....	2-195
Tabel 2.258	Persentase Produk Hukum yang Terfasilitasi, 2020-2024	2-195
Tabel 2.259	Return on Assets (RoA) BUMD, 2019-2023	2-195
Tabel 2.260	Rasio Total Dana Pihak Ketiga dan Total Kredit pada Bank Milik Kota terhadap PDRB, 2019-2023	2-195
Tabel 2.261	Persentase Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Perekonomian dan SDA yang dilaksanakan, 2019-2023.....	2-196
Tabel 2.262	Persentase Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Perekonomian dan SDA yang dilaksanakan, 2019-2023.....	2-196
Tabel 2.263	Tingkat Kematangan UKPBJ, 2019-2023	2-196
Tabel 2.264	Indeks Kepuasan Pimpinan (Bagian Umum), 2020-2024.....	2-197
Tabel 2.265	Capaian Indeks Reformasi Birokrasi, 2023.....	2-197
Tabel 2.266	Indeks Reformasi Birokrasi, 2019-2023	2-197
Tabel 2.267	Indeks Pelayanan Publik, 2019-2023	2-197
Tabel 2.268	Nilai SAKIP, 2019-2023.....	2-198
Tabel 2.269	Rincian Nilai SAKIP, 2022-2023	2-198
Tabel 2.270	Indeks Kepuasan Pimpinan (Bagian Umum), 2019-2023.....	2-199
Tabel 2.271	Indeks Kepuasan Pimpinan (Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan), 2019-2023	2-199
Tabel 2.272	Jumlah Rapat Badan/Panitia DPRD Kota Magelang, 2020-2024	2-199
Tabel 2.273	Raperda yang Disahkan Tepat Waktu, 2020-2024	2-200
Tabel 2.274	Persentase Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD yang Terlaksana, 2020-2024	2-200
Tabel 2.275	Cakupan Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah yang Berkualitas, 2020-2024	2-201
Tabel 2.276	Tingkat Implementasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, 2020-2024	2-202
Tabel 2.277	Tingkat Implementasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA, 2020-2024	2-202

Tabel 2.278	Tingkat Implementasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan, 2020-2024	2-203
Tabel 2.279	Indikator Penilaian Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	2-204
Tabel 2.280	Nilai Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Magelang, 2020-2024	2-205
Tabel 2.281	Gambaran Pengelolaan Barang Milik Daerah Kota Magelang, 2020-2024	2-205
Tabel 2.282	Realisasi Pendapatan Kota Magelang, 2020-2024	2-206
Tabel 2.283	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB, 2019-2023	2-207
Tabel 2.284	Persentase Capaian Target Aspek Sistem Merit, 2020-2024	2-207
Tabel 2.285	Rincian Capaian Target Aspek Sistem Merit, 2024	2-208
Tabel 2.286	Persentase ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi sesuai dengan Jabatannya, 2020-2024	2-208
Tabel 2.287	Indeks Integritas, 2020-2024	2-211
Tabel 2.288	Hasil Survey Kepuasan Masyarakat. 2020-2024	2-213
Tabel 2.289	Capaian Kinerja Fungsi Kewilayahan Kota Magelang, 2020-2024	2-213
Tabel 2.290	Angka Kriminalitas di Kota Magelang, 2020-2024	2-213
Tabel 2.291	Persentase Pembinaan Wawasan Kebangsaan, 2020-2024	2-214
Tabel 2.292	Organisasi Kemasyarakatan di Kota Magelang, 2019-2023	2-214
Tabel 2.293	Persentase Pembinaan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya; 2020-2024	2-215
Tabel 2.294	Persentase Penduduk Usia Pemilih Pemula yang Berpartisipasi dalam Agenda Politik, 2019-2023	2-215
Tabel 2.295	Hasil Penilaian Pilar Indeks Daya Saing Daerah Kota Magelang, 2023	2-217
Tabel 2.296	Capaian Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, 2022-2023	2-223
Tabel 2.297	Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pendidikan, 2024	2-234
Tabel 2.298	Capaian Indikator SPM Urusan Kesehatan, 2024	2-234
Tabel 2.299	Capaian Indikator SPM Bidang Pekerjaan Umum, 2024	2-236
Tabel 2.300	Capaian SPM Urusan Perumahan Rakyat, 2024	2-236
Tabel 2.301	Capaian SPM Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Kota Magelang, 2024	2-237
Tabel 2.302	Capaian SPM Urusan Sosial Kota Magelang, 2024	2-237
Tabel 2.303	Pedoman Pengkategorian Hasil Evaluasi	2-238
Tabel 2.304	Evaluasi Kinerja Utama Kota Magelang, 2024	2-239
Tabel 2.305	Capaian Kinerja Program Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan, 2024	2-241
Tabel 2.306	Capaian Kinerja Program Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan, 2024	2-243
Tabel 2.307	Capaian Kinerja Program Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, 2024	2-244
Tabel 2.308	Capaian Kinerja Program Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman, 2024	2-246
Tabel 2.309	Capaian Kinerja Program Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat, 2024	2-247
Tabel 2.310	Capaian Kinerja Program Urusan Pemerintahan Bidang Sosial, 2024	2-248
Tabel 2.311	Capaian Kinerja Program Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja, 2024	2-248
Tabel 2.312	Capaian Kinerja Program Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2024	2-249
Tabel 2.313	Capaian Kinerja Program Urusan Pemerintahan Bidang Pangan, 2024	2-250
Tabel 2.314	Capaian Kinerja Indikator Program Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 2024	2-251

Tabel 2.315	Capaian Kinerja Program Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup, 2023	2-251
Tabel 2.316	Capaian Kinerja Indikator Program Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 2024	2-254
Tabel 2.317	Capaian Kinerja Program Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, 2024	2-255
Tabel 2.318	Capaian Kinerja Program Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, 2024	2-255
Tabel 2.319	Capaian Kinerja Program Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan, 2024	2-256
Tabel 2.320	Capaian Kinerja Program Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi, Informatika dan Statistik, 2023	2-257
Tabel 2.321	Capaian Kinerja Program Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, 2023	2-258
Tabel 2.322	Capaian Kinerja Program Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal, 2024.....	2-259
Tabel 2.323	Capaian Kinerja Program Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olahraga, 2024	2-260
Tabel 2.324	Capaian Kinerja Program Urusan Pemerintahan Bidang Statistik, 2023	2-260
Tabel 2.325	Capaian Kinerja Program Urusan Pemerintahan Bidang Persandian, 2024	2-261
Tabel 2.326	Capaian Kinerja Program Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan, 2024	2-262
Tabel 2.327	Capaian Kinerja Program Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan, 2023	2-262
Tabel 2.328	Capaian Kinerja Program Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan, 2024	2-263
Tabel 2.329	Capaian Kinerja Program Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan, 2023.....	2-263
Tabel 2.330	Capaian Kinerja Program Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata, 2024	2-264
Tabel 2.331	Capaian Kinerja Program Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian, 2023	2-264
Tabel 2.332	Capaian Kinerja Program Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan, 2024.....	2-265
Tabel 2.333	Capaian Kinerja Program Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian, 2024	2-266
Tabel 2.334	Capaian Kinerja Program Unsur Sekretariat Daerah, 2024	2-267
Tabel 2.335	Capaian Kinerja Program Unsur Sekretariat DPRD, 2024	2-269
Tabel 2.336	Capaian Kinerja Program Urusan Pemerintahan Bidang Perencanaan, 2024	2-269
Tabel 2.337	Capaian Kinerja Program Unsur Keuangan, 2024.....	2-270
Tabel 2.338	Capaian Kinerja Program Urusan Pemerintahan Bidang Kepegawaian, 2024.....	2-271
Tabel 2.339	Capaian Kinerja Program Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan dan Pelatihan, 2024	2-271
Tabel 2.340	Capaian Kinerja Program Urusan Pemerintahan Bidang Penelitian dan Pengembangan, 2024	2-272
Tabel 2.341	Capaian Kinerja Program Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan Tahun 2024	2-272
Tabel 2.342	Capaian Kinerja Program Unsur Kewilayahan Tahun 2024	2-273
Tabel 2.343	Capaian Kinerja Program Unsur Pemerintahan Umum Tahun 2024.....	2-273
Tabel 2.344	Rumusan Permasalahan RKPD 2026 Kota Magelang.....	2-278
Tabel 2.345	Indeks Inovasi Daerah Kota Magelang, 2021-2024	2-291
Tabel 2.346	Penghargaan yang Diterima Kota Magelang Tahun 2020-2024	2-293
Tabel 2.347	Penghargaan yang Diterima Kota Magelang Tahun 2024	2-294
Tabel 3.1	Realisasi Capaian Indikator Makro Kota Magelang 2020-2024	3-3
Tabel 3.2	Realisasi Capaian Indikator Makro Kota Magelang 2017-2024	3-4
Tabel 3.3	Pemerataan Pendapatan Penduduk Kota Magelang Menurut Kriteria Bank Dunia, 2019-2024.....	3-5
Tabel 3.4	Indikator Ketenagakerjaan Kota Magelang, 2019-2024	3-6

Tabel 3.5	PDRB per Kapita Kota Magelang, 2019-2023.....	3-9
Tabel 4.1	Penjelasan Visi	4-2
Tabel 4.2	Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kota Magelang dalam Visi Misi RPJMD Kota Magelang Tahun 2026	4-4
Tabel 4.3	Strategi Pencapaian Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kota Magelang	4-6
Tabel 4.4	Keterkaitan antara Tema Pembangunan RKP Kota Magelang Tahun 2026 dengan RKP Tahun 2026 dan RKP Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026	4-20
Tabel 4.5	Sasaran dan Target Indikator Makro Nasional Tahun 2026	4-21
Tabel 4.6	Prioritas Pembangunan Kota Magelang Tahun 2026	4-26
Tabel 4.7	Keterkaitan Isu Strategis, Prioritas Pembangunan dan Strategi sesuai Arah Kebijakan Kota Magelang Tahun 2026	4-36
Tabel 4.8	Keselarasan Sasaran Makro RKP Kota Magelang dengan RKP 2026 dan RKP Provinsi Jawa Tengah 2026.....	4-39
Tabel 4.9	Keselarasan Sasaran dan Indikator Sasaran RPJMD pada RKP Kota Magelang Tahun 2025 dengan RKP Tahun 2025	4-39
Tabel 4.10	Keselarasan dan Keterkaitan Prioritas Pembangunan Kota Magelang Tahun 2025 dengan Prioritas Pembangunan Provinsi Jawa Tengah dan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2025	4-42
Tabel 4.11	Keterkaitan Sasaran Prioritas Pembangunan Daerah, Prioritas Pembangunan dan Program Prioritas pada RKP Kota Magelang Tahun 2026	4-55
Tabel 4.12	Keterkaitan Isu Strategis, Prioritas Pembangunan, dan Strategi sesuai Arah Kebijakan Kota Magelang Tahun 2026	4-63
Tabel 4.13	Keterkaitan Isu Strategis, Prioritas Pembangunan Daerah dengan Pokok Pikiran Tahunan DPRD	4-68
Tabel 4.14	Rekapitulasi Akomodasi Rencana Kerja Masyarakat (Renja RT) dalam RKP Kota Magelang Tahun 2026	4-73
Tabel 4.15	Keterkaitan Sasaran, Prioritas terhadap Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Tahun 2025 di Kota Magelang.....	4-77
Tabel 4.16	Dukungan Program terhadap Pengarusutamaan Gender Dan Inklusi Sosial di Kota Magelang	4-81
Tabel 4.17	Dukungan Program terhadap Kerentanan Bencana dan Perubahan Iklim.....	4-83
Tabel 4.18	Dukungan Program terhadap Pencapaian Standar Pelayanan Minimal.....	4-84
Tabel 4.19	Dukungan Program terhadap Pencapaian Transformasi Digital	4-87
Tabel 5.1	Rekapitulasi Dukungan Program dan Anggaran Terhadap Prioritas Nasional tahun 2026	5-2
Tabel 5.2	Dukungan Program-Kegiatan Pemerintah Kota Magelang terhadap Prioritas Nasional 1: Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi dan Hak Asasi Manusia (HAM)	5-4
Tabel 5.3	Dukungan Program-Kegiatan Pemerintah Kota Magelang terhadap Prioritas Nasional 2: Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau dan Ekonomi Biru.	5-5
Tabel 5.4	Dukungan Program-Kegiatan Pemerintah Kota Magelang terhadap Prioritas Nasional 3: Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	5-8

Tabel 5.5	Dukungan Program-Kegiatan Pemerintah Kota Magelang terhadap Prioritas Nasional 4: Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas	5-12
Tabel 5.6	Dukungan Program-Kegiatan Pemerintah Kota Magelang terhadap Prioritas Nasional 5: Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri.....	5-15
Tabel 5.7	Dukungan Program-Kegiatan Pemerintah Kota Magelang terhadap Prioritas Nasional 6: Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pembebasan Kemiskinan	5-17
Tabel 5.8	Dukungan Program-Kegiatan Pemerintah Kota Magelang terhadap Prioritas Nasional 7: Memperkuat Reformasi Politik, Hukum dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	5-20
Tabel 5.9	Dukungan Program-Kegiatan Pemerintah Kota Magelang terhadap Prioritas Nasional 8: Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur	5-21
Tabel 5.10	Akomodasi Hasil Musrenbang	5-24
Tabel 5.11	Akomodasi Musrenbang per Kelurahan	5-25
Tabel 5.12	Akomodasi Pokok Pikiran DPRD	5-26
Tabel 5.13	Kebijakan Pembangunan Daerah Tahun 2026 yang Menerapkan Konsep, Tematik, Holistik, Integratif dan Spasial (THIS).....	5-29
Tabel 5.14	Dukungan Program RKPD Kota Magelang Tahun 2026 Terhadap Destinasi Pariwisata Super Prioritas Borobudur	5-31
Tabel 5.15	Dukungan Program RKPD Kota Magelang Tahun 2026 Terhadap Pembangunan Jalan Tol Yogyakarta-Bawen	5-33
Tabel 5.16	Dukungan Program RKPD Kota Magelang Tahun 2026 Terhadap Aksi Konvergensi Stunting	5-33
Tabel 5.17	Program Daerah yang Mendukung Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB).....	5-35
Tabel 5.18	Dukungan Program RKPD Kota Magelang Tahun 2026 Terhadap Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim	5-59
Tabel 5.19	Hubungan Program Prioritas dan Dukungan ke Pusat dan Provinsi.....	5-60
Tabel 5.20	Target Program Tahun 2026	5-70
Tabel 5.21	Rekapitulasi Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun 2026	5-80
Tabel 5.22	Penetapan Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD) Kota Magelang Tahun 2026	5-82
Tabel 6.1	Indikator Kinerja Utama Daerah Kota Magelang Tahun 2026.....	6-1

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Bagan Alir Tahapan Penyusunan RKPD Kota Magelang Tahun 2026.....	1-2
Gambar 1.2	Hubungan Antar Dokumen Perencanaan dan Penganggaran lainnya	1-6
Gambar 1.3	Kedudukan Dokumen RKPD Kota Magelang dengan Dokumen Perencanaan dan Spasial	1-7
Gambar 2.1	Batas Wilayah Kota Magelang dengan Kabupaten Magelang.....	2-1

Gambar 2.2	Orientasi Kota Magelang terhadap Provinsi Jawa Tengah	2-2
Gambar 2.3	Peta Administrasi Kota Magelang.....	2-4
Gambar 2.4	Peta Kelerengan Kota Magelang.....	2-5
Gambar 2.5	Peta Topografi Kota Magelang	2-6
Gambar 2.6	Gambar Peta Hidrologi Kota Magelang	2-7
Gambar 2.7	Grafik Rata-Rata Bulanan Curah Hujan Kota Magelang.....	2-8
Gambar 2.8	Grafik Peluang Presipitasi Harian Kota Magelang	2-9
Gambar 2.9	Peta Bahaya Bencana Longsor	2-16
Gambar 2.10	Peta Rawan Bencana Banjir	2-17
Gambar 2.11	Piramida Penduduk Kota Magelang, 2024.....	2-21
Gambar 2.12	Pertumbuhan Ekonomi Kota Magelang, Jawa Tengah,dan Indonesia (Persen), 2020 - 2024	2-25
Gambar 2.13	Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kota Magelang Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) dan Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) (Miliar Rupiah), 2020-2024.....	2-27
Gambar 2.14	Struktur Perekonomian Kota Magelang (ADHB) dari Sisi Lapangan Usaha (Persen), 2024	2-29
Gambar 2.15	Distribusi Persentase Kota Magelang dari Sisi Pengeluaran, 2024.....	2-29
Gambar 2.16	PDRB per Kapita 6 Kota di Jawa Tengah (Juta Rupiah/tahun), 2024	2-30
Gambar 2.17	Gini Ratio Kota Magelang, Provinsi Jawa Tengah, dan Nasional, 2019-2023.....	2-31
Gambar 2.18	Indikator Pembentuk IPM Wilayah Kota di Jawa Tengah, 2024.....	2-34
Gambar 2.19	Indeks Pemberdayaan Gender Wilayah Kota di Jawa Tengah, 2019-2023	2-37
Gambar 2.20	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Wilayah Kota di Jawa Tengah, 2019-2023.....	2-39
Gambar 2.21	Penyerapan Tenaga Kerja di Kota Magelang, 2023	2-41
Gambar 2.22	Persentase Penduduk Miskin (PO) Kota Magelang, Jawa Tengah dan Indonesia, 2019- 2023	2-44
Gambar 2.23	Indikator Kemiskinan Wilayah Kota di Jawa Tengah, 2024	2-48
Gambar 2.24	AKI dan Jumlah Kematian Ibu di Kota Magelang, 2020-2024.....	2-63
Gambar 2.25	Angka Kematian Ibu di Kota Magelang, 2020-2024.....	2-64
Gambar 2.26	Prevalensi Stunting dan Gizi Buruk di Kota Magelang, 2020-2024.....	2-65
Gambar 2.27	Diagram Kondisi Jalan Kewenangan Kota Magelang, 2020-2024.....	2-71
Gambar 2.28	Foto Jl. Kalimanggis (Sampel Jalan Kondisi Rusak Berat).....	2-72
Gambar 2.29	Foto Jl. A. Yani (Sampel Jalan Kondisi Mantap)	2-72
Gambar 2.30	Peta Jalan Kondisi Tidak Mantap Kota Magelang Tahun 2023	2-73
Gambar 2.31	Jembatan Jl. Rambutan Ngembik Utara (Kali Bening)	2-74
Gambar 2.32	Saluran Drainase	2-75
Gambar 2.33	Saluran Drainase	2-75
Gambar 2.34	Saluran Irigasi.....	2-77
Gambar 2.35	Pembangunan SPALDS Komunal di Kramat Selatan	2-80
Gambar 2.36	Peta Air Limbah Domestik Kota Magelang, 2024	2-81
Gambar 2.37	Peta Sanitasi Aman Kota Magelang, 2024	2-85
Gambar 2.38	Peta Air Minum Kota Magelang, 2024.....	2-88
Gambar 2.39	Peta Sumber Mata Air Kota Magelang, 2024	2-92
Gambar 2.40	Rencana Pola Ruang Kawasan Sidotopo	2-93
Gambar 2.41	Visualisasi Kawasan Sidotopo dalam RTBL, 2024	2-93
Gambar 2.42	Visualisasi Kawasan Sidotopo dalam RTBL, 2024	2-94

Gambar 2.43	Rencana Pengembangan Kawasan Kebonpolo.....	2-95
Gambar 2.44	Rencana Pola Ruang Kawasan Lembah Tidar	2-96
Gambar 2.45	Peta Lahan Sawah Dilindungi (LSD) Kota Magelang	2-99
Gambar 2.46	Ragam Pemenuhan SMKK Pekerjaan Konstruksi di Kota Magelang.....	2-101
Gambar 2.47	Kondisi Kumuh Sedang di Kelurahan Magersari.....	2-104
Gambar 2.48	Kondisi Kumuh Akhir di Kelurahan Magersari	2-104
Gambar 2.49	Peta Penanganan Kumuh Kota Magelang, 2024.....	2-105
Gambar 2.50	Kegiatan Penanganan Kawasan Kumuh Kota Magelang, 2024	2-107
Gambar 2.51	Jenis dan Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Kota Magelang, 2024	2-114
Gambar 2.52	Penghargaan Atas Inovasi Jaminan Sosial Bagi Tenaga Kerja Rentan	2-119
Gambar 2.53	Jumlah Kasus Kekerasan terhadap Perempuan di Kota Magelang, 2020-2024	2-121
Gambar 2.54	Perkembangan Kelurahan di Kota Magelang, 2020-2024	2-138
Gambar 2.55	Tren Prevalensi Pemakaian Kontrasepsi/ Contraceptive Prevalence Rate (CPR) Kota Magelang, 2020-2024	2-140
Gambar 2.56	Age Specific Fertility Rate (15-19 Th) Kota Magelang, 2020-2024	2-141
Gambar 2.57	Peta Rawan Kecelakaan Kota Magelang, 2024.....	2-142
Gambar 2.58	Gambaran Kondisi Terminal Tipe A Tidar setelah Revitalisasi.....	2-145
Gambar 2.59	Denah Rencana Pengembangan Terminal Tipe ATidar	2-145
Gambar 2.60	Peta Sebaran Halte Kota Magelang, 2024	2-146
Gambar 2.61	Peta Jalur Sepeda Kota Magelang, 2024.....	2-149
Gambar 2.62	Kondisi Marka dan Parkir Sepeda Kota Magelang.....	2-149
Gambar 2.63	Tingkat Kematangan Komponen Indeks KAMI Tahun 2023 Kota Magelang	2-167
Gambar 2.64	Perbandingan IPLM Kota Magelang dengan Daerah Sekitar, 2024.....	2-175
Gambar 2.65	Nilai Pengawasan Arsip, ASKI dan ASKE Kota Magelang, 2020-2024	2-179
Gambar 2.66	Penandatanganan Berita Acara Pendahuluan Nota Kesepakatan Kerjasama Gelangmanggung	2-183
Gambar 2.67	Proporsi Pendapatan dan Pendapatan Asli Daerah Kota Magelang Tahun 2024 per 13 Januari 2025.....	2-207
Gambar 2.68	Capaian IDSD Kota Magelang, Jawa Tengah, Nasional; 2019-2023.....	2-216
Gambar 3.1	Pertumbuhan Ekonomi Kota Magelang, Jawa Tengah dan Indonesia (%), 2019-2024	3-5
Gambar 3.2	Struktur Perekonomian Kota Magelang Menurut Lapangan Usaha, 2024.....	3-7
Gambar 3.3	Struktur Perekonomian Kota Magelang Menurut Pengeluaran, 2024.....	3-8
Gambar 3.4	PDRB per kapita (ADHB) Kota Magelang, Jawa Tengah dan Indonesia (Juta Rupiah/tahun), 2021-2024	3-8
Gambar 4.1	Tema Kota Magelang Tahun 2025-2029.....	4-17
Gambar 4.2	Konsep THIS dalam Prioritas Pembangunan Kota Magelang Tahun 2026	4-26
Gambar 5.1	Tema dan arah Kebijakan Pembangunan Kota Magelang.....	5-28

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

RKPD Kota Magelang Tahun 2026 merupakan Tahun Transisi RPJMD Kota Magelang Tahun 2021-2026 sekaligus memasuki tahun pertama RPJMD Kota Magelang Tahun 2025-2029 dengan Visi : Magelang Kota Perdagangan dan Jasa yang harmonis, humanis dan Berkelanjutan. Untuk sinergitas perencanaan, maka RKPD Kota Magelang tahun 2026 juga disusun dengan berpedoman pada RPJMN Tahun 2025-2029, Rencana Kerja Pemerintah tahun 2026, Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026, Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Magelang tahun 2011-2031, serta dokumen perencanaan sektoral lainnya.

RKPD Kota Magelang tahun 2026 yang disusun tahun 2025 untuk dilaksanakan di tahun 2026 dengan memperhatikan hasil evaluasi pelaksanaan perencanaan pembangunan tahun 2024. Rencana kerja pemerintah daerah ini menjadi acuan perangkat daerah dalam menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun 2026. Rancangan Akhir RKPD Kota Magelang Tahun 2026 akan ditetapkan dengan Peraturan Walikota Magelang tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Magelang Tahun 2026 akan menjadi pedoman penyusunan Rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Magelang yang selanjutnya akan menjadi landasan dalam penyusunan rancangan APBD Kota Magelang Tahun 2026.

1.1.1 Proses Penyusunan

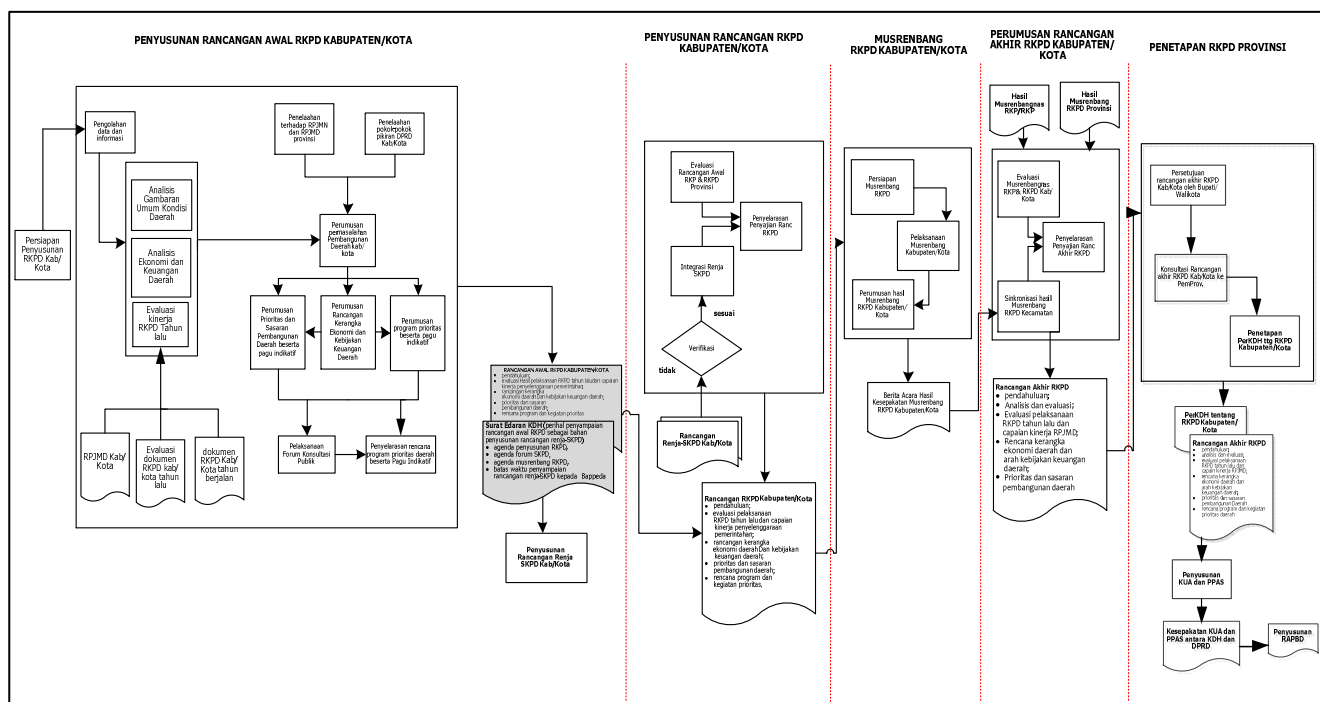
Proses penyusunan RKPD Kota Magelang Tahun 2026 dilaksanakan secara runtut dalam 6 (enam) tahapan yaitu: persiapan penyusunan RKPD; penyusunan rancangan awal RKPD; penyusunan rancangan RKPD, pelaksanaan musrenbang RKPD, perumusan rancangan akhir RKPD, dan penetapan RKPD. Tahap pertama yang dilakukan adalah tahap persiapan penyusunan yang meliputi pembentukan Tim Penyusun RKPD, orientasi mengenai RKPD, penyusunan agenda kerja Tim Penyusun RKPD, serta penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah.

Penyusunan RKPD 2025 diawali dengan perumusan Rancangan Awal RKPD, dilanjutkan dengan perumusan Rancangan RKPD yang pada dasarnya memadukan materi pokok yang telah disusun dalam Rancangan Awal RKPD dengan tema tahun perencanaan serta arah kebijakan nasional dan provinsi. Elaborasi dilakukan terhadap isu-isu strategis dan prioritas kebijakan dari pemerintah pusat dan provinsi untuk diselaraskan dengan program-program prioritas yang dihasilkan dari penelaahan Rancangan Renja Perangkat Daerah. Proses teknokratis ditempuh melalui kegiatan-kegiatan rapat koordinasi tim penyusun, pelaksanaan Forum OPD, pelaksanaan *Focused Group Discussion*, penelaahan Pokok-Pokok Pikiran DPRD serta hasil konsultasi publik dan musrenbang yang dilaksanakan di Kelurahan dan Kecamatan.

Tahapan pelaksanaan Forum Perangkat Daerah dilaksanakan untuk memastikan dan mengkonfirmasi hasil Musrenbang Kelurahan dan Kecamatan, serta usulan saran masukan hasil FGD yang diakomodir oleh Perangkat Daerah terkait sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Hasil Musrenbang Kelurahan dan Kecamatan serta Berita Acara Hasil FGD. Forum Perangkat Daerah juga dilaksanakan untuk mengkonfirmasi telaah Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang diperoleh dari penjangkaran aspirasi masyarakat melalui Reses yang dilaksanakan pada tahun 2024. Tahap selanjutnya adalah melaksanakan verifikasi rencana kerja perangkat daerah untuk memastikan integrasi program dan kegiatan prioritas, dengan tujuan pokok adalah menyangkut kesamaan materi antara program dan kegiatan prioritas pada rancangan RKPD telah sama dengan muatan nama program dan kegiatan prioritas tiap-tiap Perangkat Daerah, termasuk konfirmasi tentang indikator kinerjanya, serta untuk memastikan agar program dan kegiatan prioritas telah sepenuhnya tercantum dalam rancangan Renja Perangkat Daerah.

Dokumen rancangan RKPD menjadi bagian dari materi Musrenbang tingkat Kota Magelang yang merupakan forum konfirmasi atas keseluruhan hasil Musrenbang di tingkat kelurahan dan kecamatan serta hasil rancangan Renja Perangkat Daerah yang telah terverifikasi. Berdasarkan Berita Acara Hasil Kesepakatan Musrenbang kemudian dilakukan penyelarasan Rancangan RKPD menjadi Rancangan Akhir RKPD dengan memperhatikan Rancangan RKPD Provinsi Jawa Tengah dan Rancangan RKP serta hasil konsultasi dan evaluasi RKPD oleh

Bappeda Provinsi Jawa Tengah. Hasil Penyelarasan Akhir ini dikonsultasikan kepada TAPD sebelum ditetapkan dengan Peraturan Walikota. Proses perumusan RKPD Kota Magelang Tahun 2026 sebagaimana gambar berikut:



Gambar 1.1 Bagan Alir Tahapan Penyusunan RKPD Kota Magelang Tahun 2026

Sumber: diolah tim penyusun RKPD

1.1.2 Prinsip dan Pendekatan Penyusunan

Untuk memastikan output hasil penyusunan RKPD adalah berkualitas, taat regulasi dan operasional, maka penyusunan dokumen RKPD Kota Magelang Tahun 2026 dilaksanakan dengan berpegang pada prinsip penyusunan rencana pembangunan daerah sebagai berikut:

Tabel 1.1 Prinsip Penyusunan RKPD Kota Magelang Tahun 2026

PRINSIP	INDIKATOR
Merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional	Konsistensi dan sinergitas perencanaan pembangunan daerah Kota Magelang (RKPD) tahun 2026 dengan RKPD Provinsi Jawa Tengah dan Rencana Kerja Pemerintah
Dilakukan pemerintah daerah bersama para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing	Pelibatan para pemangku kepentingan pada proses penyusunan dokumen perencanaan melalui Musrenbang berjenjang dari tingkat Kelurahan, Kecamatan, dan Tingkat Kota; forum konsultasi publik, dan “ <i>focused group discussion</i> ”
Mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana pembangunan daerah	Pendekatan yang berorientasi pada substansi, dengan penyusunan rencana kerja yang diperjelas lokasi kegiatan sesuai dengan RTRW sebagaimana Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Perda Nomor 4 Tahun 2012 tentang RTRW 2011-2031, pembangunan kewilayahan Propinsi Jawa Tengah dan Nasional

PRINSIP	INDIKATOR
Dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki masing-masing daerah, sesuai dinamika perkembangan daerah dan nasional	Penetapan urutan kegiatan sebagai prioritas pembangunan disusun berdasarkan pada data potensi dan kebutuhan lokasi kegiatan, serta menyesuaikan dengan dinamika perkembangan daerah dan nasional

Sumber: diolah tim penyusun RKPD

Sementara itu pendekatan penyusunan RKPD Kota Magelang Tahun 2026 dilakukan dengan pendekatan yang berorientasi pada proses yaitu pendekatan teknokratik, politik, *bottom up/top down* serta partisipatif, serta pendekatan yang berorientasi pada substansi yaitu pendekatan tematik-holistik, integratif, dan spasial. Detil konfigurasi pendekatan proses penyusunan RKPD Kota Magelang Tahun 2026 adalah sebagaimana Tabel 1.2 dan Tabel 1.3:

Tabel 1.2 Pendekatan Penyusunan RKPD Kota Magelang Tahun 2026 yang Berorientasi pada Proses

KRITERIA	PARAMETER
DARI BAWAH (BOTTOM-UP)	Usulan dari Musrenbang berjenjang dari tingkat Kelurahan, tingkat Kecamatan, dan Tingkat Kota.
	Partisipasi masyarakat dan pemangku kepentingan dalam proses penyusunan dokumen perencanaan
DARI ATAS (TOP-DOWN)	Sinkronisasi Prioritas Daerah dalam RKPD Kota Magelang Tahun 2026, Prioritas Provinsi Jawa Tengah dalam RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026 dan Prioritas Nasional dalam RKP 2026.
	Sinergitas program dan kegiatan dalam RKPD Kota Magelang Tahun 2026, RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026 dan RKP Tahun 2026.
TEKNOKRATIK	Dilaksanakan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan Daerah.
	Ketersediaan dan kelengkapan sumber data dan informasi dalam penyusunan RKPD Kota Magelang Tahun 2026.
	Kapasitas Perencana Daerah dalam Penyiapan RKPD Kota Magelang Tahun 2026.
	Mendasarkan pada hasil evaluasi kinerja RKPD periode tahun 2024.
PARTISIPATIF	Dilaksanakan dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan yang dilaksanakan melalui forum-forum yang diselenggarakan seperti Musrenbang dan Konsultasi Publik
POLITIK	Dilaksanakan dengan menerjemahkan visi dan misi kepala Daerah terpilih yang dijabarkan dalam dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah yang dibahas bersama dengan DPRD.
	Melakukan telaah terhadap pokok-pokok pikiran DPRD Kota Magelang hasil penjaringan aspirasi masyarakat yang dilaksanakan saat reses pada tahun 2024

Sumber: diolah tim penyusun RKPD

Tabel 1.3 Pendekatan Substansi RKPD Kota Magelang Tahun 2026

PENDEKATAN	PARAMETER
HOLISTIK-TEMATIK	Dilaksanakan dengan mempertimbangkan keseluruhan unsur/bagian/kegiatan pembangunan sebagai satu kesatuan faktor potensi, tantangan, hambatan dan/atau permasalahan yang saling berkaitan satu dengan lainnya

PENDEKATAN	PARAMETER
INTEGRATIF	Menyatukan beberapa kewenangan kedalam satu proses terpadu dan fokus yang jelas dalam upaya pencapaian tujuan pembangunan Daerah
SPASIAL	Dilaksanakan dengan mempertimbangkan dimensi keruangan dalam perencanaan

Sumber: diolah tim penyusun RKPD

1.2 LANDASAN HUKUM

Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Magelang Tahun 2025 ini adalah:

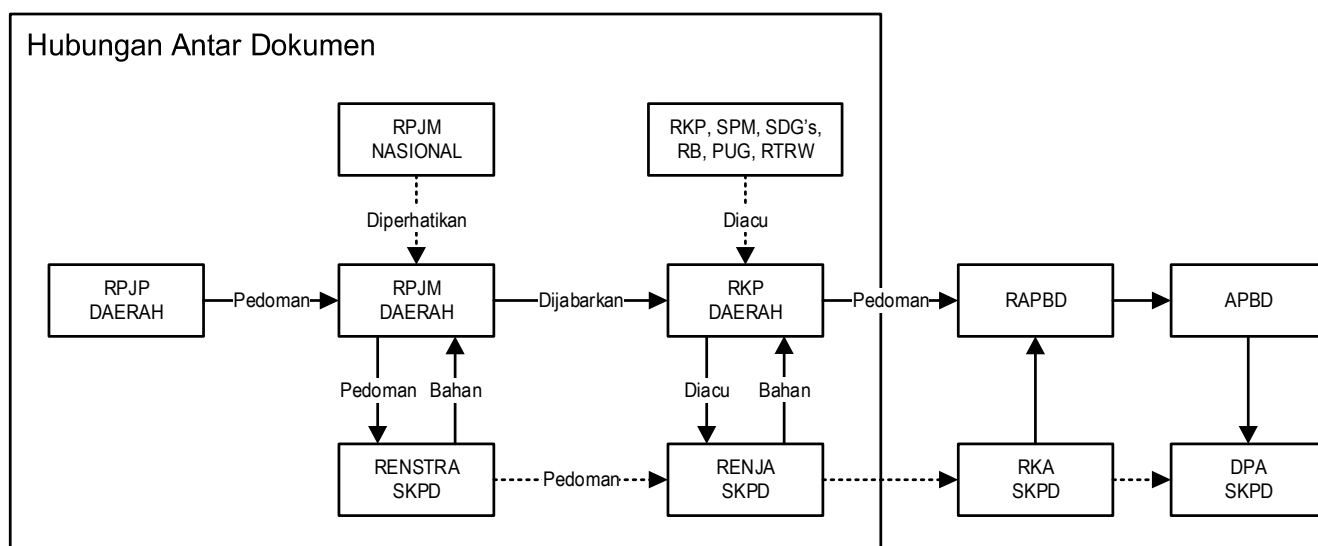
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
10. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah;
11. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-Undangan;
12. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
14. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
15. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang;
16. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
19. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
20. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
21. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
22. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

23. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
24. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
25. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
26. Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
27. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
28. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
29. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi;
30. Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Kawasan Kendal-Semarang-Salatiga-Demak-Grobogan, Kawasan Purworejo-Wonosobo-Magelang-Temanggung, dan Kawasan Brebes-Tegal-Pemalang;
31. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
32. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional;
33. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
34. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik; Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional;
35. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025;
36. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2024;
37. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Magelang Tahun 2025-2045;
38. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
39. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Magelang Tahun 2011-2031;
40. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
41. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Magelang Tahun 2021-2026;
42. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
43. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

44. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
45. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
46. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
47. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah yang dimutakhirkan beberapa kali terakhir dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
48. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
49. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
50. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026.

1.3 HUBUNGAN ANTAR DOKUMEN

Dalam melaksanakan pembangunan daerah, maka didahului dengan perencanaan pembangunan daerah yang menghasilkan rencana pembangunan daerah dan rencana perangkat daerah. Menurut periodisasinya, rencana pembangunan daerah terdiri dari rencana jangka panjang untuk periode 20 (dua puluh) tahun yaitu RPJPD, rencana jangka menengah untuk periode 5 (lima) tahun yaitu RPJMD, dan rencana kerja tahunan untuk periode 1 (satu) tahun yaitu RKP. Sedangkan rencana perangkat daerah terdiri dari rencana strategis (renstra) perangkat daerah dan rencana kerja (renja) perangkat daerah. Hubungan antar dokumen sebagaimana Gambar 1.2 berikut ini.



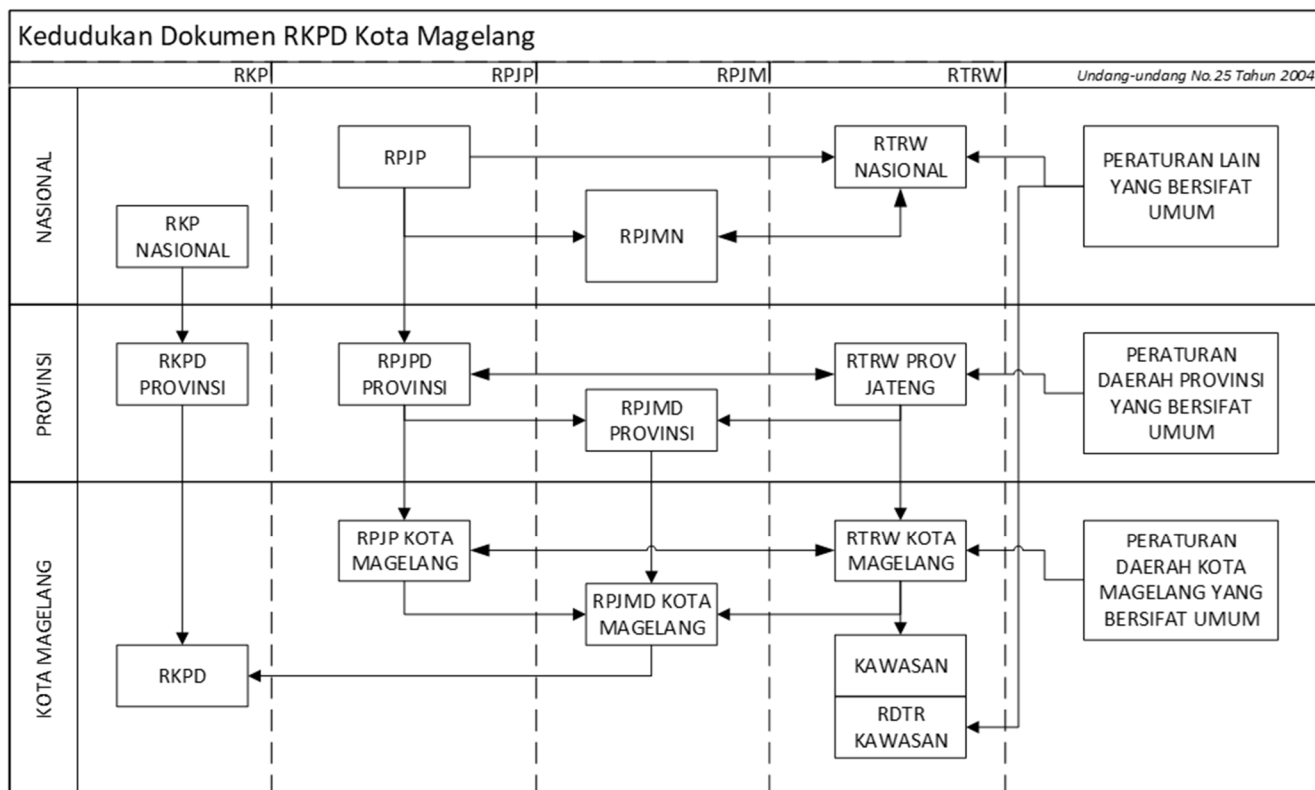
Gambar 1.2 Hubungan Antar Dokumen Perencanaan dan Penganggaran lainnya

Sumber: UU No 25 Tahun 2004

Sebagai pengejawantahan pendekatan perencanaan yang berorientasi pada substansi, maka aspek keruangan (*spasial*) menjadi hal yang utama, sehingga dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Magelang Tahun 2011-2031 terutama struktur dan pola ruang menjadi acuan dalam penyusunan RKP 2026. Demikian pula dengan

telaah terhadap usulan Musrenbang dan Pokok-Pokok Pikiran DPRD memperhatikan pada lokasi yang jelas, serta data kebutuhan penanganan permasalahan terutama kemiskinan dan kawasan kumuh yang prioritas kebutuhannya telah dituangkan dalam peta sehingga akomodasi usulan akan memperhatikan prioritas berdasarkan lokasi yang jelas.

Kedudukan RKPD terhadap RTRW sebagaimana tertuang dalam Gambar 1.3 berikut ini.



Gambar 1.3 Kedudukan Dokumen RKPD Kota Magelang dengan Dokumen Perencanaan dan Spasial

Sumber: diolah tim penyusun RKPD

Secara lengkap penjelasan masing masing dokumen yang terkait dengan penyusunan RKPD Kota Magelang Tahun 2026 adalah sebagai berikut:

1. RPJM Nasional

Benang merah perencanaan pembangunan Pusat dan Daerah untuk mewujudkan sinergitas dengan perencanaan pembangunan Nasional adalah dengan merujuk pada RPJMN 2025-2029 dengan tema tertentu.

Perhatian utama adalah kepada Agenda Pembangunan RPJMN 2025-2029 yang saat ini masih dalam kerangka penyusunan.

2. Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2026

RKPD Kota Magelang Tahun 2026 merujuk pada RKP Tahun 2026 dan program strategis nasional yaitu penyalarsan prioritas pembangunan daerah, program serta kegiatan tahunan daerah dengan tema, agenda pembangunan dan sasaran pengembangan wilayah dalam RKP serta program strategis lainnya. Hal ini merupakan manifestasi dari upaya mewujudkan sinergitas kebijakan dan dukungan pembangunan daerah Kota Magelang kepada kebijakan nasional. Pemerintah Kota Magelang berupaya semaksimal mungkin agar target-target pembangunan nasional dapat tercapai dengan kontribusi yang diberikan dari pembangunan di Kota Magelang Tahun 2025 sebagaimana ditetapkan dalam RPJMN tahun 2025-2029.

1.3.1 RTRW Kota Magelang Tahun 2011-2031

Sebagaimana amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, bahwa dalam pendekatan penyusunan RKPD yang berorientasi pada substansi, salah satunya adalah melalui pendekatan spasial yaitu dengan mempertimbangkan dimensi keruangan dalam perencanaan. Oleh karena itu penyusunan RKPD Kota Magelang Tahun 2025 secara konsisten memperhatikan Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Magelang Tahun 2011-2031, guna mewujudkan pembangunan yang komprehensif, berwawasan lingkungan dengan ketaatan terhadap struktur dan pola ruang sehingga pemanfaatan ruang dalam pelaksanaan pembangunan dapat sesuai dengan perencanaan tata ruang.

Dengan demikian, pemanfaatan ruang konsisten dengan perencanaan tata ruang, tertib tata ruang, sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan melalui pengendalian pemanfaatan ruang dan pengawasan penataan ruang. Pada akhirnya tujuan-tujuan pembangunan daerah dapat tercapai, kesenjangan antar wilayah berkurang, berwawasan lingkungan dan berkelanjutan, namun sesuai dengan tata kelola fungsi keruangan wilayah. Perencanaan dan pelaksanaan pembangunan yang berpedoman pada dokumen penataan ruang akan mewujudkan keterpaduan, keterkaitan, keseimbangan, dan perkembangan antar wilayah serta keserasian antar sektor.

1.3.2 RPJMD Kota Magelang

RKPD Kota Magelang tahun 2026 mengacu pada RPJMD Kota Magelang Tahun 2025-2029, yang merupakan tahun pertama perencanaan pada Kepala daerah dan wakil kepala daerah yang dilantik pada 20 Februari 2025. RKPD 2026 telah mengacu pada Rancangan RPJMD 2025-2029.

Tematik tahun pertama RPJMD 2025-2029 adalah Penguatan Fondasi Pembangunan Kota yang Harmonis dan Nyaman (**Fondasi Pembangunan**) Klaster terkait: **Magelang Peduli** untuk melindungi yang rentan dan membangun kenyamanan kota

1.3.3 Rencana Pembangunan Sektoral

Penyusunan RKPD Kota Magelang Tahun 2026 juga memperhatikan beberapa dokumen pembangunan sektoral baik di tingkat nasional, provinsi maupun Kota Magelang. Beberapa dokumen rencana pembangunan sektoral di maksud antara lain: Pencapaian SDGS, RAD KLA, RAD HAM, Roadmap Reformasi Birokrasi, Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata, Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum, Master Plan Kampung Tematik, Masterplan Kebun Raya Gunung Tidar, Masterplan Aloon Aloon, Masterplan Pemberdayaan Masyarakat, Strategi Penanggulangan Kemiskinan, RAD Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Provinsi Jawa Tengah, RAD Pengurangan Resiko Bencana dan Pedoman PUG di Jawa Tengah.

1.3.4 Rencana Kerja Perangkat Daerah

Dokumen perencanaan periode 1 (satu) tahunan di tingkat perangkat daerah, adalah Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) yang memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan RKPD, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Dalam menyusun Renja PD, Rancangan awalnya dibahas bersama dengan pemangku kepentingan dan forum perangkat daerah untuk mendapatkan saran dan pertimbangan. Perangkat Daerah melakukan koordinasi dan sinkronisasi dengan Bappeda untuk menjaga sinergitas substansinya dengan RKPD. Bappeda akan menindak lanjuti dengan verifikasi Renja PD untuk memastikan kesesuaian rancangan Renja PD dengan rancangan RKPD.

Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) yang merupakan perencanaan pembangunan perangkat daerah periode waktu 5 (lima) tahun, yang telah ditetapkan dengan peraturan kepala daerah menjadi pedoman kepala Perangkat Daerah dalam menyusun Renja Perangkat Daerah dan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD.

Penyusunan rancangan Renja PD merupakan tahapan awal yang harus dilakukan sebelum disempurnakan menjadi dokumen Renja PD yang definitif. Rancangan Rencana Kerja (Renja) PD Tahun 2026 sebagai bahan untuk penyusunan Rancangan RKPD Kota Magelang Tahun 2026.

1.4 MAKSUD DAN TUJUAN

1.4.1 Maksud

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Magelang Tahun 2026 disusun dengan maksud untuk:

1. Menentukan arah kebijakan pembangunan daerah Kota Magelang Tahun 2026;
2. Menetapkan program prioritas untuk seluruh urusan penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka mencapai target RPJMD Kota Magelang Tahun 2025-2029;
3. Menyediakan acuan resmi bagi Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam rangka menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) yang didahului dengan penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA), serta penentuan Prioritas dan Pagu Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2026;
4. Sebagai pedoman Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Tahun 2026.

1.4.2 Tujuan

Tujuan Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kota Magelang Tahun 2026 adalah untuk menciptakan sinergitas pelaksanaan pembangunan daerah antar wilayah, antar sektor pembangunan dan antar tingkat pemerintahan serta menciptakan efisiensi alokasi sumber daya dalam pembangunan daerah.

1.5 SISTEMATIKA RKPD

Sistematika Dokumen RKPD Kota Magelang Tahun 2026 sebagai berikut:

PERATURAN WALIKOTA

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan RKPD 2026 yang memuat latar belakang penyusunan RKPD, landasan hukum, hubungan antar dokumen, maksud dan tujuan penyusunan, serta sistematika dokumen perencanaan RKPD, agar urgensi dan kepentingan penyusunan serta sinergitas antar bab dapat dengan mudah dipahami.

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Menyajikan gambaran umum kondisi daerah tentang aspek geografi dan demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek layanan umum, dan aspek daya saing daerah; Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD yang menguraikan tentang hasil evaluasi terhadap pelaksanaan RKPD tahun 2024 dengan memperhatikan substansi dokumen RPJMD 2021-2026 dan Visi Misi program unggulan dan program prioritas Wakilota dan Wakil Walikota Magelang Tahun 2025-2029 dan substansi dokumen RKPD tahun 2026, serta gambaran permasalahan pembangunan daerah yang disajikan menurut urusan.

BAB III KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH

Memuat penjelasan tentang realisasi dan prediksi capaian indikator makro, kondisi ekonomi tahun 2024, prediksi 2026, yang antara lain mencakup indikator pertumbuhan ekonomi daerah; tantangan dan prospek perekonomian daerah; sumber-sumber pendapatan dan arah kebijakan keuangan daerah yang mencakup pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah yang diperlukan dalam pembangunan perekonomian daerah

BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Menyajikan perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah berdasarkan hasil analisis terhadap hasil evaluasi pelaksanaan RKPD tahun 2024 dan capaian kinerja yang direncanakan, identifikasi isu strategis dan masalah mendesak di tingkat daerah dan nasional, rancangan kerangka ekonomi daerah beserta kerangka pendanaan, serta menyajikan persandingan tema dan arah kebijakan pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah kota sebagai landasan dalam perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah.

BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Menyajikan rencana program dan kegiatan prioritas daerah yang disusun berdasarkan evaluasi pembangunan tahunan, kedudukan tahun rencana (RKPD) dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD.

BAB VI KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Menyajikan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah bertujuan untuk memberi panduan dalam pencapaian kinerja tahunan yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU), Indikator Kinerja Daerah (IKD) maupun Indikator Kinerja Program pada akhir tahun perencanaan.

BAB VII PENUTUP

Menyajikan penegasan bahwa dalam melaksanakan RKPD Kota Magelang Tahun 2026 diperlukan sinergisitas yang kokoh dan terpadu di jajaran pemerintah Kota Magelang, DPRD, pihak swasta dan seluruh lapisan masyarakat.

BAB 2

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1 KONDISI UMUM DAERAH

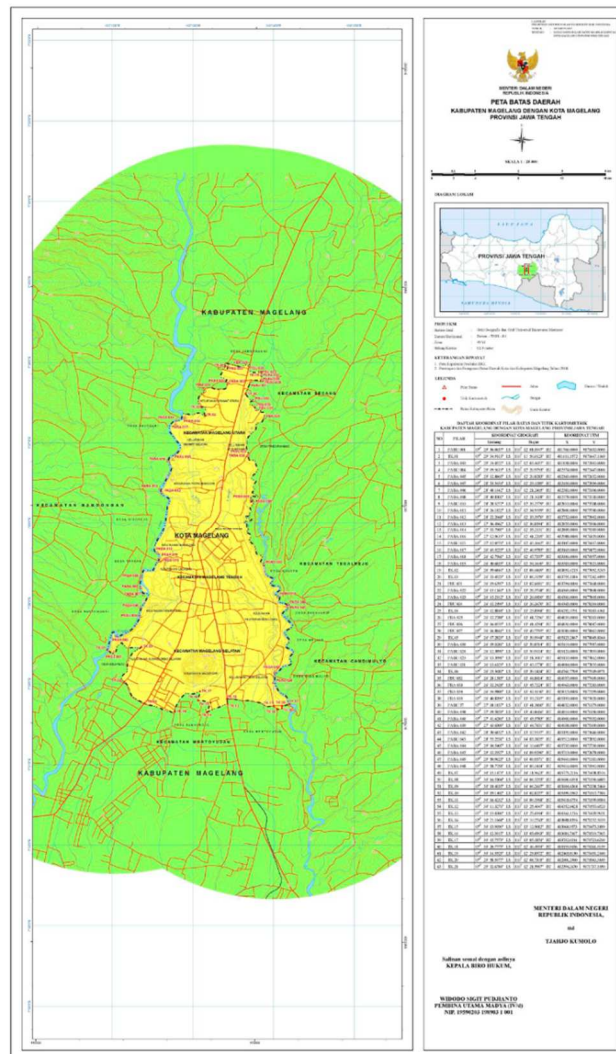
2.1.1 Aspek Geografi dan Demografi

2.1.1.1 Aspek Geografi

Analisis aspek geografi di Kota Magelang dilakukan agar karakteristik Kota Magelang sebagai sebuah wilayah dapat diketahui serta dapat memperdalam aspek pemanfaatan ruang geografi. Sementara itu untuk mengetahui struktur dari suatu masyarakat dan untuk menentukan jenis pendekatan yang dilakukan untuk berinteraksi dalam sebuah populasi masyarakat maka diperlukan analisis terhadap aspek demografi.

2.1.1.1.1 Letak, Luas, dan Batas Wilayah

Berdasarkan posisinya, secara astronomi Kota Magelang berada pada $7^{\circ}26'0,622''$ - $7^{\circ}30'21,697''$ LS dan $110^{\circ}11'56,012''$ - $110^{\circ}14'14,075''$ BT. Posisi ini menjadikan Kota Magelang menjadi kota yang unik karena terletak tepat di tengah Pulau Jawa. Kota Magelang hanya menempati areal sebesar 0,66% dari keseluruhan luas Propinsi Jawa Tengah dan dikelilingi oleh Kabupaten Magelang. Batas wilayah Kota Magelang dengan Kabupaten Magelang seperti ditunjukkan pada gambar berikut.



Gambar 2.1 Batas Wilayah Kota Magelang dengan Kabupaten Magelang

Sumber: Permendagri No 64 Tahun 2017 Tentang Batas Daerah Kabupaten Magelang dengan Kota Magelang Provinsi Jawa Tengah

Adapun posisi Kota Magelang di Provinsi Jawa Tengah dapat dilihat pada gambar berikut ini:



Gambar 2.2 Orientasi Kota Magelang terhadap Provinsi Jawa Tengah

Sumber: Peta Rupa Bumi Indonesia (2001), Bakosurtanal, diolah (2025)

Dari tinjauan administratif Kota Magelang terletak di jalur persilangan lalu lintas ekonomi dan transportasi antara Semarang-Magelang-Yogyakarta dan Purworejo-Temanggung serta pada persimpangan jalur wisata lokal dan regional antara Yogyakarta-Borobudur-Kopeng-Ketep Pass-dataran tinggi Dieng. Posisi Kota Magelang berada di tengah Kabupaten Magelang, dengan batas wilayah sebagai berikut:

- Utara : Kecamatan Secang, Kabupaten Magelang
- Timur : Sungai Elo dan Kecamatan Tegalrejo, Kabupaten Magelang
- Selatan : Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang
- Barat : Sungai Progo dan Kecamatan Bandongan, Kabupaten Magelang

Mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2017 tentang Batas Wilayah Kabupaten Magelang dan Kota Magelang yang kemudian diperbaharui dengan Keputusan Mendagri Nomor 050-145 Tahun 2022, wilayah Kota Magelang mengalami perluasan sebesar 0,44 km² dari data awal, sehingga luas Kota mengalami peningkatan dari 18,12 km² menjadi 18,56 km². Adapun gambaran secara rinci luas wilayah setiap kelurahan dapat dilihat pada tabel berikut.

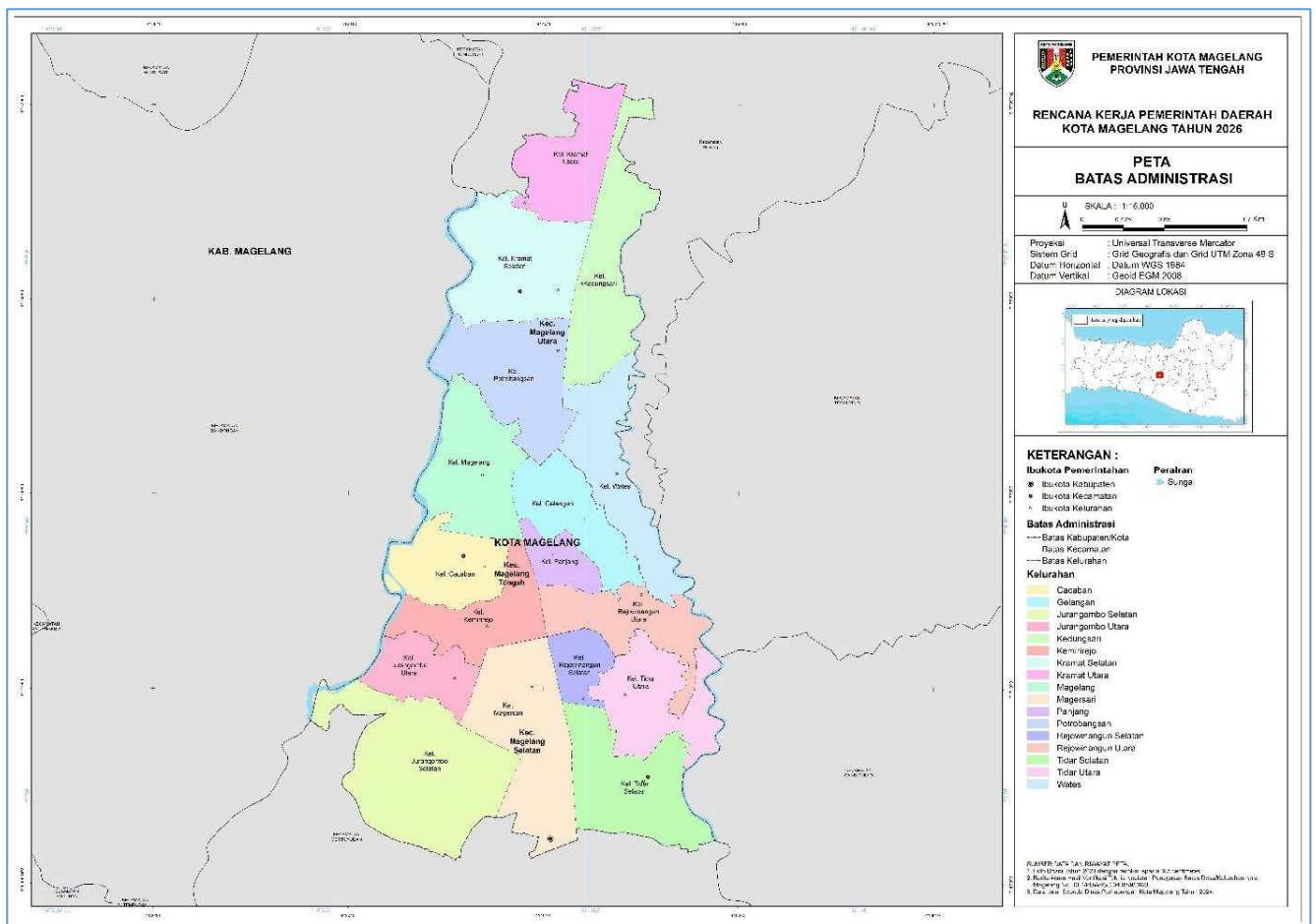
Tabel 2.1 Luas Kecamatan dan Kelurahan di Kota Magelang

No.	Kecamatan dan Kelurahan	Luas / Area (ha)	Persentase (%)
01.	KEC. MAGELANG SELATAN	714	38,46
	1. Kel. Jurangombo Utara	64	3,45
	2. Kel. Jurangombo Selatan	215	11,58

No.	Kecamatan dan Kelurahan	Luas / Area (ha)	Persentase (%)
	3. Kel. Magersari	157	8,46
	4. Kel. Tidar Utara	109	5,87
	5. Kel. Tidar Selatan	131	7,06
	6. Kel. Rejowinangun Selatan	38	2,05
02.	KEC. MAGELANG TENGAH	513	27,64
	1. Kel. Magelang	124	6,68
	2. Kel. Kemirirejo	87	4,69
	3. Kel. Cacaban	86	4,63
	4. Kel. Rejowinangun Utara	93	5,01
	5. Kel. Panjang	35	1,89
	6. Kel. Gelangan	88	4,74
03.	KEC. MAGELANG UTARA	629	33,90
	1. Kel. Wates	118	6,36
	2. Kel. Potrobangsari	133	7,16
	3. Kel. Kedungsari	133	7,16
	4. Kel. Kramat Utara	99	5,35
	5. Kel. Kramat Selatan	146	7,86
	JUMLAH	1856	100,00

Sumber: Tim Penyusun, diolah (2025)

Untuk lebih jelasnya, batas administrasi dari masing-masing kelurahan dapat dilihat pada gambar 2.3 di bawah ini.



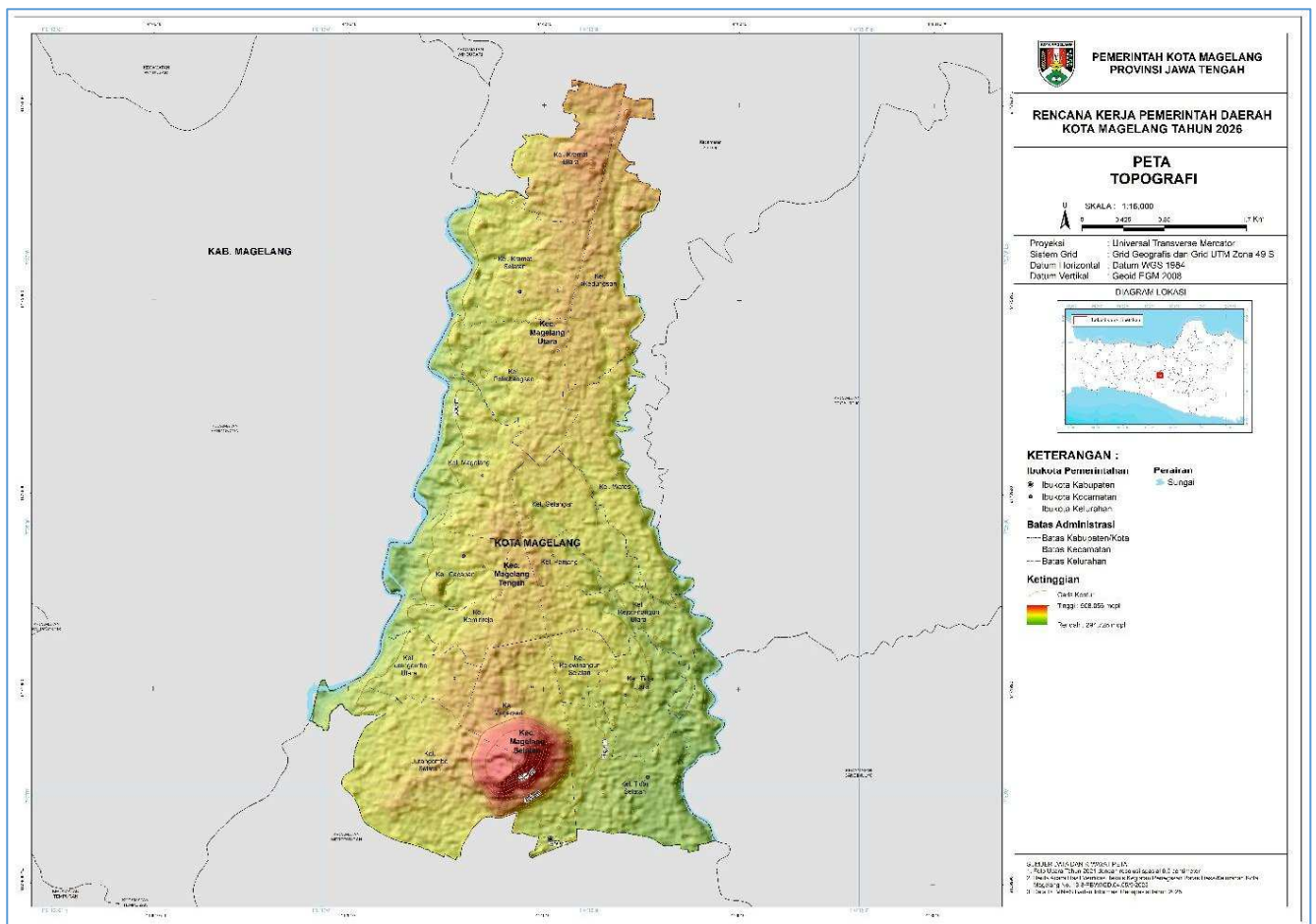
Gambar 2.3 Peta Administrasi Kota Magelang

Sumber: Tim Penyusun, 2025

2.1.1.1.2 Topografi

Kota Magelang dikelilingi oleh Gunung Merapi, Merbabu, Sindoro, Sumbing, Giyanti, Menoreh, Andong, dan Telomoyo. Bentang alamnya datar di antara gunung berapi dengan kelerengan landai dan relief kasar. Kota Magelang berada pada ketinggian 375-500 meter di atas permukaan laut, dengan titik tertinggi di Gunung Tidar yang mencapai 503 meter. Gunung Tidar menjadi ciri khas Kota Magelang yang tidak dimiliki banyak daerah lain. Selain berfungsi sebagai kawasan lindung dan konservasi, Gunung Tidar juga menjadi paru-paru kota yang menyejukkan iklim Kota Magelang.

Struktur fisik Kota Magelang terbentang sepanjang jaringan jalan arteri. Pertumbuhan kota secara alami berkembang ke arah utara dan selatan, terutama di kawasan terbangun dan lahan datar. Permukiman umumnya berkembang di area datar, tetapi dalam kondisi geografis terbatas, permukiman dapat meluas ke kawasan dengan topografi curam.



Gambar 2.5 Peta Topografi Kota Magelang

Sumber: RTRW Kota Magelang 2011 - 2031

2.1.1.1.3 Geologi

Kondisi geologi Kota Magelang tersusun dari batuan gunung api sehingga litologi yang menempati Kota Magelang sebagian besar batu pasir tufaan (lepas) dan breksi. Potensi kandungan tanah Kota Magelang sebagian besar berupa batu pasir lepas dan konglomerat hasil produksi gunung berapi yang merupakan endapan kwarter yang mempunyai sifat sangat poreous (kelulusan air tinggi), serta penurunan terhadap beban kecil, mendekati nol (0). Daya dukung terhadap bangunan berkisar antara 5 kg/cm^2 - 19 kg/cm^2 .

Ditinjau dari satuan morfologi, endapan alluvium tersebar sampai di bagian selatan dan tempat-tempat di pinggir Sungai Progo dan Sungai Elo. Tersusun oleh batuan hasil rombakan batuan yang lebih tua yang bersifat lepas. Umumnya berada pada ketinggian antara 250 - 350 m, berelief halus dengan kemiringan sebesar 3-8 %. Daerah ini dialiri oleh Sungai Progo dan Sungai Elo yang mengalir dengan pola *Sum Meander*.

2.1.1.1.4 Hidrologi

Sumber air di Kota Magelang dapat digolongkan dari air permukaan dan air tanah. Yang dimaksud dengan air permukaan adalah air yang terkumpul di atas tanah atau di mata air, sungai, danau, lahan basah dan laut. Air permukaan tidak lepas dari air bawah tanah. Siklus hidrologi akan membuat sumber air terbarukan. Namun walaupun air merupakan sumber daya yang terbarukan, jumlah yang tersedia digunakan manusia saat ini terutama di Kota Magelang dipengaruhi oleh beberapa ancaman, mulai dari polusi air, pertumbuhan perkotaan, perubahan lanskap, kekeringan dan perubahan iklim.

Air permukaan di Kota Magelang berupa sungai, saluran irigasi dan mata air. Kota Magelang memiliki 2 (dua) sungai yang cukup besar, yaitu Sungai Elo di sebelah timur dan Sungai Progo di sebarlah barat. Kedua sungai tersebut juga menjadi batas alamiah yang menentukan letak administrasi Kota Magelang. Sedangkan potensi air tanah relatif bervariasi dengan kedalaman antara 5 meter sampai dengan 20 meter. Air tanah di Kota Magelang

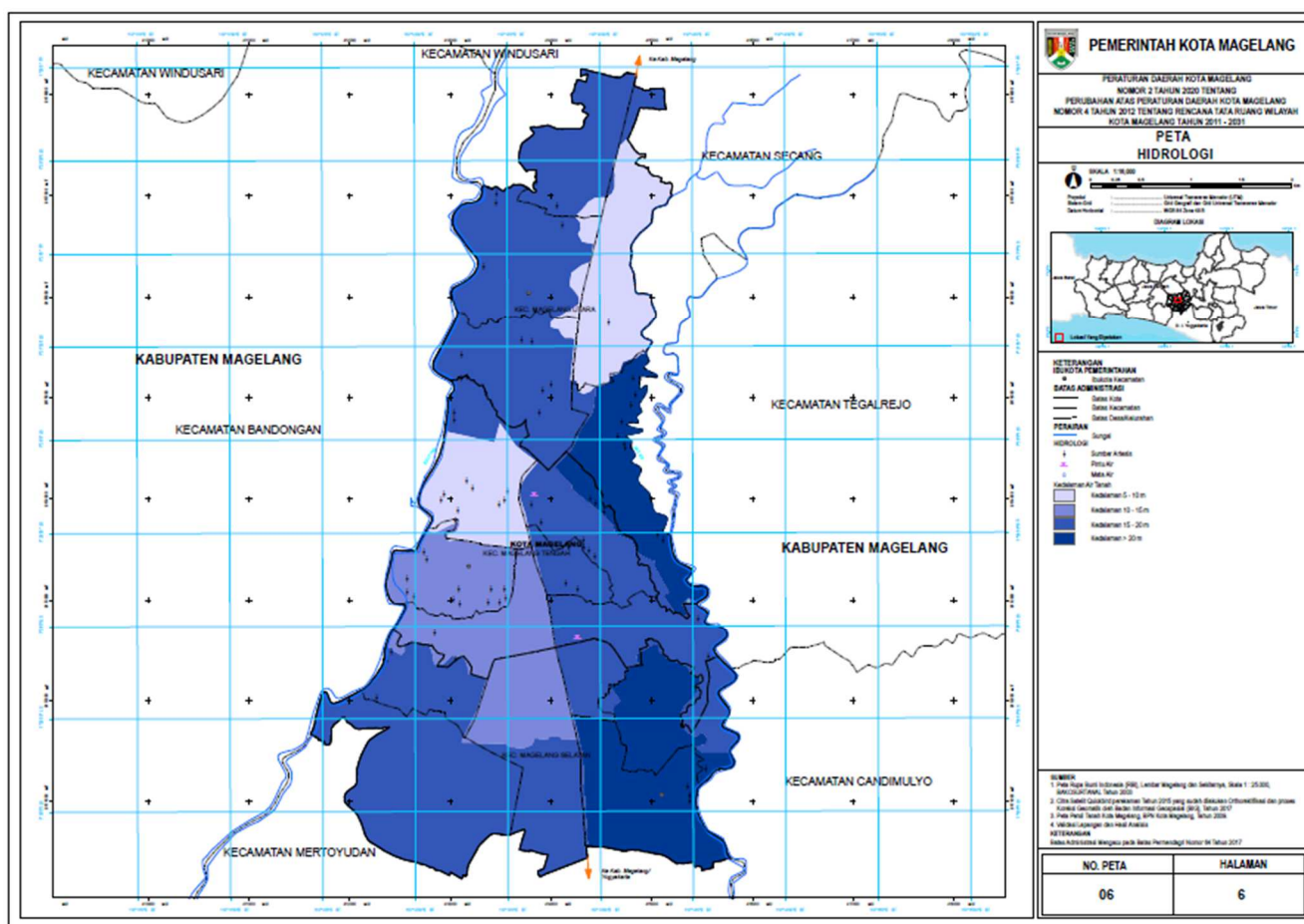
kurang menguntungkan jika dikembangkan mengingat air tanah yang ada mayoritas cukup dalam dengan aquifer yang dangkal, sehingga sulit untuk dikembangkan (dipompa).

Untuk kebutuhan air bersih Kota Magelang sampai saat ini bergantung pada sumber-sumber air yang ada di luar wilayah Kota Magelang yaitu dari mata air yang berada di wilayah Kabupaten Magelang dan satu-satunya mata air yang berada di Kawasan Kota Magelang adalah Mata Air Tuk Pecah. Di kawasan Kota Magelang juga terdapat 2 (dua) saluran air yaitu: (i) Kali Bening (Kali Kota), dan (ii) Kali Progo Manggis. Saluran tersebut juga dapat berfungsi sebagai saluran irigasi teknis.

Adapun Sumber mata air yang dimanfaatkan untuk kebutuhan air bersih di Kota Magelang saat ini adalah:

1. Mata air Wulung dan Karang sebesar 71 lt/det.
2. Mata air Kalimas I sebesar 81 lt/det.
3. Mata air Kalimas II sebesar 87 lt/det
4. Mata air Kanoman I sebesar 74 lt/det.
5. Mata air Kanoman II sebesar 69 lt/det
6. Mata air Tuk Pecah sebesar 102 lt/det.
7. Mata Air Sripunganten 35 lt/det.

Daerah yang diperkirakan potensial air adalah kawasan Jurangombo, Bayeman, Tidar, Nambangan dan Magersari. Namun pemanfaatan air tanah masih memerlukan penelitian lebih jauh mengingat penelitian geologi belum mencakup penelitian pengeboran guna penentuan debit dan cadangan air tanah. Air tanah di Kota Magelang kurang menguntungkan jika dikembangkan mengingat air tanah yang ada mayoritas cukup dalam dengan equifer yang dangkal, sehingga sulit untuk dikembangkan (dipompa). Untuk lebih jelasnya mengenai kondisi Hidrologi Kota Magelang dapat dilihat pada Peta Hidrologi Kota Magelang dibawah ini:



Gambar 2.6 Gambar Peta Hidrologi Kota Magelang

Sumber: RTRW Kota Magelang 2011 - 2031

2.1.1.1.5 Klimatologi

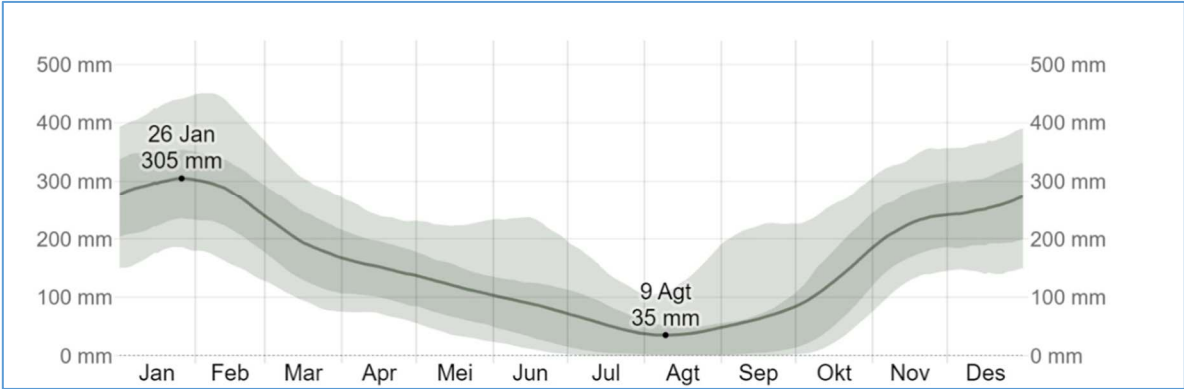
Dari tinjauan klimatologi, Kota Magelang memiliki iklim tropik basah yang dipengaruhi oleh angin muson barat dan muson timur. Kota Magelang termasuk wilayah beriklim sejuk, yang memiliki curah hujan cukup tinggi pada musim penghujan. Berdasarkan data iklim rata-rata curah hujan bulanan di kawasan Kota Magelang dalam jangka waktu lima tahun tersaji pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.3 Curah Hujan Tahunan Kota Magelang (mm), 2019-2023

No	Bulan	2019	2020	2021*	2022	2023
1	Januari	875	503	503	552	249
2	Februari	437	422	422	326	355
3	Maret	328	409	409	412	381
4	April	318	301	301	391	310
5	Mei	42	180	180	350	100
6	Juni	-	60	60	177	37
7	Juli	-	21	21	44	8
8	Agustus	-	59	59	65	1
9	September	-	122	122	157	-
10	Oktober	3	306	306	388	26
11	November	211	481	481	449	267
12	Desember	379	515	515	709	206
	Jumlah curah hujan tahunan (mm)	2.593	3.378	3.378	4.020	1.940

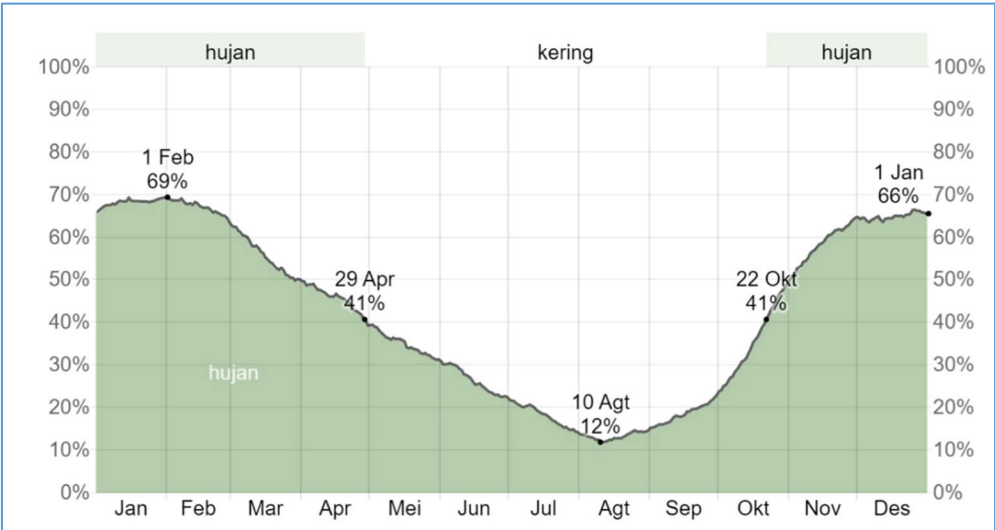
Sumber: Kota Magelang dalam Angka, BPS (2019-2021); BMKG Stasiun Klimatologi Semarang (2022-2023)
 * Menggunakan data tahun 2021

Dalam kurun waktu 2019-2023, curah hujan tahunan di Kota Magelang berfluktuasi. Selama lima tahun terakhir, curah hujan tahunan tertinggi terjadi pada tahun 2022 dengan 4.020 mm kemudian curah hujan terendah terjadi pada tahun 2023 dengan 1.940 mm. Jika dilihat lebih lanjut, selama 2022-2023 curah hujan tahunan di Kota Magelang menurun cukup signifikan. Curah hujan yang berfluktuasi dengan selisih yang cukup tinggi antartahunnya menjadi sebuah peringatan bahwa dampak perubahan iklim kian dirasakan. Di lain sisi, keberadaan air hujan sepanjang tahun di Kota Magelang dapat dilihat sebagai sebuah potensi untuk dimanfaatkan sebagai salah satu sumber pemenuhan kebutuhan air bagi masyarakat, seperti penggunaan untuk pertanian, kebutuhan air tanah dan lain sebagainya.



Gambar 2.7 Grafik Rata-Rata Bulanan Curah Hujan Kota Magelang
 Sumber: Weatherspark (Kajian Ketahanan Iklim, Bappeda Kota Magelang, 2023)

Mengacu pada data curah hujan per-bulan pada tahun 2023, tren peningkatan curah hujan di Kota Magelang pada umumnya dimulai setelah tengah tahun kemudian berlanjut hingga awal tahun. Tinggi-rendahnya curah hujan pada bulan-bulan tertentu di sepanjang tahun meningkatkan upaya waspada terhadap akibat negatif yang ditimbulkan oleh kondisi dan situasi cuaca dan iklim yang ekstrem. Hal yang perlu diwaspadai misalnya terjadi banjir di beberapa ruas jalan yang disebabkan karena resapan yang kurang dan bencana pohon tumbang yang disebabkan hujan disertai angin kencang serta bencana longsor. Selain itu perlu juga diwaspadai adanya bahaya kekeringan yang bisa terjadi pada bulan-bulan tertentu dimana curah hujan rendah. Adapun grafik fluktuatif presipitasi di tahun 2023 dapat diperlihatkan pada gambar berikut:



Gambar 2.8 Grafik Peluang Presipitasi Harian Kota Magelang
(Sumber: Bappeda Kota Magelang, 2023)

2.1.1.1.6 Penggunaan Lahan

Penggunaan lahan merupakan pemanfaatan lahan dan lingkungan alam untuk memenuhi kebutuhan manusia dalam penyelenggaraan kehidupannya. Penggunaan lahan di Kota Magelang didominasi lahan terbangun, dari luas lahan 1854,67 Ha, hampir 70% merupakan lahan terbangun yang berupa permukiman, perdagangan dan jasa, pendidikan, perkantoran, kesehatan, pariwisata dan kawasan terbangun lainnya. Tata guna lahan di Kota Magelang sesuai dengan karakteristik perkotaan banyak di dominasi oleh pekarangan/lahan untuk bangunan dan halaman. Tingginya kebutuhan akan lahan untuk rumah tinggal, perumahan, pekarangan, gudang maupun untuk kegiatan ekonomi seperti ruko dan rumah makan berpengaruh pada tingginya alih fungsi lahan pertanian. Salah satu sisi lain yang perlu diperhatikan terkait menurunnya tingkat dan fungsi tanah menjadi lahan kritis adalah menurunnya daya dukung lingkungan dan ketidaktercapaian target 30% dari Ruang Terbuka Hijau di Kota Magelang serta keterbatasan kebutuhan penyediaan air bersih dan fasilitas umum seiring dengan pertumbuhan bangunan di kota Magelang.

Berdasarkan data tabel di bawah ini, terdapat penurunan luasan atas lahan pertanian selama beberapa tahun ini, dari 11,40% pada tahun 2017 menjadi 7,7% pada tahun 2021. Sementara itu dilihat dari luas total Kota Magelang, terjadi penambahan luas dari tahun 2017 seluas 1.812 ha menjadi 1.854 ha pada tahun 2018. Di sisi lain terjadi penambahan luasan tanah kering dengan komposisi klasifikasi di dalamnya berubah untuk tanah pekarangan dan lainnya.

Tabel 2.4 Luas Lahan Menurut Penggunaannya di Kota Magelang (hektar), 2019-2023

Jenis Tanah	2019	2020	2021	2022	2023
I. Tanah Sawah	142,89	142,89	143,26	143,96	105,55
1. Pengairan Teknis	142,89	142,89	143,26	143,96	105,55
2. Pengairan ½ Teknis	-	-	-	-	-

Jenis Tanah	2019	2020	2021	2022	2023
3. Tadah Hujan	-	-	-	-	-
4. Lainnya	-	-	-	-	-
II. Tanah Kering	1.711,11	1.711,11	1.710,74	1710,74	1710,74
1. Pekarangan	1.234,85	1.234,85	1.234,85	1234,85	1234,85
2. Tegal/Kebun/Ladang/Huma	19,52	19,52	11,68	11,68	11,68
3. Tambak	-	-	-	-	-
4. Kolam/Tebat/Empang	5,40	5,40	5,8	5,9	5,9
5. Perkebunan/Hutan Rakyat	70,00	70,00	70	70	70
6. Industri	53,44	53,44	53,4	53,4	53,4
7. Lainnya	327,90	327,90	335,4	335,41	335,41
Jumlah	1.854,00	1.854,00	1.854,00	1854,70	1816,29

Sumber: Dinas Pertanian, Peternakan dan Perikanan Kota Magelang, 2024

Hal ini menunjukkan bahwa terjadi penurunan terhadap pengolahan lahan pertanian dan perikanan di Kota Magelang baik berupa tanah sawah, perkebunan maupun kolam. Penurunan lahan untuk pertanian dan perikanan beralih menjadi tanah kering berupa pekarangan (pemukiman dan bangunan) dan lainnya. Pada lahan sektor industri juga mengalami peningkatan luasan sebesar 1.54 ha di tahun 2019 hingga tahun 2023. Ada beberapa penyebab terjadinya alih fungsi lahan pertanian dan perikanan, diantaranya adalah seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk, maka meningkat pula kebutuhan akan pemukiman dan fasilitas umum. Penyebab yang lain adalah kurangnya minat untuk mengelola lahan pertanian dan perikanan. Hal ini dikarenakan harga jual tidak sebanding dengan tingginya biaya produksi di bidang pertanian dan perikanan serta pengembangan bidang pertanian dianggap kurang menjanjikan.

Alih fungsi lahan menunjukkan bahwa perkembangan Kota Magelang dari tahun ke tahun mengarah pada sektor industri dan jasa. Hal ini akan dapat meningkatkan angka pertumbuhan ekonomi di Kota Magelang, terbukanya peluang usaha dan peningkatan sarana prasarana fasilitas umum. Namun ada beberapa hal yang perlu diwaspadai yakni bergesernya lapangan kerja dari sektor pertanian ke non pertanian, terjadi kerawanan bahan pangan pokok yang dibutuhkan oleh masyarakat, serta apabila terjadi kesalahan perhitungan investasi atas alih fungsi lahan pertanian dan perikanan akan menyebabkan bertambahnya lahan tidur yang tidak produktif. Mengingat dampak yang perlu diwaspadai akibat alih fungsi lahan, maka Pemerintah Kota Magelang berusaha mengendalikan alih fungsi lahan pertanian dengan mengoptimalkan pemanfaatan lahan dengan pola pembangunan vertikal. Selain itu perlu dilakukan pencermatan terkait perijinan pembangunan harus sesuai dengan peraturan yang berlaku mengenai penggunaan lahan.

2.1.1.1.7 Potensi Pengembangan Wilayah

Potensi Pengembangan wilayah di Kota Magelang, sebagaimana tercantum di dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kota Magelang Tahun 2005-2025 dan juga dalam dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Magelang Tahun 2011-2031 akan lebih diarahkan untuk menjadi kota jasa. Faktor pendukung sebagai kota jasa, adalah posisi strategis kota yang berada pada simpul jalur ekonomi dan wisata regional yang dipadukan dengan penataan fisik wajah kota, akan menjadi potensi yang dominan dalam mempertegas fungsi kota sebagai kota jasa.

Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 -2044 Kota Magelang mempunyai kedudukan sebagai Pusat Kegiatan Wilayah (PKW). Kota Magelang menjadi PKW untuk Kawasan Kabupaten Magelang, Kota Magelang, dan Kabupaten Temanggung yang diistilahkan sebagai Kawasan GELANGMANGGUNG.

Kota Magelang sebagai Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) memiliki beberapa fungsi, antara lain sebagai berikut:

1. Pusat pelayanan keuangan/bank yang melayani beberapa kabupaten;
2. Pusat pengolahan/pengumpul barang yang melayani beberapa kabupaten;
3. Simpul transportasi yang melayani beberapa kabupaten;
4. Pusat pemerintahan yang melayani beberapa kabupaten;
5. Pusat pendidikan yang melayani beberapa kabupaten;
6. Pusat kesehatan yang melayani beberapa kabupaten; dan
7. Pusat Perdagangan dan Jasa umum lain yang melayani beberapa kabupaten

Rencana pengembangan struktur ruang wilayah Kota Magelang meliputi sistem pusat kegiatan, dan sistem jaringan prasarana wilayah Daerah. Sistem pusat kegiatan terdiri dari beberapa sistem, yaitu pusat pelayanan kota, subpusat pelayanan kota dan pusat lingkungan, sedangkan sistem jaringan prasarana wilayah Kota Magelang meliputi sistem jaringan transportasi darat, sistem jaringan telekomunikasi, sistem sumber daya air, sistem jaringan energi, dan infrastruktur perkotaan.

Sistem perkotaan Kota Magelang dibagi dalam 5 (lima) Bagian Wilayah Perencanaan (BWP) dimana masing-masing mempunyai fungsi tertentu, sebagai berikut:

1. Pusat Pelayanan Kota Magelang, mempunyai cakupan pelayanan seluruh wilayah Kota Magelang dan Regional yaitu Kawasan PURWOMANGGUNG sebagai *hinterland*. Mempunyai makna sebagai fungsi pelayanan eksternal. Pusat pelayanan Kota ditetapkan di BWP I yang terdapat di sebagian Kelurahan Cacaban, sebagian Kelurahan Kemirirejo, sebagian Kelurahan Magelang, sebagian Kelurahan Magersari, Kelurahan Panjang, Kelurahan Rejowinangun Selatan, dan sebagian Kelurahan Rejowinangun Utara, yaitu Kawasan Alun-alun Kota Magelang.
2. Subpusat Pelayanan Kota Magelang, direncanakan mempunyai cakupan pelayanan subwilayah kota dan terutama mempunyai skala pelayanan kota atau sebagai pengungkapan fungsi kawasan dalam memberikan pelayanan bagi pemenuhan kebutuhan masyarakat dalam kawasan atau masing-masing bagian wilayah kota (fungsi pelayanan internal) adapun pembagian sub pusat pelayanan Kota Magelang meliputi:
 - a. Sub Pusat Pelayanan Kota BWP I mempunyai luas kurang lebih 246 Ha dengan fungsi utama sebagai kawasan pusat pelayanan sosial dan ekonomi skala kota/ regional, kesehatan, rekreasi wisata perkotaan, dan Perumahan, meliputi Kelurahan Cacaban, sebagian Kelurahan Kemirirejo, sebagian Kelurahan Kemirirejo, sebagian Kelurahan Magelang, sebagian Kelurahan Magersari, sebagian Kelurahan Panjang, Kelurahan Rejowinangun Selatan, sebagian Kelurahan Rejowinangun Utara, yaitu Kawasan Rejowinangun;
 - b. Sub Pusat Pelayanan Kota BWP II mempunyai luas kurang lebih 506 H dengan fungsi pusat pelayanan Perumahan, Perdagangan dan jasa, Perguruan Tinggi, dan pendidikan angkutan darat, meliputi: sebagian Kelurahan Cacaban, sebagian Kelurahan Magelang, Kelurahan Potrobangsari, Kelurahan Wates, dan Kelurahan Gelangan.
 - c. Sub Pusat Pelayanan Kota BWP III dengan kurang lebih 399 Ha dengan fungsi pusat pelayanan rekreasi kota/ wisata alam skala kota/ regional, RTH Kebun Raya, pendidikan angkutan darat, dan Perumahan, terdiri dari sebagian Kelurahan Magersari, Kelurahan Kemirirejo, Kelurahan Tidar Selatan, dan sebagian Kelurahan Rejowinangun Utara.
 - d. Sub Pusat Pelayanan Kota BWP IV dengan luas kurang lebih 327 Ha, dengan fungsi pusat pelayanan pemerintah, pengembangan perdagangan dan jasa, simpul pergerakan barang, jasa dan orang, dan perumahan, terdiri dari sebagian Kelurahan Magersari, Kelurahan Tidar Utara, Kelurahan Tidar Selatan, dan sebagian Kelurahan Rejowinangun Utara.
 - e. Sub Pusat pelayanan kota di BWP V dengan luas kurang lebih 376 Ha, dengan fungsi pusat pelayanan perguruan tinggi, perdagangan dan jasa, kesehatan, kawasan pengembangan social budaya, olahraga dan rekreasi, dan perumahan, meliputi Kelurahan Kramat Utara, Kelurahan Kramat Selatan, dan Kelurahan Kedungsari.

3. Pusat Lingkungan mempunyai cakupan pelayanan skala lingkungan wilayah di Kota Magelang. Pusat lingkungan merupakan pusat pelayanan skala lingkungan wilayah Kota Magelang yang dikembangkan pada masing-masing BWP.

Kota Magelang selain sebagai PKW juga sebagai daerah penyangga Kawasan Strategis Nasional (KSN) Borobudur berdasarkan Perpres No. 58 Tahun 2014 tentang RTR Kawasan Borobudur dan sekitarnya, dan ditegaskan kembali dalam Perpres No. 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional yang menyebut Candi Borobudur menjadi destinasi pariwisata nasional bersama dengan Danau Toba, Kepulauan Seribu, Tanjung Kelayang, Mandalika, Wakatobi, Pulau Morotai, Tanjung Lesung, Bromo Tengger Semeru, dan Komodo.

Berdasarkan Perpres No. 58 Tahun 2014 wilayah KSN Borobudur terbagi menjadi dua, yaitu Sub Kawasan Pelestarian 1 (SP-1) yang berada pada radius 5 km, dan Sub Kawasan Pelestarian 2 (SP-2) yang berada pada radius 5-10 km. Sub Kawasan Pelestarian 1 (SP-1) diarahkan sebagai kawasan pelestarian utama, sedangkan Sub Kawasan Pelestarian 2 (SP-2) diarahkan sebagai kawasan penyangga yang dikendalikan pertumbuhan kawasan terbangunnya. Jika dilihat dari gambar di bawah maka Kota Magelang tidak termasuk dalam kawasan penyangga namun pengembangan Borobudur menjadi potensi ekonomi bagi Kota Magelang melalui penyediaan sarana perdagangan dan jasa untuk melayani kebutuhan wisatawan.

Penetapan Candi Borobudur sebagai kawasan strategis nasional juga berkorelasi dengan pengembangan jalur pergerakan. Pada beberapa tahun ke depan akan dikembangkan jalan tol dan jalur kereta api Semarang-Yogyakarta untuk meningkatkan konektivitas kedua kota tersebut dan konektivitas menuju Candi Borobudur. Agar Kota Magelang mendapatkan manfaat dari hal ini maka skenario pengembangan Kota Magelang adalah dengan menciptakan pusat-pusat kegiatan baru yang berfungsi sebagai generator pertumbuhan ekonomi dalam skala kawasan yang lebih luas yang masuk dalam kategori berpotensi dalam pengembangan pusat pelayanan perekonomian, kesehatan, dan pendidikan yang mempunyai jangkauan pelayanan skala kota / regional.

Fokus pengembangan kawasan strategis sesuai RTRW Kota Magelang diantaranya adalah : a). Pengembangan kawasan sport center di daerah GOR Samapta (Sanden); b). Pengembangan kawasan Sidotopo; c). Pengembangan kawasan Mantyasih; d). Pengembangan kawasan Gunung Tidar; dan e). pengembangan Kawasan Soekarno Hatta, f) Kawasan Mantyasih.

Sebagaimana halnya Akademi Militer sebagai pusat pendidikan militer skala nasional di Kota Magelang, dengan ditetapkannya Universitas Tidar sebagai universitas negeri di Indonesia juga menyebabkan terjadinya perubahan fisik sosial di lingkungan sekitar Universitas Tidar, seperti semakin banyaknya tempat kos sebagai tempat tinggal sementara para mahasiswa, semakin menjamurnya tempat usaha untuk melayani kebutuhan mahasiswa, dan semakin banyaknya pendatang seperti mahasiswa yang belajar di Universitas Tidar. Pada nantinya keberadaan Universitas Tidar sebagai universitas negeri akan menjadi tarikan bagi masyarakat dari luar Magelang yang menyebabkan Kota Magelang menjadi semakin padat. Berkembangnya Kawasan UN Tidar akan menyebabkan peningkatan jumlah penduduk, kepadatan penduduk kepadatan permukiman, sehingga berpotensi terjadinya penurunan kualitas permukiman. Hal ini harus diantisipasi mulai dari sekarang sehingga potensi tersebut tidak terjadi.

Pengembangan Kawasan UN Tidar sendiri sudah diatur di dalam tata ruang RDTR BWP V yaitu Kawasan Sidotopo. Kawasan ini juga telah ditetapkan sebagai kawasan strategis pertumbuhan ekonomi dan nantinya akan terbagi menjadi kawasan pendidikan dan kawasan perdagangan dan jasa. Di sekitar Kawasan Sidotopo juga dikembangkan kawasan permukiman untuk mendukung kegiatan pendidikan disana. Selain itu juga dilakukan peningkatan kelas jalan yaitu Jalan Perintis Kemerdekaan menjadi jalan kolektor primer untuk meningkatkan konektivitas dengan Universitas Tidar di wilayah Kabupaten Magelang.

Pengembangan kawasan gunung Tidar dalam rangka mendukung wisata religius Gunung Tidar yang menjadi daya tarik dan destinasi wisata dalam beberapa tahun terakhir ini. Bahkan Gunung Tidar sebagai salah satu Kawasan Lindung Ruang Terbuka Hijau ini dikembangkan menjadi Kebunraya, hal ini didasarkan pada Peraturan Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Rencana Pengembangan Kebun Raya Indonesia. Dalam Peraturan tersebut disampaikan bahwa Gunung Tidar di Kota Magelang masuk dalam Ekoregion Hutan Hujan Pegunungan Jawa Bagian Barat.

Rencana pengembangan Gunung Tidar sebagai Kebun raya saat ini sedang dalam tahapan perencanaan oleh Pemerintah Kota Magelang. Dengan menggandeng LIPI, Pemerintah Kota Magelang melakukan uji kelayakan Gunung Tidar sebagai Kebun Raya dan berdasarkan hasil penelitian dan Kajian dari LIPI pada tahun 2018,

dinyatakan bahwa Kota Magelang layak sebagai Kebun Raya. Terkait dengan hal tersebut, Badan Perencanaan Pembangunan Kota Magelang pada tahun 2019 menyusun Dokumen Perencanaan Pengembangan Kebun Raya Gunung Tidar.

Perlu disampaikan bahwa ketika Kawasan Ruang Terbuka Hijau telah ditetapkan sebagai Kebun Raya, maka selamanya akan tetap menjadi Kebun Raya (Kawasan Lindung). Kebun Raya juga mewadahi 5 fungsi yaitu edukasi, konservasi, penelitian, wisata dan Jasa Lingkungan. Kelima fungsi ini telah dimiliki oleh Kebun Raya Gunung Tidar, bahkan lebih dari itu, saat ini telah banyak pengunjung yang berkunjung ke Gunung Tidar untuk keperluan Wisata Religius. Fungsi Wisata Religius ini seharusnya menjadi satu fungsi tersendiri sehingga membutuhkan zona ruang tersendiri karena aktivitas dan pengunjung di zona ini sangat tinggi.

Terkait dengan fokus pengembangan Kawasan Soekarno Hatta, hal ini seiring dengan perubahan fungsi kawasan tersebut menjadi kawasan jasa dan perdagangan dan mendukung kebijakan Pemerintah Pusat yaitu Pembangunan Jalan Tol Bawen- Jogjakarta dan Pembukaan Jalur Kereta Api Semarang- Borobudur-Yogyakarta. Pemerintah Kota Magelang melalui Anggaran KeMenPUPR mengajukan usulan untuk pembangunan Fly-Over untuk memecah kemacetan di sekitar kawasan tersebut.

Di sisi lain beberapa potensi internal Kota Magelang yang menjadi generator perkembangan kota, diantaranya yaitu keberadaan Akademi Militer yang merupakan pusat pendidikan kemiliteran dengan layanan nasional sudah banyak dikenal dari seluruh penjuru wilayah Indonesia, sehingga berdampak pada kunjungan ke Kota Magelang semakin meningkat. Kebutuhan akomodasi menjadi daya Tarik investor untuk mengembangkan usaha perhotelan dan restoran di Kota Magelang.

Sedangkan rencana pengembangan Kota Magelang diatur dalam Rencana Pola Ruang Kota Magelang yang ditetapkan dalam Perda Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Perda 4 Tahun 2012 tentang RTRW Kota Magelang adalah sebagai berikut:

1. Kawasan Lindung

Kawasan peruntukan Lindung meliputi:

a. Kawasan Perlindungan Setempat, meliputi:

- sempadan sungai, meliputi Sempadan Sungai Elo dan Sungai Progo
- sempadan irigasi, meliputi sempadan saluran Kali Manggis, Sempadan Kali Bening, Sempadan Saluran Kali Kota, Sempadan Saluran Ngaran, Sempadan saluran Gandekan, dan Sempadan Kedali.
- sempadan Jalur Kereta Api, meliputi sempadan jaringan Kereta Api antarkota jalur Ambarawa-Secang-Magelang-Yogyakarta.

b. Ruang Terbuka Hijau (RTH) Kota, meliputi:

- RTH publik Kebun Raya pada Gunung Tidar
- RTH publik taman
- RTH public fungsi tertentu

c. Kawasan Lindung Geologi, meliputi:

- Kawasan CAT; meliputi CAT Magelang-Temanggung
- Sempadan Mata Air, meliputi sempadan mata air Tuk Pecah

d. Kawasan Cagar Budaya, meliputi:

- Rumah Sakit Soejono
- Menara Air Kota Magelang
- Rumah Sakit Umum Daerah Tidar
- Kelenteng Liong Hok Bio
- Eks Karesidenan Kedu
- Kepolisian Resort Magelang Kota
- Museum Badan Pemeriksaan Keuangan
- Plengkung

- Pondok Sriti
- Wisma Diponegoro
- Gereja Protestan di Indonesia Bagian Barat (GPIB) Magelang
- Museum Jend. Sudirman
- Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Magelang
- Pasturan St. Ignatius
- Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)/ Sekolah Menengah Ilmu Pariwisata (SMIP) Wiyasa
- Komando Distrik Militer Magelang
- Gereja St. Ignatius
- Gereja Kristen Jawa Magelang
- Kantor Koordinasi Pembangunan Wilayah II Provinsi Jawa Tengah
- Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
- Eks Kepolisian Wilayah Kedu
- Bangunan Unit Gawat Darurat Rumah Sakit Umum Daerah Tidar
- Petilasan Mantyasih;
- Cagar Budaya lain yang ditemukan di kemudian hari disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Kawasan Budidaya

Kawasan peruntukan Budi Daya meliputi:

- a. Kawasan Permukiman, terdiri dari:
 - Kawasan Perumahan
 - Kawasan Perdagangan dan Jasa
 - Kawasan Perkantoran
 - Kawasan Sektor Informal
 - Kawasan Pendidikan
 - Kawasan Transportasi
 - Kawasan Kesehatan
 - Kawasan Peribadatan
 - Kawasan Olahraga
- b. Kawasan Peruntukan Industri
- c. Kawasan Pariwisata
- d. Kawasan Pertahanan dan Keamanan
- e. Kawasan Pertanian
- f. Kawasan Perikanan
- g. Kawasan Hutan Rakyat

Sebagai upaya peningkatan perkembangan wilayah Kota, dalam perda Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Perda No 4 Tahun 2012 juga ditetapkan Kawasan Strategis Daerah. Kawasan strategis daerah artinya wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup Kota terhadap ekonomi, sosial, budaya dan/atau lingkungan. Rencana pengembangan kawasan strategis Kota meliputi:

1. Kawasan strategis kota fungsi dan Daya Dukung Lingkungan Hidup;
2. Kawasan strategis kota pertumbuhan ekonomi;
3. Kawasan strategis sosial budaya.

Kawasan strategis kota dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung Lingkungan Hidup berupa Kebun Raya yaitu Kawasan Gunung Tidar, dilaksanakan dengan penegasan batas kawasan Lindung Gunung Tidar dengan kawasan budidaya di seputar kawasan, revitalisasi kawasan Gunung Tidar sebagai Kebun Raya, reboisasi pohon di Kawasan Gunung Tidar secara bertahap, pengembangan kawasan sebagai kawasan pariwisata untuk wisata religi dan obyek studi ilmu pengetahuan alam, serta pengembangan secara terbatas prasarana dan sarana pendukung.

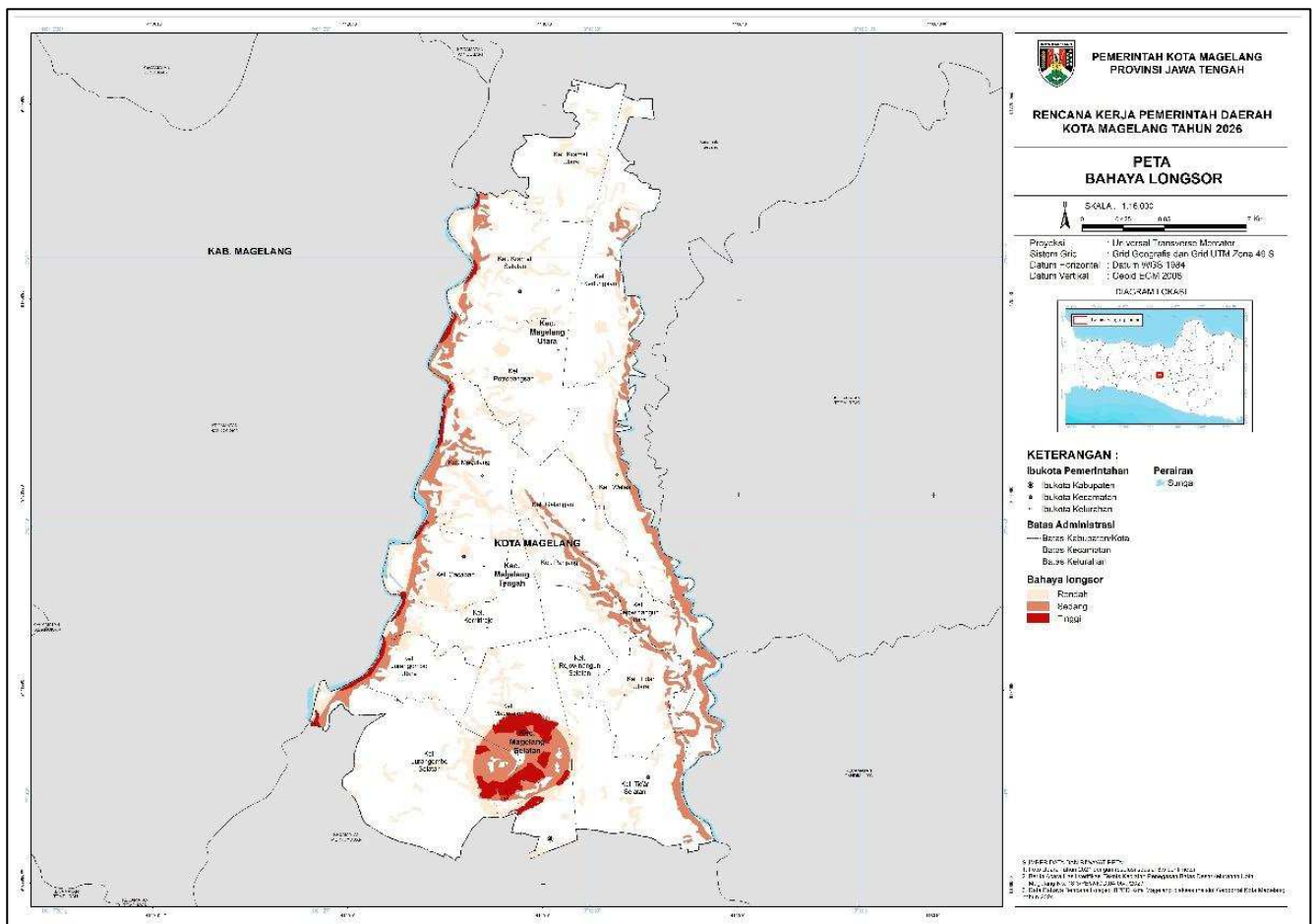
Kawasan strategis kota pertumbuhan ekonomi meliputi: Kawasan Sidotopo, kawasan Soekarno-Hatta, kawasan Kebonpolo, kawasan Alun-alun, kawasan GOR Samapta, kawasan Sentra Perekonomian Lembah Tidar, dan kawasan Taman Kyai Langgeng, Skenario pengembangan Kota Magelang adalah dengan menciptakan pusat-pusat kegiatan baru yang berfungsi sebagai generator pertumbuhan ekonomi dalam skala kawasan yang lebih luas yang masuk dalam kategori berpotensi dalam pengembangan pusat pelayanan perekonomian, kesehatan, dan pendidikan yang mempunyai jangkauan pelayanan skala kota / regional. Potensi pengembangannya pada masa-masa mendatang sebagai berikut, yaitu:

1. Kawasan Sidotopo sebagai pusat pelayanan pendidikan, perdagangan dan jasa, pada kawasan ini direncanakan untuk memwadahi pendirian kampus perguruan tinggi negeri Untidar. Kebijakan pengembangan dan Penataan Kawasan Sidotopo sebagai pusat bisnis baru di Kota Magelang (Pusat Perdagangan, rekreasi/ pariwisata, pendidikan dengan skala pelayanan lokal dan regional);
2. Kawasan Sukarno Hatta sebagai pusat pelayanan kegiatan transportasi dan perdagangan jasa, pada kawasan ini sudah disiapkan sebidang lahan untuk pembangunan pasar induk yang dipadukan dengan pergudangan;
3. Kawasan Kebonpolo sebagai pusat pelayanan kegiatan transportasi dan perdagangan;
4. Kawasan Alun-alun sebagai pusat pelayanan perdagangan jasa dan perkantoran, Kawasan Alun-Alun juga sebagai kawasan pusat kota yang memwadahi kegiatan rekreasi masyarakat Kebijakan Pengembangan Kawasan pusat Kota (CBD) sebagai aktivitas bisnis utama di Kota Magelang.;
5. Kawasan GOR Samapta sebagai pusat pelayanan rekreasi dan olahraga, saat ini sedang dalam tahap penyelesaian pembangunan Stadion Madya Moch. Soebroto, dengan kapasitas 15.000 penonton. Selain itu dibangun kolam renang dengan standar internasional;
6. Kawasan Sentra Perekonomian Lembah Tidar sebagai pusat pelayanan perdagangan jasa dan kesehatan Kebijakan pengembangan dan penataan kawasan Sentra Perekonomian Lembah Tidar sebagai pusat perdagangan modern dan tradisional skala regional;
7. Kawasan Taman Kyai Langgeng sebagai kawasan pusat pelayanan rekreasi dan olahraga, dan untuk lebih meningkatkan pelayanan kawasan, maka pada lokasi sekitar Taman Kyai Langgeng telah dibangun Showroom Mudalrejo yang memwadahi pemasaran hasil-hasil UMKM Kota Magelang.

Sedangkan kawasan strategis kota dari sudut kepentingan sosial dan budaya daerah meliputi Petilasan Mantyasih dan Cagar Budaya serta ilmu pengetahuan yang ada di wilayah Daerah yang ditetapkan, dengan strategi untuk melestarikan dan meningkatkan sosial dan budaya daerah meliputi: mengembangkan kegiatan budidaya secara selektif dan kajian teknis zonasi di dalam dan di sekitar kawasan, melestarikan keaslian fisik serta bentuk bangunan yang ada di kawasan strategis serta meningkatkan kecintaan masyarakat akan nilai budaya yang mencerminkan jati diri bangsa yang berbudi luhur dan mengembangkan penerapan nilai budaya bangsa dalam kehidupan bermasyarakat.

2.1.1.1.8 Wilayah Rawan Bencana

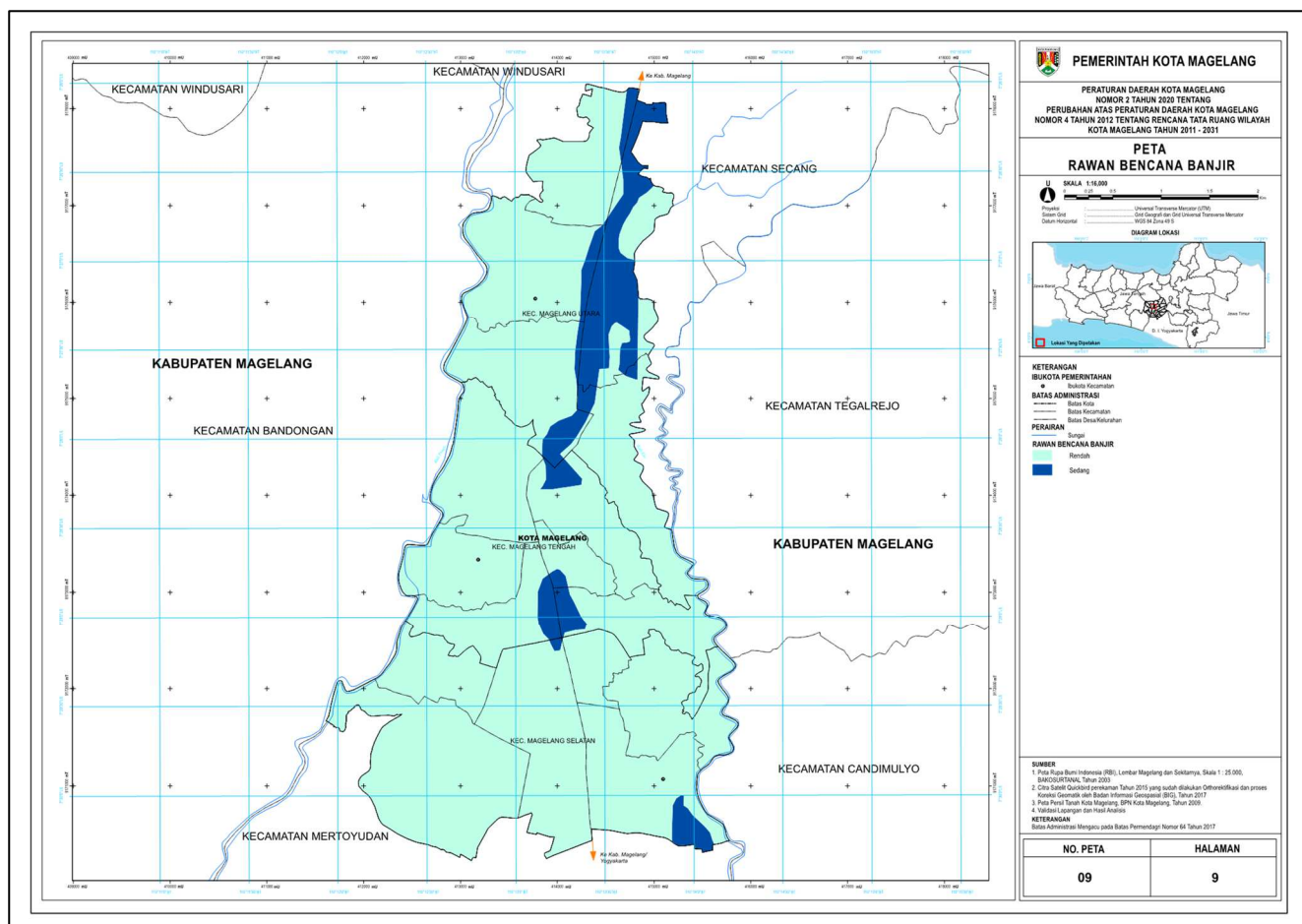
Kota Magelang memiliki potensi cukup besar terjadi bencana tanah longsor karena sebagian wilayah Kota Magelang termasuk dalam wilayah dengan tingkat keterenggan yang cukup tinggi dan Daerah Aliran Sungai (DAS). Beberapa wilayah memiliki potensi longsor diantaranya (a) Wilayah Barat Kota Magelang dalam lingkup Daerah Aliran Sungai Progo meliputi Kelurahan Kramat Utara, Kelurahan Kramat Selatan, Kelurahan Magelang Utara, Kelurahan Potrobangsari, Kelurahan Magelang, Kelurahan Cacaban; dan (b) Wilayah Timur Kota Magelang dalam lingkup Daerah Aliran Sungai Elo meliputi Kelurahan Kedungsari, Rejowinangun Utara dan Kelurahan Wates.



Gambar 2.9 Peta Bahaya Bencana Longsor

Sumber: RTRW Kota Magelang 2011 - 2031

Relief lahan Kota Magelang menyerupai punggung sapi, dimana ditengahnya adalah titik tertinggi sementara semakin ke tepi semakin menurun karena memang di bagian tepi merupakan sungai besar. Kali elo di bagian tepi timur sementara di bagian tepi barat adalah Kali Progo. Hal ini yang menjadikan Kota Magelang tidak mengalami Banjir (dengan tinggi lebih dari 30 cm selama lebih dari 30 menit) akan tetapi potensi banjir atau genangan ini masih tetap ada yang diakibatkan oleh saluran air dan sudut elevasi saluran air yang tidak dapat menampung debit air hujan dengan maksimal. Namun banjir kiriman di wilayah tepi Sungai Progo dan Elo perlu diwaspadai, terutama untuk wilayah yang ada disekitarnya, diantaranya Kelurahan Potrobangsari, Cacaban, Kemirirejo, Panjang, Tidar Utara, Rejowinangun Utara.



Gambar 2.10 Peta Rawan Bencana Banjir

Sumber: RTRW Kota Magelang 2011 - 2031

Posisi Kota Magelang juga berada di tengah-tengah 5 Gunung, diantaranya adalah Gunung Merapi, Gunung yang masih aktif. Sekalipun Kota Magelang tidak masuk dalam wilayah rawan bencana gunung berapi, akan tetapi Ketika terjadi letusan, Kota Magelang mengalami dampaknya berupa hujan abu dan menjadi tempat untuk evakuasi bencana. Saat ini telah diatur dalam rencana Tata Ruang Kota, tempat - tempat yang secara umum menjadi sarana untuk evakuasi bencana yaitu Lapangan, Kantor Pemerintah, Fasilitas Sosial dan Gedung Olahraga.

Selain itu, adanya potensi bahaya pencemaran akibat aktivitas industri dan jasa serta limbah rumah tangga di Kota Magelang, hal ini berdampak pada pencemaran tanah dan pencemaran air sehingga mempengaruhi kualitas air di Kota Magelang. Disamping itu, potensi bencana kebakaran juga dapat terjadi pada kawasan permukiman dengan kepadatan tinggi dengan akses jalan yang sempit dengan lebar 3-6 meter perlu diwaspadai. Daerah yang termasuk dalam wilayah dengan rawan bencana kebakaran diantaranya Kramat Utara dan Selatan, Potrobangsari, Cacaban, Panjang, Kemirirejo, Rejowinangun Utara, Rejowinangun Selatan. Bencana lain yang perlu mendapat perhatian dan identik dengan wilayah perkotaan adalah bencana sosial seperti pertikaian antar warga di wilayah Kota Magelang, pertikaian pelajar dan tindak kriminalitas.

Tabel 2.5 Kejadian Bencana di Kota Magelang, 2021-2024

Kecamatan / Kelurahan	KEJADIAN															
	Longsor				Banjir				Puting Beliung				Kebakaran			
	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
Kec. Magelang Selatan	4	1	2	2	0	0	0	0	0	7	1	0	1	1	14	3
Kel. Rejowinangun Selatan	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
Kel. Magersari	0	0	1	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	1	0

Kecamatan / Kelurahan	KEJADIAN																			
	Longsor				Banjir				Putting Beliung				Kebakaran				Lain-lain			
	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
Kel. Jurangombo Utara	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	5	0	0	0	0	1
Kel. Jurangombo Selatan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	2	2	0	3	0	7
Kel. Tidar Utara	2	1	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	1	2
Kel. Tidar Selatan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	1	1	5	0	0	2	0	6
Kec. Magelang Utara	6	3	3	2	1	1	0	1	0	18	2	0	1	2	13	3	3	4	0	11
Kel. Wates	3	2	2	0	0	0	0	1	0	3	0	0	0	0	2	1	1	3	0	3
Kel. Potrobangsari	1	1	0	1	1	1	0	0	0	8	1	0	0	0	3	0	0	1	0	4
Kel. Kedungsari	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	0	0	3
Kel. Kramat Utara	2	0	0	1	0	0	0	0	0	4	0	0	0	1	2	1	0	0	0	0
Kel. Kramat Selatan	0	0	1	0	0	0	0	0	0	3	1	0	1	0	5	1	1	0	0	1
Kec. Magelang Tengah	0	8	2	7	1	2	0	0	2	9	2	0	3	1	13	6	4	2	2	9
Kel. Kemirirejo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	0	5	0	0	0	0	2
Kel. Cacaban	0	2	0	3	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	3	2	2	1	1	1
Kel. Rejowinangun Utara	0	2	1	2	1	0	0	0	0	2	0	0	0	0	2	1	1	1	0	1
Kel. Magelang	0	2	0	1	0	1	0	0	2	4	0	0	0	0	2	1	1	0	0	4
Kel. Panjang	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0
Kel. Gelangan	0	2	1	1	0	0	0	0	0	1	1	0	1	0	0	2	0	0	1	1
	10	12	7	11	2	3	0	1	2	34	5	0	5	4	40	12	8	12	3	39

Sumber: BPBD, 2025

Dalam kurun waktu 2021 hingga 2024, wilayah Kecamatan Magelang Selatan, Magelang Utara, dan Magelang Tengah mengalami berbagai bencana, termasuk longsor, banjir, puting beliung, kebakaran, serta kejadian lain-lain. Kejadian longsor terjadi secara fluktuatif, dengan jumlah tertinggi pada tahun 2022 sebanyak 12 kasus, kemudian menurun menjadi 7 kasus pada 2023, dan kembali meningkat menjadi 11 kasus pada 2024. Kecamatan Magelang Utara dan Magelang Tengah lebih sering terdampak longsor dibandingkan Kecamatan Magelang Selatan. Banjir merupakan bencana yang relatif jarang terjadi. Dalam periode ini, kasus tertinggi tercatat pada tahun 2022 dengan tiga kejadian, sementara pada tahun 2023 tidak ada kasus banjir sama sekali.

Putting beliung merupakan salah satu bencana yang paling sering terjadi, terutama pada tahun 2021 dengan 34 kejadian. Namun, jumlahnya menurun drastis pada tahun-tahun berikutnya, dengan hanya lima kasus pada tahun 2023 dan tidak ada laporan kejadian pada tahun 2024. Kejadian puting beliung lebih sering terjadi di Kecamatan Magelang Utara dibandingkan kecamatan lainnya. Kebakaran juga menjadi bencana yang cukup sering terjadi, dengan puncaknya pada tahun 2022 sebanyak 40 kasus. Setelah itu, jumlah kejadian kebakaran mengalami penurunan bertahap, dengan hanya 12 kasus pada tahun 2024. Sementara itu, kategori bencana "lain-lain" menunjukkan peningkatan signifikan pada tahun 2024 dengan 39 kasus, jauh lebih tinggi dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Secara keseluruhan, kejadian bencana cenderung menurun pada tahun 2024, kecuali untuk kategori lain-lain yang justru mengalami lonjakan. Kecamatan Magelang Utara dan Magelang Tengah menjadi wilayah yang lebih sering terdampak bencana dibandingkan Kecamatan Magelang Selatan.

Permasalahan lingkungan di Kota Magelang mencakup pencemaran air akibat limbah industri, jasa, dan rumah tangga yang tidak tertangani, serta sampah yang mencemari permukiman juga perlu menjadi perhatian. Selain itu, bencana sosial seperti pertikaian warga, konflik pelajar, dan kriminalitas menjadi tantangan di wilayah perkotaan.

Prioritas pencegahan dan penanganan bencana sosial perlu difokuskan pada wilayah dengan mobilitas tinggi, tingkat sosial ekonomi rendah, serta permukiman padat dan kumuh guna menciptakan lingkungan yang lebih aman dan tertata.

2.1.1.2 Aspek Demografi

Jumlah penduduk Kota Magelang menunjukkan tren meningkat dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 berdasarkan data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Magelang. Pada tahun 2020, penduduk Kota Magelang berjumlah 127.394 jiwa yang meningkat menjadi 128.709 jiwa di tahun 2024.

Kecamatan Magelang Tengah merupakan kecamatan dengan kepadatan penduduk tertinggi (9.506 jiwa/km²). Untuk kelurahan, Kelurahan Rejowinangun Selatan menjadi kelurahan dengan kepadatan penduduk tertinggi (21.513 jiwa/km²) diikuti Kelurahan Panjang (18.254 jiwa/km²) dan Kelurahan Rejowinangun Utara (12.809 jiwa/km²). Jumlah dan tingkat kepadatan penduduk dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 per wilayah kelurahan tersaji dalam tabel berikut:

Tabel 2.6 Jumlah dan Kepadatan Penduduk per Kelurahan di Kota Magelang, 2020-2024

KECAMATAN/ KELURAHAN	TAHUN														
	2020			2021			2022			2023			2024		
	Jumlah (jiwa)	Kepadatan (jiwa/km ²)	Laju Pertumbuhan	Jumlah (jiwa)	Kepadatan (jiwa/km ²)	Laju Pertumbuhan	Jumlah (jiwa)	Kepadatan (jiwa/km ²)	Laju Pertumbuhan	Jumlah (jiwa)	Kepadatan (jiwa/km ²)	Laju Pertumbuhan	Jumlah (jiwa)	Kepadatan (jiwa/km ²)	Laju Pertumbuhan
MAGELANG UTARA	37.524	5.975	-1,28	37.479	5.968	-0,12	37.481	5.959	0,01	37.617	5.980	0,36	37.630	5.983	0,03
Kramat Utara	4.792	4.840	-0,62	4.818	4.867	0,54	4.758	4.806	-1,25	4.709	4.757	-1,03	4.746	4.794	0,79
Kramat Selatan	8.070	5.566	-1,32	8.076	5.570	0,07	8.143	5.577	0,83	8.179	5.602	0,44	8.234	5.640	0,67
Kedungsari	7.344	5.564	-0,89	7.299	5.530	-0,61	7.337	5.517	0,52	7.390	5.556	0,72	7.351	5.527	-0,53
Potrobangsari	8.478	6.280	-1,48	8.478	6.280	-	8.436	6.343	-0,5	8.492	6.385	0,66	8.506	6.395	0,16
Wates	8.840	7.556	-1,71	8.808	7.528	-0,36	8.807	7.464	-0,01	8.847	7.497	0,45	8.793	7.452	-0,61
MAGELANG TENGAH	47.759	9.365	-2,69	47.878	9.388	0,25	48.173	9.390	0,62	48.476	9.450	0,63	48.767	9.506	0,60
Magelang	7.764	6.261	-2,83	7.776	6.271	0,15	7.820	6.306	0,57	7.904	6.374	1,07	7.935	6.399	0,39
Cacaban	8.004	9.416	-2,49	8.052	9.473	0,6	8.090	9.407	0,47	8.159	9.487	0,85	8.240	9.581	0,99
Kemirirejo	5.578	6.486	-3,44	5.567	6.473	-0,2	5.661	6.507	1,69	5.744	6.602	1,47	5.793	6.659	0,85
Rejowinangun Utara	11.873	13.192	-2,64	11.907	13.230	0,29	11.899	12.795	-0,07	11.867	12.760	-0,27	11.912	12.809	0,38
Gelangan	8.145	9.152	-1,38	8.191	9.203	0,56	8.326	9.461	1,65	8.451	9.603	1,5	8.498	9.657	0,56
Panjang	6.395	17.764	-3,81	6.385	17.736	-0,16	6.377	18.220	-0,13	6.351	18.146	-0,41	6.389	18.254	0,60
MAGELANG SELATAN	42.111	5.881	-2,09	41.894	5.851	-0,52	42.013	5.884	0,28	42.171	5.906	0,38	42.312	5.926	0,33
Rejowinangun Selatan	8.292	22.411	-2,65	8.218	22.211	-0,89	8.212	21.611	-0,07	8.225	21.645	0,16	8.175	21.513	-0,61
Tidar Utara	8.127	7.388	-3,19	8.035	7.305	-1,13	8.040	7.376	0,06	8.086	7.418	0,57	8.088	7.420	0,02
Tidar Selatan	5.718	4.332	-1,87	5.690	4.311	-0,49	5.682	4.337	-0,14	5.748	4.388	1,16	5.803	4.430	0,96
Magersari	8.586	5.504	-1,73	8.505	5.452	-0,94	8.503	5.416	-0,02	8.513	5.422	0,12	8.508	5.419	-0,06
Jurangombo Utara	4.184	6.339	-1,65	4.246	6.433	1,48	4.296	6.713	1,18	4.281	6.689	-0,35	4.360	6.813	1,85
Jurangombo Selatan	7.204	3.351	-1,06	7.200	3.349	-0,06	7.280	3.386	1,11	7.318	3.404	0,52	7.378	3.432	0,82
KOTA MAGELANG	127.394	6.871	-2,08	127.251	6.864	-0,11	127.667	6.879	0,33	128.264	6.911	0,47	128.709	6.935	0,35

Sumber: Data Konsolidasi Bersih (DKB)-Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 2025

Selain jumlah penduduk, aspek demografi yang juga mempengaruhi strategi pembangunan daerah adalah jenis kelamin penduduk yang biasanya digambarkan dalam rasio jenis kelamin/sex ratio. Berdasarkan data dari Disdukcapil Kota Magelang maka sex ratio Kota Magelang dari Tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 berada pada kisaran angka 96 s.d 97 artinya sejauh ini komposisi penduduk di Kota Magelang antara penduduk laki-laki dan perempuan masih lebih banyak penduduk berjenis kelamin perempuan, dengan perbandingan rata-rata 100:97 artinya rasio perbandingan penduduk antara laki-laki dan perempuan di Kota Magelang bisa dikatakan cukup seimbang.

Tabel 2.7 Perkembangan Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin dan Tingkat Pertumbuhan Penduduk di Kota Magelang, 2020-2024

Penduduk	2020	2021	2022	2023	2024
Laki-Laki (jiwa)	62.756	62.691	63.023	63.345	63.612
Perempuan (jiwa)	64.638	64.560	64.644	64.919	65.097
Jumlah Total (jiwa)	127.394	127.251	127.667	128.264	128.709

Penduduk	2020	2021	2022	2023	2024
Sex Ratio (%)	97,09	97,11	97,49	97,58	97,72
Laju Pertumbuhan (%)	-2,08	-0,11	0,33	0,47	0,35

Sumber: Data Konsolidasi Bersih (DKB)-Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 2025

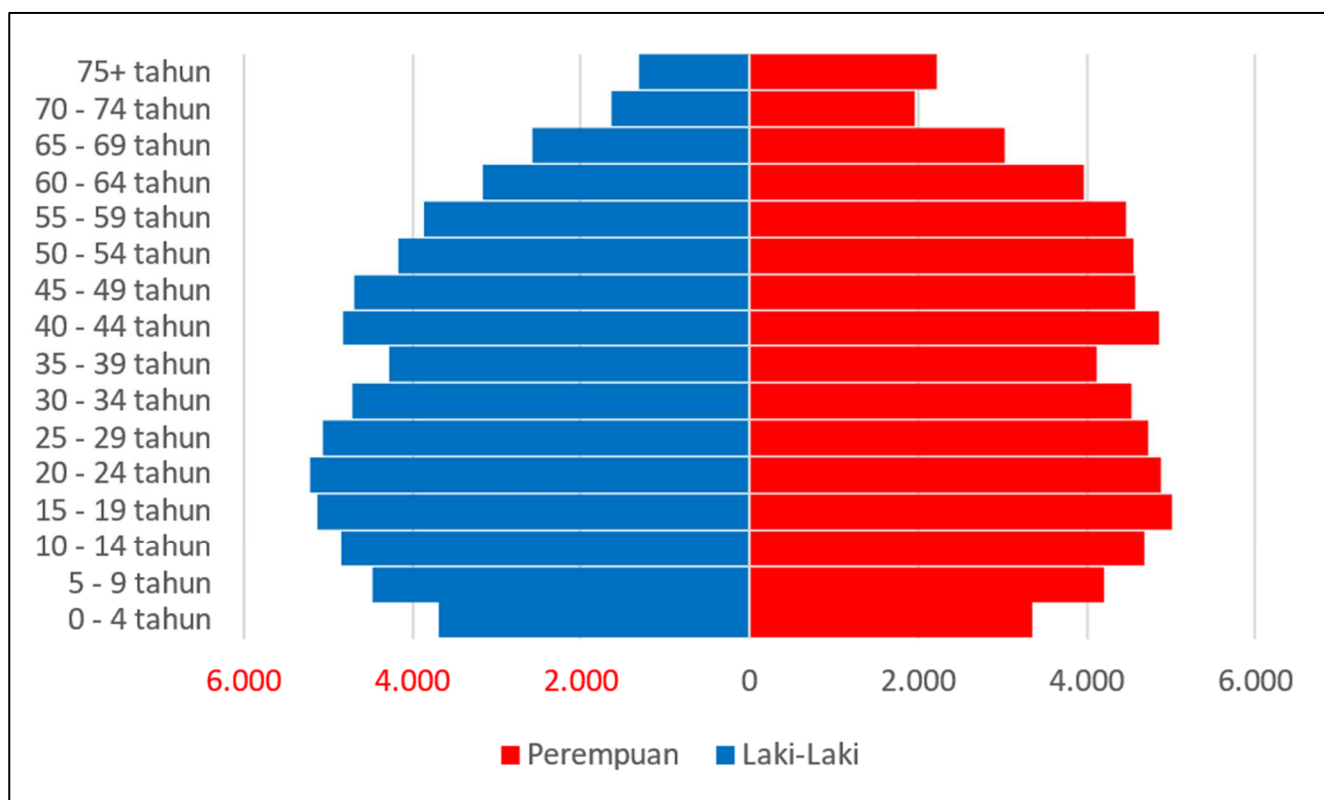
Mencermati aspek demografi Kota Magelang bila dilihat dari kelompok umur, maka Kota Magelang saat ini mengalami bonus demografi. Hal tersebut ditunjukkan dari tingginya angka jumlah penduduk pada usia produktif 15 - 64 tahun sebanyak 90.749 jiwa (70,51%) di tahun 2024. Bonus demografi akan memberikan dampak positif bagi kesejahteraan apabila dikelola dengan baik, namun sebaliknya akan menimbulkan banyak masalah terutama masalah sosial bila pemerintah kurang mampu mengelola dan memanfaatkan peluang potensi tersebut.

Tabel 2.8 Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur di Kota Magelang, 2020-2024

Kelompok Umur	Jumlah Penduduk				
	2020	2021	2022	2023	2024
0 - 4 tahun	7.616	7.622	6.018	7.373	7.046
5 - 9 tahun	8.896	8.691	8.522	8.582	8.669
10 - 14 tahun	9.904	9.823	9.508	9.704	9.525
15 - 19 tahun	10.125	10.121	10.220	10.128	10.135
20 - 24 tahun	9.874	9.804	9.925	10.038	10.075
25 - 29 tahun	9.600	9.795	9.907	9.867	9.780
30 - 34 tahun	8.504	8.624	9.026	9.020	9.239
35 - 39 tahun	9.479	9.128	8.470	8.484	8.403
40 - 44 tahun	9.435	9.566	9.759	9.759	9.696
45 - 49 tahun	9.041	8.936	9.062	9.036	9.250
50 - 54 tahun	8.899	8.982	8.971	8.891	8.708
55 - 59 tahun	8.138	8.135	8.201	8.079	8.319
60 - 64 tahun	6.796	6.825	7.344	7.200	7.144
65 - 69 tahun	4.852	5.002	5.515	5.354	5.605
70 - 74 tahun	2.597	2.659	3.378	3.256	3.582
75+ tahun	3.638	3.538	3.841	3.493	3.533
Jumlah	127.394	127.251	127.667	128.264	128.709

Sumber: Data Konsolidasi Bersih (DKB)-Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 2025

Piramida penduduk tahun 2024 Kota Magelang merupakan piramida stasioner. Kondisi ini menunjukkan jumlah penduduk usia muda hampir seimbang dengan jumlah penduduk usia tua. Kondisi ini dapat disebabkan oleh rendahnya angka kematian dan rendahnya angka kelahiran. Kondisi ini perlu diperhatikan terkait pemberian layanan kepada penduduk usia tua yang akan tumbuh semakin banyak di tahun mendatang.



Gambar 2.11 Piramida Penduduk Kota Magelang, 2024

Sumber: Data Konsolidasi Bersih (DKB)-Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 2025

Mata pencaharian penduduk Kota Magelang cukup beragam. Seperti halnya fenomena yang banyak terjadi di daerah perkotaan, jumlah penduduk bermata pencaharian sebagai petani relatif kecil. Sebagian besar bermata pencaharian sebagai karyawan swasta.

Tabel 2.9 Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencaharian di Kota Magelang, 2021-2024

NO	KETERANGAN	2021		2022		2023		2024	
		L	P	L	P	L	P	L	P
1	TIDAK/BELUM BEKERJA	10.573	9.810	10.345	9.574	10.184	9.356	10.348	9.429
2	MENGURUS RUMAH TANGGA	-	19.587	-	19.585	-	19.684	-	19.698
3	PELAJAR/MAHASISWA	14.211	13.383	14.612	13.621	14.744	13.823	14.813	13.880
4	PENSIUNAN	1.801	1.140	1.805	1.149	1.849	1.179	1.836	1.167
5	PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS)	1.616	1.612	1.557	1.604	1.509	1.584	1.462	1.594
6	TENTARA NASIONAL INDONESIA	1.194	20	1.244	23	1.282	24	1.289	27
7	KEPOLISIAN RI (POLRI)	423	49	437	48	428	47	445	43
8	PERDAGANGAN	263	340	262	315	249	301	245	288
9	PETANI/PEKEBUN	90	44	89	43	92	47	95	48
10	PETERNAK	2	-	2	-	3	-	3	-
11	NELAYAN/PERIKANAN	1	1	1	1	1	1	1	1
12	INDUSTRI	5	3	5	3	5	3	6	3
13	KONSTRUKSI	13	-	14	-	15	-	14	-
14	TRANSPORTASI	13	-	12	-	12	-	10	-

NO	KETERANGAN	2021		2022		2023		2024	
		L	P	L	P	L	P	L	P
15	KARYAWAN SWASTA	16.117	9.408	16.289	9.596	16.490	9.776	16.494	9.811
16	KARYAWAN BUMN	240	156	238	156	230	155	233	160
17	KARYAWAN BUMD	65	33	66	35	69	38	70	41
18	KARYAWAN HONORER	112	109	111	107	107	107	108	108
19	BURUH HARIAN LEPAS	6.172	2.195	6.213	2.144	6.332	2.139	6.384	2.115
20	BURUH TANI/PERKEBUNAN	40	23	39	21	39	19	36	17
21	BURUH NELAYAN/PERIKANAN	3	1	3	1	2	1	1	1
22	BURUH PETERNAKAN	3	-	3	-	3	-	2	-
23	PEMBANTU RUMAH TANGGA	1	88	1	85	1	82	1	79
24	TUKANG CUKUR	6	-	6	-	6	-	6	-
25	TUKANG LISTRIK	3	-	2	-	2	-	2	-
26	TUKANG BATU	42	-	43	-	38	-	36	-
27	TUKANG KAYU	8	1	8	1	8	1	8	1
28	TUKANG SOL SEPATU	2	-	2	-	2	-	2	-
29	TUKANG LAS/PANDAI BESI	13	-	12	-	12	-	12	-
30	TUKANG JAHIT	11	28	13	26	11	28	11	27
31	TUKANG GIGI	-	-	-	-	-	-	-	-
32	PENATA RIAS	-	14	-	11	-	12	-	12
33	PENATA BUSANA	-	-	-	-	-	-	-	-
34	PENATA RAMBUT	1	5	1	4	1	4	1	4
35	MEKANIK	41	-	39	-	40	-	38	-
36	SENIMAN	35	4	37	4	36	4	36	5
37	TABIB	-	-	-	-	-	-	2	3
38	PARAJI	1	1	1	1	1	1	1	1
39	PERANCANG BUSANA	-	2	-	2	-	2	-	2
40	PENTERJEMAH	2	2	1	2	1	2	1	2
41	IMAM MASJID	1	-	1	-	1	-	1	-
42	PENDETA	38	7	39	7	39	7	38	8
43	PASTOR	8	-	8	-	9	-	9	-
44	WARTAWAN	8	1	8	1	9	1	7	-
45	USTADZ/MUBALIGH	6	1	7	1	7	1	7	1
46	JURU MASAK	2	3	2	3	2	3	2	3
47	PROMOTOR ACARA	-	-	-	-	-	-	-	-
48	ANGGOTA DPR RI	-	-	-	-	-	-	-	-
49	ANGGOTA DPD RI	-	-	-	-	-	-	-	-
50	ANGGOTA BPK	1	-	1	-	-	-	-	-
51	PRESIDEN	-	-	-	-	-	-	-	-
52	WAKIL PRESIDEN	-	-	-	-	-	-	-	-
53	ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI	-	-	-	-	-	-	-	-
54	ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN	-	-	-	-	-	-	-	-
55	DUTA BESAR	-	-	-	-	-	-	-	-
56	GUBERNUR	-	-	-	-	-	-	-	-

NO	KETERANGAN	2021		2022		2023		2024	
		L	P	L	P	L	P	L	P
57	WAKIL GUBERNUR	-	-	-	-	-	-	-	-
58	BUPATI	-	-	-	-	-	-	-	-
59	WAKIL BUPATI	-	-	-	-	-	-	-	-
60	WALIKOTA	1	-	1	-	1	-	1	-
61	WAKIL WALIKOTA	1	-	1	-	1	-	-	-
62	ANGGOTA DPRD PROP.	1	-	1	-	1	-	1	-
63	ANGGOTA DPRD KAB./KOTA	17	5	17	5	17	5	17	4
64	DOSEN	58	70	60	78	55	73	61	72
65	GURU	325	885	313	875	306	888	302	907
66	PILOT	-	-	-	-	-	-	-	-
67	PENGACARA	9	1	9	1	8	1	9	1
68	NOTARIS	4	8	4	9	4	9	5	10
69	ARSITEK	5	2	6	3	6	2	6	2
70	AKUNTAN	-	1	-	1	-	1	-	1
71	KONSULTAN	4	-	5	-	3	-	3	-
72	DOKTER	65	102	68	112	72	121	76	127
73	BIDAN	-	68	-	72	-	72	-	76
74	PERAWAT	57	224	60	233	63	236	69	246
75	APOTEKER	2	18	2	18	2	16	2	17
76	PSIKIATER/PSIKOLOG	-	4	-	3	-	3	-	3
77	PENYIAR TELEVISI	-	-	-	-	-	-	-	-
78	PENYIAR RADIO	-	3	-	3	-	3	-	3
79	PELAUT	42	1	40	1	41	-	40	-
80	PENELITI	-	-	1	-	1	-	1	-
81	SOPIR	231	-	230	-	225	-	218	-
82	PIALANG	-	-	-	-	-	-	-	-
83	PARANORMAL	-	-	-	-	-	-	-	-
84	PEDAGANG	889	1.003	897	990	881	977	875	958
85	PERANGKAT DESA	1	-	1	-	1	-	2	-
86	KEPALA DESA	-	-	-	-	-	-	-	-
87	BIARAWAN/BIARAWATI	-	13	-	11	-	12	-	10
88	WIRASWASTA	7.598	3.984	7.720	4.052	7.778	4.065	7.800	4.077
89	ANGGOTA LEMBAGA TINGGI LAIN	194	97	8	2	7	2	7	2
90	ARTIS	-	-	-	-	1	-	1	-
91	ATLIT	-	-	-	-	-	-	-	-
92	CHEFF	-	-	-	-	-	-	-	-
93	MANAJER	-	-	-	-	-	-	-	-
94	TENAGA TATA USAHA	-	-	-	-	-	-	-	-
95	OPERATOR	-	-	-	-	-	-	-	-
96	PEKERJA PENGOLAHAN KERAJINAN	-	-	-	-	-	-	-	-
97	TEKNISI	-	-	-	-	-	-	-	-
98	ASISTEN AHLI	-	-	-	-	-	-	-	-

NO	KETERANGAN	2021		2022		2023		2024	
		L	P	L	P	L	P	L	P
99	PEKERJAAN LAINNYA	-	-	-	1	-	1	-	2
	TOTAL	62.691	64.560	63.023	64.644	63.345	64.919	63.612	65.097

Sumber: Data Konsolidasi Bersih (DKB)-Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 2025

Kota Magelang memiliki karakter sebagai kota yang majemuk, yang terdiri dari berbagai macam etnis, suku, budaya, agama dan perbedaan lain. Namun demikian kondisi Kota Magelang relatif kondusif. Masyarakat hidup berdampingan secara damai dalam keanekaragaman agama yang mereka peluk. Kebebasan beragama dan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing menjadi prioritas Pemerintah Kota Magelang dalam menjamin hak asasi masyarakat dalam berkeyakinan. Kenyamanan hidup berdampingan dalam beragam perbedaan, menunjukkan kedewasaan masyarakat Kota Magelang dalam kehidupan bertoleransi. Statistik penduduk Kota Magelang berdasarkan agama dan keyakinan yang dipeluk disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 2.10 Penduduk Berdasarkan Agama dan Keyakinan yang Dipeluk di Kota Magelang, 2020-2024

Agama/ Keyakinan	2020	2021	2022	2023	2024
Islam	108.806	108.884	109.493	110.209	110.900
Kristen	11.478	11.337	11.243	11.166	11.008
Katolik	6.440	6.376	6.293	6.261	6.174
Hindu	108	107	108	103	107
Budha	545	530	514	509	505
Konghucu	6	6	5	5	3
Lainnya	11	11	11	11	12
Jumlah	127.394	127.251	127.667	128.264	128.709

Sumber: Data Konsolidasi Bersih (DKB)-Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 2025

Dilihat dari pendidikan terakhir yang ditamatkan oleh penduduk Kota Magelang, mayoritas penduduk merupakan tamatan SLTA/ sederajat, diikuti dengan tamatan SLTP/ sederajat. Proporsi penduduk Kota Magelang menurut pendidikan disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.11 Pendidikan Penduduk Kota Magelang, 2021-2024

NO	PENDIDIKAN	2021		2022		2023		2024	
		L	P	L	P	L	P	L	P
1	TIDAK/BELUM SEKOLAH	9.489	9.260	9.355	9.075	9.229	8.892	9.412	8.966
2	BELUM TAMAT SD/ SEDERAJAT	6.171	5.895	6.135	5.906	6.003	5.853	5.967	5.723
3	TAMAT SD/ SEDERAJAT	8.308	10.759	8.184	10.416	8.090	10.283	7.966	10.064
4	SLTP/ SEDERAJAT	9.213	9.553	9.103	9.363	9.121	9.367	9.197	9.470
5	SLTA/ SEDERAJAT	21.214	19.706	21.688	20.088	22.122	20.363	22.158	20.401
6	DIPLOMA I/II	179	258	194	270	205	279	204	277
7	AKADEMI / DIPLOMA III / S.MUDA	1.680	2.459	1.681	2.519	1.709	2.568	1.716	2.648

NO	PENDIDIKAN	2021		2022		2023		2024	
		L	P	L	P	L	P	L	P
8	DIPLOMA IV/STRATA I	5.971	6.284	6.178	6.584	6.348	6.868	6.463	7.074
9	STRATA II	454	378	490	413	502	433	511	461
10	STRATA III	12	8	15	10	16	13	18	13
	TOTAL	62.691	64.560	63.023	64.644	63.345	64.919	63.612	65.097

Sumber: Data Konsolidasi Bersih (DKB)-Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 2025

2.1.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

2.1.2.1 Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

2.1.2.1.1 Pertumbuhan Ekonomi

Pada tahun 2024 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kota Magelang atas dasar harga konstan (ADHK) mencapai 7.668,79 miliar rupiah, meningkat sebesar 403,87 miliar rupiah dibandingkan tahun sebelumnya. Maka pada tahun 2024 terjadi pertumbuhan ekonomi sebesar 5,56 persen di Kota Magelang.

Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, perekonomian di Kota Magelang tahun ini sedikit berbeda dengan Jawa Tengah dan Indonesia. Perekonomian Indonesia dan Jawa Tengah tahun ini mengalami perlambatan dibanding tahun lalu, namun hal itu tidak terjadi di Kota Magelang. Dibanding tahun 2023, pertumbuhan ekonomi di Kota Magelang justru mengalami peningkatan. Hal ini menunjukkan bahwa geliat ekonomi di Kota Magelang lebih baik dibanding kondisi Jawa Tengah dan Indonesia.



Gambar 2.12 Pertumbuhan Ekonomi Kota Magelang, Jawa Tengah, dan Indonesia (Persen), 2020 - 2024

Sumber: BPS, 2024

Kinerja perekonomian di Kota Magelang terlihat dari capaian pertumbuhan ekonomi dibandingkan dengan target yang tertuang di dokumen perencanaan. Secara umum kinerja perekonomian di Kota Magelang sejak tahun 2018 menunjukkan kinerja yang relatif baik, kecuali pada tahun 2020 dan 2021 yang merupakan dampak

dari Pandemi Covid 19. Realisasi pertumbuhan ekonomi di Kota Magelang pada tahun 2024 mampu melampaui target yang ditetapkan dalam RPJMD 2021-2026.

Tabel 2.12 Target RKPD dan Capaian Pertumbuhan Ekonomi Kota Magelang (Persen), 2020-2024

Tahun	Target*	Realisasi**	Keterangan
2020	4,96 - 5,46	-2,45	Tidak Tercapai
2021	5,08 - 5,58	3,20	Tidak tercapai
2022	4,35 - 5,05	5,77	Tercapai
2023	5,05 - 5,14	5,45	Tercapai
2024	5,14 - 5,36	5,56	Tercapai

Sumber Data:

*) RPJMD 2016-2021, RPJMD 2021-2026,

**) BPS Provinsi Jawa Tengah, 2024

Perekonomian Kota Magelang pada tahun 2024 tercatat mengalami pertumbuhan positif, yaitu sebesar 5,56 persen. Pertumbuhan tersebut lebih tinggi dibandingkan capaian pada tahun sebelumnya yang tumbuh sebesar 5,45 persen. Laju pertumbuhan ekonomi meningkat seiring dengan meningkatnya aktivitas pada beberapa lapangan usaha. Dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi kota-kota di Provinsi Jawa Tengah, Kota Magelang menempati urutan ketiga setelah Kota Semarang dan Kota Surakarta.

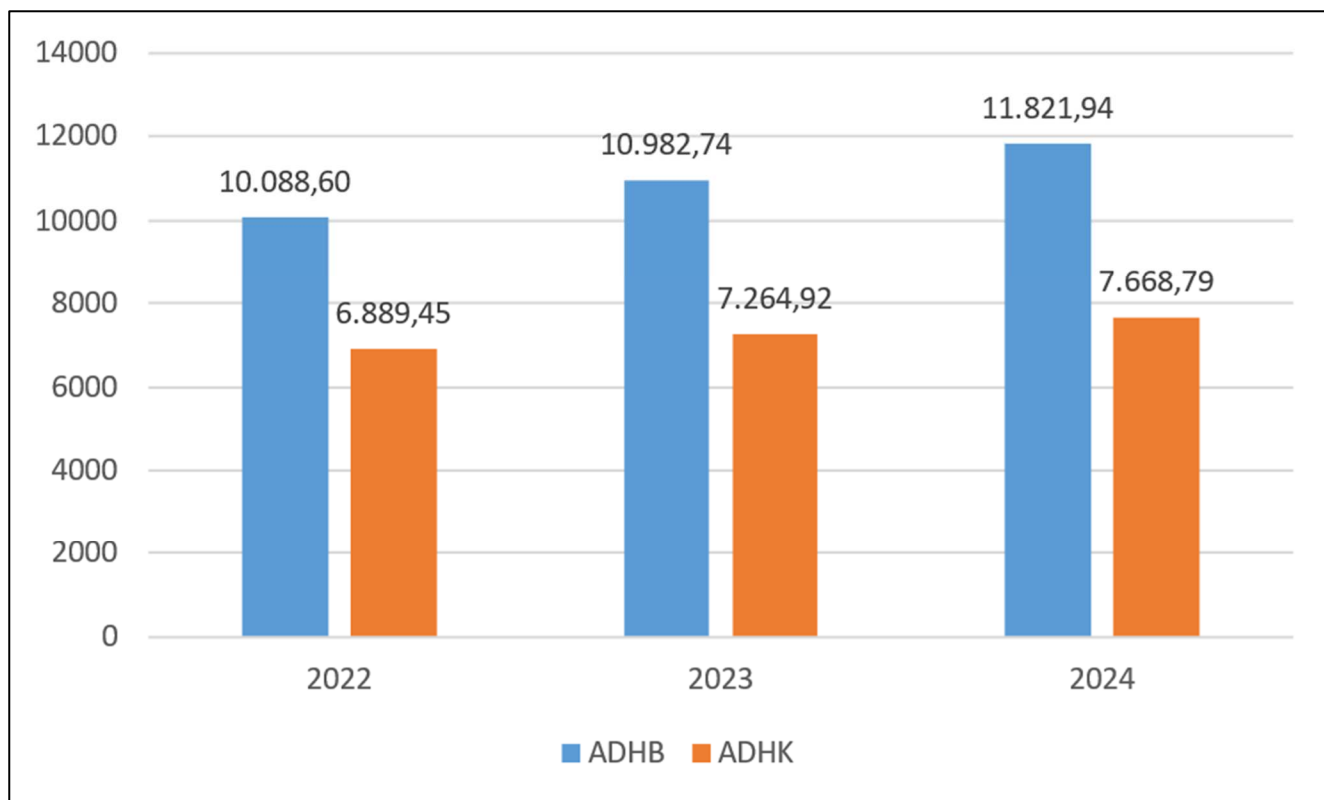
Tabel 2.13 Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Kota Magelang dengan Kota-kota di Jawa Tengah, Provinsi Jawa Tengah, dan Indonesia (Persen), 2019-2023

Wilayah Kota	2020	2021	2022	2023**	2024*
Kota Magelang	-2,45	3,20	5,77	5,45	5,56
Kota Surakarta	-1,76	4,01	6,25	5,57	5,61
Kota Salatiga	-1,68	3,35	5,53	5,34	5,37
Kota Semarang	-1,85	5,16	5,73	5,79	5,62
Kota Pekalongan	-1,87	3,59	5,76	5,44	5,34
Kota Tegal	-2,29	3,12	5,16	5,01	5,22
Jawa Tengah	-2,65	3,33	5,31	4,98	4,95
Indonesia	-2,07	3,70	5,31	5,05	5,03

Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, 2024; * Angka Sementara; ** Angka Sangat Sementara

2.1.2.1.2 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Harga Berlaku

Nilai PDRB Kota Magelang atas dasar harga berlaku pada tahun 2024 mencapai 11.821,94 miliar rupiah. Secara nominal, nilai PDRB ini meningkat 833,83 miliar rupiah dibandingkan dengan tahun 2023 yang mencapai 10.988,11 miliar rupiah. Naiknya nilai PDRB ini dipengaruhi oleh meningkatnya produksi di seluruh kategori seiring dengan mulai normalnya aktivitas perekonomian secara umum sejak tahun 2022 dan juga pengaruh kenaikan harga.



Gambar 2.13 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kota Magelang Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) dan Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) (Miliar Rupiah), 2020-2024

Sumber: BPS Kota Magelang, 2024

Dilihat dari sumber pertumbuhan PDRB tahun 2024, penyumbang pertumbuhan terbesar adalah lapangan usaha informasi dan komunikasi sebesar 0,72 persen. Selanjutnya lapangan usaha Perdagangan besar dan eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 0,68 persen. Lapangan usaha Penyediaan akomodasi dan makan minum serta Konstruksi memberikan kontribusi masing-masing sebesar 0,67 persen. Industri pengolahan memberikan sumbangan terhadap pertumbuhan ekonomi sebesar 0,60 persen.

Tabel 2.14 Sumber Pertumbuhan PDRB Kota Magelang (Persen) Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) (Persen), 2020-2024

Kategori	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
A	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	0,01	0,01	-0,01	0,02	0,02
B	Pertambangan dan Penggalian					
C	Industri Pengolahan	-0,03	0,69	0,51	0,68	0,60
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0,01	0,04	0,01	0,02	0,02
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F	Konstruksi	-0,30	0,52	0,14	0,50	0,67
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	-0,54	0,82	0,35	0,74	0,68
H	Transportasi dan Pergudangan	-2,16	0,17	2,93	0,36	0,47
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	-0,58	0,26	0,90	0,72	0,67
J	Informasi dan Komunikasi	1,23	0,19	0,20	0,81	0,72

Kategori	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	0,06	0,04	0,02	0,15	0,13
L	Real Estate	-0,02	0,08	0,14	0,20	0,22
M, N	Jasa Perusahaan	-0,02	0,01	0,01	0,02	0,02
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	-0,16	0,17	0,12	0,55	0,57
P	Jasa Pendidikan	-0,01	0,16	0,07	0,25	0,41
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,24	0,03	0,04	0,28	0,25
R, S, T, U	Jasa Lainnya	-0,16	0,02	0,33	0,15	0,13
	PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	-2,45	3,20	5,77	5,45	5,56

Sumber: BPS Kota Magelang, 2024

Sebagai penyeimbang PDRB Lapangan Usaha, Komponen PDRB Pengeluaran pun tumbuh menguat. Hampir semua komponen PDRB Pengeluaran menguat di tahun ini, kecuali konsumsi rumah tangga yang sedikit melambat dengan pertumbuhan hanya sebesar 5,02 persen, lebih rendah dibanding pertumbuhan tahun sebelumnya (5,25 persen). Konsumsi Lembaga Non Profit yang melayani Rumah Tangga (LNPRT) merupakan komponen dengan pertumbuhan terkuat yaitu sebesar 16,42 persen, dua kali lipat dibanding pertumbuhan tahun lalu. Adanya event pemilu legislatif dan pemilu presiden diduga kuat menjadi salah satu penyebab melesatnya pertumbuhan konsumsi LNPRT. Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) tumbuh 5,31 persen, lebih tinggi dibanding pertumbuhan tahun sebelumnya. Begitu juga Konsumsi Pemerintah yang tumbuh menguat sebesar 2,92 persen.

Tabel 2.15 PDRB Kota Magelang Menurut Pengeluaran ADHB (dalam Miliar Rupiah), 2019 - 2023

Komponen Pengeluaran	2020	2021	2022	2023*	2024**
Konsumsi Rumah Tangga	4.987,23	5.158,67	5.666,98	6.169,83	6.637,72
Konsumsi LNPRT	119,07	124,67	139,62	160,98	188,34
Konsumsi Pemerintah	1.552,14	1.590,17	1.620,89	1.720,19	1.792,83
PMTB	4.328,13	4.678,08	4.929,93	5.206,11	5.663,96
Perubahan Inventori	88,25	87,95	107,75	120,16	97,34
Net Ekspor	-2.361,66	-2.460,79	-2.376,57	-2.394,53	-2.558,25

Sumber: BPS Kota Magelang, 2024

* Angka Sementara

** Angka Sangat Sementara

Tabel 2.16 Pembentukan Modal Tetap Bruto terhadap PDRB, 2019-2023

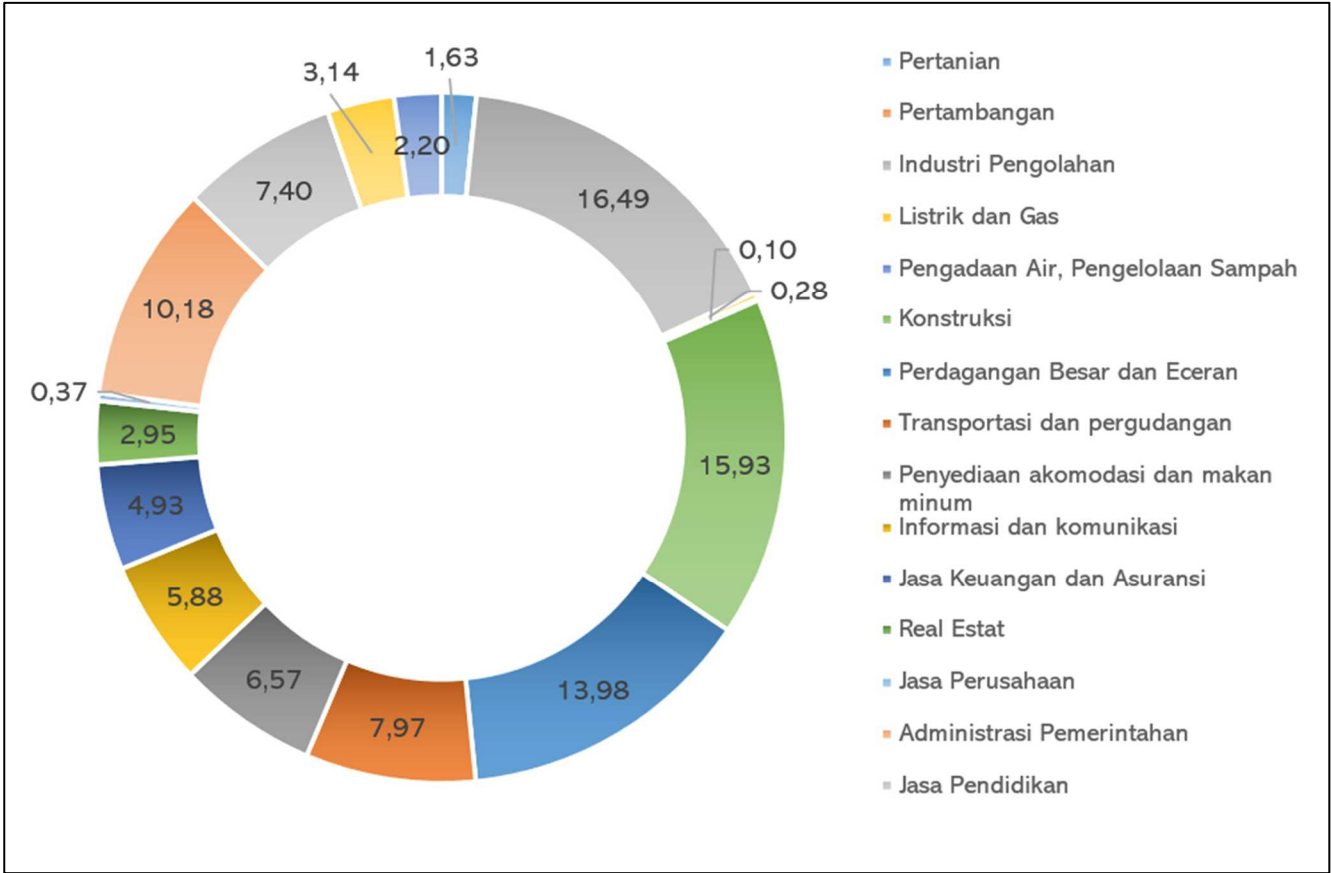
Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
Pembentukan Modal Tetap Bruto terhadap PDRB	51,88%	49,67%	50,97%	48,94%	47,40%

Sumber: BPS Kota Magelang, 2024

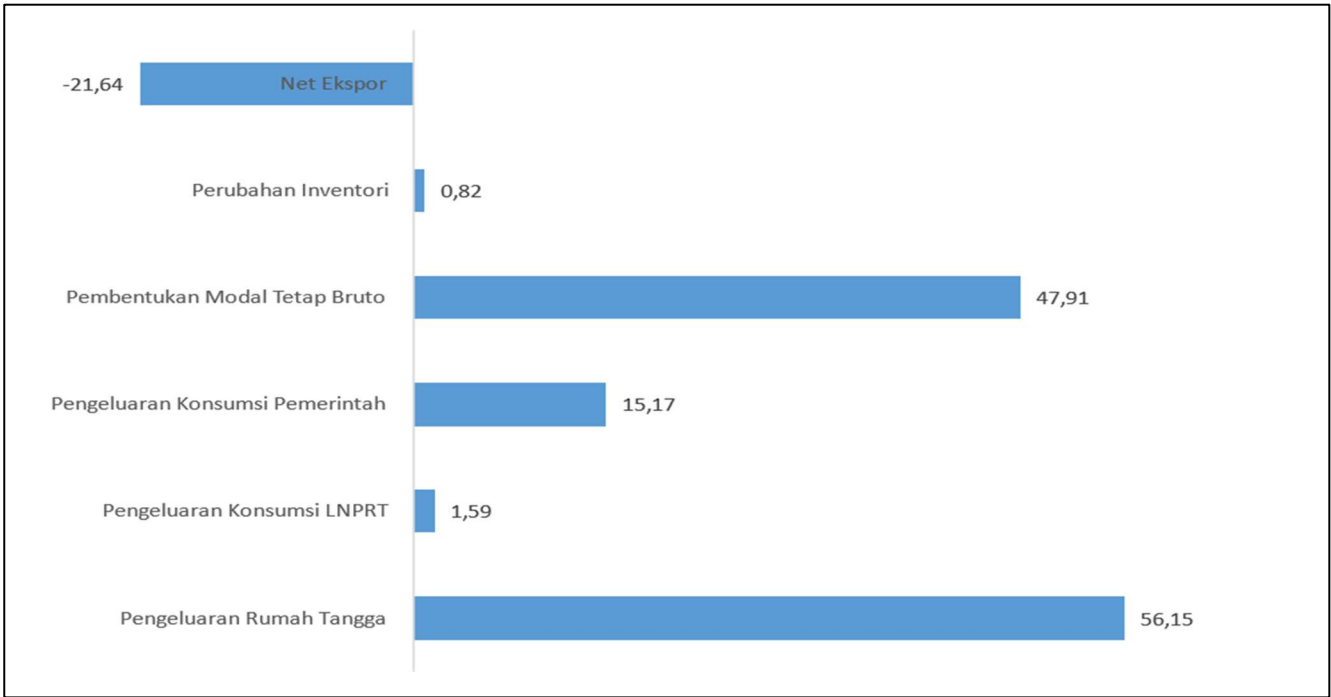
2.1.2.1.3 Kontribusi Lapangan Usaha Perekonomian terhadap PDRB

Struktur PDRB Kota Magelang menurut lapangan usaha atas dasar harga berlaku pada tahun 2024 tidak berbeda dengan tahun sebelumnya. Perekonomian Kota Magelang masih didominasi oleh empat lapangan usaha yaitu Lapangan Usaha Industri Pengolahan sebesar 16,49 persen; diikuti oleh konstruksi sebesar 15,93 persen; Perdagangan Besar-Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 13,98 persen; dan Administrasi

Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib sebesar 10,18 persen. Sementara itu peranan lapangan usaha yang lainnya kurang dari 8 persen.



Gambar 2.14 Struktur Perekonomian Kota Magelang (ADHB) dari Sisi Lapangan Usaha (Persen), 2024
Sumber: BPS Kota Magelang, 2024

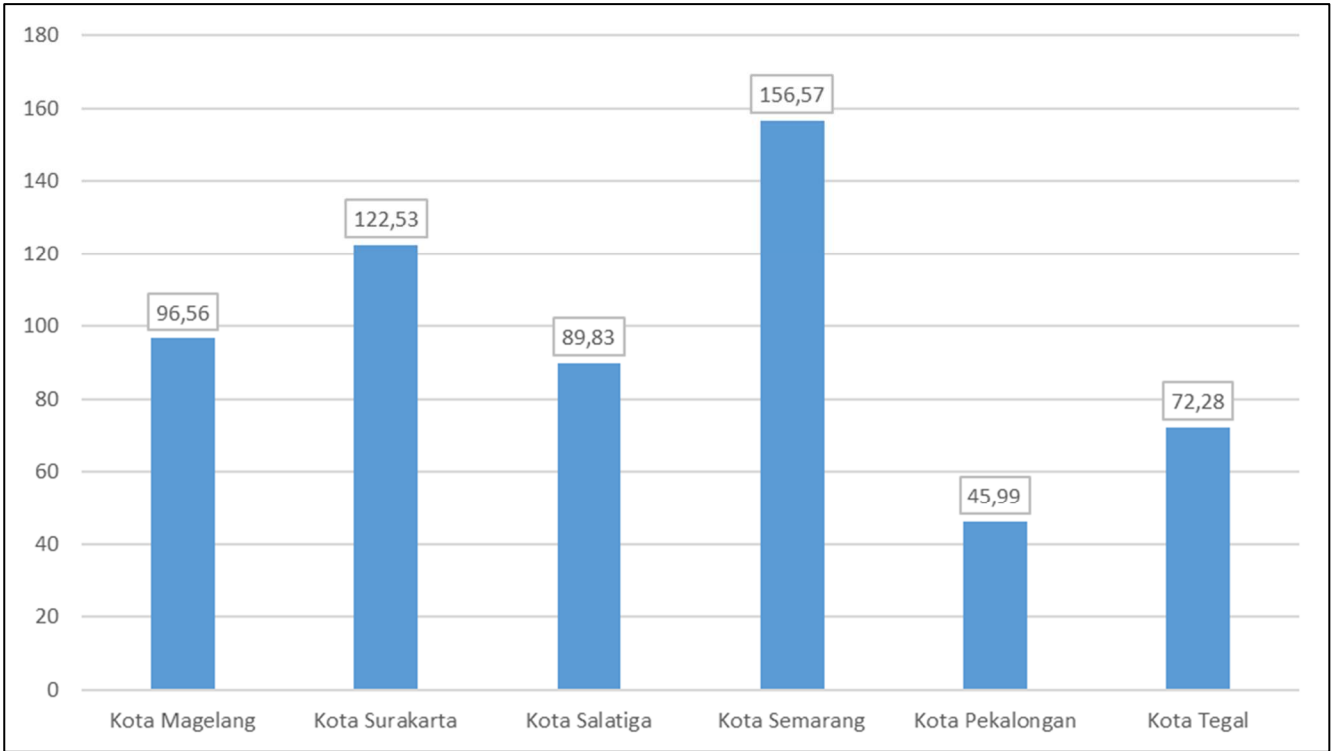


Gambar 2.15 Distribusi Persentase Kota Magelang dari Sisi Pengeluaran, 2024
Sumber: BPS Kota Magelang, 2024

Tahun 2024 dari sisi penggunaan, lebih dari separuh (56,15 persen) produk yang dikonsumsi di Kota Magelang digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi akhir rumah tangga, sebagiannya lagi digunakan untuk pembentukan modal tetap bruto (PMTB) sebesar 47,91 persen. Sementara itu struktur pengeluaran dari konsumsi pemerintah tercatat hanya sebesar 15,17 persen. Porsi net ekspor dalam PDRB Kota Magelang tahun 2024 sebesar -21,64 persen, masih mengindikasikan neraca perdagangan Kota Magelang yang defisit, mengingat sebagian besar permintaan domestik masih dipenuhi melalui impor dari daerah lain.

2.1.2.1.4 PDRB Perkapita

Nilai PDRB per kapita Kota Magelang atas dasar harga berlaku sejak tahun 2020 hingga 2024, secara nominal terus mengalami kenaikan. Sejalan dengan peningkatan yang terjadi pada perekonomian pada tahun 2024, nilai PDRB per kapita pada tahun ini juga meningkat dibandingkan tahun sebelumnya. Nilai tersebut tercatat sebesar 96,56 juta rupiah, meningkat sekitar 6,6 juta rupiah dibandingkan tahun sebelumnya. Kenaikan angka PDRB per kapita yang cukup tinggi ini sejalan dengan pulihnya aktivitas perekonomian dan juga disebabkan karena adanya faktor inflasi. Nilai PDRB per kapita secara riil (berdasarkan harga konstan 2010) selama periode 2020-2024 juga mengalami peningkatan. Meski sebenarnya sempat mengalami penurunan pada tahun 2020 akibat pandemi covid-19 namun perlahan meningkat . Tercatat nilai PDRB per kapita pada tahun 2020 sebesar 51,94 juta rupiah meningkat menjadi 62,64 juta rupiah pada tahun 2024. Besarnya PDRB per kapita Kota Magelang di tahun 2024 menempati peringkat ke-3 terbesar di antara wilayah perkotaan se-Jawa Tengah di bawah Kota Semarang (Rp. 156,57 juta per tahun) dan Kota Surakarta (Rp. 122,53 juta per tahun).



Gambar 2.16 PDRB per Kapita 6 Kota di Jawa Tengah (Juta Rupiah/tahun), 2024
Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, 2024

Tabel 2.17 PDRB per Kapita (Ribu Rupiah/tahun) Kota Magelang, 2020 - 2024

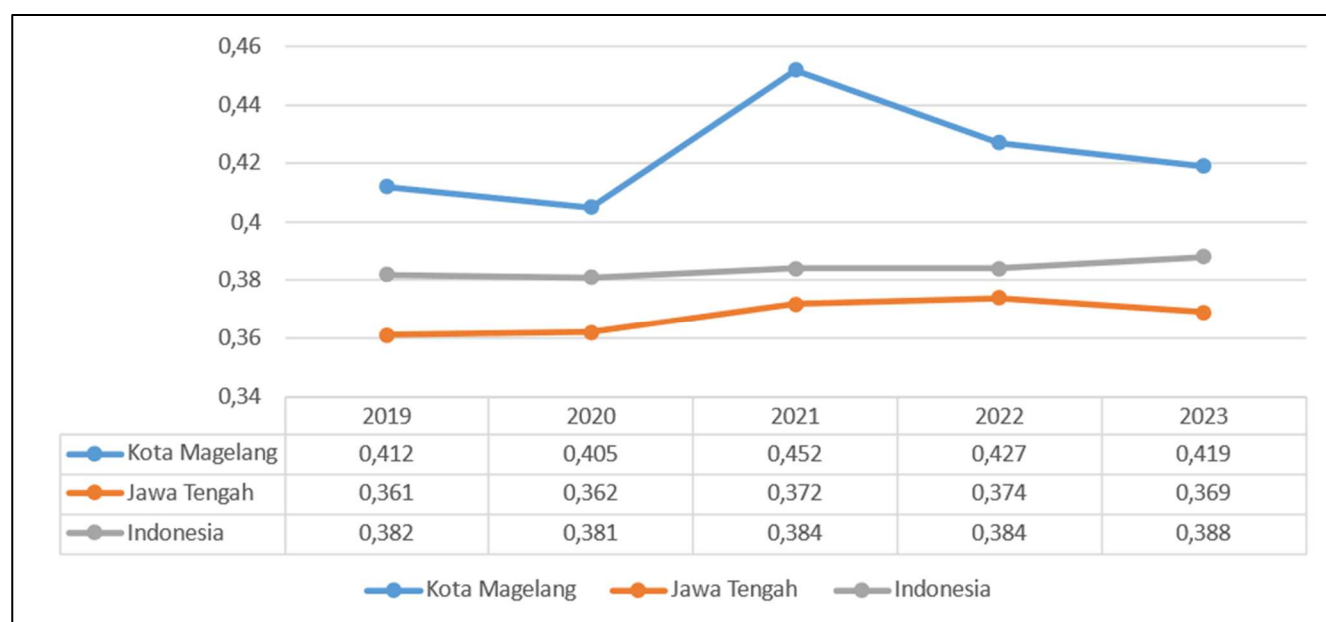
Uraian	2020	2021	2022	2023*	2024**
PDRB per Kapita ADHB	71,70	75,49	82,66	89,96	96,56
- Perkembangan	-1,03	5,29	9,49	8,77	7,34

Uraian	2020	2021	2022	2023*	2024**
PDRB per Kapita ADHK	51,94	53,58	56,53	59,48	62,64
- Perkembangan	-2,42	3,15	5,52	5,21	5,31

Sumber: BPS Kota Magelang, 2024

2.1.2.1.5 Gini Ratio

Gini Ratio Kota Magelang pada tahun 2023 sebesar 0,419 poin. Capaian tersebut lebih tinggi 0,05 poin dari Jawa Tengah dan lebih tinggi 0,031 poin dari Nasional. Selanjutnya jika dilihat dalam kurun waktu 2019-2023, gini ratio Kota Magelang terus mengalami fluktuasi meskipun tetap berada pada kisaran 0,4 poin. Dalam kurun waktu tersebut pun *gini ratio* Kota Magelang selalu lebih tinggi daripada Provinsi Jawa Tengah maupun Nasional.



Gambar 2.17 *Gini Ratio Kota Magelang, Provinsi Jawa Tengah, dan Nasional, 2019-2023*

Sumber: https://sepakat.bappenas.go.id/pk-analisis/analisis/modul/5/kemiskinan_dan_ketimpangan

Di sisi lain, jika dilihat dari distribusi pengeluaran berdasarkan kriteria Bank Dunia, persentase pengeluaran pada kelompok 40% penduduk terendah berada di angka 16,07% pada tahun 2023. Bila persentase pengeluaran pada kelompok 40% penduduk terbawah berada pada angka 12-17%, maka dikategorikan sebagai ketimpangan sedang. Oleh karena itu, dalam kurun waktu 2019-2023, berdasarkan distribusi pengeluaran mengacu kriteria Bank Dunia ketimpangan Kota Magelang berada pada klasifikasi sedang.

Tabel 2.18 *Distribusi Pengeluaran Berdasarkan Kriteria Bank Dunia Kota Magelang, 2019-2023*

Tahun	Distribusi Pengeluaran Berdasarkan Kriteria Bank Dunia
2019	15,17
2020	16,26
2021	14,90
2022	16,24
2023	16,07

Sumber: BPS Jawa Tengah, 2024

2.1.2.2 Fokus Kesejahteraan Sosial

2.1.2.2.1 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Capaian pembangunan manusia di suatu wilayah diukur dengan indeks komposit yang dinamakan dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). IPM dibentuk oleh 3 dimensi dasar yaitu dimensi umur panjang dan sehat, dimensi pengetahuan, dan dimensi standar hidup layak. Dimensi umur panjang dan sehat diukur menggunakan indikator Umur Harapan Hidup (*expectancy of life at birth*) yang menghasilkan Indeks Kesehatan. Dimensi pengetahuan diukur dengan indikator Rata-rata Lama Sekolah (*mean years of schooling*) penduduk usia 25 tahun ke atas dan indikator Harapan Lama Sekolah (*expected years of schooling*) dari penduduk usia 7 tahun ke atas yang keduanya menghasilkan indeks pengetahuan. Dimensi standar hidup layak diukur dengan indikator pengeluaran perkapita yang disesuaikan (*purchasing power parity*) yang menghasilkan indeks pendapatan.

IPM Kota Magelang pada tahun 2024 tercatat sebesar 82,15, mengalami peningkatan 0,98 poin atau tumbuh 1,21 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Dari segi capaian dan pertumbuhan, IPM Kota Magelang tahun 2024 (pertumbuhan 1,21 persen) tetap berada di atas IPM Jawa Tengah (pertumbuhan 0,65 persen) maupun IPM Nasional (pertumbuhan 0,85 persen). Jika dibandingkan dengan kota-kota lain di Jawa Tengah, laju pertumbuhan IPM Kota Magelang tahun 2024 secara umum lebih unggul. Selama periode lima tahun terakhir (2020-2024), pertumbuhan IPM Kota Magelang mencapai 4,00 persen, yang merupakan angka tertinggi dibandingkan kota-kota lain di Jawa Tengah serta melebihi pertumbuhan IPM Jawa Tengah dan Nasional dalam periode yang sama.

Tabel 2.19 Perbandingan IPM Kota Magelang dengan Kota-Kota di Jawa Tengah, 2020-2024

Nama Daerah	2020	2021	2022	2023	2024	Pertumbuhan 2020-2024
Kota Magelang	78,99	79,43	80,39	81,17	82,15	4,00
Kota Surakarta	82,21	82,62	83,08	83,54	84,41	2,68
Kota Salatiga	83,14	83,60	84,35	84,99	85,72	3,10
Kota Semarang	83,05	83,55	84,08	84,43	85,24	2,64
Kota Pekalongan	74,98	75,40	75,90	76,71	77,22	2,99
Kota Tegal	75,14	75,59	76,21	77,06	77,43	3,05
Jawa Tengah	71,88	72,17	72,80	73,39	73,87	2,77
Indonesia	72,81	73,16	73,77	74,39	75,02	3,04

Sumber: BPS, 2023

Berdasarkan kategorinya, pembangunan manusia di Kota Magelang tahun 2024 telah mencapai tingkat "sangat tinggi," dengan IPM sebesar 82,15. Meskipun demikian, Kota Magelang tetap berada di peringkat keempat tertinggi di Jawa Tengah, berada di bawah Kota Salatiga, Kota Semarang, dan Kota Surakarta. Kenaikan IPM pada tahun ini, meski signifikan, belum cukup untuk mengubah posisi relatif Kota Magelang dibandingkan dengan kabupaten/kota lainnya di Jawa Tengah.

Pertumbuhan IPM Kota Magelang tahun 2024 yang mencapai 1,21 persen merupakan peningkatan yang signifikan dibandingkan tahun sebelumnya. Kenaikan ini terjadi secara merata di semua dimensi pembangunan manusia, yang terlihat dari peningkatan seluruh indikator penyusun IPM, yaitu umur harapan hidup, rata-rata lama sekolah, harapan lama sekolah, dan pengeluaran per kapita. Hal ini menunjukkan bahwa program pembangunan yang dilaksanakan berhasil meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan.

Tabel 2.20 Realisasi Indikator Pembentuk IPM Kota Magelang, Jawa Tengah dan Indonesia, 2022-2023

Indikator	Kota Magelang			Jawa Tengah			Indonesia		
	2023	2024	Pertumbuhan	2023	2024	Pertumbuhan	2023	2024	Pertumbuhan
Umur Harapan Hidup Saat Lahir (tahun)	77,22	77,54	0,41	74,69	74,91	0,29	73,93	74,15	0,30
Rata-rata Lama Sekolah (tahun)	11,20	11,43	2,05	8,01	8,02	0,12	8,77	8,85	0,91
Harapan Lama Sekolah (tahun)	14,40	14,62	1,53	12,85	12,86	0,08	13,15	13,21	0,46
Pengeluaran Per Kapita Disesuaikan (ribu rupiah)	13.175	13.619	3,37	11.835	12.276	3,73	11.879	12.341	3,89

Sumber: BPS, 2024

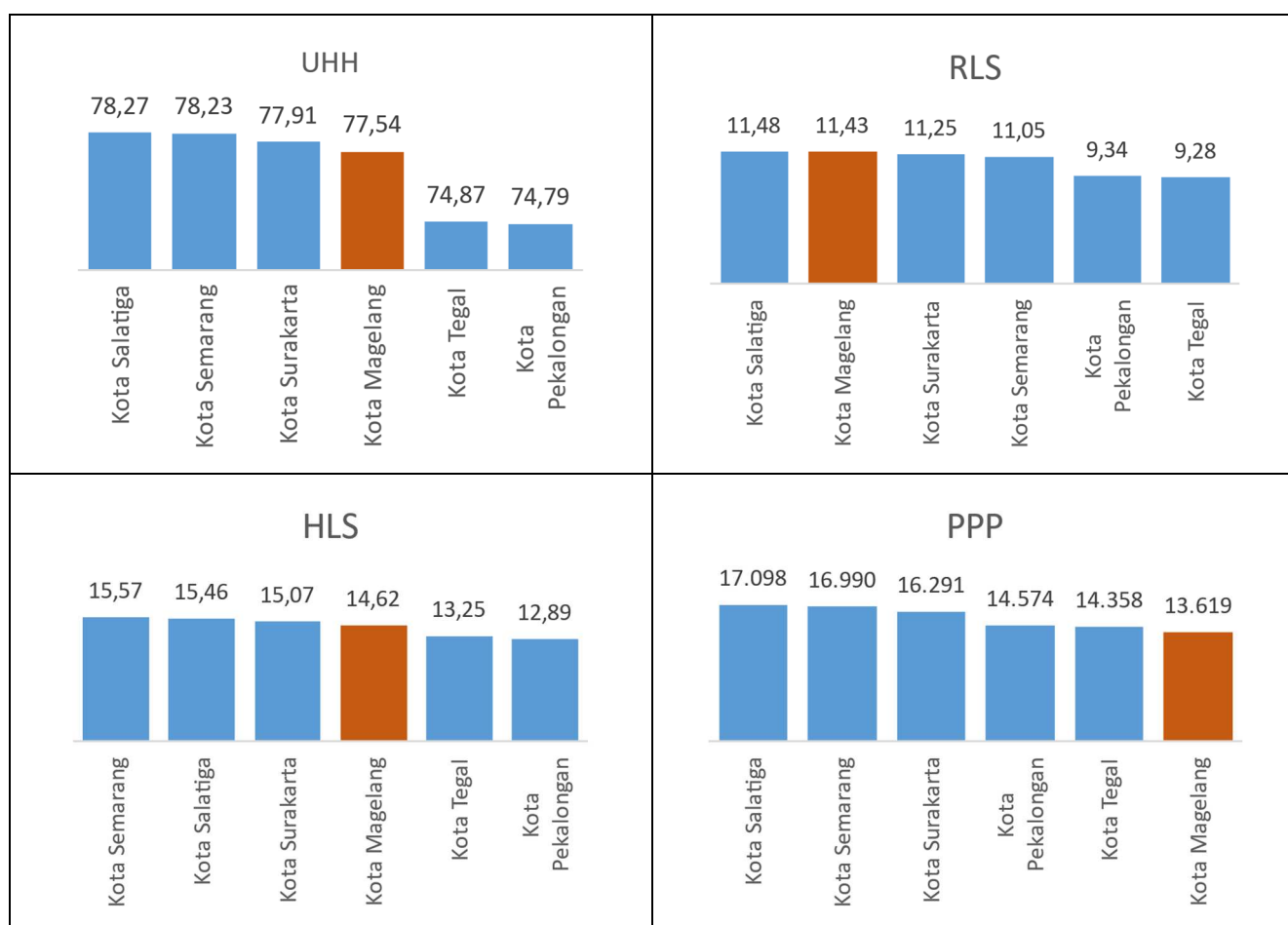
Berdasarkan indikator pembentuknya, capaian indikator di Kota Magelang pada tahun 2024 umumnya lebih tinggi dibandingkan rata-rata di tingkat Jawa Tengah maupun nasional. Pengeluaran Per Kapita Disesuaikan mencatat pertumbuhan tertinggi di Kota Magelang sebesar 3,37 persen, diikuti oleh Rata-rata Lama Sekolah yang meningkat 2,05 persen, serta Harapan Lama Sekolah yang bertambah 1,53 persen. Pertumbuhan terendah terjadi pada Umur Harapan Hidup Saat Lahir yang hanya naik sebesar 0,41 persen. Jika dibandingkan dengan Jawa Tengah, hampir semua indikator di Kota Magelang tumbuh lebih cepat, kecuali Pengeluaran Per Kapita Disesuaikan (PPP). PPP Jawa Tengah tumbuh sebesar 3,73 persen, lebih tinggi daripada PPP Kota Magelang yang tumbuh 3,37 persen. Sementara itu, bila dibandingkan dengan nasional, PPP Kota Magelang juga mencatat pertumbuhan yang lebih rendah, mengingat PPP nasional tumbuh sebesar 3,89 persen.

Pengeluaran per kapita disesuaikan di Kota Magelang tahun 2024 meningkat 444 ribu rupiah menjadi Rp.13.619.000/kapita/tahun. Angka ini sudah lebih tinggi dibanding capaian sebelum pandemi Covid-19 (tahun 2019), menunjukkan bahwa daya beli masyarakat Kota Magelang tahun 2024 sudah kembali pulih pasca Covid-19. Dibandingkan dengan capaian Provinsi Jawa Tengah, Pengeluaran Per Kapita Disesuaikan Kota Magelang selalu lebih tinggi. Jika dibandingkan dengan kota-kota di Provinsi Jawa Tengah capaian Pengeluaran Per Kapita Disesuaikan Kota Magelang ternyata paling rendah, lebih rendah dari Kota Pekalongan dan Kota Tegal yang dimana IPM-nya lebih rendah dari Kota Magelang.

Dimensi umur panjang dan sehat yang diukur dengan indikator Umur Harapan Hidup Saat Lahir (UHH) tahun 2024 ini tumbuh paling rendah dibanding indikator pembentuk IPM yang lain. Meski demikian, pertumbuhan tersebut masih lebih tinggi dibanding pertumbuhan UHH Jawa Tengah maupun Indonesia (lihat tabel. Umur Harapan Hidup sebesar 77,54 tahun menunjukkan bahwa anak yang baru lahir di Kota Magelang tahun 2024 memiliki harapan untuk tetap hidup hingga umur kurang lebih 77 tahun. Jika dibandingkan dengan capaian UHH kota-kota lain di Provinsi Jawa Tengah, UHH di Kota Magelang masih menempati peringkat ke-4 dibawah Kota Salatiga, Kota Semarang, dan Kota Surakarta. Hal ini menunjukkan derajat kesehatan masyarakat Kota Magelang masih lebih rendah dibanding Salatiga, Semarang dan Surakarta. Meskipun demikian, capaian UHH Kota Magelang terlihat selalu lebih tinggi dibanding capaian UHH tingkat Provinsi Jawa Tengah maupun Nasional.

Dimensi pengetahuan dalam konsep pembangunan manusia diukur dengan dua indikator yaitu Rata-rata Lama Sekolah (RLS) dan harapan Lama Sekolah (HLS). Rata-rata Lama Sekolah Kota Magelang tahun 2024 meningkat dari 11,2 (tahun 2023) menjadi 11,43 (tahun 2024). Angka ini menunjukkan secara rata-rata penduduk usia 25 tahun ke atas di Kota Magelang telah menjalani pendidikan formal selama 11,43 tahun atau setara kelas 2 (dua) SMA. Dengan capaian ini pula, peringkat RLS Kota Magelang mampu bertahan di peringkat ke-2 tertinggi di Provinsi Jawa Tengah, di bawah Kota Salatiga namun di atas Kota Semarang dan Surakarta. Pertumbuhan RLS tahun 2024 (2,05 persen) meskipun tidak sebesar pertumbuhan tahun lalu, namun masih lebih tinggi dibanding pertumbuhan RLS Jawa Tengah dan Nasional.

Sebagaimana indikator pembentuk IPM yang lain, Harapan Lama Sekolah (HLS) Kota Magelang Tahun 2024 juga mengalami peningkatan meskipun tidak terlalu besar. Kendati demikian, pertumbuhan dan capaiannya masih di atas pertumbuhan dan capaian HLS Jawa Tengah dan Nasional (lihat tabel 2.16). HLS Kota Magelang meningkat dari 14,4 tahun (2023) menjadi 14,62 tahun (2024). Angka ini menunjukkan bahwa penduduk usia 7 tahun ke atas di Kota Magelang memiliki harapan untuk dapat menyelesaikan pendidikan hingga tingkat perguruan tinggi tahun kedua dengan asumsi kondisi aksesibilitas pendidikan yang stagnan atau tidak ada perubahan yang berarti. Jika dibandingkan secara relatif terhadap kota-kota lain di Provinsi Jawa Tengah, HLS Kota Magelang masih menduduki peringkat ke-4, sama seperti tahun-tahun sebelumnya. Selama empat tahun terakhir HLS Kota Magelang bertahan di kisaran angka 14 tahun.



Gambar 2.18 Indikator Pembentuk IPM Wilayah Kota di Jawa Tengah, 2024

Sumber: BPS Jawa Tengah, 2024

Capaian IPM Kota Magelang pada tahun 2024 tetap bertahan di peringkat keempat tertinggi dibandingkan kabupaten/kota lain di Provinsi Jawa Tengah. Berdasarkan indikator pembentuknya, hanya Rata-rata Lama Sekolah (RLS) yang mampu melampaui Kota Semarang dan Kota Surakarta, sementara Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Umur Harapan Hidup (UHH) tetap berada di posisi keempat, sama seperti tahun-tahun sebelumnya. Faktor terbesar yang menyebabkan kesenjangan IPM Kota Magelang dengan kota-kota lain di Provinsi Jawa Tengah adalah rendahnya angka Pengeluaran Per Kapita Yang Disesuaikan (PPP). Selisih PPP antara Kota Magelang dan Kota Surakarta (peringkat ketiga IPM di Jawa Tengah) pada tahun 2024 mencapai Rp2.672.000,-/kapita. Meski selisih ini sedikit menurun dibandingkan tahun sebelumnya, tetap tergolong besar jika dibandingkan dengan selisih PPP antara Kota Salatiga, Kota Semarang, dan Kota Surakarta, yang hanya berkisar antara Rp100.000,- hingga Rp800.000,-/kapita.

IPM Kota Magelang tahun 2024 mengalami peningkatan sehingga target yang tercantum dalam dokumen perencanaan dapat tercapai. Hal ini menunjukkan kinerja yang lebih baik dibandingkan tahun 2023. Tercapainya target IPM tahun 2024 didorong oleh tercapainya target umur harapan hidup dan rata-rata lama sekolah. Meskipun indikator Pengeluaran per Kapita yang Disesuaikan mencatatkan pertumbuhan tertinggi dalam dua tahun terakhir di antara indikator pembentuk IPM lainnya, pencapaiannya masih jauh dari target yang tercantum dalam dokumen perencanaan. Sementara itu, capaian indikator Harapan Lama Sekolah dalam tiga tahun terakhir selalu berada di bawah target yang ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Tabel 2.21 Target dan Realisasi Indikator Pembentuk IPM Kota Magelang, 2023-2024

Indikator	Target*		Realisasi**		Keterangan	
	2023	2024	2023	2024	2023	2024
Umur Harapan Hidup Saat Lahir (tahun)	76,98	77,04	77,22	77,54	Tercapai	Tercapai
Rata-rata Lama Sekolah (tahun)	10,62	10,71	11,20	11,43	Tercapai	Tercapai
Harapan Lama Sekolah (tahun)	14,75	14,97	14,40	14,62	Tidak Tercapai	Tidak Tercapai
Pengeluaran Per Kapita Disesuaikan (ribu rupiah)	13.849	14.332	13.175	13.619	Tidak Tercapai	Tidak Tercapai
Indeks Pembangunan Manusia	81,25	81,94	81,17	82,15	Tidak Tercapai	Tercapai

Sumber:

*) RPJMD 2021-2026

**) BPS Jawa Tengah, 2024

Beberapa upaya telah dilakukan untuk peningkatan IPM Kota Magelang. Untuk sektor pendidikan, penyelenggaraan pendidikan dasar gratis untuk sekolah negeri dengan adanya BOS dan BOSDA untuk meningkatkan akses pendidikan bagi seluruh warga. Selain itu, anak yang putus sekolah didorong untuk dapat mengikuti kejar paket sesuai jenjang. Di sektor kesehatan (Umur Harapan Hidup), pelayanan di puskesmas dan rumah sakit terus ditingkatkan, diiringi dengan peningkatan sarana prasarana hingga SDM. Selain itu, perluasan jangkauan pelayanan seperti *homecare* juga telah dilakukan. KIE terkait Pola Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) juga terus dilakukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat. Selain itu, upaya perbaikan infrastruktur, manajemen lalu lintas, dan upaya mitigasi bencana juga dilakukan untuk mendukung peningkatan Umur Harapan Hidup. Upaya ini diharapkan dapat meminimalisir korban akibat kecelakaan atau bencana. Terkait upaya peningkatan pengeluaran per kapita, selain bantuan langsung kepada masyarakat, juga dilakukan peningkatan kapasitas SDM dengan pelatihan kerja maupun pelatihan usaha untuk peningkatan pendapatan dengan program unggulan magelang keren yang telah mewisuda sebanyak 1.500 wirausaha baru dalam dua tahun terakhir.

2.1.2.2.2 Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)

Tahun 2023 terjadi kenaikan IPG Kota Magelang sebesar 0,52 poin dari 95,91 pada tahun 2022 menjadi 96,43. Peningkatan IPG tahun ini sedikit lebih tinggi dibanding peningkatan tahun lalu yang hanya 0,37 poin. Hal ini menunjukkan bahwa kesenjangan pembangunan kualitas sumber daya manusia perempuan dan laki-laki di Kota Magelang semakin kecil. Hampir di semua indikator pembentuk IPM, capaian indikator penduduk perempuan lebih rendah, kecuali di Umur Harapan Hidup (UHH). UHH perempuan selalu lebih tinggi dari laki-laki. Di aspek pendidikan meskipun capaian lebih rendah, namun peningkatan HLS dan RLS perempuan lebih besar dibanding peningkatan indikator yang sama untuk laki-laki. RLS perempuan mampu bergerak menjadi 11 tahun, dari yang sebelumnya bertahan di angka 10 tahun selama 3 tahun (periode 2020-2022). Sementara RLS laki-laki hanya meningkat 0,01 poin yang menyebabkan angka RLS masih bertahan di angka 11 tahun selama 5 tahun terakhir. Pengeluaran per kapita yang disesuaikan dari penduduk perempuan lebih rendah dibandingkan laki-laki.

Tabel 2.22 Komponen Pembentuk Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kota Magelang, 2020-2024

Tahun	UHH (tahun)		HLS (tahun)		RLS (tahun)		Pengeluaran (Ribu Rp)		IPM		IPG
	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	
2020	75,04	78,74	14,43	13,82	11,11	10,16	13.619	11.775	81,59	77,73	95,27
2021	75,11	78,82	14,44	14,00	11,32	10,42	13.806	11.897	82,03	78,37	95,54
2022	75,19	78,92	14,59	14,23	11,42	10,75	14.341	12.254	82,72	79,34	95,91

Tahun	UHH (tahun)		HLS (tahun)		RLS (tahun)		Pengeluaran (Ribu Rp)		IPM		IPG
	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	
2023	75,37	79,14	14,60	14,40	11,43	11,06	14.896	12.584	83,22	80,25	96,43
2024	Na	Na	Na	Na	Na	Na	Na	Na	Na	Na	Na

Sumber: BPS Kota Magelang, 2024

Selain IPG, perwujudan kesetaraan gender di Indonesia diukur melalui Indeks Pemberdayaan Gender (IDG). IDG mengukur partisipasi aktif perempuan di bidang politik, pengambilan keputusan dan ekonomi dengan tiga komponen yaitu persentase perempuan dalam parlemen, persentase tenaga profesional perempuan dan sumbangan pendapatan perempuan. Nilai IDG semakin mendekati 100 mengindikasikan pemberdayaan gender yang semakin baik, sementara nilai masing-masing komponen IDG menunjukkan persentase keterlibatan perempuan tersebut dalam kegiatan.

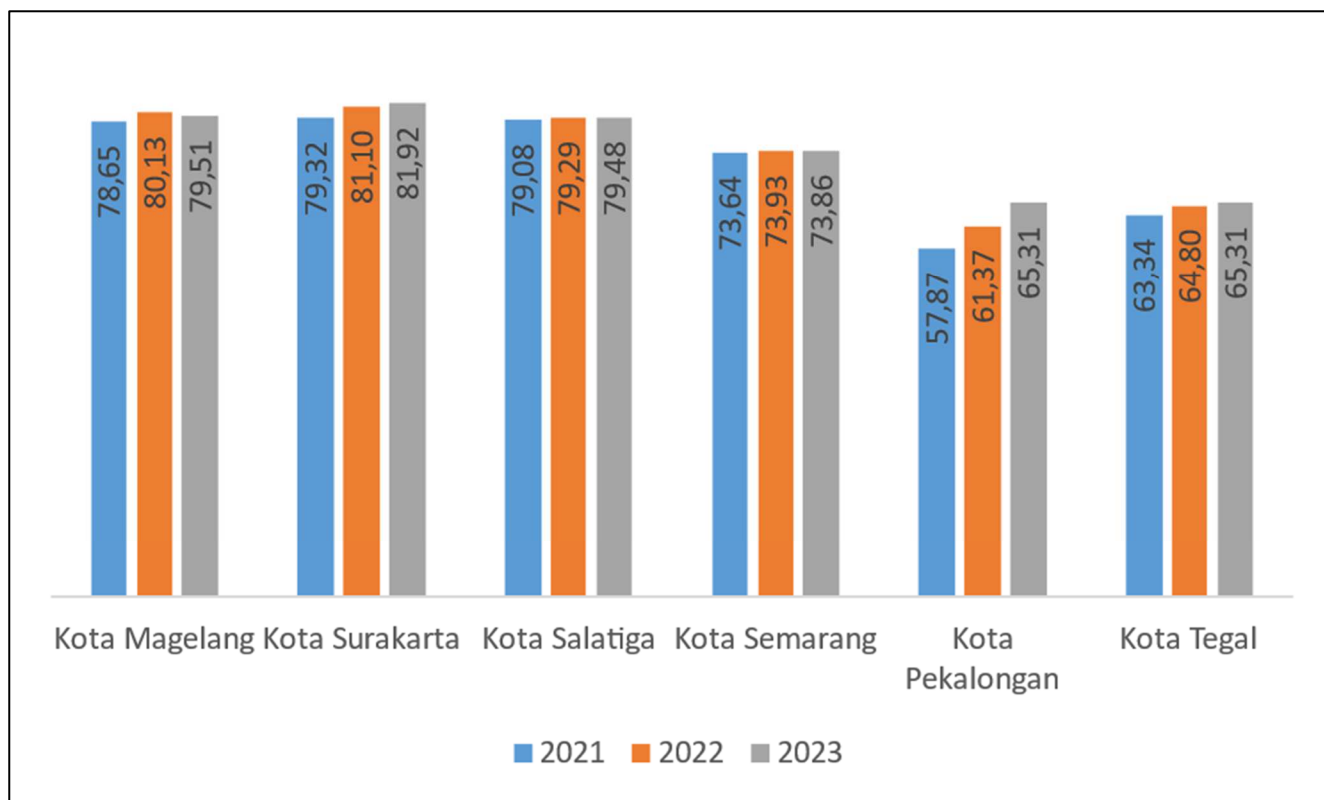
IDG Kota Magelang dalam 5 (lima) tahun terakhir cenderung berfluktuatif. Tahun 2023 IDG justru mengalami penurunan dari 80,13 menjadi 79,51. Sebagaimana tahun-tahun sebelumnya, penyumbang IDG tertinggi di Kota Magelang adalah peran serta perempuan sebagai tenaga manajer, profesional, administrasi, teknisi yang meningkat dari 46,81 persen (2022) menjadi 59,55 persen (2023). Peningkatan indikator juga terjadi untuk indikator sumbangan perempuan dalam pendapatan kerja dari 41,84 persen menjadi 42,42 persen. Sementara sumbangan terendah dari indikator keterlibatan perempuan dalam parlemen yang cenderung tetap dalam 3 tahun terakhir sebesar 24 persen.

Tabel 2.23 Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Kota Magelang, 2019-2023

Indikator	2020	2021	2022	2023	2019
Keterlibatan Perempuan di Parlemen (%)	20,00	24,00	24,00	24,00	Na
Perempuan sebagai Tenaga Manajer, Profesional, Administrasi, Teknisi (%)	55,07	59,89	46,81	59,55	Na
Sumbangan Perempuan dalam Pendapatan Kerja (%)	41,97	42,15	41,84	42,42	Na
IDG	76,35	78,65	80,13	79,51	Na

Sumber: BPS Kota Magelang, 2024

Pada tahun 2023, meskipun sedikit mengalami penurunan, IDG Kota Magelang masih relatif unggul dibandingkan kota-kota lain di Jawa Tengah. Kota Magelang masih dapat mempertahankan posisi di peringkat kedua IDG tertinggi di bawah Kota Surakarta (81,92), sedikit di atas Kota Salatiga (79,48). Jika diperhatikan, diantara kota-kota di Jawa Tengah, hanya Kota Magelang dan Kota Semarang yang capaian IDG nya mengalami penurunan, sementara yang lain justru meningkat. Hal ini menyebabkan jarak IDG Kota Magelang dengan IDG Kota Salatiga semakin dekat, dan berpotensi tersalip jika tidak dilakukan upaya intervensi ke depannya. Sementara jarak dengan IDG Kota Surakarta justru semakin jauh. Perkembangan nilai IDG Kota Magelang dan kota-kota di Jawa Tengah selama tahun 2021-2023 disajikan pada gambar berikut.



Gambar 2.19 Indeks Pemberdayaan Gender Wilayah Kota di Jawa Tengah, 2019-2023

Sumber: BPS Kota Magelang, 2024

2.1.2.2.3 Pengangguran

2.1.2.2.3.1 Tingkat Pengangguran Terbuka

Permasalahan utama yang dihadapi Pemerintah Daerah di bidang ketenagakerjaan adalah meningkatnya pengangguran. Pengangguran terjadi ketika jumlah angkatan kerja yang ada, belum atau tidak terserap sepenuhnya oleh lapangan pekerjaan yang tersedia. Salah satu indikator yang dapat digunakan untuk melihat besarnya tingkat pengangguran adalah Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT). TPT diperoleh dengan membagi antara jumlah pengangguran (penduduk usia 15 tahun ke atas yang tidak bekerja dan mencari pekerjaan) dengan jumlah angkatan kerja (penduduk usia kerja yang bekerja dan pengangguran). Ukuran ini dapat digunakan untuk melihat seberapa besar penawaran kerja yang tidak dapat terserap di dalam pasar kerja.

Tabel 2.24 Target dan Realisasi Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kota Magelang, 2020-2024

Tahun	Target*	Realisasi**	Keterangan
2020	5 - 5,2	8,59	Tidak Tercapai
2021	4,5 - 5	8,73	Tidak Tercapai
2022	6,8 - 7,8	6,71	Tercapai
2023	6,3 - 7,5	5,25	Tercapai
2024	5,8-7,1	4,4	Tercapai

Sumber Data:

*) RPJMD 2021-2026;

**) BPS Jawa Tengah, 2024

Dalam kondisi normal, kinerja Pemerintah Kota Magelang dalam penanganan pengangguran dapat dikatakan berhasil. Hal ini terlihat dari realisasi TPT di Kota Magelang mampu melampaui target TPT yang telah ditetapkan di periode sebelum dan pasca Pandemi Covid-19. Target TPT yang tidak tercapai hanya di periode 2020-2021

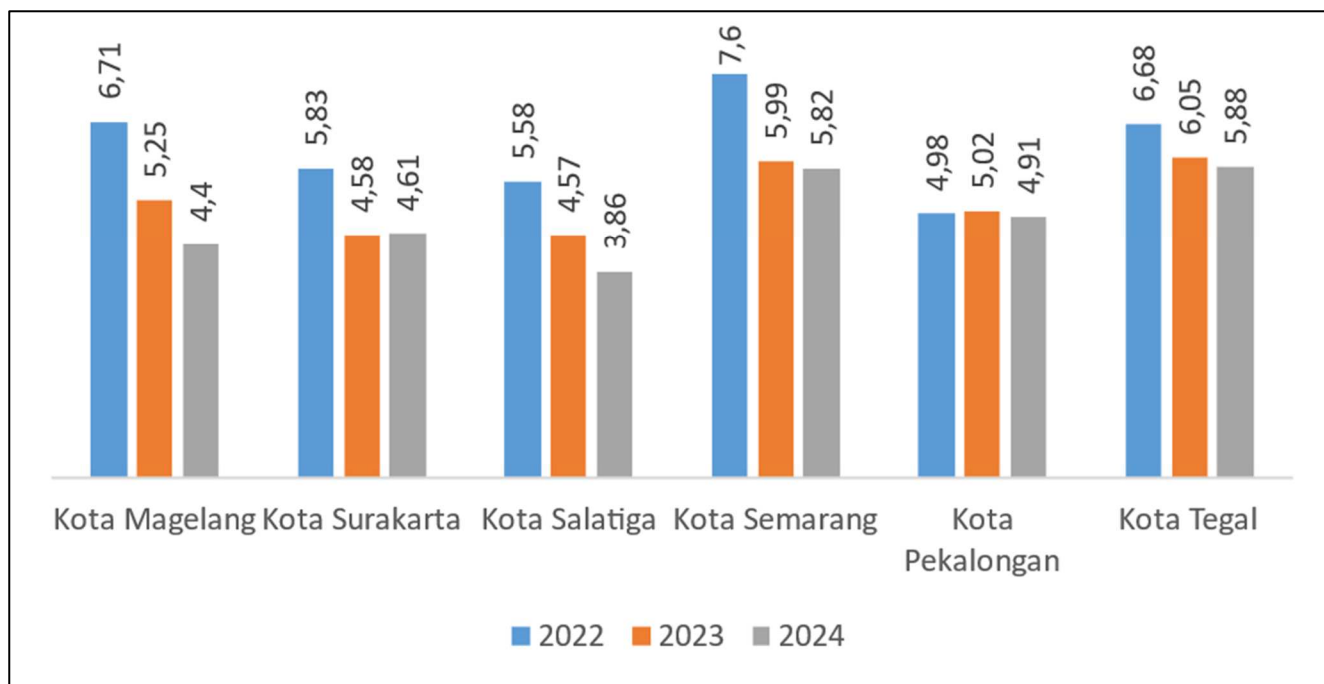
atau periode ketika Pandemi Covid-19 melanda. Dampak dari pandemi, TPT meningkat dua kali lipat hingga mencapai 8,73 persen di tahun 2021. Seiring dengan pulihnya kondisi ekonomi pasca pandemi Covid 19, TPT Kota Magelang tahun 2022 menurun menjadi 6,71 persen. Pada Tahun 2023 TPT kembali mengalami penurunan menjadi 5,25 persen. Dari sisi jumlah penganggur, terjadi penurunan dari 4.487 orang (2022) menjadi 3.632 orang (2023), atau berkurang sebanyak 855 orang. Meskipun menurun dan mampu melampaui target, namun TPT di Kota Magelang tahun 2023 masih lebih tinggi dibanding kondisi sebelum pandemi covid-19 (tahun 2019). Kondisi ini juga terjadi di tingkat Provinsi Jawa Tengah maupun Nasional, begitu pula di kota-kota lain di Jawa Tengah, kecuali Kota Pekalongan dan Kota Tegal. Pada Tahun 2024 TPT mengalami penurunan menjadi 4,4 persen dengan target 5,8-7,1 persen. Artinya realisasi tingkat pengangguran terbuka tidak mencapai target. Mulai tahun 2020, sejak pandemi Covid-19 TPT Kota Magelang meningkat menjadi lebih tinggi dibanding TPT Jawa Tengah dan TPT Nasional sehingga menempati peringkat tertinggi kedua diantara wilayah kota di Jawa Tengah. Pada tahun 2023 penurunan TPT yang cukup signifikan mampu mengembalikan posisi TPT Kota Magelang di peringkat tertinggi ke-3 diantara kota-kota lain di Jawa Tengah. Capaian TPT Kota Magelang berada di bawah TPT Nasional, namun masih sedikit di atas TPT Jawa Tengah. Pada tahun 2024 kembali mengalami penurunan menjadi 4,4 persen.

Tabel 2.25 Tingkat Pengangguran Terbuka Kota-kota di Jawa Tengah dan Indonesia, 2020-2024

Nama Kota/Wilayah	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)					Perubahan Tingkat Pengangguran (%)				
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
Kota Magelang	8,59	8,73	6,71	5,25	4,40	4,22	0,14	-2,02	-1,46	-0,85
Kota Surakarta	7,92	7,85	5,83	4,58	4,61	3,76	-0,07	-2,02	-1,25	0,03
Kota Salatiga	7,44	7,26	5,58	4,57	3,86	3,11	-0,18	-1,68	-1,01	-0,71
Kota Semarang	9,57	9,54	7,60	5,99	5,82	5,07	-0,03	-1,94	-1,61	-0,17
Kota Pekalongan	7,02	6,89	4,98	5,02	4,91	1,22	-0,13	-1,91	0,04	-0,11
Kota Tegal	8,40	8,25	6,68	6,05	5,88	0,32	-0,15	-1,57	-0,63	-0,17
Jawa Tengah	6,48	5,95	5,57	5,13	4,78	2,04	-0,53	-0,38	-0,44	-0,35
Indonesia	7,07	6,49	5,86	5,32	4,91	1,84	-0,58	-0,63	-0,54	-0,41

Sumber: BPS, 2024

Tingkat pengangguran terbuka di Kota Magelang mengalami penurunan pada tahun 2024 dengan angka yang mencapai 4,40 persen dari 5,25 persen. Penurunan TPT di Kota Magelang pada tahun 2024 merupakan salah satu penurunan terbesar dibandingkan kota-kota lain di Provinsi Jawa Tengah. TPT Jawa Tengah turun sebesar 0,35 persen dari 5,13 persen menjadi 4,78 persen pada tahun 2024. Sedangkan TPT Nasional mengalami penurunan sebesar 0,41 persen poin dari 5,32 persen menjadi 4,91 persen. TPT Kota Magelang pada tahun 2024 lebih tinggi dibandingkan rata-rata TPT Provinsi Jawa Tengah (4,78 persen) dan Nasional (4,91 persen).



Gambar 2.20 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Wilayah Kota di Jawa Tengah, 2019-2023

Sumber: BPS, 2024

Relasi antara pertumbuhan ekonomi dan tingkat pengangguran terbuka terlihat cukup jelas pada tingkat Jawa Tengah dan Nasional, setidaknya dalam lima tahun terakhir. Pertumbuhan ekonomi yang positif diikuti dengan penurunan TPT, meskipun dengan besaran yang beragam. Sebaliknya, kontraksi ekonomi juga diikuti dengan meningkatnya TPT. Kondisi berbeda terjadi di Kota Magelang, relasi tersebut tidak sepenuhnya berlaku. Pada saat pertumbuhan ekonomi di Kota Magelang mencapai besaran 5 persen diikuti dengan penurunan TPT, namun ketika pertumbuhan ekonomi hanya mencapai 3 persen justru TPT mengalami peningkatan. Pada saat pertumbuhan ekonomi berada di kisaran 5 persen, penurunan TPT di Kota Magelang relatif lebih tinggi dibanding penurunan TPT di Jawa Tengah dan Nasional. Kondisi ini menunjukkan bahwa pada tingkat pertumbuhan ekonomi tertentu dampak dari pertumbuhan ekonomi terhadap penurunan tingkat pengangguran terbuka di Kota Magelang cenderung lebih tinggi dibanding Jawa Tengah dan Nasional.

Tabel 2.26 Perkembangan Perubahan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dan Pertumbuhan Ekonomi Kota Magelang, Jawa Tengah dan Indonesia, 2020-2024

Tahun	Kota Magelang		Jawa Tengah		Indonesia	
	Perubahan TPT	Pertumbuhan Ekonomi	Perubahan TPT	Pertumbuhan Ekonomi	Perubahan TPT	Pertumbuhan Ekonomi
2020	4,22	-2,45	2,04	-2,65	1,84	-2,07
2021	0,14	3,20	-0,53	3,33	-0,58	3,70
2022	-2,02	5,77	-0,38	5,31	-0,63	5,31
2023	-1,46	5,45	-0,44	4,98	-0,54	5,05
2024	-0,85	5,56	-0,35	4,95	-0,41	5,03

Sumber: BPS, 2024

2.1.2.2.3.2 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) didefinisikan sebagai persentase angkatan kerja terhadap penduduk usia kerja (usia 15 tahun ke atas). Nilai TPAK mengindikasikan besarnya persentase penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi di suatu daerah. Semakin tinggi nilai TPAK, semakin tinggi pula pasokan tenaga kerja yang

tersedia untuk memproduksi barang dan jasa dalam perekonomian. Angkatan kerja merupakan penjumlahan dari penduduk bekerja dan pengangguran. Salah satu indikator keberhasilan pembangunan ketenagakerjaan adalah menurunnya TPT yang diiringi dengan meningkatnya TPAK. Meningkatnya angkatan kerja diriingi dengan meningkatnya jumlah penduduk yang bekerja (tenaga kerja) dan menurunnya jumlah pengangguran.

Pada tahun 2024, Angkatan kerja di Kota Magelang mengalami penurunan menjadi 67.633 orang dari 69.199 orang (2023). Sementara penduduk yang terkategori bukan Angkatan kerja mengalami peningkatan dari 30.141 orang (2023) menjadi 32.329 orang (2024). Hal ini tentu berdampak pada menurunnya Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dari 69,66 persen (2023) menjadi 67,66 persen (2024), atau meningkat hingga 2,00 persen poin. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kota Magelang terus mengalami penurunan, dari 5,25 persen pada tahun 2023 menjadi 4,40 persen (2024). Tingkat Kesempatan Kerja (TKK) meningkat dari 94,75 persen (2023) menjadi 95,60 persen di tahun 2024. Selama lima tahun terakhir TKK di Kota Magelang cenderung fluktuatif.

TKK menunjukkan besarnya persentase penduduk yang bekerja (tenaga kerja) terhadap angkatan kerja. TKK Kota Magelang tahun 2024 meningkat dari 95,60 persen (2023) menjadi 95,60 persen. Jika dilihat perkembangannya selama lima tahun terakhir, jumlah tenaga kerja juga berfluktuatif. Pada tahun 2024 tenaga kerja di Kota Magelang tercatat sebanyak 64.654 orang, atau menurun hingga 913 orang dibanding tahun sebelumnya.

Tabel 2.27 Indikator Ketenagakerjaan di Kota Magelang, 2020-2024

Tahun	Bekerja	Pengangguran Terbuka	Angkatan Kerja	Bukan Angkatan Kerja	TPT	TPAK
					(%)	(%)
2019	60.649	2.769	63.418	34.220	4,37	64,95
2020	60.612	5.699	66.311	31.767	8,59	67,61
2021	60.317	5.769	66.086	32.444	8,73	67,07
2022	62.347	4.487	66.834	32.091	6,71	67,56
2023	65.567	3.632	69.199	30.141	5,25	69,66
2024	64.654	2.979	67.633	32.329	4,40	67,66

Sumber: BPS Kota Magelang, 2024

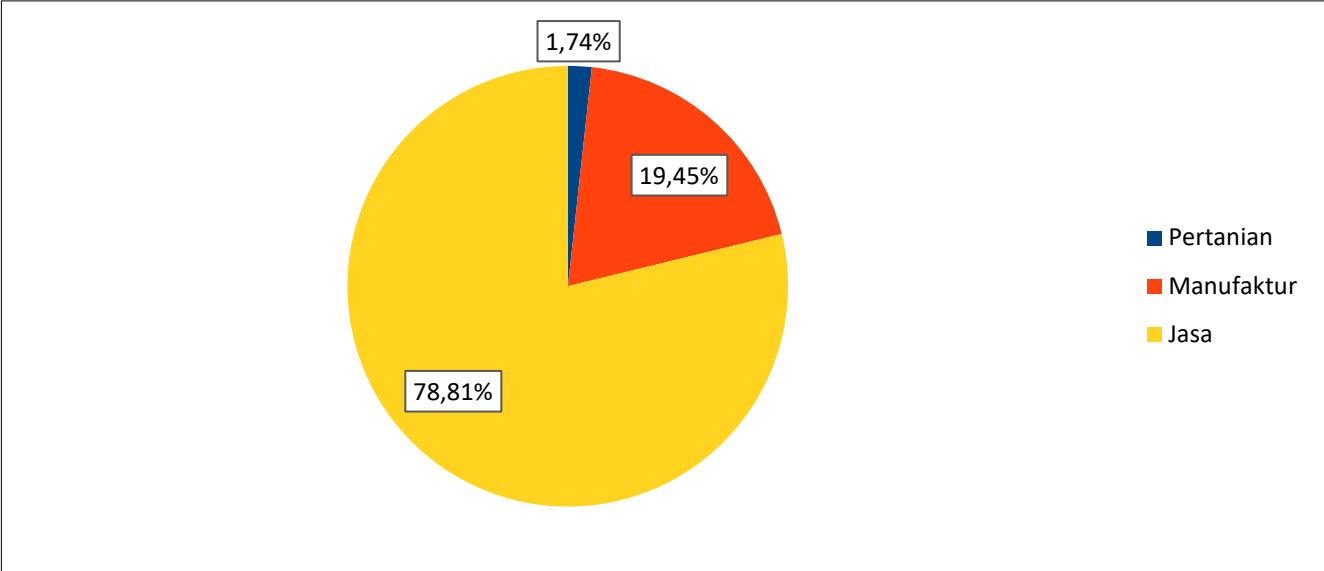
Penyerapan tenaga kerja di Kota Magelang masih didominasi oleh sektor jasa, utamanya adalah lapangan usaha perdagangan besar dan eceran serta penyediaan akomodasi dan makan minum. Tenaga kerja di sektor jasa menyerap hampir 80 persen dari total tenaga kerja yang ada di Kota Magelang. Sementara sektor manufaktur mampu menyerap tenaga kerja sebesar 19,45 persen, utamanya di lapangan usaha industri pengolahan. Sektor pertanian menyerap tenaga kerja paling sedikit, hanya 1,74 persen. Kondisi ini berkebalikan dengan struktur tenaga kerja di Jawa Tengah maupun Nasional. Di Jawa Tengah dan Nasional, sektor pertanian masih dominan menyerap tenaga kerja dibanding sektor lain pada kisaran 24-29 persen.

Tabel 2.28 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan, 2019-2023

Tahun	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan
2019	57,33%
2020	59,85%
2021	59,98%
2022	58,30%
2023	61,10%

Sumber: Profil Ketenagakerjaan Kota Magelang Hasil Sakernas, 2024

Penyerapan tenaga kerja di Kota Magelang masih didominasi oleh sektor jasa, utamanya adalah lapangan usaha perdagangan besar dan eceran serta penyediaan akomodasi dan makan minum. Tenaga kerja di sektor jasa menyerap hampir 80 persen dari total tenaga kerja yang ada di Kota Magelang. Sementara sektor manufaktur mampu menyerap tenaga kerja sebesar 19,45 persen, utamanya di lapangan usaha industri pengolahan. Sektor pertanian menyerap tenaga kerja paling sedikit, hanya 1,74 persen. Kondisi ini berkebalikan dengan struktur tenaga kerja di Jawa Tengah maupun Nasional. Di Jawa Tengah dan Nasional, sektor pertanian masih dominan menyerap tenaga kerja dibanding sektor lain pada kisaran 24-29 persen.



Gambar 2.21 Penyerapan Tenaga Kerja di Kota Magelang, 2023
Sumber: BPS Kota Magelang, 2024

2.1.2.2.4 Angka Beban Tanggungan Penduduk (Rasio Ketergantungan)

Semakin tinggi rasio ketergantungan menunjukkan beban yang harus ditanggung penduduk usia produktif semakin besar, begitu pula sebaliknya. Kondisi Rasio Ketergantungan di Kota Magelang selama periode 2020-2024 bisa dilihat pada Tabel 2.43 berikut.

Tabel 2.29 Angka Beban Tanggungan Penduduk Kota Magelang, 2020-2024

Tahun	Penduduk Kelompok Umur			Rasio Ketergantungan	
	0-14 th	15-64 th	≥ 65 th	Kota Magelang	Jawa Tengah
2020	24.373	86.145	11.008	41,07	43,16
2021	24.080	85.997	11.533	41,41	43,42
2022	23.796	85.811	12.068	41,79	43,71
2023	22.972	86.421	12.757	41,34	46,24
2024					

Sumber: BPS Kota Magelang, 2024

Hasil Sensus Penduduk 2020 (SP2020) mencatat jumlah penduduk di Kota Magelang sebanyak 121.526 jiwa. Berdasarkan proyeksi interim hasil SP2020, jumlah penduduk tahun 2023 meningkat menjadi 122.150 jiwa atau tumbuh 0,17 persen. Dilihat dari strukturnya, penduduk masih didominasi oleh penduduk usia produktif, mencapai 70,75 persen pada tahun 2023. Persentase ini sedikit meningkat dibanding tahun 2022 (70,52 persen). Selama periode 2019-2022 terlihat bahwa rasio ketergantungan cenderung semakin meningkat tetapi sedikit menurun pada tahun 2023. Beban penduduk usia produktif untuk menanggung penduduk usia non produktif

semakin bertambah. Pada tahun 2023 setiap 100 penduduk usia produktif di Kota Magelang harus menanggung sekitar 41 orang penduduk usia non produktif. Meskipun rasio ketergantungan sedikit meningkat namun angkanya masih dibawah rasio ketergantungan Jawa Tengah.

Rasio ketergantungan di Kota Magelang besarnya masih berada di bawah 50, kondisi ini masih termasuk dalam bonus demografi. Masih terdapat peluang besar untuk meraih kemakmuran yang mudah apabila penduduk di usia produktif benar-benar mampu berkontribusi secara ekonomi. Sebaliknya, jika sebagian besar dari mereka tidak bekerja maka akan menciptakan instabilitas sosial dan politik. Mereka ini yang dikatakan sebagai penduduk usia produktif namun tidak dapat memanfaatkan tenaganya karena tidak terserap di pasar kerja.

Bonus demografi tersebut merupakan modal dasar pembangunan yang sangat potensial. Potensi yang besar harus diimbangi dengan ketersediaan lapangan kerja, kepemilikan ketrampilan yang cukup, dan fasilitas lainnya yang mendukung iklim usaha. Tidak hanya aspek ekonomi saja yang perlu dipersiapkan, penduduk usia produktif yang melimpah juga membutuhkan layanan bidang pendidikan dan kesehatan yang memadai dan berkualitas dalam rangka mendukung produktifitas penduduk.

2.1.2.2.5 Konsumsi Rumah Tangga

Konsumsi rumah tangga adalah pengeluaran atas barang dan jasa oleh rumah tangga untuk tujuan konsumsi. Dalam hal ini rumah tangga berfungsi sebagai pengguna akhir (*final demand*) atas berbagai jenis barang dan jasa yang tersedia di dalam suatu perekonomian. Pengeluaran konsumsi rumah tangga merupakan proksi pendapatan dikarenakan data pendapatan yang sesungguhnya dari tiap rumah tangga sangat sulit diperoleh. Rumah tangga lebih bersedia untuk mengingat apa yang mereka keluarkan daripada apa yang mereka peroleh. Di negara-negara berkembang, konsumsi adalah indikator kesejahteraan seumur hidup yang lebih baik dibandingkan pendapatan (Haughton dan Khandker, 2012).

Salah satu tolok ukur tingkat kesejahteraan penduduk adalah pangsa (*share*) pengeluaran pangan. Menurut Trisnowati (2013). pangsa pengeluaran makanan yang semakin kecil menggambarkan tingkat kesejahteraan yang semakin baik. Tingkat kesejahteraan meningkat seiring dengan meningkatnya pangsa pengeluaran untuk non makanan. Penduduk dengan pangsa konsumsi non makanan lebih dari 50% dapat digolongkan sebagai penduduk dengan perekonomian yang baik. kategori ekonomi sedang jika pangsa konsumsi non makanan pada rentang 20% - 49%. sedangkan kategori perekonomian buruk jika pangsa pengeluaran non makanan kurang dari 20%.

Tabel 2.30 Perkembangan Persentase Konsumsi dan Rata-rata Pengeluaran Per Kapita Kota Magelang, 2020-2024

Tahun	Persentase Konsumsi Non Makanan	Persentase Konsumsi Makanan	Rata-rata Pengeluaran Per Kapita Per Bulan (Rp)
2020	59,57	40,43	1.317.746
2021	60,39	39,61	1.497.033
2022	56,65	43,35	1.701.771
2023	56,81	43,19	1.506.326
2024	58,74	41,26	1.670.272

Sumber: BPS Kota Magelang, 2024

Tingkat konsumsi non pangan masyarakat Kota Magelang sejak tahun 2019 sampai dengan tahun 2024 meskipun berfluktuatif namun tren cenderung meningkat dan selalu di atas 50 persen, sehingga dapat dikategorikan dalam perekonomian dengan kondisi baik. Hal ini mengindikasikan adanya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dalam lima tahun terakhir terlihat bahwa pangsa pengeluaran untuk makanan lebih sedikit dibandingkan pengeluaran untuk non makanan. Pada tahun 2024, sebanyak 58,74 persen konsumsi masyarakat digunakan untuk memenuhi kebutuhan non makanan, seperti pendidikan, kesehatan, perumahan, dan lain-lain. Secara umum, pola konsumsi ini masih lebih baik dibanding kondisi rata-rata Jawa Tengah dan Nasional yang konsumsi non makanannya masing-masing 50 persen dan 49,90 persen.

Pengeluaran perkapita merupakan proksi yang digunakan untuk menggambarkan pendapatan penduduk. Semakin tinggi pendapatan maka semakin banyak yang dikonsumsi. Besarnya nilai pengeluaran menggambarkan kemampuan daya beli penduduk Kota Magelang terhadap komoditas pangan maupun bukan pangan. Penurunan daya beli sempat terjadi pada tahun 2020 dikarenakan pandemi Covid-19, namun di tahun 2021 daya beli masyarakat cenderung sudah kembali normal dan terus meningkat hingga tahun 2022. Kendati sempat menurun pada tahun 2023, rata-rata pengeluaran perkapita kembali meningkat menjadi 1,67 juta rupiah/bulan. Rata-rata ini masih lebih rendah dibandingkan rata-rata pengeluaran perkapita tahun 2022. Rendahnya rata-rata konsumsi ini dimungkinkan terjadi karena dua kondisi, pertama: ada sebagian kelompok masyarakat (utamanya di golongan berpendapatan tinggi) yang menahan perilaku konsumsinya dan mengalihkan sebagian pendapatannya untuk saving maupun investasi, kedua: ada sebagian kelompok masyarakat (utamanya di golongan berpendapatan menengah atau rendah) yang memang mengalami penurunan pendapatan sehingga menurunkan tingkat konsumsinya. Kondisi kedua ini yang perlu diwaspadai karena berpotensi menambah kemiskinan baru jika pendapatannya terus menurun sehingga berada di bawah garis kemiskinan. Fenomena ini perlu diantisipasi dengan upaya pemberdayaan masyarakat dan jaminan perlindungan sosial yang berbasis data yang *up to date*. Rata-rata pengeluaran perkapita di Kota Magelang tahun 2024 lebih tinggi dibanding rata-rata di Jawa Tengah dan Nasional yang masing-masing hanya sebesar 1,27 juta rupiah dan 1,16 juta rupiah.

2.1.2.2.6 Kemiskinan

2.1.2.2.6.1 Kemiskinan Makro

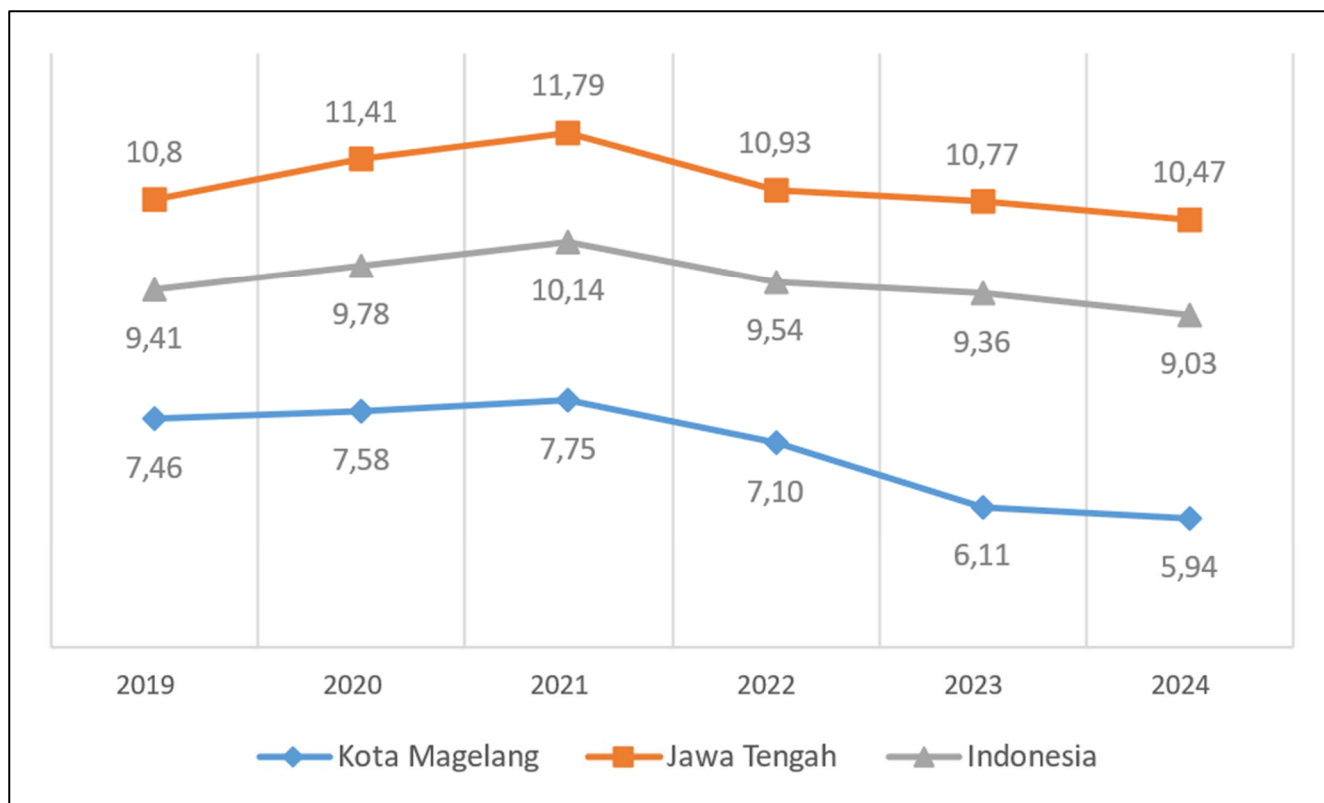
Kemiskinan didefinisikan sebagai ketidakmampuan secara ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan non-makanan yang diukur menurut garis kemiskinan. Garis kemiskinan menjadi standar nilai minimum rupiah yang harus dikeluarkan untuk dapat memenuhi kebutuhan dasar makanan dan non makanan. Dengan demikian, garis kemiskinan juga menjadi standar tingkat kesejahteraan di suatu daerah. Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan, sementara tingkat kemiskinan didefinisikan sebagai persentase penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan.

Tabel 2.31 Target dan Realisasi Tingkat Kemiskinan Kota Magelang, 2020-2024

Tahun	Target*	Realisasi**	Keterangan
2020	6,42 - 6,61	7,58	Tidak tercapai
2021	6,12 - 6,40	7,75	Tidak tercapai
2022	6,73 - 7,58	7,10	Tercapai
2023	6,41 - 7,40	6,11	Tercapai
2024	6,36 - 7,00	5,94	Tercapai

Sumber Data: *) RPJMD 2016-2021, RPJMD 2021-2026; **) BPS Provinsi Jawa Tengah, 2024

Dalam tiga tahun terakhir, target penurunan tingkat kemiskinan di Kota Magelang berhasil tercapai, bahkan pada tahun 2023 dan 2024, angka penurunan melebihi target yang ditetapkan, seperti yang terlihat pada tabel di atas. Pada tahun 2024, tingkat kemiskinan di Kota Magelang turun dari 6,11 persen (2023) menjadi 5,94 persen (2024), atau mengalami penurunan sebesar 0,17 persen poin. Capaian tingkat kemiskinan tahun 2024 ini lebih rendah dari target yang tercantum dalam RPJMD 2021-2026, yaitu sebesar 6,36 persen, yang menunjukkan kinerja penanganan kemiskinan yang cukup baik.



Gambar 2.22 Persentase Penduduk Miskin (P0) Kota Magelang, Jawa Tengah dan Indonesia, 2019-2023

Sumber: BPS, 2024

Tingkat kemiskinan di Kota Magelang selalu lebih rendah dibanding tingkat kemiskinan Jawa Tengah maupun Nasional, sebagaimana ditunjukkan gambar di atas. Penurunan tingkat kemiskinan yang terjadi di Kota Magelang mengikuti pola serupa di tingkat regional maupun nasional, namun penurunan di Kota Magelang jauh lebih tinggi dibanding penurunan di Jawa Tengah maupun Nasional. Tingkat kemiskinan Jawa Tengah turun dari 10,93 persen menjadi 10,77 persen, sementara tingkat kemiskinan nasional juga menurun dari 9,54 persen menjadi 9,36 persen. Jika dilihat dari perubahannya dalam setahun terakhir, tingkat kemiskinan Kota Magelang mampu turun 0,99 persen poin, lebih tinggi dari penurunan tingkat kemiskinan Jawa Tengah (0,16 persen poin) maupun nasional (0,18 persen poin). Penurunan kemiskinan tahun 2023 menyebabkan tingkat kemiskinan Kota Magelang sudah jauh lebih rendah dibanding kondisi sebelum Covid-19 (tahun 2019), sementara untuk Jawa Tengah dan Nasional tingkat kemiskinannya hanya sedikit di bawah capaian sebelum pandemi Covid-19.

Tabel 2.32 Persentase Penduduk Miskin (P0) Kota-kota di Jawa Tengah dan Indonesia, 2020-2024

Nama Kota	Tingkat Kemiskinan (%)					Perubahan Tingkat Kemiskinan (%)				
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
Kota Magelang	7,58	7,75	7,10	6,11	5,94	0,12	0,17	-0,65	-0,99	-0,17
Kota Surakarta	9,03	9,40	8,84	8,44	8,31	0,33	0,37	-0,56	-0,40	-0,13
Kota Salatiga	4,94	5,14	4,73	4,66	4,57	0,18	0,20	-0,41	-0,07	-0,09
Kota Semarang	4,34	4,56	4,25	4,23	4,03	0,36	0,22	-0,31	-0,02	-0,2
Kota Pekalongan	7,17	7,59	7,00	6,81	6,71	0,57	0,42	-0,59	-0,19	-0,1
Kota Tegal	7,80	8,12	7,91	7,68	7,64	0,33	0,32	-0,21	-0,23	-0,04
Jawa Tengah	11,41	11,79	10,93	10,77	10,47	0,61	0,38	-0,86	-0,16	-0,3

Nama Kota	Tingkat Kemiskinan (%)					Perubahan Tingkat Kemiskinan (%)				
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
Indonesia	9,78	10,14	9,54	9,36	9,03	0,37	0,36	-0,60	-0,18	-0,33

Sumber: BPS, 2024

Posisi relatif tingkat kemiskinan Kota Magelang terhadap kota-kota lain di Jawa Tengah ditunjukkan oleh tabel di atas. Berdasarkan tabel di atas, posisi tingkat kemiskinan Kota Magelang dibandingkan dengan kota-kota lain di Jawa Tengah tetap menunjukkan pencapaian yang baik. Pada tahun 2024, Kota Magelang mempertahankan peringkat sebagai kota dengan tingkat kemiskinan terendah ketiga, seperti yang terjadi sejak tahun 2023. Kota ini mengalami penurunan angka kemiskinan dibandingkan tahun sebelumnya, dengan penurunan sebesar 0,17 persen. Meskipun angka penurunan ini lebih kecil dibandingkan tahun 2023 yang mencapai 0,99 persen, tren positif dalam pengurangan kemiskinan tetap berlanjut. Jika dibandingkan dengan kota-kota lain di Jawa Tengah, Kota Magelang menunjukkan pencapaian yang lebih baik dibandingkan beberapa daerah yang mengalami penurunan lebih kecil, seperti Kota Salatiga (0,09 persen) dan Kota Tegal (0,04 persen).

Penurunan tingkat kemiskinan tidak selalu linier dengan pertumbuhan ekonomi yang terjadi. Fenomena yang sama terjadi di Kota Magelang, Provinsi Jawa Tengah, maupun Nasional. Terlihat selama lima tahun terakhir, pertumbuhan ekonomi yang positif di Kota Magelang akan diikuti dengan penurunan tingkat kemiskinan hanya jika pertumbuhan ekonomi berada pada kisaran 5 persen. Pada tahun 2024, pertumbuhan ekonomi di Kota Magelang tumbuh 5,56 persen, lebih tinggi dibanding pertumbuhan ekonomi tahun sebelumnya, namun penurunan kemiskinan yang terjadi justru lebih rendah dibanding tahun sebelumnya. Hal ini menunjukkan bahwa dampak dari pertumbuhan ekonomi terhadap penurunan kemiskinan di Kota Magelang di tahun 2023 lebih besar dibanding dampak yang sama di tingkat Provinsi Jawa Tengah maupun tingkat Nasional. Di Jawa Tengah dan Nasional, seiring dengan perlambatan perekonomian, besaran penurunan kemiskinan juga semakin mengecil. Dibutuhkan pertumbuhan ekonomi sekitar 5 persen untuk menurunkan tingkat kemiskinan 0,16 persen poin di Jawa Tengah maupun 0,18 persen poin di tingkat Nasional. Sementara di Kota Magelang dengan pertumbuhan ekonomi 5,45 persen tingkat kemiskinan bisa menurun hampir 1 persen poin. Perkembangan perubahan tingkat kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi selama periode 2018-2022 tersaji di tabel berikut.

Tabel 2.33 Perkembangan Perubahan Tingkat Kemiskinan dan Pertumbuhan Ekonomi Kota Magelang, Jawa Tengah dan Indonesia, 2020-2024

Tahun	Kota Magelang		Jawa Tengah		Indonesia	
	Perubahan Tingkat Kemiskinan	Pertumbuhan Ekonomi	Perubahan Tingkat Kemiskinan	Pertumbuhan Ekonomi	Perubahan Tingkat Kemiskinan	Pertumbuhan Ekonomi
2020	0,12	-2,45	0,61	-2,65	0,37	-2,07
2021	0,17	3,20	0,38	3,33	0,36	3,70
2022	-0,65	5,77	-0,86	5,31	-0,60	5,31
2023	-0,99	5,45	-0,16	4,98	-0,18	5,05
2024	-0,17	5,56	-0,30	4,95	-0,33	5,03

Sumber: BPS, 2024

Perkembangan jumlah penduduk miskin pada tahun 2024 menunjukkan tren penurunan yang signifikan di berbagai wilayah, termasuk Kota Magelang. Penurunan jumlah penduduk miskin ini sejalan dengan penurunan tingkat kemiskinan yang telah terjadi. Pada tahun 2024, jumlah penduduk miskin di Kota Magelang turun menjadi 7,25 ribu jiwa dari 7,45 ribu jiwa pada tahun sebelumnya, dengan tingkat pertumbuhan negatif sebesar -2,68 persen. Angka ini menunjukkan penurunan yang lebih besar dibandingkan beberapa kota lain di Jawa Tengah, seperti Kota Surakarta (-1,39 persen) dan Kota Salatiga (-0,85 persen).

Secara agregat, jumlah penduduk miskin di Kota Magelang terus mengalami penurunan, sejalan dengan tren di kota-kota lain di Jawa Tengah dan secara nasional. Pada tahun 2024, jumlah penduduk miskin di Kota Magelang berkurang sebanyak 200 jiwa, dari 7.450 jiwa (2023) menjadi 7.250 jiwa (2024). Dibandingkan dengan kota-kota lain di Jawa Tengah, jumlah penduduk miskin di Kota Magelang tetap yang paling sedikit, seiring dengan total populasi yang juga paling kecil di provinsi ini. Dari segi pertumbuhan penduduk miskin, penurunan jumlah penduduk miskin di Kota Magelang pada tahun 2024 mencapai 2,68 persen, masih tergolong signifikan dibandingkan kota-kota lain di Jawa Tengah. Angka ini lebih besar dibandingkan penurunan di Provinsi Jawa Tengah (-2,30 persen)

Tabel 2.34 Jumlah dan Pertumbuhan Penduduk Miskin Kota-kota di Jawa Tengah dan Indonesia, 2020-2024

Nama Kota/Wilayah	Jumlah Penduduk Miskin (Ribu Jiwa)					Pertumbuhan Penduduk Miskin (%)				
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
Magelang	9,27	9,44	8,65	7,45	7,25	1,87	1,83	-8,37	-13,87	-2,68
Surakarta	47,03	48,78	45,94	43,89	43,28	4,05	3,72	-5,82	-4,46	-1,39
Salatiga	9,69	10,14	9,45	9,41	9,33	5,33	4,64	-6,80	-0,42	-0,85
Semarang	79,58	84,45	79,87	80,53	77,79	10,53	6,12	-5,42	0,83	-3,40
Pekalongan	22,16	23,49	21,81	21,36	21,16	9,70	6,00	-7,15	-2,06	-0,94
Tegal	19,55	20,27	19,78	19,22	19,17	5,11	3,68	-2,42	-2,83	-0,26
Jawa Tengah	3.980,90	4.109,75	3.831,44	3.791,50	3.704,33	6,35	3,24	-6,77	-1,04	-2,30
Indonesia	26.424,02	27.542,77	26.161,16	25.898,55		5,09	4,23	-5,02	-1,00	

Sumber: BPS, 2024

Tidak hanya angka kemiskinan dan Garis Kemiskinan, keberhasilan penanggulangan kemiskinan juga harus memperhatikan indeks kedalaman kemiskinan (*Poverty Gap Index*-P1) yang merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Perkembangan indeks kedalaman kemiskinan di Kota Magelang selama lima tahun terakhir cenderung menurun. Peningkatan indeks kedalaman sempat meningkat di tahun 2020 yang dimungkinkan dampak dari pandemi Covid-19, setelah itu peningkatan juga kembali terjadi di tahun 2023.

Tabel 2.35 Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Kota-kota di Jawa Tengah dan Indonesia, 2020-2024

Nama Kota/Wilayah	Indeks Kedalaman Kemiskinan					Perubahan Indeks Kedalaman Kemiskinan				
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
Kota Magelang	1,12	0,85	0,47	0,74	0,92	0,13	-0,27	-0,38	0,27	0,18
Kota Surakarta	1,50	1,83	1,07	1,00	1,14	-0,10	0,33	-0,76	-0,07	0,14
Kota Salatiga	0,53	0,8	0,66	0,75	0,61	-0,30	0,27	-0,14	0,09	-0,14
Kota Semarang	0,68	0,67	0,56	0,54	0,59	0,11	-0,01	-0,11	-0,02	0,05
Kota Pekalongan	1,28	1,51	0,90	0,82	0,84	0,36	0,23	-0,61	-0,08	0,02
Kota Tegal	1,38	1,04	1,15	0,86	1,34	0,23	-0,34	0,11	-0,29	0,48
Jawa Tengah	1,72	1,91	1,77	1,75	1,64	0,19	0,19	-0,14	-0,02	-0,11
Indonesia	1,61	1,71	1,59	1,53	1,92	0,06	0,10	-0,12	-0,06	0,39

Sumber: BPS, 2024

Tahun 2023 indeks kedalaman kemiskinan Kota Magelang terendah kedua di Jawa Tengah setelah Kota Semarang, melampaui Kota Salatiga (0,75), Kota Pekalongan (0,82), dan Kota Tegal (0,86). Tahun 2024, posisi Kota Magelang digeser oleh Kota Salatiga dan Kota Semarang. Indeks kedalaman kemiskinan Kota Magelang

mencapai mencapai 0,92 sedangkan indeks kedalaman kemiskinan Kota Semarang hanya sebesar 0,59 dan Kota Salatiga hanya sebesar 0,61. Jika dilihat dari perubahan indeksnya, indeks kedalaman kemiskinan di Kota Magelang meningkat sebesar 0,18 poin. Peningkatan tersebut berbanding terbalik dengan indeks kedalaman kemiskinan di Jawa Tengah (-0,11) dan berbanding lurus dengan indeks kedalaman kemiskinan Nasional (0,39). Peningkatan ini perlu diantisipasi karena berarti semakin tinggi nilai indeks kedalaman kemiskinan maka semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk miskin dari garis kemiskinan, artinya tingkat kesejahteraan penduduk miskin semakin memburuk.

Selain indeks kedalaman kemiskinan, indikator lain yang perlu dilihat adalah Indeks Keparahan Kemiskinan (*Poverty Severity Index-P2*). Indeks Keparahan Kemiskinan memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran diantara penduduk miskin. Indeks keparahan kemiskinan juga memiliki interpretasi yang sama dengan indeks kedalaman, dimana semakin rendah nilai indeks justru menunjukkan arah yang lebih baik. Sebaliknya semakin tinggi indeks menunjukkan semakin besar ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin.

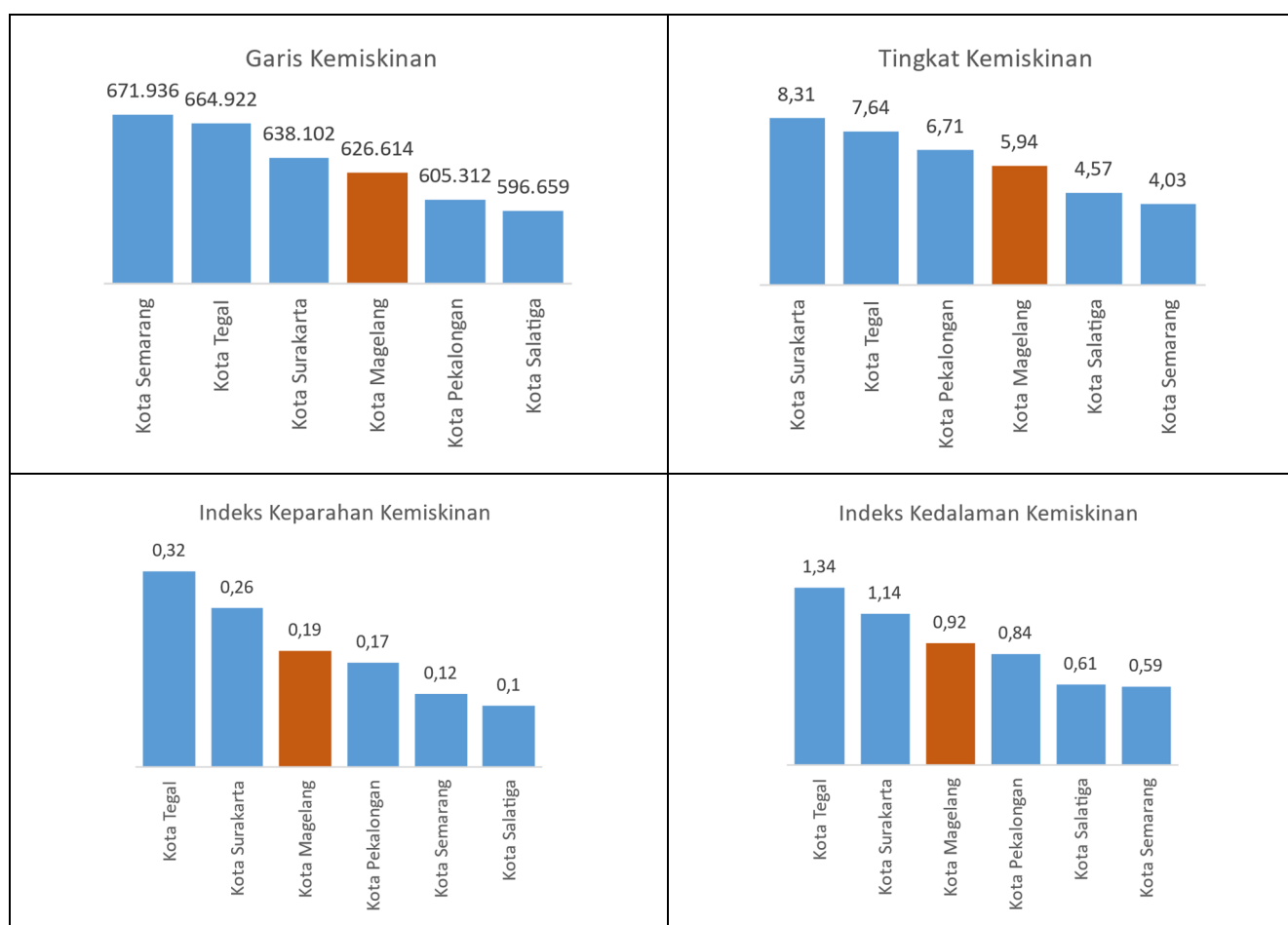
Pada tahun 2024, indeks keparahan kemiskinan di Kota Magelang mengalami kenaikan dibanding tahun sebelumnya dari 0,74 menjadi 0,92. Pola penurunan indeks keparahan kemiskinan di Kota Magelang berbeda dengan pola indeks kedalaman kemiskinan di Jawa Tengah. Jawa Tengah mengalami penurunan dari 1,75 menjadi 1,64, sementara Nasional mengalami kenaikan dari 1,53 menjadi 1,92. Peningkatan indeks keparahan di Kota Magelang ini menunjukkan bahwa ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin sedikit membesar. Meskipun meningkat namun indeks keparahan kemiskinan di Kota Magelang selalu lebih rendah dibanding indeks yang sama di Jawa Tengah dan Nasional. Peningkatan indeks keparahan kemiskinan di tahun ini menggeser posisi Kota Magelang dari posisi terendah kembali menjadi peringkat ke 3 terendah di Jawa Tengah.

Tabel 2.36 Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Kota-kota di Jawa Tengah dan Indonesia, 2020-2024

Nama Kota/Wilayah	Indeks Keparahan Kemiskinan					Perubahan Indeks Keparahan Kemiskinan				
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
Kota Magelang	0,23	0,15	0,06	0,12	0,19	0,04	-0,08	-0,09	0,06	0,07
Kota Surakarta	0,38	0,54	0,27	0,20	0,26	-0,10	0,16	-0,27	-0,07	0,06
Kota Salatiga	0,08	0,19	0,15	0,17	0,10	-0,12	0,11	-0,04	0,02	-0,07
Kota Semarang	0,16	0,14	0,11	0,10	0,12	0,04	-0,02	-0,03	-0,01	0,02
Kota Pekalongan	0,30	0,41	0,17	0,21	0,17	0,12	0,11	-0,24	0,04	-0,04
Kota Tegal	0,36	0,24	0,28	0,13	0,32	0,12	-0,12	0,04	-0,15	0,19
Jawa Tengah	0,34	0,45	0,42	0,42	0,37	0,04	0,11	-0,03	0,00	-0,05
Indonesia	0,38	0,42	0,39	0,38	0,32	0,01	0,04	-0,03	-0,01	-0,06

Sumber: BPS, 2024

Dibandingkan dengan kota-kota lain di Jawa Tengah, capaian indeks kedalaman dan indeks keparahan kemiskinan di Kota Magelang tahun 2024 berada pada peringkat keempat terendah. Kondisi ini dapat dianggap masih sangat mendukung dan memudahkan dalam proses pengentasan kemiskinan di Kota Magelang. Kendati demikian, ada faktor lain yang memperlambat laju penurunan tingkat kemiskinan di Kota Magelang, salah satunya adalah masih tingginya garis kemiskinan. Di antara enam wilayah kota yang ada di Jawa Tengah, Kota Magelang merupakan daerah perkotaan dengan garis kemiskinan tertinggi keempat setelah Kota Semarang, Kota Tegal, dan Kota Surakarta. Hal ini menunjukkan bahwa Garis kemiskinan Kota Magelang tahun 2024 sebesar 626.614 rupiah, sementara garis kemiskinan Kota Semarang sebesar 671.936 rupiah, Kota Tegal sebesar 664.922 rupiah, dan Kota Surakarta sebesar 638.102 rupiah. Upaya pengentasan kemiskinan harus diimbangi dengan upaya menahan laju inflasi garis kemiskinan, salah satunya dengan menahan inflasi bahan kebutuhan pokok. Inflasi garis kemiskinan yang tidak diimbangi dengan peningkatan daya beli masyarakat akan berpotensi meningkatkan jumlah dan persentase penduduk miskin.



Gambar 2.23 Indikator Kemiskinan Wilayah Kota di Jawa Tengah, 2024

Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, 2024

2.1.2.2.6.2 Profil Penduduk Miskin Kota Magelang

Beberapa aspek yang harus menjadi fokus dalam upaya penanganan kemiskinan Kota Magelang adalah pendidikan, ketenagakerjaan, serta sanitasi dan air bersih. Hasil analisis kemiskinan makro Kota Magelang tahun 2024 yang dilakukan oleh BPS menunjukkan bahwa dari sisi pendidikan secara umum komposisi penduduk miskin bergeser dibanding tahun sebelumnya yang didominasi oleh penduduk berijazah SD/SLTP, pada tahun 2024 didominasi oleh penduduk berijazah SMA sebesar 63,71 persen. Sementara komposisi paling sedikit adalah penduduk miskin yang tidak lulus SD, hanya 2,88 persen.

Tabel 2.37 Persentase Penduduk Miskin Usia 15 Tahun Ke Atas Menurut Tingkat Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan di Kota Magelang 2020-2024

Tahun	2020	2021	2022	2023	2024
< SD	10,60	8,95	20,07	6,21	2,88
SD/SLTP	48,38	44,76	46,18	51,11	33,41
SLTA	41,02	46,29	33,75	42,68	63,71

Sumber: BPS Kota Magelang, 2024

Terkait ketenagakerjaan, pada tahun 2024, masih ada 41,72 persen penduduk miskin usia 15 tahun ke atas yang tidak bekerja. Sisanya terbagi atas penduduk yang bekerja di sektor formal dan sektor informal. Pada tahun 2024 proporsi penduduk miskin yang bekerja di sektor formal sedikit meningkat menjadi 34,10 persen, sementara

yang bekerja di sektor informal proporsinya meningkat tajam menjadi 24,18 persen. Dimungkinkan penduduk miskin yang bekerja di sektor formal merupakan kelompok penduduk yang sedikit di bawah garis kemiskinan.

Tabel 2.38 Persentase Penduduk Miskin Usia 15 Tahun ke Atas menurut Status Bekerja di Kota Magelang, 2020-2024

Status Bekerja	2020	2021	2022	2023	2024
Tidak Bekerja	51,20	47,12	45,58	58,27	41,72
Sektor Informal	34,84	18,08	22,20	9,77	24,18
Sektor Formal	23,96	34,81	32,22	31,95	34,10

Sumber: BPS Kota Magelang, 2024

Di Kota Magelang, belum semua masyarakat miskin menggunakan jamban sendiri/bersama. Persentase rumah tangga miskin yang menggunakan jamban sendiri/bersama selama 2 tahun terakhir (tahun 2022-2023) pada kisaran 90 persen. Pada tahun 2024, proporsi rumah tangga miskin yang menggunakan jamban sendiri/bersama semakin sedikit hanya 76,86 persen. Dimungkinkan penduduk yang terentaskan dari kemiskinan adalah kelompok penduduk yang rumah tangganya memiliki jamban sendiri/bersama. Perlu upaya lebih untuk meningkatkan kemampuan masyarakat miskin dalam mengakses jamban sendiri/Bersama, meski hal tersebut sulit diwujudkan. Ukuran rumah masyarakat miskin yang cenderung kecil kadang tidak memungkinkan adanya penambahan ruangan meskipun hanya sekedar ruang untuk jamban/WC.

Tabel 2.39 Persentase Rumah Tangga Miskin yang Menggunakan Air Layak dan Jamban Sendiri/ Bersama di Kota Magelang, 2020-2024

Karakteristik	2020	2021	2022	2023	2024
Air Layak	92,80	100,00	100,00	100,00	100,00
Jamban Sendiri/ Bersama	86,97	75,31	93,56	90,82	76,86

Sumber: BPS Kota Magelang, 2024

2.1.2.2.6.3 Upaya Penurunan Kemiskinan

Upaya penanganan kemiskinan di Kota Magelang pada tahun 2023 menjadi tanggung jawab lintas sektor yang melibatkan berbagai perangkat daerah, untuk penurunan beban pengeluaran, peningkatan pendapatan, dan peningkatan akses terhadap pelayanan dasar bagi masyarakat miskin, melalui berbagai program kegiatan, Beberapa aktivitas kegiatan yang dilakukan antara lain:

- a. Penyelenggaraan sekolah gratis untuk sekolah negeri (SD dan SLTP) melalui pemanfaatan dana BOS dan BOSDA untuk memperluas akses Pendidikan
- b. Peningkatan kualitas sarana prasarana fasilitas Kesehatan dan SDM Kesehatan untuk meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan Kesehatan, salah satunya melalui home care untuk lansia
- c. Pemberian pelatihan kerja kepada pencari kerja, perempuan rentan, dan pemuda
- d. Pemberian pelatihan kepada UMKM untuk peningkatan pendapatan pelaku UMKM
- e. Pemberian bantuan kepada PMKS
- f. Pemberian jaminan sosial berupa permakanan kepada penduduk miskin yang berada di desil 1 dalam daftar P3KE 2022 yang telah diverifikasi dan validasi dengan kegiatan Survey Sosial Ekonomi dan Kependudukan (SSEK) 2023.

2.1.3 Aspek Layanan Umum

2.1.3.1 Fokus Urusan Pelayanan Wajib Pelayanan Dasar

2.1.3.1.1 Pendidikan

2.1.3.1.1.1 Angka Harapan Lama Sekolah

Data harapan lama sekolah (HLS) Kota Magelang selama periode 2020 hingga 2024 menunjukkan tren yang cukup positif, baik dalam realisasi tingkat Kota Magelang maupun perbandingan dengan rata-rata Provinsi Jawa Tengah dan Nasional. Angka Harapan Lama Sekolah di Kota Magelang dengan Provinsi Jawa Tengah dan Nasional dapat dilihat dari tabel berikut ini:

Tabel 2.40 Angka Harapan Lama Sekolah di Kota Magelang, Provinsi Jawa Tengah, dan Nasional; 2020-2024

Tahun	Harapan Lama Sekolah (Tahun)			
	Target RKPD	Realisasi		
		Kota Magelang	Jawa Tengah	Nasional
2020	NA	14,14	12,70	12,98
2021	NA	14,15	12,77	13,08
2022	14,54	14,31	12,81	13,1
2023	14,75	14,40	12,85	13,15
2024	14,97	14,62	12,86	13,21

Sumber: BPS, 2025

Harapan Lama Sekolah (HLS) di Kota Magelang terus meningkat dari 14,14 tahun pada 2020 menjadi 14,62 tahun pada 2024. Kenaikan signifikan terjadi sejak 2022 dengan rata-rata peningkatan 0,15 tahun per tahun, meskipun belum mencapai target RKPD 2024 sebesar 14,97 tahun. HLS Kota Magelang secara konsisten berada di atas rata-rata provinsi dan nasional, dengan selisih yang terus meningkat, mencerminkan kualitas dan akses pendidikan yang lebih baik.

Pada 2024, HLS Kota Magelang selisih 1,41 tahun lebih tinggi dari rata-rata nasional (13,21 tahun). Meskipun target RKPD belum tercapai sepenuhnya, tren positif ini menunjukkan arah kebijakan pendidikan yang efektif. Keberhasilan ini dapat diperkuat dengan memperluas akses pendidikan berkualitas, terutama bagi kelompok rentan, serta meningkatkan program pendidikan formal dan non-formal untuk mendukung keberlanjutan belajar masyarakat.

2.1.3.1.1.2 Angka Rata-Rata Lama Sekolah

Angka Rata-Rata Lama Sekolah di Kota Magelang dengan Provinsi Jawa Tengah dan Nasional dapat dilihat dari tabel berikut ini:

Tabel 2.41 Rata-rata Lama Sekolah Kota Magelang, Jawa Tengah, dan Nasional; 2020-2024

Tahun	Rata-rata Lama Sekolah (Tahun)			
	Target RKPD	Realisasi		
		Kota Magelang	Jawa Tengah	Nasional
2020	10,55	10,39	7,69	8,48
2021	10,59	10,62	7,75	8,54
2022	10,54	10,94	7,93	8,69
2023	10,62	11,20	8,01	8,77

Tahun	Rata-rata Lama Sekolah (Tahun)			
	Target RKPD	Realisasi		
		Kota Magelang	Jawa Tengah	Nasional
2024	10,71	11,43	8,02	8,85

Sumber: BPS, 2025

Rata-rata Lama Sekolah (RLS) di Kota Magelang menunjukkan peningkatan yang konsisten, dari 10,39 tahun pada 2020 menjadi 11,43 tahun pada 2024, dengan rata-rata kenaikan tahunan sebesar 0,21 tahun. Tren positif ini mencerminkan keberhasilan Kota Magelang dalam meningkatkan kualitas pendidikan. RLS Kota Magelang selalu lebih tinggi dibandingkan rata-rata Jawa Tengah (selisih 0,5-0,7 tahun) dan nasional (selisih signifikan hingga 2,66 tahun pada 2024), menunjukkan keunggulan pendidikan di kota ini.

Selain itu, RLS Kota Magelang pada 2024 tidak hanya mencapai tetapi juga melampaui target RKPD sebesar 10,71 tahun. Hal ini menunjukkan keselarasan antara perencanaan dan implementasi kebijakan pendidikan. Meskipun capaian ini sangat baik, Kota Magelang perlu terus memperkuat upaya untuk meningkatkan kualitas dan akses pendidikan, memastikan tren positif ini berlanjut, dan memperkecil kesenjangan pendidikan secara menyeluruh.

2.1.3.1.1.3 Angka Partisipasi Kasar (APK)

Angka Partisipasi Kasar di Kota Magelang dapat dilihat dari tabel berikut ini:

Tabel 2.42 Angka Partisipasi Kasar (APK) Kota Magelang dan Jawa Tengah, 2020-2024

Tahun	PAUD		SD/ MI/ Paket A		SMP/ MTs/ Paket B	
	Jawa Tengah	Kota Magelang	Jawa Tengah	Kota Magelang	Jawa Tengah	Kota Magelang
2020	50,24	89,69	106,32	104,79	93,21	94,93
2021	47,33	95,63	106,40	104,06	94,00	98,57
2022	46,48	70,05	106,19	104,72	94,05	106,05
2023	47,98	84,58	105,01	104,77	92,80	91,01
2024	47,65	84,58	103,86	109,28	90,89	96,37

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Magelang, 2025

Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD di Kota Magelang menunjukkan tren fluktuatif selama periode 2020-2024. Pada 2020, APK PAUD tercatat sangat tinggi di 89,69%, menandakan hampir 90% anak usia dini mengakses pendidikan PAUD. Pada 2021, angka ini meningkat signifikan menjadi 95,63%, mencerminkan keberhasilan dalam memperluas akses pendidikan usia dini. Namun, penurunan tajam terjadi pada 2022, dengan APK menurun menjadi 70,05%, kemungkinan dipengaruhi oleh faktor eksternal seperti dampak pandemi atau perubahan kebijakan. Pada 2023 dan 2024, angka partisipasi kembali stabil di 84,58%, menunjukkan adanya pemulihan akses pendidikan PAUD di Kota Magelang.

Untuk jenjang SD/MI/Paket A, APK Kota Magelang menunjukkan kinerja yang sangat baik dan konsisten melampaui 100%. Pada 2020, APK tercatat 104,79%, mengindikasikan tingginya akses pendidikan dasar, termasuk anak-anak di luar kelompok usia resmi. Meskipun sedikit menurun menjadi 104,06% pada 2021, angka ini kembali meningkat secara signifikan menjadi 109,28% pada 2024, mencerminkan keberhasilan dalam mempertahankan dan meningkatkan partisipasi pendidikan dasar.

Pada jenjang SMP/MTs/Paket B, APK juga menunjukkan tren positif. Pada 2020, angka partisipasi mencapai 94,93%, yang sudah mencerminkan tingkat akses yang baik di tingkat menengah pertama. Pada 2024, APK meningkat menjadi 96,37%, menunjukkan adanya peningkatan akses pendidikan yang berkelanjutan.

Secara keseluruhan, Kota Magelang berhasil menunjukkan kinerja yang sangat baik dalam meningkatkan APK di semua jenjang pendidikan. Tren ini mencerminkan keberhasilan implementasi kebijakan pendidikan yang

efektif, sehingga mampu melampaui target partisipasi pendidikan dibandingkan dengan rata-rata provinsi Jawa Tengah. Upaya tersebut memberikan kontribusi nyata dalam meningkatkan kualitas dan akses pendidikan secara keseluruhan di Kota Magelang.

2.1.3.1.1.4 Angka Partisipasi Murni (APM)

Angka Partisipasi Murni di Kota Magelang dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel 2.43 *Angka Partisipasi Murni (APM) Kota Magelang dan Jawa Tengah, 2020-2024*

Tahun	SD/ MI/ Paket A		SMP/ MTs/ Paket B	
	Jawa Tengah	Kota Magelang	Jawa Tengah	Kota Magelang
2020	98,00	97,95	80,53	81,65
2021	98,22	99,05	80,99	83,33
2022	98,32	99,87	81,02	84,69
2023	98,46	99,96	81,56	78,10
2024	98,46	98,92	81,56	80,64

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Magelang, 2025

APM SD/MI Kota Magelang menunjukkan tren peningkatan yang stabil dari tahun ke tahun. Pada 2020, angka ini tercatat sebesar 97,95% dan meningkat tajam menjadi 99,05% pada 2021. Tren positif ini berlanjut hingga mencapai puncaknya pada 2023 dengan angka 99,96%. Namun, pada 2024 terjadi sedikit penurunan menjadi 98,92%. Meski demikian, APM SD/MI Kota Magelang tetap mencerminkan akses pendidikan dasar yang sangat baik dan mendekati universal.

APM SMP/MTs Kota Magelang juga mengalami dinamika selama periode 2020-2024. Pada 2020, angka ini tercatat sebesar 81,65% dan meningkat secara signifikan hingga mencapai 84,69% pada 2022. Namun, APM mengalami penurunan menjadi 78,10% pada 2023 sebelum kembali membaik menjadi 80,64% pada 2024. Walaupun terdapat fluktuasi, angka ini tetap lebih tinggi dibandingkan rata-rata provinsi Jawa Tengah, mencerminkan keberhasilan dalam menjaga tingkat partisipasi pendidikan menengah meskipun menghadapi tantangan pada beberapa tahun.

2.1.3.1.1.5 Angka Partisipasi Sekolah (APS)

Angka Partisipasi Sekolah (APS) di Kota Magelang digambarkan melalui tingkat partisipasi kelompok umur atau setiap jenjang pendidikan mulai PAUD/ sederajat, SD/sederajat, SMP/sederajat, dan SMA/sederajat. Realisasi pada indikator ini bertujuan untuk memberi gambaran bagaimana akses masyarakat terhadap masing-masing tingkatan pendidikan.

Tabel 2.44 *Angka Partisipasi Sekolah Kota Magelang, 2020-2024*

Tahun	Usia			
	5-6	7-12	13-15	16-18
2020	89,62	99,99	96,01	90,70
2021	85,34	99,72	95,92	90,88
2022	87,52	99,87	96,99	87,58
2023	92,27	99,96	99,55	85,63
2024	92,27	98,92	99,81	80,59

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Magelang, 2025

Pada kelompok usia 5-6 tahun atau setara jejang pendidikan PAUD, dalam kurun waktu 2020-2024 realisasi APS masih mengalami fluktuasi, dimana pada tahun 2024 realisasinya sebesar 92,27; stagnan dibandingkan tahun 2023. Meskipun demikian, realisasi tersebut sudah menggambarkan adanya perbaikan kinerja dimana pada tahun 2020 APS 5-6 tahun masih berada di angka 89,62. Selanjutnya, terkait partisipasi pendidikan Sekolah Dasar atau pada kelompok usia 7-12 tahun, meskipun dalam kurun waktu 2020-2024 relatif mendekati nilai sempurna (100), sayangnya realisasi pada tahun 2024 pada angka 98,92 menunjukkan penurunan dibandingkan tahun 2023 yang berada pada angka 99,96. Berikutnya, mengenai APS pada rentang usia 13-15 tahun atau setara jenjang pendidikan SMP, realisasi pada tahun 2024 dengan angka 99,81 merupakan realisasi terbaik setidaknya dalam periode 2020-2024.

Perhatian lebih lanjut terkait dengan APS, berada pada kelompok usia 16-18 tahun. Selama 3 (tiga) tahun terakhir yaitu periode 2022-2024, realisasi APS terus mengalami penurunan hingga pada tahun 2024 berada pada angka 80,59. Angka tersebut merupakan angka terendah dalam kurun waktu 2020-2024. Penurunan APS jenjang pendidikan SMA menunjukkan bahwa masyarakat belum sepenuhnya memprioritaskan pendidikan sampai tingkat SMA. Pendidikan menengah atas di Kota Magelang mengalami penurunan dalam partisipasi yang perlu mendapat perhatian serius. Penurunan ini menunjukkan adanya tantangan dalam memastikan anak-anak tetap melanjutkan pendidikan di tingkat SMA/SMK.

2.1.3.1.1.6 Angka Putus Sekolah (APtS)

Dalam kurun waktu 2020-2024, Kota Magelang berhasil mempertahankan nol Angka Putus Sekolah (APtS) baik pada jenjang SD/MI maupun SMP/MTs. Kondisi tersebut menggambarkan adanya perbaikan kinerja dimana pada tahun 2019 APtS di jenjang SD/MI tercatat sebesar 0,01 sedangkan jenjang SMP/MTs APtS berada di kisaran 0,16

Angka Putus Sekolah di Kota Magelang dapat dilihat dari tabel berikut ini:

Tabel 2.45 Angka Putus Sekolah Kota Magelang, 2020-2024

Tahun	Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI	Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs
2020	0	0
2021	0	0
2022	0	0
2023	0	0
2023	0	0

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Magelang, 2025

Meskipun Angka Putus Sekolah di Kota Magelang cenderung rendah, keberadaan Anak Tidak Sekolah (ATS) masih menjadi perhatian. Hal ini terlihat dari masih adanya anak usia sekolah yang mengikuti pendidikan di Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM). Hingga akhir tahun 2024, tercatat sebanyak 1.736 anak melanjutkan pendidikan di berbagai PKBM yang ada di Kota Magelang.

Pada tahun 2024, Satuan Pendidikan Nonformal (SPNF) Negeri Kota Magelang mulai beroperasi dengan 70 warga belajar yang terdaftar. Namun, SPNF Negeri ini belum terakreditasi karena masih dalam tahap awal operasional dan belum meluluskan warga belajarnya. Kondisi ini menjadi tantangan sekaligus peluang untuk memperkuat layanan pendidikan nonformal di Kota Magelang, sehingga dapat menjadi alternatif pendidikan bagi masyarakat yang membutuhkan.

Tabel 2.46 Peserta Didik PKBM dan SKB PNF di Kota Magelang Berdasarkan Usia, 2024

No	Nama Satuan Pendidikan	Paket A	Paket B	Paket C	Total
1	PKBM KUNCUP MEKAR	99	259	356	714

No	Nama Satuan Pendidikan	Paket A	Paket B	Paket C	Total
2	PKBM PERMATA	85	254	442	781
3	PKBM UPAYA TRAMPIL	14	99	128	241
4	SKB PNF	3	28	28	70

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Magelang, 2025

Pada tahun 2024, hasil verifikasi dan validasi data Anak Tidak Sekolah (ATS) di Kota Magelang menunjukkan penurunan yang signifikan. Hal ini mencerminkan keberhasilan berbagai program yang telah dilaksanakan. Namun, tantangan tetap ada, terutama di Kecamatan Magelang Tengah yang memiliki jumlah ATS lebih tinggi, disebabkan oleh faktor-faktor seperti penyandang disabilitas, pengalaman kekerasan di sekolah, atau kurangnya motivasi untuk melanjutkan pendidikan.

Untuk mengatasi permasalahan ini, Dinas Pendidikan Kota Magelang mengimplementasikan program Asik Keren (*Ayo Sekolah Kudu Sregep Aja Leren*). Program ini menyediakan berbagai solusi, seperti *homeschooling* untuk siswa difabel, pemberian bantuan sarana pendidikan, serta pemfasilitasi pendidikan kesetaraan dan pendidikan formal lainnya. Selain itu, pendampingan belajar oleh pamong belajar juga dilakukan untuk memastikan setiap anak mendapatkan kesempatan pendidikan yang layak dan sesuai dengan kebutuhannya. Langkah-langkah ini bertujuan untuk mengurangi ATS dan meningkatkan partisipasi pendidikan di Kota Magelang.

Tabel 2.47 Hasil Verifikasi dan Validasi Data Anak Tidak Sekolah (ATS), 2024

No	Kecamatan	Jumlah Anak Tidak Sekolah (ATS)	
		2023	2024
1.	Kecamatan Magelang Utara	7	1
2.	Kecamatan Magelang Tengah	25	7
3.	Kecamatan Magelang Selatan	19	5

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Magelang, 2025

2.1.3.1.1.7 Angka Kelulusan (AL)

Angka Kelulusan di Kota Magelang dapat dilihat dari tabel berikut ini:

Tabel 2.48 Angka Kelulusan SD/MI dan SMP/MTs Kota Magelang, 2020-2024

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
Angka Kelulusan (AL) SD/MI	100	100	100	100	100
Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs	100	100	100	100	100
Angka Kelulusan (AL) Kesetaraan	100	100	100	100	100

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Magelang, 2025

Selama periode 2020 hingga 2024, angka kelulusan tingkat SD/MI dan SMP/MTs di Kota Magelang mencapai 100 persen. Hal yang sama juga terjadi pada pendidikan kesetaraan, yang menunjukkan angka kelulusan ideal sebesar 100 persen. Capaian ini mencerminkan efektivitas sistem pendidikan di Kota Magelang dalam memastikan setiap peserta didik menyelesaikan pendidikannya.

2.1.3.1.1.8 Angka Melanjutkan (AM)

Tabel 2.49 Persentase Angka Melanjutkan SD/MI ke SMP/MTs Kota Magelang, 2020-2024

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah siswa baru tingkat 1 SMP/MTs	3.642	3.198	3.374	3.374	3.354
Jumlah lulusan SD/MI	2.610	2.352	2.371	2.324	2.100
Angka melanjutkan SD/MI ke SMP/MTs (%)	123,03	135	142	145	159

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Magelang, 2025

Jumlah siswa baru tingkat 1 SMP/MTs di Kota Magelang mengalami fluktuasi dalam lima tahun terakhir. Pada tahun 2020, jumlah siswa baru tercatat sebanyak 3.642, kemudian menurun menjadi 3.198 pada tahun 2021. Angka ini kembali meningkat menjadi 3.374 pada tahun 2022 dan tetap stabil di angka yang sama pada tahun 2023, sebelum sedikit menurun menjadi 3.354 pada tahun 2024.

Sementara itu, jumlah lulusan SD/MI cenderung mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2020, jumlah lulusan mencapai 2.610, kemudian menurun menjadi 2.352 pada tahun 2021. Tren penurunan ini berlanjut hingga tahun 2024, dengan jumlah lulusan hanya 2.100.

Meskipun jumlah lulusan SD/MI mengalami penurunan, Angka Melanjutkan dari SD/MI ke SMP/MTs justru menunjukkan peningkatan signifikan. Pada tahun 2020, angka ini berada di 123,03 dan terus meningkat hingga mencapai 159 pada tahun 2024. Peningkatan ini menunjukkan bahwa jumlah siswa baru di tingkat SMP/MTs lebih tinggi dibandingkan jumlah lulusan SD/MI di Kota Magelang. Hal ini mengindikasikan bahwa banyak siswa yang berasal dari luar daerah atau dari jalur lain, seperti pendidikan nonformal, yang melanjutkan pendidikan ke SMP/MTs di Kota Magelang.

2.1.3.1.1.9 Rasio Siswa terhadap Guru

Secara keseluruhan, rasio guru terhadap murid di SD/MI menunjukkan tren yang semakin ideal, sementara di SMP/MTs rasio ini mengalami peningkatan dalam kurun waktu 2022-2024 yang dapat menjadi perhatian dalam perencanaan tenaga pendidik di masa mendatang.

Rasio siswa per guru di Kota Magelang dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.50 Rasio Guru-Murid Kota Magelang, 2020-2024

Tahun	SD/MI		Rasio	SMP/MTs		Rasio
	Jumlah Guru	Jumlah Murid		Jumlah Guru	Jumlah Murid	
2020	851	15.541	18,26	744	10.694	14,37
2021	851	13.068	15,35	629	9.583	15,23
2022	867	13.333	15,37	676	10.880	16,09
2023	890	13.026	14,63	718	11.221	15,63
2024	1.099	13.636	12,41	629	11.314	17,98

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Magelang, 2025; DataGo, 2025

Dalam lima tahun terakhir, jumlah guru dan murid di jenjang SD/MI dan SMP/MTs di Kota Magelang mengalami perubahan yang cukup signifikan, yang berdampak pada rasio guru terhadap murid di masing-masing jenjang.

Pada jenjang SD/MI, jumlah guru meningkat dari 851 pada tahun 2020 menjadi 1.099 pada tahun 2024. Sementara itu, jumlah murid mengalami fluktuasi, dari 15.541 pada tahun 2020 menurun menjadi 13.026 pada tahun 2023, sebelum kembali meningkat menjadi 13.636 pada tahun 2024. Peningkatan jumlah guru yang lebih besar dibandingkan jumlah murid menyebabkan rasio guru terhadap murid semakin membaik, dari 18,26 pada tahun 2020 menjadi 12,41 pada tahun 2024.

Di jenjang SMP/MTs, jumlah guru cenderung berfluktuasi, dengan angka tertinggi 744 pada tahun 2020 dan angka terendah 629 pada tahun 2021 dan 2024. Sementara itu, jumlah murid mengalami peningkatan, dari 10.694 pada tahun 2020 menjadi 11.314 pada tahun 2024. Meskipun jumlah guru di tahun 2024 sama dengan tahun 2021, jumlah murid lebih tinggi, yang dapat berdampak pada peningkatan beban kerja guru pada tahun 2024.

2.1.3.1.1.10 Kualifikasi Guru

Persentase guru yang memiliki kualifikasi S1/S2 di Kota Magelang menunjukkan tren yang bervariasi di setiap jenjang pendidikan selama periode 2020-2024.

Tabel 2.51 Jumlah Guru dan Pendidikan Guru Kota Magelang, 2020-2024

No.	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Persentase	80,92%	65,55%	96,63%	72,58%	65.92%
1.a	Guru PAUD	262	508	416	445	441
1.b	Lulusan S1/S2	212	333	402	323	318
2	Persentase	95,30%	98,47%	99,29	95,4%	98.40%
2.a	Guru SD/MI	851	851	866	1000	1099
2.b	Lulusan S1/S2	811	838	860	954	1053
3	Persentase	95,71%	99,04%	98,71%	98,71%	99.00%
3.a	Guru SMP/MTs	629	629	621	621	629
3.b	Lulusan S1/S2	602	623	613	613	576

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Magelang, 2025

Pada jenjang PAUD, persentase guru berkualifikasi S1/S2 mengalami fluktuasi yang cukup besar. Angka tertinggi terjadi pada tahun 2022, yaitu 96,63%, sementara angka terendah tercatat pada tahun 2021, yaitu 65,55%. Setelah mengalami kenaikan signifikan di tahun 2022, persentase ini kembali turun menjadi 72,58% di tahun 2023 dan 65,92% di tahun 2024. Fluktuasi ini menunjukkan ketidakstabilan dalam kualifikasi akademik guru PAUD yang perlu mendapat perhatian lebih untuk peningkatan kualitas pendidikan di jenjang ini.

Di jenjang SD/MI, persentase guru yang berkualifikasi S1/S2 cenderung tinggi dan stabil, berkisar antara 95,30% hingga 99,29%. Setelah mengalami peningkatan dari 95,30% di tahun 2020 menjadi 99,29% di tahun 2022, angka ini sedikit menurun menjadi 95,4% di tahun 2023 sebelum kembali naik ke 98,40% pada tahun 2024. Konsistensi persentase yang tinggi menunjukkan bahwa hampir seluruh guru SD/MI telah memenuhi standar kualifikasi akademik yang diharapkan.

Pada jenjang SMP/MTs, persentase guru berkualifikasi S1/S2 relatif stabil dan cenderung mendekati 100%. Angka tertinggi terjadi pada tahun 2021 dengan 99,04%, sementara angka terendah tercatat pada tahun 2020 dengan 95,71%. Sejak tahun 2022, persentase ini tetap berada di kisaran 98,71% hingga 99,00%, menunjukkan bahwa hampir seluruh guru SMP/MTs telah memiliki kualifikasi akademik yang sesuai dengan standar pendidikan.

Secara keseluruhan, persentase guru berkualifikasi S1/S2 di jenjang SD/MI dan SMP/MTs menunjukkan tren yang cukup baik dengan tingkat kualifikasi yang hampir merata. Namun, pada jenjang PAUD, masih terdapat fluktuasi yang cukup signifikan, yang dapat menjadi perhatian utama dalam upaya peningkatan kualitas pendidikan anak usia dini.

2.1.3.1.1.11 Kondisi Ruang Kelas

Mutu pendidikan tidak hanya ditentukan oleh kualitas tenaga pendidik, tetapi juga dipengaruhi oleh kondisi sarana dan prasarana (saprass) yang tersedia. Di Kota Magelang, kondisi saprass pendidikan masih menghadapi

tantangan, terutama terkait dengan keberadaan ruang kelas yang mengalami kerusakan dalam berbagai tingkatan, mulai dari rusak ringan, sedang, hingga berat. Ruang kelas yang tidak layak dapat berdampak pada kenyamanan serta efektivitas proses pembelajaran, sehingga perlu mendapatkan perhatian serius dari pemerintah dan pemangku kepentingan di bidang pendidikan.

Untuk mengatasi permasalahan ini, pemerintah terus berupaya meningkatkan sarpras pendidikan melalui berbagai program rehabilitasi dan pembangunan infrastruktur sekolah. Salah satu strategi yang digunakan adalah optimalisasi anggaran, baik melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Sarpras Pendidikan dari APBN maupun melalui pendanaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Rehabilitasi ini mencakup perbaikan ruang kelas yang mengalami kerusakan, pembangunan ruang belajar baru, hingga pengadaan fasilitas pendukung lainnya seperti laboratorium, perpustakaan, dan sanitasi sekolah.

Tabel 2.52 Kondisi Ruang Kelas Sekolah (SD, MI, SMP, dan MTs) Kota Magelang, 2020-2024

Jenjang	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah	77	75	75	74	74
	Jumlah Ruang Kelas	578	578	610	633	616
	Rusak Berat	1	1	7	22	0
	Rusak Ringan	77	77	18	169	25
	Baik	500	500	585	442	591
	Persentase Ruang Kelas Kondisi baik	86.51	86.51	95.90	69.83	95,94
Madrasah Ibtidaiyah	Jumlah Sekolah	2	2	2	2	2
	Jumlah Ruang Kelas	25	25	25	25	25
	Rusak Berat	0	0	0	0	0
	Rusak Ringan	2	2	4	4	4
	Baik	23	23	21	21	21
	Persentase Ruang Kelas Kondisi baik	92	92	84	84	84
Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah	20	20	20	20	20
	Jumlah Ruang Kelas	298	298	298	412	394
	Rusak Berat	0	0	6	8	0
	Rusak Ringan	148	148	16	130	26
	Baik	150	150	276	274	368
	Persentase Ruang Kelas Kondisi baik	50.34	50.34	92.62	77,61	93,40

Jenjang	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
Madrasah Tsanawiyah	Jumlah Sekolah	3	3	3	3	3
	Jumlah Ruang Kelas	52	52	49	49	49
	Rusak Berat	16	16	16	16	16
	Rusak Ringan	0	0	0	0	0
	Baik	36	36	33	33	33
	Persentase Ruang Kelas Kondisi baik	69,23	69,23	67,35	67,35	67,35

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Magelang, 2025

2.1.3.1.1.12 Akreditasi Satuan dan Lembaga Pendidikan

Sarana pendidikan di Kota Magelang, mencakup PAUD, SD, SMP, dan PKBM, hampir seluruhnya telah terakreditasi, menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam meningkatkan mutu pendidikan. Pada tahun 2024, persentase PAUD yang terakreditasi mencapai 99,21%. Meskipun belum mencapai 100%, capaian ini menunjukkan peningkatan signifikan dibandingkan tahun 2023, yang berada di angka 95,24%. Peningkatan tersebut tidak terlepas dari regulasi operasional yang mempersyaratkan lembaga pendidikan untuk memperoleh akreditasi sebagai standar mutu.

Untuk jenjang Sekolah Dasar (SD), hingga tahun 2024 terdapat 74 unit SD di Kota Magelang, di mana seluruhnya telah terakreditasi dengan nilai $\geq B$. Sebagai catatan, SD IT Tahfidzul Quran Ihsanul Fikri, yang pada tahun 2023 belum terakreditasi karena belum meluluskan siswa, kini telah mendapatkan akreditasi pada tahun 2024.

Pada jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP), dari total 20 unit SMP yang tersebar di Kota Magelang, seluruhnya juga telah terakreditasi dengan nilai $\geq B$, mencerminkan kualitas pendidikan yang relatif merata di tingkat ini.

Namun, di sisi lain, tantangan masih ada dalam konteks Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP). Dalam periode lima tahun terakhir, tidak terjadi peningkatan jumlah maupun persentase LKP yang terakreditasi. Untuk mengatasi kendala ini, langkah awal yang perlu diambil adalah penguatan pengelolaan data terkait LKP, sehingga dapat menggambarkan kondisi di lapangan secara akurat dan menjadi dasar pengambilan kebijakan yang efektif.

Melalui upaya kolaboratif antara pemerintah, institusi pendidikan, dan masyarakat, Kota Magelang diharapkan dapat terus meningkatkan kualitas sarana pendidikan di semua jenjang, sehingga mampu mewujudkan pendidikan yang berkualitas, inklusif, dan berkeadilan.

Tabel 2.53 Akreditasi PAUD, SD, SMP, PKBM, dan LKP Kota Magelang; 2020-2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	% PAUD terakreditasi	77,95%	64,38%	56,25%	95,24%	99,21%
1.a	PAUD	127	146	128	126	126
1.b	PAUD terakreditasi	99	94	72	120	125
2	% SD terakreditasi	97,37%	98,67%	98,67%	98,65%	100%
2.a	SD	76	75	75	74	74
2.b	SD terakreditasi	74	74	74	73	74
3	% SMP terakreditasi	100%	100%	100%	100%	100%
3.a	SMP	20	20	20	20	20
3.b	SMP terakreditasi	20	20	20	20	20
4	% PKBM terakreditasi	100%	100%	100%	100%	100%

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
4.a	PKBM	3	3	3	3	3
4.b	PKBM terakreditasi	3	3	3	3	3
5	% LKP terakreditasi	26,67%	26,67%	26,67%	26,67%	26,67%
5.a	LKP	30	30	30	30	30
5.b	LKP terakreditasi	8	8	8	8	8

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Magelang, 2025

Tabel 2.54 Akreditasi SD SMP Kota Magelang, 2024

No.	Uraian	Belum Berakreditasi	Berakreditasi			Total
			A	B	C	
1.	Sekolah Dasar (SD)	-	34	39	1	74
2.	Sekolah Menengah Pertama (SMP)	-	18	2	-	20

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Magelang, 2025

2.1.3.1.1.13 Perizinan Satuan Pendidikan

Kondisi status perizinan Satuan Pendidikan di Kota Magelang Tahun 2020 - 2024, sebagaimana tertuang pada tabel berikut:

Tabel 2.55 Perizinan PAUD, SD, dan SMP Kota Magelang, 2020-2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	% SD berizin	100%	100%	100%	100%	100%
1.a	SD	76	75	75	74	74
1.b	SD berizin	76	75	75	74	74
2	% SMP berizin	100%	100%	100%	100%	100%
2.a	SMP	20	20	20	20	20
2.b	SMP berizin	20	20	20	20	20
3	% PAUD berizin	100%	100%	100%	100%	100%
3.a	PAUD	127	128	128	126	126
3.b	PAUD berizin	127	128	128	126	126

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Magelang, 2024

Hingga tahun 2024, seluruh lembaga pendidikan di Kota Magelang menunjukkan kemajuan signifikan dalam kepatuhan terhadap perizinan operasional, yang menjadi salah satu indikator penting dalam pengelolaan pendidikan berkualitas. Sebanyak 74 unit Sekolah Dasar (SD) dan 20 unit Sekolah Menengah Pertama (SMP) telah memiliki izin operasional resmi, memastikan legalitas dan standar penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Pada jenjang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan lembaga sejenis, tercatat 126 lembaga telah memenuhi persyaratan perizinan operasional hingga tahun 2024. Capaian ini tidak hanya menunjukkan tingginya perhatian pemerintah terhadap tata kelola pendidikan formal dan nonformal, tetapi juga mencerminkan kesadaran para pengelola lembaga pendidikan untuk memenuhi standar yang ditetapkan.

Kepatuhan terhadap perizinan operasional tidak hanya memastikan legalitas, tetapi juga mendorong penguatan mutu pendidikan secara menyeluruh. Dengan adanya izin operasional, setiap lembaga pendidikan dipastikan memiliki landasan hukum yang kuat untuk menjalankan aktivitasnya, sekaligus membuka peluang untuk mendapatkan pembinaan dan dukungan lebih lanjut dari pemerintah daerah.

Keberhasilan ini menjadi bukti komitmen bersama antara pemerintah, masyarakat, dan lembaga pendidikan dalam mewujudkan sistem pendidikan yang tertib, inklusif, dan berorientasi pada peningkatan kualitas. Meski demikian, upaya tetap perlu dilakukan untuk memastikan keberlanjutan program pembinaan, terutama bagi lembaga-lembaga yang baru berdiri atau berada di wilayah yang memerlukan perhatian khusus.

2.1.3.1.1.14 Pengembangan Bahasa dan Sastra

Persentase pendidik pada satuan pendidikan dasar yang menghasilkan karya sastra (dalam bentuk buku) di Kota Magelang menunjukkan perkembangan positif selama periode 2020-2024. Pada tahun 2020, capaian awal berada di angka 7,50% dan tetap stagnan hingga tahun 2021. Namun, pada tahun 2022 terjadi peningkatan signifikan hingga mencapai 13,45%, yang mencerminkan adanya dorongan nyata untuk meningkatkan partisipasi pendidik dalam kegiatan literasi. Tren positif ini berlanjut pada tahun 2023 dengan capaian sebesar 20,90%. Meskipun begitu, pada tahun 2024, persentase ini tidak mengalami peningkatan lebih lanjut dan tetap berada di angka 20,90%.

Stagnasi yang terjadi pada tahun 2024 menunjukkan perlunya evaluasi dan strategi baru untuk mendorong peningkatan capaian, seperti melalui pelatihan literasi, pemberian insentif bagi pendidik yang aktif dalam menulis karya sastra, dan kolaborasi dengan penerbit untuk memfasilitasi penerbitan buku. Meskipun target akhir RPJMD belum tercapai, progres ini menggambarkan potensi besar yang dapat terus dioptimalkan guna mendukung pengayaan literasi dan ilmu pengetahuan di tingkat pendidikan dasar.

Tabel 2.56 Persentase Pendidik pada Satuan Pendidikan Dasar yang Membuat Karya Sastra (Dalam Bentuk Buku), 2020-2024

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah pendidik pada satuan pendidikan dasar yang membuat karya sastra dalam bentuk buku	60	60	113	294	294
Jumlah pendidik pada satuan pendidikan dasar di Kota Magelang	800	800	840	1.407	1.407
Persentase Pendidik pada Satuan Pendidikan Dasar yang Membuat Karya Sastra (Dalam Bentuk Buku)	7,50	7,50	13,45	20,90	20,90

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Magelang, 2025

2.1.3.1.1.15 Satuan Pendidikan yang Mempunyai Guru Mengajar Mulok Bahasa Daerah/Seni Budaya dan Mengarusutamakan Kebudayaan

Pada tahun 2024, persentase satuan pendidikan di Kota Magelang yang memiliki guru yang mengajar muatan lokal (mulok) bahasa daerah, seni budaya, dan/atau melaksanakan kegiatan pengarusutamaan kebudayaan baru mencapai 21,28%. Angka ini mencakup satuan pendidikan di semua jenjang, baik PAUD, SD, maupun SMP, yang terdiri dari sekolah negeri, swasta, pendidikan umum, maupun pendidikan keagamaan. Capaian tersebut menunjukkan bahwa baru 21,28% satuan pendidikan yang memenuhi dua dari tiga indikator, yaitu guru yang mengajar mulok bahasa daerah, guru yang mengajar seni budaya, atau pelaksanaan kegiatan pengarusutamaan kebudayaan di sekolah.

Kinerja indikator ini menjadi semakin penting dalam konteks upaya mempertahankan dan mengembangkan budaya serta kearifan lokal, terutama di tengah arus teknologi dan budaya global yang semakin kuat. Penguatan pembelajaran budaya dan seni lokal di sekolah bukan hanya menjadi langkah strategis dalam menjaga identitas lokal, tetapi juga menjadi sarana untuk membentuk karakter siswa yang menghargai nilai-nilai budaya bangsa.

Untuk meningkatkan capaian ini, diperlukan strategi yang lebih komprehensif, seperti penyediaan pelatihan bagi guru dalam mengajarkan mulok bahasa daerah dan seni budaya, penyusunan kurikulum yang terintegrasi dengan kearifan lokal, serta kolaborasi antara pemerintah daerah, komunitas budaya, dan sekolah. Selain itu,

pengarusutamaan kebudayaan juga dapat diperkuat melalui program ekstrakurikuler, kegiatan seni tradisional, serta pengenalan adat istiadat lokal dalam kehidupan sehari-hari di sekolah.

Jika dikelola dengan baik, program ini dapat menjadi salah satu pilar utama dalam membangun generasi yang tidak hanya terampil secara intelektual tetapi juga memiliki kepedulian terhadap warisan budaya dan identitas lokal.

2.1.3.1.1.16 Kondisi Standar Kompetensi Minimum pada Asesmen Tingkat Nasional

Indikator literasi dan numerasi di Kota Magelang menunjukkan perkembangan yang signifikan pada tahun-tahun terakhir. Untuk literasi membaca, baik di tingkat SD/ sederajat maupun SMP/ sederajat, terjadi peningkatan yang stabil dari tahun 2021 hingga 2024. Pada SD/ sederajat, literasi membaca meningkat dari 66,35 pada 2021 menjadi 78,28 pada 2023 dan tetap pada angka yang sama pada 2024. Sementara itu, literasi membaca di SMP/ sederajat juga meningkat secara konsisten, dari 79,43 pada 2021 menjadi 86,9 pada 2023 dan 2024.

Peningkatan yang paling mencolok terjadi pada numerasi, baik di tingkat SD maupun SMP. Di tingkat SD/ sederajat, angka numerasi meningkat pesat dari 43,72 pada 2021 menjadi 90,29 pada 2024. Demikian juga di SMP/ sederajat, numerasi meningkat dari 60,4 pada 2021 menjadi 94,23 pada 2024.

Pencapaian ini menunjukkan kemajuan signifikan dalam kualitas pendidikan dasar dan menengah di Kota Magelang, terutama dalam kemampuan literasi dan numerasi yang sangat krusial untuk mendukung perkembangan akademik siswa. Upaya terus dilakukan untuk menjaga dan meningkatkan kualitas pendidikan agar angka-angka ini terus menunjukkan tren positif.

Tabel 2.57 Persentase Siswa yang Mencapai Standar Kompetensi Minimum pada Asesmen Tingkat Nasional (Seluruh Jenjang), 2020-2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Literasi Membaca SD/ Sederajat	-	66,35	69,54	78,28	78,28
2	Literasi Membaca SMP/ Sederajat	-	79,43	81,22	86,9	86,9
3	Numerasi SD/ Sederajat	-	43,72	50,05	58,72	90,29
4	Numerasi SMP/ Sederajat	-	60,4	64,27	74,98	94,23

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Magelang, 2025

2.1.3.1.1.17 Penduduk Berusia 15 Tahun Ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi

Pada tahun 2024, proporsi penduduk berusia 15 tahun ke atas yang memiliki kualifikasi pendidikan tinggi di Kota Magelang tetap sebesar 18,77%, sama dengan angka tahun 2023. Meskipun tidak ada perubahan, angka ini masih menunjukkan penurunan dibandingkan dengan tahun 2022 yang tercatat sebesar 20,87%.

Upaya untuk memperbesar proporsi penduduk dengan pendidikan tinggi menjadi sangat penting, karena kualitas angkatan kerja yang terbentuk akan berperan langsung dalam meningkatkan produktivitas dan daya saing Kota Magelang. Pendidikan tinggi tidak hanya berkontribusi pada peningkatan keterampilan dan pengetahuan individu, tetapi juga mendukung pengembangan sektor-sektor ekonomi yang lebih kompleks dan berkelanjutan.

Tabel 2.58 Persentase Siswa yang Mencapai Standar Kompetensi Minimum pada Asesmen Tingkat Nasional (Seluruh Jenjang), 2020-2024

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun Ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi	14,98	19,6	20,87	18,77	18,77*

Sumber: Statistik Pendidikan 2024; BPS Jawa Tengah, 2024

2.1.3.1.2 Kesehatan

2.1.3.1.2.1 Indeks Kesehatan dan Usia Harapan Hidup (UHH)

Indeks Kesehatan di Kota Magelang menunjukkan peningkatan stabil setiap tahun, dari 0.875 pada tahun 2020 menjadi 0.885 pada tahun 2024. Hal serupa juga terlihat pada Umur Harapan Hidup (UHH) yang meningkat dari 76,85 tahun pada tahun 2020 menjadi 77,54 tahun pada tahun 2024. Kenaikan ini berlangsung secara bertahap setiap tahun, mencerminkan tren perbaikan yang konsisten dalam kualitas kesehatan masyarakat.

Peningkatan pada Indeks Kesehatan menggambarkan adanya perbaikan signifikan dalam layanan kesehatan, akses kesehatan, serta kesejahteraan masyarakat secara umum. Stabilitas tren positif ini menunjukkan bahwa berbagai upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat di Kota Magelang telah membuahkan hasil yang baik.

Sementara itu, peningkatan UHH mencerminkan adanya perbaikan dalam kualitas hidup, terutama pada aspek gizi, akses layanan kesehatan, dan penurunan angka kematian pada kelompok usia tertentu. Meskipun peningkatannya relatif kecil, konsistensinya menandakan adanya perbaikan yang berkelanjutan.

Meskipun tren ini menunjukkan perkembangan yang positif, masih terdapat ruang untuk lebih meningkatkan kualitas hidup masyarakat di masa depan. Optimalisasi program pencegahan penyakit, promosi pola hidup sehat, dan peningkatan akses layanan kesehatan berkualitas dapat mempercepat pertumbuhan ini, sehingga Kota Magelang dapat terus menjadi kota dengan kualitas kesehatan masyarakat yang lebih baik.

Secara lebih rinci, capaian Indeks Kesehatan dan UHH Kota Magelang tahun 2020-2024, sebagaimana tabel dibawah ini:

Tabel 2.59 Indeks Kesehatan Kota Magelang, 2020-2024

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
Indeks Kesehatan	0.875	0.876	0.877	0.880	0.885
UHH	76.85	76.93	77.02	77.22	77.54

Sumber: BPS, 2025

2.1.3.1.2.2 Kasus Kematian Ibu, Bayi, dan Balita

Angka Kematian Ibu (AKI) di Kota Magelang pada kurun waktu tahun 2020-2024, sebagaimana tabel di bawah ini:

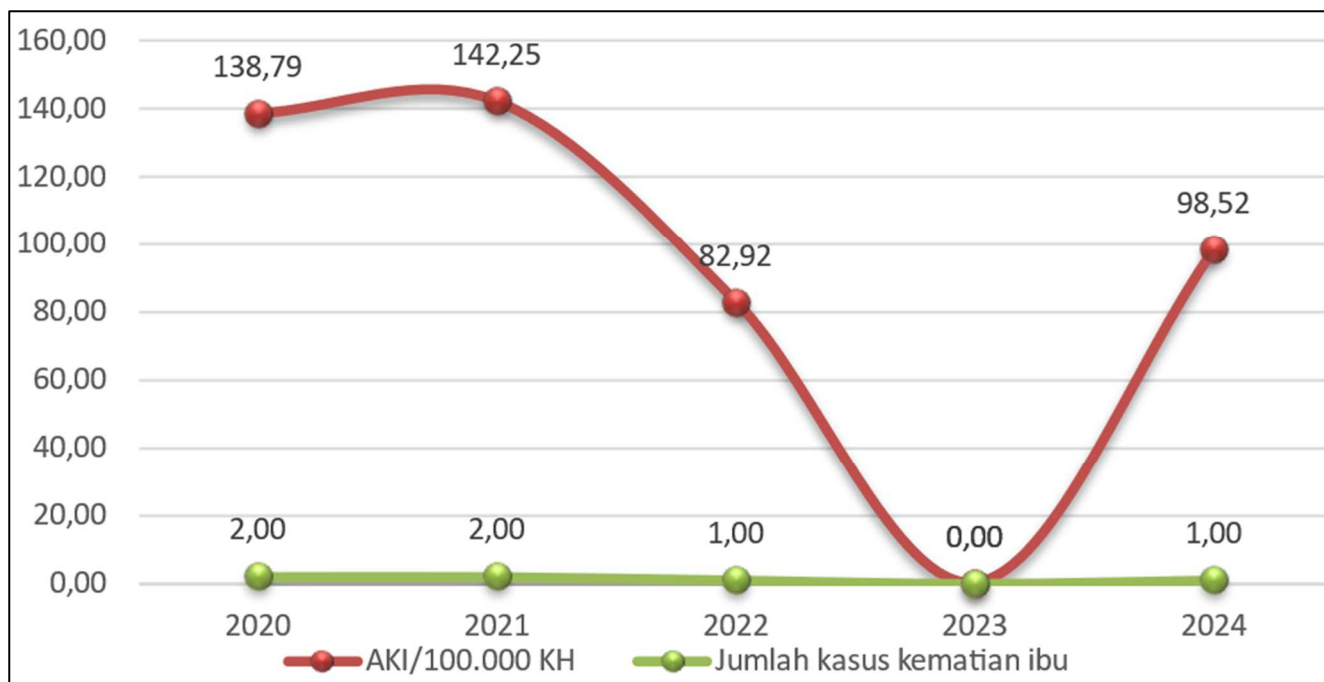
Tabel 2.60 Kasus Kematian Ibu Melahirkan di Kota Magelang, 2020-2024

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah kasus kematian ibu melahirkan	2	2	1	0	1
Jumlah ibu melahirkan	1440	1.409	1.215	1.096	1.013
AKI/100.000 KH	138,79	142,25	82,92	0	98,52

Sumber: BPS Kota Magelang, 2025; Dinas Kesehatan Kota Magelang, 2025

Jumlah kasus kematian ibu melahirkan mengalami fluktuasi dari tahun 2020 hingga 2024. Pada tahun 2020 dan 2021, tercatat masing-masing 2 kasus. Angka ini menurun menjadi 1 kasus pada tahun 2022, bahkan mencapai 0 kasus pada tahun 2023. Namun, pada tahun 2024 terdapat kembali 1 kasus. Penurunan kasus kematian pada tahun 2023 menunjukkan adanya perbaikan signifikan dalam upaya pencegahan kematian ibu melahirkan, meskipun diperlukan usaha tambahan untuk mempertahankan tren ini.

Angka Kematian Ibu (AKI) per 100.000 kelahiran hidup menunjukkan tren fluktuatif: 138,79 (2020), meningkat menjadi 142,25 (2021), lalu menurun signifikan menjadi 82,92 (2022). Pada 2023, AKI mencapai 0, namun kembali meningkat menjadi 98,52 pada 2024. Penurunan AKI pada 2023 menjadi nol menunjukkan keberhasilan intervensi kesehatan ibu dan bayi, tetapi lonjakan kembali pada 2024 mengindikasikan perlunya peningkatan strategi pencegahan.



Gambar 2.24 AKI dan Jumlah Kematian Ibu di Kota Magelang, 2020-2024

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Magelang, 2025

Fluktuasi terlihat selama periode 2020-2024. AKB tertinggi terjadi pada 2021 (15,60/1.000 KH), sementara terendah pada 2023 (5,47/1.000 KH). Pada 2024, AKB meningkat kembali menjadi 11,82/1.000 KH. Jumlah kasus kematian bayi menurun dari 20 kasus (2020) menjadi 6 kasus (2023), namun meningkat kembali menjadi 12 kasus pada 2024. Faktor risiko seperti persalinan prematur, asfiksia, dan infeksi neonatal masih menjadi penyebab utama kematian bayi.

Mirip dengan AKB, AKABA menunjukkan fluktuasi. Angka tertinggi tercatat pada 2020 (16,66/1.000 KH) dan terendah pada 2022 (8,29/1.000 KH). Pada 2024, AKABA meningkat menjadi 11,82/1.000 KH. Jumlah kasus kematian balita menurun dari 24 kasus (2020) menjadi 8 kasus (2023), sebelum naik kembali menjadi 12 kasus pada 2024.

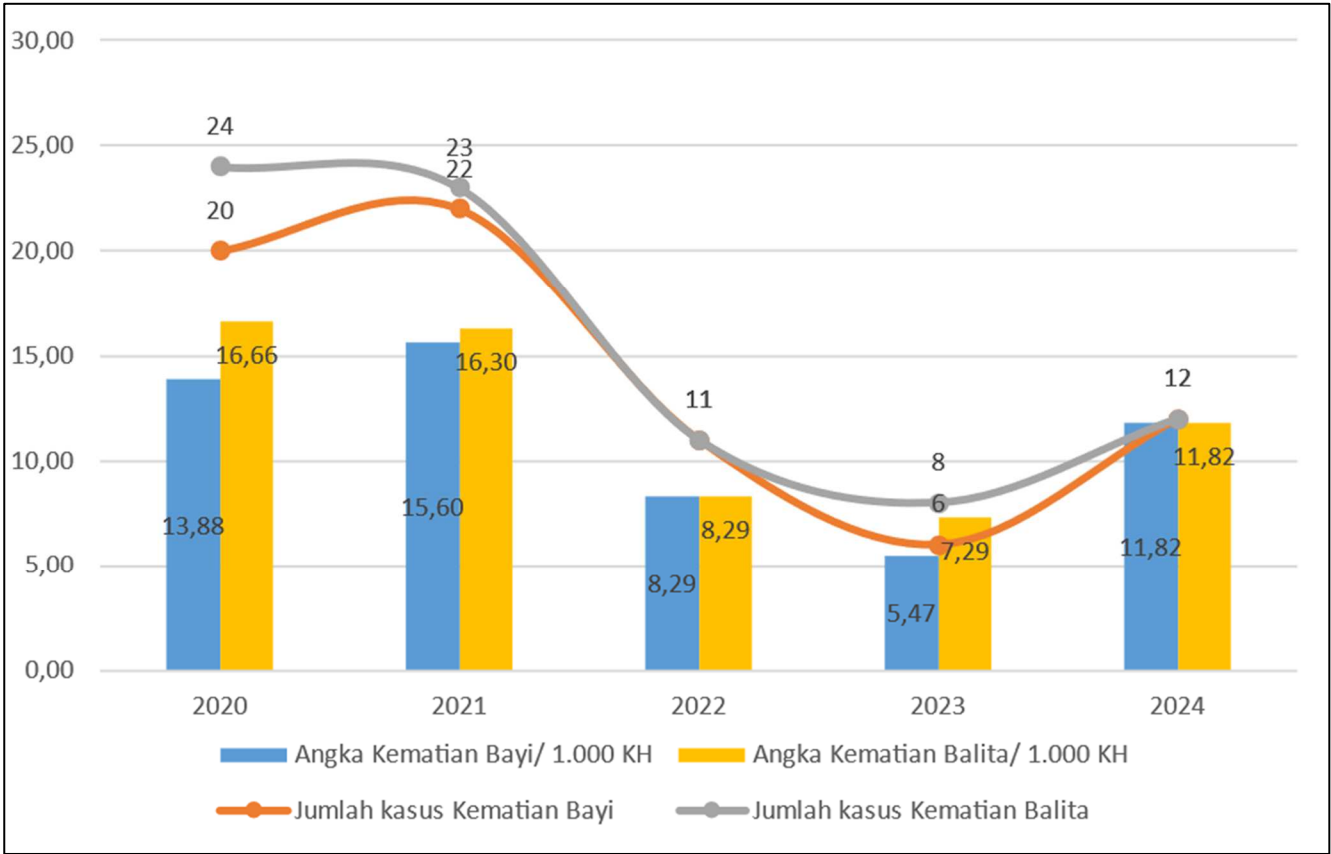
Tabel 2.61 Kematian Bayi dan Balita Kota Magelang, 2020-2024

No	Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
1	Angka Kematian Bayi/ 1.000 KH	13,88	15,60	8,29	5,47	11,82
1.a	Jumlah kasus Kematian Bayi	20	22	11	6	12
1.b	Jumlah kelahiran hidup	1.441	1.410	1.206	1.096	1.015
2	Angka Kematian Balita/ 1.000 KH	16,66	16,3	8,29	7,29	11,82
2.a	Jumlah kasus kematian balita	24	23	11	8	12
2.b	Jumlah Balita	6.083	5.160	5.735	5.052	5.612

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Magelang, 2025

AKB dan AKABA di Kota Magelang menunjukkan fluktuasi selama 2020-2024, dengan tren penurunan yang baik hingga 2023, namun meningkat kembali pada 2024. Penurunan jumlah kelahiran hidup dan jumlah balita setiap tahun berkontribusi pada perubahan angka ini. Perbaikan hingga 2023 mencerminkan keberhasilan program kesehatan ibu dan anak, tetapi lonjakan pada 2024 menunjukkan perlunya upaya lebih lanjut. Beberapa penyebab kematian balita antara lain pneumonia, penyakit bawaan, diare, cedera dan campak. Selain infeksi

penyakit, faktor pola asuh juga menjadi faktor penyumbang kasus kematian balita. Masih perlu upaya edukasi dan peningkatan pemahaman orang tua dan pengasuh untuk menerapkan pola asuh secara benar kepada balita.



Gambar 2.25 Angka Kematian Ibu di Kota Magelang, 2020-2024
Sumber: Dinas Kesehatan Kota Magelang, 2025

Terkait dengan imunisasi balita, capaian imunisasi BCG, Campak/Morbili, dan Hepatitis B pada tahun 2024 telah berada di angka 100%. Capaian tersebut menunjukkan kondisi yang positif dibandingkan tahun 2022. Meskipun demikian, cakupan imunisasi BCG dan DPT pada tahun 2023 belum mencapai 100% dan mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya.

Tabel 2.62 Persentase Frekuensi Imunisasi Balita di Kota Magelang, 2020-2024

Jenis Imunisasi	2020	2021	2022	2023	2024
BCG	96.92	93.23	98,74	100	100
DPT	95,15	87,25	98,74	89,67	89,67
Polio	95,14	90,73	98,74	90,07	90,07
Campak/Morbili	77,8	76,6	74.06	100	100
Hepatitis B	99,58	90,17	100	100	100

Sumber: Profil Kesehatan Provinsi Jawa Tengah, 2020-2025

Terkait aspek kesehatan, permasalahan gizi juga perlu mendapat perhatian di Kota Magelang. Secara umum, permasalahan gizi yang terjadi di Kota Magelang disebabkan oleh masalah kekurangan dan kelebihan gizi. Kekurangan gizi dalam waktu lama maupun infeksi berulang yang mengganggu intake zat gizi menyebabkan masalah gizi kronis sehingga mengakibatkan anak menjadi pendek (*stunting*). Kekurangan gizi dalam waktu singkat, misalnya karena wabah penyakit dan kelaparan menyebabkan masalah gizi akut sehingga

mengakibatkan anak menjadi kurus (*underweight* dan *wasted*). Selain permasalahan kekurangan gizi, kelebihan gizi juga menimbulkan masalah karena menyebabkan anak menjadi obesitas.

Jumlah kasus gizi buruk menunjukkan penurunan yang signifikan dari 17 kasus pada 2020 menjadi 3 kasus pada 2024. Prevalensi balita dengan gizi buruk juga mengalami penurunan yang signifikan, dari 0,69% pada 2020 menjadi 0,06% pada 2024. Penurunan ini mencerminkan keberhasilan dalam program gizi terintegrasi yang dilaksanakan selama beberapa tahun terakhir.

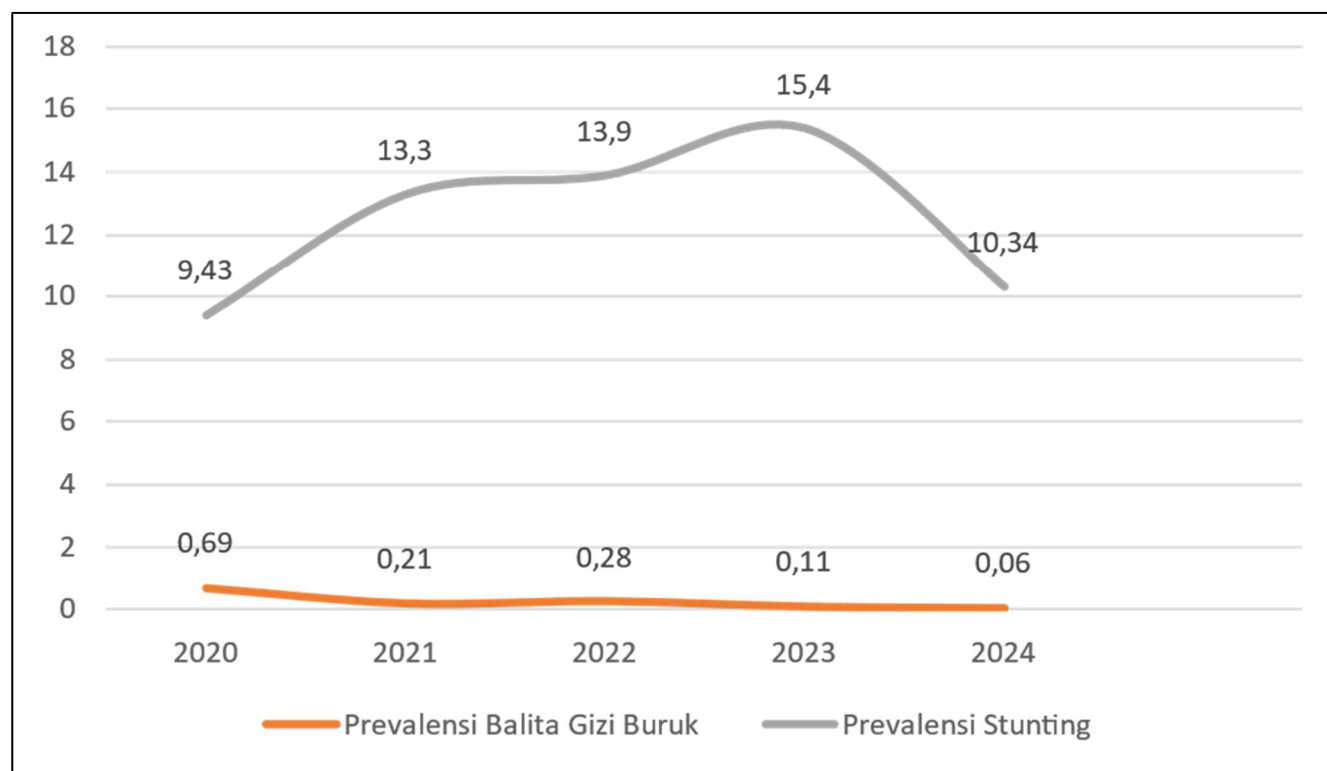
Prevalensi *stunting* (pendek dan sangat pendek) pada balita menunjukkan fluktuasi, 9,43% pada 2020, meningkat menjadi 13,3% pada 2021, dan terus meningkat menjadi 15,5% pada 2023. Pada 2024, prevalensi *stunting* menurun menjadi 10,34% (EPPGBM), tetapi masih menunjukkan angka yang relatif tinggi.

Kenaikan yang tajam pada 2021 hingga 2023 diproyeksikan dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti pandemi COVID-19 yang memengaruhi asupan gizi dan layanan kesehatan pada anak.

Tabel 2.63 Prevalensi Stunting dan Gizi Buruk Kota Magelang, 2020-2024

Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah Gizi Buruk	17	13	14	5	3
Prevalensi Balita Gizi Buruk	0,69	0,21	0,28	0,11	0,06
Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita	9,43	13,3	13,9	15,5	10,34*

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Magelang, 2025



Gambar 2.26 Prevalensi Stunting dan Gizi Buruk di Kota Magelang, 2020-2024

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Magelang, 2025

Hasil evaluasi menunjukkan delapan penyebab kasus *stunting* di Kota Magelang yaitu ibu hamil kekurangan energi kronis, ibu hamil anemia, bayi Berat Badan Lahir Rendah (BBLR), asupan nutrisi bayi kurang memadai, remaja putri kurus dan anemia, kehamilan remaja usia kurang dari 20 tahun, penyakit penyerta pada balita antara lain tuberkulosis dan jantung bawaan, dan pola konsumsi pangan pada remaja. Terdapat dua tindak lanjut yang telah disepakati untuk mengatasi kasus *stunting* di Kota Magelang yaitu:

1. Intervensi spesifik, seperti upaya dan teknis penanganan, antara lain pemberian tablet tambah darah untuk remaja putri, kelas ibu hamil, kelas ibu hebat, *homecare*, pendampingan Tim Asuhan Gizi Terpadu, literasi gizi via balai belajar dan UKS.
2. Intervensi sensitive, yang meliputi penguatan regulasi dan kelembagaan, advokasi anggaran stunting, peningkatan kapasitas kader, penyediaan peralatan dan perlengkapan posyandu sesuai standar, inovasi pelaksanaan posyandu, dan optimalisasi teknologi informasi.

Selain itu, juga diperlukan upaya peningkatan jangkauan penimbangan agar bisa lebih mendekati populasi bayi yang ada. upaya yang perlu dilakukan salah satunya melalui *homecare* balita.

2.1.3.1.2.3 Sumber Daya Manusia Kesehatan

Jumlah tenaga kesehatan di Kota Magelang menunjukkan tren peningkatan dalam lima tahun terakhir. Jumlah dokter meningkat signifikan dari 380 orang pada 2020 menjadi 657 orang pada 2024. Sementara itu, jumlah bidan mengalami fluktuasi, dengan penurunan dari 197 orang pada 2020 menjadi 190 orang pada 2021, kemudian meningkat hingga 232 orang pada 2023, namun sedikit menurun menjadi 231 orang pada 2024. Jumlah perawat juga mengalami pertumbuhan yang stabil, dari 1.509 orang pada 2020 menjadi 1.680 orang pada 2024. Peningkatan jumlah tenaga kesehatan ini mencerminkan upaya untuk memperkuat layanan kesehatan di Kota Magelang.

Tabel 2.64 Jumlah Dokter, Bidan, dan Perawat Kota Magelang; 2020-2024

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
Dokter	380	393	431	452	657
Bidan	197	190	214	232	231
Perawat	1.509	1.487	1.560	1.592	1.680

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Magelang, 2025

Secara keseluruhan, Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK) di Kota Magelang tetap dalam kondisi yang relatif baik, meskipun terjadi penurunan persentase pemenuhan sertifikat kompetensi sejak tahun 2023. Hal ini bukan disebabkan oleh kurangnya kualifikasi tenaga kesehatan, melainkan karena sebagian dari mereka tidak menjalankan praktik kesehatan secara langsung. Banyak tenaga kesehatan di Kota Magelang yang beralih peran sebagai pengajar di Poltekkes maupun SMK Kesehatan serta bekerja sebagai ASN atau personel di Dinas Kesehatan Kota Magelang. Dengan demikian, meskipun tidak seluruh SDMK memiliki sertifikat kompetensi praktik kesehatan, keberadaan mereka tetap berkontribusi dalam meningkatkan kualitas layanan dan pendidikan kesehatan di Kota Magelang.

Tabel 2.65 Persentase Pemenuhan SDM Kesehatan Sesuai Standar di Kota Magelang, 2020-2024

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah SDMK yang telah memiliki STR untuk yang berpraktik di Kota Magelang	2.979	3.295	3.170	3.174	3.462
Jumlah seluruh SDMK yang ada di Kota Magelang	2.981	3.295	3.170	3.237	3.748
Persentase sumber daya manusia kesehatan (SDMK) yang memenuhi standar (sertifikat kompetensi)	99,93%	100%	100%	98,05%	92,37%

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Magelang, 2025

2.1.3.1.2.4 Fasilitas Kesehatan

Pemenuhan fasilitas kesehatan sesuai standar di Kota Magelang secara umum menunjukkan tren yang baik dalam lima tahun terakhir. Dari tahun 2020 hingga 2022, persentasenya selalu mencapai 100%. Namun, pada tahun 2023 terjadi sedikit penurunan menjadi 96,51%, yang disebabkan oleh adanya faktor tertentu seperti

renovasi, penyesuaian standar baru, atau kendala teknis lainnya. Meskipun demikian, pada tahun 2024 persentase tersebut kembali mencapai 100%, menandakan bahwa fasilitas kesehatan di Kota Magelang telah memenuhi standar yang ditetapkan secara optimal.

Tabel 2.66 Persentase Pemenuhan Fasilitas Kesehatan Sesuai Standar di Kota Magelang, 2020-2024

No	Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
1	Persentase ketersediaan obat yang sesuai standar	100%	100%	100%	100%	100%
1.a	Jumlah ketersediaan obat yang sesuai standar	20	20	45	45	45
1.b	Jumlah ketersediaan obat	20	20	45	45	45
2	Persentase pemenuhan fasilitas kesehatan sesuai standar	100%	100%	100%	96,51%	100%
2.a	Jumlah fasilitas kesehatan yang sesuai standar	96	129	140	166	139
2.b	Jumlah fasilitas kesehatan	96	129	140	172	139

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Magelang, 2024

Cakupan perizinan, pengendalian dan pengawasan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman telah mencapai 97,04% pada tahun 2024. Artinya, dari 540 target jumlah sarana pelayanan kesehatan dan makanan minuman untuk dibina dan diawasi pada tahun 2024, 524 diantaranya telah dilakukan pembinaan dan pengawasan. Di masa yang akan datang, perlu ditingkatkan agar pembinaan dan pengawasan dapat dilaksanakan untuk seluruh target.

Berikutnya, berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor: 1096/MENKES/PER/VI/2011 tentang Hygiene Sanitasi Jasa Boga, maka perlu dilakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Tempat Pengelolaan Makanan tersebut. Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) terdiri dari rumah makan/restoran, jasa boga/catering, penjaja makanan, depot air minum, dan kantin. Berkaitan dengan hal tersebut, maka dalam rangka upaya preventif dan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, Dinas Kesehatan Kota Magelang melakukan pembinaan dan pengawasan Tempat Pengelolaan Makanan untuk menjaga keamanan makanan yang beredar di masyarakat. Data rinci Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) dan Depot Air Minum (DAM) yang memenuhi syarat disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 2.67 Cakupan Pengawasan Kefarmasian, Alat Kesehatan dan TPM di Kota Magelang, 2020-2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Cakupan perijinan, pengendalian dan pengawasan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman	NA	92,80%	99,56%	97,54%	97,04%
1.a	Jumlah sarana pelayanan kefarmasian, alat kesehatan dan makanan minuman yang memenuhi syarat	NA	232	448	634	524
1.b	Jumlah sarana pelayanan kefarmasian, alat kesehatan dan makanan minuman yang dilakukan pembinaan dan pengawasan	NA	250	450	650	540
2	Persentase tempat pengelolaan makanan (TPM) antara lain jasa boga, rumah makan/restoran dan depot air minum (DAM) yang bersertifikat layak hygiene	95,76%	94,70%	77,78%	100%	50%
2.a	Jumlah TPM laik sehat	565	751	7	5	1
2.b	Jumlah pengajuan laik sehat	590	793	9	5	2

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Magelang, 2024

2.1.3.1.2.5 Penyakit Menular dan Tidak Menular

Beban ganda penyakit saat ini menjadi tantangan kesehatan Kota Magelang, yaitu penyakit menular dan penyakit tidak menular. Perubahan pola penyakit tersebut sangat dipengaruhi antara lain oleh perubahan lingkungan, perilaku masyarakat, transisi demografi, teknologi, ekonomi dan sosial budaya. Untuk itu penting dilakukan upaya pengendalian penyakit melalui upaya menurunkan insiden, prevalensi, morbiditas atau mortalitas dari suatu penyakit hingga level yang dapat diterima secara lokal. Pengendalian penyakit menular dilakukan terhadap penyakit menular langsung, penyakit menular bersumber binatang, dan penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi. Sedangkan pengendalian penyakit tidak menular meliputi upaya pencegahan dan deteksi dini penyakit tidak menular tertentu.

Cakupan penemuan dan pengobatan penyakit baik menular maupun tidak menular sudah mencapai 100% pada tahun 2024. Capaian tersebut konsisten bahkan dalam konteks cakupan penyakit tidak menular kondisi di tahun 2024 lebih baik daripada tahun 2020-2021 dan tren kinerja tersebut diupayakan untuk konsisten kedepannya. Meskipun demikian, perlu menjadi catatan bahwa dalam kurun waktu 2020-2024 terdapat tren peningkatan jumlah temuan kasus penyakit tidak menular. Peningkatan tersebut khususnya terjadi dari tahun 2022 ke 2023 dengan peningkatan 16.804 kasus. Pada tahun 2024 terdapat kinerja perbaikan namun sayangnya belum signifikan. Diketahui bahwa penyakit tidak menular yang mendominasi adalah hipertensi dan obesitas. Oleh karena itu upaya preventif perlu untuk lebih diintensifkan.

Tabel 2.68 Cakupan Penemuan dan Pengobatan Penyakit di Kota Magelang, 2020-2024

No	Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
1	Cakupan penemuan dan pengobatan penyakit menular	100%	100%	100%	100%	100%
1.a	Jumlah kasus penyakit menular (HIV, DBD dan TBC) yang diobati dan dilaporkan diwilayah kerja dalam kurun waktu satu tahun	296	170	314	308	295
1.b	Jumlah kasus penyakit menular (HIV, DBD dan TBC) yang ditemukan dan dilaporkan di wilayah kerja dalam kurun waktu satu tahun yang sama	296	170	314	308	295
2	Cakupan penemuan dan pengendalian penyakit tidak menular	25,55%	33,88%	100%	100%	100%
2.a	Jumlah kasus penyakit tidak menular di wilayah kerja yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun	10.577	14.030	33.078	49.882	39.148
2.b	Jumlah estimasi penderita penyakit tidak menular yang berada didalam wilayah kerjanya berdasarkan angka prevalensi kab/kota tahun yang sama	41.393	41.407	33.078	49.882	39.148

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Magelang, 2025

Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis di Kota Magelang masih jauh dari target 90% yang ditetapkan. Dalam lima tahun terakhir, cakupan tertinggi hanya mencapai 43% pada tahun 2022, sementara pada tahun 2024 turun drastis menjadi 14%. Hal ini menunjukkan adanya tantangan dalam upaya deteksi dan pelacakan kasus baru, yang dapat berdampak pada penyebaran penyakit di masyarakat.

Sementara itu, angka keberhasilan pengobatan kasus tuberkulosis relatif stabil, meskipun juga mengalami beberapa fluktuasi. Setelah bertahan di angka 82% pada 2020-2021, angka ini sempat menurun menjadi 75% pada 2022, kemudian meningkat ke 85% pada 2023 sebelum kembali turun ke 80% pada 2024.

Meskipun angka keberhasilan pengobatan relatif tinggi, dengan rata-rata di atas 75%, rendahnya cakupan penemuan kasus dapat menghambat pengendalian tuberkulosis secara keseluruhan. Diperlukan strategi yang lebih agresif dalam skrining, pelacakan kontak, dan peningkatan kesadaran masyarakat untuk mencapai target 90% cakupan penemuan kasus, sehingga pengobatan dapat dilakukan lebih cepat dan efektif.

Tabel 2.69 Penemuan dan Penanganan Kasus Tuberkulosis di Kota Magelang, 2020-2024

Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis (<i>treatment coverage</i>)	21%	26%	43%	23%	14%*
Angka keberhasilan pengobatan kasus tuberkulosis (<i>treatment success rate</i>)	82%	82%	75%	85%	80%

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Magelang, 2025

2.1.3.1.2.6 Kesehatan Lingkungan

Kesehatan lingkungan menjadi aspek yang penting untuk diwujudkan khususnya untuk menguatkan kesehatan masyarakat dari level yang paling dasar. Perwujudan kesehatan lingkungan tersebut diupayakan melalui terbentuknya kelurahan siaga aktif dengan target berada pada level mandiri. Kelurahan siaga aktif mandiri dapat diartikan sebagai kelurahan yang masyarakatnya mampu mencegah dan mengatasi masalah kesehatan, bencana, dan kegawatdaruratan secara mandiri. Sayangnya, kondisi kelurahan siaga aktif mandiri di Kota Magelang pada tahun 2024 masih stagnan sejak tahun 2021 dimana dari 17 (tujuh) belas kelurahan yang ada, masih terdapat 3 (tiga) kelurahan yang belum mencapai kategori siaga aktif mandiri yaitu Kemirirejo, Panjang, dan Rejowinangun Utara.

Tabel 2.70 Persentase Kelurahan Siaga Aktif Strata Mandiri di Kota Magelang, 2020-2024

Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah kelurahan siaga aktif mandiri	13	14	14	14	14
Jumlah seluruh kelurahan	17	17	17	17	17
Persentase kelurahan siaga aktif strata mandiri	76,47%	82,35%	82,35%	82,35%	82,35%

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Magelang, 2025

2.1.3.1.2.7 Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional

Cakupan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Kota Magelang menunjukkan tren peningkatan yang sangat baik dalam lima tahun terakhir. Dari 96,22% pada tahun 2020, cakupan ini terus meningkat hingga mencapai 100% pada tahun 2023 dan tetap terjaga pada tahun 2024.

Capaian ini mencerminkan keberhasilan program JKN dalam memastikan seluruh penduduk Kota Magelang memiliki akses terhadap layanan kesehatan yang terjamin. Dengan cakupan penuh, masyarakat diharapkan dapat lebih mudah memperoleh layanan kesehatan tanpa kendala finansial, sehingga mendukung peningkatan kesejahteraan dan kualitas hidup.

Tabel 2.71 Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional di Kota Magelang, 2020-2024

Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional	96,22%	99,11%	99,74%	100%	100%

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Magelang, 2025

2.1.3.1.3 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

2.1.3.1.3.1 Jalan

Hingga akhir tahun 2024, penetapan jalan kota yang menjadi kewenangan penyelenggaraan jalan pada urusan pekerjaan umum dan penataan ruang masih ditetapkan melalui Surat Keputusan Wali Kota Magelang Nomor 621/028/112 tahun 2023 tanggal 28 Maret 2023 tentang Penetapan Ruas Jalan Menurut Statusnya Sebagai Jalan

Kota di Kota Magelang. Jumlah jalan yang menjadi kewenangan kota berdasarkan SK tersebut sebanyak 309 ruas. Kondisi jalan perkotaan di Kota Magelang dalam kurun lima tahun terakhir tersaji dalam tabel berikut ini.

Tabel 2.72 Kondisi Jalan Kota Magelang, 2020-2024

No	Uraian	Panjang Jalan Kab/Kota (km)				
		2020	2021	2022	2023	2024
A	Jenis Permukaan	118,92	116,52	116,52	124,370	124,370
1	Aspal	118,92	114,20	113,980	121,834	124,634
2	Perkerasan Beton	0	0	1,369	2,095	0,092
3	Kerikil	0	0	0	0	0
4	Tanah	0	1,16	1,167	0,801	0,004
5	Tidak Dirinci	0	1,15	0	0	0
B	Kondisi Jalan	118,92	116,52	116,52	124,370	124,370
1	Baik	76,05	72,91	72,358	74,6047	74,935
2	Sedang	35,78	32,53	38,285	31,925	31,944
3	Rusak	7,09	11,08	6,688	16,396	16,147
4	Rusak Berat	0	0	2,59	1,804	1,704
C	Kelas Jalan	118,92	116,52	116,52	124,370	124,370
1	Kelas I	0	0	0	0	0
2	Kelas II	0	0	0	0	0
3	Kelas III	0	0	0	0	0
4	Kelas III A	0	0	0	0	0
5	Kelas III B	0	0	0	0	0
6	Kelas III C	118,92	116,52	116,52	124,370	124,370
7	Tidak Dirinci	0	0	0	0	0

Sumber: DPUPR Kota Magelang, 2025

Mayoritas jalan di Kota Magelang jika dilihat dari jenis permukaannya pada tahun 2024, berupa aspal (hotmix) sepanjang 124,634 km. Sebagian kecil lainnya berupa perkerasan beton sepanjang 0,092 km dan berupa tanah sepanjang 0,004 km. Dari total panjang jalan 124,370 km pada tahun 2024, panjang jalan kondisi mantap sepanjang 106,879 dan panjang jalan kondisi tidak mantap sepanjang 17,851 km. Gambaran kondisi jalan mantap dan tidak mantap di Kota Magelang dalam kurun waktu 5 tahun terakhir dapat dilihat pada diagram berikut ini.

Tabel 2.73 Persentase Panjang Jalan Kondisi Permukaan Mantap Kewenangan Kota, 2020-2024

Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
Panjang Jalan Kondisi Permukaan Mantap Kewenangan Kota	118,92	116,52	116,52	124,730	124,730
Panjang Jalan Kondisi Permukaan Tidak Mantap Kewenangan Kota	111,830	105,440	110,643	106,530	106,879

Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
Panjang Jalan Kewenangan Kota	7,090	11,080	9,278	18,200	17,851
Persentase Panjang Jalan Kondisi Permukaan Mantap Kewenangan Kota	93%	90,02%	93%	85,41%	85,69%

Sumber: DPUPR Kota Magelang, 2025



Gambar 2.27 Diagram Kondisi Jalan Kewenangan Kota Magelang, 2020-2024

Sumber: DPUPR Kota Magelang, 2025

Dari total 309 ruas jalan kota di Kota Magelang, 81 ruas diantaranya memiliki kondisi tidak mantap baik rusak ringan maupun rusak berat. Jalan yang keseluruhan ruasnya dalam kondisi rusak ringan pada akhir 2023 sebanyak 17 ruas, yaitu Jl. Dr. Sutomo, Jl. Enggano, Jl. Jangrono, Jl. Kahendran, Jl. Kapuas I, Jl. Kapuas II, Jl. Kartini, Jl. Kauman, Jl. Mahakam III, Jl. Margoharjo, Jl. Menur I, Jl. Merbabu, Jl. Pringadi, Jl. Ringinanom, Jl. Sidotopo I, Jl. Sigaluh, dan Jl. Sunan Kalijaga IX. Sedangkan jalan yang kondisi ruasnya 100% dalam kondisi rusak berat adalah Jl. Duku 5C dan Jl. Kalibening VI. Berikut ini adalah dokumentasi salah satu ruas jalan dalam kondisi mantap dan kondisi tidak mantap (rusak berat).

Dalam Upaya mempertahankan kemantapan jalan, kegiatan pemeliharaan yang dilakukan melalui pengaspalan di tahun 2024 adalah:

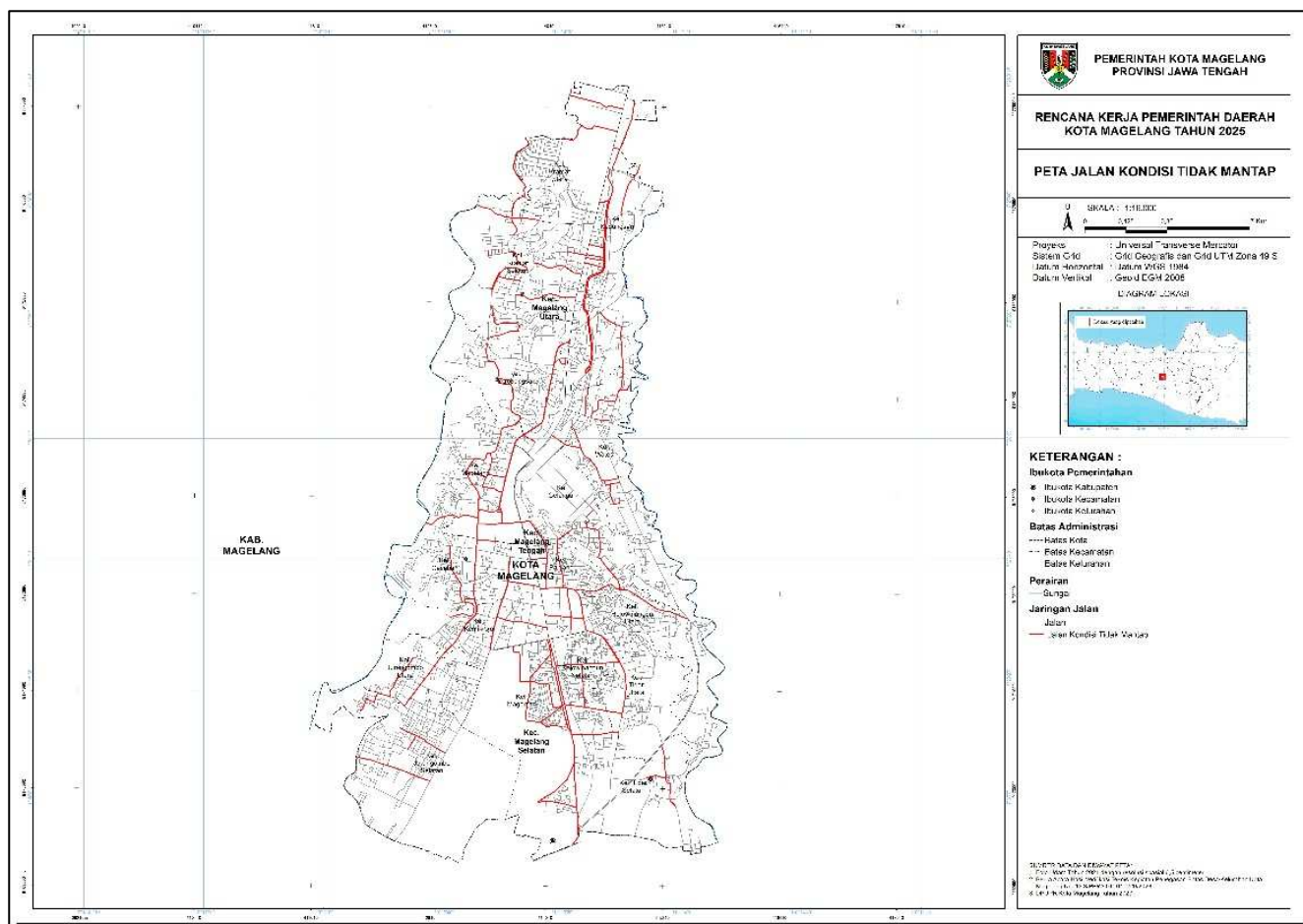
1. Jl. Andong Utama sepanjang 100 M
2. Jl. Ternate sepanjang 215 M
3. Jl. Perum Sangriya sepanjang 15 M
4. Jl. Duku 5f sepanjang 71 M
5. Jl. Opak sepanjang 200 M
6. Jl. Mahakam 1 sepanjang 170 M
7. Jl. Mahakam 2 sepanjang 180 M
8. Jl. Perum Green java sepanjang 100 M
9. Jl. Botton Kopen sepanjang 200 M



Gambar 2.28 Foto Jl. Kalimanggis (Sampel Jalan Kondisi Rusak Berat)
 Sumber: DPUPR Kota Magelang, 2025



Gambar 2.29 Foto Jl. A. Yani (Sampel Jalan Kondisi Mantap)
 Sumber: DPUPR Kota Magelang, 2025



Gambar 2.30 Peta Jalan Kondisi Tidak Mantap Kota Magelang Tahun 2023
Sumber: DPUPR Kota Magelang, 2024 (data diolah)

2.1.3.1.3.2 Jembatan

Gambaran kondisi jembatan di Kota Magelang pada tahun 2024, hampir sama dengan kondisi tahun 2023. Jumlah jembatan di Kota Magelang belum mengalami penambahan, yaitu sebanyak 79 unit dengan tipe bangunan atas jembatan yang masih sama dengan tahun sebelumnya. Sebanyak 75 unit jembatan bangunan atasnya berupa gelagar, 1 unit jembatan berupa gorong-gorong, yaitu Jembatan Jl. Tentara Genie Pelajar (Kali Bening); dan 3 unit jembatan berupa plengkungan, yaitu Jembatan Telaga Warna II (Kali Canguk), Jembatan Sudirman (Kali Manggis), dan Jembatan Andong.

Mayoritas jembatan di Kota Magelang dalam kondisi baik, yaitu sebanyak 72 unit. Dari total 79 unit jembatan tersebut, 72 jembatan dalam kondisi baik dan 7 lainnya dalam kondisi rusak ringan dan sedang. Jembatan dalam kondisi rusak ringan dan sedang adalah Jembatan Margo Utomo (Kali Bening), Jembatan Jl. Margo Harjo (Kali Bening), Jembatan Jl. Margo Harjo I (Kali Bening), Jembatan Jl. Jeruk II (Kali Bening), Jembatan Jl. Gelangan I (Kali Manggis) Jembatan Ikhlas V, dan Jembatan Jl. Kalimas (kali Elo) Lama.

Tabel 2.74 Kondisi Jembatan Kota Magelang, 2020-2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jembatan dalam kondisi baik	76	70	76	75	72
2	Jumlah Jembatan	79	79	79	79	79

Sumber: DPUPR Kota Magelang, 2025

Selain kondisi jembatan sebagaimana dijelaskan sebelumnya, terdapat satu jembatan yang perlu mendapat perhatian terkait dengan akses jalan menuju TPST Regional Magelang yang akan dibangun di Kabupaten

Magelang. Akses jalan menuju TPST Regional Magelang dari Kota Magelang melewati Jl. Rambutan dan Jembatan Jl. Rambutan Ngembik Utara (Kali Bening). Data dari DPUPR tahun 2024, menunjukkan jembatan Jl. Rambutan Ngembik Utara (Kali Bening) memiliki panjang 8 meter dan lebar 5,7 meter dan dalam kondisi baik. Namun demikian, perlu dikaji kekuatan konstruksi jembatan ketika akan dilewati kendaraan pengangkut sampah dengan tonase muatan dan dimensi besar.



Gambar 2.31 Jembatan Jl. Rambutan Ngembik Utara (Kali Bening)
Sumber: DPUPR Kota Magelang, 2025

2.1.3.1.3.3 Bangunan Gedung

Penambahan bangunan gedung yang memiliki Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) pada tahun 2024 sebanyak 76 unit. Pada akhir tahun 2024, bulan November ddan Desember, SIM BG mengalami kendala secara nasional sehingga pelayanan penerbitan PBG pada bulan tersebut juga terhenti.

Tabel 2.75 Rasio Bangunan Gedung ber-PBG di Kota Magelang, 2020-2024

Uraian	Kondisi PBG				
	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah bangunan ber PBG	10.606	10.702	10.842	10.949	11.025
Jumlah bangunan*	40.602	40.602	40.602	40.602	40.602
Rasio bangunan ber PBG persatuan bangunan	26,12%	26,36%	26,70%	26,97%	26,97%

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Magelang, 2025
*) pendataan DKPTK tahun 2016

Untuk meningkatkan kesadaran pengurusan PBG terutama untuk bangunan yang sudah berdiri (bangunan lama) relatif rendah, perlu didorong melalui mekanisme pemutihan PBG. Sedangkan untuk bangunan baru, kegiatan pengawasan oleh Tim Pengawasan Pemanfaatan Ruang yang beranggotakan lintas OPD terkait perlu terus dilaksanakan dengan dibarengi melalui sosialisasi (media reklame, dll).

2.1.3.1.3.4 Drainase

Kondisi drainase primer Kota Magelang hingga akhir tahun 2024 menunjukkan perbaikan dibandingkan tahun sebelumnya, seperti ditunjukkan pada tabel berikut ini.

Tabel 2.76 Kondisi Saluran Drainase di Kota Magelang, 2020-2024

Uraian	Panjang Drainase dalam kondisi baik (m)				
	2020	2021	2022	2023	2024
Panjang drainase dalam kondisi baik (m)	219.859	4.930	5.136	6.555	7.029
Panjang drainase (m)	237.830	20.230	20.230	20.230	20.230
Persentase panjang drainase dalam kondisi baik	92,44%	24,37%	25,39%	32,40%	34,75%

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Magelang, 2025

Drainase primer yang berada dalam kondisi baik di Kota Magelang pada tahun 2024 meningkat sepanjang 655 meter dari tahun sebelumnya. Jaringan drainase primer yang dimaksud adalah jaringan yang menghubungkan jaringan drainase sekunder dengan badan air berupa Sungai Progo dan Sungai Elo. Jaringan drainase sekunder kewenangannya masuk ke dalam penanganan jalan karena merupakan bagian pelengkap jalan, sedangkan drainase menjadi kewenangan Urusan Pemerintahan Bidang Kawasan Perumahan dan Permukiman. Gambaran jaringan drainase kondisi baik dan tidak baik dapat dilihat pada gambar berikut ini.



(a) Alun-Alun Barat-Jambon Wot



(b) Kliwonan (Kali Gandekan/Sisabuk)

Gambar 2.32 Saluran Drainase

Sumber: DPUPR Kota Magelang, 2025



(a) Kliwonan (Kali Gandekan/Sisabuk)



(b) Kalijaga-Progo (Saluran BBI)

Gambar 2.33 Saluran Drainase

Sumber: DPUPR Kota Magelang, 2025

Penambahan panjang drainase kondisi baik pada tahun 2024 didukung dengan kegiatan peningkatan sistem drainase perkotaan, baik berupa rehabilitasi saluran drainase maupun rehabilitasi talud. Kegiatan ini ditujukan untuk mempertahankan kondisi baik saluran drainase maupun meningkatkan kondisi drainase menjadi baik. Kegiatan yang dilakukan pada tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.77 Kegiatan Peningkatan Sistem Drainase Perkotaan, 2024

No	Paket	Lokasi	Output (m)
1	Fisik Peningkatan Saluran Drainase Alun-Alun Barat - Jambon Wot (Kali Keleng)	Saluran Drainase Alun-Alun Barat - Jambon Wot (Kali Keleng)	111,00
2	Fisik Rehabilitasi Saluran Drainase Bottonbalong - Meteseh Tengah	Saluran Drainase Bottonbalong - Meteseh Tengah	18,00
3	Fisik Rehabilitasi Talud Gandekan	Saluran Drainase Kali Gandekan	20,00
4	Fisik Rehabilitasi/Peningkatan Talud Gandekan (Tidar Campur)	Saluran Drainase Kali Gandekan	14,50
5	Fisik Rehabilitasi Talud Kedali	Saluran Drainase Kali Kedali	16,00
6	Fisik Rehabilitasi Saluran Drainase Alun Alun Utara - Jendralan	Saluran Drainase Alun Alun Utara - Jendralan	34,00
7	Fisik Rehabilitasi Saluran Drainase Trunan	Saluran Drainase Trunan	170,00
8	Fisik Rehabilitasi Saluran Drainase Jagoan	Saluran Drainase Jagoan	37,00

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Magelang, 2024

2.1.3.1.3.5 Sumber Daya Air

Kota Magelang dilewati 2 (dua) sungai besar yaitu Kali Elo dan Kali Progo sebagai batas administrasi wilayah di sisi timur dan barat. Namun demikian, Kota Magelang tidak memiliki daerah aliran sungai kewenangan kota, karena sungai yang melewati lintas kabupaten kota. Sedangkan sesuai dengan kewenangan pengelolaan SDA dalam Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 17 tahun 2019 tentang Sumber Daya Air, Kota Magelang hanya berwenang dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi yang luasnya kurang dari 1000 ha dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota. Perkembangan kondisi saluran irigasi Kota Magelang tahun 2020-2024 ditunjukkan tabel berikut ini.

Tabel 2.78 Kondisi Saluran Irigasi Kota Magelang, 2020 -2024

Uraian	Jaringan Irigasi Dalam Kondisi Baik (m)				
	2020	2021	2022	2023	2024
Panjang saluran irigasi dalam kondisi baik (meter)	4.050	4.050	8.708	9.346,50	9.599,00
Panjang seluruh jaringan irigasi (meter)	5.000	5.000	16.550	16.550	16.550
Persentase saluran irigasi dalam kondisi baik	81,00%	81,00%	52,62%	56,47%	58,00%

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Magelang, 2025

Upaya pemeliharaan maupun peningkatan saluran irigasi dilakukan untuk mempertahankan dan meningkatkan kondisi baik saluran irigasi di Kota Magelang. Kegiatan yang dilakukan pada tahun 2024 ditunjukkan tabel dibawah ini.

Tabel 2.79 Kegiatan Peningkatan Sistem Irigasi Perkotaan, 2024

No	Peningkatan Sistem Irigasi Perkotaan	Lokasi	Output (m)
1	Fisik Rehabilitasi Saluran Irigasi Dumpoh	Saluran Irigasi Dumpoh	60,00
2	Fisik Rehabilitasi Saluran Irigasi Kali Andu	Saluran Irigasi Kali Andu	111,00
3	Fisik Peningkatan Saluran Kalisari - Pinggir Rejo	Saluran Irigasi Kalisari - Pinggir Rejo	65,50
4	Fisik Rehabilitasi Saluran Irigasi Meteseh Utara - Botton Kopen	Saluran Irigasi Meteseh Utara - Botton Kopen	79,50
TOTAL			316,00

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Magelang, 2025

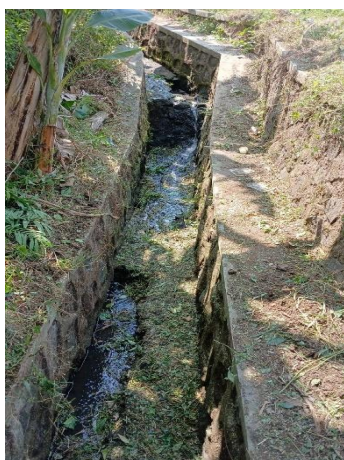
Dalam penilaian kondisi baik/buruknya saluran irigasi di Kota Magelang, beberapa variable yang digunakan sebagai dasar penilaian yaitu bangunan fisik saluran, akses pemeliharaan, serta endapan lumpur yang terjadi. Sampel gambaran saluran irigasi di Kota Magelang dalam kondisi baik dan tidak baik dapat dilihat pada gambar berikut ini.



(a) Dumpoh



(b) Kalisari-Pinggir Rejo



(c) Panggung Sari-Progo



(d) Sanggrahan Legok-Ponganan

Gambar 2.34 Saluran Irigasi

Sumber: DPUPR Kota Magelang, 2025

2.1.3.1.3.6 Akses Sanitasi Layak

Berdasarkan SE Mendagri dan Bappenas Nomor 600.1/176/SJ dan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Penyelarasan RPJPD dengan RPJPN Tahun 2025-2045, sanitasi ditetapkan menjadi salah satu Indikator Utama Pembangunan (IUP) dari 45 prioritas nasional sehingga dipandang perlu untuk menyesuaikan data yang ada dengan data real. Pemakaian data real ini digunakan untuk menggambarkan bagaimana kondisi akses sanitasi layak di Kota Magelang tahun 2024 dimana perubahan data yang digunakan yaitu data jumlah KK dimana semula memakai data hasil survey pemutakhiran 2019 oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Magelang menjadi jumlah KK yang berasal dari Data Go Kota Magelang. Dari perubahan sumber data yang digunakan tersebut, diketahui bahwa persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan di Kota Magelang tahun 2024 sebesar 73,15%. Perubahan sumber data tersebut menyebabkan realisasi sanitasi layak di Kota Magelang menurun daripada tahun 2023 yang sebesar 98,81% karena faktor pembagiannya menjadi lebih banyak.

Tabel 2.80 Akses Sanitasi Layak Kota Magelang, 2020-2024

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
Rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan	31.297	31.422	31.579	31.619	34.413
Jumlah seluruh KK (Domisili Kota)	32.001**	32.001**	32.001**	32.001**	44.605***
Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan.	97,80%	98,19%	98,68%	98.81 %	73.15 %

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, 2024

Keterangan:

*Hasil Survey Pemutakhiran 2015

**Hasil Survey Pemutakhiran 2019

*** Datago Kota Magelang jumlah penduduk semester 1 tahun 2024

Berdasarkan hasil survey mandiri yang dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Magelang, sampai dengan akhir tahun 2024 di Kota Magelang masih terdapat KK yang tidak memiliki septitank dan BABS, walaupun pada tahun 2023 Kota Magelang sudah mendapatkan STBM award. Survey ini dilakukan secara bertahap dari tahun 2022 sampai dengan tahun 2024 di 17 kelurahan.

Tabel 2.81 Sebaran BABS dan Rumah Tangga Belum Terakses Sanitasi Layak Kota Magelang, 2024

NO	KELURAHAN	BABS	BELUM TERAKSES SANITASI LAYAK (KK)
1.	Gelangan	240	724
2.	Panjang	64	185
3.	Cacaban	172	216
4.	Kemirirejo	148	179
5.	Rejowinangun Utara	336	414
6.	Kramat Utara	0	0
7.	Magelang	165	191
8.	Magersari	87	122
9.	Tidar Utara	79	81
10.	Tidar Selatan	149	163

NO	KELURAHAN	BABS	BELUM TERAKSES SANITASI LAYAK (KK)
11.	Jurangombo Utara	4	4
12.	Jurangombo Selatan	1	1
13.	Rejowinangun Selatan	58	61
14.	Wates	166	171
15.	Kedungsari	132	143
16.	Kramat Selatan	6	7
17.	Potrobangsari	181	183
	Jumlah	1.988	2.845

Sumber: DPUPR Kota Magelang Tahun 2025

Akses sanitasi layak penduduk Kota Magelang hingga akhir tahun 2023 mencapai 98,81% dan menurun menjadi 73.15% karena perbedaan jumlah KK yang dipakai. Upaya yang dilakukan dalam peningkatan akses sanitasi layak meliputi pembangunan SPALDS komunal dan SPALDS individu dengan berbagai dana baik dari APBD maupun pengajuan DAK Fisik.

Tabel 2.82 Sebaran SPALDS Komunal dan SPALDS Individu Kota Magelang, 2024

NO	KELURAHAN	SPALDS KOMUNAL (UNIT)	SPLADS INIVIDU (UNIT)	JUMLAH SR	JUMLAH KK
1.	Kramat Utara	1		2	2
2.	Kramat Selatan	1		2	3
3.	Potrobangsari		50	50	52
4.	Wates		50	50	71
5.	Kedungsari	5		25	37
6.	Panjang		50	50	63
7.	Gelangan	6		29	29
8.	Cacaban		66	66	88
9.	Rejowinangun Utara		55	55	67
10.	Kemirirejo	3		8	14
11.	Tidar Utara	2	55	59	72
12.	Rejowinangun Selatan	1		4	4
	Jumlah	19 Unit	326 Unit	400 SR	502 KK

Sumber: DPUPR Kota Magelang Tahun 2025

Berikut perbandingan pendanaan dari APBD, DAK Fisik sanitasi dan Banprov pada tahun 2023 dan 2024 sebagai dukungan terhadap perwujudan akses sanitasi layak di Kota Magelang.

Tabel 2.83 Sumber Pendanaan SPALDS Kota Magelang, 2024

NO	Nama Kegiatan	Sumber Anggaran	Anggaran 2023	Jumlah Penduduk Terlayani (2023)	Anggaran 2024	Jumlah Penduduk Terlayani (2024)
1.	Pembangunan SPALDS komunal	APBD	537.466.625	49	500.732.100	31
2.	Pembangunan SPALDS individu	DAK Fisik Sanitasi	2.282.000.000	330	2.282.000.000	326
3.	Pembangunan SPALDS Komunal	DAK Fisik Sanitasi	478.976.000	50	478.976.000	50
4.	Pembangunan SPALDS Komunal	APBD Perubahan	80.296.000	9	-	-
5.	Pembangunan SPALDS Komunal	Banprov	343.986.000	30	-	-

Sumber: DPUPR Kota Magelang Tahun 2025

Pada tahun 2024, pembangunan SPALDS komunal yang berasal dari dana APBD mengalami penurunan dari tahun 2023. Anggaran tahun 2023 sebesar Rp 537.466.625,00 dengan penerima manfaat sebanyak 49 jiwa menjadi Rp 500.732.100,00 dengan penerima manfaat sebanyak 31 jiwa. Selain itu, sumber dana yang berasal dari DAK Fisik Sanitasi tahun 2024 besarnya sama dengan tahun 2023 meskipun dengan jumlah penerima manfaat yang sedikit menurun.



Foto 0%



Foto 50%

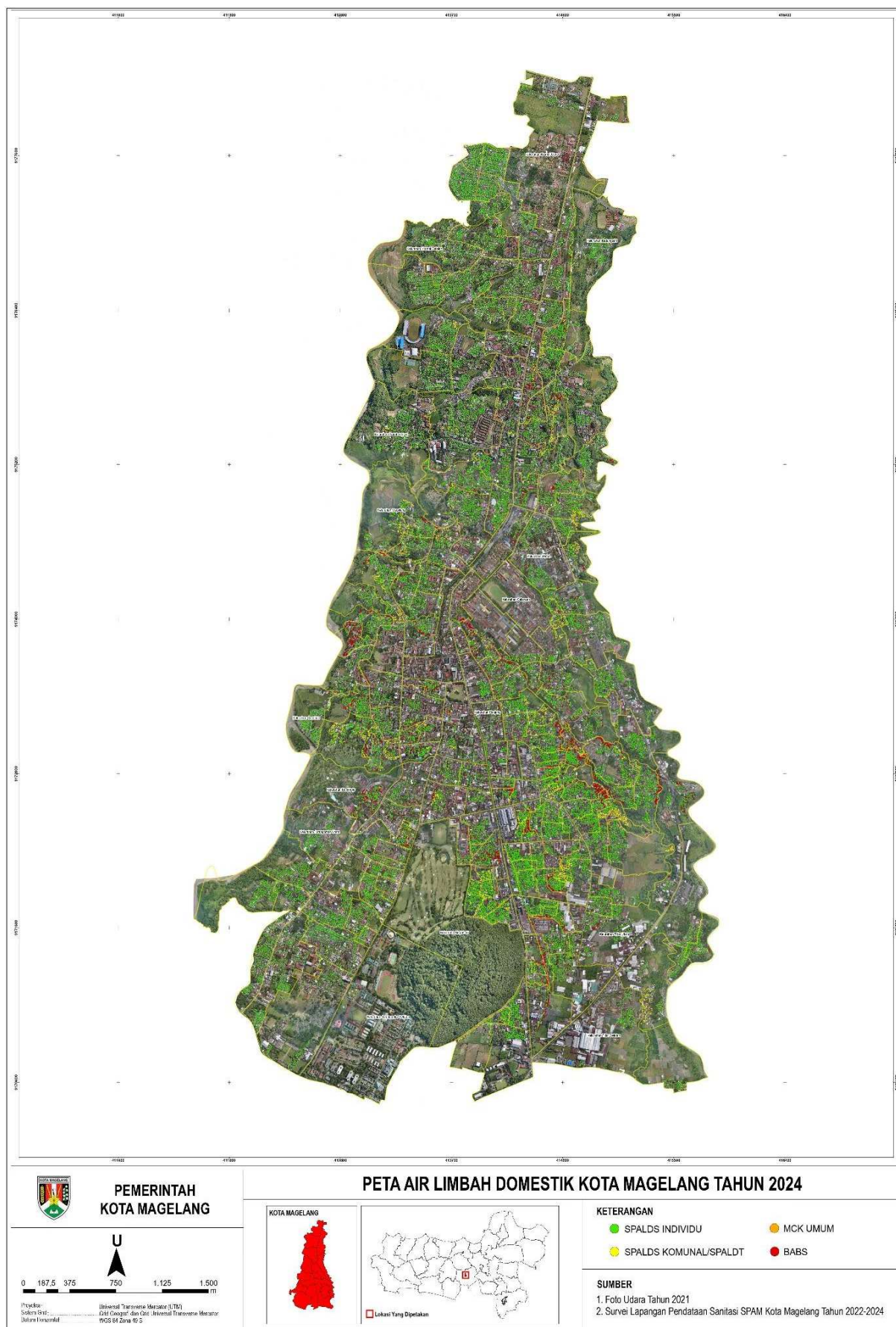


Foto 100%

Gambar 2.35 Pembangunan SPALDS Komunal di Kramat Selatan

Sumber: DPUPR Kota Magelang, 2025

Selain itu, sebagai upaya untuk mewujudkan keberlanjutan lingkungan dari adanya pembangunan SPALDS, dilakukan uji test e coli oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang untuk beberapa SPALDS Komunal di Kota Magelang. Uji test ini dilakukan untuk mengetahui sejauh mana air yang keluar dari SPLADS komunal terkontaminasi oleh bakteri e coli dan dapat mencemarkan air baku di sekitarnya. Pada tahun 2024, uji test ini dilakukan di beberapa SPALDS meliputi IPAL Rusun Potrobangsas, IPAL Ihsanul Fikri Potrobangsas, IPLT Magelang Dumpoh Potrobangsas Magelang, SPALD Magersari, IPAL Rusun Tidar Utara, SPALDT Rumah Habitat Panjang dan IPAL Rusun Wates Magelang Utara. Hasil uji lab untuk 7 SPALDS komunal tersebut semua terindikasi terkontaminasi oleh bakteri e coli dimana ambang batas minimal untuk ketersediaan bakteri e coli adalah nol. Hasil uji lab yang didapat berada di angka paling kecil 17×10^4 untuk IPAL Ihsanul Fikri, dan ini berarti jauh diatas angka ambang batas. Hal ini berpotensi untuk mencemari lingkungan dan air baku di sekitar lokasi.



Gambar 2.36 Peta Air Limbah Domestik Kota Magelang, 2024

Sumber: DPUPR Kota Magelang, 2025

2.1.3.1.3.7 Akses Sanitasi Aman

Realisasi akses sanitasi aman mengalami penurunan dimana tahun 2023 mencapai 14.22% kemudian menurun di tahun 2024 menjadi 11.54% karena perubahan faktor pembagi yaitu jumlah KK yang dipergunakan.

Tabel 2.84 Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Layanan Sanitasi Aman, 2020-2024

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi aman	4.055	4.237	4.237	4.551	5.148
Jumlah seluruh KK (Domisili Kota)	32.001**	32.001**	32.001**	32.001**	44.605***
Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi aman	12.67%	13.24%	13.24%	14.22%	11.54%

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Magelang, 2024

Keterangan:

*Hasil Survey Pemutakhiran 2015

**Hasil Survey Pemutakhiran 2019

*** Datago Kota Magelang jumlah penduduk semester 1 tahun 2024

Kriteria yang menentukan sanitasi disebut aman adalah melakukan penyedotan tangki septic minimal 5 tahun sekali. Di lain sisi, pelaksanaan layanan sedot tinja di Kota Magelang dilakukan oleh UPT PALD yang didukung oleh 2 unit truck, 1 unit L300 dan 1 unit SS yang memiliki inovasi berupa Layanan Senja (Sedot Tinja). Salah satu kendala dalam penyedotan adalah lokasi yang tidak bisa dilalui oleh truck sehingga diperlukan penyediaan pompa sedot kapasitas besar dengan jangkauan 50 meter lebih. UPT PALD tidak hanya melayani dalam kota, tetapi juga melayani luar Kota Magelang.

Tabel 2.85 Retribusi UPT PALD, 2020-2024

Tahun	Target PAD Penetapan	Target PAD Perubahan	Jumlah PAD	Jumlah Disedot	
				Wilayah Kota Magelang	Luar Kota Magelang
2020	17.000.000	27.000.000	37.000.000	74	24
2021	17.000.000	30.000.000	44.370.000	160	71
2022	25.000.000	37.000.000	61.310.000	201	88
2023	27.000.000	80.000.000	100.270.000	328	62
2024	27.000.000	45.000.000	100.270.000		

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Magelang, 2025

Salah satu inovasi untuk meningkatkan sanitasi aman yaitu dengan membangun kerjasama antara Pemerintah Kota Magelang, IUWASH Tangguh, LPM dan CSR. Inovasi yang diluncurkan adalah Lelang Sanitasi, dimana ini merupakan tahun kedua dari lelang sanitasi. Tujuan dari lelang sanitasi adalah penyedotan gratis bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Hasil dari lelang tersebut terkumpul Rp50.400.000, dengan 168 KK yang terlayani. Tahun 2024, masyarakat yang diprioritaskan untuk mendapatkan sedot gratis adalah masyarakat miskin dari desil 1 dan 2 SSEK 2023 yang dioverlay dengan kawasan kumuh dan stunting. Selain data-data tersebut, pihak UPTD IPLT melakukan survey kelayakan bangunan dan kemudahan akses terhadap 1000 warga yang teridentifikasi layak mendapat bantuan. Survey ini dilakukan atas kerjasama Pemerintah Kota Magelang dengan IUWASH Tangguh. CSR yang turut bergabung berasal dari BUMD, hotel seperti Puri Asri, Atria, dan Wisata Hotel, perbankan dan pabrik plastik Joyoboyo. Salah satu dampak dari adanya lelang sanitasi adalah peningkatan retribusi UPT PALD selain mengurangi stunting dan tercemarnya air tanah oleh bakteri e coli. Distribusi hasil lelang sanitasi sebagai berikut:

Tabel 2.86 Distribusi Hasil Lelang Sanitasi, 2024

No	Kelurahan	Kecamatan	Jumlah KK
1.	Kedungsari	Magelang Utara	10
2.	Kramat Utara	Magelang Utara	15
3.	Potrobangsari	Magelang Utara	16
4.	Kramat Selatan	Magelang Utara	5
5.	Wates	Magelang Utara	3
6.	Rejowinangun Utara	Magelang Tengah	34
7.	Gelangan	Magelang Tengah	10
8.	Magelang	Magelang Tengah	6
9.	Magersari	Magelang Selatan	31
10.	Tidar Utara	Magelang Selatan	18
11.	Rejowinangun Selatan	Magelang Selatan	15
12.	Tidar Selatan	Magelang Selatan	5
	Jumlah		168 KK

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Magelang, 2025

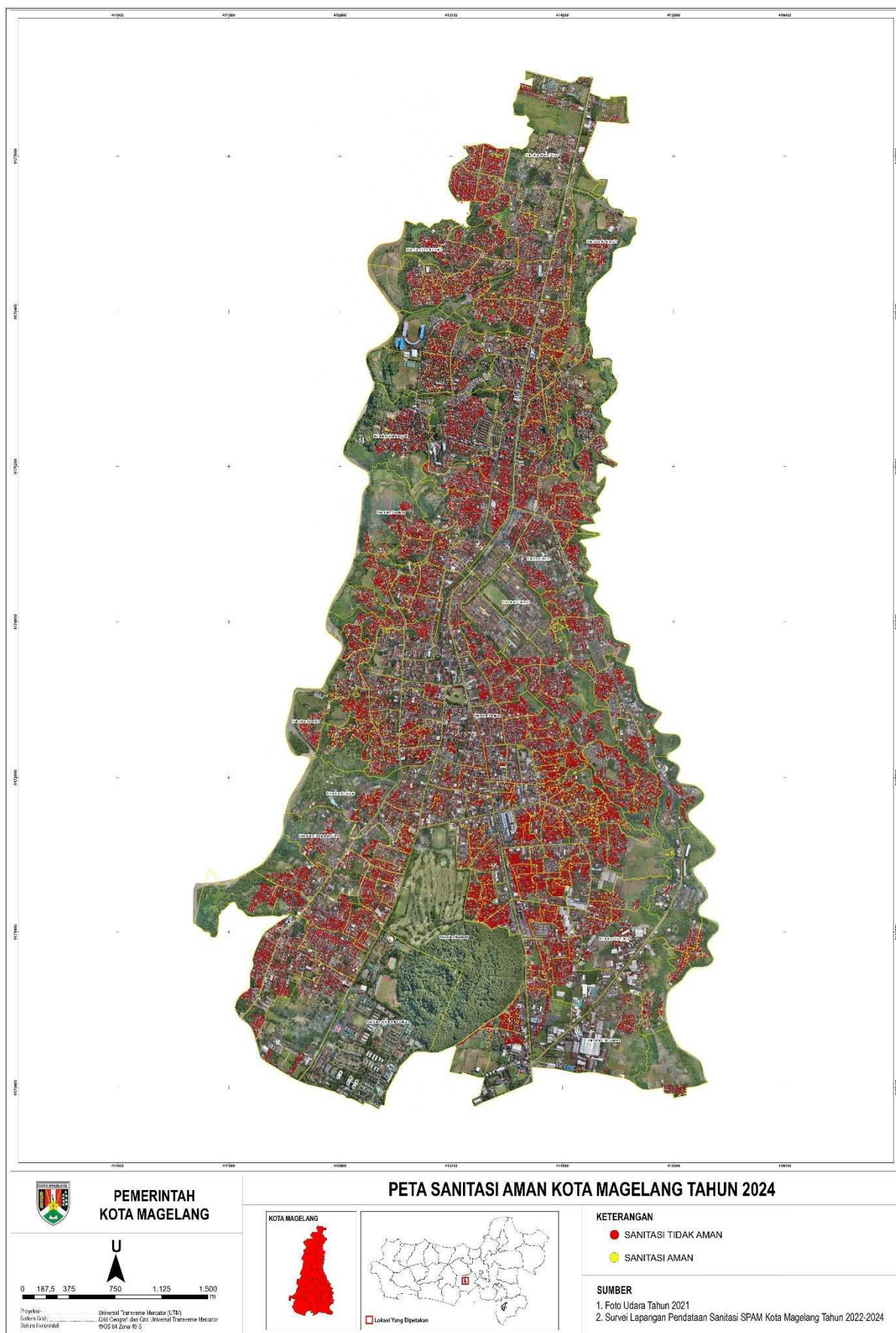
Beberapa upaya telah dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Magelang untuk meningkatkan angka sanitasi aman, salah satunya yaitu kolaborasi antara IPLT UPTD dengan PDAM Kota Magelang pada tahun 2024. Sistem kolaborasi tersebut dilakukan dengan cara penyedotan, pengangkutan dan pengolahan di lakukan oleh IPLT dan penagihan dilakukan oleh PDAM. Banyak kendala dalam rencana ini antara lain adanya Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kota Magelang yang berbunyi bahwa Bidang Usaha PDAM adalah melaksanakan sebagian kewenangan Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan SPAM untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan usaha lainnya dalam bidang penyediaan air minum. Tindak lanjut dari rencana ini adalah perlu adanya kajian lebih lanjut tentang kelayakan kolaborasi tersebut, yang rencana akan dilaksanakan pada tahun 2025.

Tabel 2.87 Sebaran SPALDS Individu dan Komunal di Kota Magelang, 2024

No	Kelurahan	SPALDS Individu	SPALDS Komunal
1.	Gelangan	109	79
2.	Panjang	57	67
3.	Cacaban	456	199
4.	Kemirirejo	150	53
5.	Rejowinangun Utara	586	110
6.	Kramat Utara	138	25
7.	Magelang	174	229
8.	Magersari	232	218
9.	Tidar Utara	208	251
10.	Tidar Selatan	87	87

No	Kelurahan	SPALDS Individu	SPALDS Komunal
11.	Jurangombo Utara	46	8
12.	Jurangombo Selatan	29	3
13.	Rejowinangun Selatan	76	58
14.	Wates	125	148
15.	Kedungsari	412	171
16.	Kramat Selatan	339	54
17.	Potrobangsari	50	32
	Jumlah	3274	1792

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Magelang, 2025



Gambar 2.37 Peta Sanitasi Aman Kota Magelang, 2024

Sumber: DPUPR Kota Magelang, 2025

2.1.3.1.3.8 Akses Sumber Air Minum yang Layak dan Berkelanjutan

1. Akses Air Minum Layak

Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap pelayanan sumber air minum layak mengalami penurunan sama dengan sanitasi aman dan layak, dikarenakan komitmen Pemerintah Kota Magelang untuk menyajikan data real sesuai dengan kondisi yang ada. Penurunan ini disebabkan data jumlah KK yang digunakan pada tahun 2024 adalah data jumlah KK dari Data GO Kota Magelang yaitu jumlah KK semester 1 tahun 2024 sebanyak 44.605 KK.

Tabel 2.88 Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Air Minum Layak, 2020-2024

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah KK dengan akses layak	31.012	31.066	31.377	31.464	34.708
Jumlah KK	32.001**	32.001**	32.001**	32.001**	44.605***
Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap pelayanan sumber air minum layak	96,91%	97,08%	98,05%	98.32%	77.81%

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Magelang, 2025

Keterangan:

* Hasil Survey Pemutakhiran 2015

**Hasil Survey Pemutakhiran 2019

*** Data Jumlah Penduduk Kota Magelang Semester 1 Tahun 2024 Data Go

Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap pelayanan sumber air minum layak di Kota Magelang tahun 2023 sudah mencapai 98.32%, mengalami penurunan pada tahun 2024 karena faktor pembagi yang berbeda walaupun jumlah KK dengan akses layak mengalami kenaikan sebesar 3.243 K menjadi 77.81 %. Angka ini meliputi jumlah pelanggan PDAM, pemakai air tanah, air permukaan dan SPAM komunal. Di lain sisi, layanan PDAM yang belum mampu mencukupi kebutuhan air minum masyarakat menyebabkan keengganan masyarakat untuk beralih dari SPAM komunal, air tanah menuju ke layanan PDAM. Beberapa kendala dalam penyediaan air oleh PDAM seperti kehilangan air/*Non Revenue Water* (NRW). Nilai kehilangan air meliputi 2 (dua) hal yaitu kehilangan air produksi dan kehilangan air distribusi. Penyebab kehilangan air produksi disebabkan oleh air yang dibuang untuk mengeluarkan udara didalam pipa untuk pemeliharaan jaringan pipa. Kehilangan air distribusi karena beberapa hal seperti water mater pelanggan rusak, kebocoran pipa distribusi, kelebihan tekanan di titik pelayanan terendah menyebabkan meter tidak akurat dan menurunkan masa, serta penempatan meter induk di sumber air yang tidak tepat. Kondisi *Non-Revenue Water* Kota Magelang selanjutnya digambarkan melalui tabel berikut ini.

Tabel 2.89 Persentase Non-Revenue Water (NRW) Kota Magelang, 2020-2024

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
Kapasitas produksi (m3/bulan)	2.042.637,5	2.038.744,83	1.866.138,75	1.905.128,45	1.864.014,76
Kapasitas distribusi (m3/bulan)	2.030.136,17	2.023.811,50	1.848.392,75	1.874.739,36	1.842.072,73
Kapasitas terjual (m3/bulan)	818.375,92	805.984,42	795.901,08	807.842,25	801.424,60
Kebocoran (m3/bulan)	1.211.760,25	1.232.760,42	1.052.491,67	910.688,83	887.142,17
NRW	59.69%	60.47%	56.94%	52.99%	52.54 %

Sumber: Perusahaan Daerah Air Minum Kota Magelang, 2025

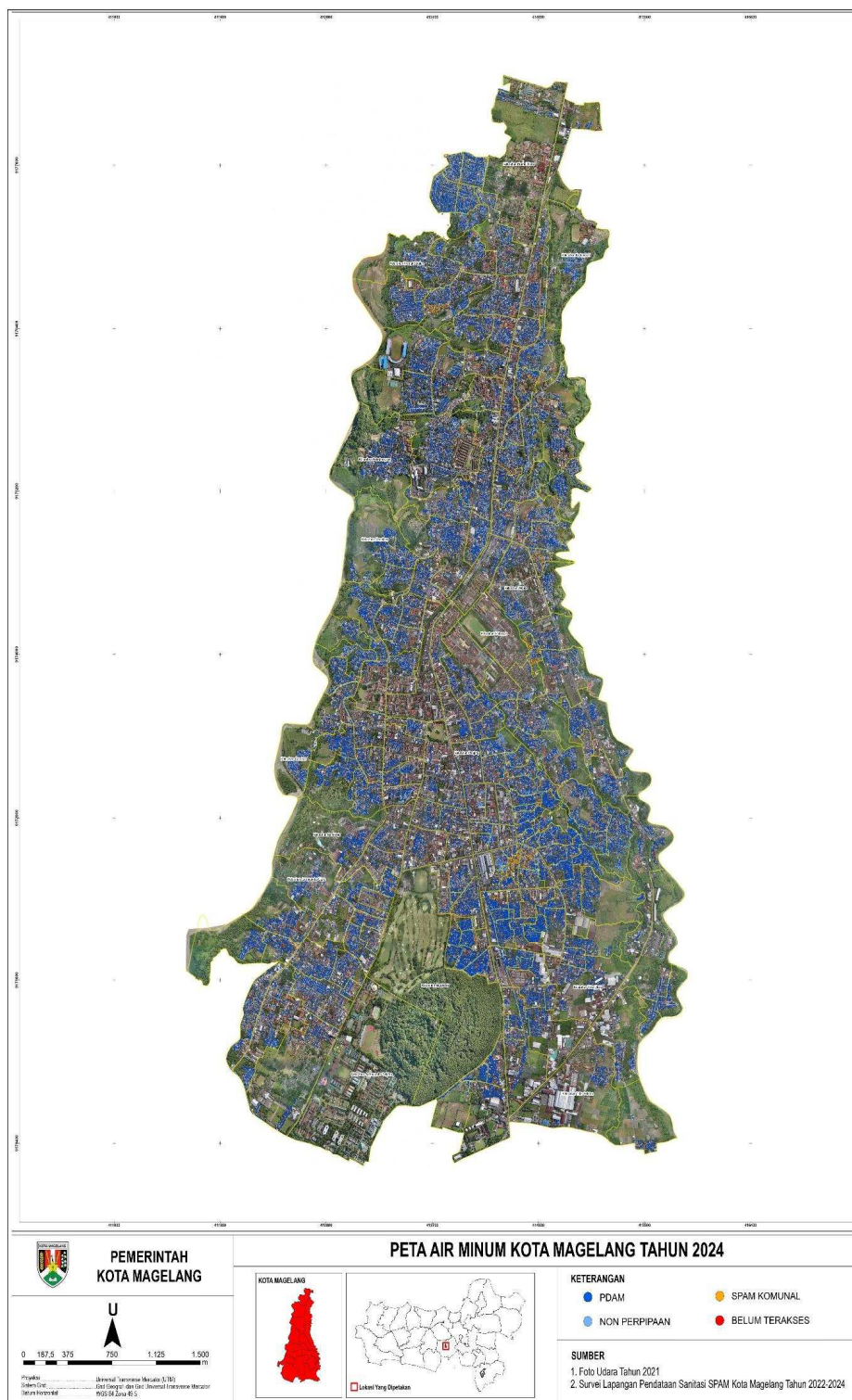
Selanjutnya, terkait dengan sumber pendanaannya, upaya peningkatan pelayanan air minum yang dilakukan oleh pemerintah Kota Magelang menggunakan dana APBD dan DAK Air Minum. Pada tahun 2024, Kota Magelang mendapat dana DAK Air Minum sebesar Rp 10.431.336.000,00 yang diperuntukkan untuk 710 KK dengan sambungan gratis di Kecamatan Magelang Selatan dan beberapa di Magelang Tengah. Sambungan untuk Kelurahan Wates merupakan sambungan pada masyarakat terdampak program pemerintah tahun

2026 yang berasal dari rusunawa di Kota Magelang. Selain DAK air minum, dari anggaran APBD dibangun SPAM Komunal dengan anggaran Rp 116.139.000, 00 di kelurahan Gelangan dan Magelang serta Rp 98.727.000,00 di Kelurahan Kemirirejo

Tabel 2.90 Sebaran Sasaran Penerima Bantuan DAK Air Minum, 2024

NO	KECAMATAN	KELURAHAN	JUMLAH
1.	Magelang Utara	Wates	26
2.	Magelang Tengah	Kemirirejo	26
3.	Magelang Tengah	Rejowinangun Utara	179
4.	Magelang Selatan	Tidar Utara	98
5.	Magelang Selatan	Tidar Selatan	63
6.	Magelang Selatan	Rejowinangun Selatan	98
7.	Magelang Selatan	Magersari	114
8.	Magelang Selatan	Jurangombo Utara	30
9.	Magelang Selatan	Jurangombo Selatan	76
		Jumlah	710 KK

Sumber: Perusahaan Daerah Air Minum Kota Magelang, 2025



Gambar 2.38 Peta Air Minum Kota Magelang, 2024

Sumber: DPUPR Kota Magelang, 2025

2. Akses Air Minum Aman

Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum aman dan berkelanjutan hingga tahun 2023 mencapai 88,05% (dihitung berdasarkan layanan jaringan perpipaan PDAM yang telah dilakukan uji kualitas airnya) dan pada tahun 2024 mengalami penurunan menjadi 65.54% karena perubahan sumber data jumlah penduduk yang digunakan. Akses air minum aman yang digunakan dalam perhitungan merupakan jumlah KK yang terlayani oleh air siap minum PDAM Kota Magelang. Untuk

penduduk yang memakai sumber air bukan dari PDAM (air tanah atau sumur terlindungi), maka air yang diminum harus memenuhi standar uji kualitas air.

Tabel 2.91 *Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Layanan Sumber Air Minum Aman dan Berkelanjutan, 2020-2024*

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah KK terlayani air siap minum	456	456	109.502	112.931**	29.234
Jumlah KK	32.001*	32.001*	127.965	128.264***	44.605****
Capaian (%)	1,42%	1,42%	85,75%	88,05 %	65.54%

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Magelang, 2025
*Hasil Survey Pemutahiran 2019
**Jumlah penduduk terlayani jaringa perpipaan PDAM yang sudah diuji kualitas airnya
***Jumlah penduduk bersumber dari Disdukcapil Kota Magelang tahun 2023
****Jumlah penduduk bersumber dari Datago Kota Magelang semester 1 Tahun 2024

Jika dilihat kondisi akses air minum aman selama 2020-2024, terjadi kenaikan signifikan pada tahun 2022. Hal tersebut terjadi sebagai implikasi adanya Pedoman Pengukuran Capaian Pembangunan Perumahan dan Permukiman Berbasis Hasil Tahun 2019 yang dikeluarkan Bappenas tentang definisi air minum aman adalah yang memenuhi aspek 4K (kuantitas, kualitas, kontinuitas dan keterjangkauan). Air minum aman berasal dari PDAM dan non perpipaan yang memenuhi kategori aspek 4K tersebut.

3. Sumber Air PDAM Kota Magelang

Saat ini PDAM Kota Magelang tidak hanya melayani masyarakat kota, tetapi juga melayani beberapa daerah di Kabupaten Magelang meliputi wilayah Mertoyudan sebanyak 648 KK, wilayah Bandongan 824 KK, wilayah Banyuwangi 1.247 KK, wilayah Trasan 1.339 KK, wilayah Tonoboyo 37 KK dan wilayah Secang 574 KK. Sedangkan dari masyarakat Kota Magelang berikut sebaran pelanggan PDAM Kota Magelang:

Tabel 2.92 *Sebaran Pelanggan PDAM Kota Magelang, 2024*

No	Kelurahan	Jumlah KK	Jumlah Jiwa
1.	Kramat Utara	1.041	4.164
2.	Kramat Selatan	2.039	8.115
3.	Kedungsari	1.246	4.984
4.	Wates	1.719	6.984
5.	Potrobangsari	1.820	7.436
6.	Magelang	2.059	7.943
7.	Cacaban	1.914	7.692
8.	Kemirirejo	1.454	5.718
9.	Gelangan	1.659	6.636
10.	Panjang	1.148	4.828
11.	Rejowinangun Utara	2.427	10.068
12.	Tidar Utara	1.903	7.684
13.	Tidar Selatan	1.570	5.737
14.	Rejowinangun Selatan	1.587	6.492

No	Kelurahan	Jumlah KK	Jumlah Jiwa
15.	Magersari	2.059	8.517
16.	Jurangombo Utara	1.152	4.333
17.	Jurangombo Selatan	1.863	7.293
	JUMLAH	28.660	114.425

Sumber: Perusahaan Daerah Air Minum Kota Magelang, 2025

Salah satu permasalahan dalam layanan PDAM adalah jumlah jam layanan yang tidak mencukupi kebutuhan masyarakat. Hal ini disebabkan karena 7 (tujuh) dari 8 (delapan) sumber mata air PDAM Kota Magelang berasal dari kabupaten. Pada tahun 2024, sumber mata air yang berada di Kota Magelang bertambah dengan mata air Sri Punganten dengan debit sebesar 35 ltr/detik. Berikut kapasitas sumber air PDAM Tahun 2024:

Tabel 2.93 Kapasitas Sumber Air dan Produksi Sumber Mata Air PDAM Kota Magelang, 2024

No	Mata Air	Kapasitas Sumber Air (Rata-Rata Perbulan) Ltr/Det	Produksi (Ltr/Det)
1.	Kalimas I	110.02	110.02
2.	Kalimas II	188.95	122.00
3.	Wulung	80.28	61.91
4.	Kalegen	68.59	43.94
5.	Kanoman I	446.05	68.15
6.	Kanoman II	75.49	75.49
7.	Tuk Pecah I	115.96	113.62
8.	Tuk Pecah II	88.97	53.55

Sumber: Perusahaan Daerah Air Minum Kota Magelang, 2025

Beberapa upaya telah dilakukan oleh Pemerintah Kota Magelang dalam meningkatkan kualitas air minum salah satunya adalah dengan inovasi Zona Air Minum Prima (ZAMP). Zona Air Minum Prima ini merupakan sistem distribusi air siap minum yang sudah memenuhi standar kualitas air minum dan teruji secara klinis. Di Kota Magelang Zona Air Minum Prima (ZAMP) baru terdistribusi di 3 tempat yaitu:

Tabel 2.94 Sebaran Penerima Manfaat Zona Air Minum Prima (ZAMP), 2024

No	Kelurahan	Perumahan	Jumlah Penerima Manfaat (KK)
1.	Wates	Cluster Sangriya	110
2.	Kramat Utara	Perum Korpri	310
3.	Cacaban	Tuk Songo	159

Sumber: Perusahaan Daerah Air Minum Kota Magelang, 2025

Salah satu kendala belum semua lokasi dan perumahan terdistribusi Zona Air Minum Prima (ZAMP) ini adalah belum semua perumahan memiliki minimal tekanan yang disyaratkan dalam distribusi ZAMP, layanan harus 24 jam dan lingkup pendistribusian minimal 100 SR.

4. Sumber Air SPAM

Sumber air minum bagi masyarakat Kota Magelang tidak hanya berasal dari PDAM, tetapi juga berasal dari air tanah, air permukaan dan sumber air terlindungi. Sumber air yang bukan berasal dari jaringan perpipaan dalam hal ini PDAM bisa dikatakan aman apabila sudah memenuhi beberapa standar yang ditetapkan seperti menggunakan sumber air layak, lokasi sumber berada di dalam atau di halaman rumah, tersedia setiap kebutuhan, dan kualitas sumber air memenuhi syarat kualitas air minum.

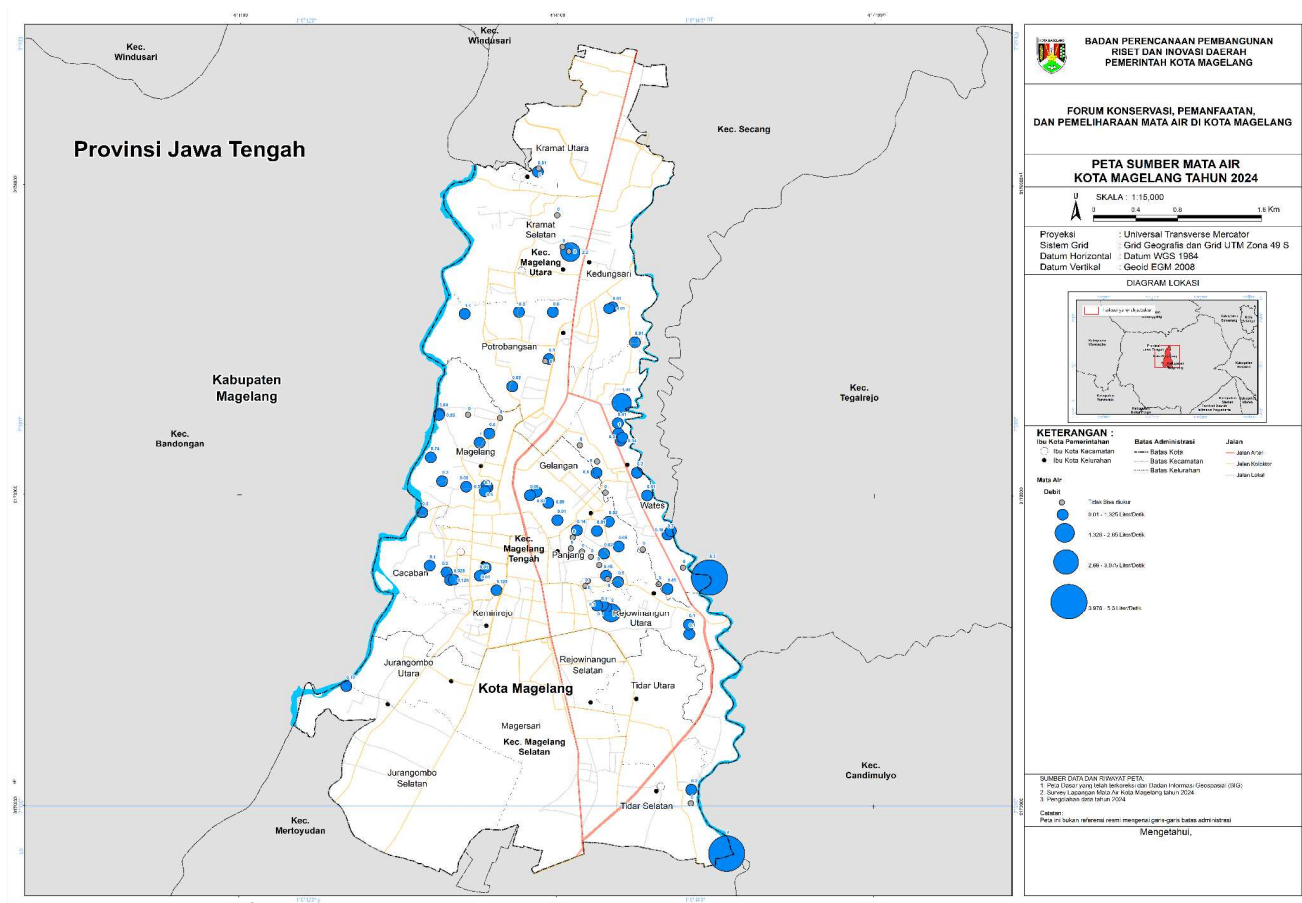
Sumber air minum layak adalah jika rumah tangga tersebut menggunakan sumber air minum utama berupa ledeng, perpipaan, perpipaan eceran, kran halaman, hidran umum, air terlindungi, dan penampungan air hujan. Pada tahun 2024, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Magelang melakukan beberapa uji kualitas air non-PDAM.

Sumber air yang berasal Kabupaten Magelang menyulitkan Pemerintah Kota Magelang dalam melakukan konservasi terhadap sumber air, sehingga pada tahun 2024 dilakukan survey sumber air baku di Kota Magelang. Survey ini dilaksanakan atas kerjasama antara Pemerintah Kota Magelang dengan IUWASH Tangguh dengan tujuan memetakan sumber air baku di Kota Magelang. Hasil survey ini mendapatkan 83 titik sumber air baku dengan kapasitas debit yang berbeda-beda.

Tabel 2.95 Sebaran Sumber Air Baku Kota Magelang, 2024

No	Kelurahan	Debit < 1 Ltr/Det	Debit < 2,5 Ltr/Det	Debit < 5,3 Ltr/Det
1.	Wates	16 titik	3 titik	1 titik
2.	Potrobangsari	4 titik	1 titik	
3.	Kramat Selatan	1 titik		
4.	Gelangan	9 titik		
5.	Rejowinangun Utara	6 titik	1 titik	
6.	Kedungsari	2 titik		
7.	Panjang	9 titik		
8.	Tidar Selatan	2 titik		1 titik
9.	Jurangombo Selatan	1 titik		
10.	Magelang	8 titik	1 titik	
11.	Cacaban	7 titik		
12.	Kramat Utara	2 titik		
		67 titik	6 titik	2 titik

Sumber: Perusahaan Daerah Air Minum Kota Magelang, 2025



Gambar 2.39 Peta Sumber Mata Air Kota Magelang, 2024

Sumber: DPUPR Kota Magelang, 2025

5. Air Siap Minum Perpipaan

Selanjutnya dalam rangka mendukung pemantauan ketercapaian indikator utama pembangunan sebagaimana diamanatkan melalui RPJDPD Kota Magelang tahun 2025-2045, aspek ketersediaan air minum juga dilihat dari indikator akses rumah tangga perkotaan terhadap air siap minum perpipaan. Meskipun capaian pada tahun 2023 belum mencapai 100% yaitu dengan angka 88,21%; tetapi angka tersebut telah menunjukkan perbaikan dibandingkan capaian tahun 2022 sebesar 85,88%.

2.1.3.1.3.9 Kawasan Strategis yang Ditata

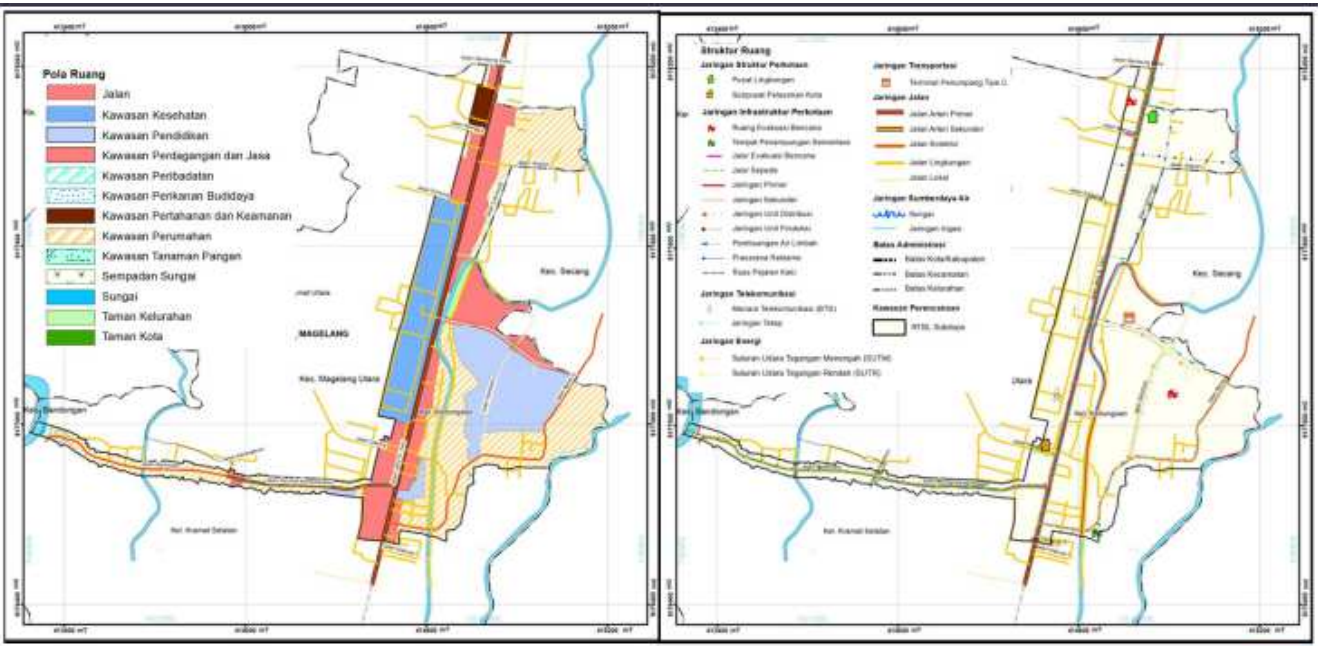
Kota Magelang memiliki 8 (delapan) kawasan strategis sebagai motor pertumbuhan kota. Gambaran Kawasan Strategis tersebut adalah:

1. Kawasan Sidotopo

Kawasan Sidotopo berada pada bagian utara Kota Magelang, tepatnya berada pada BWP V dan berbatasan dengan Kabupaten Magelang. Visi pengembangan Kawasan Sidotopo dalam dokumen RTBL yang sudah disusun pada tahun 2022 adalah Menciptakan Pusat Kota Baru dengan konsep pengembangan kawasan perkantoran, pendidikan, kesehatan, permukiman, dan perdagangan jasa terpadu sebagai pembangkit di bagian utara kota yang berkelanjutan. Saat ini Peraturan Walikota untuk menetapkan RTBL Kawasan Sidotopo sedang dalam proses legalisasi dan hingga akhir tahun 2024 sudah diajukan ke Biro Hukum Provinsi untuk direviu.

Kawasan Sidotopo dalam RTRW Kota Magelang memiliki arahan fungsi pelayanan pendidikan dengan adanya pengembangan perguruan tinggi, perbelanjaan toko modern, kawasan pengembangan sosial budaya, olahraga, dan rekreasi. Sedangkan pada arahan pola ruang kawasan, pada BWP V akan dikembangkan mayoritas sebagai kawasan perumahan, kawasan perdagangan jasa pada persil lapis pertama

jalan, kawasan pertanian, RTH serta kawasan pendidikan. Arahkan pola ruang dan struktur ruang Kawasan Sidotopo dapat dilihat pada gambar berikut ini.



Gambar 2.40 Rencana Pola Ruang Kawasan Sidotopo

Sumber: DPUPR Kota Magelang, 2025

Hingga akhir tahun 2024, arahan pengembangan Kawasan Sidotopo yang sudah terwujud adalah pengembangan kompleks perkantoran pemerintah (Kantor DLH) dan Untidar Magelang. Beberapa pengembangan sesuai arahan dalam RTBL (visualisasi dapat dilihat pada gambar di bawah), seperti pengembangan terminal tipe c, pusat perdagangan jasa dan perkantoran sewa, tower air PDAM, dan stasiun pengisian kendaraan listrik belum terwujud hingga akhir tahun 2024.

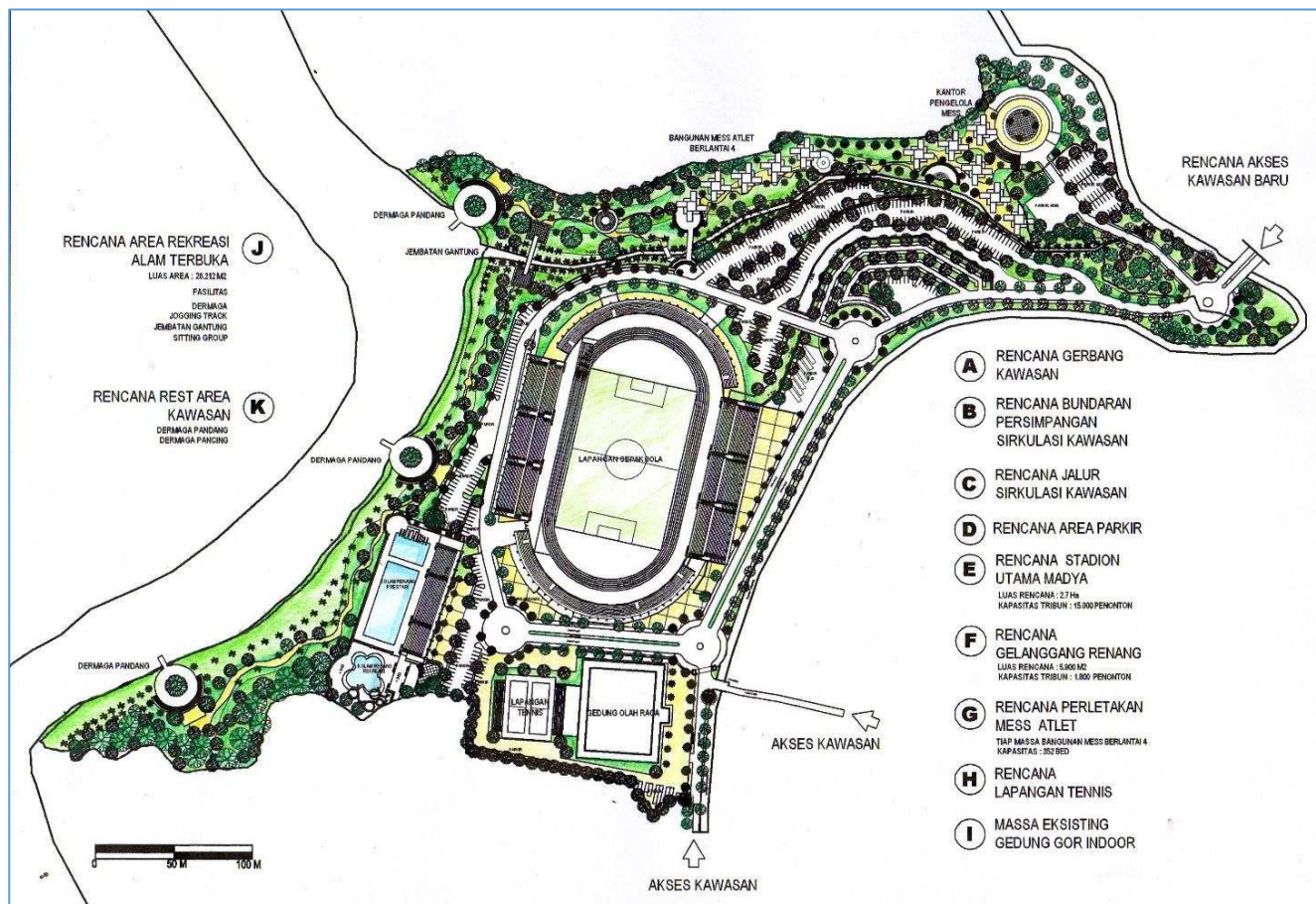


Gambar 2.41 Visualisasi Kawasan Sidotopo dalam RTBL, 2024

Sumber: DPUPR Kota Magelang, 2025

2. Kawasan Sport Center GOR Samapta

Kawasan GOR Samapta difungsikan sebagai pusat pelayanan rekreasi dan olahraga. Sebagian perwujudan fisik kawasan sudah terbangun untuk mendukung even-even olahraga nasional yaitu Stadion Moch Soebroto, Samapta Aquatic Stadium, GOR Samapta, dan Lapangan Tennis Moncer Serious Indoor. Rencana pengembangan kawasan ini dapat dilihat pada gambar berikut ini.



Gambar 2.42 Visualisasi Kawasan Sidotopo dalam RTBL, 2024

Sumber: DPUPR Kota Magelang, 2025

3. Kawasan Kebonpolo

Kawasan Kebonpolo merupakan kawasan yang direncanakan dengan fungsi transportasi dan perdagangan. Dokumen RTBL kawasan ini baru disusun tahun 2024 dengan rencana sebagaimana berikut.



Gambar 2.43 Rencana Pengembangan Kawasan Kebonpolo

Sumber: DPUPR Kota Magelang, 2025

4. Kawasan Aloon-Aloon

Visi pengembangan Kawasan Aloon-aloon adalah “Mewujudkan Kawasan Alun-Alun Kota Magelang dan Sekitarnya sebagai Pusat Kota, Pendukung Pelayanan Kegiatan Ekonomi, Kelestarian Lingkungan, Kearifan Lokal dan Religi di Kota Magelang”. Kawasan ini terletak di BWP I yang memiliki fungsi sebagai pusat pelayanan kota dengan arah pengembangan utama sebagai kawasan yang mawadahi kegiatan perkotaan, dengan karakteristik kegiatan sebagai pusat pelayanan sosial-ekonomi skala kota, rekreasi wisata perkotaan, dan permukiman dengan kepadatan tinggi.

Secara umum, konsep perancangan struktur tata bangunan dan lingkungan di Kawasan Aloon-Aloon dan sekitarnya adalah sebagai berikut:

- Peningkatan pelayanan, sarana dan prasarana kawasan perdagangan jasa agar mendukung rencana fungsi sebagai pusat bisnis dan perekonomian (*Central Business District*) Kota Magelang
- Struktur diarahkan untuk mempertegas *node* kawasan sehingga mempermudah penataan sirkulasi pergerakan baik pejalan kaki maupun nonpejalan kaki.
- Kawasan Alun-Alun Kota Magelang merupakan kawasan sejarah dengan gaya bangunan Jawa, Islam, Kolonial dan Cina, maka konsep ekspresi bangunan disesuaikan dengan tema dan konteks sejarah pada masing-masing penggal koridor
- Peningkatan kualitas lingkungan sebagai kawasan yang layak singgah, layak usaha dan layak huni yang berkarakter.
- Peningkatan kualitas prasarana pendukung transportasi kawasan dan utilitas yang ramah lingkungan.

Perwujudan fisik terakhir yang dilakukan dalam pengembangan kawasan Aloon-aloon adalah pembangunan Kawasan Ngesengan sebagai sentra kuliner baru pada tahun 2023. Di tahun 2025 ini pembangunan kawasan bekas Magelang Theater juga direncanakan akan dimulai oleh investor.

5. Kawasan Kyai Langgeng

Kawasan Kyai Langgeng adalah kawasan strategis yang difungsikan sebagai kawasan pusat pelayanan rekreasi dan olahraga. Kawasan ini meliputi obyek wisata Taman Kyai Langgeng yang pengelolaannya berada di

8. Kawasan Soekarno Hatta

Kawasan Soekarno Hatta memiliki fungsi sebagai pusat transportasi dan perdagangan jasa. RTBL kawasan ini disusun tahun 2024 menyempurnakan perencanaan yang telah disusun sebelumnya. Pada kawasan Soekarno hatta terdapat Terminal Tipe A Tidar yang juga sudah direvitalisasi oleh Kementerian Perhubungan di tahun 2024. Selain itu terdapat simpul transportasi *Underpass* Cangkuk yang juga selesai dibangun tahun 2024. Pembangunan tersebut diharapkan dapat mendorong perkembangan kawasan dari sisi Selatan.

2.1.3.1.3.10 Penataan Ruang

Penyelenggaraan urusan penataan ruang di Kota Magelang dilakukan melalui pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan penataan ruang. Hingga akhir tahun 2021 dokumen rencana rinci (RDTR dan RTBL) masih belum dapat terselesaikan.

1. Penyusunan RDTR Kota Magelang

Hingga akhir tahun 2024, dokumen RDTR Kota Magelang masih belum terselesaikan. Rincian pemenuhan persyaratan administrasi dan teknis adalah:

Tabel 2.96 Kemajuan Tahapan Aspek Administrasi Penyusunan RDTR Kota Magelang Hingga Akhir 2024

No	Persyaratan	Lengkap	Belum Lengkap
	Administratif		
1	Berita Acara Konsultasi Publik RDTR Tahap I	v	
2	Berita Acara Konsultasi Publik Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RDTR Tahap I	v	
3	Berita Acara Kaveling Minimal	v	
4	Berita Acara Paduserasi dengan Kawasan Berbatasan (Kabupaten Magelang)	v	
5	Berita Acara Konsultasi Publik RDTR Tahap II	v	
6	Berita Acara Konsultasi Publik KLHS RDTR Tahap II	v	
7	Berita Acara Persetujuan RDTR dari Kementerian ATR tidak mengadakan Sidang Lintas Sektoral pada akhir Tahun 2024		v (dilaksanakan awal Tahun 2025/ Target TW I)
8	Surat Rekomendasi Substansi Raperwal RDTR dari Kanwil KUMHAM atas Raperwal RDTR		v
9	Surat Rekomendasi Penetapan Biro Hukum Provinsi atas Raperwal RDTR		v (Target TW I tahun 2025)
10	Validasi KLHS dari DLHK Provinsi Jawa Tengah		v (Target TW I tahun 2025)
	Dokumen Teknis		
1	Dokumen Fakta analisis	v	
2	Dokumen Rencana	v	
3	Album Peta	v	
4	Dokumen Peraturan Zonasi (sudah draf belum asistensi)		v
5	Rancangan Peraturan Walikota dan Lampiran (proses awal ke Kanwil Kumham) beserta Matrik Penilaian Mandiri atas Perwal		v (Target TW I tahun 2025)

No	Persyaratan	Lengkap	Belum Lengkap
6	Dokumen Database Zonasi (Integrasi dengan Online Single Submission/OSS)		V tahun 2025

Sumber: DPUPR Kota Magelang, 2025

Kekurangan persyaratan baik administratif maupun teknis diharapkan dapat diselesaikan di tahun 2025, mengingat penyusunan RDTR Kota Magelang sudah dimulai sejak tahun 2021. Tindak lanjut yang akan dilakukan pada tahun 2025 dalam rangka memenuhi kekurangan persyaratan tersebut adalah koordinasi supervisi oleh Kementerian ATR atas dokumen teknis meliputi:

- a. Peraturan Zonasi (2025/TW I);
- b. Studio Peta Struktur Ruang dan Pola Ruang RDTR (target Triwulan I tahun 2025);
- c. Dokumen Data Base Zonasi PZ untuk integrasi OSS (Target Triwulan III sampai IV Tahun 2025);
- d. Sidang Lintas Sektoral Kementerian (target Triwulan I tahun 2025);
- e. Integrasi Online Single Submission/OSS (target Triwulan I sampai Triwulan III tahun 2025);

2. Penyusunan RTBL Kota Magelang

Hingga akhir tahun 2024, dokumen RTBL yang sudah disusun adalah untuk 5 (lima) kawasan strategis, yaitu RTBL Kawasan Lembah Tidar, RTBL Kawasan Aloon-aloon, RTBL Kawasan Sidotopo, RTBL Kawasan Soekarno Hatta dan Kawasan Kebonpolo. Untuk 3 (tiga) kawasan strategis lainnya belum memiliki dokumen perencanaan RTBL, namun 2 (dua) diantaranya (Kawasan Mantyasih dan Kawasan Sport Center GOR Samapta) sudah memiliki masterplan sedangkan untuk rencana pengembangan Kawasan Kyai Langgeng, karena dikelola oleh Perusahaan Umum Daerah Objek Wisata Taman Kyai Langgeng Kota Magelang maka penyusunannya menjadi tanggung jawab perusda. Dari 5 (lima) RTBL yang sudah disusun, 2 (dua) diantaranya dalam proses penetapan Peraturan Walikota, yaitu RTBL Kawasan Lembah Tidar dan RTBL Kawasan Sidotopo.

3. Pengendalian Pemanfaatan Ruang

Rekomendasi tata ruang sebagai wujud dari pengendalian pemanfaatan ruang di Kota Magelang merupakan salah satu syarat dalam pengajuan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG). Pada tahun 2024 jumlah rekomendasi tata ruang yang diterbitkan sebanyak 62 berkas Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) nonberusaha dan Informasi Rencana Kota (IRK) sebanyak 64 berkas, sehingga total rekomendasi tata ruang yang diterbitkan dalam kurun waktu tahun 2019-2024, jumlah sebanyak 897 dengan rincian:

- Surat Keterangan Rencana Kota (SKRK)/Informasi Rencana Kota (IRK) (Nomenklatur lama sebelum UUCK) sebanyak 430 berkas
- KKPR Non Berusaha sebanyak 266 berkas
- KKPR Berusaha sebanyak 4 berkas
- IRK untuk Usaha Mikro Kecil (UMK) sebanyak 197 berkas

4. Peran Serta Masyarakat dalam Pengawasan Pemanfaatan Ruang

Keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan penataan ruang meliputi keterlibatan dalam perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian ruang. Dalam perencanaan, masyarakat dilibatkan dalam proses penyusunan dokumen RDTR Kota Magelang melalui mekanisme konsultasi publik. Dalam pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang, peran serta masyarakat terwujud dalam pengajuan permohonan kegiatan pemanfaatan ruang dan dalam pengawasan pemanfaatan ruang yang difasilitasi melalui berbagai media. Keterlibatan Masyarakat juga difasilitasi dalam Forum Penataan Ruang Daerah yang secara rutin melakukan rapat koordinasi sebanyak 4 kali dalam setahun.

5. Penetapan Lahan Sawah Dilindungi (LSD) di Kota Magelang

[illegible]

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, 2024

2.1.3.1.3.11 Sarana yang Memenuhi Universal Design

Persentase perbandingan sarana di Kota Magelang yang memenuhi *universal design* (Sarana yang memenuhi *universal design* dinilai dengan tinjauan minimal kepada akses jalan masuk berupa *ramp* dan pegangan serta kamar mandi) dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.97 Kondisi Sarana milik Pemerintah Daerah yang Memenuhi Universal Design, 2022-2024

No	Uraian	2022	2023	2024
1	Cakupan universal design di sarana pendidikan	60%	66%	67,5%
2	Cakupan universal design di sarana kesehatan	48%	56,25%	57%
3	Cakupan universal design di sarana perdagangan	40%	75%	75%
4	Cakupan universal design di sarana kebudayaan dan rekreasi	29%	42,86%	45%
5	Cakupan universal design di sarana pemerintahan	9%	78,57%	79%

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Magelang, 2025

2.1.3.1.3.12 Jasa Konstruksi

Berdasarkan Undang-undang Nomor 2 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, kewenangan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Magelang dalam penyelenggaraan sub-urusan jasa konstruksi adalah:

1. Penyelenggaraan pelatihan tenaga terampil konstruksi,

Sertifikasi Tenaga Terampil Konstruksi Jabatan Kerja Tukang Bangunan Gedung pada tahun 2024 telah dilaksanakan untuk jenjang Level I dengan kelompok sasaran sebanyak 23 orang dan masa berlaku 5 tahun. Hal ini menambah kompetensi tenaga operator dan teknik analis konstruksi terampil yang pada tahun sebelumnya mencapai 170 tukang.

2. Penyelenggaraan sistem informasi jasa konstruksi cakupan kota

Penyelenggaraan sistem informasi pembinaan jasa konstruksi (Sipjaki) di Kota Magelang ditetapkan melalui Keputusan Wali Kota Magelang Nomor 600/016/112/ tahun 2024 tanggal 15 Februari 2024 tentang Pembentukan Tim Pembina Jasa Konstruksi. Sipjaki ini berfungsi dalam pengelolaan data pelaksanaan pekerjaan konstruksi, data anggaran dan standar biaya umum, dan data berita-berita terkait jasa konstruksi di Kota Magelang. Pengelolaan Sipjaki di Kota Magelang dilakukan oleh 4 orang administrator yang ditetapkan melalui Keputusan Walikota Magelang 600/015/112/ tahun 2024 tanggal 15 Februari 2024.

3. Penerbitan izin usaha nasional konstruksi

Pelayanan penerbitan izin usaha nasional konstruksi di Kota Magelang dilayani oleh DPMPTSP dan pasca-Juli 2021 tidak perlu mendapat pertimbangan teknis atau rekomendasi teknis dari DPUPR selaku OPD pengampu urusan jasa konstruksi.

4. Pengawasan tertib usaha, tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi

Obyek pengawasan proyek yang menjadi kewenangannya pada tahun 2024 meliputi 30 paket pekerjaan. Jumlah ini menurun dibandingkan paket pekerjaan yang menjadi obyek pengawasan pada tahun 2023 sebanyak 63, dan tahun 2022 sebanyak 38 paket. Seluruh paket sudah melaksanakan melaksanakan 9 komponen yang harus dilengkapi oleh penyedia jasa konstruksi terkait Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK) sesuai dengan Peraturan Menteri PUPR Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pedoman SMKK dan mencapai target tanpa kecelakaan kerja.



Gambar 2.46 Ragam Pemenuhan SMKK Pekerjaan Konstruksi di Kota Magelang

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Magelang, 2025

2.1.3.1.3.13 Dukungan Proyek Strategis Infrastruktur Nasional di Kota Magelang

1. Pembangunan *flyover* Canguk

Pada akhir tahun 2024, pembangunan *flyover* Canguk sudah selesai dilaksanakan dan dioperasikan. Hanya saja terdapat perbedaan konstruksi yang awalnya direncanakan sebagai *flyover* namun pembangunan yang dilaksanakan adalah *underpass*

2. *Exit tol* Yogya Bawen di Soekarno Hatta

Persiapan pembangunan *Exit Tol* Yogya Bawen di Kota Magelang hingga akhir tahun 2024 sampai pada tahap pembebasan lahan. Pembangunan fisik masih belum dilakukan menunggu penyelesaian pembebasan lahan pada lokasi lain.

3. Akses jalan menuju TPST Regional Magelang

Pembangunan jembatan dan akses jalan menuju lokasi TPTS regional Magelang hingga jembatan Kali Bening sudah selesai dilakukan pada akhir tahun 2024. Pembangunan jalan yang dilakukan di Kota Magelang masih perlu sedikit penyelesaian untuk ruas dari Jembatan Kali Bening hingga Kupatan. Hal ini perlu mendapat perhatian yang serius agar Ketika TPST Regional Magelang sudah siap beroperasi yang direncanakan di tahun 2027, akses jalan sudah selesai dibangun.

2.1.3.1.3.14 Persentase Pembangunan TPSPT/3R

Kota Magelang telah memiliki lahan seluas 3 hektar (30.000 m²) di Kampung Bojong pada tahun 2018 dan berencana membangun fasilitas pengelolaan sampah regional Magelang. Sampai dengan akhir Desember 2024, akses yang sudah dimiliki adalah jalan masuk sebagai indikasi adanya pembangunan daerah Kota Magelang. Fasilitas yang akan diusulkan adalah TPS 3R/TPST/PDU meskipun akan berfungsi sebagai pengganti TPA Kota Magelang yang berlokasi di Banyuurip Tegalrejo Kota Magelang.

Berikut beberapa pertimbangan dalam penentuan TPS 3R, TPST dan PDU di Kampung Bojong Kota Magelang:

Tabel 2.98 Pertimbangan Penentuan TPS 3R/TPST/PDU di Kampung Bojong Kota Magelang

No	Syarat Kriteria	TPS 3R		TPST		PDU (Pusat Daur Ulang)	
		Pasal 30	Kesesuaian	Pasal 32	Kesesuaian	SNI 3242:2008	Kesesuaian
1.	Luas lahan pengelolaan sampah	Lebih Besar dari 200 m ²	Kurang sesuai karena lokasi pengelolaan sampah kota memiliki ukuran yang terlalu kecil	Lebih besar dari 20.000 m ²	Sesuai	Lebih besar dari 200 m ² (Tipe III)	Sesuai
2	Sarana Pengelompokan Sampah	Paling sedikit 5 (lima) jenis	Sesuai	Memiliki stasiun peralihan antara (SPA) skala hunian yang memiliki luas paling	Sesuai	Teknis operasional menerapkan sistem	Sesuai

No	Syarat Kriteria	TPS 3R		TPST		PDU (Pusat Daur Ulang)	
		Pasal 30	Kesesuaian	Pasal 32	Kesesuaian	SNI 3242:2008	Kesesuaian
				sedikit 600 m2 dengan produksi timbulan sampah 20-30 ton/hari yang ditempatkan pada lokasi penempatan di titik pusat area lingkungan hunian pada fasilitas SPA skala kota dilengkapi dengan ramp dan sarana pemadatan dan penampungan lindi dan pengolahan lindi dapat dilakukan di SPA atau TPA		penanganan sampah setempat dengan: Menerapkan pemilahan sampah organik dan non organik; Menerapkan teknik 3 R di sumber dan TPS serta Penanganan residu oleh pengelola sampah kota.	
3.	Penempatan Lokasi	Mudah diakses	Sesuai	Dalam kota dan/atau di TPA	Sesuai	Mudah diakses Skala Lingkungan	Sesuai
4.	Jarak ke Permukiman / Jarak terhadap Sumber Air Minum	Sedekat mungkin dengan daerah pelayanan dalam radius tidak lebih dari 1 km	Sesuai	Permukiman terdekat paling sedikit 500 m	Tidak Sesuai, memiliki jarak kurang dari 500 m	Jarak terhadap sumber air minum lebih besar dari 100 m (seratus meter) di hilir aliran	Sesuai
5.	Dukungan Fasilitas	Ruang pemilahan, pengomposan sampah organik, dan/atau unit penghasil gas bio, gudang, zona penyangga, dan tidak mengganggu estetika serta lalu lintas	Menyesuaikan kebutuhan di lapangan saat operasional berjalan	Ruang pemilah, instalasi pengolahan sampah, pengendalian pencemaran lingkungan, penanganan residu, dan fasilitas penunjang serta zona penyangga.	Menyesuaikan kebutuhan di lapangan saat operasional berjalan	Menerapkan pemilahan sampah organik dan non organik; Menerapkan teknik 3 R di sumber dan TPS; dan Penanganan residu oleh pengelola sampah kota.	Sesuai

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Magelang, 2025

2.1.3.1.4 Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

2.1.3.1.4.1 Persentase Luas Kawasan Kumuh

Luas kawasan kumuh Kota Magelang pada akhir tahun 2024, tersisa 10.59 Ha dari 14.46 Ha (tahun 2023) atau sekitar 0.57% dari luas kota Magelang yang sebesar 18.56 km². Penanganan luas kawasan kumuh yang berhasil ditangani pada tahun 2024 sebesar 3.87 Ha, dengan penurunan terbesar di RT 02 RW 05 Kelurahan Rejowinangun Selatan sebesar 0.67 Ha. Berikut tabel luas kawasan kumuh Kota Magelang:

Tabel 2.99 Luas Kawasan Kumuh Kota Magelang, 2020-2024

No	Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
1	Luas kawasan kumuh	10.779	39.91	20.341	14.46	10.59
2	Persentase	0.58 %	2.2 %	1.10 %	0.78 %	0.57 %

Sumber: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Magelang, 2025

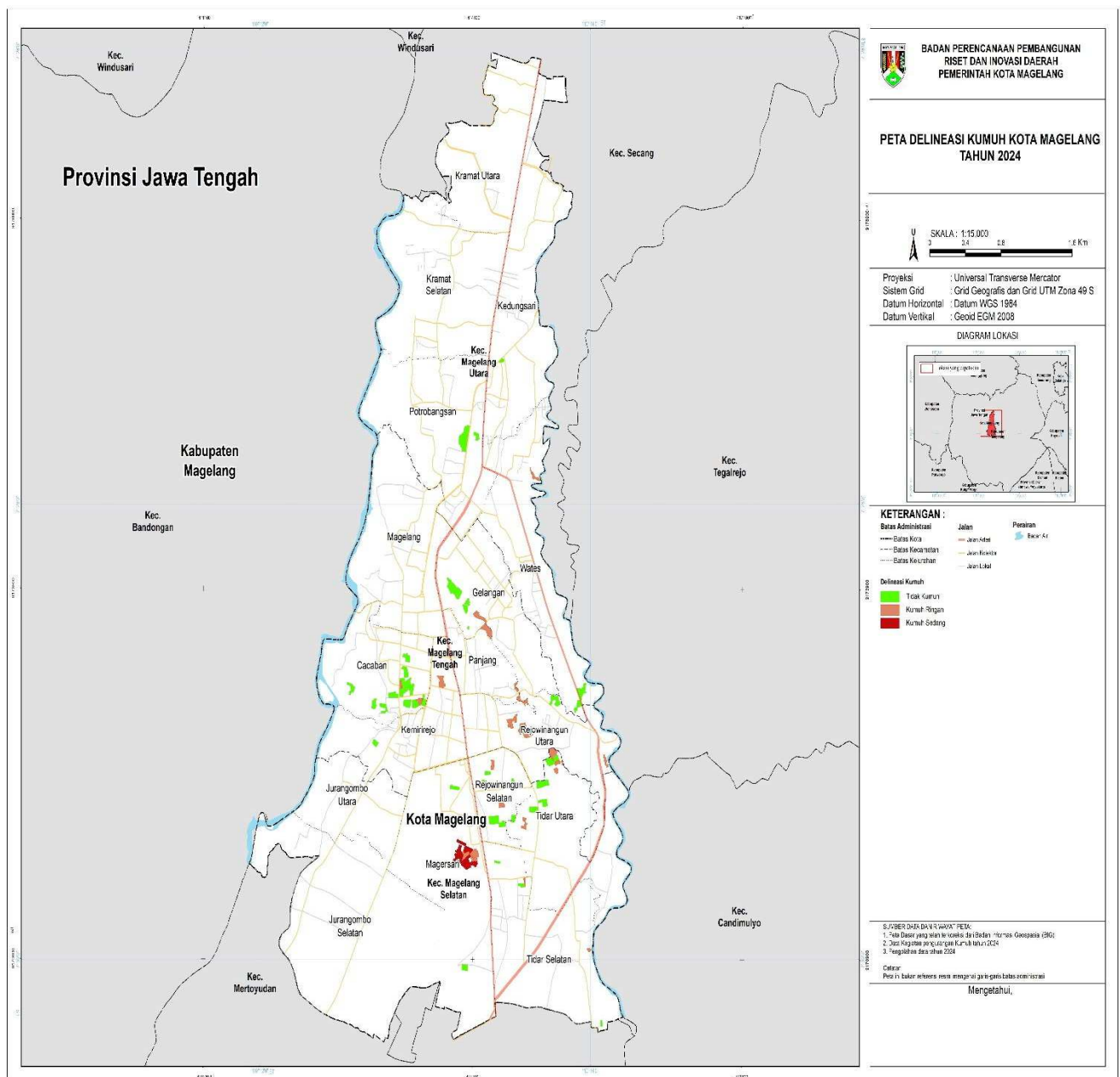
Penanganan pengurangan kumuh di tahun 2024, masih tetap difokuskan pada 77 wilayah RT dengan rincian 37 RT di Kecamatan Magelang Selatan, 35 RT di Kecamatan Magelang Tengah dan 5 RT di Kecamatan Magelang Utara. Penanganan yang dilakukan disesuaikan dengan karakteristik dan kebutuhan yang berbeda pada setiap RT sehingga kebutuhan penanganan tidak bisa disamakan antar-RT. Hasil dari penanganan di 77 RT meliputi 25 kumuh ringan, 8 kumuh sedang, dan 44 kondisi tidak kumuh. Penurunan status dari kumuh ringan menjadi kumuh sedang berada di Kelurahan Magersari dengan 12 RT yang terdiri dari 4 RT kumuh ringan dan 8 RT kumuh sedang. Secara keseluruhan kondisi kelurahan Magersari masuk dalam kategori kumuh ringan dengan skor 31. Penurunan kondisi pada awal tahun 2023 meliputi kualitas jalan lingkungan yang mengalami kerusakan sepanjang 1.498 m, beberapa titik tidak tersedia drainase sepanjang 2.050 m, pengelolaan air limbah yang tidak sesuai persyaratan teknis sebanyak 380 KK, prasarana dan sarana persampahan tidak sesuai dengan persyaratan teknis sebanyak 525 KK dan ketidaktersediaan prasarana proteksi kebakaran sebanyak 423 unit. Penanganan tahun 2024 bisa mengurangi skor kumuh secara keseluruhan menjadi 29. Penanganan tersebut mengurangi kualitas jalan lingkungan yang mengalami kerusakan menjadi 1.494 m, ketidaktersediaan drainase menjadi 1.850 m, pengelolaan air limbah yang tidak sesuai persyaratan teknis menjadi 365 KK, prasarana dan sarana persampahan tidak sesuai dengan persyaratan teknis menjadi 457 KK dan ketidaktersediaan prasarana proteksi kebakaran menjadi 423 unit. Secara total, skor 29 di Kelurahan Magersari termasuk dalam kumuh ringan.

Secara kawasan, permukiman kumuh di Kota Magelang terbagi menjadi 3 kawasan yaitu Kawasan Mantyasih dengan luas kumuh awal 5.34 Ha, Kawasan Elo Kambang Kedali dengan luas kumuh awal 10.07 Ha, Kawasan Rejowinangun dengan luas 7,81 Ha dan 3 kelurahan yang tidak termasuk dalam kawasan yaitu beberapa RT di Kelurahan Potrobangsari, Tidar Selatan dan Kedungsari. Penanganan tahun 2024, menyisakan luas untuk Kawasan Mantyasih menjadi 0,98 Ha, Kawasan Elo Kambang Kedali menjadi 4,96 Ha dan Kawasan Rejowinangun menjadi 4,46 Ha. Pembedaan kawasan ini berdasarkan beberapa kriteria seperti kesamaan karakteristik/tipologi kumuh, lokasi yang berdekatan, pembentuk sistem/jaringan infrastruktur yang tidak ditangani dalam bentuk spot-spot kumuh dan pertimbangan keterpaduan penanganan kawasan dan kemudahan penanganan kawasan.

Tabel 2.100 Luas Kawasan Kumuh per Kelurahan di Kota Magelang, 2024

No	Kelurahan	Jumlah RT dengan status kumuh	Luas Kawasan Kumuh Akhir (Ha) 2023	Luas Kawasan Kumuh Akhir (Ha) 2024
1	Magersari	12	4.34	3.67
2	Tidar Utara	4	1.98	1.26
3	Rejowinangun Selatan	2	1.37	0.50
4	Tidar Selatan	2	0.46	0.19
5	Rejowinangun Utara	5	1.96	1.96
6	Panjang	2	0.88	0.88
7	Kemirirejo	1	0.76	0.54
8	Cacaban	1	1.32	0.44
9	Gelangan	3	0.85	0.85
10	Kedungsari	-	0.00	0.00
11	Potrobangsari	-	0.25	0.00
12	Wates	1	0.30	0.30
	Jumlah	33	14.46	10.59

Sumber: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Magelang, 2025



Gambar 2.49 Peta Penanganan Kumuh Kota Magelang, 2024

Sumber: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Magelang, 2025

2.1.3.1.4.2 Persentase Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Layak Huni bagi Korban Bencana

Pada tahun 2024 tidak ada kejadian bencana yang membutuhkan relokasi korban sehingga tidak ada pembangunan rumah bagi korban bencana.

Tabel 2.101 Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Layak Huni Bagi Korban Bencana, 2019-2023

Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana	0	0	0	0	0
Jumlah penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana yang harus dibangun	0	0	0	0	0

Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana	-	-	100%	100%	100%

Sumber: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Magelang, 2025

2.1.3.1.4.3 Persentase Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Layak Huni bagi Korban Relokasi Program Pemerintah Kab/Kota

Persentase penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban relokasi program pemerintah kabupaten/kota pada tahun 2024 mencapai 100%. Hal ini berbeda dari realisasi pada tahun 2023. Pada tahun 2023, data yang digunakan adalah data jumlah warga yang harus pindah dari rusun/rusus milik pemerintah setelah lama tinggal 6 (enam) tahun. Berdasarkan rekomendasi dari BPK, pemakaian data tersebut tidak dibenarkan karena yang dianggap korban relokasi program pemerintah merupakan warga yang memiliki tanah/rumah dengan legalitas resmi dan tanah/rumahnya terdampak program pemerintah. Sehingga warga yang harus pindah dari rusun/rusus tidak terhitung sebagai korban relokasi program pemerintah kabupaten/kota. Setiap tahun, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Magelang memiliki data penghuni rusun/rusus yang harus pindah. Pada tahun 2024, jumlah penghuni rusun/rusus yang harus pindah sebanyak 19 KK dan 7 KK pada tahun 2025.

Tabel 2.102 Persentase Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Layak Huni Bagi Korban Relokasi Program Pemerintah Kabupaten/Kota, 2020-2024

Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban relokasi program pemerintah kabupaten/kota	0	0	20	34	0
Jumlah penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban relokasi program pemerintah kabupaten/kota yang harus dibangun	0	0	20	38	0
Persentase penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban relokasi program pemerintah kabupaten/kota	-	-	100%	89.47%	100%

Sumber: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Magelang, 2025

2.1.3.1.4.4 Persentase Kawasan Permukiman Kumuh yang Ditata

Luas kawasan kumuh yang ditata pada tahun 2024 mencapai 29.32 Ha dari 39.91 Ha. Sisa luas kawasan kumuh di Kota Magelang sampai dengan akhir tahun 2024 seluas 10.59 Ha. Penanganan kumuh setiap RT tidak bisa sama, tergantung dari karakteristik dan kebutuhan tiap RT. Penanganan yang sudah dilakukan di beberapa RT terindikasi kumuh sedang dan ringan antara lain renovasi saluran drainase, renovasi RTLH, penambahan jaringan rumah air minum dan sanitasi, perbaikan jalan lingkungan.

Beberapa kelurahan tidak mengalami penurunan luas permukiman kumuh. Kelurahan yang tidak mengalami penurunan luas kawasan kumuh adalah Kelurahan Rejowinangun Utara, Kelurahan Panjang dan Kelurahan Gelangan. Penanganan yang dilakukan di Kelurahan Rejowinangun Utara dan tidak mampu mengurangi luas permukiman kumuh meliputi penambahan jaringan air minum di 6 RT dengan penerima manfaat sebanyak 25 KK dan pembangunan SPALDS untuk 1 RT dengan penerima manfaat sebanyak 5 KK. Skor akhir dari Kelurahan Rejowinangun Utara masih sama dengan skor awal di tahun 2024 yaitu 18, sehingga masih masuk kategori kumuh ringan. Penanganan di Kelurahan Gelangan pada tahun 2024 meliputi penanganan RTLH di 4 RT sebanyak 13 unit, pembangunan dan perbaikan kualitas drainase lingkungan sepanjang 70 m, pembangunan SPALDS di 3 RT, penambahan BIN sampah di 1 RT dengan penerima manfaat 23 KK. Penanganan yang dilakukan masih belum mampu mengurangi luas kawasan kumuh. Penanganan di Kelurahan Panjang yang dilakukan, yang belum mampu mengurangi luas permukiman kumuh meliputi pembangunan RTLH sebanyak 4 unit, pembangunan SPALDS di 2 RT dan pembelian kendaraan sampah. Penanganan permukiman kumuh agar dapat mengurangi skor kumuh, adalah dengan penanganan yang tepat sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan dari setiap RT. Berikut persentase kawasan kumuh yang ditata:

Tabel 2.103 Kawasan Permukiman Kumuh Kota Magelang yang Ditata, 2020-2024

Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
Luas kawasan permukiman kumuh yang ditata	NA	14.07	13.61	25.45	29.32
Luas kawasan permukiman kumuh	NA	39.91	39.91	39.91	39.91
Persentase kawasan permukiman kumuh yang ditata	NA	35.25 %	34.10 %	63.77 %	73.46 %

Sumber: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Magelang, 2025

Beberapa upaya dalam peningkatan prasarana dan sarana permukiman di kawasan kumuh telah dilakukan oleh Disperkim Kota Magelang. Salah satunya adalah dengan mengikuti Lomba Habitat Tahun 2024 yang diadakan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah melalui Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah. Pada tahun 2024, tema yang diusung dalam perlombaan tersebut yaitu Peningkatan Kualitas Permukiman yang Berkelanjutan dalam Upaya Mendukung Ekonomi Perkotaan yang Tangguh. Untuk mengikuti ajang tersebut, Kota Magelang mengajukan Kampung Jambon Gesikan dimana hasilnya dapat meraih juara pertama dan mendapatkan uang hadiah sebesar 500 juta rupiah.

Selanjutnya, uang hadiah tersebut digunakan untuk pembangunan saluran drainase dan jalan lingkungan di kawasan kumuh Kampung Kiringan Kelurahan Tidar Utara. Kampung Kiringan berlokasi di Kawasan Elo Kambang Kedali dengan luasan kumuh 10.085 Ha. Permasalahan kumuh di RW 3 Kampung Kiringan meliputi kepadatan dan ketidakteraturan bangunan, akses jalan sempit, sebagian rumah penduduk berada di bantaran saluran dan topografi relative tinggi dan ketidakteraturan drainase di beberapa titik. Skor kumuh di RT 3 merupakan kumuh ringan yang tersebar di RT 02 dengan skor 20, RT 03 dengan skor 26, RT 04 dengan skor 21, RT 05 dengan skor 22 dan RT 06 dengan skor 28. Pembangunan saluran drainase dan jalan lingkungan ini bersasaran agar permukiman kumuh yang di RT 02 RW 03 Kiringan menjadi tidak kumuh dengan skor 15. Pembangunan saluran ini juga diharapkan dapat meningkatkan perekonomian masyarakat miskin di kawasan Kampung Kiringan, sehingga dapat mengurangi kekumuhan.



Gambar 2.50 Kegiatan Penanganan Kawasan Kumuh Kota Magelang, 2024

Sumber: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Magelang, 2025

2.1.3.1.4.5 Persentase Rumah Tidak Layak Huni di Luar Permukiman Kumuh yang Tertangani

Penanganan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) merupakan salah satu prioritas dalam penanganan permukiman kumuh mengingat RTLH termasuk dalam parameter ketidakteraturan bangunan yang memegang peranan penting dalam penentuan skor kumuh. Berikut penanganan RTLH Kota Magelang pada tahun 2024:

Tabel 2.104 Penanganan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Kota Magelang, 2020-2024

Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah rumah tidak layak huni di luar permukiman kumuh yang tertangani	NA	187	224	1.002	1246

Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah rumah tidak layak huni di luar permukiman kumuh	NA	1679	1679	1679	1679
Persentase rumah tidak layak huni di luar permukiman kumuh yang tertangani	NA	11.14%	13.34%	59.68%	74.21%

Sumber: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Magelang, 2025

Pendanaan penanganan RTLH menggunakan beberapa sumber meliputi pembiayaan APBD maupun non-APBD. Pembiayaan APBD ditujukan untuk mengatasi 191 unit, yang dibagi menjadi 2 yaitu 105 memakai APBD Penetapan 2024 dan 86 unit dengan APBD 2024 Perubahan. Terkait dengan pembiayaan nonAPBD terdapat pembiayaan yang berasal dari Bazda Kota Magelang untuk mendanai 40 unit rumah, Lazis dapat mendanai 8 unit rumah dan Kodim mendanai 5 unit rumah. Sehingga total jumlah RTLH yang dapat ditangani dari berbagai sumber pembiayaan tersebut sebanyak 244 unit.

Besaran anggaran yang digunakan untuk penanganan 1 (satu) unit RTLH menggunakan APBD sebesar 15 juta, sedangkan untuk Baznas, Lazis dan Kodim bervariasi tergantung dengan kondisi RTLH. Berikut rekap pendanaan RTLH dan sebaran penanganan RTLH:

Tabel 2.105 Pembiayaan Penanganan RTLH Kota Magelang, 2020-2024

Tahun	APBD	DAK	DID	LAZIS	KODIM	BSPS	CSR	Bazda	Jumlah
2019	-	84	-			360	-	-	444
2020	-	85	-			100	92	5	282
2021	84	-	-			-	-	19	103
2022	72	-	115			-	-	37	224
2023	688	-	-			-	-	90	778
2024	191	-	-	8	5	-	-	40	244

Sumber: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Magelang, 2025

Tabel 2.106 Sebaran Pengananan RTLH Kota Magelang dengan Berbagai Sumber Pembiayaan, 2024

No.	KECAMATAN	KELURAHAN	APBD	BAZDA	LAZIS	KODIM	TOTAL
1	Magelang Utara	Kramat Utara	7				7
2	Magelang Utara	Kramat Selatan	11		1	1	13
3	Magelang Utara	Kedungsari	15	1	1	1	18
4	Magelang Utara	Potrobangsari	10	1	3		14
5	Magelang Utara	Wates	15	2		2	19
6	Magelang Tengah	Rejowinangun Utara	9	14			23
7	Magelang Tengah	Gelangan	13	1			14
8	Magelang Tengah	Panjang	19	3			22
9	Magelang Tengah	Cacaban	12	4			16
10	Magelang Tengah	Magelang	12	1	2		15
11	Magelang Tengah	Kemirirejo	11	1		1	13
12	Magelang Selatan	Jurangombo Selatan	13	2			15
13	Magelang Selatan	Jurangombo Utara	13	1	1		15

No.	KECAMATAN	KELURAHAN	APBD	BAZDA	LAZIS	KODIM	TOTAL
14	Magelang Selatan	Magersari	4	2			6
15	Magelang Selatan	Rejowinangun Selatan	1	1			2
16	Magelang Selatan	Tidar Selatan	12	2			14
17	Magelang Selatan	Tidar Utara	14	4			18
Total Realisasi Anggaran			191	40	8	5	244

Sumber: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, 2025

Selain penanganan RTLH, upaya penyediaan rumah layak huni di Kota Magelang juga dilakukan melalui penyediaan rumah susun. Berikut daftar rumah susun dan penghuninya di Kota Magelang:

Tabel 2.107 Rumah Susun dan Rumah Khusus di Kota Magelang, 2023

No	Nama Rusun/ Rusus	Alamat	Tahun Pembangunan	Sasaran	Tipe Rusun/ Rusus	Jumlah Tower	Jumlah Unit	Telah Dihuni	Belum Dihuni
1.	Rusun Yon Armed Kostrad	Komp Perm Yon Armed 11/1/12, Kel. Magelang, Kec. Magelang Tengah	TA 2012	TNI/ Polri	Panjang/ 3 LT	1	59	59	0
2.	Rusun Reguler Kota Magelang	Kel. Potrobangsari, Kec. Magelang Utara	TA 2012-2013	MBR	T 24/ 5 LT	1	98	86	12
3.	Rusun Reguler Kota Magelang 2013	Jl. Abimanyu, Kel. Tidar Utara, Kec. Magelang	TA 2013-2014	MBR	T 24/ 5 LT	1	98	85	13
4.	Rusun Wates Kota Magelang	Wates, Kec. Magelang Utara, Kota Magelang, Jawa Tengah 51253	TA 2018	MBR	T 36/ 4 LT	1	58	45	13
5.	Rusun Wates	Wates, Kec. Magelang Utara, Kota Magelang, Jawa Tengah 51253	TA 2018	MBR	T 27	-	50	46	4
6.	Rusun kedungsari	Gg. Anggrek II, Kedungsari, Kec. Magelang Utara, Kota Magelang, Jawa Tengah 59155	TA 2019	MBR	T 27	-	45	41	4

Sumber: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, 2024

2.1.3.1.4.6 Persentase Lingkungan yang Sehat dan Aman yang Didukung dengan Prasarana Sarana Utilitas (PSU)

Perhitungan persentase lingkungan yang sehat dan aman yang didukung PSU disesuaikan dengan jumlah lingkungan yang tidak kumuh. Pada tahun 2024 masih terdapat 33 lingkungan RT kumuh dengan distribusi 25 RT berada pada status kumuh ringan dan 8 RT memiliki status kumuh sedang. Sehingga sampai dengan akhir tahun 2024, jumlah lingkungan perumahan yang didukung oleh PSU sebanyak 998.

Tabel 2.108 Persentase Lingkungan yang Sehat dan Aman yang Didukung dengan PSU, 2020-2024

Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah lingkungan perumahan yang didukung PSU	929	966	952	986	998
Jumlah lingkungan perumahan	1.029	1.029	1.032	1.032	1.031
Persentase lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan PSU	90.28%	93.88%	92.52%	95.54%	96.80%

Sumber Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, 2025

Di sisi lain, pada tahun 2024, prasarana dan sarana umum perumahan yang diserahkan kepada Pemerintah Kota Magelang ada sebanyak 8 PSU. Berikut data realisasi penyerahan PSU Perumahan Tahun 2024:

Tabel 2.109 Serah Terima Prasarana dan Sarana Umum Perumahan, 2024

NO	NAMA PENGEMBANG	NAMA PERUMAHAN	REKOMENDASI SITE PLAN	TANGGAL	KET	NOMOR	TANGGAL
1.	Rumaedi	Panorama Tidar	640/134.1/1293	27/2/2015	BAST	600.2.1/452/260	25/07/2024
2.	dr. Supriyadi Miftah	Menowosari	640/309/293	05/07/2014	BAST	600.2.1/554.4/260	12/08/2024
3.	Yuniaro Mendrofa	Green Java	-	-	BAST	600.2.1/646/260	06/09/2024
4.	Mujiyo	Pesona Barito	640/969/293	10/06/2010	BAST	600.2.1/452/260	25/07/2024
5.	Taat Nugrodi	Karet Indah	648/1008/293	05/11/2012	BAST	600.2/1005/260	23/12/2024
6.	Hartanto Halim	Cendrawasih Regency	640/262/293	25/03/2015	BAST	600.2.1/1060/260	31/12/2024
7.	Herawanto	karangwuni	650/228/210	12/03/2020	BAST	600.2.1/1004/260	23/12/2024
8.	Harri Unitminsa Anggara	Greenland	648/965/293	25/10/2011	Surat Penyerahan	13/10/24/04/XI	21/10/2024

Sumber Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, 2025

Nilai aset yang diserahkan oleh pengembang senilai Rp 21.811.471.249,00 yang meliputi tanah untuk jalan, drainase, saluran air, fasum, pagar, gapura, portal dan lain-lain. Luas aset yang diserahkan mencapai 18.245 m² dari 8 prasarana dan sarana umum dari 8 perumahan.

2.1.3.1.4.7 Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak

Empat (4) indikator proxy yang digunakan untuk mendefinisikan hunian layak yaitu ketahanan bangunan, kecukupan luas tempat tinggal, keberadaan akses air minum layak, dan keberadaan akses sanitasi layak. Semakin tinggi persentase rumah tangga dengan akses hunian layak, artinya semakin baik kesejahteraan rumah tangga dilihat dari sektor perumahan. Dalam kasus Kota Magelang, berbagai upaya yang dilakukan terkait penyediaan hunian yang layak nampaknya belum mampu memberikan dampak secara signifikan terhadap akses rumah tangga terhadap dengan akses hunian layak. Selama periode tahun 2019-2023 hanya terjadi peningkatan capaian tidak lebih dari dua belas persen dimana rumah tangga dengan akses hunian layak tahun 2023 baru sebesar 76,16%. Aspek ketahanan bangunan diatasi dengan pembangunan dan renovasi Rumah Tidak Layak Huni. Pada tahun 2023, pembangunan RTLH yang sudah dilakukan oleh Pemerintah Kota Magelang sebanyak 778 rumah dari 1.679 rumah, dan menyisakan 677 rumah tidak layak huni yang perlu di renovasi. Persentase yang sulit ditangani adalah kecukupan luas tempat tinggal, dimana berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman disebutkan bahwa minimal kecukupan luas tempat tinggal adalah $\pm 7,2$ m² perkapita. Ini berarti setiap KK yang beranggota 4 jiwa minimal harus memiliki luas tempat tinggal 28,8 m², dimana untuk daerah perkotaan hal yang sulit direalisasi. Akses air minum layak sudah mencapai realiasi 98.32 % dan sanitasi layak secara persentase sudah mencapai 98,81%. Hal ini berarti bahwa pencapaian akses air minum layak dan sanitasi layak tidak begitu mengalami kendala yang signifikan.

Tabel 2.110 Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, 2019-2023

Tahun	Capaian (%)
2019	64,69
2020	72,51
2021	77,79
2022	75,45
2023	76,16

Sumber Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, 2024

2.1.3.1.5 Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat menjadi salah satu dasar untuk mewujudkan Kota Magelang yang kondusif baik untuk bermukim ataupun menjalankan aktivitas ekonomi. Salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat di Kota Magelang melalui jumlah pelanggaran peraturan daerah (perda) yang terjadi dalam kurun waktu tertentu. Pada tahun 2024, terjadi 661 pelanggaran perda yang seluruhnya dapat diselesaikan. Adapun pelanggaran perda yang berkaitan dengan K3 (Ketenteraman, Ketertiban dan Keindahan) telah terjadi penurunan jumlah pelanggaran pada tahun 2024. 161 pelanggaran yang terjadi pada tahun 2023 dapat ditekan menjadi 157 pelanggaran pada tahun 2024 dan seluruhnya dapat diselesaikan. Penyelesaian pelanggaran tersebut dilakukan melalui pembinaan ataupun sidang tindak pidana ringan.

Tabel 2.111 Penyelesaian Pelanggaran K3, 2020-2024

Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah pelanggaran K3 diselesaikan	916	634	166	161	157
Jumlah pelanggaran K3	916	634	166	161	157
Presentase Penyelesaian Pelanggaran K3	100%	100%	100%	100%	100%

Sumber: Satpol PP Kota Magelang, 2025

Sebagai upaya perwujudan ketenteraman, ketertiban, dan perlindungan masyarakat, Kota Magelang juga dilengkapi dengan linmas dan siskamling untuk mendukung kondusivitas mulai lingkup terkecil masyarakat. Pada tahun 2024, Kota Magelang memiliki 861 linmas, meningkat 93 unit dari tahun 2023 yang sebanyak 768 unit. Linmas tersebut terbagi dalam linmas inti yang difungsikan di tingkat kota maupun linmas yang tersebar pada 17 (tujuh belas) kelurahan Kota Magelang. Peningkatan jumlah linmas tersebut selanjutnya juga diiringi oleh peningkatan jumlah linmas yang mendapatkan peningkatan kapasitas. Terdapat 172 unit tambahan linmas yang mendapatkan peningkatan kapasitas sehingga pada tahun 2024 terdapat 809 unit linmas yang telah mendapatkan peningkatan kapasitas. Penambahan jumlah beserta penguatan kapasitas linmas tersebut dilakukan guna mendukung pengamanan pemilihan umum serentak yang dilaksanakan pada tahun 2024. Di sisi lain, terkait dengan siskamling, karena pada tahun 2024 tidak ada kegiatan dari Bimbingan Masyarakat (Binmas) Kepolisian maka persentase siskamling aktif tidak mengalami peningkatan dari tahun 2023 yaitu dengan besaran 60,16%.

Tabel 2.112 Peningkatan Kapasitas Linmas dan Siskamling di Kota Magelang, 2020-2024

Indikator		2020	2021	2022	2023	2024
1a	Jumlah linmas yang mendapatkan peningkatan kapasitas	361	361	505	634	809
1b	Jumlah seluruh linmas (inti & kelurahan)	1.027	787	819	768	861
1	Persentase linmas yang mendapatkan peningkatan kapasitas	35,15	45,87	61,66	82,55	93,96
2a	Jumlah siskamling aktif	94	165	165	148	148
2b	Jumlah siskamling di seluruh kelurahan	195	288	288	246	246
2	Persentase siskamling aktif	48,21	57,29	57,29	60,16	60,16

Sumber: Satpol PP Kota Magelang, 2025

2.1.3.1.5.1 Penanggulangan Bencana

Potensi bencana yang ada di Kota Magelang berdasarkan buku Indeks Risiko Bencana Indonesia adalah gempa bumi, letusan gunung api, kebakaran hutan dan lahan, tanah longsor, kekeringan, dan cuaca ekstrem. Nilai Indeks Risiko Bencana Kota Magelang selama tahun 2020-2024 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.113 Indeks Risiko Bencana Kota Magelang, 2020-2024

TAHUN	SKOR	KELAS RISIKO
2020	108,00	Sedang
2021	108,00	Sedang
2022	108,00	Sedang
2023	102,08	Sedang
2024	93,35	Sedang

Sumber: Badan Nasional Penanggulangan Bencana, 2025 (diolah)

Indeks Risiko Bencana Kota Magelang menunjukkan penurunan dari selama 5 tahun terakhir. Salah satu yang mempengaruhi penurunan ini adalah peningkatan kapasitas daerah dalam mengantisipasi kejadian bencana. Penurunan IRB ditunjukkan mulai tahun 2023 karena pada tahun tersebut baru menilaikan/verifikasi terkait kapasitas daerah. Kapasitas (*capacity*) yang menjadi komponen penghitungan risiko bencana tersebut dihitung menggunakan Indeks Ketahanan Daerah (IKD) yang terdiri dari 7 prioritas dengan 71 indikator. Kondisi IKD Kota Magelang tahun 2023 dan 2024 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.114 Indeks Ketahanan Daerah Kota Magelang, 2023-2024

Fokus Prioritas		2023	2024
Prioritas 1	Perkuatan Kebijakan dan Kelembagaan	0,71	0,79
Prioritas 2	Pengkajian Risiko dan Perencanaan Terpadu	0,70	0,70
Prioritas 3	Pengembangan Sistem Informasi, Diklat dan Logistik	0,52	0,63
Prioritas 4	Penanganan Tematik Kawasan Rawan Bencana	0,75	0,75
Prioritas 5	Peningkatan Efektivitas Pencegahan dan Mitigasi Bencana	0,38	0,44
Prioritas 6	Perkuatan Kesiapsiagaan dan Penanganan Darurat Bencana	0,22	0,34
Prioritas 7	Pengembangan Sistem Pemulihan Bencana	0,26	0,36
Indeks Ketahanan Daerah		0,39	0,48

Sumber: Badan Nasional Penanggulangan Bencana, 2025 (diolah)

Berdasarkan penilaian 2 (dua) tahun tersebut, 5 (lima) prioritas menunjukkan peningkatan dari 7 (tujuh) prioritas yang ada. Prioritas 1 terkait Perkuatan Kebijakan dan Kelembagaan didukung dengan pemenuhan dokumen rencana kontingensi terhadap salah satu potensi bencana yang ada yaitu kebakaran hutan dan lahan. Prioritas 3 didukung salah satunya dengan adanya Peraturan Wali Kota Magelang Nomor 51 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Kota Magelang yang juga mengatur terkait pemanfaatan cadangan pangan tersebut untuk kejadian bencana.

Peningkatan skor Prioritas 5 didukung dengan kelengkapan data bencana terkait perlindungan air dan restorasi sungai. Penyusunan SOP terkait penetapan darurat bencana, komando darurat bencana, kaji cepat, dan penyelamatan dan pertolongan menjadi salah satu pendorong meningkatnya skor Prioritas 6. Adanya SOP utamanya SOP rehabilitasi dan rekonstruksi juga menjadi pendukung dalam peningkatan skor Prioritas 7.

Terkait penanganan kejadian bencana, semua kejadian bencana yang terjadi di Kota Magelang dapat tertangani. Kondisi terkait bencana dan penanganannya selama kurun waktu 2020 sampai dengan 2024 di Kota Magelang disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.115 Persentase Layanan Penanggulangan Bencana Kota Magelang, 2020-2024

Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah kejadian bencana yang tertangani	46	26	65	55	78
Jumlah kejadian bencana	46	26	65	55	78
Persentase layanan penanggulangan bencana	100%	100%	100%	100%	100%

Sumber: BPBD Kota Magelang, 2025

2.1.3.1.6 Sosial

Urusan sosial fokus pada upaya penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) atau Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS). Dalam penanganan PPKS/PPKS tersebut, pemerintah juga menggandeng Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS). Kondisi urusan sosial di Kota Magelang sampai dengan tahun 2024 digambarkan pada sub-bab berikut.

2.1.3.1.6.1 Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)/Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)

Jumlah PMKS menunjukkan tren penurunan dari tahun 2020 sampai dengan 2024, dari sejumlah 11.898 menurun menjadi 5.775 PMKS. Secara proporsi, PMKS yang menerima bantuan menunjukkan peningkatan dari 66,81% pada tahun 2020 dan sudah mencapai 100% sejak tahun 2022. Capaian tersebut dapat dipertahankan hingga tahun 2024.

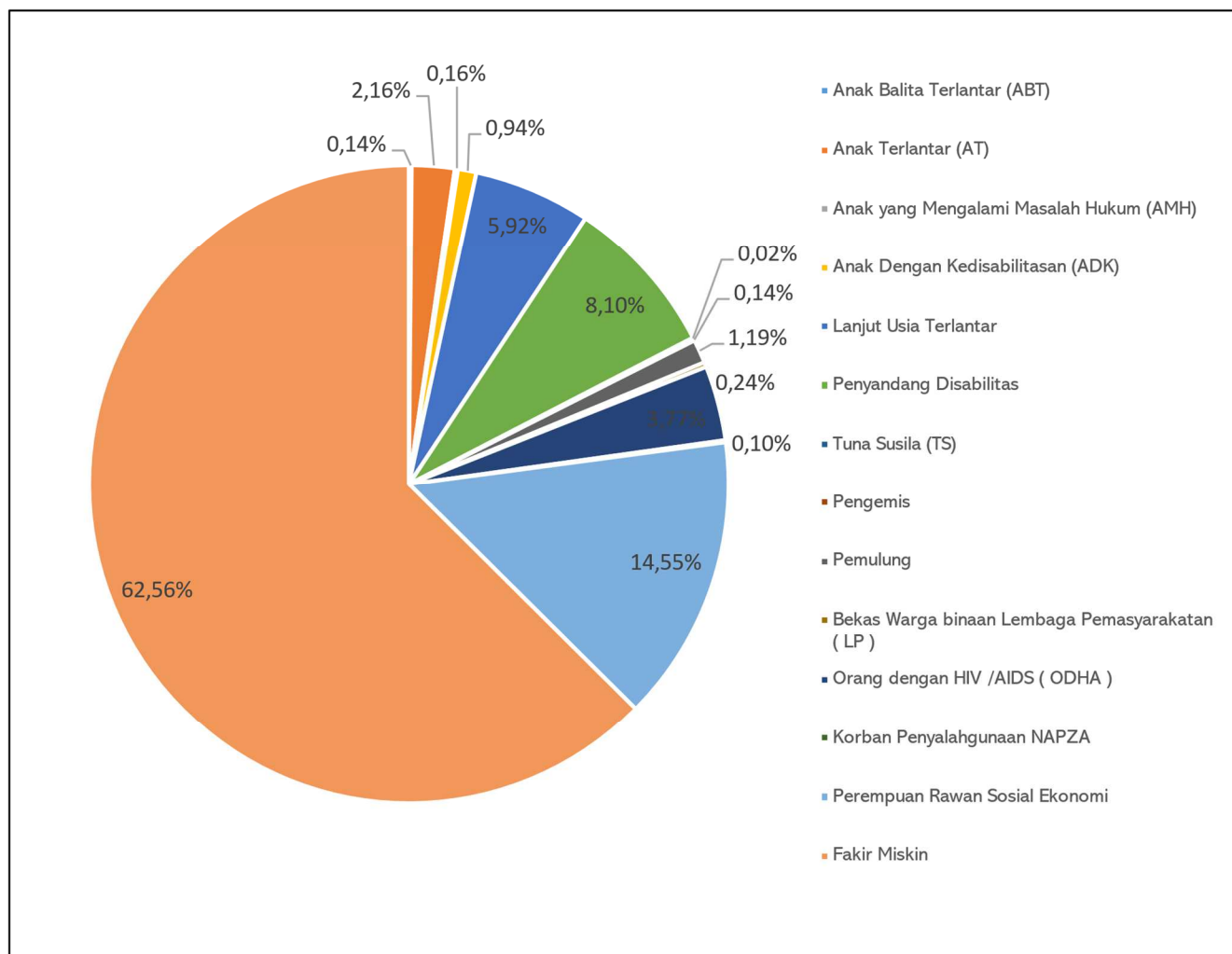
Tabel 2.116 Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang mendapatkan Bantuan Kota Magelang, 2020-2024

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah PMKS	11.898	6.813	6.813	6.053	5.775
Jumlah PMKS yang diberikan bantuan	7.949	6.644	6.813	6.053	5.775
Persentase PMKS yang mendapatkan bantuan	66,81%	97,52%	100%	100%	100%

Sumber: Dinas Sosial Kota Magelang, 2025

PMKS di Kota Magelang pada tahun 2024 didominasi oleh fakir miskin (62,56%) dari keseluruhan jenis PMKS. Proporsi terbanyak kedua adalah Perempuan Rawan Sosial Ekonomi (14,55%), diikuti Penyandang Disabilitas (8,10%) dan Lanjut Usia Terlantar (5,92%).

Pada tahun 2024, dalam rangka penanganan terhadap fakir miskin dan lansia terlantar dilakukan berbagai upaya seperti pemberian bantuan permakanan untuk warga miskin dan bantuan permakanan bagi lansia terlantar. Bantuan bagi perempuan rawan sosial ekonomi dilaksanakan oleh DPMP4KB Kota Magelang melalui pelatihan bagi wanita rentan pada tahun 2024. Pemberian alat bantu juga dilakukan untuk penyandang disabilitas, dan untuk usia dewasa juga diberikan pelatihan oleh Dinas Tenaga Kerja Kota Magelang. Bantuan juga diberikan kepada anak terlantar melalui reunifikasi keluarga, pemberian bantuan susu, dan bantuan alat mandi.



Gambar 2.51 Jenis dan Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Kota Magelang, 2024

Sumber: Dinas Sosial Kota Magelang, 2025

2.1.3.1.6.2 Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)

Tenaga Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) merupakan unsur masyarakat yang memberikan dukungan dalam penanganan PMKS di sekitarnya. Jumlah PSKS menunjukkan penurunan di tahun 2024 dibanding tahun 2023. Taruna Siaga Bencana (TAGANA) berkurang 1 orang di tahun 2024. Selain itu, Lembaga Kesejahteraan Sosial juga berkurang 1 lembaga. Perkembangan jumlah PSKS di Kota Magelang selama tahun 2020-2024 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.117 Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) Kota Magelang, 2020-2024

NO	JENIS PSKS	2020	2021	2022	2023	2024
1	Pekerja Sosial Profesional (PSP)	0	2	2	1	1
2	Pekerja Sosial Masyarakat (PSM)	246	17	17	17	18
3	Taruna Siaga Bencana (TAGANA)	13	14	14	20	19
4	Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS)	11	11	13	13	12
5	Karang Taruna (KT)	17	17	18	18	18
6	Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	1	1	1	1	1
7	Keluarga Pioner	0	0	0	0	0

NO	JENIS PSKS	2020	2021	2022	2023	2024
8	Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (WKSBM)	5	5	5	5	5
9	Wanita Pemimpin Kesejahteraan Sosial	5	0	0	0	0
10	Penyuluh Sosial	4	1	1	5	5
11	Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK)	3	3	3	3	3
12	Dunia Usaha	95	1	1	1	1
JUMLAH		400	72	75	84	82

Sumber: Dinas Sosial Kota Magelang, 2025

Dari 12 jenis PSKS, baru 10 jenis PSKS yang ada di Kota Magelang. PSKS yang belum ada di Kota Magelang adalah Keluarga Pioner dan Wanita Pemimpin Kesejahteraan Sosial. Dalam pelaksanaan penanganan PMKS, pemberdayaan dilakukan kepada 10 jenis PSKS yang ada di Kota Magelang. Koordinasi dan komunikasi dilakukan dengan PSKS untuk dapat memberikan penanganan kepada PMKS yang ada. Penjangkauan awal dilakukan oleh penyuluh sosial dan pekerja sosial untuk mengetahui kondisi dan rencana tindak lanjut penanganan. Tindak lanjut penanganan dapat dilanjutkan oleh pekerja sosial maupun PSKS yang lain, seperti Dunia Usaha, untuk membantu dalam pemberian bantuan. Sementara itu, Taruna Siaga Bencana (TAGANA) bergerak ketika ada korban bencana alam.

Selain itu, dalam melakukan upaya rehabilitasi sosial, Dinas Sosial juga didukung oleh Petugas Pendamping ATENSI (Asistensi Rehabilitasi Sosial) yang terdiri dari 1 orang tiap RW (total sebanyak 192 orang). ATENSI sendiri merupakan layanan rehabilitasi sosial yang menggunakan pendekatan berbasis keluarga, komunitas, dan/atau residensial melalui kegiatan dukungan pemenuhan kebutuhan hidup layak, perawatan sosial dan/atau pengasuhan anak, dukungan keluarga, terapi fisik, terapi psikososial, terapi mental spiritual, pelatihan vokasional, pembinaan kewirausahaan, bantuan dan asistensi sosial, serta dukungan aksesibilitas.

2.1.3.2 Fokus Urusan Wajib Non-Pelayanan Dasar

2.1.3.2.1 Ketenagakerjaan

Pemerintah Kota Magelang terus berupaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) yang kompeten di pasar tenaga kerja. Perencanaan pengembangan tenaga kerja berfokus pada peningkatan kualitas dan penyerapan tenaga kerja secara optimal untuk meningkatkan daya saing tenaga kerja di Kota Magelang.

2.1.3.2.1.1 Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja

Pemerintah Kota Magelang meningkatkan kualitas dan daya saing tenaga kerja dengan memberikan pelatihan kewirausahaan dan pelatihan berbasis kompetensi. Pelatihan kewirausahaan diselenggarakan dalam rangka perluasan kesempatan kerja bagi warga Kota Magelang. Pelatihan ini dilaksanakan untuk mendukung program unggulan Pemerintah Kota Magelang yang tertuang di RPJMD Kota Magelang Tahun 2021-2026 yaitu 1500 Wirausaha Baru.

Tabel 2.118 Jenis dan Jumlah Peserta Pelatihan Kewirausahaan, 2021-2024

No	Jenis Pelatihan Kewirausahaan	Jumlah Peserta			
		2021	2022	2023	2024
1	Barbershop	16	20	21	14
2	Barista dan Minuman Kekinian	32	28	25	40
3	Membatik	13	-	-	-
4	Marketing Online	28	30	98	-
5	Service HP	32	8	25	-

No	Jenis Pelatihan Kewirausahaan	Jumlah Peserta			
		2021	2022	2023	2024
6	SPA/baby SPA	20	-	5	3
7	Tata Boga	78	465	568	212
8	Design Grafis	-	25	78	21
9	Service Sepeda Motor	-	18	66	5
10	Menjahit	-	43	81	40
11	Tata Rias	-	17	39	10
12	Setir Mobil	-	2	1	-
13	Pertukangan (Sangkar Burung)	-	1	-	18
14	Laundry	-	-	-	12
Jumlah		189	566	849	375

Sumber: Dinas Tenaga Kerja Kota Magelang, 2025

Selama tahun 2023 dan 2024, Pemerintah Kota Magelang memberikan pelatihan membuat bagi penyandang disabilitas. Pada tahun 2023 diberikan pelatihan membuat 31 orang penyandang disabilitas dan pada tahun 2024 pelatihan diberikan pada 27 orang penyandang disabilitas. Pelatihan bagi penyandang disabilitas ini ditujukan agar dapat lebih mandiri dan produktif.

Adapun tingkat keberhasilan peserta pelatihan kewirausahaan yang menjadi wirausaha baru mengalami penurunan daripada tahun 2023. Jumlah wirausaha yang berhasil pada tahun 2024 sebesar 52% atau turun sebesar 2,89% dari tahun sebelumnya. Penurunan capaian ini disebabkan karena adanya penurunan jumlah peserta yang dilatih sehingga jumlah keberhasilan wirausaha setelah dievaluasi selama 6 (enam) bulan juga menurun. Penurunan jumlah peserta pelatihan yang signifikan terdapat pada pelatihan tata boga.

Selain pelatihan kewirausahaan, dilaksanakan pula pelatihan berbasis kompetensi dimana pelatihan kompetensi menitikberatkan pada penguasaan keterampilan dan pengetahuan sesuai dengan standar yang ditetapkan. Pelatihan kompetensi di Kota Magelang masih mengacu pada unit kompetensi yang merupakan hasil identifikasi kebutuhan kompetensi di tempat kerja. Pelatihan Kompetensi menggunakan pendanaan dari APBD dan APBN.

Tabel 2.119 Jenis dan Jumlah Peserta Pelatihan Berbasis Kompetensi, 2021-2024

No	Jenis Pelatihan Berbasis Kompetensi	Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024	
		APBD	APBN	APBD	APBN	APBD	APBN	APBD	APBN
1	Tata Boga	16	14	66	25	94	64	64	38
2	Tata Rias Kecantikan	-	20	64	10	64	23	48	10
3	Menjahit	-	15	-	13	48	33	48	23
4	Service Sepeda Motor	16	12	-	8	16	23		3
5	Desain Grafis	16	-	-	-	32	17		8
6	Perhotelan	-		33		48		64	
7	Barista	16		64		64		64	
8	Barbershop	-		64		32		48	
9	Membatik	-		-		16		64	
10	Sablon	-		16		16			

No	Jenis Pelatihan Berbasis Kompetensi	Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024	
		APBD	APBN	APBD	APBN	APBD	APBN	APBD	APBN
11	Awak Kapal Pesiar	16		32		-			
12	Plumbing	-		25		-			
13	Service AC	-		16		-			
14	Komputer Operator Asisten	-	-	-	-	-	-	-	8
TOTAL		80	61	380	56	430	160	400	90

Sumber: Dinas Tenaga Kerja Kota Magelang, 2025

Tabel 2.120 Rasio Kewirausahaan Daerah, 2019-2023

Tahun	Rasio Kewirausahaan Daerah
2019	3,74
2020	4,55
2021	3,80
2022	3,77
2023	4,10

Sumber: Profil Ketenagakerjaan Kota Magelang Hasil Sakernas, 2024 (diolah)

2.1.3.2.1.2 Penempatan Kerja

Penempatan kerja menjadi salah satu upaya yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Magelang. Penempatan kerja adalah mempertemukan tenaga kerja dan pemberi kerja. Aktivitas yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Magelang adalah Job Fair, Job Fair Mini, dan share lowongan yang ada dengan bekerjasama dengan Bursa Kerja Khusus (BKK).

Tabel 2.121 Fasilitas Penempatan Tenaga Kerja Kota Magelang, 2024

TAHUN	PENCAKER			LOWONGAN			PENEMPATAN MELALUI FASILITASI											
							LOKET PELAYANAN DISNAKER			BKK			JOB FAIR			JUMLAH TOTAL		
	L	P	L + P	L	P	L + P	L	P	L + P	L	P	L + P	L	P	L + P	L	P	L + P
2023	289	232	521	1.593	1.978	3.571	158	144	302	25	49	74	36	28	64	2.101	2.431	4.532
2024	318	216	534	2924	4386	7310	132	92	224	65	56	121	78	43	121	3517	4793	8310

Sumber: Dinas Tenaga Kerja Kota Magelang, 2024

Apabila dibandingkan dengan angkatan kerja yang terdaftar, maka jumlah pencari kerja yang mendapatkan fasilitasi penempatan kerja sudah mencapai 452 orang atau 84,64%. Realisasi indikator fasilitasi penempatan kerja ini mengalami kenaikan daripada tahun sebelumnya yaitu meningkat sebesar 2,11%. Pada tahun 2024, Pemerintah Kota Magelang telah membuat MoU dengan Indomarco dan PT. PNM dalam rangka perekrutan dan penempatan tenaga kerja.

Tabel 2.122 Jumlah Peserta Pelatihan dan Pencari Kerja yang Mendapatkan Fasilitas Penempatan Kerja, 2020-2024

Keterangan	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Fasilitas Penempatan Kerja	327	601	625	440	466

Angkatan Kerja (yang terdaftar)	636	853	979	521	534
Persentase pencari kerja yang mendapatkan fasilitasi penempatan kerja	51,42%	70,46%	63,84%	82,53%	87,27%

Sumber: Dinas Tenaga Kerja Kota Magelang, Tahun 2025

2.1.3.2.1.3 Hubungan Industrial

Salah satu tugas dan fungsi yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Magelang adalah melakukan pengawasan agar perusahaan memiliki tata kelola yang layak serta melakukan penyelesaian apabila terdapat permasalahan. Indikator tata kelola yang layak bagi perusahaan adalah apabila perusahaan memiliki Peraturan Perusahaan (PP) atau memiliki Perjanjian Kerja Bersama (PKB), adanya Lembaga Kerja Sama (LKS) Bipartit, dan memiliki jaminan ketenagakerjaan/kesehatan. Dari 335 perusahaan yang terdaftar di Kota Magelang, baru 127 perusahaan yang menerapkan tata kelola yang layak atau sebesar 37,91%. Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan perusahaan yang menerapkan tata kelola yang layak adalah dengan melaksanakan sosialisasi dan pendekatan persuasif pada perusahaan yang belum menerapkan.

Pada tahun 2024, terdapat 6 (enam) kasus yang masuk dan 5 (lima) kasus yang ditangani dengan Perjanjian Bersama dengan mediasi dari Pemerintah Kota Magelang. Dari indikator tata kelola yang layak yang harus dilaksanakan oleh perusahaan, struktur pengupahan dianggap belum terpenuhi oleh perusahaan karena rata-rata perusahaan menggunakan manajemen tertutup (merupakan perusahaan keluarga) sehingga ada keengganan untuk tidak menerapkan tata kelola baik, karena merasa tidak ada masalah dalam pengelolaan perusahaan.

Tabel 2.123 Jumlah Perusahaan yang memiliki PP/PKB, LKS Bipartit, Permasalahan Hubungan Industrial dan Pemutusan Hubungan Kerja Kota Magelang, 2020-2024

Tahun	PP	PKB	SP/SB	LKS BIPARTIT	PHI/ PHK	TK Korban PHK
2020	123	48	76	58	11	22
2021	125	48	76	58	7	7
2022	126	49	78	58	4	18
2023	130	47	78	58	4	18
2024	135	48	83	58	6	14

Sumber: Dinas Tenaga Kerja Kota Magelang, Tahun 2025

Aspek perlindungan terhadap tenaga kerja dapat dilihat dari Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (Jamsostek) yang dimiliki oleh para pekerja. Kondisi pada Tahun 2024, sudah 97% pekerja atau 15.091 pekerja yang memiliki Jamsostek. Dalam rangka meningkatkan kesadaran bagi pemilik perusahaan, maka Pemerintah Kota Magelang bekerjasama dengan kantor BPJS melaksanakan sosialisasi ke perusahaan yang belum memberikan perlindungan sosial kepada para pekerjanya.

Tabel 2.124 Jumlah Pekerja/Buruh yang Menjadi Peserta Jamsostek di Kota Magelang, 2020-2024

Tahun	Jumlah pekerja/ buruh program jamsostek	Jumlah Pekerja/ Buruh	%
2020	12,511	13,938	90%
2021	13,646	14,628	93%
2022	13,978	15,581	90%
2023	14.298	14.629	97%
2024	15.091	15.505	97%

Sumber: Dinas Ketenagakerjaan Kota Magelang, 2024

Selain jaminan ketenagakerjaan bagi pekerja pada sektor formal, Pemerintah Kota Magelang juga memberikan perhatian jaminan sosial bagi pekerja informal terutama yang masuk kategori pekerja rentan. Hal ini dibuktikan dengan pengalokasian anggaran di APBD Tahun 2024 bagi 2.044 tenaga kerja rentan. Inovasi ini di apresiasi oleh BPJS Ketenagakerjaan wilayah Jateng dan DIY dengan memberikan penghargaan yang diserahkan oleh Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah kepada PJs Walikota Magelang di sela Diseminasi dan Asistensi Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan pada tanggal 10 Oktober 2024.



Gambar 2.52 Penghargaan Atas Inovasi Jaminan Sosial Bagi Tenaga Kerja Rentan
Sumber: Dinas Ketenagakerjaan Kota Magelang, 2025

2.1.3.2.2 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Kota Magelang terus berupaya meningkatkan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak mengacu pada Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 13 tahun 2016 tentang Perlindungan Anak serta Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 10 tahun 2012 tentang Pengarusutamaan Gender. Implementasi strategi pengarusutamaan gender berimplikasi pada kenaikan Indeks Pembangunan Gender (IPG) setiap tahunnya, dimana pada tahun 2023 nilai IPG adalah 96,43. Selain itu, evaluasi kinerja pengarusutamaan gender melalui pemberdayaan perempuan dibuktikan dengan raihan penghargaan Anugerah Parahita Ekapraya Kategori Nindya. Pun demikian dengan perlindungan anak, Kota Magelang telah mendapatkan predikat Kota Layak Anak Kategori Nindya pada tahun 2023 dengan capaian Indeks Perlindungan Anak sebesar 69,20. Keterlibatan masyarakat dalam upaya pemberdayaan dan perlindungan perempuan dan anak juga dilaksanakan melalui Pusat Pembelajaran Keluarga (Puspaga) yang terbentuk di setiap kelurahan.

2.1.3.2.2.1 Pemberdayaan Perempuan

Peran penting pemberdayaan perempuan terutama dalam bidang ekonomi berkontribusi dalam memperkuat ketahanan keluarga dan mencapai pembangunan berkelanjutan. Kota Magelang melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana telah melaksanakan pengembangan kapasitas perempuan, khususnya perempuan rentan(kepala keluarga perempuan, perempuan prasejahtera, dan perempuan penyintas kekerasan dan bencana) berupa pelatihan ekonomi produktif.

Tabel 2.125 Peningkatan Kapasitas Perempuan di Kot Magelang, 2020-2024

Pengembangan kapasitas	Jumlah (orang)				
	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah peserta pelatihan ekonomi produktif	500	500	500	500	420
Jumlah perempuan rentan	N/A	2.172	2.116	2.171	1.761
Persentase perempuan kepala keluarga dan perempuan rentan terlatih dalam perekonomian keluarga	N/A	23,02%	23,63%	23,03%	23,85%

Sumber: DPMP4KB Kota Magelang, 2025

Pada tahun 2024 dilaksanakan updating jumlah perempuan kepala keluarga dan rentan yang pelaksanaannya bekerja sama dengan Dinas Sosial Kota Magelang. Pendataan diperlukan agar pelatihan yang diberikan tepat sasaran dan sesuai dengan minat peserta. Adapun pelatihan pada tahun 2024 diberikan kepada 420 orang dengan varian pelatihan yaitu boga, tata rias, dan menjahit

Dalam rangka meningkatkan pemberdayaan perempuan di bidang politik, social, hukum dan ekonomi, penguatan dan pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan (LPLPP) perlu terus diupayakan. Pembinaan dilaksanakan melalui promosi, sosialisasi, dan peningkatan kapasitas Lembaga.

Tabel 2.126 Lembaga Perempuan yang Diberdayakan di Kota Magelang, 2020-2024

Uraian	Jumlah (orang)				
	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah lembaga perempuan yang diberdayakan	N/A	3	3	4	4
Jumlah lembaga perempuan	N/A	18	18	18	18
Persentase lembaga yang anggotanya diberdayakan	N/A	16,67%	16,67%	22,22%	22,22%

Sumber: DPMP4KB Kota Magelang, 2025

Pada tahun 2024 lembaga perempuan yang dibina meliputi 4 empat lembaga yaitu PKK, Dharma Wanita, Gabungan Organisasi Wanita (GOW) dan Persaudaraan Muslimah (Salimah). Ke depan, upaya pembinaan diharapkan semakin meluas dengan cara penetapan standarisasi LPLPP untuk menjamin kualitas yang sama di tiap lembaga perlu menjadi prioritas utama.

Upaya peningkatan pemberdayaan perempuan di bidang politik dilaksanakan dengan peningkatan kapasitas perempuan anggota partai politik serta fasilitasi kegiatan kaukus perempuan politik. Pada tahun 2024 dilaksanakan pemilihan anggota legislatif, namun demikian kinerja pemberdayaan perempuan pada bidang politik menunjukkan kecenderungan relatif konstan, dilihat dari persentase proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPRD.

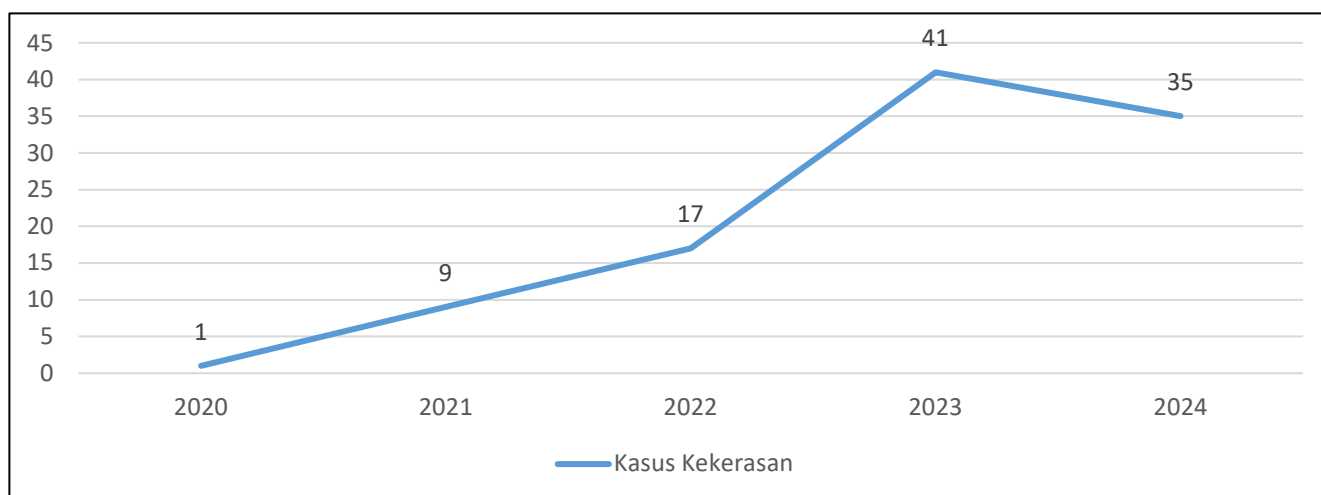
Tabel 2.127 Persentase Proporsi Kursi yang Diduduki Perempuan di DPRD Kota Magelang, 2020-2024

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah anggota DPRD (perempuan)	5 org	6 org	6 org	6 org	6 org
Jumlah anggota DPRD	25 org	25 org	25 org	25 org	25 org
Persentase proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPRD	20%	24%	24%	24%	24%

Sumber: DPMP4KB Kota Magelang, 2025

2.1.3.2.2.2 Perlindungan Perempuan

Dasar hukum perlindungan perempuan di Kota Magelang didasarkan pada Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan. Jumlah kasus kekerasan di Kota Magelang pada tahun 2024 menurun sebanyak 6 kasus bila dibandingkan dengan tahun 2023 yaitu dengan total 35 kasus kekerasan. Secara lebih rinci, jumlah kasus kekerasan dapat dilihat pada grafik di bawah ini.



Gambar 2.53 Jumlah Kasus Kekerasan terhadap Perempuan di Kota Magelang, 2020-2024

Sumber: DPMP4KB Kota Magelang, 2025

Jenis kasus kekerasan sesuai data laporan yang masuk ke P2TP2A Kota Magelang meliputi kekerasan fisik, psikis, seksual, penelantaran, dan perebutan hak asuh anak. Dari beberapa jenis kekerasan tersebut, kekerasan fisik dan psikis pada tahun 2024 mendominasi dengan total 24 kasus (68,57%). Upaya preventif yang telah dilakukan melalui sosialisasi, edukasi, dan kerjasama dengan LPLPP berdampak positif dalam menurunkan kasus kekerasan. Pun demikian, upaya kuratif yang telah dilakukan meliputi pelayanan aduan, rujukan pelayanan kesehatan, psikologi, hukum, integrasi sosial, rehabilitasi sosial sampai dengan pemulangan merupakan wujud dari perlindungan hukum dan upaya memulihkan traumatis bagi korban kekerasan.

2.1.3.2.2.3 Perlindungan Anak

Upaya perlindungan anak terus diwujudkan melalui Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat yang semakin dikembangkan. Selain itu terdapat Rumah Ibadah Layak Anak, Informasi Layak Anak (siaran anak, taman bacaan layak anak, Pusat Informasi Sahabat Anak, bunda literasi) sehingga diharapkan mampu memenuhi hak anak sesuai dengan indikator empat kluster pemenuhan hak anak.

Tabel 2.128 Persentase Capaian Empat Kluster Pemenuhan Hak Anak, 2020-2024

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah indikator Pemenuhan Hak Anak yang tercapai	NA	20	19	19	19
Jumlah indikator Pemenuhan Hak Anak	NA	26	26	26	26
Persentase capaian 4 (empat) kluster pemenuhan hak anak	NA	76,92%	73,08%	73,08%	73,08%

Sumber: DPMP4KB Kota Magelang, 2025

Upaya pemenuhan 4 (empat) kluster hak anak meliputi hak kelangsungan hidup, hak perlindungan, hak berpartisipasi dan hak tumbuh kembang. Indikator pemenuhan hak anak yang masih diupayakan ketercapainnya adalah regulasi kota layak anak, peran lembaga masyarakat, media massa dan dunia usaha dalam pemenuhan hak anak, pelayanan bagi anak disabilitas, kelompok minoritas yang terisolir, pelayanan anak yang berhadapan dengan hukum serta kelengkapan sarana prasarana pendukung kelurahan dan kecamatan layak anak. Tahun 2023 sebanyak 5 kelurahan dari total 17 kelurahan menjadi rintisan Kelurahan Ramah Perempuan dan Anak.

Dalam rangka kebijakan responsif gender, seluruh OPD di Kota Magelang telah menyusun perencanaan dan penganggaran responsif gender minimal dua sub kegiatan. Penyusunan Anggaran Responsif Gender menggunakan *Gender Analysis Pathway* menyesuaikan data pilah di masing-masing OPD.

Tabel 2.129 Jumlah Kasus Kekerasan terhadap Anak Kota Magelang, 2020-2024

Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
Jumlah kasus kekerasan terhadap anak	7	6	2	25	31

Sumber: DPMP4KB Kota Magelang, 2025

2.1.3.2.3 Ketahanan Pangan

Pada tahun 2024, ketahanan pangan di Kota Magelang berada pada kondisi yang baik. Hal tersebut digambarkan melalui Indeks Ketahanan Pangan (IKP) yang berada pada kategori sangat tahan dengan rincian nilai mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2023 yaitu berada pada angka 91,41. Dengan nilai tersebut ketahanan pangan Kota Magelang termasuk ke dalam 15 (lima belas) besar nasional dan menjadi nomor 2 (dua) di Provinsi Jawa Tengah setelah Kota Semarang. Nilai IKP tersebut dapat menggambarkan bahwa keterjangkauan pangan dan pemanfaatan pangan di Kota Magelang berada pada tren yang positif terlebih mengingat karakteristik Kota Magelang yang tidak memungkinkan swasembada pangan.

Tabel 2.130 Indeks Ketahanan Pangan Kota Magelang, 2019-2023

Tahun	Indeks Ketahanan Pangan	Kategori
2020	80,76	Sangat tahan
2021	82,59	Sangat tahan
2022	82,09	Sangat tahan
2023	91,18	Sangat tahan
2024	91,41	Sangat tahan

Sumber: Bappanas, 2020-2025

Terkait dengan pangan, jika melihat dari Indeks Ketahanan Pangan dapat disimpulkan bahwa keterjangkauan pangan masih terbentuk di Kota Magelang. Sayangnya, masih ada yang perlu diperhatikan yaitu belum terwujudnya kesadaran secara penuh terkait konsumsi pangan yang bergizi. Hal ini ditunjukkan melalui Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan (*Prevalence of Undernourishment*) yang belum menunjukkan perbaikan yang berarti dalam kurun waktu 2019-2023. Artinya, masih ada masyarakat Kota Magelang yang konsumsi pangannya di bawah standar kecukupan energi yang direkomendasikan.

Tabel 2.131 Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan (*Prevalence of Undernourishment*), 2019-2023

Tahun	Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan (<i>Prevalence of Undernourishment</i>)
2020	10,58
2021	11,07
2022	9,48
2023	10,34
2024	

Sumber: BPS, 2025

2.1.3.2.3.1 Ketersediaan Pangan

Ketersediaan pangan di Kota Magelang meliputi pangan berupa beras yang beredar dipasaran, produksi beras dari sawah yang ada didalam Kota Magelang dan bantuan pangan beras dari Pemerintah Daerah/ bantuan pangan beras dari pusat (Cadangan Pangan Pemerintah/CPP dan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah).

Meskipun persentase ketersediaan pangan beras seolah-olah mengalami penurunan pada tahun 2024, akan tetapi kebutuhan pangan beras terpenuhi 100%. Penurunan persentase ketersediaan beras ini merupakan akibat dari peningkatan jumlah penduduk sehingga konsumsi beras meningkat cukup signifikan sebesar 20,7%.

Tabel 2.132 Persentase Ketersediaan Pangan Kota Magelang, 2020-2024

Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah ketersediaan pangan utama	NA	14.200	13.922	14.361,41	14.297
Jumlah kebutuhan pangan utama	NA	11.310	10.771	10.768	12.997
Persentase Ketersediaan Pangan	NA	125,46%	129,25%	133,37%	110%

Sumber: Dinas Pertanian dan Pangan Kota Magelang, 2025

Produksi pangan di Kota Magelang hanya memenuhi 10% dari total kebutuhan pangan di Kota Magelang. Sementara barang masuk ke Kota Magelang sudah cukup memenuhi 100% dari total kebutuhan pangan sehingga ketersediaan pangan di Kota Magelang terpenuhi dengan baik karena peran besar dari distribusi pangan dari daerah lain. Pada tahun 2024, produksi beras Kota Magelang 773 ton sementara beras yang masuk ke Kota Magelang 12.638 ton sehingga total ketersediaan pangan di Kota Magelang sebesar 14.297 Ton.

2.1.3.2.3.2 Penanganan Daerah Rentan Rawan Pangan

Berdasarkan dokumen Kerawanan Pangan yang disusun setiap tahun menunjukkan bahwa di Kota Magelang tidak ada kelurahan yang mengalami rawan pangan prioritas 1,2,3. Akan tetapi ada beberapa kelurahan yang teridentifikasi mengalami rawan pangan prioritas 4 yang berada pada Kecamatan Magelang Tengah (4 kelurahan) dan Kecamatan Magelang Selatan (5 kelurahan). Sementara itu, kelurahan rawan pangan prioritas 5 ditemukan di Kecamatan Magelang Utara (5 kelurahan), Kecamatan Magelang Tengah (2 kelurahan) dan Kecamatan Magelang Selatan (1 kelurahan). Pada dasarnya, kelurahan yang di kategorikan rawan pangan prioritas 4-6 tidak dapat di nyatakan sebagai Kelurahan Rawan Pangan berdasarkan instrumen penilaian dari BAPANAS.

Selain bantuan pangan baik dari Pusat maupun Daerah, dilakukan beberapa strategi dalam rangka mengatasi kerawanan pangan, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Menjamin ketersediaan pangan melalui Kerjasama antar daerah
2. Mengupayakan keterjangkauan dengan memastikan distribusi sampai konsumen akhir mudah
3. Pemanfaatan lahan melalui urban farming
4. Mengupayakan pemanfaatan lahan marjinal untuk budidaya komoditas pangan
5. Diversifikasi pangan lokal

Tabel 2.133 Persentase Kerawanan Pangan Kota Magelang, 2020-2024

Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah kelurahan rentan rawan pangan yang ditangani	NA	NA	NA	4	9
Jumlah total kelurahan rentan rawan pangan	NA	NA	NA	6	9
Persentase Penanganan Daerah Rentan Rawan Pangan	NA	NA	NA	66,67%	100%

Sumber: Dinas Pertanian dan Pangan Kota Magelang, 2025

2.1.3.2.3.3 Pangan Segar yang Aman

Pengawasan pangan segar merupakan upaya menjaga kualitas pangan masyarakat melalui uji sampel pangan segar yang dijual di pasar dan toko modern. Sampel ini berupa beras, bawang merah dan bawang putih, sayur mayur dan buah-buahan. Adapun upaya peningkatan skala pengawasan dilakukan melalui peningkatan jumlah sampel pada tiap tahunnya. Adapun temuan sampel yang mengandung cemaran bersifat fluktuatif tiap-tiap

tahunnya. Hal menjadi perhatian bagi Dinas Pertanian supaya senantiasa melakukan upaya preventif melalui informasi kepada masyarakat dan pembinaan kepada para pedagang sehingga ada control dari kedua belah pihak baik pembeli maupun penjual/distributor.

Tabel 2.134 Persentase Pangan Segar yang Aman Kota Magelang, 2020-2024

Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah pangan segar asal tumbuhan yang aman	NA	36	97	221	215
Jumlah total sample pangan segar asal tumbuhan yang diambil	NA	42	102	229	243
Persentase Pangan Segar yang Aman	NA	85,71	95,10	96,51	88,48

Sumber: Dinas Pertanian dan Pangan Kota Magelang, 2025

Adapun sampel yang teridentifikasi mengandung cemaran berdasarkan pengawasan pada tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.135 Hasil Pemeriksaan Pangan Segar Asal Tumbuhan, 2024

No.	Jenis PSAT	Jenis Cemaran	Asal Komoditas	Lokasi Pengambilan Sampel	Tanggal Pengambilan Sampel
1	Bawang Putih	Pestisida		Ps. Rejowinangun	27/03/24
2	Cabai Rawit Merah	Pestisida	Kaliangkrik	Ps. Rejowinangun	07/06/24
3	Cabai Merah Keriting	Pestisida	Kaliangkrik	Ps. Rejowinangun	07/06/24
4	Selada	Pestisida	Ngablak	Ps. Rejowinangun	07/06/24
5	Tomat	Pestisida	Ngablak	Ps. Rejowinangun	07/06/24
6	Bawang Bombay	Pestisida	Cina	Ps. Rejowinangun	07/06/24
7	Jambu Biji	Pestisida	Kaliangkrik	Ps. Rejowinangun	07/06/24
8	Belimbing	Pestisida	Demak	Ps. Rejowinangun	07/06/24
9	Cabai Rawit Merah	Pestisida	Tegalrejo	Ps. Rejowinangun	07/06/24
10	Cabai Merah Keriting	Pestisida	Kaliangkrik	Ps. Rejowinangun	07/06/24
11	Selada	Pestisida	Kaliangkrik	Ps. Rejowinangun	07/06/24
12	Cabai Merah Kriting	Pestisida	Tegalrejo	Ps. Kebonpolo	15/08/24
13	Tomat	Pestisida	Tegalrejo	Ps. Kebonpolo	15/08/24
14	Teri	Formalin	Magelang	Ps. Kebonpolo	15/08/24
15	Daun Bawang sebelum cuci	Pestisida	Pakis	Ps. Cacaban	30/08/24
16	Jagung Manis	Pestisida	Kaliangkrik	Ps. Cacaban	30/08/24
17	Mangga Golek	Pestisida	Ps. Gamping Jogja	Ps. Cacaban	30/08/24
18	Jambu Biji	Pestisida	Ps. Gamping Jogja	Ps. Cacaban	30/08/24
19	Jeruk Nipis	Pestisida	Jawa Timur	Ps. Cacaban	30/08/24
20	Pare	Pestisida	Muntilan	Ps. Cacaban	30/08/24
21	Anggur Hijau	Pestisida	Yogyakarta	Ps. Rejowinangun	05/09/24
22	SunKist	Pestisida	Yogyakarta	Ps. Rejowinangun	05/09/24
23	Pepaya	Pestisida	Pakis	Ps. Rejowinangun	05/09/24
24	Cabai Teropong	Pestisida	Temanggung	Ps. Rejowinangun	05/09/24
25	Paprika Kuning	Pestisida	Bandung	Superindo Bayeman	03/10/24

No.	Jenis PSAT	Jenis Cemaran	Asal Komoditas	Lokasi Pengambilan Sampel	Tanggal Pengambilan Sampel
26	Kol Merah	Pestisida	Yogyakarta	Superindo Bayeman	03/10/24
27	Tomat Sayur (ranti)	Pestisida	Yogyakarta	Superindo Bayeman	03/10/24
28	Kiwi	Pestisida	Ps Rejowinangun	Ps. Cacaban	13/12/24
29	Kelengkeng	Pestisida	Kios Buah Magersari	Ps. Cacaban	13/12/24
30	Jeruk Santang	Pestisida	Kios Buah Magersari	Ps. Cacaban	13/12/24

Sumber: Dinas Pertanian dan Pangan Kota Magelang, 2025

2.1.3.2.4 Pertanahan

2.1.3.2.4.1 Kasus Sengketa Tanah yang Tertangani

Tabel 2.136 Kasus Sengketa Tanah yang Tertangani Kota Magelang, 2019-2023

Indikator	2019	2020	2021	2022	2023
Jumlah kasus yang diselesaikan	NA	0	0	0	17
Jumlah kasus yang sudah terdaftar	NA	0	0	0	23
Persentase kasus sengketa tanah yang tertangani	NA	0	0	0	73.91%

Sumber: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Magelang dan Kantor Pertanahan Kota Magelang, 2024

Kasus sengketa tanah yang ditangani merupakan kasus sengketa yang didaftarkan di Badan Pertanahan Nasional Kota Magelang dan bekerja sama dengan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Magelang. Kasus sengketa meliputi kasus sengketa batas dan waris. Peran Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Magelang sebagai salah satu tim pertanahan di Kota Magelang bertugas membantu memberi saran dan masukan berdasarkan aturan yang berlaku. Untuk saat ini, peran Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Magelang baru sebatas sebagai anggota tim, karena wewenang dan otoritas pertanahan ada di Badan Pertanahan Nasional. Semua sengketa yang ada dan masuk ke pengadilan harus memiliki bukti yang kuat dan hanya bisa dipenuhi oleh Badan Pertanahan Nasional, sehingga kewenangan bukan di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Magelang.

2.1.3.2.4.2 Kasus Permasalahan Pengadaan Tanah yang Mendapat Penyelesaian Ganti Rugi/Santunan Tanah

Tabel 2.137 Kasus Permasalahan Pengadaan Tanah yang Mendapat Penyelesaian Ganti Rugi/Santunan Tanah di Kota Magelang, 2019-2023

Indikator	2019	2020	2021	2022	2023
Jumlah kasus permasalahan pengadaan tanah yang mendapat penyelesaian ganti rugi/santunan tanah	NA	0	0	0	19
Jumlah kasus permasalahan pengadaan tanah	NA	0	0	0	43
Persentase kasus permasalahan pengadaan tanah yang mendapat penyelesaian ganti rugi/santunan tanah	NA	0	0	0	44.19%

Sumber: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Magelang, 2024

Kasus permasalahan pengadaan tanah merupakan dampak dari rencana pembangunan TPST Regional Rejosari. Dari 43 rencana pembebasan tanah, sampai akhir tahun 2023 baru terealisasi 19 ruas tanah. Beberapa permasalahan yang mengakibatkan realisasi pembebasan tanah antara lain beberapa ruas tanah yang harus dibebaskan merupakan tanah warisan. Penanganan tanah waris lebih rumit daripada penanganan tanah yang bukan tanah waris. Pengalihan sertifikat tanah waris harus ditandatangani semua ahli waris, meliputi anak, cucu

maupun cicit seandainya ada. Hal ini membuat pembebasan tanah tersebut terkendala. Masalah lainnya yaitu ada beberapa warga yang belum setuju dengan harga yang ditawarkan sehingga perlu adanya negosiasi dan sosialisasi secara intens terhadap kondisi tersebut. Kendala yang dihadapi lainnya adalah masih adanya sertifikat warga yang tergadai di perbankan. Hal ini membutuhkan pembiayaan dan negosiasi dengan perbankan, sehingga waktu yang diperlukan menjadi lebih lama.

2.1.3.2.4.3 Masalah pada Tanah Kosong yang Terselesaikan

Tabel 2.138 Masalah pada Tanah Kosong yang Terselesaikan di Kota Magelang, 2019-2023

Indikator	2019	2020	2021	2022	2023
Jumlah masalah tanah kosong yang terselesaikan	NA	0	0	0	0
Jumlah seluruh permasalahan pada tanah kosong	NA	0	0	0	0
Persentase masalah pada tanah kosong yang terselesaikan	NA	100	100	100	100

Sumber: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Magelang, 2024

Permasalahan tanah kosong yang terselesaikan memiliki realisasi capaian 100%. Hal ini disebabkan karena di Kota Magelang tidak ditemukan tanah kosong, dimana spesifikasi tanah kosong mengacu pada Undang-undang Agraria Nomor 11 Tahun 2010 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar, maka di Kota Magelang tidak terdapat tanah terlantar/kosong.

2.1.3.2.4.4 Luas Lahan Bersertifikat

Tabel 2.139 Luas Lahan Pemerintah Kota Magelang yang Bersertifikat, 2019-2023

Indikator	2019	2020	2021	2022	2023
Luas tanah aset pemkot yang sudah bersertifikat	NA	0	0	2.015.156	2.156.411
Jumlah seluruh luas tanah aset pemkot	NA	0	0	3.433.247	3.521.616
Persentase luas lahan bersertifikat	NA	100	100	58.70	61.23

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang, 2024

Tahun 2023, luas tanah yang berhasil disertifikat sebesar 6.961 m² yang terletak di perum depkes berupa masjid dan prasarana fasilitas umum ruang terbuka. Pengurangan luas tanah sertifikat sebesar 9 m² karena pengurangan jalan lingkungan di Kramat Selatan RW 3.

Berikut daftar tanah yang berhasil disertifikasi oleh Pemerintah Kota Magelang Tahun 2023.

Tabel 2.140 Daftar Tanah yang Berhasil Disertifikasi, 2023

No	Penggunaan	Hak Baru	Tanggal	Nomor	Letak/ alamat	Penggunaan di Sertifikat	Stf Baru Luas (M2)	Nilai
1	Masjid Muhajirin	HAK PAKAI	01/12/2023	039	Perum DEPKES Blok A Jl. Delima Selatan V	MASJID	891	
2	Masjid An-Namiroh dan Prasarana Fasilitas Umum	HAK PAKAI	01/12/2023	040	Perum DEPKES Blok A RT.03 RW.05	MASJID dan FASUM	669	
3	Masjid Al-Afiyah	HAK PAKAI	01/12/2023	041	Perum DEPKES Blok B RW.06	MASJID	447	
4	Masjid Baiturrosyidin	HAK PAKAI	01/12/2023	042	Perum DEPKES Blok D RT.04 RW.03	MASJID	710	
5	Prasarana Fasilitas Umum Ruang Terbuka	HAK PAKAI	01/12/2023	044	Perum DEPKES Blok B RT.03 RW. 06	Prasarana Fasilitas Umum Ruang Terbuka	318	

No	Penggunaan	Hak Baru	Tanggal	Nomor	Letak/ alamat	Penggunaan di Sertifikat	Stf Baru Luas (M2)	Nilai
6	Prasarana Fasilitas Umum Ruang Terbuka	HAK PAKAI	01/12/2023	043	Perum DEPKES Blok C RW. 04	Prasarana Fasilitas Umum Ruang Terbuka	458	
7	Prasarana Fasilitas Umum Ruang Terbuka (lapangan voli)	HAK PAKAI	01/12/2023	045	Perum DEPKES Blok D RW. 05	Prasarana Fasilitas Umum Ruang Terbuka	523	
8	Prasarana Fasilitas Umum Ruang Terbuka	HAK PAKAI	01/12/2023	046	Perum DEPKES Blok D RW. 05	Prasarana Fasilitas Umum Ruang Terbuka	189	
9	Prasarana Fasilitas Umum Ruang Terbuka	HAK PAKAI	01/12/2023	037	Perum DEPKES Blok D	Prasarana Fasilitas Umum Ruang Terbuka	228	
10	Prasarana Fasilitas Umum Ruang Terbuka	HAK PAKAI	21/12/2023	047	Perum DEPKES Blok D RT.02 RW. 03	Prasarana Fasilitas Umum Ruang Terbuka	1,056	
11	Prasarana Fasilitas Umum Ruang Terbuka	HAK PAKAI	01/12/2023	038	Perum DEPKES Blok C RW. 04	Prasarana Fasilitas Umum Ruang Terbuka	257	
12	Prasarana Fasilitas Umum Ruang Terbuka	HAK PAKAI	21/12/2023	048	Perum DEPKES Blok C RT.01 RW. 04	Prasarana Fasilitas Umum Ruang Terbuka	373	
13		HAK PAKAI	21/12/2023	053	Gg. Mangga III RW.03	Jalan Lingkungan	338	56,004,257
14		HAK PAKAI	21/12/2023	054	Gg. Mangga II RW.03	Jalan Lingkungan	504	95,965,963
							6,961	151,970,220

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang, 2024

2.1.3.2.5 Lingkungan Hidup

2.1.3.2.5.1 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) menunjukkan peningkatan yang signifikan dari 47,03 pada tahun 2020 menjadi 64,8 pada tahun 2023, meskipun sedikit menurun menjadi 64,33 pada tahun 2024. Hal ini karena kontribusi dari Indeks kualitas air yang menurun. Meskipun terdapat sedikit fluktuasi, secara keseluruhan, telah berhasil meningkatkan kualitas lingkungan hidupnya dalam beberapa tahun terakhir.

Tabel 2.141 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kota Magelang, 2020-2024

Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	47,03	51,32	63,46	64,80	64,33
Indeks Kualitas Air (IKA)	16,67	30,83	65,00	66,67	58,33
Indeks Kualitas Udara (IKU)	83,67	81,08	81,16	83,05	86,83
Indeks Tutupan Vegetasi (IKTL)	49,31	31,48	28,07	27,85	35,88

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang, 2025

1. Indeks Kualitas Air (IKA)

Indeks Kualitas Air (IKA) mengalami fluktuasi yang cukup besar. Pada tahun 2020, nilainya adalah 16,67; tahun 2021 nilainya 30,83 dan 2022 nilainya 65. Namun, terjadi lonjakan signifikan menjadi 66,67 pada tahun 2023, sebelum turun lagi ke 56,67 pada tahun 2024. Hal ini menunjukkan adanya perbaikan, tetapi juga menunjukkan ketidakstabilan dalam kualitas air.

Tabel 2.142 Tabel Uji Sampel Air Sungai di Kota Magelang, 2021-2024

No.	Nama Sungai	Hasil Pengujian terhadap Cemaran Coli Tinja								Satuan	Keterangan
		2021		2022		2023		2024			
		Uji I	Uji II	Uji I	Uji II	Uji I	Uji II	Uji I	Uji II		
1	Sungai Elo Hulu	6,73	10,23	360	1,8	1400	180	2400	750	Jumlah/ 100 ml	Di bawah batas maksimal
2	Sungai Elo Tengah	10,49	5,49	360	1,8	600	180	2400	980	Jumlah/ 100 ml	Di bawah batas maksimal
3	Sungai Elo Hilir	10,87	21,73	920	1,8	200	180	2100	780	Jumlah/ 100 ml	Di bawah batas maksimal
4	Sungai Progo Hulu	9,66	15,87	920	1,8	920	180	1100	780	Jumlah/ 100 ml	Di bawah batas maksimal
5	Sungai Progo Tengah	6,73	4,66	720	1,8	680	180	2100	720	Jumlah/ 100 ml	Di bawah batas maksimal
6	Sungai Progo Hilir	9,66	6,73	360	230	200	180	680	780	Jumlah/ 100 ml	Di bawah batas maksimal

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang, 2025

2. Indeks Kualitas Udara (IKU)

Indeks Kualitas Udara (IKU) menunjukkan angka yang relatif baik, dengan nilai 83,67 pada tahun 2020. Meskipun tidak ada data untuk tahun 2021 dan 2022, nilai ini tetap tinggi di 83,05 pada tahun 2023 dan meningkat ke 86,83 pada tahun 2024, menandakan bahwa kualitas udara terjaga dengan baik.

Tabel 2.143 Hasil Pengujian Sampel NO2 dan SO2, 2021-2024

No	Aktivitas	Hasil Pengukuran NO2 (µg/m3)				Hasil Pengukuran SO2 (µg/m3)			
		2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
Semester 1									
1	Transportasi	12,24	11,39	12,64	10	9,57	13,00	10,02	11,7
2	Industri / agro industri	5,79	6,02	8,09	13,4	15,35	16,00	15,26	15,2
3	Pemukiman	6,96	8,10	11,06	4,49	12,02	14,08	13,22	3,91
4	Perkantoran/ Komersial	21,5	17,84	15,48	8,85	11,25	10,45	10,65	7,92
Semester 2									
1	Transportasi	15,63	15,17	14,25	11,48	11,95	10,72	11,40	9,08
2	Industri / agro industri	7,23	6,97	6,84	13,32	12,84	11,3	10,35	12,42
3	Pemukiman	8,11	7,38	7,56	2,23	6,25	6,68	5,52	3,18
4	Perkantoran/ Komersial	20,6	20,9	12,60	9,25	12,74	11,42	8,93	7,90
	Jumlah	98,06	93,77	88,52	73,11	91,97	93,65	85,35	71,31
	Rata-Rata	12,26	11,72	11,065	9,139	11,50	11,71	10,669	8,914

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang, 2025

Tabel 2.144 Lokasi Uji Sampling Kualitas Udara Kota Magelang, 2024

No.	Nama Lokasi Sampling	Koordinat		Alamat Lokasi Titik Sampling
		Latitude	Longitude	
1	Transportasi	- 7.473360	110.216759	Jl. Pahlawan No 4, Samping Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
2	Industri / agro industri	- 7.497071	110.232894	Sentra Pengolahan Ikan dan Tahu, Tidar Selatan, Kota Magelang

No.	Nama Lokasi Sampling	Koordinat		Alamat Lokasi Titik Sampling
		Latitude	Longitude	
3	Pemukiman	- 7.500093	110.222645	Jl Lamtoro No 71 Tidarbaru, samping kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah
4	Perkantoran/Komersial	- 7.503226	110.220112	Area Perkantoran Pemkot Kota Magelang, Jl Sarwo Edy Wibowo No 2, Kota Magelang

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang, 2025

Berdasarkan hasil pengujian terhadap sampel kualitas udara maka hasil perhitungan IKU berdasarkan tingkat cemaran NO₂ dan SO₂ adalah sebagai berikut:

Tabel 2.145 Perhitungan Indeks Kualitas Udara Kota Magelang, 2024

Parameter	Rerata	Baku Mutu	Indeks Pencemar Parameter	Indeks Pencemaran Udara IEU	Indeks Kualitas Udara
		EU	IEU		
2021					
NO2	12,26	40,00	0,3064	0,44063	81,076
SO2	11,50	20,00	0,5748		
2022					
NO2	11,72	40,00	0,2930	0,43917	81,16
SO2	11,71	20,00	0,5853		
2023					
NO2	11,07	40,00	0,2766	0,40503	83,05
SO2	10,67	20,00	0,5334		
2024					
NO2	9,139	40,00	0,2285	0,3371	86,83
SO2	8,914	20,00	0,4457		

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang, 2025

Kategori angka indeks yang dihasilkan (Mengacu Pemen LHK No.27 Tahun 2021 tentang Indeks Kualitas Lingkungan Hidup):

Kategori	Nilai Indeks
Sangat Baik	: 90 ≤ X ≤ 100
Baik	: 70 ≤ X ≤ 90
Sedang	: 50 ≤ X ≤ 70
Kurang	: 25 ≤ X ≤ 50
Sangat Kurang	: 0 ≤ X ≤ 25

3. Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)

Indeks Tutupan Vegetasi menunjukkan angka yang lebih rendah, dimulai dari 31,38 pada tahun 2020, namun mengalami penurunan pada tahun 2023 menjadi 27,85, sebelum kembali meningkat menjadi 35,88 pada tahun 2024. Hal ini mengindikasikan tantangan dalam menjaga tutupan vegetasi yang perlu diperhatikan untuk keberlanjutan lingkungan.

Tabel 2.146 Perhitungan Indeks Kualitas Tutupan Lahan

Luas Wilayah (Ha)	Luas Hutan	Luas Belukar dalam Kawasan	Luas Belukar pada Fungsi Lindung	Kebun Raya (Data LIPI)	RTH (Data Cipta Karya + DLH Prov)	Taman Kehati	Tutupan Vegetasi Relevan Lainnya*	RHL	TL	IKTL	DKK	TL - DKK	IKL
1855,83	77,58	-	-	-	53,155	-	1,437	-	0,06	27,85	0,00	0,06	27,85
1855,83	77,58	-	-	101,12	197,51	-	25,67	-	0,15	35,88	0,00	0,15	35,88

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang, 2024

Tabel 2.147 Luasan Jenis Tutupan Lahan Kota Magelang, 2024

Jenis Tutupan Lahan	Luas (Ha)
Luas Hutan *)	77.581
Luas Belukar dalam Kawasan	-
Luas Belukar pada Fungsi Lindung	-
Kebun Raya	101,12
RTH (Ruang Terbuka Hijau **)	197,51
Taman Kehati	-
Tutupan Vegetasi Relevan Lainnya	25,67
RHL (Rehabilitasi Hutan dan Lahan dari APBN)	-

Sumber:

*) Citra Satelit Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2018

**) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Magelang, 2024

2.1.3.2.5.2 Dokumen Perencanaan Lingkungan Hidup yang Tersusun

Dokumen perencanaan lingkungan hidup menunjukkan perkembangan positif digambarkan melalui indikator persentase dokumen perencanaan lingkungan hidup yang disusun. Pada tahun 2021, persentase dokumen yang tersusun mencapai 20%, dan meningkat menjadi 40% pada tahun 2022. Pada tahun 2023, persentase ini mengalami kenaikan menjadi 80%, dan di akhir tahun 2024 tercapai 100%.

Jumlah dokumen lingkungan hidup yang sudah dibuat juga menunjukkan tren peningkatan. Dari tidak ada dokumen yang disusun pada tahun 2020, jumlahnya bertambah menjadi 1 dokumen pada tahun 2021 (Inventarisasi Lingkungan Hidup), tambah 1 dokumen di tahun 2022 (Dokumen Daya Dukung Daya Tampung Lingkungan Hidup (DDDTLH)), dan terus meningkat bertambah 2 dokumen pada tahun 2023 (Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (KLHS RPJPD) Kota Magelang dan dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (KLHS RPJMD) Kota Magelang), di tahun 2024 bertambah 1 dokumen (Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH)) sehingga target 5 dokumen tercapai di akhir tahun 2024.

Tabel 2.148 Dokumen Perencanaan yang Disusun, 2020-2024

Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah dokumen lingkungan hidup yang sudah dibuat	0,00	1,00	2,00	4,00	5,00
Jumlah seluruh dokumen yang harus disusun	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Persentase dokumen perencanaan lingkungan hidup yang tersusun	NA	20%	40%	80%	100%

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang, 2025

2.1.3.2.5.3 RTH Publik untuk Pengelolaan Keanekaragaman Hayati

Pada tahun 2020, proporsi RTH publik tercatat sebesar 25.93%. Namun, untuk tahun 2021, tidak ada data yang tersedia. Pada tahun 2022, proporsi tersebut meningkat menjadi 28.09%, dan terus meningkat menjadi 29.17% pada tahun 2023, serta mencapai 30.25% pada tahun 2024. Peningkatan ini menandakan upaya yang semakin baik dalam pengelolaan keanekaragaman hayati di area RTH publik.

Luas RTH yang dikelola oleh Dinas Lingkungan Hidup (DLH) untuk keanekaragaman hayati, data tersedia mulai dari tahun 2022 dengan luas 84.33, yang meningkat menjadi 87.57 pada tahun 2023, dan mencapai 90.82 pada tahun 2024. Ini menunjukkan komitmen Dinas Lingkungan Hidup dalam mengelola RTH untuk mendukung keanekaragaman hayati.

Sementara itu, luas RTH Kota tetap stabil di angka 300.22 pada tahun 2022, 2023, dan 2024. Hal ini mencerminkan konsistensi dalam pengelolaan ruang terbuka hijau di tingkat kota. Secara keseluruhan, data ini menggambarkan kemajuan yang positif dalam pengelolaan RTH publik dan keanekaragaman hayati, meskipun ada tantangan yang perlu diatasi untuk meningkatkan proporsi dan luas RTH yang dikelola dengan lebih efektif.

Tabel 2.149 Proporsi RTH Publik untuk Pengelolaan Keanekaragaman Hayati, 2020-2024

Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
Luas RTH yang dikelola DLH untuk Kehati			84,33	87,57	90,82
Luas RTH Kota			300,22	300,22	300,22
Proporsi RTH publik untuk pengelolaan keanekaragaman hayati	25,93	NA	28,09	29,17	30,25

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang, 2025

Tabel 2.150 Luasan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Kota Magelang, 2024

No	Jenis RTH	Rincian RTH	Luas (Ha)
1	RTH Taman dan Hutan Kota	Kebun Raya	68,22
		Pariwisata Alam	17,02
		Taman Kota	10,58
		Taman Kecamatan	0,32
		Taman Kelurahan	6,26
		Lapangan/Kawasan Olahraga	52,75
2	RTH Jalur Hijau Jalan	Pulau Jalan dan Median	29,39
		Jalur Pejalan Kaki	77,07
3	RTH Fungsi Tertentu	Pemukaman	38,61
Total RTH Eksisting			300,22

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang dan Validasi Peta, 2025

2.1.3.2.5.4 Usaha dan/atau Kegiatan yang Mempunyai Rincian Teknis Penyimpanan Sementara LB3

Data yang disajikan dalam tabel di bawah ini memberikan gambaran tentang perkembangan usaha dan kegiatan yang memiliki rincian teknis penyimpanan sementara Limbah Berbahaya dan Beracun (LB3) dari tahun 2020 hingga 2024. Pada tahun 2020 dan 2021, tidak ada data yang tersedia mengenai persentase usaha yang memiliki rincian teknis tersebut. Namun, pada tahun 2022, persentase tersebut tercatat sebesar 30%, meningkat menjadi 50% pada tahun 2023, dan mencapai 66.67% pada tahun 2024. Peningkatan yang signifikan ini menunjukkan kemajuan dalam pengelolaan penyimpanan sementara LB3.

Tabel 2.151 Persentase Usaha dan atau Kegiatan yang Mempunyai Rincian Teknis Penyimpanan Sementara LB3, 2020-2024

Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah usaha dan/atau kegiatan yang memiliki rincian teknis tahun n	NA	NA	4,00	6,00	5,00
Jumlah usaha dan/kegiatan penghasil limbah B3	NA	NA	30,00	30,00	30,00
Persentase usaha dan atau kegiatan yang mempunyai rincian teknis penyimpanan sementara LB3 capaian tahun lalu	NA	NA	16,67	30,00	50,00
Persentase usaha dan atau kegiatan yang mempunyai rincian teknis penyimpanan sementara LB3	NA	NA	30,00	50,00	66,67

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang, 2025

2.1.3.2.5.5 Ketaatan Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan terhadap Pelaksanaan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan

Data yang disajikan memberikan informasi mengenai ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan dari tahun 2020 hingga 2024. Pada tahun 2020 dan 2021, tidak ada data yang tersedia mengenai persentase ketaatan. Namun, pada tahun 2022, persentase ketaatan tercatat sebesar 36.67%, yang meningkat menjadi 40% pada tahun 2023, dan mencapai 43.33% pada tahun 2024. Peningkatan ini menunjukkan adanya kemajuan dalam ketaatan penanggung jawab terhadap pengelolaan lingkungan.

Secara keseluruhan, data ini menunjukkan peningkatan ketaatan penanggung jawab usaha dalam pengelolaan dan pemantauan lingkungan, meskipun jumlah penanggung jawab yang diawasi tetap konstan. Ini menunjukkan perlunya upaya lebih lanjut untuk meningkatkan kepatuhan dan efektivitas pengawasan dalam pengelolaan lingkungan.

Tabel 2.152 Persentase Ketaatan Penanggungjawab Usaha dan/ atau Kegiatan terhadap Pelaksanaan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan, 2020-2024

Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan yang taat terhadap PPLH	NA	NA	11,00	12,00	13,00
Jumlah penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan yang diawasi	NA	NA	30,00	30,00	30,00
Persentase ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan	NA	NA	36,67	40,00	43,33

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang, 2025

2.1.3.2.5.6 Peningkatan Lembaga Masyarakat dan Lembaga Pendidikan yang Mengikuti Pendidikan Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup

Kegiatan ini terdiri dari berbagai bentuk kegiatan bertema lingkungan hidup, seperti pemberian penghargaan, sosialisasi kegiatan bertema pelestarian lingkungan, perayaan hari besar lingkungan hidup dan perlombaan. Adapun lembaga yang terlibat didalamnya adalah unsur masyarakat tingkat RW dan sekolah.

Pada tahun 2022, persentase lembaga yang mengikuti program ini tercatat sebesar 18.37%, meningkat menjadi 24.14% pada tahun 2023, namun mengalami penurunan menjadi 22.22% pada tahun 2024. Jumlah total lembaga yang berpartisipasi dalam pendidikan pelatihan menunjukkan tren positif. Dari 58 lembaga pada tahun 2022, jumlah ini meningkat menjadi 72 pada tahun 2023, dan mencapai 88 lembaga pada tahun 2024. Meskipun terdapat fluktuasi dalam persentase partisipasi, jumlah lembaga yang terlibat dalam pendidikan dan pelatihan lingkungan hidup menunjukkan peningkatan yang signifikan dari tahun ke tahun.

Tabel 2.153 Peningkatan Lembaga Masyarakat dan Lembaga Pendidikan yang Mengikuti Pendidikan Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup, 2020-2024

Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
Total lembaga yang mengikuti pendidikan pelatihan pada tahun n	NA	NA	58,00	72,00	88,00
Total lembaga yang mengikuti pendidikan pelatihan pada tahun n-1	NA	NA	49,00	58,00	72,00
Persentase peningkatan lembaga masyarakat dan lembaga pendidikan yang mengikuti pendidikan pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup	NA	NA	18,37	24,14	22,22

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang, 2025

Tabel 2.154 Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Lingkungan Hidup, 2024

No	Subjek/Lembaga	Kegiatan
1	RW 18 Rejowinangun Utara	Sosialisasi pengelolaan sampah dan proklamasi
2	RW 3 Tidar Utara	Penanaman biopori dan penyebaran benih ikan dalam peringatan Hari Air Sedunia
3	Yayasan Tarakanita	Penebaran eco enzyme dan bibit ikan di sepanjang sungai manggis (rindam) dalam rangka rangkaian peringatan Hari Lingkungan Hidup
4	RW 6 Kelurahan Magersari	Penanaman pohon dan biopori dalam rangka rangkaian peringatan Hari Lingkungan Hidup
5	SD Rejowinangun Selatan 2	Memperoleh Penghargaan Adiwiyata Provinsi tahun 2024
6	SDN Wates 3	Memperoleh Penghargaan Adiwiyata Provinsi tahun 2024
7	SDN Potrobangsari 1	Memperoleh Penghargaan Adiwiyata Provinsi tahun 2024
8	SD Rejowinangun Selatan 1	Memperoleh Perpanjangan Penghargaan Adiwiyata Provinsi tahun 2024
9	SD Kemirirejo 1	Memperoleh Perpanjangan Penghargaan Adiwiyata Provinsi tahun 2024
10	SMPN 3	Memperoleh Perpanjangan Penghargaan Adiwiyata Provinsi tahun 2024
11	SDN WATES 4	Memperoleh Penghargaan Adiwiyata Nasional tahun 2024
12	SDN MAGELANG 7	Memperoleh Penghargaan Adiwiyata Nasional tahun 2024
13	SMPN 2	Memperoleh Penghargaan Adiwiyata Mandiri tahun 2024
14	RW 09 Jurangombo Selatan	Sosialisasi pemanfaatan air hujan (biopori & sumur resapan)
15	SMA 5	Pembagian bibit tanaman dalam rangka peringatan hari menanam pohon sedunia

No	Subjek/Lembaga	Kegiatan
16	RW 14 Rejowinangun Utara	Sosialisasi pemanfaatan air hujan (biopori & sumur resapan)

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang, 2025

2.1.3.2.5.7 Cakupan Penghargaan yang Diterima Masyarakat

Dalam upaya meningkatkan kualitas lingkungan hidup, cakupan penghargaan yang diterima masyarakat menjadi indikator penting karena dapat menggambarkan bagaimana kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi pada pengelolaan lingkungan. Pada tahun 2020 dan 2021, data tidak tersedia, namun mulai tahun 2022 persentase penghargaan yang diterima masyarakat sebesar 5.73% dan meningkat menjadi 10.42% pada tahun 2023. Berikutnya pada tahun 2024 menunjukkan angka yang lebih baik, yaitu 14.06%.

Dengan total 192 Rukun Warga (RW) yang menjadi sasaran, upaya dalam meningkatkan penghargaan ini menunjukkan adanya kemajuan dalam kesadaran dan partisipasi masyarakat terhadap pengelolaan lingkungan hidup.

Pada tahun 2024, penghargaan yang diterima masyarakat khususnya pada kategori kampung iklim yaitu sebagai berikut:

1. Penghargaan Proklam Tk. Utama (RW 09 Jurangombo Selatan dan RW 14 Rejowinangun Utara).
2. Penghargaan Proklam Tk. Madya (RW 02 Kramat Utara, RW 09 Rejowinangun Selatan, RW 14 Rejowinangun Selatan, RW 03 Tidar Utara, RW 06 Tidar Utara, RW 03 Jurangombo Utara)

Tabel 2.155 Persentase Cakupan Penghargaan yang Diterima Masyarakat, 2020-2024

Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah penghargaan LH yang diterima tahun n	NA	NA	10,00	9,00	7,00
Jumlah penghargaan LH yang diterima tahun n-1	NA	NA	1,00	11,00	20,00
Jumlah RW	NA	NA	192,00	192,00	192,00
Persentase cakupan penghargaan yang diterima Masyarakat	NA	NA	5,73	10,42	14,06

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang, 2025

2.1.3.2.5.8 Pengaduan Kasus Lingkungan Hidup yang Terselesaikan

Dalam upaya meningkatkan kualitas pengelolaan lingkungan, data pengaduan kasus lingkungan hidup menunjukkan perkembangan yang signifikan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2022, persentase pengaduan kasus lingkungan hidup yang terselesaikan mencapai 75%. Keberhasilan ini meningkat menjadi 100% pada tahun 2023 dan 2024, menunjukkan efektivitas dalam penanganan pengaduan oleh pihak berwenang.

Jumlah pengaduan yang masuk mengalami variasi, dengan 4 pengaduan pada tahun 2022 dan tetap stabil di angka 4 pada tahun 2023. Namun, terdapat penurunan menjadi 3 pengaduan pada tahun 2024. Dari jumlah tersebut, kasus yang berhasil diselesaikan menunjukkan angka yang positif, dengan 3 kasus terselesaikan pada tahun 2022, 4 pada tahun 2023, dan kembali 3 pada tahun 2024. Peningkatan persentase penyelesaian pengaduan ini mencerminkan komitmen dalam merespon isu lingkungan yang dihadapi masyarakat, serta pentingnya kolaborasi antara instansi terkait untuk memastikan pengelolaan lingkungan yang lebih baik.

Tabel 2.156 Persentase Pengaduan Kasus Lingkungan Hidup yang Terselesaikan, 2020-2024

Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
Pengaduan kasus lingkungan hidup yang masuk	NA	NA	4,00	4,00	3,00
Kasus lingkungan hidup yang terselesaikan	NA	NA	3,00	4,00	3,00

Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase pengaduan kasus lingkungan hidup yang terselesaikan	NA	NA	75,00	100,00	100,00

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang, 2025

2.1.3.2.5.9 Peningkatan Sampah yang Terkelola

Dalam upaya pengelolaan sampah, indikator peningkatan persentase sampah yang terkelola menunjukkan perkembangan yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Meskipun data untuk tahun 2020 tidak tersedia, hasil pengelolaan sampah pada tahun 2021 sebesar 2,95%. Tahun 2022 tercatat terjadi kenaikan menjadi 6,69%. Namun, terjadi penurunan yang signifikan pada tahun 2023 yaitu tercatat -0,12%. Tahun 2024 peningkatan persentase tercatat 1,04% yang menunjukkan tantangan besar dalam pengelolaan sampah.

Tabel 2.157 Pengolahan Sampah Kota Magelang, 2020-2024

Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase sampah yang terkelola tahun n-1		84,11	87,06	93,75	93,63
Persentase sampah yang terkelola tahun n		87,06	93,75	93,63	94,67
Peningkatan persentase sampah yang terkelola	NA	2,95	6,69	-0,12	1,04

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang, 2025

Tabel 2.158 Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah, 2019-2023

INDIKATOR	2019	2020	2021	2022	2023
Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah	-	5,96	7,85	19,6	14,93

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang, 2024

2.1.3.2.6 Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

2.1.3.2.6.1 Pendaftaran Penduduk

Seluruh penduduk Kota Magelang yang wajib KTP-el telah memiliki KTP-el. Kondisi ini juga terjadi pada kepemilikan Kartu Keluarga, serta kepemilikan Kartu Identitas Anak. Capaian ini tidak terlepas dari inovasi yang dilakukan yaitu SI TITAK Plus yaitu layanan jemput bola penerbitan KIA yang mulanya hanya bekerja sama dengan kader Posyandu dan Sekolah (SD/TK) berkembang menjadi kerja sama dengan dunia usaha yaitu melalui pemberian diskon atau voucher bagi pemilik KIA.

Tabel 2.159 Kepemilikan KTP, KK, dan KIA Warga Kota Magelang, 2020-2024

Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah penduduk usia 17 tahun ke atas atau telah menikah memiliki KTP-el	97.017	97.728	97.596	98.512	99.522
Jumlah seluruh penduduk wajib KTP-el	97.221	97.728	97.596	98.512	99.522
Persentase penduduk usia wajib KTP-el yang sudah melakukan perekaman KTP-el	99,79%	100%	100%	100%	100%
Jumlah Kartu Keluarga yang diterbitkan	43.183	43.607	43.826	44.047	44.532
Jumlah permohonan Kartu Keluarga	43.183	43.607	43.826	44.047	44.532
Persentase kepemilikan KK	100%	100%	100%	100%	100%
Jumlah penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA)	29.032	30.569	30.369	30.157	29.053

Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah penduduk usia kurang dari 17 tahun dan/atau belum menikah	30.799	30.569	30.369	30.157	29.053
Persentase kepemilikan KIA	94,26%	100%	100%	100%	100%

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Magelang, 2025

Implementasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) sampai dengan akhir tahun 2024 mencapai 33,94% dari total jumlah penduduk wajib KTP-el. Kondisi ini menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan dari kondisi tahun 2023 (19,01%). Pencapaian ini sudah melebihi target Nasional tahun 2024 sebesar 30%. Peningkatan ini didukung oleh upaya jemput bola ke kelurahan.

2.1.3.2.6.2 Pencatatan Sipil

Kepemilikan akte kelahiran dan akte kematian sudah mencapai 100%. Untuk mendorong kepemilikan akte kelahiran, utamanya pada bayi baru lahir, Pemerintah Kota Magelang telah melakukan kerja sama dengan fasilitas pelayanan kesehatan di Kota Magelang dan perbatasan dengan Kabupaten Magelang. Melalui inovasi Aksi Ibu Pulang Bawa Akte Kelahiran (SI BULAN), ibu melahirkan di fasilitas kesehatan yang telah terjalin kerja sama, maka bayi yang lahir tersebut akan memperoleh akte kelahiran dan update KK secara langsung.

Sementara itu, untuk mendorong kepemilikan akte kematian dilakukan inovasi SI SAKTI (Aksi Siap antar Akte Kematian). Upaya yang dilakukan yaitu dengan adanya grup whatsapp dengan kelurahan, sehingga ketika ada kejadian kematian akan langsung dilaporkan secara bertingkat dari RT/RW ke kelurahan dan dapat langsung ditindaklanjuti oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk menerbitkan akte kematian.

Untuk mendorong pencatatan perceraian, terdapat inovasi SI KACER (Aksi Layanan Terintegrasi Pelaporan Perkawinan dan Perceraian). Dinas juga bekerja sama dengan Pengadilan Agama untuk mendorong pencatatan perceraian.

Tabel 2.160 Kepemilikan Akta Kelahiran, Akta Kematian, dan Akta Perceraian, 2020-2024

Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah penduduk usia 0-18 tahun yang memiliki akte kelahiran	34.494	34.502	34.345	34.523	31.149
Jumlah penduduk usia 0-18 tahun	34.779	34.518	34.345	34.523	31.149
Persentase penduduk 0-18 tahun yang memiliki akta kelahiran	99,18%	100%	100%	100%	100%
Jumlah kutipan akta kematian yang diterbitkan untuk kematian tahun berkenaan	1.837	2.256	1.681	1.569	1.537
Jumlah kematian yang terjadi pada tahun berkenaan	1.837	2.256	1.681	1.569	1.537
Persentase penerbitan akta kematian	100%	100%	100%	100%	100%
Jumlah kutipan akta perceraian yang diterbitkan untuk perceraian tahun berkenaan	19	20	16	13	19
Jumlah perceraian yang terjadi pada tahun berkenaan	19	20	16	13	19
Persentase penerbitan akta perceraian	100%	100%	100%	100%	100%

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Magelang, 2025

2.1.3.2.6.3 Pengelolaan Administrasi Kependudukan

Seluruh layanan administrasi kependudukan telah dilaksanakan berbasis teknologi informasi melalui Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK). Pada awalnya, masing-masing Kabupaten/Kota diberikan hak akses terhadap SIAK, kemudian pada tahun 2022 hak akses ditarik menjadi SIAK terpusat. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Magelang hanya dapat mengakses data terbatas sesuai ketentuan.

Tabel 2.161 Persentase Data Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang Terkelola Berbasis Teknologi Informasi, 2020-2024

Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase data kependudukan dan pencatatan sipil yang terkelola berbasis teknologi informasi	100%	100%	100%	100%	100%

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Magelang, 2025

Untuk OPD yang akan melakukan akses data kependudukan, dapat mengajukan permohonan dan melakukan Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan Ditjen Dukcapil Kemendagri yang difasilitasi oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Magelang. Namun pada tahun 2023, OPD yang telah melakukan PKS tidak dapat mengakses data kependudukan lagi karena adanya Surat Dirjen Dukcapil Nomor 400.8.1.2/2345/Dukcapil tanggal 14 Februari 2023 tentang Penyesuaian Kuota Akses Pemanfaatan Data Kependudukan, yang menyebutkan kepemilikan sertifikat ISO/IEC 27001 paling lambat akhir bulan Juni 2023. Kemudian pada Bulan Oktober 2023 ditetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 102 Tahun 2019 tentang Pemberian Hak Akses dan Pemanfaatan Data Kependudukan pada Pasal 18A terkait kepemilikan sertifikat standar keamanan.

2.1.3.2.6.4 Pengelolaan Profil Kependudukan

Penyusunan profil kependudukan dilaksanakan sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Profil Perkembangan Kependudukan.

Tabel 2.162 Persentase Jenis Data yang Tersaji dalam Profil Kependudukan, 2020-2024

Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah Jenis data yang tersaji dalam profil kependudukan	50	50	61	61	61
Jumlah jenis data yang harus tersaji dalam profil kependudukan	61	61	61	61	61
Persentase Jenis Data yang Tersaji dalam Profil Kependudukan	81,97%	81,97%	100%	100%	100%

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Magelang, 2025

2.1.3.2.7 Pemberdayaan Masyarakat Desa

Dalam kurun waktu tahun 2020 sampai dengan tahun 2024, seluruh LPM telah aktif berperan sebagai mitra kerja pemerintah. Penguatan LPM dilakukan melalui pelatihan Perencanaan Partisipatif Pembangunan Masyarakat Kelurahan (P3MK) baik di tingkat provinsi maupun kota. Pengurus LPM sampai dengan tahun 2024 sebanyak 425 orang telah mengikuti pelatihan P3MK. Namun, pada akhir tahun 2024 telah dilaksanakan reorganisasi kepengurusan LPM, sehingga seluruh pengurus LPM yang baru perlu mendapatkan penguatan kapasitas.

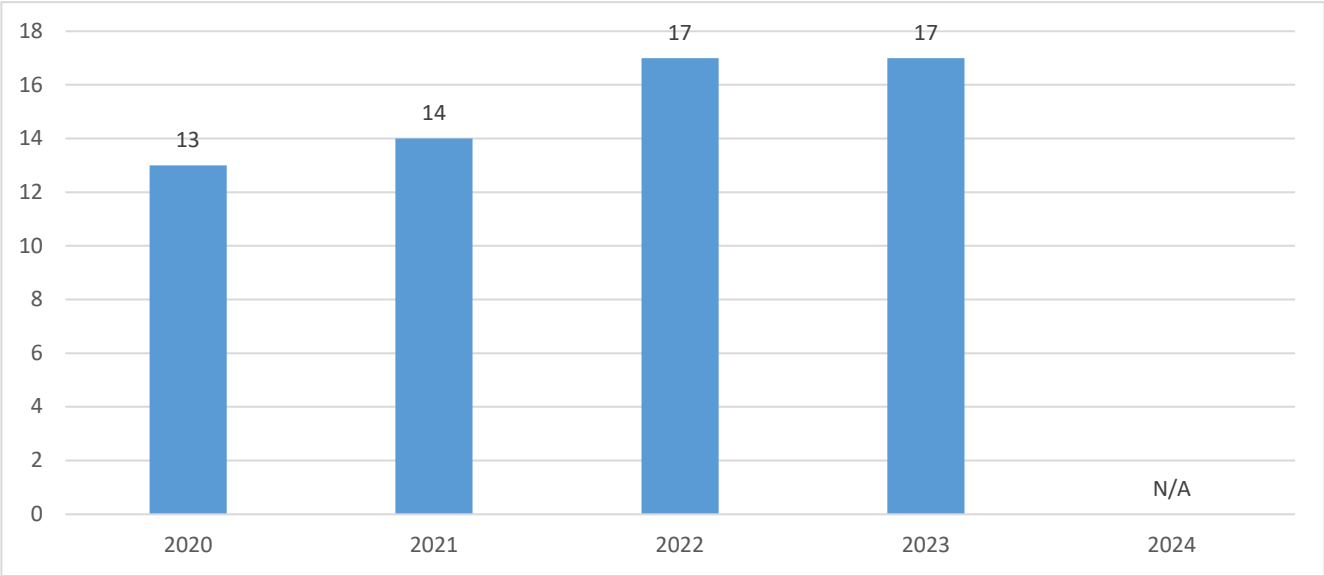
Tabel 2.163 Jumlah PKK Aktif Kota Magelang, 2020-2024

Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah PKK aktif	1.249	1.250	1.250	1.250	1.250

Sumber: DP4KB Kota Magelang, 2025

Pemberdayaan masyarakat ditunjukkan salah satunya melalui jumlah organisasi masyarakat yang aktif, diantaranya adalah Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK). PKK aktif di Kota Magelang sejumlah 1.250 yang terdiri dari 1.032 PKK RT, 192 PKK RW, 17 PKK tingkat kelurahan, 3 PKK tingkat kecamatan dan 1 PKK tingkat Kota. 5 PKK yang lain adalah PKK millineal yang diikuti oleh generasi muda yang bertujuan utama untuk menginspirasi anak-anak muda untuk peduli dengan pembangunan dan pemberdayaan di wilayah masing-masing. Selain itu, indikator keberhasilan pemberdayaan masyarakat adalah tingkat perkembangan wilayah (kelurahan).

Sesuai dengan Permendagri Nomor 81 Tahun 2015, Evaluasi perkembangan kelurahan dilakukan setiap tahun mencakup 3 (tiga) aspek yaitu Bidang Pemerintahan, Bidang Kewilayahan dan Bidang Kemasyarakatan. Hasilnya sejak tahun 2022 seluruh kelurahan di Kota Magelang masuk dalam kategori cepat berkembang (nilai evaluasi di atas 351). Perkembangan kelurahan hasil evaluasi perkembangan kelurahan dari tahun 2020 sampai dengan 2024 disajikan pada grafik berikut:



Gambar 2.54 Perkembangan Kelurahan di Kota Magelang, 2020-2024

Sumber: DPMP4KB Kota Magelang, 2025

Adapun hasil penilaian dari masing-masing kelurahan pada tahun 2022 - 2024 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.164 Hasil Evaluasi Perkembangan Desa/Kelurahan Kota Magelang, 2024

No	Kelurahan	2022	2023	2024*
1	RejowinangunSelatan	373	384	384
2	Magersari	358	383	383
3	Jurangombo Utara	388	392	392
4	Jurangombo Selatan	353	376	376
5	Tidar Utara	363	375	375
6	Tidar Selatan	385	396	396
7	Wates	392	392	392
8	Potrobangsari	409	409	409
9	Kedungsari	387	388	388

No	Kelurahan	2022	2023	2024*
10	Kramat Utara	383	385	385
11	Kramat Selatan	387	395	395
12	Kemirirejo	395	397	397
13	Cacaban	367	367	367
14	Rejowinangun Utara	367	367	367
15	Magelang	368	368	368
16	Panjang	369	380	380
17	Gelangan	399	399	399

Sumber: DPMP4KB Kota Magelang, 2025

*Menggunakan realisasi tahun 2023

Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa ada peningkatan nilai di sebelas kelurahan, sementara enam kelurahan yang lain nilainya masih sama dengan tahun sebelumnya.

2.1.3.2.8 Pengendalian Penduduk dan Keluarga Bencana

Pengukuran keberhasilan dalam upaya membangun kualitas dan ketahanan keluarga pada suatu wilayah ditunjukkan melalui indikator Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga). Sesuai dengan UU No 52 Tahun 2009 tentang tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, maka pencapaian keluarga yang berkualitas,berketahanan dan sejahtera menjadi tujuan dalam pembangunan keluarga yang ditunjukkan melalui 3 dimensi yaitu ketenteraman, kemandirian, dan kebahagiaan keluarga yang diharapkan mampu menggambarkan bagaimana peran dan fungsi keluarga itu sendiri. iBangga diklasifikasikan menjadi kurang baik (rentan) jika memiliki nilai <40; cukup baik (berkembang jika nilainya diantara 40-70; dan baik (tangguh) jika nilainya >70.

Tabel 2.165 Nilai Indeks Pembangunan Keluarga Kota Magelang, 2020-2024

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	53,57	53,57*	58,82	65,58	66,30

Sumber: DPMP4KB Kota Magelang, 2025

*: menggunakan data tahun 2020

Berdasarkan tabel di atas, Nilai iBangga Kota Magelang menunjukkan tren peningkatan dari tahun ke tahun, namun masih pada klasifikasi berkembang. Hal yang menjadi perhatian untuk peningkatan nilai iBangga pada kategori Tangguh adalah penguatan dimensi kemandirian utamanya pada pemenuhan kebutuhan dasar.

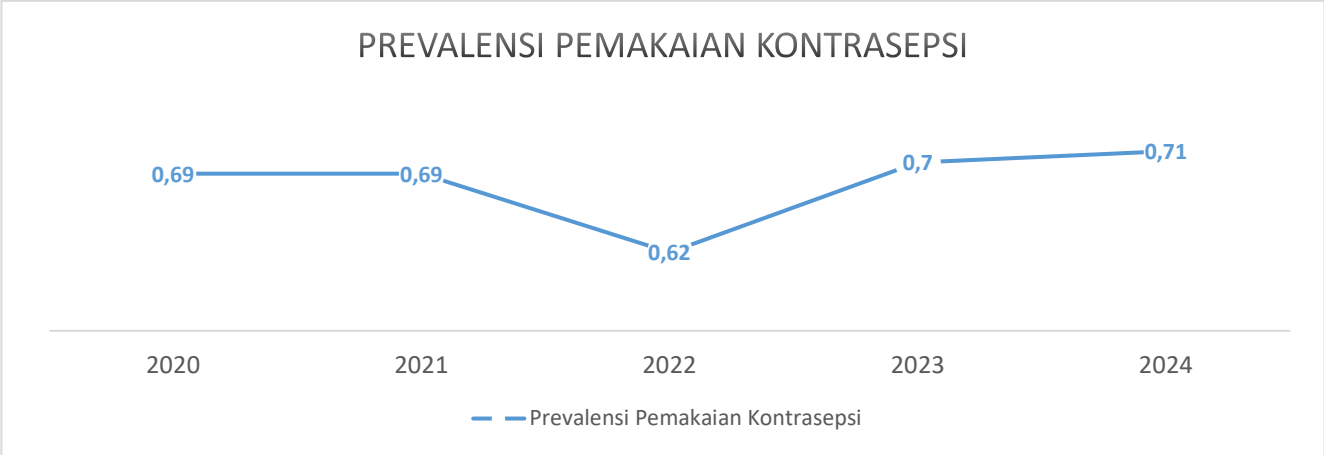
Upaya peningkatan kemandirian keluarga diwujudkan dengan pemberdayaan dan peningkatan keluarga sejahtera dilaksanakan diantaranya dengan pembinaan keluarga tribina, melalui Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang berKB.

Tabel 2.166 Anggota Keluarga Tribina yang Ber-KB, Kota Magelang, 2020-2024

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah anggota keluarga tribina, UPPKS yang ber-KB	2.592	2.592	2.592	2.597	2.305
Jumlah anggota keluarga tribina, UPPKS	5.242	5.157	3.475	3.475	3.178
Presentase anggota keluarga tribina, UPPKS yang ber-KB	49.45%	50.26%	74,59%	74,73%	72,53%

Sumber: DPMP4KB Kota Magelang, 2025

Prevalensi Pemakaian Kontrasepsi/ *Contraceptive Prevalence Rate* (CPR) semakin meningkat pada dua tahun terakhir. Tren kenaikan dapat dilihat melalui grafik di bawah ini.



Gambar 2.55 *Tren Prevalensi Pemakaian Kontrasepsi/ Contraceptive Prevalence Rate (CPR) Kota Magelang, 2020-2024*

Sumber: DPMP4KB Kota Magelang, 2025

Tabel 2.167 *Pemakaian Kontrasepsi oleh Pasangan Usia Subur Kota Magelang, 2020-2024*

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah Pasangan Usia Subur ber KB	9.565	9.594	8.461	9.227	9.654
Jumlah Pasangan usia subur	13.919	13.937	13.608	13.164	13.590
Contraceptive Prevalence Rate (CPR)	68,72%	68,84%	62,18%	70,09%	71,04%

Sumber: DPMP4KB Kota Magelang, 2025

Pemakaian kontrasepsi oleh PUS menunjukkan tren yang semakin meningkat setiap tahunnya. Hal ini menjadi capaian sekaligus tantangan yang perlu diwaspadai. Kenaikan angka CPR berhubungan dengan penurunan Angka kelahiran total /Total Fertility Rate (TFR). TFR Kota Magelang menunjukkan penurunan di dua tahun terakhir. Pada tahun 2023, TFR sebesar 1,78, menurun 0,01 poin dari tahun 2022. Idealnya, angka TFR menurut BKKBN adalah pada 2,1. Angka kelahiran yang terlalu rendah akan meningkatkan angka beban ketergantungan.

Tabel 2.168 *Komposisi Penduduk (%) dan Angka Beban Ketergantungan Kota Magelang, 2020-2024*

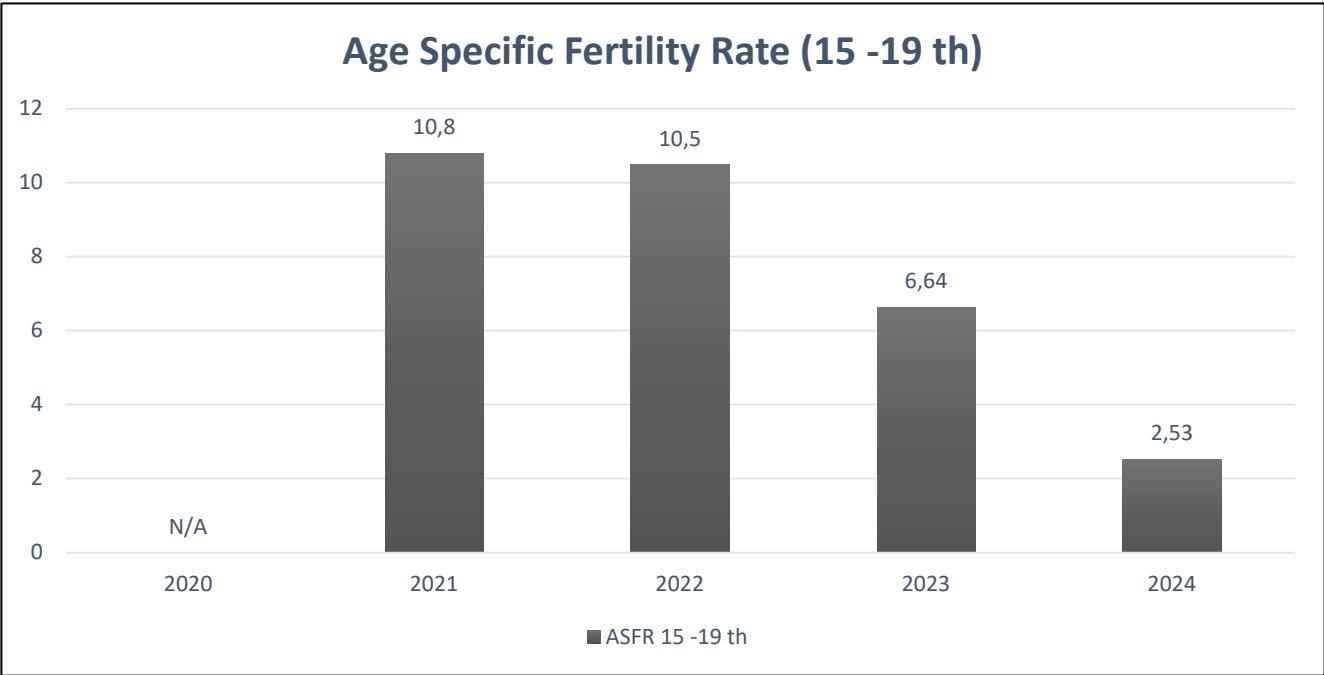
Tahun	Umur			Angka Beban Ketergantungan (Jiwa)
	0-14	15-64	65+	
2020	20,06	70,89	9,06	41,07
2021	19,80	70,72	9,48	41,41
2022	19,56	70,52	9,92	41,79
2023	18,81	70,75	10,44	41,34
2024	18,47	70,58	10,95	41,69

Sumber: Proyeksi Interim Penduduk Hasil Sensus Penduduk (Statistik Kesejahteraan Rakyat, BPS, 2024)

Dari tabel di atas, diketahui bahwa komposisi penduduk berumur 65 tahun ke atas semakin meningkat. Peningkatan proporsi penduduk usia tua, tidak selalu berkonotasi negatif. Peningkatan ini bisa dikaitkan dengan

semakin baiknya kualitas kesehatan penduduk Kota Magelang di usia tua. Di sisi lain, hal ini juga dapat menjadi tantangan, karena semakin banyak penduduk usia tua yang kurang produktif, akan meningkatkan pula angka beban ketergantungan. Pada tahun 2024, angka beban ketergantungan/ *dependency ratio* sebesar 41,69. Artinya, setiap 100 penduduk produktif menanggung beban sekitar 42 penduduk tidak produktif (di bawah umur 15 tahun dan 65 tahun ke atas). Dengan demikian perencanaan kebijakan dan program pengendalian penduduk tidak hanya berfokus pada penekanan jumlah penduduk namun juga harus memperhatikan struktur demografi penduduk (piramida penduduk).

Sejalan dengan penguatan pilar pengendalian kuantitas penduduk, kehamilan pada rentang usia 15-19 th perlu mendapat perhatian khusus.



Gambar 2.56 Age Specific Fertility Rate (15-19 Th) Kota Magelang, 2020-2024

Sumber: DPMP4KB Kota Magelang, 2025

Data menunjukkan bahwa tren penurunan ASFR di Kota Magelang terjadi mulai dari tahun 2021 sampai dengan 2024. Pada tahun 2024, nilai ASFR adalah 2,53. Nilai tersebut berarti bahwa pada setiap 1.000 wanita usia 15 - 19 th terdapat 2 sampai 3 kelahiran hidup. Angka ini jauh di bawah rata-rata ASFR 15 -19 th nasional yaitu sebesar 18. Rendahnya perkawinan anak di Kota Magelang menjadi salah satu factor kunci penurunan ASFR. Pada tahun 2024, jumlah perkawinan anak di Kota Magelang sebanyak 16 anak. Meski demikian, upaya berkelanjutan untuk tetap mempertahankan bahkan menurunkan angka ASFR 15-19 th perlu terus dilakukan. Edukasi mengenai pentingnya Kesehatan reproduksi dan seksual, pencegahan perkawinan anak melalui pendekatan komunikasi antar pribadi dan mobilisasi social dinilai efektif menurunkan angka ASFR Kota Magelang.

2.1.3.2.9 Perhubungan

2.1.3.2.9.1 Tingkat Keselamatan Lalu Lintas

Jumlah kejadian kecelakaan lalu lintas di Kota Magelang menjadi salah satu tolok ukur keselamatan lalu lintas. Perkembangan kejadian kecelakaan lalu lintas di Kota Magelang dari tahun 2020-2024 ditunjukkan pada tabel berikut ini.

Tabel 2.127 Perkembangan Kejadian Kecelakaan Lalu Lintas di Kota Magelang, 2020-2024

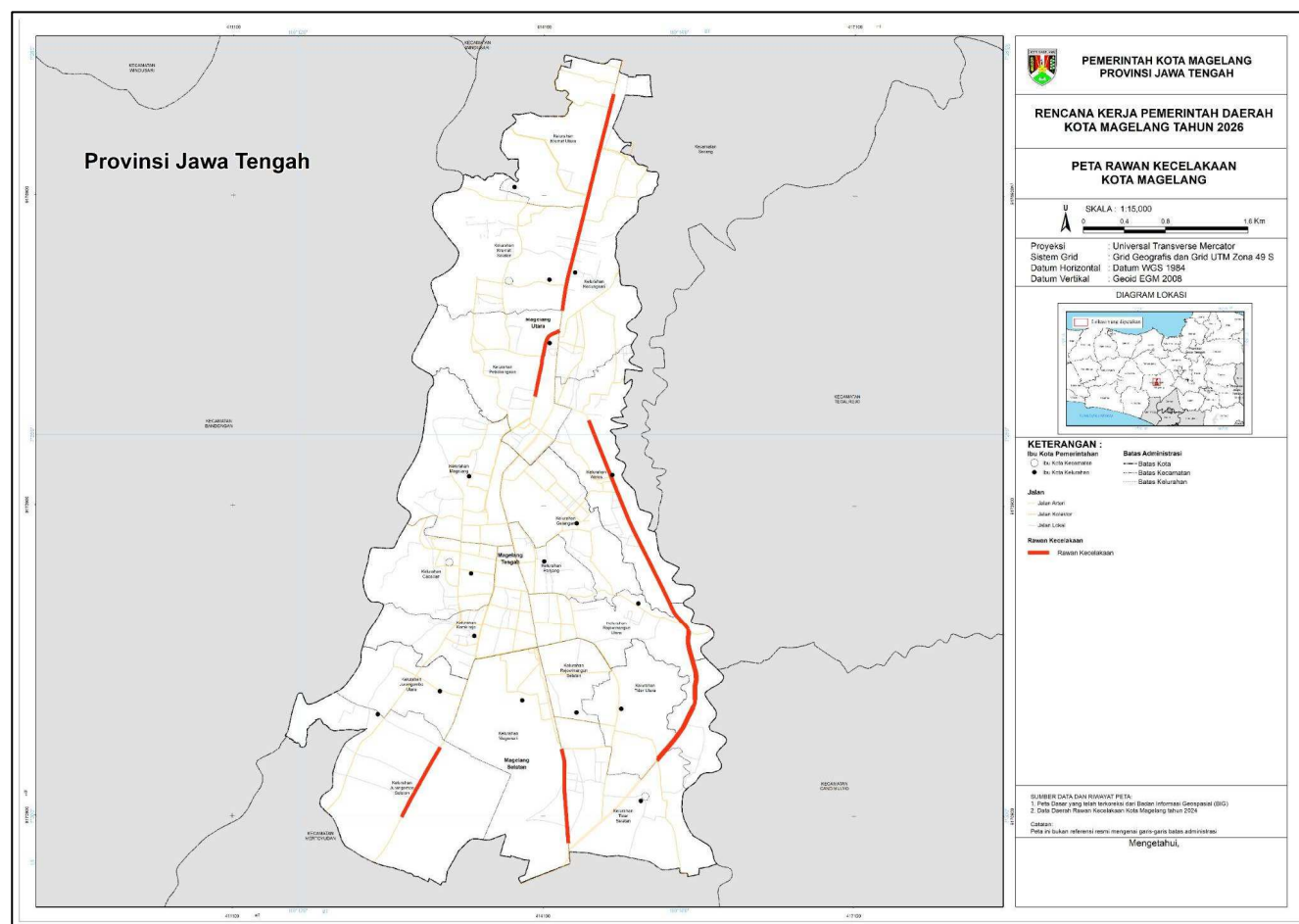
No	Kecelakaan Lalu Lintas	2020	2021	2022	2023	2024*
1	Jumlah Kejadian	149	239	334	278	105
2	Jumlah korban meninggal dunia	22	22	25	28	15
3	Jumlah korban luka berat	0	1	0	0	0
4	Jumlah korban luka ringan	180	281	228	332	90

Sumber: Dinas Perhubungan Kota Magelang, 2024

*Data Semester I Tahun 2024

Kejadian kecelakaan lalu lintas hingga semester 1 tahun 2024, mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya baik dari sisi jumlah kejadian maupun fatalitas kejadian. Untuk meminimalkan resiko terjadinya kecelakaan, upaya yang perlu terus didorong oleh Dinas Perhubungan adalah melalui pemenuhan fasilitas kelengkapan jalan yang baik. Dari total 309 ruas jalan kewenangan kota, baru sebesar 86,08% (266 ruas jalan) yang memenuhi kelengkapan jalan yang telah terpasang dalam kondisi baik.

Lokasi yang dikategorikan rawan kecelakaan di Kota Magelang masih sama dengan tahun sebelumnya, meliputi ruas jalan yang memiliki kepadatan arus lalu lintas tinggi. Area tersebut adalah sebagian ruas Jl. A. Yani, Jl. Urip Sumoharjo, Jl. Soekarno Hatta, Jl. Jendral Sudirman, dan Jl. Jenderal Gatot Subroto. Untuk meningkatkan keselamatan lalu lintas, rekayasa yang dilakukan pada lokasi rawan kecelakaan tersebut melalui pengoptimalan pengaturan APILL pada ruas jalan *black line*. Peta rawan kecelakaan di Kota Magelang ditunjukkan dalam gambar berikut ini.



Gambar 2.57 Peta Rawan Kecelakaan Kota Magelang, 2024

Sumber: Dinas Perhubungan Kota Magelang, 2025 (diolah)

2.1.3.2.9.2 Fasilitas Keselamatan Jalan

Fasilitas keselamatan jalan merupakan komponen pendukung keselamatan jalan yang harus dipenuhi. Perkembangan fasilitas keselamatan jalan di Kota Magelang ditunjukkan dalam tabel berikut.

Tabel 2.128 Perkembangan Fasilitas Keselamatan Jalan di Kota Magelang, 2020-2024

No	Fasilitas Keselamatan Jalan	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah APILL ATCS	15	15	18	17	17
2	Jumlah Kebutuhan APILL terintegrasi ATCS	15	15	1	1	1
3	Jumlah Rambu Terpasang	125	125	50	50	50
4	Jumlah Kebutuhan Rambu	150	150	53	55	55

Sumber: Dinas Perhubungan Kota Magelang, 2025

Jumlah APILL ATCS pada tahun 2024 masih sama dengan tahun sebelumnya yaitu sebanyak 17 unit. Sebaran APILL tersebut adalah di Simpang Shopping, Simpang Bayeman, Simpang Kupatan, Simpang Menowo, Simpang Kebonpolo, Simpang Kodim, Simpang CPM, Simpang Canguk, Simpang Trio, Simpang Gotong Royong, Simpang Aloon-aloon, Simpang Cacaban, Simpang SMP 2, Simpang Safari, dan Simpang Apotik Sumbing (Jl. Pemuda), Simpang SMP 7, dan Simpang Jalan Jeruk (satu-satunya APILL yang belum terintegrasi ATCS). Dengan selesainya pembangunan *underpass* Canguk, maka dibutuhkan pengaturan melalui pemasangan APILL pada ruas jalan dari arah Tegalrejo ke Kota Magelang. Pemasangan APILL juga dibutuhkan di Jl. A. Yani pada titik depan RSJ Prof dr. Soerojo karena lokasi tersebut rawan kecelakaan lalu lintas.

2.1.3.2.9.3 Angkutan Umum

Penggunaan transportasi umum perlu ditingkatkan guna membantu mengurangi kemacetan lalu lintas, mengurangi polusi udara, dan mendukung keberlanjutan lingkungan. Layanan angkutan umum di Kota Magelang dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.129 Layanan Angkutan Umum di Kota Magelang, 2019-2023

Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase penduduk terlayani transportasi umum	7,06%	9,14%	7,83%	7,85%	8,29%
<i>Load Factor</i> Angkutan umum	31,88	32,29	33,04	37,05	35,08

Sumber: Dinas Perhubungan Kota Magelang, 2025

Jumlah pengguna transportasi umum pada tahun 2024 sebanyak 10.673, sedikit meningkat dibanding tahun sebelumnya sebanyak 10.052. Untuk meningkatkan penggunaan transportasi umum perkotaan, perlu dilakukan upaya perbaikan layanan angkutan umum dan juga peningkatan kesadaran masyarakat untuk menggunakan angkutan umum. Sesuai dengan program unggulan Walikota Magelang terpilih, upaya peningkatan pengguna transportasi umum perkotaan direncanakan menggunakan angkutan umum gratis bagi pelajar.

Load Factor angkutan umum tahun 2024 di Kota Magelang mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun 2023. Hal ini dipengaruhi oleh kondisi angkutan umum perkotaan yang belum sepenuhnya ideal. Dari total 134 angkutan yang beroperasi, hanya 37 kendaraan yang usia kendaraan di bawah 15 tahun.

Perkembangan jumlah armada angkutan umum di Kota Magelang ditunjukkan pada tabel berikut ini.

Tabel 2.130 Perkembangan Jumlah Armada Angkutan Umum, 2020-2024

No	Jenis Angkutan Umum	2020	2021	2022	2023	2024
1	Angkutan Kota	335	335 (aktif beroperasi 200 unit)	335 (aktif beroperasi 226 unit, peremajaan 6 unit)	335 (aktif beroperasi 186 unit, peremajaan 54 unit)	134
2	Angkutan Perbatasan	173	173 (aktif beroperasi 104 unit)	173 (aktif beroperasi 79 unit, peremajaan 11)	162 (aktif beroperasi 85 unit)	46
3	Bus AKDP	150	59	115 (aktif beroperasi 65)	35 (aktif beroperasi 15)	35 (aktif beroperasi 15)
4	Bus AKAP	238	358	273 (aktif beroperasi 164)	190	198
5	Taksi	10	13	50 (aktif beroperasi 10)	7	7
6	Bus Wisata	78	78	146	60	66
7	Angkutan Travel	28	28	18 (aktif beroperasi 15)	20	23

Sumber: Dinas Perhubungan Kota Magelang, 2025

Kondisi trayek angkutan kota tahun 2024 sama dengan tahun sebelumnya, yaitu dari 12 trayek angkutan kota eksisting, terdapat satu trayek yang sudah berhenti beroperasi yaitu jalur 11 dan satu trayek yang hanya dilayani oleh 2 unit armada angkutan, yaitu jalur 12. Hal yang sama juga terjadi pada trayek angkutan perbatasan, dari 7 trayek terdapat 1 trayek yang sudah berhenti beroperasi yaitu trayek Magelang-Candimulyo. Hingga akhir tahun 2024, review trayek angkutan umum di Kota Magelang untuk mengoptimalkan layanan transportasi angkutan umum masih belum dilaksanakan. Reviu trayek ini penting dilakukan untuk lebih meningkatkan layanan angkutan umum kota.

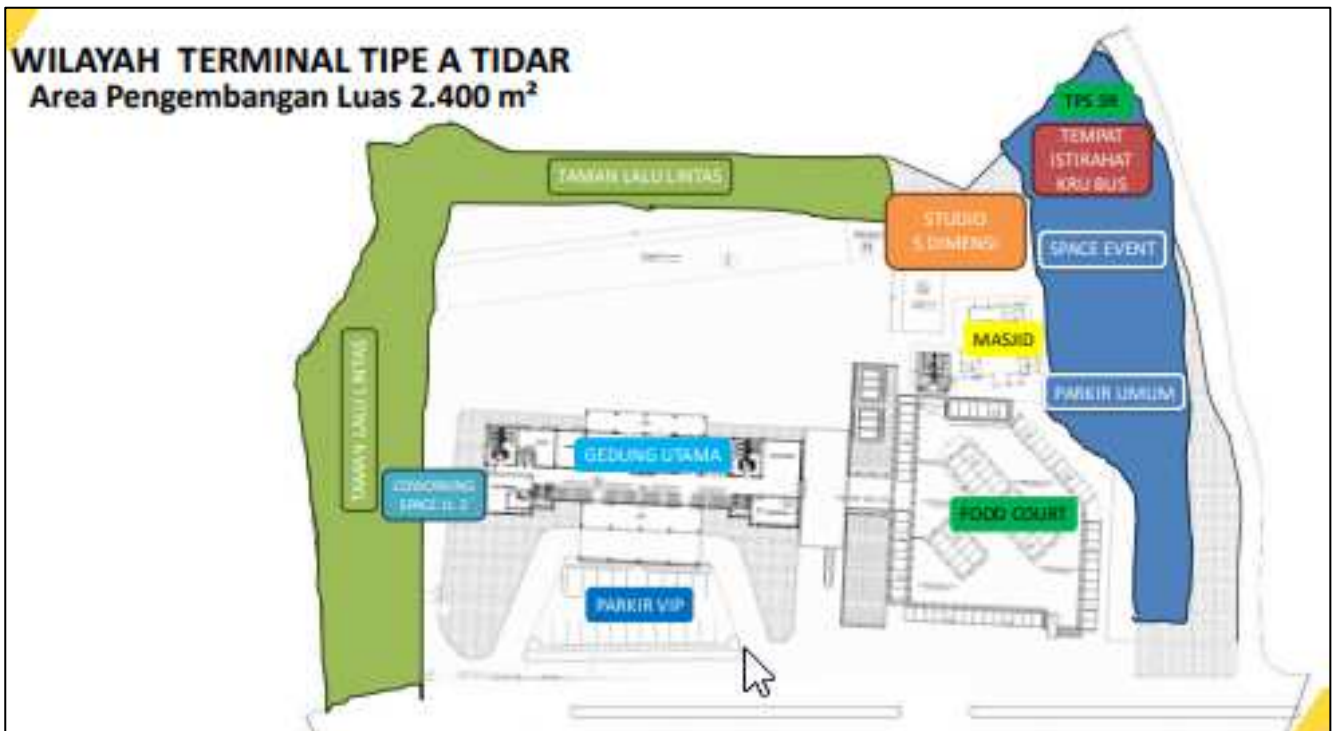
2.1.3.2.9.4 Terminal

Kota Magelang memiliki dua buah terminal, yang terdiri dari satu Terminal Tipe A dan satu Terminal Tipe C. Terminal Tidar merupakan Terminal Tipe A yang terletak di Jl. Soekarno Hatta Kota Magelang dengan luas 22.350 m2. Lokasi Terminal Tipe A Tidar cukup strategis yaitu pada jalur utama Kota Semarang dan Kota Yogyakarta serta berhimpitan dengan lokasi exit tol Yogya Bawen yang akan dibangun. Terminal Tipe A Tidar kedepannya direncanakan bukan hanya sebagai pusat kegiatan transportasi tetapi juga pusat kegiatan ekonomi. Dalam revitalisasi terminal yang sudah dilakukan, terdapat ruang untuk kegiatan massal di lantai II terminal yang dapat dimanfaatkan untuk penyelenggaraan event-event massal. Gambaran kondisi terminal Tipe A Tidar setelah dilakukan revitalisasi ditunjukkan oleh gambar di bawah ini.



Gambar 2.58 *Gambaran Kondisi Terminal Tipe A Tidar setelah Revitalisasi*
Sumber: Dinas Perhubungan Kota Magelang, 2025

Hingga akhir tahun 2024, revitalisasi Terminal Tipe A Tidar masih belum selesai 100%. Pengembangan *mixed use* yang menggabungkan layanan transportasi, pusat perekonomian, pusat kegiatan dan tempat pendidikan keselamatan lalu lintas ditunjukkan melalui denah pengembangan sebagai berikut.



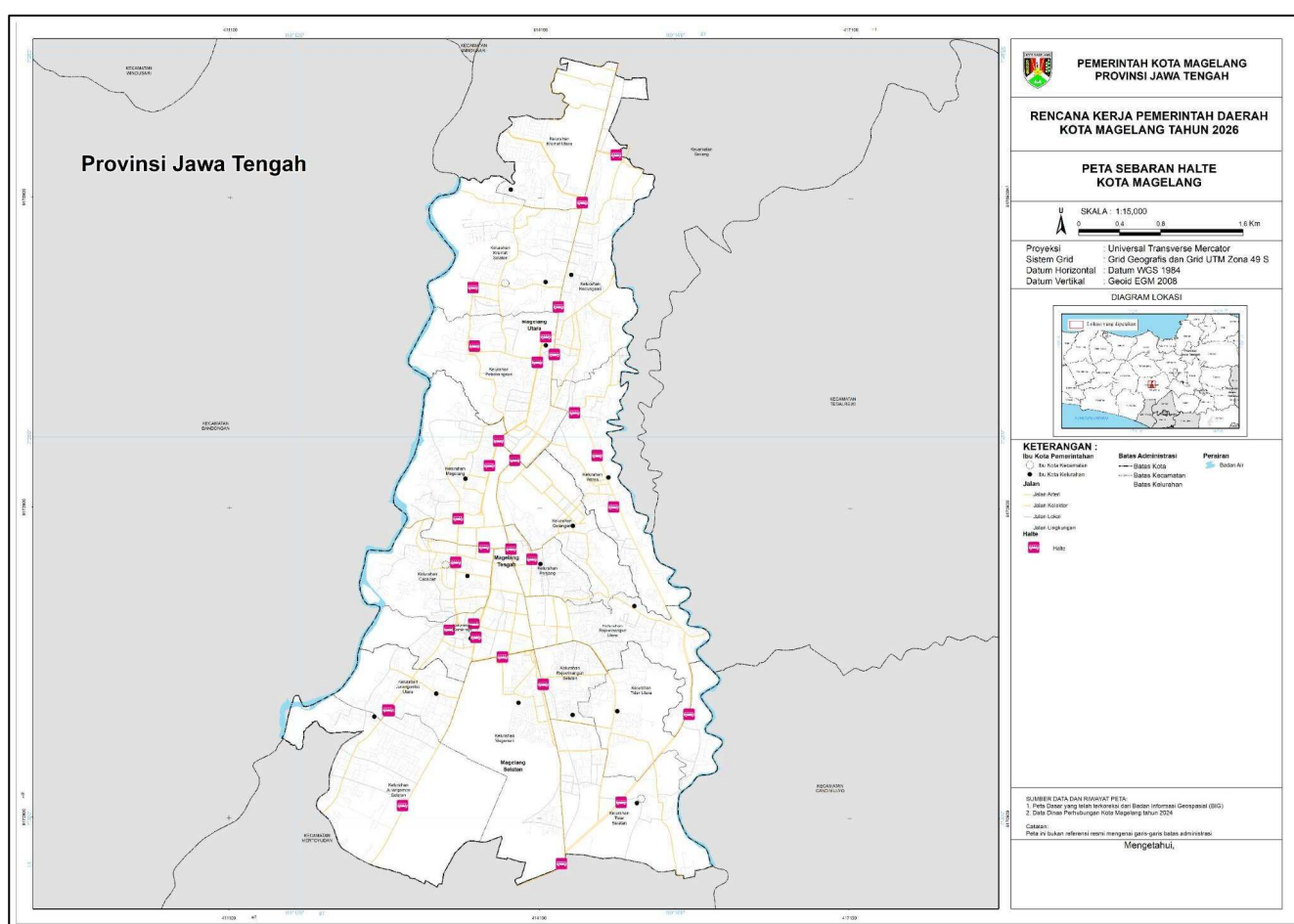
Gambar 2.59 *Denah Rencana Pengembangan Terminal Tipe A Tidar*
Sumber: Dinas Perhubungan Kota Magelang, 2025

Sesuai kewenangannya, terminal yang pengelolaannya dilakukan oleh Pemerintah Kota Magelang adalah Terminal Tipe C Magersari yang terletak di Kawasan Sentra Ekonomi Lembah Tidar. Terminal ini sudah dilengkapi

dengan sarana prasarana sesuai Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 40 tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Penyelenggaraan Terminal Penumpang Angkutan Jalan. Namun demikian perlu peningkatan peran terminal sebagai simpul transportasi Kawasan Sentra Ekonomi Lembah Tidar sebagai satu kesatuan dengan Kawasan Kebun Raya Tidar, Pasar Burung, Pasar Ikan Sasana Mina, dan Pasar Sidomukti.

2.1.3.2.9.5 Halte

Pada tahun 2024, tidak ada penambahan pembangunan halte sehingga jumlahnya masih sama dengan tahun sebelumnya yaitu sebanyak 31 unit. Keseluruhan halte yang tersebar di seluruh wilayah Kota Magelang pada umumnya dalam kondisi baik dengan sebaran sebagaimana gambar di bawah. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa terdapat satu halte yang secara fungsi belum dapat optimal yaitu Halte Barito (Maju, sehat, dan Bahagia) yang terletak di Kawasan Sidotopo Jl. Barito, Kecamatan Magelang Utara. Belum optimalnya halte ini dipengaruhi oleh bangkitan tarikan penumpang yang relatif kecil mengingat belum berkembangnya Kawasan Strategis Sidotopo.



Gambar 2.60 Peta Sebaran Halte Kota Magelang, 2024

Sumber: Dinas Perhubungan Kota Magelang, 2025 (data diolah)

2.1.3.2.9.6 Tingkat Kemacetan

Kepadatan jalan di Kota Magelang pada 2024 sedikit mengalami peningkatan dibanding tahun 2023. Nilai VC ratio tahun 2024 menjadi 0,72 (akhir tahun 2024) dari 0,61 (akhir tahun 2023). Urutan ruas jalan di Kota Magelang dengan kinerja 20 ruas terburuk pada Desember 2024 ditunjukkan tabel berikut ini.

Tabel 2.130 VC Ratio Ruas Jalan Kota Magelang, 2024

No	Ruas jalan	V/C Ratio
1	Jalan Pemuda	0,72
2	Jalan Pahlawan	0,71
3	Jalan Jendral Sudirman	0,7
4	Jalan Ikhlas	0,7
5	Jalan Jend. Achmad Yani	0,7
6	Jalan Pajajaran	0,69
7	Jalan Pangeran Diponegoro	0,63
8	Jalan Kyai Mojo	0,6
9	Jalan Mataram	0,58
10	Jalan Singosari	0,55
11	Jalan Mayjend Sutoyo	0,53
12	Jalan Telaga Warna	0,52
13	Jalan Gatot Subroto	0,51
14	Jalan Daha	0,48
15	Jalan Suprpto	0,42
16	Jalan Tidar	0,35
17	Jalan Sultan Agung	0,33
18	Jl. Kol Sugiono	0,33
19	Jalan Yos Sudarso	0,33
20	Jalan Veteran	0,31

Sumber: Dinas Perhubungan Kota Magelang, 2025 (data diolah)

Faktor utama dalam peningkatan nilai v/c ratio di beberapa ruas jalan dalam Kota Magelang karena adanya kegiatan pembangunan *flyover* Cangkuk sehingga kendaraan banyak yang beralih melalui dalam kota. Dengan selesainya kegiatan pembangunan di akhir 2024, diharapkan kepadatan lalu lintas berangsur kembali normal.

2.1.3.2.9.7 Uji Laik Kendaraan

Pada tahun 2024, Dinas Perhubungan Kota Magelang melakukan pelayanan uji kendaraan bermotor terhadap 4.409 unit kendaraan, menurun dari tahun sebelumnya (melayani 4.805 unit kendaraan). Penurunan ini terjadi karena dengan dihapuskannya retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor Berkala maka pelayanan uji kendaraan bermotor difokuskan pada kendaraan dalam daerah. Unit kendaraan luar daerah yang melakukan numpang uji KIR menjadi berkurang.

2.1.3.2.9.8 Pengelolaan Parkir

Pengelolaan parkir di Kota Magelang pada tahun 2024 meliputi 12 blok parkir dan 280 titik parkir. Pendapatan retribusi parkir Kota Magelang yaitu sebesar Rp1.495.889.000,00 dengan realisasi 100% dari target. Ditetapkannya Perda Kota Magelang Nomor 12 tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah berimplikasi pada mekanisme pengelolaan parkir di Kota Magelang. Diperlukan pedoman pelaksanaan pemungutan retribusi sebagai dasar pemungutan retribusi ke depannya.

2.1.3.2.9.9 Penerangan Jalan Umum

Penerangan jalan umum menjadi salah satu fasilitas kelengkapan jalan untuk mendukung keselamatan berlalu lintas. Jenis dan jumlah lampu penerangan jalan umum Kota Magelang Tahun 2024 ditunjukkan tabel berikut.

Tabel 2.130 Jenis dan Jumlah Lampu Penerangan Jalan Umum (PJU) Kota Magelang, 2024

NO	KELURAHAN	JENIS LAMPU												
		ARMATUR	HPIT	HPS				LED	MERCURY	SL LED	TL	LAMPU HIAS	SOLAR CELL	ABONEMEN
				70	150	250	400							
1	CACABAN	4	2	16	43	69		17	2	13	30			198
2	GELANGAN			82	73	9		74		18	20		4	54
3	JURANGOMBO SELATAN				9	85		60		28	33		2	METERISASI PENETAPAN 2023
4	JURANGOMBO UTARA				13	28		17		10	30			
5	KEDUNGSARI				60	21		82	1	35	45			METERISASI PENETAPAN 2024
6	KEMIRIREJO		2	20	80	89		5	1	26	28		2	69
7	KRAMAT SELATAN			11	22			39		19	30			METERISASI PERUBAHAN 2023
8	KRAMAT UTARA			58	72			93		30	55			
9	MAGELANG		8	3	4	73		58		40	50		10	70
10	MAGERSARI		3	14	36	61		91		31	26		11	114
11	PANJANG				53	15	6	9		31	26		1	38
12	POTROBANGSAN		5		47	55		68		29	50		44	55
13	REJOWINANGUN SELATAN		2		11	33		8		22	50			211
14	REJOWINAGUN UTARA					33	10	13		4	4			
15	TIDAR SELATAN		1			37	28	67		25	10		10	METERISASI PENETAPAN 2023
16	TIDAR UTARA		2			73		5	3	36	46			
17	WATES		4		45	69		11		24	45			METERISASI PENETAPAN 2024
18	PEMKOT							0		0			2	
19	DLH		31	56				734		0		399	57	

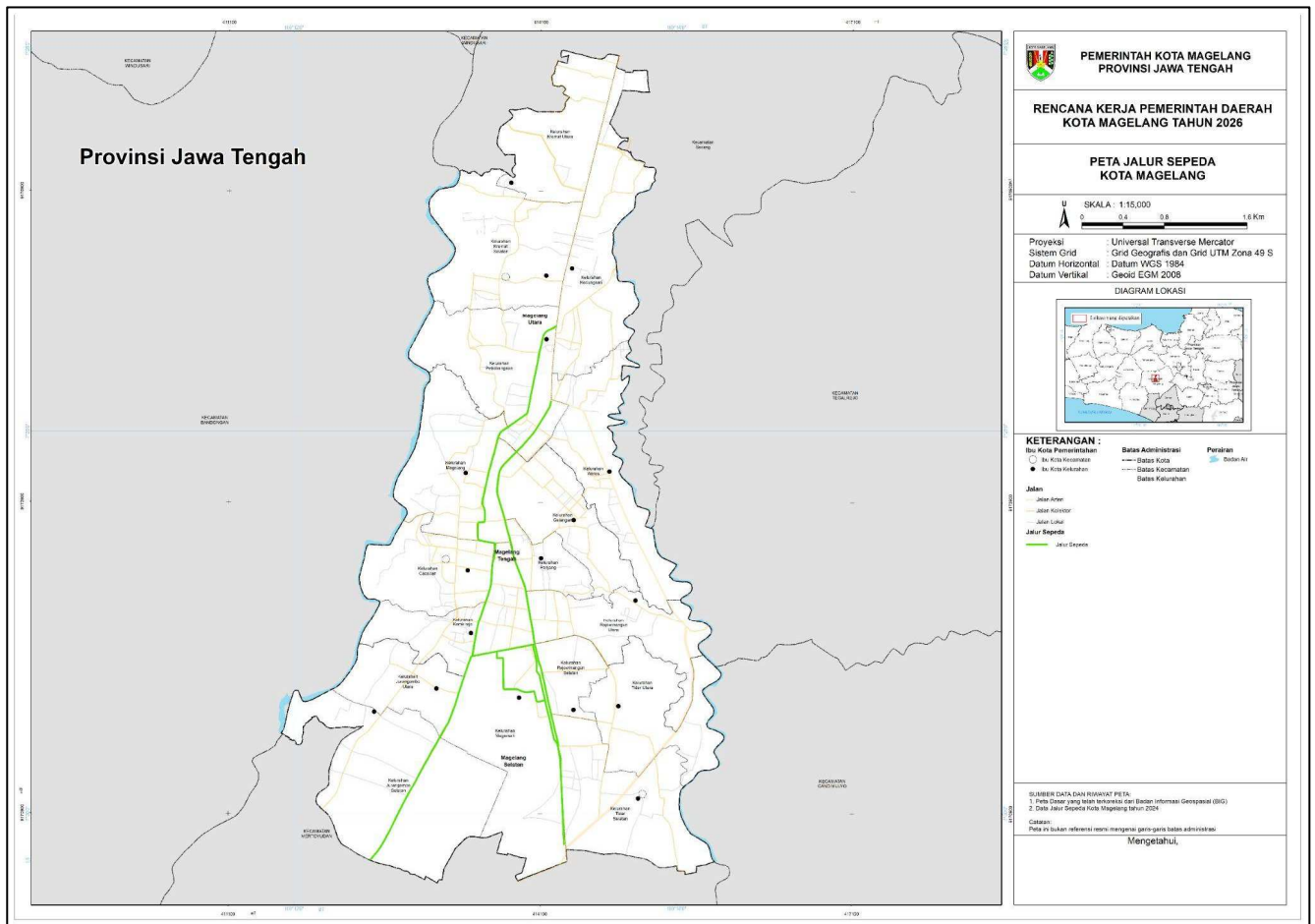
Sumber: Dinas Perhubungan Kota Magelang, Tahun 2024

Salah satu pemanfaatan energi ramah lingkungan dalam pelayanan PJU adalah dengan pemanfaatan *solarcell* yang mayoritas pengadaannya oleh Kementerian ESDM. Pemanfaatan *solarcell* ini belum mengalami penambahan dari tahun sebelumnya dan menjadi tantangan dalam pemeliharaan dan perbaikannya yang membutuhkan biaya yang tinggi. Masih diperlukan sinkronisasi dan kerja sama dengan PLN untuk dapat melaksanakan meterisasi dan pengecekan berkala bersama untuk penggunaan daya listrik.

2.1.3.2.9.10 Jalur Sepeda

Pemanfaatan sepeda sebagai alternatif alat transportasi ramah lingkungan menjadi perhatian penting Pemerintah Kota Magelang. Mengingat keterbatasan lahan di Kota Magelang, Jalur sepeda yang dikembangkan terintegrasi dengan jalan umum yang ada dengan penambahan marka jalur sepeda. Hingga akhir tahun 2024

belum ada penambahan jalur sepeda baru sehingga kondisi sebaran jalur sepedanya masih sama dengan tahun 2023 sebagaimana tergambar dalam peta di bawah ini.



Gambar 2.61 Peta Jalur Sepeda Kota Magelang, 2024

Sumber: Dinas Perhubungan Kota Magelang, 2025 (data diolah)

Fasilitas pendukung bagi pengguna moda transportasi sepeda adalah titik parkir dan titik rambu sebanyak 12 lokasi parkir dan 12 titik rambu. Kondisi marka dan parkir tersebut dapat dilihat pada gambar berikut ini.



Parkir Sepeda di Jl. Pemuda



Marka sepeda Jl. Jend. Gatot Subroto

Gambar 2.62 Kondisi Marka dan Parkir Sepeda Kota Magelang

Sumber: Dinas Perhubungan Kota Magelang, 2024

2.1.3.2.10 Komunikasi dan Informatika

Transformasi digital menjadi perhatian dalam perkembangannya mengingat adanya perkembangan teknologi yang cukup masif seperti perkembangan Artificial Intelligent (AI). Transformasi ini juga diharapkan terjadi dalam pemerintahan. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) menjadi salah satu pengarusutamaan dalam rangka mendukung transformasi ini yang ditandai dengan terbitnya Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

Indeks SPBE menjadi salah satu ukuran yang digunakan untuk mengetahui perkembangan digitalisasi lingkup pemerintah. Nilai Indeks SPBE Kota Magelang selama tahun 2020 sampai dengan 2024 menunjukkan tren peningkatan. Dalam kurun waktu ini terdapat perubahan aturan terkait penilaian Indeks SPBE yaitu pada tahun 2020 mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Kemudian pada tahun 2021 mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, yang mencabut regulasi sebelumnya. Pada tahun 2023 terdapat regulasi tambahan untuk penyempurnaan penilaian Indeks SPBE yaitu Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

Tabel 2.169 Indeks SPBE Kota Magelang, 2020-2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Indeks SPBE	3,21	2,71	2,67	3,36	3,69

Sumber: Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Magelang, 2025

Dukungan dalam peningkatan nilai SPBE ini salah satunya adalah penyesuaian arsitektur SPBE yang berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 132 Tahun 2022 tentang Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Nasional. Tantangan dalam implementasi SPBE ini salah satunya adalah integrasi program/sistem informasi. Sekarang ini banyak sekali aplikasi-aplikasi yang dibuat baik dari Pemerintah Pusat, Provinsi, maupun dari Pemerintah Kota Magelang sendiri. Aplikasi-aplikasi tersebut harus disusun dokumen pendukungnya yang memuat spesifikasi dan detil aplikasi agar nantinya dapat diintegrasikan sesuai dengan arsitektur SPBE yang ada. Selain SPBE, keterbukaan informasi publik menjadi salah satu fasilitas yang harus diberikan pemerintah kepada masyarakat. Adanya keterbukaan informasi ini dapat memberikan gambaran kepada masyarakat terkait program-program pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah. Di Jawa Tengah, keterbukaan informasi publik dilakukan penilaian oleh Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah. Hasil penilaian keterbukaan informasi publik tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 untuk Kota Magelang disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.170 Keterbukaan Informasi Publik, 2020-2024

Uraian		2020	2021	2022	2023	2024
Tingkat Keterbukaan Informasi Publik		92,4	NA	(80-89,9)	95,03	96,73
	Menuju Informatif		NA	Menuju Informatif	Informatif	Informatif

Sumber: Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Magelang, 2025

Tingkat keterbukaan informasi publik Pemerintah Kota Magelang menunjukkan perbaikan dan menunjukkan tren peningkatan. Pada tahun 2022, tingkat keterbukaan informasi publik masih berada pada tingkat menuju informatif. Kemudian pada tahun 2023 dan 2024 sudah berada pada tingkat informatif. Upaya ini didukung dari upaya pendampingan dari Dinas Kominsta kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) untuk penyebaran informasi publik melalui website maupun media sosial OPD.

Berikutnya, ketika melihat digitalisasi di Kota Magelang dalam lingkup yang lebih luas, dari data persentase rumah tangga dengan akses internet dapat dilihat bahwa digitalisasi sudah dirasakan oleh hampir seluruh rumah

tangga di Kota Magelang. Dari tahun 2020—2023, persentase rumah tangga dengan akses internet terus meningkat dan cakupannya pada tahun 2023 telah berada pada angka 96.18%. Tren ini perlu untuk terus ditingkatkan agar seluruh rumah tangga di Kota Magelang memiliki akses terhadap internet. Hal ini menjadi penting mengingat akses terhadap internet memiliki beragam dampak positif yang dapat dirasakan oleh masyarakat, mulai dari peningkatan produktivitas hingga efisiensi waktu. Meskipun di lain sisi, paparan terhadap internet juga memiliki dampak negatif jika pemanfaatannya tidak dilakukan dengan bijaksana. Oleh karena itu, literasi digital serta pemahaman untuk tetap mengedepankan etika dan moral dalam dunia digital juga perlu untuk dikuatkan.

Tabel 2.171 Persentase Rumah Tangga dengan Akses Internet, 2019-2023

Tahun	Persentase Rumah Tangga dengan Akses Internet
2019	-
2020	90,01
2021	91,69
2022	94,53
2023	96,18

Sumber: Susenas, 2024 (diolah)

2.1.3.2.11 Koperasi dan UKM

2.1.3.2.11.1 Koperasi

Jenis koperasi sejak tahun 2022 tidak mengalami perubahan, namun tren dari 2018 hingga tahun 2024 jumlah koperasi mengalami kenaikan. Walaupun secara jumlah koperasi masih sama dengan tahun lalu, namun antusiasme masyarakat untuk mendirikan koperasi tetap ada. Hal ini terbukti bahwa ada beberapa rintisan koperasi yang berproses untuk melengkapi administrasi pendukung agar bisa secara resmi menjadi koperasi, seperti yang dilakukan oleh Koperasi Tidar Mandiri Sejahtera. Berdasarkan jenis koperasi, maka yang paling banyak adalah koperasi konsumen yang aktivitasnya adalah melaksanakan kegiatan bagi anggota dalam rangka penyediaan barang atau jasa yang dibutuhkan anggota.

Tabel 2.172 Jenis Koperasi di Kota Magelang, 2020-2024

Tahun	Koperasi Produsen	Koperasi Konsumen	Koperasi Simpan Pinjam	Koperasi Jasa	Koperasi Pemasaran	Jumlah
2020	14	161	36	2	6	219
2021	14	161	36	2	6	219
2022	18	165	45	4	8	240
2023	18	165	45	4	8	240
2024	18	165	45	4	8	240

Sumber: DPPKUM Kota Magelang, 2025

Pada tahun 2024, jumlah koperasi aktif mengalami penurunan daripada tahun 2023. Penurunan ini dikarena belum semua koperasi melaksanakan Rapat Anggota Tahunan (RAT) selama tiga tahun berturut-turut yang menjadi salah satu kriteria sebuah koperasi dikatakan sebagai koperasi aktif.

Selain menilai keaktifan koperasi, kinerja koperasi juga dilihat dari kualitas koperasi. Penyelenggaraan RAT, volume usaha dan asset koperasi menjadi kriteria penilaian kualitas koperasi. Pada tahun 2024, jumlah koperasi berkualitas ada 92 koperasi atau 38,33% dari jumlah koperasi keseluruhan. Koperasi berkualitas pada tahun 2024 mengalami kenaikan 1,66% daripada tahun 2023.

Tabel 2.173 Perkembangan Keragaman Koperasi di Kota Magelang, 2020-2024

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah Koperasi Aktif	221	209	123	132	129
Jumlah Koperasi Tidak Aktif	16	29	117	108	111
Jumlah Koperasi Berkualitas	78	84	93	88	92
Jumlah Koperasi	237	238	240	240	240
Persentase Koperasi Aktif (%)	93,20	87,82	51,25	55,00	53,65
Persentase Koperasi Berkualitas (%)	32,91	35,29	38,75	36,67	38,33

Sumber: DPPKUM Kota Magelang, 2025

Tren usaha koperasi sejak tahun 2020 naik dari tahun ke tahun. Pada tahun 2023 mengalami kenaikan menjadi Rp. 687 miliar atau naik sebanyak Rp.6,2 miliar dari tahun sebelumnya.

Tabel 2.174 Volume Koperasi di Kota Magelang, 2020-2024

Tahun	Jumlah (Rp)
2020	507.908.615.930
2021	592.988.453.670
2022	615.178.135.332
2023	681.556.026.950
2024	687.706.510.520

Sumber: DPPKUM Kota Magelang, 2025

Tabel 2.175 Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB, 2019-2023

Tahun	Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB
2019	-
2020	-
2021	1,50
2022	1,44
2023	1,25

Sumber: DPPKUM Kota Magelang, 2024

Berkaitan simpan pinjam yang dilaksanakan koperasi, maka terdapat Koperasi Simpan Pinjam (KSP) yang memang hanya memiliki aktivitas simpan pinjam saja dan Unit Simpan Pinjam (UPJ) dimana aktivitas simpan pinjam hanya menjadi salah satu aktivitas yang dilakukan oleh koperasi. Baik KSP maupun USP harus memiliki ijin usaha sebagaimana aturan yang berlaku. Pada tahun 2024 jumlah KSP/USP secara keseluruhan adalah 225 koperasi dan hanya 38,22% saja yang memiliki ijin usaha.

Tabel 2.176 Jumlah KSP/USP yang Memiliki Ijin Usaha, 2020-2024

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah KSP/USP yang Memiliki Ijin Usaha Simpan Pinjam	83	86	86	86	86

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah KSP/USP yang Ada	222	224	225	225	225
Persentase KSP/USP yang Memiliki Izin Usaha Simpan Pinjam	37,39%	38,39%	38,22%	38,22%	38,22%

Sumber: DPPKUM Kota Magelang, 2025

Penilaian yang harus dilakukan juga terhadap koperasi adalah melakukan penilaian koperasi sehat. Hal ini menjadi amanat yang tertuang di Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pengawasan Koperasi. Pada Tahun 2024, jumlah koperasi sehat naik menjadi 25 koperasi.

Tabel 2.177 Jumlah Koperasi Sehat dan Tidak Sehat di Kota Magelang, 2020-2024

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
Koperasi Sehat	55	62	14	23	25
Koperasi Cukup Sehat	4	2	26	25	35
Dalam Pengawasan	-	-	1	0	0
Dalam Pengawasan Khusus	-	-	2	0	0
Jumlah Koperasi yang dinilai	59	64	43	69	97
Jumlah Koperasi yang seharusnya dinilai	195	222	224	225	225
Persentase KSP/ USP Koperasi yang meningkat status kesehatannya	24,77	27,93	6,22	10,22	11,11

Sumber: DPPKUM Kota Magelang, 2025

Jumlah koperasi sehat di Kota Magelang masih sangat kecil dibandingkan jumlah koperasi yang seharusnya dinilai. Aspek laporan keuangan masih menjadi kendala bagi koperasi untuk penyusunannya sehingga menyebabkan masih banyak koperasi belum bisa masuk kategori sehat. Kinerja keuangan pada koperasi tidak lepas dari kemampuan sumber daya manusia yang dimiliki oleh koperasi tersebut. Untuk itu, Pemerintah Kota Magelang mengadakan pelatihan manajemen perkoperasian. Jumlah sumber daya manusia (SDM) koperasi yang telah mengikuti pelatihan adalah 43,70% dari jumlah keseluruhan.

Tabel 2.178 Persentase SDM Pengelola Koperasi yang Meningkatkan Kapasitasnya, 2020-2024

Tahun	Jumlah SDM Pengelola Koperasi yang Mengikuti Pelatihan	Jumlah SDM Pengelola Koperasi	Persentase SDM Pengelola Koperasi yang Meningkatkan Kapasitasnya
2020	48	361	13,30
2021	48	361	13,30
2022	141	361	39,06
2023	220	556	39,57
2024	243	556	43,70

Sumber: DPPKUM Kota Magelang, 2024

2.1.3.2.11.2 Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)

Sebagian besar UMKM merupakan kegiatan usaha rumah tangga yang dapat menyerap banyak tenaga kerja. Aktivitas yang dilakukan oleh UMKM merupakan penyumbang terbesar pada perolehan PDRB Kota Magelang. Pemerintah Kota Magelang berupaya untuk memberikan dukungan untuk pengembangan UMKM dengan menciptakan iklim usaha yang kondusif, penyediaan infrastruktur yang memadai serta kegiatan pendukung

lainnya bagi UMKM. Pada tahun 2023, dilakukan revitalisasi shelter Ngesengan dan baru dilakukan peresmian di tanggal 21 Februari 2024 oleh Walikota Magelang.

Salah satu peran Pemerintah Kota Magelang adalah memfasilitasi kerja sama UMKM. Pada tahun 2024, Pemerintah Kota Magelang melalui IKM Center melakukan kerjasama dengan pusat oleh-oleh Dusun Semilir yang berlokasi di Bawen, Kabupaten Semarang. Kerja sama tersebut diharapkan dapat menjadi pemantik untuk UMKM bersinergi dan bekerjasama melakukan ekspansi ke luar daerah. Untuk bisa berdaya saing di luar daerah, maka diperlukan kreativitas dari pelaku UMKM untuk meningkatkan kualitas produknya. Selain itu kolaborasi dan sinergitas diantara pelaku UMKM dilaksanakan dengan melakukan kerjasama dengan pihak lain seperti UMKM Sehati dengan Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) di Kota Magelang, maupun dengan pasar modern seperti Gardena, transmart Indomart dan Alfamart serta dengan jaringan komunitas yaitu *Sampoerna Retail Community* (SRC).

Pengaruh perkembangan UMKM di Kota Magelang terhadap pertumbuhan ekonomi cukup besar. Perkembangan UMKM diharapkan akan dapat menciptakan lapangan kerja baru, meningkatkan pendapatan masyarakat serta meningkatkan aktivitas ekonomi lokal.

Tabel 2.179 Jumlah UMKM di Kota Magelang, 2018-2024

Tahun	Pelaku UMKM				Pertumbuhan (%)
	Jumlah Pelaku Usaha non PKL dan Pedagang Pasar	Pedagang Pasar	Pedagang Kaki Lima	Total	
2018	NA	NA	NA	NA	NA
2019	NA	NA	NA	NA	NA
2020	8663	1453	613	10.729	NA
2021	9206	1387	560	11.153	3,95
2022	8447	1516	572	10.535	-5,54
2023	8364	1468	709	10.541	0,06
2024	8691	1468	749	10.909	3,49

Sumber: DPPKUM Kota Magelang, 2025

Pada tahun 2024 terjadi peningkatan pertumbuhan UMKM sebesar 3,49% dari tahun 2023. Kenaikan pelaku UMKM ada pada jumlah pelaku usaha bukan PKL dan pedagang pasar.

Jumlah pelaku UMKM secara total mengalami peningkatan pada tahun 2023. Kenaikan jumlah pelaku UMKM sebesar 0,06% daripada tahun 2022. Kenaikan jumlah pelaku usaha berkorelasi positif dengan jumlah omzet yang diperoleh pelaku UMKM di tahun 2024. Namun apabila dilihat dari pertumbuhan omzet, terjadi penurunan sebesar 0,24% dari pertumbuhan omzet tahun sebelumnya

Tabel 2.180 Jumlah Omzet UMKM di Kota Magelang, 2020-2024

Tahun	Jumlah Omzet (Rp)	Pertumbuhan (%)
2020	48.605.018.900	-8.22
2021	54.667.569.800	12.47
2022	65.258.340.950	19,37
2023	67.119.475.422	2,85
2024	68.869.610.565	2,61

Sumber: DPPKUM Kota Magelang, 2025

UMKM sebagai penopang perekonomian melalui kewirausahaan memiliki peran penting dalam menekan angka pengangguran melalui penyediaan lapangan pekerjaan. Pada tahun 2023 terdapat penambahan serapan tenaga kerja UMKM sebesar 42,29% dibandingkan tahun 2022.

Tabel 2.181 Jumlah Pelaku Usaha (selain Pedagang Pasar dan PKL) dan Penyerapan Tenaga Kerja di Kota Magelang, 2019-2024

Kelurahan	Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024	
	Pelaku Usaha	Tenaga Kerja	Pelaku Usaha	Tenaga Kerja	Pelaku Usaha	Tenaga Kerja	Pelaku Usaha	Tenaga Kerja	Pelaku Usaha	Tenaga Kerja	Pelaku Usaha	Tenaga Kerja
Kramat Utara	188	308	255	422	332	504	324	485	351	512	351	512
Kramat Selatan	295	660	331	554	395	600	429	662	433	692	478	746
Kedungsari	355	536	365	529	352	492	458	760	463	765	471	774
Potrobangsari	359	728	538	921	487	814	438	705	445	720	468	743
Wates	308	486	444	551	485	625	465	673	430	628	447	648
Cacaban	616	1,022	677	1,074	566	882	568	855	568	819	586	847
Gelangan	404	562	570	754	568	760	506	613	512	615	529	632
Magelang	329	531	434	664	529	753	509	717	509	728	532	763
Kemirirejo	218	363	272	434	351	509	322	470	289	438	307	466
Panjang	512	805	556	847	570	749	518	630	502	622	521	641
Rejowinangun Utara	668	979	804	1,017	850	1,214	779	1,093	773	1097	774	1.090
Rejowinangun Selatan	568	835	739	1,07	787	1,117	686	910	660	861	675	881
Magersari	567	860	733	1,076	899	1,1	684	861	688	859	702	871
Jurangombo Utara	227	442	280	522	399	600	301	460	299	467	343	516
Jurangombo Selatan	333	678	377	705	406	647	413	685	421	683	455	718
Tidar Utara	356	666	892	1,332	758	1,002	710	928	696	916	703	925
Tidar Selatan	334	820	396	923	472	635	337	615	325	598	349	635
Jumlah	6.637	11.281	8.663	13.395	9.206	13.003	8.447	12.122	8.364	12.020	8.691	12.408

Sumber: DPPKUM Kota Magelang, 2025

Permodalan menjadi salah satu kendala bagi pelaku UMKM. Sehingga salah satu solusi yang dimunculkan adalah melalui layanan perbankan. Pelaku UMKM mendapatkan akses perbankan meningkat dari tahun ke tahun meskipun belum mencakup seluruh pelaku usaha.

Tabel 2.182 Kelompok Usaha Mikro (KUM) yang Mendapat akses Layanan Perbankan, 2020-2024

Tahun	Jumlah KUM yang Menerima Akses Permodalan	Jumlah Pelaku Usaha Non Pedagang Pasar dan PKL	Persentase KUM yang Mendapat Akses Layanan Perbankan
2020	4.757	8.663	54,91%
2021	4.785	9.206	51,98%
2022	7.185	8447	68,20%
2023	3070	8364	36,71%
2024	3097	8691	35,63%

Sumber: DPPKUM Kota Magelang, 2025

2.1.3.2.12 Penanaman Modal

Peningkatan investasi diyakini ikut andil dalam mendorong pembangunan ekonomi suatu daerah. Dalam ekonomi makro, investasi juga berperan sebagai salah satu komponen dari Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Nilai investasi Kota Magelang di tahun 2024 sebesar 16,05%. Sumbangsih terbesar adalah investasi yang bersumber dari Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN).

Nilai investasi menjadi cerminan terkait Nilai investasi di Kota Magelang mengalami kenaikan sebesar 16,05%. Sumbangan kenaikan yang terbesar adalah dari investasi penanaman modal dalam negeri (PMDN). Pada tahun 2024, terdapat 3.216 investor baru. Sedangkan apabila dilihat dari nilai investasi PMDN, maka terdapat kenaikan sebesar 1,1 milyar rupiah. Hal itu dapat dilihat pada tabel dibawah:

Tabel 2.183 Realisasi Investasi di Kota Magelang, 2020-2024

Klasifikasi Investasi	Realisasi Investasi				
	2020	2021	2022	2023	2024
Nilai PMA	233.624.000.000	243.776.000	120.125.000.000	117.725.000.000	117.725.000.000
Nilai PMDN	1.917.438.000.000	2.488.103.000.000	3.260.712.000.000	4.218.360.000.000	5.329.710.681.513
Jumlah Investor Baru	226	872	530	3.507	3.216

Sumber: DPMPTSP Kota Magelang, 2025

Sedangkan nilai Penanaman Modal Asing (PMA) mengalami stagnasi. Potensi Kota Magelang yang terbatas sangat mempengaruhi minat investor asing untuk melakukan PMA di Kota Magelang. Selain itu juga struktur ekonomi yang didominasi oleh ekonomi menengah bawah menyebabkan daya beli masyarakat belum tinggi sehingga mempengaruhi minat PMA untuk berinvestasi di Kota Magelang.

Tabel 2.184 Realisasi Kegiatan PMDN dan PMA Kota Magelang, 2024

No	Bulan	Realisasi Kegiatan			
		Investor Baru	PMDN		PMA
			Lokal	Nasional	
1	Januari	340	340	0	0
2	Februari	246	246	0	0
3	Maret	216	216	0	0
4	April	364	364	0	0
5	Mei	214	214	0	0
6	Juni	215	215	0	0
7	Juli	344	342	2	0
8	Agustus	238	237	1	0
9	September	197	196	1	0
10	Oktober	244	244	0	0
11	November	434	434	0	0
12	Desember	164	163	1	0
	Jumlah	3.216	3.211	5	0

Pada tahun 2023 terdapat 11 investor baru dari PMDN yang terdiri dari 3.211 (tiga ribu dua ratus sebelas) investor lokal dan 5 (lima) investor nasional.

Tabel 2.185 Investor Baru Skala Usaha Besar di Kota Magelang, 2024

No	PMDN Nasional	Jenis	Skala Usaha	Jenis Resiko	Alamat	Uraian KBLI
1	INDOMARCO ADI PRIMA	PMDN / PT	Nasional	Rendah	Jl. Jend. Sudirman No. 74 RT. 01/RW. 11	Perdagangan Besar Bahan Makanan Dan Minuman Hasil Pertanian Lainnya
2	ZAP CLINIC INDONESIA	PMDN / PT	Nasional	Menengah Tinggi	Jl. Tentara Pelajar No. 54	Aktivitas Klinik Swasta
3	SOLU SINDO KREASI PRATAMA	PMDN / PT	Nasional	Menengah Tinggi	Kp. Kiringan RT. 02 RW. 02	Konstruksi Sentral Telekomunikasi
4	DIANLESTARI PERDANA	PMDN / PT	Nasional	Menengah Rendah	Jalan Beringin VII	Real Estat Yang Dimiliki Sendiri Atau Disewa
5	PERUSAHAAN DAGANG DAN INDUSTRI PANAMAS	PMDN / PT	Nasional	Rendah	Jl. Soekarno Hatta No. 12	Pergudangan dan Penyimpanan
6	MAGELANG MERTOYUDAN SENTOSA	PMDN / PT	Lokal	Rendah	JL. JEND. SUDIRMAN NO. 74, RT 001/RW 011	Perdagangan Besar Berbagai Macam Barang
7	MAGELANG SELATAN MAKMUR	PMDN / PT	Lokal	Rendah	JL. SUKARNO HATTA NO.27 TIDAR, MAGELANG SELATAN, MAGELANG 56125	Perdagangan Besar Berbagai Macam Barang
8	TRIO INVESTAMA PRIMA	PMDN / PT	Lokal	Menengah Rendah	Jl. Kartini No. 2 Kota Magelang	Gudang PT TRIO INVESTAMA PRIMA

Sumber: DPMPTSP Kota Magelang, 2024

Dalam rangka promosi investasi, Pemerintah Kota Magelang menindaklanjuti *Letter of Intent* (LoI) yang telah diajukan oleh investor sebagai tanda kepeminatan investor untuk berinvestasi di Kota Magelang. Pada tahun 2024, terdapat 11 (sebelas) LoI yang diajukan oleh investor dan seluruh ajuan tersebut telah ditindaklanjuti sehingga kinerjanya mencapai 100%.

Tabel 2.186 Letter of Intent yang Ditindaklanjuti, 2024

NO	PEMILIK	BIDANG USAHA	URAIAN KBLI	NILAI INVESTASI	ALAMAT
1	Aziz Khariri	Marwa Valley	Property	800.000.000	Puri Tirta Mas No. 45 RT 07 RW 02 Kramat Selatan, Magelang Utara, Kota Magelang
2	Danish Suleman	Atoll Bay Partners	Health Care	-	Kota Magelang
3	Priyo Trimanto	PT Trijaya Artha Mitra	Perdagangan Sigaret Kretek Tangan	250.000.000	Jl. Soekarno Hatta

NO	PEMILIK	BIDANG USAHA	URAIAN KBLI	NILAI INVESTASI	ALAMAT
4	dr. Doddy Sutanto, SpOG (K) FER	RSIA Gladiool	Pelayanan Kesehatan	5.000.000.000	JL. Kenangan No 2-6 Kemirirejo, Magelang Tengah, Kota Magelang
5	Ratna Silvia	Kanay Food N Drink	Snack	50.000.000	Kota Magelang
6	Reni Purnama Sari	Hotel Ardiva	Perhotelan	5.000.000.000	Jl. daha
7	Maman Setiman	Rumah Kos Bu Ning	Akomodasi	900.000.000	sanden
8	Henoch Sugeng D	Hotways	Restorant	1.000.000.000	Jl. Pahlawan
9	Joko Budi Santoso	PT. Mitra Migas Sejati	Perdagangan BBM dan Gas	554.000.000	Jl. Senopati No 38 Kota Magelang
10	Tonny Purnama Sidi	Tonny Purnama Sidi	Property	4.000.000.000	Jl. Button rt 02 rw 07
11	Vicki Riana S	Karya jaya	Perdagangan Kayu	500.000.000	Jl jendral sudirman 151

Sumber: DPMPTSP Kota Magelang, 2025

2.1.3.2.12.1 Investasi

Dalam rangka mendukung peningkatan investasi di Kota Magelang, Pemerintah Kota Magelang telah membuat beberapa kajian baik bersifat Kawasan maupun sektoral. Penyusunan kajian disusun dalam rangka untuk mendukung pembangunan kawasan strategis yang telah ditetapkan di dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Magelang yang meliputi:

1. Kawasan strategis kota dengan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup adalah Kawasan Gunung Tidar.
2. Kawasan strategis kota dengan fungsi pertumbuhan ekonomi, yaitu Kawasan Gelanggang Olah Raga (GOR) Samapta; Kawasan Kebonpolo; Kawasan Soekarno Hatta; Kawasan Kyai Langgeng; Kawasan Sentra Perekonomian Lembah Tidar; Kawasan sekitar Alun-Alun dan Kawasan Sidotopo.
3. Kawasan strategis kota dengan fungsi sosial dan budaya yaitu Kawasan Petilasan Mantyasih.

Sedangkan potensi investasi di Kota Magelang berdasarkan sinkronisasi antara dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan RPJMD Kota Magelang Tahun 2005-2025 adalah:

1. Kawasan Sport Center Gelora Sanden
2. Kawasan Kebonpolo
3. Kawasan Soekarno Hatta
4. Kawasan Taman Kyai Langgeng
5. Kawasan Sentra Perekonomian Lembah Tidar
6. Kawasan Alun-Alun
7. Kawasan Sidotopo

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Magelang berkewajiban menyediakan informasi potensi investasi. Guna memenuhi kebutuhan tersebut, maka pada tahun 2023 disusun kajian Pemetaan Potensi Investasi Kecamatan Magelang Tengah dan pada tahun 2024 disusun kajian Pemetaan Potensi Investasi Kecamatan Utara. Hasil kajian ini dimaksudkan untuk mengidentifikasi potensi investasi secara lebih detail di Kecamatan Magelang Tengah guna menarik investor untuk berinvestasi. Berdasarkan kajian

Pemetaan Investasi Kecamatan Magelang Tengah, kawasan strategis khusus Kecamatan Magelang Tengah meliputi:

1. Kawasan Alun-alun
2. Kawasan Pecinan
3. Kawasan Wisata Taman Kyai Langgeng Ecopark
4. Kawasan Eks Karisidenan Kedu
5. Kawasan Budaya Mantyasih
6. Koridor Jalan lainnya

Berdasarkan kajian Pemetaan Investasi Kecamatan Magelang Utara, kawasan strategis khusus Kecamatan Magelang Tengah meliputi:

1. Koridor Perdagangan Jalan Pahlwan
2. Koridor Perdagangan Jalan A Yani Menowo
3. Koridor Perdagangan Jalan Urip Sumoharjo
4. Kawasan Sidotopo
5. Kawasan Pendidikan Tuguran
6. Kawasan Perdagangan Kebonpolo
7. Kawasan Olahraga GOR
8. Kawasan Perdagangan Armada Estate

Adapun potensi investasi yang dikhususkan untuk pengembangan perdagangan dan perumahan per kelurahan di Kota Magelang dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.187 Potensi Lahan Pengembangan untuk Perdagangan dan Perumahan di Kota Magelang, 2024

No	Kelurahan	Potensi Lahan Pengembangan Untuk Perdagangan (Ha)	Potensi Lahan Pengembangan Untuk Perumahan (Ha)
1	Cacaban	8,05	0,31
2	Gelangan	0	3,05
3	Jurangombo Selatan	5,54	9,68
4	Jurangombo Utara	1,47	6,90
5	Kedungsari	5,58	20,32
6	Kemirirejo	2,62	0
7	Kramat Selatan	0,13	18,13
8	Kramat Utara	3,54	10,13
9	Magelang	5,00	1,17
10	Magersari	1,91	10,86
11	Panjang	4,17	0
12	Potrobangsari	3,97	15,53
13	Rejowinangun Selatan	0,80	0
14	Rejowinangun Utara	10,82	0
15	Tidar Selatan	47,40	24,97
16	Tidar Utara	23,40	5,90
17	Wates	6,90	6,87

No	Kelurahan	Potensi Lahan Pengembangan Untuk Perdagangan (Ha)	Potensi Lahan Pengembangan Untuk Perumahan (Ha)
	Luas total potensi lahan	131,28	133,82

Sumber: DPMPTSP Kota Magelang, 2025

Dalam rangka mengoptimalkan potensi investasi di Kota Magelang, maka DPMPTSP melaksanakan kegiatan promosi baik secara langsung ke masyarakat maupun dengan memanfaatkan media baik online maupun offline. Kegiatan promosi secara langsung dilakukan melalui keikutsertaan dalam pameran potensi investasi di Kota Malang dan melalui even bussines yaitu *Magelang Investment Bussiness Forum* (Massif) yang diadakan di Hotel Atria. Kegiatan promosi di Kota Malang membawa hasil 1 (satu) Lol di bidang makanan dan minuman.

Penyebaran informasi yang paling efektif adalah melalui media digital. Media yang paling sering diakses oleh masyarakat adalah website dengan mencapai 47.163 pengakses atau mengalami kenaikan 4 kali lipat dari tahun 2023. Optimalisasi media promosi investasi online dan offline DPMPTSP dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.188 Optimalisasi Media Promosi Investasi Kota Magelang, 2022-2024

No	Jenis Kanal	Jumlah		
		2022	2023	2024
1	Website	5.990	11.261	47.163
2	Instagram	553	806	910
3	Twitter	122	40	91
4	Youtube	9.052	5.154	7.003
5	Facebook	731	1.113	1.736
	Total Media Sosial	24.769	22.415	56.903
6	Sicantik	2.677	2.779	2.080
7	Permintaan Data	7	62	37
8	Bintek	70	22	17
	Total	19.202	21.237	59.037

Sumber: DPMPTSP Kota Magelang, 2025

2.1.3.2.12.2 Pelayanan Perizinan

DPMPTSP sebagai OPD pengampu Mall Pelayanan Publik, menetapkan standar lama perijinan berbeda-beda untuk setiap jenis perizinannya. Namun apabila diperhitungkan rata-rata daria sebagai standar dalam pemberian pelayanan perizinan. Namun masih ada beberapa perizinan yang melebihi SOP pemberian perizinan dikarenakan beberapa hal teknis. Pada tahun 2024, permohonan perizinan di dominasi oleh izin periklanan dan izin penelitian.

Tabel 2.189 Rekapitulasi Permohonan Perizinan yang Melebihi SOP, 2024

No	Bulan	Jenis Perizinan yang Melebihi SOP								Jumlah
		SIMPEL	Izin Perpanjangan Op PAUD	Suket Penelitian	Suket Magang	SIP dr Hewan	SPPL	Perawat	Apoteker	
1	Januari									0
2	Februari									0

No	Bulan	Jenis Perizinan yang Melebihi SOP								Jumlah
		SIMPEL	Izin Perpanjangan Op PAUD	Suket Penelitian	Suket Magang	SIP dr Hewan	SPPL	Perawat	Apoteker	
3	Maret	1								1
4	April	4			1					5
5	Mei									0
6	Juni									0
7	Juli			1						1
8	Agustus	15			1					16
9	September			2					1	3
10	Oktober			1	1	1	1			4
11	November				6					6
12	Desember		4	1						5
	Jumlah	20	4	5	9	1	1	0	1	41

Sumber: DPMPTSP Kota Magelang, 2025

Pemerintah Kota Magelang berupaya untuk memberikan layanan perizinan dan non perizinan yang terbaik untuk masyarakat. Pelayan yang baik tersebut telah mengantongi beberapa penghargaan di tahun 2023 dan 2024.

Tabel 2.190 Penghargaan Pelayanan Publik yang Diperoleh Kota Magelang, 2023-2024

No	Tahun	Jenis Penghargaan	Keterangan
1	2023	Piagam Penghargaan Penilaian Ombudsman	Pemerintah Kota Magelang berupaya untuk memberikan layanan perizinan dan non perizinan yang terbaik untuk masyarakat. Hasil Penilaian Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Tahun 2023, Kota Magelang menduduki peringkat I nasional dengan perolehan nilai 98,17 untuk kategori Pemerintah Kota. Penilaian tersebut dilakukan oleh Ombudsman RI terhadap 6 lokus OPD di Kota Magelang, yakni Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil), Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), Dinas Sosial (Dinsos), Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud), Puskesmas Jurangombo dan Puskesmas Kerkopan. DPMPTSP sendiri memperoleh nilai 98,03
2	2024	Piagam Penghargaan Penilaian Ombudsman	Pemerintah Kota Magelang berupaya untuk memberikan layanan perizinan dan non perizinan yang terbaik untuk masyarakat. Hasil Penilaian Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Tahun 2024, Kota Magelang menduduki peringkat I nasional dengan perolehan nilai 99,61 untuk kategori Pemerintah Kota. Penilaian tersebut dilakukan oleh Ombudsman RI terhadap 6 lokus OPD di Kota Magelang, yakni Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil), Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), Dinas Sosial (Dinsos), Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud), Puskesmas Magelang Utara dan Puskesmas Magelang Selatan. DPMPTSP sendiri memperoleh nilai 99,65
3	2024	Piagam Penghargaan Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK)	DPMPTSP Kota Magelang berusaha meningkatkan pembangunan Zona Integritas dan Reformasi Birokrasi supaya dapat menjadi unit kerja percontohan pelayanan Publik dan Pencegahan Korupsi, dan melalui penilaian dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, DPMPTSP Kota Magelang ditetapkan sebagai unit kerja berpredikat Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi Tahun 2024.
4	2024	Juara V Kompetisi Inovasi Daerah Kota Magelang (IDAMAN) Tahun 2024	Dalam menunjang pelayanan terhadap investor di Kota Magelang, maka DPMPTSP berupaya untuk melakukan inovasi dengan membangun Sistem Informasi Potensi Investasi (SIPOINT) yang dapat diakses oleh seluruh masyarakat untuk melihat potensi investasi yang ada di Kota Magelang. Aplikasi SIPOINT mendapatkan penghargaan Juara V dalam Kompetisi Inovasi Daerah Kota Magelang Tahun 2024.
5	2024	Piagam Penghargaan sebagai Penyusun Memo Info Peluang Investasi Daerah Berbasis Spasial Tahun 2024 dai Kementrian Investasi (BKPM)	Pemerintah Daerah Khususnya DPMPTSP telah mengikuti ajang Investment Callage (IC) yang diadakan oleh Propinsi Jawa tengah bekerjasama dg Bank Indonesia, dimana pada tahun 2024 DPMPTSP mendapatkan penghargaan sebagai juara ke II Penyusun Memo Info Peluang Usaha investasi Daerah dengan Judul Transformasi TKL Ekopark Kota Magelang, dimana OPD penyusun terdiri dari : DPMPTSP Kota Magelang, Baperida Kota Magelang dan TKL Ekopark.

2.1.3.2.13 Kepemudaan dan Olahraga

2.1.3.2.13.1 Kepemudaan

2.1.3.2.13.1.1 Organisasi Kepemudaan yang Dikembangkan

Tabel 2.191 Pengembangan Organisasi Pemuda Kota Magelang, 2020-2024

INDIKATOR	2020	2021	2022	2022	2024
Jumlah organisasi kepemudaan yang dikembangkan	43	43	47	40	21
Jumlah organisasi kepemudaan	44	44	63	47	31
Persentase organisasi kepemudaan yang dikembangkan	NA	NA	74,60	85,11	67,74

Sumber: Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata Kota Magelang, 2025

Pada tahun 2024 jumlah organisasi kepemudaan mengalami penurunan begitu juga dengan jumlah organisasi kepemudaan yang dikembangkan. Penurunan jumlah organisasi kepemudaan tersebut terjadi karena adanya perubahan metodologi perhitungan dari tahun sebelumnya. Dilihat dari persentasenya, maka capaian pada tahun 2024 dengan 67,74% mengalami penurunan dari tahun sebelumnya yang berada di angka 85,11%.

2.1.3.2.13.1.2 Pemuda yang Dibina

Tabel 2.192 Pembinaan Organisasi Pemuda Kota Magelang, 2020-2024

INDIKATOR	2020	2021	2022	2022	2024
Jumlah pemuda yang dibina tahun N	NA	NA	350	454	505
Jumlah pemuda yang dibina tahun N-1	NA	NA	65	350	454
Prosentase peningkatan pemuda yang dibina	NA	NA	438,46	29,71	11,23

Sumber: Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata Kota Magelang, 2025

Pemuda yang dibina pada tahun 2024 berjumlah 505 orang atau mengalami peningkatan 11,23% dibandingkan tahun sebelumnya. Pembinaan pemuda tersebut dilakukan melalui kegiatan pelatihan wirausaha muda, pemuda kader, dan pemuda pelopor.

2.1.3.2.13.1.3 Organisasi Kepramukaan yang Dibina

Tabel 2.193 Pembinaan Organisasi Kepramukaan Kota Magelang, 2019-2023

INDIKATOR	2020	2021	2022	2022	2024
Jumlah organisasi kepramukaan yang dibina tahun N	35	35	35	36	36
Jumlah total organisasi kepramukaan tahun N	35	35	35	36	36
Prosentase organisasi kepramukaan yang dibina	100	100	100	100	100

Sumber: Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata Kota Magelang, 2024

Organisasi kepramukaan di Kota Magelang pada tahu 2024 tidak mengalami perubahan secara total dari tahun sebelumnya yang berjumlah 36 (tiga puluh enam). Seluruh organisasi tersebut dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir telah dibina seluruhnya.

2.1.3.2.13.2 Olahraga

Beberapa yang dapat menggambarkan kondisi keolahragaan di Kota Magelang yaitu ketersediaan sarana olahraga dan jumlah klub olahraga. Berdasarkan data Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata Kota Magelang,

pada tahun 2023 terdapat 35 (tiga puluh lima) cabang olahraga dengan total 187 cabang olahraga yang aktif kepengurusannya. Adapun cabang olahraga unggulan yang ada di Kota Magelang meliputi yudo, tarung derajat, taekwondo, renang, panahan, sepakbola, dan tenis. Kondisi keolahragaan tersebut didukung oleh ketersediaan fasilitas olahraga berupa lapangan olahraga sejumlah 122 lapangan olahraa (lapangan bola voli/basket/tenis/futsal/sepak bola/bulu tangkis), 5 (lima) unit gedung olahraga, 4 (empat) unit kolam renang umum, dan 10 (sepuluh) sasana bela diri.

Di lain sisi, Kota Magelang masih memerlukan upaya untuk membudayakan olahraga pada level masyarakat maupun individu untuk mendukung perwujudan gaya hidup sehat. Oleh karena itu, diperlukan pengembangan budaya olahraga melalui peningkatan peran serta keluarga, masyarakat dan institusi pendidikan. Beberapa kegiatan yang dapat dilakukan yaitu pemassalan olahraga rekreasi, olahraga pendidikan di sekolah, serta pembinaan olahraga melalui klub-klub dan komunitas olahraga.

Tabel 2.194 Cabang Olahraga yang Aktif Kepengurusannya di Kota Magelang, 2023

NO	CABANG OLAH RAGA	JUMLAH CLUB	STATUS	NO	CABANG OLAH RAGA	JUMLAH CLUB	STATUS
1.	Sepak Bola dan Futsal	5		23.	Sepak Takraw	2	
2.	Bulu Tangkis	20		24.	Tenis Lapangan	11	
3.	Panahan	1		25.	Gulat	2	
4.	Panjat Tebing	4		26.	Golf	3	
5.	Bola Basket	16		27.	Balap Motor	1	
6.	Angkat Berat	2		28.	Catur	2	
7.	Tarung Derajat	1	***	29.	Kempo	3	
8.	Tenis Meja	2		30.	Karate	5	
9.	Tinju	2		31.	Menembak	1	
10.	Wushu	1		32.	Billyard	1	
11.	Bridge	2	**	33.	Pencak Silat	13	
12.	Dansa	5		34.	Balap Sepeda	2	
13.	Tae Kwon Do	10		35.	Renang	4	
14.	Atletik	2		36.	Bola Volly	3	
15.	Arung Jeram	1	*	37.	Senam	32	
16.	Judo	1	*	38.	Selam	1	
17.	Barongsai	20		39.	Paralayang	1	
18.	Sepatu Roda	1		40.	E-Sport		
19.	Petanque			41.	Ju-Jitsu		
20.	Kick Boxing			42.	Bola Voli		
21.	Sambo			43.	Tarung Bebas Indonesia		
22.	Yongmoodo		**				
				J U M L A H		187	

Sumber: Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata Kota Magelang, 2024

Keterangan :

	SK Aktif
*	SK hampir habis masa jabatannya
**	SK sudah habis
***	Sudah melaksanakan Muscab

Tabel 2.195 Sarana dan Prasarana Olahraga yang Ada di Kota Magelang, 2020-2024

NO	PRASARANA	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Lapangan Bola Voli	79	28	29	34	34
2.	Lapangan Basket	25	30	30	30	30
3.	Lapangan Tenis	12	9	9	10	10
4.	Lapangan Futsal	8	4	5	6	6
5.	Stadion/Lapangan Sepak Bola	5	10	10	10	10
6.	Lapangan Bulu Tangkis	37	33	33	32	32
7.	Gedung Olah Raga	5	5	5	5	5
8.	Kolam Renang (Umum, fasilitas Hotel tidak termasuk)	4	5	5	4	4
9.	Sasana Bela Diri	44	9	9	10	10
	J U M L A H	219	133	135	141	141

Sumber: Data Go Kota Magelang, 2025

2.1.3.2.13.2.1 Prestasi di Bidang Olahraga

Tabel 2.196 Prestasi Olahraga Kota Magelang, 2020-2024

INDIKATOR	2020	2021	2022	2022	2024
Jumlah prestasi di bidang olahraga tahun N	4	91	124	169	235
Jumlah prestasi di bidang olah raga tahun N-1	50	4	91	124	169
Persentase peningkatan prestasi di bidang olah raga	-92,00	2175,00	36,26	36,29	39,05

Sumber: Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata Kota Magelang, 2025

Prestasi bidang olahraga menunjukkan tren positif selama 3 (tiga) tahun terakhir. Pada tahun 2024 jumlah prestasi olahraga sejumlah 235 atau meningkat sebesar 39,05% dari tahun sebelumnya. Jumlah prestasi tersebut berasal dari kejuaraan tingkat internasional (10 kejuaraan), kejuaraan tingkat nasional (8 kejuaraan), dan kejuaraan tingkat provinsi (151 kejuaraan). Peningkatan prestasi tersebut seiring dengan maraknya *event* olahraga pada tahun 2024, seperti Pekan Olahraga Provinsi dan Festival Olahraga Rekreasi Nasional.

Selain itu, pada tahun 2024 juga terdapat prestasi olahraga disabilitas yang berasal dari *event* Pekan Paralimpik Pelajar Daerah (Peparpeda) Tingkat Provinsi Jawa Tengah. Dari *event* tersebut Kota Magelang mendapatkan 5 (lima) kejuaraan dari cabang olahraga bulutangkis, tenis meja, renang, dan atletik. Di tahun 2024 juga atlet disabilitas berprestasi di ajang Pekan Paralimpiade Nasional Tahun 2024 sebanyak 1 (satu) orang, meraih juara 2 pada cabang olah raga Para Atletik Lempar Cakran F55.

2.1.3.2.13.2.2 Atlit yang Dibina

Tabel 2.197 Pembinaan Atlit Kota Magelang, 2020-2024

INDIKATOR	2020	2021	2022	2022	2024
Jumlah atlit yang dibina tahun N	NA	66	74	364	414
Jumlah jumlah atlit yang dibina tahun N-1	NA	NA	66	74	364
Persentase peningkatan atlit yang dibina	NA	NA	12,12	391,89	13,74

Sumber: Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata Kota Magelang, 2025

Terdapat 414 jumlah atlit yang dibina pada tahun 2024. Jumlah tersebut meningkat signifikan dibandingkan tahun 2023 dimana terdapat 364 atlet yang dibina. Peningkatan atlit yang dibina tersebut seiring dengan bertambahnya event olahraga yang diikuti. Pada tahun 2024 setidaknya terdapat 2 (dua) kegiatan yaitu Pekan Olahraga Provinsi dan Festival Olahraga Rekreasi Nasional. Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) yang dilaksanakan 4 (empat) tahun sekali jatuh pada tahun 2023, begitu juga dengan Festival Olahraga Nasional (Fornas) yang dilaksanakan 2 (dua) tahun sekali jatuh pada tahun 2023. Atlit Kota Magelang dibina agar mendapat perolehan terbaik dalam ajang tersebut. Selain pembinaan untuk persiapan perlombaan, peningkatan signifikan pembinaan atlit di tahun 2023 juga sebagai dampak positif dari adanya pembukaan Kelas Khusus Olahraga (KKO) yang berada di SMP Negeri 11 Kota Magelang. Lebih lanjut, Disporapar juga melakukan penggalan potensi tidak hanya melalui prestasi olahraga tetapi juga melalui pembinaan dan pengembangan olahraga masyarakat dan olahraga disabilitas.

2.1.3.2.13.2.3 Pelatih yang Bersertifikat

Tabel 2.198 Sertifikat Pelatih di Kota Magelang, 2020-2024

INDIKATOR	2020	2021	2022	2022	2024
Jumlah pelatih yang bersertifikat	NA	66	69	72	75
Jumlah seluruh pelatih	NA	93	93	83	93
Persentase Pelatih yang bersertifikat	NA	70,97	74,19	77,42	80,65

Sumber: Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata Kota Magelang, 2025

Pada tahun 2024, jumlah pelatih yang ada di Kota Magelang mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2023 yaitu dari 83 orang pelatih menjadi 93 pelatih. Dilihat dari sisi pelatih yang bersertifikat juga mengalami penambahan pada tahun 2024 dari 72 pelatih menjadi 75 pelatih, Tren peningkatan pelatih yang bersertifikat tersebut perlu untuk diteruskan mengingat capainnya baru berada di angka 80,65% atau belum 100%. Di sisi lain, terdapat satu fenomena yang perlu diperhatikan bahwasannya Kota Magelang perlu menawarkan gaji kompetitif agar dapat mempertahankan pelatih lokal berkualitas.

2.1.3.2.14 Statistik

Statistik sektoral adalah statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan instansi pemerintah tertentu dalam rangka penyelenggaraan tugas-tugas pemerintah dan tugas pembangunan yang merupakan tugas pokok instansi pemerintah yang bersangkutan sesuai dengan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2022 tentang Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral. Pengelolaan statistik sektoral juga dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan pendampingan dari Badan Pusat Statistik selaku Pembina Data dalam Satu Data Indonesia (SDI).

Berkaitan dengan publikasi data sektoral, Pemerintah Kota Magelang memiliki dataGo (<https://datago.magelangkota.go.id>) yang dapat diakses publik. Portal data ini terhubung dengan portal open data Jawa Tengah (<https://data.jatengprov.go.id>) yang berisikan data-data Kabupaten/Kota di Jawa Tengah.

Publikasi data sektoral melalui portal satu data ini selama kurun waktu 2020 sampai dengan 2024 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.199 Kondisi Publikasi Data Sektoral dalam Portal Open Data, 2020-2024

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
Publikasi data sektoral tahun (n) dalam Portal Satu Data	NA	NA	713	747	800
Publikasi data sektoral tahun 2021 dalam Portal Satu Data	NA	NA	600	600	600
Persentase perkembangan publikasi data sektoral dalam portal open data	NA	NA	18,83%	24,50%	33,33%

Sumber: Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Magelang, 2025

Data yang dipublikasikan melalui portal data tersebut terus ditingkatkan jumlah datasheet-nya. Pada tahun 2022, baru 713 datasheet sektoral yang terpublikasi yang kemudian meningkat menjadi 800 datasheet di tahun 2024. Penambahan ini mengakomodir permintaan dan ketersediaan data yang ada di Kota Magelang. Selain portal tersebut, juga dikembangkan geoportal yang mempublikasikan data-data spasial.

2.1.3.2.15 Persandian

Berdasarkan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Indeks Keamanan Informasi (KAMI) merupakan aplikasi yang digunakan sebagai alat bantu untuk melakukan asesmen dan evaluasi tingkat kesiapan (Kelengkapan dan Kematangan) penerapan keamanan informasi berdasarkan kriteria SNI ISO/IEC 27001. Tingkat kematangan ini nantinya akan digunakan sebagai alat untuk melaporkan pemetaan dan pemeringkatan kesiapan keamanan informasi di Kementerian/ Lembaga. Untuk keperluan Indeks KAMI, tingkat kematangan tersebut didefinisikan sebagai:

1. Tingkat I - Kondisi Awal
2. Tingkat II - Penerapan Kerangka Kerja Dasar
3. Tingkat III - Terdefinisi dan Konsisten
4. Tingkat IV - Terkelola dan Terukur
5. Tingkat V - Optimal

Untuk membantu memberikan uraian yang lebih detil, tingkatan ini ditambah dengan tingkatan antara - I+, II+, III+, dan IV+, sehingga total terdapat 9 tingkatan kematangan. Sebagai awal, semua responden akan diberikan kategori kematangan Tingkat I. Sebagai padanan terhadap standar ISO/IEC 27001:2013, tingkat kematangan yang diharapkan untuk ambang batas minimum kesiapan sertifikasi adalah Tingkat III+.

Pemerintah Kota Magelang menggunakan indeks ini untuk mengukur tingkat keamanan informasi di Kota Magelang. Nilai indeks KAMI dan masing-masing komponennya selama kurun waktu 2020 sampai dengan 2024 di Kota Magelang disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.200 Nilai Komponen Indeks KAMI Kota Magelang, 2020-2024

No	Komponen	2020*	2021*	2022	2023	2024
1	Nilai Tata Kelola Keamanan Informasi	24	24	91	109	109
2	Nilai Pengelolaan Resiko Keamanan Informasi	18	18	26	61	61
3	Nilai Kerangka Kerja Keamanan Informasi	24	24	32	61	61
4	Nilai Pengelolaan Aset Keamanan Informasi	27	27	62	138	138
5	Nilai Teknologi dan Keamanan Informasi	0	0	55	72	72

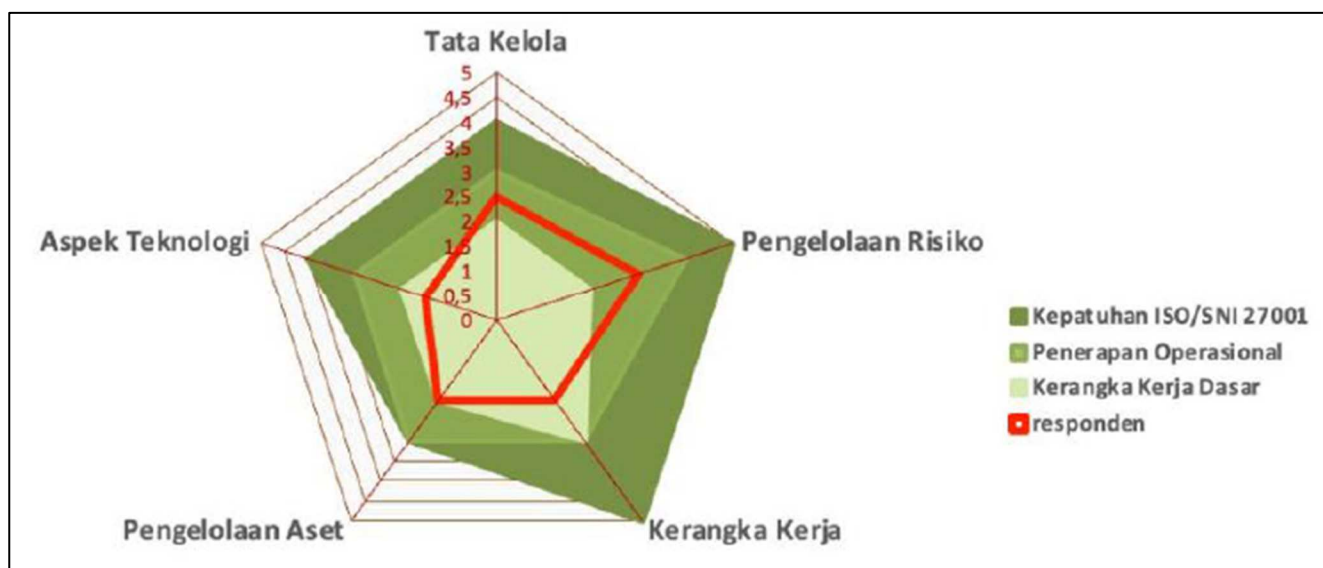
No	Komponen	2020*	2021*	2022	2023	2024
	Total Skor	93	93	266	441	441

Sumber: Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Kota Magelang, 2025

*Penilaian Mandiri

Pada tahun 2020 dan 2021, Pemerintah Kota Magelang melakukan *self-assessment* untuk Indeks KAMI, kemudian mulai tahun 2022 dilakukan assessment oleh BSSN. Berdasarkan penilaian dari BSSN, indeks KAMI Kota Magelang menunjukkan peningkatan cukup signifikan di tahun 2023 jika dibandingkan dengan tahun 2022. Peningkatan ini didorong oleh penyusunan dokumen-dokumen SOP dan hasil review terkait keamanan informasi. Kondisi di tahun 2024 sama dengan tahun 2023 karena tidak mengajukan assessment ke BSSN. Meskipun tidak melakukan assessment, Pemerintah Kota tetap melakukan upaya untuk peningkatan keamanan informasi. Pelaksanaan dan pendokumentasian SOP yang telah disusun menjadi satu hal yang mandatory dilakukan untuk mendukung pencapaian indikator ini.

Hasil evaluasi akhir tahun 2023, Pemerintah Kota Magelang berada pada level PEMENUHAN KERANGKA KERJA DASAR dengan tingkat kelengkapan penerapan standar ISO 27001 sesuai kategori pada skor nilai 441. Kondisi ini berada pada Tingkat kematangan I+ s/d III dari masing-masing komponennya. Tingkat kematangan tersebut dapat dilihat pada gambar berikut.



Gambar 2.63 Tingkat Kematangan Komponen Indeks KAMI Tahun 2023 Kota Magelang

Sumber: Badan Siber dan Sandi Negara, 2024

Semua komponen masih berada di bawah Tingkat kematangan III+ yang menjadi batas minimum kesiapan sertifikasi ISO 27001. Komponen yang paling lemah adalah Aspek Teknologi. Salah satu kelemahan dari komponen ini adalah belum adanya konfigurasi standar untuk keamanan sistem bagi keseluruhan aset jaringan, sistem dan aplikasi yang terdokumentasi dan dimutakhirkan sesuai perkembangan (standar industri yang berlaku) dan kebutuhan. Selain itu, rencana pemindahan kantor kompleks Wali Kota akan menjadi peluang dan tantangan dalam pemenuhan komponen ini, salah satunya adalah ruang server. Pembangunan ruang server yang sesuai standar akan membantu peningkatan nilai komponen ini.

2.1.3.2.16 Kebudayaan

Pembangunan kebudayaan memiliki tujuan utama untuk mewujudkan ketahanan budaya, yaitu kemampuan suatu masyarakat dalam menjaga, melestarikan, dan mengembangkan nilai-nilai budaya lokal di tengah derasnya arus globalisasi. Ketahanan budaya menjadi semakin penting karena globalisasi membawa pengaruh

besar terhadap ekspansi seni dan budaya global, yang berpotensi mengikis kelestarian budaya daerah dan, pada gilirannya, memengaruhi kekuatan budaya nasional.

Di Kota Magelang, upaya mewujudkan ketahanan budaya tercermin dari keberadaan 223 kelompok kesenian yang aktif pada tahun 2024. Kelompok-kelompok ini mencakup berbagai ragam seni tradisional dan modern, yang memperkaya khazanah budaya daerah. Kelompok kesenian tersebut antara lain: Drum Band, Kubro Siswo, Kuntulan, Ketoprak, Jatilan / Reog, Dagelan / Lawak, Karawitan / Panembromo, Orkes Keroncong, Samproh / Kasidah, Tari Topeng Ireng, Sanggar Tari, Seni Lukis / Seni Rupa dan Janur / Dekorasi.

Keberadaan berbagai kelompok kesenian ini tidak hanya berfungsi sebagai wadah ekspresi kreatif masyarakat, tetapi juga sebagai penjaga identitas budaya lokal. Kelompok-kelompok ini memiliki peran penting dalam memastikan bahwa warisan budaya daerah tetap hidup dan diwariskan kepada generasi berikutnya. Selain itu, mereka juga menjadi bagian integral dalam kegiatan seni budaya, seperti festival, pementasan, dan pelatihan seni, yang turut memperkuat daya tarik pariwisata budaya di Kota Magelang.

Perkembangan jumlah kelompok seni dari tahun 2020-2024 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.201 Perkembangan Jumlah Kelompok Seni di Kota Magelang, 2020-2024

No	Kelompok Seni	2020	2021	2022	2023	2024
1	Drum Band	39	39	39	39	39
2	Kubro Siswo	3	3	3	3	3
3	Kuntulan	3	3	3	3	3
4	Ketoprak	6	6	6	6	6
5	Wayang Orang	0	0	0	0	0
6	Jatilan/Reog	31	31	31	31	31
7	Dagelan/Lawak	0	0	0	0	0
8	Karawitan/ Panembromo	11	11	11	11	11
9	Orkes Keroncong	18	18	18	18	18
10	Samproh/ Kasidah	77	77	81	81	81
11	Orkes Melayu	0	0	0	0	0
12	Tari Topeng Ireng	4	4	4	4	4
13	Sanggar Tari	23	23	23	23	23
14	Seni Lukis/ Seni Rupa	3	3	3	3	3
15	Tari Jawa Tradisional	0	0	0	0	0
16	Wayang Kulit	0	0	0	0	0
17	Janur/ Dekorasi	2	2	1	1	1
18	Seni Pahat	0	0	0	0	0
	TOTAL	220	220	223	223	223

Sumber: DATAGO Modul Daerah Dalam Angka Kota Magelang, 2025

Pemerintah Kota Magelang memiliki berbagai sarana dan prasarana untuk mendukung aktivitas seni dan budaya. Salah satu fasilitas utama adalah Loka Budaya Soekimin Adiwiratmoko, sebuah gedung kesenian yang difungsikan sebagai area untuk menggelar berbagai kegiatan seni budaya. Selain itu, tersedia Sasana Gladen, yang difokuskan sebagai tempat latihan kesenian untuk berbagai komunitas seni di Kota Magelang.

Untuk pelaksanaan aktivitas seni budaya lainnya, Kota Magelang memiliki 16 lokasi pendukung yang bervariasi, mencakup ruang publik hingga fasilitas khusus, seperti: Aloon-Aloon Kota Magelang, Bakorwil II Wilayah Kedu, Gedung BPK, Area Mantiyasih, Gedung Pertemuan, Ballroom Hotel, Lapangan, Balai Kelurahan, Aula Kampus, Halaman Sekolah/Kantor, Padepokan/Sanggar Seni, Rumah Budaya, Desa Wisata, GOR Samapta dan Kawasan Gunung Tidar.

Keberadaan berbagai lokasi ini memungkinkan beragam acara seni dan budaya seperti pameran wayang kulit, festival kesenian rakyat, pentas seni, dan lomba seni budaya dapat berlangsung dengan baik di berbagai area, menciptakan pengalaman yang kaya bagi masyarakat maupun wisatawan.

Selain pemenuhan sarana dan prasarana, pengembangan kebudayaan di Kota Magelang mencakup beberapa aspek utama, seperti:

- Kebudayaan Lokal: Pelestarian tradisi lisan, adat istiadat, ritus, dan olahraga tradisional.
- Kesenian Tradisional: Meliputi seni musik, tari, teater, dan kerajinan.
- Pembinaan Sejarah: Peningkatan pemahaman masyarakat terhadap nilai-nilai sejarah lokal.
- Cagar Budaya: Pelestarian dan pemanfaatan situs bersejarah sebagai bagian dari identitas budaya kota.
- Museum: Pemeliharaan koleksi budaya dan sejarah yang memperkaya wawasan masyarakat.

Keberadaan fasilitas yang memadai dan pengembangan berbagai aspek kebudayaan menunjukkan komitmen Pemerintah Kota Magelang dalam mendukung pelestarian dan pengembangan seni budaya sebagai bagian integral dari pembangunan daerah. Strategi ini juga diharapkan dapat meningkatkan daya tarik wisata budaya dan memperkuat identitas kota sebagai pusat seni dan budaya di wilayah Kedu.

Tabel 2.202 Persentase Kelompok Kesenian yang Aktif Terlibat/Mengadakan Pertunjukan Kesenian dalam 1 Tahun Terakhir, 2020-2024

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase Kelompok Kesenian yang Aktif Terlibat/Mengadakan Pertunjukan Kesenian dalam 1 Tahun Terakhir	-	8,93	15,625	23,58	70,75

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Magelang, 2024

Jumlah kelompok seni di Kota Magelang menunjukkan tren yang meningkat dan semakin beragam dari tahun ke tahun, didukung oleh penambahan fasilitas yang dapat dimanfaatkan oleh para pelaku seni. Namun, tingkat keaktifan kelompok seni masih menjadi tantangan yang perlu mendapatkan perhatian lebih. Pada tahun 2023, hanya 23,53% kelompok kesenian yang aktif terlibat atau mengadakan pertunjukan kesenian dalam satu tahun terakhir. Meskipun angka ini masih relatif rendah, terdapat peningkatan yang cukup signifikan dibandingkan tahun 2021 yang hanya mencapai 8,93%. Hal ini menunjukkan adanya perbaikan, namun pemerintah Kota Magelang tetap memiliki tanggung jawab besar untuk mendorong kelompok kesenian agar lebih aktif, produktif, dan memiliki kesempatan rutin dalam mengadakan pertunjukan seni.

Pada tahun 2024, persentase keaktifan kelompok kesenian mengalami peningkatan yang cukup signifikan dibandingkan tahun sebelumnya. Peningkatan ini tidak terlepas dari peran pemerintah, khususnya melalui even-even budaya yang diselenggarakan oleh bidang Kebudayaan Kota Magelang. Beberapa acara besar seperti Magelang Sparkle, Grebeg Gethuk, Festival Gethuk, Sadranan, dan berbagai kegiatan seni lainnya berhasil melibatkan banyak sanggar seni dan pelaku kesenian. Event-event ini tidak hanya memberikan ruang ekspresi bagi para seniman lokal tetapi juga menciptakan peluang bagi mereka untuk tampil di hadapan publik, sehingga mendorong motivasi kelompok kesenian untuk lebih aktif berkontribusi dalam pelestarian budaya.

Peningkatan ini menjadi bukti bahwa kolaborasi antara pemerintah dan pelaku seni melalui program dan kegiatan yang terstruktur dapat memberikan dampak positif. Ke depan, diperlukan langkah-langkah strategis untuk memastikan keberlanjutan program-program tersebut. Pemerintah dapat mempertimbangkan pemberian dukungan berupa pendanaan, pelatihan, dan promosi bagi kelompok seni, serta mendorong kolaborasi lintas sektor untuk menciptakan ekosistem seni yang lebih dinamis. Dengan begitu, diharapkan kelompok kesenian di Kota Magelang tidak hanya aktif secara kuantitas, tetapi juga mampu menghadirkan kualitas pertunjukan yang semakin baik dan berdaya saing.

2.1.3.2.16.1 Kesenian Tradisional

Tabel 2.203 Kondisi Pengembangan Kesenian Tradisional di Kota Magelang, 2020-2024

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah kesenian tradisional yang dikembangkan	8	8	8	9	11
Jumlah total kesenian tradisional	12	12	12	12	12
Persentase kesenian tradisional yang dikembangkan	66,67%	66,67%	66,67%	75%	91,67%

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Magelang, 2025

Kesenian tradisional merupakan bagian penting dari warisan budaya yang terus dijaga dan dikembangkan di Kota Magelang. Berbagai jenis kesenian tradisional telah dikembangkan, termasuk rias busana tradisional, karawitan, keroncong/campursari, rebana, tari rakyat tradisional, tari klasik, teater tradisional/ketoprak, wayang kulit, serta seni dekorasi. Ragam kesenian ini tidak hanya menjadi identitas budaya lokal, tetapi juga menjadi sarana untuk mempererat keterhubungan antargenerasi dalam pelestarian tradisi.

Pada tahun 2024, pengembangan kesenian tradisional di Kota Magelang semakin diperluas dengan penambahan jenis seni baru, yaitu geguritan/macapat dan wayang orang. Geguritan atau macapat adalah bentuk seni sastra Jawa yang dilantunkan dengan iringan nada, sementara wayang orang menghadirkan seni pertunjukan dengan gabungan seni peran, tari, dan musik. Kehadiran dua jenis seni ini menunjukkan adanya upaya untuk memperkaya ragam seni tradisional di Kota Magelang, sekaligus memperluas ruang ekspresi bagi para pelaku seni lokal.

Namun, di tengah perkembangan ini, terdapat satu jenis kesenian tradisional yang belum mendapatkan perhatian, yaitu tatah sungging. Tatah sungging merupakan seni ukir dan lukis pada kulit atau kayu yang biasanya digunakan dalam pembuatan wayang kulit atau ornamen tradisional lainnya. Ketiadaan pengembangan tatah sungging di Kota Magelang menjadi sebuah peluang sekaligus tantangan untuk memperkaya portofolio kesenian tradisional di daerah ini. Selain itu, pengembangan tatah sungging tidak hanya akan melestarikan seni ini, tetapi juga membuka peluang ekonomi kreatif melalui produk-produk seni bernilai tinggi.

Oleh karena itu, perlu adanya langkah strategis untuk mendukung pengembangan tatah sungging di Kota Magelang. Pemerintah dapat menginisiasi program pelatihan atau workshop tatah sungging yang melibatkan seniman berpengalaman. Selain itu, kolaborasi dengan pelaku seni dari daerah lain yang telah mengembangkan tatah sungging secara baik dapat menjadi inspirasi untuk memulai. Dengan memperhatikan pengembangan semua jenis kesenian, termasuk tatah sungging, Kota Magelang dapat menjadi pusat pelestarian budaya yang semakin kuat dan beragam, serta menjadi daya tarik wisata budaya yang signifikan di masa depan.

2.1.3.2.16.2 Kebudayaan Lokal

Kebudayaan lokal merupakan kekayaan yang mencerminkan identitas dan nilai-nilai luhur masyarakat. Kota Magelang telah mengembangkan beragam kebudayaan lokal, termasuk tradisi lisan, manuskrip, adat istiadat, ritus, seni, bahasa, olahraga tradisional, dan cagar budaya. Setiap elemen kebudayaan ini tidak hanya menjadi warisan yang harus dilestarikan, tetapi juga menjadi medium pembelajaran nilai-nilai tradisional bagi generasi muda.

Pada tahun 2024, terdapat penambahan dalam pengembangan kebudayaan lokal di Kota Magelang, yaitu permainan tradisional. Langkah ini sangat patut disyukuri, mengingat tantangan besar dalam melestarikan permainan tradisional di tengah masifnya penggunaan gawai akibat perkembangan teknologi. Permainan tradisional, seperti gobak sodor, engklek, atau benthik, bukan sekadar hiburan, tetapi juga memiliki nilai edukasi, membangun interaksi sosial, dan melatih keterampilan motorik anak-anak. Namun, dengan semakin maraknya permainan digital, permainan tradisional sering kali terpinggirkan dan mulai dilupakan.

Pengembangan permainan tradisional di Kota Magelang menjadi sebuah langkah strategis untuk menyeimbangkan dampak perkembangan teknologi dengan pelestarian budaya lokal. Pemerintah Kota Magelang dapat mengintegrasikan permainan tradisional dalam kegiatan pendidikan formal maupun nonformal,

seperti lomba permainan tradisional di sekolah, festival budaya, atau area bermain khusus di ruang publik. Selain itu, perlu adanya promosi permainan tradisional melalui platform digital untuk menarik minat generasi muda. Langkah ini juga menjadi pengingat bahwa kebudayaan lokal harus terus berkembang agar relevan dengan tantangan zaman. Dengan menjaga keseimbangan antara tradisi dan modernitas, Kota Magelang dapat menjadi contoh bagaimana kebudayaan lokal dapat menjadi kekuatan utama dalam membangun identitas masyarakat yang kokoh, harmonis, dan inklusif.

Tabel 2.204 Kondisi Pengembangan Kebudayaan Lokal di Kota Magelang, 2020-2024

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah kebudayaan lokal yang dikembangkan	8	8	8	8	9
Jumlah total kebudayaan lokal	9	9	9	9	9
Persentase kebudayaan lokal yang dikembangkan	88,89%	88,89%	88,89%	88,89%	100%

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Magelang, 2025

2.1.3.2.16.3 Pembinaan Sejarah

Tabel 2.205 Kondisi Pembinaan Sejarah di Kota Magelang, 2020-2024

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah pembinaan sejarah yang dilakukan	6	6	7	7	9
Jumlah total pembinaan sejarah yang direncanakan	9	9	9	9	9
Cakupan pembinaan sejarah	66,67%	66,67%	77,78%	77,78%	100%

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Magelang, 2025

Dari total 9 pembinaan sejarah yang direncanakan, Pada Tahun 2023 tujuh diantaranya telah dilakukan yaitu diseminasi sejarah, bedah buku sejarah, pembacaan/penyampaian sejarah, lomba terkait sejarah, penelitian sejarah, pendokumentasian sejarah dan pemanfaatan sejarah dalam bentuk karya seni. Pada Tahun 2024 ada tambahan 2 kegiatan yang dilaksanakan yaitu jelajah/napak tilas sejarah dan pameran sejarah sehingga dari 9 pembinaan terkait sejarah yang direncanakan sudah tercapai semuanya.

2.1.3.2.16.4 Cagar Budaya

Persentase cagar budaya yang dilestarikan di Kota Magelang pada tahun 2024 mencapai 35,29%, menunjukkan adanya peningkatan dibandingkan tahun 2023. Peningkatan ini didukung oleh adanya 6 tambahan cagar budaya yang telah diregisterkan dan diakui sebagai warisan budaya yang dilestarikan. Hal ini mencerminkan komitmen pemerintah Kota Magelang dalam menjaga dan melestarikan kekayaan cagar budaya sebagai bagian dari identitas dan warisan sejarah daerah.

Dalam kurun waktu 2020-2022, definisi cagar budaya yang dilestarikan merujuk pada cagar budaya yang telah diregisterkan dalam Sistem Registrasi Nasional Cagar Budaya Kemendikbud. Namun, mulai tahun 2023, definisi tersebut diperluas, mencakup cagar budaya yang tidak hanya telah diregisterkan, tetapi juga telah memiliki Surat Keputusan (SK) penetapan. SK penetapan ini dapat dikeluarkan di tingkat kota, provinsi, maupun nasional, sehingga memberikan pengakuan formal terhadap cagar budaya yang dilestarikan.

Perubahan definisi ini menunjukkan adanya peningkatan standar dan keseriusan dalam upaya pelestarian cagar budaya. Dengan persentase yang terus meningkat, Kota Magelang menunjukkan progres yang baik dalam pengelolaan cagar budaya. Namun, tantangan ke depan adalah memastikan bahwa cagar budaya yang telah diregisterkan dan ditetapkan tetap terawat dengan baik serta dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan, baik untuk edukasi, penelitian, maupun pariwisata.

Pemerintah Kota Magelang diharapkan terus mendorong pelestarian cagar budaya dengan melibatkan berbagai pihak, termasuk komunitas lokal, akademisi, dan sektor swasta. Dengan kolaborasi yang baik, cagar budaya tidak

hanya dilihat sebagai peninggalan sejarah, tetapi juga sebagai aset budaya yang memberikan kontribusi positif bagi pembangunan sosial dan ekonomi daerah.

Tabel 2.206 Kondisi Pengelolaan dan Pelestarian di Kota Magelang, 2020-2024

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah cagar budaya yang dilestarikan	35	42	42	12	18
Jumlah total cagar budaya	35	42	42	51	51
Persentase cagar budaya yang dilestarikan	100%	100%	100%	23,53%	35,29%

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Magelang, 2025

Tabel 2.207 Daftar Cagar Budaya Kota Magelang, 2024

No	Nama Benda / Bangunan / Situs / Kawasan Cagar Budaya	No	Nama Benda / Bangunan / Situs / Kawasan Cagar Budaya
1	Pastoran St Ignatius	27	Rumah Tinggal C 6 (Jl. Ade Irma Suryani)
2	Gereja St Ignatius*	28	Bangunan Rumah Tinggal di Kompl. Kwarasan
3	Gereja GPIB Jemaat "Beth-El"*	29	Menara Air Minum/Watertorn*
4	Gereja Kristen Jawa Magelang	30	Plengkung (Jl. Ahmad Yani)
5	SMK (SMIP) Wiyasa	31	Museum Jend. Sudirman
6	SLTP Negeri 1 Magelang	32	Wisma Diponegoro
7	Komplek Ex Karesidenan Kedu dan Rumah Dinas**	33	Laboratorium Klinik Prima
8	Kantor Koord Pembangunan Wil II Jateng	34	Gerbang Kerkoff
9	Kantor Catatan Sipil	35	Eks Stasiun Kereta Kebon Polo
10	Kantor Pekerjaan Umum	36	Kelenteng Tri Bhakti (Liong Hok Bio)*
11	Kantor Transmigrasi	37	Masjid Agung/Masjid Kauman Kota Magelang*
12	Eks Kantor Penerangan Pertanian	38	Alun-alun Kota Magelang*
13	Eks Bangunan Asuransi Bumi Putera 1921	39	Eks-Kadipaten Kota Magelang*
14	Polresta Magelang*	40	Kantor Pos Kota Magelang*
15	Sekolah Calon Bintara (Secaba)	41	Tugu Aniem Kota Magelang*
16	Kesatrian Diponegoro	42	Kompleks makam Pa Van Der Steur
17	Pondok Sriti	43	SMP Tarakanita dan SMK PIUS X
18	Kodim Magelang	44	Situs Lumpang Mantyasih
19	Polwil Kedu	45	Makam dan Paku Tanah Jawa
20	Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. Soerojo***	46	SMP Negeri 2 Magelang

No	Nama Benda / Bangunan / Situs / Kawasan Cagar Budaya	No	Nama Benda / Bangunan / Situs / Kawasan Cagar Budaya
21	Komplek Rumah Sakit Umum Tidar	47	Dapur Umum (Kampung Tulung)
22	Bangunan Unit Gawat Darurat	48	Sungai Kotak Saluran Kali Manggis
23	Rumah Sakit Tentara	49	Gedung Bunder
24	Mess Tentara	50	Plengkung (Jl. Pierre Tendean)
25	Gedung Bunder	51	Plengkung Bada'an
26	Rumah Tinggal (Jl. Tentara Pelajar)		

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Magelang, 2024

- * : Ditetapkan melalui SK Wali Kota Magelang
- ** : Ditetapkan melalui SK Gubernur Jawa Tengah (430/38 Tahun 2017)
- *** : Ditetapkan melalui Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata (PM. 57/PW.007/MKP/2010)

Pada tahun 2023, Kota Magelang memiliki 51 cagar budaya yang telah diregisterkan dalam Sistem Registrasi Nasional Cagar Budaya Kemendikbud. Dari jumlah tersebut, 12 cagar budaya telah ditetapkan secara resmi melalui Keputusan Wali Kota, Keputusan Gubernur, maupun Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata. Penetapan ini memberikan pengakuan hukum dan perlindungan lebih lanjut terhadap cagar budaya di Kota Magelang.

Dari 12 cagar budaya yang telah ditetapkan, 10 di antaranya merupakan cagar budaya dengan status level kota, yaitu: Gereja St. Ignatius, Gereja GPIB Jemaat “Beth-El”, Polresta Magelang, Menara Air Minum/Watertorn, Kelenteng Tri Bhakti (Liong Hok Bio), Masjid Agung/Masjid Kauman Kota Magelang, Alun-Alun Kota Magelang dan Eks-Kadipaten Kota Magelang. Sementara itu, terdapat 2 cagar budaya dengan status tingkat provinsi, yakni Komplek Eks Karesidenan Kedu dan Rumah Dinas, serta 1 cagar budaya dengan status nasional, yaitu Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. Soerojo.

Hampir seluruh cagar budaya di Kota Magelang ini berasal dari periode kolonial, mencerminkan jejak sejarah kolonial yang sangat kuat di kota tersebut. Namun, ada satu cagar budaya yang berbeda, yaitu Situs Lumpang Mantyasih, yang berasal dari periode Hindu Mataram. Situs ini menjadi bukti keberagaman sejarah dan warisan budaya Kota Magelang.

Pada tahun 2024, Kota Magelang mencatatkan peningkatan pelestarian cagar budaya dengan adanya 6 tambahan cagar budaya yang ditetapkan melalui Keputusan Wali Kota. Keenam cagar budaya tersebut adalah: Gerbang Kerkhof, Makam Pa Van Der Steur, Museum Sudirman, Plengkung Jl. Daha, Plengkung Jl. Piere Tendean dan Plengkung Badaan. Penambahan ini mencerminkan upaya berkelanjutan Pemerintah Kota Magelang dalam memperkuat pelestarian warisan budaya. Dengan total 57 cagar budaya yang telah diregisterkan pada tahun 2024, Kota Magelang semakin menunjukkan komitmennya sebagai kota yang kaya akan nilai sejarah dan budaya. Tantangan ke depan adalah memastikan seluruh cagar budaya ini tetap terawat, dimanfaatkan secara berkelanjutan, dan dipromosikan sebagai aset wisata budaya yang dapat meningkatkan daya tarik kota di tingkat lokal maupun nasional.

Tabel 2.208 Jumlah Pengunjung Tempat Bersejarah, 2020-2024

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah Pengunjung Tempat Bersejarah (ribu orang)	-	163	334	425	425

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Magelang, 2025

Keberadaan beragam cagar budaya berpeluang menjadi salah satu magnet yang dapat dimanfaatkan untuk menarik kunjungan ke Kota Magelang. Peluang tersebut dapat digambarkan melalui indikator jumlah pengunjung tempat bersejarah dimana sejak tahun 2021 hingga tahun 2023, kunjungan ke tempat bersejarah di Kota Magelang terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2023 terdapat 425 ribu pengunjung yang tersebar di berbagai tempat bersejarah di Kota Magelang.

2.1.3.2.16.5 Museum

Pandemi Covid-19 memberikan dampak signifikan pada jumlah pengunjung museum di Kota Magelang. Pada tahun 2020, jumlah pengunjung museum turun drastis menjadi hanya 750 jiwa, menandakan penurunan tajam dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Namun, pada tahun 2021 mulai terjadi perbaikan dengan peningkatan jumlah pengunjung menjadi 982 jiwa.

Tren ini terus menunjukkan peningkatan signifikan pada tahun-tahun berikutnya. Pada tahun 2022, jumlah pengunjung museum naik drastis menjadi 3.937 jiwa, diikuti oleh peningkatan lebih lanjut pada tahun 2023 dengan total 6.068 pengunjung. Peningkatan ini mencerminkan pemulihan sektor pariwisata budaya di Kota Magelang seiring dengan pelonggaran pembatasan pandemi dan upaya promosi yang dilakukan.

Pada tahun 2024, jumlah pengunjung museum mencapai 9.614 jiwa, peningkatan yang signifikan dari tahun sebelumnya. Salah satu faktor utama yang mendorong lonjakan ini adalah pelaksanaan berbagai even budaya yang diselenggarakan oleh bidang Kebudayaan, termasuk Event Sudirman, yang mampu menarik minat masyarakat untuk mengunjungi museum.

Peningkatan jumlah pengunjung ini menunjukkan keberhasilan strategi pemerintah dalam memanfaatkan even budaya untuk menghidupkan kembali pariwisata museum. Ke depan, penting bagi pemerintah untuk terus mengadakan program kreatif dan kolaboratif yang dapat menjaga momentum ini serta menjadikan museum sebagai salah satu destinasi utama dalam pengembangan pariwisata budaya di Kota Magelang.

Tabel 2.209 Jumlah Pengunjung Museum di Kota Magelang, 2020-2024

Tahun	Jumlah pengunjung museum	Persentase peningkatan kunjungan museum
2020	750	-51,83%
2021	982	30,93%
2022	3.937	300,92%
2023	6.068	54,13%
2024	9.614	58,44%

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Magelang, 2025

2.1.3.2.17 Perpustakaan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan menyebutkan bahwa perpustakaan berfungsi sebagai wahana pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi, dan rekreasi untuk meningkatkan kecerdasan dan keberdayaan bangsa, dengan tujuan memberikan layanan kepada pemustaka, meningkatkan kegemaran membaca, serta memperluas wawasan dan pengetahuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Kebutuhan peningkatan kualitas hidup masyarakat salah satunya melalui pembangunan literasi masyarakat terus diupayakan. Pembangunan literasi dapat dilihat melalui capaian berbagai komponen unsur pembangun literasi masyarakat (UPLM) hasil kajian Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat yang diterbitkan oleh Perpustakaan Nasional. Capaian IPLM Kota Magelang dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

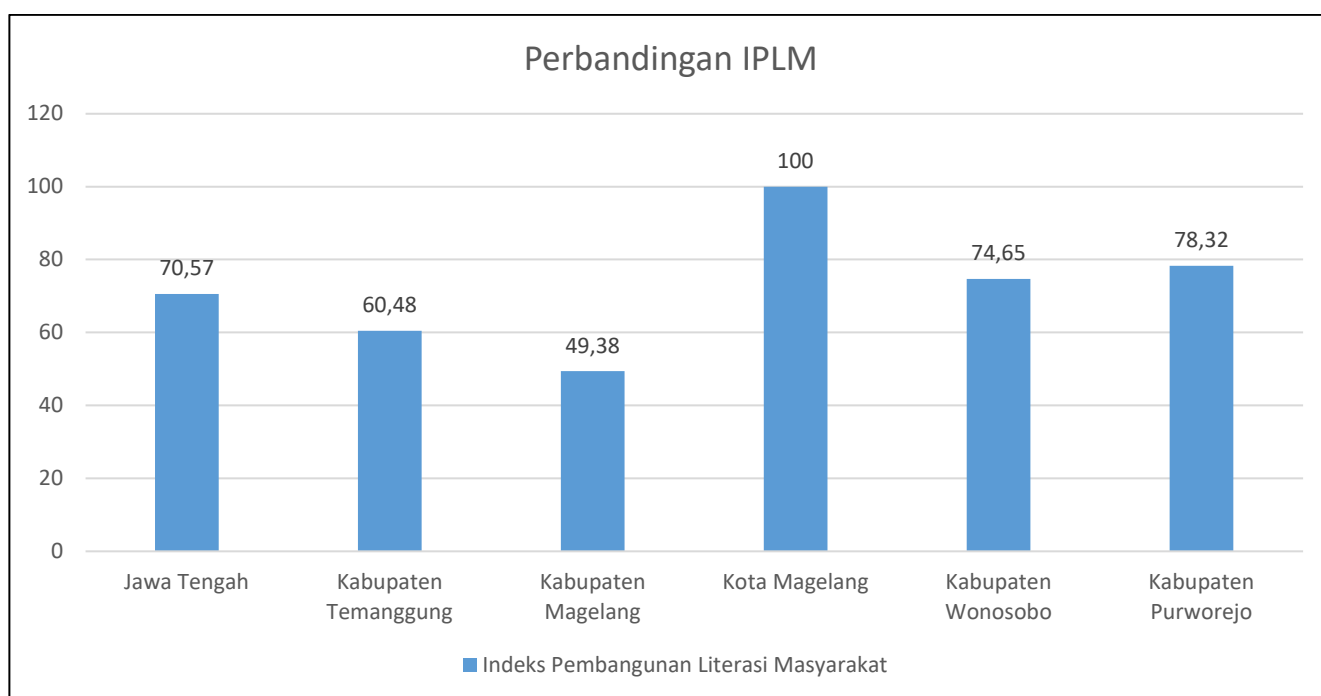
Tabel 2.210 Nilai Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat Kota Magelang, 2024

Komponen	Uraian	2022	2023	2024
UPLM1	Pemerataan Layanan Perpustakaan	0,0043	1,0000	1,0000

Komponen	Uraian	2022	2023	2024
UPLM2	Ketercukupan Koleksi Perpustakaan	1,8065	1,0000	1,0000
UPLM3	Ketercukupan Tenaga Pustakawan	0,0023	1,0000	1,0000
UPLM4	Tingkat Kunjungan Masyarakat ke Perpustakaan	0,3748	0,5178	1,0000
UPLM5	Jumlah Perpustakaan ber-SNP	3,1339	1,0000	1,0000
UPLM6	Keterlibatan Masyarakat dalam Sosialisasi Perpustakaan	0,1583	1,0000	1,0000
UPLM7	Anggota Perpustakaan	1,1091	1,0000	1,0000
IPLM		94,13	93,11	100,00

Sumber: Perpustakaan Nasional, 2025

Berdasarkan tabel di atas, nilai IPLM Kota Magelang menunjukkan penurunan dari tahun 2022 ke tahun 2023 sebesar 1,02 poin kemudian meningkat signifikan sebanyak 6,88 poin menjadi 100,00. Sehingga, Kota Magelang menjadi salah satu diantara tiga Kabupaten/Kota se- Indonesia yang meraih nilai IPLM dengan nilai sempurna. Kinerja yang tentunya perlu dipertahankan melalui upaya peningkatan unsur pembangunan literasi masyarakat khususnya pada jumlah kunjungan dan keterlibatan masyarakat dalam perpustakaan serta kerjasama dengan lintas sector untuk mendukung Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial (TPBIS). Capaian IPLM tersebut jauh di atas IPLM Jawa Tengah yang berada pada nilai 70,57. Adapun perbandingan Nilai IPLM dengan daerah sekitar dapat dilihat pada grafik sebagai berikut:



Gambar 2.64 Perbandingan IPLM Kota Magelang dengan Daerah Sekitar, 2024

Sumber: Perpustakaan Nasional, 2025

2.1.3.2.17.1 Layanan Perpustakaan

Pemerataan layanan perpustakaan dilakukan melalui dua acara yaitu offline dan online. Penjangkauan layanan online melalui aplikasi iMagelang dan siJelita, Adapun layanan perpustakaan offline selain kunjungan langsung pemustaka, dilakukan pula kegiatan perpustakaan keliling, dropping buku, serta penambahan titik monitoring dan evaluasi perpustakaan. Namun demikian, penambahan titik layanan masih terkendala dengan ketersediaan sarana prasarana serta sumber daya manusia yang kurang memadai sehingga penjangkauan layanan hanya bisa bertambah sebanyak 9 titik pada tahun 2024.

Tabel 2.211 Jumlah Perpustakaan di Kota Magelang, 2020-2024

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah perpustakaan	316	316	316	316	316
Jumlah titik layanan perpustakaan	47	40	108	114	123
Jumlah RW	192	192	192	192	192
Persentase pemerataan layanan perpustakaan	24,48%	20,83%	56,25%	59,38%	64,06%

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Arsip Kota Magelang, 2025

2.1.3.2.17.2 Koleksi Perpustakaan

Tabel 2.212 Jumlah Koleksi Jumlah Buku di Perpustakaan Daerah Kota Magelang, 2020-2024

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah koleksi di seluruh perpustakaan	43.727	44.311	129.913	130.224	131.527
Jumlah penduduk (Disdukcapil)	128.020	127.846	127.965	128.264	128.709
Rasio ketercukupan koleksi perpustakaan	24,87%	25,57%	50,76%	50,76%	51,09%

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Arsip Kota Magelang, 2025

Jumlah koleksi di seluruh perpustakaan terus bertambah setiap tahunnya. Rasio ketercukupan koleksi perpustakaan dihitung dengan membagi jumlah koleksi di seluruh perpustakaan dengan dua kali jumlah penduduk. Rasio ketercukupan koleksi perpustakaan tahun 2022 dan 2023 menunjukkan angka yang sama yaitu 50,76%. Meskipun menunjukkan angka yang stagnan, tetapi jika dilihat dari komponen pembentuknya, pada tahun 2023 terdapat penambahan jumlah koleksi perpustakaan meskipun masih linear dengan bertambahnya jumlah penduduk. Hal ini perlu untuk diperhatikan karena menurut IFLA/UNESCO, kondisi ideal jumlah koleksi perpustakaan di suatu wilayah adalah sebanyak 2 kali jumlah penduduk. Untuk itu perlu diadakan pendataan secara komprehensif untuk jumlah koleksi perpustakaan yang ada yaitu meliputi koleksi perpustakaan tingkat kota, semua jenjang sekolah, instansi dan perpustakaan yang ada di masyarakat.

2.1.3.2.17.3 Tenaga Perpustakaan

Ketercukupan tenaga perpustakaan merupakan salah satu unsur pembangunan literasi masyarakat. Mengacu pada Guideliness for Development IFLA/UNESCO, rasio ideal jumlah tenaga perpustakaan dibandingkan dengan jumlah populasi penduduk adalah 1 : 2.500. Sehingga jumlah tenaga perpustakaan minimal yang harus dimiliki adalah 52 orang. Pada table di bawah, jumlah tenaga perpustakaan di Kota Magelang sebanyak 176 orang. Jumlah tersebut tentunya telah melebihi standar yang ditetapkan. Namun di sisi lain, pada tahun 2024 baru 68,18% tenaga perpustakaan yang dinyatakan kompeten. Selain itu, berdasarkan jumlah total perpustakaan sebanyak 316 perpustakaan, 140 diantaranya tidak memiliki tenaga perpustakaan murni. Berdasarkan kondisi tersebut, perlu upaya berkelanjutan untuk meningkatkan kompetensi tenaga perpustakaan dan menambah jumlah tenaga perpustakaan.

Tabel 2.213 Jumlah Tenaga Perpustakaan di Kota Magelang, 2020-2024

Komponen	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah tenaga perpustakaan yang kompeten	109	120	111	116	120
Jumlah tenaga perpustakaan di Kota Magelang	176	176	176	176	176
Rasio ketercukupan tenaga perpustakaan	61,93%	68,18%	63,07%	65,91%	68,18%

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Arsip Kota Magelang, 2025

2.1.3.2.17.4 Kunjungan Masyarakat ke Perpustakaan

Tabel 2.214 Jumlah Kunjungan Masyarakat ke Perpustakaan di Kota Magelang, 2020-2024

Komponen	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah kunjungan masyarakat ke perpustakaan tahun (n)	26.483	71.043	274.580	275.061	406.195
Jumlah kunjungan masyarakat ke perpustakaan tahun (n-1)	116.467	26.483	71.043	274.580	275.061
Persentase peningkatan kunjungan masyarakat ke perpustakaan	-77,26	168,26%	286,50%	0,17%	47,68%

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Arsip Kota Magelang, 2025

Peningkatan kunjungan masyarakat ke perpustakaan menjadi bukti nyata perkembangan literasi masyarakat. Pada tahun 2024, jumlah kunjungan meningkat 47,68%. Upaya promosi dan kerjasama dengan berbagai *stakeholder* diwujudkan dalam berbagai *event* yang dilaksanakan untuk menarik animo masyarakat. Kegiatan yang dilaksanakan diantaranya adalah *talkshow* dengan penulis ternama, podcast, pameran buku dan *event* liburan seru.

2.1.3.2.17.5 Perpustakaan ber-SNP

Standar Nasional Perpustakaan merupakan kriteria minimal yang digunakan sebagai acuan penyelenggaraan, pengelolaan dan pengembangan perpustakaan. Pada tahun 2024, jumlah perpustakaan ber-SNP adalah sebanyak 145 perpustakaan atau 45,89% dari total seluruh perpustakaan di Kota Magelang. Komponen SNP yang masih sangat perlu mendapatkan perhatian dan saling terkait adalah standar tenaga perpustakaan dan sarana prasarana pendukung. Adapun dari total 145 perpustakaan ber-SNP, 89 diantaranya telah memperoleh akreditasi dengan rincian perpustakaan terakreditasi A sebanyak 42, akreditasi B sebanyak 44 dan 3 sisanya terakreditasi nilai C.

Tabel 2.215 Jumlah Perpustakaan ber-SNP di Kota Magelang, 2020-2024

Komponen	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah perpustakaan ber-SNP	84	92	111	127	145
Jumlah perpustakaan	316	316	316	316	316
Persentase perpustakaan ber-SNP	26,58%	29,11%	35,13%	40,19%	45,89%

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Arsip Kota Magelang, 2025

2.1.3.2.17.6 Keterlibatan Masyarakat dalam Kegiatan Perpustakaan

Dalam upaya mendorong Transformasi Perpustakaan Berdasarkan Inklusi Sosial, keterlibatan masyarakat memegang peranan penting. Upaya peningkatan keterlibatan melalui partisipasi dalam kegiatan lomba, wisata literasi dengan sekolah dan PKK kelurahan melalui kampanye Gerakan ayo bunda membaca, dan liburan seru sebagai alternatif kegiatan mengisi liburan bagi pelajar. Selain itu digalakkan kembali sosialisasi iMagelang ke kelurahan-kelurahan dan pemustaka. iMagelang merupakan aplikasi perpustakaan digital yang memfasilitasi pengguna untuk dapat membaca ribuan koleksi ebook dimanapun dan kapanpun melalui perangkat android.

Tabel 2.216 Keterlibatan Masyarakat dalam Kegiatan Perpustakaan, 2020-2024

Komponen	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah masyarakat yang mengikuti kegiatan perpustakaan tahun (n)	3.899	5.183	39.791	7.912	10.669

Komponen	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah masyarakat yang mengikuti kegiatan perpustakaan tahun (n-1)	2.578	3.899	5.183	6.295	7.912
Persentase peningkatan keterlibatan masyarakat dalam kegiatan perpustakaan	51,24%	32,96%	667,72%	25,69%	34,85%

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Arsip Kota Magelang, 2025

Pada tahun 2024, terdapat 10.669 orang yang mengikuti kegiatan perpustakaan.

2.1.3.2.17.7 Anggota Perpustakaan

Jumlah anggota perpustakaan semakin meningkat setiap tahunnya. Namun belum dilakukan pilah data anggota perpustakaan berdasarkan tempat tinggal sehingga belum diketahui berapa jumlah penduduk Kota Magelang yang menjadi anggota perpustakaan.

Tabel 2.217 Jumlah Anggota Perpustakaan Kota Magelang, 2020-2024

Komponen	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah anggota perpustakaan	36.335	36.548	38.373	40.545	42.049
Jumlah penduduk (Disdukcapil)	128.020	127.846	127.965	128.027	128.709
Persentase anggota perpustakaan	27,95%	28,58%	29,99%	31,67%	32,67%

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Arsip Kota Magelang, 2025

2.1.3.2.17.8 Pemanfaatan Perpustakaan

Pemanfaatan perpustakaan didasarkan pada akses yang terbuka dan merata terhadap informasi berkolerasi dalam mendorong peningkatan tingkat kegemaran membaca. Berdasarkan laporan akhir kajian gemar membaca masyarakat Indonesia (TGM) Tahun 2024, TGM Kota Magelang berada pada kategori Tinggi dengan nilai TGM sebesar 88,43. Nilai TGM tersebut adalah tertinggi di Jawa Tengah dan melampaui TGM nasional yang berada di angka 72,44.

Tabel 2.218 Tingkat Pemanfaatan Perpustakaan di Kota Magelang, 2020-2024

Komponen	2020	2021	2022	2023	2024
Tingkat Pemanfaatan Perpustakaan	0,06%	0,16%	0,62%	2,91%	3,39%

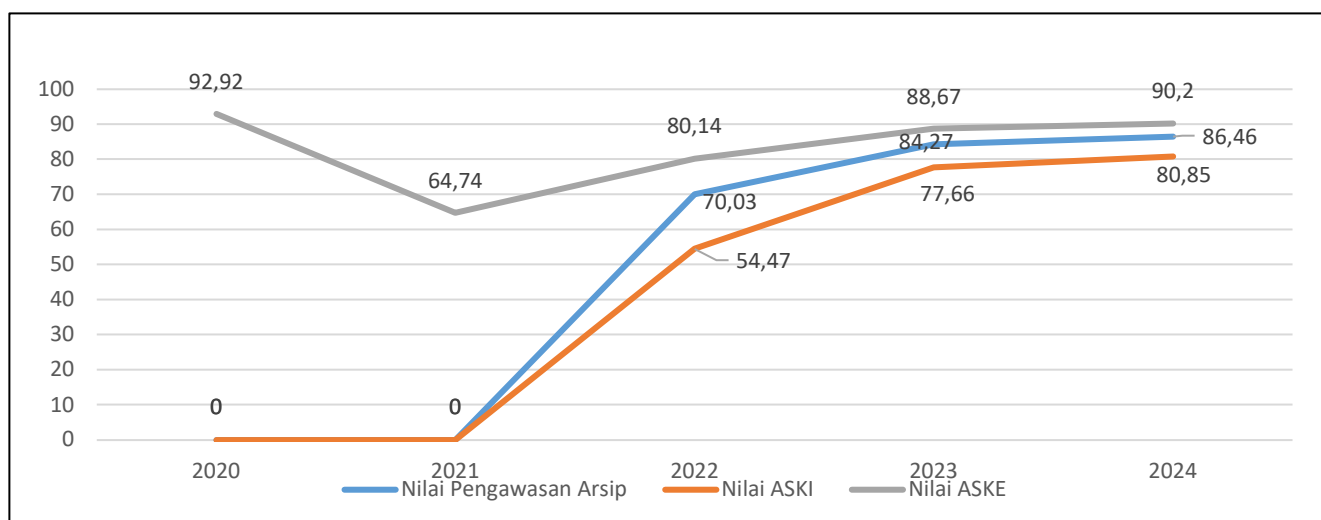
Sumber: Dinas Perpustakaan dan Arsip Kota Magelang, 2025

Sejalan dengan hal itu, tingkat pemanfaatan perpustakaan semakin meningkat dari tahun ke tahun. Sehingga upaya untuk terus mendorong seluruh lapisan masyarakat agar lebih dekat dengan budaya membaca diikuti dengan pemberian fasilitas perpustakaan yang lebih inklusif dan berkualitas.

2.1.3.2.18 Kearsipan

2.1.3.2.18.1 Pengelolaan Arsip

Kinerja pengelolaan arsip Kota Magelang dapat dilihat dari Nilai Pengawasan Arsip yang terdiri dari komponen nilai Audit Sistem Kearsipan Eksternal (ASKE) dan nilai Audit Sistem Kearsipan Internal (ASKI).



Gambar 2.65 Nilai Pengawasan Arsip, ASKI dan ASKE Kota Magelang, 2020-2024

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Magelang, 2024

Dilihat dari grafik di atas, Nilai pengawasan arsip yang didapatkan mulai tahun 2022 menunjukkan tren peningkatan setiap tahunnya. Pada tahun 2024 nilai pengawasan arsip yaitu 86,46 dengan kategori A. Terlihat bahwa capaian nilai ASKI masih lebih rendah daripada ASKE. ASKI menggambarkan pengelolaan arsip di tingkat OPD yang belum optimal. Selain keterbatasan sarana dan prasarana, kondisi SDM arsiparis juga perlu mendapat perhatian. Pada tahun 2024, total jumlah SDM arsiparis sebanyak 21 orang, dimana 4 orang diantaranya merupakan arsiparis LKD sedangkan 17 sisanya tersebar di 27 OPD lainnya. Upaya peningkatan nilai ASKI melalui pembinaan, monitoring dan evaluasi pengelolaan arsip dinamis perlu mendapat perhatian penuh agar kewajiban pengelolaan arsip meliputi penciptaan, penggunaan dan penyusutan arsip dapat berjalan dengan baik. Sehingga hal tersebut berdampak kepada pengelolaan arsip statis yang dikelola oleh LKD

Sejalan dengan reformasi birokrasi, pada tahun 2024 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Magelang juga telah menyelenggarakan Gelar Pengawasan kearsipan dan pencanangan Gerakan Nasional Sadar Tertib Arsip yang diharapkan berdampak pada perubahan mindset dan culture set para penyelenggara negara dalam meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik (good governance) serta mendukung transparansi tata kelola pemerintahan.

Adapun pengelolaan arsip oleh Lembaga Kearsipan Daerah dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.219 Pengelolaan Arsip Kota Magelang, 2020-2024

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase berkas yang dikelola sesuai ketentuan	82,00%	73,93%	100,00%	100,00%	100,00%
Jumlah arsip dinamis yang dikelola	49.626	48.291	73.195	77.920	84.220
Jumlah keseluruhan arsip dinamis	60.520	65.320	73.195	77.920	84.220
Jumlah arsip inaktif yang telah dibuatkan daftar arsip	NA	66.540	71.620	77.920	84.220
Jumlah seluruh arsip inaktif	NA	90.000	90.000	90.000	90.520

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Magelang, 2025

Berdasarkan tabel di atas, jumlah arsip inaktif yang telah dibuatkan daftar arsip sejumlah 84.220 berkas dari total sebanyak 90.520 berkas arsip inaktif. Namun demikian, tata kelola arsip menghadapi tantangan yang cukup besar. Perpindahan bangunan kantor tujuh OPD di lingkup Sekretariat Daerah yang direncanakan pada tahun 2027 tentunya menjadi isu strategis bidang kearsipan terkait dengan penataan, perlindungan dan penyelamatan arsip, khususnya pada tujuh OPD tersebut.

2.1.3.2.18.2 Perlindungan dan Penyelamatan Arsip

Perlindungan dan penyelamatan arsip statis ditargetkan 3.000 berkas setiap tahunnya. Dalam pelaksanaannya, perlindungan dan penyelamatan 3.000 berkas tersebut terpenuhi. Sehingga sampai dengan tahun 2024 sejumlah 20.996 berkas telah dibuatkan sarana bantu temu balik. Mulai tahun 2024 upaya perlindungan dan penyelamatan arsip terus dilakukan melalui alih media arsip, namun keterbatasan sumber daya mengakibatkan hanya 1.000 arsip dari total 3.000 arsip statis setiap tahunnya yang bisa di-alih mediakan.

Tabel 2.220 Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Kota Magelang, 2020-2024

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase arsip yang dilindungi dan terselamatkan	100%	100%	100%	100%	100%
Jumlah arsip statis yang dilindungi dan terselamatkan	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Jumlah keseluruhan arsip statis	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Jumlah arsip statis yang telah dibuatkan sarana bantu temu balik	NA	3.000	3.000	3.000	3.000
Jumlah seluruh arsip statis	NA	11.996	14.996	17.996	20.996

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Arsip Kota Magelang, 2025

2.1.3.3 Fokus Urusan Pilihan

2.1.3.3.1 Kelautan dan Perikanan

2.1.3.3.1.1 Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya

Perikanan bukanlah sektor utama yang dikembangkan di Kawasan Perkotaan mengingat Luas Lahan Perkotaan yang sangat minim. Akan tetapi, dalam rangka membangun ketahanan pangan di Kawasan Perkotaan kegiatan perikanan di Perkotaan ini berusaha untuk dipertahankan dan berusaha ditingkatkan produksinya. Secara umum presentase peningkatan produksi perikanan mengalami fluktuasi setiap tahunnya, hal ini disebabkan oleh faktor alami seperti ketersediaan air dan pakan, sementara faktor non alam seperti kebijakan pemerintah, ketersediaan modal petani ikan dan jumlah bantuan yang diberikan kepada para kelompok tani.

Hal ini terbukti pada tahun 2023 produksi perikanan meningkat 75%, peningkatan produksi perikanan meningkatkan pesat karena adanya bantuan dari Pemerintah pusat sehingga kepemilikan lahan yang sempit dan minimnya ketersediaan air dapat teratasi melalui budidaya ikan dengan Teknik budikdumber ini. Sementara itu pada tahun 2024 produksi perikanan mengalami sedikit kenaikan karena tidak ada bantuan dari Pemerintah sehingga tidak ada penambahan skala produksi perikanan.

Tabel 2.221 Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya, 2020-2024

Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
Produksi Perikanan Budidaya tahun N	124,51	168,10	169,32	296,31	298,54
Produksi perikanan budidaya tahun N-1	NA	124,51	168,10	169,32	296,31
Persentase peningkatan produksi perikanan budidaya	NA	1,35	0,73	75	0,75

Sumber: Dinas Pertanian dan Pangan Kota Magelang, 2025

2.1.3.3.1.2 Produksi Olahan Perikanan

Olahan Ikan di Kota Magelang masih terbatas pada pengolahan ikan bandeng presto. Pada tahun 2024 ini tidak ada kendala terkait dengan stok bahan mentah yang didatangkan dari Daerah pesisir serta adanya bantuan peralatan pengolahan ikan dari Kementerian Perikanan berupa peralatan pengasapan memberikan manfaat kepada para pelaku usaha pengolahan ikan.

Tabel 2.222 Jumlah Total Produksi Olahan Perikanan, 2020-2024

Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah Total Produksi olahan Perikanan (ton)	NA	NA	218,7	236	236

Sumber: Dinas Pertanian dan Pangan Kota Magelang, 2025

2.1.3.3.2 Pariwisata

Pariwisata merupakan sektor strategis dalam pembangunan daerah yang berkontribusi terhadap peningkatan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, serta pelestarian budaya dan lingkungan. Kota Magelang sebagai salah satu penyangga Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Borobudur, perlu mengembangkan kegiatan pendukung pariwisata. Kota Magelang juga memiliki destinasi wisata yang potensial untuk dikembangkan. Destinasi tersebut telah mendatangkan wisatawan baik nusantara maupun mancanegara.

Tabel 2.223 Tabel Kunjungan Destinasi Wisata Kota Magelang, 2021-2024

No	Nama Wisata	2021		2022		2023		2024	
		Nus	Man	Nus	Man	Nus	Man	Nus	Man
1	Museum Diponegoro	999	-	5.607	-	9.761	-	7.754	0
2	Museum Abdul Jalil	1.714	-	1.910	-	20.175	-	41.127	0
3	Museum AJB Bumi Putera	132	-	673	-	893	-	1342	0
4	Museum BPK RI	9.760	-	31.889	-	49.477	-	60.467	0
5	Museum Sudirman	710	-	4.374	-	6.165	-	9.140	4
6	Museum OHD	1.541	5	3.980	92	4.152	346	4.030	248
7	TKL Ecopark	149.308	-	355.072	-	288.286	-	225.272	0
8	Borobudur Golf	16.690	-	22.639	-	20.251	-	13.688	0
9	Kebun Raya Gunung Tidar	148.620	-	286.415	-	334.641	-	317.561	6
10	Mantyasih	922	-	3.068	-	3.920	-	4.622	0
11	Kebun Bibit Senopati	958	-	6.266	-	7.448	-	6.280	0
12	Van der Steur	-	-	-	-	-	-	491	59
13	Proklim Bersemi	-	-	-	-	-	-	3.974	7
14	S C Gelora Sanden	-	-	-	-	-	-	111.420	0
15	Event Kota	-	-	-	-	84.864	86	167.083	25
	Jumlah	331.354	5	721.893	93	830.033	432	974.251	349

Sumber: Disporapar Tahun 2025

Peningkatan pariwisata di Kota Magelang perlu didukung dengan adanya peningkatan infrastruktur, pemberdayaan masyarakat, promosi dan digitalisasi serta pelestarian lingkungan. Selain itu, peningkatan kualitas destinasi wisata dan pendukungnya juga diperlukan. Melihat letak strategis Kota Magelang dan keberadaan AKMIL serta Sekolah Taruna Nusantara yang berada sekitar wilayah kota, hal ini menjadi daya tarik tersendiri untuk pengunjung datang. Oleh karenanya investor berminat untuk berinvestasi fasilitas pendukung pariwisata seperti hotel, umkm dan kuliner.

Tabel 2.224 Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara, 2019-2023

Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara (orang)	-	-	162	693	1.717

Sumber: Disporapar Kota Magelang, 2024

Tabel 2.225 Jumlah Hotel di Kota Magelang, 2020-2024

No	Jenis	2020	2021	2022	2023	2024
1	Hotel Bintang 5	1	1	1	1	1
2	Hotel Bintang 4	1	1	1	1	1
3	Hotel Bintang 3	3	3	3	3	3
4	Hotel Bintang 2	2	2	2	2	2
5	Hotel Bintang 1	0	0	0	0	0
6	Hotel Melati	12	14	14	13	13
7	Reddoors	0	0	0	0	4
	Jumlah	19	21	21	20	24

Sumber: Disporapar Kota Magelang, 2025

Selain hotel, kuliner dari suatu daerah sering menjadi daya tarik utama bagi wisatawan. Banyak wisatawan berwisata tidak hanya untuk melihat keindahan alam atau budaya tetapi juga untuk mencicipi kuliner khas daerah. Adapun data rumah makan/restoran adalah sebagai berikut:

Tabel 2.226 Data Rumah Makan/Restoran Menurut Kecamatan di Kota Magelang, 2024

No	Kecamatan	2021	2022	2023	2024
1	Magelang Selatan	19	134	209	267
2	Magelang Tengah	15	130	192	298
3	Magelang Utara	13	110	163	238
	Jumlah	47	374	564	803

Sumber: Disporapar Kota Magelang, 2025

Dalam rangka menghidupkan kegiatan pariwisata di kelurahan, maka dibentuklah Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis). Pokdarwis diharapkan bisa menjadi pioner di lingkungannya untuk menghidupkan aktivitas pariwisata. Namun dari 6 (enam) Pokdarwis yang ada di Kota Magelang, yang aktif hanya ada 3 yaitu Pokdarwis Cacaban, Pokdarwis Dudan Village dan Pokdarwis Kadang Bebrayan.

Tabel 2.227 Data Pokdarwis Kota Magelang, 2024

No	Nama Pokdarwis	Kelurahan	SK	Jumlah Anggota	Keterangan (Aktif/Tidak)
1	Pokdarwis Cacaban	Kel. Cacaban	Sudah ber SK	6	Aktif
2	Pokdarwis Dudan Village	Kel. Tidar Dudan	Sudah ber SL	22	Aktif
3	Pokdarwis Kadang Bebrayan	Kel. Tidar Dudan	Sudah ber SK	29	Aktif
4	Pokdarwis Mahkota	Kel. Magelang	Sudah ber SK	36	Tidak
5	Pokdarwis Permata Lestari	Kel. Potrobangsari	Sudah ber SK	21	Tidak

No	Nama Pokdarwis	Kelurahan	SK	Jumlah Anggota	Keterangan (Aktif/Tidak)
6	Pokdarwis Sehati	Kel.Panjang	Sudah ber SK	50	Tidak

Sumber: Disporapar Kota Magelang, 2025

Pada tahun 2024 telah ditanda tangani Berita Acara Pendahuluan Nota Kesepakatan 4 (empat) pihak, yaitu Badan Pelaksana Otorita Borobudur (BPOB), Pemerintah Kota Magelang, Pemerintah Kabupaten Magelang, dan Pemerintah Kabupaten Temanggung untuk bekerjasama berkaitan pengembangan pariwisata, UMKM dan ekonomi kreatif wilayah pengembangan Gelangmanggung. BA Pendahuluan Nota Kesepakatan ini dilaksanakan pada tanggal 22 November 2024.



Gambar 2.66 Penandatanganan Berita Acara Pendahuluan Nota Kesepakatan Kerjasama Gelangmanggung

Sumber: Disporapar Kota Magelang, 2025

Tabel 2.228 Rasio PDRB Akomodasi Makan dan Minum di Kota Magelang, 2019-2023

Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
Rasio PDRB Akomodasi Makan dan Minum	6,07	5,58	5,64	6,07	6,28

Sumber: BPS, 2024

2.1.3.3.3 Pertanian

2.1.3.3.3.1 Sarana Pembibitan

Sarana Pembibitan ini meliputi peralatan dan perlengkapan pembibitan tanaman yang berlokasi di Kebun Bibit Senopati, Laboratorium Pertanian dan Kyai Langgeng. Jumlah Sarana Pembibitan ini mengalami peningkatan sebesar 27,58% sementara jumlah sarana pembibitan yang terpelihara mengalami peningkatan sebesar 5,59% pada tahun 2022. Akan tetapi mengingat keterbatasan Dana APBD, Jumlah sarana Pembibitan ini tidak ada penambahan sampai pada akhir tahun 2024.

Tabel 2.229 Persentase Sarana Pembibitan yang Terpelihara, 2019-2023

Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah Sarana Pembibitan yang Terpelihara	NA	87	111	111	111
Jumlah Sarana Pembibitan	NA	143	151	151	151
Persentase sarana pembibitan yang terpelihara	NA	60,84	73,51	73,51	73,51

Sumber: Dinas Pertanian dan Pangan Kota Magelang, 2025

2.1.3.3.2 Sarana Peternakan

Jumlah sarana Peternakan yang meliputi peralatan dan perlengkapan di Puskesmas, Rumah Potong Hewan dan Dinas Pertanian dan Peternakan selalu mengalami peningkatan pada tiap-tiap tahunnya. Peningkatan jumlah sarana peternakan ini memang tidak menunjukkan kinerja disektor peternakan, akan tetapi penambahan sarana peternakan memiliki peran dalam peningkatan kinerja di sektor peternakan.

Tabel 2.230 Persentase Peningkatan Sarana Peternakan, 2020-2024

Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah sarana Peternakan tahun n	NA	25	28	32	36
Persentase Peningkatan sarana Peternakan	NA	NA	12	14,29	12.50

Sumber: Dinas Pertanian dan Pangan Kota Magelang, 2025

2.1.3.3.3 Prasarana Pertanian

Parasana di sektor pertanian ini terdiri dari 2 bentuk asset, yaitu JITU dan Greenhouse. 2 aset ini sangat penting dalam rangka pengembangan pertanian di Kota Magelang. Hingga saat ini *greenhouse* masih berfungsi dengan baik, sementara itu JITU yang Sebagian teridentifikasi dibangun ditanah hak milik masyarakat sangat menyulitkan Disperpa dalam konteks pemeliharaan asset sehingga hingga saat ini Pemerintah tidak dapat melakukan Tindakan perbaikan JITU yang rusak. Disamping itu, karena Kota Magelang dinyatakan tidak memiliki Daerah Irigasi, maka bantuan dari Pusat dan Provinsi tidak dapat masuk ke Kota Magelang. Hal yang bisa dilakukan oleh Disperpa dalam rangka pemeliharaan prasarana pertanian ini adalah melalui pembinaan terhadap Kelompok swadaya P3A yang secara sukarela mengelola ketersediaan air dan melakukan pemeliharaan terhadap kerusakan pada prasarana pertanian.

Tabel 2.231 Persentase Prasarana Pertanian yang Terpelihara, 2019-2023

Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah lokasi Jaringan irigasi usaha tani yang terpelihara	NA	NA	0	0	0
Jumlah total lokasi Jaringan irigasi usaha tani	NA	NA	17	17	17
Jumlah greenhouse	NA	NA	7	7	7
Persentase Prasarana Pertanian	NA	NA	29,17	29,17	29,17

Sumber: Dinas Pertanian dan Pangan Kota Magelang, 2025

2.1.3.3.4 Prasarana Peternakan

Tabel 2.232 Persentase Peningkatan Prasarana Peternakan, 2019-2023

Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah prasarana peternakan tahun N	NA	35	40	32	36
Jumlah prasarana peternakan tahun N-1	NA	NA	35	28	32

Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase peningkatan Prasarana Peternakan	NA	16,67	14,29	5	

Sumber: Dinas Pertanian dan Pangan Kota Magelang, 2025

2.1.3.3.3.5 Jumlah Kasus Penyakit Hewan

Kinerja Penurunan kasus penyakit hewan selalu mengalami peningkatan setiap tahun, hal ini tidak lepas dari peran Disperpa dalam mengatasi penyebaran penyakit hewan melalui berbagai strategi diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Observasi hewan yang akan disembelih melalui Rumah Pemotongan Hewan
2. Identifikasi lapangan pada saat hadirnya wabah penyakit hewan
3. Pendampingan terhadap penyembelihan hewan qurban
4. Layanan pengobatan gratis selama 3 bulan dalam setiap tahunnya
5. Layanan rawat inap dan rawat jalan melalui Puskesmas

Tabel 2.233 Persentase Penurunan Jumlah Kasus Penyakit Hewan, 2020-2024

Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah kasus penyakit hewan tahun N	NA	148	136	127	105
Jumlah kasus penyakit hewan tahun N-1	NA	NA	148	136	127
Persentase penurunan jumlah kasus penyakit hewan	NA	NA	8,11	6,62	17,32

Sumber: Dinas Pertanian dan Pangan Kota Magelang, 2025

2.1.3.3.3.6 Produk Pangan Asal Hewan yang ASUH

Produk pangan asal hewan yang ASUH (Aman, sehat, Utuh dan halal) meliputi Daging, Ikan, Susu dan Telur. Monitoring pasar terhadap produk asal hewan ini dilakukan secara insidental melalui operasi pasar. Adapun pengawasan rutin dilakukan sepekan sekali pada Pasar Tradisional dan Rumah Potong Hewan. Pengawasan terkait dengan produk hewan ini memiliki sanksi yang tegas sehingga produk hewan ASUH di Kota Magelang selalu mengalami peningkatan tiap tahunnya dan merupakan pengawasan terbaik se Jawa Tengah.

Tabel 2.234 Persentase Peningkatan Produk Pangan Asal Hewan yang ASUH, 2020-2024

Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah produk asal hewan ASUH tahun N	NA	7.856.516	8.020.761	8.290.650	8.473.100
Jumlah produk asal hewan ASUH tahun N-1	NA	NA	7.856.516	8.020.761	8.290.650
Persentase peningkatan produk pangan asal hewan yang ASUH	NA	NA	2,09	3,36	2,20

Sumber: Dinas Pertanian dan Pangan Kota Magelang, 2025

2.1.3.3.3.7 Lahan Bencana Pertanian yang Tertangani

Bencana pertanian di Kota Magelang meliputi 2 hal, yaitu bencana pertanian yang disebabkan oleh iklim dan bencana pertanian yang disebabkan oleh hama penyakit. Melalui penyuluh pertanian, Disperpa mengupayakan pemberian bantuan obat-obatan kepada para petani. Selain itu pada musim kemarau Disperpa juga memberikan bantuan air kepada Sawah yang mengalami kekeringan terutama pada Lahan yang jauh dari jangkauan irigasi.

Tabel 2.235 Persentase Luasan Lahan Bencana Pertanian yang Tertangani, 2020-2024

Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
Total luas lahan bencana pertanian yang tertangani	NA	NA	4,25	35,85	24,15
Total luas lahan pertanian yang terdampak bencana	NA	NA	5,20	42,98	29
Persentase luasan lahan bencana pertanian yang tertangani	NA	NA	81,73	83,41	83,28

Sumber: Dinas Pertanian dan Pangan Kota Magelang, 2025

2.1.3.3.3.8 Kelayakan Usaha Peternakan dan Kesehatan Hewan

Jumlah peternakan yang memiliki kelayakan usaha mengalami penurunan pada tahun 2023, hal ini terjadi karena Kawasan Perkotaan yang kurang mendukung sektor peternakan dari segi geografis dan demografis. Bahkan teridentifikasi ada beberapa peternak dari Kota Magelang yang membangun industri ternak di Daerah lain mengingat kebutuhan lahan yang cukup besar dan jarak dengan permukiman yang cukup jauh.

Pada dasarnya kegiatan yang seharusnya berijin selain dari sektor peternakan sendiri adalah petshop, toko daging dan praktek dokter hewan dimana pada umumnya unit usaha ini berijin secara online melalui OSS sehingga Sebagian belum melaporkan melalui Disperpa.

Tabel 2.236 Persentase Peningkatan Kelayakan Usaha Peternakan dan Kesehatan Hewan yang Diawasi Pelaksanaannya secara Berkala, 2020-2024

Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah kelayakan usaha tahun N	NA	27	30	11	12
Jumlah kelayakan usaha tahun N-1	NA	NA	27	10	11
Persentase peningkatan kelayakan usaha peternakan dan kesehatan hewan yang diawasi pelaksanaannya secara berkala	NA	NA	11,11	10	09,09

Sumber: Dinas Pertanian dan Pangan Kota Magelang, 2025

2.1.3.3.3.9 Peningkatan Kapasitas Kelompok Tani

Pertanian bukan sektor yang berkembang pesat di Kawasan Perkotaan mengingat keterbatasan lahan dan keterampilan para petani yang sangat minim, itulah sebabnya mengapa jumlah petani yang meningkat kapasitasnya secara teknis juga mengalami kendala tiap tahunnya. Meskipun demikian, dari table dibawah menunjukkan adanya peningkatan kapasitas petani dari tahun ketahun meskipun masih relatif sangat kecil.

Tabel 2.237 Persentase Kelompok Tani yang Meningkatkan Kapasitasnya, 2020-2024

Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah kelompok tani yang meningkat kapasitasnya	NA	NA	2	3	3
Jumlah seluruh kelompok tani	NA	NA	25	30	25
Persentase kelompok tani yang meningkat kapasitasnya	NA	NA	8	10	12

Sumber: Dinas Pertanian dan Pangan Kota Magelang, 2024

2.1.3.3.3.10 Peningkatan Kapasitas Petani

Berdasarkan evaluasi penilaian dari Disperpa menunjukkan bahwa Kapasitas Kelompok Tani mengalami kenaikan yang cukup signifikan pada tahun 2024, dimana pada tahun sebelumnya tidak lebih dari 15% yang dinyatakan naik kelas berdasarkan hasil pelatihan dan instrumen penilaian dari Disperpa.

Tabel 2.238 Persentase Kelompok Tani yang Naik Kelas, 2020-2024

Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah kelompok tani yang naik kelas	NA	NA	3	3	20
Jumlah seluruh kelompok tani	NA	NA	25	30	25
Persentase kelompok tani yang naik kelas	NA	NA	12	10	80

Sumber: Dinas Pertanian dan Pangan Kota Magelang, 2024

2.1.3.3.4 Perdagangan

Terdapat 5 (lima) pasar rakyat/tradisional yang ada di Kota Magelang yaitu Pasar Rejowinangun, Pasar Kebonpolo, Pasar Cacaban, Pasar Gotong Royong dan Pasar Sidomukti. Sampai dengan tahun 2024, hanya Pasar Gotong Royong yang belum diserahkan pengelolaannya kepada Pemerintah Kota Magelang. Hal ini menyebabkan Pemerintah Kota Magelang tidak bisa melakukan pemeliharaan atas kerusakan yang terjadi di pasar Gotong Royong. Pasar rakyat menjadi salah satu pusat perdagangan bagi masyarakat. Jumlah pedagang mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. sampai dengan tahun 2024, jumlah pedagang pasar tetap 5.522 orang Sedangkan apabila dilihat dari jumlah omzet pedagang juga mengalami peningkatan menjadi Rp. 1.508.471.985.000,-.

Tabel 2.239 Jumlah Pedagang Pasar Tradisional di Kota Magelang, 2020-2024

TAHUN	PEDAGANG			JUMLAH	Omzet
	KIOS	LOS	BANGO / PELATARAN		
2020	578	2,526	1,574	4.678	NA
2021	526	2,381	1,516	4.423	NA
2022	670	2.650	2.010	5.330	1.487.630.555.000
2023	696	2.926	1.900	5.522	1.508.471.985.000
2024	696	2.926	1.900	5.522	1.508.471.985.000

Sumber: DPPKUM Kota Magelang, 2025

Peningkatan jumlah pedagang di pasar rakyat secara normatif harus disertai peningkatan pengawasan terhadap alat ukur, takar, timbang dan perlengkapan (UTTP). Pengawasan terhadap UTTP sesuai dengan standar (sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen). Pada Tahun 2024 jumlah UTTP yang bertanda Tera Sah mengalami kenaikan sebesar 9,49 % dengan jumlah 705 unit. Persentase UTTP bertanda tera sah yang berlaku mengalami kenaikan menjadi 98,93 % atau naik 9,49 % dari tahun 2023.

Tabel 2.240 Persentase Alat-Alat Ukur Takar, Timbang dan Perlengkapannya Tertanda Tera; 2020-2024 (1)

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah UTTP yang Bertanda Tera Sah yang Berlaku pada Tahun Berjalan	1.949	7.484	7.189	6.721	7.426
Jumlah Potensi Alat UTTP yang Wajib Tera/Tera Ulang	4.421	7.614	7.614	7.506	7.506
Persentase UTTP Bertanda Tera Sah yang Berlaku	44,09%	98,29%	94,42%	89,54%	98,93%

Sumber: DPPKUM Kota Magelang, 2025

Sebagai bentuk perlindungan konsumen, Pemerintah Kota Magelang melakukan tera dan tera ulang terhadap alat ukur takar, timbang dan perlengkapan tertanda tera. Pada tahun 2024 jumlah timbangan digital yang

bertanda tera sah mengalami kenaikan sebesar 16,63% dibandingkan dengan jumlah timbangan digital yang bertanda tera sah pada tahun 2023. hal ini menunjukkan bahwa ada pengusaha atau pedagang mulai beralih dari timbangan manual ke digital, yang tidak memerlukan perlengkapan anak timbang dan dianggap lebih akurat dibandingkan timbangan manual. sedangkan untuk timbangan manual yang bertanda tera sah mengalami kenaikan sebesar 6,24%. Timbangan digital yang bertanda tera sah mengalami kenaikan secara konsisten dari tahun ke tahun, kenaikan pada tahun 2024 merupakan kenaikan tertinggi sejak tahun 2020. Pada tahun 2024 mengalami kenaikan sebesar 7,45%.

Tabel 2.241 Persentase Alat-Alat Ukur Takar, Timbang dan Perlengkapannya Tertanda Tera; 2020-2024 (2)

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah Timbangan digital yang bertanda tera sah	136	332	369	457	533
Jumlah Timbangan manual yang bertanda tera sah	4.285	7.157	6.573	6.234	6.623
Jumlah Timbangan Digital dan Manual Bertanda Tera Sah	4.421	7.489	6.942	6.691	7.156
Persentase Timbangan digital yang bertanda tera sah	3,08%	4,43%	5,32%	6,83%	7,45%

Sumber: DPPKUM Kota Magelang, 2025

Perlindungan terhadap konsumen salah satunya diwujudkan juga melalui pengawasan terhadap pelaku usaha pemilik gudang, fasilitas penyimpanan bahan berbahaya dan pelaku usaha minuman berakohol. Perlu adanya persetujuan yang dituangkan dalam bentuk surat keputusan atau pemenuhan persyaratan dan/atau komitmen bagi pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatan. Pada tahun 2024 terdapat kenaikan pelaku usaha yang memiliki ijin usaha yaitu sebesar 96,12%.

Tabel 2.242 Persentase Pelaku Usaha yang Memiliki Ijin Usaha, 2020-2024

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah Usaha yang Memiliki Ijin Usaha (Gudang, Minuman Beralkohol dan Penyimpanan Bahan Berbahaya)	45	45	47	48	49
Jumlah Usaha yang Ada (Gudang, Minuman Beralkohol dan Penyimpanan Bahan Berbahaya)	52	52	52	51	51
Persentase Pelaku Usaha yang Memiliki Ijin Usaha	86,54%	86,54%	90,38%	94,12%	96,08%

Sumber: DPPKUM Kota Magelang, 2024

Sarana perdagangan lain yang juga berperan penting dalam perekonomian Kota Magelang adalah pusat jajanan kuliner atau biasa disebut shelter Pedagang Kaki Lima (PKL). Pemerintah Kota Magelang melakukan penataan PKL sejak tahun 2013 dengan membangun shelter PKL di kawasan Stadion Abu Bakrin Kota Magelang atau lebih dikenal Kawasan Kuliner Kartikasari. Selanjutnya Pemerintah Kota Magelang melakukan penataan PKL di lokasi lain dengan membangun shelter yang lainnya. Penataan PKL di Kota Magelang dilatarbelakangi peningkatan jumlah PKL, yang berdampak pada tata ruang dan keindahan kota. Oleh karena itu peningkatan jumlah PKL dibarengi dengan pembangunan shelter dan penempatan PKL di dalam shelter yang ada. Pada tahun 2024 terdapat penambahan 1 shelter PKL yaitu Shelter Kuliner Ngesengan. dimana shelter PKL ini memiliki daya tarik sendiri karena tempatnya yang strategis berada di sekitar Aloon-aloon Kota Magelang. Penambahan Shelter PKL Ngesengan menjadikan jumlah shelter PKL di Kota Magelang menjadi 23 unit yang tersebar di beberapa wilayah di Kota Magelang.

Tabel 2.243 Jumlah Shelter dan PKL di Kota Magelang, 2020-2024

TAHUN	JUMLAH SHELTER	JUMLAH PKL
2020	19	1.048

TAHUN	JUMLAH SHELTER	JUMLAH PKL
2021	19	1.048
2022	22	1.051
2023	22	900
2024	23	966

Sumber: DPPKUM Kota Magelang, 2025

Kenyamanan dan keamanan pengujung baik dari dalam kota maupun luar kota menjadi prioritas utama dalam pengelolaan shelter yang ada. Kriteria yang digunakan sebagai penilai kondisi shelter adalah lahan parkir, toilet, tempat cuci tangan, instalasi listrik, instalasi air, adanya tempat sampah, pengelolaan limbah air, APAR, keamanan, akses untuk disabilitas. dari 23 shelter yang ada, 52,17 % dalam kondisi sangat baik, 39,13% dalam kondisi baik.

Tabel 2.244 Kondisi Shelter di Kota Magelang, 2021-2024

NO	NAMA SHELTER	KONDISI SHELTER			
		2021	2022	2023	2024
1	JENGGOLO I	BAIK	BAIK	SANGAT BAIK	SANGAT BAIK
2	JENGGOLO II	BAIK	BAIK	SANGAT BAIK	SANGAT BAIK
3	DAHA	SEDANG	BAIK	BAIK	BAIK
4	BADAAN	BAIK	BAIK	SANGAT BAIK	SANGAT BAIK
5	JENDRALAN	SEDANG	BAIK	BAIK	BAIK
6	SEJUTA BUNGA	BAIK	BAIK	SANGAT BAIK	SANGAT BAIK
7	SRIWIJAYA	SEDANG	BAIK	BAIK	BAIK
8	ARMADA ESTATE	SEDANG	BAIK	BAIK	BAIK
9	ALIBASAH SENTOT	SEDANG	BAIK	BAIK	BAIK
10	BUNGA TABUR / SINGOSARI	SEDANG	SEDANG	SEDANG	SEDANG
11	KARTIKA SARI	BAIK	BAIK	SANGAT BAIK	SANGAT BAIK
12	PURI BOGA KENCANA	SEDANG	SEDANG	SEDANG	SEDANG
13	SIGALUH	SEDANG	BAIK	BAIK	BAIK
14	KALINGGA	SEDANG	BAIK	BAIK	BAIK
15	KAUMAN BARAT	SEDANG	BAIK	BAIK	BAIK
16	TUGURAN	BAIK	BAIK	SANGAT BAIK	SANGAT BAIK
17	TVJ dan ANGKRINGAN	BAIK	BAIK	SANGAT BAIK	SANGAT BAIK
18	LEMBAH TIDAR I	BAIK	BAIK	SANGAT BAIK	SANGAT BAIK
19	REJOMULYO	SEDANG	BAIK	SANGAT BAIK	SANGAT BAIK
20	GIRILOYO	-	BAIK	BAIK	BAIK
21	DIPONEGORO	-	BAIK	SANGAT BAIK	SANGAT BAIK
22	LEMBAH TIDAR II	-	SEDANG	SANGAT BAIK	SANGAT BAIK

NO	NAMA SHELTER	KONDISI SHELTER			
		2021	2022	2023	2024
23	NGESENAN	-	-	-	SANGAT BAIK

Sumber: DPPKUM Kota Magelang, 2025

Secara umum, sarana distribusi perdagangan di Kota Magelang dalam kondisi optimal. Sarana distribusi perdagangan dalam kondisi baik mengalami kenaikan dari pada tahun sebelumnya, dengan persentase 85,71%. Peningkatan persentase ini dipengaruhi oleh penambahan jumlah shelter yaitu PKL Ngesengan yang dalam kondisi baik.

Tabel 2.245 Sarana Distribusi Perdagangan dalam Kondisi Baik, 2020-2024

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah Pasar Ber-SNI	1	1	1	1	1
Jumlah Shelter dalam Kondisi Baik	10	18	7	22	23
Jumlah Pasar	5	5	5	5	5
Jumlah Shelter PKL	19	19	22	22	23
Persentase Sarana Distribusi Perdagangan dalam Kondisi Baik	45,83%	79,17%	29,63%	85,19%	85,71%

Sumber: DPPKUM Kota Magelang, 2025

Tabel 2.246 Koefisien Harga Antar Waktu/Disparitas Harga, 2020-2024

Tahun	Koefisien Harga Antar Waktu
2020	3,68
2021	0,92
2022	7,99
2023	4,88
2024	1,34

Sumber: DPPKUM Kota Magelang, 2025

Kota Magelang sebagai sentra jalur distribusi barang yang menghubungkan antara daerah penghasil komoditas pertanian dan peternakan yang ada di Jawa Tengah. Pemantauan harga dilakukan terhadap 10 komoditas, antarlain : beras, gula pasir, jagung, kedelai, tepung terigu, minyak goreng, susu kental manis, daging ayam, daging sapi, dan telur. Perkembangan harga yang cukup fluktuatif menjadikan pemantauan harga dilakukan secara kontinyu.

Tabel 2.247 Perkembangan Ekspor Komoditi Kota Magelang, 2020-2024

NO	MATA DAGANGAN	SATUAN	2020		2021		2022		2023		2024		NEGARA TUJUAN
			VOL	USD\$	VOL	USD\$	VOL	USD\$	VOL	USD\$	VOL	USD\$	
1	Plastik	KGM	1.402.087	3.018.254	609,012	2.209.933	1.449.996	2.988.899,85	1.460.173	2.812.621		3.087.097	Jepang, Somalia, Uni Emirat Arab
2	Kerang		-	-	-	7,367	-	35.713,08	-	-			
3	Decorative		-	49,379	164	61,094	-	-	-	-			
4	Batok Arang	KG	-	-	53,402	55,178	126,207	120.530,15	-	-	270000	11.340	Malaysia

NO	MATA DAGANGAN	SATUAN	2020		2021		2022		2023		2024		NEGARA TUJUAN
			VOL	USD\$	VOL	USD\$	VOL	USD\$	VOL	USD\$	VOL	USD\$	
5	Perkakas Plastik	KGM	-	-	-	-	57,182	126,839	-	-			
	Jumlah		1.402.087	3.067.633	662,578	2.333.573	1.633.385	3.271.982,08	1.460.173	2.812.621	270.000	3.098.437	

Sumber: DPPKUM Kota Magelang, 2025

2.1.3.3.5 Perindustrian

Sektor industri pengolahan memainkan peran cukup penting sebagai penggerak dan penopang perekonomian daerah. Perkembangan sektor industri mendukung perluasan lapangan usaha dan kesempatan kerja sehingga meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Pada Tahun 2023, kategori industri pengolahan merupakan penyumbang terbesar terhadap kontribusi PDRB Kota Magelang yakni sebesar 16,49 % dengan nilai 1.811,59 miliar rupiah sedangkan laju pertumbuhannya sebesar 4,64%.

Tabel 2.248 Kontribusi Lapangan Usaha Industri Pengolahan terhadap PDRB Kota Magelang beserta Laju Pertumbuhan, 2020-2024

Tahun	Kontribusi (%)	Laju Pertumbuhan (%)
2020	16,13	-0,21
2021	16,60	4,69
2022	16,46	3,38
2023	16,49	4,64
2024	NA	NA

Sumber: BPS Kota Magelang, 2025

2.1.3.3.5.1 Perkembangan Industri Kecil dan Menengah

Jumlah industri kecil mengalami penambahan dari tahun 2023 sejumlah 1.918 menjadi 2.126 pada tahun 2024. Hal ini menunjukkan tingkat perekonomian yang semakin membaik di Kota Magelang. Berdasarkan database terjadi penambahan 208 industri kecil di Kota Magelang di tahun 2024, dengan rincian 34 industri kecil di Kecamatan Magelang Utara, 69 industri kecil di Kecamatan Magelang Tengah dan 105 industri kecil di Kecamatan Magelang Selatan. Penambahan jumlah industri ini juga menambah tenaga kerja yang terserap dari sektor industri kecil menjadi 3.797 orang dengan presentase terbesar di Kecamatan Magelang Selatan sebesar 27,45 % atau sebanyak 311 tenaga kerja.

Tabel 2.249 Perkembangan Industri Kecil Kota Magelang, 2020-2024

Kecamatan	2020		2021		2022		2023		2024	
	Jumlah	Tenaga Kerja	Jumlah	Tenaga Kerja	Jumlah	Tenaga Kerja	Jumlah	Tenaga Kerja	Jumlah	Tenaga Kerja
Magelang Utara	441	631	494	728	556	959	553	956	587	1.114
Magelang Tengah	626	912	657	1.028	698	1.168	708	1.175	777	1239
Magelang Selatan	613	741	634	1.134	628	1.125	657	1.133	762	1.444
Total	1.680	2.284	1.785	2.890	1.882	3.252	1.918	3.264	2.126	3797

Sumber: DPPKUM Kota Magelang, 2025

Industri menengah juga berkembang di Kota Magelang meskipun tidak sebanyak industri kecil, dan jumlahnya tetap sejak tahun 2021 hingga tahun 2023. Bahkan serapan tenaga kerja pada industri tersebut tetap sejak tahun

2022 hingga 2023. Jenis usaha industri menengah Kota Magelang didominasi oleh industri percetakan dan industri plastik.

Tabel 2.250 Jumlah Industri Menengah dan Jumlah Tenaga Kerja Industri Menengah Kota Magelang, 2020-2024

Kecamatan	2020		2021		2022		2023		2024	
	Jumlah	Tenaga Kerja	Jumlah	Tenaga Kerja	Jumlah	Tenaga Kerja	Jumlah	Tenaga Kerja	Jumlah	Tenaga Kerja
Magelang Utara	6	128	7	85	7	100	7	100	1	55
Magelang Tengah	2	46	11	35	11	151	11	151		
Magelang Selatan	4	1,161	22	1,746	22	2,099	22	2099	4	2307
Jumlah	12	1,335	40	1,866	40	2350	40	2350	5	2362

Sumber: DPPKUM Kota Magelang, 2025

Secara agregat jumlah industri kecil dan menengah naik sejak tahun 2020 meskipun dengan persentase pertumbuhan cenderung menurun sejak tahun 2021. Namun pada tahun 2024 pertumbuhan industri kecil dan menengah mengalami kenaikan cukup signifikan yakni sebesar 8,84%, angka ini lebih tinggi daripada pertumbuhan pada tahun 2021.

Tabel 2.251 Pertambahan Jumlah Industri Kecil Menengah, 2020-2024

Tahun	Jumlah Industri Kecil Menengah	Prosentase Pertambahan IKM
2020	1,709	-0,29%
2021	1,834	7,31%
2022	1922	4,80%
2023	1958	1,87%
2024	2131	8,84%

Sumber: DPPKUM Kota Magelang, 2025

Pemerintah Kota Magelang terus mendorong para pelaku industri untuk meningkatkan daya saing produk, tidak hanya dari jumlah omset industri namun juga sisi legalitas perijinan industri. Pada tahun 2024, Industri Kecil Menengah (IKM) yang memiliki legalitas usaha naik sebesar 7,19% dari tahun 2022. Hal ini menunjukkan tingkat kesadaran dari IKM terhadap legalitas usaha.

Tabel 2.252 Persentase Industri Kecil Menengah yang Memiliki Legalitas Usaha, 2020-2024

Tahun	Jumlah Ijin yang Terpantau dan Dianalisis dalam Laporan Hasil Pemantauan	Persentase IKM yang Memiliki Legalitas Usaha (Pertumbuhan)
2020	563	4,45%
2021	679	25,97%
2022	793	16,79%
2023	793	16,79%
2024	1423	79,45%

Sumber: DPPKUM Kota Magelang, 2025

2.1.3.3.5.2 Pengendalian dan Informasi Industri

Sejak tahun 2022 seluruh ijin yang terpantau dan dianalisis selaras dengan penerbitan Ijin Usaha Industri.

Tabel 2.253 Jumlah Hasil Pemantauan dan Pengawasan Perijinan Industri, 2020-2024

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah Ijin yang Terpantau dan Dianalisis dalam Laporan Hasil Pemantauan	1	2	21	62	84
Jumlah Ijin Usaha Industri (IUSI) yang diterbitkan	1	3	21	62	84
Persentase Jumlah Hasil Pemantauan dan Pengawasan dengan Jumlah IUI yang Dikeluarkan oleh Instansi Terkait	100%	66,67%	100%	100%	100%

Sumber: DPPKUM Kota Magelang, 2025

Upaya lain yang bisa dilakukan oleh industri kecil dan menengah untuk memperkuat daya saingnya adalah peningkatan manajemen mutu melalui standarisasi dan sertifikasi. Hanya saja, untuk industri kecil dan menengah di Kota Magelang hanya ada satu yang memiliki sertifikat sebagai bukti telah melaksanakan manajemen mutu, yaitu PT. Galant yang usahanya bergerak di pakaian bayi. Sedangkan industri yang lain tidak memiliki sertifikat atau tidak memperpanjang pengurusan sertifikatnya dikarenakan biaya sertifikasi yang cukup tinggi.

Selain legalitas perijinan, industri memiliki kewajiban untuk integrasi data dan informasi dalam SIInas (Sistem Informasi Industri Nasional). Industri Kecil dan Menengah (IKM) berkewajiban melaporkan data industri ke sistem SIINAS dan SIIDA. Pelaporan ke dalam kedua sistem tersebut dipantau oleh Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UMKM. Data tersebut memuat informasi industri dengan batas waktu 0-6 bulan (50%), informasi industri dengan batas waktu 7-12 bulan (25%), menyampaikan informasi industri (5%), informasi produksi dan kapasitas produksi (10%) serta informasi bahan baku dan bahan penolong (10%).

2.1.3.3.6 Transmigrasi

Transmigrasi di Kota Magelang tidak banyak peminatnya walaupun wilayah perkotaan yang padat penduduk di Kota Magelang. Terdapat 3 (tiga) kepala keluarga yang diberangkatkan ke UPT Padang Tarok Kabupaten Sijunjung Provinsi Sumatera Barat. Pada tahun 2019, hanya ada 1 (satu) kepala keluarga yang diberangkatkan ke UPT Kahingai Kab. Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah. Selama kurun waktu tahun 2020-2022 tidak ada pemberangkatan transmigran dari Kota Magelang. Tahun 2023, Kota Magelang tidak mendapatkan alokasi untuk memberangkatkan transmigrasi sehingga tidak ada pemberangkatan kepala keluarga walaupun ada peminat 2 (dua) kepala keluarga.

2.1.3.4 Fokus Urusan Pendukung Fungsi Pemerintahan

2.1.3.4.1 Sekretariat Daerah

2.1.3.4.1.1 Bagian Pemerintahan

Dalam kurun waktu 2020-2024, persentase kebijakan administrasi tata pemerintahan yang terfasilitasi mampu terus diusahakan agar berada pada realisasi 100%. Pada tahun 2024, terdapat 6 (enam) kebijakan administrasi tata pemerintahan yang terfasilitasi.

Tabel 2.254 Persentase Kebijakan Administrasi Tata Pemerintahan yang Terfasilitasi, 2019-2024

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah kebijakan administrasi tata pemerintahan yang terfasilitasi	1	1	1	7	6
Jumlah kebijakan tata pemerintahan	1	1	1	7	6

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase kebijakan administrasi tata pemerintahan yang terfasilitasi	100%	100%*	100%	100%	100%

Sumber: Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Magelang, 2025

*: mengacu data tahun 2021

Selanjutnya mengenai persentase kerja sama daerah yang terfasilitasi juga dapat dipertahankan 100% selama 5 (lima) tahun terakhir (2020-2024). Pada tahun 2024, terdapat 52 jumlah kerja sama daerah yang difasilitasi oleh Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Magelang.

Tabel 2.255 Persentase Kerja Sama Daerah yang Terfasilitasi, 2019-2024

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah kerja sama daerah yang terfasilitasi	1	1	10	52	52
Jumlah total rencana kerjasama daerah yang diajukan	1	1	10	52	52
Persentase kerja sama daerah yang terfasilitasi	100%	100%	100%	100%	100%

Sumber: Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Magelang, 2025

2.1.3.4.1.2 Bagian Kesejahteraan Rakyat

Salah satu sasaran dari Misi 1 Kota Magelang (Mewujudkan Masyarakat yang Religius, Berbudaya, Beradab, Toleran, Berlandaskan Imtaq) yaitu Meningkatnya Toleransi yang digambarkan melalui indikator komposit yaitu nilai penguatan toleransi yang terbentuk dari 3 (tiga) indikator dimana 2 (dua) diantaranya adalah persentase pembinaan tokoh agama dan persentase santunan kepada pengelola tempat ibadah dimana pada tahun 2024 dapat direalisasikan dengan optimal.

Tabel 2.256 Capaian Indikator di Bidang Kesejahteraan Rakyat, 2020-2024

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase pembinaan tokoh agama	NA	NA	100%	100%	100%
Persentase santunan kepada pengelola tempat ibadah	NA	NA	92,72%	100%	100%
Persentase kebijakan di bidang kesejahteraan rakyat yang dilaksanakan	NA	NA	100%	100%	100%

Sumber: Bagian Kesra Sekretariat Daerah Kota Magelang, 2024

Berikutnya, indikator lainnya yang diampu oleh Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Magelang yaitu persentase kebijakan di bidang kesejahteraan rakyat yang dilaksanakan dimana sejak tahun 2022 sampai tahun 2024 telah terealisasi sebesar 100%.

2.1.3.4.1.3 Bagian Hukum

Indeks reformasi hukum di Kota Magelang menunjukkan tren positif dari tahun 2022-2023. Pada tahun 2022, indeks reformasi hukum Kota Magelang masih berada pada kategori B (cukup baik) dengan angka 66,85 dan pada tahun 2023 menunjukkan perbaikan, berada pada kategori BB (baik) dengan total nilai 77,57. Perbaikan indeks reformasi hukum tersebut memperlihatkan adanya perbaikan harmonisasi regulasi, peningkatan kompetensi Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagai perancang peraturan perundang-undangan yang berkualitas, dorongan terhadap peningkatan kualitas regulasi atau deregulasi peraturan perundang-undangan berdasarkan hasil revidu, serta penataan *database* peraturan perundang-undangan.

Tabel 2.257 Indeks Reformasi Hukum, 2019-2023

Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
Indeks Reformasi Hukum	-	-	-	66,85	77,57

Sumber: Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, 2024

Berikutnya, indikator yang juga menjadi tanggung jawab dari Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Magelang yaitu persentase produk hukum yang terfasilitasi. Realisasi pada tahun 2024 berada di angka 100%, mampu mempertahankan realisasi tahun 2023 dengan jumlah produk hukum yang terfasilitasi di tahun 2024 sebanyak 852.

Tabel 2.258 Persentase Produk Hukum yang Terfasilitasi, 2020-2024

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah produk hukum yang terfasilitasi	NA	NA	856	892	852
Jumlah seluruh produk hukum yang diajukan	NA	NA	902	892	852
Persentase produk hukum yang terfasilitasi	NA	NA	94,90%	100%	100%

Sumber: Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Magelang, 2025

2.1.3.4.1.4 Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam

Dalam kurun waktu 2019-2023, pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Kota Magelang masih menunjukkan perlunya perbaikan. Hal tersebut diperlihatkan dengan indikator *Return on Assets* (RoA) BUMD Kota Magelang dimana pada tahun 2023 berada pada angka 1,07; menurun dari tahun 2022 yang sebesar 2,32; dan nilai tersebut masih lebih rendah daripada kondisi tahun 2019 yang berada pada angka 3,78. Dari nilai RoA tersebut dapat dikatakan bahwa asset yang dimiliki oleh BUMD belum dikembangkan secara optimal sehingga belum mampu menghasilkan laba yang signifikan.

Tabel 2.259 Return on Assets (RoA) BUMD, 2019-2023

No.	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
1.	Return on Assets (RoA) BUMD	3,78	-0,06	1,02	2,32	1,07

Sumber: Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kota Magelang, 2024

Di lain sisi, jika dilihat dari kondisi sektor keuangan milik pemerintah Kota Magelang, sektor keuangan bank milik kota yaitu Bank Magelang belum berkontribusi secara riil dalam kegiatan ekonomi maupun investasi. Bank Magelang belum mampu menarik simpanan maupun menyalurkan pinjaman secara signifikan. Kondisi tersebut tergambarkan melalui 2 (dua) indikator yaitu rasio dana pihak ketiga pada bank milik kota terhadap PDRB maupun rasio kredit pada bank milik kota terhadap PDRB. Dalam kurun waktu 2019-2023, kedua indikator tersebut secara umum masih berada pada kisaran 1%.

Tabel 2.260 Rasio Total Dana Pihak Ketiga dan Total Kredit pada Bank Milik Kota terhadap PDRB, 2019-2023

No.	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
1.	Rasio Dana Pihak Ketiga pada Bank Milik Kota terhadap PDRB	1,72	1,89	2,06	1,96	1,98
2.	Rasio Kredit pada Bank Milik Kota terhadap PDRB	1,82	1,83	1,99	1,92	1,80

Sumber: Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kota Magelang, 2024

Dari sisi kebijakan, jumlah koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang perekonomian dan SDA pada tahun 2024 masih sama dengan tahun 2023. Terdapat 84 (delapan puluh empat) rencana kebijakan di bidang perekonomian dan SDA yang mampu dieksekusi seluruhnya. Delapan puluh empat kebijakan tersebut terbagi ke dalam 6 (enam) jenis kebijakan bidang perekonomian dan SDA, meliputi (1) Pengendalian dan Distribusi Perekonomian/Tim Pengendalian Inflasi Daerah; (2) Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil; (3) Pembinaan dan Monitoring Evaluasi BUMD dan BLUD; (5) Monitoring dan Evaluasi Energi dan Air; serta (6) Monitoring dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT).

Tabel 2.261 Persentase Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Perekonomian dan SDA yang dilaksanakan, 2019-2023

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah koordinasi dan sinkronisasi program perekonomian yang dilaksanakan	NA	NA	41	84	84
Jumlah koordinasi dan sinkronisasi program perekonomian yang direncanakan	NA	NA	70	84	84
Persentase koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang perekonomian dan SDA yang dilaksanakan	NA	NA	58,57%	100%	100%

Sumber: Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Magelang, 2024

2.1.3.4.1.4.1 Bagian Administrasi Pembangunan

Dalam kurun waktu 2020-2024, persentase progress fisik seluruh OPD di Kota Magelang sudah mampu berada di atas angka 98%. Pada tahun 2024, persentase progress fisik seluruh OPD berada di angka 99,49%; menunjukkan perbaikan daripada tahun 2023 yang berada pada 98,85%. Dari angka tersebut dapat disimpulkan bahwa hampir seluruh kegiatan yang tersebar di berbagai OPD Pemerintah Kota Magelang dapat terlaksana sepenuhnya

Tabel 2.262 Persentase Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Perekonomian dan SDA yang dilaksanakan, 2019-2023

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase progress fisik seluruh OPD	98,20	99,18	99,60	98,85	99,49

Sumber: Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Magelang, 2025

2.1.3.4.1.5 Bagian Pengadaan Barang dan Jasa

Tingkat kematangan UKPBJ Kota Magelang sejak tahun 2023 sudah berada pada level 3 (proaktif). UKPBJ pada level proaktif artinya berorientasi pada pemenuhan kebutuhan pelanggan melalui kolaborasi, penguatan fungsi perencanaan bersama pelanggan internal maupun eksternal. Capaian tingkat kematangan UKPBJ pada level 3 sudah sesuai dengan instruksi Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sehingga kedepan capaian ini perlu untuk dipertahankan.

Tabel 2.263 Tingkat Kematangan UKPBJ, 2019-2023

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
Tingkat kematangan UKPBJ	NA	NA	2,00	3,00	3,00

Sumber: Bagian Pemerintahan, Sekretariat Daerah Kota Magelang, 2024

2.1.3.4.1.6 Bagian Umum

Indeks Kepuasan Pimpinan (Bagian Umum) pada tahun 2024 berada pada angka 83,92. Nilai tersebut merupakan capaian tertinggi yang diperoleh sejak tahun 2021. Dengan membaiknya realisasi Indeks Kepuasan Pimpinan

tersebut dapat menggambarkan bahwa terdapat perbaikan terhadap 9 (sembilan) layanan umum yang dirasakan oleh Wali Kota, Wakil Wali Kota, juga Sekretaris Daerah yaitu (1) persyaratan pelayanan; (2) sistem, mekanisme, prosedur; (3) waktu penyelesaian pelayanan; (4) biaya/tarif; (5) produk/hasil layanan; (6) kompetensi pelaksana; (7) perilaku pelaksana; (8) penanganan pengaduan; dan (9) sarana dan prasarana.

Tabel 2.264 Indeks Kepuasan Pimpinan (Bagian Umum), 2020-2024

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
Indeks Kepuasan Pimpinan (Bagian Umum)	NA	NA	79,17	82,41	83,92

Sumber: Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Magelang, 2025

2.1.3.4.1.7 Bagian Organisasi

Pada tahun 2023, Indeks Reformasi Birokrasi Kota Magelang berada pada angka 84,85 (kategori A-) dengan rincian skor yaitu 73,54/100 pada RB General dan 11,31/20 pada RB tematik. Pada RB Tematik, nilai yang diperoleh Kota Magelang tidak terlepas dari keberhasilan dalam mengurangi angka kemiskinan, pengangguran, serta anak tidak sekolah. Hal tersebut dapat tercapai karena adanya komitmen bersama untuk terus meningkatkan pelayanan publik bagi masyarakat Kota Magelang.

Tabel 2.265 Capaian Indeks Reformasi Birokrasi, 2023

No.	Penilaian	Bobot	Nilai
1	RB General	100	73,54
2	RB Tematik	20	11,31
3	Indeks RB	120	84,85

Sumber: Hasil Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi, 2019-2023

Meskipun demikian, perlu menjadi catatan bahwa hasil evaluasi reformasi birokrasi tahun 2023 tidak dapat dibandingkan dengan hasil evaluasi sebelumnya. Hal tersebut mengacu pada Peraturan Menteri PANRB Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024 dan peraturan turunannya terdapat perubahan kerangka logis, komponen indikator, bobot, dan kriteria penilaian yang signifikan.

Tabel 2.266 Indeks Reformasi Birokrasi, 2019-2023

Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
Indeks Reformasi Birokrasi	64,75	66,33	67,11	68,24	84,85

Sumber: Hasil Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi, 2019-2023

Tabel 2.267 Indeks Pelayanan Publik, 2019-2023

Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
Indeks Pelayanan Publik	-	-	4,30	4,51	4,51

Sumber: Hasil Evaluasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik, 2019-2023

Selaras dengan indeks reformasi birokrasi yang menunjukkan peningkatan, indeks pelayanan publik dari tahun 2021-2023 juga relatif menggambarkan perbaikan. Capaian indeks pelayanan publik tahun 2023 telah berada pada kategori A (pelayanan prima) dengan angka 4,51. Angka tersebut lebih baik daripada capaian 2021 sebesar 4,30 yaitu kategori A- (sangat baik). Meskipun demikian, angka 4,51 pada tahun 2023 masih tetap jika dibandingkan capaian tahun 2022. Pada tahun 2023, lokus penilaian indeks pelayanan publik berada pada RSUD Tidar, Dinas Sosial, juga Kecamatan Magelang Tengah. Dari hasil tersebut dapat digambarkan bawa kondisi

kebijakan pelayanan, profesionalisme SDM, sarana prasarana, sistem informasi pelayanan publik, konsultasi dan pengaduan, serta inovasi pelayanan sudah baik dilakukan di Kota Magelang.

Selain itu, dilihat dari nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP), Kota Magelang terus menunjukkan tren positif selama 2019-2023. Tahun 2023, nilai SAKIP Kota Magelang berada di angka 72,12 (kategori BB). Dari nilai tersebut, dapat diartikan bahwa implementasi AKIP sudah sangat baik pada pemerintah daerah dan sebagian besar unit kerja, ditandai dengan mulai terwujudnya efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja, serta memiliki sistem manajemen kinerja yang andal dan berbasis teknologi informasi.

Tabel 2.268 Nilai SAKIP, 2019-2023

Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
Nilai SAKIP	66,47	67,26	69,15	70,49	72,12

Sumber: Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP), 2022-2023

Jika dilihat lebih rinci, seluruh komponen penilaian SAKIP mulai dari perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, dan evaluasi akuntabilitas kinerja internal menunjukkan perbaikan di tahun 2023. Meskipun demikian, terdapat beberapa catatan dari hasil evaluasi SAKIP 2023 yaitu sebagai berikut.

1. Perencanaan Kinerja

Pemanfaatan pohon kinerja sebagai dasar penyusunan dokumen perencanaan belum sepenuhnya dilakukan sehingga keselarasan antara pohon kinerja yang disusun dengan dokumen perencanaan belum tergambar dengan baik. Selain itu, masih ditemukan Perangkat Daerah dimana dokumen perencanaan jangka menengah dan tahunan yang target dan formulasi perhitungan indikator kinerja belum selaras.

2. Pengukuran Kinerja

Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Daerah yang *Specific, Measurable, Achievable, Relevance, Timebound* (SMART) belum ditetapkan dan diformalkan. Selain itu, belum seluruh Perangkat Daerah berkomitmen dalam menggunakan smart.magelang.go.id sebagai sarana monitoring dan evaluasi secara bulanan yang terlihat dari belum adanya feedback perbaikan dari pimpinan untuk kinerja yang belum mencapai target. Selanjutnya, hasil pengukuran kinerja berjangka belum digunakan sebagai dasar pemberian *reward* dan *punishment* sehingga budaya kinerja belum terbentuk dengan baik.

3. Pelaporan Kinerja

Belum seluruh laporan kinerja Perangkat Daerah menyajikan data secara time series. Selain itu, informasi yang mendalam terkait penyebab tercapai/tidak tercapai dari setiap indikator kinerja belum sepenuhnya dilakukan. Lebih dari itu, pelaporan kinerja belum dimanfaatkan sebagai dasar perbaikan perencanaan kinerja karena masih ditemukan penetapan target kinerja tahun berjalan yang masih rendah daripada realisasi tahun sebelumnya.

4. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

Pedoman evaluasi internal yang dimiliki Pemerintah Kota Magelang masih dalam proses penetapan. Selain itu, hasil evaluasi akuntabilitas kinerja yang telah dilakukan belum memacu perbaikan akuntabilitas kinerja secara signifikan.

Tabel 2.269 Rincian Nilai SAKIP, 2022-2023

No.	Komponen yang Dinilai	Bobot	Nilai	
			2022	2023
a.	Perencanaan Kinerja	30	23,25	23,42
b.	Pengukuran Kinerja	30	20,85	21,47
c.	Pelaporan Kinerja	15	11,09	11,24
d.	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	15,30	15,99

No.	Komponen yang Dinilai	Bobot	Nilai	
			2022	2023
	Nilai Hasil Evaluasi	100	70,49	72,12
Tingkat Akuntabilitas Kinerja			BB	BB

Sumber: Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP), 2022-2023

Selanjutnya, jika dilihat dari tingkat kematangan organisasi, pada tahun 2023, seluruh OPD dalam lingkup Pemerintah Kota Magelang minimal sudah memiliki tingkat kematangan sedang. Rinciannya yaitu 14 (empat belas) OPD berada pada tingkat kematangan sedang dan 14 (empat belas) lainnya sudah berada pada kematangan tinggi.

Tabel 2.270 Indeks Kepuasan Pimpinan (Bagian Umum), 2019-2023

Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
Jumlah OPD dengan tingkat kematangan organisasi sedang	NA	15	21	23	28
Jumlah OPD	28	28	28	28	28
Persentase perangkat daerah tingkat kematangan organisasi sedang	NA	53,57%	75,00%	82,14%	100%

Sumber: Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Magelang, 2024

2.1.3.4.1.7.1 Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan

Indeks Kepuasan Pimpinan terhadap layanan dari Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kota Magelang berada pada angka yang relatif baik yaitu 84,00 pada tahun 2024. Sayangnya, nilai tersebut menurun dari tahun 2023 yang berhasil di angka 92,16. Turunnya nilai tersebut menjadi perhatian untuk melakukan akselerasi perbaikan kualitas komunikasi dan perhumasan dalam lingkup Pemerintah Kota Magelang.

Tabel 2.271 Indeks Kepuasan Pimpinan (Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan), 2019-2023

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
Indeks kepuasan pimpinan (protokol dan komunikasi pimpinan)	NA	NA	92,16	92,16	84,00

Sumber: Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Magelang, 2025

2.1.3.4.2 Sekretariat DPRD

Sekretariat DPRD adalah unsur penunjang kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta wewenang DPRD. Sekretariat DPRD membantu pencapaian kinerja DPRD. Dukungan pelaksanaan dilakukan untuk berbagai kegiatan seperti reses maupun sidang.

Tabel 2.272 Jumlah Rapat Badan/Panitia DPRD Kota Magelang, 2020-2024

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024*
Badan Musyawarah	23	1	17	17	5
Badan Anggaran	12	4	51	49	9
Badan Pembentukan Perda	1	3	16	15	8
Badan Kehormatan	3	13	5	4	0
Panitia Khusus	7	7	86	49	20

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024*
Jumlah	46	37	175	134	42*

Sumber: Sekretariat DPRD Kota Magelang, 2025

Pada tahun 2024, terdapat total 11 Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) yang masuk ke dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda), terdiri dari 9 raperda baru dan 2 raperda luncuran dari tahun 2023. Seluruh raperda tersebut berhasil ditetapkan menjadi Peraturan Daerah (Perda), menunjukkan komitmen Pemerintah Kota Magelang dalam menyelesaikan agenda legislasi daerah.

Namun, terdapat beberapa kendala dalam proses penetapan raperda menjadi perda. Salah satu kendala utama adalah keterlambatan dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pengusul dalam mengajukan rancangan perda, yang sering kali baru diajukan pada triwulan IV atau menjelang akhir tahun. Keterlambatan ini menyebabkan waktu pembahasan menjadi sangat terbatas, sehingga memengaruhi kelancaran proses fasilitasi di tingkat provinsi. Hal ini penting untuk diperhatikan karena pembentukan perda memerlukan waktu yang cukup panjang, termasuk tahap penyusunan, pembahasan, hingga proses fasilitasi.

Untuk mengatasi kendala ini, diperlukan perencanaan yang lebih matang dari setiap OPD pengusul, termasuk pengajuan raperda di awal tahun. Selain itu, penguatan koordinasi antar OPD dan optimalisasi peran tim penyusun raperda juga menjadi kunci untuk memastikan kelancaran proses legislasi. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan penyusunan perda ke depannya dapat berjalan lebih efektif dan efisien, mendukung tata kelola pemerintahan yang lebih baik.

Tabel 2.273 Raperda yang Disahkan Tepat Waktu, 2020-2024

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah perda yang ditetapkan	9	7	7	11	11
Jumlah raperda yang diajukan	10	8	15	13	11
Persentase Raperda yang disahkan tepat waktu	90.00	87.50	46.67	84.62	100

Sumber: Sekretariat DPRD Kota Magelang, 2025

Tabel 2.274 Persentase Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD yang Terlaksana, 2020-2024

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah alat kelengkapan DPRD yang terfasilitasi pelaksanaannya	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
Jumlah keseluruhan alat kelengkapan DPRD	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
Persentase Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD yang terlaksana	100%	100%	100%	100%	100%

Sumber: Sekretariat DPRD Kota Magelang, 2025

Kinerja pelaksanaan unsur pendukung urusan pemerintahan dari unsur Sekretariat DPRD dicapai melalui satu program dengan satu indikator, yang pada tahun 2023 memperoleh nilai sangat tinggi.

2.1.3.5 Fokus Urusan Penunjang Fungsi Pemerintahan

2.1.3.5.1 Perencanaan

Terdapat dua program dalam urusan perencanaan, yaitu Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah *dan* Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah. Indikator capaian kinerja Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah adalah Cakupan Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Yang Berkualitas. Di sisi lain, terdapat tiga indikator capaian kinerja Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah, yaitu Tingkat Implementasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, Tingkat Implementasi

Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA, serta Tingkat Implementasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan.

2.1.3.5.1.1 Cakupan Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah yang Berkualitas

Terdapat dua program dalam urusan perencanaan, yaitu Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah *dan* Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah. Indikator capaian kinerja Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah adalah Cakupan Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Yang Berkualitas. Di sisi lain, terdapat tiga indikator capaian kinerja Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah, yaitu Tingkat Implementasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, Tingkat Implementasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA, serta Tingkat Implementasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan.

Tabel 2.275 Cakupan Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah yang Berkualitas, 2020-2024

Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah usulan masyarakat dalam musrenbang yang memenuhi syarat untuk diakomodir	NA	NA	396	254	352
Jumlah usulan masyarakat dalam musrenbang	NA	NA	605	331	474
Jumlah rekomendasi dalam pengendalian dan evaluasi yang ditindaklanjuti	NA	NA	82	72	48
Jumlah rekomendasi dalam pengendalian dan evaluasi	NA	NA	105	83	59
Cakupan perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah yang berkualitas	NA	48,32	71,77	81,74	77,81

Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Magelang, 2025

Berdasarkan tabel tersebut, diketahui bahwa capaian indikator pada tahun 2024 mengalami kenaikan jika dibandingkan terhadap capaian tahun 2021, namun mengalami penurunan jika dibandingkan terhadap capaian tahun 2023. Apabila dirinci terhadap capaian pada masing-masing komponen pembentuknya, maka capaian pada aspek terkait usulan masyarakat dalam musrenbang mengalami penurunan pada tahun 2023 dan meningkat pada tahun 2024. Sementara, capaian pada aspek terkait rekomendasi dalam pengendalian dan evaluasi mengalami penurunan dalam dua tahun terakhir.

2.1.3.5.1.2 Tingkat Implementasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia

Komponen penghitungan capaian indikator Tingkat Implementasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia adalah sebagai berikut

- Jumlah indikator di Renstra OPD yang sesuai dengan indikator RPJMD (Bidang PPM) *terhadap* Jumlah seluruh indikator di Renstra OPD (Bidang PPM);
- Jumlah target di Renstra OPD yang sesuai dengan indikator RPJMD (Bidang PPM) *terhadap* Jumlah seluruh target di Renstra OPD (Bidang PPM); dan
- Jumlah program di Renstra OPD yang sesuai dengan indikator RPJMD (Bidang PPM) *terhadap* Jumlah seluruh program di Renstra OPD (Bidang PPM).

Berikut adalah rekapitulasi capaian indikator tersebut dalam lima tahun terakhir (2020-2024) beserta dengan capaian dari masing-masing komponen pembentuknya:

Tabel 2.276 Tingkat Implementasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, 2020-2024

Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah indikator di Renstra OPD yang sesuai dengan indikator RPJMD (Bidang PPM)	NA	NA	102	102	102
Jumlah seluruh indikator di Renstra OPD (Bidang PPM)	NA	NA	121	121	121
Jumlah target di Renstra OPD yang sesuai dengan indikator RPJMD (Bidang PPM)	NA	NA	102	102	102
Jumlah seluruh target di Renstra OPD (Bidang PPM)	NA	NA	121	121	121
Jumlah program di Renstra OPD yang sesuai dengan indikator RPJMD (Bidang PPM)	NA	NA	66	66	66
Jumlah seluruh program di Renstra OPD (Bidang PPM)	NA	NA	66	66	66
Tingkat implementasi perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	NA	100,00	90,58	90,58	90,58

Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Magelang, 2025

Berdasarkan tabel tersebut, diketahui bahwa capaian indikator stagnan. Capaian indikator diketahui dengan menghitung jumlah indikator, target, dan program di Renstra OPD yang bersesuaian dengan indikator RPJMD. Dengan demikian, selama tidak ada perubahan pada Renstra OPD dan RPJMD, capaian dari masing-masing komponen pembentuk indikator akan selalu sama pada setiap tahunnya.

2.1.3.5.1.3 Tingkat Implementasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA

Komponen penghitungan capaian indikator Tingkat Implementasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA adalah sebagai berikut:

- Jumlah indikator di Renstra OPD yang sesuai dengan indikator RPJMD (Bidang ESDA) *terhadap* Jumlah seluruh indikator di Renstra OPD (Bidang ESDA);
- Jumlah target di Renstra OPD yang sesuai dengan indikator RPJMD (Bidang ESDA) *terhadap* Jumlah seluruh target di Renstra OPD (Bidang ESDA); dan
- Jumlah program di Renstra OPD yang sesuai dengan indikator RPJMD (Bidang ESDA) *terhadap* Jumlah seluruh program di Renstra OPD (Bidang ESDA).

Berikut adalah rekapitulasi capaian indikator tersebut dalam lima tahun terakhir (2020-2024) beserta dengan capaian dari masing-masing komponen pembentuknya:

Tabel 2.277 Tingkat Implementasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA, 2020-2024

Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah indikator di Renstra OPD yang sesuai dengan indikator RPJMD (Bidang ESDA)	NA	NA	54	54	54
Jumlah indikator di Renstra OPD yang sesuai dengan indikator RPJMD (Bidang ESDA)	NA	NA	64	64	64
Jumlah Target di Renstra OPD yang sesuai dengan indikator RPJMD (Bidang ESDA)	NA	NA	54	54	54
Jumlah seluruh target di Renstra OPD (Bidang ESDA)	NA	NA	64	64	64
Jumlah Program di Renstra OPD yang sesuai dengan indikator RPJMD (Bidang ESDA)	NA	NA	46	46	46
Jumlah seluruh program di Renstra OPD (Bidang ESDA)	NA	NA	46	46	46

Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
Tingkat implementasi perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA	NA	100,00	90,63	90,63	90,63

Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Magelang, 2025

Berdasarkan tabel tersebut, diketahui bahwa capaian indikator stagnan. Capaian indikator diketahui dengan menghitung jumlah indikator, target, dan program di Renstra OPD yang bersesuaian dengan indikator RPJMD. Dengan demikian, selama tidak ada perubahan pada Renstra OPD dan RPJMD, capaian dari masing-masing komponen pembentuk indikator akan selalu sama pada setiap tahunnya.

2.1.3.5.1.4 Tingkat Implementasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan

Komponen penghitungan capaian indikator Tingkat Implementasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan adalah sebagai berikut:

- Jumlah indikator di Renstra OPD yang sesuai dengan indikator RPJMD (Bidang IWIL) *terhadap* Jumlah seluruh indikator di Renstra OPD (Bidang IWIL);
- Jumlah target di Renstra OPD yang sesuai dengan indikator RPJMD (Bidang IWIL) *terhadap* Jumlah seluruh target di Renstra OPD (Bidang IWIL); dan
- Jumlah program di Renstra OPD yang sesuai dengan indikator RPJMD (Bidang IWIL) *terhadap* Jumlah seluruh program di Renstra OPD (Bidang IWIL).

Berikut adalah rekapitulasi capaian indikator tersebut dalam lima tahun terakhir (2020-2024) beserta dengan capaian dari masing-masing komponen pembentuknya:

Tabel 2.278 Tingkat Implementasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan, 2020-2024

Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah indikator di Renstra OPD yang sesuai dengan indikator RPJMD (Bidang IWIL)	NA	NA	15	15	15
Jumlah indikator di Renstra OPD yang sesuai dengan indikator RPJMD (Bidang IWIL)	NA	NA	27	27	27
Jumlah Target di Renstra OPD yang sesuai dengan indikator RPJMD (Bidang IWIL)	NA	NA	15	15	15
Jumlah seluruh target di Renstra OPD (Bidang IWIL)	NA	NA	27	27	27
Jumlah Program di Renstra OPD yang sesuai dengan indikator RPJMD (Bidang IWIL)	NA	NA	15	15	15
Jumlah seluruh program di Renstra OPD (Bidang IWIL)	NA	NA	16	16	16
Tingkat implementasi perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	NA	85,71	70,83	70,83	70,83

Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Magelang, 2025

Berdasarkan tabel tersebut, diketahui bahwa capaian indikator stagnan. Capaian indikator diketahui dengan menghitung jumlah indikator, target, dan program di Renstra OPD yang bersesuaian dengan indikator RPJMD. Dengan demikian, selama tidak ada perubahan pada Renstra OPD dan RPJMD, capaian dari masing-masing komponen pembentuk indikator akan selalu sama pada setiap tahunnya.

2.1.3.5.2 Keuangan

2.1.3.5.2.1 Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2020 tentang Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah, Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) merupakan alat untuk menilai kualitas kinerja tata kelola keuangan daerah yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel. Dimensi dari IPKD dan indikator pengukurannya disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.279 Indikator Penilaian Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah

No	Dimensi	Bobot	Indikator
1	Kesesuaian dokumen perencanaan dan penganggaran	15	<ul style="list-style-type: none">- Kesesuaian nomenklatur program RPJMD dan RKPD- Kesesuaian nomenklatur program RKPD dan KUA-PPAS- Kesesuaian nomenklatur program KUA-PPAS dan APBD- Kesesuaian pagu program RKPD dan KUA-PPAS- Kesesuaian pagu program KUA-PPAS dan APBD
2	Pengalokasian anggaran belanja dalam APBD	20	<ul style="list-style-type: none">- Penyediaan alokasi anggaran belanja untuk fungsi Pendidikan sebesar 20%- Penyediaan alokasi anggaran belanja urusan Kesehatan sebesar 10%- Penyediaan alokasi anggaran belanja infrastruktur sebesar 25%- Penyediaan alokasi anggaran belanja untuk memenuhi standar pelayanan minimal
3	Transparansi pengelolaan keuangan daerah	15	<ul style="list-style-type: none">- Ketepatan waktu- Keteraksesan
4	Penyerapan anggaran	20	<ul style="list-style-type: none">- Anggaran belanja operasional- Anggaran belanja modal- Anggaran belanja tidak terduga- Anggaran belanja transfer (sesudah PP 12 tahun 2019)- Anggaran belanja pegawai- Anggaran belanja bunga- Anggaran belanja subsidi- Anggaran belanja hibah- Anggaran belanja bantuan social- Anggaran belanja bagi hasil dan bantuan keuangan- Anggaran belanja tidak terduga- Anggaran barang dan jasa- Anggaran belanja modal (PP 58 tahun 2005)
5	Kondisi keuangan daerah	15	<ul style="list-style-type: none">- Kemandirian keuangan- Fleksibilitas keuangan- Solvabilitas operasional- Solvabilitas jangka pendek- Solvabilitas jangka Panjang- Solvabilitas layanan

No	Dimensi	Bobot	Indikator
6	Opini Badan Pemeriksa Keuangan atas LKPD	15	Opini BPK atas LKPD dilakukan berdasarkan opini badan Pemeriksa Keuangan atas LKPD yang diaudit selama 3 (tiga) tahun terakhir berturut-turut

Sumber: Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2020

Penilaian IPKD dilakukan melalui sistem yang diakses melalui ipkd-bskdn.kemendagri.go.id. dengan melengkapi form penilaian yang tersedia. Pada tahun 2024, dilakukan penilaian IPKD terhadap dokumen tahun 2023. Hasil IPKD Tahun 2020-2024 Kota Magelang dapat dilihat pada table berikut.

Tabel 2.280 Nilai Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Magelang, 2020-2024

Tahun	Dimensi 1	Dimensi 2	Dimensi 3	Dimensi 4	Dimensi 5	Dimensi 6	IPKD	Kategori
2020	11,5790	19,6550	14,4828	15,0000	1,3072	15,0000	77,0239	Baik
2021	9,7740	19,3100	15,0000	10,0000	4,6330	15,0000	73,7173	Perlu Perbaikan
2022	9,8780	15,0000	15,0000	6,6667	9,4429	15,0000	70,9872	Perlu Perbaikan
2023	10,4226	14,8276	9,8276	13,3333	4,6081	15,0000	68,0192	Perlu Perbaikan
2024	9,9850	10,000	13,4483	15,0000	2,6789	15,0000	66,1126	Perlu Perbaikan

Sumber: ipkd-bpp.kemendagri.go.id

Terjadi tren penurunan secara total nilai IPKD dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024. Selain itu, nilai di beberapa dimensi pada kurun waktu 2020-2024 juga menunjukkan penurunan. Jika dibandingkan dengan tahun 2023, nilai Dimensi 1, Dimensi 2, dan Dimensi 5 tahun 2024 menunjukkan penurunan. Penyelarasan program dan pagu program mulai dari perencanaan sampai penetapan anggaran menjadi pengawalan yang cukup berat mengingat proses yang sangat dinamis dalam pelaksanaannya. Selain itu, pemenuhan mandatory spending dan SPM yang tidak terpenuhi adalah anggaran pendidikan dan infrastruktur.

2.1.3.5.2.2 Pengelolaan Barang Milik Daerah

Jumlah Barang Milik Daerah (BMD) yang dimanfaatkan menunjukkan kenaikan pada kurun waktu 2020-2024. Hal ini berlaku juga untuk rasio pemanfaatan BMD yang meningkat. Selain itu, upaya pensertifikatan tanah milik Pemkot Magelang juga terus dilakukan. Dari 619 bidang tanah milik Pemkot, sudah dilakukan pensertifikatan sebanyak 603 bidang tanah di tahun 2024.

Tabel 2.281 Gambaran Pengelolaan Barang Milik Daerah Kota Magelang, 2020-2024

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah BMD yang dimanfaatkan	NA	134	169	170	170
Jumlah potensi BMD yang bisa dimanfaatkan	NA	141	134	170	170
Rasio jumlah pemanfaatan BMD terhadap potensi pemanfaatan BMD	NA	95,04	126,12	100	100
Jumlah bidang tanah yang telah bersertifikat atas nama Pemerintah Kota Magelang	NA	549	579	603	603

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah bidang tanah milik Pemerintah Kota Magelang yang telah masuk neraca	NA	619	619	619	619
Rasio pensertifikatan tanah	NA	88,69	93,54	97,42	97,42

Sumber: BPKAD Kota Magelang, 2024

Manajemen aset pada Pemerintah Kota Magelang dari tahun ke tahun menunjukkan perbaikan, seperti dari yang sebelumnya masih manual kemudian pada beberapa tahun terakhir ini sudah menggunakan sistem yang mempermudah pengelolaan aset di Kota Magelang. Pemetaan aset yang masih bermasalah terus dilakukan untuk penyelesaian masalah aset yang ada. Selain itu, pemetaan aset juga perlu dilakukan.

2.1.3.5.2.3 Pendapatan Asli Daerah

Realisasi pendapatan daerah cenderung mengalami peningkatan dalam kurun waktu 2020-2024 meskipun pada tahun 2020 terjadi penurunan pendapatan daerah dari komponen dana perimbangan. Hal ini disebabkan adanya pengurangan alokasi Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) oleh Pemerintah Pusat karena kebijakan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) pada tahun 2020 dialihkan untuk penanganan pandemi Covid-19 dan upaya pemulihan ekonomi.

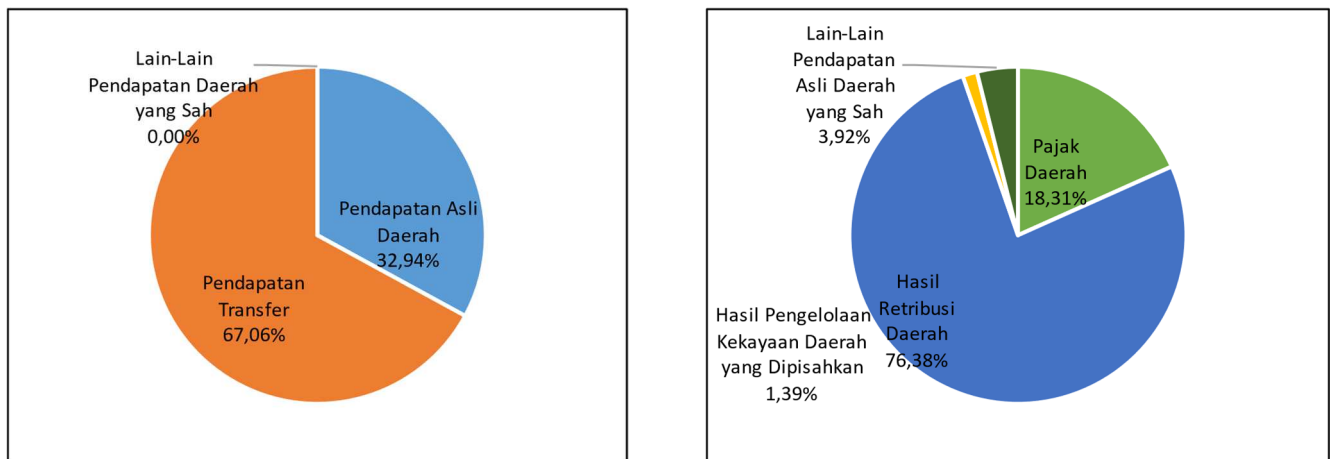
Tabel 2.282 Realisasi Pendapatan Kota Magelang, 2020-2024

Kode Rek	Uraian	Realisasi				
		2020	2021	2022	2023	2024*
4	Pendapatan	946.115.053.305	994.366.987.776	985.763.798.066	1.012.649.071.845	978.680.560.484
4.1	Pendapatan Asli Daerah	290.753.133.278	319.391.277.825	377.367.945.305	324.669.631.605	322.424.056.749
4.1.1	Pajak Daerah	35.958.686.531	38.088.697.858	50.527.714.269	58.054.811.662	59.039.350.736
4.1.2	Hasil Retribusi Daerah	5.318.140.927	6.255.220.022	7.596.084.765	8.387.983.403	246.252.704.261
4.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	9.217.035.218	8.504.726.391	8.960.533.259	10.877.026.257	4.485.922.571
4.1.4	Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	240.259.270.602	266.542.663.554	310.283.613.012	247.349.810.283	12.646.079.181
4.2	Pendapatan Transfer	525.575.219.057	657.129.779.951	607.888.056.321	685.987.237.240	656.256.503.735
4.3	Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah	129.786.700.970	17.845.930.000	507.796.440	1.992.203.000	0

Sumber: BPKAD Kota Magelang dan DataGo, Modul Daerah Dalam Angka Kota Magelang Tahun 2024

*Data 13 Januari 2025 (belum audit)

Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Magelang menunjukkan tren peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2020, PAD Kota Magelang sebesar Rp 290.753.133.278,- yang meningkat menjadi Rp 377.367.945.305,- di tahun 2022. Namun, pada tahun 2023 terjadi penurunan menjadi Rp 324.669.631.605,-. Angka PAD sementara sampai dengan tanggal 13 Januari 2025 adalah sebesar Rp 322.424.056.736,-. Proporsi PAD terbesar disumbang oleh Retribusi Daerah sebesar 67,06% di tahun 2024. Sementara Pajak Daerah menyumbang 18,31% dari total PAD Kota Magelang.



Gambar 2.67 Proporsi Pendapatan dan Pendapatan Asli Daerah Kota Magelang Tahun 2024 per 13 Januari 2025

Sumber: BPKAD Kota Magelang, Tahun 2025

Berikutnya, jika dilihat perbandingan antara pajak yang diterima Kota Magelang dengan total PDRB, maka rasionya masih sangat rendah yaitu masih kurang dari 1%. Meskipun relatif mengalami peningkatan dari tahun 2019-2023, namun rasio pajak daerah terhadap PDRB sampai tahun 2023 masih berada pada angka 0,53. Berdasarkan data rendahnya rasio pajak daerah terhadap PDRB tersebut maka dapat disimpulkan bahwa Kota Magelang belum mampu mandiri secara finansial karena APBD belum mampu berperan sebagai sumber utama pembiayaan pembangunan.

Tabel 2.283 Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB, 2019-2023

Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB	0,46	0,41	0,41	0,50	0,53

Sumber: BPKAD Kota Magelang, 2024

2.1.3.5.3 Kepegawaian

Terdapat satu program dalam urusan kepegawaian, yaitu Program Kepegawaian Daerah. Indikator capaian kinerja program tersebut yaitu persentase capaian target aspek Sistem Merit.

Mengacu pada Undang-Undang Nomor 20 tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, Sistem Merit didefinisikan sebagai penyelenggaraan sistem manajemen ASN dengan prinsip meritokrasi. Prinsip meritorasi adalah prinsip pengelolaan sumber daya manusia yang didasarkan pada kualifikasi, kompetensi, potensi, dan kinerja, serta integritas dan moralitas yang dilaksanakan secara adil dan wajar dengan tidak membedakan latar belakang suku, ras, warna kulit, agama, asal-usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, atau berkebutuhan khusus. Sementara, pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 40 Tahun 2018 tentang Pedoman Sistem Merit dalam Manajemen Aparatur Sipil Negara, terdapat 8 aspek sistem merit yaitu perencanaan kebutuhan; pengadaan; pengembangan karier; promosi dan mutasi; manajemen kinerja; penggajian, penghargaan dan disiplin; perlindungan dan pelayanan; dan sistem informasi. Dalam konteks Kota Magelang, capaian indikator persentase capaian target aspek Sistem Merit dihitung dengan membandingkan jumlah tingkat capaian kinerja pada aspek sistem merit *dengan* jumlah aspek sistem merit. Berikut adalah rekapitulasi capaian indikator tersebut dalam lima tahun terakhir (2020-2024) beserta dengan capaian dari masing-masing komponen pembentuknya:

Tabel 2.284 Persentase Capaian Target Aspek Sistem Merit, 2020-2024

Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah tingkat capaian kinerja pada aspek sistem merit	NA	8,00	8,77	10,01	8,00
Jumlah aspek sistem merit	NA	8,00	8,00	8,00	8,00

Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase capaian target aspek Sistem Merit	NA	90,39	109,61	125,09	100

Sumber: BKPSDM Kota Magelang, 2025

Berdasarkan rekapitulasi tersebut, diketahui bahwa capaian target dalam 5 tahun terakhir meningkat. Capaian tahun 2022 dan 2023 di atas 100% karena realisasi capaian kinerja pada aspek sistem merit telah melampaui target yang ditetapkan. Berikut adalah rincian target aspek sistem merit tahun 2024:

Tabel 2.285 Rincian Capaian Target Aspek Sistem Merit, 2024

Aspek Sistem Merit	Realisasi dan Target 2024		
	Target	Realisasi	Persentase
Perencanaan Kebutuhan	40	40	100.00%
Pengadaan	40	40	100.00%
Pengembangan Karir	87.5	87.5	100.00%
Promosi dan Mutasi	32.5	32.5	100.00%
Manajemen Kinerja	67.5	67.5	100.00%
Penggajian, Penghargaan dan Disiplin	40	40	100.00%
Perlindungan dan Pelayanan	12	12	100.00%
Sistem informasi	18	18	100.00%

Sumber: BKPSDM Kota Magelang, 2025

Berdasarkan data tersebut, diketahui bahwa realisasi seluruh aspek sistem merit telah memenuhi target tahun 2024.

2.1.3.5.4 Pendidikan dan Pelatihan

Terdapat satu program dalam urusan pendidikan dan pelatihan, yaitu Program Pengembangan Sumber Daya Manusia. Indikator capaian kinerja program tersebut yaitu persentase ASN yang mengikuti pengembangan kompetensi sesuai dengan jabatannya.

Capaian indikator persentase ASN yang mengikuti pengembangan kompetensi sesuai dengan jabatannya dihitung dengan membandingkan jumlah pegawai yang mengikuti pengembangan kompetensi *dengan* jumlah ASN. Berikut adalah rekapitulasi capaian indikator tersebut dalam lima tahun terakhir (2020-2024) beserta dengan komponen pembentuknya:

Tabel 2.286 Persentase ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi sesuai dengan Jabatannya, 2020-2024

Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah pegawai yang mengikuti pengembangan kompetensi	NA	820	1076	1425	1313
Jumlah ASN	NA	2673	2849	2926	3059
Persentase ASN yang mengikuti pengembangan kompetensi sesuai dengan jabatannya	NA	30,67	37,77	48,70	42,92

Sumber: BKPSDM Kota Magelang, 2025

Berdasarkan tabel tersebut, diketahui bahwa capaian indikator pada tahun 2024 mengalami kenaikan jika dibandingkan terhadap capaian tahun 2021, namun mengalami penurunan jika dibandingkan terhadap capaian

tahun 2023. Apabila dirinci terhadap capaian pada masing-masing komponen pembentuknya, maka dapat diketahui bahwa jumlah pegawai yang mengikuti pengembangan kompetensi cenderung meningkat, namun mengalami penurunan pada tahun 2024. Di sisi lain, jumlah ASN selalu meningkat pada setiap tahunnya.

2.1.3.5.5 Penelitian dan Pengembangan

Terdapat satu program dalam urusan penelitian dan pengembangan, yaitu Program Penelitian dan Pengembangan Daerah. Indikator capaian kinerja program tersebut yaitu persentase pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan *dan* Persentase pemanfaatan hasil inovasi.

2.1.3.5.5.1 Persentase Pemanfaatan Hasil Penelitian dan Pengembangan

Capaian indikator dihitung dengan membandingkan jumlah hasil litbang yang diterapkan sejak tahun 2021 *dengan* jumlah hasil litbang yang disusun sejak tahun 2021 hingga tahun ini. Berikut adalah rekapitulasi capaian indikator tersebut dalam lima tahun terakhir (2020-2024) beserta dengan capaian dari masing-masing komponen pembentuknya:

Tabel 2.220 Persentase Pemanfaatan Hasil Penelitian dan Pengembangan, 2020-2024

Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah hasil litbang yang diterapkan sejak tahun 2021	NA	NA	0,00	3,00	7,00
Jumlah hasil litbang yang disusun sejak tahun 2021 hingga tahun ini	NA	NA	8,00	8,00	17,00
Persentase pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan	42,11	0,00	0,00	37,50	41,18

Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah, 2025

Berdasarkan tabel tersebut, diketahui bahwa capaian indikator mengalami peningkatan. Selain itu, pada tahun 2024 seluruh komponen pembentuk indikator mengalami peningkatan, baik jumlah hasil litbang yang disusun maupun jumlah hasil litbang yang diterapkan.

2.1.3.5.5.2 Persentase Pemanfaatan Hasil Inovasi

Capaian indikator dihitung dengan membandingkan:

- a. Hasil penjumlahan antara jumlah inovasi OPD/BUMD yang diterapkan *dan* jumlah inovasi masyarakat yang dikembangkan dan diterapkan; *dengan*
- b. Hasil penjumlahan antara jumlah inovasi OPD/BUMD yang terjaring *dan* jumlah inovasi masyarakat yang terjaring.

Berikut adalah rekapitulasi capaian indikator tersebut dalam lima tahun terakhir (2020-2024) beserta dengan capaian dari masing-masing komponen pembentuknya:

Tabel 2.220 Persentase Pemanfaatan Hasil Inovasi, 2020-2024

Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah inovasi OPD/BUMD yang diterapkan	NA	NA	6.00	30.00	40.00
Jumlah inovasi masyarakat yang dikembangkan dan diterapkan	NA	NA	5.00	5.00	5.00
Jumlah inovasi OPD/BUMD yang terjaring	NA	NA	20.00	96.00	80.00
Jumlah inovasi masyarakat yang terjaring	NA	NA	30.00	30.00	53.00
Persentase pemanfaatan hasil inovasi	10,09	44,00	22,00	27,78	33,83

Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah, 2025

Berdasarkan tabel tersebut, diketahui bahwa capaian indikator cenderung mengalami peningkatan. Apabila dirinci per komponen penyusun indikator, jumlah inovasi masyarakat yang sudah terjaring pada tahun 2024

mengalami peningkatan yang signifikan. Di sisi lain, jumlah inovasi masyarakat yang dikembangkan dan diterapkan dalam 3 tahun terakhir masih stagnan (tidak mengalami peningkatan). Selain itu, walaupun jumlah inovasi OPD/BUMD yang terjaring pada tahun 2024 mengalami penurunan dibandingkan tahun 2023, namun jumlah inovasi OPD/BUMD yang diterapkan mengalami peningkatan.

Tabel 2.220 Kapabilitas Inovasi, 2019-2023

Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
Kapabilitas Inovasi	-	-	-	3,52	3,65

Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah, 2024

2.1.3.6 Fokus Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan

2.1.3.6.1 Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)

Mengacu Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penilaian Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah pada Kementerian / Lembaga / Pemerintah Daerah, Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) didefinisikan sebagai Instansi Pemerintah yang dibentuk dengan tugas melaksanakan pengawasan intern di lingkungan pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah, yang terdiri dari BPKP, Inspektorat Jenderal/Inspektorat/Unit Pengawasan Intern pada Kementerian / Lembaga / Pemerintah Daerah dan Unit Pengawasan Intern pada Badan Hukum Pemerintah lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dalam konteks pembahasan RKPD 2026 Kota Magelang, yang dimaksud dengan APIP yaitu Inspektorat Daerah Kota Magelang sehingga kapabilitas APIP akan menggambarkan bagaimana kemampuan Inspektorat Daerah Kota Magelang untuk melaksanakan aktivitas pengawasan yang ditunjang dengan dukungan pengawasan yang berkualitas agar dapat mewujudkan perannya secara efektif.

Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) Kota Magelang pada tahun 2024 masih berada pada level 3 (delivered). Level ini menunjukkan bahwa APIP telah menjalankan fungsi pengawasan, baik dalam bentuk assurance maupun consulting, sesuai dengan standar dan praktik profesional. Dengan demikian, hasil pengawasan APIP sudah berkualitas dan memberikan keyakinan memadai atas kepatuhan serta penerapan prinsip 3E (efisiensi, efektivitas, dan ekonomi). Selain itu, APIP juga berperan dalam memberikan peringatan dini, meningkatkan efektivitas manajemen risiko, serta memperbaiki tata kelola di lingkungan Pemerintah Kota Magelang. Sebagai mitra konsultasi, APIP aktif dalam pendampingan, asistensi, dan sosialisasi, salah satunya melalui kegiatan sosialisasi pengendalian gratifikasi menjelang hari raya bagi seluruh ASN di Kota Magelang.

Dari segi kualitas, terdapat perkembangan positif dalam jumlah APIP yang bersertifikat penunjang. Pada tahun 2024, jumlah APIP bersertifikat meningkat menjadi 21 orang, bertambah 5 orang dari tahun 2023 yang berjumlah 17 orang. Peningkatan ini berkontribusi dalam memperkuat kualitas pengawasan internal di Kota Magelang. Namun, meskipun terjadi peningkatan kompetensi SDM, kapabilitas APIP masih stagnan pada level 3 selama periode 2020-2024. Untuk mencapai level yang lebih tinggi, APIP perlu lebih diperkuat sebagai mitra strategis dalam mendukung efektivitas dan efisiensi operasi, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset, serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

Dari perspektif kuantitas, jumlah personel APIP di Kota Magelang masih belum mencapai standar yang ditetapkan. Saat ini, Kota Magelang memiliki 21 personel APIP, yang masih jauh dari standar minimal jumlah Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah (P2UPD) menurut Irjen Kemendagri, yaitu 27 personel. Selain itu, jika mengacu pada kebutuhan Jabatan Fungsional Auditor (JFA) Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), idealnya diperlukan 40 auditor. Dengan jumlah yang masih kurang, peningkatan kapasitas APIP tidak hanya membutuhkan peningkatan kualitas, tetapi juga perlu didukung dengan penambahan jumlah personel agar pengawasan di lingkungan Pemerintah Kota Magelang dapat berjalan lebih optimal.

Tabel 2.220 Jumlah Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), 2022-2024

No	Uraian	2022	2023	2024
1	Jumlah APIP yang bersertifikat kompetensi	17 orang	17 orang	21 orang

No	Uraian	2022	2023	2024
2	Jumlah APIP yang bersertifikat penunjang	5 orang	17 orang	21 orang
3	Perangkat Daerah yang telah mendapatkan jasa consulting	28 OPD	28 OPD	28 OPD
4	Jumlah seluruh Perangkat Daerah	28 OPD	28 OPD	28 OPD

Sumber: Inspektorat Derah Kota Magelang, 2024

2.1.3.6.2 Pencegahan Korupsi

Pada tahun 2024 telah dilaksanakan diseminasi pencegahan korupsi oleh Inspektorat Kota Magelang, diantaranya:

1. Sosialisasi pencegahan korupsi yang diselenggarakan secara luring pada:
 - PKK dan Pegawai Kecamatan se-Kota Magelang;
 - UMKM, Koperasi dan Pegawai Disperindag Kota Magelang;
 - Legistlatif dan pegawai Sekretariat Dewan Kota Magelang;
 - Pengurus Osis, Karyawan, Guru dan pengawas SMP Negeri 1, 2 dan 3 Kota Magelang
2. Sosialisasi anti-gratifikasi yang diselenggarakan secara luring pada stakeholder Disdukcapil dan DPMPTSP;
3. Diseminasi konten/pesan antigratifikasi melalui pencetakan kalender, spanduk, banner serta baliho;
4. Sosialisasi pembentukan UPG Pembantu kepada Sekretaris dan Ka Sub Bag Umum dan Kepegawaian se-Kota Magelang;
5. Selain itu, dalam rangka peningkatan pemahaman tentang gratifikasi, juga dilaksanakan e-learning pengendalian gratifikasi oleh KPK yang diikuti oleh 1.500 orang yang terdiri dari pejabat struktural dan fungsional se- Kota Magelang.

Upaya pencegahan korupsi yang telah dilakukan di Kota Magelang memberikan dampak positif terhadap capaian Indeks Integritas. Pada tahun 2024, Indeks Integritas Kota Magelang mencapai angka 80,71, yang sama dengan capaian tahun 2023. Indeks ini masuk dalam kategori terjaga (rentang indeks 78-100), menunjukkan bahwa Kota Magelang telah memiliki sistem pengendalian dan pengawasan yang cukup baik dalam mencegah praktik korupsi. Hasil Survei Penilaian Integritas tahun 2024 juga mengungkapkan bahwa sosialisasi antikorupsi di Kota Magelang telah dilaksanakan dengan baik dan bahkan berada di atas rata-rata nasional.

Meskipun demikian, efektivitas sosialisasi antikorupsi masih perlu ditingkatkan agar dapat lebih mendorong kesadaran dan kepatuhan pegawai dalam menjalankan tugasnya dengan integritas tinggi. Sosialisasi yang lebih terarah diharapkan mampu menanamkan pemahaman yang lebih kuat tentang pentingnya menghindari konflik kepentingan, melaporkan atau menolak gratifikasi serta suap, dan berani melaporkan dugaan tindak pidana korupsi yang diketahui. Dengan strategi sosialisasi yang lebih efektif, budaya antikorupsi di lingkungan pemerintahan Kota Magelang dapat semakin mengakar dan diterapkan secara konsisten.

Di sisi lain, meskipun upaya pencegahan sudah berjalan dengan baik, persepsi dari pihak eksternal menunjukkan bahwa masih terdapat risiko pemberian gratifikasi, suap, atau pemerasan, meskipun dalam skala sedang. Risiko ini perlu terus diminimalisir melalui penguatan sistem pengawasan, peningkatan transparansi dalam pelayanan publik, serta penegakan aturan yang lebih tegas. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan birokrasi yang berintegritas dan bersih dari korupsi dapat semakin terwujud di Kota Magelang.

Tabel 2.287 Indeks Integritas, 2020-2024

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
Indeks Integritas	-	-	80,00	80,71	80,71

Sumber: Survei Penilaian Integritas Kota Magelang 2022-2024

2.1.3.6.3 Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) dan Manajemen Risiko

Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Kota Magelang masih berada pada level 3, yang menunjukkan bahwa sistem pengendalian internal sudah mulai terstruktur namun masih memerlukan

perbaikan untuk mencapai tingkat yang lebih tinggi. Berdasarkan Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021, maturitas SPIP mencerminkan tingkat kematangan dalam mencapai tujuan pengendalian, termasuk efektivitas dan efisiensi kegiatan, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

Meskipun target maturitas SPIP tahun 2024 ditetapkan sebesar 3,745 dengan target akhir tahun mencapai 4,000, realisasi yang dicapai baru mencapai 3,290. Hal ini menunjukkan bahwa masih ada tantangan dalam penguatan sistem pengendalian internal, terutama dalam aspek implementasi kebijakan dan efektivitas pengawasan. Salah satu faktor utama yang menyebabkan target maturitas SPIP belum tercapai pada tahun 2023 adalah keterbatasan sumber daya manusia (SDM) Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), baik dari segi kualitas maupun kuantitas.

Untuk meningkatkan maturitas SPIP di Kota Magelang, diperlukan upaya strategis yang mencakup peningkatan kapasitas SDM APIP melalui pelatihan dan sertifikasi, optimalisasi sistem pengawasan berbasis risiko, serta penguatan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku. Dengan langkah-langkah perbaikan yang berkelanjutan, diharapkan maturitas SPIP dapat mencapai target yang telah ditetapkan, sehingga tata kelola pemerintahan yang lebih akuntabel dan transparan dapat terwujud. Capaian level Maturitas SPIP Kota Magelang adalah sebagai berikut:

Tabel 2.221 Capaian Maturitas SPIP Kota Magelang. 2024

No	Fokus Penilaian	2021 (baseline)		2021-2022		2023		2024	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
1	Maturitas SPIP		2,77	3,391	3,189	3,568	3,290	3,745	3,290
2	Manajemen Risiko Indeks (MRI)		2,28		2,82		3,083	2,65	3,08
3	Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK)		2,26		3,02		2,940		2,940

Sumber: BPKP Wilayah Yogyakarta, 2024

Upaya yang telah dilaksanakan dalam rangka meningkatkan capaian skor dan level Maturitas SPIP di tahun 2024 adalah:

1. Mengusulkan penambahan jumlah Personel APIP
2. Melakukan evaluasi secara berkelanjutan atas setiap kegiatan Inspektorat
3. Meningkatkan sinergitas antar perangkat daerah Pemerintah Kota Magelang untuk memaksimalkan pelaksanaan Manajemen Resiko dan SPIP

Adapun Isu yang perlu ditindaklanjuti adalah:

1. Mengoptimalkan penerapan SPIP di seluruh OPD
2. Meningkatkan nilai SAKIP komponen evaluasi internal

2.1.3.7 Fokus Unsur Kewilayahan

Dalam rangka mewujudkan tata Kelola Pemerintahan yang baik dan Inovatif sebagai amanah Misi 3 Pemerintah kota Magelang, maka tujuan untuk mewujudkan Birokrasi yang responsive, akuntabel dan inovatif harus tercapai. Untuk itu kualitas pelayanan kepada public harus selalu ditingkatkan. Adapun salah satu komponen yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat kualitas pelayanan public adalah sampai sejauh mana keberhasilan pelaksanaan fungsi pelayanan Kecamatan dengan melihat hasil penilaian kepuasan Masyarakat terhadap layanan yang telah diberikan.

Tabel 2.288 Hasil Survey Kepuasan Masyarakat. 2020-2024

No	Kecamatan	2020	2021	2022	2023	2024
1	Kecamatan Magelang Utara	83,06	NA	82,58	85.40	88,27
2	Kecamatan Magelang Tengah	NA	NA	83,967	87.11	93,45
3	Kecamatan Magelang Selatan	NA	NA	82,4	86.54	90,56

Sumber: Sekretariat Daerah Kota Magelang, 2025

Berdasarkan tabel tersebut diatas, nilai survei kepuasan masyarakat yang dilaksanakan di 3 kecamatan pada tahun 2023 menunjukkan kategori baik. Nilai konversi layanan di tiap Kecamatan yang merupakan rerata hasil penilaian 9 unsur yang dipakai dalam Survey Kepuasan Masyarakat menunjukkan katagori Baik.

Unsur Kewilayahan yang dalam hal ini dilaksanakan di Tingkat Kecamatan, dalam penyelenggaraannya terdapat beberapa indikator program sebagaimana tersebut dalam tabel berikut:

Tabel 2.289 Capaian Kinerja Fungsi Kewilayahan Kota Magelang, 2020-2024

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1. Cakupan program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	100%	99.20%	100%	100%
a. Jumlah warga yang mendapat pelayanan	6.197	5.233	5.317	5.247	2.963
b. Target warga yang mendapat pelayanan	6.197	5.233	3.397	5.247	2.963
2. Cakupan program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	NA	NA	98.71	100%	100%
3. Cakupan program koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	100%	100%	100%	100%	100%
a. Jumlah Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	24	24	24	9	36
b. Target Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam setahun	24	24	12	9	36

Sumber: Sekretariat Daerah Kota Magelang, 2025

Dalam rangka menjaga ketentraman dan ketertiban umum, kecamatan juga melaksanakan koordinasi dengan beberapa stakeholder. Koordinasi mencakup unsur Forum Pimpinan Kecamatan, koordinasi terkait dengan harmonisasi seluruh kegiatan serta koordinasi khusus yang berkaitan dengan stabilitas keamanan.

2.1.3.8 Fokus Unsur Pemerintahan Umum

Kota Magelang yang aman dan tenteram merupakan kondisi ideal yang perlu diwujudkan. Salah satu indikator yang dapat menggambarkan keamanan Kota Magelang yaitu melalui banyaknya kriminalitas yang terjadi. Pada tahun 2024, tercatat ada 73 kasus kriminalitas. Jumlah tersebut menurun 22 (dua puluh dua) kasus dari tahun 2023 yang berjumlah 95 kasus. Meskipun demikian, jika dilihat dari kejadian konflik sosial dan SARA, setidaknya selama kurun waktu 2020-2024, tidak ada permasalahan di Kota Magelang.

Tabel 2.290 Angka Kriminalitas di Kota Magelang, 2020-2024

URAIAN	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah kriminalitas yang terjadi	134	142	76	95	73

URAIAN	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah penduduk	128.020	127.846	127.846	127.965	128.017
Angka kriminalitas	10,47	11,11	5,94	7,43	5,702
Kejadian konflik (sosial dan SARA)	0	0	0	0	0

Sumber: Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Magelang, 2025

Meskipun kejadian kriminal tahun 2024 menurun namun upaya untuk menjaga kondusivitas daerah justru menunjukkan peningkatan, setidaknya dilihat dari persentase pembinaan wawasan kebangsaan yang mencapai lebih dari dua kali lipat dibandingkan tahun 2023. Pada tahun 2024, kegiatan yang dilakukan untuk mendukung pembinaan wawasan kebangsaan diantaranya adalah sosialisasi peningkatan wawasan kebangsaan yang melibatkan siswa SMP/ sederajat dan SMA/ sederajat, kegiatan kemah kebangsaan, peningkatan kapasitas pengurus akademi kebhinekaan, tantingan Paskibraka Kota Magelang, juga peningkatan kapasitas pengurus Kampung Pancasila. Selain itu pada tahun 2024 juga telah disusun Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 10 Tahun 2024 tentang Pembinaan Ideologi dan Wawasan Kebangsaan Kota Magelang.

Tabel 2.291 Persentase Pembinaan Wawasan Kebangsaan, 2020-2024

URAIAN	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah masyarakat yang mendapat sosialisasi	1.200	1.400	170	370	800
Jumlah target masyarakat yang mendapat sosialisasi	NA	NA	1.000	1.000	1.000
Persentase pembinaan wawasan kebangsaan	NA	NA	17%	37%	80%

Sumber: Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Magelang, 2024

Upaya mewujudkan stabilitas daerah juga dilakukan melalui peningkatan ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya serta peningkatan wawasan kebangsaan, didukung oleh semua elemen masyarakat diantaranya organisasi kemasyarakatan (ormas). Terkait dengan organisasi kemasyarakatan, berdasarkan pembaruan data, pada tahun 2024 bertambah jumlahnya menjadi 264 ormas yaitu bertambah sebanyak 9 organisasi kemasyarakatan, hal tersebut berkaitan juga dengan adanya kegiatan Pilkada di tahun 2024. Sebanyak 229 organisasi kemasyarakatan diantaranya masih bersifat aktif (memiliki sekretariat, mempunyai kegiatan, serta memiliki susunan kepengurusan yang masih aktif). Selain itu, 164 diantaranya juga dilakukan pembinaan/pemantauan pada tahun 2024. Kegiatan pemantauan ormas melibatkan Tim Terpadu Pengawasan Ormas Kota Magelang yang melibatkan Kodim dan Polres di seluruh Kota Magelang dimana salah satu kegiatan riilnya yaitu melalui sosialisasi aktivitas ormas yang dilakukan pada tahun 2024. Selanjutnya terkait dengan pembinaan, dilakukan dalam bentuk pembinaan terhadap aspek kelembagaan dari organisasi-organisasi tersebut. Jika dilihat dari jenisnya, organisasi kemasyarakatan yang ada di Kota Magelang terdiri dari organisasi adat, keagamaan/aliran kepercayaan, pendidikan, sosial, kesehatan, kepemudaan, olahraga, seni budaya, sosial kemasyarakatan, wanita, organisasi profesi, organisasi nasional, maupun organisasi dalam bentuk yayasan.

Di lain sisi, terdapat kendala yang dihadapi terkait keberadaan organisasi kemasyarakatan, salah satunya terkait pendaftaran ormas melalui mekanisme *online*. Hal tersebut berdampak pada ormas yang bersangkutan belum terdaftar dalam register dinas teknis yang mempunyai kewenangan bidang keormasan padahal organisasi masyarakat telah aktif melaksanakan kegiatannya. Untuk itu, ditahun tahun mendatang perlu diadakan kegiatan pengawasan yang intensif

Tabel 2.292 Organisasi Kemasyarakatan di Kota Magelang, 2019-2023

URAIAN	2020	2021	2022	2023	2024
Target jumlah ormas yang dibina / dipantau	113	113	35	99	164
Jumlah total ormas yang ada	246	246	270	255	264

URAIAN	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase organisasi kemasyarakatan yang diberdayakan	45,93%	45,93%	16,91%	38,43%	62,12%
Jumlah ormas yang memiliki program dan kegiatan, memiliki kesekretariatan	NA	NA	NA	217	229
Jumlah total ormas yang ada	246	246	207	255	264
Persentase organisasi kemasyarakatan yang aktif	NA	NA	NA	85,09%	86,74%

Sumber: Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Magelang, 2024

Selanjutnya, untuk mendukung stabilitas daerah juga dilakukan pembinaan ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya. Pembinaan tersebut dilakukan melalui sosialisasi terhadap tokoh agama, tokoh masyarakat, juga pelajar/mahasiswa yang ada di Kota Magelang. Pada tahun 2024, diadakan Kemah Bakti Antarumat Beragama dengan sasaran pelajar SPM se-Kota Magelang, Sesrawungan Generasi Muda Lintas Umat Beragama, pembinaan kepada pengurus Kampung Religi Kota Magelang, juga acara silaturahmi bersama Wali Kota Magelang, Kementerian Agama, serta Baznas bersama alim ulama dan ustadz ustadzah Kota Magelang. Melalui kegiatan-kegiatan tersebut pada tahun 2024 terdapat 2.318 jiwa yang mendapatkan pembinaan atau persentase pembinaan ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya di Kota Magelang sebesar 9,09%.

Tabel 2.293 Persentase Pembinaan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya; 2020-2024

URAIAN	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah Toga, Toma, Pelajar/Mahasiswa yang mendapatkan pembinaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya	NA	NA	952	1.550	2.318
Total seluruh Toga, Toma, Pelajar/Mahasiswa	NA	NA	26.536	26.625	25.514
Persentase pembinaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya	NA	NA	3,59%	5,82%	9,09%

Sumber: Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Magelang, 2024

Tabel 2.294 Persentase Penduduk Usia Pemilih Pemula yang Berpartisipasi dalam Agenda Politik, 2019-2023

URAIAN	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah penduduk usia pemilih pemula yang mengikuti agenda politik	NA	NA	1.000	2.471	12.238
Jumlah pemilih	94.670	-	101.829	101.829	97.825
Persentase penduduk usia pemilih pemula yang berpartisipasi dalam agenda politik	NA	NA	0,98%	2,43%	12,51%

Sumber: Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Magelang, 2024

Berikutnya, terkait dengan perwujudan kondusivitas dalam lingkup politik, juga diupayakan optimalisasi peran serta pemuda dalam agenda politik melalui kegiatan sosialisasi yang dilaksanakan dalam lingkup sekolah maupun di seluruh lapisan masyarakat secara umum. Terutama untuk menyongsong pemilihan umum serentak pada tahun 2024, dilakukan langkah-langkah persiapan untuk mendukung kontestasi politik dapat terlaksana secara optimal. Kegiatan yang dilakukan seperti pembinaan dan sosialisasi dalam rangka partisipasi agenda politik dengan sasaran pembinaan ditujukan kepada calon pemilih pemula yang harapannya aktif dalam pemilu 2024.

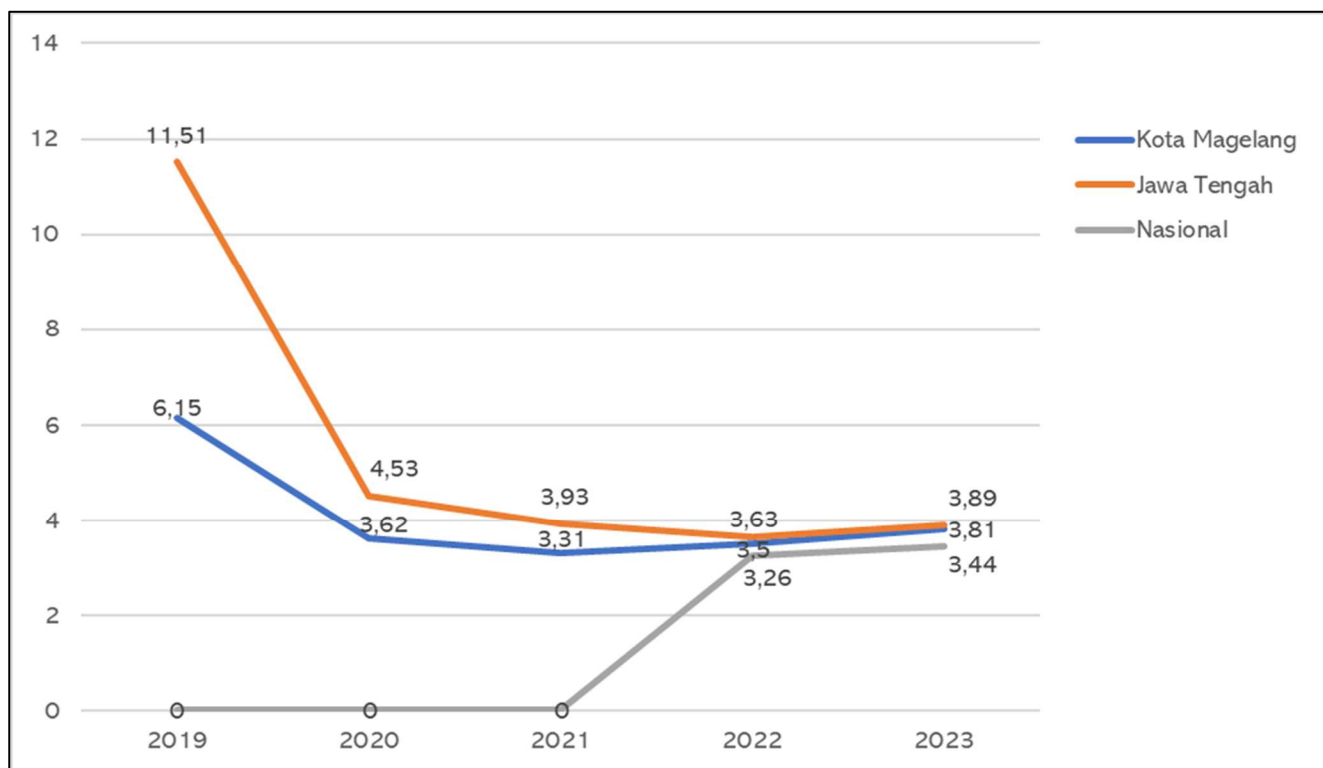
2.1.4 Aspek Daya Saing Daerah

Daya saing daerah menunjukkan kemampuan suatu daerah menciptakan nilai tambah untuk mencapai kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan dengan tetap terbuka pada persaingan domestik dan internasional.

Kemampuan daerah untuk meningkatkan daya saingnya akan sangat tergantung pada kemampuan daerah dalam menemukan dan menentukan faktor-faktor pendorong daya saing dan juga kemampuan daerah dalam menetapkan kebijakan ekonomi yang difokuskan untuk dapat mendorong transformasi dan akselerasi pertumbuhan ekonomi regional (Ridwan et al., 2018). Daerah yang memiliki daya saing yang tinggi secara umum didominasi oleh daerah yang memiliki basis ekonomi yang bersumber pada kekayaan sumber daya alam dan/atau daerah-daerah yang memiliki aktivitas ekonomi berbasis sektor industri dan sektor jasa. Sedangkan daerah yang memiliki posisi daya saing relatif rendah umumnya merupakan daerah dengan basis ekonomi yang bersandar pada sektor primer (khususnya pertanian).

Sejak tahun 2020, metode pengukuran Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) yang dilakukan dan dirilis oleh Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) mulai mengadopsi kerangka *Global Competitiveness Index* (GCI) 2019 yang dikembangkan oleh *World Economic Forum* (WEF). GCI 2019 merupakan sistem pengukuran daya saing yang menilai produktivitas dan kemampuan suatu wilayah atau negara dalam mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. GCI 2019 dikelompokkan ke dalam 4 (empat) komponen utama, yaitu Lingkungan Pendukung (*Enabling Environment*), Sumber Daya Manusia (*Human Capital*), Pasar (*Markets*), serta Ekosistem Inovasi (*Innovation Ecosystem*). Keempat komponen daya saing ini kemudian dielaborasi ke dalam 12 pilar daya saing, yaitu komponen Lingkungan Pendukung meliputi: 1) Institusi, 2) Infrastruktur, 3) Adopsi TIK, 4) Stabilitas Ekonomi Makro. Komponen Sumber Daya Manusia meliputi: 5) Kesehatan, 6) Ketrampilan. Komponen Pasar meliputi: 7) Pasar produk, 8) Pasar tenaga kerja, 9) sistem keuangan, 10) ukuran pasar. Komponen Ekosistem Inovasi meliputi: 11) Dinamisme bisnis dan 12) kapabilitas inovasi.

Adopsi GCI 2019 dalam pengukuran IDSD sejak 2020 menyebabkan perubahan metodologi yang lebih kompleks dan standar yang lebih tinggi dalam penilaian daya saing daerah di Indonesia. Berdasarkan data IDSD Kota Magelang, Provinsi Jawa Tengah, dan Nasional, terlihat adanya perbedaan yang cukup signifikan sebelum dan sesudah penerapan GCI 2019. Berikut grafik tren Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) untuk Kota Magelang, Provinsi Jawa Tengah, dan Nasional selama periode 2019-2023. Grafik ini memperlihatkan fluktuasi yang terjadi, dengan pola peningkatan di tahun-tahun terakhir.



Gambar 2.68 Capaian IDSD Kota Magelang, Jawa Tengah, Nasional; 2019-2023

Sumber: BRIN, 2020-2024

Berdasarkan hasil pengukuran Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) Tahun 2023, Kota Magelang menunjukkan performa yang cukup baik. Nilai IDSD Kota Magelang adalah 3,81 (dari skala 5), yang lebih tinggi dibandingkan

skor nasional sebesar 3,44. Meskipun skor total Kota Magelang sedikit lebih rendah dibandingkan Provinsi Jawa Tengah (Jateng), yang memiliki skor 3,89, terdapat beberapa pilar di mana Kota Magelang menunjukkan nilai yang lebih tinggi. Perbandingan nilai-nilai ini ditunjukkan dalam tabel berikut:

Tabel 2.295 Hasil Penilaian Pilar Indeks Daya Saing Daerah Kota Magelang, 2023

Pilar Daya Saing	Penjelasan Pilar	Nilai IDSD		
		Nasional (3,44)	Prov. Jateng (3,89)	Kota Magelang (3,81)
Pilar 1	Pilar Institusi Mengukur seberapa jauh iklim sosial, politik, hukum dan aspek keamanan mempengaruhi secara positif aktivitas perekonomian daerah. Pilar ini juga menunjukkan institusi yang kuat merupakan pendorong fundamental bagi produktivitas dan pertumbuhan ekonomi jangka panjang.	4,31	4,49	4,70
Pilar 2	Pilar Infrastruktur Mengukur keberadaan dan kualitas sarana dan prasarana pendukung aktivitas ekonomi suatu daerah.	2,71	4,14	3,18
Pilar 3	Pilar Adopsi TIK Mengukur tingkat difusi pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dari suatu daerah.	3,60	3,80	4,92
Pilar 4	Pilar Stabilitas Ekonomi Makro Memberikan gambaran tentang kemampuan daerah mengelola ekonomi makro dari ancaman guncangan (shock) baik yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri.	3,54	3,63	3,31
Pilar 5	Pilar Kesehatan Merefleksikan kualitas sumber daya manusia diukur melalui jumlah tahun yang diharapkan dapat dicapai oleh seorang bayi dengan kesehatan yang baik.	3,79	4,14	4,39
Pilar 6	Pilar Ketrampilan Mengukur tingkat pendidikan dan keterampilan tenaga kerja di suatu daerah.	3,76	3,52	4,42
Pilar 7	Pilar Pasar Produk Menggambarkan keterbukaan pasar produk melalui besarnya kesempatan yang sama bagi para produsen untuk memasarkan produknya secara fair dan kompetitif. Berbagai praktek monopoli dan oligarki ekonomi serta adanya hambatan-hambatan bagi pelaku usaha untuk masuk ke pasar produk dan jasa tertentu menciptakan inefisiensi pasar.	2,59	2,15	4,41
Pilar 8	Pilar Pasar Tenaga Kerja Menggambarkan fleksibilitas tenaga kerja dan kelayakan upah tenaga kerja, sebagai faktor penentu pasar tenaga kerja di suatu daerah.	3,86	3,39	3,59

Pilar Daya Saing	Penjelasan Pilar	Nilai IDSD		
		Nasional (3,44)	Prov. Jateng (3,89)	Kota Magelang (3,81)
Pilar 9	Pilar Sistem Keuangan Mengukur kemampuan sistem keuangan untuk memediasi sumber daya keuangan secara efisien dan memitigasi resiko krisis keuangan dengan penuh kehati hatian, sehingga dapat memfasilitasi pelaku usaha untuk lebih produktif dan ekspansif.	2,54	3,44	2,72
Pilar 10	Pilar ukuran pasar Mengukur besaran pasar yang mampu mempengaruhi produktivitas bisnis, karena pasar yang besar memungkinkan pelaku bisnis untuk mengeksplorasi skala ekonomi.	4,36	5,00	3,94
Pilar 11	Pilar Dinamisme Bisnis Menggambarkan kemudahan untuk memulai dan melakukan bisnis dan kemudahan untuk melakukan divestasi dan keluar dari pasar di suatu daerah. Daerah yang mampu menciptakan dinamisme bisnis yang positif, yaitu daerah yg mendatangkan investasi dan pelaku usaha yang inovatif serta melepas perusahaan yang tidak efisien keluar dari pasar, akan menjadikan daerah tersebut jauh lebih kompetitif dan produktif.	3,23	4,47	2,48
Pilar 12	Pilar Kapabilitas Inovasi Memberikan gambaran kuantitas dan kualitas riset dan inovasi di suatu daerah. Pilar ini juga menggambarkan sejauh mana lingkungan suatu daerah mendorong kolaborasi, konektivitas, kreativitas, keragaman, konfrontasi lintas-visi, dan sudut pandang yang berbeda, serta sejauh mana kapasitas daerah dapat mengubah ide menjadi barang dan jasa baru.	3,02	4,51	3,65

Sumber: BRIN, 2024

Berdasarkan data pada tabel diatas, Kota Magelang menunjukkan kekuatan pada **Pilar Institusi (Pilar 1)** dengan nilai yang lebih baik dibandingkan Provinsi Jateng (4,49) dan nasional (4,31). Salah satu faktor penyebabnya adalah nilai Survei Penilaian Integritas (SPI) Kota Magelang Tahun 2022. Berdasarkan hasil Survei Penilaian Integritas Wilayah Jawa Tengah dan DIY yang dirilis oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), nilai SPI Kota Magelang adalah sebesar 80,0, yang berada di atas rata-rata nilai Provinsi Jawa Tengah sebesar 76,3.

Selain itu, indikator pendukung lainnya pada Pilar 1 juga mencerminkan bahwa iklim sosial, politik, hukum, dan keamanan di Kota Magelang telah mendukung peningkatan aktivitas ekonomi daerah. Beberapa indikator tersebut antara lain:

1. Nilai transparansi anggaran Pemerintah Kota Magelang berdasarkan Ikhtiar Hasil Pemeriksaan Semester I Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Tahun 2022, meraih predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP);
2. Nilai Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Kota Magelang berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI No. 108 Tahun 2023 tentang Hasil Pemantauan Dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pada Instansi Pusat Dan Pemerintah Daerah Tahun 2022 adalah sebesar 2,71 (kategori baik);
3. Nilai kinerja instansi Pemerintah Kota Magelang berdasarkan indeks Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP) yang dirilis Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi adalah BB;

4. Nilai pelaksanaan reformasi birokrasi Kota Magelang berdasarkan indeks Reformasi Birokrasi (RB) yang dirilis Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, adalah sebesar 2,71 (kategori baik).

Kota Magelang juga unggul dalam pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), dengan skor 4,92 pada **Pilar Adopsi TIK (Pilar 3)**, jauh di atas nilai Provinsi Jawa Tengah (3,80) dan nasional (3,60). Berdasarkan penilaian indeks SPBE, secara keseluruhan Pemerintah Kota Magelang sudah melakukan pengembangan aplikasi pelayanan publik berbasis teknologi digital. Diantara itu, terdapat sekitar tujuh inovasi tata kelola pemerintah Kota Magelang terkait sistem pelayanan publik berbasis teknologi informasi, salah satunya aplikasi Smart Magelang yang juga menjadi program unggulan pemerintah Kota Magelang. Selain itu, layanan Wi-Fi telah dipasang di sejumlah besar area publik, serta jaringan fiber optik juga telah terkoneksi 100 persen di seluruh unit kerja. Bahkan BPS mencatat pada 2022 sebesar 87,88 persen penduduk (usia lima tahun ke atas) menggunakan telepon seluler/HP, 25 persen menggunakan komputer, serta 81,81 persen mengakses internet.

Selain keunggulan dalam Adopsi TIK, keunggulan lain Kota Magelang terletak pada **Pilar Kesehatan (Pilar 5)**, yang menunjukkan kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk pada umumnya, dan meningkatkan derajat kesehatan pada khususnya. Kualitas kesehatan di Kota Magelang mendapatkan skor 4,39, lebih tinggi dibandingkan dengan Provinsi Jawa Tengah (4,14) dan nasional (3,79). Indikator utama pada Pilar 5 adalah Angka Harapan Hidup (AHH). Berdasarkan data BPS, AHH Kota Magelang pada tahun 2022 mencapai 77,02 tahun (75,19 tahun untuk laki-laki dan 78,92 tahun untuk perempuan), sementara AHH Provinsi Jawa Tengah adalah 74,57 tahun. Peningkatan angka harapan hidup yang terjadi di Kota Magelang merupakan hasil dari peran pemerintah dalam pembangunan kesehatan dengan menyediakan sarana kesehatan yang dapat dijangkau oleh masyarakat. Pada tahun 2022, di Kota Magelang terdapat sarana dan prasarana kesehatan berupa 8 Rumah Sakit, 5 puskesmas, 14 puskesmas pembantu, 16 klinik/balai kesehatan, dan 5 laboratorium. Selain itu, sarana kesehatan Rumah Sakit Tidar Kota Magelang merupakan rumah sakit yang memiliki fasilitas terbaik dan terlengkap dalam lingkup Eks Karesidenan Kedu.

Di samping itu, Kota Magelang juga memiliki keunggulan pada **Pilar Ketrampilan (Pilar 6)** dengan skor 4,42. Skor ini lebih tinggi dibandingkan dengan Provinsi Jawa Tengah (3,52) dan nasional (3,76). Tingginya skor pada Pilar Ketrampilan menunjukkan bahwa Kota Magelang memiliki tenaga kerja yang terdidik dan terampil, yang merupakan aset penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan daya saing daerah.

Berdasarkan dimensi tenaga kerja saat ini (*current workforce*), kualitas pendidikan masyarakat Kota Magelang dilihat dari rata-rata lama sekolah tahun 2022 sesuai data BPS adalah 10,94 tahun. Artinya, rata-rata penduduk usia 15 tahun ke atas di Kota Magelang memiliki pendidikan setara dengan kelas dua SMA atau sederajat. Angka ini lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata provinsi Jawa Tengah, yang hanya sebesar 7,93 tahun atau setara dengan kelas dua SMP atau sederajat. Kualifikasi penduduk usia 15 tahun ke atas yang didominasi oleh lulusan SMA Umum dan SMK tersebut memang telah sesuai dengan kebutuhan lapangan pekerjaan di Kota Magelang yang memang lebih banyak membutuhkan tenaga kerja dengan pendidikan setingkat SMA/SMK.

Lapangan pekerjaan di Kota Magelang tidak banyak mencakup perusahaan padat karya yang mampu menyerap tenaga kerja dalam skala besar, seperti perusahaan alas kaki, garmen, atau tekstil. Oleh karena itu, Pemerintah Kota Magelang menggunakan strategi pengentasan pengangguran di sektor informal, yang akan diisi oleh angkatan kerja yang terampil dan memiliki keahlian. Pada tahun 2022, Pemerintah Kota Magelang telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 3,1 miliar untuk mengadakan berbagai pelatihan guna mencetak wirausaha baru. Upaya ini berhasil menekan angka Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kota Magelang menjadi 6,71 persen dan mencapai penurunan tertinggi di Jawa Tengah, yaitu sebesar 2,02 persen dari tahun sebelumnya. Balai Latihan Kerja (BLK) Kota Magelang juga aktif mengembangkan berbagai jenis pelatihan yang dianggap berhasil dalam menyerap tenaga kerja. BLK berperan penting dalam meningkatkan kualitas pendidikan dan pelatihan kerja dengan menyediakan berbagai program pendidikan dan kursus yang bertujuan untuk meningkatkan keterampilan dan kompetensi tenaga kerja lokal. Selain itu, keterampilan digital masyarakat Kota Magelang terus ditingkatkan dengan menyediakan akses internet yang luas dan program pelatihan digital yang mendukung peningkatan keterampilan teknologi, terutama bagi penduduk usia kerja.

Sementara itu, dari sudut pandang tenaga kerja masa depan (*future workforce*), angka harapan sekolah di Kota Magelang adalah 14,31 tahun, lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata provinsi Jawa Tengah yang sebesar 12,81 tahun. Selain itu, Kota Magelang memiliki sejumlah guru SD-SMA/SMK yang bersertifikat, yang menunjukkan komitmen terhadap peningkatan kualitas pendidikan dengan memastikan tenaga pengajar

memiliki kualifikasi yang memadai. Selanjutnya, rasio murid terhadap guru di pendidikan dasar di Kota Magelang lebih rendah dibandingkan dengan rata-rata provinsi, yang menunjukkan perhatian terhadap kualitas pengajaran dengan memastikan setiap guru dapat memberikan perhatian yang cukup kepada muridnya.

Keunggulan lainnya adalah pada **Pilar Pasar Produk (Pilar 7)**. Skor Pilar Pasar Produk Kota Magelang mencapai 4,41, jauh lebih tinggi dibandingkan Provinsi Jawa Tengah (2,15) dan nasional (2,59). Skor ini mencerminkan keterbukaan dan efisiensi pasar produk di Kota Magelang yang memungkinkan para produsen untuk memasarkan produk mereka secara adil dan kompetitif. Keberadaan pasar yang kompetitif ini didukung oleh berbagai kebijakan pemerintah daerah yang proaktif dalam mendorong kewirausahaan dan menghapus hambatan-hambatan birokrasi yang tidak perlu. Di Kota Magelang, pemerintah telah mengimplementasikan sistem perizinan yang lebih sederhana dan cepat, menyediakan Mal Pelayanan Publik (MPP) Kota Magelang yang mengintegrasikan pelayanan publik kedalam satu tempat, serta memberikan berbagai insentif investasi bagi usaha baru dan usaha lama yang melakukan pengembangan. Hal ini membantu menciptakan lingkungan bisnis yang lebih dinamis dan inovatif, yang pada akhirnya meningkatkan daya saing ekonomi daerah.

Pada **Pilar Pasar Tenaga Kerja (Pilar 8)** Kota Magelang juga memiliki kinerja yang lebih baik dengan nilai 3,59 dibandingkan provinsi Jawa Tengah yang memiliki nilai 3,39, meskipun masih di bawah rata-rata nasional yang bernilai 3,86. Salah satu indikator utama dalam penilaian ini adalah kebijakan pasar tenaga kerja aktif, dimana Pemerintah Kota Magelang telah menerapkan beberapa kebijakan strategis ketenagakerjaan seperti program “Magelang Keren” yang bertujuan mengembangkan kewirausahaan berbasis inovasi dan potensi lokal dengan target menciptakan 1.500 wirausahawan, serta program “Rodanya Mas Bagia” yang menyediakan dana sebesar Rp 30 juta per tahun untuk tiap RT guna meningkatkan pemberdayaan masyarakat.

Aspek kedua yang berkontribusi pada nilai pilar pasar tenaga kerja adalah upah pekerja. Upah Minimum Regional (UMR) di Kota Magelang sebesar Rp 2.066.007,00 lebih rendah dibandingkan dengan Kabupaten Magelang yang sebesar Rp 2.236.777,00, meskipun biaya hidup di Kota Magelang lebih tinggi. Ini menandakan perlunya peninjauan ulang kebijakan UMR agar kompensasi yang diterima pekerja lebih mencerminkan kebutuhan hidup yang sebenarnya. Kesenjangan ini bisa menjadi faktor yang mempengaruhi daya tarik Kota Magelang sebagai tempat bekerja dan tinggal, serta berdampak pada motivasi dan produktivitas tenaga kerja di kota tersebut.

Indikator ketiga adalah kesetaraan upah antara laki-laki dan perempuan. Berdasarkan data dari BPS Provinsi Jawa Tengah, terdapat kesenjangan upah yang signifikan di Kota Magelang, dimana rata-rata upah buruh/karyawan/pegawai laki-laki sebesar Rp 3.071.126,00 sedangkan perempuan hanya sebesar Rp 2.672.508,00, dengan selisih Rp 398.618,00. Ketidakseimbangan ini menunjukkan adanya diskriminasi upah yang mempengaruhi partisipasi dan kesejahteraan ekonomi perempuan. Untuk meningkatkan nilai pilar pasar tenaga kerja, perlu adanya kebijakan yang lebih tegas dan terukur untuk mencapai kesetaraan upah, sehingga tidak hanya meningkatkan keadilan gender tetapi juga memperkuat kontribusi ekonomi dari seluruh segmen tenaga kerja.

Diantara keunggulan-keunggulan pada Pilar Institusi (Pilar 1), Pilar Adopsi TIK (Pilar 3), Pilar Kesehatan (Pilar 5), Pilar Ketrampilan (Pilar 6), Pilar Pasar Produk (Pilar 7), dan Pilar Pasar Tenaga Kerja (Pilar 8) tersebut diatas, terdapat beberapa kekurangan yang dapat menjelaskan mengapa skor total Magelang lebih rendah dibandingkan dengan Provinsi Jawa Tengah, yaitu Pilar Infrastruktur (Pilar 2), Pilar Stabilitas Ekonomi Makro (Pilar 4), Pilar Sistem Keuangan (Pilar 9), Pilar Ukuran Pasar (Pilar 10), Pilar Dinamisme Bisnis (Pilar 11), dan Pilar Kapabilitas Inovasi (Pilar 12).

Pada **Pilar Infrastruktur (Pilar 2)**, nilai Kota Magelang adalah 3,18. Angka ini berada di bawah rata-rata provinsi yang mencapai 4,14, meskipun lebih baik dari rata-rata nasional yang hanya 2,71. Ini menunjukkan bahwa meskipun infrastruktur di Magelang lebih baik dari rata-rata nasional, masih terdapat kesenjangan signifikan dibandingkan dengan provinsi.

Infrastruktur jalan di Kota Magelang tahun 2022 menunjukkan masih adanya ruas jalan dengan kinerja buruk, sementara persentase jalan yang dalam kondisi baik baru mencapai 92,29%. Hal ini menjadi tantangan dalam memfasilitasi mobilitas tinggi serta aktivitas ekonomi, sosial, dan lainnya di Kota Magelang di masa depan. Oleh karena itu, diperlukan upaya pengaturan manajemen dan rekayasa lalu lintas khususnya pada ruas-ruas jalan utama dan yang memiliki aktivitas ekonomi tinggi, serta peningkatan persentase jalan dalam kondisi baik.

Dalam hal infrastruktur kelistrikan, Kota Magelang merupakan bagian dari PLN Distribusi Jawa Tengah dan DIY, sehingga ketersediaan listrik bergantung pada produksi dari pembangkit-pembangkit listrik di wilayah tersebut.

Kota Magelang dipasok oleh Gardu Induk Tegangan Ekstra Tinggi (GITET) Pedan, yang kemudian ditransmisikan ke Gardu Induk Sanggrahan. Data tahun 2020 menunjukkan bahwa pemakaian listrik terbesar adalah oleh kelompok rumah tangga, yaitu sebesar 54.536.052 kWh.

Untuk akses air bersih, meskipun sebagian besar kebutuhan penduduk Kota Magelang sudah dapat dilayani melalui jaringan perpipaan yang hampir menjangkau seluruh wilayah, namun pemenuhan kebutuhan air bersih masih bergantung pada sumber-sumber air di luar wilayah Kota Magelang, yaitu dari mata air di Kabupaten Magelang. Dari lima sumber mata air yang melayani Kota Magelang, yaitu Mata Air Wulung, Mata Air Kalegen, Mata Air Kalimas, Mata Air Kanoman dan Mata Air Tuk Pecah, hanya Mata Air Tuk Pecah yang berada di wilayah Kota Magelang. Berdasarkan dokumen RISPAM Kota Magelang tahun 2022, masih terdapat beberapa permasalahan dalam penyelenggaraan SPAM Kota Magelang, termasuk kendala pelestarian daerah tangkapan air (*catchment area*) dan perijinan karena sumber air berada di lintas Kabupaten Magelang.

Pilar Stabilitas Ekonomi Makro (Pilar 4) Kota Magelang memiliki skor 3,31, lebih rendah dari rata-rata provinsi yang sebesar 3,63 dan nasional yang mencapai 3,54. Stabilitas ekonomi yang lebih rendah ini menunjukkan adanya risiko lebih tinggi dalam aspek-aspek seperti inflasi, defisit anggaran, dan volatilitas nilai tukar. Kondisi ini dapat mempengaruhi kepercayaan investor dan masyarakat terhadap stabilitas ekonomi jangka panjang di Magelang.

Kondisi laju inflasi Kota Magelang dapat dikatakan terkendali dengan baik di kisaran 1,50-4,00 persen selama lima tahun terakhir hingga tahun 2021. Namun, pada tahun 2022, laju inflasi di Kota Magelang mencapai 6,31 persen. Hal ini menunjukkan bahwa inflasi di Kota Magelang pada tahun 2022 dapat dikategorikan sebagai inflasi sedang, yang dapat berdampak pada kenaikan harga dan kondisi perekonomian masyarakat jika tidak dikendalikan dengan baik. Selain itu, kapasitas fiskal daerah Kota Magelang yang berada dalam kategori rendah dengan rasio KFD sebesar 1,362 menunjukkan adanya keterbatasan dalam pengumpulan dan pengelolaan pendapatan asli daerah, terutama jika dibandingkan dengan Provinsi Jawa Tengah yang memiliki KFD sebesar 1,947. Untuk meningkatkan kapasitas fiskal, salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah mendorong investasi di daerah serta menjalin kerja sama dengan sektor swasta guna mendukung pembangunan yang lebih berkelanjutan.

Indikator lain yang mempengaruhi nilai pada pilar 4 di Kota Magelang adalah skor Indeks Ketahanan Pangan tahun 2021. Berdasarkan data yang dirilis oleh Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian, Kementerian Pertanian, Kota Magelang memiliki skor sebesar 82,59. Skor ini sedikit lebih rendah dibandingkan dengan skor Provinsi Jawa Tengah yang mencapai 82,73. Meskipun perbedaannya tidak terlalu signifikan, angka ini menunjukkan bahwa Kota Magelang perlu melakukan upaya lebih untuk meningkatkan ketahanan pangan guna mencapai atau bahkan melampaui rata-rata provinsi.

Meskipun menghadapi tantangan inflasi, kapasitas fiskal, dan indeks ketahanan pangan yang rendah, data tahun 2022 menunjukkan bahwa Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kota Magelang atas dasar harga konstan mencapai 6.889,45 miliar rupiah, atau meningkat sebesar 375,56 miliar rupiah dibandingkan tahun sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi sebesar 5,77 persen ini menunjukkan bahwa strategi pemulihan kegiatan perekonomian di Kota Magelang pasca pandemi Covid-19 dinilai berhasil. Bahkan, pertumbuhan ekonomi Kota Magelang lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Tengah dan nasional yang hanya mencapai 5,31 persen.

Selanjutnya, jika dilihat secara sektoral, pertumbuhan ekonomi Kota Magelang menunjukkan perkembangan yang beragam di antara 17 lapangan usaha. Dari jumlah tersebut, 14 sektor mengalami peningkatan positif. Sektor transportasi dan pergudangan, penyediaan akomodasi dan makanan minuman, serta sektor jasa lainnya menunjukkan pertumbuhan yang signifikan dengan peningkatan masing-masing sebesar 50,05 persen; 15,85 persen; dan 15,36 persen. Beberapa sektor lain yang juga mengalami pertumbuhan positif, meskipun kurang dari 5 persen dan lebih cepat dibandingkan tahun sebelumnya, termasuk real estate yang tumbuh sebesar 4,02 persen, informasi dan komunikasi dengan peningkatan 2,34 persen, serta sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial yang naik sebesar 1,39 persen.

Namun, terdapat delapan sektor yang tetap tumbuh positif tetapi dengan laju yang lebih lambat dibandingkan tahun sebelumnya. Sektor-sektor tersebut meliputi pengadaan listrik dan gas dengan pertumbuhan 3,84 persen, industri pengolahan sebesar 3,38 persen, perdagangan besar dan eceran serta reparasi mobil dan sepeda motor sebesar 2,25 persen, administrasi pemerintahan, pertanahan, dan jaminan sosial wajib sebesar 1,12 persen, jasa pendidikan yang naik 1,02 persen, sektor konstruksi dengan pertumbuhan 0,86 persen, dan jasa keuangan serta

administrasi yang tumbuh sebesar 0,38 persen. Dua sektor lainnya mengalami kontraksi dibandingkan tahun sebelumnya. Sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan mengalami penurunan sebesar 0,45 persen, sedangkan sektor pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah, dan daur ulang menurun sebesar 1,15 persen.

Pilar Sistem Keuangan (Pilar 9) di Kota Magelang mendapat nilai 2,72, agak tertinggal dibandingkan rata-rata provinsi Jawa Tengah yang sebesar 3,44, dan sedikit lebih baik dari rata-rata nasional yang berada di angka 2,54. Meskipun tercatat tahun 2022 Kota Magelang memiliki 56 lembaga keuangan perbankan (cabang dan unit lembaga perbankan) yang tersebar di tiga kecamatan, yang terdiri dari bank umum, BPR, dan bank syariah, namun terdapat kendala akses sektor swasta terhadap kredit, antara lain distribusi lembaga keuangan yang tidak merata di tiap kecamatan, persyaratan kredit yang ketat dari bank umum, serta rasio kredit bermasalah.

Pada tahun 2022, jumlah KUR yang disalurkan di Kota Magelang mencapai 226,29 miliar rupiah, dengan jumlah debitur dan calon debitur yang telah masuk dalam Sistem Informasi Kredit Program (SIKP) mencapai 11.728, meningkat dari tahun 2021 yang sebanyak 10.977. Prosentase penyaluran KUR tahun 2022 terbesar adalah ke sektor Perdagangan Besar dan Eceran sebesar 60,41 persen, diikuti oleh Jasa Kemasyarakatan, Sosial Budaya, dan Hiburan sebesar 11,92 persen, serta Industri Pengolahan sebesar 11,8 persen. Peningkatan jumlah debitur dan nilai penyaluran KUR menunjukkan adanya pertumbuhan minat dan kebutuhan akan KUR di kalangan UMKM, yang penting untuk mendorong perkembangan ekonomi lokal.

Meskipun ada banyak lembaga keuangan, dan meningkatnya jumlah debitur KUR, namun persentase kredit yang diberikan kepada sektor swasta di Kota Magelang, jika dibandingkan dengan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) harga berlaku tahun 2022 yang sebesar 10.088,60 miliar rupiah, menunjukkan bahwa kontribusi kredit terhadap perekonomian lokal masih rendah. Dengan demikian, dukungan pemerintah daerah melalui peningkatan penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR), serta upaya meningkatkan pembiayaan ventura dapat membantu aktivitas konsumsi dan produktif, sehingga mendorong perkembangan ekonomi lokal yang lebih sehat dan stabil.

Pilar Ukuran Pasar (Pilar 10) di Kota Magelang memiliki nilai 3,39, jauh di bawah rata-rata provinsi Jawa Tengah (5,00) dan nasional (4,36). Ini mencerminkan skala ekonomi yang kecil dan keterbatasan dalam menarik investor. Nilai PDRB ADHK Kota Magelang pada tahun 2022 sebesar 6.889,45 miliar rupiah sangat rendah dibandingkan dengan PDRB ADHK Provinsi Jawa Tengah yang hampir mencapai 1,1 kuadriliun rupiah. Skala ekonomi yang kecil ini mengindikasikan bahwa aktivitas ekonomi di Magelang tidak cukup besar untuk menciptakan pasar yang menarik bagi investasi besar.

Persentase impor terhadap PDRB harga berlaku di Kota Magelang hanya sebesar 0,62 persen, dengan nilai impor pada tahun 2022 sebesar 62,69 miliar rupiah jauh lebih rendah dibandingkan dengan Provinsi Jawa Tengah yang mencapai 15,47 persen. Hal ini menunjukkan ketergantungan rendah pada barang dan jasa dari luar. Meskipun ini bisa menunjukkan kemandirian ekonomi lokal, tetapi juga mengindikasikan kurangnya aktivitas perdagangan internasional. Rendahnya nilai impor memperlihatkan bahwa Kota Magelang belum menjadi pusat perdagangan yang signifikan, yang dapat membatasi diversifikasi ekonomi dan memperlambat pertumbuhan ekonomi jangka panjang.

Keterbatasan dalam ukuran pasar dan rendahnya daya tarik investasi mengakibatkan pertumbuhan ekonomi Kota Magelang yang lebih lambat dan kurangnya diversifikasi ekonomi. Untuk meningkatkan daya tarik dan pertumbuhan ekonomi, Kota Magelang perlu mengembangkan strategi untuk memperluas skala ekonominya, meningkatkan diversifikasi sektor-sektor ekonomi, dan memperkuat daya saing di tingkat provinsi dan nasional. Upaya ini penting untuk menciptakan stabilitas ekonomi yang lebih baik dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pilar Dinamisme Bisnis (Pilar 11) di Kota Magelang menunjukkan nilai yang rendah, yaitu 2,48, jauh di bawah rata-rata provinsi Jawa Tengah yang mencapai 4,47 dan nasional sebesar 3,23. Hal ini mengindikasikan adanya hambatan bagi pelaku usaha dalam memulai dan menjalankan bisnis di Kota Magelang. Salah satu indikator yang relevan menggambarkan kondisi ini adalah pertumbuhan Nomor Induk Berusaha (NIB). Meskipun data dari OSS RBA menunjukkan peningkatan jumlah NIB di Kota Magelang hampir 100 persen pada tahun 2023 sejumlah 7.511 NIB, dari tahun 2022 sejumlah 3.760 NIB, namun peningkatan jumlah NIB yang signifikan ini sebagian besar bukan karena adanya aktivitas bisnis baru, melainkan lebih pada proses administratif migrasi dari OSS ke OSS RBA.

Indikator lain yang menyebabkan rendahnya dinamisme bisnis di Kota Magelang adalah jumlah bank yang tersedia di Kota Magelang. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2022, Kota Magelang

memiliki 56 lembaga keuangan perbankan (cabang dan unit lembaga perbankan) terdiri dari Bank Umum, BPR dan Bank Syariah yang tersebar di tiga kecamatan, 46 persen di Magelang Selatan, 43 persen di Magelang Tengah, dan 11 persen di Magelang Utara. Sementara itu, data sebaran kegiatan usaha dari OSS RBA menunjukkan bahwa 36 persen dari kegiatan usaha berada di Magelang Selatan, 35 persen di Magelang Tengah, dan 29 persen di Magelang Utara. Meskipun Magelang Utara memiliki hampir sepertiga dari total kegiatan usaha di Kota Magelang, jumlah bank yang tersedia di wilayah ini sangat terbatas. Perbandingan ini menunjukkan bahwa distribusi bank tidak sebanding dengan distribusi kegiatan usaha. Ketimpangan ini berarti pelaku usaha di Magelang Utara mungkin menghadapi tantangan lebih besar dalam mengakses layanan perbankan yang mereka butuhkan untuk operasional sehari-hari dan pertumbuhan bisnis.

Dari beberapa indikator dinamisme bisnis di Kota Magelang diatas, perlu diperhatikan bahwa terdapat potensi peningkatan nilai pada pilar ini melalui kinerja pelayanan publik yang baik dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Magelang. Berdasarkan Keputusan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 1035 Tahun 2022, kinerja perangkat daerah penyedia layanan perizinan dan administrasi yang mendukung kegiatan bisnis di Kota Magelang ini mendapatkan nilai 4,51 (kategori A). Dengan pelayanan publik yang efektif dan responsif dari DPMPTSP, akan menjadi salah satu faktor kunci dalam menciptakan lingkungan bisnis yang ramah dan efisien di Kota Magelang, terutama dari sudut pandang pelaku usaha. Pelaku usaha akan mengalami proses birokrasi yang lebih efisien, sehingga memungkinkan mereka fokus pada pengembangan dan operasional bisnisnya tanpa terhambat oleh kendala administratif.

Terakhir, **Pilar Kapabilitas Inovasi (Pilar 12)** Kota Magelang yang memiliki nilai 3,65, lebih baik daripada nasional yang hanya 3,02, namun masih di bawah rata-rata provinsi Jawa Tengah yang mencapai 4,51. Salah satu indikator utama yang berkontribusi terhadap penilaian ini adalah publikasi ilmiah. Kota Magelang telah mengembangkan Open Journal System (OJS) dengan nama "Jendela Inovasi Daerah," yang terakreditasi Sinta 6. Jurnal ini memungkinkan penulis dari berbagai kalangan, termasuk Aparatur Sipil Negara (ASN), dosen, guru, dan mahasiswa untuk berkontribusi. Adanya platform ini menunjukkan komitmen Kota Magelang dalam mendukung kegiatan riset dan publikasi ilmiah, yang berdampak positif pada peningkatan kapabilitas inovasi daerah.

Selain publikasi ilmiah, aplikasi kekayaan intelektual (KI) juga merupakan indikator penting dalam penilaian kapabilitas inovasi. Pemerintah Kota Magelang, melalui Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Bapperida), selama ini telah melakukan fasilitasi bagi para pemenang ajang Kreatifitas dan Inovasi Masyarakat Kota Magelang (KRENOVA) dan Inovasi Daerah Kota Magelang (IDAMAN) untuk proses pendaftaran dan perolehan HKI. Ini mencakup paten, desain industri, desain tata letak sirkuit terpadu, hak cipta, Perlindungan Varietas Tanaman (PVT), dan rahasia dagang. Dukungan ini menunjukkan keseriusan pemerintah dalam mendorong inovasi dan melindungi hasil karya intelektual masyarakat, yang pada gilirannya dapat meningkatkan daya saing dan kreativitas daerah.

Dengan berbagai program tersebut, Kota Magelang menunjukkan upaya dalam meningkatkan kapabilitas inovasi. Namun, masih perlu usaha lebih untuk menyamai atau melampaui capaian provinsi Jawa Tengah. Kota Magelang masih dikategorikan belum sepenuhnya mampu memanfaatkan potensi inovasi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, yang pada akhirnya mengurangi daya saing daerah. Oleh karenanya, Pemerintah Kota Magelang perlu meningkatkan dukungan pada penelitian dan pengembangan, serta pemberian fasilitas yang lebih baik bagi para inovator, sehingga dapat meningkatkan kapabilitas inovasinya dan berkontribusi lebih signifikan terhadap perekonomian daerah.

2.1.5 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)

Tabel 2.296 Capaian Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, 2022-2023

NO	INDIKATOR	Tahun 2022	Tahun 2023
TUJUAN 1	TANPA KEMISKINAN		
1.1.1*	Tingkat kemiskinan ekstrim	0,13%	0
1.2.1*	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur	7,10%	6,11%

NO	INDIKATOR	Tahun 2022	Tahun 2023
1.2.2*	Persentase laki-laki, perempuan dan anak-anak dari semua usia, yang hidup dalam kemiskinan dalam berbagai dimensi, sesuai dengan definisi nasional	NA	NA
1.3.1*	Proporsi penduduk yang menerima program perlindungan sosial, menurut jenis kelamin, untuk kategori kelompok semua anak, pengangguran, lansia, penyandang difabilitas, ibu hamil/melahirkan, korban kecelakaan kerja, kelompok miskin dan rentan	NA	NA
1.3.1.(a)	Proporsi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan	100%	100%
1.3.1.(b)	Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan	78,36	78,36
1.4.1*	Persentase penduduk hidup dalam rumah tangga yang mempunyai akses pada pelayanan dasar	NA	NA
1.4.2*	Proporsi dari penduduk dewasa yang mendapatkan hak atas tanah yang didasari oleh dokumen hukum dan yang memiliki hak atas tanah berdasarkan jenis kelamin dan tipe kepemilikan	NA	NA
1.5.1*	Jumlah korban meninggal, hilang, dan terkena dampak bencana per 100.000 orang	0	0
1.5.2*	Jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana terhadap PDB	0	0
1.5.3*	Rencana dan implementasi strategi nasional pengurangan risiko bencana yang selaras dengan the Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015-2030	0	0
1.5.4*	Persentase pemerintah daerah yang mengadopsi dan menerapkan strategi pengurangan risiko bencana daerah yang selaras dengan strategi pengurangan risiko bencana nasional	0	0
1.a.2*	Pengeluaran untuk layanan pokok (pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial) sebagai persentase dari total belanja pemerintah	55,57%	55,03%
TUJUAN 2	TANPA KELAPARAN		
2.1.1*	Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan (<i>Prevalence of Undernourishment</i>)	9,48	10,34
2.1.2*	Prevalensi penduduk dengan kerawanan pangan sedang atau berat, berdasarkan Skala Pengalaman Kerawanan Pangan	NA	NA
2.2.1*	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah lima tahun/balita	8,34	10,3
2.2.2*	Prevalensi wasting (berat badan/ tinggi badan) anak pada usia kurang dari 5 tahun, berdasarkan tipe	1,77	5,5
2.2.2.(a)	Kualitas konsumsi pangan yang diindikasikan oleh skor Pola Pangan Harapan (PPH)	93,1	91,1
2.2.3	Prevalensi anemia pada ibu hamil usia 15-49 tahun	5,44	7
2.3.1*	Volume produksi per tenaga kerja menurut kelas usaha tani tanaman/ peternakan/ perikanan/ kehutanan	NA	NA
2.3.1.(a)	Nilai tambah pertanian per tenaga kerja menurut kelas usaha tani tanaman/ peternakan/ perikanan/ kehutanan	NA	NA
2.3.2*	Rata-rata pendapatan produsen pertanian skala kecil, menurut subsektor	NA	NA
2.4.1.(a)	Proporsi luas lahan pertanian yang ditetapkan sebagai kawasan pertanian pangan berkelanjutan	44	44

NO	INDIKATOR	Tahun 2022	Tahun 2023
2.5.1*	Jumlah sumber daya genetik tanaman dan hewan untuk pangan dan pertanian yang disimpan di fasilitas konservasi, baik jangka menengah ataupun jangka panjang	NA	NA
2.5.2*	Proporsi rumpun atau galur ternak lokal diklasifikasi menurut tingkat risiko kepunahan	NA	NA
2.a.1*	Indeks orientasi pertanian (IOP) untuk pengeluaran pemerintah	NA	NA
2.a.2*	Total bantuan pembangunan (ODA) dan bantuan lain untuk sektor pertanian	NA	NA
2.b.1*	Subsidi ekspor pertanian	NA	NA
2.c.1*	Indikator anomali harga pangan	0,528	0,431
TUJUAN 3	KEHIDUPAN SEHAT DAN SEJAHTERA		
3.1.1*	Angka Kematian Ibu (AKI)	82,92%	0%
3.1.2*	Proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya;	100%	100%
	(a) ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih	100%	100%
	(b) di fasilitas kesehatan	100%	100%
3.2.1*	(a) Angka Kematian Balita (AKBa);	8,29	7,29
	(b) Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 kelahiran hidup	8,29	5,47
3.2.2*	Angka Kematian Neonatal (AKN) per 1.000 kelahiran hidup	6,63	3,65
3.3.1*	Jumlah infeksi baru HIV per 1000 penduduk tidak terinfeksi	0,1	0,11
3.3.2*	Insidens Tuberkulosis (ITB) per 100.000 penduduk	183,81	199
3.3.3*	Kejadian Malaria per 1.000 orang	0	0,01
3.3.3.(a)	Jumlah kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria	NA	NA
3.3.4*	Insiden Hepatitis B per 100.000 penduduk	0	13,25
3.3.5*	Jumlah orang yang memerlukan intervensi terhadap penyakit tropis yang terabaikan (a) Filariasis dan (b) Kusta	0	2
3.3.5.(a)	Jumlah kabupaten/kota dengan eliminasi kusta	1	1
3.3.5.(b)	Jumlah kabupaten/kota endemis filariasis yang mencapai eliminasi	1	1
3.4.1.(a)	Persentase merokok penduduk usia 10-18 tahun	25,22%	1,2
3.4.1.(b)	Prevalensi tekanan darah tinggi	17.36%	13,67%
3.4.1.(c)	Prevalensi obesitas pada penduduk umur ≥18 tahun	0,23	0,67
3.6.1	Kematian akibat kecelakaan lalu lintas	25 (jiwa)	28 (jiwa)
3.7.1*	Proporsi perempuan usia reproduksi (15-19 tahun) yang memiliki kebutuhan keluarga berencana terpenuhi menurut metode kontrasepsi modern	61,18	70,09
3.7.2*	Angka kelahiran remaja (umur 10-14 tahun; umur 15-19 tahun) per 1000 perempuan di kelompok umur yang sama	10,5	6,64
3.7.2.(a)	Total Fertility Rate (TFR)	3,69	1,78
3.8.1*	Cakupan pelayanan kesehatan esensial	-	-
3.8.1.(a)	Unmet Need Pelayanan Kesehatan	0	55,32

NO	INDIKATOR	Tahun 2022	Tahun 2023
3.8.2*	Proporsi populasi dengan pengeluaran rumah tangga yang besar untuk kesehatan sebagai bagian dari total pengeluaran rumah tangga atau pendapatan	NA	NA
3.8.2.(a)	Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)	99,74%	100%
3.a.1*	Persentase merokok pada penduduk umur ≥ 15 tahun	25,22%	24,87%
3.b.1*	Proporsi target populasi yang telah memperoleh vaksin program nasional	96,28%	82,53%
3.b.2*	Total Official Development Assistance (ODA) untuk penelitian medis dan sektor kesehatan dasar	NA	NA
3.b.3*	Proporsi fasilitas kesehatan dengan paket obat esensial yang tersedia dan terjangkau secara berkelanjutan	100%	100%
3.c.1*	Kepadatan dan distribusi tenaga kesehatan	24,79	25,24
3.d.1*	Regulasi kesehatan internasional dan kesiapsiagaan darurat kesehatan	NA	NA
TUJUAN 4	PENDIDIKAN BERKUALITAS		
4.1.1.(a)	Proporsi anak-anak dan remaja di: (a) kelas 5 (b) kelas 8, dan (c) usia 15 tahun yang mencapai setidaknya tingkat kemahiran minimum dalam: (i) membaca, (ii) matematika		
	(a) kelas 5		
	(i) membaca	69,54	78,28
	(ii) matematika	50,05	58,72
	(a) kelas 8		
	(i) membaca	81,22	86,9
	(ii) matematika	64,27	74,98
4.1.2*	Tingkat penyelesaian pendidikan jenjang SD/ sederajat, SMP/ sederajat, dan SMA/ sederajat		
	(i) SD/ sederajat	87.70%	78.55%
	(ii) SMP/ sederajat	76.25%	81.71%
	(iii) SMA/ sederajat	57.14%	57.65%
4.1.2.(a)	Angka anak tidak sekolah usia 7-12 tahun; usia 13-15 tahun; dan usia 16-18 tahun		
	Usia 7-12 tahun	0,13%	0,04%
	Usia 13-15 tahun	3,89%	0,45%
	Usia 16-18 tahun	12,42%	14,37%
4.2.2*	Tingkat partisipasi dalam pembelajaran yang terorganisir (satu tahun sebelum usia sekolah dasar), menurut jenis kelamin	NA	NA
4.3.1*	Tingkat partisipasi remaja dan dewasa dalam pendidikan dan pelatihan formal dan non formal dalam 12 bulan terakhir, menurut jenis kelamin	NA	NA
4.3.1.(a)	Angka Partisipasi Kasar (APK) Perguruan Tinggi (PT)	41,24	35,83
4.4.1.(a)	Proporsi remaja (usia 15-24 tahun) dan dewasa (usia 15-59 tahun) dengan keterampilan teknologi informasi dan komunikasi (TIK)	NA	NA

NO	INDIKATOR	Tahun 2022	Tahun 2023
4.5.1*	Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) pada tingkat SD/ sederajat, dan (ii) Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) pada tingkat SMP/ sederajat, SMA/ SMK/ sederajat, dan Perguruan Tinggi untuk (a) perempuan/ laki-laki, (b) pedesaan/ perkotaan, (c) kuintil terbawah/ teratas, (d) disabilitas/ tanpa disabilitas		
	(a) Rasio APM SD/ Sederajat Perempuan/ laki-laki	100,28	100,08
	(b) Rasio APK SMP/ Sederajat Perempuan/ laki-laki	93,62	97,33
	(c) Rasio APK SMA/ Sederajat Perempuan/ laki-laki	97,04	95,1
	(d) Rasio APK PT Perempuan/ laki-laki	125,28	177,68
4.6.1.(a)	Persentase Angka melek aksara penduduk umur ≥ 15 tahun	98,34%	98,80%
4.a.1*	Proporsi sekolah dengan akses terhadap: (a) listrik, (b) internet untuk tujuan pengajaran, (c) komputer untuk tujuan pengajaran, (d) air minum layak, (e) fasilitas sanitasi dasar per jenis kelamin, (f) fasilitas cuci tangan (terdiri air, sanitasi, dan higienis bagi semua (WASH))	NA	NA
4.a.1.(a)	Persentase siswa yang mengalami perundungan dalam 12 bulan terakhir	NA	NA
4.c.1*	Persentase guru yang memenuhi kualifikasi sesuai dengan standar nasional menurut jenjang pendidikan		
	-PAUD	96,63%	72,58%
	-SD/MI	99,29%	95,40%
	-SMP/MTS	99%	98,71%
TUJUAN 5	KESETARAAN GENDER		
5.1.1*	Ketersediaan kerangka hukum yang mendorong, menetapkan dan memantau kesetaraan gender dan penghapusan diskriminasi berdasarkan jenis kelamin	Ada	Ada
5.2.1*	Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan (fisik, seksual, atau emosional) oleh pasangan atau mantan pasangan dalam 12 bulan terakhir	32,00%	31,91%
5.2.2*	Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan seksual oleh orang lain selain pasangan dalam 12 bulan terakhir	2	0
5.5.1*	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di (a) parlemen tingkat pusat dan (b) pemerintah daerah		
	(a) Parlemen tingkat pusat	NA	NA
	(b) pemerintah daerah	24%	24%
5.5.2*	Proporsi perempuan yang berada di posisi managerial	10,15	NA
5.6.1*	Proporsi perempuan usia reproduksi 15-49 tahun yang membuat keputusan sendiri terkait hubungan seksual, penggunaan kontrasepsi, dan layanan kesehatan.	NA	NA
5.a.1*	(1) Proporsi penduduk pertanian yang memiliki hak atas tanah pertanian; (2) Proporsi perempuan penduduk pertanian sebagai pemilik atau yang memiliki hak atas tanah pertanian, menurut jenis kepemilikan	NA	NA
5.b.1*	Proporsi individu yang menguasai/ memiliki telepon genggam	79,27%	76,63%
5.c.1*	Ketersediaan sistem untuk melacak dan membuat alokasi umum untuk kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan	0	0

NO	INDIKATOR	Tahun 2022	Tahun 2023
TUJUAN 6	AIR BERSIH DAN SANITASI LAYAK		
6.1.1*	Presentase rumah tangga yang menggunakan layanan air minum yang dikelola secara aman	85,88	88,05
6.2.1*	Persentase rumah tangga yang menggunakan (a) layanan sanitasi yang dikelola secara aman dan (b) fasilitas cuci tangan dengan air mengalir dan sabun	NA	NA
6.3.1.(a)	Persentase limbah cair industri cair yang diolah secara aman	NA	NA
6.3.2.(a)	Indeks Kualitas Air (IKA)	65	66,67
6.4.2.(a)	Proporsi pengambilan air baku bersumber dari air permukaan terhadap ketersediaannya	NA	NA
6.5.1*	Tingkat pelaksanaan pengelolaan sumber daya air terpadu (0-100)	NA	NA
6.5.2*	Proporsi wilayah cekungan lintas batas dengan pengaturan kerjasama sumber daya air yang operasional	NA	NA
Tujuan 7	MENJAMIN AKSES ENERGI YANG TERJANGKAU, ANDAL, BERKELANJUTAN DAN MODERN UNTUK SEMUA		
7.1.1*	Rasio elektrifikasi	100%	100%
7.1.1.(a)	Konsumsi listrik per kapita (kwh/kapita)	30,92	30,07
7.1.2.(a)	Jumlah sambungan jaringan gas untuk rumah tangga	NA	NA
7.1.2.(b)	Proporsi rumah tangga yang menggunakan gas/LPG sebagai bahan bakar utama untuk memasak terhadap total rumah tangga	94,97	96,43
7.1.2.(c)	Proporsi rumah tangga yang menggunakan listrik sebagai bahan bakar utama untuk memasak terhadap total rumah tangga	0,28	NA
TUJUAN 8	MENINGKATKAN PERTUMBUHAN EKONOMI YANG INKLUSIF DAN BERKELANJUTAN, KESEMPATAN KERJA YANG PRODUKTIF DAN MENYELURUH, SERTA PEKERJAAN YANG LAYAK UNTUK SEMUA		
8.1.1*	Laju pertumbuhan PDB per kapita	5,71	5,21
8.1.1.(a)	PDB per kapita	82,91 Juta Rp/Tahun	89,91 (Juta Rp/Tahun)
8.2.1*	Laju pertumbuhan PDB per tenaga kerja/Tingkat pertumbuhan PDB riil per orang bekerja per tahun	2,32	0,27
8.3.1*	Proporsi lapangan kerja informal, berdasarkan sektor dan jenis kelamin	43,8	45,4
8.3.1.(a)	Proporsi UMKM yang mengakses kredit lembaga keuangan formal	NA	NA
8.5.1*	Upah rata-rata per jam kerja	Rp15.861,49	Rp15.723,56
8.5.2*	Tingkat pengangguran terbuka berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur	6,71	5,25
8.5.2.(a)	Tingkat setengah pengangguran	2,65	4,87
8.6.1*	Persentase usia muda (15-24) yang sedang tidak sekolah, bekerja, atau mengikuti pelatihan (NEET)	13,61	16,32
8.9.1*	Proporsi dan laju pertumbuhan kontribusi pariwisata terhadap PDB	NA	NA
8.9.1.(a)	Jumlah wisatawan mancanegara	693	346
8.9.1.(b)	Jumlah kunjungan wisatawan nusantara	932.399	745.169

NO	INDIKATOR	Tahun 2022	Tahun 2023
8.10.1*	Jumlah kantor layanan bank dan ATM per 100.000 penduduk dewasa	NA	NA
8.10.1.(a)	Proporsi kredit UMKM terhadap total kredit perbankan	48,08	49,74
8.b	Adanya strategi nasional terkait ketenagakerjaan pemuda yang sudah dikembangkan dan operasional sebagai strategi khusus atau sebagai bagian dari strategi ketenagakerjaan nasional	NA	NA
TUJUAN 9	MEMBANGUN INFRASTRUKTUR YANG TANGGUH, MENINGKATKAN INDUSTRI INKLUSIF DAN BERKELANJUTAN, SERTA MENDORONG INOVASI		
9.1.1.(a)	Kondisi mantap jalan nasional	NA	NA
9.1.1.(b)	Panjang jalan tol	0	0
9.1.1.(c)	Panjang jalur kereta api	0	0
9.1.2*	Jumlah penumpang dan barang berdasarkan moda transportasi	2.998.200	3.236.400
9.1.2.(a)	Jumlah Bandara	0	0
9.1.2.(b)	Jumlah pelabuhan penyeberangan	0	0
9.1.2.(c)	Jumlah Pelabuhan strategis	0	0
9.2.1*	Proporsi nilai tambah sektor industri manufaktur terhadap PDB dan per kapita		
	-proporsi nilai tambah sektor industri manufaktur terhadap PDB	16,46	16,49
	-Nilai tambah sektor industri manufaktur per kapita	13,63	14,83
9.2.1.(a)	Laju pertumbuhan PDB industri manufaktur	3,38	4,64
9.2.2*	Proporsi tenaga kerja pada sektor industri manufaktur	19,36	19,45
9.3.1*	Proporsi nilai tambah industri kecil terhadap total nilai tambah sektor industri	NA	NA
9.3.2*	Proporsi industri kecil dengan pinjaman atau kredit	NA	NA
9.4.1*	Rasio Emisi CO2/Emisi Gas Rumah Kaca dengan Nilai Tambah Sektor Industri Manufaktur	NA	NA
9.4.1.(a)	Penurunan emisi gas rumah kaca sektor industri	NA	NA
9.4.1.(b)	Intensitas emisi sektor industri	NA	NA
9.5.1*	Proporsi anggaran riset pemerintah terhadap PDB	NA	0,038
9.5.2*	Jumlah sumber daya manusia bidang ilmu pengetahuan dan teknologi (peneliti, perekayasa, dan dosen) pada instansi pemerintah dan perguruan tinggi per satu juta penduduk	NA	436
9.5.2.(a)	Proporsi sumberdaya manusia bidang ilmu pengetahuan dan teknologi dengan gelar Doktor (S3)	NA	56
9.c.1*	Proporsi penduduk terlayani mobile broadband	NA	NA
TUJUAN 10	MENGURANGI KESENJANGAN INTRA DAN ANTAR NEGARA		
10.1.1*	Rasio Gini	0,43	0,42
10.1.1.(b)	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur	7,1	6,11
10.1.1.(c)	Jumlah desa tertinggal	NA	NA
10.1.1.(d)	Jumlah desa mandiri	NA	NA

NO	INDIKATOR	Tahun 2022	Tahun 2023
10.1.1.(e)	Jumlah daerah tertinggal	NA	NA
10.1.1.(f)	Persentase penduduk miskin di daerah tertinggal	NA	NA
10.2.1*	Proporsi penduduk yang hidup di bawah 50 persen dari median pendapatan, menurut jenis kelamin dan penyandang disabilitas	10	8,38
10.3.1.(a)	Indeks Aspek Kebebasan	NA	NA
10.3.1.(b)	Jumlah penanganan pengaduan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM)	0	0
10.3.1.(c)	Jumlah penanganan pengaduan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) perempuan terutama kekerasan terhadap perempuan	0	0
10.3.1.(d)	Jumlah kebijakan yang diskriminatif dalam 12 bulan lalu berdasarkan pelanggaran diskriminasi menurut hukum HAM internasional	0	0
10.4.1.(b)	Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan	78,36	78,36
10.5.1. (a)	Indikator Kesehatan Perbankan	NA	NA
10.7.2.(a)	Jumlah dokumen kerjasama ketenagakerjaan dan perlindungan pekerja migran antara Negara RI dengan negara tujuan penempatan	NA	NA
10.7.2.(b)	Jumlah fasilitasi pelayanan penempatan TKLN berdasarkan okupasi	NA	NA
TUJUAN 11	KOTA DAN PEMUKIMAN YANG BERKELANJUTAN		
11.1.1.(a)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau	75,45%	76,16%
11.2.1.(a)	Proporsi populasi yang mendapatkan akses yang nyaman pada transportasi publik	34,72%	35,83%
11.2.1.(b)	Persentase penduduk terlayani transportasi umum	7,83%	8,15%
11.3.1.(a)	Rasio laju perluasan lahan terbangun terhadap laju pertumbuhan penduduk	NA	NA
11.4.1.(a)	Total pengeluaran per kapita yang diperuntukan untuk preservasi, perlindungan, konservasi pada semua warisan budaya dan alam (non-PPP)	NA	NA
11.5.1*	Jumlah korban meninggal, hilang, dan terkena dampak bencana per 100.000 orang	0	0
11.5.2.(a)	Proporsi kerugian ekonomi langsung akibat bencana relatif terhadap PDB	0,0019	0,0017
11.6.1.(a)	Persentase rumah tangga yang mendapatkan akses pelayanan pengumpulan sampah	74,93	78,57
11.6.1.(b)	Persentase sampah nasional yang terkelola	NA	NA
11.6.2.(a)	Rata-rata tahunan materi partikular halus PM 10	NA	NA
11.6.2.(b)	Indeks Kualitas Udara	81,157	83,05
11.7.1.(a)	Proporsi ruang terbuka perkotaan untuk semua	16,24	16,24
11.7.2.(a)	Proporsi penduduk yang mengalami kejahatan kekerasan dalam 12 bulan terakhir	25	30
11.b.2*	Persentase pemerintah daerah yang mengadopsi dan menerapkan strategi penanggulangan bencana daerah yang selaras dengan rencana/strategi nasional penanggulangan bencana	0	0

NO	INDIKATOR	Tahun 2022	Tahun 2023
TUJUAN 12	KONSUMSI DAN PRODUKSI YANG BERTANGGUNG JAWAB		
12.1.1*	Rencana dan implementasi Strategi Pelaksanaan Sasaran Pola Konsumsi dan Produksi Berkelanjutan	NA	NA
12.3.1.(a)	Persentase Sisa Makanan	33,70	33,60
12.4.1.(a)	Persentase pengurangan dan penghapusan merkuri dari baseline 50 ton penggunaan merkuri	NA	NA
12.4.1.(b)	Persentase penurunan tingkat konsumsi perusak ozon dari baseline	NA	NA
12.4.2*	(a) Limbah B3 per kapita; dan (b) Proporsi limbah B3 yang ditangani/diolah berdasarkan jenis penanganannya /pengelolaannya	222,24	NA
12.5.1.(a)	Jumlah timbulan sampah yang didaur ulang	6.388,77 ton	4.351,14 ton
12.6.1*	Jumlah perusahaan yang mempublikasi laporan keberlanjutannya (Sustainability Report)	NA	NA
12.6.1.(a)	Jumlah perusahaan yang menerapkan sertifikasi SNI ISO 14001	0	NA
12.7.1.(a)	Jumlah produk ramah lingkungan yang teregister dan masuk dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah	NA	NA
12.8.1.(a)	Jumlah satuan Pendidikan formal dan Lembaga/ komunitas masyarakat peduli dan berbudaya lingkungan hidup	NA	NA
12.8.1.(a)	Jumlah satuan Pendidikan dormal dan Lembaga/komunitas masyatakat peduli dan berbudaya lingkungan hidup	33	148
12.a.1*	Kapasitas pembangkit energi terbarukan yang terpasang	0	0
12.b.1.(a)	Jumlah lokasi yang menerapkan pariwisata berkelanjutan (sustainable tourism development)	2	2
TUJUAN 13	PENANGANAN PERUBAHAN IKLIM		
13.1.2*	Rencana dan Implementasi nasional strategi nasional penanggulangan bencana yang selaras dengan the Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015-2030	NA	NA
13.1.3*	Persentase pemerintah daerah yang mengadopsi dan menerapkan strategi penanggulangan bencana daerah yang selaras dengan rencana/ strategi nasional penanggulangan bencana	NA	NA
13.2.1*	Terwujudnya penyelenggaraan inventarisasi gas rumah kaca (GRK), serta monitoring, pelaporan dan verifikasi emisi GRK yang dilaporkan dalam dokumen Biennial Update Report (BUR) dan National Communications	NA	NA
13.2.2*	Jumlah emisi gas rumah kaca (GRK) per tahun	NA	NA
13.2.2.(a)	Potensi penurunan emisi gas rumah kaca (GRK)	NA	NA
13.2.2.(b)	Persentase potensi penurunan intensitas emisi gas rumah kaca (GRK)	NA	NA
13.3.1.(a)	Jumlah satuan Pendidikan formal dan Lembaga/ komunitas masyarakat peduli dan berbudaya lingkungan hidup	NA	NA
TUJUAN 16	PERDAMAIAN, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh		
16.1.1.(a)	Jumlah kasus kejahatan pembunuhan pada satu tahun terakhir	0	0
16.1.2.(a)	Kematian disebabkan konflik per 100.000 penduduk	0	0

NO	INDIKATOR	Tahun 2022	Tahun 2023
16.1.3.(a)	Proporsi penduduk yang menjadi korban kejahatan kekerasan dalam 12 bulan terakhir.	NA	NA
16.1.4*	Proporsi penduduk yang merasa aman berjalan sendirian di area tempat tinggalnya	100%	90%
16.2.1.(a)	Proporsi rumah tangga yang memiliki anak umur 1-17 tahun yang mengalami hukuman fisik dan/atau agresi psikologis dari pengasuh dalam setahun terakhir	2	0
16.2.1.(b)	Prevalensi anak usia 13-17 tahun yang pernah mengalami kekerasan sepanjang hidupnya	NA	NA
16.2.2*	Angka korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) per 100.000 penduduk menurut jenis kelamin, kelompok umur dan jenis eksploitasi	0	0
16.2.3.(a)	Proporsi perempuan dan laki-laki muda umur 18-24 tahun yang mengalami kekerasan seksual sebelum umur 18 tahun	NA	NA
16.3.1.(a)	Proporsi korban kekerasan dalam 12 bulan terakhir yang melaporkan kepada polisi	100%	100%*
16.3.1.(b)	Persentase orang miskin yang menerima bantuan hukum litigasi dan non litigasi	NA	NA
16.3.1.(c)	Persentase orang tidak mampu yang menerima layanan hukum berupa pos bantuan hukum, sidang di luar gedung pengadilan, dan pembebasan biaya perkara	NA	NA
16.3.2.(a)	Proporsi tahanan yang melebihi masa penahanan terhadap seluruh jumlah tahanan	0	0
16.3.3.(a)	Indeks Akses terhadap Keadilan (Access to Justice Index)	NA	NA
16.5.1.(a)	Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK)	94,15	96,11
16.6.1*	Proporsi pengeluaran utama pemerintah terhadap anggaran yang disetujui	93,85%	93,88%
16.6.1.(a)	Persentase instansi pemerintah yang mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)	1	1
16.6.1.(b)	Persentase instansi pemerintah dengan skor Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) \geq B	1	1
16.6.1.(c)	Persentase instansi pemerintah dengan Indeks Reformasi Birokrasi (RB) \geq B	1	1
16.6.2.(a)	Jumlah Instansi pemerintah dengan tingkat kepatuhan pelayanan publik kategori baik	NA	NA
16.7.1.(a)	Persentase keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)	24%	24%
16.7.2.(a)	Indeks Kapasitas Lembaga Demokrasi	NA	NA
16.7.2.(b)	Indeks Aspek Kebebasan	NA	NA
16.7.2.(c)	Indeks Kesetaraan	NA	NA
16.9.1*	Proporsi anak umur di bawah 5 tahun yang kelahirannya dicatat oleh lembaga pencatatan sipil menurut umur	100%	100%
16.9.1.(a)	Persentase kepemilikan akta lahir untuk penduduk 0-17 tahun pada 40% berpendapatan bawah	100%	100%
16.9.1.(b)	Persentase cakupan kepemilikan akta kelahiran pada penduduk 0-17 tahun	100%	100%

NO	INDIKATOR	Tahun 2022	Tahun 2023
16.10.1.(b)	Jumlah penanganan pengaduan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM)	NA	NA
16.10.1.(c)	Jumlah penanganan pengaduan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) perempuan terutama kekerasan terhadap perempuan	NA	NA
16.10.2.(a)	Jumlah Badan Publik yang berkualifikasi Informatif	NA	NA
16.b.1.(a)	Jumlah kebijakan yang diskriminatif dalam 12 bulan lalu berdasarkan pelanggaran diskriminasi menurut hukum HAM internasional	NA	NA
TUJUAN 17	MENGUATKAN SARANA PELAKSANAAN DAN MEREVITALISASI KEMITRAAN GLOBAL UNTUK PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN		
17.1.1*	Total pendapatan pemerintah sebagai proporsi terhadap PDB menurut sumbernya	3,74%	2,96%
17.1.1.(a)	Rasio penerimaan pajak terhadap PDB	0,50%	0,53%
17.1.2*	Proporsi anggaran domestik yang didanai oleh pajak domestik	27,66%	26,69%
17.3.2.(a)	Proporsi volume remitansi PMI (dalam US dollars) terhadap PDB	NA	NA
17.6.1.(a)	Persentase pelanggan terlayani jaringan internet akses tetap pitalebar (fixed broadband) terhadap total rumah	NA	NA
17.6.1.(b)	Persentase kecamatan yang terjangkau infrastruktur jaringan serat optik (kumulatif)	NA	NA
17.8.1*	Persentase pengguna internet	81,81%	79,85%
17.11.1.(a)	Pertumbuhan ekspor produk non migas	NA	NA
17.17.1.(a)	Jumlah Dokumen Daftar Rencana Proyek KPBU (DRK) yang diterbitkan setiap tahun	0	0
17.17.1.(b)	Jumlah proyek yang ditawarkan untuk dilaksanakan dengan skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU)	0	0
17.17.1.(c)	Jumlah nilai investasi proyek KPBU yang telah ditandatangani	1.150,00 (miliar rupiah)	0
17.18.1.(a)	Persentase pengguna data yang menggunakan data BPS sebagai dasar perencanaan, monitoring dan evaluasi pembangunan nasional	NA	NA
17.18.1.(b)	Persentase publikasi statistik yang menerapkan standar akurasi sebagai dasar perencanaan, monitoring dan evaluasi pembangunan nasional	NA	NA
17.18.3*	Jumlah negara dengan Perencanaan Statistik Nasional yang didanai dan melaksanakan rencananya berdasar sumber pendanaan .	NA	NA
17.19.1.(a)	Persentase K/L/D/I yang melaksanakan rekomendasi kegiatan statistik	71,43	53,33
17.19.1.(b)	Persentase K/L/D/I yang menyampaikan metadata sektoral dan khusus sesuai standar	50,00%	100%
17.19.2.(a)	Terlaksananya Sensus Penduduk pada tahun 2020	Ada	Ada
17.19.2.(b)	Tersedianya data registrasi terkait kelahiran dan kematian (Vital Statistics Register)	Tersedia	Tersedia

Sumber: Pemerintah Kota Magelang, 2024

2.1.6 Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM)

2.1.6.1 Bidang Pendidikan

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis

Pelayanan Minimal Pendidikan, indikator pengukuran Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pendidikan digambarkan melalui tabel berikut:

Tabel 2.297 Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pendidikan, 2024

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Tahun 2023	Tahun 2024			Status
				Target	Realisasi	Kinerja	
1	Pendidikan Anak Usia Dini	Jumlah Warga Negara Usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	100%	100%	100%	100%	ST
2	Pendidikan Dasar	Jumlah Warga Negara Usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar	100%	100%	100%	100%	ST
3	Pendidikan Kesenjangan	Jumlah Warga Negara Usia 7-18 Tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	100%	100%	100%	100%	ST

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Magelang, 2025

Pada tahun 2023 dan 2024, Kota Magelang berhasil mencapai target Standar Pelayanan Minimal (SPM) di bidang pendidikan dengan kinerja 100% pada seluruh jenis pelayanan dasar. Untuk pendidikan anak usia dini, jumlah warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD tercatat mencapai target 100%, yang menunjukkan akses pendidikan usia dini yang sangat baik. Selain itu, pada pendidikan dasar, partisipasi warga negara usia 7-15 tahun juga mencapai 100%, memastikan bahwa seluruh anak usia sekolah mendapatkan kesempatan untuk mengenyam pendidikan dasar tanpa hambatan.

Keberhasilan ini juga tercermin dalam sektor pendidikan kesetaraan, di mana 100% warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar atau menengah telah berpartisipasi dalam program pendidikan kesetaraan. Hal ini menunjukkan bahwa Kota Magelang telah berhasil menyediakan jalur pendidikan alternatif bagi mereka yang tertinggal, sehingga tidak ada warga yang terabaikan dalam mendapatkan pendidikan. Secara keseluruhan, pencapaian SPM di bidang pendidikan ini mencerminkan komitmen dan upaya pemerintah Kota Magelang dalam memastikan semua warganya memiliki akses yang setara terhadap pendidikan berkualitas.

2.1.6.2 Bidang Kesehatan

Pada tahun 2024, kinerja pelayanan kesehatan di Kota Magelang menunjukkan hasil yang sangat memuaskan. Dari dua belas indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang kesehatan, seluruhnya telah mencapai target yang ditetapkan. Hal ini mencerminkan efektivitas kebijakan dan program kesehatan yang diterapkan, serta komitmen dalam menyediakan layanan kesehatan yang optimal bagi masyarakat.

Dengan cakupan pelayanan yang mencapai 100%, masyarakat Kota Magelang dapat mengakses layanan kesehatan sesuai standar yang telah ditetapkan. Keberhasilan ini perlu dipertahankan dan ditingkatkan melalui strategi berkelanjutan, termasuk penguatan fasilitas kesehatan, peningkatan sumber daya manusia kesehatan, serta optimalisasi program.

Tabel 2.298 Capaian Indikator SPM Urusan Kesehatan, 2024

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Tahun 2023	Tahun 2024			Status
				Target	Realisasi	Kinerja	
1	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah ibu hamil yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	100%	100%	100%	ST

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Tahun 2023	Tahun 2024			Status
				Target	Realisasi	Kinerja	
2	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	100%	100%	100%	ST
3	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	100%	100%	100%	ST
4	Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah balita yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	100%	100%	100%	ST
5	Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah warga negara usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	100%	100%	100%	ST
6	Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah warga negara usia produktif yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	100%	100%	100%	ST
7	Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah warga negara usia lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	100%	100%	100%	ST
8	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah warga negara penderita hipertensi yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	100%	100%	100%	ST
9	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah warga negara penderita diabetes melitus yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	100%	100%	100%	ST
10	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah warga negara dengan gangguan jiwa berat yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	100%	100%	100%	ST
11	Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah warga negara terduga tuberkulosis yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	100%	100%	100%	ST
12	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi Virus yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (Human Immunodeficiency Virus)	Jumlah warga negara dengan Risiko Terinfeksi Virus yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (Human Immunodeficiency Virus) yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	100%	100%	100%	ST

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Magelang, 2025

2.1.6.3 Bidang Pekerjaan Umum

Tabel 2.299 Capaian Indikator SPM Bidang Pekerjaan Umum, 2024

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Tahun 2023	Tahun 2024			Status
				Target	Realisasi	Kinerja	
1	Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari	Jumlah Warga Negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari	98,25%	100%	100%	100%	ST
2	Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air limbah Domestik	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	96,39%	100%	100%	100%	ST

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Magelang, 2024

Terdapat 2 (dua) layanan yang termasuk ke dalam SPM Bidang Pekerjaan Umum yaitu penyediaan kebutuhan pokok air minum sehari-hari dan penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik. Kedua jenis pelayanan tersebut telah mengalami peningkatan pada tahun 2023 dan telah memiliki kinerja 100%.

2.1.6.4 Bidang Perumahan Rakyat

Tabel 2.300 Capaian SPM Urusan Perumahan Rakyat, 2024

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Tahun 2023	Tahun 2024			Status
				Target	Realisasi	Kinerja	
1	Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	100%	100 %	100 %	100%	ST
2	Fasilitasi Penyediaan Rumah Yang Layak Huni Bagi Masyarakat Yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Warga Negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah Kabupaten Kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	100%	100 %	-	100%	ST

Sumber: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Magelang, 2025

Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota memiliki realisasi 100%. Faktor pendorong pencapaian realisasi ini, karena pada tahun 2024 tidak terdapat bencana di Kota Magelang. Penetapan status bencana harus mengacu pada Pedoman Penetapan Status Keadaan Darurat Bencana yang dikeluarkan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNBP) Tahun 2016 bahwa status Bencana ditetapkan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan rekomendasi oleh badan yang menyelenggarakan urusan dibidang penanggulangan bencana. Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi Masyarakat yang terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota juga memiliki realisasi 100%. Pada tahun 2024, tidak ada warga yang terdampak oleh Program Pemerintah sehingga realisasi 100%.

2.1.6.5 Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Standar Pelayanan Minimal Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat terdiri dari 5 jenis pelayanan dasar yang diampu oleh Satuan Polisi Pamong Praja (1 jenis pelayanan), Badan Penanggulangan Bencana Daerah (3 jenis pelayanan), dan UPT Pemadam Kebakaran (1 jenis pelayanan). Kondisi capaian SPM tersebut pada tahun 2024 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.301 Capaian SPM Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Kota Magelang, 2024

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Tahun 2024	Tahun 2024			Status
				Target	Realisasi	Kinerja	
1	Pelayanan ketentraman dan ketertiban umum	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkara	100%	100%	100%	100%	ST
2	Pelayanan informasi rawan bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	100%	100%	100%	100%	ST
3	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100%	100%	100%	100%	ST
4	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100%	100%	100%	100%	ST
5	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	100%	100%	100%	100%	ST

Sumber: Satpol PP Kota Magelang dan BPBD Kota Magelang, 2025

Pemenuhan SPM sub-urusan bencana dapat terpenuhi 100%. Pelayanan informasi rawan bencana dilakukan melalui pelaksanaan sosialisasi kepada masyarakat di daerah rawan bencana dan pemasangan papan Informasi bencana. Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana dilakukan melalui pemberian pelatihan kepada 381 relawan bencana. Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana mencapai 100% karena tidak ada kejadian yang ditetapkan sebagai bencana sehingga tidak ada korban yang harus diselamatkan dan dievakuasi. Begitu juga dengan SPM sub-urusan yang diampu oleh Satpol PP, penegakan perda/perkada serta menguatnya kesadaran masyarakat menjadi faktor pendorong capaian SPM 100%. Selain itu, UPT Pemadam kebakaran juga berkomitmen menjaga dan meningkatkan responsivitas terhadap kejadian kebakaran sehingga capaian SPM 100% dapat dipertahankan.

2.1.6.6 Bidang Sosial

Standar Pelayanan Minimal yang harus dilaksanakan pada penyelenggaraan urusan ini ditampilkan pada tabel berikut ini. Dari lima indikator SPM urusan sosial, seluruhnya sudah memenuhi target tahunan yang ditetapkan. Kinerja pencapaian SPM urusan sosial sudah mencapai 100%.

Tabel 2.302 Capaian SPM Urusan Sosial Kota Magelang, 2024

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Tahun 2024	Tahun 2024			Status
				Target	Realisasi	Kinerja	
1	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti	Jumlah Warga Negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	100%	100%	100%	100%	ST
2	Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar diluar panti	Jumlah anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	100%	100%	100%	100%	ST

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Tahun 2024	Tahun 2024			Status
				Target	Realisasi	Kinerja	
3	Rehabilitasi Sosial Dasar lanjut usia terlantar di luar panti	Jumlah Warga Negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	100%	100%	100%	100%	ST
4	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti	Jumlah Warga Negara/ gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial diluar panti	100%	100%	100%	100%	ST
5	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap dan paska bencana bagi korban bencana kab/kota	Jumlah Warga Negara korban bencana kab/kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial	100%	100%	100%	100%	ST

Sumber: Dinas Sosial Kota Magelang, 2025

Untuk memenuhi SPM tersebut, mutu layanan juga perlu diperhatikan dari masing-masing jenis pelayanan dasar. Pemenuhan mutu layanan untuk pelayanan dasar nomor 2 (dua) dan 4 (empat) terdiri dari 12 komponen yaitu: Layanan data dan pengaduan; Penyediaan layanan kedaruratan/ layanan reaksi cepat; Penyediaan permakanaan; Penyediaan sandang; Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial; Penyediaan perbekalan kesehatan (Penyediaan P3K); Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga anak terlantar; Fasilitas pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Kartu Identitas Anak / Bukti dokumen kependudukan; Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar/fasilitas layanan pendidikan dan kesehatan; Pemberian pelayanan penelusuran keluarga; Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga; dan Layanan rujukan. Sedangkan untuk pelayanan dasar nomor 1 (satu) dan 3 (tiga) terdapat 13 komponen, dimana 12 komponen sama dengan sebelumnya ditambah 1 (satu) komponen yaitu Penyediaan alat bantu. pelayanan dasar ke-5 memiliki 5 komponen pemenuhan mutu yaitu Penyediaan permakanaan; Penyediaan sandang; Penyediaan tempat penampungan pengungsi; Penanganan khusus bagi kelompok rentan; dan Pelayanan dukungan Psikososial

2.2 EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN RKPD SAMPAI TAHUN BERJALAN DAN REALISASI RPJMD

Evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Magelang Tahun 2026 dilakukan melalui 2 (dua) mekanisme, yaitu membandingkan capaian tahun 2024 dengan target tahun 2024 dan membandingkan capaian tahun 2024 dengan target akhir RPJMD 2026. Output dari evaluasi terhadap target tahunan yaitu mengacu pada klasifikasi Permendagri No. 86 Tahun 2017 dimana hasil kinerja diklasifikasikan ke dalam 5 (lima) kategori yaitu Sangat Tinggi, Tinggi, Sedang, Rendah, dan Sangat Rendah. Kelima klasifikasi tersebut juga digunakan untuk mengkategorikan hasil evaluasi terhadap target akhir RPJMD 2026 sekaligus dilakukan pendekataan pengklasifikasian menjadi 3 (tiga) kategori yaitu perlu upaya keras, akan tercapai, dan mencapai/melebihi target sebagai proxy untuk memetakan program yang perlu diprioritaskan. Evaluasi tersebut dilakukan terhadap indikator kinerja utama daerah maupun indikator program pada urusan pelayanan wajib pelayanan dasar, urusan wajib non-pelayanan dasar, urusan pilihan, urusan pendukung fungsi pemerintahan, urusan penunjang fungsi pemerintahan, unsur pengawasan urusan pemerintahan, unsur kewilayahan, dan unsur pemerintahan umum.

Tabel 2.303 Pedoman Pengkategorian Hasil Evaluasi

Pengklasifikasian Hasil Evaluasi Terhadap Target Tahunan (2024)		Pengklasifikasian Hasil Evaluasi Terhadap Target Akhir RPJMD (2026)			
Status	Keterangan	Status	Keterangan	Simbol	Klasifikasi

Pengklasifikasian Hasil Evaluasi Terhadap Target Tahunan (2024)		Pengklasifikasian Hasil Evaluasi Terhadap Target Akhir RPJMD (2026)			
ST	Sangat Tinggi (90% < capaian kinerja tahun 2022 ≤ 100%)	ST	Sangat Tinggi (90% < capaian kinerja tahun 2022 ≤ 100%)	●	Mencapai/ Melebihi Target
T	Tinggi (75% < capaian kinerja tahun 2022 ≤ 90%)	T	Tinggi (75% < capaian kinerja tahun 2022 ≤ 90%)	▲	Akan Tercapai
S	Sedang (65% < capaian kinerja tahun 2022 ≤ 75%)	S	Sedang (65% < capaian kinerja tahun 2022 ≤ 75%)		
R	Rendah (50% < capaian kinerja tahun 2022 ≤ 65%)	R	Rendah (50% < capaian kinerja tahun 2022 ≤ 65%)	▼	Perlu Upaya Keras
SR	Sangat Rendah (capaian kinerja tahun 2022 ≤ 50%)	SR	Sangat Rendah (capaian kinerja tahun 2022 ≤ 50%)		
Mengacu Permendagri 86 Tahun 2017		Mengacu Permendagri 86 Tahun 2017 dengan Penyesuaian			

Sumber: Tim Penyusun, 2024

2.2.1 Evaluasi Kinerja Utama

Tabel 2.304 Evaluasi Kinerja Utama Kota Magelang, 2024

MISI	MISI/ TUJUAN/ SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	TARGET AKHIR RPJMD (2026)	TARGET 2024	REALISASI 2024	CAPAIAN KINERJA RKPD 2024 (%)	CAPAIAN KINERJA RPJMD s.d. 2024 (%)	STATUS	SIMBOL
1	Mewujudkan Masyarakat yang Religius, Berbudaya, Beradab, Toleran, Berlandaskan Imtaq								
	<i>Terwujudnya masyarakat kota yang berkarakter</i>	<i>Nilai pembangunan masyarakat</i>	83,93	78,38	88,82	100	100	ST	●
	Meningkatnya penguatan toleransi	Nilai penguatan toleransi	65	60,00	101,20	100	100	ST	●
	Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum	Nilai penguatan ketentraman dan ketertiban umum	97,86	87,95	84,71	96,31	86,56	T	▲
	Meningkatnya stabilitas daerah	Nilai stabilitas daerah	94,87	93,09	97,15	100	100	ST	●
	Meningkatnya penguatan kebudayaan	Nilai pemajuan kebudayaan	71,91	64,87	68,18	100	94,81	ST	●
	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan	Nilai partisipasi masyarakat	90	86,00	92,85	100	100	ST	●
2	Memenuhi kebutuhan pelayanan dasar masyarakat untuk meningkatkan kualitas SDM								
	<i>Meningkatnya kualitas dan daya saing sumberdaya manusia</i>	<i>Indeks Pembangunan Manusia</i>	83,34	81,94	82,15	100	98,57	ST	●
	Meningkatnya kualitas pendidikan dan literasi untuk masyarakat berdaya saing	Indeks Pendidikan	0,791	0,773	0,79	100	99,49	ST	●
		Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	17	17,00	17,00	100	100	ST	●

MISI	MISI/ TUJUAN/ SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	TARGET AKHIR RPJMD (2026)	TARGET 2024	REALISASI 2024	CAPAIAN KINERJA RKPD 2024 (%)	CAPAIAN KINERJA RPJMD s.d. 2024 (%)	STATUS	SIMBOL
	Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat	Indeks Kesehatan	0,8790	0,8780	0,8850	100	100	ST	●
	Meningkatnya Daya Beli Masyarakat	Pengeluaran per kapita yang disesuaikan (ribu rupiah)	13,127.00	12,846.00	13,175.00*	100	100	ST	●
	Meningkatnya kesetaraan gender, perlindungan terhadap anak dan perempuan	Indeks Pembangunan Gender	96,15	95,90	96,43*	100	100	ST	●
3	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan inovatif								
	<i>Terwujudnya birokrasi yang responsif, akuntabel, dan inovatif</i>	<i>Indeks Reformasi Birokrasi</i>	<i>85,10</i>	<i>75,10</i>	<i>84,85</i>	<i>100</i>	<i>99,71</i>	<i>ST</i>	●
	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	85,91	84,91	92,58	100	100	ST	●
	Terciptanya birokrasi yang kapabel	Nilai Kematangan Organisasi Daerah (KOD)	31	30,60	37,25	100	100	ST	●
		Indeks Sistem Merit	0,7300	0,7050	0,8232*	100	100	ST	●
		Indeks SPBE	3,25	2,68	3,69	100	100	ST	●
	Terciptanya birokrasi yang bersih dan akuntabel	Maturitas SPIP	4	3,745	3,339	89,16	83,48	T	▲
		Nilai SAKIP	80,50	80,01	75,02	93,76	93,19	ST	●
		Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	93,61	93,59	66,11	70,64	70,63	S	▲
4	Meningkatkan ekonomi masyarakat dengan peningkatan peran UMKM berbasis ekonomi kerakyatan								
	<i>Meningkatnya pembangunan ekonomi inklusif</i>	<i>Pertumbuhan Ekonomi (%)</i>	<i>5,32</i>	<i>5,14</i>	<i>5,56</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>ST</i>	●
	Meningkatnya kontribusi sektor ekonomi unggulan	Persentase kontribusi PDRB sektor Industri Pengolahan dan Perdagangan (%)	29,87	29,83	30,56*	100	100	ST	●
	Meningkatnya pertumbuhan investasi	Persentase pertumbuhan investasi (%)	16	16,00	16,05*	100	100	ST	●
	Meningkatnya angka kunjungan wisatawan	Persentase Peningkatan Kunjungan Wisatawan (%)	3,26	3,10	12,79	100	100	ST	●
		<i>Persentase penduduk miskin (%)</i>	<i>6,70</i>	<i>7,00</i>	<i>5,94</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>ST</i>	●
	Meningkatnya kesejahteraan pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial	Persentase PMKS (%)	9,16%	9,20	4,49	100	100	ST	●
	Meningkatnya Penyerapan Tenaga Kerja Daerah	Tingkat Pengangguran Terbuka	6	7,10	4,40	100	100	ST	●
		<i>Ketimpangan Pendapatan (%)</i>	<i>16,50</i>	<i>16,42</i>	<i>16,07*</i>	<i>97,87</i>	<i>97,39</i>	<i>ST</i>	●

MISI	MISI/ TUJUAN/ SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	TARGET AKHIR RPJMD (2026)	TARGET 2024	REALISASI 2024	CAPAIAN KINERJA RKPD 2024 (%)	CAPAIAN KINERJA RPJMD s.d. 2024 (%)	STATUS	SIMBOL
	Meningkatnya pertumbuhan industri kreatif dan usaha mikro	Persentase Pertumbuhan UMKM (%)	4,50	4,50	3,49	77,56	77,56	T	▲
5	Mewujudkan kota modern yang berdaya saing dengan peningkatan tata ruang dan infrastruktur								
	Terwujudnya ruang kota yang berkelanjutan	Indeks Kualitas Ruang Kota	70,21	67,04	49,60	73,98	70,64	S	▲
	Meningkatnya kualitas infrastruktur kota	Indeks infrastruktur wilayah	92,36	91,36	64,33	70,41	69,65	S	▲
	Meningkatnya kesesuaian pemanfaatan ruang	Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang (%)	80,00	76,00	83,40	100	100	ST	●
	Meningkatnya aksesibilitas perkotaan	Indeks aksesibilitas perkotaan	78,90	68,70	68,71	100	87,08	T	▲
	Meningkatnya kualitas lingkungan permukiman	Persentase luas kawasan kumuh (%)	0	0,26	0,57	0	0	SR	▼
	Terwujudnya lingkungan hidup yang berkualitas dan berkelanjutan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	52	50,00	64,33	100	100	ST	●
		Persentase ruang terbuka hijau publik (%)	18	17,00	16,24	95,53	90,22	ST	●
	Meningkatnya ketahanan daerah	Indeks Resiliensi Daerah	77,22	66,36	67,05	100	86,83	T	▲
	Meningkatnya ketahanan terhadap bencana	Indeks Ketahanan Daerah	66,80	47,40	48,00	100	71,86	S	▲
	Meningkatnya ketahanan pangan daerah	Skor PPH	93,24	92,03	86,10	93,56	92,34	ST	●

Sumber: Pemerintah Kota Magelang, 2025

*Menggunakan realisasi tahun 2023

2.2.2 Evaluasi Kinerja Urusan Wajib Pelayanan Dasar

2.2.2.1 Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan

Tabel 2.305 Capaian Kinerja Program Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan, 2024

No	Program Prioritas	Indikator Kinerja	Target RPJMD s.d.2026	Target 2024	Realisasi 2024	Kinerja RKPD Tahun 2024				
						Terhadap Target 2024		Terhadap Target Akhir RPJMD		
						Kinerja	Status	Kinerja	Status	Simbol
1	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	APK PAUD	100	96	81.89	85.30	T	81.89	T	▲
		APM SD/ MI	100	100	98,92	98,92	ST	98,92	ST	●
		APK SD/ MI	100	100	109.28	100	ST	100	ST	●
		Angka Putus Sekolah SD/MI	0.00	0,00	0.00	100	ST	100	ST	●
		APM SMP/MTs	100	100	80,64	80,64	T	80,64	T	▲
		APK SMP/MTs	100	100	96.37	100	ST	100	ST	●
		Angka Putus Sekolah SMP/MTs	0.00	0,00	0.00	100	ST	100	ST	●

No	Program Prioritas	Indikator Kinerja	Target RPJMD s.d.2026	Target 2024	Realisasi 2024	Kinerja RKPd Tahun 2024				
						Terhadap Target 2024		Terhadap Target Akhir RPJMD		
						Kinerja	Status	Kinerja	Status	Simbol
		Angka Kelulusan Warga Belajar Pendidikan Kesetaraan	97.50	96,50	100	100	ST	100	ST	●
		Persentase Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Terakreditasi	72.51	68,70	99.21	100	ST	100	ST	●
		Persentase SD Terakreditasi	100	100	100	98.65	ST	98.65	ST	●
		Persentase SMP Terakreditasi	100	100	100	100	ST	100	ST	●
		Persentase Satuan Pendidikan Kesetaraan Terakreditasi	100	100	100	100	ST	100	ST	●
2	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Persentase satuan pendidikan yang mengembangkan kurikulum	100	100	100	100	ST	100	ST	●
3	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Persentase guru di satuan Pendidikan Dasar yang berkualifikasi minimal S1	100	99,00	98.95	100	ST	98.95	ST	●
		Persentase guru di satuan PAUD dan pendidikan nonformal/kesetaraan yang berkualifikasi minimal S1	80.00	75,00	66.33	88.44	T	82.91	T	▲
4	PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	Persentase satuan pendidikan yang memiliki izin (memiliki izin rekomendasi dari dinas pendidikan dan kebudayaan)	100	100	100	100	ST	100	ST	●
5	PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA	Persentase Pendidik pada Satuan Pendidikan Dasar yang membuat karya sastra (dalam bentuk buku)	35	25	20.90	83,58	T	59.70	R	▼

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Magelang, 2025

Penyelenggaraan urusan pendidikan di Kota Magelang melibatkan 5 (lima) program strategis yang bertujuan meningkatkan mutu dan aksesibilitas pendidikan. Dalam pelaksanaannya, terdapat 17 (tujuh belas) indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur keberhasilan program-program tersebut. Berdasarkan evaluasi kinerja terhadap target tahun 2024, 13 (tiga belas) indikator menunjukkan capaian yang sangat tinggi, sementara 4 (empat) indikator lainnya berhasil mencapai kinerja tinggi. Namun, jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD, terdapat 1 (satu) indikator yang masih berada pada kategori kinerja rendah. Indikator tersebut adalah persentase pendidik pada satuan pendidikan dasar yang menghasilkan karya sastra (dalam bentuk buku), yang memerlukan perhatian dan dukungan lebih untuk mencapai target yang telah ditetapkan.

Selain itu, meskipun Kota Magelang berhasil memastikan tidak ada kasus anak putus sekolah, tantangan lain tetap ada dalam bentuk Anak Tidak Sekolah (ATS). Data menunjukkan bahwa masih terdapat anak usia sekolah yang tidak mengikuti jalur pendidikan formal dan memilih jalur pendidikan nonformal, seperti menjadi peserta didik di Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM). Hal ini mencerminkan pentingnya pendekatan yang lebih inklusif dan kolaboratif dalam memastikan setiap anak mendapatkan haknya untuk memperoleh pendidikan yang layak.

2.2.2.2 Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan

Tabel 2.306 Capaian Kinerja Program Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan, 2024

No	Program Prioritas	Indikator Kinerja	Target RPJMD s.d.2026	Target 2024	Realisasi 2024	Kinerja RKPD Tahun 2023				
						Terhadap Target 2023		Terhadap Target Akhir RPJMD		
						Kinerja	Status	Kinerja	Status	Simbol
1	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Cakupan penemuan dan pengobatan penyakit menular	70%	65%	100%	100%	ST	100%	ST	●
		Cakupan penemuan dan pengendalian penyakit tidak menular	80%	75%	100%	100%	ST	100%	ST	●
		Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	100%	100%	100%	100%	ST	100%	ST	●
		Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	100%	100%	100%	100%	ST	100%	ST	●
		Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	100%	100%	97.37%	97.37%	ST	97.37%	ST	●
		Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100%	100%	125.77	100%	ST	100%	ST	●
		Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	100%	100%	100%	100%	ST	100%	ST	●
		Persentase Ketersediaan Obat yang Sesuai Standar	100%	100%	100%	100%	ST	100%	ST	●
		Persentase Pemenuhan Fasilitas Kesehatan Sesuai Standar	100%	100%	96.51%	96.51%	ST	96.51%	ST	●
		Indeks Keluarga Sehat	0.80	0.80	0.41	51.25%	R	51.25%	R	▼
2	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Persentase sumber daya manusia kesehatan yang memenuhi standar (sertifikat kompetensi)	100%	100%	98.05%	98.05%	ST	98.05%	ST	●
3	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	Cakupan perijinan, pengendalian dan pengawasan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman	100%	100%	97.54%	97.54%	ST	97.54%	ST	●
		Persentase Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/ Restoran dan Depot Air Minum (DAM) yang bersertifikat layak hygiene	100%	100%	100%	100%	ST	100%	ST	●
4	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Persentase kelurahan siaga aktif strata mandiri	100%	88.24%	88.24%	100%	ST	82.35%	T	▲

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Magelang, 2025

Urusan pemerintahan bidang kesehatan memiliki 4 (empat) program dengan 14 (empat belas) indikator kinerja. Dari keempat belas indikator tersebut, terdapat 13 (tiga belas) indikator yang kinerjanya sangat tinggi dan 1 (satu) indikator dengan kinerja rendah jika dibandingkan target tahun 2024. Indikator kinerja rendah tersebut

yaitu indeks keluarga sehat. Dilihat dari kinerja terhadap target akhir RPJMD, kinerja indeks keluarga sehat juga berada pada posisi rendah.

Meskipun secara keseluruhan kinerja urusan pemerintahan di bidang kesehatan di Kota Magelang menunjukkan hasil yang sangat baik, terdapat satu indikator yang masih belum mencapai target, yaitu **Indeks Keluarga Sehat**. Dibandingkan dengan target tahun 2024 maupun target akhir RPJMD, kinerja indikator ini masih tergolong rendah.

Beberapa faktor utama yang menyebabkan rendahnya indeks keluarga sehat meliputi:

1. **Tingginya prevalensi rumah tangga dengan perokok** yang masih di atas 30%, yang berkontribusi terhadap risiko penyakit tidak menular.
2. **Adanya penderita hipertensi, tuberkulosis (TB), dan gangguan jiwa**, yang memengaruhi angka kesehatan keluarga secara keseluruhan.
3. **Belum meratanya akses terhadap sarana air bersih dan fasilitas buang air yang sehat**, yang merupakan komponen penting dalam menentukan indeks keluarga sehat.

Untuk meningkatkan indeks keluarga sehat, diperlukan strategi yang lebih terfokus, seperti penguatan program edukasi kesehatan keluarga, kampanye anti-merokok, peningkatan akses layanan kesehatan bagi penderita penyakit kronis, serta percepatan pemerataan infrastruktur sanitasi dan air bersih. Langkah-langkah ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan mendorong capaian indeks keluarga sehat di masa mendatang.

2.2.2.3 Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang terdiri dari sepuluh program dan dua belas indikator yang capaiannya bisa dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.307 Capaian Kinerja Program Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, 2024

No	Program Prioritas	Indikator Kinerja	Target RPJMD s.d.2026	Target 2024	Realisasi 2024	Kinerja RKPd Tahun 2024				
						Terhadap Target 2024		Terhadap Target Akhir RPJMD		
						Kinerja	Status	Kinerja	Status	Simbol
1	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase Panjang Jaringan Irigasi yang Kondisi Baik	81	81	58,00	71,60	S	71,60	S	▲
2	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase drainase dalam kondisi baik	65	63	35,75	55,15	R	53,45	R	▼
3	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Persentase bangunan yang memiliki PBG	27,50	27	27,15	100	ST	98,74	ST	●
		Persentase Progres Pembangunan Gedung Balai Kota	100	66	10	15,15	SR	10	SR	▼
4	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Persentase kawasan strategis yang ditata	100	100	70,00	70,00	S	70,00	S	▲
5	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Persentase Panjang jalan dalam kondisi mantab	95	93,67	85,69	91,48	ST	90,20	ST	●
6	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Persentase proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi	100	100	100	100	ST	100	ST	●
7	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Persentase Perwujudan Kesesuaian Pemanfaatan Ruang	80	70	83,34	100	ST	100	ST	●

No	Program Prioritas	Indikator Kinerja	Target RPJMD s.d.2026	Target 2024	Realisasi 2024	Kinerja RKPDP Tahun 2024				
						Terhadap Target 2024		Terhadap Target Akhir RPJMD		
						Kinerja	Status	Kinerja	Status	Simbol
8	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase jumlah rumah tangga yang memiliki akses terhadap pelayanan sanitasi layak	93,49	92,41	73,15	79,16	T	78,23	T	▲
9	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap pelayanan sumber air minum layak	98,65	98,3	77,81	79,15	T	78,87	T	▲
		Proporsi populasi yang memiliki akses layanan sumber air minum, aman, dan berkelanjutan	35	25	65,54	100	ST	100	ST	●
10	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	Persentase Pembangunan TPST/3R	80	50,00	29,73	59,46	R	37,16	SR	▼

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Magelang, 2025

Dari sepuluh program dan dua belas indikator dalam urusan pekerjaan umum dan penataan ruang, terdapat lima indikator yang kinerjanya sangat tinggi, dua indikator tinggi, dua indikator kinerja sedang, dua indikator kinerja rendah dan satu indikator kinerja sangat rendah, jika dibandingkan terhadap target akhir tahun 2024. Apabila dibandingkan dengan target hingga akhir RPJMD tahun 2026 terdapat lima indikator kinerja sangat tinggi, dua indikator kinerja tinggi, dua indikator kinerja sedang, satu indikator kinerja rendah dan dua indikator sangat rendah. Rata-rata kinerja indikator urusan pekerjaan umum dan penataan ruang tahun 2024 sebesar 76,76%.

Indikator-indikator yang memiliki pencapaian indikator kinerja rendah dan sangat rendah jika dibandingkan target RPJMD hingga akhir 2024 yaitu:

1. Persentase drainase dalam kondisi baik

Hambatan utama dari ketercapaian indikator persentase drainase dalam kondisi baik adalah tingginya intensitas perubahan tutupan lahan yang ada di sekitar saluran. Hal tersebut berdampak pada banyaknya bangunan di sekitar saluran yang ada di sempadan drainase sehingga kesulitan untuk dilakukan pemeliharaan. Kendala lain yang dialami meliputi kesadaran masyarakat yang cukup rendah terhadap pentingnya menjaga saluran drainase serta saluran drainase yang cukup sempit sehingga tidak mampu meresapkan genangan air.

Kinerja indikator ini pada tahun 2024 baru mencapai 55,15 % dengan total panjang drainase dalam kondisi baik baru mencapai 7.029 m dari total panjang drainase 20.230. Ruas saluran drainase dengan kerusakan drainase paling tinggi yaitu saluran drainase poncol - Elo (Kali Kedali) yang memiliki panjang saluran drainase rusak sepanjang 2.110 m, sedangkan saluran drainase dengan kondisi baik paling panjang adalah saluran drainase Kliwonan (Kali Gandekan/Sisabuk) dengan panjang drainase kondisi baik sebesar 1.570 m. Selain dari perubahan tutupan lahan, rendahnya capaian kinerja indikator ini juga dipicu dari banyaknya kondisi drainase yang masih berupa tanah. Jumlah anggaran yang kurang memadai juga menjadi salah satu faktor penyebab rendahnya capaian kinerja indikator tersebut.

Strategi yang bisa dilakukan untuk meningkatkan capaian kinerja indikator ini bisa melalui sosialisasi kepada masyarakat untuk menjaga drainase seperti sosialisasi untuk tidak membuang sampah di saluran drainase. Program padat karya juga bisa menjadi salah satu cara untuk meningkatkan panjang drainase dalam kondisi baik.

2. Persentase Progres Pembangunan Gedung Balai Kota

Pembangunan Gedung Balai Kota Magelang merupakan tindak lanjut dari Nota Kesepahaman antara TNI, Kementerian Keuangan, dan Pemkot Magelang pada 13 September 2022. Nota ini mengatur hibah tanah

dan bangunan eks Balai Diklat Kemenkeu di Jl. Alun-Alun Utara No. 2 kepada Pemkot Magelang, sementara Pemkot menyerahkan kompleks perkantoran seluas 4 hektar di Jl. Jend. Sarwo Edhie Wibowo No. 2 kepada TNI sebagai penyelesaian sengketa aset.

Progres pembangunan Gedung Balai Kota Magelang masih sangat rendah, dengan capaian 15,5% dari target akhir tahun 2024, atau hanya 10% dari target akhir periode RPJMD. Hingga kini, pembangunan fisik belum dimulai, dan pencapaian pada tahun 2024 baru sebatas penyusunan dokumen DED. Kajian awal sebenarnya sudah dilakukan sejak 2022, namun proses pembangunan terhambat terutama karena keterbatasan anggaran. Mengingat rencana penempatan gedung baru dijadwalkan pada 2027, percepatan pembangunan sangat perlu dilakukan.

3. Persentase Pembangunan TPST/3R

Progres pembangunan TPS/3R di Bojong baru mencapai 59,4% dari target tahun 2024, dengan beberapa kendala. Salah satu penyebabnya adalah ketidakjelasan nomenklatur status infrastruktur antara TPST atau TPS3R. Pada awalnya, lokasi ini direncanakan sebagai TPST Bojong, namun di tengah perjalanan tidak memenuhi persyaratan yang dibutuhkan sebagai TPST yaitu jarak dari permukiman yang terlalu dekat, sehingga pembangunan TPST dihentikan. Selain itu, rencana operasional TPST Regional Magelang, yang akan menangani seluruh sampah dari Kota Magelang, juga menjadi hambatan dalam melanjutkan pembangunan ini. Sebagai alternatif, lokasi tersebut diusulkan untuk dikembangkan menjadi Pusat Daur Ulang (PDU). Rencana ini memungkinkan untuk direalisasikan, namun memerlukan pengalihan kewenangan dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang ke Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang. Langkah ini penting untuk memastikan proyek dapat terus berjalan dan tidak terhenti sepenuhnya.

2.2.2.4 Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman

Tabel 2.308 Capaian Kinerja Program Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman, 2024

No	Program Prioritas	Indikator Kinerja	Target RPJMD s.d.2026	Target 2024	Realisasi 2024	Kinerja RKPD Tahun 2024				
						Terhadap Target 2024		Terhadap Target Akhir RPJMD		
						Kinerja	Status	Kinerja	Status	Simbol
1	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Persentase penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana	90	90	100	100	ST	100	ST	●
		Persentase penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban relokasi program pemerintah kab/kota	46,78	23.39	100	100	ST	100	ST	●
2	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase kawasan permukiman kumuh yang ditata	100	88	73.47	83.48	T	73.47	S	▲
3	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Persentase rumah tidak layak huni di luar permukiman kumuh yang tertangani	100%	50.63	74.21	100	ST	74.21	S	▲
4	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Persentase lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan PSU	100	96,11	96.61	97,55	ST	96,61	ST	●

Sumber: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Magelang, 2025

Disandingkan dengan target RPJMD tahun 2026, empat indikator program pada Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman sudah mencapai target dan satu indikator kinerja masih belum memenuhi target. Faktor pendorong dari indikator yang telah mencapai target yaitu adanya komitmen dari Pemerintah Daerah untuk menyediakan hunian yang layak. Di sisi lain, penghambat dalam pencapaian target kinerja urusan bidang perumahan dan kawasan permukiman dijelaskan sebagai berikut. Faktor penghambat dalam pencapaian target kinerja persentase kawasan permukiman kumuh yang ditata adalah belum spesifiknya

penanganan kumuh dengan karakteristik RT yang dituju. Sehingga perlu adanya koordinasi dengan Pokja PKP terkait dengan karakteristik setiap RT dan penanganan yang dibutuhkan.

2.2.2.5 Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat

Pelaksanaan urusan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat didukung melalui 3 (tiga) program dengan 4 (empat) indikator program. Capaian dan kinerja dari masing-masing program disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.309 Capaian Kinerja Program Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat, 2024

No	Program Prioritas	Indikator Kinerja	Target RPJMD s.d.2026	Target 2024	Realisasi 2024	Kinerja RKPD Tahun 2024				
						Terhadap Target 2024		Terhadap Target Akhir RPJMD		
						Kinerja	Status	Kinerja	Status	Simbol
1	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Presentase Penyelesaian Pelanggaran K3	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	ST	100,00%	ST	●
2	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Presentase layanan penanggulangan bencana	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	ST	100,00%	ST	●
3	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Persentase pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	ST	100,00%	ST	●
		Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran*	15 menit	15 menit	5,89 menit	100,00%	ST	100,00%	ST	●

Sumber: SatpolPP dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Magelang, 2025

Berdasarkan tabel tersebut, kinerja program urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat menunjukkan kinerja yang baik. Kondisi ini ditunjukkan dengan status kinerja Sangat Tinggi (ST) di seluruh program jika dibandingkan dengan target tahun 2024. Penyelesaian pelanggaran perda mencapai 100%. Kondisi ini ditunjukkan dengan adanya 157 pelanggaran dan dapat terselesaikan semua. Upaya penanggulangan bencana didukung oleh Program Penanggulangan Bencana dengan indikator kinerja Persentase layanan penanggulangan bencana. Pada tahun 2024, realisasi indikator kinerja ini sebesar 100%, yaitu selalu ada pelayanan penanggulangan bencana ketika ada laporan kejadian bencana. Pada tahun 2024, terjadi 78 kejadian dan terlayani semua. Jangkauan pelayanan ini dipengaruhi adanya layanan 112 yang mempermudah masyarakat dalam melaporkan kejadian dan dapat segera ditindaklanjuti oleh OPD terkait. Terkait penyelamatan kebakaran dan non-kebakaran juga mencapai 100%. Pada tahun 2024 terdapat 369 laporan kebakaran dan non-kebakaran dan dapat diselesaikan semuanya. Penyelesaian laporan ini termasuk pemenuhan waktu tanggap (*response time*) kebakaran maksimal 15 menit. Rata-rata waktu tanggap di tahun 2024 selama 5,89 menit karena jangkauan Kota Magelang yang kecil.

Jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD, kinerja indikator program juga menunjukkan kinerja yang baik. Peningkatan kualitas pelayanan harus terus dilakukan untuk dapat mempertahankan kinerja yang telah dicapai.

2.2.2.6 Urusan Pemerintahan Bidang Sosial

Pelaksanaan urusan sosial didukung melalui 5 (lima) program dengan 5 (lima) indikator program. Capaian dan kinerja dari masing-masing program disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.310 Capaian Kinerja Program Urusan Pemerintahan Bidang Sosial, 2024

No	Program Prioritas	Indikator Kinerja	Target RPJMD s.d.2026	Target 2024	Realisasi 2024	Kinerja RKPD Tahun 2024				
						Terhadap Target 2024		Terhadap Target Akhir RPJMD		
						Kinerja	Status	Kinerja	Status	Simbol
1	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang mendapatkan rehabilitasi	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	ST	100,00%	ST	●
2	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase PMKS yang menerima bantuan	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	ST	100,00%	ST	●
3	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase korban bencana alam dan sosial yang tertangani	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	ST	100,00%	ST	●
4	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase PSKS yang diberdayakan	91,67%	75,00%	83,33%	100,00%	ST	90,90%	ST	●
5	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Persentase luas taman makam pahlawan yang dipelihara	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	ST	100,00%	ST	●

Sumber: Dinas Sosial Kota Magelang, 2024

Berdasarkan tabel tersebut, kinerja program urusan sosial menunjukkan kinerja yang baik. Kondisi ini ditunjukkan dengan status kinerja Sangat Tinggi (ST) di seluruh program jika dibandingkan dengan target tahun 2024. Kondisi ini menunjukkan bahwa dalam penanganan PMKS dapat ditangani seluruhnya. Terkait penanganan korban bencana alam dan sosial, pada tahun 2024 terdapat 22 korban yang mendapat penanganan dari Dinas Sosial, yang merupakan korban kebakaran rumah, rumah roboh, atau rumah tertimpa pohon tumbang. Pemeliharaan taman makam pahlawan dilakukan setiap tahun, termasuk di tahun 2024 berupa pemeliharaan rutin.

Jika dibandingkan dengan target akhir periode RPJMD (tahun 2026), kinerja seluruh indikator program juga telah menunjukkan kinerja yang baik. Namun, ada 1 (satu) indikator yang kinerjanya masih di bawah 100%, yaitu Persentase PSKS yang diberdayakan. Untuk dapat mencapai target akhir periode RPJMD akan diupayakan target untuk memberikan fasilitasi pelatihan bagi Keluarga Pioner dan/atau Wanita Pemimpin Kesejahteraan Sosial.

2.2.3 Evaluasi Kinerja Urusan Wajib Non-Pelayanan Dasar

2.2.3.1 Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja

Tabel 2.311 Capaian Kinerja Program Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja, 2024

No	Program Prioritas	Indikator Kinerja	Target RPJMD s.d.2026	Target 2024	Capaian 2024	Kinerja RKPD Tahun 2024				
						Terhadap Target 2024		Terhadap Target Akhir RPJMD		
						Kinerja	Status	Kinerja	Status	Simbol
1	Program Pelatihan Kerja dan	Persentase tenaga kerja bersertifikat kompetensi	75%	60%	95,25%	100%	ST	100%	ST	●

No	Program Prioritas	Indikator Kinerja	Target RPJMD s.d.2026	Target 2024	Capaian 2024	Kinerja RKPDP Tahun 2024				
						Terhadap Target 2024		Terhadap Target Akhir RPJMD		
						Kinerja	Status	Kinerja	Status	Simbol
	Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase angkatan kerja yang mengikuti pelatihan kerja	80%	70%	74,91%	100%	ST	93,63	ST	●
2	Program Penempatan Tenaga Kerja	Persentase pencari kerja yang mendapatkan fasilitasi penempatan kerja	80%	70%	87,27%	100%	ST	100%	ST	●
		Persentase peserta pelatihan yang menjalankan wirausaha	75%	65%	52%	80%	T	69,33%	S	▲
3	Program Hubungan Industrial	Persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)	50%	40%	37,91%	94,78%	ST	75,82%	S	▲

Sumber: Dinas Tenaga Kerja Kota Magelang, 2025

Terdapat 3 (tiga) program yang terdiri dari 5 (lima) indikator kinerja pada urusan pemerintahan bidang tenaga kerja. Melihat dari capaian kinerja terhadap target 2024 dapat dikatakan kinerjanya sangat baik, tercermin dari 4 (empat) indikator dengan status sangat tinggi dan 1 (satu) indikator dengan status tinggi yaitu peserta pelatihan yang menjalankan wirausaha. Lebih lanjut, dilihat dari capaian kinerja tahun 2024 terhadap target RPJMD (2026), kinerja bidang tenaga kerja juga dapat dikatakan baik. Hal ini tercermin dengan 3 (tiga) indikator dalam status sangat tinggi dan 2 (dua) indikator dalam status sedang. Dua indikator yang berada pada kategori sedang berdasarkan target akhir RPJMD 2026 yaitu persentase peserta pelatihan yang menjalankan wirausaha dan persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak. Diperlukan upaya kolaborasi dengan stakeholder terkait untuk melakukan pembinaan terhadap peserta pelatihan untuk dapat menjalankan usahanya juga mendorong perusahaan dengan manajemen tertutup agar tetap melaksanakan tata kelola yang baik.

2.2.3.2 Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Tabel 2.312 Capaian Kinerja Program Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2024

No	Program Prioritas	Indikator Kinerja	Target RPJMD s.d.2026	Target 2024	Capaian 2024	Kinerja RKPDP Tahun 2024				
						Terhadap Target 2024		Terhadap Target Akhir RPJMD		
						Kinerja	Status	Kinerja	Status	Simbol
1	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase program perangkat daerah yang responsif gender	17,34%	17,34%	18,14%	100	ST	100	ST	●
		Persentase perempuan kepala keluarga dan perempuan rentan terlatih dalam perekonomian keluarga	20%	20%	23,85%	100	ST	100	ST	●
		Persentase proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPRD	20%	20%	24%	100	ST	100	ST	●
		Persentase lembaga yang anggotanya diberdayakan	20,90%	20,90%	22,22%	100	ST	100	ST	●

No	Program Prioritas	Indikator Kinerja	Target RPJMD s.d.2026	Target 2024	Capaian 2024	Kinerja RKPD Tahun 2024				
						Terhadap Target 2024		Terhadap Target Akhir RPJMD		
						Kinerja	Status	Kinerja	Status	Simbol
2	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)*	0,04%	0,04%	0,053%	75,47	S	75,47	S	▲
3	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Persentase Keluarga Berkualitas	16,57%	14,29%	18,22%	100	ST	100	ST	●
4	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Persentase PD yang mengelola data gender dan anak	17,24%	17,24%	39,29%	100	ST	100	ST	●
5	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Persentase capaian 4 (empat) kluster pemenuhan hak anak	13,79%	17,24%	73,08%	100	ST	100	ST	●

Sumber: DPMP4KB Kota Magelang, 2024

Kinerja Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ditunjukkan melalui 5 (lima) program dengan 8 (delapan) indikator. Berdasarkan target tahun 2024, kinerja 7 (tujuh) indikator seluruhnya menunjukkan capaian Sangat Tinggi dan hanya 1 (satu) indikator menunjukkan capaian Sedang.

Indikator dengan kinerja Sedang adalah rasio kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan). Masih adanya kasus kekerasan terhadap perempuan, dimana pada tahun 2024 jumlah kasus kekerasan sebanyak 35 kasus. Jumlah tersebut turun sebanyak 6 kasus dibandingkan tahun 2023 yaitu sejumlah 41 kasus kekerasan. Kekerasan fisik dan psikis mendominasi dengan jumlah kasus sebanyak 24. Upaya preventif melalui sosialisasi, edukasi terus digalakkan. Disamping itu, kemudahan pelaporan dan upaya pendampingan secara komprehensif juga terus diupayakan. Salah satunya melalui Pembentukan UPTD PPPA di Kota Magelang yang bertujuan untuk memberikan layanan pengaduan, pendampingan hukum, pendampingan psikologis, pendampingan bimbingan rohani dan perlindungan khusus bagi perempuan dan anak korban kekerasan.

2.2.3.3 Urusan Pemerintahan Bidang Pangan

Tabel 2.313 Capaian Kinerja Program Urusan Pemerintahan Bidang Pangan, 2024

No	Program Prioritas	Indikator Kinerja	Target RPJMD s.d.2026	Target 2024	Capaian 2024	Kinerja RKPD Tahun 2024				
						Terhadap Target 2024		Terhadap Target Akhir RPJMD		
						Kinerja	Status	Kinerja	Status	Simbol
1	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Persentase Ketersediaan Pangan	100%	100%	110%	100%	ST	100%	ST	●
2	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Persentase Penanganan Daerah Rentan Rawan Pangan	100%	40%	100%	100%	ST	100%	ST	●
3	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Persentase Pangan Segar yang Aman	88%	84%	88,48%	100%	ST	100%	ST	●

Sumber: Dinas Pertanian dan Pangan Kota Magelang, 2025

Secara umum kinerja urusan ketahanan pangan di Kota Magelang tergolong cukup baik diperlihatkan dengan keseluruhan kinerja indikator yang berada pada kategori Sangat Tinggi baik dibandingkan target tahunan maupun target akhir RPJMD 2026. Hal ini merupakan hasil dari kerjasama dari berbagai pihak pengampu kepentingan penyediaan pangan, distributor, pemerintah daerah dan pemerintah pusat.

2.2.3.4 Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan

Tabel 2.314 Capaian Kinerja Indikator Program Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 2024

No	Program Prioritas	Indikator Kinerja	Target RPJMD s.d.2026	Target 2024	Capaian 2024	Kinerja RKPD Tahun 2024				
						Terhadap Target 2024		Terhadap Target Akhir RPJMD		
						Kinerja	Status	Kinerja	Status	Simbol
1	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	Persentase kasus sengketa tanah yang tertangani	100 %	60%	33,33%	55,56%	R	33,33%	SR	▼
2	PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	Persentase kasus permasalahan pengadaan tanah yang mendapat penyelesaian ganti rugi/santunan tanah	100%	60%	97,67%	100%	ST	97,67%	ST	●
3	PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG	Persentase masalah pada tanah kosong yang terselesaikan	100%	60%	100%	100%	ST	100%	ST	●
4	PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	Persentase luas lahan bersertifikat	100%	98,50%	62,42%	63,37%	R	62,42%	R	▼

Sumber: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Magelang, 2025

2.2.3.5 Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup

Tabel 2.315 Capaian Kinerja Program Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup, 2023

No	Program Prioritas	Indikator Kinerja	Target RPJMD s.d.2026	Target 2024	Capaian 2024	Kinerja RKPD Tahun 2024				
						Terhadap Target 2024		Terhadap Target Akhir RPJMD		
						Kinerja	Status	Kinerja	Status	Simbol
1	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase dokumen perencanaan lingkungan hidup yang tersusun	100	80	100	100	ST	100	ST	●
2	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase ketersediaan data pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan	100	100	100	100	ST	100	ST	●
3	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Persentase usaha dan atau kegiatan yang mempunyai rincian teknis penyimpanan sementara LB3	100	66.67	66.67	100	ST	66.67	S	▲
4	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Persentase ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan	50	43.33	43.33	100	ST	87	T	▲
5	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase pengaduan kasus lingkungan hidup yang terselesaikan	75	75	100	100	ST	100	ST	●
6	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase peningkatan lembaga masyarakat dan lembaga pendidikan yang mengikuti pendidikan pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup	10,59	13.43	22.22	100	ST	100	ST	●

No	Program Prioritas	Indikator Kinerja	Target RPJMD s.d.2026	Target 2024	Capaian 2024	Kinerja RKPD Tahun 2024				
						Terhadap Target 2024		Terhadap Target Akhir RPJMD		
						Kinerja	Status	Kinerja	Status	Simbol
7	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase cakupan penghargaan yang diterima masyarakat	18,23	11.98	14.06	100	ST	77	T	▲
8	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Peningkatan persentase sampah yang terkelola	2,50	3,00	1,04	35	SR	42	SR	▼
9	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Proporsi RTH publik untuk pengelolaan keanekaragaman hayati	32,41	30,25	30,25	100	ST	93	ST	●

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang, 2024

Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup memiliki 9 (sembilan) program dengan 9 (sembilan) indikator kinerja. Berdasarkan target 2024, capaian tahun 2024 menunjukkan bahwa 8 (delapan) indikator kinerja dengan status sangat tinggi dan 1 (satu) indikator kinerja dengan status sangat rendah. Namun jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD (2026) capaian tahun 2024 menunjukkan bahwa 5 (lima) indikator kinerja dengan status sangat tinggi, 2 (dua) Indikator kinerja dengan status tinggi, 1 (satu) indikator kinerja dengan status sedang, dan 1 indikator kinerja dengan status sangat rendah.

8 (Delapan) Indikator yang kinerja dengan status sangat tinggi mengacu pada target tahun 2024 yaitu:

1. Persentase dokumen perencanaan lingkungan hidup yang tersusun

Capaian kinerja dokumen perencanaan lingkungan hidup yang tersusun pada tahun 2024 telah melebihi target yaitu mencapai 125% dengan status sangat tinggi. Jumlah dokumen yang tersusun di akhir tahun 2024 tercatat 5 dokumen diantaranya dokumen Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH), dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (KLHS RPJPD) Kota Magelang, dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (KLHS RPJMD) Kota Magelang, dokumen Daya Dukung Daya Tampung Lingkungan Hidup (DDDTLH), dokumen Inventarisasi Lingkungan Hidup. Faktor pendorong capaian tersebut adanya regulasi maupun kebijakan yang jelas mengenai perencanaan lingkungan hidup, keterlibatan berbagai pihak, termasuk masyarakat, akademisi, dan sektor swasta, dalam proses perencanaan dapat meningkatkan kualitas dokumen yang dihasilkan serta pemanfaatan teknologi informasi dalam pengumpulan data dan analisis sehingga dapat mempercepat penyusunan dokumen.

2. Persentase ketersediaan data pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan

Capaian kinerja ketersediaan data pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan pada tahun 2024 telah mencapai target yaitu 100% dengan status sangat tinggi. Jumlah ketersediaan data pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan pada tahun 2024 tercatat 10 data antara lain, Sampling Air 1, Sampling Air 2, Sampling Udara 1, Sampling Udara 2, Sampling Tanah, DIKPLHD, IKLH, GRK, Monev Air dan Sosialisasi. Faktor Pendorong capaian tersebut yaitu penggunaan teknologi untuk pengumpulan, penyimpanan, dan analisis data, serta kolaborasi dengan lembaga akademis untuk pengembangan metodologi dan pengumpulan data.

3. Proporsi RTH publik untuk pengelolaan keanekaragaman hayati

Capaian kinerja ketersediaan data pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan pada tahun 2024 telah mencapai target yaitu 100% dengan status sangat tinggi. Luas RTH yang dikelola Dinas Lingkungan Hidup untuk Keanekaragaman Hayati tahun 2024 tercatat 90,82 Hektar dari Luas RTH Kota 300,22 Hektar. Luas RTH yang dikelola Dinas Lingkungan Hidup untuk Keanekaragaman Hayati mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2023 yang tercatat 87,57 Hektar. Faktor Pendorong capaian tersebut yaitu, adanya kebijakan maupun regulasi yang memprioritaskan pengembangan RTH sebagai bagian dari tata ruang dan pengelolaan lingkungan (Perda Kota Magelang No. 1 Tahun 2014 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau).

4. Persentase usaha dan atau kegiatan yang mempunyai rincian teknis penyimpanan sementara LB3

Capaian kinerja usaha dan atau kegiatan yang mempunyai rincian teknis penyimpanan sementara LB3 pada tahun 2024 telah mencapai target yaitu 100% dengan status sangat tinggi. Tahun 2024 Jumlah usaha dan/atau kegiatan yang memiliki rincian teknis tercatat 5 usaha. Dibandingkan dengan tahun 2023 mengalami penurunan 1 usaha yang memiliki rincian teknis. Faktor Pendorong capaian tersebut yaitu Pemerintah Kota Magelang rutin menjalin komunikasi dengan para pelaku usaha terkait pengelolaan LB3 baik secara resmi maupun tidak resmi.

5. Persentase ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan

Capaian kinerja ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan pada tahun 2024 telah mencapai target yaitu 100% dengan status sangat tinggi. Tahun 2024 Jumlah penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang taat terhadap PPLH tercatat 13 usaha. Dibandingkan dengan tahun 2023 mengalami peningkatan 1 usaha yang taat terhadap PPLH. Faktor Pendorong capaian tersebut yaitu adanya regulasi dan kebijakan terkait ketaatan penanggung jawab usaha terhadap lingkungan hidup serta kesadaran para pelaku usaha untuk taat terhadap pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan.

6. Persentase peningkatan lembaga masyarakat dan lembaga pendidikan yang mengikuti pendidikan pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup

Capaian kinerja peningkatan lembaga masyarakat dan lembaga pendidikan yang mengikuti pendidikan pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup pada tahun 2024 telah melebihi target yaitu 165% dengan status sangat tinggi. Jumlah lembaga yang mengikuti pendidikan pelatihan tercatat 88, meningkat 16 lembaga dibandingkan tahun 2023. Faktor Pendorong capaian tersebut yaitu sosialisasi yang rutin kepada lembaga masyarakat maupun lembaga pendidikan untuk mengikuti pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup.

7. Persentase cakupan penghargaan yang diterima masyarakat

Capaian kinerja cakupan penghargaan yang diterima Masyarakat pada tahun 2024 telah melebihi target yaitu 117% dengan status sangat tinggi. Jumlah penghargaan Lingkungan Hidup yang diterima tercatat 7 mengalami penurunan 2 penghargaan dibandingkan tahun 2023. Upaya tindak lanjut untuk meningkatkan penghargaan lingkungan hidup yang akan diterima masyarakat yaitu dorongan dari Pemerintah Kota Magelang kepada masyarakat untuk meningkatkan kualitas program-program lingkungan seperti Kampung Iklim maupun Kampung Organik agar dapat meraih lebih banyak penghargaan, yang tidak hanya mencerminkan prestasi tetapi juga meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan.

8. Persentase pengaduan kasus lingkungan hidup yang terselesaikan

Capaian kinerja pengaduan kasus lingkungan hidup yang terselesaikan pada tahun 2024 telah melebihi target yaitu 133% dengan status sangat tinggi. Jumlah Pengaduan kasus lingkungan hidup yang masuk tercatat 3 sementara kasus lingkungan hidup yang terselesaikan tercatat 3 sehingga Persentase pengaduan kasus lingkungan hidup yang terselesaikan tercatat 100%. Faktor Pendorongnya capaian tersebut yaitu setiap ada aduan dari masyarakat terkait kasus lingkungan hidup Pemerintah Kota Magelang langsung menindaklanjuti kasus tersebut.

(Satu) Indikator yang kinerja dengan status sangat rendah dibandingkan target 2024 yaitu peningkatan persentase sampah yang terkelola. Faktor penghambatnya karena sistem pengelolaan sampah yang belum optimal. Sistem pengelolaan sampah masih didominasi oleh sistem sentralistik, di mana sampah dikumpulkan di TPSS (Tempat Pembuangan Sampah Sementara) kemudian diangkut ke TPA Banyurip. Jumlah TPS 3R, Bank Sampah, dan Kampung Organik yang beroperasi masih terbatas sehingga upaya pengurangan sampah dari sumber belum maksimal. Sehingga perlu strategi mengoptimalkan pengelolaan sampah baik organik maupun anorganik serta peningkatan kinerja bank sampah.

2.2.3.6 Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pelaksanaan urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil didukung melalui 4 program dengan 9 indikator program. Capaian dan kinerja dari masing-masing program disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.316 Capaian Kinerja Indikator Program Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 2024

No	Program Prioritas	Indikator Kinerja	Target RPJMD s.d.2026	Target 2024	Realisasi 2024	Kinerja Tahun 2024				
						Terhadap Target 2024		Terhadap Target Akhir RPJMD		
						Kinerja	Status	Kinerja	Status	Simbol
1	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Persentase Penduduk Usia Wajib KTP yang sudah melakukan Perekaman KTP-EL	100,00%	99,90%	100,00%	100,00%	ST	100,00%	ST	●
		Persentase Kepemilikan KK	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	ST	100,00%	ST	●
		Persentase Kepemilikan KIA	99,00%	97,00%	100,00%	100,00%	ST	100,00%	ST	●
2	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Persentase pasangan yang memiliki akta Perkawinan	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	ST	100,00%	ST	●
		Persentase penduduk 0-18 tahun yang memiliki akta kelahiran	100,00%	99,35%	100,00%	100,00%	ST	100,00%	ST	●
		Persentase penerbitan akta kematian	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	ST	100,00%	ST	●
		Persentase penerbitan akta perceraian	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	ST	100,00%	ST	●
3	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Persentase data kependudukan dan pencatatan sipil yang terkelola berbasis Teknologi Informasi	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	ST	100,00%	ST	●
4	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Persentase Jenis Data yang Tersaji dalam Profil Kependudukan	100,00%	91,67%	100,00%	100,00%	ST	100,00%	ST	●

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Magelang, 2025

Berdasarkan tabel tersebut, kinerja program urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil menunjukkan kinerja yang baik. Kondisi ini ditunjukkan dengan status kinerja Sangat Tinggi (ST) di seluruh program jika dibandingkan dengan target tahun 2023. Kondisi ini didorong adanya Upaya jemput bola pelayanan adminduk (SIJEMPOLAN= Aksi Jemput Bola Pelayanan). Pelayanan yang dilakukan mulai dari pelayanan KIA ke sekolah-sekolah, dan perekaman KTP bagi penduduk, salah satunya bagi siswa yang akan berusia 17 tahun. Selain itu, juga telah dilakukan kerja sama dengan fasilitas kesehatan untuk pelayanan akte kelahiran. Peningkatan layanan terhadap penerbitan akte kematian juga dilakukan melalui grup whatsapp dari masing-masing kelurahan untuk mempercepat informasi ketika ada kematian.

Jika dibandingkan dengan target akhir periode RPJMD (tahun 2026), kinerja seluruh indikator program juga telah menunjukkan kinerja yang baik. Upaya jemput bola pelayanan agar terus dilakukan untuk mempertahankan kinerja yang sudah baik ini.

2.2.3.7 Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Tabel 2.317 Capaian Kinerja Program Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, 2024

No	Program Prioritas	Kinerja Indikator	Target RPJMD s.d.2026	Target Tahun 2024	Capaian 2024	Kinerja RKPD Tahun 2024				
						Terhadap Target 2024		Terhadap Target Akhir RPJMD		
						Kinerja	Status	Kinerja	Status	Simbol
1	PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA	Persentase kelurahan yang difasilitasi dalam program pemberdayaan masyarakat	94%	82%	100%	100%	ST	100%	ST	●
2	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Persentase kelurahan yang melakukan evaluasi perkembangan kelurahan sesuai dengan regulasi	94%	82%	100%	100%	ST	100%	ST	●
3	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADATA	Persentase kelurahan yang lembaga masyarakatnya diberdayakan	94%	82%	100%	100%	ST	100%	ST	●

Sumber: DPMP4KB Kota Magelang, 2025

Capaian kinerja Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa menunjukkan kinerja sangat tinggi untuk semua indikator dari tiga program yang diampu. Seluruh kelurahan di Kota Magelang sejumlah 17 kelurahan telah difasilitasi dalam program pemberdayaan masyarakat. Fasilitasi tersebut berupa fasilitasi pertemuan antar kelurahan serta pendampingan oleh tenaga pendamping kelurahan terkait program pemberdayaan masyarakat yaitu RKM.

Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan yang diberdayakan dalam hal ini meliputi RT dan RW melalui pendampingan penyusunan profil RT, Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), Pokjanal Posyandu dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM). Pemberdayaan yang dilakukan meliputi fasilitasi kegiatan, pembinaan, dan pelatihan tugas pokok dan fungsi LKK serta evaluasi kinerja khususnya untuk LPM melalui Lomba LPM Tingkat Kota Magelang.

2.2.3.8 Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Bencana

Tabel 2.318 Capaian Kinerja Program Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, 2024

No	Program Prioritas	Indikator Kinerja	Target RPJMD s.d.2026	Target 2024	Capaian 2024	Kinerja RKPD Tahun 2024				
						Terhadap Target 2024		Terhadap Target Akhir RPJMD		
						Kinerja	Status	Kinerja	Status	Simbol
1	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Persentase penurunan angka kelahiran pada remaja usia 15-19 tahun (ASFR 15-19 th)	22%	25%	61,90%	100%	ST	100%	ST	●
2	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA	Persentase <i>Contraceptive Prevalance Rate</i> (CPR)	59,25%	58,05%	71,32%	100%	ST	100%	ST	●
3	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA	Persentase anggota keluarga tribina, UPPKS yang ber-KB	73,50%	72,50%	72,53%	100%	ST	98,68%	ST	●

Sumber: DPMP4KB Kota Magelang, 2025

Berdasarkan Tabel 2.318, kinerja urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana mempunyai 3 indikator kinerja yang semuanya menunjukkan capaian sangat tinggi.

Faktor pendorong capaian tersebut diantaranya adalah

1. Peningkatan kesadaran dan partisipasi masyarakat yang didukung oleh sosialisasi, edukasi dan peningkatan layanan akses KB melalui safari KB gratis dan penyediaan alat kontrasepsi yang memadai, peningkatan kapasitas kader dan penyuluh KB;
2. Regulasi pemerintah diantaranya Surat Edaran Walikota mengenai KB Pasca Persalinan, penguatan layanan MKJP (Metode Kontrasepsi Jangka Panjang) yang dilaksanakan melalui Kerjasama dengan klinik kesehatan dan stake holder terkait;
3. Penguatan program Bina Keluarga Remaja (BKR) dan Bina Keluarga Balita (BKB).

2.2.3.9 **Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan**

Penyelenggaraan urusan perhubungan di Kota Magelang sebagaimana tertuang dalam RPJMD tahun 2021-2026 mendukung pencapaian misi 5 tujuan 1 dan sasaran 3 meliputi dua indikator kinerja program. Capaian kinerja hingga tahun 2024 pada urusan ini dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.319 *Capaian Kinerja Program Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan, 2024*

No	Program Prioritas	Indikator Kinerja	Target RPJMD s.d.2026	Target 2024	Realisasi 2024	Kinerja Tahun 2024				
						Terhadap Target 2024		Terhadap Target Akhir RPJMD		
						Kinerja	Status	Kinerja	Status	Simbol
1	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Kinerja lalu lintas kota (VC Ratio)	0,75	0,77	0,72	100,00%	ST	100,00%	ST	●
		Pengguna moda transportasi umum di perkotaan (PPTUK)*	6,86	6,76	8,32	100,00%	ST	100,00%	ST	●

Sumber: Dinas Perhubungan Kota Magelang, 2024

Kinerja kedua indikator urusan perhubungan hingga akhir tahun 2024 sudah mencapai target baik target tahun 2024 maupun target RPJMD 2026. Rata-rata capaian indikator tersebut sebesar 100%. Faktor pendorong dan upaya yang dilakukan untuk mencapai target indikator tersebut adalah:

1. **Kinerja lalu lintas kota (VC Ratio)**

Nilai VC Ratio akhir tahun 2024 di Kota Magelang telah mencapai target dengan nilai VC Ratio sebesar 0,72 dengan target di akhir tahun 2024 adalah 0,77. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja tingkat pelayanan jalan baik dengan karakteristik jalan tersebut menampung 72% dari kapasitas maksimumnya. Dengan kata lain, kondisi lalu lintas di Kota Magelang masih cukup lancar, meskipun mulai mendekati kondisi padat. Faktor pendorong tercapainya indikator VC Ratio ini adalah telah didukungnya beberapa beberapa simpang yang telah memanfaatkan Kamera AI sehingga tidak perlu melakukan survey lalu lintas secara langsung. Oleh sebab itu kinerja monitoring lalu-lintas lebih efektif

Meskipun telah mencapai target, VC ratio tahun 2024 dinilai mengalami penurunan daripada tahun 2023 yaitu sebesar 0,61. Faktor utama menurunnya kinerja VC ratio dibandingkan tahun lalu adalah sedang dibangunnya Fly Over Cangkuk sehingga sangat berpengaruh terhadap arus lalu lintas jalan. Selain itu meningkatnya lahan terbangun di sekitar jalan yang berdampak pada meningkatnya hambatan samping juga menjadi salah satu faktor pendorong turunnya kinerja VC ratio dibanding tahun 2023. Strategi untuk mengurangi volume lalu lintas bisa dilakukan dengan cara melakukan perubahan fase di beberapa titik sehingga arus lalu lintas relatif lebih lancar.

2. **Pengguna moda transportasi umum di perkotaan (PPTUK)**

Capaian kinerja pengguna moda transportasi umum di perkotaan pada tahun 2024 telah memenuhi target, yaitu mencapai **100%**. Jumlah pengguna moda transportasi umum pada tahun 2024 tercatat sebanyak **10.673 orang**, mengalami peningkatan **621 pengguna** dibandingkan dengan tahun 2023. Peningkatan ini

didorong oleh adanya berbagai event dan kegiatan sekolah yang memanfaatkan transportasi umum sebagai sarana mobilitas.

Meskipun target telah tercapai, tingkat kesadaran masyarakat dalam menggunakan transportasi umum di Kota Magelang masih tergolong rendah, yakni hanya sekitar **8,32%** dari total penduduk. Oleh karena itu, diperlukan upaya berkelanjutan untuk meningkatkan jumlah pengguna transportasi umum melalui berbagai strategi yang lebih efektif.

Sebagai langkah peningkatan kualitas layanan angkutan umum, telah dilakukan **peremajaan armada** guna meningkatkan kenyamanan dan keamanan penumpang. Selain itu, pemerintah juga melaksanakan **pembinaan dan sosialisasi** kepada pengelola angkutan yang belum memenuhi persyaratan operasional. Sementara itu, angkutan yang belum memiliki izin diimbau untuk segera mengurus perizinan agar dapat beroperasi secara legal.

Pada tahun 2024, beberapa angkutan perkotaan telah dilengkapi dengan **GPS Tracking** untuk meningkatkan efektivitas monitoring operasional. Dengan adanya langkah-langkah ini, diharapkan kualitas transportasi umum di Kota Magelang semakin baik dan mampu menarik lebih banyak pengguna di masa mendatang.

2.2.3.10 Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika

Pelaksanaan urusan komunikasi dan informatika didukung melalui 2 (dua) program dengan 2 (dua) indikator program. Capaian dan kinerja dari masing-masing program disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.320 Capaian Kinerja Program Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi, Informatika dan Statistik, 2023

No	Program Prioritas	Indikator Kinerja	Target RPJMD s.d.2026	Target 2024	Capaian 2024	Kinerja RKPD Tahun 2024				
						Terhadap Target 2024		Terhadap Target Akhir RPJMD		
						Kinerja	Status	Kinerja	Status	Simbol
1	PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	Tingkat Keterbukaan Informasi Publik	5	5	5	100%	ST	100%	ST	●
2	PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase pemanfaatan aplikasi informatika	100%	100%	100%	100%	ST	100%	ST	●

Sumber: Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Kota Magelang, 2024

Berdasarkan tabel tersebut, kinerja program urusan komunikasi dan informatika menunjukkan kinerja yang baik. Kondisi ini ditunjukkan dengan status kinerja Sangat Tinggi (ST) di seluruh program jika dibandingkan dengan target tahun 2024. Tingkat keterbukaan informasi publik bertahan di kategori informatif di tahun 2024. Untuk pemanfaatan aplikasi informatika, sudah dilaksanakan di seluruh OPD karena terdapat aplikasi yang digunakan oleh seluruh OPD seperti Srikandi (Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi) untuk surat menyurat dan SIPD (Sistem Informasi Pemerintahan Daerah) untuk perencanaan sampai dengan penganggaran.

Jika dibandingkan dengan target akhir periode RPJMD (tahun 2026), kinerja seluruh indikator program juga telah menunjukkan kinerja yang baik. Pemanfaatan aplikasi informatika akan terus dilakukan dengan adanya transformasi digital. Terkait keterbukaan informasi publik, pendampingan kepada OPD masih harus terus dilakukan mulai dari pengelolaan website dan juga media sosial agar informasi publik dapat lebih mudah diakses oleh masyarakat.

2.2.3.11 Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Tabel 2.321 Capaian Kinerja Program Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, 2023

No	Program Prioritas	Indikator Kinerja	Target RPJMD s.d.2026	Target 2024	Capaian 2024	Kinerja Tahun 2024				
						Terhadap Target 2024		Terhadap Target Akhir RPJMD		
						Kinerja	Status	Kinerja	Status	Simbol
1	PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	Persentase jumlah KSP/USP yang memiliki ijin usaha simpan pinjam	63,52	54,15	38,22	70,59	S	60,17	R	▼
2	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase koperasi aktif yang patuh terhadap perundang-undangan	43,37	42,45	53,75	100,00	ST	100,00	ST	●
3	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Persentase KSP/USP Koperasi yang meningkat status kesehatannya	27,87	27,11	11,11	40,99	SR	39,87	SR	▼
4	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase SDM pengelola koperasi yang meningkat kapasitasnya	29,81	22,52	43,71	100,00	ST	100,00	ST	●
5	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Persentase koperasi berkualitas	50	44,00	38,33	87,12	T	76,67	S	▲
6	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Persentase wirausaha pemula yang diberdayakan	20	20	60,34	100,00	ST	100,00	ST	●
7	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Persentase peningkatan omzet pelaku usaha mikro	3	-1,00	2,61	100,00	ST	86,92	T	▲

Sumber: DPPKUM Kota Magelang, 2025

Urusan pemerintahan Bidang Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah memiliki 7 (tujuh) program dengan 7 indikator kinerja. dilihat dari kinerja tahun 2024 terhadap target 2024 terdapat 4 (empat) indikator dengan status Sangat Tinggi (ST), 1(satu) indikator dengan status tinggi (T) dan 1 (satu) indikator dengan status sangat rendah (SR) yaitu Persentase KSP/USP Koperasi yang meningkat status kesehatannya.

Belum tercapainya target ini dikarenakan masih terdapat koperasi yang belum dapat memenuhi persyaratan sesuai dengan Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 8 Tahun 2023 tentang Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi, dimana pengurus dan pengawas koperasi dipersyaratkan untuk memiliki kompetensi sesuai dengan standar dan peraturan yang berlaku. Indikator kinerja Persentase KSP/USP Koperasi yang meningkat status kesehatannya memiliki status kinerja sangat rendah (SR) dengan capaian 40,99% dari target 2024. belum tercapainya target ini disebabkan oleh adanya perubahan KKPKK (Kertas Kerja Penilaian Kesehatan Koperasi) yang menambah berbagai macam indikator di dalamnya sehingga bobot nilai untuk mencapai kriteria sehat lebih sulit dibandingkan dengan KKPKK tahun sebelumnya. Perlunya sosialisasi dan pendampingan terhadap KSP/USP untuk menyesuaikan perubahan KKPKK.

2.2.3.12 Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal

Tabel 2.322 Capaian Kinerja Program Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal, 2024

No	Program Prioritas	Indikator Kinerja	Target RPJMD s.d.2026	Target 2023	Capaian 2023	Kinerja Tahun 2023				
						Terhadap Target 2023		Terhadap Target Akhir RPJMD		
						Kinerja	Status	Kinerja	Status	Simbol
1	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Persentase Persentase Investor PMA/PMDN	100%	100%	83,36%	83%	T	83	T	▲
2	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Persentase LOI yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%	100%	ST	100%	ST	●
3	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Persentase Penerbitan Perizinan dan Non Perizinan yang Sesuai dengan SOP	95,50%	94,50%	98,82	100%	ST	100%	ST	●
4	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Persentase Pelaku Usaha yang memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku	35%	25%	26,64	100%	ST	76	T	▲
5	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Persentase pertumbuhan pemanfaatan data, Informasi dan Sistem Informasi PM	10%	10%	177,99%	100%	ST	100	ST	●

Sumber: DPMPTSP Kota Magelang, 2025

Ada 5 (lima) program dengan 5 (lima) lima indikator kinerja pada urusan pemerintahan bidang penanaman modal. Terdapat 4 indikator mencapai target dengan capaian kinerja sangat tinggi dan 1 indikator dengan capaian tinggi apabila dibandingkan dengan target tahun 2024. Namun apabila dibandingkan dengan target akhir RPJMD 2026, terdapat 3 (tiga) indikator dengan status sangat tinggi dan 2 (satu) indikator dengan status tinggi, yaitu Persentase Investor PMA/PMDN dan Pelaku Usaha yang Memenuhi Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku. Berikut penjelasan kelima indikator kinerja pada urusan pemerintahan bidang penanaman modal:

1. Persentase Investor PMA/PMDN

Ketidakpastian ekonomi global seperti inflasi tinggi dan kenaikan suku bunga menjadi penghambat bagi investor untuk berinvestasi di Kota Magelang. Kenaikan harga BBM memberikan efek berantai terhadap peminatan investor. Ketersediaan obyek investasi di Kota Magelang belum cukup

2. Persentase LOI yang ditindaklanjuti

Terjalannya komunikasi dan koordinasi antara pemerintah Kota Magelang dengan stakeholder terkait memberikan dampak positif terhadap LOI (*Letter of Intent*) yang ditindaklanjuti. Tersedianya profil investasi dan Regulasi Pemerintah yang memberikan kemudahan investasi mendorong peminatan investor untuk berinvestasi di Kota Magelang.

3. Persentase Penerbitan Perizinan dan Non Perizinan yang Sesuai dengan SOP

Penggunaan aplikasi SIMPEL yang disediakan oleh DPMPTSP Kota Magelang mendorong peningkatan kualitas dan kuantitas penerbitan perizinan dan Non Perizinan. Penggunaan aplikasi mempermudah dan mempersingkat serta dapat memonitor status perizinan.

4. Persentase Pelaku Usaha yang memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku

Sosialisasi dan Pendampingan terhadap pelaku usaha dalam pemenuhan syarat usaha sesuai dengan peraturan perundang-undangan, Tersedianya aplikasi OSS RBA dan aplikasi Sigumilang mempermudah pelaku usaha dalam memenuhi peraturan sesuai peraturan yang berlaku.

5. Persentase pertumbuhan pemanfaatan data, Informasi dan Sistem Informasi PM

Optimalisasi SDM Pelayanan dalam menyampaikan informasi Penanamwan modal beserta penyajian data perizinan dan non perizinan secara rutin dan informatif. Pengaplikasian inovasi pelayanan publik

membuat Pemerintah Kota Magelang secara berturut-turut dari tahun 2023 sampai dengan 2024 mendapat penghargaan pelayanan publik terbaik.

2.2.3.13 Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olahraga

Tabel 2.323 Capaian Kinerja Program Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olahraga, 2024

No	Program Prioritas	Indikator Kinerja	Target RPJMD s.d.2026	Target 2024	Capaian 2024	Kinerja Tahun 2024				
						Terhadap Target 2024		Terhadap Target Akhir RPJMD		
						Kinerja	Status	Kinerja	Status	Simbol
1	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Persentase organisasi kepemudaan yang dikembangkan	88,64%	65,91%	67,74%	100%	ST	76,42%	S	▲
		Persentase peningkatan pemuda yang dibina	8,70%	6,56%	11,23%	100%	ST	100%	ST	●
2	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Persentase peningkatan prestasi di bidang olahraga	25,00%	30,77%	39,05%	100%	ST	100%	ST	●
		Persentase peningkatan atlet yang dibina	10,53%	13,33%	13,74%	100%	ST	100%	ST	●
		Persentase pelatih yang bersertifikat	87,10%	80,65%	80,64%	100%	ST	92,59%	ST	●
3	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Persentase organisasi kepramukaan yang dibina	100,00%	94,29%	100%	100%	ST	100%	ST	●

Sumber: Disporapar Kota Magelang, 2025

Urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan olahraga dilaksanakan melalui 3 (tiga) program dan diukur melalui 6 (enam) indikator. Dilihat dari perbandingan antara capaian dan target tahun 2024, sebanyak 5 (lima) kinerja indikator sudah mencapai target dan berada pada status sangat tinggi, dan hanya 1 indikator yang masih berada pada posisi tinggi yaitu indikator Persentase Organisasi Kepemudaan yang Dikembangkan. Jika dibandingkan antara capaian tahun 2024 dengan target akhir RPJMD 2026, ke enam indikator sudah berada pada status sangat tinggi.

2.2.3.14 Urusan Pemerintahan Bidang Statistik

Pelaksanaan urusan statistik didukung melalui 1 (satu) program dengan 1 (satu) indikator program. Realisasi dan kinerja dari masing-masing program disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.324 Capaian Kinerja Program Urusan Pemerintahan Bidang Statistik, 2023

No	Program Prioritas	Indikator Kinerja	Target RPJMD s.d.2026	Target 2024	Capaian 2024	Kinerja Tahun 2024				
						Terhadap Target 2024		Terhadap Target Akhir RPJMD		
						Kinerja	Status	Kinerja	Status	Simbol
1	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Persentase perkembangan publikasi data sektoral dalam portal open data	45%	33%	33,33%	100,00%	ST	74,07%	S	▲

Sumber: Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Kota Magelang, 2024

Berdasarkan tabel tersebut, kinerja program urusan statistik menunjukkan kinerja yang baik. Kondisi ini ditunjukkan dengan status kinerja Sangat Tinggi (ST) jika dibandingkan dengan target tahun 2024. Pemenuhan

data sektoral dapat dilakukan dengan adanya tambahan data Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) dan data pendukung LPPD.

Jika dibandingkan dengan target akhir periode RPJMD (tahun 2026), indikator kinerja program memerlukan upaya keras untuk ketercapaian target. Untuk dapat memenuhi target tersebut, diperlukan tambahan 123 datasheet yang dipublikasikan dalam portal open data. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan mengintegrasikan data Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) ke dalam portal dataGO yang akan terhubung dengan portal open data di tahun 2024 ini. Selain itu, pembangunan dan publikasi data spasial juga dilakukan untuk mendukung publikasi data sektoral.

2.2.3.15 **Urusan Pemerintahan Bidang Persandian**

Pelaksanaan urusan persandian didukung melalui 1 program dengan 5 indikator program. Realisasi dan kinerja dari masing-masing program disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.325 *Capaian Kinerja Program Urusan Pemerintahan Bidang Persandian, 2024*

No	Program Prioritas	Indikator Kinerja	Target RPJMD s.d.2026	Target 2024	Realisasi 2024	Kinerja RKPD Tahun 2024				
						Terhadap Target 2023		Terhadap Target Akhir RPJMD		
						Kinerja	Status	Kinerja	Status	Simbol
1	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Nilai Tata Kelola Keamanan Informasi	84	47	109	100%	ST	100%	ST	●
		Nilai Pengelolaan Risiko Keamanan Informasi	48	30	61	100%	ST	100%	ST	●
		Nilai Kerangka Kerja Keamanan Informasi	106	47	61	100%	ST	57,55%	R	▼
		Nilai Pengelolaan Aset Informasi	88	81	138	100%	ST	100%	ST	●
		Nilai Teknologi dan Keamanan Informasi	80	65	72	100%	ST	90,00%	T	▲

Sumber: Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Kota Magelang, 2025

Berdasarkan tabel tersebut, kinerja program urusan persandian menunjukkan kinerja yang baik. Kondisi ini ditunjukkan dengan status kinerja Sangat Tinggi (ST) di seluruh program jika dibandingkan dengan target tahun 2024. Pemenuhan persyaratan keamanan informasi sudah dilakukan upaya pemenuhan mulai dari mekanisme dan regulasi termasuk implementasi pengamanan informasi.

Jika dibandingkan dengan target akhir periode RPJMD (tahun 2026), terdapat 1 komponen yang memerlukan upaya keras yaitu Kerangka Kerja Keamanan Informasi. Untuk mendukung capaian ini diperlukan upaya perencanaan dan simulasi pemulihan bencana terhadap layanan TIK; audit dan tindak lanjut terkait kepatuhan, konsistensi dan efektivitas penerapan keamanan informasi; serta perlu dilakukan uji coba dan evaluasi secara periodik untuk memastikan status kepatuhan program keamanan informasi yang ada.

2.2.3.16 Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan

Tabel 2.326 Capaian Kinerja Program Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan, 2024

No	Program Prioritas	Indikator Kinerja	Target RPJMD s.d.2026	Target 2024	Realisasi 2024	Kinerja Tahun 2024				
						Terhadap Target 2024		Terhadap Target Akhir RPJMD		
						Kinerja	Status	Kinerja	Status	Simbol
1	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Persentase kebudayaan lokal yang dikembangkan	100	100	100	100	ST	100	ST	●
2	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	Persentase kesenian tradisional yang dikembangkan	100	83	91,67	100	ST	91,67	ST	●
3	PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	Cakupan pembinaan sejarah	67	67	100	100	ST	100	ST	●
4	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Persentase cagar budaya yang dilestarikan	19	12	35,29	100	ST	100	ST	●
5	PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	Persentase peningkatan kunjungan museum	20	20	58,44	100	ST	100	ST	●

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Magelang, 2025

Pelaksanaan urusan kebudayaan pada tahun 2024 menunjukkan kinerja yang sangat baik, dengan lima indikator utama yang berada dalam kategori Sangat Tinggi. Capaian ini tidak hanya melebihi target tahunan, tetapi juga menunjukkan bahwa kebijakan dan program kebudayaan yang dilaksanakan selama ini efektif dan efisien. Jika dilihat dari perspektif target akhir RPJMD 2026, seluruh indikator kinerja urusan kebudayaan sudah berhasil mencapai target yang ditetapkan. Hal ini menggambarkan kesuksesan jangka panjang yang tercapai melalui perencanaan yang matang dan pelaksanaan yang konsisten.

2.2.3.17 Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan

Tabel 2.327 Capaian Kinerja Program Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan, 2023

No	Program Prioritas	Indikator kinerja	Target RPJMD s.d.2026	Target 2024	Capaian 2024	Kinerja Tahun 2024				
						Terhadap Target 2024		Terhadap Target Akhir RPJMD		
						Kinerja	Status	Kinerja	Status	Simbol
1	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Persentase pemerataan layanan perpustakaan	61%	59%	64,06%	100%	ST	97,34%	ST	●
		Rasio ketercukupan koleksi perpustakaan	51,25%	50,75%	51,09%	100%	ST	100%	ST	●
		Rasio ketercukupan tenaga perpustakaan	72,91%	67,91%	68,18%	100%	ST	90,40%	ST	●
		Persentase peningkatan kunjungan masyarakat ke perpustakaan	25,02%	23,02%	248,76%	100%	ST	100%	ST	●
		Persentase Perpustakaan ber-SNP	55%	45%	45,89%	100%	ST	83,44%	S	▲
		Persentase peningkatan keterlibatan masyarakat dalam kegiatan perpustakaan	21,36%	21,06%	34,85%	100%	ST	100%	ST	●
		Persentase peningkatan anggota perpustakaan	28,37%	28,23%	32,70%	100%	ST	100%	ST	●

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Magelang, 2024

Berdasarkan tabel tersebut, kinerja program urusan perpustakaan menunjukkan kinerja yang baik. Kondisi ini ditunjukkan dengan status kinerja Sangat Tinggi (ST) di seluruh program jika dibandingkan dengan target tahun 2024. Seluruh capaian indikator program telah melebihi target yang ditetapkan.

Jika dibandingkan dengan target akhir periode RPJMD (tahun 2026), dari 7 indikator, 6 diantaranya berkinerja sangat tinggi, hanya satu indikator dengan kinerja sedang yaitu persentase perpustakaan ber-SNP. Hal ini perlu upaya keras untuk mencapai target akhir RPJMD sebesar 55% dari total seluruh perpustakaan di Kota Magelang. Pembinaan dan fasilitasi kepada seluruh perpustakaan harus ditingkatkan untuk mendorong pemenuhan standar nasional perpustakaan yang meliputi koleksi perpustakaan, sarana dan prasarana perpustakaan, standar pelayanan perpustakaan, standar tenaga perpustakaan, standar penyelenggaraan, dan standar pengelolaan perpustakaan

2.2.3.18 Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan

Tabel 2.328 Capaian Kinerja Program Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan, 2024

No	Program Prioritas	Indikator Kinerja	Target RPJMD s.d.2026	Target 2024	Realisasi 2024	Kinerja Tahun 2024				
						Terhadap Target 2024		Terhadap Target Akhir RPJMD		
						Kinerja	Status	Kinerja	Status	Simbol
1	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Persentase berkas yang dikelola sesuai ketentuan	100%	97%	100%	100%	ST	100%	ST	●
2	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	Persentase arsip yang dilindungi dan terselamatkan	100%	100%	100%	100%	ST	100%	ST	●

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Magelang, 2025

Kinerja program urusan kearsipan terlihat dari 2 indikator program yang menunjukkan kinerja sangat tinggi Ketika dibandingkan target tahun 2024 maupun target RPJMD. Monitoring dan evaluasi serta fasilitasi Pengelolaan, perlindungan dan penyelamatan arsip ke semua OPD turut mendukung pencapaian target indikator program.

2.2.4 Evaluasi Kinerja Urusan Pilihan

2.2.4.1 Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan

Tabel 2.329 Capaian Kinerja Program Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan, 2023

No	Program Prioritas	Indikator Kinerja	Target RPJMD s.d.2026	Target 2024	Capaian 2024	Kinerja RKPD Tahun 2024				
						Terhadap Target 2024		Terhadap Target Akhir RPJMD		
						Kinerja	Status	Kinerja	Status	Simbol
1	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Persentase peningkatan produksi perikanan budidaya	1,25	0,75	0,75	100	ST	60	R	▼
2	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Jumlah total produksi olahan perikanan (ton)	240	236	236	100	ST	98,33	ST	●

Sumber: Dinas Pertanian dan Pangan Kota Magelang, 2024

Perikanan di Kota Magelang mengalami kendala terkait dengan Daya Dukung Lahan dan air yang sangat minim. Akibatnya, Perikanan di Kota Magelang tidak cukup berkembang dengan baik sehingga memerlukan suatu strategi tertentu dalam rangka meningkatkan produktivitas perikanan di Kota Magelang.

Beberapa kendala terkait dengan perikanan budidaya diantaranya adalah sebagai berikut:

- Luas tanah yang sangat minim tidak memungkinkan pengembangan konsep perikanan tradisional
- Ketersediaan air yang minim kurang mendukung produktivitas perikanan budidaya

- c. Sering terjadi konflik penggunaan air dimusim kemarau, karena air dari irigasi yang seharusnya menjadi hak para petani padi dialihkan untuk kolam ikan yang pada akhirnya air tersebut tidak kembali ke sawah

2.2.4.2 Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata

Tabel 2.330 Capaian Kinerja Program Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata, 2024

No	Program Prioritas	Indikator Kinerja	Target RPJMD s.d.2026	Target 2024	Capaian 2024	Kinerja RKPD Tahun 2024				
						Terhadap Target 2024		Terhadap Target Akhir RPJMD		
						Kinerja	Status	Kinerja	Status	Simbol
1	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Persentase destinasi pariwisata yang dikelola dengan baik	93,33%	86,67%	86,67%	100%	ST	92,86%	ST	●
2	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara	12,50%	10,20%	27,20%	100%	ST	100%	ST	●
		Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke kota	14,71%	12,78%	12,77%	99,93%	ST	86,82%	T	▲
3	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Persentase SDM pariwisata yang meningkat kapasitasnya	4,72%	4,72	7,86%	100%	ST	100%	ST	●
		Persentase peningkatan pelaku ekonomi kreatif yang meningkat kapasitasnya	33,33%	38,46%	66,67%	100%	ST	100%	ST	●

Sumber: Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Kota Magelang, 2025

Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata memiliki 3 prioritas program dengan 5 indikator kinerja. Berdasarkan capaian kinerja terhadap target 2024 kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata sangat tinggi (ST). Dari ke 5 (lima) indikator yang dimiliki oleh Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata, indikator peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke kota memiliki kinerja 99,93% dengan status sangat tinggi (ST). Belum optimalnya indikator ini dikarenakan belum semua objek wisata di Kota Magelang melaporkan data kunjungan wisatawan, baik itu wisatawan nusantara maupun wisatawan mancanegara. Selain itu tidak semua event yang mendukung pariwisata di Kota Magelang belum mencatatkan dan melaporkan data pengunjung. Perlunya upaya dan kerjasama dengan penyelenggara event dan destinasi wisata untuk dapat mencatat dan melaporkan setiap kunjungan wisatawan. Jika dilihat dari capaian kinerja berdasarkan target RPJMD, Indikator peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke kota memiliki kinerja tinggi (T) dengan capaian 86,82%. Untuk meningkatkan daya tarik Kota Magelang dan mendukung industri kreatif, Pemerintah Kota Magelang perlu menyelenggarakan event yang berkualitas dan memiliki publikasi yang luas.

2.2.4.3 Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian

Tabel 2.331 Capaian Kinerja Program Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian, 2023

No	Program Prioritas	Indikator Kinerja	Target RPJMD s.d.2026	Target 2024	Capaian 2024	Kinerja RKPD Tahun 2024				
						Terhadap Target 2023		Terhadap Target Akhir RPJMD		
						Kinerja	Status	Kinerja	Status	Simbol
1	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase sarana pembibitan yang terpelihara	66,89%	66,89%	73,51%	100%	ST	100%	ST	●

No	Program Prioritas	Indikator Kinerja	Target RPJMD s.d.2026	Target 2024	Capaian 2024	Kinerja RKPD Tahun 2024				
						Terhadap Target 2023		Terhadap Target Akhir RPJMD		
						Kinerja	Status	Kinerja	Status	Simbol
		Persentase Peningkatan sarana Peternakan	10%	10%	12,5%	100%	ST	100%	ST	●
2	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Persentase prasarana pertanian	70,83%	44,17%	29,17%	66,04%	R	41,18%	SR	▼
		Persentase Peningkatan prasarana pertanian	70,83%	11,11%	11,11%	100%	ST	17,65%	SR	▼
3	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Persentase penurunan jumlah kasus penyakit hewan	4%	6%	6,30%	94,54%	ST	100%	ST	●
		Persentase peningkatan produk pangan asal hewan yang ASUH	2%	2%	2,20%	100%	ST	100%	ST	●
4	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Persentase luasan lahan bencana pertanian yang tertangani	86%	83%	83,28%	100%	ST	96,84%	ST	●
5	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	Persentase peningkatan kelayakan usaha peternakan dan kesehatan hewan yang diawasi pelaksanaannya secara berkala	10%	10%	9,09%	90,9%	ST	90,9%	ST	●
6	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase kelompok tani yang meningkat kapasitasnya	13,33%	10%	12%	100%	ST	90%	T	▲
		Persentase kelompok tani yang naik kelas	28%	20%	10%	80%	S	35,71%	SR	▼

Sumber: Dinas Pertanian dan Pangan Kota Magelang, 2025

Secara umum kinerja di sector pertanian sudah cukup baik, akan tetapi ada 1 program kegiatan yang memiliki kinerja yang kurang baik yaitu program penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian. Keberadaan program ini pada dasarnya juga belum dapat dijadikan indikator kinerja yang tepat sehingga penganggaran dibuat seminim mungkin sehingga ketercapaian jumlah prasarana pertanian yang terbeli juga semakin kecil.

2.2.4.4 Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan

Tabel 2.332 Capaian Kinerja Program Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan, 2024

No	Program Prioritas	Indikator Kinerja	Target RPJMD s.d.2026	Target 2024	Capaian 2024	Kinerja RKPD Tahun 2024				
						Terhadap Target 2024		Terhadap Target Akhir RPJMD		
						Kinerja	Status	Kinerja	Status	Simbol
1	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Persentase sarana distribusi perdagangan dalam kondisi baik	60	50	85,71	100	ST	100	ST	●
2	PROGRAM STABILITAS HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG	Persentase koefisien variasi harga antar waktu	8	8	1,34	100	ST	100	ST	●
3	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Nilai ekspor	3.113.000	2.461.000,00	3.098.437,00	100	ST	99,53	ST	●

No	Program Prioritas	Indikator Kinerja	Target RPJMD s.d.2026	Target 2024	Capaian 2024	Kinerja RKPD Tahun 2024				
						Terhadap Target 2024		Terhadap Target Akhir RPJMD		
						Kinerja	Status	Kinerja	Status	Simbol
4	PROGRAM STANDARISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	79,17	76,90	98,93	100	ST	100	ST	●
5	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Persentase pelaku usaha yang memiliki izin usaha	96	95,92	96,08	100	ST	100	ST	●

Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Magelang, 2025

Keberhasilan penyelenggaraan urusan perdagangan dilihat dari capaian kinerja lima program dengan lima indikator. Kelima indikator berkaitan dengan urusan perdagangan memiliki capaian sangat tinggi (ST) baik diukur berdasarkan kinerja terhadap target tahun 2024 maupun terhadap target RPJMD. Hal ini menunjukkan kondisi kinerja urusan perdagangan di Kota Magelang dalam kondisi baik.

Nilai ekspor sebagai salah satu sumber devisa perlu dioptimalkan. Pada tahun 2023, Sektor perdagangan memberikan kontribusi terbesar ke 3 (tiga) terhadap PDRB Kota Magelang sebesar 14,07%. Hal tersebut tidak lepas dari peranan Pemerintah Kota Magelang dalam memberikan fasilitas sarana distribusi perdagangan dalam kondisi baik, berdasarkan data pada Tahun 2024, jumlah sarana distribusi perdagangan berupa pasar dan shelter PKL dalam kondisi sangat baik sejumlah 24 unit dari 28 unit yang ada. Pelayanan prima Pemerintah Kota Magelang dalam memberikan kepercayaan dan perlindungan konsumen dapat dibuktikan dengan tertanda tera UTTP yang ada di pasar dan masyarakat. Pada Tahun 2024, sebanyak 98,93 % UTTP yang ada di Kota Magelang telah bertanda tera sah. Kondisi ini terwujud karena adanya upaya pelayanan kegiatan tera ulang dilaksanakan rutin baik di tingkat pasar maupun tingkat kelurahan.

2.2.4.5 Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian

Tabel 2.333 Capaian Kinerja Program Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian, 2024

No	Program Prioritas	Indikator Kinerja	Target RPJMD s.d. 2026	Target 2023	Capaian 2023	Kinerja Tahun 2023				
						Terhadap Target 2023		Terhadap Target Akhir RPJMD		
						Kinerja	Status	Kinerja	Status	Simbol
1	PROGRAM PERENCANA DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah	3,35%	1,74 %	8,73 %	100%	ST	100%	ST	●
2	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/ KOTA	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah IUI yang dikeluarkan oleh instansi terkait	90%	80%	100%	100%	ST	100%	ST	●
		Persentase jumlah IKM yang memiliki legalitas usaha	0,87%	0,81	67,18	100%	ST	100%	ST	●
3	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Ketersediaan informasi industri terkini dan lengkap	95%	90%	100%	100%	ST	100%	ST	●

Sumber: DPPKUM Kota Magelang, 2024

Urusan pemerintahan bidang perindustrian melaksanakan 3 (tiga) program dengan 4 (empat) indikator kinerja. Didalam tabel diatas dapat disimpulkan bahwa ke 4 (empat) indikator diatas memiliki kinerja sangat tinggi baik dari sisi kinerja terhadap target tahun 2024 maupun terhadap target akhir RPJMD.

2.2.5 Evaluasi Kinerja Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan

2.2.5.1 Sekretariat Daerah

Tabel 2.334 Capaian Kinerja Program Unsur Sekretariat Daerah, 2024

No	Program Prioritas	Indikator Kinerja	Target RPJMD s.d.2026	Target 2024	Capaian 2024	Kinerja Tahun 2024				
						Terhadap Target 2024		Terhadap Target Akhir RPJMD		
						Kinerja	Status	Kinerja	Status	Simbol
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Perangkat Daerah dengan Tingkat Kematangan Organisasi Sedang	31%	30,60%	100%	100%	ST	100%	ST	●
		Indeks Kepuasan Pimpinan (Prokompim)	86	83	84	100%	ST	97,67%	ST	●
		Indeks Kepuasan Pimpinan (Umum)	86	83%	83,92	100%	ST	97,58%	ST	●
2	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase Kebijakan administrasi tata pemerintahan yang terfasilitasi	100%	100%	100%	100%	ST	100%	ST	●
		Persentase Kerjasama daerah yang terfasilitasi	100%	100%	100%	100%	ST	1100%	ST	●
		Persentase kebijakan di bidang kesejahteraan rakyat yang dilaksanakan	100%	100%	100%	100%	ST	100%	ST	●
		Persentase Produk Hukum yang terfasilitasi	100%	100%	100%	100%	ST	100%	ST	●
3	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase progres fisik seluruh OPD	99,20%	98,80%	99,49%	100%	ST	99,65%	ST	●
		Persentase Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Perekonomian dan SDA yang dilaksanakan	100%	100%	100%	100%	ST	100%	ST	●
		Tingkat kematangan UKPBJ	3	2	3	100%	ST	100%	ST	●

Sumber: Sekretariat Daerah Kota Magelang, 2025

Sekretariat Daerah merupakan unsur pendukung urusan pemerintahan yang mencakup tiga (3) Target program Pembangunan yaitu: Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat dan Program Perekonomian dan Pembangunan. Dari ketiga program prioritas tersebut, capaian kinerja pada tahun 2024 dapat dikategorikan menunjukkan status Sangat Tinggi (ST). Hal tersebut dapat dilihat dari realisasi capaian indikator kinerja sebagaimana tersebut dalam tabel dibawah ini. Namun demikian perlu adanya kaji ulang terkait dengan definisi operasional yang digunakan serta indikator-indikator yang digunakan dalam rangka merealisasikan target yang ditetapkan. Hal tersebut bertujuan untuk lebih meningkatkan capaian kinerja. Disamping itu perlu adanya pemikiran terkait penuangan besaran target kinerja yang relevan guna peningkatan akuntabilitas kinerja.

Adapun sebagai gambaran umum terkait indikator kinerja yang telah dicapai guna mendukung tercapainya program prioritas diantaranya:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan Indikator Persentase Perangkat Daerah dengan Tingkat Kematangan Organisasi ditargetkan pada katagori “Sedang” dengan

nilai kematangan 30,40 dapat terealisasi 100 % dengan nilai kematangan 37,25. Adapun pada tahun 2024, dari 28 Organisasi Perangkat Daerah di Kota Magelang terdapat 14 OPD yang mencapai Tingkat kematangan Sedang dan 14 OPD mencapai Tingkat kematangan Tinggi. Hal tersebut memungkinkan untuk merubah target indikator program pada tahun 2026 pada kategori “Tinggi” dengan target nilai 40. Sehingga dapat dilihat sampai sejauh mana peningkatan Tingkat nilai kematangan pada tahun berjalan. Indikator lain yang digunakan untuk mendukung Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota adalah Indek Kepuasan Pimpinan dengan Variabel hasil survey kepuasan pimpinan yang dilaksanakan oleh Bagian Protokol, Komunikasi antar Pimpinan serta indikator Indek Kepuasan Pimpinan yang dilaksanakan oleh Bagian Umum Sekretariat Daerah Kota Magelang. Untuk capaian kinerja survey kepuasan pimpinan yang dilaksanakan oleh Bagian Protokol, Komunikasi antar Pimpinan terealisasi 100 %. Dari target yang telah ditetapkan sebesar 83 dapat terealisasi 84. Sedangkan untuk target indikator Indek Kepuasan Pimpinan yang dilaksanakan oleh Bagian Umum Sekretariat Daerah Kota Magelang sebesar 83 dapat terealisasi sebesar 83,92.

2. Indikator Persentase Kebijakan administrasi tata pemerintahan yang terfasilitasi pada tahun 2024 dapat terealisasi sebesar 100%. Adapun Kebijakan administrasi tata pemerintahan yang terfasilitasi meliputi; Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ), Laporan Penyelenggaraan Standard Pelayanan Minimal (SPM), Laporan pelaksanaan kegiatan Ngopi Bareng, Laporan Penyelenggaraan pelaksanaan Hari Jadi Magelang.
3. Pada Indikator Persentase Kerjasama daerah yang terfasilitasi, output yang didapat berupa jumlah dokumen kerjasama daerah yang terfasilitasi. pada tahun 2024 untuk Kerjasama daerah yang terfasilitasi ditargetkan sejumlah 52 dokumen dan dapat terealisasi 100%.
4. Untuk indikator Persentase kebijakan di bidang kesejahteraan rakyat yang dilaksanakan, secara keseluruhan dapat dilaksanakan dan pada tahun 2024 dapat diterbitkan sejumlah 4 dokumen. Dokumen kebijakan yang dimunculkan meliputi ; Kota Sehat, Hari Ibu, Hari Aids dan Safari Subuh.
5. Persentase Produk Hukum yang terfasilitasi pada tahun 2024 dapat terealisasi sebesar 100 %. Hal tersebut ditunjukkan dengan telah terfasilitasinya 852 produk hukum dari target yang telah ditentukan sejumlah 800 produk hukum.
6. Pada Program Perekonomian dan Pembangunan, terdapat 3 (tiga) indikator kinerja sebagai pembentuk keberhasilan pelaksanaan program yaitu: Persentase progres fisik seluruh OPD, Persentase Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Perekonomian dan SDA yang dilaksanakan serta Indikator Tingkat kematangan UKPBJ. Dari keseluruhan indikator program capaian kinerjanya terealisasi 100%.

Terkait dengan indikator Presentase progress fisik seluruh OPD, Capaian kinerja yang merupakan akumulasi presentase dari triwulan I sampai dengan trwulan IV dapat terealisasi sebesar 99,49% dari prosentase target yang telah ditetapkan sebesar 98.80%. Meskipun pencapaian kinerja telah melebihi target yang telah ditetapkan, namun ada beberapa permasalahan yang menyebabkan capaian kinerjanya tidak mencapai 100 %. Permasalahan tersebut adalah :

- Penyusunan dokumen perencanaan dan pelaksanaan rencana fisik pekerjaan dilaksanakan pada Tahun Anggaran yang bersamaan. Hal tersebut terjadi dikarenakan ketidakpastian pengalokasian anggaran dari Pemerintah Pusat sehingga berdampak pada keharusan dilakukannya review dokumen perencanaan yang telah ada.
 - Proses penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah yang masih harus lebih ditingkatkan karena berdampak pada tidak terlaksananya kegiatan fisik karena berkaitan dengan kepemilikan Aset.
7. Terkait jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam yang dilaksanakan, target yang telah ditetapkan telah terealisasi 100%. kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan guna menunjang indikator tersebut berupa ; Pembinaan BUMD, Pembinaan BLUD, Pengendalian distribusi perekonomian serta Pemberdayaan ekonomi mikro.

2.2.5.2 Sekretariat DPRD

Tabel 2.335 Capaian Kinerja Program Unsur Sekretariat DPRD, 2024

No	Program Prioritas	Indikator Kinerja	Target RPJMD s.d.2026	Target 2024	Realisasi 2024	Kinerja RKPD Tahun 2024				
						Terhadap Target 2024		Terhadap Target Akhir RPJMD		
						Kinerja	Status	Kinerja	Status	Simbol
1	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Persentase dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD yang terlaksana	100%	100%	100%	100,00	ST	100%	ST	●

Sumber: Sekretariat DPRD Kota Magelang, 2025

Sekretariat DPRD memiliki satu indikator program yaitu persentase dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD yang terlaksana. Kinerja terhadap target tahunan maupun target akhir RPJMD telah berada pada kondisi baik dengan status kinerja Sangat Tinggi.

2.2.6 Evaluasi Kinerja Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan

2.2.6.1 Perencanaan

Tabel 2.336 Capaian Kinerja Program Urusan Pemerintahan Bidang Perencanaan, 2024

No	Program Prioritas	Indikator Kinerja	Target RPJMD s.d.2026	Target 2024	Realisasi 2024	Kinerja RKPD Tahun 2024				
						Terhadap Target 2024		Terhadap Target Akhir RPJMD		
						Kinerja	Status	Kinerja	Status	Simbol
1	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Cakupan perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah yang berkualitas	95,89	34,25	37,13	100,00	ST	38,72	SR	▼
2	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Tingkat Implementasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	100,00	90,00	90,58	100,00	ST	90,58	ST	●
		Tingkat Implementasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA	100,00	100,00	90,63	90,63	ST	90,63	ST	●
		Tingkat Implementasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	100,00	100,00	70,83	70,83	S	70,83	S	▲

Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah, 2025

Berdasarkan tabel tersebut, diketahui bahwa kinerja Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah pada tahun 2024 menunjukkan kinerja Sangat Tinggi (2 indikator kinerja) dan Sedang (1 indikator kinerja). Capaian indikator pada program tersebut diketahui dengan menghitung jumlah indikator, target, dan program di Renstra OPD yang bersesuaian dengan indikator RPJMD. Dengan demikian, selama tidak ada perubahan pada Renstra OPD dan RPJMD, capaian dari masing-masing komponen pembentuk indikator akan selalu sama pada setiap tahunnya. Hal ini menjadi salah satu pertimbangan dalam penyusunan RPJMD dan Renstra periode 2025-2029 agar merumuskan indikator kinerja yang menggambarkan kinerja antar tahun.

Capaian Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah sudah melampaui target tahun 2024, namun kinerja terhadap target akhir RPJMD masih sangat rendah. Selanjutnya, upaya yang akan dilakukan dilakukan untuk memenuhi target kinerja adalah sebagai berikut:

1. Sosialisasi kepada masyarakat terkait batasan kriteria usulan yang dapat diakomodir dalam musrenbang.
2. Penyesuaian indikator kinerja program beserta definisi operasionalnya, khususnya pada Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah

2.2.6.2 Keuangan

Pelaksanaan urusan keuangan didukung oleh 3 program dengan 5 indikator. Capaian kinerja indikator program urusan keuangan disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.337 Capaian Kinerja Program Unsur Keuangan, 2024

No	Program Prioritas	Indikator Kinerja	Target RPJMD s.d.2026	Target 2024	Realisasi 2024	Kinerja RKPD Tahun 2024				
						Terhadap Target 2024		Terhadap Target Akhir RPJMD		
						Kinerja	Status	Kinerja	Status	Simbol
1	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Persentase capaian pengelolaan keuangan daerah bidang anggaran	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	ST	100,00%	ST	●
		Persentase capaian pengelolaan keuangan daerah bidang perbendaharaan	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	ST	100,00%	ST	●
		Persentase capaian pengelolaan keuangan daerah bidang akuntansi	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	ST	100,00%	ST	●
2	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Cakupan pengelolaan barang milik daerah	89,29%	85,71%	100,00%	100,00%	ST	100,00%	ST	●
3	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah	124,37%	110,06%	160,98%	100,00%	ST	100,00%	ST	●

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang, 2025

Kinerja indikator program urusan keuangan pada tahun 2024 menunjukkan kinerja yang baik. Kondisi ini dapat dilihat dari status kinerja keseluruhan indikator program yang menunjukkan status Sangat Tinggi (ST). Jika dibandingkan dengan target tahun 2026 (akhir periode RPJMD), kinerja indikator program urusan keuangan juga telah menunjukkan kinerja yang baik (ST). Meskipun kinerja sudah baik, pengelolaan keuangan dan aset daerah harus terus dilakukan sesuai dengan ketentuan. Pendampingan kepada OPD juga masih harus dilakukan untuk mendukung terwujudnya pengelolaan keuangan dan barang milik daerah yang baik. Selain itu, pengelolaan pendapatan termasuk upaya peningkatan pendapatan juga perlu dilakukan untuk dapat mengurangi rasio ketergantungan terhadap Pemerintah Pusat. Identifikasi dan pemetaan aset milik Pemerintah Kota Magelang menjadi salah satu poin dalam mendukung peningkatan pendapatan melalui pemanfaatan aset. Upaya ini juga untuk meningkatkan manajemen pengelolaan aset.

2.2.6.3 Kepegawaian

Tabel 2.338 Capaian Kinerja Program Urusan Pemerintahan Bidang Kepegawaian, 2024

No	Program Prioritas	Indikator Kinerja	Target RPJMD s.d.2026	Target 2024	Realisasi 2024	Kinerja RKPd Tahun 2024				
						Terhadap Target 2024		Terhadap Target Akhir RPJMD		
						Kinerja	Status	Kinerja	Status	Simbol
1	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Persentase capaian target aspek sistem merit	95%	95%	100%	100%	ST	100%	ST	●

Sumber: Badan Kepegawaian dan Pendidikan Sumber Daya Manusia Kota Magelang, 2025

Dengan capaian tersebut, upaya yang telah dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan dan penguatan pada 8 aspek sistem merit, terutama di aspek pengembangan karier, aspek manajemen kinerja, dan aspek sistem informasi. Hal tersebut didukung dengan pembangunan dan pengembangan *Assessment Center*, sehingga dapat memperkuat upaya pemetaan kompetensi dan potensi pegawai, khususnya pegawai di tataran pejabat administrator ke bawah. *Assessment Center* tersebut saat ini telah memperoleh akreditasi B.
2. Akselerasi untuk mendorong capaian pada komponen perencanaan kebutuhan dan pengadaan pegawai.
3. Dalam aspek penghargaan, penggajian, dan disiplin telah ada *mekanisme reward and punishment* secara berjenjang, baik pada tingkat OPD maupun di tingkat kota. Mekanisme *reward* berupa pemberian *employee of the month* dan *employee of the year*. Sementara, mekanisme *punishment* berupa pemberian surat peringatan (SP), baik SP 1 maupun SP 2.
4. Pengembangan kompetensi SDM pengelola kepegawaian berupa pelatihan, pendampingan, magang, dan *benchmarking* terkait penerapan sistem merit dalam manajemen ASN. Upaya pelatihan dan pendampingan dilakukan melalui kerjasama dengan pihak swasta.

2.2.6.4 Pendidikan dan Pelatihan

Tabel 2.339 Capaian Kinerja Program Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan dan Pelatihan, 2024

No	Program Prioritas	Indikator Kinerja	Target Akhir RPJMD (2026)	Target 2024	Realisasi 2024	Kinerja RKPd Tahun 2024				
						Terhadap Target 2024		Terhadap Target Akhir RPJMD		
						Kinerja	Status	Kinerja	Status	Simbol
1	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Persentase ASN yang mengikuti pengembangan kompetensi sesuai dengan jabatannya	37%	33%	42,92%	100%	ST	100%	ST	●

Sumber: Badan Kepegawaian dan Pendidikan Sumber Daya Manusia Kota Magelang, 2025

Berdasarkan tabel tersebut, diketahui bahwa realisasi capaian indikator kinerja tahun 2024 telah melebihi angka target. Walaupun demikian, masih diperlukan upaya dalam rangka mencapai target akhir periode RPJMD 2021 2026.

Dengan capaian tersebut, upaya yang telah dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Digitalisasi usul layanan pengembangan kompetensi ASN, di antaranya layanan usul kebutuhan pendidikan dan pelatihan (diklat) ASN dan layanan usul sertifikasi kompetensi bagi ASN.
2. Bekerjasama dengan beberapa instansi penyelenggara pengembangan kompetensi, seperti PPSDM Regional Yogyakarta, Dirjen Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri, BPSDMD Provinsi Jawa Tengah, Pusbangkom TSK ASN LAN RI, Pusbang SDM BSSN.

2.2.6.5 Penelitian dan Pengembangan

Tabel 2.340 Capaian Kinerja Program Urusan Pemerintahan Bidang Penelitian dan Pengembangan, 2024

No	Program Prioritas	Indikator Kinerja	Target RPJMD s.d.2026	Target 2024	Realisasi 2024	Kinerja RKPD Tahun 2024				
						Terhadap Target 2024		Terhadap Target Akhir RPJMD		
						Kinerja	Status	Kinerja	Status	Simbol
1	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan	44,44	41,17	41,18	100,00	ST	92,66	ST	●
		Persentase pemanfaatan hasil inovasi	24,00	24,00	33,83	100,00	ST	100,00	ST	●

Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah, 2025

Berdasarkan tabel tersebut, diketahui bahwa realisasi capaian indikator kinerja tahun 2024 telah melebihi angka target. Capaian indikator kinerja Persentase pemanfaatan hasil inovasi telah melebihi target akhir RPJMD. Di sisi lain, diperlukan upaya untuk memenuhi target akhir RPJMD untuk indikator kinerja Persentase pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan. Dengan demikian, upaya yang akan dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Penguatan kolaborasi antarpemangku kepentingan dalam rangka penguatan ekosistem inovasi.
2. Meningkatkan partisipasi masyarakat dan stakeholder dalam mendukung implementasi perencanaan berbasis riset.

2.2.7 Evaluasi Kinerja Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan

Tabel 2.341 Capaian Kinerja Program Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan Tahun 2024

No	Program Prioritas	Indikator Kinerja	Target RPJMD s.d.2026	Target 2024	Realisasi 2024	Kinerja RKPD Tahun 2024				
						Terhadap Target 2024		Terhadap Target Akhir RPJMD		
						Kinerja	Status	Kinerja	Status	Simbol
1	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Persentase penyelenggaraan pengawasan	97.50%	94,5%	147.36%	100%	ST	100%	ST	●
2	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Persentase entitas yang telah mendapatkan pendampingan dan asistensi	100%	72.50%	100.00%	100%	ST	100%	ST	●

Sumber: Inspektorat Daerah Kota Magelang, 2025

Capaian kinerja pengawasan di Kota Magelang pada tahun 2024 menunjukkan hasil yang melampaui target yang telah ditetapkan. Persentase penyelenggaraan pengawasan mencapai 147,36%, jauh melampaui target tahun 2024 sebesar 94,5% dan bahkan melebihi target RPJMD hingga tahun 2026 yang ditetapkan sebesar 97,50%. Hal ini mencerminkan bahwa pelaksanaan pengawasan di Kota Magelang telah berjalan secara optimal, dengan cakupan yang lebih luas dari yang direncanakan.

Selain itu, indikator persentase entitas yang telah mendapatkan pendampingan dan asistensi juga menunjukkan pencapaian yang sangat baik. Pada tahun 2024, realisasi mencapai 100%, sesuai dengan target RPJMD hingga 2026, dan lebih tinggi dari target tahun 2024 yang ditetapkan sebesar 72,50%. Capaian ini mencerminkan bahwa seluruh entitas yang membutuhkan pendampingan dan asistensi telah terlayani dengan baik, sehingga mendukung peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan di Kota Magelang.

Hasil ini menunjukkan efektivitas peran pengawasan internal dalam mendukung akuntabilitas dan transparansi pemerintahan. Meskipun pencapaian sudah melebihi target, upaya untuk mempertahankan dan meningkatkan kualitas pengawasan tetap diperlukan, terutama dalam memastikan keberlanjutan pengawasan yang efektif serta peningkatan kompetensi sumber daya manusia di bidang pengawasan.

2.2.8 Evaluasi Kinerja Unsur Kewilayahan

Tabel 2.342 Capaian Kinerja Program Unsur Kewilayahan Tahun 2024

No	Program Prioritas	Indikator Kinerja	Target RPJMD s.d.2026	Target 2024	Capaian 2024	Kinerja Tahun 2024				
						Terhadap Target 2024		Terhadap Target Akhir RPJMD		
						Kinerja	Status	Kinerja	Status	Simbol
1	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Cakupan program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	100%	100%	100%	ST	100%	ST	●
2	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Cakupan program koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	100%	100%	100%	100%	ST	100%	ST	●
3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	100%	100%	100%	100%	ST	100%	ST	●
4	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Cakupan program penyelenggaraan pemerintahan umum	100%	100%	100%	100%	ST	100%	ST	●

Sumber: Kecamatan se-Kota Magelang, 2025

2.2.9 Evaluasi Kinerja Unsur Pemerintahan Umum

Unsur pemerintahan umum memiliki 5 (lima) program dengan 6 (enam) indikator. Dilihat dari kinerja tahun 2024 terhadap target tahun tersebut, keempat indikator berada pada status sangat tinggi. Selanjutnya, jika dilihat kinerjanya terhadap target akhir RPJMD 2026, baru terdapat 4 (empat) indikator dengan status sangat tinggi dan masih ada 1 (satu) indikator dengan status tinggi, serta 1 (satu) indikator dengan status sedang. Satu indikator dengan status sedang berdasarkan kinerja terhadap target akhir 2026 yaitu Persentase Pembinaan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya. Hal ini menandakan bahwa pelaksanaan pada tahun 2025 masih perlu terus diupayakan agar mencapai target akhir 2026.

Tabel 2.343 Capaian Kinerja Program Unsur Pemerintahan Umum Tahun 2024

No	Program Prioritas	Indikator Kinerja	Target RPJMD s.d.2026	Target 2024	Capaian 2024	Kinerja Tahun 2024				
						Terhadap Target 2024		Terhadap Target Akhir RPJMD		
						Kinerja	Status	Kinerja	Status	Simbol
1	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Persentase Pembinaan Wawasan Kebangsaan	75,47%	45,28%	80%	100%	ST	100%	ST	●
2	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Persentase Penduduk Usia Pemilih Pemula yang Berpartisipasi dalam Agenda Politik	6,50%	5,12%	12,51%	100%	ST	100%	ST	●
3	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Persentase Organisasi Kemasyarakatan yang Diberdayakan	81,30%	48,78%	62,12%	100%	ST	76,41	T	▲
		Persentase Organisasi Kemasyarakatan yang Aktif	88,62%	85,37%	86,74%	100%	ST	97,88	ST	●
4	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Persentase Pembinaan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	12,23%	7,90%	9,09%	100%	ST	74,29	S	▼

No	Program Prioritas	Indikator Kinerja	Target RPJMD s.d.2026	Target 2024	Capaian 2024	Kinerja Tahun 2024				
						Terhadap Target 2024		Terhadap Target Akhir RPJMD		
						Kinerja	Status	Kinerja	Status	Simbol
5	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Jumlah Konflik Sosial	0	0	0	100%	ST	100%	ST	●

Sumber: Badan Kesbangpol Kota Magelang, 2025

2.3 PERMASALAHAN PEMBANGUNAN DAERAH

2.3.1 Permasalahan Daerah Yang Berhubungan Dengan Prioritas Dan Sasaran Pembangunan Daerah

1. Menurunnya capaian indeks pengelolaan keuangan daerah
2. Ketimpangan pendapatan yang masih perlu diminimalkan
3. Menurunnya indeks infrastruktur wilayah
4. Masih adanya luas kawasan kumuh
5. Ketersediaan ruang terbuka hijau yang masih kurang
6. Masih rendahnya indeks ketahanan daerah

2.3.2 Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah

2.3.2.1 Evaluasi Kinerja Urusan Wajib Pelayanan Dasar

1. **Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan**
 - a. Masih terdapat anak tidak sekolah
 - b. Belum tercapainya Harapan Lama Sekolah Kota Magelang
 - c. Terus menurunnya Angka Partisipasi Sekolah (APS) pada kelompok usia 16-18 tahun
 - d. Belum optimalnya kualifikasi Guru PAUD
2. **Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan**
 - a. Masih adanya kasus kematian ibu
 - b. Meningkatkan angka kematian bayi dan balita
 - c. Dalam 5 (lima) tahun terakhir, treatment coverage kasus tuberkulosis tidak pernah memenuhi target yang ditetapkan
 - d. Masih rendahnya kinerja indeks keluarga sehat
 - e. Stagnasi kelurahan siaga aktif strata mandiri
3. **Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**
 - a. Masih rendahnya persentase drainase dalam kondisi baik
 - b. Rendahnya progress pembangunan Gedung Balai Kota
 - c. Rendahnya progress pembangunan TPST/3R
 - d. Belum seluruh jaringan irigasi berada pada kondisi baik
 - e. Belum seluruh rumah tangga memiliki akses terhadap pelayanan sanitasi layak
 - f. Belum seluruh rumah tangga memiliki akses terhadap sumber air minum layak
 - g. Panjang jalan dalam kondisi mantab belum 100%
4. **Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman**
 - a. Masih belum spesifiknya penanganan kumuh sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan setiap RT;
 - b. Masih adanya persentase rumah tidak layak huni di luar permukiman kumuh yang tertangani;

5. **Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat**
 - a. Ketahanan daerah terhadap bencana masih perlu ditingkatkan
6. **Urusan Pemerintahan Bidang Sosial**
 - a. Belum semua jenis PSKS ada di Kota Magelang

2.3.2.2 Evaluasi Kinerja Urusan Wajib Non-Pelayanan Dasar

1. **Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja**
 - a. Belum optimalnya daya dukung untuk pelatihan
 - b. Belum optimalnya serapan tenaga kerja Kota Magelang
2. **Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**
 - a. Masih adanya kasus kekerasan terhadap anak
 - b. Indikator pemenuhan hak anak belum tercapai optimal
3. **Urusan Pemerintahan Bidang Pangan**
 - a. Tingginya ketergantungan pangan dari daerah lain
 - b. Masih ditemukan pangan segar yang tidak aman
 - c. Pola konsumsi yang tidak seimbang
4. **Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian**
 - a. Belum seluruh lahan aset pemerintah bersertifikat
5. **Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup**
 - a. Indeks Kualitas Air (IKA) yang menurun
 - b. Menurunnya Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)
 - c. Belum optimalnya pengelolaan sampah
6. **Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil**
 - a. OPD yang sudah ber-PKS dengan Ditjendukcapil tidak bisa mengakses data penduduk untuk keperluan verifikasi
7. **Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**
 - a. Pengurus LPM belum mengikuti bimtek P3MK
 - b. Beberapa wilayah kelurahan tidak mengalami perkembangan dibandingkan tahun sebelumnya
8. **Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Bencana**
 - a. Capaian indeks pembangunan keluarga (iBangga) yang belum optimal
 - b. Semakin menurunnya angka TFR
 - c. Semakin meningkatnya angka ketergantungan setiap tahunnya
9. **Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan**
 - a. Belum semua kebutuhan fasilitas pelengkap jalan terpenuhi
 - b. Persentase pengguna transportasi umum masih di bawah 10%
 - c. Menurunnya load factor angkutan umum
 - d. Meningkatkan kepadatan jalan di Kota Magelang
10. **Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika**
 - a. Banyak aplikasi yang belum terintegrasi
11. **Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah**
 - a. Masih sedikitnya KSP/USP yang memiliki perizinan
 - b. Belum semua UMKM memiliki izin berusaha
12. **Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal**
 - a. Potensi investasi yang bisa ditawarkan ke investor masih terbatas

- b. Belum optimalnya pelayanan perizinan melalui sistem OSS

13. Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olahraga

- a. Belum adanya pusat pembinaan dan pengembangan olahraga pada jenjang pendidikan usia dini;
- b. Belum adanya penghargaan untuk atlet berprestasi khususnya pelajar Kota Magelang yang telah berprestasi pada kejuaraan tingkat provinsi, nasional, maupun internasional;
- c. Belum ada jaminan sosial bagi atlet yang mengalami cedera saat mengikuti pertandingan
- d. Besaran honor wasit/juri dalam penyelenggaraan kejuaraan dirasa kurang dan belum sesuai dengan standar yang ada pada masing-masing cabang olahraga

14. Urusan Pemerintahan Bidang Statistik

- a. NIHIL

15. Urusan Pemerintahan Bidang Persandian

- a. Keamanan informasi masih belum memenuhi standar ISO 27001

16. Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan

- a. Masih banyak cagar budaya yang belum ditetapkan secara resmi.

17. Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan

- a. Layanan perpustakaan belum merata
- b. Koleksi perpustakaan masih terbatas
- c. Belum seluruh perpustakaan ber-SNP

18. Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan

- a. Belum semua OPD memiliki arsiparis
- b. Belum optimalnya pengelolaan arsip di OPD terutama penyusutan arsip

2.3.2.3 Evaluasi Kinerja Urusan Pilihan

1. Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan

- a. Belum optimalnya peningkatan produksi perikanan budidaya

2. Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata

- a. Belum semua destinasi wisata terkelola dengan baik
- b. Belum optimalnya pengembangan potensi ekraf dan pariwisata di Kota Magelang

3. Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian

- a. Belum optimalnya ketersediaan dan pemeliharaan prasarana pertanian
- b. Peningkatan kelompok tani yang naik kelas yang belum optimal

4. Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan

- a. Belum seluruh pelaku usaha memiliki izin usaha
- b. Belum optimalnya sarana distribusi perdagangan yang berada dalam kondisi baik
- c. Koefisien variasi harga antarwaktu yang fluktuatif dari tahun ke tahun
- d. Belum optimalnya nilai ekspor Kota Magelang

5. Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian

- a. Pertambahan jumlah industri yang belum optimal
- b. Belum optimalnya kualitas hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah IUI yang dikeluarkan oleh instansi terkait
- c. Rendahnya IKM yang mengurus legalitas usaha
- d. Belum optimalnya ketersediaan informasi industri terkini dan lengkap

6. Urusan Pemerintahan Bidang Transmigrasi

- a. Tidak ada urusan Bidang Transmigrasi

2.3.2.4 Evaluasi Kinerja Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan

1. Sekretariat Daerah

- a. Belum optimalnya Indeks Reformasi Hukum
- b. Belum optimalnya pengelolaan asset BUMD
- c. Capaian nilai SAKIP yang masih bisa dioptimalkan

2. Sekretariat DPRD

- a. Keterlambatan pembahasan raperda.

2.3.2.5 Evaluasi Kinerja Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan

1. Perencanaan

- a. Indikator kinerja pada Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah tidak dapat digunakan untuk membandingkan capaian antar tahun.

2. Keuangan

- a. Penurunan IPKD Kota Magelang
- b. Masih adanya tanah Pemerintah Kota yang belum bersertifikat
- c. Keuangan Kota Magelang masih tergantung pembiayaan dari Pusat

3. Kepegawaian

- a. Capaian Indeks Sistem Merit dan Nilai Sistem Merit Kota Magelang belum optimal.

4. Pendidikan dan Pelatihan

- a. Penurunan persentase ASN yang mengikuti pengembangan kompetensi sesuai dengan jabatannya.

5. Penelitian dan Pengembangan

- a. Pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan serta inovasi belum optimal

2.3.2.6 Evaluasi Kinerja Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan

1. Maturitas SPIP Kota Magelang masih berada pada level 3
2. Implementasi kebijakan pengendalian internal belum optimal
3. Kurangnya koordinasi dan sinergi antar-OPD dalam penerapan SPIP

2.3.2.7 Evaluasi Kinerja Unsur Kewilayahan

Sampai saat ini belum ada permasalahan yang teridentifikasi untuk urusan ini. Usaha yang dilakukan adalah untuk mempertahankan kinerja layanan.

2.3.2.8 Evaluasi Kinerja Unsur Pemerintahan Umum

1. Belum optimalnya kinerja pembinaan wawasan kebangsaan
2. Organisasi kemasyarakatan yang diberdayakan belum maksimal
3. Pembinaan ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya yang perlu ditingkatkan
4. Penduduk usia pemilih pemula yang berpartisipasi dalam agenda politik yang masih perlu ditingkatkan

Tabel 2.344 Rumusan Permasalahan RKPD 2026 Kota Magelang

Urusan	Akar Masalah	Data Dukung	Statement Permasalahan
URUSAN PELAYANAN WAJIB PELAYANAN DASAR			
Pendidikan	Hasil verifikasi dan validasi data Anak Tidak Sekolah (ATS) di Kota Magelang menunjukkan penurunan yang signifikan. Hal ini mencerminkan keberhasilan berbagai program yang telah dilaksanakan. Namun, tantangan tetap ada, terutama di Kecamatan Magelang Tengah, yang memiliki jumlah ATS lebih tinggi, disebabkan oleh faktor-faktor seperti penyandang disabilitas, pengalaman kekerasan di sekolah, atau kurangnya motivasi untuk melanjutkan pendidikan	Tahun 2023: 51 ATS Tahun 2024: 13 ATS	Masih terdapat anak tidak sekolah
		Realisasi HLS Kota Magelang 2024 pada angka 14,62; sedangkan target tahun 2024 pada angka 14,97	Belum tercapainya Harapan Lama Sekolah
		Dalam kurun waktu 2022-2024, realisasi APS pada kelompok usia 16-18 tahun yaitu: 2022=87,58 2023=85,63 2024=80,59	Terus menurunnya Angka Partisipasi Sekolah (APS) pada kelompok usia 16-18 tahun
	Banyaknya guru PAUD dengan sistem kontrak/sukarela sehingga ketersediaan tenaga pendidik di lapangan sangat dinamis	Persentase guru PAUD lulusan S1/S2 tahun 2024 sebesar 65,92%; bahkan menurun dari tahun 2023 yang sebesar 72,58%	Belum optimalnya kualifikasi guru PAUD
Kesehatan		Pada tahun 2024 terdapat 1 (satu) angka kematian ibu	Masih adanya kasus kematian ibu
	Penyebab AKB: persalinan prematur, asfiksia, dan infeksi neonatal Penyebab AKBa: pneumonia, penyakit bawaan, diare, cedera, campak, pola asuh	Angka Kematian Bayi (AKB) 2024=12 2023=6 Angka Kematian Balita (AKBa) 2024=12 2023=8	Meningkatnya angka kematian bayi dan balita
	Belum optimalnya skrining, pelacakan kontak, serta masih perlunya peningkatan kesadaran masyarakat	Target penemuan 90%. Realisasi 14% (s/d bulan November 2024)	Dalam 5 (lima) tahun terakhir, treatment coverage kasus tuberkulosis tidak pernah memenuhi target yang ditetapkan

Urusan	Akar Masalah	Data Dukung	Statement Permasalahan
	<p>Tingginya prevalensi rumah tangga dengan perokok yang masih di atas 30%, yang berkontribusi terhadap risiko penyakit tidak menular</p> <p>Adanya penderita hipertensi, tuberkulosis (TB), dan gangguan jiwa, yang memengaruhi angka kesehatan keluarga secara keseluruhan.</p> <p>Belum meratanya akses terhadap sarana air bersih dan fasilitas buang air yang sehat, yang merupakan komponen penting dalam menentukan indeks keluarga sehat.</p>	<p>Target indeks keluarga sehat 2024: 0,80</p> <p>Realisasi 2024: 0,41</p>	Masih rendahnya kinerja indeks keluarga sehat
		Pada tahun 2024 baru 14 kelurahan yang berada pada kategori kelurahan siaga aktif strata mandiri. Jumlah tersebut stagnan dari tahun 2021	Stagnasi kelurahan siaga aktif strata mandiri
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Masih adanya kondisi eksisting drainase yang berbentuk tanah. Pemeliharaan yang sulit dilakukan karena pembangunan yang intensif di sekitar drainase.	Dibandingkan target akhir RPJMD, persentase drainase dalam kondisi baik tahun 2024 sebesar 53,45%	Masih rendahnya persentase drainase dalam kondisi baik
	Dilaksanakan secara bertahap dan sesuai prioritas pembangunan	Dibandingkan target akhir RPJMD, kinerja persentase progress pembangunan Gedung Balai Kota sebesar 10%	Rendahnya progress pembangunan Gedung Balai Kota
	Perlunya penyesuaian proses perencanaan karena perubahan nomenklatur menjadi Pusat Daur Ulang	Dibandingkan target akhir RPJMD, kinerja persentase pembangunan TPST/3R sebesar 37,16%	Rendahnya progress pembangunan TPST/3R
	Dilaksanakan secara bertahap dan sesuai prioritas pembangunan	Dibandingkan target akhir RPJMD, kinerja persentase panjang jaringan irigasi yang kondisi baik sebesar 71,60%	Belum seluruh jaringan irigasi berada pada kondisi baik
	Belum semua masyarakat mau berpindah atau tersambung di tangka septic kedap air. Karena membutuhkan biaya yang banyak	Dibandingkan target akhir RPJMD, kinerja persentase jumlah rumah tangga yang memiliki akses terhadap pelayanan sanitasi layak sebesar 78,23%	Belum seluruh rumah tangga memiliki akses terhadap pelayanan sanitasi layak
	Belum semua masyarakat mau menggunakan jaringan perpipaan PDAM, banyak yang masih memilih menggunakan air tanah atau air permukaan	Dibandingkan target akhir RPJMD, persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap pelayanan sumber air minum layak sebesar 78,87%	Belum seluruh rumah tangga memiliki akses terhadap sumber air minum layak

Urusan	Akar Masalah	Data Dukung	Statement Permasalahan
	Dilaksanakan secara bertahap dan sesuai prioritas pembangunan	Dibandingkan target akhir RPJMD, persentase panjang jalan dalam kondisi mantab sebesar	Panjang jalan dalam kondisi mantab belum 100%
Perumahan dan Kawasan Permukiman	Usulan pokir, musren tidak disesuaikan dengan karakteristik RT. Penanganan dari OPD belum tepat sasaran sehingga tidak menambah penanganan kumuh. Belum efektifnya fasilitator dalam mendampingi dan menyadarkan masyarakat	Hasil telaah permasalahan oleh OPD	Masih belum spesifiknya penanganan kumuh sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan setiap RT;
	Legalitas tanah belum terpenuhi. Sengketa lahan dengan ahli waris. Meninggal sebelum bantuan dicairkan. Status DTKS berubah sebelum bantuan dicairkan	Persentase rumah tidak layak huni di luar permukiman kumuh yang tertangani di tahun 2024 sebesar 74,21%	Masih adanya persentase rumah tidak layak huni di luar permukiman kumuh yang tertangani
Ketenteraman, Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	Belum lengkapnya aturan dan mekanisme mitigasi bencana di Kota Magelang	IKD Tahun 2024 sebesar 48,00	Ketahanan daerah terhadap bencana masih perlu ditingkatkan
Sosial	Belum adanya juknis terkait Keluarga Prioritas dan Wanita Pemimpin Kesejahteraan Sosial	PSKS tahun 2024 ada 10 dari 12 jenis PSKS Target PSKS tahun 2026 ada 11 dari 12 jenis PSKS	Belum semua jenis PSKS ada di Kota Magelang
URUSAN WAJIB NONPELAYANAN DASAR			
Ketenagakerjaan	Sarana prasarana pelatihan sudah harus diperbarui	Hasil telaah permasalahan oleh OPD	Belum optimalnya daya dukung untuk pelatihan
	Rendahnya keinginan masyarakat untuk mengakses informasi loker dan hadir di jobfair sehingga loker yang tersedia lebih banyak diisi oleh tenaga kerja luar daerah	Hasil telaah permasalahan oleh OPD	Belum optimalnya serapan tenaga kerja Kota Magelang
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Meningkatnya kasus kekerasan terhadap perempuan	Pada tahun 2023 terdapat 41 kasus kekerasan terhadap perempuan dan jumlah ini meningkat dari tahun 2022 yang sebesar 17 kasus	Masih adanya kasus kekerasan terhadap perempuan
	Pelaksanaan kegiatan dilakukan secara bertahap sampai tahun 2026	Capaian tahun 2023 dibandingkan target akhir RPJMD indikator persentase keluarga berkualitas masih sebesar 51,51%	Belum optimalnya kinerja capaian keluarga berkualitas

Urusan	Akar Masalah	Data Dukung	Statement Permasalahan
	Belum optimalnya pemenuhan indikator hak anak	Terdapat 5 (lima) indikator pemenuhan hak anak yang belum optimal, yaitu (1) regulasi kota layak anak; (2) peran lembaga masyarakat, media massa, dan dunia usaha dalam pemenuhan hak anak; (3) pelayanan bagi anak disabilitas, kelompok minoritas yang terisolir; (4) pelayanan anak yang berhadapan dengan hukum; (5) kelengkapan sarana dan prasarana pendukung kelurahan dan kecamatan layak anak	Indikator pemenuhan hak anak belum tercapai optimal
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Masih kurangnya parenting yang sehat juga menurunnya kualitas interaksi sosial	Pada tahun 2024 terdapat 35 kasus kekerasan terhadap anak dan jumlah ini meningkat dari tahun 2023 yang sebesar 26 kasus	Masih adanya kasus kekerasan terhadap anak
	Belum adanya dukungan perda, masih kurangnya kerjasama antar-stakeholders, juga sarana prasarana pendukung	5 indikator pemenuhan hak anak yang belum tercapai optimal adalah Regulasi kota layak anak, peran Lembaga masyarakat, media massa dan dunia usaha dalam pemenuhan hak anak, pelayanan bagi anak disabilitas, kelompok minoritas yang terisolir, pelayanan anak yang berhadapan dengan hukum serta kelengkapan sarana prasarana pendukung Kelurahan dan Kecamatan Layak Anak.	Indikator pemenuhan hak anak belum tercapai optimal
Pangan	Kondisi geografis dan SDM yang kurang mendukung disektor penyediaan pangan	Total ketersediaan pangan di Kota Magelang tahun 2024 14.297 ton dengan 12.638 ton diantaranya (88,4%) diantaranya berasal dari luar daerah	Tingginya ketergantungan pangan dari daerah lain
	Belum ada sinergi pengawasan pangan yang baik antara level lokal, regional, nasional. (Diketahui bahwa sebagian besar dari pangan segar yang tidak aman merupakan barang import)	Tahun 2024, persentase pangan segar yang aman masih sebesar 88,48%	Masih ditemukan pangan segar yang tidak aman
Pertanahan	Pensertifikatan lahan asset pemerintah kota dilakukan secara bertahap memperhatikan sumber daya dan prioritas pembangunan	Persentase luas lahan bersertifikat tahun 2023 baru sebesar 61,23%	Belum seluruh lahan aset pemerintah bersertifikat
Lingkungan Hidup	Polutan pertanian (pupuk kandang) yang terbuang ke badan air	IKA tahun 2024 berada di angka 58,33; menurun dari tahun 2023 yang sebesar 66,67	Indeks Kualitas Air (IKA) yang menurun

Urusan	Akar Masalah	Data Dukung	Statement Permasalahan
	Berkurangnya pekarangan dan lahan pepohonan karena alih fungsi lahan	IKTL tahun 2024 sebesar 27,85; turun dari tahun 2023 yang berada di angka 28,07	Menurunnya Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)
	Kinerja pengelolaan sampah organik maupun anorganik yang belum optimal	Tahun 2024, persentase sampah yang terkelola sebesar 94,67%	Belum optimalnya pengelolaan sampah
Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Adanya regulasi dan surat edaran terkait persyaratan kepemilikan ISO 27001 untuk akses data kependudukan	Belum ada OPD di Kota Magelang yang memiliki ISO 27001	OPD yang sudah ber- PKs dengan Ditjendukcapil tidak bisa mengakses data penduduk untuk keperluan verifikasi
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Reorganisasi LPM pada akhir tahun 2024	Seluruh pengurus LPM belum mengikuti bimtek P3MK	Pengurus LPM belum mengikuti bimtek P3MK
	Belum optimalnya akuntabilitas data dalam pengisian epdeskel	Terdapat 6 (enam) kelurahan yang nilai evaluasi hasil perkembangannya stagnan dengan tahun sebelumnya	Beberapa wilayah kelurahan tidak mengalami perkembangan dibandingkan tahun sebelumnya
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Bencana	Belum optimalnya capaian pemenuhan kebutuhan dasar pada dimensi kemandirian sebagai salah satu dimensi pengukuran iBanga	Dari tahun 2020, capaian iBanga masih berada pada tahap berkembang walaupun nilai menunjukkan tren peningkatan setiap tahunnya	Capaian indeks pembangunan keluarga (iBanga) yang belum optimal
	Berhasilnya kampanye 2 (dua) anak per rumah angga	TFR 2022 sebesar 1,79 dan 2023 sebesar 1,78	Semakin menurunnya angka TFR
	Lebih banyaknya usia lanjut daripada usia muda di Kota Magelang	Tahun 2024 sebesar 41,69 meningkat 0,35 poin dari tahun 2023	Semakin meningkatnya angka ketergantungan setiap tahunnya
Perhubungan	Penyediaan kelengkapan jalan mengacu pada prioritas kebutuhan ruas jalan (kelengkapan jalan diberikan pada ruas-ruas jalan yang membutuhkan intervensi rekayasa lalu lintas)	Meskipun sudah meningkat dari tahun 2023 (85,31%), persentase kelengkapan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal pada jalan kewenangan Kota Magelang berada pada angka 86,08%	Belum semua kebutuhan fasilitas pelengkap jalan terpenuhi
	Pelayanan transportasi umum belum memenuhi standar pelayanan minimal, seperti belum ada pengaturan jadwal juga kondisi kendaraan belum diremajakan. Selain itu, perlunya peningkatan kesadaran masyarakat untuk menggunakan transportasi publik	Meskipun sudah meningkat dari tahun 2023 (7,85%), persentase penduduk terlayani transportasi umum tahun 2024 sebesar 8,29%	Persentase pengguna transportasi umum masih di bawah 10%
	Kondisi angkutan umum perkotaan yang belum sepenuhnya ideal	Load factor angkutan umum tahun 2024 sebesar 35,08; menurun dari tahun 2023 yang berada pada angka 37,95.	Menurunnya load factor angkutan umum

Urusan	Akar Masalah	Data Dukung	Statement Permasalahan
	Belum optimalnya transportasi umum sebagai moda transportasi	VC ratio tahun 2024 sebesar 0,72; meningkat dari tahun 2023 yang sebesar 0,61	Meningkatnya kepadatan jalan di Kota Magelang
Komunikasi dan Informatika	Adanya aplikasi yang dikembangkan Pemerintah Pusat, Provinsi, dan Kota Magelang yang belum bisa sharing Application Programming Interface (API)	Hasil telaah permasalahan oleh OPD	Banyak aplikasi yang belum terintegrasi
Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah	Belum semua KSP/USP memiliki dokumen legalitas usaha	Persentase KSP/USP yang memiliki usaha simpan pinjam sebesar 38,22% pada tahun 2024	Masih sedikitnya KSP/USP yang memiliki perizinan
	Belum semua memiliki mentalitas untuk naik kelas	Hasil telaah permasalahan oleh OPD	Belum semua UMKM memiliki izin berusaha
Penanaman Modal	Status tanah asset milik pemerintah belum ditingkatkan statusnya menjadi hak pengelolaan	Hasil telaah permasalahan oleh OPD	Potensi investasi yang bisa ditawarkan ke investor masih terbatas
	Aplikasi yang digunakan merupakan milik pemerintah pusat sehingga sulit sulit penanganan apabila ada kendala	Hasil telaah permasalahan oleh OPD	Belum optimalnya pelayanan perizinan melalui sistem OSS
Kepemudaan dan Olahraga	Pembinaan sarana keolahragaan baru difokuskan pada anak usia sekolah menengah pertama dan akan dikembangkan secara bertahap	Tidak adanya pusat pembinaan dan pengembangan olahraga pada jenjang pendidikan usia dini	Belum adanya pusat pembinaan dan pengembangan olahraga pada jenjang pendidikan usia dini
	Belum ada regulasi yang mengatur terkait apresiasi untuk atlet pelajar berprestasi	Tidak adanya penghargaan untuk atlet berprestasi khususnya pelajar Kota Magelang yang telah berprestasi pada kejuaraan tingkat provinsi, nasional maupun internasional	Belum adanya penghargaan untuk atlet berprestasi khususnya pelajar Kota Magelang yang telah berprestasi pada kejuaraan tingkat provinsi, nasional maupun internasional
	Belum ada standarisasi yang mengatur jaminan sosial bagi atlet yang mengalami cedera saat mengikuti pertandingan	Belum ada jaminan sosial bagi atlet yang mengalami cedera saat mengikuti pertandingan	Belum ada jaminan sosial bagi atlet yang mengalami cedera saat mengikuti pertandingan
	Belum adanya standarisasi harga yang diberlakukan	Hasil telaah permasalahan oleh OPD	Besaran honor wasit/juri dalam penyelenggaraan kejuaraan dirasa kurang dan belum sesuai dengan standar yang ada pada masing-masing cabang olahraga
Statistik	NIHIL		

Urusan	Akar Masalah	Data Dukung	Statement Permasalahan
Persandian	<ul style="list-style-type: none"> - Masih terdapat regulasi atau SOP yang belum dibuat - Infrastruktur khususnya ruang server belum memenuhi standar - Belum ada uji publik dan evaluasi secara berkala terhadap sistem keamanan informasi yang ada 	Tingkat kematangan Indeks KAMI tahun 2023 Kota Magelang berada pada I+ s/d III	Keamanan informasi masih belum memenuhi standar ISO 27001
Kebudayaan		Dari 51 benda cagar budaya, baru 12 yang ditetapkan melalui SK Walikota atau SK Gubernur	Masih banyak cagar budaya yang belum ditetapkan secara resmi.
Perpustakaan	Sarpras pendukung layanan pusaka keliling belum memadai	Persentase pemerataan layanan perpustakaan tahun 2024 sebesar 64,06%	Layanan perpustakaan belum merata
	Belum seluruh perpustakaan melaporkan data koleksi perpustakaan	Tahun 2024, rasio ketercukupan koleksi perpustakaan masih berada di angka 51,09%	Koleksi perpustakaan masih terbatas
	Masih banyaknya perpustakaan yang belum memenuhi standar sarpras dan tenaga perpustakaan	Persentase perpustakaan ber-SNP tahun 2024 sebesar 45,89%	Belum seluruh perpustakaan ber-SNP
	Masih banyak perpustakaan yang belum terakreditasi	Jumlah perpustakaan terakreditasi adalah 89, jumlah total perpustakaan 316	Belum seluruh perpustakaan terakreditasi
Kearsipan	Masih kurangnya jumlah SDM arsiparis	Jumlah arsiparis 21 orang untuk 28 OPD	Belum semua OPD memiliki arsiparis
	Pengelolaan arsip di OPD belum optimal	Nilai ASKI 80,85	Belum optimalnya pengelolaan arsip di OPD terutama penyusutan arsip
URUSAN PILIHAN			
Kelautan dan Perikanan	Karakter kota dengan wilayah dan daya dukung air yang terbatas menjadi hambatan dalam pengembangan urban fishery	Kinerja tahun 2023 dibandingkan target akhir RPJMD indikator persentase peningkatan produksi perikanan budidaya sebesar 60%	Belum optimalnya peningkatan produksi perikanan budidaya
Pariwisata	Tidak semua destinasi merupakan milik pemerintah kota magelang	Kinerja terhadap target akhir RPJMD, persentase destinasi pariwisata yang terkelola dengan baik di tahun 2024 sebesar 92,86%	Belum semua destinasi wisata terkelola dengan baik
	Belum optimalnya data pelaku ekraf dan pelaku usaha pariwisata	Realisasi persentase peningkatan pelaku ekonomi kreatif yang meningkat kapasitasnya tahun 2024 berada di angka 66,67%. Meskipun telah mencapai target tahunan maupun target akhir RPJMD, namun kinerjanya masih perlu terus dioptimalkan	Belum optimalnya pengembangan potensi ekraf dan pariwisata di Kota Magelang

Urusan	Akar Masalah	Data Dukung	Statement Permasalahan
Pertanian	Legalitas lahan terkait kepemilikan lahan JITUT dan adanya prioritas pembangunan	Realisasi tahun 2023 dibandingkan target akhir RPJMD indikator persentase prasarana pertanian menunjukkan angka 41,18%	Belum optimalnya ketersediaan dan pemeliharaan prasarana pertanian
	Rendahnya modal kapital masyarakat perkotaan pada umumnya dan para petani kota pada khususnya	Realisasi tahun 2023 dibandingkan target akhir RPJMD indikator persentase kelompok tani yang naik kelas baru sebesar 35,71%	Peningkatan kelompok tani yang naik kelas yang belum optimal
Perdagangan	Masih rendahnya kesadaran untuk mengurus perizinan	Persentase pelaku usaha yang memiliki izin usaha tahun 2024 sebesar 96,08	Belum seluruh pelaku usaha memiliki izin usaha
		Empat pasar di Kota Magelang belum ber-SNI	Belum optimalnya sarana distribusi perdagangan yang berada dalam kondisi baik
	Fluktuasi komoditas sektor pertanian dan peternakan	Dalam kurun waktu 2024, koefisien harga antarwaktu berada pada kisaran 1-8	Koefisien variasi harga antarwaktu yang fluktuatif dari tahun ke tahun
	Pasar internasional yang masih terbatas	Nilai Ekspor tahun 2024 US\$ 3.098.437. Jumlah pelaku usaha yang melakukan ekspor pada tahun 2024 baru 2 (dua) pelaku usaha dengan 2 (dua) komoditas yaitu plastik dan arang batok kelapa	Belum optimalnya nilai ekspor Kota Magelang
Perindustrian	Keterbatasan terhadap akses pasar. Keterbatasan permodalan.	Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah pada tahun 2024 sebesar 8,74%. Sudah mencapai target tahunan maupun target akhir RPJMD 2026 namun tetap perlu dioptimalkan	Pertambahan jumlah industri yang belum optimal
	Terdapat data yang belum lengkap dalam pengisian SIINas. Masih terdapat IKM yang belum memahami akses ke OSS Masih perlunya koordinasi intensif antara DPPKUM sebagai tim teknis, dan DPMPSTSP sebagai OPD yang bertugas melakukan penerbitan izin	Hasil telaah permasalahan oleh OPD	Belum optimalnya kualitas hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah IUI yang dikeluarkan oleh instansi terkait
	Rendahnya kesadaran pentingnya mengurus legalitas usaha IKM	Persentase jumlah IKM yang memiliki legalitas usaha di tahun 2024 sebesar 67,18%	Rendahnya IKM yang mengurus legalitas usaha
	Rendahnya jumlah IKM yang terdata dalam SIINAs	Hasil telaah permasalahan oleh OPD	Belum optimalnya ketersediaan informasi industri terkini dan lengkap

Urusan	Akar Masalah	Data Dukung	Statement Permasalahan
UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN			
Sekretariat Daerah	Masih diperlukan adanya harmonisasi regulasi, peningkatan kualitas regulasi, serta peningkatan kompetensi perancang peraturan perundang-undangan	Capaian Indeks Reformasi Hukum Tahun 2023 berada pada angka 77,57	Belum optimalnya Indeks Reformasi Birokrasi
	Masih terbatasnya diversifikasi produk yang ditawarkan BUMD. Masih terbatasnya pasar BUMD.	Return on Assets BUMD pada tahun 2023 sebesar 1,07; turun dari tahun 2022 yang sebesar 2,32	Belum optimalnya pengelolaan asset BUMD
	Pedoman evaluasi internal belum ditetapkan. Pemanfaatan pohon kinerja dalam perencanaan belum sepenuhnya dilakukan. Masih kurangnya penyediaan data time series dan kedalaman evaluasi capaian kinerja.	Nilai SAKIP tahun 2023 sebesar 72,12	Capaian nilai SAKIP yang masih bisa dioptimalkan
Sekretariat DPRD	Keterlambatan pengiriman draf Raperda Keterlambatan fasilitasi Biro Hukum Provinsi	Hasil telaah permasalahan oleh OPD	Belum semua rancangan peraturan daerah disahkan tepat waktu
Sekretariat DPRD	Keterlambatan dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pengusul dalam mengajukan rancangan perda, yang sering kali baru diajukan pada triwulan IV	Hasil telaah permasalahan oleh OPD	Keterlambatan pembahasan raperda
UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN			
Perencanaan	Definisi operasional indikator mengacu pada indikator, target, dan program yang tercantum di Renstra OPD dan RPJMD	Capaian Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah pada 3 tahun terakhir stagnan	Indikator kinerja pada Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah tidak dapat digunakan untuk membandingkan capaian antar tahun
Keuangan	Belum terpenuhinya proporsi anggaran infrastruktur. Rasio ketergantungan keuangan masih di atas 50%	IPKD 2022= 70,9872 2023= 68,0192 2024= 66,1126	Penurunan IPKD Kota Magelang
	Masih adanya tanah yang bermasalah dengan pihak lain	Rasio pensertifikatan tanah Pemkot tahun 2023 sebesar 97,42%	Masih adanya tanah Pemerintah Kota yang belum bersertifikat
	Masih kurangnya pengelolaan potensi PAD	Proporsi PAD terhadap total pendapatan sebesar 31%	Keuangan Kota Magelang masih tergantung pembiayaan dari Pusat

Urusan	Akar Masalah	Data Dukung	Statement Permasalahan
Kepegawaian	<p>Masih terdapat pegawai yang belum memahami penggunaan aplikasi kinerja, terutama dalam penyusunan sasaran kinerja.</p> <p>Belum ada pedoman teknis dari instansi Pembina, khususnya terkait tim penilai angka kredit terhadap jabatan fungsional hasil penyetaraan.</p> <p>Pengelolaan kinerja pegawai belum sepenuhnya memenuhi SE Menpan No. 3/2023 tentang tata cara penetapan predikat kinerja pegawai ASN.</p> <p>Sistem informasi kepegawaian belum sepenuhnya terintegrasi.</p> <p>Belum semua OPD menginput data di sistem informasi.</p>	<p>Terdapat 5 komponen yang nilainya belum optimal, yaitu:</p> <p>Manajemen kinerja</p> <p>Pengembangan karier</p> <p>Promosi dan mutasi</p> <p>Sistem informasi</p> <p>Perlindungan dan pelayanan</p>	Capaian Indeks Sistem Merit dan Nilai Sistem Merit Kota Magelang belum optimal.
Pendidikan dan Pelatihan	<p>Masih ada Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dan Pejabat Administrator/Pengawas yang belum mengikuti pelatihan kepemimpinan.</p> <p>Penundaan penyelenggaraan diklat orientasi PPPK yang dilantik pada tahun 2024.</p> <p>Peningkatan jumlah ASN yang tidak diimbangi dengan peningkatan jumlah pegawai yang mengikuti pengembangan kompetensi.</p>	<p>Persentase ASN yang mengikuti pengembangan kompetensi sesuai dengan jabatannya pada tahun 2024 sebesar 42,92%; menurun dari tahun 2023 yang sebesar 48,70%.</p>	Penurunan persentase ASN yang mengikuti pengembangan kompetensi sesuai dengan jabatannya
Penelitian dan Pengembangan	Belum seluruh hasil penelitian dan pengembangan dijadikan dasar pengambilakan kebijakan	<p>Persentase pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan di tahun 2023 baru 46,30% dan persentase pemanfaatan hasil inovasi baru 27,78%</p>	Pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan serta inovasi belum optimal
UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN			
	Keterbatasan jumlah serta kompetensi SDM APIP dalam menjalankan pengawasan dan pengendalian internal	Realisasi maturitas SPIP tahun 2024 hanya 3,290 dari target 3,745 (target akhir tahun 4,000).	Maturitas SPIP Kota Magelang masih berada pada level 3
	<p>Pengawasan internal masih menghadapi kendala dalam efektivitas penerapan kebijakan.</p> <p>Masih terdapat kelemahan dalam implementasi sistem pengendalian berbasis risiko.</p>	Hasil telaah permasalahan oleh OPD	Implementasi kebijakan pengendalian internal belum optimal

Urusan	Akar Masalah	Data Dukung	Statement Permasalahan
	Belum semua OPD memiliki pemahaman yang sama terkait implementasi SPIP Beberapa kebijakan pengendalian internal belum diintegrasikan secara menyeluruh.	Hasil telaah permasalahan oleh OPD	Kurangnya koordinasi dan sinergi antar-OPD dalam penerapan SPIP
UNSUR PEMERINTAHAN UMUM			
	Pelaksanaan kegiatan dilakukan secara bertahap sampai tahun 2026	Realiasi tahun 2023 dibandingkan target akhir RPJMD indikator persentase pembinaan wawasan kebangsaan baru di angka 22,53%	Belum optimalnya kinerja pembinaan wawasan kebangsaan
	Pelaksanaan kegiatan dilakukan secara bertahap sampai tahun 2026	Realisasi tahun 2023 dibandingkan target akhir RPJMD indikator persentase organisasi kemasyarakatan yang diberdayakan baru 20,80%	Organisasi kemasyarakatan yang diberdayakan belum maksimal
	Pelaksanaan kegiatan dilakukan secara bertahap sampai tahun 2026	Realiasi tahun 2023 dibandingkan target akhir RPJMD indikator persentase pembinaan ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya di angka 29,35%	Pembinaan ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya yang perlu ditingkatkan
	Tidak ada agenda politik pada tahun 2023. Target diupayakan tercapai secara optimum pada tahun dimana pemilihan umum berlangsung	Realisasi tahun 2023 dibandingkan target akhir RPJMD indikator persentase penduduk usia pemilih pemula yang berpartisipasi dalam agenda politik baru sebesar 15,08%	Penduduk usia pemilih pemula yang berpartisipasi dalam agenda politik yang masih perlu ditingkatkan

Sumber: Tim Penyusun, 2025

2.3.3 Permasalahan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)

Dalam penyusunan RKPD Kota Magelang Tahun 2025, data Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) yang digunakan berdasarkan metadata indikator edisi II tahun 2023 dimana terdapat beberapa perubahan pada level indikator dibandingkan edisi sebelumnya dengan tetap mengacu pada 17 (tujuh belas) kesepakatan TPB. Dari 17 (tujuh) belas TPB tersebut, terdapat 2 (dua) TPB yang tidak relevan di Kota Magelang mengingat karakter kota, juga kondisi alam dan geografisnya. Tujuan TPB yang tidak digunakan yaitu Tujuan 14 TPB (Ekosistem Lautan) dan Tujuan 15 TPB (Ekosistem Daratan)

Tujuan 1 TPB: Tanpa Kemiskinan

Tantangan utama Kota Magelang dalam mewujudkan Tujuan 1 TPB: Tanpa Kemiskinan yaitu untuk terus menekan persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan juga mendorong inklusivitas bagi pekerja formal maupun informal sehingga dapat mengoptimalkan proporsi peserta program jaminan sosial bidang ketenagakerjaan.

Tujuan 2 TPB: Tanpa Kelaparan

Dalam mencapai Tujuan 2 T: Tanpa Kelaparan, beberapa hal yang masih perlu diselesaikan Kota Magelang yaitu untuk menjamin ketahanan pangan bagi masyarakat dengan meminimalkan prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan juga mendorong konsumsi pangan yang seimbang yang digambarkan melalui skor Pola Pangan Harapan (PPH). Selain itu, stunting juga menjadi salah satu permasalahan utama Kota Magelang terlebih melihat prevalensi stunting di tahun 2023 yang meningkat dibandingkan tahun 2022.

Tujuan 3 TPB: Kehidupan Sehat dan Sejahtera

Permasalahan yang dihadapi Kota Magelang dalam mewujudkan Kehidupan Sehat dan Sejahtera sebagaimana Tujuan 3 TPB salah satunya yaitu untuk menekan penyakit menular maupun tidak menular seperti tuberculosis dan hepatitis dimana insiden pada tahun 2023 sedikit mengalami peningkatan daripada 2022. Selain itu, terkait dengan penyakit sebagai dampak dari gaya hidup yang tidak sehat yaitu obesitas yang ditunjukkan oleh prevalensi obesitas pada penduduk umur ≥ 18 tahun juga mengalami sedikit peningkatan pada tahun 2023. Kinerja positif dari AKI, AKBa, AKB, AKN, cakupan jaminan kesehatan nasional pada tahun 2023 di Kota Magelang juga perlu terus dipertahankan juga dengan didukung oleh perluasan proporsi target popilais yang memperoleh vaksin program nasional.

Tujuan 4 TPB: Pendidikan Berkualitas

Secara umum, kinerja indikator indikator TPB tahun 2023 yang mendukung ketercapaian pendidikan berkualitas di Kota Magelang mengalami perbaikan. Beberapa pekerjaan rumah yang masih perlu diselesaikan seperti peningkatan kualitas guru agar memenuhi keualifikasi sesuai standar nasional terlebih untuk jenjang pendidikan PAUD juga upaya untuk mengangkat capaian APK Perguruan Tinggi yang mengalami penurunan di tahun 2023. Tren positif untuk penegntasan anak tidak sekolah, perbaikan kemampuan literasi dan numerasi, juga APM/APK jenjang pada seluruh jenjang pendidikan perlu untuk dijaga dan dioptimalkan.

Tujuan 5 TPB: Kesenjangan Gender

Kesetaraan gender di Kota Magelang masih perlu untuk terus dioptimalkan. Terlebih ketika melihat kinerja indikator proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan yang mengalami kekerasan baik fisik, seksual, dan/atau emosional oleh pasangan maupun mantan pasangan dalam 12 (dua belas) bulan terakhir, Meskipun kinerjanya sedikit mengalami perbaikan dibandingkan tahun 2022, tetapi dengan masih adanya kekerasan tersebut menunjukkan bahwa terdapat ketidaksetaraan antara perempuan dan laki-laki. Terlebih ketika melihat spektrum penyebab dari kekerasan yang masih sangat luas, Kota Magelang perlu menyiapkan wadah yang aman dan responsive bagi korban juga mendorong terbentuknya kesadaran yang nyata bagi masyarakat.

Tujuan 6 TPB: Air Bersih dan Sanitasi Layak

Melihat indikator-indikator yang mendukung Tujuan 6 TPB: Air Bersih dan Sanitasi Layak, kinerja Kota Magelang tahun 2023 sudah menunjukkan perbaikan dibandingkan tahun 2022. Kinerja positif persentase rumah tangga yang menggunakan layanan air minum yang dikelola secara aman dan Indeks Kualitas Air (IKA) perlu untuk dijaga dan diakselerasikan,

Tujuan 7 TPB: Menjamin Akses Energi yang Terjangkau, Andal, Berkelanjutan dan Modern untuk Semua

Rasio elektrifikasi Kota Magelang telah mencapai 100% sehingga pada dasarnya dapat diartikan bahwa akses energi terutama dalam hal listrik tidak menjadi masalah di Kota Magelang. Tantangannya adalah ketika ingin mewujudkan *green energy*, Kota Magelang sampai tahun 2023 belum memiliki infrastruktur yang mendukung.

Tujuan 8 TPB: Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, Kesempatan Kerja yang Produktif dan Menyeluruh, serta Pekerjaan yang Layak untuk Semua

Perwujudan tujuan 8 TPB di Kota Magelang tahun 2023 secara umum menunjukkan kinerja yang positif. Meskipun demikian, pariwisata sebagai salah satu sektor ekonomi yang potensial kinerjanya belum optimal digambarkan melalui jumlah wisatawan nusantara dan mancanegara yang menurun dari tahun sebelumnya. Hal

ini perlu menjadi perhatian mengingat Kota Magelang seyogyanya dapat mengusahakan *sped effect* dari Kawasan Strategis Pariwisata Nasional Borobudur. Selain itu, salah satu isu yang perlu diperhatikan terkait dengan tujuan 8 TPB yaitu tren *gig economy* sebagai salah satu eksternalitas dari terus berkembangnya teknologi. Oleh karena itu, salah satu pekerjaan rumah Kota Magelang yaitu merangkul berbagai pelaku sektor informal terlebih melihat proporsi lapangan kerja informal mengalami peningkatan dari tahun 2022 ke 2023.

Tujuan 9 TPB: Membangun Infrastruktur yang Tangguh, Meningkatkan Industri Inklusif dan Berkelanjutan, serta Mendorong Inovasi

Capaian indikator-indikator yang mendukung Tujuan 9 TPB pada tahun 2023 menunjukkan realisasi yang positif. Catatan yang didapatkan ketika membandingkan realisasi tahun 2022-2023 yaitu bahwa sektor industri manufaktur di Kota Magelang menunjukkan sedikit penguatan diindikasikan melalui proporsi nilai tambah terhadap PDB dan per kapita, laju pertumbuhan, dan proporsi tenaga kerja pada sektor tersebut.

Tujuan 10 TPB: Mengurangi Kesenjangan Intra dan Antar-Negara

Permasalahan yang dihadapi Kota Magelang terkait tujuan 10 TPB yaitu kesenjangan berada pada level sedang. Meskipun demikian, jika dilihat perbaikan kinerja dari tahun 2022-2023, tingkat kesenjangan sedikit menurun sebesar 0,01 poin. Oleh karena itu, pemerataan pendapatan salah satunya melalui peningkatan kapasitas masyarakat miskin dan rentan miskin perlu untuk digalakkan.

Tujuan 11 TPB: Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan

Highlight permasalahan untuk mewujudkan Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan di Kota Magelang yaitu ketersediaan hunian yang layak dan terjangkau, keberadaan transportasi publik yang nyaman, serta proporsi ruang terbuka perkotaan yang ideal. Dengan luas wilayahnya yang relatif kecil dan sebagian besar telah terbangun, penyediaan hunian layak bagi seluruh masyarakatnya dan pemenuhan ruang terbuka hijau yang ideal menjadi sebuah tantangan yang tidak mudah untuk diselesaikan. Selain itu, ketersediaan transportasi publik yang nyaman juga belum dapat diwujudkan oleh Kota Magelang. Kerjasama yang baik antarstakeholders dan komitmen jangka panjang perlu diupayakan untuk mewujudkan transportasi publik yang nyaman di Kota Magelang

Tujuan 12 TPB: Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab

Permasalahan sampah menjadi hambatan yang ditemui Kota Magelang dalam mewujudkan Tujuan 12 TPB. Kondisi tersebut digambarkan melalui jumlah timbulan sampah yang didaur ulang tahun 2023 menurun cukup signifikan dibandingkan tahun 2022. Konsekuensi dari kondisi tersebut adalah meningkatnya jumlah sampah yang dibuang di TPA dimana dalam jangka panjang akan berdampak pada menurunnya kualitas lingkungan hidup. Oleh karena itu, pengurangan sampah melalui kegiatan daur ulang perlu untuk dioptimalkan terlebih untuk mendukung tumbuhnya *circular economy* di Kota Magelang.

Tujuan 13 TPB: Penanganan Perubahan Iklim

Belum adanya data di Kota Magelang menjadi permasalahan dasar sehingga belum dapat diketahui bagaimana kondisi penanganan perubahan iklim di Kota Magelang sesuai dengan kebutuhan indikator TPB.

Tujuan 16 TPB: Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh

Dari berbagai indikator yang mendukung tujuan 16 TPB, capaian yang pada tahun 2023 mengalami penurunan dibandingkan tahun 2022 adalah proporsi penduduk yang merasa aman berjalan sendirian di area tempat tinggalnya. Melalui data tersebut perlu menjadi perhatian bagaimana peran pemerintah Kota Magelang mampu mewujudkan lingkungan yang aman melalui penataan kawasan, penyediaan prasarana, juga menjada kondusivitas sosial.

Tujuan 17 TPB: Memperkuat Sarana Pelaksanaan dan Merevitalisasi Kemitraan Global untuk Pembangunan Berkelanjutan

Dalam rangka mencapai tujuan 17 TPB, meskipun relatif mengalami perbaikan, namun masih terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi Kota Magelang. Pertama yaitu terkait dengan kualitas penyediaan data yang digunakan untuk mendukung pembangunan yang belum optimal diindikasikan dengan persentase K/L/D/I yang melaksanakan rekomendasi statistik di tahun 2023 mengalami penurunan dibandingkan tahun 2022. Selain itu, terkait dengan kemampuan finansial daerah yang diperlihatkan melalui pendapatan asli daerah, Kota Magelang masih perlu mengupayakan agar proporsi PAD melalui berbagai komponennya dapat terus bertambah dan mampu lebih besar berkontribusi untuk pembangunan.

2.4 ISU STRATEGIS

Tahun 2026 merupakan masa transisi kepemimpinan juga menjadi tahun akhir dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) periode 2021-2026. Sebagaimana Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Magelang Tahun 2021-2026, arah kebijakan pembangunan tahun 2026 yaitu “Perwujudan Kota Magelang yang Semakin Maju, Sehat, dan Bahagia) dengan 3 (tiga) fokus pembangunan yaitu:

- a. Perwujudan kesejahteraan masyarakat
- b. Perwujudan keberdayaan masyarakat
- c. Perwujudan ruang kota layak huni.

Fokus pembangunan yang diusung pada tahun 2024 mengakomodasi upaya penyelesaian terhadap 7 (tujuh) isu strategis yang dihadapi Kota Magelang pada akhir periode RPJMD 2021-2026, yaitu kemiskinan; kualitas sumber daya manusia; sarana prasarana perkotaan yang berkelanjutan; kualitas lingkungan hidup; ketahanan daerah (ketahanan bencana dan ketahanan pangan); daya saing ekonomi; dan reformasi birokrasi.

2.5 INOVASI DAERAH

Inovasi daerah merupakan upaya sistematis yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk menciptakan, mengembangkan, dan menerapkan ide-ide baru guna meningkatkan kualitas pelayanan publik, efisiensi pemerintahan, serta daya saing ekonomi dan sosial. Inovasi ini mencakup berbagai bidang, seperti teknologi, kebijakan publik, tata kelola pemerintahan, serta pembangunan ekonomi dan sosial. Dengan menerapkan inovasi, pemerintah daerah dapat menyederhanakan proses birokrasi, meningkatkan transparansi, dan mempercepat pelayanan kepada masyarakat. Inovasi daerah juga dapat menciptakan peluang usaha baru, menarik investasi, serta meningkatkan daya saing sektor industri dan ekonomi kreatif. Inovasi dalam bidang pelayanan publik dan sosial dapat meningkatkan akses masyarakat terhadap pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur yang lebih baik. Penerapan teknologi dalam pemerintahan dan layanan publik dapat memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam mengakses informasi dan berinteraksi dengan pemerintah. Dengan inovasi, pemerintah daerah dapat lebih mudah menjalin kerja sama dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk sektor swasta, akademisi, dan masyarakat sipil.

Berdasarkan hasil pengukuran Indeks Inovasi Daerah oleh Kementerian Dalam Negeri, nilai Indeks Inovasi Daerah Kota Magelang dari tahun 2021 hingga 2024 sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2.345 Indeks Inovasi Daerah Kota Magelang, 2021-2024

Tahun	Nilai Indeks Inovasi Daerah	Kategori	Peringkat
2021	53,26	inovatif	33
2022	53,45	inovatif	42
2023	59,28	inovatif	27
2024	71, 87	Sangat inovatif	14

Sumber: IDSD Kota Magelang, 2025

Indeks Inovasi Daerah merupakan indikator penting dalam menilai kapasitas dan efektivitas pemerintah daerah dalam mendorong inovasi dalam berbagai sektor. Kota Magelang menunjukkan tren peningkatan dalam indeks ini, dari 53,26 pada tahun 2021 (peringkat 33) menjadi 71,87 pada tahun 2024 (peringkat 14). Tren indeks inovasi Kota Magelang menunjukkan peningkatan signifikan, terutama dari 2023 ke 2024. Peningkatan ini mencerminkan adanya upaya yang signifikan dalam penguatan ekosistem inovasi, baik dari aspek kebijakan, sumber daya manusia, maupun pemanfaatan teknologi.

Pada tahun 2023, nilai indeks inovasi Kota Magelang mengalami kenaikan yang cukup baik yaitu sebesar 59,28 (peringkat 27), masuk dalam kategori kota inovatif. Hasil penginputan data inovasi daerah Kota Magelang Tahun 2023 di aplikasi IID Kemendagri, dari 97 inovasi yang diusulkan oleh unit kerja, terpilih 44 inovasi yang dikirim untuk mengikuti Lomba Inovation Government Award tahun 2023, dengan perincian kematangan antara lain: kematangan lebih besar atau sama dengan 100 sejumlah 25 inovasi dan kematangan antara 84 - 99 sebanyak 19 inovasi.

Pada tahun 2024 kenaikan nilai indeks inovasi daerah Kota Magelang kembali mengalami kenaikan yaitu sebesar 71,87 naik menjadi peringkat 14 dan masuk dalam kategori “Kota Sangat Inovatif”. Jumlah inovasi yang dilaporkan di Tahun 2024 sejumlah 97 inovasi dengan nilai kematangan diatas 93. Peningkatan dalam jumlah inovasi yang dilaporkan dengan tetap mempertahankan peningkatan nilai kematangan inovasi menjadi faktor yang mendorong nilai indeks inovasi daerah Kota Magelang di tahun 2024.

Meskipun mengalami peningkatan yang cukup signifikan, Kota Magelang masih memiliki peluang untuk bisa lebih mengoptimalkan inovasi di berbagai bidang guna mencapai peringkat yang lebih tinggi dan memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat. Beberapa tantangan yang masih dihadapi meliputi keterbatasan sumber daya, kesiapan teknologi, dan kolaborasi antar pemangku kepentingan. Strategi yang akan dilakukan untuk lebih mengoptimalkan nilai indeks inovasi daerah Kota Magelang antara lain:

1. Berkolaborasi dengan Pentahelix terutama Perguruan Tinggi yaitu dengan melibatkan mahasiswa magang untuk pendampingan inovasi daerah Kota Magelang.
2. Mengeksplor jumlah inovator yang ada di pemerintah Kota Magelang terutama di sekolah SD dan SMP melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Magelang.
3. Menjadi bagian dari nilai capaian kinerja OPD dalam aspek inovasi.
4. Melakukan desk setiap periode sesuai dengan target inovasi.
5. Memperkuat regulasi inovasi daerah Kota Magelang.

Kota Magelang telah menunjukkan komitmen yang kuat dalam mendorong inovasi daerah sebagai upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik dan pembangunan berkelanjutan. Beberapa inisiatif program dan kegiatan yang mendukung penciptaan ekosistem inovasi dan budaya inovasi di kalangan masyarakat, Aparatur Sipil Negara, Organisasi Perangkat Daerah dan BUMD Kota Magelang antara lain:

1. Penyelenggaraan Lomba Kreativitas dan Inovasi (Krenova) Masyarakat Kota Magelang. Pemenang lomba Krenova mendapatkan fasilitas berupa uang pembinaan, Sertifikat Hak Kekayaan Intelektual, dan fasilitasi pengembangan penerapan inovasi yang ditemukan.
2. Mendampingi inovator Kota Magelang untuk ikut serta dalam Lomba Kreativitas dan Inovasi (Krenova) Tingkat Provinsi Jawa Tengah.
3. Tahun 2023, sejumlah 3 orang inovator dari Kota Magelang masuk finalis dalam Lomba Krenova Tingkat Provinsi Jawa Tengah. 1 orang lolos masuk sebagai pemenang harapan di Tingkat Provinsi Jawa Tengah dan 2 orang mendapatkan pendampingan selama 1 tahun dalam kegiatan inkubator bisnis yang diselenggarakan oleh BRIDA Provinsi Jawa Tengah bekerja sama dengan.
4. Apresiasi Budaya Iptek (ABI). Lomba ini diikuti oleh seluruh pelajar SMP sederajat se-Kota Magelang dan pemenangnya akan mendapatkan fasilitas berupa hadiah uang pembinaan dan piagam Walikota Magelang. Lomba ini diadakan untuk menstimulus para siswa dalam memajukan bidang teknologi.
5. Penyelenggaraan Lomba Idaman (Inovasi Daerah Kota Magelang). Lomba ini diikuti oleh semua Organisasi Perangkat daerah dan BUMD di Kota Magelang.
6. Magelang Innovation Award (MIA) 2023. Acara ini bertujuan untuk mengapresiasi para inovator yang berkontribusi dalam menciptakan ekosistem inovasi di Kota Magelang.

Dengan penguatan ekosistem inovasi yang lebih inklusif, berkelanjutan dan berdaya saing tinggi melalui kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, akademisi, dan masyarakat, peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam inovasi dan teknologi; optimalisasi digitalisasi layanan publik; serta penerapan kebijakan yang mendukung inovasi di tingkat lokal, Kota Magelang berpotensi untuk menjadi salah satu kota inovatif terdepan di Indonesia.

2.6 PENGHARGAAN YANG DITERIMA KOTA MAGELANG

Konsisten dengan tahun sebelum-sebelumnya, pada tahun 2024 Kota Magelang mendapatkan berbagai macam penghargaan baik dalam level provinsi, nasional, maupun internasional baik yang diterima oleh pemerintah kota, OPD, maupun masyarakat (perseorangan/kelompok masyarakat).

Pada tahun 2024, terdapat 18 penghargaan internasional dalam bidang sains & teknologi serta olahraga yang seluruhnya diterima oleh perseorangan Kota Magelang. Penghargaan tersebut berasal dari bidang sains & teknologi serta olahraga. Secara lebih spesifik, bidang sains & teknologi diwakili dari ajang kompetisi olimpiade matematika; sedangkan cabang olahraga yang mampu bersaing di level internasional berasal dari cabang bela diri (kungfu, pencak silat, karate), tenis, maupun perlombaan menari (*dance competition*).

Tabel 2.346 Penghargaan yang Diterima Kota Magelang Tahun 2020-2024

Tahun	Jumlah Penghargaan		
	Provinsi	Nasional	Internasional
2020	19	27	-
2021	25	24	2
2022	185	75	1
2023	226	243	40
2024	170	105	18

Sumber: LKPJ Kota Magelang, 2025

Untuk penghargaan level nasional, tercatat 105 penghargaan yang diperoleh pemerintah kota, OPD, maupun masyarakat (kelompok masyarakat/perseorangan) yang berasal dari 11 (sebelas) bidang penghargaan yaitu lingkungan hidup, kesehatan, riset dan inovasi, kependudukan dan catatan sipil, penyelenggaraan pelayanan publik, penyelenggaraan statistic sectoral, kepegawaian, perpustakaan, perhubungan, sains & teknologi, juga olahraga. Dari sebelas bidang penghargaan tersebut, bidang olahraga (berkontribusi 40%) serta sains & teknologi (kontribusi 31,43%) berperan sebagai 2 (dua) kontributor terbesar dalam penerimaan penghargaan level nasional yang diterima Kota Magelang.

Selanjutnya dalam konteks provinsi, 170 penghargaan berasal dari 9 (sembilan) bidang yaitu kawasan permukiman, pengawasan, kesehatan, pariwisata, perpustakaan, perhubungan, sains & teknologi, keagamaan, juga olahraga yang diterima pemerintah kota, OPD, maupun masyarakat (kelompok masyarakat/perorangan). Sama halnya dengan distribusi penghargaan pada level nasional; penghargaan pada level provinsi juga dominan berasal dari bidang olahraga (71,18%) serta sains & teknologi (14,12%).

Dari berbagai penghargaan yang diterima tersebut, beberapa pencapaian strategis yang diterima Kota Magelang pada tahun 2024 seperti Kota/Kabupaten dengan Peningkatan Kinerja Keberlanjutan Terbaik dalam penghargaan UI Green City Metric 2024, Kota Sangat Inovatif dalam Piagam Penghargaan Innovative Government Award (IGA) 2024, Bhumandala Rajata (Perak) Kategori Kota dari Badan Informasi Geospasial (BIG), dan kenaikan tertinggi Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tingkat Provinsi Jawa Tengah.

Secara lebih rinci, penghargaan yang diterima Kota Magelang Tahun 2024 ditampilkan dalam tabel berikut ini:

Tabel 2.347 Penghargaan yang Diterima Kota Magelang Tahun 2024

NO	BIDANG		KATEGORI KEJUARAAN/LOMBA	HASIL	ATAS NAMA
TINGKAT INTERNASIONAL					
1	Sains dan Teknologi	1	Kejuaraan Thailand International Mathematical Olympiad (TIMO) di Online	Juara 3	Bridgette Liony La Damusa Krisifu, SMP Negeri 1 Magelang
		2	Kejuaraan Hongkong International Mathematical Olympiad (HKIMO) di Online	Juara 3	Bridgette Liony La Damusa Krisifu, SMP Negeri 1 Magelang
2	Olahraga	1	Kejuaraan The 1 "INDONESIA INTERNATIONAL KUNGFU CHAMPIONSHIP" (INA IKC) 2024 di Kuta Bali Indonesia	Bronze Medalist Wing Chun-Mok Yan Jong Group C 1 Male	Akbar Ridho Hartono
		2	Kejuaraan The 1 "INDONESIA INTERNATIONAL KUNGFU CHAMPIONSHIP" (INA IKC) 2024 di Kuta Bali Indonesia	Bronze Medalist Wing Chun-Siu Nim Tau Group C1 Male	Akbar Ridho Hartono
		3	Kejuaraan The 1 "INDONESIA INTERNATIONAL KUNGFU CHAMPIONSHIP" (INA IKC) 2024 di Kuta Bali Indonesia	Bronze Medalist Wing Chun-Bart Jaam Dao Group C1 Male	Akbar Ridho Hartono
		4	Kejuaraan The 1 "INDONESIA INTERNATIONAL KUNGFU CHAMPIONSHIP" (INA IKC) 2024 di Kuta Bali Indonesia	Bronze Medalist Wing Chun-Cam Kiu Group C 1 Male	Akbar Ridho Hartono
		5	Kejuaraan The 1 " INDONESIA INTERNATIONAL KUNGFU CHAMPIONSHIP (INA IKC) 2024 di Kuta Bali Indonesia	Bronze Medalist Taijiquan Group B Female	Anggita Wening Maheswari
		6	Kejuaraan The 1 " INDONESIA INTERNATIONAL KUNGFU CHAMPIONSHIP (INA IKC) 2024 di Kuta Bali Indonesia	Bronze Medalist Taijijian Group B Female	Anggita Wening Maheswari
		7	Kejuaraan REKTOR CUP X UIN WALISONGO SEMARANG INTERNATIONAL KARATE OPEN CHAMPIONSHIP 2024 Di GOR Jatidiri Semarang	Juara 1 Kategori Female Kumite + 35 Kg Junior High School	Gesha Muraya
		8	Kejuaraan The 1 " INDONESIA INTERNATIONAL KUNGFU CHAMPIONSHIP (INA IKC) 2024 di Kuta Bali Indonesia	Silver Medalist Nangun Group C Female	Putri Ayu
		9	Kejuaraan The 1 " INDONESIA INTERNATIONAL KUNGFU CHAMPIONSHIP (INA IKC) 2024 di Kuta Bali Indonesia	Silver Medalist Nanquan Group C Female	Putri Ayu
		10	Kejuaraan The 1 " INDONESIA INTERNATIONAL KUNGFU CHAMPIONSHIP (INA IKC) 2024 di Kuta Bali Indonesia	Bronze Medalist Nandao Group C Female	Putri Ayu
		11	Kejuaraan "INTERNATIONAL INDONESIA STUDENT OPEN PENCAK SILAT CHAMPIONSHIP 2024" di Jakarta	Juara 3-Tunggal Pra Remaja Putri Pool D/Prestasi	Aqila Reba Mawari
		12	Kejuaraan "INTERNATIONAL INDONESIA STUDENT OPEN PENCAK SILAT CHAMPIONSHIP 2024" di Jakarta	Juara 3-Tunggal Pra Remaja Putri Pool H/Prestasi	Aqila Reba Mawari
		13	Kejuaraan INTERNATIONAL KARATE CHAMPIONSHIP YOGYAKARTA OPEN TOURNAMENT IV "KEMENPORA RI CUP"	Juara I Kata Beregu Kadet Putra	Alvino Herta Syahputra
		14	Kejuaraan PAN AMERICAN CHAMPIONSHIP OF NATIONS 2024 di Ibaque Amerika	Juara 4	Nafeeza Lamarch Dreineed Nadieshak
		15	Kejuaraan Tennis Lapangan di Penang Malaysia	Juara 3 Bronze Medal Single dan Bronze Double	M. Ammar Althaaf Badruzzaman
		16	Kejuaraan MDS International Dance Open Championship 2024	Juara 1	Feriska Vionna
TINGKAT NASIONAL					
1	Lingkungan Hidup	1	Penghargaan Adipura 2023	Kategori Kota Sedang	Kota Magelang
		2	Penghargaan sebagai Sekolah Adiwiyata Mandiri 2024	Adiwiyata Mandiri	SMP Negeri 2 Magelang

NO	BIDANG	KATEGORI KEJUARAAN/LOMBA		HASIL	ATAS NAMA
		3	Penghargaan UI Green City Metric 2024	Kategori Kota Peningkatan Berkelanjutan Terbaik	Kota Magelang
		4	Penghargaan Program Kampung Iklim	Kategori Utama	RW 14 Kelurahan Rejowinangun Utara
		5	Penghargaan Program Kampung Iklim	Kategori Utama	RW 09 Kelurahan Jurangombo Selatan
		6	Penghargaan Program Kampung Iklim	Kategori Madya	RW 09 Kelurahan Rejowinangun Selatan
		7	Penghargaan Program Kampung Iklim	Kategori Madya	RW 03 Kelurahan Jurangombo Utara
		8	Penghargaan Program Kampung Iklim	Kategori Madya	RW 03 Kelurahan Tidar Utara
		9	Penghargaan Program Kampung Iklim	Kategori Madya	RW 02 Kelurahan Kramat Utara
		10	Penghargaan Program Kampung Iklim	Kategori Madya	RW 06 Kelurahan Tidar Utara
		11	Penghargaan Program Kampung Iklim	Kategori Madya	RW 08 Kelurahan Cacaban
2	Kesehatan	1	Sertifikat Penghargaan Atas keberhasilan mencapai target Non-Polio AFP (NPAFP) Rate ≥ 3 per 100.000 penduduk < 15 tahun dan Discarded (bukan campak-bukan rubela) Rate ≥ 2 per 100.000 penduduk tahun 2023		Kota Magelang
		2	Sertifikat Penghargaan Atas keberhasilan mencapai target Non-Polio AFP (NPAFP) Rate ≥ 2 per 100.000 penduduk < 15 tahun pada tahun 2022		Kota Magelang
3	Riset dan Inovasi	1	Piagam Penghargaan Innovative Government Award (IGA) 2024 di Surabaya	Kota Sangat Inovatif	Kota Magelang
4	Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1	Piagam Penghargaan Dukcapil Prima Award Tahun 2024	Kategori Kota Dengan Jumlah Penduduk Kecil " Perekaman KTP-EI dan Identitas Kependudukan Digital Tertinggi (PIKD Award)	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Magelang
5	Penyelenggaraan Pelayanan Publik	1	Piagam Penghargaan atas Inovasi SIBULAN (Aksi Ibu Pulang Bawa Akta Kelahiran) sebagai Top Inovasi Pelayanan Publik Kelompok Replikasi Tahun 2024	Inovasi SIBULAN (Aksi Ibu Pulang Bawa Akta Kelahiran)	Pemerintah Kota Magelang
		2	Piagam Penghargaan Penganugrahan Predikat Penilaian Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Tahun 2024 dari Ombudsman Republik Indonesia	Kualitas tertinggi , Zona Hijau dengan Kepatuhan 99,65	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Magelang
		3	Piagam Penghargaan Penilaian Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Tahun 2024	Kualitas tertinggi , Zona Hijau dengan Kepatuhan 99,61	Dinas Sosial Kota Magelang
		4	Piagam Penghargaan Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik pada Lingkup Pemerintah Daerah Tahun 2024	Peringkat 12 Tingkat Kota	Dinas Sosial Kota Magelang
		5	Piagam Penghargaan sebagai penerima Penghargaan Pasar Tertib Ukur Tahun 2023		Pasar Kebonpolo Kota Magelang
		6	Piagam Penghargaan sebagai penerima Penghargaan Pasar Tertib Ukur Tahun 2023		Pasar Cacaban Kota Magelang
6	Penyelenggaraan Statistik Sektor	1	Piagam Penghargaan Atas kontribusinya dalam Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoralsehingga meraih predikat Baik dan memperoleh Anugerah Anindhita Wistara Data Tahun 2024 dari Badan Pusat Statistik Republik Indonesia	Peringkat I Nasional Kategori Pemerintah Kota	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Magelang

NO	BIDANG	KATEGORI KEJUARAAN/LOMBA		HASIL	ATAS NAMA
7	Kepegawaian	1	Sertifikat atas Prestasi Pengakuan Standar Kelayakan Penyelenggara Penilaian Kompetensi ASN dari BKN	Kategori B	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pemerintah Kota Magelang
		2	Piagam Penghargaan atas Prestasinya dalam Penetapan NP Kenaikan Pangkat tercepat dan Responsif dari Kantor Regional 1 BKN Yogyakarta		Pemerintah Kota Magelang
		3	Piagam Penghargaan atas Prestasinya dalam Penetapan Surat Penggunaan Gelar tervalid dan Akuntabel dari Kantor Regional I BKN Yogyakarta		Pemerintah Kota Magelang
		4	Piagam Penghargaan atas Prestasinya dalam Pengusulan Perincian Kebutuhan Pegawai Tahun 2024 dari Kantor Regional I BKN Yogyakarta		Pemerintah Kota Magelang
8	Perpustakaan	1	Piagam Penghargaan Finalis Pemilihan Pustakawan Berprestasi Terbaik Tingkat Nasional 2024	Finalis	Heny Hidayati, S.TP. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Magelang
		2	Piagam Penghargaan sebagai Pemenang Lomba Tantangan Vidio Singkat Instagram (Reels Challenge)	Juara 1	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Magelang
		3	PIC Kajian Perpustakaan Daerah Terbaik di Perpustakaan Nasional RI	10 Terbaik	Heny Hidayati, S.TP. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Magelang
9	Perhubungan	1	Penghargaan Piala Wahana Tata Nugraha 2024	10 besar kategori Kota Sedang	Pemerintah Kota Magelang
10	Sains dan Teknologi	1	Kejuaraan Olimpiade Sains Nasional (OSN) Tingkat Nasional Jenjang SD/MI Tahun 2024	Honorable Mention	Cordelia Neysa Kireynahikari, SD Negeri Kemirirejo3 Magelang
		2	Kejuaraan Olimpiade Sains Nasional (OSN) Tingkat Nasional Jenjang SD/MI Tahun 2024	Honorable Mention	Putri Aqeela Safiqha Naulidya Widi, SD Negeri Kedungsari 5 Magelang
		3	Kejuaraan Festival Anak Shaleh Indonesia (FASI) ke XII Tingkat Nasional	Juara 1 Lomba Nasyid Islami Beregu TKA	Ilena Ahlam, SD Negeri Cacaban 3 Magelang
		4	Kejuaraan Festival Olimpiade Sains Nasional (FOSNAS) di Sumatera Utara	Juara 1 Cabang Mata Pelajaran Bahasa Inggris	Faida Afra Nada Nadifa, SMP Negeri 1 Magelang
		5	Kejuaraan NASAFAIR di Yogyakarta	Juara Harapan 1	Arraya Zalva Noor Fannani,SMP Negeri 1 Magelang
		6	Kejuaraan Garuda Science Olimpiade	Juara 2 Cabang Mata Pelajaran IPS	Jihan Khalisadinata, SMP Negeri 1 Magelang
		7	Kejuaraan Garuda Science Olimpiade	Juara 3 Cabang Mata Pelajaran IPA	Jihan Khalisadinata, SMP Negeri 1 Magelang
		8	Kejuaraan Garuda Science Olimpiade	Juara 2 Cabang Mata Pelajaran Bahasa Indonesia	Jihan Khalisadinata, SMP Negeri 1 Magelang
		9	Kejuaraan Garuda Science Olimpiade	Juara 3 Cabang Mata Pelajaran Bahasa Inggris	Dewinta Jasmine Khairinnisa, SMP Negeri 1 Magelang
		10	Kejuaraan Global Student Competition	Juara 1 Cabang Mata Pelajaran Bahasa Indonesia	Indana Zalfa Chalisa, SMP Negeri 1 Magelang
		11	Kejuaraan Pekan Olimpiade Siswa Nasional	Juara 3 Cabang Mata Pelajaran Bahasa Indonesia	Anisaa Anatasya, SMP Negeri 1 Magelang
		12	Kejuaraan Kompetisi Sains Nasional Pelajar Indonesia	Juara 3 Cabang Mata Pelajaran IPS	Nafisa Helwa Az Zahraa, SMP Negeri 1 Magelang
		13	Kejuaraan Kompetisi Sains Indonesia Merdeka	Juara 1 Cabang Mata Pelajaran Biologi Terpadu	Jesenia Quenisha Holly, SMP Negeri 1 Magelang

NO	BIDANG	KATEGORI KEJUARAAN/LOMBA		HASIL	ATAS NAMA
		14	Kejuaraan Kompetisi Sains Indonesia Merdeka	Juara 1 Cabang Mata Pelajaran Bahasa Indonesia	Jesenia Quenisha Holly, SMP Negeri 1 Magelang
		15	Kejuaraan Acer Smart School Awards 2024	Juara 1 Guru Kreatif Nasional	Niko Brahmento, S.Pd, Si, M.Pd, SMP Negeri 1 Magelang
		16	Kejuaraan Guru Kreatif Berdedikasi	Juara 2 Guru Inovatif Nasional	Niko Brahmento, S.Pd, Si, M.Pd, SMP Negeri 1 Magelang
		17	Kejuaraan Olimpiade Sains Djuanda Nasional (OSDN) 2024 di Sumatera	Juara 1	Nareswara Chrysant Larasati, SMP Negeri 7 Magelang
		18	Kejuaraan Olimpiade Sains Indonesia	Juara 3 Mata Pelajaran Matematika	Putri Indriasari Wasono, SMP Negeri 2 Magelang
		19	Kejuaraan Olimpiade Garuda Sains Indonesia	Juara 1Cabang Mata Pelajaran Bahasa Inggris	Putri Indriasari Wasono, SMP Negeri 2 Magelang
		20	Kejuaraan Hasanuddin Genius Olympiad	Juara 3 Cabang Mata Pelajaran Bahasa Inggris	Putri Indriasari Wasono, SMP Negeri 2 Magelang
		21	Kejuaraan Ajang Kompetisi Sains Indonesia (AKSI)	Juara 1 Bidang Biologi Terpadu	Achmad Fahrezy, SMP Negeri 2 Magelang
		22	Kejuaraan Ajang Kompetisi Sains Indonesia (AKSI)	Juara 1Bidang Astronomi Terpadu	Rizqon Wasian, SMP Negeri 2 Magelang
		23	Kejuaraan Olimpiade SainsTingkat Nasional	Juara 1 Bidang Astronomi Dasar	Rizqon Wasian, SMP Negeri 2 Magelang
		24	Kejuaraan Festival Olimpiade Sains Nasional (FESANAS) di Sumatera Utara	Juara 1 Bidang Matematika	Arysatya Hadiadi Sindu, SMP Negeri 2 Magelang
		25	Kejuaraan Festival Olimpiade Sains Nasional (FESANAS) di Sumatera Utara	Juara 1 Bidang Kedokteran Dasar	Arysatya Hadiadi Sindu, SMP Negeri 2 Magelang
		26	Kejuaraan Festival Olimpiade Sains Nasional (FESANAS) di Sumatera Utara	Juara 1 Bidang Bahasa Inggris	Muhammad Wildan Ahsana Zain, SMP Negeri 2 Magelang
		27	Kejuaraan Festival Olimpiade Sains Nasional (FESANAS) di Sumatera Utara	Juara 1 Bidang IPA	Muhammad Wildan Ahsana Zain, SMP Negeri 2 Magelang
		28	Kejuaraan Festival Olimpiade Sains Nasional (FESANAS) di Sumatera Utara	Juara I Bidang Biologi Terpadu	Bahra Ahmad Fawas Arrazqi, SMP Negeri 2 Magelang
		29	Kejuaraan Brawijaya Student Competition	Juara II Cabang Mata Pelajaran PKN	Putri Indriasari Wasono, SMP Negeri 2 Magelang
		30	Kejuaraan Cerdas Cermat IPS Tingkat Nasional 2024 di UNY Yogyakarta	Juara 1 LCC IPS	Barra Amdji Djaka Santoto, SMP Negeri 2 Magelang
		31	Kejuaraan Cerdas Cermat IPS Tingkat Nasional 2024 di UNY Yogyakarta	Juara 1 LCC IPS	Ahmad Saifudin Zaki, SMP Negeri 2 Magelang
		32	Kejuaraan Cerdas Cermat IPS Tingkat Nasional 2024 di UNY Yogyakarta	Juara 1 LCC IPS	Bima Cahyo Nugroho, SMP Negeri 2 Magelang
		33	Kejuaraan Lomba Karya Inovasi Pelajar Tingkat Nasional	Juara3 dengan judul " Pemanfaatan Aplikasi Pengendalian dan Pemanfaatan Parameter Nutrisi IoT pada Pertanian Hdroponik"	Fahry Rediantama Putra, SMP Negeri 2 Magelang
11	Olahraga	1	Kejuaraan Indonesia Super Fight Taekwondo Championship 2 20024	Juara 1 Kyorugi Pra Cadet C U-26 Putra	Raka Putra Bramasta
		2	Kejuaraan Olimpiade Olah Raga Siswa Nasional (O2SN) di Jakarta Utara	Juara 2 Cabang Olahraga Bulutangkis Tunggal Putra	Muhammad Fakhri Candra Yudha
		3	Kejuaraan Olimpiade Olah Raga Siswa Nasional (O2SN) di Jakarta Utara	Juara 1 Cabang Olahraga Renang 50 m Gaya Kupu-kupu Putri	Bilqis Janeeta Al Hakim

NO	BIDANG	KATEGORI KEJUARAAN/LOMBA		HASIL	ATAS NAMA
		4	Kejuaraan Olimpiade Olah Raga Siswa Nasional (O2SN) di Jakarta Utara	Juara 1 Cabang Olahraga Renang 50 m Gaya Punggung Putri	Bilqis Janeeta Al Hakim
		5	Kejuaraan Olimpiade Olah Raga Siswa Nasional (O2SN) di Jakarta Utara	Juara 1 Cabang Olahraga Renang 50 m Gaya Kupu-kupu putra	Aditya Sidiq Pamungkas
		6	Kejuaraan Lapangan Tenis Sultan Agung Yogyakarta	Juara 1 Ganda 12 Tahun Putra	M. Ammar Althaaf Badruzzaman
		7	Kejuaraan Lapangan Tenis Sultan Agung Yogyakarta	Juara III Tunggal 12 Tahun Putra	M. Ammar Althaaf Badruzzaman
		8	Kejuaraan Nasional Panahan Junior dan Barebrow di Batam Kepulauan Riau	Juara 2 Cabang Olahraga Panahan Eliminasi Beregu Recurve U-15 putri	Evelyn Noelle Diaken Widodo
		9	Kejuaraan Karate Nasional Piala Kapolri di GOR Ken Arok Malang	Juara 3 Cabang Kumite Perorangan Pemula putri + 52 Kg	Gesha Muraya
		10	Kejuaraan Pekan Olahraga Nasional XXI/2024 di Aceh-Sumatera Utara	Juara 2 Cabang Olahraga Sepatu Roda	Nafeeza Lamarch Dreineed Nadieshak
		11	Kejuaraan Nasional Airsoft Competition and Exhibition	Juara 3 Ganda Campuran	Ainun Rasuna Bekt
		12	Kejuaraan Nasional Airsoft Competition and Exhibition	Juara 3 Spring Pelajar SMP (Putri)	Ainun Rasuna Bekt
		13	Kejuaraan Nasional Airsoft Competition and Exhibition	Juara 1 Spring Pelajar SMP (Putri)	Annisa Sri Kumala
		14	Kejuaraan Nasional Airsoft Competition and Exhibition	Juara 1 Spring Pelajar SMP (Putra)	Dimas Angga Ramadhan
		15	Kejuaraan Nasional Airsoft Competition and Exhibition	Juara 3 Spring (Putra)	Dimas Angga Ramadhan
		16	Kejuaraan Nasional Airsoft Competition and Exhibition	Juara 2 Ganda Campuran	Dinar Arya Satya Fadhillah
		17	Kejuaraan Nasional Airsoft Competition and Exhibition	Juara 2 Spring (Putra)	Dinar Arya Satya Fadhillah
		18	Kejuaraan Nasional Airsoft Competition and Exhibition	Juara 3 Spring (Ganda Campuran)	Eddu Savio Priyudatama Putra
		19	Kejuaraan Nasional Airsoft Competition and Exhibition	Juara 3 (Ganda Campuran)	Eddu Savio Priyudatama Putra
		20	Kejuaraan Nasional Airsoft Competition and Exhibition	Juara 3 Spring Pelajar SMP (Putra)	Faisal Aulia Aqil
		21	Kejuaraan Nasional Airsoft Competition and Exhibition	Juara 1 (Ganda Campuran)	Farhan Aryasatya
		22	Kejuaraan Nasional Airsoft Competition and Exhibition	Juara 1 Spring (Putra)	Farhan Aryasatya
		23	Kejuaraan Nasional Airsoft Competition and Exhibition	Juara 2 Spring Pelajar SMP Putri	Felicia Anggelica Beatrice
		24	Kejuaraan Nasional Airsoft Competition and Exhibition	Juara 3 Spring (Ganda Campuran)	Josephira Violent Pratama
		25	Kejuaraan Nasional Airsoft Competition and Exhibition	Juara 2 Spring Pelajar SD (Kelas Open)	Mayvesya Veglia Borleti
		26	Kejuaraan Nasional Airsoft Competition and Exhibition	Juara 1 (Putri)	Mega Boghi Diadario Satriani
		27	Kejuaraan Nasional Airsoft Competition and Exhibition	Juara 1 Spring Pelajar SD (Kelas Open)	Muhammad Amir Ariyanto
		28	Kejuaraan Nasional Airsoft Competition and Exhibition	Juara 1 Spring (Ganda Campuran)	Naila Putri Nafisa

NO	BIDANG	KATEGORI KEJUARAAN/LOMBA		HASIL	ATAS NAMA
		29	Kejuaraan Nasional Airsoft Competition and Exhibition	Juara 2 (Putri)	Naila Putri Nafisa
		30	Kejuaraan Nasional Airsoft Competition and Exhibition	Juara 1 Spring Pelajar SD (Kelas Open)	Najwa Khairunnisa Salsabila
		31	Kejuaraan Nasional Airsoft Competition and Exhibition	Juara 2 Spring (Putri)	Nandita Dewi Aulia
		32	Kejuaraan Nasional Airsoft Competition and Exhibition	Juara 1 Ganda Campuran	Nandita Dewi Aulia
		33	Kejuaraan Nasional Airsoft Competition and Exhibition	Juara 1 Ganda Campuran	Ridwan Baihaqi
		34	Kejuaraan Nasional Airsoft Competition and Exhibition	Juara 2 Spring Pelajar SMP (Putra)	Wiryawan Putra Nurhidayat
		35	Kejuaraan Nasional Airsoft Competition and Exhibition	Juara 2 Ganda Campuran	Wulan Eka Nugraha Andini
		36	Kejuaraan Taekwondo Championship 2024 di UIN Salatiga	Juara 1 Kyorugi Cadet Putri U-33 Kg	Anggun Ayu Rahmadani
		37	Kejuaraan RR Yuniior Nasional 2024, Yogyakarta	Juara III Ganda Putri 14 tahun	Putri Indriasari Wasono dan Nadune Alexandra Cahaerudin
		38	Kejuaraan Taekwondo se Indonesia Grade C UGM 2024	Juara 3 Kyorugi Cadet Under 59 Kg Putri	Elysia Fayola Natha Laksita
		39	Kejuaraan Pigeon Teens Babolat WTA Seri VIII	Juara III Ganda 14 Tahun Putri (Tenis Meja)	Putri Indriasari Wasono dan Tamara Nasyfa
		40	Kejuaraan Taekwondo se Indonesia Grade C Walikota Cup XI di Yogyakarta	Juara 2 Poomsae Individual Junior Putra Prestasi	Razief Bintang El Khairy
		41	Kejuaraan Indonesia Open Competition 2024	Juara III	Anggita Wening Maheswari
		42	Kejuaraan Pekan Paralimpiade Nasional 2024	Juara 2 Woman' Lembar Cakram F55	Dwi Oktaviyani
TINGKAT PROVINSI					
1	Kawasan Permukiman	1	Kejuaraan Lomba Hari Habitat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024	Juara 1	Pemerintah Kota Magelang
		2	Sertifikat sebagai Kabupaten/Kota Layak Huni Tahun 2024	Kota Layak Huni	Kota Magelang
2	Pengawasan	1	Piagam Penghargaan kategori Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dengan Kinerja Pengawasan Pemerintah Daerah Terbaik Tahun 2024	Peringkat I	Pemerintah Kota Magelang
3	Kesehatan Program JKN	1	Piagam Penghargaan atas Kepatuhan Pembayaran Iuran Program JKN 2023	Terbaik III	Pemerintah Kota Magelang
4	Pariwisata	1	Kejuaraan Jambore Pokdarwis Jawa Tengah 2024	Juara Harapan III Konvensi Pokdarwis	Pokdarwis Cacaban Bersemi Kota Magelang
5	Perpustakaan	1	IPLM (Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat) tertinggi se-Jawa Tengah. Riset oleh Perpustakaan Nasional RI	Juara 1	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Magelang
		2	TGM (Tingkat Kegemaran Membaca) tertinggi se-Jawa Tengah. Riset oleh Perpustakaan Nasional RI	Juara 1	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Magelang
6	Perhubungan / Angkutan Jalan	1	Penghargaan Abdiyasa Teladan Tingkat Provinsi Jawa Tengah	Juara 2	Heribertus Dwi Setyawan, Dinas Perhubungan Kota Magelang
7	Sains dan Teknologi	1	Kejuaraan Pekan Olimpiade Siswa Nasional di Media Online	Juara 3 Cabang Mata Pelajaran Bahasa Indonesia	Jihan Khalisadinata, SMP Negeri 1 Magelang

NO	BIDANG	KATEGORI KEJUARAAN/LOMBA		HASIL	ATAS NAMA
		2	Kejuaraan Kihajar STEM 2024 Tahap Basic oleh Balai Layanan Platform Teknologi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi secara daring di Jakarta	Juara 2 Tingkat Provinsi Jawa Tengah	Arraya Zalva Noor Fannani, SMP Negeri 1 Magelang
		3	Kejuaraan Kihajar STEM 2024 Tahap Basic oleh Balai Layanan Platform Teknologi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi secara daring di Jakarta	Juara 2 Tingkat Provinsi Jawa Tengah	Bridgette Liony La Damusa Krisifu, SMP Negeri1 Magelang
		4	Kejuaraan Kihajar STEM 2024 Tahap Basic oleh Balai Layanan Platform Teknologi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi secara daring di Jakarta	Juara 2 Tingkat Provinsi Jawa Tengah	Nibras Izzul Haq, SMP Negeri 1 Magelang
		5	Kejuaraan GTK Hebat Jawa Tengah	Juara II	Niko Brahmanto, S.Pd, Si, M.Pd, SMP Negeri 1 Magelang
		6	Kejuaraan Idea FEST JATENG, Best Presentasion		Niko Brahmanto, S.Pd, Si, M.Pd, SMP Negeri 1 Magelang
		7	Kejuaraan Kontes Roket Air Taman Pintar 2024	Terbaik V	Ainun Rasuna Brkti, SMP Negeri 6 Magelang
		8	Kejuaraan Lomba Festival Tunas Bahasa Ibu Lomba Berpidato bagi siswa SMP Tingkat Jawa Tengah di Jepara	Pemenang 1 Kategori Putri	Adelia Sahla Syarif, SMP Negeri 4 Magelang
		9	Kejuaraan GTK Inovatif Pendidik PAUD, Jambore Guru dan Tenaga Kependidikan Hebat Tahun 2024	Terbaik 3 GTK Inovatif Pendidik PAUD	Varynha Marcha Indratno Putri, Guru KB Happy Bear Preschool Magelang
		10	Kejuaraan Jambore kesetaraan Tingkat Jawa Tengah 2024	Juara Harapan II Lomba Tutor	Septi Dianasari, S.E, Tutor PKBM Kuncup Mekar
		11	Kejuaraan Lomba Membaca Geguritan bagi SD Tingkat Jawa Tengah	Pemenang 1 Kategori Putri	Keyana Azznieda Naubel, MI Al Iman
		12	Kejuaraan Lomba Menulis Cerkak bagi Siswa Sekolah Dasar (SD) Tingkat Provinsi Jawa Tengah	Pemenang Harapan I Kategori Putri	Bening Iyvonda Fahkranavita, SD Negeri Kedungsari 1 Magelang
		13	Kejuaraan Lomba Menulis dan Membaca Aksara Jawa bagi Siswa Sekolah Dasar (SD) Tingkat Provinsi Jawa Tengah	Pemenang Harapan II Kategori Putri	Eriana Riski Apriluiani, SD Negeri Kedungsari 1 Magelang
		14	Kejuaraan Lomba Berpidato bagi Siswa Sekolah Dasar (SD) Tingkat Provinsi Jawa Tengah	Pemenang III Kategori Putri	Wafira Ain Al Fithri, SD Negeri Magelang 7
		15	Kejuaraan Olimpiade Sains Muhammadiyah Jawa Tengah Season 3 Tahun 2024	Medali Emas Cabang IPA	Adrian Rashdan Zhafran, SD Muhammadiyah 1 Alternatif
		16	Kejuaraan Olimpiade Sains Muhammadiyah Jawa Tengah Season 3 Tahun 2024	Medali Perak Cabang IPA	Annisa Lidya Anas, SD Muhammadiyah 1 Alternatif
		17	Kejuaraan Olimpiade Sains Muhammadiyah Jawa Tengah Season 3 Tahun 2024	Medali Emas Cabang Bahasa Inggris	Raden Ajeng Aneira Gndhi Mahendra
		18	Kejuaraan Olimpiade Sains Muhammadiyah Jawa Tengah Season 3 Tahun 2024	Medali Perak Cabang Matematika	Avariella Khurruya Shanum Danendra
		19	Kejuaraan Garuda Sains Indonesia	Medali Emas Cabang Bahasa Inggris	Putri Indriasari Wasono, SMP Negeri 2 Magelang
		20	Kejuaraan dalam rangka HUT ke 79 PGRI dan Hari Guru Nasional 2024	Juara II Lomba Menyanyi Duet	Yeremia Yessa Irnanda, SH, Guru SMP Negeri 2 Magelang
		21	Sertifikat dari Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan (BBPMP)Provinsi Jawa Tengah	Sekolah Binaan Gerakan Sekolah Sehat Tahun 2024	SMP Negeri 2 Magelang

NO	BIDANG	KATEGORI KEJUARAAN/LOMBA		HASIL	ATAS NAMA
		22	Sertifikat dari Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan (BBPMP) Provinsi Jawa Tengah	Gerakan Aksi Nyata dalam Penguatan Literasi dan Numerasi untuk Pemulihan Pembelajaran	Fatina Mahdalina, S,Pd, Kepala SMP Negeri 2 Magelang
		23	Kejuaraan festival Dongeng Remaja se Jawa Tengah dan DIY Tahun 2024	Juara Harapan 1	Narendra Aryasakhiy Wardana, SMP Negeri 2 Magelang
		24	Kejuaraan pada kegiatan Jambore Pemuda Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024	Juara II Kategori Lomba Pidato Bahasa Inggris	Arinta Kusuma Ramadhani
8	Keagamaan	1	Kejuaraan Lomba Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Seni Islami (MAPSI) SD ke-25 Tingkat Provinsi Jawa Tengah	Juara 2 Cabang Lomba Seni Musik Rebana	Na'ila Yumna Qaisara, SD Muhammadiyah 2 Alternatif Kota Magelang
		2	Kejuaraan Lomba Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Seni Islami (MAPSI) SD ke-25 Tingkat Provinsi Jawa Tengah	Juara 2 Cabang Lomba Seni Musik Rebana	Aziel Dewa Saputro, SD Muhammadiyah 2 Alternatif Kota Magelang
		3	Kejuaraan Lomba Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Seni Islami (MAPSI) SD ke-25 Tingkat Provinsi Jawa Tengah	Juara 2 Cabang Lomba Seni Musik Rebana	Athariq Azka Rajendra, SD Muhammadiyah 2 Alternatif Kota Magelang
		4	Kejuaraan Lomba Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Seni Islami (MAPSI) SD ke-25 Tingkat Provinsi Jawa Tengah	Juara 2 Cabang Lomba Seni Musik Rebana	Naeva Keyne Faustina, SD Muhammadiyah 2 Alternatif Kota Magelang
		5	Kejuaraan Lomba Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Seni Islami (MAPSI) SD ke-25 Tingkat Provinsi Jawa Tengah	Juara 2 Cabang Lomba Seni Musik Rebana	Adzkiya 'Izza Ulfatunnisa, SD Muhammadiyah 2 Alternatif Kota Magelang
		6	Kejuaraan Lomba Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Seni Islami (MAPSI) SD ke-25 Tingkat Provinsi Jawa Tengah	Juara 2 Cabang Lomba Seni Musik Rebana	Najmania Syafarani, SD Muhammadiyah 2 Alternatif Kota Magelang
		7	Kejuaraan Lomba Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Seni Islami (MAPSI) SD ke-25 Tingkat Provinsi Jawa Tengah	Juara 2 Cabang Lomba Seni Musik Rebana	Gilang Sakhil Al Ghany, SD Muhammadiyah 2 Alternatif Kota Magelang
		8	Kejuaraan Lomba Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Seni Islami (MAPSI) SD ke-25 Tingkat Provinsi Jawa Tengah	Juara 2 Cabang Lomba Seni Musik Rebana	Azka Fadhil Shagufta, SD Muhammadiyah 2 Alternatif Kota Magelang
		9	Kejuaraan Lomba Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Seni Islami (MAPSI) SD ke-25 Tingkat Provinsi Jawa Tengah	Juara 2 Cabang Lomba Seni Musik Rebana	Muhammad Abidzayan Pranajaya, SD Muhammadiyah 2 Alternatif Kota Magelang
		10	Kejuaraan Lomba Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Seni Islami (MAPSI) SD ke-25 Tingkat Provinsi Jawa Tengah	Juara 2 Cabang Lomba Seni Musik Rebana	Alena Fidela Carissa, SD Muhammadiyah 2 Alternatif Kota Magelang
		11	Kejuaraan Lomba Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Seni Islami (MAPSI) SD ke-25 Tingkat Provinsi Jawa Tengah	Juara 2 Cabang Lomba Seni Musik Rebana	Athillah Andharu Fatah, SD Muhammadiyah 2 Alternatif Kota Magelang
		12	Kejuaraan Lomba Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Seni Islami (MAPSI) SD ke-25 Tingkat Provinsi Jawa Tengah	Juara Harapan 2 Cabang Lomba Seni Menyanyi Duet Lagu Religi Berpasangan	Muhammad Giebran Zaahii Abraar, SD Muhammadiyah 2 Alternatif Kota Magelang
		13	Kejuaraan Lomba Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Seni Islami (MAPSI) SD ke-25 Tingkat Provinsi Jawa Tengah	Juara 2 Cabang Lomba Seni Menyanyi Duet Lagu Religi Berpasangan	Claresta Fayza Sahasrakirana, SD Muhammadiyah 2 Alternatif Kota Magelang
		14	Kejuaraan Lomba Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Seni Islami (MAPSI) SD ke-25 Tingkat Provinsi Jawa Tengah	Juara 3 Cabang Lomba Seni Kaligrafi Putra	Arjunio Tigojuang Hajar, SD Negeri Kedungsari 5 Kota Magelang
		15	Kejuaraan Lomba Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Seni Islami (MAPSI) SD ke-25 Tingkat Provinsi Jawa Tengah	Juara 2 Cabang Lomba Pengetahuan PAI dan BTQ Putri	Putri Aqeela Safiqha Maulidya Widi, SD Negeri Kedungsari 5 Magelang
		16	Kejuaraan Lomba Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Seni Islami (MAPSI) SD ke-25 Tingkat Provinsi Jawa Tengah	Juara 1 Cabang Lomba Seni KaligrafiPutri	Eriana Rizki Apriliani, SD Negeri Kedungsari 1 Magelang

NO	BIDANG	KATEGORI KEJUARAAN/LOMBA		HASIL	ATAS NAMA
		17	Kejuaraan Lomba Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Seni Islami (MAPSI) SD ke-25 Tingkat Provinsi Jawa Tengah	Juara 3 Cabang Lomba Seni Tilawatil Quran Putri	Mazaya Aqlin Farhana, SD Negeri Jurangomobo 4 Magelang
9	Olahraga	1	Kejuaraan Pekan Paralympic Pelajar Daerah (PEPARPEDA) Jawa Tengah Tahun 2024	Juara 1 Para Bulutangkis UPPER PUTRI	Khaira Adiba Wibowo
		2	Kejuaraan Pekan Paralympic Pelajar Daerah (PEPARPEDA) Jawa Tengah Tahun 2024	Juara III Para Atletik 800 M (T 20 Putra)	Muhammad Musafak
		3	Kejuaraan Pekan Paralympic Pelajar Daerah (PEPARPEDA) Jawa Tengah Tahun 2024	Juara III Para Tenis Meja Putra	Rafi Alfianto
		4	Kejuaraan Pekan Paralympic Pelajar Daerah (PEPARPEDA) Jawa Tengah Tahun 2024	Juara III Para Renang 50 m Putra	Aditya Pramana Putra
		5	Kejuaraan Pekan Paralympic Pelajar Daerah (PEPARPEDA) Jawa Tengah Tahun 2024	Juara I Para Bulutangkus TRW	Ahmad Ulin Nuha
		6	Kejuaraan Pekan Olahraga Pelajar Daerah (POPDA) Tingkat Provinsi Jawa Tengah	Juara I Menembak 10 m Air Rifle Women	Indira Sakunto
		7	Kejuaraan Pekan Olahraga Pelajar Daerah (POPDA) Tingkat Provinsi Jawa Tengah	Juara II Atletik Lompat Tinggi Putra	Alfin Drajad Suwardana
		8	Kejuaraan Pekan Olahraga Pelajar Daerah (POPDA) Tingkat Provinsi Jawa Tengah	Juara III Pencak Silat Putri	Filladelfia Kurnia Jasa
		9	Kejuaraan Pekan Olahraga Pelajar Daerah (POPDA) Tingkat Provinsi Jawa Tengah	Juara III Karate Kata Beregu Putri	Dwi Citra Dewanti
		10	Kejuaraan Pekan Olahraga Pelajar Daerah (POPDA) Tingkat Provinsi Jawa Tengah	Juara III Karate Kata Beregu Putri	Muthia Nadira Paramitha
		11	Kejuaraan Pekan Olahraga Pelajar Daerah (POPDA) Tingkat Provinsi Jawa Tengah	Juara III Karate Kata Beregu Putri	Viola Rahma Pratiwi
		12	Kejuaraan Pekan Olahraga Pelajar Daerah (POPDA) Tingkat Provinsi Jawa Tengah	Juara II Taekwondo Under 59 Kg Putra	Saka Putra Angkasa
		13	Kejuaraan Pekan Olahraga Pelajar Daerah (POPDA) Tingkat Provinsi Jawa Tengah	Juara III Taekwondo Under 49 Kg Putri	Aina Adzkia Gandhis
		14	Kejuaraan Pekan Olahraga Pelajar Daerah (POPDA) Tingkat Provinsi Jawa Tengah	Juara III Taekwondo Poomsae Freestyle Putra	Aulia Zamir Aditya
		15	Kejuaraan Pekan Olahraga Pelajar Daerah (POPDA) Tingkat Provinsi Jawa Tengah	Juara III Taekwondo Under 51 Kg Putra	Danu Wakhid Prakoso
		16	Kejuaraan Pekan Olahraga Pelajar Daerah (POPDA) Tingkat Provinsi Jawa Tengah	Juara III Taekwondo Under 55 Kg Putra	Ellisha Daniela Theta Putra
		17	Kejuaraan Pekan Olahraga Pelajar Daerah (POPDA) Tingkat Provinsi Jawa Tengah	Juara III Taekwondo Under 46 Kg Putri	Nafisa Azila Zahra
		18	Kejuaraan Pekan Olahraga Pelajar Daerah (POPDA) Tingkat Provinsi Jawa Tengah	Juara III Taekwondo Poomsae Putra	Putra Mahatvavirya
		19	Kejuaraan Pekan Olahraga Pelajar Daerah (POPDA) Tingkat Provinsi Jawa Tengah	Juara III Taekwondo Under 68 Kg Putri	Valda Aulia Najwa Az Zahra
		20	Kejuaraan Pekan Olahraga Pelajar Daerah (POPDA) Tingkat Provinsi Jawa Tengah	Juara III Tinju Kelas 57 Kg Putra	Ahmad Latip Suyudi
		21	Kejuaraan Pekan Olahraga Pelajar Daerah (POPDA) Tingkat Provinsi Jawa Tengah	Juara III Tinju Kelas 60 Kg Putra	Yeremia Erwin Hanuebi
		22	Kejuaraan Pekan Olahraga Pelajar Daerah (POPDA) SD/MI/Sederajat Tahun 2024 Tingkat Jawa Tengah di Semarang	Juara III Pencak Silat Kelas I (42-44 Kg) Putra	Arjuna Dwi Prasetyo
		23	Kejuaraan Pekan Olahraga Pelajar Daerah (POPDA) SD/MI/Sederajat Tahun 2024 Tingkat Jawa Tengah di Semarang	Juara 1 Renang Gaya Punggung 50 m Putri	Bilqis Janeeta Al Hakim
		24	Kejuaraan Pekan Olahraga Pelajar Daerah (POPDA) SD/MI/Sederajat Tahun 2024 Tingkat Jawa Tengah di Semarang	Juara 1 Renang Gaya Kupu 50 m Putri	Bilqis Janeeta Al Hakim

NO	BIDANG	KATEGORI KEJUARAAN/LOMBA		HASIL	ATAS NAMA
		25	Kejuaraan Pekan Olahraga Pelajar Daerah (POPDA) SD/MI/Sederajat Tahun 2024 Tingkat Jawa Tengah di Semarang	Juara 1 Renang Gaya Kupu 100 m Putri	Bilqis Janeeta Al Hakim
		26	Kejuaraan Pekan Olahraga Pelajar Daerah (POPDA) SD/MI/Sederajat Tahun 2024 Tingkat Jawa Tengah di Semarang	Juara III Taekwondo Under 34 Kg Putra	Azka Zidan Mahardika
		27	Kejuaraan Pekan Olahraga Pelajar Daerah (POPDA) SD/MI/Sederajat Tahun 2024 Tingkat Jawa Tengah di Semarang	Juara 1 Wushu Taola Jianshu+Qiangshu Putri	Makaila Mufida Fauzhara
		28	Kejuaraan Pekan Olahraga Pelajar Daerah (POPDA) SD/MI/Sederajat Tahun 2024 Tingkat Jawa Tengah di Semarang	Juara I Taekwondo Under 34 Kg Putri	Violentia Agatha Riska Putri Kuncoro
		29	Kejuaraan Pekan Olahraga Pelajar Daerah (POPDA) SD/MI/Sederajat Tahun 2024 Tingkat Jawa Tengah di Semarang	Juara II Wushu Taolu Daoshu + Gunshu Putra	Muhammad Fakhri Ali El Rafif
		30	Kejuaraan Pekan Olahraga Pelajar Daerah (POPDA) SD/MI/Sederajat Tahun 2024 Tingkat Jawa Tengah di Semarang	Juara 1 Renang Gaya Dada 100 m Putra	Glennzo Moritz Midas Suharlin
		31	Kejuaraan Pekan Olahraga Pelajar Daerah (POPDA) SD/MI/Sederajat Tahun 2024 Tingkat Jawa Tengah di Semarang	Juara II Renang Gaya Dada 50 m Putra	Glennzo Moritz Midas Suharlin
		32	Kejuaraaan Pekan Olahraga Pelajar Daerah (POPDA) SMP/Mts/Sederajat Tingkat Jawa Tengah di Semarang	Juara I Taekwondo Under 45 Kg Putra	Amaru Bima Alif Setiawan
		33	Kejuaraaan Pekan Olahraga Pelajar Daerah (POPDA) SMP/Mts/Sederajat Tingkat Jawa Tengah di Semarang	Juara III Taekwondo Under 38 Kg Putri	Felisha Zalfa Odelia Putri
		34	Kejuaraaan Pekan Olahraga Pelajar Daerah (POPDA) SMP/Mts/Sederajat Tingkat Jawa Tengah di Semarang	Juara 3 Panahan Divisi Recurve Eliminasi Individu Putra	Putra Rakha Ratjendra
		35	Kejuaraaan Pekan Olahraga Pelajar Daerah (POPDA) SMP/Mts/Sederajat Tingkat Jawa Tengah di Semarang	Juara 2 Panahan Divisi Recurve Eliminasi Individu Putri	Evelyn Noelle Diaken Widodo
		36	Kejuaraaan Pekan Olahraga Pelajar Daerah (POPDA) SMP/Mts/Sederajat Tingkat Jawa Tengah di Semarang	Juara III Taekwondo Under 34 Kg Putri	Anggun Ayu Rahmadani
		37	Kejuaraaan Pekan Olahraga Pelajar Daerah (POPDA) SMP/Mts/Sederajat Tingkat Jawa Tengah di Semarang	Juara I Renang Gaya Dada 200 m Putra	Muhammad Kaisar Jabbar Al Hakim
		38	Kejuaraaan Pekan Olahraga Pelajar Daerah (POPDA) SMP/Mts/Sederajat Tingkat Jawa Tengah di Semarang	Juara II Renang Gaya Kupu 100 m Putra	Aditya Shidiq Pamungkas
		39	Kejuaraaan Pekan Olahraga Pelajar Daerah (POPDA) SMP/Mts/Sederajat Tingkat Jawa Tengah di Semarang	Juara II Atletik Lompat Jauh Putra	Akhmad Bani Adam
		40	Kejuaraaan Pekan Olahraga Pelajar Daerah (POPDA) SMP/Mts/Sederajat Tingkat Jawa Tengah di Semarang	Juara II Karate Kumite -50 Kg Putra	Dionisius Aryo Putranto Wibisono
		41	Kejuaraaan Pekan Olahraga Pelajar Daerah (POPDA) SMP/Mts/Sederajat Tingkat Jawa Tengah di Semarang	Juara II Bulutangkis Tunggal Putra	Muhammad Fakhri Candra Yudha
		42	Kejuaraaan Pekan Olahraga Pelajar Daerah (POPDA) SMP/Mts/Sederajat Tingkat Jawa Tengah di Semarang	Juara II Taekwondo Under 49 Kg Putra	Kristyan Aditri
		43	Kejuaraan Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) jenjang SD Tingkat Provinsi Jawa Tengah	Juara 2 Lomba Karate-Putri-Individu	Evelyna Putri Cindaga
		44	Kejuaraan Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) jenjang SD Tingkat Provinsi Jawa Tengah	Juara 1 Lomba Karate-Putri (Kata Perorangan)	Evelyna Putri Cindaga

NO	BIDANG	KATEGORI KEJUARAAN/LOMBA		HASIL	ATAS NAMA
		45	Kejuaraan Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) jenjang SD Tingkat Provinsi Jawa Tengah	Juara 1 Bidang Lomba Bulu Tangkis-Putra-Individu	Muhammad Fakhri Candra Yudha
		46	Kejuaraan Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) jenjang SD Tingkat Provinsi Jawa Tengah	Juara 3 Lomba Senam-Outri-Individula	Vanesa Aqeela Rafani
		47	Kejuaraan Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) jenjang SD Tingkat Provinsi Jawa Tengah	Juara 1 Bidang Renang-Putri-Gaya Kupu kupu 50 m	Bilqis Janeeta Al Hakim
		48	Kejuaraan Olimpiade Siswa Nasional (O2SN) jenjang SMP Tingkat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024	Juara 1 Renang Putra Gaya Kupu-kupu 50 m	Aditya Shidiq Pamungkas
		49	Kejuaraan Olimpiade Siswa Nasional (O2SN) jenjang SMP Tingkat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025	Juara 1 Renang Putra Gaya Bebas 100 m	Aditya Shidiq Pamungkas
		50	Kejuaraan Olimpiade Siswa Nasional (O2SN) jenjang SMP Tingkat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026	Juara 1 Renang Putra Individu	Aditya Shidiq Pamungkas
		51	Kejuaraan Renang Antar Sekolah (KRAS) se Jawa Tengah Tahun 2024	Juara II-200 m Gaya Ganti Perorangan Putri, LCM-Group 5 Hasil	Khadijah Fatharani Nowa
		52	Kejuaraan Renang Antar Sekolah (KRAS) se Jawa Tengah Tahun 2024	Juara I-100 m Gaya Dada Putri, LCM- Group 5	Khadijah Fatharani Nowa
		53	Kejuaraan Renang Antar Sekolah (KRAS) se Jawa Tengah Tahun 2024	Juara I-50 m Gaya Bebas Putri, LCM-Group 5	Khadijah Fatharani Nowa
		54	Kejuaraan Renang Antar Sekolah (KRAS) se Jawa Tengah Tahun 2024	Juara II-50 m Gaya Kupu-kupu Putri, LCM-Group 5	Khadijah Fatharani Nowa
		55	Kejuaraan Renang Antar Sekolah (KRAS) se Jawa Tengah Tahun 2024	Juara I-100 m Gaya Punggung Putri, LCM- Group 5	Khadijah Fatharani Nowa
		56	Kejuaraan Renang Antar Sekolah (KRAS) se Jawa Tengah Tahun 2024	Juara III-50 m Gaya Dada Putri, LCM- Group 5	Khadijah Fatharani Nowa
		57	Kejuaraan Renang Antar Sekolah (KRAS) se Jawa Tengah Tahun 2024	Juara II-100 m Gaya Bebas Putri, LCM-Group 5	Khadijah Fatharani Nowa
		58	Kejuaraan Renang Antar Sekolah (KRAS) se Jawa Tengah Tahun 2024	Juara I-50 m Gaya Punggung Putri, LCM- Group 5	Khadijah Fatharani Nowa
		59	Kejuaraan Renang Antar Sekolah (KRAS) se Jawa Tengah Tahun 2024	Juara I-100 m Gaya Kupu-kupu Putri, LCM-Group 5	Khadijah Fatharani Nowa
		60	Kejuaraan Renang Antar Sekolah (KRAS) se Jawa Tengah Tahun 2024	Juara I - 200 m Gaya Dada Putra, LCM-Group 2	Muhammad Kaisar Jabbar Al Hakim
		61	Kejuaraan Renang Antar Sekolah (KRAS) se Jawa Tengah Tahun 2024	Juara II-50 m Gaya Dada Putra, LCM-Group 2	Muhammad Kaisar Jabbar Al Hakim
		62	Kejuaraan Renang Antar Sekolah (KRAS) se Jawa Tengah Tahun 2024	Juara II - 100 m Gaya Dada Putra, LCM-Group 2	Muhammad Kaisar Jabbar Al Hakim
		63	Kejuaraan Renang Antar Perkumpulan KRAPPROV Jawa Tengah Bupati Brebes Cup Tahun 2024	Juara II-50 m Gaya Kupu-kupu Putra, LCM-Group 2	Muhammad Kaisar Jabbar Al Hakim
		64	Kejuaraan Renang Antar Perkumpulan KRAPPROV Jawa Tengah Bupati Brebes Cup Tahun 2024	Juara II-100 m Gaya Bebas Putra, LCM-Group 2	Muhammad Kaisar Jabbar Al Hakim
		65	Kejuaraan Renang Antar Perkumpulan KRAPPROV Jawa Tengah Bupati Brebes Cup Tahun 2024	Juara II-400 m Gaya Bebas Putra, LCM-Group 2	Muhammad Kaisar Jabbar Al Hakim
		66	Kejuaraan Renang Antar Perkumpulan KRAPPROV Jawa Tengah Bupati Brebes Cup Tahun 2024	Juara II-100 m Gaya Kupu-kupu Putra, LCM-Group 2	Muhammad Kaisar Jabbar Al Hakim
		67	Kejuaraan Renang Antar Perkumpulan KRAPPROV Jawa Tengah Bupati Brebes Cup Tahun 2024	Juara III-50 m Gaya Bebas Putra, LCM-Group 2	Muhammad Kaisar Jabbar Al Hakim

NO	BIDANG	KATEGORI KEJUARAAN/LOMBA		HASIL	ATAS NAMA
		68	Kejuaraan Renang Antar Perkumpulan KRAPPROV Jawa Tengah Bupati Brebes Cup Tahun 2024	Juara I-200 m Gaya Ganti Perorangan Putra, LCM-Group 2	Muhammad Kaisar Jabbar Al Hakim
		69	Kejuaraan Renang Antar Perkumpulan KRAPPROV Jawa Tengah Bupati Brebes Cup Tahun 2024	Juara I-200 m Gaya Kupu-kupu Putra, LCM-Group 2	Muhammad Kaisar Jabbar Al Hakim
		70	Kejuaraan Renang Antar Perkumpulan KRAPPROV Jawa Tengah Bupati Brebes Cup Tahun 2024	Juara I-200 m Gaya Dada Putra, LCM-Group 2	Muhammad Kaisar Jabbar Al Hakim
		71	Kejuaraan Renang Antar Perkumpulan KRAPPROV Jawa Tengah Bupati Brebes Cup Tahun 2024	Juara I- 100 m Gaya DadaPutra Putra, LCM-Group 2	Muhammad Kaisar Jabbar Al Hakim
		72	Kejuaraan Renang Antar Perkumpulan KRAPPROV Jawa Tengah Bupati Brebes Cup Tahun 2024	Juara I-50 m GayaDada Putra, LCM-Group 2	Muhammad Kaisar Jabbar Al Hakim
		73	Kejuaraan Renang Antar Perkumpulan Jateng Series #4 Tahun 2024	Juara I-100 m Gaya Bebas Putri, LCM-Group 5	Khadijah Fatharani Nowa
		74	Kejuaraan Renang Antar Perkumpulan Jateng Series #4 Tahun 2024	Juara II-50 m Gaya Dada Putri, LCM-Group 5	Khadijah Fatharani Nowa
		75	Kejuaraan Renang Antar Perkumpulan Jateng Series #4 Tahun 2024	Juara II-100 m Gaya Dada Putri, LCM-Group 5	Khadijah Fatharani Nowa
		76	Kejuaraan Renang Antar Perkumpulan Jateng Series #4 Tahun 2024	Juara II-200 m Gaya Dada Putri, LCM-Group 5	Khadijah Fatharani Nowa
		77	Kejuaraan Renang Antar Perkumpulan Jateng Series #4 Tahun 2024	Juara 1-50 m Gaya Bebas Putri, LCM-Group 5	Khadijah Fatharani Nowa
		78	Kejuaraan Renang Antar Perkumpulan Jateng Series #4 Tahun 2024	Juara I-50 m Gaya Punggung Putri, LCM-Group 5	Khadijah Fatharani Nowa
		79	Kejuaraan Renang Antar Perkumpulan Jateng Series #4 Tahun 2024	Juara I-200 m Gaya Ganti Perorangan Putri, LCM-Group 5	Khadijah Fatharani Nowa
		80	Kejuaraan Renang Antar Perkumpulan Jateng Series #4 Tahun 2024	Juara I-100 m Gaya Bebas Putri, LCM-Group 5	Khadijah Fatharani Nowa
		81	Kejuaraan Renang Antar Perkumpulan Jateng Series #4 Tahun 2024	Juara I-100 m Gaya Kupu kupu Putri, LCM-Group 5	Khadijah Fatharani Nowa
		82	Kejuaraan Renang Antar Perkumpulan Jateng Series #4 Tahun 2024	Juara III-4x50 m Gaya Ganti Estafet Putri, LCM-Relay	Khadijah Fatharani Nowa
		83	Kejuaraan Renang Antar Perkumpulan Jateng Series #4 Tahun 2024	Juara I-200 m Gaya Bebas Putri, LCM-Group 5	Khadijah Fatharani Nowa
		84	Kejuaraan Renang Antar Perkumpulan Jateng Series #4 Tahun 2024	Juara I-50 m Gaya Kupu kupu Putri, LCM-Group 5	Khadijah Fatharani Nowa
		85	Kejuaraan Provinsi Wushu Jawa Tengah Piala Ketua Umum Pengprov Wushu Indonesia Jawa Tengah Tahun 2024	Juara 3 Taijijian-Junior C-Putra	Rama Aufa Fadilah
		86	Kejuaraan Provinsi Wushu Jawa Tengah Piala Ketua Umum Pengprov Wushu Indonesia Jawa Tengah Tahun 2024	Juara 3 Taijiquan-Junior C-Putra	Rama Aufa Fadilah
		87	Kejuaraan Provinsi Wushu Jawa Tengah Piala Ketua Umum Pengprov Wushu Indonesia Jawa Tengah Tahun 2024	Juara 3 Gunshu-Junior C Putri	Ghumaisha Dzakiyya Fauzie
		88	Kejuaraan Lawang Sewu Garuda Emas Open Wushu Championship Tahun 2024	Juara 3 -Chang Quan Junior C PA(M)	Rama Aufa Fadilah
		89	Kejuaraan Taekwondo se Indonesia Grade C Walikota Cup XI di Yogyakarta	Juara 1 Under 59 Kg Cadet Putri Prestasi	Helda Putri Ramadhani
		90	Kejuaraan Provinsi Pelajar dan Open Finswimming Nomor Kolam 2024 di Kolam Renang Jatidiri Semarang	Juara 1 Kategori 200 m Bifins Putra KU : C	Aditya Shidiq Pamungkas

NO	BIDANG	KATEGORI KEJUARAAN/LOMBA		HASIL	ATAS NAMA
		91	Kejuaraan Provinsi Pelajar dan Open Finswimming Nomor Kolam 2024 di Kolam Renang Jatidiri Semarang	Juara 1 Kategori 50 m Bifins Putra KU:C	Aditya Shidiq Pamungkas
		92	Kejuaraan Provinsi Pelajar dan Open Finswimming Nomor Kolam 2024 di Kolam Renang Jatidiri Semarang	Juara 1 Kategori 40x50 m Estafet Bifins Putra : Gabungan A,B,C,D	Aditya Shidiq Pamungkas
		93	Kejuaraan Provinsi Pelajar dan Open Finswimming Nomor Kolam 2024 di Kolam Renang Jatidiri Semarang	Juara 2 Kategori 100 m Bifins Putra KU:C	Aditya Shidiq Pamungkas
		94	Kejuaraan Provinsi Pelajar dan Open Finswimming Nomor Kolam 2024 di Kolam Renang Jatidiri Semarang	Juara 2 Kategori 400 m Bifins Putra KU:C	Aditya Shidiq Pamungkas
		95	Kejuaraan Taekwondo se Indonesia Grade-C UGM Taekwondo Championship (UGMTC) 2024 di GOR Pancasila	Juara 2 Kyorugi Cadet Under 51 Kg Putri	Khayran Amala Razifa Putri Irawan
		96	Kejuaraan Fesfival Olahraga Masyarakat Daerah (FORDA) 2024 di Banyumas	Juara 2 Individual Kyourugi Anak-anak III Under 50-53 Kg Putra	Gryf Filiko Sandya Edsel
		97	Kejuaraan Kapolda Cup Taekwondo Open Turnamen tingkat grade C di GOR Satria Purwokerto	Juara 2 Kyorugi Junior U 44 Kg Putri	Desycha Arinanda Kurniawati
		98	Kejuaraan Magelang Pencak Silat Tournament di GOR Samapta Kota Magelang	Juara 1 Pra Remaja Putra Seni Tunggal Full	Mohammad Zabran Kale
		99	Kejuaraan Magelang Pencak Silat Tournament di GOR Samapta Kota Magelang	Juara 2 Pra Remaja Putri Seni Tunggal Full	Nayla Chandra Salsabila Putri
		100	Kejuaraan Indonesia Super Fight Taekwondo Championship 2 2024 di GOR Among RagaYogyakarta	Juara 1 Poomsae Individual Cadet Putri	Lecia Angelia Wiguno
		101	Kejuaraan Indonesia Super Fight Taekwondo Championship 2 2024 di GOR Among RagaYogyakarta	Juara 1 Kyorugi Prestasi Cadet U-59 Putri	Helda Putri Ramadhani
		102	Kejuaraan Salatiga Open III Taekwondo Championship 2024 di Auditorium Student Centre UIN Salatiga	Juara 1 Kyorugi Cadet U-61 Putra	Suryo Aryo Wibowo
		103	Kejuaraan Kapolda Cup Taekwondo Open Turnamen tingkat grade C di GOR Satria Purwokerto	Juara 2 Kyourugi Junior U 49 Kg Putri	Tafakkarina Muna Z
		104	Kejuaraan Kapolda Cup Taekwondo Open Turnamen tingkat grade C di GOR Satria Purwokerto	Juara 2 Kyorugi Junior U 47 Putri	Adhinda Haruni Wasiati
		105	Kejuaraan Kapolda Cup Taekwondo Open Turnamen tingkat grade C di GOR Satria Purwokerto	Juara I Kyorug Cadet U 53 Putra	M. Ilham Aditama Bagus
		106	Kejuaraan Taekwondo Bhayangkara Presisi II di GOR UNY Yogyakarta	Juara 2 Cabang Kyorugi Junior Putri-59 kg	Salsabila Shofia Oktoliana
		107	Kejuaraan Pencak Silat Komisariat Akmil Championship 2024 di Akmil Magelang	Juara 2 Seni Tunggal Tangan Kosong Putri Pra Remaja	Talita Sarah Allatif
		108	Kejuaraan Fesfival Olahraga Masyarakat Daerah (FORDA) 2024 di Banyumas	Juara I Group Formation Free Style	Felisha Zalfa
		109	Kejuaraan Fesfival Olahraga Masyarakat Daerah (FORDA) 2024 di Banyumas	Juara I Junior Group	Ozorra Rachiana Clarissa
		110	Kejuaraan Fesfival Olahraga Masyarakat Daerah (FORDA) 2024 di Banyumas	Juara 1 Individual Kyorugi Anak-anak (12-14T h) Putra	Rayyan Evan Farisky
		111	Kejuaraan Fesfival Olahraga Masyarakat Daerah (FORDA) 2024 di Banyumas	Juara II Individual Kyorugi Anak-anak (12-14T h) Putri	Atha Wijayanti
		112	Kejuaraan Fesfival Olahraga Masyarakat Daerah (FORDA) 2024 di Banyumas	Juara II Kategori Anak-anak (10-11 Th) Putri	Karina Ayu Dewi

NO	BIDANG	KATEGORI KEJUARAAN/LOMBA		HASIL	ATAS NAMA
		113	Kejuaraan Festival Olahraga Masyarakat Daerah (FORDA) 2024 di Banyumas	Juara II Kategori Anak-anak (8-9 Th) Putra	Gevin Abassy Pratama
		114	Kejuaraan Festival Olahraga Masyarakat Daerah (FORDA) 2024 di Banyumas	Juara II Kategori Anak-anak (8-9 Th) Putri	Najwa Sahla Sarda Ngareswai
		115	Kejuaraan Festival Olahraga Masyarakat Daerah (FORDA) 2024 di Banyumas	Juara II Beregu Kipas Kung Fu	Yekti Winarsih
		116	Kejuaraan Festival Olahraga Masyarakat Daerah (FORDA) 2024 di Banyumas	Juara I Kategori Remaja (15-17 Th)	Salsabila Eka Fitria
		117	Kejuaraan Lawang Sewu Garuda Emas Open Wushu Championship Tahun 2024	Juara I-Dao Shu Junior B PI(F)	Zanuba Hayfanisa Isnu
		118	Kejuaraan Lawang Sewu Garuda Emas Open Wushu Championship Tahun 2024	Juara I-Chang Quan Junior B PI (F)	Zanuba Hayfanisa Isnu
		119	Kejuaraan Lawang Sewu Garuda Emas Open Wushu Championship Tahun 2025	Juara II-Taiji Jian Junior B PI (F)	Lubna Tsabita
		120	Kejuaraan Taekwondo Championship di Salatiga	Juata I Kyorugi Cadet Putra U-53 Putra	Maulana Rakha Ganendra
		121	Kejuaraan Taekwondo Championship di Salatiga	Juara I Kyorugi Cadet Putri U-59 g	Elysia Fayola

Sumber: LKPJ Kota Magelang, 2025

BAB 3

RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

3.1 ARAH KEBIJAKAN EKONOMI DAERAH

Kerangka ekonomi makro memberi gambaran tentang perkiraan kondisi ekonomi makro Kota Magelang baik yang dipengaruhi faktor internal serta variabel eksternalitas yang memberi pengaruh signifikan antara lain perekonomian regional, nasional maupun perekonomian global. Kerangka pendanaan ini menjadi basis kebijakan anggaran untuk mengalokasikan secara efektif dan efisien dengan perencanaan anggaran berbasis kinerja dan berorientasi pada konsep *money follow programme priority*.

Selain itu kerangka ekonomi dan keuangan daerah dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Magelang Tahun 2026 menggambarkan kebijakan perekonomian daerah yang diambil sebagai dasar pencapaian bagi sasaran indikator ekonomi makro daerah. Kerangka ekonomi ini memberi gambaran tentang perkiraan kondisi ekonomi makro Kota Magelang yang dipengaruhi oleh perekonomian regional, nasional maupun perekonomian global. Bab ini akan membahas kerangka pendanaan daerah agar dapat memberikan fakta dan analisis terkait perkiraan sumber-sumber pendapatan dan besaran pendapatan dari sektor-sektor potensial, perkiraan kemampuan pembelanjaan dan pembiayaan untuk pembangunan daerah tahun 2026.

Kerangka ekonomi dan pendanaan daerah ini menjadi dasar kebijakan perencanaan anggaran agar dapat dialokasikan secara efektif dan berbasis program prioritas disamping juga untuk mencapai program dalam RPJMD yang dari hasil evaluasi pada tahun 2024 yang masuk dalam kategori program yang akan tercapai dan program yang perlu upaya keras untuk mencapai target RPJMD. Diharapkan pertumbuhan ekonomi dapat tumbuh sesuai target dan pertumbuhan ekonomi juga meningkat secara kualitas untuk menurunkan kemiskinan, memperbaiki ketimpangan pendapatan, mengurangi angka pengangguran, dan meningkatkan IPM sebagai indikator kesejahteraan masyarakat.

Rancangan kerangka ekonomi dan pendanaan daerah tahun 2026 ini akan mampu menjembatani fungsi perencanaan dan penganggaran yang efektif dalam mengawal pencapaian target kinerja pembangunan maupun menyelesaikan permasalahan dan isu-isu strategis yang telah teridentifikasi di Kota Magelang.

3.1.1 Kondisi Perekonomian Global

Pada tahun 2024 pertumbuhan ekonomi global mengalami perlambatan dengan pertumbuhan 3,2 persen dari pertumbuhan 3,3 persen di tahun 2023. Ketidakpastian global yang semakin kompleks dipercaya turut memberi andil dalam perlambatan pertumbuhan ekonomi global. Beberapa faktor jangka pendek seperti dampak invasi Rusia Ke Ukraina, meningkatnya fragmentasi geopolitik dan geoekonomi, eksalasi timur tengah utamanya Iran dan Israel meningkatkan tensi geopolitik dan dampak yang meluas. Kondisi ini diperkirakan menyebabkan pertumbuhan ekonomi global diprediksi stagnan di pertumbuhan 3,3 persen selama tahun 2025.

Penurunan *Baltic Dry Index* menunjukkan aktivitas perdagangan global selama tahun 2023 mengalami perlambatan. Rata-rata indeks turun dari level 1.930,86 di tahun 2022 menjadi sebesar 1.393,56 di tahun 2023. Volume perdagangan pada tahun 2023 diperkirakan melambat dan berkontraksi sebesar 1,2 persen dari yang sebelumnya yang mampu tumbuh sebesar 9,6 persen dan 3,0 persen di tahun 2021 dan 2022. Pergeseran perilaku belanja konsumen dari belanja barang ke jasa, penurunan harga komoditas, tekanan inflasi dan suku bunga yang tinggi serta penguatan dolar Amerika Serikat diyakini menjadi beberapa penyebab terjadinya perlambatan aktivitas perdagangan global, selain ketegangan geopolitik yang semakin meningkat.

Pertumbuhan perdagangan global tahun 2025 diproyeksi hanya sebesar 2,6 persen dikarenakan adanya ketidakpastian geopolitik, perlambatan ekonomi Tiongkok serta tekanan harga pangan akibat perubahan iklim. Meskipun masih ada di atas rata-rata harga komoditas global sebelum pandemi, namun harga komoditas global diproyeksikan akan mengalami penurunan lebih lanjut. Pembatasan perdagangan di negara mitra dagang berdampak pada rantai pasokan yang terbatas dan memicu pertumbuhan perdagangan global yang lebih lambat. Diproyeksikan perdagangan global tahun 2021 hingga tahun 2024 menjadi pemulihan perdagangan global yang terlemah setelah resesi global dalam lima puluh tahun terakhir.

Seiring dengan pertumbuhan ekonomi global yang melambat, Purchasing Managers Index (PMI) sektor manufaktur yang menjadi indikator aktivitas manufaktur global juga mengalami perlambatan selama tahun 2024. Berbeda dengan PMI untuk setor jasa yang justru mengalami ekspansi. Perbaikan PMI sektor manufaktur dan sektor jasa terlihat di tiga bulan pertama di tahun 2025. Pelemahan permintaan serta pelemahan aktivitas manufaktur global menyebabkan harga komoditas juga mengalami penurunan dari kenaikan tinggi di tahun sebelumnya. Harga komoditas utamanya energi yang turun di tahun 2023 turut berkontribusi pada upaya penurunan tingkat inflasi oleh bank sentral di banyak negara. Kenaikan suku bunga yang ditetapkan oleh bank sentral berbagai negara merupakan respon untuk menurunkan tekanan inflasi. Tingkat suku bunga yang tinggi seperti suku bunga The Fed, Bank of England dan European Central Bank yang berkepanjangan memicu resiko perlambatan aktivitas perekonomian global.

3.1.2 Kondisi Perekonomian Nasional dan Jawa Tengah

Di tengah kondisi ketidakpastian global, Indonesia masih bisa mempertahankan pertumbuhan ekonomi di atas 5 persen, tepatnya 5,03 persen di tahun 2024. kendati demikian, dibandingkan tahun sebelumnya, perekonomian nasional mengalami sedikit perlambatan. Ekonomi nasional mengalami kontraksi pada pertumbuhan 5,03 persen di tahun 2024 dari sebelumnya 5,05 persen di tahun 2023. Pertumbuhan ekspor yang positif, terjaganya inflasi dan intensitas kegiatan partai politik menjelang pemilu turut menjaga perekonomian domestik bertahan di atas 5 persen. Produk domestik bruto per kapita Indonesia tumbuh sebesar 4,8 persen menjadi US\$4.960,3 atau setara dengan Rp 78,6 juta di tahun 2024. Sementara *Gross National Income* per kapita Indonesia tahun 2023 mencapai US\$4.750, masih termasuk dalam kategori *upper-middle income country* sebagaimana tahun 2022.

Dari sisi pengeluaran, konsumsi masyarakat mampu tumbuh 5,11 persen di tahun 2024. Pertumbuhan konsumsi ini didukung oleh pertumbuhan konsumsi rumah tangga dan pertumbuhan konsumsi lembaga non profit yang melayani rumah tangga. Peningkatan aktivitas wisata dan tingginya mobilitas masyarakat meningkatkan subkomponen konsumsi transportasi dan komunikasi serta restoran dan hotel menyebabkan konsumsi rumah tangga tumbuh sebesar 4,94 persen. Peningkatan aktivitas partai politik menjelang dan saat pelaksanaan pemilu baik legislatif maupun presiden dan wakil presiden, meningkatkan pertumbuhan konsumsi lembaga non profit yang melayani rumah tangga hingga 12,48 persen.

Investasi yang diukur dengan Pembentukan modal tetap bruto (PMTB) mengalami pertumbuhan 4,61 persen di tahun 2024, meningkat dari tahun sebelumnya. Pertumbuhan PMTB didorong oleh investasi pembangunan perumahan, infrastruktur jalan tol dan bendungan. Pendapatan dan belanja negara yang tumbuh positif di tahun 2024 mendorong konsumsi pemerintah tumbuh 6,61 persen atau dua kali lipat dibanding pertumbuhan tahun sebelumnya. Ekspor barang dan jasa tumbuh 6,51 persen, meningkat dibanding tahun 2023 sehingga kontribusi ekspor terhadap PDB juga meningkat mencapai 22,18 persen di tahun 2024.

Dari sisi lapangan usaha, pertumbuhan tertinggi dicapai oleh sektor jasa lainnya (9,52 persen) yang disumbang oleh peningkatan aktivitas rekreasi seiring peningkatan jumlah wisatawan nusantara (tumbuh 21,61 persen) dan wisatawan mancanegara (tumbuh 19,05 persen) serta berbagai event olahraga dan hiburan. Lapangan usaha transportasi dan pergudangan menempati peringkat kedua dengan pertumbuhan 8,69 persen didorong oleh peningkatan jumlah penumpang dan barang karena mobilitas masyarakat dan peningkatan kegiatan ekonomi lainnya, termasuk dipicu oleh libur natal dan tahun baru. Lapangan usaha akomodasi dan makan minum tumbuh 8,56 persen, merupakan lapangan usaha dengan pertumbuhan tertinggi ketiga.

Kontribusi industri pengolahan terhadap produk domestik bruto di tahun 2024 mencapai 18,98 persen, atau naik 0,34 persen dibandingkan tahun sebelumnya, dengan pertumbuhan sebesar 4,43 persen. Capaian ini didorong oleh pertumbuhan subsektor industri logam dasar yang tumbuh 13,34 persen sejalan permintaan luar negeri utamanya besi dan baja. Subsektor industri barang logam, barang elektronik, optik dan peralatan listrik tumbuh 6,16 persen didorong oleh permintaan luar negeri, sementara subsektor industri makanan dan minuman tumbuh 5,90 persen didorong oleh permintaan domestik untuk konsumsi dan bahan baku industri serta permintaan luar negeri. Industri pengolahan menjadi sumber pertumbuhan tertinggi bagi perekonomian tahun 2024 yaitu sebesar 0,90 persen. Aktivitas konstruksi secara keseluruhan meningkat seiring dengan pembangunan proyek infrastruktur oleh pemerintah dan swasta hingga mampu tumbuh 7,02 persen di tahun 2024, lebih tinggi dibanding tahun sebelumnya. Meningkatnya perdagangan eceran bukan mobil dan sepeda motor yang tumbuh sejalan dengan peningkatan produksi lapangan usaha pertambangan dan industri

pengolahan serta meningkatnya volume impor mendorong sektor perdagangan tumbuh positif sebesar 4,86 persen.

Pertumbuhan ekonomi yang sedikit melambat di tahun 2024 menjadi modal besar untuk menghadapi ketidakpastian global yang semakin kompleks di tahun 2025. Pertumbuhan ekonomi tahun 2025 diperkirakan pada kisaran 5,20 persen. Pelaksanaan pemilu presiden, legislatif di bulan februari dan pemilu kepala daerah di bulan november diperkirakan mendorong konsumsi rumah tangga dan lembaga non profit yang melayani rumah tangga tumbuh sebesar 5,02 persen. Inflasi domestik diperkirakan terjaga pada rentang 1,5-3,5 persen. Kinerja ekspor dan impor diperkirakan menguat dengan perkiraan pertumbuhan masing-masing sebesar 5,01 dan 4,39 persen seiring dengan pemulihan perdagangan barang global dan berlanjutnya pemulihan perdagangan jasa pasca pandemi.

Industri pengolahan diperkirakan tetap menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi nasional di tahun 2025. Kinerja industri pengolahan didukung oleh keberlanjutan proyek hilirisasi mineral terutama di wilayah timur Indonesia, peningkatan konsumsi dalam negeri seiring pelaksanaan pemilu, keberlanjutan penerapan industri 4.0 pada 7 (tujuh) subsektor prioritas serta penerapan industri hijau. Di sisi lain, kinerja pariwisata juga diperkirakan meningkat seiring dengan meningkatnya penyelenggaraan berbagai event nasional maupun internasional. Peningkatan aktivitas wisatawan diharapkan berdampak pada meningkatnya lama tinggal dan pengeluaran wisatawan sehingga meningkatkan devisa pariwisata.

Tabel 3.1 Realisasi Capaian Indikator Makro Kota Magelang 2020-2024

Pertumbuhan Ekonomi (%)	2020	2021	2022	2023	2024	Keterangan
Jawa Tengah	-2,65	3,33	5,31	4,98	4,95	Akhir Tahun 2024
Indonesia	-2,07	3,69	5,31	5,05	5,03	Akhir Tahun 2024

Sumber: BPS, 2024

Jumlah lapangan kerja baru yang tercipta selama tahun 2024 mencapai 4,79 juta, tertinggi sejak tahun 2018. Jumlah pekerja di bidang pekerjaan dengan keahlian menengah dan tinggi juga meningkat sebesar 3,86 juta orang. Capaian tersebut berdampak pada penurunan tingkat pengangguran terbuka di Agustus 2024 menjadi sebesar 4,91 persen, dari sebelumnya 5,32 persen (tahun 2023). Seiring dengan akselerasi pertumbuhan ekonomi, tingkat pengangguran terbuka di tahun 2025 diperkirakan dapat diturunkan hingga di kisaran 5,0-5,7 persen. Program Kartu Prakerja untuk meningkatkan keterampilan angkatan kerja melalui pelatihan vokasi masih akan diteruskan untuk mendukung tercapainya target penurunan tingkat pengangguran terbuka.

Penyaluran bantuan sosial seperti program keluarga harapan (PKH), BPNT, bantuan pangan beras, BLT Mitigasi Risiko Pangan dan PIP yang dikucurkan pada triwulan I 2024 mendorong peningkatan konsumsi masyarakat yang pada akhirnya menurunkan tingkat kemiskinan di Indonesia menjadi 9,03 persen di Maret 2024 dari 9,36 persen di Maret 2023. Terhitung September 2024 tingkat kemiskinan kembali menurun menjadi 8,57 persen yang didorong oleh peningkatan konsumsi rumah tangga sebesar 2,63 persen (triwulan III terhadap triwulan I 2024) serta inflasi pada level rendah sebesar 0,74 persen (september 2024). Pemerintah memperkirakan angka kemiskinan di tahun 2025 masih di kisaran 8,5-9,0 persen. Seiring dengan penurunan kemiskinan, pemerintah memperkirakan kondisi gini rasio tahun 2025 mengalami perbaikan pada rentang 0,381-0,384.

Di tingkat Provinsi Jawa Tengah, besaran produk domestik regional bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku tahun 2024 mencapai Rp1.817.776,96 miliar dan atas dasar harga konstan tahun 2010 mencapai 1.157.025,94 miliar. Berdasarkan besaran PDRB tersebut, perekonomian Jawa Tengah tahun 2024 tercatat mengalami pertumbuhan positif sebesar 4,95 persen, melambat dibanding capaian tahun 2023 yang tumbuh 4,98 persen. Perlambatan ekonomi didorong utamanya oleh melambatnya pertumbuhan industri pengolahan. Kondisi ini dipicu adanya penurunan produksi industri batubara dan pengilangan migas serta penurunan produksi industri pengolahan lainnya. Kondisi normal pasca Covid-19 juga membuat kinerja sektor transportasi dan perdagangan mengalami sedikit perlambatan meskipun tetap tumbuh positif dari 8,12 persen (tahun 2023) menjadi 5,56 persen (tahun 2024). Pertumbuhan sektor penyediaan akomodasi dan makan minum juga ikut melambat dari 11,24 persen menjadi 10,03 persen. Kendati demikian, perekonomian Jawa Tengah mengalami perbaikan di sektor konstruksi dari 6,07 persen menjadi 7,97 persen. Selain itu peningkatan juga terjadi di pertanian, jasa pendidikan, jasa kesehatan serta sub sektor penggalian.

Struktur PDRB Jawa Tengah menurut lapangan usaha atas dasar harga berlaku secara kumulatif sampai dengan Triwulan IV-2024 tidak menunjukkan perubahan berarti. Perekonomian Jawa Tengah masih didominasi oleh Lapangan Usaha Industri Pengolahan sebesar 33,84 persen; diikuti oleh Perdagangan Besar-Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 13,49 persen; Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar 13,03 persen; dan Konstruksi sebesar 11,39 persen. Peranan keempat lapangan usaha tersebut dalam perekonomian Jawa Tengah mencapai 71,75 persen. Sementara dari sisi pengeluaran, komponen penunjang utama adalah konsumsi rumah tangga yang menyumbang lebih dari 61,29 persen. Peningkatan PDRB di Jawa Tengah secara otomatis meningkatkan PDRB per kapita menjadi sebesar Rp47,97 juta, atau meningkat 6,21 persen dibanding tahun sebelumnya.

3.1.3 Kondisi Perekonomian Kota Magelang

Respons kebijakan ekonomi dan sosial yang telah dirumuskan dalam kondisi normal baru pasca pandemi mampu menjaga kestabilan perekonomian dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang terlihat dari capaian indikator makro sampai akhir tahun 2024. Dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya, peningkatan kesejahteraan masyarakat Kota Magelang terlihat dari penurunan tingkat kemiskinan, diikuti dengan penurunan tingkat pengangguran terbuka yang cukup signifikan, serta pertumbuhan IPM yang tertinggi di Jawa Tengah. Selain itu kestabilan perekonomian juga terlihat dari pertumbuhan ekonomi yang mampu bertahan di angka 5 persen dengan inflasi yang berada di kisaran 3 persen. Kendati demikian, muncul tantangan ketimpangan pendapatan yang melebar, ditunjukkan oleh gini ratio yang sempat meningkat.

Keberhasilan pembangunan di Kota Magelang selama tahun 2024 dapat dilihat dari peningkatan capaian kinerja makro di aspek ekonomi dan kesejahteraan sosial berikut:

Tabel 3.2 Realisasi Capaian Indikator Makro Kota Magelang 2017-2024

Indikator	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,46	5,44*	-2,45	3,20	5,77	5,45	5,56
TPT (%)	4,88	4,37	8,59	8,73	6,71	5,25	4,40
IPM (%)	78,31	78,80	78,99	79,43	80,39	81,17	82,15
Inflasi (%)	2,65	2,19	1,84%-3,84%*	1,53**	6,31**	3,28**	2,19**
Rasio Gini	0,387	0,412	0,405	0,452	0,427	0,419	0,462
Persentase Penduduk Miskin (%)	7,87	7,46	7,58	7,75	7,10	6,11	5,94

Sumber: BPS Kota Magelang, 2024
* Prediksi ** Berdasarkan inflasi sister city Kota Tegal

3.1.4 Pemerataan Pendapatan

Seberapa besar ketimpangan pendapatan terjadi di masyarakat bisa diukur menggunakan beberapa pendekatan indikator seperti gini ratio ataupun melihat dari share kelompok pengeluaran versi bank dunia. Secara makro, distribusi pendapatan (pengeluaran) masyarakat bisa diukur ketimpangannya menggunakan gini ratio. Dilihat dari angkanya, gini ratio di Kota Magelang masih tergolong tinggi pada kisaran 0,4 yang menunjukkan bahwa ketimpangan pendapatan di Kota Magelang masih relatif tinggi meskipun beberapa tahun terakhir sudah mengalami penurunan.

Secara lebih detail, pemerataan pendapatan ditunjukkan oleh share pengeluaran berdasarkan kriteria Bank Dunia. Persentase hasil pembangunan yang diterima oleh 40 persen penduduk berpenghasilan terendah di Kota Magelang mengalami fluktuasi dari tahun 2018-2023 dengan tren menurun. Periode sebelum pandemi Covid, penduduk berpenghasilan 40% terbawah menikmati 16,29 persen dari total konsumsi di Kota Magelang. Pada tahun 2023 persentasenya menurun hanya sebesar 16,07 persen. Meski demikian persentase ini mengindikasikan Kota Magelang masih berada pada kelompok ketimpangan pendapatan sedang/menengah. Sementara itu, kelompok 20 persen penduduk Kota Magelang dengan pendapatan tinggi justru menikmati hampir separuh (49,32%) dari total pengeluaran di Kota Magelang di tahun 2023. Penurunan gini ratio yang mengindikasikan penurunan ketimpangan lebih disebabkan karena peningkatan share pengeluaran dari

kelompok penduduk berpendapatan 40% menengah yang diikuti dengan penurunan share pengeluaran kelompok berpendapatan 20% tertinggi.

Tabel 3.3 *Pemerataan Pendapatan Penduduk Kota Magelang Menurut Kriteria Bank Dunia, 2019-2024*

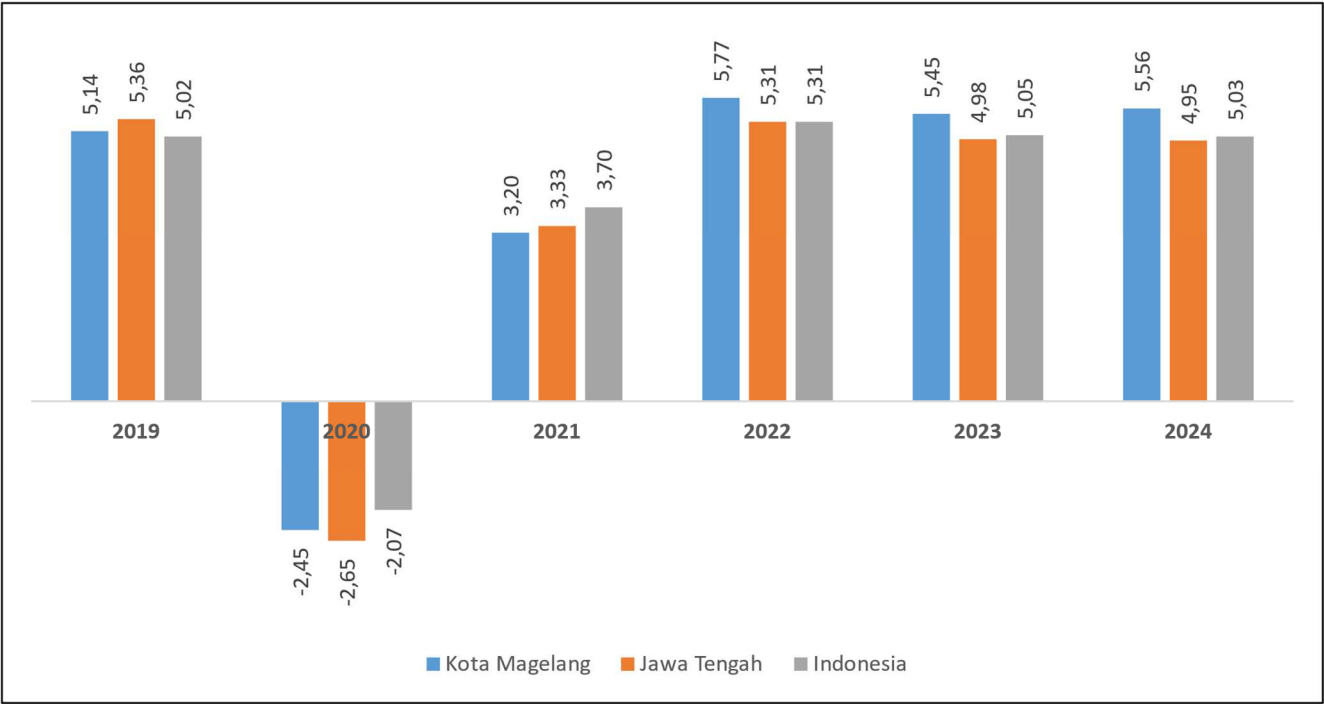
Tahun	Kriteria Bank Dunia		
	40% Pendapatan Bawah	40% Pendapatan Menengah	20% Pendapatan Tinggi
2019	15,17	37,58	47,25
2020	16,26	36,80	46,95
2021	14,90	32,91	52,19
2022	16,24	33,16	50,59
2023	16,07	34,62	49,32
2024			

Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, 2024

3.1.5 **Pertumbuhan Ekonomi**

Perekonomian di Kota Magelang tahun 2024 ini mampu menghasilkan nilai tambah yang ditunjukkan oleh nilai PDRB atas dasar harga berlaku (adhb) sebesar Rp.11.821,94 miliar. Secara nominal angka ini meningkat Rp. 833,3 miliar dibanding tahun 2023 yang sebesar Rp.10.988,11 miliar. Berdasarkan harga konstan tahun 2010 (adhk) PDRB Kota Magelang tahun 2024 senilai Rp. 7.668,79 miliar yang meningkat dari Rp. 7.264,92 miliar di tahun 2023 atau meningkat Rp.403,87 miliar.

Ekonomi Kota Magelang tahun 2024 mengalami pertumbuhan positif sebesar 5,56 persen. Sebagaimana tahun sebelumnya, pertumbuhan ekonomi Kota Magelang tahun 2024 ini mampu lebih tinggi dibanding pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah dan Pusat yang hanya sebesar 4,95 persen dan 5,03 persen.



Gambar 3.1 *Pertumbuhan Ekonomi Kota Magelang, Jawa Tengah dan Indonesia (%), 2019-2024*

Sumber: BPS Kota Magelang (2024)

Dibandingkan dengan tahun sebelumnya, perekonomian di Kota Magelang tahun ini sedikit berbeda dengan Jawa Tengah dan Indonesia. Perekonomian Indonesia dan Jawa Tengah tahun ini mengalami perlambatan dibanding tahun lalu, namun hal itu tidak terjadi di Kota Magelang. Dibanding tahun 2023, pertumbuhan ekonomi di Kota Magelang justru mengalami peningkatan. Hal ini menunjukkan bahwa geliat ekonomi di Kota Magelang lebih baik dibanding kondisi Jawa Tengah dan Indonesia.

Lapangan usaha penyediaan akomodasi dan makan minum mencatatkan pertumbuhan tertinggi di antara lapangan usaha yang lain, sebesar 10,20 persen. Selanjutnya lapangan usaha informasi dan komunikasi serta lapangan usaha jasa kesehatan juga memberikan kontribusi pada pertumbuhan ekonomi di Kota Magelang dengan pertumbuhan masing-masing sebesar 8,42 persen dan 8,24 persen.

Dari sisi pengeluaran, pertumbuhan tertinggi terjadi di komponen konsumsi Lembaga Non-Profit yang Melayani Rumah Tangga yang tumbuh hampir dua kali lipat dari tahun sebelumnya menjadi 16,42 persen. Pertumbuhan ini didorong adanya pelaksanaan pemilihan umum baik pemilihan legislatif, pemilihan presiden dan wakil presiden, maupun pemilihan kepala daerah (pilkada). Konsumsi pemerintah dan Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) tumbuh positif masing-masing sebesar 2,92 persen dan 5,31 persen. Konsumsi rumah tangga meskipun sedikit melambat namun masih tetap tumbuh positif sebesar 5,02 persen.

3.1.6 Tingkat Pengangguran Terbuka

Keberhasilan penanganan pengangguran di Kota Magelang ditunjukkan oleh menurunnya Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) yang merupakan persentase jumlah pengangguran terbuka terhadap angkatan kerja. TPT Kota Magelang menurun dari 5,25 persen (2023) menjadi 4,40 persen (2024). Seiring dengan penurunan TPT, Jumlah pengangguran terbuka di Kota Magelang tahun 2024 berkurang sebanyak 653 orang dibanding tahun lalu sehingga jumlah penganggur hanya tinggal sejumlah 2.979 orang.

Keberhasilan pembangunan ketenagakerjaan selain ditandai dengan menurunnya TPT, juga diikuti dengan peningkatan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK). Kendati jumlah penganggur dan tingkat pengangguran terbuka berkurang namun TPAK Kota Magelang ternyata juga menurun dari 69,66 persen (2023) menjadi 67,66 persen (2024). Angka ini berarti bahwa dari 100 orang penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) yang ada di Kota Magelang terdapat sekitar 67 orang yang termasuk dalam angkatan kerja di tahun 2024. Jumlah angkatan kerja menurun sebanyak 1.566 orang, sehingga jumlahnya di tahun 2024 menjadi sebanyak 67.633 orang. Menurunnya TPAK yang diiringi dengan menurunnya TPT menunjukkan adanya penurunan jumlah penduduk bekerja. Tahun 2024 jumlah penduduk bekerja berkurang sebanyak 913 orang sehingga jumlahnya menjadi sebanyak 64.654 orang.

Tabel 3.4 Indikator Ketenagakerjaan Kota Magelang, 2019-2024

Tahun	Penduduk Bekerja	Pengangguran Terbuka	Angkatan Kerja	Bukan Angkatan Kerja	TPT (%)	TPAK (%)
2019	60.649	2.769	63.418	34.220	4,37	64,95
2020	60.612	5.699	66.311	31.767	8,59	67,61
2021	60.317	5.769	66.086	32.444	8,73	67,07
2022	62.347	4.487	66.834	32.091	6,71	67,56
2023	65.567	3.632	69.199	30.141	5,25	69,66
2024	64.654	2.979	67.633	32.329	4,40	67,66

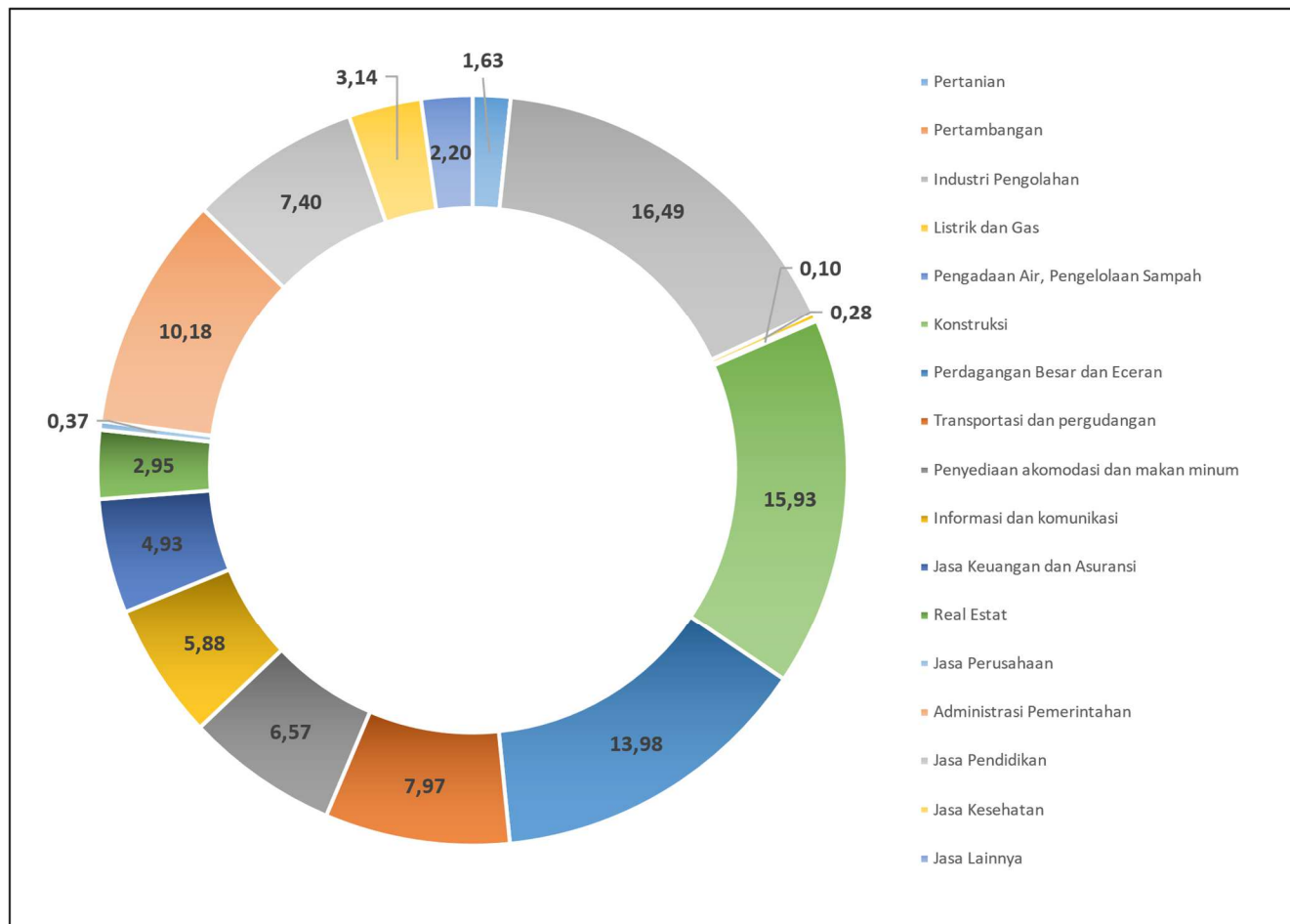
Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Magelang (2024).

3.1.7 Kontribusi Sektor Perekonomian terhadap PDRB

Struktur perekonomian Kota Magelang tahun 2023 secara umum memiliki struktur yang hampir sama dengan tahun sebelumnya. Penyangga utama perekonomian di Kota Magelang masih berasal dari tiga lapangan usaha dominan yaitu industri pengolahan (16,49 persen), konstruksi (15,93 persen) dan perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor (13,98 persen). Lapangan usaha industri pengolahan memberi

kontribusi tertinggi dalam perekonomian di Kota Magelang dalam dua tahun terakhir, menggeser posisi lapangan usaha konstruksi.

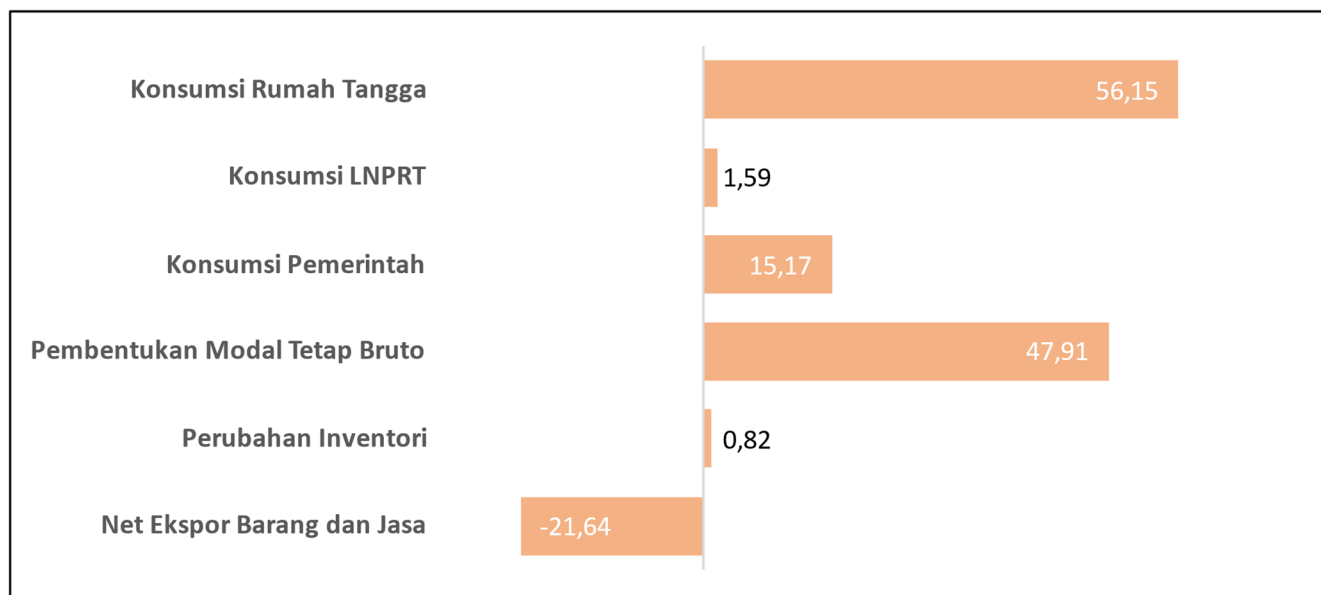
Struktur perekonomian Kota Magelang tahun 2024 dari sisi penggunaan belum banyak mengalami perubahan, didominasi oleh konsumsi rumah tangga dan Pembentukan Modal Tetap Bruto. Lebih dari separuh (56,15 persen) nilai tambah yang dihasilkan (adhb) di Kota Magelang digunakan untuk memenuhi konsumsi akhir rumah tangga dengan nilai sebesar Rp. 6.637,72 miliar. Dibandingkan tahun lalu, konsumsi rumah tangga meningkat 5,02 persen.



Gambar 3.2 Struktur Perekonomian Kota Magelang Menurut Lapangan Usaha, 2024

Sumber: BPS Kota Magelang, 2024

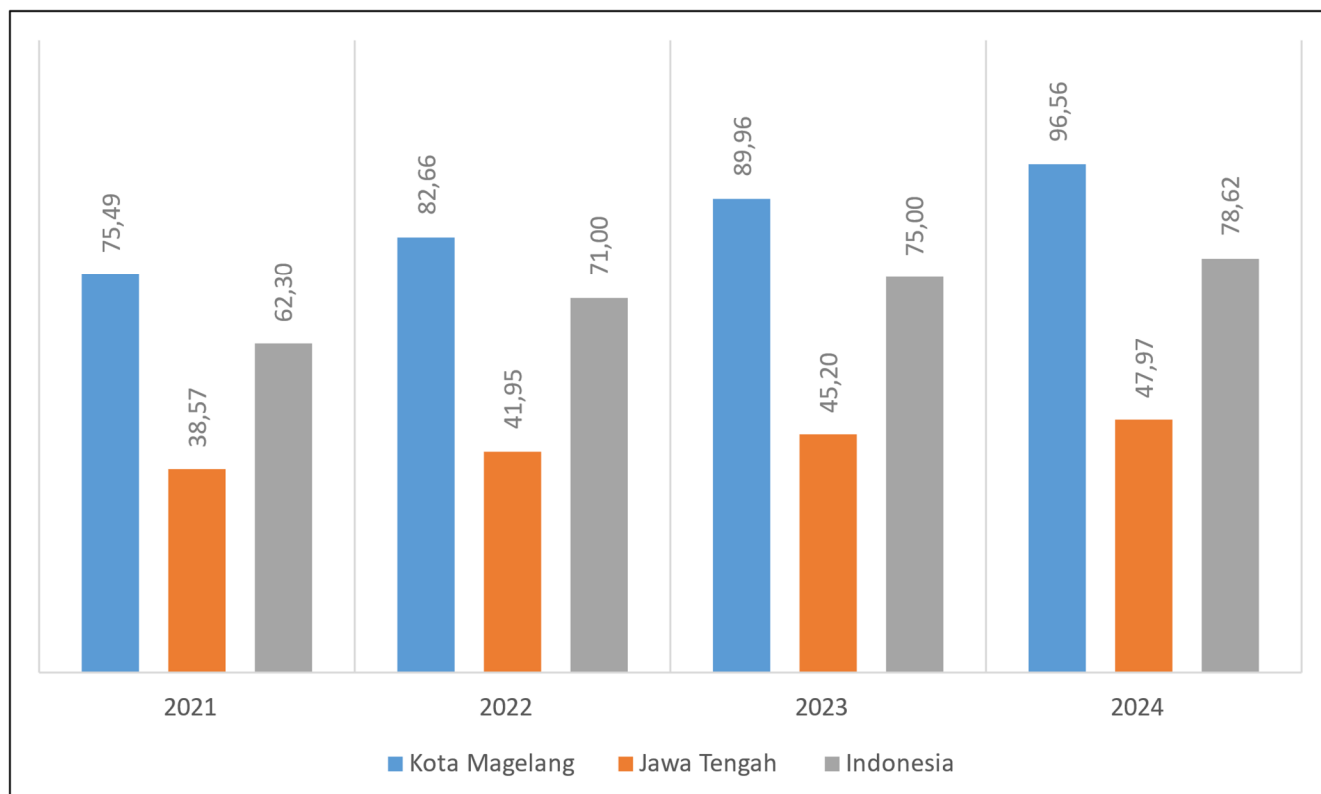
Sebanyak 47,91 persen dari nilai tambah ekonomi yang dihasilkan di Kota Magelang digunakan untuk investasi dalam bentuk Pembentukan Modal Tetap Bruto dengan nilai nominal sebesar Rp. 5.663,96 miliar. Sementara itu nilai tambah perekonomian yang digunakan untuk memenuhi konsumsi pemerintah tercatat sebesar 15,17 persen atau sebesar Rp. 1.792,83 miliar. Struktur dari net ekspor barang dan jasa yang bernilai negatif menunjukkan bahwa impor barang dan jasa dari luar daerah Kota Magelang masih lebih dominan.



Gambar 3.3 Struktur Perekonomian Kota Magelang Menurut Pengeluaran, 2024
Sumber: BPS Kota Magelang, 2024

3.1.8 PDRB per Kapita

Gambaran dan rata-rata pendapatan yang diterima oleh setiap penduduk selama satu tahun di suatu wilayah/daerah dapat diproksi dengan indikator PDRB per kapita. PDRB per kapita atas dasar harga berlaku Kota Magelang di tahun 2024 mencapai angka Rp. 96,56 juta/tahun. Angka ini meningkat 7,34 persen dibanding kondisi tahun 2023 lalu yang mencapai Rp. 89,96 Juta/tahun. Peningkatan nilai PDRB per kapita tahun 2024 seiring dengan semakin kuatnya kondisi perekonomian pasca Covid-19.



Gambar 3.4 PDRB per kapita (ADHB) Kota Magelang, Jawa Tengah dan Indonesia (Juta Rupiah/tahun), 2021-2024
Sumber: BPS, 2024

Perkembangan PDRB per kapita Kota Magelang memiliki pola yang serupa dengan Jawa Tengah dan Nasional. Atas dasar harga berlaku PDRB Per Kapita Kota Magelang tercatat selalu lebih tinggi dibanding PDRB per kapita Jawa Tengah maupun Indonesia, bahkan PDRB Per Kapita Kota Magelang nilainya mencapai hampir dua kali lipat dari capaian Jawa Tengah. Dari sisi pertumbuhan dibanding tahun lalu, pertumbuhan PDRB Per Kapita (adhb) Kota Magelang juga lebih tinggi dibanding pertumbuhan Jawa Tengah (6,13 persen) maupun Indonesia (4,83 persen). Berikut perkembangan PDRB Per Kapita Kota Magelang dalam lima tahun terakhir.

Tabel 3.5 PDRB per Kapita Kota Magelang, 2019-2023

Indikator	2020	2021	2022	2023*	2024**
PDRB per Kapita ADHB (Juta Rp/tahun)	71,70	75,49	82,66	89,96	96,56
PDRB per Kapita ADHK (Juta Rp/tahun)	51,94	53,58	56,53	59,48	62,64

Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, 2024

* Angka Sementara ** Angka Sangat Sementara

Peningkatan PDRB perkapita dapat dilakukan melalui upaya sebagai berikut:

- Menaikkan investasi berdasarkan potensi daerah sampai kepada komoditas;
- Meningkatkan program kewirausahaan / pengembangan UMKM /pengembangan ekonomi kreatif;
- Memaksimalkan penyerapan tenaga kerja pada sektor industri maupun sektor penggerak perekonomian;
- Meningkatkan kualitas SDM melalui pendidikan keterampilan; dan
- Meningkatkan produksi bagi sektor potensial daerah.

3.1.9 Inflasi

Inflasi merupakan salah satu indikator ekonomi yang digunakan untuk mengukur tingkat kecenderungan meningkatnya harga barang dan jasa secara umum dan terus menerus. Inflasi diukur dengan perubahan indeks harga konsumen (IHK). Kota Magelang tidak termasuk dalam 90 kota yang inflasinya dihitung oleh BPS. Oleh karena itu inflasi Kota Magelang didapatkan dari perkembangan harga komoditas di *sister city* (Kota Tegal) yang diasumsikan memiliki pola konsumsi yang identik dengan Kota Magelang.

Inflasi akhir tahun 2024 dicapai pada angka 2,19 persen. Dibandingkan inflasi tahun lalu (3,28 persen), inflasi tahun ini jauh lebih baik dan lebih terkendali. Dibandingkan dengan kota-kota lain di Jawa Tengah angka ini termasuk yang paling tinggi. Kendati demikian, angka ini masih dalam rentang target inflasi yang ditetapkan secara nasional sebesar $3\% + 1$. Hal ini menunjukkan bahwa harga komoditas barang/jasa di Kota Magelang relatif masih terkendali. Inflasi utamanya disebabkan karena naiknya harga emas perhiasan, beras, minyak goreng, kopi bubuk dan sigaret kretek mesin (SKM). Kenaikan harga beras merupakan fenomena umum yang terjadi pada tahun 2024 secara merata di seluruh wilayah Indonesia.

3.1.10 Tantangan dan Prospek Perekonomian Kota Magelang Tahun 2025

Perekonomian Kota Magelang sampai akhir tahun 2025 masih akan menghadapi sejumlah tantangan akibat dari pengaruh pandemi, aktivitas perekonomian regional, nasional dan global yang terjadi dalam beberapa tahun terakhir. Tantangan perekonomian yang diperkirakan masih akan dihadapi adalah:

- Pemulihan sektor primer pasca pandemi.
- Reformasi jaring pengaman sosial pasca pandemi.
- Perumusan inovasi kebijakan penanggulangan pengangguran dan kemiskinan yang efektif.
- Pemulihan geliat investasi.
- Pengelolaan inflasi pada batas wajar untuk menjaga stabilitas ekonomi makro sehingga mampu mendukung upaya percepatan pertumbuhan perekonomian yang berkelanjutan.

6. Akselerasi pertumbuhan ekonomi dengan mendorong potensi lapangan usaha unggulan dan andalan.
7. Peningkatan pemanfaatan satu data dalam mengoptimalkan *evidence-based policy making*.
8. Peningkatan daya saing lokal dalam rangka mendukung pembangunan kawasan strategis yang merupakan bagian dari prioritas pembangunan kewilayahan di Provinsi Jawa Tengah seperti pembangunan kawasan agropolitan Semar Boyong (Semarang-Boyolali-Magelang), pengaktifan jalur kereta api Semarang-Yogyakarta, pembangunan jalur tol dengan exit tol yang melewati Kota Magelang, pengembangan Candi Borobudur yang merupakan salah satu prioritas destinasi pariwisata nasional dan sebagainya.
9. Penyediaan infrastruktur yang cukup dan berkualitas dengan konsep *universal design*.
10. Peningkatan daya saing ekonomi, daya saing tenaga kerja dan produksi ekspor daerah.
11. Peningkatan produktivitas sektor ekonomi dan promosi daerah dengan pemantapan kemitraan antara pemerintah, masyarakat dan swasta.
12. Pengembangan program-program bagi perusahaan yang berskala mikro termasuk diantaranya digitalisasi UMKM.
13. Pemantapan peran koperasi.
14. Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi dalam mengintegrasikan informasi dari berbagai pihak untuk meningkatkan kualitas dan efektifitas pelayanan publik, peningkatan kompetensi dan produktivitas tenaga kerja dan penjangkaran riset inovatif sehingga dapat meningkatkan daya saing.
15. Optimalisasi nilai tambah ekonomi dari potensi ekonomi kreatif dan start up.
16. Penguatan kapasitas fiskal.

Berdasar kondisi eksisting perekonomian Kota Magelang tahun 2023 dan prediksi tahun 2024, dan tren outlook perekonomian pada skala regional dan nasional, maka perekonomian makro Kota Magelang diprediksi makin membaik di tahun 2025. Prospek perekonomian makro Kota Magelang sampai akhir tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Pertumbuhan ekonomi diprediksi berada pada rentang 5,5% - 6,20%.
2. Tingkat Pengangguran Terbuka diprediksi pada rentang 5,02% - 4,72%.
3. Persentase penduduk miskin diprediksi pada rentang 5,7% - 5,0%.
4. IPM diprediksi pada rentang 82,05-82,23.

Beberapa asumsi tersebut diharapkan dapat tercapai selama proses pembangunan. Target dan asumsi akan disesuaikan kembali jika asumsi *ceteris paribus* tidak terpenuhi, terjadi dinamika dan atau perubahan ekstrim pada faktor/variabel eksternal dan atau internal baik di skala global maupun lokal serta terdapat perubahan metode atau formulasi perhitungan indikator baku pada periode yang bersangkutan.

3.2 ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

RKPD merupakan dasar bagi penyusunan pengelolaan keuangan daerah dalam masa 1 (satu) tahun anggaran, yang terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah (penerimaan dan pengeluaran pembiayaan daerah). RKPD sebagai pedoman penyusunan APBD, disusun berdasarkan *money follow program* dimana pendekatan perencanaan dan penganggaran lebih fokus pada program, kegiatan dan sub kegiatan yang berorientasi pada pencapaian visi dan misi dalam RPJMD Tahun 2021-2026 dan prioritas pembangunan dalam RKPD Tahun 2026.

Efektivitas kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang tertuang dalam RKPD Tahun 2026 tidak terlepas dari kapasitas anggaran yang dapat terkelola oleh pemerintah daerah. Arah kebijakan keuangan daerah tahun anggaran 2026 disusun sebagai pedoman dalam pengelolaan keuangan daerah yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Kebijakan ini mempertimbangkan dinamika ekonomi nasional dan global serta prioritas

pembangunan daerah. Kebijakan keuangan daerah mencakup strategi dan prinsip dalam pengelolaan pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah guna mencapai pembangunan yang berkelanjutan.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah berhubung dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut. Keuangan daerah tersebut harus dikelola dengan prinsip-prinsip transparan, efisien, efektif, akuntabilitas dan partisipatif. Untuk itu, kebutuhan belanja pembangunan daerah selalu mempertimbangkan kapasitas fiskal daerah sebagai salah satu penopang strategis dalam pelaksanaan program-program pembangunan, yang akan selalu berdampingan dengan sumber-sumber pendanaan non APBD, seperti APBN, hibah, dan kontribusi pelaku usaha melalui *Corporate Social Responsibility (CSR)* atau Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (TJSP).

3.2.1 Kebijakan Pendapatan Daerah

Kapasitas fiskal daerah mengacu pada kemampuan pemerintah daerah dalam menghasilkan pendapatan untuk membiayai pengeluaran pembangunan dan pelayanan publik tanpa terlalu bergantung pada transfer dari pemerintah pusat. Peningkatan kapasitas fiskal sangat penting untuk mencapai kemandirian keuangan daerah. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65 Tahun 2024 tentang Peta Kapasitas Fiskal Daerah, Kota Magelang termasuk dalam kategori kapasitas fiskal sangat tinggi.

Sesuai dengan data realisasi APBD tahun anggaran 2024 (*unaudited* BPK), bahwa proporsi terbesar dari anggaran Pendapatan Daerah dalam APBD Kota Magelang masih bertumpu pada Pendapatan Transfer, yaitu masih pada kisaran 59,50% dan PAD menyumbang sebesar 40,50%. Kenyataan ini menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Magelang masih sangat tergantung pada Pemerintah Pusat dalam membiayai pembangunannya. Oleh karena itu, dalam merumuskan kebijakan yang terkait dengan Pendapatan untuk APBD Tahun Anggaran 2026 perlu benar-benar memperhatikan arah kebijakan Pemerintah pusat berkaitan dengan dana transfer dan upaya-upaya yang akan ditempuh guna meningkatkan PAD antara lain dengan memperhatikan dasar hukum pelaksanaannya.

Kebijakan Pendapatan Daerah diarahkan untuk meningkatkan sumber-sumber Pendapatan Daerah, sehingga perkiraan besaran pendapatan dapat terukur dan terealisasi dan bahkan diharapkan selalu ada upaya-upaya pengembangan cara untuk mencapai penerimaan daerah lebih dari yang ditargetkan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Pendapatan Daerah Kota Magelang berasal dari: (1) Pendapatan Asli Daerah (PAD); (2) Pendapatan Transfer; dan (3) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.

3.2.2 Kebijakan Pendapatan Asli Daerah

Pertumbuhan ekonomi Kota Magelang yang bertumpu pada sektor jasa sangat berpengaruh pada Pendapatan Daerah yang bersumber pada PAD. PAD merupakan pendapatan yang diperoleh daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sumber PAD yang dominan berasal dari Pajak Daerah. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 285 ayat (1) dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Pasal 31 ayat (1), terdapat empat sumber PAD yang memegang peranan penting dalam pengelolaan keuangan daerah, yaitu: 1) Pajak Daerah; (2) Retribusi Daerah; (3) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan; dan (4) Lain-lain PAD yang Sah.

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, maka terkait dengan pengelolaan pendapatan asli daerah khususnya dari Pajak Daerah dan Retribusi daerah, Pemerintah Kota Magelang telah menetapkan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sehingga terdapat perubahan struktur pendapatan asli daerah terutama untuk pendapatan yang diperoleh dari Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) utamanya dari penerimaan jasa kesehatan yang semula termasuk dalam Lain-Lain PAD yang sah menjadi bagian dari Retribusi Daerah.

Di sisi lain dalam rangka mendukung kebijakan Pemerintah dalam mencapai program prioritas Nasional khususnya melanjutkan pengembangan infrastruktur serta menjamin rumah murah dan sanitasi bagi rakyat yang membutuhkan, Pemerintah Kota Magelang telah menetapkan Peraturan Walikota Nomor 43 Tahun 2024 tentang Pembebasan BPHTB bagi Masyarakat berpenghasilan Rendah dan Peraturan Walikota Magelang Nomor

44 Tahun 2024 tentang Pembebasan Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah sehingga secara tidak langsung akan berpengaruh pada penerimaan pendapatan asli daerah.

Pada tahun 2024, penerimaan PAD Kota Magelang mencapai Rp349.050.511.509,00 atau melampaui target dengan persentase capaian sebesar 105,82 persen yang proporsi terbesarnya adalah dari Retribusi Daerah.

Gambaran target dan realisasi Pendapatan Asli Daerah Kota Magelang tahun 2024, Target Pendapatan Asli Daerah tahun 2025 dan Proyeksi Pendapatan Asli Daerah tahun 2026 sebagaimana tersaji dalam tabel 3.5 berikut:

Tabel 3.4 Target dan Realisasi PAD Kota Magelang Tahun 2024, Target PAD Kota Magelang Tahun 2025 dan Proyeksi PAD Tahun 2026

Kode	Uraian	Target Tahun 2024	Realisasi Tahun 2024*	Prosentase (%)	Target Tahun 2025	Target Tahun 2026
4.1	Pendapatan Asli Daerah	329,858,767,643	349,050,511,509	105.82%	360,082,774,871	374,478,674,884
4.1.01	Pajak daerah	59,010,000,000	59,039,350,736	100.05%	96,670,100,000	94,732,539,000
4.1.02	Retribusi Daerah	249,830,389,643	272,730,733,348	109.17%	242,366,051,800	260,163,133,884
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yg Dipisahkan	11,972,673,000	4,485,922,571	37.47%	12,386,623,071	10,273,502,000
4.1.04	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	9,045,705,000	12,794,504,854	141.44%	8,660,000,000	9,309,500,000

Sumber: BPKAD Kota Magelang, Tahun 2025

Keterangan*: untuk realisasi pendapatan Tahun 2024 merupakan data realisasi anggaran unaudited BPK.

Berdasarkan tabel tersebut dapat dilihat bahwa:

1. Proyeksi pendapatan asli daerah yang bersumber dari pajak daerah dan retribusi daerah tahun 2026 apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2024 maupun target tahun 2025 meningkat khususnya dari retribusi daerah. Hal ini berkaitan dengan meningkatnya pelayanan retribusi jasa kesehatan khususnya dari BLUD RSUD Tidar (sebagai rumah sakit rujukan di Magelang Raya) sehingga berdampak pada peningkatan retribusi daerah.
2. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan Tahun 2026 direncanakan lebih rendah dibandingkan target tahun 2025, yang disebabkan karena target pendapatan deviden dari BUMD lebih rendah dibandingkan dari tahun 2025 (pada realisasi tahun 2024 yang semula direncanakan Rp11.972.673.000,00 hanya terealisasi sebesar Rp4,485,922,571,00.
3. Sedangkan untuk pendapatan asli daerah yang bersumber dari pajak daerah Tahun 2026 direncanakan lebih rendah dari target Tahun 2024, yang dikarenakan :
 - a. penyesuaian target karena kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terkait penetapan besaran tarif Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) yang tetap/ tidak ada kenaikan seperti sebelum pemberlakuan Opsen PKB dan BBNKB (atau pemberlakuan diskon tarif) sehingga penetapan tarif opsen PKB dan BBNKB yang semula diperhitungkan dari kenaikan tarif PKB dan BBNKB.
 - b. penyesuaian target karena Kebijakan Nasional yang telah diterapkan menjadi kebijakan Pemerintah Kota Magelang telah ditetapkan dengan Peraturan Walikota Nomor 43 Tahun 2024 tentang Pembebasan BPHTB bagi Masyarakat berpenghasilan Rendah sehingga berpengaruh pada penerimaan pendapatan asli daerah khususnya dari BPHTB.

Selanjutnya sesuai amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, maka akan dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Peraturan Daerah tentang Retribusi Daerah, baik oleh Pemerintah Kota Magelang sendiri maupun oleh Kementerian Dalam Negeri, sehingga dimungkinkan akan terjadi penyesuaian-penyesuaian kembali atas Perda No.12 Tahun 2023 pada tahun 2026. Namun demikian untuk rencana kebijakan pendapatan asli daerah Tahun 2026 ini mengacu pada ketentuan-ketentuan yang berlaku dan diarahkan untuk pencaian target PAD tahun 2026 antara lain sebagai berikut:

1. melaksanakan kaidah-kaidah yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah serta peraturan pelaksanaannya;

2. mengoptimalkan penerimaan dari pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dengan melakukan efisiensi serta mendorong peningkatan kinerja BUMD sesuai *core bussines* serta melakukan efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan biaya sehingga mampu meningkatkan dividen.
3. melakukan pemutakhiran data pajak melalui pendataan wajib pajak dan digitalisasi peta untuk PPB-P2 dengan tujuan mempermudah dalam melakukan reklasifikasi dengan penyesuaian Nilai Jual Objek Pajak (PBB-P2) agar mendekati nilai pasar yang sesungguhnya sehingga berpengaruh juga terhadap penerimaan BPHTB.
4. mengoptimalkan penagihan piutang pajak daerah melalui penerbitan surat tagihan pajak daerah (STPD) bagi wajib pajak yang melebihi jatuh tempo pembayaran kewajiban pajak daerah..
5. melakukan verifikasi terhadap piutang pajak kepada seluruh objek pajak untuk memastikan kebenaran data piutang yang dapat ditagih sehingga mampu menjadi salah satu penerimaan PAD.
6. penerapan dan penggunaan digitalisasi peta melalui *one map policy* untuk mengoptimalkan pendapatan daerah (*Fiscal Cadaster Policy*);
7. meningkatkan monitoring alat monitoring transaksi elektronik (tapping box) secara intensif yang telah terpasang pada wajib pajak daerah untuk memastikan alat monitoring berfungsi dengan baik dan terpantunya penerimaan pajak daerah;
8. penegakan *law enforcement* berupa denda pajak bagi wajib pajak yang menunggak pembayaran pajaknya dan fasilitasi kerjasama dengan aparat penegak hukum untuk melakukan penagihan terhadap wajib pajak yang sulit tertagih;
9. melakukan pemeriksaan pajak kepada wajib pajak secara berkala untuk memastikan bahwa wajib pajak telah mematuhi kewajiban pajak daerah sesuai ketentuan tentang Pajak Daerah;
10. peningkatan kapasitas dan kapabilitas SDM pajak daerah (fiskus) melalui diklat terkait pajak daerah;
11. melakukan koordinasi intensif dengan para pemangku kepentingan terkait yang berkorelasi mendukung peningkatan pendapatan asli daerah melalui *e-pajak* dan *e-retribusi*;
12. meningkatkan kesadaran dan kepatuhan melalui sosialisasi dan pembinaan wajib pajak dan wajib retribusi secara berkala.

3.2.3 Kebijakan Pendapatan Transfer

Pemerintah daerah menganggarkan pendapatan yang bersumber dari Transfer Ke Daerah (TKD) berdasarkan alokasi yang ditetapkan setiap tahunnya dalam Undang-undang mengenai APBN dengan rincian alokasi TKD menurut provinsi dan kabupaten/kota yang ditetapkan dengan Peraturan Presiden dan juga berdasarkan informasi resmi yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam ketentuan tentang pedoman penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun sebelumnya. Hal ini dilakukan agar terdapat sinkronisasi dalam melaksanakan proyeksi pendapatan yang tercantum dalam dokumen perencanaan dan dokumen penganggaran.

Namun mengingat belum terdapat penetapan alokasi Transfer Ke Daerah (TKD) untuk tahun anggaran 2026, maka sesuai dengan kaedah penyusunan anggaran seperti halnya dalam ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2025, maka dalam merencanakan besaran alokasi pendapatan transfer dengan berdasarkan alokasi dana transfer tahun sebelumnya, dengan tetap memperhatikan kemungkinan realisasi penerimaan Negara tahun sebelumnya. Selain itu dalam menentukan besaran alokasi TKD, juga memperhatikan beberapa ketentuan antara lain Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 29 Tahun 2025 tentang Penyesuaian Rincian Alokasi Transfer Ke Daerah Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2025 Dalam Rangka Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Dan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

Tabel 3.5 Target dan Realisasi Pendapatan Transfer Kota Magelang Tahun 2024, Target Pendapatan Transfer Kota Magelang Tahun 2025 dan Proyeksi Pendapatan Transfer Tahun 2026

Kode	Uraian	Target Tahun 2024	Realisasi Tahun 2024*	Target Tahun 2025	Target Tahun 2026
4.2	Pendapatan Transfer	654,020,139,805	663,233,203,738	624,423,880,424	529,853,922,096
4.2.01	Transfer Pemerintah Pusat	594,490,412,805	610,994,228,855	588,368,385,000	500,944,202,000
4.2.01.06	Insentif Fiskal	16,270,817,000	16,270,817,000	15,339,346,000	0
4.2.01.07	Dana Bagi Hasil (DBH)	27,101,199,650	30,208,919,000	33,874,803,000	33,874,803,000
4.2.01.08	Dana Alokasi Umum	434,125,214,981	453,244,643,000	472,384,836,000	467,069,399,000
4.2.01.09	Dana Alokasi Khusus	116,993,181,174	111,269,849,855	82,108,746,000	0
4.2.02	Transfer Antar Daerah	59,529,727,000	52,238,974,883	36,055,495,424	28,909,720,096
4.2.02.01	Pendapatan Bagi Hasil	57,679,216,000	50,402,691,383	36,055,495,424	28,909,720,096
4.2.02.02	Bantuan Keuangan dari Provinsi	1,850,511,000	1,836,283,500	0	0

Sumber: BPKAD Kota Magelang, Tahun 2025

Keterangan : *Realisasi tahun 2024 unaudited BPK

Berdasarkan tabel tersebut di atas dapat dilihat bahwa:

1. Pada rencana atau target pendapatan transfer pemerintah pusat Tahun 2026, disusun dengan mempertimbangkan hal-hal antara lain:
 - a. Insentif Fiskal pada tahapan penyusunan RKPD Tahun Anggaran 2026 direncanakan alokasinya sebesar Rp.15.000.000.000,-.
 - b. Dana Bagi Hasil (DBH) direncanakan alokasinya sebesar Rp33,874,803,000,00 sesuai dengan alokasi tahun anggaran 2025.
 - c. Dana Alokasi Umum (DAU) direncanakan alokasinya sebesar Rp467.069.399.000,00 dengan rincian sebagai berikut:
 - Dana Alokasi Umum yang tidak ditentukan penggunaannya direncanakan alokasinya sebesar Rp427.366.116.000,00 sesuai dengan alokasi tahun anggaran 2025.
 - DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan direncanakan alokasinya sebesar Rp3.400.000.000,00 sesuai dengan alokasi tahun anggaran 2025.
 - DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja direncanakan alokasinya sebesar Rp4.646.275.000,00 sesuai dengan alokasi tahun anggaran 2025.
 - DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan direncanakan alokasinya sebesar Rp22.485.071.000,00 sesuai dengan alokasi tahun anggaran 2025.
 - DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan direncanakan alokasinya sebesar Rp9.171.937.000,00 sesuai dengan alokasi tahun anggaran 2025.
 - DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum tidak direncanakan alokasinya pada tahun 2026, karena sesuai kebijakan yang tertuang dalam Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 29 Tahun 2025 tentang Penyesuaian Rincian Alokasi Transfer Ke Daerah Menurut Provinsi/ Kabupaten/ Kota Tahun Anggaran 2025 Dalam Rangka Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Dan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.
 - d. Dana Alokasi Khusus (DAK) belum dialokasikan rencana anggarannya, mengingat belum ada informasi resmi mengenai alokasi DAK TA 2026, hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2025.

2. Pada pendapatan Transfer Antar Daerah sesuai ketentuan yang berlaku, belum merencanakan Bantuan Keuangan Provinsi dan hanya menganggarkan pendapatan Bagi Hasil Pajak dengan mengacu pada alokasi Bagi Hasil Pajak dari Provinsi Jawa Tengah tahun 2025 yang ditetapkan dalam Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 100.3.3.1/14 Tahun 2025 tentang Alokasi Dana Bagi Hasil Penerimaan Pajak Daerah Kepada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2025. Selanjutnya terkait bagi hasil pajak PKB dan BBNKB tahun 2026 tidak dianggarkan lagi karena mulai tahun 2025 pendapatan yang berasal dari bagian PKB dan BBNKB untuk pemerintah Kabupaten/ Kota menjadi dalam bentuk opsen pajak PKB dan BBNKB sesuai ketentuan perundang-undangan.

3.2.4 Kebijakan Lain-lain Pendapatan yang Sah

Lain-lain pendapatan daerah yang sah merupakan pendapatan daerah selain pendapatan asli daerah dan pendapatan transfer, terdiri dari pendapatan hibah, dana darurat dan lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemerintah Kota Magelang pada tahun 2026 tidak memproyeksikan pendapatan yang bersumber dari Lain-lain Pendapatan yang Sah, karena Pemerintah Kota Magelang belum mendapatkan alokasi pendapatan hibah, dana darurat dan lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan kebijakan pendapatan baik pendapatan asli daerah, pendapatan transfer maupun lain-lain pendapatan yang sah, maka secara keseluruhan Proyeksi Pendapatan Daerah Kota Magelang Tahun 2026 sebagaimana tersaji dalam Tabel 3.6 berikut:

Tabel 3.6 *Proyeksi Pendapatan Daerah Kota Magelang Tahun 2026*

Kode	Uraian	Proyeksi Tahun 2026
4.1	Pendapatan Asli Daerah	374,478,674,884
4.1.01	Pajak daerah	94,732,539,000
4.1.02	Retribusi Daerah	260,163,133,884
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yg Dipisahkan	10,273,502,000
4.1.04	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	9,309,500,000
4.2	Pendapatan Transfer	550,252,842,000
4.2.01	Transfer Pemerintah Pusat	515,944,202,000
4.2.02	Transfer Antar Daerah	34,308,640,000
4.3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah	0
4.3.01	Pendapatan Hibah	0
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	0
	Jumlah Pendapatan Daerah	924,731,516,884

3.2.5 Arah Kebijakan Belanja Daerah

Kebijakan belanja daerah perlu dimaksimalkan untuk mencapai visi, misi, sasaran dan tujuan pembangunan daerah yang difokuskan pada program dan kegiatan yang didanai dari penerimaan daerah. Belanja daerah pada tahun anggaran 2026, dialokasikan pada setiap perangkat daerah dimana besarnya ditentukan berdasarkan target kinerja pelayanan publik tiap-tiap urusan pemerintahan yang difokuskan pada prioritas pembangunan

yang telah ditetapkan serta tidak dilakukan berdasarkan pertimbangan pemerataan antar perangkat daerah atau berdasarkan alokasi anggaran pada tahun anggaran sebelumnya.

Pada tahun 2026 terdapat agenda yang cukup besar yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Magelang, yaitu Pembangunan Gedung Balai Kota. Untuk melaksanakan pembangunan Gedung Balai Kota yang memerlukan dana cukup besar, maka perlu menyiapkan alokasi dana melalui pembentukan dana cadangan. Kegiatan Pembangunan Gedung Balai Kota Magelang akan dilaksanakan secara bertahap yang dilaksanakan dalam kegiatan secara *multy years* atau dalam bentuk kegiatan tahun jamak, dimulai dari Tahun Anggaran 2025. Kegiatan pembangunan Gedung Balai Kota ini cukup memberikan dampak terhadap kebijakan pengalokasian belanja daerah, sehingga kebijakan belanja daerah pada tahun 2026 akan sangat difokuskan pada program dan kegiatan yang benar-benar prioritas.

Melihat prediksi kemampuan keuangan daerah tahun 2026 serta program utama yang akan dilaksanakan pada tahun 2026, maka kebijakan belanja daerah yang akan dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Memenuhi belanja yang bersifat wajib dan mengikat guna menjamin kelangsungan pemenuhan pelayanan dasar masyarakat.
2. Memenuhi kebutuhan belanja Pembangunan Gedung Balai Kota.
3. Memprioritaskan belanja daerah untuk program, kegiatan dan sub kegiatan yang berorientasi pada pemenuhan pencapaian sasaran pembangunan.
4. Mengupayakan belanja untuk pemenuhan kebutuhan urusan pemerintahan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar publik untuk pencapaian standar pelayanan minimal.
5. Memperhatikan dan melaksanakan sinkronisasi program prioritas Daerah dengan prioritas provinsi dan prioritas nasional.
6. Mengupayakan pemenuhan alokasi minimal mandatory spending yang telah ditetapkan peraturan perundang-undangan
7. Mengalokasikan belanja daerah yang berasal dari TKD yang telah ditentukan penggunaannya dianggarkan dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya dengan memperhatikan target pendapatan daerah, realisasi belanja daerah tahun 2024, target belanja daerah tahun 2025 maka proyeksi belanja daerah tahun 2026 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.7 Target dan Realisasi Belanja Daerah Kota Magelang Tahun 2024, Target Belanja Daerah Kota Magelang Tahun 2025 dan Proyeksi Belanja Daerah Tahun 2026

Kode	Uraian	Target Tahun 2024	Realisasi Tahun 2024	Target Tahun 2025	Proyeksi Tahun 2026
5.1	Belanja Operasi	958,709,618,977	893,557,312,908	945,950,568,920	881,421,154,700
5.1.01	Belanja Pegawai	422,613,617,835	377,979,984,623	449,685,709,147	412,573,964,147
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	503,889,552,942	483,549,569,720	475,338,500,970	524,083,305,072
5.1.03	Belanja Bunga	0	0	0	0
5.1.04	Belanja Subsidi	0	0	0	0
5.1.05	Belanja Hibah	29,237,048,200	29,149,758,565	18,635,244,003	7,288,132,865
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	2,969,400,000	2,878,000,000	2,291,114,800	2,291,114,800
5.2	Belanja Modal	182,473,215,970	166,117,550,439	147,647,647,375	76,603,750,000
5.3	Belanja Tidak Terduga	1,987,166,000	967,496,500	21,500,000,000	3,000,000,000
5.4	Belanja Transfer	0	0	0	0
	JUMLAH BELANJA	1,143,170,000,947	1,060,642,359,847	1,115,098,216,295	1,025,840,266,884

Sumber: BPKAD Kota Magelang, 2025

Keterangan: Realisasi Tahun 2024 un audited

3.2.6 Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan daerah ini terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan daerah.

Adapun Kebijakan pengelolaan pembiayaan daerah di Kota Magelang adalah sebagai berikut:

1. Kebijakan Penerimaan Pembiayaan Daerah

Kebijakan Penerimaan Pembiayaan Daerah di Kota Magelang dilakukan sesuai regulasi dan memperhitungkan secara cermat dan rasional dan mempertimbangkan perkiraan realisasi anggaran tahun sebelumnya dalam rangka menghindari kemungkinan adanya pengeluaran yang tidak dapat didanai akibat tidak tercapainya SILPA yang direncanakan.

2. Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan Daerah

Pengeluaran pembiayaan daerah Kota Magelang diarahkan untuk investasi (penyertaan modal) ke BUMD. Hal ini dilakukan untuk memperkuat struktur permodalan, sehingga BUMD dapat lebih berkompetisi, tumbuh dan berkembang. Pada Tahun Anggaran 2026 direncanakan untuk Pembentukan dana cadangan pembangunan Balai Kota Magelang sebesar Rp10.0000.000,000,00 dan Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah sebesar Rp10.000.000,000,00.

Dengan memperhatikan target pendapatan daerah, proyeksi belanja daerah dan kebijakan pembiayaan daerah, struktur realisasi dan proyeksi pembiayaan daerah Kota Magelang digambarkan sebagai berikut.

Tabel 3.8 Target dan Realisasi Pembiayaan Daerah Kota Magelang Tahun 2024, Target Pembiayaan Daerah Kota Magelang Tahun 2025 dan Proyeksi Pembiayaan Daerah Tahun 2026

Kode	Uraian	Target Tahun 2024	Realisasi Tahun 2024	Target Tahun 2025	Proyeksi Tahun 2026
6.1	Penerimaan Pembiayaan Daerah	171,286,093,499	170,827,068,000	117,752,215,000	121,108,750,000
6.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sblmnya	155,395,381,599	155,395,381,600	70,747,215,000	44,500,000,000
6.1.2	Pencairan Dana Cadangan	15,890,711,900	15,431,686,400	47,000,000,000	76,603,759,000
6.1.3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0	0	0	0
6.1.4	Penerimaan Pinjaman Daerah dan Obligasi daerah	0	0	0	0
6.1.6	Penerimaan Piutang Daerah	0	0	0	0
6.1.7	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	0	0	5,000,000	5,000,000
6.2	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	12,000,000,000	12,000,000,000	2,500,000,000	20,000,000,000
6.2.1	Pembentukan Dana Cadangan	12,000,000,000	12,000,000,000	0	10,000,000,000
6.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	0	0	2,500,000,000	10,000,000,000
6.2.3	Pembayaran Pokok Utang	0	0	0	0
6.2.4	Pemberian Pinjaman Daerah	0	0	0	0
6.2.5	Pemberian Dana Bergulir	0	0	0	0
	JUMLAH PEMBIAYAAN NETTO	159,286,093,499	158,827,068,000	115,252,215,000	101,108,750,000

Sumber: BPKAD Kota Magelang, tahun 2025
Keterangan: Realisasi Tahun 2024 un audited

Berdasarkan target pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah maka proyeksi struktur APBD Kota Magelang Tahun Anggaran digambarkan sebagaimana tabel di bawah ini:

Tabel 3.9 *Proyeksi Struktur APBD Kota Magelang Tahun Anggaran 2026*

Kode	Uraian	Proyeksi Tahun 2026
4	Pendapatan Daerah	924,731,516,884
4.1	Pendapatan Asli Daerah	374,478,674,884
4.1.01	Pajak daerah	94,732,539,000
4.1.02	Retribusi Daerah	260,163,133,884
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yg Dipisahkan	10,273,502,000
4.1.04	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	9,309,500,000
4.2	Pendapatan Transfer	550,252,842,000
4.2.01	Transfer Pemerintah Pusat	515,944,202,000
4.2.02	Transfer Antar Daerah	34,308,640,000
4.3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah	0
4.3.01	Pendapatan Hibah	0
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	0
5	Belanja Daerah	1,025,840,266,884
5.1	Belanja Operasi	946,236,516,884
5.1.1	Belanja Pegawai	412,573,964,147
5.1.5	Belanja Barang dan Jasa	524,083,305,072
5.1.3	Belanja Bunga	0
5.1.4	Belanja Subsidi	0
5.1.5	Belanja Hibah	7,288,132,865
5.1.6	Belanja Bantuan Sosial	2,291,114,800
5.2	Belanja Modal	76,603,750,000
5.3	Belanja Tidak Terduga	3,000,000,000
5.4	Belanja Transfer	0
	Surplus/Defisit	(101,108,750,000)
6	Pembiayaan Daerah	
6.1	Penerimaan Pembiayaan Daerah	121,108,750,000
6.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya	44,500,000,000
6.1.2	Pencairan Dana Cadangan	76,603,750,000
6.1.3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0
6.1.4	Penerimaan Pinjaman Daerah dan Obligasi daerah	0
6.1.6	Penerimaan Piutang Daerah	0
6.1.7	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	5,000,000
6.2	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	20,000,000,000
6.2.1	Pembentukan Dana Cadangan	10,000,000,000
6.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	10,000,000,000
6.2.3	Pembayaran Pokok Utang	0

Kode	Uraian	Proyeksi Tahun 2026
6.2.4	Pemberian Pinjaman Daerah	0
6.2.5	Pemberian Dana Bergulir	0
	Pembiayaan Netto	101,108,750,000
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan	0

BAB 4

SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Hasil capaian kinerja sampai dengan triwulan IV tahun 2024 menjadi gambaran akhir atas capaian kinerja RKPD Tahun 2024 sekaligus sebagai evaluasi atas kinerja pada tahun 2024. Hasil evaluasi RKPD tahun 2024 ini digunakan sebagai dasar untuk merumuskan target sasaran RKPD Tahun 2026 serta menjadi pertimbangan dalam menentukan sasaran dan prioritas pembangunan daerah. Adapun sasaran prioritas daerah yang tertuang dalam RKPD Kota Magelang tahun 2026 disusun berdasarkan:

1. Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2026;
2. Prioritas RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026;
3. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Magelang Tahun 2025 - 2029; dan
4. Pokok-pokok pikiran DPRD.

Substansi yang akan diuraikan dalam bab ini secara garis besar terdiri dari:

1. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran, serta Strategi dan Arah Kebijakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
2. Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2026;
3. Arah Pengembangan Wilayah Terpadu Kota Magelang;
4. Sasaran dan Prioritas Daerah dalam Mendukung Pencapaian Target SDG's Kota Magelang;
5. Sasaran dan Prioritas Daerah dalam Mendukung Pengarusutamaan Gender (PUG) dan Inklusi Sosial;
6. Sasaran dan Prioritas Daerah dalam Mendukung Pengarusutamaan Kerentanan Bencana, Pembangunan Rendah Karbon dan Ketahanan Iklim;
7. Sasaran dan Prioritas Daerah dalam Mendukung Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM); dan
8. Sasaran dan Prioritas Daerah dalam Mendukung Pencapaian Transformasi Digital.

Secara detail diuraikan sebagai berikut:

4.1 TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN

4.1.1 Visi Pembangunan Daerah

Penyusunan RKPD Tahun 2026 masih dalam masa transisi dan milestone penyusunan RPJMD 2025-2029, dengan mengusung Visi : Magelang Kota Perdagangan dan Jasa yang Harmonis, Humanis, Nyaman dan Berkelanjutan dengan melibatkan 6 misi, 4 klaster program, 19 program unggulan dan 11 program prioritas. Oleh karena itu sampai dengan tahapan Rancangan RKPD Kota Magelang Tahun 2026, mengingat RPJMD Kota Magelang Tahun 2025-2029 baru dalam tahapan rancangan, paska selesainya Rancangan akhir RPJMD Kota Magelang Tahun 2025-2029, Rancangan akhir RKPD Kota Magelang Tahun 2026 akan segera dilakukan penyesuaian seperlunya.

RKPD Kota Magelang Tahun 2026 merupakan perencanaan tahun 2025 untuk dilaksanakan pada tahun 2026. Tahun perencanaan 2026 merupakan pertama pelaksanaan RPJMD Kota Magelang tahun 2025-2029. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Magelang tahun 2026 disusun berdasarkan pada: (1) visi dan misi RPJMD beserta tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, tema dan prioritas pembangunan; (2) hasil evaluasi RKPD tahun 2024; (3) Isu strategis Daerah; (4) Prioritas dan sasaran Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2026; (5) Prioritas dan sasaran RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026.

Visi menurut peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 merupakan rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan. Adapun visi pembangunan daerah adalah visi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih yang disampaikan pada waktu pemilihan kepala daerah dan menjadi arah pembangunan yang ingin dicapai dalam periode masa jabatannya. Visi pembangunan daerah Kota Magelang sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kota Magelang tahun 2025-2029 serta menjadi pedoman dalam penyusunan RKPD Tahun 2026 yaitu:

"MAGELANG KOTA PERDAGANGAN DAN JASA YANG HARMONIS, HUMANIS, NYAMAN DAN BERKELANJUTAN "

Penjabaran masing-masing unsur dari Visi tersebut sebagaimana tersaji dalam Tabel 4.1.

Tabel 4.1 Penjelasan Visi

UNSUR VISI	PENJELASAN
Magelang	Magelang adalah suatu wilayah dibawah administrasi Pemerintah Kota Magelang, dengan luas wilayah $\pm 18,56 \text{ km}^2$ dan terdiri dari 3 kecamatan dan 17 kelurahan.
Kota Perdagangan dan Jasa	Merujuk pada peraturan Daerah Kota Magelang nomor 5 tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Magelang tahun 2025-2045, Perdagangan dan Jasa dimaknai sebagai pembangunan Kota Magelang yang diarahkan untuk memperkuat sektor perdagangan skala mikro dan jasa dengan menitikberatkan pada sektor perekonomian, kesehatan, pendidikan, pariwisata dan transportasi yang inovatif dan berlandaskan IPTEK serta berwawasan lingkungan sebagai bentuk pemanfaatan posisi strategis wilayah.
Harmonis	Makna harmonis yang terkait dengan keselarasan , keserasian dan kesetaraan , maka Kota Magelang diarahkan untuk menjadi kota inklusif . Keharmonisan dalam menjalin hubungan antar warga masyarakat mencakup segala aspek, dengan penekanan pada keharmonisan hubungan antar pemeluk agama. Hubungan antara agama dan penganutnya bersifat esensial. Dengan mengutamakan hal yang esensial maka akan merambat dan menjadi penarik bagi hubungan dalam aspek kehidupan lain dalam masyarakat. Harmonis mencerminkan kehidupan sosial yang rukun dan damai, dengan interaksi yang sehat antar warga serta kerukunan antar umat beragama. Harmonis juga mencerminkan keseimbangan antara pembangunan fisik dan pelestarian budaya lokal agar identitas Kota Magelang tetap terjaga dalam proses modernisasi.
Humanis	Berawal dari tercapainya aspek keharmonisan, maka akan mengarah pada pencapaian kota yang humanis . Kota yang humanis adalah kota yang mengedepankan kepentingan dasar manusia dalam pembangunan. Pembangunan Kota Magelang menempatkan manusia sebagai pusat kebijakan, dengan mengutamakan kesejahteraan, keadilan sosial, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Humanis berarti bahwa setiap individu memiliki akses yang setara terhadap layanan publik, termasuk pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial. Hal ini juga mencerminkan pendekatan inklusif dalam pembangunan, yang memperhatikan kelompok rentan seperti difabel, lansia, dan masyarakat miskin. Konsep tersebut dilaksanakan melalui penerapan pengendalian pertumbuhan kota, kota hemat energi, kota yang menerapkan sistem transportasi cerdas, kota yang ramah lingkungan dan kota yang layak huni
Nyaman	Dengan terwujudnya kota yang harmonis dan humanis maka akan menuju terwujudnya kota yang nyaman dan inklusif sehingga masyarakat dan orang yang datang ke Magelang akan merasakan pesona kota yang jauh lebih baik. Masyarakat terjamin kenyamanan dalam hidup dan berusaha sehingga kondusifitas wilayah dapat terjaga keberlangsungannya.
Berkelanjutan	Aspek berkelanjutan sebagai indikasi bahwa pemerintahan periode ini tetap mengutamakan kepentingan-kepentingan yang harus dijaga keberadaannya di masa yang akan datang. Pengelolaan segala potensi yang dimiliki kota akan selalu mempertimbangkan keberlanjutannya untuk dapat tetap dimiliki dan dinikmati oleh generasi mendatang Berkelanjutan dimaknai dengan pengembangan kemampuan adaptif dan kemandirian daerah dalam memanfaatkan sumber daya serta mengelola wilayahnya secara efektif sehingga dapat mewujudkan Kota Magelang yang berdaya dengan memperhatikan kelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup untuk mendukung keberlangsungan pembangunan. Kota Magelang yang Berkelanjutan, mampu meningkatkan kualitas hidup lingkungan dan masyarakat serta memiliki daya tahan terhadap bencana.

Sumber: RPJMD Kota Magelang 2021-2026

4.1.2 Misi Pembangunan Daerah

Dalam rangka mewujudkan visi Magelang Kota Perdagangan Jasa yang Harmonis, humanis nyaman dan berkelanjutan, maka diterjemahkan ke dalam misi pembangunan sebagai berikut:

1. Misi 1: Menciptakan masyarakat yang bermartabat

Misi ini mengusung nilai masyarakat Kota Magelang diperlakukan secara hormat bermartabat, terlindungi, dan menjalani standar hidup layak. Masyarakat Kota Magelang adalah sumber daya manusia yang harus diarahkan untuk menjadi modal yang potensial bagi pembangunan Kota Magelang. Nilai-nilai agama dan budaya harus ditanamkan dan menjadi landasan dalam menjalankan kehidupan kemasyarakatan. Masyarakat yang bermartabat adalah masyarakat yang menjunjung tinggi kehormatan diri, mempunyai harga diri dan derajat kemanusiaan yang luhur. Pemerintah Kota Magelang berkomitmen untuk menempatkan masyarakat sebagai pihak yang mendapatkan keistimewaan dalam pelayanan. Itu semua dalam rangka menjaga martabat masyarakat tetap terjunjung tinggi.

Pemerintah kota berkewajiban mengatasi ketimpangan sosial dalam peningkatan kesejahteraan dan ketahanan masyarakat. Dengan layanan Adminduk yang inklusif dan berkualitas, hak-hak warga negara, terutama perempuan dan keluarga, dapat lebih terlindungi, sehingga berkontribusi pada meningkatnya kesetaraan gender dan ketahanan keluarga yang lebih kuat. Oleh karena itu, misi ini menjadi payung dari upaya menurunkan angka kemiskinan, meningkatkan akses layanan dasar bagi kelompok rentan, memperkuat ketahanan keluarga, serta melindungi masyarakat dari kerentanan sosial ekonomi.

2. Misi 2. Meningkatkan infrastruktur yang inovatif dan berwawasan lingkungan

Masyarakat yang berkualitas, harmonis, bermartabat membutuhkan wadah yang nyaman, yaitu lingkungan tempat tinggal yang sehat, nyaman dan berkualitas. Selain itu dukungan infrastruktur yang memadai diperlukan sebagai katalis percepatan proses pembentukan kondisi masyarakat yang dikehendaki. Inovasi dalam penyediaan infrastruktur mutlak menjadi prioritas. Guna mendukung kualitas inovasi maka penerapan prinsip dan konsep kota cerdas tetap akan ditempuh. Infrastruktur yang cerdas menjadi salah satu faktor pendukung mitigasi perubahan iklim. Penyediaan infrastruktur juga mencakup infrastruktur digital guna mendukung implementasi konsep kota cerdas.

Misi ini menekankan penguatan infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan untuk meningkatkan konektivitas, mitigasi bencana, dan daya saing Kota Magelang, termasuk transportasi publik, drainase, sanitasi, ruang terbuka hijau, serta infrastruktur hijau yang adaptif terhadap perubahan iklim.

Misi ini juga mengupayakan terwujudnya kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan, termasuk pengelolaan sampah sirkuler, penurunan gas emisi rumah kaca, dan pemasyarakatan pemanfaatan energi terbarukan. Selain itu, penguatan sistem ketahanan pangan juga menjadi bagian penting dalam mendukung keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat, melalui optimalisasi lahan perkotaan, distribusi pangan yang efisien, dan pengurangan limbah pangan.

Misi ini hendak mewujudkan pembangunan sarana prasarana yang terkoneksi dengan upaya menurunkan risiko bencana, meningkatkan ketahanan lingkungan, serta memastikan ketersediaan pangan yang berkelanjutan bagi masyarakat.

3. Misi 3. Menciptakan keharmonisan antar umat beragama

Hubungan harmonis antar umat beragama bermakna terjalinnya hubungan yang baik, saling menghormati, saling memahami, saling menyayangi, selalu berbuat baik, berkata lemah lembut, dan sopan santun. Masing-masing agama pasti mengajarkan kebaikan. Oleh karena itu berbagai kebaikan dan kemajemukan harus selalu dijaga sebagai modal utama terwujudnya wilayah Kota Magelang yang lebih kondusif.

Misi ini memerlukan penguatan kohesi sosial melalui pembinaan wawasan kebangsaan, pelestarian budaya lokal, serta peningkatan literasi digital untuk menyaring informasi dan mencegah disinformasi yang dapat memicu konflik sosial. Pelestarian Cagar Budaya (CB), seperti situs bersejarah dan tempat ibadah, serta Warisan Budaya Tak Benda (WBTB), seperti seni, ritual adat, dan tradisi lokal, menjadi sarana mempererat hubungan sosial dan menanamkan nilai toleransi dalam masyarakat. Keberlanjutan warisan budaya ini berperan penting dalam menjaga nilai-nilai kebersamaan dan memperkuat identitas masyarakat di tengah keberagaman. Oleh karena itu, misi ini menjadi payung bagi pengembangan Kota Magelang yang kondusif, aman, tertib, serta stabil secara sosial, sekaligus mencegah konflik berbasis keberagaman melalui penguatan nilai budaya sebagai perekat sosial.

4. Misi 4. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas

Misi ini untuk menghasilkan masyarakat Kota Magelang yang sehat terdidik, terampil dan produktif. Misi ini menekankan penguatan pendidikan, keterampilan berbasis industri, literasi IPTEKS, serta kualitas kesehatan

sebagai faktor fundamental dalam menciptakan tenaga kerja yang produktif, adaptif, dan berdaya saing guna menghadapi transformasi ekonomi digital.

5. Misi 5. Meningkatkan perekonomian dan pariwisata yang berdaya saing

Pengelolaan berbagai obyek yang menjadi roda penggerak ekonomi kota harus lebih dioptimalkan agar bisa menjadi sumber pendapatan kota yang pada akhirnya memberi manfaat lebih bagi peningkatan pendapatan Masyarakat. Prioritas pada peningkatan kepariwisataan didasarkan pada upaya untuk memperoleh nilai lebih dari Pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional Borobudur dan sekitarnya. Aksesibilitas dari dan ke kota menjadi lebih baik dengan adanya pintu masuk dan keluar Jalan Tol Bawen-Yogyakarta. Misi ini memayungi upaya penguatan sektor perdagangan, industri kreatif, peningkatan kemudahan investasi, pemberdayaan UMKM dan perdagangan berbasis digital, untuk meningkatkan daya saing daerah secara berkelanjutan.

6. Misi 6. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik

Tata kelola pemerintahan adalah seperangkat alat atau *tools* guna mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Dukungan sumber daya manusia yang berkualitas serta kuat secara moralitas dan menjadi modal yang tangguh dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang baik, bersih dan inovatif. Dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, setidaknya harus diterapkan beberapa prinsip, yaitu partisipasi masyarakat, penegakan hukum, transparansi, kesetaraan, efektifitas, efisiensi serta akuntabilitas. Misi ini menekankan reformasi birokrasi, transformasi digital, penguatan akuntabilitas, serta sinergi antar-lembaga untuk meningkatkan kualitas layanan publik dan efektivitas pembangunan yang inklusif serta berkelanjutan.

4.1.3 Tujuan dan Sasaran

Tujuan adalah kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan daerah yang diperoleh dari pencapaian *outcome* program.

Sebagaimana disebutkan dalam Rancangan RPJMD Tahun 2025-2029, arah kebijakan pembangunan tahun 2025 direpresentasikan melalui tema RKPD tahun 2026, yaitu Penguatan Fondasi Pembangunan Kota yang Harmonis dan Nyaman. Berdasarkan visi dan misi tersebut, tujuan dan sasaran pembangunan daerah yang akan diwujudkan sebagaimana Tabel 4.2

Tabel 4.2 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kota Magelang dalam Visi Misi RPJMD Kota Magelang Tahun 2026

Tujuan dan Sasaran	Indikator	Satuan	Target						Urusan
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
Unsur Visi: Kota Perdagangan dan Jasa									
Tujuan 1: Terwujudnya peran perdagangan dan jasa Kota Magelang dalam skala regional.	Kontribusi PDRB Sektor Perdagangan dan Jasa dalam Skala Regional	%	19,55	19,58	19,61	19,64	19,67	19,71	
Sasaran 1.1: Meningkatnya kontribusi PDRB sektor perdagangan dan jasa	Kontribusi sektor perdagangan dan jasa terhadap PDRB	%	16,78	16,88	16,99	17,09	17,19	17,20	URUSAN PERDAGANGAN URUSAN KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH URUSAN PARIWISATA URUSAN KEBUDAYAAN URUSAN PENANAMAN MODAL
Unsur Visi: Humanis dan Harmonis									
Tujuan 2: Terwujudnya kesejahteraan Masyarakat	Tingkat Kemiskinan	Angka	5,53 - 5,80	5,11 - 5,38	4,70 - 5,09	4,29 - 4,81	3,80 - 4,50	3,47 - 4,25	
Sasaran 2.1: Meningkatnya daya saing SDM dan Ketahanan Sosial yang Inklusif	IPM (Indeks Pembangunan Manusia)	Angka	82,58	82,97	83,48	83,98	84,47	84,94	URUSAN PENDIDIKAN URUSAN KESEHATAN URUSAN PERPUSTAKAAN URUSAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

Tujuan dan Sasaran	Indikator	Satuan	Target						Urusan
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
									URUSAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK URUSAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
Sasaran 2.2: Menngkatnya kesempatan kerja dan menurunnya ketimpangan	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	4,20 - 4,80	4,12 - 4,66	4,04 - 4,52	3,96 - 4,38	3,88 - 4,24	3,80 - 4,10	URUSAN TENAGA KERJA URUSAN KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH URUSAN PERINDUSTRIAN URUSAN SOSIAL
	Rasio Gini	Angka	0,447	0,432	0,417	0,402	0,387	0,372	
Sasaran 2.3: Terwujud nya Daerah yang kondusif Berbasis Harmoni Sosial	Angka kriminalitas	Angka	74,83	74,22	73,90	73,25	72,94	75,01	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK URUSAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT SUB URUSAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM URUSAN BIDANG KEBUDAYAAN
Unsur Visi: Nyaman dan Berkelanjutan									
Tujuan 3: Terwujudnya tata ruang kota yang inklusif dan berkelanjutan	Nilai Livable City	Angka							
Sasaran 3.1: Terwujudnya kualitas infrastruktur yang inklusif dan berkelanjutan	Nilai Layanan Infrastruktur	Angka							URUSAN PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG URUSAN PERHUBUNGAN URUSAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Sasaran 3.2: Terwujudnya ketahanan daerah, ketahanan pangan, dan lingkungan hidup yang berkualitas	Indeks Risiko Bencana	93,68	89,51	85,7	82,21	78,98	77,46	93,68	URUSAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT URUSAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT URUSAN PANGAN URUSAN LINGKUNGAN HIDUP
	Indeks Ketahanan Pangan	91,56	91,80	92,03	92,27	92,50	92,74	91,56	
	Penurunan emisi GRK kumulatif (TonCO2eq)	%	111,91	341.098.389,2	682.196.666,5	1.023.294.943,8	1.364.393.221,2	1.705.491.498,5	
Tujuan 4: Terwujudnya teta kelola pemerintahan dan layanan publik yang professional, inklusif, akuntabel	Indeks Reformasi Birokrasi	Angka	86	87	88	89	90	85	
Sasaran 4.1: Terwujudnya birokrasi dan pelayanan publik yang berintegritas, efektif, inklusif dan berkelanjutan	SAKIP	Angka	80,5	82,05	85	87,05	90,01	80,25	URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA URUSAN STATISTIK URUSAN PERSANDIAN URUSAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL URUSAN KEARSIPAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PENGAWASAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KEUANGAN SEKRETARIAT DPRD
	Indeks Integritas Nasional	Angka	82,34	83,00	83,67	84,34	85,00	85,67	
	Indeks Pelayanan Publik	Angka	3,72	3,92	4,11	4,29	4,51	4,68	
	Maturitas SPIP terintegrasi	Angka	3,339	3,35	3,40	3,45	3,50	3,55	

Sumber: Raperda RPJMD Kota Magelang 2025-2029

Adapun strategi yang disusun untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah pada setiap misi disampaikan sebagai berikut:

Tabel 4.3 Strategi Pencapaian Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kota Magelang

Tujuan dan Sasaran	Indikator Tujuan dan Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Urusan
Unsur Visi: Kota Perdagangan dan Jasa				
Tujuan 1: Terwujudnya peran perdagangan dan jasa Kota Magelang dalam skala regional.	Kontribusi PDRB Sektor Perdagangan dan Jasa dalam Skala Regional			
Sasaran 1.1: Meningkatnya kontribusi PDRB sektor perdagangan dan jasa	Kontribusi sektor perdagangan dan jasa terhadap PDRB	<p>Strategi 1.1.1: Penguatan ekosistem perdagangan dan jasa yang inklusif skala regional melalui:</p> <ol style="list-style-type: none"> Pengembangan kawasan perdagangan dan jasa terintegrasi dengan infrastruktur kota. Penguatan UMKM dan industri kreatif melalui fasilitasi usaha dan pendampingan. Digitalisasi layanan perdagangan dan pengembangan e-commerce lokal. Peningkatan keterampilan SDM sektor jasa dengan pelatihan dan sertifikasi. Promosi dan fasilitasi investasi perdagangan dan jasa dengan insentif dan kemudahan. Penyediaan inkubator bisnis dan pelatihan wirausaha untuk UMKM dan startup digital. Pengembangan pasar digital dan pemasaran teknologi untuk UMKM. Sertifikasi produk lokal untuk meningkatkan daya saing di pasar regional dan nasional. Penyediaan kawasan investasi ramah lingkungan dan berkelanjutan. Peningkatan infrastruktur pendukung investasi, transportasi, dan fasilitas usaha. Kemitraan pemerintah, swasta, dan komunitas untuk penguatan sektor perdagangan dan jasa. Integrasi program nasional dan Jawa Tengah di sektor ekonomi digital, pariwisata, koperasi, syariah, hilirisasi produk, pelatihan wirausaha, dan pemberdayaan kelompok rentan. <p>Strategi 1.2.1: Penguatan daya saing pariwisata berbasis budaya, sejarah, dan ekonomi kreatif melalui:</p> <ol style="list-style-type: none"> Pengembangan destinasi wisata unggulan terintegrasi dengan infrastruktur pendukung. Optimalisasi pengelolaan destinasi wisata berbasis budaya dan sejarah. Penyediaan dan peningkatan infrastruktur pendukung pariwisata seperti transportasi, akomodasi, dan fasilitas umum. 	<ol style="list-style-type: none"> Tahun 2026: Arah kebijakan diarahkan pada penataan kawasan perdagangan dan jasa strategis yang terintegrasi dengan infrastruktur dasar kota sebagai langkah awal membangun ekosistem usaha yang inklusif. (Merujuk pada: Misi 2, Misi 5). Tahun 2027: Arah kebijakan difokuskan pada peningkatan kapasitas SDM dan perluasan kemitraan usaha melalui pelatihan vokasi, inkubasi bisnis, dan fasilitasi koperasi berbasis komunitas untuk memperkuat ekonomi lokal. (Merujuk pada: Misi 4, Misi 5). Tahun 2028: Arah kebijakan diarahkan pada digitalisasi layanan perdagangan, pengembangan pemasaran berbasis teknologi, dan sertifikasi produk lokal untuk memperluas akses pasar regional dan nasional. (Merujuk pada: Misi 5, Misi 6). Tahun 2029: Arah kebijakan diarahkan pada penguatan jejaring investasi melalui promosi potensi lokal, penyediaan kawasan investasi ramah lingkungan, dan penguatan ekosistem pariwisata berbasis jasa dan budaya. (Merujuk pada: Misi 5, Misi 2). Tahun 2030: Arah kebijakan diarahkan pada pengokohan ekosistem perdagangan dan jasa melalui integrasi program nasional-provinsi-daerah, standarisasi mutu produk, dan optimalisasi ekosistem digital berbasis data dan inovasi. (Merujuk pada: Misi 5, Misi 6). 	<p>URUSAN PERDAGANGAN</p> <p>URUSAN KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH</p> <p>URUSAN PENANAMAN MODAL</p> <p>URUSAN PARIWISATA</p>
			<ol style="list-style-type: none"> Tahun 2026: Arah kebijakan diarahkan pada penataan destinasi wisata unggulan dan peningkatan infrastruktur dasar pendukung pariwisata, sebagai pondasi pengembangan ekosistem wisata berbasis budaya dan Sejarah, sebagai identitas khas kota serta penguatan kelembagaan pariwisata lokal. (Merujuk pada: Misi 2, Misi 3, Misi 5). Tahun 2027: Arah kebijakan difokuskan pada peningkatan kapasitas SDM pariwisata dan optimalisasi paket wisata tematik 	

Tujuan dan Sasaran	Indikator Tujuan dan Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Urusan
		d. Integrasi pariwisata dengan industri kreatif dan kuliner lokal melalui paket wisata tematik. e. Peningkatan kapasitas SDM pariwisata melalui pelatihan, sertifikasi, dan pembinaan usaha wisata. f. Penguatan kelembagaan dan kemitraan pariwisata dengan pelaku usaha, komunitas lokal, dan investor. g. Integrasi program nasional dan provinsi seperti pengembangan desa/kampung wisata, pelatihan konten kreator, literasi keuangan perempuan pelaku pariwisata, promosi digital, dan penguatan destinasi lokal.	berbasis komunitas untuk mendukung pertumbuhan ekonomi inklusif. (Merujuk pada: Misi 4, Misi 5) 3. Tahun 2028: Arah kebijakan diarahkan pada integrasi pariwisata dengan industri kreatif dan kuliner lokal, penguatan branding Kota Magelang, serta penguatan konektivitas antar destinasi wisata, digitalisasi promosi pariwisata, pengembangan destinasi ramah lingkungan berbasis sejarah dan budaya, selaras ekonomi hijau (Merujuk pada: Misi 5, Misi 3, misi 2). 4. Tahun 2029: Arah kebijakan diarahkan pada penguatan kelembagaan pariwisata, perluasan jejaring kerja sama, dan inovasi promosi wisata digital berbasis nilai lokal, untuk meningkatkan daya saing kota di tingkat regional dan nasional (Merujuk pada: Misi 5, Misi 6). 5. Tahun 2030: Arah kebijakan diarahkan pada pengokohan ekosistem pariwisata terpadu Kota Magelang berbasis budaya, sejarah, dan kreativitas sebagai pilar pertumbuhan ekonomi daerah yang berkelanjutan. (Merujuk Misi 5, Misi 2, Misi 6).	
Unsur Visi: Humanis dan Harmonis				
Tujuan 2: Terwujudnya kesejahteraan Masyarakat	Tingkat Kemiskinan			
Sasaran 2.1.: Meningkatnya daya saing SDM	IPM (Indeks Pembangunan Manusia)			URUSAN PENDIDIKAN URUSAN KESEHATAN URUSAN PERPUSTAKAAN URUSAN KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA URUSAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK URUSAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
		Strategi 2.1.1: Peningkatan Akses dan Kualitas Pendidikan untuk SDM Berdaya Saing, melalui: a. Optimalisasi pendidikan vokasi berbasis industri dan kewirausahaan	1. Tahun 2026: Arah kebijakan difokuskan pada pemenuhan layanan pendidikan dasar dan vokasi inklusif untuk kelompok rentan guna membangun pondasi kesejahteraan sosial masyarakat. (Merujuk pada: Misi 1, Misi 4)	

Tujuan dan Sasaran	Indikator Tujuan dan Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Urusan
		<p>untuk mempersiapkan lulusan siap kerja.</p> <p>b. Peningkatan fasilitas pendidikan inklusif untuk mendukung akses belajar bagi semua kelompok masyarakat.</p> <p>c. Revitalisasi kurikulum berbasis teknologi dan inovasi guna meningkatkan kompetensi digital dan IPTEKS.</p> <p>d. Beasiswa pendidikan vokasi bagi masyarakat kurang mampu</p> <p>e. Mendorong pendidikan sepanjang hayat melalui komunitas belajar dan perpustakaan digital.</p> <p>f. Menyiapkan kerangka untuk mengintegrasikan program nasional dan program prioritas provinsi Jawa Tengah, terkait sektor pendidikan, antara lain: Program makan siang dan susu gratis di sekolah dan pesantren, Sekolah Rakyat, Perluasan Layanan Pendidikan Anak Usia Dini, Revitalisasi Sarana dan Prasarana Sekolah dan Madrasah yang Berkualitas, Pencegahan dan Penanganan Anak Tidak Sekolah, sekolah unggulan per kecamatan, (Prioritas Nasional); Program Kartu Zillenial (Taruna Karya Mandiri) untuk pelatihan kerja dan penempatan lulusan SMA/SMK, Pengembangan Sekolah Inklusif di setiap Kecamatan. Digitalisasi pendidikan dan pembangunan rumah apung sebagai solusi akses pendidikan di wilayah pesisir dan marginal, Sekolah Inklusi tiap kecamatan (Prioritas Jateng).</p>	<p>2. Tahun 2027: Arah kebijakan diarahkan pada peningkatan kapasitas SDM melalui pelatihan vokasi, pendidikan berbasis teknologi, dan literasi digital untuk memperkuat daya saing ekonomi lokal. (Merujuk pada: Misi 4, Misi 5)</p> <p>3. Tahun 2028: Arah kebijakan difokuskan pada digitalisasi pendidikan, penguatan sistem pembelajaran inovatif, dan perluasan akses beasiswa pendidikan vokasi bagi masyarakat kurang mampu. (Merujuk pada: Misi 4, Misi 6)</p> <p>4. Tahun 2029: Arah kebijakan diarahkan pada pengembangan ekosistem pendidikan yang mendukung inovasi, penguatan kolaborasi pendidikan-industri, dan perluasan peluang belajar sepanjang hayat. (Merujuk pada: Misi 4, Misi 5)</p> <p>5. Tahun 2030: Arah kebijakan difokuskan pada penguatan tata kelola pendidikan yang inklusif, integratif, dan adaptif berbasis data, inovasi, serta kolaborasi lintas sektor. (Merujuk pada: Misi 4, Misi 6)</p>	
		<p>Strategi 2.1.2: Penguatan Kesehatan Masyarakat untuk SDM Sehat dan Produktif, melalui:</p> <p>a. Perluasan akses layanan kesehatan gratis berbasis digital melalui Program KTP-KU.</p> <p>b. Penguatan layanan kesehatan primer dan rujukan lewat Poliklinik Pagi-Sore di Puskesmas dan RS.</p> <p>c. Penurunan stunting dan peningkatan gizi anak melalui Program Anak Merdeka.</p> <p>d. Pengembangan layanan homecare untuk lansia dan penyandang disabilitas.</p> <p>e. Peningkatan layanan kesehatan promotif dan preventif untuk mendukung angka harapan hidup.</p> <p>f. Integrasi program nasional dan provinsi, seperti: makan siang dan susu gratis, bantuan gizi untuk anak balita dan ibu hamil, penurunan stunting, pemeriksaan kesehatan gratis, rumah sakit berkualitas, 1 dokter dan 1 bidan per puskesmas, layanan keliling, elayanan kesehatan keliling, Puskesmas pembantu, serta digital screening Kesehatan.</p>	<p>1. Tahun 2026: Arah kebijakan difokuskan pada perluasan akses layanan kesehatan dasar melalui Program KTP-KU, penguatan puskesmas dengan Poliklinik Pagi-Sore, layanan keliling, dan percepatan penurunan stunting serta peningkatan gizi anak sebagai langkah awal menciptakan masyarakat sehat dan produktif. (Merujuk pada: Misi 1, Misi 4, Misi 5)</p> <p>2. Tahun 2027: Arah kebijakan diarahkan pada peningkatan layanan rujukan kesehatan, pemenuhan SDM kesehatan sesuai standar (1 dokter 1 bidan di puskesmas pembantu), penguatan sistem layanan berbasis digital, dan kelanjutan percepatan penurunan stunting untuk mengurangi kesenjangan akses kesehatan. (Merujuk pada: Misi 4, Misi 6)</p> <p>3. Tahun 2028: Arah kebijakan diperkuat pada pengembangan layanan promotif dan preventif, optimalisasi layanan homecare, serta pemberdayaan komunitas untuk mendukung ketahanan gizi</p>	

Tujuan dan Sasaran	Indikator Tujuan dan Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Urusan
			<p>dan kesehatan keluarga. (Merujuk pada: Misi 1, Misi 4)</p> <p>4. Tahun 2029: Arah kebijakan diarahkan pada penyediaan layanan spesialistik unggulan (<i>center of excellence</i>), pembangunan rumah sakit berkualitas, dan penguatan sistem rujukan antarwilayah sebagai pusat layanan kesehatan regional. (Merujuk pada: Misi 4, Misi 5)</p> <p>5. Tahun 2030: Arah kebijakan diarahkan pada integrasi ekosistem layanan kesehatan berbasis digital, pemanfaatan data kesehatan terintegrasi, dan optimalisasi program nasional-provinsi seperti gizi gratis, pemeriksaan kesehatan gratis, dan penguatan layanan berbasis komunitas. (Merujuk pada: Misi 4, Misi 6)</p>	
		<p>Strategi 2.1.3: Penguatan Literasi Masyarakat dan IPTEKS untuk Daya Saing, melalui:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan literasi digital, keuangan, dan kewirausahaan bagi masyarakat dan UMKM. 2. Mengembangkan ruang kreativitas dan inovasi generasi muda melalui Z-Hub. 3. Meningkatkan keterampilan SDM pada industri kreatif dan teknologi digital. 4. Memperkuat pendidikan non-formal dan literasi komunitas. 5. Mengintegrasikan program nasional dan provinsi seperti pelatihan konten kreator, literasi digital perempuan pesisir, dan wirausaha komunitas. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tahun 2026: Arah kebijakan difokuskan pada peningkatan literasi dasar masyarakat melalui program literasi digital, literasi keuangan, dan literasi kewirausahaan untuk memperkuat kapasitas adaptif warga kota. (Merujuk pada: Misi 1, Misi 4, Misi 5) 2. Tahun 2027: Arah kebijakan diarahkan pada pengembangan ruang kreatif dan inovasi generasi muda melalui Program Z-Hub sebagai wadah pengembangan potensi dan inovasi digital. (Merujuk pada: Misi 1, Misi 4, Misi 5) 3. Tahun 2028: Arah kebijakan fokus pada penguatan keterampilan SDM dalam industri kreatif, teknologi digital, dan penguatan komunitas literasi berbasis potensi lokal. (Merujuk pada: Misi 4, Misi 5) 4. Tahun 2029: Arah kebijakan diarahkan pada pemberdayaan masyarakat melalui literasi berbasis komunitas, pengembangan wirausaha komunitas, serta integrasi program nasional dan provinsi untuk mendukung ekonomi kreatif dan ekonomi digital. (Merujuk pada: Misi 4, Misi 5) 5. Tahun 2030: Arah kebijakan fokus pada penguatan ekosistem literasi yang inklusif, pemanfaatan teknologi berbasis AI dan big data untuk literasi adaptif, serta pengembangan SDM unggul berbasis komunitas. (Merujuk pada: Misi 4, Misi 5, Misi 6) 	
		<p>Strategi 2.1.4: Pemberdayaan Pemuda dan Olahraga untuk SDM yang Kompetitif, melalui:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan fasilitas olahraga dan pembinaan bakat atlet muda. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tahun 2026: Arah kebijakan difokuskan pada penyediaan fasilitas olahraga dasar dan pembinaan komunitas pemuda dalam program pembinaan bakat 	

Tujuan dan Sasaran	Indikator Tujuan dan Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Urusan
		<ol style="list-style-type: none"> Dukungan pengembangan ekonomi kreatif, startup digital, dan literasi wirausaha pemuda. Penguatan karakter dan kedisiplinan pemuda melalui integrasi olahraga dengan program pembinaan. Peningkatan partisipasi dan daya saing pemuda dalam ajang kompetisi lokal dan nasional. Integrasi program nasional dan prioritas provinsi Jawa Tengah, seperti pelatihan konten kreator, penguatan ekonomi kreatif komunitas, penyelenggaraan sport tourism, dan event olahraga antarkecamatan sebagai penguatan identitas lokal. 	<p>dan pembentukan karakter. (Merujuk pada: Misi 1, Misi 4)</p> <ol style="list-style-type: none"> Tahun 2027: Arah kebijakan difokuskan pada peningkatan kapasitas pemuda melalui pelatihan ekonomi kreatif, startup digital, dan participating pemuda dalam pengembangan UMKM komunitas. (Merujuk pada: Misi 4, Misi 5) Tahun 2028: Arah kebijakan diarahkan pada penguatan daya saing pemuda dalam kompetisi olahraga, event regional, dan pelatihan konten kreator untuk memperkuat identitas lokal dan sport tourism. (Merujuk pada: Misi 4, Misi 5) Tahun 2029: Arah kebijakan diarahkan pada pengembangan ekosistem kolaborasi pemuda dengan pelaku usaha, komunitas kreatif, dan sektor olahraga sebagai katalisator pertumbuhan ekonomi lokal. (Merujuk pada: Misi 4, Misi 5) Tahun 2030: Arah kebijakan diarahkan pada pemantapan program pemuda berdaya saing melalui integrasi program nasional-provinsi-daerah, penguatan ekonomi kreatif berbasis komunitas, dan pengembangan sport tourism yang inklusif. (Merujuk pada: Misi 4, Misi 5) 	
		<p>Strategi 2.1.5: Penguatan sumber daya manusia berbasis inklusi sosial, kesetaraan gender, dan ketahanan keluarga sebagai fondasi masyarakat yang harmonis dan humanis, melalui:</p> <ol style="list-style-type: none"> Penerapan prinsip gender, disabilitas, dan inklusi sosial (GEDSI) dalam seluruh tahapan perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah; Pengembangan ruang publik yang aman, ramah, dan inklusif sebagai wahana interaksi sosial, ekspresi budaya, dan penguatan kebersamaan lintas kelompok. Penguatan layanan sosial berbasis komunitas untuk pencegahan kekerasan, perlindungan kelompok rentan, dan penguatan nilai saling menghargai dalam masyarakat; Peningkatan ketahanan keluarga melalui penguatan fungsi sosial, ketenteraman, kemandirian, dan kebahagiaan rumah tangga; Sinkronisasi program nasional dan provinsi dalam Pembangunan keluarga dan pengarusutamaan GEDSI 	<ol style="list-style-type: none"> 2026: Arah kebijakan difokuskan pada penguatan layanan dasar yang berpihak pada perempuan, anak, difabel, lansia, dan kelompok rentan lainnya, melalui peningkatan mutu pelaksanaan prinsip GEDSI, pendataan terpilah berbasis kelurahan, serta pengadaan tenaga pendamping sosial yang memahami kebutuhan kelompok sasaran secara nyata (Merujuk pada Misi 1 dan Misi 4). 2027: Arah kebijakan difokuskan pada penguatan peran keluarga dan komunitas dalam mewujudkan lingkungan sosial yang aman, ramah, dan inklusif bagi perempuan, anak, difabel, lansia, dan kelompok rentan lainnya, dengan memanfaatkan ruang publik sebagai sarana interaksi, edukasi keluarga, dan aktivitas kebersamaan lintas usia dan latar belakang (Merujuk pada Misi 1, Misi 3, dan Misi 4). 2028: Arah kebijakan difokuskan pada pemanfaatan teknologi untuk mendekatkan layanan sosial kepada perempuan, anak, difabel, lansia, dan kelompok rentan lainnya, melalui penyediaan sistem pelaporan kekerasan yang mudah, konseling daring, serta 	

Tujuan dan Sasaran	Indikator Tujuan dan Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Urusan
			<p>penjangkauan aktif bagi mereka yang belum tersentuh layanan reguler, dengan dukungan kader dan mitra warga (Merujuk pada Misi 1, Misi 4, dan Misi 6)</p> <p>4. 2029: Arah kebijakan difokuskan pada penyelarasan program antarperangkat daerah agar intervensi terhadap perempuan, anak, difabel, lansia, dan kelompok rentan lainnya berjalan terpadu, dengan membangun paket layanan keluarga yang mencakup perlindungan, pemberdayaan ekonomi, dan dukungan psikososial berbasis komunitas (Merujuk pada Misi 1, Misi 4, dan Misi 6).</p> <p>5. 2030: Arah kebijakan difokuskan pada penanaman budaya saling peduli dan pelebagaan sistem sosial yang menyatu dalam kehidupan warga Kota Magelang, dengan menjadikan perempuan, anak, difabel, lansia, dan kelompok rentan lainnya sebagai subjek pembangunan, serta keluarga sebagai pusat penguatan nilai, karakter, dan ketangguhan sosial (Merujuk pada Misi 1, Misi 3, dan Misi 4).</p>	
Sasaran 2.2.: Menngkatnya kesempatan kerja dan menurunkan ketimpangan menuju ketahanan sosial ekonomi yang inklusif	Tingkat Pengangguran Terbuka			URUSAN TENAGA KERJA
	Rasio Gini			URUSAN KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH
		<p>Strategi 2.2.1: Perluasan Kesempatan Kerja Inklusif dan Berkelanjutan, melalui:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penguatan pendidikan vokasi sesuai kebutuhan dunia kerja untuk kelompok usia produktif dari rumah tangga miskin. 2. Pengembangan magang dan kemitraan DUDI untuk mempercepat transisi pencari kerja ke sektor formal. 3. Pemberdayaan ekonomi pemuda, perempuan, dan disabilitas melalui pelatihan wirausaha, inkubasi bisnis, dan pembentukan koperasi/kelompok usaha. 4. Pemutakhiran data tenaga kerja dan integrasi SIPKD dengan pencarian kerja online dan layanan konsultasi di kelurahan. 5. Perluasan program padat karya berbasis komunitas untuk wilayah dengan pengangguran tinggi. 6. Penguatan jejaring penempatan tenaga kerja, layanan antar kerja, bursa kerja, dan pelibatan BLK swasta. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tahun 2026: Arah kebijakan diarahkan pada penguatan pendidikan vokasi dan literasi kerja untuk kelompok rentan sebagai dasar pembekalan keterampilan kerja. (Merujuk pada Misi 4, Misi 5) 2. Tahun 2027: Arah kebijakan difokuskan pada pengembangan kemitraan dunia usaha-dunia industri (DUDI), penyediaan program magang, dan fasilitasi wirausaha bagi pemuda, perempuan, dan penyandang disabilitas untuk memperluas peluang kerja. (Merujuk pada Misi 4, Misi 5) 3. Tahun 2028: Arah kebijakan diarahkan pada penguatan jejaring penempatan kerja, integrasi data pasar kerja melalui SIPKD, dan pengembangan platform digital pencarian kerja berbasis kelurahan. (Merujuk pada Misi 5, Misi 6) 4. Tahun 2029: Arah kebijakan diarahkan pada perluasan program padat karya produktif, penguatan inkubator bisnis, dan pemanfaatan 	URUSAN PERINDUSTRIAN URUSAN SOSIAL

Tujuan dan Sasaran	Indikator Tujuan dan Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Urusan
		7. Kebijakan afirmatif dalam rekrutmen sektor publik-swasta untuk perempuan kepala keluarga, disabilitas, pemuda tidak sekolah, dan eks pekerja migran.	ekosistem digital untuk menciptakan lapangan kerja inklusif. (Merujuk pada Misi 4, Misi 5) 5. Tahun 2030: Arah kebijakan diarahkan pada penerapan kebijakan afirmatif untuk mendorong rekrutmen kelompok marginal dalam sektor publik dan swasta, sekaligus memperkuat peran Kota Magelang sebagai pusat distribusi ekonomi berbasis inklusi. (Merujuk pada Misi 4, Misi 5, Misi 6)	
		<p>Strategi 2.2.2: Pengurangan Ketimpangan Ekonomi Melalui Pemerataan Akses dan Distribusi Pendapatan yang inklusif, melalui:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Fasilitasi UMKM dan wirausaha mikro bagi masyarakat miskin, perempuan kepala keluarga, penyandang disabilitas, dan lansia produktif melalui bantuan modal, pelatihan, dan akses pasar. 2. Perluasan program padat karya berbasis komunitas GEDSI di wilayah dengan konsentrasi kemiskinan perempuan, disabilitas, dan pekerja informal. 3. Peningkatan inklusi keuangan dengan literasi ramah gender-disabilitas, penguatan kelompok simpan pinjam perempuan, layanan keuangan digital, dan pengukuran IKAD untuk memastikan akses keuangan inklusif. 4. Penerapan subsidi terarah dan insentif sosial ekonomi bagi kelompok 40% terbawah berbasis data terpilah (DTKS, gender, disabilitas), terintegrasi dengan PKH, Kartu Sembako, dan bantuan sewa rumah. 5. Revitalisasi pelatihan vokasi untuk perempuan pekerja rumahan, remaja putus sekolah, dan penyandang disabilitas dengan dukungan penempatan kerja inklusif. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tahun 2026: Arah kebijakan diarahkan pada fasilitasi akses modal usaha, pelatihan wirausaha, dan perlindungan sosial terarah untuk masyarakat miskin, perempuan kepala keluarga, disabilitas, dan lansia produktif melalui integrasi program pusat-daerah. (Merujuk pada: Misi 1, Misi 5) 2. Tahun 2027: Arah kebijakan difokuskan pada perluasan program padat karya berbasis komunitas GEDSI, pemberdayaan kelompok marginal melalui skema kerja produktif, serta penguatan literasi dan kelompok simpan pinjam perempuan. (Merujuk pada: Misi 1, Misi 5) 3. Tahun 2028: Arah kebijakan diarahkan pada penguatan inklusi keuangan dengan memperluas akses layanan perbankan digital, pemanfaatan Indeks Akses Keuangan Daerah (IKAD), serta peningkatan literasi keuangan yang ramah gender dan disabilitas. (Merujuk pada: Misi 5, Misi 6) 4. Tahun 2029: Arah kebijakan difokuskan pada penyelarasan subsidi terarah dan insentif sosial ekonomi berbasis data terpilah (DTKS, gender, disabilitas) agar manfaat program seperti PKH, Kartu Sembako, dan bantuan sewa rumah tepat sasaran. (Merujuk pada: Misi 1, Misi 5) 5. Tahun 2030: Arah kebijakan diarahkan pada revitalisasi pelatihan vokasi untuk kelompok marginal, penguatan jejaring kerja inklusif, dan perluasan akses kerja formal bagi perempuan pekerja rumahan, remaja putus sekolah, dan disabilitas. (Merujuk pada: Misi 1, Misi 4, Misi 5) 	
Sasaran 2.3: Terwujudnya Kondusivitas Daerah berbasis Harmoni Sosial.	Angka kriminalitas			KESATUAN BANGSA DAN POLITIK URUSAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA

Tujuan dan Sasaran	Indikator Tujuan dan Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Urusan
				PERLINDUNGAN MASYARAKAT URUSAN BIDANG KEBUDAYAAN
		<p>Strategi 2.3.1: Memperkuat ketahanan sosial dengan pendekatan budaya, interaksi sosial yang inklusif, dan pencegahan konflik berbasis kearifan lokal. melalui:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pelindungan dan pemanfaatan cagar budaya dan warisan budaya tak benda melalui status legal, revitalisasi, dan pelibatan komunitas untuk mendukung ekonomi lokal. 2. Pemberdayaan pelaku seni tradisi, perempuan pelestari budaya, dan pemuda melalui festival, ekspresi budaya, dan usaha kreatif berbasis nilai lokal. 3. Penguatan toleransi dan kohesi sosial dengan memperkuat FKUB, forum dialog lintas iman, dan pendidikan moderasi di sekolah, kelurahan, dan komunitas. 4. Pencegahan konflik dan gangguan sosial melalui kampung damai, pengawasan sosial berbasis tokoh masyarakat, dan patroli komunitas. 5. Integrasi nilai budaya dan kohesi sosial ke dalam kebijakan pendidikan karakter, ruang publik, pariwisata lokal, dan perencanaan kota untuk lingkungan aman, inklusif, dan harmonis. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tahun 2026: Arah kebijakan diarahkan pada pelindungan dan pemanfaatan cagar budaya serta warisan budaya tak benda melalui penetapan status legal, revitalisasi objek, dan pelibatan komunitas dalam aktivitas budaya untuk mendukung ekonomi lokal. (Merujuk pada: Misi 1, Misi 3, Misi 5) 2. Tahun 2027: Arah kebijakan difokuskan pada pemberdayaan pelaku seni tradisi, perempuan pelestari budaya, dan pemuda melalui fasilitasi festival, ruang ekspresi, dan pengembangan usaha kreatif berbasis nilai lokal. (Merujuk pada: Misi 1, Misi 3, Misi 5) 3. Tahun 2028: Arah kebijakan diarahkan pada penguatan toleransi dan kohesi sosial melalui penguatan FKUB, forum lintas iman, pendidikan nilai moderasi di sekolah, kelurahan, dan komunitas. (Merujuk pada: Misi 1, Misi 3) 4. Tahun 2029: Arah kebijakan difokuskan pada pencegahan konflik dan pengendalian gangguan sosial melalui kampung damai, pengawasan berbasis tokoh masyarakat, dan patroli komunitas. (Merujuk pada: Misi 1, Misi 3) 5. Tahun 2030: Arah kebijakan diarahkan pada integrasi nilai budaya dan kohesi sosial ke dalam kebijakan pendidikan karakter, ruang publik, pengelolaan pariwisata, dan perencanaan kota untuk menciptakan lingkungan aman, inklusif, dan harmonis. (Merujuk pada: Misi 1, Misi 3, Misi 5) 	
Unsur Visi: Nyaman dan Berkelanjutan				
Tujuan 3: Terwujudnya tata ruang kota yang inklusif dan berkelanjutan	Indeks Livable City			
Sasaran 3.1: Terwujudnya kualitas infrastruktur yang inklusif dan berkelanjutan	Nilai Layanan Infrastruktur			URUSAN PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG URUSAN PERHUBUNGAN URUSAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
		Strategi 3.1.1: Peningkatan Kualitas Infrastruktur Perkotaan dengan Penataan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tahun 2026: Fokus pada pemenuhan infrastruktur dasar di 	

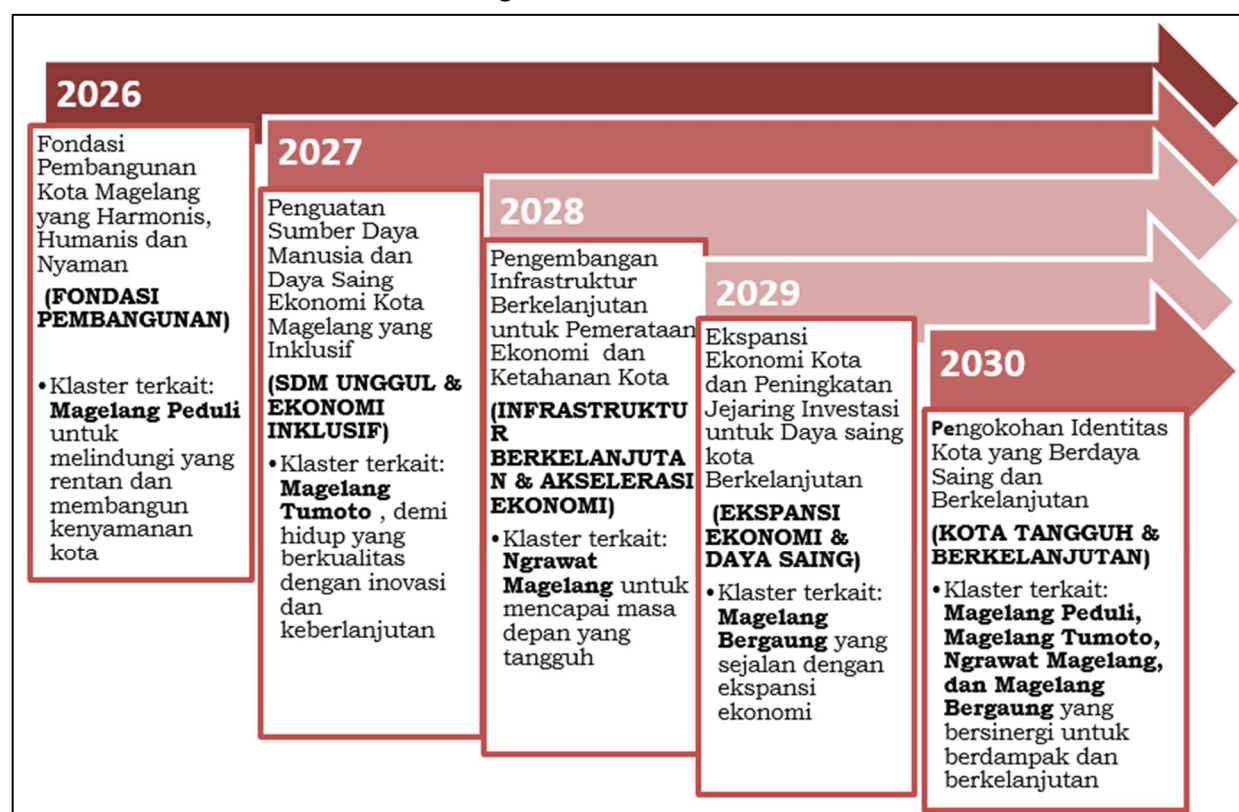
Tujuan dan Sasaran	Indikator Tujuan dan Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Urusan
		<p>Layanan Dasar, Standarisasi Mutu, dan Pemanfaatan Efisien Ruang Kota, melalui:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penataan jalan lingkungan, drainase, dan fasilitas dasar di kawasan padat dan zona pelayanan publik. 2. Penyusunan standar teknis infrastruktur sebagai acuan lintas perangkat daerah. 3. Penyediaan fasilitas umum dengan akses universal di simpul aktivitas warga. 4. Rehabilitasi infrastruktur tidak laik fungsi dan penguatan pemeliharaan aset berbasis data kelurahan. 5. Pemanfaatan ruang terbatas untuk taman, halte, dan parkir. 6. Dukungan pada kebijakan pemerintah/ATR/BPN untuk pengadaan tanah untuk kepentingan umum, sesuai kewenangan daerah serta penataan akses di kawasan strategis. 7. Penerapan desain hemat lahan dan energi pada infrastruktur baru. 8. Pemerataan infrastruktur pelayanan dasar sanitasi dan pengolahan limbah 9. Integrasi program nasional dan Provinsi Jawa Tengah terkait infrastruktur, seperti SPAM terintegrasi, pusat rekreasi, sarana olahraga, titik aglomerasi ekonomi baru, pengembangan energi terbarukan (biogas, hydro, surya), dan rumah layak huni. 	<p>kawasan padat, perbaikan fasilitas umum, penguatan infrastruktur pengelolaan air bersih dan distribusi air untuk rumah tangga dan sektor ekonomi lainnya, penataan aset strategis sesuai kewenangan daerah, serta penataan infrastruktur pendukung regenerasi pertanian kota dan pengendalian alih fungsi lahan.</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Tahun 2027: Penyusunan standar teknis infrastruktur dan peningkatan fasilitas publik inklusif, penguatan sistem distribusi air bersih, serta penguatan infrastruktur pendukung sektor pertanian kota (Urban Frming). 3. Tahun 2028: Optimalisasi pemanfaatan ruang terbatas, optimalisasi sumber daya air dan akses air untuk rumah tangga dan kebutuhan urban farming, antisipasi dukungan pengadaan tanah untuk proyek strategis nasional, pengendalian alih fungsi lahan, serta optimalisasi aset strategis kota. 4. Tahun 2029: Penerapan desain hemat lahan dan energi pada infrastruktur baru, kesiapan mendukung pengadaan tanah untuk kepentingan umum, penguatan tata kelola aset strategis, penguatan pengelolaan air bersih dan distribusi air secara berkelanjutan untuk mendukung rumah tangga, pertanian, dan sektor ekonomi, pengendalian alih fungsi lahan pertanian, serta penyediaan infrastruktur pendukung regenerasi pertanian perkotaan untuk meningkatkan ketahanan pangan 5. Tahun 2030: Integrasi program prioritas nasional dan provinsi, kesiapan mendukung pengadaan tanah untuk kepentingan umum dan proyek strategis nasional, pengelolaan aset strategis kota berbasis data dan digitalisasi, penguatan infrastruktur sumberdaya air, dan regenerasi pertanian perkotaan 	
Sasaran 3.2: Terwujudnya ketahanan daerah, ketahanan pangan, dan lingkungan hidup yang berkualitas	Indeks Risiko Bencana			URUSAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT URUSAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT URUSAN PANGAN
	Indeks Ketahanan Pangan			
	Penurunan emisi GRK kumulatif (TonCO2eq)			

Tujuan dan Sasaran	Indikator Tujuan dan Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Urusan
				URUSAN LINGKUNGAN HIDUP
		<p>Strategi 3.2.1: Penguatan Resiliensi Wilayah melalui Penataan Risiko Bencana, Kemandirian Pangan, dan Pengendalian Daya Dukung Lingkungan, melalui:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Identifikasi wilayah rawan bencana dan integrasi data risiko dalam RTRW/RDTR kota. 2. Penguatan infrastruktur dan sistem peringatan dini di titik rawan bencana. 3. Penataan drainase dan ruang terbuka hijau serta tutupan lahan untuk mengurangi limpasan air dan banjir lokal. 4. Revitalisasi ruang terbuka hijau (RTH) dan kawasan hijau perkotaan untuk meningkatkan kualitas udara, tutupan lahan dan keanekaragaman hayati 5. Pengembangan lahan pangan produktif dan pekarangan kota untuk cadangan pangan darurat. 6. Peningkatan kapasitas kelembagaan dan logistik untuk tanggap darurat bencana dan krisis pangan. 7. Penguatan kolaborasi masyarakat dalam pengelolaan sampah, pengurangan emisi, dan pelestarian lingkungan hidup. 8. Penguatan pengelolaan sampah berbasis ekonomi sirkular untuk mengurangi volume sampah yang masuk ke tempat pembuangan akhir. 9. Penerapan energi terbarukan, seperti solar panel dan teknologi efisiensi energi pada fasilitas umum. 10. Peningkatan kebijakan pengurangan emisi gas rumah kaca (GRK) dengan mendorong penggunaan transportasi ramah lingkungan. 11. Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungan melalui kampanye dan insentif bagi komunitas hijau. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tahun 2026: Arah kebijakan difokuskan pada identifikasi wilayah rawan bencana, integrasi data risiko dalam RTRW/RDTR, penguatan sistem peringatan dini, pemanfaatan ruang terbatas untuk penghijauan dan lahan pangan produktif sebagai cadangan darurat, pengelolaan sampah skala komunitas, serta inisiasi pemanfaatan energi terbarukan pada fasilitas umum. (Merujuk pada Misi 2, 3, 4) 2. Tahun 2027: Arah kebijakan diarahkan pada penguatan infrastruktur adaptif (drainase, RTH, ruang publik), perluasan penerapan energi terbarukan seperti solar panel dan teknologi efisiensi energi, pengurangan emisi, dan penguatan kolaborasi masyarakat dalam pengelolaan sampah berbasis ekonomi sirkular. (Merujuk pada Misi 2, 3, 4) 3. Tahun 2028: Arah kebijakan difokuskan pada peningkatan kapasitas kelembagaan dan logistik tanggap darurat bencana, pemantapan pemanfaatan energi terbarukan, pengembangan transportasi ramah lingkungan, dan penguatan program pengurangan emisi. (Merujuk pada Misi 2, 3, 4) 4. Tahun 2029: Arah kebijakan diarahkan pada penguatan ekosistem pengelolaan lingkungan berkelanjutan, revitalisasi RTH, perluasan pemanfaatan pekarangan kota untuk pangan, perluasan penggunaan energi terbarukan dan teknologi efisiensi energi, serta peningkatan kesadaran lingkungan melalui kampanye komunitas hijau. (Merujuk pada Misi 2, 3, 4) 5. Tahun 2030: Arah kebijakan diarahkan pada penguatan keberlanjutan ekosistem lingkungan kota, harmonisasi kebijakan tata ruang dengan mitigasi bencana, penguatan sistem transportasi rendah emisi, integrasi penuh energi terbarukan pada fasilitas kota, serta adaptasi iklim berbasis komunitas. (Merujuk pada Misi 2, 3, 4) 	
Tujuan 4: Terwujudnya tata kelola pemerintahan dan layanan publik yang profesional,	Indeks Reformasi Birokrasi			

Tujuan dan Sasaran	Indikator Tujuan dan Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Urusan
inklusif, akuntabel				
Sasaran 4.1: Terwujudnya birokrasi dan pelayanan publik yang berintegritas, efektif, inklusif dan berkelanjutan	Maturitas SPIP Indeks Integritas Nasional Indeks Pelayanan Publik SAKIP			SEKRETARIAT DAERAH KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA STATISTIK PERSANDIAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KEARSIPAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PENGAWASAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KEUANGAN SEKRETARIAT DPRD KECAMATAN
		<p>Strategi 4.1.1: Reformasi Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Kinerja, Teknologi Cerdas, dan Partisipatif, melalui:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan manajemen organisasi berbasis kinerja, meritokrasi, dan perencanaan-anggaran terintegrasi. 2. Mengembangkan sistem digital pemerintahan yang aman untuk arsip, layanan publik, dan administrasi. 3. Memodernisasi layanan administrasi kependudukan untuk menjamin dokumen dasar dan data akurat. 4. Mengoptimalkan Satu Data Daerah, Big Data, dan AI untuk mendukung pengambilan keputusan. 5. Memperkuat integritas ASN melalui pengawasan internal, mitigasi risiko, dan pelaporan konflik kepentingan. 6. Mengintegrasikan RIPJPID dalam inovasi daerah berbasis riset, teknologi, dan data terbuka. 7. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan evaluasi layanan publik dengan feedback terbuka, pokok pikiran DPRD, dan kanal digital. 8. Meningkatkan kapasitas fiskal melalui optimalisasi PAD dan inovasi pembiayaan. 9. Mempercepat implementasi ETPD untuk transaksi keuangan pemerintah dan integrasi layanan publik. 10. Memperluas kanal pembayaran nontunai, integrasi bantuan dengan keuangan daerah, dan edukasi literasi 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tahun 2026: Memperkuat tata kelola pemerintahan berbasis kinerja, meritokrasi, sistem penganggaran terintegrasi, literasi fiskal, reformasi birokrasi, pembenahan administrasi kependudukan yang akurat, dan penguatan layanan kearsipan yang aman menuju perbaikan kualitas layanan publik dasar. 2. Tahun 2027: Mendorong transformasi digital pemerintahan, memanfaatkan Satu Data Daerah dan RIPJPID untuk perencanaan yang terintegrasi, memperluas digitalisasi administrasi dan layanan publik, serta memperkuat basis penerimaan pajak daerah. 3. Tahun 2028: Mengoptimalkan Big Data dan kecerdasan buatan untuk pengambilan keputusan, mempercepat implementasi transaksi keuangan pemerintah secara elektronik, dan <i>meningkatkan kapasitas layanan kependudukan dan kearsipan digital</i>. dan mengintegrasikan sistem keuangan daerah dengan layanan publik. 4. Tahun 2029: Memperkuat transparansi dan akuntabilitas keuangan daerah melalui perluasan kanal pembayaran non-tunai, literasi keuangan inklusif, serta basis data terpadu untuk subsidi dan bantuan. 5. Tahun 2030: Mengokohkan pemerintahan digital yang responsif, memperkuat pengawasan berbasis risiko, mempercepat inovasi pembiayaan 	

Tujuan dan Sasaran	Indikator Tujuan dan Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Urusan
		keuangan mendukung Indeks Akses Keuangan Daerah (IKAD) 11. Mengintegrasikan mandat program prioritas nasional dan provinsi dalam tata kelola daerah, seperti reformasi birokrasi, antikorupsi, digitalisasi layanan publik, optimalisasi pajak, penguatan ASN dan perangkat desa, serta sistem informasi desa.	daerah, dan mendorong kolaborasi antarlembaga untuk pencegahan korupsi dan peningkatan integritas ASN.	

Dalam rangka pencapaian visi misi pembangunan Kota Magelang Tahun 2021-2026 yang telah diterjemahkan kedalam beberapa strategi pembangunan, diperlukan arah kebijakan tahunan agar lebih fokus dalam setiap tahapan pembangunan. Arah kebijakan ini diharapkan dapat menjadi pedoman dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan setiap tahun. Pentahapan yang dibuat juga dilakukan dengan sinkronisasi terhadap arah pembangunan Provinsi Jawa Tengah maupun Nasional. Arah kebijakan pembangunan Kota Magelang dalam RPJMD Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:



Gambar 4.1 Tema Kota Magelang Tahun 2025-2029

Sumber : RPJMD Kota Magelang 2021 - 2026

4.1.4 Keselarasan dengan RPJPD Kota Magelang Tahun 2025-2045 dan Rancangan RPJMD Kota Magelang 2025-2029

Pelaksanaan RKPD Kota Magelang Tahun 2026 merupakan tahun pertama pada periode pertama tahapan RPJPD Kota Magelang tahun 2025-2045. RPJPD Kota Magelang tahun 2025-2045 memiliki visi **“Magelang Kota Perdagangan dan Jasa yang Berdaya Saing, Berkarakter, dan Berkelanjutan”**. Keberhasilan pencapaian visi tersebut ditandai dengan sasaran utama visi diantaranya peningkatan pendapatan per Kapita, Pengentasan kemiskinan dan ketimpangan, Pusat perdagangan dan jasa regional, Peningkatan daya saing sumber daya manusia, dan Penurunan emisi GRK menuju *net zero emission*.

Dalam upaya pencapaian keberhasilan visi tersebut, ditandai dengan sasaran utama diantaranya peningkatan pendapatan per Kapita, pengentasan kemiskinan dan ketimpangan, peningkatan PDRB sektor perdagangan dan jasa serta indeks daya saing daerah, dan penurunan emisi GRK. Perwujudan visi jangka panjang Kota Magelang melalui perumusan lima misi, yaitu:

1. Mewujudkan sumber daya manusia yang unggul;
2. Mewujudkan perekonomian daerah yang inklusif, tangguh dan berdaya saing;
3. Meningkatkan ketahanan daerah dan lingkungan yang berkelanjutan;
4. Mewujudkan infrastruktur yang adaptif dan berwawasan lingkungan; dan
5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

Pada fase I (tahun 2025-2029) RPJPD Kota Magelang diarahkan untuk **pembangunan sumber daya manusia yang berintegritas sebagai modal sosial dalam berbagai aspek pembangunan**. Tahap ini dilakukan dengan peningkatan kapasitas masyarakat didukung penguatan reformasi birokrasi, peningkatan ketentraman dan ketertiban untuk mewujudkan kondusifitas daerah, dan peningkatan pengendalian pencemaran lingkungan serta ketahanan terhadap bencana dan perubahan iklim. Dalam kaitannya dengan arah kebijakan pembangunan RKPd Kota Magelang tahun 2026 juga berfokus pada pemantapan fondasi pembangunan Kota Magelang yang harmonis dan nyaman. Pembangunan diarahkan untuk memperkuat stabilitas sosial, meningkatkan kualitas layanan publik, serta menata kembali infrastruktur dasar yang mendukung kesejahteraan masyarakat.

Fokus sumber daya manusia menjadi prioritas pertama pembangunan pada tahap 5 tahun pertama dikarenakan untuk menciptakan keunggulan kompetitif dan komparatif daerah yang berdaya saing maka perlu untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusianya terlebih dahulu termasuk penguatan kapasitas aparatur daerah untuk penguatan reformasi birokrasi. Selanjutnya fokus perdagangan, jasa dan UMKM diarahkan pada optimalisasi pelaku usaha dan kapasitas SDM dalam memberikan pelayanan jasa. Sumber Daya Manusia yang Unggul diarahkan pada peningkatan Angka Partisipasi Sekolah (APS) pada setiap jenjang pendidikan, termasuk pencapaian wajib belajar tiga belas tahun, dan peningkatan kapasitas dan keahlian lulusan SMA/SMK untuk meningkatkan penyerapan angkatan kerja khususnya untuk lulusan SMA/SMK. Selain itu upaya peningkatan kapasitas pelaku ekonomi kreatif dan pariwisata juga menjadi perhatian pada tahap ini sebagai bagian dari kesiapan untuk menangkap potensi KSPN Borobudur bagi Kota Magelang. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan pada akhirnya dapat meningkatkan produktivitas baik individu maupun daerah.

Tahun 2026 juga menjadi tahun transisi perencanaan antar periode RPJMD. Dalam rancangan dokumen RPJMD 2025-2029 memiliki visi yaitu **Magelang Kota Perdagangan dan Jasa yang Harmonis, Humanis, Nyaman dan Berkelanjutan** dengan misi:

1. Menciptakan Masyarakat yang Bermartabat;
2. Meningkatkan Infrastruktur yang Inovatif dan Berwawasan Lingkungan;
3. Menciptakan keharmonisan antar umat beragama;
4. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas;
5. Meningkatkan Perekonomian dan Pariwisata yang Berdaya Saing; dan
6. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik.

Dalam perwujudan visi dan misi tersebut, akan dilaksanakan dalam beberapa kluster program diantaranya kluster program Magelang Tumoto, kluster program Magelang Bergaung, kluster program Kita Peduli dan kluster program Magelang Ngrawat Magelang. Selain itu terdapat program unggulan sebagai berikut:

1. Program Pemberdayaan Masyarakat dan Infrastruktur;
2. Sahabat Usaha;
3. Berdikari Disabilitas;
4. Hunian Nyaman;
5. Z-Hub;
6. Pelayanan untuk Warga Miskin;
7. Harapan Magelang;
8. Anak Merdeka;

9. Perempuan Berdaya, Lansia Mantap, Nyaman dan Sejahtera;
10. Angkot Pelajar Gratis;
11. Dana Wibawa Kecamatan dan Kelurahan;
12. KTP-Ku;
13. Makclinge, Magelang *Cleansheet*;
14. Puskesmas-Rumah Sakit Pagi Sore;
15. *Homecare* Pusling;
16. Rumah Sakit Tanpa Dinding;
17. *Hospital Tourism*;
18. Rumah Sakit Pro Rakyat; dan
19. Aplikasi Kesehatan Memudahkan Rakyat.

4.2 PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN TAHUN 2026

4.2.1 Tema Pembangunan Tahun 2026

Tema Pembangunan 2026 adalah "Membangun dengan Kepedulian", yaitu: Penguatan Fondasi Pembangunan Kota yang Harmonis dan Nyaman. Kluster program pembangunan daerah yang dominan adalah kluster Magelang Peduli: penguatan layanan dasar dan perlindungan kelompok rentan sebagai fondasi kota yang nyaman dan harmonis. Tema ini dipilih sebagai langkah awal untuk memastikan stabilitas dan kesiapan Kota Magelang dalam melaksanakan pembangunan jangka menengah 2025-2029. Sebagai langkah awal dalam RPJMD 2025-2029, tahun 2025 difokuskan pada pemantapan fondasi pembangunan Kota Magelang yang harmonis dan nyaman. Pembangunan diarahkan untuk memperkuat stabilitas sosial, meningkatkan kualitas layanan publik, serta menata kembali infrastruktur dasar yang mendukung kesejahteraan masyarakat. Dalam aspek sosial, upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat dan perlindungan kelompok rentan menjadi prioritas, termasuk penguatan layanan kesehatan, pendidikan, dan jaminan sosial. Sementara itu, revitalisasi infrastruktur perkotaan akan dilakukan melalui perbaikan jalan, drainase, serta penyediaan ruang terbuka hijau guna meningkatkan kualitas lingkungan kota. Selain itu, peningkatan keamanan dan kondusivitas wilayah menjadi faktor utama dalam menciptakan kenyamanan dan harmoni sosial. Dengan pondasi yang kuat di tahun pertama ini, pembangunan Kota Magelang dapat berjalan lebih stabil dan berkelanjutan pada tahun-tahun berikutnya.

Pada fase awal ini, pembangunan diarahkan untuk membangun pondasi kesejahteraan sosial, perlindungan kelompok rentan, dan kenyamanan kota yang inklusif. Nilai Magelang Peduli tercermin dalam upaya nyata untuk menghadirkan layanan yang pro-warga, khususnya bagi kelompok miskin, perempuan, lansia, anak-anak, dan penyandang disabilitas.

Tahap pertama (tahun 2025) didukung oleh kluster program Magelang Kita Peduli, seperti Program Prioritas Rumah Singgah, Program Unggulan Pelayanan Untuk Warga Miskin, Anak Merdeka, Perempuan Berdaya, Lansia Mantap, Homecare Pusling, dan Berdikarikan Disabilitas. Dengan pendekatan ini, Magelang membangun dengan kepedulian sebagai fondasi.

Tahap 2025, pemantapan fondasi pembangunan Kota Magelang yang harmonis dan nyaman, memerlukan dukungan infrastruktur untuk mendukung program Magelang Peduli. Program prioritas difokus antara lain revitalisasi infrastruktur perkotaan, digitalisasi layanan administrasi, dan penguatan perlindungan sosial.

Lebih jauh, pembangunan tahap 2025 juga secara eksplisit dirancang untuk mendukung arah kebijakan RKPD Tahun 2026, yang disusun sebelum RPJMD ditetapkan. Tiga tema utama RKPD 2026 yaitu: perwujudan kesejahteraan masyarakat, keberdayaan masyarakat, dan ruang kota yang layak huni, telah diantisipasi sejak tahun pertama RPJMD. Oleh karena itu, penguatan layanan dasar dan perlindungan sosial (kesejahteraan), pengembangan kapasitas komunitas dan aksesibilitas layanan (keberdayaan), serta revitalisasi lingkungan permukiman dan infrastruktur dasar (kota layak huni) sudah dimulai sebagai bagian dari kerangka kesinambungan kebijakan lintas dokumen perencanaan.

Dengan fondasi yang kuat di tahun ini, Kota Magelang bukan hanya memulai pembangunan lima tahunan secara teknis, tetapi juga menyelaraskan diri dengan arah transformasi kebijakan ke depan. Kota dibangun dengan

pendekatan humanis dan inklusif, yang menjadikan kepedulian sosial, kenyamanan ruang kota, dan keberdayaan masyarakat sebagai modal dasar menuju Magelang yang unggul dan berkelanjutan.

Kota Magelang mendukung tema Provinsi Jawa Tengah tahun 2026 pada aspek konsumsi pangan, distribusi logistik, dan perlindungan sosial. Sebagai simpul jasa dan distribusi di selatan Jawa Tengah, Magelang memperkuat layanan dasar seperti kesehatan, pendidikan, dan bantuan sosial guna menjaga kesejahteraan kelompok rentan dan memperkuat daya tahan masyarakat terhadap krisis pangan. Infrastruktur dasar seperti jalan, drainase, dan ruang publik terus dibenahi untuk memperlancar arus barang, mendukung distribusi logistik, dan menciptakan lingkungan kota yang sehat dan layak. Tema 2026 Kota Magelang menguatkan fondasi masyarakat yang harmonis dan kehidupan kota yang nyaman. Kota yang harmonis dan nyaman menciptakan stabilitas sosial yang memungkinkan distribusi pangan berlangsung lancar dan aman, sehingga mendukung ketahanan pangan provinsi secara menyeluruh. Tema pembangunan Kota Magelang tahun 2026 diselaraskan dan mendukung tema RKP Nasional dan Provinsi, seperti termuat pada Tabel 4.3 berikut ini.

Tabel 4.4 Keterkaitan antara Tema Pembangunan RKPD Kota Magelang Tahun 2026 dengan RKP Tahun 2026 dan RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026

Tema RKP 2026	Tema RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026	Tema RKPD Kota Magelang Tahun 2026
Kedaulatan Pangan dan Energi, serta Ekonomi yang Produktif dan Inklusif	Penguatan Perekonomian Daerah, Kualitas Sumber Daya Manusia, Ketahanan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup serta Tata Kelola Pemerintahan yang Dinamis	Penguatan Fondasi Pembangunan Kota yang Harmonis dan Nyaman

Sumber: Tim Penyusun, 2025

4.2.2 Prioritas Pembangunan Tahun 2026

Perencanaan pembangunan daerah Kota Magelang tahun 2026 disusun dengan memperhatikan strategi dan arah kebijakan pembangunan nasional tahun 2026, sebagai bentuk sinergi dan keterpaduan antara kebijakan Pusat dan Daerah. Perencanaan pembangunan daerah Kota Magelang tahun 2026 juga disusun dengan mengacu pada strategi dan arah kebijakan pembangunan Provinsi Jawa Tengah tahun 2026, sebagai bentuk sinergi dan keterpaduan antara kebijakan Provinsi dan Daerah.

4.2.2.1 Prioritas Nasional dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2026

Arah kebijakan pembangunan nasional merupakan pedoman untuk merumuskan prioritas dan sasaran pembangunan daerah serta rencana program, kegiatan, sub kegiatan pembangunan daerah yang dilakukan melalui pendekatan politik, teknokratik, partisipatif, **bottom up** dan **top down**. Keberhasilan pembangunan nasional adalah keberhasilan dari pencapaian semua sasaran dan prioritas serta program, kegiatan, sub kegiatan pembangunan daerah yang ditetapkan dalam RKPD dan dilaksanakan secara nyata oleh semua pemangku kepentingan.

Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2026 merupakan perencanaan tahunan di masa transisi yang menjadi tahap awal pelaksanaan berbagai agenda pembangunan untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045. Dalam rangka menciptakan pondasi yang kuat dalam mengawal pencapaian Indonesia Emas 2045, serta mencapai target sasaran pembangunan nasional tahun 2026, ditetapkan prioritas nasional sebagai berikut:

1. Prioritas Nasional 1: Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).
2. Prioritas Nasional 2 : Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.
3. Prioritas Nasional 3 : Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
4. Prioritas Nasional 4 : Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.

5. Prioritas Nasional 5 : Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
6. Prioritas Nasional 6 : Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan.
7. Prioritas Nasional 7: Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.
8. Prioritas Nasional 8: Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

Sasaran pembangunan RKP 2026 difokuskan pada pertumbuhan ekonomi yang tinggi berkelanjutan, peningkatan pendapatan nasional perkapita, penurunan intensitas emisi gas rumah kaca, peningkatan indeks kualitas lingkungan hidup, penurunan tingkat kemiskinan, penurunan ketimpangan serta peningkatan indeks modal manusia. Adapun sasaran RKP 2026 berserta targetnya dapat dilihat pada Tabel berikut.

Tabel 4.5 Sasaran dan Target Indikator Makro Nasional Tahun 2026

No	Sasaran Pembangunan	Target
1	Pertumbuhan Ekonomi	6,3 %
2	Rasio Gini (nilai)	0,377-0,380
3	Gross National Income (GNI) per kapita	5.870 USD
4	Indeks Modal Manusia (nilai)	0,57
5	Tingkat Kemiskinan	6,5-7,5 %
6	Penurunan Intensitas Emisi GRK	37,14 %
7	Indeks kualitas lingkungan hidup	76,67%

Sumber: Rancangan RKP 2026

Adapun kebijakan di tahun 2026 diarahkan pada Peningkatan Produktivitas untuk Swasembada Pangan dan Energi, serta Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif, dengan 8 prioritas nasional yang telah ditetapkan dalam RKP 2026. Prioritas nasional dan program pembangunan nasional tahun 2026 tercantum dalam tabel berikut.

Tabel 4.5 Prioritas Nasional Tahun 2026

No	Prioritas Nasional (PN)	Sasaran Utama	Program Pembangunan (PP) Nasional
1	PN.1. Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi dan Hak Asasi Manusia (HAM).	Terwujudnya kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang berlandaskan Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia	<ul style="list-style-type: none"> - Memperkokoh ideologi pancasila - Penguatan Demokrasi - Pemantapan komunikasi pembangunan dan informasi publik - Kepemimpinan nasional yang berasaskan Pancasila, demokrasi dan hak asasi manusia - Transformasi akses terhadap keadilan dan pengarusutamaan hak asasi manusia.
2	PN.2. Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau dan Ekonomi Biru.	Terjaganya kedaulatan negara dan penguatan stabilitas keamanan nasional sebagai fondasi pelaksanaan pembangunan	<ul style="list-style-type: none"> - Penguatan pertahanan negara - Pembangunan dan pengembangan industri pertahanan - Penguatan sistem keamanan negara - Profesionalisme pelayanan kepolisian - Penguatan keamanan laut dan hidro-oseanografi - Keamanan siber, sandi dan sinyal

No	Prioritas Nasional (PN)	Sasaran Utama	Program Pembangunan (PP) Nasional
			<ul style="list-style-type: none"> - Penguatan infrastruktur dan jejaring <i>smart diplomacy</i> - Diplomasi ekonomi - Hubungan internasional yang kondusif
		Meningkatnya kemandirian bangsa dalam memenuhi kebutuhan pangan, energi dan air secara berkelanjutan	<ul style="list-style-type: none"> - Swasembada pangan - Swasembada energi - Swasembada air - Pemenuhan akses air minum aman - Percepatan pemenuhan akses sanitasi aman untuk masyarakat
		Terwujudnya perekonomian nasional yang progresif, inklusif dan berkelanjutan	<ul style="list-style-type: none"> - Ekonomi Syariah - Ekonomi digital - Ekonomi sirkular industri - Pengelolaan keanekaragaman hayati ekosistem, spesies, dan genetik - Peningkatan kualitas lingkungan hidup dan tata ruang - Penerapan ekonomi sirkular dari sumber sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga secara partisiatif (hulu) - Penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga (hilir) - Pembangunan rendah karbon - Tenaga kerja hijau - Pengelolaan hutan lestari - Pengembangan ekonomi biru sebagai sumber pertumbuhan baru
3	PN.3. Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi.	Melanjutkan pengembangan infrastruktur	<ul style="list-style-type: none"> - Penguatan konektivitas dan layanan transportasi - Penguatan konektivitas dan transisi energi listrik - Penguatan konektivitas dan ekosistem digital serta pengembangan pengairan dan irigasi.
		Meningkatnya Tital Aset Sektor Keuangan terhadap PDB	<ul style="list-style-type: none"> - Pendalaman sektor keuangan
		Meningkatnya lapangan kerja yang berkualitas	<ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan produktivitas usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi.
		Meningkatnya nilai tambah pariwisata	<ul style="list-style-type: none"> - Pembangunan pariwisata berkualitas dan berkelanjutan
		Meningkatnya Proporsi PDB Ekonomi kreatif	<ul style="list-style-type: none"> - Penguatan ekosistem ekonomi kreatif berbasis kekayaan intelektual
4	PN.4. Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesenjangan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda dan Penyandang Disabilitas.	Pendidikan berkualitas yang merata	<ul style="list-style-type: none"> - Percepatan wajib belajar 13 tahun - Peningkatan kualitas pengajaran dan pembelajaran - Penguatan pengelolaan pendidik dan tenaga kependidikan berkualitas - Penguatan sistem tata kelola pendidikan - Penguatan pendidikan tinggi dan pengembangan bidang science technology, engineering, art, and mathematic - Penguatan budaya literasi untuk kreativitas dan inovasi
		Kesehatan untuk semua	<ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan kesehatan dan gizi masyarakat - Pengendalian penyakit dan pembudayaan hidup sehat - Penguatan kapasitas ketahanan kesehatan - Penguatan pelayanan kesehatan dan tata kelola yang komprehensif

No	Prioritas Nasional (PN)	Sasaran Utama	Program Pembangunan (PP) Nasional
		Keluarga berkualitas, keteraan gender dan masyarakat inklusif	<ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan ketangguhan keluarga - Peningkatan kualitas perlindungan anak - Peningkatan kualitas pemuda - Peningkatan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan dari kekerasan - Peningkatan kesetaraan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas dan lanjut usia
		Iptek, inovasi dan produktivitas ekonomi	<ul style="list-style-type: none"> - Penguatan pendidikan dan pelatihan vokasi dan produktivitas tenaga kerja - Peningkatan kontribusi iptek dan inovasi dalam pembangunan nasional - Pengembangan manajemen talenta nasional - Peningkatan prestasi olahraga
5	PN.5. Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri.	Meningkatnya nilai tambah, produktivitas dan daya saing industri pengolahan	<ul style="list-style-type: none"> - Pengembangan hilirisasi berbasis sumber daya alam unggulan, industri padat karya terampil, padat teknologi dan inovasi serta berorientasi ekspor sebagai industri strategis nasional, termasuk didalamnya penguatan industri dasar - Pengembangan aglomerasi industri di kawasan industri/kawasan ekonomi khusus prioritas sebagai pusat pertumbuhan baru
		Integrasi ekonomi domestik dan global	<ul style="list-style-type: none"> - Optimalisasi backbone integrasi ekonomi dan perkuatan sistem logistik nasional - Peningkatan investasi untuk integrasi ekonomi domestik dan global - Peningkatan perdagangan domestik, antar wilayah dan ekspor serta peningkatan partisipasi dalam rantai nilai global
6	PN.6. Membangun dari Desa dan dari bawah untuk Pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Perlindungan sosial yang adaptif	<ul style="list-style-type: none"> - Satu sistem registrasi sosial ekonomi - Reformasi sistem jaminan sosial nasional - Integrasi bantuan sosial, jaminan sosial dan pemberdayaan masyarakat yang adaptif - Pengembangan ekonomi perawatan (care economy) untuk perluasan perlindungan sosial dan kesejahteraan - Inklusi sosial untuk kesejahteraan kelompok rentan
		Meningkatnya akses hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan	<ul style="list-style-type: none"> - Penyediaan perumahan dan kawasan permukiman
		Mewujudkan pembangunan kemandirian perdesaan dari bawah sebagai sumber pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan	<ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan kemandirian perdesaan yang berkelanjutan
		Perkotaan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi	<ul style="list-style-type: none"> - Perkotaan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi dilaksanakan melalui pembangunan wilayah metropolitan dan pembangunan ibu kota nusantara
7	PN.7. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pembeantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan.	Terwujudnya supremasi hukum yang transparan, adil dan tidak memihak melalui tersusunnya fondasi kelembagaan hukum dan sistem antikorupsi	<ul style="list-style-type: none"> - reformasi politik - reformasi hukum - pencegahan dan pemberantasan korupsi - penguatan kelembagaan hukum - transformasi sistem penuntutan dan advocaat genemal
		Terwujudnya birokrasi pemerintahan yang adaptif dan melayani	<ul style="list-style-type: none"> - reformasi tata kelola pemerintahan - inklusivitas dan transformasi digital layanan publik - perlindungan warga negara Indonesia di luar negeri, tenaga kerja Indonesia, dan keamanan insani

No	Prioritas Nasional (PN)	Sasaran Utama	Program Pembangunan (PP) Nasional
		Terwujudnya masyarakat yang bebas dari penyalahgunaan narkoba	- pencegahan dan pemberantasan narkoba
		Menekan potensi kerugian ekonomi, sosial dan lingkungan akibat tindakan judi dan penyelundupan	- Penanggulangan judi dan penyelundupan
		Terwujudnya tata kelola BUMN yang baik untuk meningkatkan kontribusi BUMN sebagai agen pembangunan	- peningkatan produktivitas Badan Usaha Milik Negara
		Tercapainya peningkatan pendapatan negara yang optimal sesuai potensi perekonomian dengan tetap menjaga iklim investasi	- Optimalisasi pendapatan negara yang sejalan dengan upaya untuk mewujudkan reformasi fiskal secara komprehensif, melalui optimalisasi belanja negara serta perluasan sumber dan pengembangan inovasi pembiayaan
		Tercapainya tingkat inflasi yang rendah dan stabil untuk mendukung stabilitas serta pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan	- Pengendalian komponen inflasi harga bergejolak
8	PN.8. Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur.	Beragama masalah dan berkebudayaan maju	- Penguatan kerukunan umat beragama dan layanan keagamaan transformatif untuk mewujudkan kehidupan beragama maslahat - Pelestarian dan pemajuan kebudayaan serta penguatan karakter bangsa
		Resiliensi terhadap bencana dan perubahan iklim	- Pembangunan ketahanan iklim - Pengelolaan risiko bencana yang efisien dan tepat guna

Sumber: Rancangan RKP 2026

4.2.2.2 Prioritas Pembangunan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026

Penetapan arah kebijakan pembangunan daerah dan prioritas daerah Jawa Tengah tahun 2026 berpedoman pada RPJMD Tahun 2025-2029, serta dengan mempertimbangkan hasil identifikasi permasalahan pembangunan daerah dan isu strategis daerah. Kebijakan pembangunan daerah Jawa Tengah tahun 2026 berdasarkan pada RPJMD Tahun 2025-2029 diarahkan pada tema Pembangunan Daerah Tahun 2026 yaitu Meneguhkan Posisi Jawa Tengah Sebagai Lumbung Pangan Nasional. Upaya yang dilakukan dalam rangka mewujudkan kebijakan tersebut meliputi:

1. peningkatan produksi dan produktivitas sektor pertanian, perkebunan, peternakan, pangan, kehutanan, kelautan dan perikanan;
2. penguatan infrastruktur dan pengelolaan sumber daya air yang berkelanjutan yang mendukung kontinuitas produksi pangan;
3. pengendalian dan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan;
4. penguatan sistem agroforestry berbasis potensi lokal;
5. pemenuhan hak dasar atas pangan yang cukup, beragam, bergizi, seimbang, dan aman secara berkelanjutan, penguatan sistem rantai pasok, dan penguatan pengendalian harga pangan untuk menjamin aksesibilitas pangan;
6. penyediaan pangan lokal secara mandiri dan berkelanjutan;
7. peningkatan ketahanan pangan dan gizi hingga tingkat individu melalui pengembangan biofortifikasi dan fortifikasi pangan secara luas (large scale food fortification/LSFF);
8. pencegahan pemborosan pangan (food loss and waste).

Tahun 2026 ini juga diarahkan untuk “Penguatan Landasan Pembangunan Daerah” dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran daerah dengan prioritas daerah meliputi:

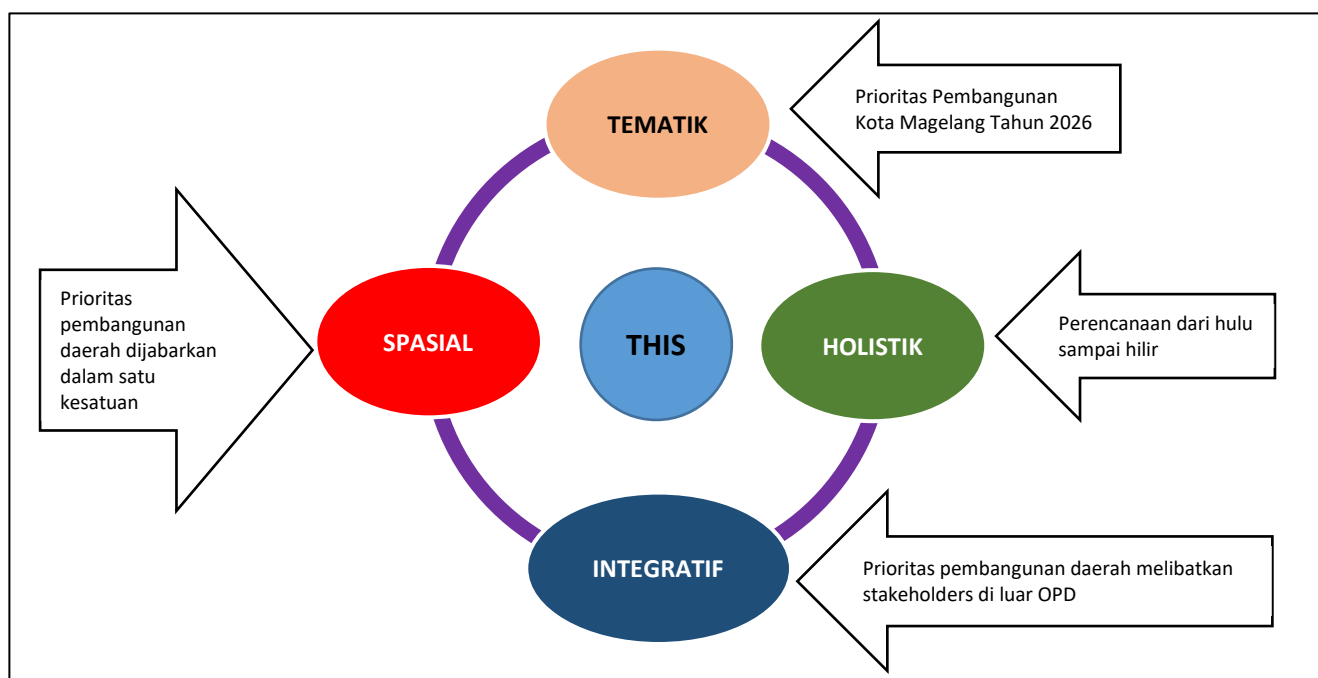
1. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis:

- a. pelayanan publik yang merata dan inklusif;
- b. penguatan kualitas perencanaan berbasis Satu Data Indonesia, berorientasi kinerja, serta berbasis risiko dan riset;
- c. penguatan meritokrasi melalui pemetaan kebutuhan jabatan berdasarkan kompetensi dan kinerja didukung dengan peningkatan akurasi data kepegawaian;
- d. penguatan pengembangan kompetensi dan integritas melalui pemetaan kompetensi berbasis tujuan pembangunan daerah;
- e. penguatan sistem pengawasan dan pengendalian internal akan menjadi prioritas serta pemetaan risiko dan titik rawan korupsi serta peningkatan kapabilitas APIP;
- f. pelaksanaan analisis evaluasi produk hukum yang diimplementasikan pada penyusunan kebijakan daerah, pengawasan produk hukum serta penguatan jaringan dokumentasi informasi hukum;
- g. penguatan kualitas pengelolaan digitalisasi manajemen kearsipan;
- h. kelembagaan pangan efektif;
- i. pemberian bantuan hukum dan fasilitasi penyelesaian permasalahan hukum;
- j. meningkatkan integritas dan peran partai politik dalam pemajuan demokrasi;
- k. pembentukan jejaring global dalam peningkatan perekonomian dan ketahanan regional;
- l. peningkatan kapasitas fiskal daerah dengan optimalisasi penerimaan pendapatan asli daerah dan peningkatan kualitas belanja daerah;

4.2.2.3 Prioritas Pembangunan Kota Magelang Tahun 2026

Proses penyusunan RKPD Kota Magelang menggunakan pendekatan teknokratis, partisipatif, politis, serta pendekatan atas-bawah dan bawah-atas. Wujud pendekatan teknokratis, partisipatif, politis, serta atas-bawah dan bawah-atas dalam penyusunan prioritas pembangunan daerah yang termuat dalam RKPD Kota Magelang Tahun 2026 antara lain dimulai dari penjarangan usulan perencanaan dari masyarakat melalui rembug warga dan pelaksanaan Musrenbang baik tingkat kelurahan-kecamatan maupun kota, Konsultasi Publik serta *Focused Group Discussion* (FGD). Konsultasi publik atas rancangan awal RKPD Tahun 2025 dilaksanakan dalam segmen umum dan segmen khusus (anak-anak dan lansia). Sedangkan FGD yang dilakukan dengan mengambil tema i) Stop Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak: Peran Masyarakat dan Pemerintah; ii) Peran Masyarakat dalam penguatan pendidikan karakter; iii) mewujudkan pertumbuhan ekonomi melalui Pemberdayaan UMKM, Ekonomi Kreatif dan Pariwisata; iv) Penataan Ruang Kota yang berkelanjutan; serta v) Mewujudkan Kota yang berketahanan iklim. Disamping itu juga dilakukan proses verifikasi terhadap pokok-pokok pikiran DPRD. Hasil musrenbang maupun forum khusus dan verifikasi pokok-pokok pikiran DPRD kemudian ditindaklanjuti dalam program di masing-masing perangkat daerah terkait.

Dalam penyusunan substansi RKPD Kota Magelang Tahun 2026 juga menerapkan pendekatan tematik-holistik, integratif dan spasial (THIS). Dimana prioritas pembangunan Kota Magelang Tahun 2026 yang termuat dalam RKPD Tahun 2026 telah sesuai dengan tema pembangunan sebagaimana terdapat dalam RPJMD 2021-2026 untuk tahun 2026. Dari prioritas pembangunan tersebut serta memperhatikan potensi, tantangan, hambatan dan permasalahan hasil evaluasi pelaksanaan tahun 2024 kemudian ditentukan strategi untuk mewujudkannya dan kemudian dijabarkan pelaksanaannya dalam bentuk program dan kegiatan. Baik dalam proses perencanaan pembangunan maupun pelaksanaan prioritas pembangunan juga telah melibatkan semua unsur pemangku kepentingan yang meliputi unsur pemerintah, akademisi, badan atau pelaku usaha, komunitas/masyarakat dan media (kolaborasi pentahelix-ABCGM). Selanjutnya lokasi pelaksanaan dari prioritas pembangunan juga telah mempertimbangkan dimensi keruangan yang jelas, terutama untuk prioritas pembangunan yang melibatkan beberapa lokasi.



Gambar 4.2 Konsep THIS dalam Prioritas Pembangunan Kota Magelang Tahun 2026

Sumber : Permendagri Nomor 86 Tahun 2017

4.2.2.3.1 Prioritas Pembangunan

Prioritas RKPD Kota Magelang tahun 2026 disusun berdasar pada permasalahan pembangunan hasil dari evaluasi RKPD 2024 dan Isu strategis. Isu strategis menjadi pertimbangan perumusan prioritas RKPD 2026 yang disusun berdasar: (1) isu strategis daerah 2021-2026; (2) evaluasi pencapaian kinerja RKPD 2024; (3) tantangan global, nasional dan regional SDGs (Tujuan Pembangunan Berkelanjutan) termasuk juga standar pelayanan minimal serta isu sektoral yang dirumuskan dalam RKP 2026 dan RKPD Provinsi Jawa Tengah 2026. Berdasarkan RPJMD Kota Magelang 2021-2026, terdapat tiga prioritas pembangunan tahun 2026 yaitu:

Tabel 4.6 Prioritas Pembangunan Kota Magelang Tahun 2026

No	Prioritas Pembangunan Tahun 2026	Indikator Kinerja Utama Daerah	Target RPJMD Tahun 2026	Penyesuaian Target Tahun 2026
1.	Perwujudan kesejahteraan masyarakat	Pertumbuhan ekonomi	5,32-5,70	5,70
		Persentase Kontribusi PDRB sektor Industri Pengolahan dan Perdagangan (%)	29,87	30,56*)
		Persentase pertumbuhan investasi	16	16,05*)
		Persentase Peningkatan Kunjungan Wisatawan	3,26	12,79*)
		Persentase penduduk miskin	6,06-6,70	5,94*)
		Persentase PMKS	9,16	4,49*)
		Tingkat Pengangguran Terbuka	4,8-6,0	4,40*)
		Ketimpangan pendapatan	16,50 sedang	16,50 sedang
		Persentase Pertumbuhan UMKM	4,5	4,5
2.	Perwujudan keberdayaan masyarakat	Indeks reformasi birokrasi	85,10	85,10
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	85,91	92,58*)

No	Prioritas Pembangunan Tahun 2026	Indikator Kinerja Utama Daerah	Target RPJMD Tahun 2026	Penyesuaian Target Tahun 2026
		Nilai Kematangan Organisasi Daerah (KOD)	31	37,25 ^{*)}
		Indeks Sistem Merit	0,73	0,8232 ^{*)}
		Indeks SPBE	3,25	3,69 ^{*)}
		Maturitas SPIP	4,000	4,000
		Nilai SAKIP	A	A
		Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	93,61	93,61
		Indeks pembangunan masnusia	83,34	83,34
		Indeks pendidikan	0,791	0,791
		Indeks pembangunan literasi masyarakat	17	17
		Indeks kesehatan	0,879	0,885 ^{*)}
		Indeks Pembangunan Gender	96,15	96,43 ^{*)}
		Pengeluaran per kapita yang disesuaikan (Ribu Rp)	13.127	13.175 ^{*)}
		Nilai pembangunan masyarakat	83,93	88,58 ^{*)}
		Nilai penguatan toleransi	65	100 ^{*)}
		Nilai penguatan ketentraman dan ketertiban umum	97,86	97,86
		Nilai pemajuan kebudayaan	71,91	71,91
		Nilai partisipasi masyarakat	90	92,85 ^{*)}
		Indeks Resiliensi daerah	77,22	77,22
		Indeks Ketahanan Daerah	66,80	66,80
		Skor PPH	93,24	93,24
		Nilai stabilitas daerah	94,87	97,15 ^{*)}
3.	Perwujudan ruang kota layak huni	Indeks Kualitas Ruang Kota	70,21	70,21
		Indek Infrastruktur Wilayah	92,36	92,36
		Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang	80	83,40 ^{*)}
		Indeks Aksesibilitas Perkotaan	78,90	78,90
		Persentase luas kawasan kumuh	0,00	0,00
		Persentase ruang terbuka hijau publik	18	18

Sumber: RPJMD Kota Magelang 2021-2026 (Bab 5)

^{*)} : Penyesuaian target berdasarkan realisasi tahun 2024

4.2.2.3.2 Strategi dan Arah Kebijakan

Prioritas pembangunan tersebut selaras dengan permasalahan dan isu strategis daerah dan kemudian dilaksanakan melalui berbagai strategi sesuai arah kebijakan pembangunan tahun 2026, yaitu **“Perwujudan Kota Magelang yang Semakin Maju, Sehat dan Bahagia.”**. Strategi yang akan dilakukan untuk melakukan intervensi terhadap isu strategis dan permasalahan yang ada diantaranya:

1. Kemiskinan

Upaya penanggulangan kemiskinan secara umum dibagi menjadi tiga strategi yaitu pengurangan beban pengeluaran, peningkatan kemampuan dan pendapatan masyarakat, serta pengurangan kantong kemiskinan. Dalam upaya pengurangan beban pengeluaran, terdapat dua upaya yaitu (1) langsung, melalui perlindungan sosial dan (2) tidak langsung, melalui dimensi pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur (pengurangan kantong kemiskinan).

Upaya perlindungan sosial yang akan dilakukan diantaranya adalah bantuan permakanan untuk lansia, beras stunting, dan perlindungan sosial dari pemerintah pusat seperti Program Keluarga Harapan (PKH). Selain itu, pembangunan shelter untuk memberikan perlindungan sosial bagi PPKS akan dilaksanakan. Sedangkan upaya tidak langsung yang akan dilakukan di tahun 2025 diantaranya adalah:

a. Dimensi Pendidikan

Peningkatan akses pendidikan dilakukan melalui pengalokasian BOS dan BOSDA agar semua penduduk usia sekolah dapat mengakses pendidikan formal melalui sekolah gratis melalui Sekolah Negeri. Selain itu, untuk menjaring anak putus/tidak sekolah, dilakukan pendataan terhadap anak putus/tidak sekolah oleh Pamong Balai Belajar. Pamong Balai Belajar sudah dimulai perekrutan pada bulan April 2023 dan akan ada 2 orang pamong Balai Belajar di tiap kelurahan. Pamong Balai Belajar selain melakukan pendataan juga akan melakukan pendampingan kepada anak-anak sekolah agar lebih mampu dan mau dalam mengikuti kegiatan pembelajaran sehingga akan berkontribusi juga dalam meminimalisir angka putus sekolah.

Untuk meningkatkan rata-rata lama sekolah, rintisan wajib belajar 13 tahun akan dilaksanakan salah satunya dengan bantuan kepada anak-anak kurang mampu untuk melanjutkan sekolah yang akan diwujudkan dalam bentuk penyediaan buku, seragam dan alat-alat sekolah.

Selain itu, terdapat program beasiswa subsidi kuliah yang diampu oleh Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kota Magelang. Beasiswa diberikan kepada 100 mahasiswa warga Kota Magelang melalui proses seleksi melalui jalur prestasi akademik dan non-akademik.

b. Dimensi Kesehatan

Dalam rangka peningkatan kualitas Kesehatan, perluasan jangkauan jaminan kesehatan menjadi salah satu upaya yang terus dilakukan. Pada awal tahun 2023, *Universal Health Coverage* (UHC) Kota Magelang mencapai 99,97%. Jaminan Kesehatan-PBI menjadi salah satu komponen pendorong perluasan UHC dan diharapkan dapat memperluas akses layanan Kesehatan.

Selain jaminan Kesehatan, Pemberian Makanan Tambahan (PMT) juga dilakukan untuk meningkatkan kualitas Kesehatan. PMT dilakukan melalui pemberian beras stunting untuk keluarga berisiko stunting. Terdapat juga program CETING EMAS (Cegah Stunting melalui Emak-Emak Magelang Sehat) dimana dilakukan intervensi kepada baduta stunting keluarga miskin melalui pemberian makanan tambahan. PMT yang dilakukan juga dilakukan pengawasan terhadap konsumsinya, sehingga dipastikan PMT dikonsumsi oleh balita stunting yang menjadi target sasaran. Pengawasan tumbuh kembang anak dan pemantauan program stunting juga dilakukan melalui posyandu. Audit Kasus Stunting (AKS) sebagai salah satu cara penentuan intervensi penanganan terhadap kasus stunting dilanjutkan pelaksanaannya di tahun 2024.

Selain pengurangan beban pengeluaran, upaya peningkatan kemampuan dan pendapatan masyarakat juga terus dilakukan. Peningkatan kemampuan dan pendapatan masyarakat dapat dilakukan melalui dua dimensi yaitu ketenagakerjaan dan ketahanan pangan. Beberapa upaya yang akan dilakukan pada tahun 2025 diantaranya adalah:

- a. Pelatihan kerja diampu oleh Dinas Tenaga Kerja. Terdapat dua jenis pelatihan kerja yang diberikan yaitu pelatihan kompetensi dan pelatihan kewirausahaan. Pelatihan kompetensi dilakukan untuk memfasilitasi angkatan kerja agar memiliki kemampuan sesuai kebutuhan pasar kerja. Setelah mengikuti pelatihan, diharapkan peserta pelatihan dapat diterima kerja. Sementara itu, untuk pelatihan kewirausahaan diberikan sesuai dengan minat pencari kerja. Setelah mengikuti pelatihan ini, diharapkan para peserta pelatihan dapat memperoleh penghasilan.
- b. Pelatihan UMKM diampu oleh Dinas Perdagangan Perindustrian Koperasi dan Usaha Mikro. Target sasaran pelatihan adalah warga masyarakat yang sudah memiliki usaha. Pelatihan ini juga

menindaklanjuti dari hasil pelatihan kerja Dinas Tenaga Kerja dan Pelatihan Kepala Keluarga Perempuan/Rentan yang dilaksanakan DPMP4KB yang telah memenuhi syarat untuk pendampingan lebih lanjut. Pelatihan ini diarahkan untuk peningkatan kapasitas dan kualitas produksi serta distribusi produk UMKM, peningkatan akses modal bagi UMKM, perluasan pasar perdagangan.

- c. Pelatihan kewirausahaan pemuda diampu oleh Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata. Pelatihan wirausaha muda ini menyasar kelompok usia pemuda agar mampu membuka usaha jasa kepariwisataan. Pelatihan ini diharapkan dapat memutus rantai kemiskinan melalui penguatan kemampuan generasi kedua.
- d. Pelatihan bagi Kepala Keluarga Perempuan/rentan difasilitasi oleh DPMP4KB. Pelatihan ini diharapkan dapat meningkatkan kemampuan Kepala Keluarga Perempuan/Rentan agar lebih berdaya, salah satunya diharapkan dapat memiliki penghasilan.
- e. Pelatihan bagi disabilitas yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial. Kelompok disabilitas yang masih mampu beraktivitas diharapkan dapat lebih mengoptimalkan keterampilan/keahlian yang dimiliki, sehingga dapat lebih berdaya dan mampu.
- f. Urban Farming. Keterbatasan lahan di Kota Magelang menjadi tantangan dalam pelaksanaan urban farming. Budidaya dilakukan dengan memanfaatkan polybag untuk tanaman sayur atau buah, sesuai dengan usulan masyarakat dalam Program Rodanya Mas Bagia (Program Pemberdayaan Masyarakat Maju Sehat Bahagia). Pendampingan juga dilakukan oleh Dinas Pertanian dan Pangan untuk keberlanjutan urban farming.

Salah satu upaya intervensi penanggulangan kemiskinan ekstrem di Kota Magelang adalah verifikasi dan validasi data P3KE pada Desil 1 Persentil 2. Untuk memfokuskan intervensi, dilakukan skoring terhadap data KK Persentil 2 P3KE Kota Magelang. Hasil skoring diperoleh 60 KK, yang kemudian ditindaklanjuti dengan survei kunjungan ke lapangan. Hasil verval kemudian dibuat profil per KK dan disampaikan kepada OPD terkait. Kemudian, OPD terkait melakukan survei gabungan untuk menawarkan intervensi yang akan dilakukan, seperti intervensi Pendidikan non formal kepada warga yang belum tamat SMA yang berusia lebih dari 25 tahun, atau bantuan pelatihan kerja yang dibutuhkan oleh pengangguran/setengah pengangguran. Berdasarkan kegiatan tersebut, proses verifikasi dan validasi data akan terus dilakukan setiap tahunnya. Untuk menyusun langkah pengentasan kemiskinan yang tepat sasaran juga dilakukan peningkatan sinergitas dan harmonisasi program pengentasan kemiskinan serta identifikasi dan verifikasi data PPKS dan DTKS yang dilakukan secara rutin.

Intervensi terkait penanggulangan kemiskinan juga dilakukan dengan strategi pengurangan kantong-kantong kemiskinan. Intervensi yang dilakukan salah satunya dengan intervensi terhadap rumah tidak layak huni. Pada tahun 2026, direncanakan akan dilakukan intervensi dalam bentuk bantuan sosial rehabilitasi rumah. Selain itu, peningkatan akses sanitasi dan air bersih juga akan diintervensi. Perbaikan kondisi ini diharapkan juga akan mempengaruhi prevalensi stunting dimana akses sanitasi dan air bersih menjadi salah satu komponen intervensi gizi sensitif.

2. Kualitas SDM

Intervensi dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia selaras dengan peningkatan capaian Indeks Pembangunan Manusia yang menjadi outcome dalam pembangunan manusia. Salah satu poin penting dalam peningkatan kualitas SDM adalah kondisi ekonomi yang baik. Penanganan masalah kemiskinan menjadi prioritas dalam upaya peningkatan SDM di Kota Magelang.

Dalam upaya peningkatan kualitas pendidikan, upaya intervensi yang dilakukan antara lain dengan peningkatan kualitas layanan pendidikan dan literasi untuk masyarakat berdaya saing, peningkatan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan, peningkatan sarana dan prasarana pendukung pendidikan, peningkatan literasi masyarakat, pembinaan pemuda, serta pembinaan olahraga. Hal yang menjadi perhatian dalam pendidikan adalah terkait Anak putus/tidak sekolah. Untuk mendukung program nasional juga diupayakan untuk percepatan wajib belajar 13 tahun dan revitalisasi pendidikan non formal. Peningkatan peran masyarakat dalam mendorong anak dan dewasa untuk bersekolah lagi melalui pendidikan non formal/kesetaraan sangat penting untuk peningkatan rata-rata lama sekolah. Revitalisasi pendidikan non formal juga dilakukan sebagai upaya peningkatan *life skill* serta pendidikan berbasis komunitas. Dalam hal pemajuan kebudayaan dilakukan dengan penguatan pendidikan agama, karakter dan budi pekerti dalam

proses pembelajaran. Perlindungan dan pengembangan potensi budaya juga terus dilakukan dengan upaya pelestarian dan revitalisasi bangunan cagar budaya.

Sedangkan untuk peningkatan kualitas Kesehatan masyarakat dilakukan intervensi melalui pemenuhan upaya Kesehatan perorangan dan masyarakat, peningkatan kapasitas SDM Kesehatan, perluasan akses pelayanan Kesehatan, peningkatan pemahaman terkait kesehatan reproduksi untuk pengendalian penduduk, pemasyarakatan olahraga, pengarusutamaan gender, pemberdayaan perempuan, perlindungan perempuan dan anak, peningkatan kualitas keluarga, serta penguatan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas). Selain itu, perluasan jangkauan pelayanan Kesehatan dilakukan melalui homecare dan layanan jemput sakit antar sehat yang merupakan program unggulan Kota Magelang. Kegiatan ini juga menjangkau layanan Kesehatan ibu hamil sehingga mendukung pengurangan kasus kematian ibu (*Major Project Percepatan Penurunan Kematian Ibu dan Stunting*).

Stunting yang menjadi salah satu prioritas penanganan masalah Kesehatan tingkat nasional (*Major Project Percepatan Penurunan Kematian Ibu dan Stunting*), membutuhkan intervensi program kegiatan lintas OPD. Dinas Kesehatan melakukan intervensi terkait pemberian tambahan gizi dan tablet tambah darah bagi ibu hamil, pemberian tablet tambah darah bagi remaja putri, pemantauan dan pemberian tambahan gizi bagi balita melalui kegiatan posyandu, serta KIE terkait ASI Eksklusif dan imunisasi. Selain Dinas Kesehatan, DPMP4KB juga melakukan intervensi terkait kesehatan reproduksi, salah satunya adalah KIE Keluarga Berencana. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang juga berperan dalam intervensi penurunan stunting. Peningkatan akses terhadap air bersih dan sanitasi menjadi salah satu faktor pendorong untuk dapat mengurangi resiko stunting. Selain itu, untuk peningkatan kualitas gizi, Dinas Pertanian dan Pangan berperan dalam penyediaan pangan local yang bervariasi, salah satunya dengan pemanfaatan pekarangan rumah. Pemanfaatan pekarangan rumah diharapkan dapat memenuhi kebutuhan gizi masyarakat yang dapat mengurangi resiko stunting.

3. Sarana Prasarana Perkotaan Berkelanjutan

Arah pembangunan kota saat ini dipengaruhi isu pembangunan berkelanjutan yang mendorong pembangunan untuk lebih menyeimbangkan aspek ekonomi, ekologi dan sosial. Infrastruktur masih menjadi isu di Kota Magelang yang memiliki peran penting sebagai pendukung pembangunan kota. Strategi penguatan infrastruktur berkelanjutan tahun 2025 di Kota Magelang dilakukan melalui:

a. Pembangunan dan perbaikan infrastruktur kota

Fokus peningkatan kualitas infrastruktur di Kota Magelang adalah pada peningkatan sarana irigasi dan drainase dalam kondisi baik. Untuk kondisi jalan di Kota Magelang mayoritas sudah dalam kondisi mantap (baik dan sedang). Dari total panjang jalan kota 116,52 km, sepanjang 72,91 km dalam kondisi baik, dan 32,53 km dalam kondisi sedang; sehingga fokus penanganan jalan pada tahun 2025 pada pemeliharaan dan perawatan jalan baik bersumber dari DAK, banprov maupun APBD Kota.

Strategi peningkatan sarana irigasi dan drainase di Kota Magelang tahun 2025 melalui peningkatan kualitas saluran menjadi baik dengan kualifikasi berupa:

- 1) Bangunan berupa beton tulangan;
- 2) Saluran terbuka dan mudah diakses untuk dilakukan pemeliharaan;
- 3) Bangunan berupa pasangan batu dalam kondisi bagus.

Pada tahun 2023 telah dilakukan penyesuaian SK kewenangan saluran drainase yang semula meliputi saluran primer dan sekunder sepanjang 237,83 km menjadi saluran primer saja sepanjang 20,23 km. Saluran sekunder tidak diperhitungkan karena merupakan bagian pelengkap jalan yang program penanganannya jadi satu dengan penanganan jalan. Capaian pada tahun 2023, panjang drainase dalam kondisi baik sepanjang 6,55 km (32,40%). Sedangkan untuk saluran irigasi yang sebelumnya hanya meliputi Saluran Kali Kota sepanjang 5 km, sesuai kewenangannya direncanakan untuk ditambah menjadi 16,55 km dengan kondisi saluran yang baik baru mencapai 9,35 km (56,47%) pada tahun 2023. Upaya peningkatan kualitas jaringan irigasi dan drainase pada tahun 2025 difokuskan untuk meningkatkan kualitas saluran yang saat ini masih rusak dan sedang menjadi baik.

b. Penguatan penyelenggaraan penataan ruang

Penyelenggaraan penataan ruang di Kota Magelang hingga tahun 2023 masih menyisakan beberapa permasalahan yang perlu diselesaikan. Dokumen rencana rinci baik berupa Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kota maupun Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL) masih belum seluruhnya tersedia di Kota Magelang. Penyusunan RDTR Kota Magelang hingga tahun 2023 masih pada tahap penyediaan materi teknis, sehingga pada tahun 2024 ditargetkan sudah dapat berproses untuk penetapan peraturan walikota dan pada tahun 2025 sudah dapat dioperasionalkan dan disosialisasikan.

Dari delapan kawasan strategis kota yang tercantum dalam Perda RTRW Kota Magelang, kawasan yang sudah memiliki dokumen RTBL baru tiga yaitu, kawasan Lembah Tidar, Kawasan Aloon-aloon dan Kawasan Sidotopo. Sedangkan kawasan lainnya, yaitu Kawasan *Sport Center* Sanden, Kawasan Mantyasih, Kawasan Kyai Langgeng, Kawasan Kebonpolo dan Kawasan Soekarno Hatta belum memiliki dokumen RTBL. Namun demikian pada tahun 2024 akan disusun RTBL untuk dua Kawasan yaitu Kawasan Kebonpolo dan Kawasan Soekarno Hatta. Sehingga strategi tahun 2025 yang perlu dilakukan adalah pemenuhan penyediaan RTBL di tiga kawasan strategis yang belum memiliki dan penetapan dokumen RTBL yang sudah disusun menjadi produk hukum berupa peraturan wali kota.

Peningkatan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan penataan ruang juga masih perlu mendapat perhatian pada tahun 2025. Peran serta masyarakat diperlukan agar pengendalian dan pemanfaatan ruang dapat lebih dioptimalkan dalam upaya mewujudkan ruang Kota Magelang yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan.

c. Penyediaan sarana perkotaan yang inklusif

Komponen pendukung untuk mewujudkan kualitas infrastruktur ruang kota selain dari aspek infrastruktur juga pada penyediaan sarana perkotaan yang inklusif memenuhi kaidah *universal design*. Pada tahun 2025, penyediaan sarana perkotaan yang inklusif masih perlu mendapat perhatian karena capaian rata-rata hingga tahun 2023 baru mencapai sebesar 56,25%. Fungsi koordinasi dan pengawasan penyelenggaraan bangunan gedung dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum, sedangkan penyediaan sarana perkotaan melibatkan OPD lain, yaitu Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dalam penyediaan sarana pendidikan dasar, DPPKUM dalam penyediaan sarana perdagangan, dinporapar dalam penyediaan sarana pariwisata, serta dinas kesehatan dalam penyediaan sarana kesehatan.

d. Peningkatan angkutan umum perkotaan

Peningkatan kualitas dan akses terhadap angkutan umum perkotaan perlu menjadi perhatian di tahun 2024. Nilai *load factor* pada tahun 2023 mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya, dari semula 33,04 menjadi 37,05 karena jumlah angkutan kota yang berkurang. Kedepannya layanan angkutan umum bagi masyarakat Kota Magelang perlu terus ditingkatkan, dari 186 angkutan umum perkotaan yang beroperasi, sebagian besar belum mengalami peremajaan. Pelayanan angkutan umum juga belum memiliki SOP dalam melayani penumpang. Pada tahun 2023 nilai VC ratio di Kota Magelang sebesar 0,61 nilai ini lebih baik dibandingkan nilai VC ratio tahun 2022 0,79. Akan tetapi dengan kondisi lahan terbatas maka perlu alternatif penyediaan angkutan umum perkotaan yang baik menjadi solusi untuk mencegah semakin bertambahnya kendaraan pribadi yang mempengaruhi kemacetan jalan raya. Untuk memperbaiki mengoptimalkan layanan angkutan umum di tahun 2025 diperlukan kajian evaluasi trayek dan peremajaan armada angkutan umum yang sudah tua oleh Dinas Perhubungan.

e. Peningkatan kualitas penyehatan lingkungan dan permukiman

Peningkatan kualitas penyehatan lingkungan dan permukiman terdiri dari peningkatan akses sanitasi dan air minum baik yang layak dan aman. Hal ini sejalan dengan target pembangunan berkelanjutan yang harus tuntas pada tahun 2030. Hal-hal yang menjadi strategi peningkatan layanan akses sanitasi dan air minum pada tahun 2025 adalah pembangunan fasilitas sanitasi dan air minum layak dan aman serta penanganan RTLH melalui sumber pembiayaan APBD dan non APBD, peningkatan kesadaran dan pemahaman masyarakat mengenai sanitasi aman dengan melibatkan kader-kader kesehatan dan pembinaan KB, peningkatan promosi kesehatan dan PBHS, kampanye layanan L2T2 melalui berbagai media komunikasi, kolaborasi dalam kampanye sanitasi dengan lembaga kemasyarakatan (Forum Tembang Tidar), perbaikan dan pencegahan kawasan kumuh melalui program kampung tematik dan kampung iklim (lintas sektor antara DPUPR, Disperkim, Dinas Kesehatan, DPMP4KB, Disnaker).

4. Kualitas lingkungan hidup

a. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) merupakan gambaran atau indikasi awal yang memberikan kesimpulan cepat dari suatu kondisi lingkungan hidup pada lingkup dan periode tertentu. Nilai IKLH ini ditentukan oleh Indeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara dan Indeks Kualitas Tutupan Lahan. Ketiga penilaian itu diperoleh melalui observasi langsung dilapangan oleh Dinas Lingkungan Hidup. Akan tetapi faktor-faktor yang mendukung ketiga unsur ini diperoleh berdasarkan dari kebijakan dilintas sektoral.

b. Indeks Kualitas Air

Indeks Kualitas Air ini diperoleh melalui pengukuran kualitas air sungai berdasarkan pH, TSS, NO₃-N, DO, BOD, COD, Total Fosfat dan Fecal E Coli. Kota Magelang merupakan Kota Sedang dengan tingkat kepadatan yang cukup tinggi memungkinkan tingginya pencemaran oleh bakteri E Coli. Pencemaran Bakteri E Coli pada badan Air ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, di antaranya adalah tingkat ODF (*Open Defecation Free*) dan Pembuangan Limbah Rumah Tangga yang langsung dibuang ke Sungai (tidak memiliki Septic tank dan atau resapan sesuai standar). Kota Magelang yang tidak memiliki Kawasan Industri memungkinkan minimnya pencemaran air sungai oleh limbah Industri meskipun terkadang ada perusahaan yang sedikit teledor sehingga terjadi pencemaran sungai oleh limbah Industri. Kota Magelang yang didominasi didominasi oleh Kawasan Terbangun (Kawasan Non Pertanian) memungkinkan pencemaran oleh Nitrat dan Fosfat yang cukup sedikit, selain itu, sistem pemupukan dengan menggunakan pupuk kandang sudah jarang digunakan. Itu artinya bahwa Indeks Kualitas Air di Kota Magelang sangat bergantung kepada Kebijakan dari Dinas Perumahan dan Permukiman terkait dengan pengaturan pengelolaan limbah rumah tangga, selain itu bergantung kepada kebijakan Dinas Kesehatan terkait dengan konsep Penyehatan Lingkungan.

Adapun kebijakan yang dapat diambil dalam rangka peningkatan Indeks Kualitas Air ini adalah sebagai berikut:

- 1) Peningkatan kuantitas dan kualitas sistem pengelolaan limbah Rumah Tangga melalui Sistem Pengelolaan Air Limbah Setempat dan Terpusat (SPAL DT dan SPAL DS) berikut juga pengelolaan terhadap limbah yang akan dibuang dari Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) menuju sungai.
- 2) Pengawasan terhadap potensi pencemaran melalui pengukuran kualitas air sungai (dan air tanah secara berkala jika diperlukan)
- 3) Kampanye dan sosialisasi terkait dengan Anti Buang Air Besar Sembarangan (Anti ODF)
- 4) Identifikasi penyakit menular yang disebabkan oleh buruknya sanitasi lingkungan dan kualitas air yang buruk (diare, kolera, disentri). Karena ini hal ini merupakan indikator outcome dari kualitas penyesatan lingkungan dan kualitas air tanah.

c. Indeks Kualitas Udara

Indeks Kualitas Udara di kota Magelang mengalami Penurunan dari tahun ke tahun hingga pada tahun 2022 menjadi 81,16 sementara pada tahun 2023 naik menjadi 83,05. Indeks Kualitas Udara ini dihitung berdasarkan nilai rata - rata Nitrogen Dioksida (NO₂) dan Sulfur Dioksida (SO₂). Mengingat bahwa Kota Magelang tidak memiliki Kawasan Industri besar sementara pergerakan kendaraan bermotor cukup tinggi di Kota Magelang, sangat mungkin bahwa cemar NO₂ dan SO₂ ini dihasilkan oleh unsur transportasi sehingga pencemaran udara sangat bergantung dari kebijakan oleh Dinas Perhubungan dan Dinas lingkungan Hidup

Adapun kebijakan yang dapat diambil dalam rangka peningkatan Indeks Kualitas Udara ini adalah sebagai berikut :

- 1) Kebijakan penurunan emisi lingkungan melalui pembatasan penggunaan kendaraan pribadi secara periodik (pada hari-hari tertentu)
- 2) Uji emisi untuk kendaraan pribadi sebagai syarat untuk bisa memasuki Kawasan tertentu dari Wilayah Kota
- 3) Kampanye kepada Masyarakat untuk mengendarai kendaraan umum melalui pembentukan image yang baik dan keren terhadap Kendaraan Umum

- 4) Bekerjasama dengan Organisasi serikat Kendaraan Umum terkait dengan Peningkatan Kualitas Layanan, terutama adalah pengaturan Jadwal/ ketepatan jam operasi dan suasana berkendara.
- 5) Pengawasan dan penghitungan kualitas Udara setiap saat (seperti di Kota Besar, bila ada dananya)
- 6) Peningkatan Vegetasi yang kuat dalam menyerap karbon dan Pencemaran Lingkungan
- 7) Pengawasan dan pelestarian Vegetasi, terutama pohon - pohon besar dipinggir jalan dan sanki bagi pelakunya, terutama pelaku usaha
- 8) Alternative desain Kawasan Kota beserta jenis Vegetasi yang ditanam melalui kebijakan Tata Ruang (RTBL)

d. Indeks Kualitas Tutupan Lahan

Indeks Tutupan Lahan pada dasarnya terbagi berdasarkan kewenangan lintas sektoral. Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang merupakan unsur yang dinilai sebagai indikator indeks Tutupan Lahan terbagi atas beberapa jenis, diantaranya adalah sempadan sungai/ irigasi, jalur hijau, areal pertanian, areal perkebunan, taman kota, areal pemakaman, pekarangan, dan hutan Kota. Saat ini DLH hanya mengelola 32,41% dari total RTH. Artinya adalah bahwa kewenangan pada masing - masing sektor belum teridentifikasi atau dilaporkan secara periodik kecuali DLH. Oleh karena perlu adanya koordinasi antar sektor yang berkaitan dengan pengelolaan RTH ini oleh beberapa OPD, diantaranya adalah Dinas Pertanian dan Pangan, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, Dinas Perumahan dan Permukiman dan Dinas Lingkungan Hidup.

Adapun kebijakan yang dapat diambil dalam rangka peningkatan Indeks Kualitas Tutupan Lahan adalah sebagai berikut:

- 1) Koordinasi lintas sektoral terkait dengan pembagian kewenangan
- 2) Pengalokasian dana APBD untuk pembelian Tanah milik Pribadi untuk penanaman Vegetasi untuk dijadikan sebagai RTH Publik, untuk menyelamatkan Kota Dari area terbangun yang semakin solid (jika diperlukan)
- 3) Pengintegrasian berbagai program yang senada dengan peningkatan RTH, contohnya adalah Urban Farming
- 4) Alternatif desain Bangunan, *furniture street* dan *pedetrian ways* yang mendukung peningkatan RTH melalui kebijakan Tata Ruang RTBL
- 5) Kontrol dan pengawasan terkait dengan alih fungsi lahan
- 6) Peningkatan pengelolaan Ruang Terbuka Publik Kawasan Permukiman melalui peningkatan kuantitas dan kualitas vegetasi
- 7) Ambil bagian dalam program Green Infrastructure dimana Kabupaten/ Kota merupakan bagian dari Anggota Pokja Jawa Tengah.

5. Perubahan Iklim

Perubahan Iklim merupakan isu global yang kemudian telah diupayakan baik mitigasi maupun adaptasi oleh Sebagian besar Negara di Dunia. Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Lingkungan Hidup telah berupaya untuk melakukan pengawasan kepada Pemerintah Kota dan Kabupaten melalui aplikasi Aksara. Aplikasi Aksara ini memuat beberapa kegiatan terkait dengan pola mitigasi, adaptasi dan kampung proklam oleh beberapa OPD pengampu kegiatan, Kota Magelang pada dasarnya juga telah mengupayakan pola mitigasi dan adaptasi perubahan iklim diantara nya adalah sebagai berikut:

a. Implementasi kegiatan Mitigasi Perubahan Iklim

- 1) Dinas Lingkungan Hidup

Dinas Lingkungan Hidup berkontribusi terhadap mitigasi perubahan iklim melalui pengelolaan sampah dari Rumah Tangga melalui pembentukan Bank Sampah dimana hal ini akan mengurangi sampah yang dibuang ke TPA, sehingga mengurangi cemaran gas metana yang memicu timbulnya pemanasan global, selain itu juga perawatan tanaman besar oleh DLH yang notabene sangat kuat menyerap karbon juga memiliki kontribusi cukup besar terhadap mitigasi perubahan iklim. Selain itu,

Kampung Organik dan Bank Sampah mengembangkan penggunaan pupuk kompos dimana cukup aman untuk tanaman dan tidak berpengaruh kepada emisi lingkungan.

2) Dinas Perhubungan

Dinas Perhubungan berkontribusi terhadap mitigasi perubahan iklim melalui beberapa kegiatan seperti *Car Free Day*, Peremajaan angkutan dan pengujian emisi kendaraan umum.

3) Dinas Pertanian

Dinas Pertanian berkontribusi terhadap mitigasi perubahan iklim melalui peningkatan jumlah vegetasi, selain itu penggunaan kompos pada kelompok petani Kota juga merupakan bagian dari mitigasi perubahan iklim. Adapun sektor pertanian dengan skala besar memang kurang terlihat eksistensinya karena Ruang Kota didominasi oleh kegiatan perdagangan dan jasa.

4) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang berkontribusi terhadap mitigasi perubahan iklim melalui pengelolaan air limbah domestik SPALDT dan SPALDS (Sistem pengelolaan air limbah domestik terpusat dan setempat). Terkait pengurusan aspek air limbah domestik sejak tahun 2021 berpindah dari Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman ke Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Saat ini masih dalam proses pengembangan dan peningkatan kualitas pengelolaan.

b. Implementasi kegiatan Adaptasi Perubahan Iklim

Adaptasi Perubahan Iklim ini diupayakan melalui pembuatan kajian resiko perubahan iklim yang dianggarkan pada tahun 2024 oleh Bidang Riset dan Inovasi, Bapperida Kota Magelang.

c. Implementasi Kampung Pro Iklim

Selain itu, sebagai upaya untuk memberikan apresiasi kepada Masyarakat, sekaligus dalam rangka menginternalisasikan kepada Masyarakat terkait dengan konsep adaptasi perubahan iklim, maka dilakukan pembentukan Program Kampung Iklim. Saat ini Kota Magelang baru memiliki 1 Kampung Iklim. Adapun kegiatan yang dilakukan pada Kampung Iklim secara umum adalah sebagai berikut:

- Kerjabakti kampung secara rutin.
- Penanganan Sampah dengan pilah sampah dari Rumah Tangga, Pembentukan Bank Sampah dan Budidaya magot.
- Penanaman tanaman buah, sayuran, dll pada lahan kosong (area Publik) dan halaman kosong (area privat).
- Penanggulangan penyakit yang terkait dengan iklim dan pandemi.
- Peningkatan pendapatan masyarakat melalui kegiatan perikanan, pertanian dan pemberdayaan masyarakat.

Dapat dikatakan bahwa secara umum, kegiatan pada Kampung Iklim ini adalah lebih menekankan pada hal-hal yang mampu dilakukan oleh masyarakat terkait dengan penekanan emisi lingkungan, penyehatan lingkungan dan kewaspadaan terhadap penyakit yang disebabkan oleh iklim, dan penguatan ketahanan pangan dan gizi.

6. Ketahanan daerah (ketahanan terhadap pangan dan bencana)

Ketahanan daerah terhadap bencana yang diukur melalui Indeks Ketahanan Daerah (IKD) digunakan untuk mengukur kesiapan daerah dalam menghadapi resiko bencana. Dengan terbentuknya BPBD di awal tahun 2022, penanganan bencana dapat dilakukan lebih optimal. Pengembangan sistem informasi mitigasi bencana menjadi prioritas, salah satu yang akan dilaksanakan di tahun 2024 adalah penyusunan Kajian Resiko Bencana (KRB). Selain itu, peningkatan keberdayaan masyarakat juga dilakukan melalui kelurahan tangguh bencana, yang direncanakan setiap tahun bertambah 1 kelurahan. Selain itu, untuk meningkatkan mitigasi kebakaran, pemberian sarana prasarana kebencanaan kepada masyarakat, seperti APAR, akan ditambahkan ketika cakupan pemenuhan kebutuhan untuk penanggulangan kebakaran. Pada tahun 2025 juga fokus pada peningkatan kapasitas SDM kebencanaan, juga akan dilakukan penyusunan Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana serta kajian pasca bencana (rehabilitasi dan rekonstruksi).

Selain ketahanan terhadap bencana, ketahanan pangan juga menjadi perhatian mengingat produksi pangan Kota Magelang tidak mampu mencukupi kebutuhan pangan masyarakatnya, sehingga masih mengandalkan dari daerah sekitar. Untuk itu, salah satu intervensi kegiatan yang dapat dilakukan adalah pelaksanaan *urban farming*. *Urban farming* difokuskan pada pemanfaatan pekarangan dari masing-masing rumah. Intervensi kegiatan ini selaras dengan pelaksanaan program unggulan “Program Pemberdayaan Masyarakat Maju, Sehat, Bahagia (Rodanya Masbagia) dan “Magelang Cinta Organik (Cantik)”. Dalam pelaksanaan Program Rodanya Masbagia, masyarakat dapat mengusulkan paket tanaman untuk *urban farming* lengkap dengan paket pelatihannya. Kondisi ini diharapkan urban farming yang dilaksanakan oleh masyarakat akan berlanjut. Upaya lainnya dengan pemenuhan cadangan beras Kota Magelang juga akan dilakukan pada tahun 2025. Cadangan beras yang akan dilakukan penambahan 10 Ton pada tahun 2025. Pemenuhan cadangan beras di Kota Magelang sudah mencapai 24,9 Ton di tahun 2023. Hal ini juga akan didukung dengan koordinasi dengan berbagai pihak terkait dalam hal stabilisasi harga pangan dan distribusi pangan.

7. Daya saing ekonomi

Salah satu intervensi yang dapat dilakukan di tahun 2025 untuk peningkatan daya saing ekonomi adalah dengan pelatihan bagi pelaku UMKM untuk pengembangan usaha. Intervensi ini sejalan dengan program unggulan “Program Magelang Keren (Kelurahan Entrepreneur)” dimana akan ada pendampingan dan inkubasi bagi para pelaku UMKM. Pengembangan UMKM tidak hanya terbatas pada UMKM yang ditangani oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Intervensi juga dilakukan terhadap para pelaku industri pariwisata yang dilaksanakan oleh Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata. Pelatihan tour guide atau pelaku pariwisata yang lain diharapkan akan meningkatkan kualitas sektor pariwisata selain peningkatan kualitas objek dan sarana prasarana pendukung wisata.

Selain pelatihan bagi UMKM dan pelaku industri pariwisata, peningkatan kapasitas SDM pencari kerja juga akan diintervensi melalui pelatihan-pelatihan kerja. Pelatihan ini selaras dengan program penciptaan 1.500 wirausaha baru. Pelatihan kerja tidak hanya dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja, tetapi juga dilakukan oleh Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata untuk pelatihan pemuda; serta DPMP4KB untuk pelatihan bagi perempuan. Kegiatan pelatihan kerja ini selain sebagai upaya peningkatan daya saing ekonomi juga mendukung upaya pengurangan kemiskinan.

Peningkatan kualitas infrastruktur dan transportasi publik juga dapat menjadi intervensi dalam peningkatan daya saing ekonomi. Adanya infrastruktur yang baik akan mempermudah akses distribusi dan pemasaran produk bagi UMKM. Kondisi infrastruktur yang baik dan kemudahan akses dari dan ke Kota Magelang juga akan menarik kunjungan wisata.

Selain itu, untuk meningkatkan investasi di Kota Magelang, kemudahan pelayanan perijinan juga terus ditingkatkan. Sosialisasi terkait kemudahan perijinan melalui media cetak maupun media social terus dilakukan untuk menarik lebih banyak investor. Selain itu, penggunaan aplikasi OSS untuk perijinan juga akan mempercepat proses perijinan yang akan semakin menarik investor. Kesiapan yang perlu dilakukan adalah menyiapkan lahan yang siap diinvestasi dengan status clean & clear. Penetapan Rencana Detil Tata Ruang (RDTR) juga mendukung kemudahan dalam perijinan, apalagi ketika sudah terintegrasi dengan OSS. Pada tahun 2024, RDTR ditargetkan untuk penyelesaiannya sampai dengan penetapan agar dapat segera diintegrasikan dengan OSS.

8. Reformasi birokrasi

Penilaian atas pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kota Magelang tahun 2023 menunjukkan peningkatan signifikan dibandingkan tahun 2022. Komponen pengungkit sudah menunjukkan perbaikan dengan peningkatan nilai dari 35,90 menjadi 35,11 namun komponen hasil justru menunjukkan penurunan dari 31,39 menjadi 31,21. Melihat hasil antara area perubahan reformasi birokrasi pada Pemerintah Kota Magelang tahun 2020 dan 2021, keberhasilan pelaksanaan reformasi birokrasi membutuhkan sinergitas seluruh perangkat daerah, utamanya BKPSDM, Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik, Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa, Dinas Kesehatan, DPMP4KB, kecamatan, kelurahan, Inspektorat, Dinas Perpustakaan Kearsipan.

Secara umum upaya pelaksanaan reformasi birokrasi tahun 2025 diarahkan untuk perbaikan manajemen ASN dan peningkatan manajemen kinerja didukung optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi. Sesuai

RPJMD Kota Magelang 2021-2026, perbaikan manajemen ASN dilakukan melalui penerapan sistem merit. Strategi pencapaian target sistem merit pada tahun 2025 adalah:

- a. Penyelenggaraan rekrutmen, rotasi, promosi, dan mutasi ASN secara obyektif dan kompetitif berdasarkan kualifikasi, kompetensi, kinerja dan tanpa diskriminasi. Upaya penting yang akan dilakukan adalah pengadaan PNS dan PPPK untuk memenuhi berbagai formasi jabatan yang masih kosong, sesuai dokumen rencana kebutuhan yang disusun.
- b. Optimalisasi pemanfaatan sistem informasi kepegawaian
- c. Pada tahun 2025 ditargetkan untuk pemutakhiran 3.100 dokumen yang kemudian menjadi *input* dalam sistem informasi kepegawaian.
- d. Pengembangan kompetensi ASN serta pemenuhan ketentuan minimal pembelajaran bagi ASN. Pada tahun 2025 direncanakan pengembangan kompetensi melalui pelatihan teknis, manajerial, maupun pelatihan fungsional. Pelatihan yang akan dilaksanakan yaitu untuk pelatihan dasar CPNS, pendidikan dan pelatihan dasar manajemen kebencanaan, pendidikan dan pelatihan dasar fungsional analisis kebijakan, dan pendidikan dan pelatihan SAKIP.

Selain untuk pengembangan kompetensi ASN, pendidikan dan pelatihan SAKIP juga menjadi upaya peningkatan maturitas penyelenggaraan SPIP pada Pemerintah Kota Magelang di tahun 2025. Salah satu temuan dalam penilaian tahun 2023 yang membutuhkan tindak lanjut adalah masih ada rumusan tujuan dan sasaran dalam dokumen rencana strategis perangkat daerah yang belum berorientasi hasil dan belum menjawab isu strategis sesuai tugas dan fungsi perangkat daerah tersebut. Sehingga pengembangan kompetensi ini akan memberikan dampak tidak hanya pada peningkatan profesionalitas ASN namun juga perbaikan manajemen kinerja.

Optimalisasi pemanfaatan teknologi dalam penyelenggaraan pemerintahan dapat dilihat dari Indeks SPBE, yang selaras dengan *Major Project Transformasi Digital*. Hasil evaluasi SPBE 2023 menunjukkan manajemen SPBE sebagai domain dengan capaian paling rendah, maka kebijakan pada tahun 2025 diarahkan untuk:

- a. Perbaikan kompetensi sumber daya manusia,
- b. Peningkatan kualitas pelayanan informasi publik,
- c. Peningkatan kapasitas sistem jaringan intra pemerintah daerah
- d. Peningkatan layanan berbagi pakai data dan pemanfaatan sertifikat elektronik
- e. Integrasi layanan publik

Pengadaan barang secara elektronik, melalui Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ), juga menjadi salah satu elemen penting dalam pelaksanaan reformasi birokrasi. Peningkatan tingkat kematangan Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa di tahun 2025 diarahkan untuk peningkatan penggunaan *e-procurement* dan peningkatan pemahaman dan kompetensi dalam pengadaan barang dan jasa, dengan target persentase penggunaan *e-procurement* mencapai 50%.

Berdasarkan penjelasan diatas, ringkasan strategi intervensi terhadap isu strategis tersebut dapat dilihat pada tabel 4.6 berikut ini:

Tabel 4.7 Keterkaitan Isu Strategis, Prioritas Pembangunan dan Strategi sesuai Arah Kebijakan Kota Magelang Tahun 2026

No	Isu Strategis	Prioritas Pembangunan	Strategi	Perangkat Daerah
1	Kemiskinan	<ul style="list-style-type: none">• Pemantapan layanan publik prima• Penguatan perwujudan ruang kota layak huni• Pemantapan daya saing daerah• Pemantapan perlindungan sosial dalam penanganan fakir miskin• Pemantapan kesejahteraan masyarakat	<ul style="list-style-type: none">• Perbaikan data dan ketetapan sasaran program• Peningkatan kualitas layanan pendidikan dan literasi untuk masyarakat berdaya saing• Pemenuhan upaya Kesehatan perorangan dan masyarakat• Peningkatan kompetensi angkatan kerja• Penguatan kapasitas dan kualitas produksi serta distribusi produk UMKM	<ul style="list-style-type: none">• Dinas Sosial• Dinas Pendidikan dan Kebudayaan• Dinas Kesehatan• DPPKUM• Dinas Tenaga Kerja• Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata• DPMPTSP

No	Isu Strategis	Prioritas Pembangunan	Strategi	Perangkat Daerah
			<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan akses modal UMKM • Perluasan pasar perdagangan • Promosi pariwisata • Peningkatan nilai investasi yang masuk ke Kota Magelang • Peningkatan transparansi, kemudahan dan kecepatan pelayanan perijinan • Peningkatan akses rumah layak huni • Peningkatan akses sanitasi aman • Peningkatan akses air bersih 	<ul style="list-style-type: none"> • Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik • Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman • Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang • Bapperida
2	Kualitas SDM	<ul style="list-style-type: none"> • Pemantapan kesejahteraan masyarakat • Pemantapan Daya saing daerah 	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan kualitas layanan pendidikan dan literasi untuk masyarakat berdaya saing • Peningkatan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan • Pemenuhan WAJAR 13 tahun dan perluasan dan mutu pendidikan • Peningkatan literasi masyarakat • Pembinaan pemuda • Pembinaan olahraga • Pemenuhan upaya Kesehatan perorangan dan masyarakat • Peningkatan kapasitas SDM kesehatan • Perluasan akses pelayanan kesehatan • Peningkatan pemahaman terkait kesehatan reproduksi untuk pengendalian penduduk • Pemasyarakatan olahraga • Pengarustamaan gender • Pemberdayaan perempuan • Perlindungan perempuan dan anak • Peningkatan kualitas keluarga • Penguatan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas) • Peningkatan penyediaan dan penyerapan tenaga kerja • Peningkatan program perlindungan sosial (baik tenaga kerja formal dan informal) • Peningkatan kualitas tenaga kerja dan lapangan kerja • Peningkatan pembinaan sejarah dan pelestarian cagar budaya • Pengembangan kesenian daerah 	<ul style="list-style-type: none"> • Dinas Pendidikan dan Kebudayaan • Dinas Perpustakaan dan Arsip • Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata • Badan Kesbangpol • Dinas Kesehatan • DPMP4KB • Bapperida
3	Sarana prasarana perkotaan yang berkelanjutan	<ul style="list-style-type: none"> • Penguatan perwujudan ruang kota layak huni 	<ul style="list-style-type: none"> • Pembangunan dan perbaikan infrastruktur kota • Penyediaan dokumen rencana rinci penataan ruang • Perluasan media informasi dan komunikasi penataan ruang • Penyediaan sarana perkotaan yang inklusif • Penyediaan angkutan umum terintegrasi • Peningkatan akses rumah layak huni • Peningkatan akses sanitasi aman • Peningkatan akses air bersih 	<ul style="list-style-type: none"> • Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang • Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman • Dinas Perhubungan • Bapperida

No	Isu Strategis	Prioritas Pembangunan	Strategi	Perangkat Daerah
			<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan jaringan drainase 	
4	Kualitas lingkungan hidup	<ul style="list-style-type: none"> • Penguatan ketahanan daerah dan sosial budaya masyarakat • Penguatan perwujudan ruang kota layak huni • Pemantapan daya saing daerah • Pemantapan peran masyarakat sebagai mitra 	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan pencegahan pencemaran lingkungan • Rehabilitasi lingkungan • Penataan dan penambahan RTH publik • Peningkatan pemberdayaan masyarakat 	<ul style="list-style-type: none"> • Dinas Lingkungan Hidup • DPMP4KB • Bapperida • Kecamatan
5	Ketahanan daerah (ketahanan terhadap pangan dan bencana)	<ul style="list-style-type: none"> • Penguatan ketahanan daerah dan sosial budaya masyarakat • Pemantapan peran masyarakat sebagai mitra 	<ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan sistem informasi mitigasi bencana • Peningkatan pemberdayaan masyarakat • Urban farming • Pemenuhan cadangan pangan 	<ul style="list-style-type: none"> • BPBD • Satpol PP • Dinas Pendidikan dan Kebudayaan • Dinas Kesehatan • Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang • Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman • Dinas Sosial • Dinas Pertanian dan Pangan • Bapperida
6	Daya saing ekonomi	<ul style="list-style-type: none"> • Penguatan ketahanan daerah dan sosial budaya masyarakat • Pemantapan layanan publik prima • Pemantapan daya saing daerah • Pemantapan kesejahteraan masyarakat • Penguatan perwujudan ruang kota layak huni • Pemantapan peran masyarakat sebagai mitra • Percepatan peningkatan kontribusi sektor unggulan dalam perekonomian daerah 	<ul style="list-style-type: none"> • Perbaikan data dan ketetapan sasaran program • Peningkatan kompetensi Angkatan Kerja • Penguatan kapasitas dan kualitas produksi serta distribusi produk UMKM • Peningkatan akses modal UMKM • Perluasan pasar perdagangan • Promosi pariwisata • Peningkatan nilai investasi yang masuk ke Kota Magelang • Peningkatan transparansi, kemudahan dan kecepatan pelayanan perijinan • Pembangunan dan perbaikan infrastruktur kota • Penyediaan dokumen rencana rinci penataan ruang • Perluasan media informasi dan komunikasi penataan ruang • Penyediaan sarana perkotaan yang inklusif • Penyediaan angkutan umum terintegrasi • Peningkatan akses rumah layak huni • Peningkatan akses sanitasi aman • Peningkatan akses air bersih 	<ul style="list-style-type: none"> • Dinas Tenaga Kerja • DPPKUM • Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata • DPMPTSP • Satpol PP • Badan Kesbangpol • Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang • Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman • Dinas Perhubungan • Bapperida • DLH
7	Reformasi birokrasi	<ul style="list-style-type: none"> • Pemantapan peran masyarakat sebagai mitra • Pemantapan layanan publik prima • Pemantapan daya saing daerah • Pemantapan kesejahteraan masyarakat 	<ul style="list-style-type: none"> • Integrasi sistem pelayanan berbasis IT • Pelayanan publik • Peningkatan kualitas pengawasan • Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah • Optimalisasi PAD • Peningkatan kualitas perencanaan • Peningkatan kualitas inovasi daerah • Penerapan sistem merit 	<ul style="list-style-type: none"> • Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik • BPKAD • Bapperida • BKPSDM • Sekretariat Daerah • Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

No	Isu Strategis	Prioritas Pembangunan	Strategi	Perangkat Daerah
			<ul style="list-style-type: none"> Optimalisasi sistem OSS 	<ul style="list-style-type: none"> Dinas Perpustakaan dan Arsip Kecamatan

Sumber: Tim Penyusun, 2025

4.2.2.3 Keselarasan dan Keterkaitan dengan Prioritas Nasional dan Provinsi Jawa Tengah

Prioritas dan arah pembangunan Kota Magelang tahun 2025 sebagaimana tersebut di atas merupakan upaya untuk mencapai target sasaran indikator makro pembangunan. Target pembangunan Kota Magelang juga selaras dan terkait dengan target nasional dan provinsi seperti termuat pada Tabel 4.6 berikut.

Tabel 4.8 Keselarasan Sasaran Makro RKPD Kota Magelang dengan RKP 2026 dan RKPD Provinsi Jawa Tengah 2026

Sasaran	RKP 2026	RKPD Provinsi Jateng 2026	RKPD Kota Magelang 2026
Pertumbuhan ekonomi	6,3%	5,00-5,80%	5,70%
Angka Kemiskinan	7-8%	6,5-7,5 %	5,94%
Indeks Pembangunan Manusia	0,57 IMM	NA	83,34
Tingkat Pengangguran Terbuka	NA	4,47-4,37%	4,40

Sumber: Tim Penyusun, 2025

Dalam RKP 2025 terdapat 8 (delapan) Prioritas Nasional (PN) yaitu (1) Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi dan Hak Asasi Manusia; (2) Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau dan Ekonomi Biru; (3) Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi; (4) Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas; (5) Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri; (6) Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi dan Pembebasan Kemiskinan; (7) Memperkuat Reformasi Politik, Hukum dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pembeantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan; dan (8) Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur.

Adapun keselarasan sasaran dan indikator sasaran pembangunan daerah Kota Magelang sebagaimana tertuang dalam RKPD Tahun 2026 dengan sasaran Prioritas Nasional dalam RKP Tahun 2026 dapat disampaikan sebagai berikut:

Tabel 4.9 Keselarasan Sasaran dan Indikator Sasaran RPJMD pada RKPD Kota Magelang Tahun 2025 dengan RKP Tahun 2025

No	Sasaran Utama RKP	Sasaran RPJMD-RKPD Kota Magelang	Indikator Sasaran RPJMD-RKPD Kota Magelang
PN 1	Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi dan Hak Asasi Manusia (HAM)		
	- Terwujudnya kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang berlandaskan Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia	Meningkatnya Penguatan toleransi	Nilai penguatan toleransi
		Meningkatnya stabilitas daerah	Nilai stabilitas daerah
		Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum	Nilai penguatan ketenteraman dan ketertiban umum
PN 2	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau dan Ekonomi Biru		
		Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum	Nilai penguatan ketenteraman dan ketertiban umum

No	Sasaran Utama RKP	Sasaran RPJMD-RKPD Kota Magelang	Indikator Sasaran RPJMD-RKPD Kota Magelang
	<ul style="list-style-type: none"> - Terjaganya kedaulatan negara dan penguatan stabilitas keamanan nasional sebagai fondasi pelaksanaan pembangunan - Meningkatnya kemandirian bangsa dalam memenuhi kebutuhan pangan, energi dan air secara berkelanjutan - Terwujudnya perekonomian nasional yang progresif, inklusif dan berkelanjutan 	Meningkatnya stabilitas daerah	Nilai stabilitas daerah
		Meningkatnya kontribusi sektor ekonomi unggulan	Persentase kontribusi PDRB sektor industri pengolahan dan perdagangan
		Meningkatnya Pertumbuhan Investasi	Persentase pertumbuhan investasi
		Meningkatnya angka kunjungan wisatawan	Persentase peningkatan kunjungan wisatawan
		Meningkatnya pertumbuhan industri kreatif dan usaha mikro	Persentase pertumbuhan UMKM
		<i>Meningkatnya daya beli masyarakat</i>	Pengeluaran per kapita yang disesuaikan
PN 3	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industridi Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi		
	<ul style="list-style-type: none"> - Melanjutkan pengembangan infrastruktur - Meningkatnya Total Aset Sektor Keuangan terhadap PDB - Meningkatnya lapangan kerja yang berkualitas - Meningkatnya nilai tambah pariwisata - Meningkatnya Proporsi PDB Ekonomi kreatif 	Meningkatnya penyerapan tenaga kerja daerah	Tingkat pengangguran terbuka
		Meningkatnya kualitas infrastruktur kota	Indeks infrastruktur wilayah
		Meningkatnya kesesuaian pemanfaatan ruang	Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang
		Meningkatnya aksesibilitas perkotaan	Indeks aksesibilitas perkotaan
		Meningkatnya kualitas lingkungan permukiman	Persentase luas kawasan kumuh
		Terwujudnya lingkungan hidup yang berkualitas dan berkelanjutan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Persentase Ruang Terbuka Publik Hijau
		Meningkatnya kontribusi sektor ekonomi unggulan	Persentase kontribusi PDRB sektor industri pengolahan dan perdagangan
		Meningkatnya Pertumbuhan Investasi	Persentase pertumbuhan investasi
		Meningkatnya angka kunjungan wisatawan	Persentase peningkatan kunjungan wisatawan
		Meningkatnya pertumbuhan industri kreatif dan usaha mikro	Persentase pertumbuhan UMKM
PN 4	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan Penyandang Disabilitas		
	<ul style="list-style-type: none"> - Pendidikan berkualitas yang merata - Kesehatan untuk semua - Keluarga berkualitas, keteraan gender dan masyarakat inklusif - Iptek, inovasi dan produktivitas ekonomi 	Meningkatnya kualitas pendidikan dan literasi untuk masyarakat berdaya saing	Indeks Pendidikan Indeks pembangunan literasi masyarakat
		Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat	Indeks Kesehatan
		Meningkatnya kesetaraan gender, perlindungan terhadap anak dan perempuan	Indeks pembangunan gender
		Meningkatnya partisipasi masyarakat	Nilai partisipasi masyarakat
		Meningkatnya kontribusi sektor ekonomi unggulan	Persentase kontribusi PDRB sektor industri pengolahan dan perdagangan
		Meningkatnya Pertumbuhan Investasi	Persentase pertumbuhan investasi

No	Sasaran Utama RKP	Sasaran RPJMD-RKPD Kota Magelang	Indikator Sasaran RPJMD-RKPD Kota Magelang
		Meningkatnya angka kunjungan wisatawan	Persentase peningkatan kunjungan wisatawan
		Meningkatnya pertumbuhan industri kreatif dan usaha mikro	Persentase pertumbuhan UMKM
PN 5	Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri		
	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan nilai tambah, produktivitas dan daya saing industri pengolahan - Integrasi ekonomi domestik dan global 	Meningkatnya kontribusi sektor ekonomi unggulan	Persentase kontribusi PDRB sektor industri pengolahan dan perdagangan
		Meningkatnya Pertumbuhan Investasi	Persentase pertumbuhan investasi
		Meningkatnya pertumbuhan industri kreatif dan usaha mikro	Persentase pertumbuhan UMKM
PN 6	Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi dan Pembebasan Kemiskinan		
	<ul style="list-style-type: none"> - Perlindungan sosial yang adaptif - Meningkatkan akses hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan - Perkotaan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi 	Meningkatnya kesejahteraan pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial	Persentase PPKS
		Meningkatnya partisipasi masyarakat	Nilai partisipasi masyarakat
		Meningkatnya penyerapan tenaga kerja daerah	Tingkat pengangguran terbuka
		Meningkatnya kualitas infrastruktur kota	Indeks infrastruktur wilayah kota
		Meningkatnya kesesuaian pemanfaatan ruang	Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang
		Meningkatnya aksesibilitas perkotaan	Indeks aksesibilitas perkotaan
		Meningkatnya kualitas lingkungan permukiman	Persentase luas kawasan kumuh
		Terwujudnya lingkungan hidup yang berkualitas dan berkelanjutan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Persentase Ruang Terbuka Publik Hijau
PN 7	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pembeantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan		
	<ul style="list-style-type: none"> - Terwujudnya supremasi hukum yang transparan, adil dan tidak memihak melalui tersusunnya fondasi kelembagaan hukum dan sistem antikorupsi - Terwujudnya birokrasi pemerintahan yang adaptif dan melayani - Terwujudnya masyarakat yang bebas dari penyalahgunaan narkoba - Menekan potensi kerugian ekonomi, sosial dan lingkungan akibat tindakan judi dan penyelundupan - Terwujudnya tata kelola BUMN yang baik untuk meningkatkan kontribusi BUMN sebagai agen pembangunan - Tercapainya peningkatan pendapatan negara yang optimal sesuai potensi perekonomian dengan tetap menjaga iklim investasi - Tercapainya tingkat inflasi yang rendah dan stabil untuk mendukung stabilitas serta pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan 	Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum	Nilai penguatan ketenteraman dan ketertiban umum
		Meningkatnya stabilitas daerah	Nilai stabilitas daerah
		Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks kepuasan masyarakat
		Menciptakan birokrasi yang kapabel	Tingkat kematangan organisasi Indeks sistem merit Indeks SPBE
		Menciptakan birokrasi yang bersih dan akuntabel	Maturitas SPIP Nilai SAKIP Indeks pengelolaan keuangan daerah
		Meningkatnya Pertumbuhan Investasi	Persentase pertumbuhan investasi
PN 8	Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur		
	<ul style="list-style-type: none"> - Beragama maslahat dan berkebudayaan maju - Resiliensi terhadap bencana dan perubahan iklim 	Meningkatnya Penguatan Toleransi	Nilai penguatan toleransi
		Meningkatnya penguatan kebudayaan	Nilai pemajuan kebudayaan

No	Sasaran Utama RKP	Sasaran RPJMD-RKPD Kota Magelang	Indikator Sasaran RPJMD-RKPD Kota Magelang
		Meningkatnya partisipasi masyarakat	Nilai partisipasi masyarakat
		Meningkatnya kualitas pendidikan dan literasi untuk masyarakat berdaya saing;	Indeks Pendidikan Indeks pembangunan literasi masyarakat
		Terwujudnya lingkungan hidup yang berkualitas dan berkelanjutan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Persentase Ruang Terbuka Publik Hijau

Sumber: Analisis Tim Penyusun, 2024

Berdasarkan tabel 4.8 Keterkaitan Sasaran dan Indikator Sasaran pada RKPD Kota Magelang Tahun 2026 dengan RKP Tahun 2026 terdapat 28 (dua puluh delapan) sasaran pada delapan prioritas nasional dalam RKP 2026, bahwa secara keseluruhan 25 (dua puluh lima) sasaran daerah Kota Magelang sebagaimana tercantum dalam RPJMD Kota Magelang Tahun 2021-2026 telah mendukung dan selaras dengan sasaran PN RKP Tahun 2025, sehingga jika dipersentase maka tingkat keterkaitannya sebesar 100%.

Adapun persandingan sinergitas antara prioritas pembangunan Nasional, prioritas Provinsi Jawa Tengah dan prioritas Kota Magelang disajikan dalam Tabel 4.8 berikut ini.

Tabel 4.10 Keselarasan dan Keterkaitan Prioritas Pembangunan Kota Magelang Tahun 2025 dengan Prioritas Pembangunan Provinsi Jawa Tengah dan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2025

No	Prioritas Nasional Tahun 2026 (RKP 2026)	Prioritas Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026 (RKPD Provinsi 2026)	Prioritas Kota Magelang Tahun 2026
1	PN 1: Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi dan Hak Asasi Manusia (HAM)	Prioritas Provinsi ke 4: Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang adaptif dan kolaboratif	<ul style="list-style-type: none"> Perwujudan kesejahteraan masyarakat
2	PN 2: Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau dan Ekonomi Biru	Prioritas Provinsi ke 1: Penguatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas Prioritas Provinsi ke 3: Penguatan ketahanan sumber daya alam dan lingkungan hidup Prioritas Provinsi ke 4: Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang adaptif dan kolaboratif	<ul style="list-style-type: none"> Perwujudan kesejahteraan masyarakat Perwujudan keberdayaan masyarakat Perwujudan ruang kota layak huni
3	PN 3: Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Prioritas Provinsi ke 1: Penguatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas	<ul style="list-style-type: none"> Perwujudan kesejahteraan masyarakat Perwujudan keberdayaan masyarakat Perwujudan ruang kota layak huni
4	PN 4: Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi	Prioritas Provinsi ke 2: Penguatan kualitas Sumber Daya Manusia yang lebih pintar, sehat,	<ul style="list-style-type: none"> Perwujudan kesejahteraan masyarakat

No	Prioritas Nasional Tahun 2026 (RKP 2026)	Prioritas Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026 (RKPD Provinsi 2026)	Prioritas Kota Magelang Tahun 2026
	Olahraga, Kesenjangan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (generasi milenial dan generasi z), dan Penyandang Disabilitas	bugar, berkarakter dan adaptif secara inklusif dan merata	<ul style="list-style-type: none"> Perwujudan keberdayaan masyarakat
5	PN 5: Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	Prioritas Provinsi ke 1: Penguatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas	<ul style="list-style-type: none"> Perwujudan kesejahteraan masyarakat Perwujudan keberdayaan masyarakat
6	PN 6: Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi dan Pembebasan Kemiskinan	Prioritas Provinsi ke 1: Penguatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas	<ul style="list-style-type: none"> Perwujudan kesejahteraan masyarakat Perwujudan keberdayaan masyarakat Perwujudan ruang kota layak huni
7	PN 7: Memperkuat Reformasi Politik, Hukum dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pembeantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	Prioritas Provinsi ke 4: Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang adaptif dan kolaboratif	<ul style="list-style-type: none"> Perwujudan kesejahteraan masyarakat
8	PN 8: Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur	Prioritas Provinsi ke 2: Penguatan kualitas Sumber Daya Manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter dan adaptif secara inklusif dan merata Prioritas Provinsi ke 4: Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang adaptif dan kolaboratif	<ul style="list-style-type: none"> Perwujudan kesejahteraan masyarakat Perwujudan keberdayaan masyarakat Perwujudan ruang kota layak huni

Sumber: Analisis Tim Penyusun, 2025

Berdasarkan tabel 4.8 dapat disimpulkan bahwa prioritas pembangunan daerah Kota Magelang Tahun 2026 yang berjumlah 3 fokus prioritas selaras dengan 8 prioritas nasional dan 4 prioritas provinsi, dengan tingkat keselarasan prioritas pembangunan dapat dikatakan 100%. Pada dasarnya, program kegiatan yang disusun pada level kota mengacu pada program yang disusun pada level nasional dan provinsi. Adapun program kegiatan secara detail dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4.9 Dukungan Program dan Kegiatan Daerah terhadap Prioritas Nasional dan Prioritas Daerah

Prioritas RKP 2026 (PN)	Prioritas RKPD Kota Magelang 2026	Program	Kegiatan
PN 1: Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi dan Hak Asasi Manusia	Perwujudan kesejahteraan masyarakat	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum (KMS)
			Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum (KMU)
			Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum (KMT)

Prioritas RKP 2026 (PN)	Prioritas RKPD Kota Magelang 2026	Program	Kegiatan
		Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial
		Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan
		Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik
		Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan
		Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya
PN 2: Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau dan Ekonomi Biru	<ul style="list-style-type: none"> • Perwujudan kesejahteraan masyarakat • Perwujudan keberdayaan masyarakat • Perwujudan ruang kota layak huni 	Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya
		Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil
			Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota
		Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian
			Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota
			Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota
		Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Pengembangan Prasarana Pertanian
			Pembangunan Prasarana Pertanian
		Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota
		Program Perizinan Usaha Pertanian	Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota
		Program Penyuluhan Pertanian	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian
		Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan
			Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya
		Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota

Prioritas RKP 2026 (PN)	Prioritas RKPD Kota Magelang 2026	Program	Kegiatan
		Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan
			Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota
			Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi
		Program Penanganan Kerawanan Pangan	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota
		Program Pengawasan Keamanan Pangan	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota
		Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota
			Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota
		Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
		Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
		Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
		Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota
		Program Pengelolaan Persampahan	Pengelolaan Sampah
			Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Sampah yang Diselenggarakan oleh Pihak Swasta
		Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
		Program Peningkatan Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
		Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan (KMS)
			Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan (KMU)
			Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan (KMT)
		Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia
			Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)
			Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan
		Program Perekonomian Dan Pembangunan	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian
			Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam

Prioritas RKP 2026 (PN)	Prioritas RKPD Kota Magelang 2026	Program	Kegiatan
PN 3: Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	<ul style="list-style-type: none"> • Perwujudan kesejahteraan masyarakat • Perwujudan keberdayaan masyarakat • Perwujudan ruang kota layak huni 	Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota
		Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan
		Program Pengembangan UMKM	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil
		Program perencanaan tenaga kerja	Jumlah rencana tenaga kerja
		Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi
			Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta
		Program Penempatan Tenaga Kerja	Pelayanan Antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota
			Pengelolaan Informasi Pasar Kerja
		Program Hubungan Industrial	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota
		Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Di Bidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
			Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota
		Program Promosi Penanaman Modal	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
		Program Pelayanan Penanaman Modal	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu bidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota
		Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
		Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
		Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Pemberdayaan Pembudidaya Ikan Kecil
			Pengelolaan Pembudidayaan Ikan
		Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil
			Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota
		Program Pemasaran Pariwisata	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota
		Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar
			Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian

Prioritas RKP 2026 (PN)	Prioritas RKPD Kota Magelang 2026	Program	Kegiatan
		Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota
			Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota
		Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Pengembangan Prasarana Pertanian
			Pembangunan Prasarana Pertanian
		Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota
			Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota
			Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota
			Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner
			Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesejahteraan Hewan
		Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota
		Program Perizinan Usaha Pertanian	Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota
		Program Penyuluhan Pertanian	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian
		Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan
			Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya
		Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota
		Program Pengembangan Ekspor	Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
		Program Standarisasi Dan Perlindungan Konsumen	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan
		Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota
		Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IUPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota
		Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota
			Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota
			Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota
		Program Penatagunaan Tanah	Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota

Prioritas RKP 2026 (PN)	Prioritas RKPD Kota Magelang 2026	Program	Kegiatan
		Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota
			Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
			Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C
			Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir
			Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
			Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota
			Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota
			Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan
			Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
			Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
			Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
PN 4: Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesenjangan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas	<ul style="list-style-type: none"> • Perwujudan kesejahteraan masyarakat • Perwujudan keberdayaan masyarakat 	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan (KMS)
			Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan (KMU)
			Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan (KMT)
		Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (KMS)
			Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (KMU)
			Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (KMT)
		Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan
		Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota. Wirausaha Muda Pemula. dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota
			Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
		Program Pembinaan Perpustakaan	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
			Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
		Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga
			Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga

Prioritas RKP 2026 (PN)	Prioritas RKPD Kota Magelang 2026	Program	Kegiatan
		Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota
			Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah. Nonpemerintah. dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota
		Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota
		Program Pemberdayaan Sosial	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota
		Program Rehabilitasi Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar. Anak Terlantar. Lanjut Usia Terlantar. serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial
			Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial
		Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar
			Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
		Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota
			Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik. Hukum. Sosial. dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota
			Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota
		Program Perlindungan Perempuan	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
		Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
		Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Advokasi. Pemberdayaan. Kemitraan. Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
			Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
			Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
		Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
			Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
			Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi
			Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

Prioritas RKP 2026 (PN)	Prioritas RKPD Kota Magelang 2026	Program	Kegiatan
		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota
			Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota
			Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
		Program Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar
			Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama
			Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
			Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan
		Program Pengembangan Kurikulum	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar
			Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal
PN 5: Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	<ul style="list-style-type: none"> • Perwujudan kesejahteraan masyarakat • Perwujudan keberdayaan masyarakat 	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan
		Program Pengembangan UMKM	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil
		Program perencanaan tenaga kerja	Jumlah rencana tenaga kerja
		Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi
			Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta
		Program Penempatan Tenaga Kerja	Pelayanan Antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota
			Pengelolaan Informasi Pasar Kerja
		Program Hubungan Industrial	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota
		Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Di Bidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
			Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota
		Program Promosi Penanaman Modal	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
		Program Pelayanan Penanaman Modal	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu bidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
		Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
		Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

Prioritas RKP 2026 (PN)	Prioritas RKPD Kota Magelang 2026	Program	Kegiatan
		Program Pemasaran Pariwisata	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota
		Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar
		Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan
			Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya
		Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota
		Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IUPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota
PN 6: Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi dan Pembebasan Kemiskinan	<ul style="list-style-type: none"> • Perwujudan kesejahteraan masyarakat • Perwujudan keberdayaan masyarakat • Perwujudan ruang kota layak huni 	Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar
			Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
		Program Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar
			Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama
			Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
			Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan
		Program Pengembangan Kurikulum	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar
			Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal
		Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
			Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
			Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi
		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota
			Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota
			Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
		Program Pemberdayaan Sosial	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota
		Program Rehabilitasi Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar. Anak Terlantar. Lanjut Usia Terlantar. serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial
			Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial

Prioritas RKP 2026 (PN)	Prioritas RKPD Kota Magelang 2026	Program	Kegiatan
		Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga
			Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga
		Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (KMS)
			Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (KMU)
			Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (KMT)
			Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan (KMS)
			Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan (KMU)
			Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan (KMT)
			Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat (KMU)
			Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat (KMS)
			Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat (KMT)
		Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan (KMS)
			Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan (KMU)
			Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan (KMT)
PN 7: Memperkuat Reformasi Politik, Hukum dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pembeantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	Perwujudan kesejahteraan masyarakat	Program Peningkatan Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
			Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota
			Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota
		Program Informasi Dan Komunikasi Publik	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
		Program Aplikasi Informatika	Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
			Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
		Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
		Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah
			Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah

Prioritas RKP 2026 (PN)	Prioritas RKPD Kota Magelang 2026	Program	Kegiatan
			Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah
			Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah
		Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Pengelolaan Barang Milik Daerah
		Program Penyelenggaraan Pengawasan	Penyelenggaraan Pengawasan Internal
			Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu
		Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan
			Pendampingan dan Asistensi
		Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum (KMS)
			Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum (KMU)
			Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum (KMT)
PN 8: Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur	<ul style="list-style-type: none"> • Perwujudan kesejahteraan masyarakat • Perwujudan keberdayaan masyarakat • Perwujudan ruang kota layak huni 	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum (KMS)
			Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum (KMU)
			Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum (KMT)
		Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota
		Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)	Penyimpanan Sementara Limbah B3
		Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
		Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
		Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
		Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota
		Program Pengelolaan Persampahan	Pengelolaan sampah
			Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Sampah yang Diselenggarakan oleh Pihak Swasta
		Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

Prioritas RKP 2026 (PN)	Prioritas RKPD Kota Magelang 2026	Program	Kegiatan
		Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota
			Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota
		Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya
		Program Pengembangan Kebudayaan	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota
			Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota
		Program Pengembangan Kesenian Tradisional	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota
		Program Pembinaan Sejarah	Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
		Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya	Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota
		Program Pengelolaan Permuseuman	Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota
		Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota

Sumber: Analisis Tim Penyusun, 2025

Prioritas RKPD dicapai melalui instrumen program prioritas. Program prioritas RKPD Kota Magelang tahun 2026 dikelompokkan mengikuti kluster isu strategis. Deskripsi program prioritas RKPD Kota Magelang tahun 2026 disajikan dalam tabel 4.10 Keterkaitan Sasaran Prioritas Pembangunan Daerah, Prioritas Pembangunan dan Program Prioritas pada RKPD Kota Magelang Tahun 2026 berikut ini.

Tabel 4.11 Keterkaitan Sasaran Prioritas Pembangunan Daerah, Prioritas Pembangunan dan Program Prioritas pada RKPD Kota Magelang Tahun 2026

Sasaran	Indikator Sasaran	Target Tahun 2026	Prioritas RKPD 2026	Program Prioritas	Indikator Kinerja Program	Perangkat Daerah
Meningkatnya kesejahteraan pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial	Persentase PMKS	4,49*)	Perwujudan kesejahteraan masyarakat	Program Rehabilitasi Sosial	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang mendapatkan rehabilitasi	Dinas Sosial
Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat	Indeks Kesehatan	0,885*)	Perwujudan kesejahteraan masyarakat	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase Pemenuhan Fasilitas Kesehatan Sesuai Standar Indeks Keluarga Sehat	Dinas Kesehatan
Meningkatnya kualitas pendidikan dan literasi untuk masyarakat berdaya saing	Indeks Pendidikan	0,791	Perwujudan kesejahteraan masyarakat	Program Pengelolaan Pendidikan	APK PAUD APM SD/ MI APK SD/ MI Angka Putus Sekolah SD/MI APM SMP/MTs APK SMP/MTs Angka Putus Sekolah SMP/MTs Persentase Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Terakreditasi Persentase SD Terakreditasi Persentase SMP Terakreditasi Persentase Satuan Pendidikan Kesetaraan Terakreditasi	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Meningkatnya kualitas pendidikan dan literasi untuk masyarakat berdaya saing	Indeks Pendidikan	0,791	Perwujudan kesejahteraan masyarakat	Program Pembinaan Perpustakaan	Presentase peningkatan kunjungan masyarakat ke perpustakaan Rasio ketercukupan koleksi perpustakaan Persentase Perpustakaan ber-SNP	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat	Indeks Kesehatan	0,885*)	Perwujudan kesejahteraan masyarakat	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase Pemenuhan Fasilitas Kesehatan Sesuai Standar Indeks Keluarga Sehat	Dinas Kesehatan
Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	92,58*)	Perwujudan kesejahteraan masyarakat	Program Pendaftaran Penduduk	Presentase penduduk usia wajib KTP yang sudah melakukan Perekaman KTP-el Presentase kepemilikan KK	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Sasaran	Indikator Sasaran	Target Tahun 2026	Prioritas RKPD 2026	Program Prioritas	Indikator Kinerja Program	Perangkat Daerah
					Presentase kepemilikan KIA	
				Program Pencatatan Sipil	Persentase pasangan yang memiliki Akta Perkawinan	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
					Persentase penduduk 0-18 tahun yang memiliki Akta kelahiran	
					Persentase penerbitan Akta kematian	
					Persentase penerbitan Akta Perceraian	
Meningkatnya kualitas infrastruktur kota	Indeks Infrastruktur wilayah	92,36	Perwujudan ruang kota layak huni Perwujudan kesejahteraan masyarakat	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Persentase panjang jaringan irigasi yang kondisi baik	DPUPR
				Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap pelayanan sumber air minum layak* Proporsi populasi yang memiliki akses layanan sumber air minum, aman, dan berkelanjutan	DPUPR
				Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	Persentase Pembangunan TPST/3R	DPUPR
				Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Persentase jumlah rumah tangga yang memiliki akses terhadap pelayanan sanitasi layak*	DPUPR
				Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	Persentase Drainase Dalam Kondisi Baik	DPUPR
				Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya	Persentase kawasan strategis yang ditata	DPUPR
				Program Penataan Bangunan Gedung	Persentase bangunan yang memiliki PBG Persentase Progres Pembangunan Gedung Balai Kota	DPUPR
				Program Penyelenggaraan Jalan	Persentase Panjang jalan dalam kondisi mantab	DPUPR
				Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Persentase proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi	DPUPR
				Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Presentase perwujudan kesesuaian pemanfaatan ruang	DPUPR
				Program Pengendalian Pencemaran dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Persentase ketersediaan data pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan	DLH

Sasaran	Indikator Sasaran	Target Tahun 2026	Prioritas RKPD 2026	Program Prioritas	Indikator Kinerja Program	Perangkat Daerah
Terwujudnya lingkungan hidup yang berkualitas dan berkelanjutan	Persentase Ruang Terbuka Hijau Publik	18	Perwujudan ruang kota layak huni	Program Pengelolaan Keaneekaragaman Hayati (Kehati)	Proporsi RTH publik untuk pengelolaan keaneekaragaman hayati	DLH
Meningkatnya kualitas infrastruktur kota	Indeks Infrastruktur Wilayah	92,36	Perwujudan ruang kota layak huni Perwujudan kesejahteraan masyarakat	Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	Persentase usaha dan atau kegiatan yang mempunyai rincian teknis penyimpanan sementara LB3	DLH
				Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Persentase ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan	DLH
				Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Persentase peningkatan lembaga masyarakat dan lembaga pendidikan yang mengikuti pendidikan pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup	DLH
				Program Pengelolaan Persampahan	Peningkatan presentase sampah yang terkelola	DLH
				Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Kinerja Lalu Lintas Kota (Vc Ratio) Pengguna moda transportasi umum di perkotaan (PPTUK)*	Dinas Perhubungan
Meningkatnya ketenteraman dan ketertiban umum	Nilai Penguatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	97,86	Perwujudan kesejahteraan masyarakat	Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase penyelesaian pelanggaran perda	Satpol PP
				Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persentase Pembinaan Wawasan Kebangsaan	Kesbangpol
Meningkatnya stabilitas daerah	Nilai stabilitas daerah	97,15*)	Perwujudan kesejahteraan masyarakat	Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Presentase organisasi kemasyarakatan yang diberdayakan Presentase Organisasi Kemasyarakatan yang Aktif	Kesbangpol
				Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	Persentase Pembinaan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	Kesbangpol
				Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Jumlah konflik sosial	Kesbangpol
Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	92,58*)	Perwujudan kesejahteraan masyarakat	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Persentase pemanfaatan aplikasi informatika	Dinkominsta
				Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Persentase Pemanfaatan Hasil Penelitian dan Pengembangan Persentase pemanfaatan hasil inovasi	Bapperida

Sasaran	Indikator Sasaran	Target Tahun 2026	Prioritas RKPD 2026	Program Prioritas	Indikator Kinerja Program	Perangkat Daerah
Menciptakan birokrasi yang bersih dan akuntabel	Nilai SAKIP	A	Perwujudan kesejahteraan masyarakat	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Cakupan Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Yang Berkualitas	Bapperida
				Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Presentase peningkatan pendapatan asli daerah	BPKAD
				Program Pengelolaan BMD	Cakupan Pengelolaan Barang Milik Daerah	BPKAD
				Program Penyelenggaraan Pengawasan	Persentase penyelenggaraan pengawasan	Inspektorat
				Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Presentase entitas yang telah mendapatkan pendampingan dan asistensi	Inspektorat
				Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Persentase Perkembangan Publikasi Data Sektoral Dalam Portal Open Data	Dinkominsta
				Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Nilai Tata Kelola Keamanan Informasi Nilai Pengelolaan Risiko Keamanan Informasi Nilai Kerangka Kerja Keamanan Informasi Nilai Pengelolaan Aset Informasi Nilai Teknologi dan Keamanan Informasi	Dinkominsta
Meningkatnya pertumbuhan investasi	Persentase pertumbuhan investasi	16,05*)	Perwujudan kesejahteraan masyarakat	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Persentase Investor PMA/PMDN	DPMPTSP
				Program Promosi Penanaman Modal	Persentase Lol Yang Ditindaklanjuti	DPMPTSP
				Program Pelayanan Penanaman Modal	Prosentase Penerbitan Perizinan dan Non Perizinan Yang Sesuai Dengan SOP	DPMPTSP
				Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Prosentase Pertumbuhan Pemanfaatan Data, Informasi dan Sistem Informasi PM	DPMPTSP
				Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Persentase Pelaku Usaha yang memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku	DPMPTSP
Meningkatnya pertumbuhan industri kreatif dan usaha mikro	Persentase Pertumbuhan UMKM	4,5	Perwujudan kesejahteraan masyarakat Perwujudan keberdayaan masyarakat	Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi	Persentase koperasi aktif yang patuh terhadap perundang-undangan	DPPKUM
				Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	Persentase KSP/USP Koperasi yang meningkat status kesehatannya	DPPKUM
				Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Persentase koperasi berkualitas	DPPKUM
				Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	Persentase wirausaha pemula yang diberdayakan	DPPKUM

Sasaran	Indikator Sasaran	Target Tahun 2026	Prioritas RKPD 2026	Program Prioritas	Indikator Kinerja Program	Perangkat Daerah
				Program Pengembangan UMKM	Persentase peningkatan omzet pelaku usaha mikro	DPPKUM
Meningkatnya kontribusi sektor ekonomi unggulan	Persentase Kontribusi PDRB Sektor Industri Pengolahan dan Perdagangan	30,56*)	Perwujudan kesejahteraan masyarakat Perwujudan keberdayaan masyarakat	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Prosentase Sarana Distribusi Perdagangan Dalam Kondisi Baik	DPPKUM
				Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Persentase Koefisien Variasi Harga Antar Waktu	DPPKUM
				Program Pengembangan Ekspor	Nilai Ekspor	DPPKUM
Meningkatnya pertumbuhan industri kreatif dan usaha mikro	Persentase Pertumbuhan UMKM	4,5	Perwujudan kesejahteraan masyarakat Perwujudan keberdayaan masyarakat	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah	DPPKUM
				Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Ketersediaan informasi industri terkini dan lengkap	DPPKUM
				Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah	BPKAD
Meningkatnya angka kunjungan wisatawan	Persentase Peningkatan Kunjungan Wisatawan	12,79*)	Perwujudan kesejahteraan masyarakat Perwujudan keberdayaan masyarakat	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Presentase destinasi pariwisata yang terkelola dengan baik	Disporapar
				Program Pemasaran Pariwisata	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datan ke kota	Disporapar
Meningkatnya penguatan kebudayaan	Nilai pemajuan kebudayaan	71,91	Perwujudan kesejahteraan masyarakat Perwujudan keberdayaan masyarakat	Program Pengembangan Kebudayaan	Persentase kebudayaan lokal yang dikembangkan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
				Program Pengembangan Kesenian Tradisional	Persentase kesenian tradisional yang dikembangkan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
				Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	Persentase cagar budaya yang dilestarikan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
				Program Pengelolaan Permuseuman	Persentase peningkatan kunjungan museum	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Meningkatnya kualitas pendidikan dan literasi untuk masyarakat berdaya saing	Indeks Pendidikan	0,791	Perwujudan kesejahteraan masyarakat Perwujudan keberdayaan masyarakat	Program Pengelolaan Pendidikan	APK PAUD	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
					APM SD/ MI	
					APK SD/ MI	
					Angka Putus Sekolah SD/MI	
					APM SMP/MTs	
					APK SMP/MTs	

Sasaran	Indikator Sasaran	Target Tahun 2026	Prioritas RKPD 2026	Program Prioritas	Indikator Kinerja Program	Perangkat Daerah
					Angka Putus Sekolah SMP/MTs	
					Angka Kelulusan Warga Belajar Pendidikan Kesetaraan	
					Persentase Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Terakreditasi	
					Persentase SD Terakreditasi	
					Persentase SMP Terakreditasi	
					Persentase Satuan Pendidikan Kesetaraan Terakreditasi	
Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat	Indeks Kesehatan	0,885*)	Perwujudan kesejahteraan masyarakat Perwujudan keberdayaan masyarakat	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Cakupan penemuan dan pengobatan penyakit menular	Dinas Kesehatan
					Cakupan penemuan dan pengendalian penyakit tidak menular	
					Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	
					Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	
					Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	
					Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	
					Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	
					Persentase Ketersediaan Obat yang Sesuai Standar	
					Persentase Pemenuhan Fasilitas Kesehatan Sesuai Standar	
					Indeks Keluarga Sehat	
				Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Presentase organisasi kepemudaan yang dikembangkan	Disporapar
					Persentase peningkatan pemuda yang dibina	
				Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Persentase SDM pariwisata yang meningkat kapasitasnya	Disporapar

Sasaran	Indikator Sasaran	Target Tahun 2026	Prioritas RKPD 2026	Program Prioritas	Indikator Kinerja Program	Perangkat Daerah
					Persentase peningkatan pelaku ekonomi kreatif yang meningkat kapasitasnya	
Meningkatnya kualitas pendidikan dan literasi untuk masyarakat berdaya saing	Indeks Pendidikan	0,791	Perwujudan kesejahteraan masyarakat Perwujudan keberdayaan masyarakat	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Persentase peningkatan prestasi di bidang olahraga	Disporapar
					Persentase peningkatan atlet yang dibina	
					Persentase pelatih yang bersertifikat	
Meningkatnya penyerapan tenaga kerja daerah	Tingkat Pengangguran Terbuka	4,40 ^{*)}	Perwujudan kesejahteraan masyarakat Perwujudan keberdayaan masyarakat	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase tenaga kerja bersertifikat kompetensi	Dinas Tenaga Kerja
					Persentase angkatan kerja yang mengikuti pelatihan kerja	
				Program Penempatan Tenaga Kerja	Persentase pencari kerja yang mendapatkan fasilitasi penempatan kerja	Dinas Tenaga Kerja
					Persentase peserta pelatihan yang menjalankan wirausaha	
				Program perencanaan tenaga kerja	Persentase jumlah rencana tenaga kerja	Dinas Tenaga Kerja
				Program Kepegawaian Daerah	Persentase capaian target aspek sistem merit	BKPSDM
				Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Persentase ASN yang mengikuti pengembangan kompetensi	BKPSDM
Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan	Nilai partisipasi masyarakat	92,85 ^{*)}	Perwujudan kesejahteraan masyarakat Perwujudan keberdayaan masyarakat	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Persentase kelurahan yang lembaga kemasyarakatan diberdayakan	DPMP4KB
				Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Persentase program perangkat daerah yang responsif gender	DPMP4KB
					Persentase perempuan kepala keluarga dan perempuan rentan terlatih dalam perekonomian keluarga	
					Persentase proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPRD	
					Persentase lembaga yang anggotanya diberdayakan	
				Program Perlindungan Perempuan	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)*	DPMP4KB
				Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Persentase Keluarga Berkualitas	DPMP4KB

Sasaran	Indikator Sasaran	Target Tahun 2026	Prioritas RKPD 2026	Program Prioritas	Indikator Kinerja Program	Perangkat Daerah
Meningkatnya kesetaraan gender, perlindungan terhadap anak dan perempuan	Indeks Pembangunan Gender	96,43 ^{*)}	Perwujudan kesejahteraan masyarakat Perwujudan keberdayaan masyarakat	Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	Persentase PD yang mengelola data gender dan anak	DPMP4KB
				Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Persentase capaian 4 kluster pemenuhan hak anak	DPMP4KB
				Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Persentase anggota keluarga tribina, UPPKS yang ber-KB	DPMP4KB
				Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Persentase Kebijakan administrasi tata pemerintahan yang terfasilitasi	Setda
					Persentase kebijakan di bidang kesejahteraan rakyat yang dilaksanakan	
Meningkatnya kualitas lingkungan permukiman	Persentase luas kawasan kumuh	0	Perwujudan ruang kota layak huni	Program Kawasan Permukiman	Persentase kawasan permukiman kumuh yang ditata	Dinas Perkim
Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan	Nilai partisipasi masyarakat	92,85 ^{*)}	Perwujudan keberdayaan masyarakat	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Persentase kelurahan yang lembaga masyarakatnya diberdayakan	DPMP4KB
Meningkatnya ketahanan terhadap bencana	Indeks Ketahanan Daerah	66,80	Perwujudan ruang kota layak huni	Program Penanggulangan Bencana	Persentase layanan penanggulangan bencana	BPBD
				Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Persentase pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran	Satpol PP
					Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran*	
				Program Penanganan Bencana	Persentase korban bencana alam dan sosial yang tertangani	Dinas Sosial
Meningkatnya ketahanan pangan daerah	Skor PPH	93,24	Perwujudan kesejahteraan masyarakat Perwujudan keberdayaan masyarakat	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Persentase Ketersediaan Pangan	Dinas Pertanian dan Pangan
				Program Penanganan Kerawanan Pangan	Persentase Penanganan Daerah Rentan Rawan Pangan	Dinas Pertanian dan Pangan
				Program Pengawasan Keamanan Pangan	Persentase Pangan Segar yang Aman	Dinas Pertanian dan Pangan
				Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Persentase sarana pembibitan yang terpelihara	Dinas Pertanian dan Pangan
					Persentase Peningkatan sarana Peternakan	
				Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Persentase Peningkatan Prasarana Pertanian	Dinas Pertanian dan Pangan
					Persentase Peningkatan prasarana Peternakan	

Sasaran	Indikator Sasaran	Target Tahun 2026	Prioritas RKPD 2026	Program Prioritas	Indikator Kinerja Program	Perangkat Daerah
				Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Persentase penurunan jumlah kasus penyakit hewan	Dinas Pertanian dan Pangan
					Persentase peningkatan produk pangan asal hewan yang ASUH	
				Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Persentase luasan lahan bencana pertanian yang tertangani	Dinas Pertanian dan Pangan
				Program Penyuluhan Pertanian	Persentase kelompok tani yang meningkat kapasitasnya	Dinas Pertanian dan Pangan
					Persentase kelompok tani yang naik kelas	
				Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Persentase peningkatan produksi perikanan budidaya	Dinas Pertanian dan Pangan
				Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	Jumlah total produksi olahan perikanan (ton)	Dinas Pertanian dan Pangan

Sumber: Tim Penyusun, 2024

4.2.2.3.4 Konsistensi dengan Permasalahan/Isu Strategis

Identifikasi permasalahan pembangunan didapatkan dari hasil evaluasi yang menyandingkan kondisi yang ada dengan standar yang berlaku. Permasalahan pembangunan juga didapatkan melalui identifikasi gap atau celah antara kondisi yang ada dengan kondisi ideal. Adapun isu strategis merupakan suatu kondisi yang berpotensi menjadi masalah maupun menjadi peluang suatu daerah di masa datang. Kondisi yang belum menjadi masalah saat ini tetapi berpotensi akan menjadi masalah daerah dalam kurun waktu mendatang dapat dikategorikan sebagai isu strategis. Selain itu, isu strategis juga dapat dimaknai sebagai potensi daerah yang belum terkelola. Potensi ini jika dapat dikelola dengan tepat dapat menjadi potensi modal pembangunan yang signifikan. Berdasarkan kondisi yang disajikan pada Bab II, maka identifikasi permasalahan pembangunan pada setiap urusan diklasifikasikan kembali menurut masing-masing isu strategis yang ada guna melihat konsistensi terhadap prioritas pembangunan, strategi dan arah kebijakan, sebagaimana tabel 4.11 berikut ini:

Tabel 4.12 Keterkaitan Isu Strategis, Prioritas Pembangunan, dan Strategi sesuai Arah Kebijakan Kota Magelang Tahun 2026

No	Permasalahan Pembangunan	Isu Strategis	Prioritas Pembangunan	Strategi	Arah Kebijakan
1	<ul style="list-style-type: none"> - Ketimpangan pendapatan yang masih perlu diminimalkan - Masih sedikitnya KSP/USP yang memiliki perizinan - Belum optimalnya peningkatan KSP/USP yang meningkat status kesehatannya - Belum semua UMKM memiliki izin berusaha - Menurunnya angka APM SMP/MTS - Masih rendahnya pendidik pada satuan pendidikan dasar yang membuat karya sastra (dalam bentuk buku) 	Kemiskinan	Perwujudan kesejahteraan masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> - Perbaikan data dan ketetapan sasaran program - Peningkatan kualitas layanan pendidikan dan literasi untuk masyarakat berdaya saing - Pemenuhan upaya Kesehatan perorangan dan masyarakat 	Perwujudan Kota Magelang yang semakin maju, sehat dan bahagia

No	Permasalahan Pembangunan	Isu Strategis	Prioritas Pembangunan	Strategi	Arah Kebijakan
	<ul style="list-style-type: none"> - Cakupan imunisasi belum memenuhi target - Masih ditemukan sampel makanan yang diperiksa tidak memenuhi syarat kesehatan - Masih rendahnya kinerja indeks keluarga sehat - Belum semua jenis PSKS ada di Kota Magelang - Belum optimalnya serapan tenaga kerja Kota Magelang - Masih adanya kawasan kumuh - Penanganan RTLH baru mencapai 50% - Ketimpangan pendapatan yang masih perlu diminimalkan - Akses sanitasi layak belum mencapai 100%, akses sanitasi aman baru mencapai 14% - Akses air minum aman belum mencapai 100% 			<ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan kompetensi angkatan kerja - Penguatan kapasitas dan kualitas produksi serta distribusi produk UMKM - Peningkatan akses modal UMKM - Perluasan pasar perdagangan - Promosi pariwisata - Peningkatan nilai investasi yang masuk ke Kota Magelang - Peningkatan transparansi, kemudahan dan kecepatan pelayanan perijinan - Peningkatan akses rumah layak huni - Peningkatan akses sanitasi aman - Peningkatan akses air bersih 	
2	<ul style="list-style-type: none"> - Belum optimalnya capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) - Ketimpangan pendapatan yang masih perlu diminimalkan - Belum tercapainya Standar Nasional Pendidikan (SNP) pada Standar Sarana Prasarana (Sarpras) - Perubahan Peran Guru - Menurunnya angka APM SMP/MTS - Masih rendahnya pendidik pada satuan pendidikan dasar yang membuat karya sastra (dalam bentuk buku) - Cakupan imunisasi belum memenuhi target - Masih ditemukan sampel makanan yang diperiksa tidak memenuhi syarat kesehatan - Masih terdapat tiga kelurahan (Kemirirejo, Panjang dan Rejowinangun Utara) yang belum memenuhi persyaratan menjadi kelurahan siaga aktif mandiri - Masih rendahnya kinerja indeks keluarga sehat - Belum semua jenis PSKS ada di Kota Magelang - Belum optimalnya daya dukung untuk pelatihan - Belum optimalnya serapan tenaga kerja Kota Magelang - Masih adanya kasus kekerasan terhadap perempuan - Belum optimalnya kinerja capaian keluarga berkualitas - Capaian indeks pembangunan keluarga (iBangga) yang belum optimal - Masih adanya kehamilan pada ibu yang berumur kurang dari 20 tahun - Belum adanya pusat pembinaan dan pengembangan olahraga pada jenjang pendidikan usia dini; 	Kualitas SDM	<ul style="list-style-type: none"> - Perwujudan kesejahteraan masyarakat - Perwujudan keberdayaan masyarakat 	<ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan kualitas layanan pendidikan dan literasi untuk masyarakat berdaya saing - Peningkatan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan - Peningkatan literasi masyarakat - Pembinaan pemuda - Pembinaan olahraga - Pemenuhan upaya Kesehatan perorangan dan masyarakat - Peningkatan kapasitas SDM kesehatan - Perluasan akses pelayanan kesehatan - Peningkatan pemahaman terkait kesehatan reproduksi untuk pengendalian penduduk - Pemasarakatan olahraga - Pengarustamaan gender - Pemberdayaan perempuan - Perlindungan perempuan dan anak - Peningkatan kualitas keluarga - Penguatan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas) 	Perwujudan Kota Magelang yang semakin maju, sehat dan bahagia

No	Permasalahan Pembangunan	Isu Strategis	Prioritas Pembangunan	Strategi	Arah Kebijakan
	<ul style="list-style-type: none"> - Atlet yang mengalami cedera pada saat mengikuti kejuaraan tidak bisa menggunakan BPJS kesehatan - Belum seluruh kesenian tradisional dikembangkan - Belum seluruh kebudayaan lokal dikembangkan - Cakupan pembinaan sejarah masih perlu ditingkatkan - Belum optimalnya kinerja pembinaan wawasan kebangsaan - Organisasi kemasyarakatan yang diberdayakan belum maksimal - Pembinaan ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya yang perlu ditingkatkan - Penduduk usia pemilih pemula yang berpartisipasi dalam agenda politik yang masih perlu ditingkatkan 			<ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan penyediaan dan penyerapan tenaga kerja - Peningkatan program perlindungan sosial - Peningkatan kualitas tenaga kerja dan lapangan kerja - Peningkatan kepersertaan jamsostek bagi tenaga kerja formal dan non formal - Peningkatan pembinaan sejarah dan pelestarian cagar budaya - Pengembangan kesenian daerah 	
3	<ul style="list-style-type: none"> - Belum mantapnya kualitas infrastruktur wilayah - Masih adanya kawasan kumuh - Penanganan RTLH baru mencapai 50% - Ketersediaan ruang terbuka hijau yang masih kurang - Kondisi jalan mantap belum mencapai 100% - Drainase dalam kondisi baik hanya sekitar 30% (tiga puluh persen) - Irigasi dalam kondisi baik baru mencapai 56% - Akses sanitasi layak belum mencapai 100%, akses sanitasi aman baru mencapai 14% - Akses air minum aman belum mencapai 100% - Belum optimalnya kinerja penyelesaian ganti/rugi santunan tanah dalam kasus permasalahan pengadaaan tanah 	Sarana prasarana perkotaan yang berkelanjutan	Perwujudan ruang kota layak huni	<ul style="list-style-type: none"> - Pembangunan dan perbaikan infrastruktur kota - Penyediaan dokumen rencana rinci penataan ruang - Perluasan media informasi dan komunikasi penataan ruang - Penyediaan sarana perkotaan yang inklusif - Penyediaan angkutan umum terintegrasi - Peningkatan akses rumah layak huni - Peningkatan akses sanitasi aman - Peningkatan akses air bersih - Peningkatan jaringan drainase 	Perwujudan Kota Magelang yang semakin maju, sehat dan bahagia
4	<ul style="list-style-type: none"> - Ketersediaan ruang terbuka hijau yang masih kurang - Menurunnya indeks kualitas tutupan lahan - Menurunnya kinerja pengurangan sampah - Belum seluruh usaha dan/atau kegiatan memiliki rincian teknis penyimpnana sementara LB3 - Kinerja cakupan penghargaan yang diterima masyarakat masih perlu ditingkatkan 	Kualitas lingkungan hidup	Perwujudan ruang kota layak huni	<ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan pencegahan pencemaran lingkungan - Rehabilitasi lingkungan - Penataan dan penambahan RTH publik - Peningkatan pemberdayaan masyarakat 	Perwujudan Kota Magelang yang semakin maju, sehat dan bahagia
5	<ul style="list-style-type: none"> - Ketahanan Daerah Tahun 2023 Kota Magelang masuk kategori rendah - Tingginya ketergantungan pangan dari daerah lain - Masih ditemukan pangan segar yang tidak aman - Belum optimalnya peningkatan produksi perikanan budidaya - Belum optimalnya ketersediaan dan pemeliharaan prasarana pertanian - Peningkatan kelompok tani yang naik kelas yang belum optimal 	Ketahanan daerah (ketahanan terhadap pangan dan bencana)	Perwujudan keberdayaan masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> - Pengembangan sistem informasi mitigasi bencana - Peningkatan pemberdayaan masyarakat - Urban farming - Pemenuhan cadangan pangan 	Perwujudan Kota Magelang yang semakin maju, sehat dan bahagia

No	Permasalahan Pembangunan	Isu Strategis	Prioritas Pembangunan	Strategi	Arah Kebijakan
				- Peningkatan ketersediaan dan kualitas sarana prasarana pertanian	
6	<ul style="list-style-type: none"> - Ketimpangan pendapatan yang masih perlu diminimalkan - Masih sedikitnya KSP/USP yang memiliki perizinan - Belum optimalnya peningkatan KSP/USP yang meningkat status kesehatannya - Belum semua UMKM memiliki izin berusaha - Potensi investasi yang bisa ditawarkan ke investor masih terbatas - Belum optimalnya pelayanan perizinan melalui system OSS - Belum optimalnya pelaku usaha yang memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku - Belum semua sarana perdagangan dalam kondisi baik namun Pemerintah Kota Magelang tidak bisa melakukan pemeliharaan - Harga komoditas kurang stabil - Menurunnya realisasi indikator persentase UTPP bertanda tera sah - Belum optimalnya pertambahan jumlah industri kecil dan menengah - Masih rendahnya IKM yang mengurus legalitas usaha - Tidak banyak IKM yang memiliki sertifikasi manajemen mutu - Tidak banyak IKM yang memanfaatkan TTG untuk berproduksi 	Daya saing ekonomi	<ul style="list-style-type: none"> - Perwujudan kesejahteraan masyarakat - Perwujudan keberdayaan masyarakat 	<ul style="list-style-type: none"> - Perbaikan data dan ketetapan sasaran program - Peningkatan kompetensi Angkatan Kerja - Penguatan kapasitas dan kualitas produksi serta distribusi produk UMKM - Peningkatan akses modal UMKM - Perluasan pasar perdagangan - Promosi pariwisata - Peningkatan nilai investasi yang masuk ke Kota Magelang - Peningkatan transparansi, kemudahan dan kecepatan pelayanan perijinan - Pembangunan dan perbaikan infrastruktur kota - Penyediaan dokumen rencana rinci penataan ruang - Perluasan media informasi dan komunikasi penataan ruang - Penyediaan sarana perkotaan yang inklusif - Penyediaan angkutan umum terintegrasi - Peningkatan akses rumah layak huni - Peningkatan akses sanitasi aman - Peningkatan akses air bersih 	Perwujudan Kota Magelang yang semakin maju, sehat dan bahagia
7	<ul style="list-style-type: none"> - Capaian indeks pengelolaan keuangan daerah yang masih kurang - Belum seluruh lahan aset pemerintah bersertifikat - Belum optimalnya kinerja penyelesaian ganti/rugi santunan tanah dalam kasus permasalahan pengadaaan tanah - Belum semua penduduk menggunakan IKD - OPD yang sudah ber-PKS dengan Ditjendukcapil tidak bisa mengakses data penduduk untuk keperluan verifikasi - Banyak aplikasi yang belum terintegrasi - Belum optimalnya pelayanan perizinan melalui system OSS - Pengelolaan statistik sektoral masih perlu ditingkatkan 	Reformasi birokrasi	<ul style="list-style-type: none"> - Perwujudan kesejahteraan masyarakat - Perwujudan keberdayaan masyarakat 	<ul style="list-style-type: none"> - Integrasi sistem pelayanan berbasis IT - Pelayanan publik - Peningkatan kualitas pengawasan - Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah - Optimalisasi PAD - Peningkatan kualitas perencanaan - Peningkatan kualitas inovasi daerah - Penerapan sistem merit 	Perwujudan Kota Magelang yang semakin maju, sehat dan bahagia

No	Permasalahan Pembangunan	Isu Strategis	Prioritas Pembangunan	Strategi	Arah Kebijakan
	<ul style="list-style-type: none"> - Keamanan informasi masih belum memenuhi standar ISO 27001 - Belum seluruh arsip inaktif dibuatkan daftar arsip - Pembahasan Raperda tidak selesai tepat waktu - Penurunan IPKD Kota Magelang - Masih adanya tanah Pemerintah Kota yang belum bersertifikat - Keuangan Kota Magelang masih tergantung pembiayaan dari Pusat - Belum optimalnya perlindungan dan pelayanan - Belum optimalnya capaian aspek pengembangan karir, promosi dan mutasi, manajemen kinerja dan sistem informasi - Belum adanya pedoman teknis dari instansi Pembina tentang pengelolaan jabatan fungsional hasil penyetaraan khususnya yang berkaitan dengan tim penilai angka kredit - Belum semua pejabat Pimpinan Pratama dan Pejabat administrator/pengawas mengikuti pelatihan kepemimpinan - Belum sempurnanya penyusunan manajemen talenta dan manajemen kinerja aparatur termasuk sistem informasinya meskipun telah disetujui KASN untuk digunakan sehingga perlu uji coba penggunaannya - Belum semua pegawai paham terkait penyusunan sasaran kinerja dan penggunaan ekin BKN - Belum optimalnya pengelolaan kinerja pegawai sesuai dengan SE Menpan No. 3/2023 - Belum optimalnya integrasi sistem informais kepegawaian - Target Maturitas SPIP belum bisa tercapai - Belum optimalnya entitas yang mendapatkan pendampingan dan asistensi 			<ul style="list-style-type: none"> - Optimalisasi sistem OSS 	

Sumber: Tim Penyusun, 2025

4.2.2.3.5 Pokok-Pokok Pikiran DPRD

Penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD merupakan kajian permasalahan pembangunan daerah yang diperoleh dari DPRD berdasarkan risalah rapat dengar pendapat dan/atau rapat hasil penyerapan aspirasi melalui reses. Pokok-pokok pikiran DPRD memuat pandangan dan pertimbangan DPRD mengenai arah prioritas pembangunan serta rumusan usulan kebutuhan program/kegiatan yang bersumber dari hasil penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD sebagai masukan dalam perumusan kebutuhan program dan kegiatan pada tahun rencana berdasarkan prioritas pembangunan daerah.

Rekomendasi DPRD terhadap RKPD Kota Magelang Tahun 2026 yaitu agar penyusunan arah kebijakan dan prioritas pembangunan didasarkan pada penyelesaian isu-isu strategis sesuai RPJMD Kota Magelang Tahun 2021-2026, sedangkan untuk penyusunan program dan kegiatan harus memperhatikan permasalahan di setiap urusan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah. Secara umum aspirasi yang tercatat untuk ditindaklanjuti meliputi beberapa sub kegiatan berikut:

1. Pembangunan SPAM Jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan
2. Fasilitasi Pengelolaan dan Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan
3. Pembinaan dan pengendalian pengelolaan sarana distribusi perdagangan
4. Penanganan sampah melalui pengangkutan dan pengumpulan sampah
5. Pembinaan Prasarana, sarana dan utilitas umum perumahan
6. Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh
7. Pengembangan kawasan strategis
8. Pemeliharaan rutin dan berkala jalan
9. Peningkatan Sistem Drainase Perkotaan
10. Pembangunan sarana prasarana kelurahan
11. Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan dan perkotaan
12. Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas (PJU / Cermin Cembung / Pita Kejut)
13. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
14. Penyediaan Unit pengolahan SPALD setempat (sanitasi aman)
15. Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator
16. Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari kerja (Pelatihan Barista / Tata Rias / Menjahit / Tata Boga / Desain Grafis / Barbershop / Marketing Online / Furniture / Mebeler / Servis Sepeda Motor)
17. Pelatihan Budidaya tanaman, budidaya ikan dan budidaya ternak
18. Pengelolaan Ruang Terbuka Publik
19. Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan
20. Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
21. Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan
22. Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa
23. Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi

Keterkaitan antara prioritas RKPD Kota Magelang tahun 2026 dengan isu strategis daerah, program prioritas RKPD tahun 2026 dan Pokok Pikiran DPRD disajikan dalam tabel 4.14 berikut ini:

Tabel 4.13 Keterkaitan Isu Strategis, Prioritas Pembangunan Daerah dengan Pokok Pikiran Tahunan DPRD

No	Isu Strategis	Klaster Prioritas RKPD Tahun 2026	Pokok Pikiran DPRD	Program Prioritas
1	Kemiskinan			Program Rehabilitasi Sosial

No	Isu Strategis	Klaster Prioritas RKPD Tahun 2026	Pokok Pikiran DPRD	Program Prioritas
		Perwujudan Kesejahteraan Masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> - Pembinaan Prasarana, sarana dan utilitas umum perumahan - Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni - Pembangunan SPAM Jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan - Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah - Fasilitasi Pengelolaan dan Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan (Gerobak UMKM) - Pembinaan dan pengendalian pengelolaan sarana distribusi perdagangan - Pemeliharaan rutin dan berkala jalan 	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial
				Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
				Program Pengelolaan Pendidikan
				Program Pembinaan Perpustakaan
				Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan air minum
				Program Pengembangan Perumahan
				Program Kawasan Permukiman
				Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh
				Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat
2	Kualitas SDM	Perwujudan Keberdayaan Masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> - Pembinaan dan pengendalian pengelolaan sarana distribusi perdagangan - Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator - Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari kerja (Pelatihan Barista / Tata Rias / Menjahit / Tata Boga / Desain Grafis / Barbershop / Marketing Online / Furniture / Mebeler / Servis Sepeda Motor) - Pelatihan Budidaya tanaman, budidaya ikan dan budidaya ternak - Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan - Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah - Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/ Kesetaraan 	Program Pengelolaan Pendidikan
				Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
				Program Pengembangan Sumber Daya Manusia
				Program Pembinaan Perpustakaan
				Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan
3	Sarana Prasarana Perkotaan yang Berkelanjutan	<ul style="list-style-type: none"> - Perwujudan ruang kota layak huni - Perwujudan keberdayaan masyarakat 	<ul style="list-style-type: none"> - Pembangunan SPAM Jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan - Penanganan sampah melalui pengangkutan dan pengumpulan sampah - Pembinaan Prasarana, sarana dan utilitas umum perumahan - Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni - Pengembangan kawasan strategis - Pemeliharaan rutin dan berkala jalan - Peningkatan Sistem Drainase Perkotaan - Pembangunan sarana prasarana kelurahan - Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan dan perkotaan - Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas (PJU / Cermin Cembung / Pita Kejut) - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya - Penyediaan Unit pengolahan SPALD setempat (sanitasi aman) - Pengelolaan Ruang Terbuka Publik 	Program Penyelenggaraan Jalan
				Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
				Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional
				Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah
				Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase
				Program Kawasan Permukiman
				Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh
				Program Penataan Bangunan Gedung
				Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya
				Program Penyelenggaraan Jalan
				Program Pengembangan Jasa Konstruksi

No	Isu Strategis	Klaster Prioritas RKPD Tahun 2026	Pokok Pikiran DPRD	Program Prioritas
				Program Penyelenggaraan Penataan Ruang
				Program Pengendalian Pencemaran dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup
				Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)
				Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)
				Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Pplh)
				Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat
				Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup
				Program Pengelolaan Persampahan
				Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)
4	Kualitas Lingkungan Hidup dan Ketahanan Terhadap Bencana	<ul style="list-style-type: none"> - Perwujudan ruang kota layak huni - Perwujudan keberdayaan masyarakat 	<ul style="list-style-type: none"> - Pengelolaan Ruang Terbuka Publik - Pemeliharaan rutin dan berkala jalan - Peningkatan Sistem Drainase Perkotaan - Penanganan sampah melalui pengangkutan dan pengumpulan sampah - Pembinaan Prasarana, sarana dan utilitas umum perumahan 	Program Penanggulangan Bencana
				Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran
				Program Penanganan Bencana
				Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat
				Program Pengawasan Keamanan Pangan
				Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian
				Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian
				Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner
				Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian
				Program Penyuluhan Pertanian
				Program Pengelolaan Perikanan Budidaya
				Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
				Program Kawasan Permukiman
				Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat

No	Isu Strategis	Klaster Prioritas RKPD Tahun 2026	Pokok Pikiran DPRD	Program Prioritas
5	Ketahanan Daerah	<ul style="list-style-type: none"> - Perwujudan keberdayaan masyarakat 	<ul style="list-style-type: none"> - Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa - Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi 	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan
				Program peningkatan peran partai politik dan lembaga pendidikan melalui pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik
				Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan
				Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya
				Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial
6	Daya Saing Ekonomi	<ul style="list-style-type: none"> - Perwujudan keberdayaan masyarakat - Perwujudan ruang kota layak huni 	<ul style="list-style-type: none"> - Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator - Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari kerja (Pelatihan Barista / Tata Rias / Menjahit / Tata Boga / Desain Grafis / Barbershop / Marketing Online / Furniture / Mebeler / Servis Sepeda Motor) - Pelatihan Budidaya tanaman, budidaya ikan dan budidaya ternak - Pengembangan kawasan strategis - Fasilitasi Pengelolaan dan Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan (Gerobak UMKM) - Pibinaan dan pengendalian pengelolaan sarana distribusi perdagangan - Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan 	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal
				Program Promosi Penanaman Modal
				Program Pelayanan Penanaman Modal
				Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal
				Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi
				Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (Ukmk)
				Program Pengembangan UMKM
				Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan
				Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting
				Program Pengembangan Ekspor
				Program Perencanaan dan Pembangunan Industri
				Program Pengelolaan Pendapatan Daerah
				Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata
				Program Pemasaran Pariwisata
				Program Pengembangan Kebudayaan
				Program Pengembangan Kesenian Tradisional
				Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya
				Program Pengelolaan Permuseuman
7	Reformasi Birokrasi		Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika

No	Isu Strategis	Klaster Prioritas RKPD Tahun 2026	Pokok Pikiran DPRD	Program Prioritas
		Perwujudan keberdayaan masyarakat		Program Penelitian dan Pengembangan Daerah
				Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah
				Program Pengelolaan Keuangan Daerah
				Program Pengelolaan Barang Milik Daerah
				Program Penyelenggaraan Pengawasan
				Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi
				Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral
				Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi
				Program Pengelolaan Pendidikan
				Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
				Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan
				Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
				Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan
				Program perencanaan tenaga kerja
				Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja
				Program Penempatan Tenaga Kerja
				Program Kepegawaian Daerah
				Program Pengembangan Sumber Daya Manusia
				Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat
				Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan
				Program Perlindungan Perempuan
				Program Peningkatan Kualitas Keluarga
				Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak
				Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)
				Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)

Sumber: Tim Penyusun, 2025

4.2.2.3.6 Tindak Lanjut Hasil FGD dan Konsultasi Publik

Wujud pendekatan partisipatif dalam penyusunan RKPD Kota Magelang Tahun 2025 salah satunya adalah dalam pelaksanaan konsultasi publik dan *Focussed Group Discussion* (FGD). Konsultasi publik atas rancangan awal RKPD Tahun 2025 dilaksanakan dengan melibatkan perwakilan masyarakat dan seluruh pemangku kepentingan terkait. Selain itu juga dilakukan penjangkauan melalui musyawarah perencanaan pembangunan dari segmen anak-anak dan lansia.

Sedangkan FGD yang dilakukan dengan mengambil tema tema i) Stop Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak: Peran Masyarakat dan Pemerintah; ii) Peran Masyarakat dalam Penguatan Pendidikan Karakter; iii) Penataan ruang kota yang berkelanjutan; iv) Mewujudkan Kota yang berketahanan iklim; serta v) Mewujudkan Pertumbuhan ekonomi melalui Pemberdayaan UMKM, Ekonomi Kreatif dan Pariwisata. Hasil FGD kemudian ditindaklanjuti dalam program di masing-masing perangkat daerah terkait baik melalui kerangka kebijakan maupun kerangka anggaran.

4.2.2.3.7 Tindak Lanjut Hasil Musrenbang

Musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) merupakan salah satu perwujudan model pendekatan penyusunan perencanaan yang berorientasi pada proses karena melibatkan masyarakat sebagai salah satu unsur pemangku kepentingan dan perencanaan yang diselenggarakan dengan musyawarah yang dilaksanakan secara berjenjang dari tingkat Kelurahan, Kecamatan, dan tingkat Kota. Melalui Musrenbang, yang juga merupakan pengejawantahan pendekatan perencanaan dari segi *bottom up*, teridentifikasi saran, masukan, serta usulan para pemangku kepentingan untuk pelaksanaan pembangunan daerah guna peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Dalam penyusunan RKPD Kota Magelang tahun 2025 juga memuat akomodasi terhadap Renja RT, dengan alokasi anggaran pembangunan di masing-masing RT sebesar 30 juta rupiah plus 20 juta rupiah. Penyusunan Renja RT harus merujuk pada hasil identifikasi permasalahan yang ada dalam profil RT, dan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Surat Edaran Walikota tentang Musrenbang. Verifikasi terhadap Renja RT dilaksanakan secara berjenjang dari tingkat RW, kelurahan, kecamatan, dan kota.

Tabel 4.14 Rekapitulasi Akomodasi Rencana Kerja Masyarakat (Renja RT) dalam RKPD Kota Magelang Tahun 2026

Uraian Usulan	Satuan	Pagu	Jumlah	Jumlah Anggaran
Pelayanan Dasar				
Sumber Daya Manusia				Rp 6.934.680.000,00
Anak				
Parenting				
Umum	kel / tahun	200.000	1.559	Rp 311.800.000,00
Difabel	kel / tahun	200.000	78	Rp 15.600.000,00
Pendidikan Non-Formal				
Kejar Paket	org / tahun	500.000	67	Rp 33.500.000,00
Homeschooling	org / tahun	500.000	21	Rp 10.500.000,00
Remaja:				
Penguatan Local Champion				
Penguatan Kapasitas Kepemudaan	org / tahun	500.000	456	Rp 228.000.000,00
Beasiswa Vokasi	org / tahun	4.000.000	140	Rp 560.000.000,00
Angkatan Kerja				
Pelatihan				
Umum - Pencari Kerja:				Rp 4.666.000.000,00
Pelatihan Barista	org / tahun	5.500.000	127	Rp 698.500.000,00

Uraian Usulan	Satuan	Pagu	Jumlah	Jumlah Anggaran
Pelatihan Tata Rias	org / tahun	4.000.000	123	Rp 492.000.000,00
Pelatihan Menjahit	org / tahun	5.500.000	57	Rp 313.500.000,00
Pelatihan Tata Boga	org / tahun	3.500.000	370	Rp 1.295.000.000,00
Pelatihan Desain Grafis	org / tahun	4.000.000	84	Rp 336.000.000,00
Pelatihan Barbershop	org / tahun	5.000.000	85	Rp 425.000.000,00
Pelatihan Service Sepeda Motor	org / tahun	4.000.000	114	Rp 456.000.000,00
Pelatihan Marketing Online	org / tahun	5.000.000	93	Rp 465.000.000,00
Pelatihan Furniture/Mebel	org / tahun	5.000.000	28	Rp 140.000.000,00
Pelatihan Lainnya	org / tahun	5.000.000	9	Rp 45.000.000,00
Perempuan Rentan	org / tahun	2.500.000	203	Rp 507.500.000,00
Difabel	org / keg	8.080.000	16	Rp 129.280.000,00
Lansia:				
Sekolah Lansia	org / tahun	700.000	675	Rp 472.500.000,00
Infrastruktur				Rp 3.787.260.006,00
Persampahan:				
Petugas Sampah:				
Honor	org/RT/Tahun	1.200.000	Fix Cost	Rp 1.233.600.000,00
Sanitasi Air Minum				
Sanitasi Aman				
Penyedotan Lumpur Tinja	Ruta	20.000	1.094	Rp 21.880.000,00
Sanitasi Layak				
Pembangunan Sanitasi Layak (Leher Angsa)	Unit	4.000.000	56	Rp 224.000.000,00
Pembangunan Sambungan SPALDS/SPALDT	Unit	1.500.000	39	Rp 58.500.000,00
Air Minum:				
Perpipaan Sambungan Rumah	Unit	1.500.000	86	Rp 129.000.000,00
Hydro Doser	Unit	7.500.000	Manual Input	Rp 97.500.006,00
Permukiman:				Rp 2.022.780.000,00
RTLH	Unit	17.500.000	11	Rp 192.500.000,00
Fasum / Fasos:				Rp 1.830.280.000,00
Biopori	Unit	50.000	500	Rp 25.000.000,00
Sumur Resapan	Unit	8.000.000	13	Rp 104.000.000,00
Isi Ulang APAR 3kg	Unit	180.000	824	Rp 85.500.000,00
Isi Ulang APAR 5kg	Unit	235.000	475	Rp 193.640.000,00
Pengadaan APAR 5kg	Unit	510.000	414	Rp 211.140.000,00
Penerangan Lingkungan	RT / tahun	3.500.000	346	Rp 1.211.000.000,00
Kesehatan:				Rp 9.937.711.772,00
Permakanan:				Rp 6.032.600.000,00

Uraian Usulan	Satuan	Pagu	Jumlah	Jumlah Anggaran
Lansia:				
Permakanan Lansia	org / tahun	3.100.000	1.946	Rp 6.032.600.000,00
Posyandu				Rp 3.649.311.772,00
Anak - Lansia:				
Subsidi Makanan Tambahan PMT	RT / tahun	1.200.000	Fix Cost	Rp 1.231.200.000,00
Bantuan Peralatan Posyandu				Rp 2.418.111.772,00
Alat Kesehatan:				
Tensimeter	Unit	1.574.700	254	Rp 399.973.800,00
Alat Ukur Gula Darah, A.Urat, Kolesterol	Unit	500.000	417	Rp 208.500.000,00
Alat Ukur Hb	Unit	610.000	151	Rp 92.110.000,00
Timbangan Dewasa	Unit	3.016.886	77	Rp 232.300.222,00
Alat Ukur Tinggi Badan	Unit	1.979.000	33	Rp 65.307.000,00
Alat Ukur Lingkar Lengan dan Perut	Unit	127.650	81	Rp 10.339.650,00
Timbangan Bayi	Unit	3.000.000	14	Rp 42.000.000,00
Alat ukur panjang badan bayi	Unit	1.750.000	5	Rp 8.750.000,00
Kursi roda	Unit	1.840.500	178	Rp 327.609.000,00
Walker	Unit	818.000	40	Rp 32.720.000,00
Tongkat tripod	Unit	320.100	67	Rp 21.446.700,00
Kruk	Unit	333.400	45	Rp 15.003.000,00
Reagen stick Glukosa	Tube	391.700	641	Rp 251.079.700,00
Reagen stick Asam Urat	Tube	396.800	593	Rp 235.302.400,00
Reagen stick Kolesterol	Tube	603.300	612	Rp 369.219.600,00
Reagen stick Haemoglobin	Tube	222.000	247	Rp 54.834.000,00
Blood Lancet	Box	20.000	1.111	Rp 22.220.000,00
Alcohol Swabs	Box	19.500	965	Rp 18.817.500,00
Safety Box	Box	17.400	608	Rp 10.579.200,00
Homecare:				Rp 255.800.000,00
Difabel / anak terlantar	org / tahun	900.000	43	Rp 38.700.000,00
Homecare Lansia	org / tahun	650.000	334	Rp 217.100.000,00
Kelembagaan				Rp 10.346.546.000,00
Honor:				
Pengurus RT:			Fix Cost	Rp 7.129.536.000,00
Ketua	org / tahun	4.800.000		
Sekretaris	org / tahun	1.800.000		
Posyandu:				
Ketua Posyandu	org / tahun	336.000		
Operasional:			Fix Cost	Rp 1.675.010.000,00

Uraian Usulan	Satuan	Pagu	Jumlah	Jumlah Anggaran
RT:				
Makan Minum dan Alat Tulis	RT / tahun	1.000.000		
PKK-DAWIS:				
Makan Minum dan Alat Tulis	RT / tahun	500.000		
Posyandu:				
Operasional	RT / tahun	135.000		
Kegiatan Sosial Kemasyarakatan:			Fix Cost	Rp 1.542.000.000,00
17an, Hari Jadi, Sadranan	RT / tahun	1.500.000		
Sosial:				Rp 1.172.000.000,00
Permakanan Rumah Tangga Miskin	org / tahun	800.000	1.465	Rp 1.172.000.000,00
Literasi:				Rp 3.786.012.007,00
Pemasangan / Pemeliharaan WIFI	RT / tahun	6.000.000	560	Rp 3.360.000.000,00
Pemeliharaan WIFI	RW / tahun	6.000.000		Rp 426.012.007,00
Dukungan Tematik				Rp 15.254.785.127,00
Pengembangan Eksisting				Rp 12.290.677.481,00
Tematik Baru				Rp 2.964.107.646,00
Usulan Cadangan				Rp 468.181.615,00
TOTAL				Rp 51.189.823.912,00

Sumber: Tim Penyusun, 2025

4.3 SASARAN DAN PRIORITAS DAERAH DALAM MENDUKUNG PENCAPAIAN *SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS* (SDGs)

Sustainable Development Goals (SDGs) atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) merupakan komitmen global dan nasional dalam upaya untuk menyejahterakan masyarakat mencakup 17 tujuan dan sasaran global tahun 2030 yang dideklarasikan baik oleh negara maju maupun negara berkembang di Sidang Umum PBB pada September 2015. 17 tujuan tersebut yaitu: (1) Tanpa Kemiskinan; (2) Tanpa Kelaparan; (3) Kehidupan Sehat dan Sejahtera; (4) Pendidikan Berkualitas; (5) Kesenjangan Gender; (6) Air Bersih dan Sanitasi Layak; (7) Energi Bersih dan Terjangkau; (8) Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi; (9) Industri, Inovasi dan Infrastruktur; (10) Berkurangnya Kesenjangan; (11) Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan; (12) Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab; (13) Penanganan Perubahan Iklim; (14) Ekosistem Lautan; (15) Ekosistem Daratan; (16) Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh; (17) Kemitraan untuk Mencapai Tujuan.

Target dari masing-masing tujuan juga telah diinternalisasi melalui Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Dukungan terhadap pencapaian TPB ini juga dilakukan oleh Pemerintah Kota Magelang, meskipun tidak semua tujuan (Tujuan 7, Tujuan 14, Tujuan 15, dan Tujuan 17) dapat didukung karena tidak ada dalam lingkup Kota Magelang. Pemerintah berupaya mendorong, memfasilitasi dan bekerja sama dengan aktor nonpemerintah yaitu masyarakat sipil, mitra pembangunan, filantropi, pelaku usaha, dan perguruan tinggi untuk menerapkan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Keterkaitan sasaran, prioritas, termasuk program terhadap pencapaian TPB disajikan pada tabel berikut.

Tabel 4.15 Keterkaitan Sasaran, Prioritas terhadap Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Tahun 2025 di Kota Magelang

No	Sasaran Kota Magelang	Prioritas Tahun 2026	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	Program	Perangkat Daerah
1.1.1	Meningkatnya toleransi	Perwujudan keberdayaan masyarakat	Tujuan 16 Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh	<ul style="list-style-type: none"> - Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan - Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan - Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya - Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial 	Badan Kesbangpol
1.1.2	Meningkatnya ketenteraman dan ketertiban umum			<ul style="list-style-type: none"> - Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum 	Satpol PP
1.1.3	Meningkatnya stabilitas daerah			<ul style="list-style-type: none"> - Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya - Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial 	Badan Kesbangpol
1.1.4	Meningkatnya penguatan kebudayaan			<ul style="list-style-type: none"> - Program Pengembangan Kebudayaan - Program Pengembangan Kesenian Tradisional - Program Pembinaan Sejarah - Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya - Program Pengelolaan Permuseuman 	Dinas Pendidikan & Kebudayaan
1.1.5	Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan			<ul style="list-style-type: none"> - Program Peningkatan Kerja Sama Desa - Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat 	DPMP4KB
2.1.1	Meningkatnya kualitas pendidikan dan literasi untuk masyarakat berdaya saing	Perwujudan kesejahteraan masyarakat	Tujuan 4 Pendidikan Berkualitas	<ul style="list-style-type: none"> - Program Pengelolaan Pendidikan - Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan 	Dinas Pendidikan & Kebudayaan
				<ul style="list-style-type: none"> - Program Pembinaan Perpustakaan 	Dinas Perpustakaan & Arsip
2.1.2	Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat		Tujuan 3 Kehidupan Sehat dan Sejahtera	<ul style="list-style-type: none"> - Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat - Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan - Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman - Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan 	Dinas Kesehatan

No	Sasaran Kota Magelang	Prioritas Tahun 2026	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	Program	Perangkat Daerah
				<ul style="list-style-type: none">- Program Pengendalian Penduduk- Program Pembinaan Keluarga Berencana (Kb)- Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (Ks)	DPMP4KB
2.1.3	Meningkatnya daya beli masyarakat		Tujuan 8 Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi	<ul style="list-style-type: none">- Program perencanaan tenaga kerja- Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja- Program Penempatan Tenaga Kerja	Dinas Tenaga Kerja
				<ul style="list-style-type: none">- Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	DPMP4KB
				<ul style="list-style-type: none">- Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (Umk)- Program Pengembangan Umkm	DPPKUM
				<ul style="list-style-type: none">- Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan- Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Disporapar
2.1.4	Meningkatnya kesetaraan gender, perlindungan terhadap anak dan perempuan		Tujuan 5 Kesetaraan Gender	<ul style="list-style-type: none">- Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan- Program Perlindungan Perempuan- Program Peningkatan Kualitas Keluarga- Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak- Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	DPMP4KB
3.1.1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Perwujudan kesejahteraan masyarakat	Tujuan 16 Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh	<ul style="list-style-type: none">- Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial	Badan Kesbangpol
3.1.2	Menciptakan birokrasi yang kapabel			<ul style="list-style-type: none">- Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Sekretariat Daerah
3.1.3	Menciptakan birokrasi yang bersih dan akuntabel			<ul style="list-style-type: none">- Program Penyelenggaraan Pengawasan- Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	Inspektorat
				<ul style="list-style-type: none">- Program Pengelolaan Keuangan Daerah- Program Pengelolaan Barang Milik Daerah- Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	BPKAD
				<ul style="list-style-type: none">- Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Bapperida

No	Sasaran Kota Magelang	Prioritas Tahun 2026	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	Program	Perangkat Daerah
				<ul style="list-style-type: none"> - Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah 	
				<ul style="list-style-type: none"> - Program Pengelolaan Arsip - Program Perlindungan Dan Penyelamatan Arsip 	Dinas Perpustakaan & Arsip
				<ul style="list-style-type: none"> - Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik 	Dinas Kominsta
4.1.1	Meningkatnya kontribusi sektor ekonomi unggulan	Perwujudan keberdayaan masyarakat	Tujuan 8 Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi	<ul style="list-style-type: none"> - Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (Ukm) - Program Pengembangan Ukm 	DPPKUM
4.1.2	Meningkatnya pertumbuhan investasi			<ul style="list-style-type: none"> - Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal - Program Promosi Penanaman Modal - Program Pelayanan Penanaman Modal 	DPMPSTP
4.1.3	Meningkatnya angka kunjungan wisatawan			<ul style="list-style-type: none"> - Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata - Program Pemasaran Pariwisata - Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif 	Disporapar
4.1.4	Meningkatnya kesejahteraan pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial	Perwujudan kesejahteraan masyarakat	Tujuan 1 Tanpa Kemiskinan	<ul style="list-style-type: none"> - Program Pemberdayaan Sosial - Program Rehabilitasi Sosial - Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial 	Dinas Sosial
				<ul style="list-style-type: none"> - Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat 	Dinas Kesehatan
		Perwujudan kesejahteraan masyarakat	Tujuan 10 Berkurangnya Kesenjangan	<ul style="list-style-type: none"> - Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum - Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah 	DPUPR
				<ul style="list-style-type: none"> - Program perencanaan tenaga kerja - Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja - Program Penempatan Tenaga Kerja 	Dinas Tenaga Kerja
4.1.5	Meningkatnya penyerapan tenaga kerja daerah	Perwujudan Keberdayaan masyarakat	Tujuan 8 Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, Kesempatan Kerja yang Produktif dan Menyeluruh, serta Pekerjaan yang Layak untuk Semua	<ul style="list-style-type: none"> - Program perencanaan tenaga kerja - Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja - Program Penempatan Tenaga Kerja - Program Hubungan Industrial 	Dinas Tenaga Kerja
4.1.5	Meningkatnya pertumbuhan industri kreatif dan usaha mikro			<ul style="list-style-type: none"> - Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata - Program Pemasaran Pariwisata - Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif 	Disporapar

No	Sasaran Kota Magelang	Prioritas Tahun 2026	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	Program	Perangkat Daerah
				<ul style="list-style-type: none">- Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (Umk)- Program Pengembangan Umkm	DPPKUM
5.1.1	Meningkatnya kualitas infrastruktur kota	Perwujudan ruang kota layak huni	Tujuan 9 Industri, Inovasi dan Infrastruktur	<ul style="list-style-type: none">- Program Pengelolaan Sumber Daya Air (Sda)- Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional- Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase- Program Penyelenggaraan Jalan- Program Pengembangan Jasa Konstruksi	DPUPR
5.1.2	Meningkatnya kesesuaian pemanfaatan ruang		Tujuan 11 Kota dan Pemukiman yang Berkelanjutan	<ul style="list-style-type: none">- Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	DPUPR
5.1.3	Meningkatnya aksesibilitas perkotaan		Tujuan 9 Industri, Inovasi dan Infrastruktur	<ul style="list-style-type: none">- Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Llaj)	Dinas Perhubungan
5.1.4	Meningkatnya kualitas lingkungan permukiman		Tujuan 6 Air Bersih dan Sanitasi Layak	<ul style="list-style-type: none">- Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum- Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	DPUPR
				<ul style="list-style-type: none">- Program Pengembangan Perumahan- Program Kawasan Permukiman- Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh	Dinas Perumahan & Kawasan Permukiman
5.1.5	Terwujudnya lingkungan hidup yang berkualitas dan berkelanjutan		Tujuan 11 Kota dan Pemukiman yang Berkelanjutan	<ul style="list-style-type: none">- Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)- Program Pengelolaan Persampahan	DLH
5.2.1	Meningkatnya ketahanan terhadap bencana	Perwujudan keberdayaan masyarakat	Tujuan 13 Penanganan Perubahan Iklim	<ul style="list-style-type: none">- Program Penanggulangan Bencana	BPBD
				<ul style="list-style-type: none">- Program Pengelolaan Sumber Daya Air (Sda)- Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase- Program Penataan Bangunan Gedung- Program Pengembangan Jasa Konstruksi- Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	DPUPR
				<ul style="list-style-type: none">- Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup- Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)- Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Pplh)- Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	DLH

No	Sasaran Kota Magelang	Prioritas Tahun 2026	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	Program	Perangkat Daerah
5.2.2	Meningkatnya ketahanan pangan daerah		Tujuan 12 Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab	<ul style="list-style-type: none"> - Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat - Program Penanganan Kerawanan Pangan - Program Pengawasan Keamanan Pangan 	Dinas Pertanian & Pangan

Sumber: Tim Penyusun, 2025

4.4 SASARAN DAN PRIORITAS DALAM Mendukung TARGET PENGARUSUTAMAAN GENDER (PUG) DAN INKLUSI SOSIAL

Kebijakan pengarusutamaan gender di Kota Magelang tertuang dalam Peraturan Walikota Magelang Nomor 35 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pengarusutamaan Gender. Pemerintah berkomitmen untuk mewujudkan pembangunan yang berkesetaraan gender dan inklusif dengan memberikan kesempatan kepada perempuan dan laki-laki, anak, penyandang disabilitas, lansia, masyarakat adat, dan kelompok rentan lainnya. Kesempatan ini ditujukan untuk meningkatkan akses seluruh kelompok terhadap sumber daya, mendorong mereka berpartisipasi aktif dan bermakna dalam menyuarakan aspirasi dan kebutuhan serta terlibat dalam proses pengambilan keputusan, sehingga dapat memperoleh manfaat dari hasil pembangunan.

Pelaksanaan PUG dimaksudkan untuk memberikan landasan hukum dan pedoman kepada Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat yang responsif gender. Komitmen tersebut dilaksanakan melalui pengarusutamaan gender dan inklusi sosial (PUGIS). Pengarusutamaan gender dan inklusi sosial dilaksanakan sejalan dengan etika, moral, nilai budaya yang positif, serta norma agama, yang berlaku dan diikuti secara luas oleh masyarakat Indonesia. Pengintegrasian dalam pelaksanaan program untuk mendukung pengarusutamaan gender dan inklusi sosial dilakukan dalam proses penyusunan rencana kerja perangkat daerah, dimana setiap perangkat daerah menyiapkan program kegiatan yang akan disusun dengan strategi Pengarusutamaan Gender dan inklusi sosial yang didukung dengan menyusun *Gender Budget Statement* (GBS).

Berikut disampaikan sasaran dan prioritas serta program yang mendukung pengarusutamaan gender di Kota Magelang Tahun 2026.

Tabel 4.16 Dukungan Program terhadap Pengarusutamaan Gender Dan Inklusi Sosial di Kota Magelang

No	Sasaran	Prioritas	Indikator	Program	Perangkat Daerah
2.1.4	Meningkatnya kesetaraan gender, perlindungan terhadap anak dan perempuan	Perwujudan kesejahteraan masyarakat	Indeks Pembangunan Gender	Program Pengelolaan Pendidikan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
				Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Dinas Kesehatan
				Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	DPUPR
				Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	DPUPR
				Program Pengembangan Perumahan	Dinas Perumahan & Kawasan Permukiman
				Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	Satpol PP
				Program Penanggulangan Bencana	BPBD
				Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	Satpol PP

No	Sasaran	Prioritas	Indikator	Program	Perangkat Daerah
				Program Rehabilitasi Sosial	Dinas Sosial
				Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	Dinas Sosial
				Program Penanganan Bencana	Dinas Sosial
				Program perencanaan tenaga kerja	Dinas Tenaga Kerja
				Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	Dinas Tenaga Kerja
				Program Penempatan Tenaga Kerja	Dinas Tenaga Kerja
				Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	DPMP4KB
				Program Perlindungan Perempuan	DPMP4KB
				Program Peningkatan Kualitas Keluarga	DPMP4KB
				Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak	DPMP4KB
				Program Pemenuhan Hak Anak (Pha)	DPMP4KB
				Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Dinas Pertanian & Pangan
				Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	Dinas Lingkungan Hidup
				Program Pengelolaan Persampahan	Dinas Lingkungan Hidup
				Program Pendaftaran Penduduk	Disdukcapil
				Program Pencatatan Sipil	Disdukcapil
				Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	DPMP4KB
				Program Pengendalian Penduduk	DPMP4KB
				Program Pembinaan Keluarga Berencana (Kb)	DPMP4KB
				Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (Ks)	DPMP4KB
				Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Llaj)	Dinas Perhubungan
				Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik	Dinas Kominsta
				Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian	DPPKUM
				Program Pengembangan Ukm	DPPKUM
				Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Disporapar
				Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Disporapar
				Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Diskominsta
				Program Pengembangan Kebudayaan	Dinas Pendidikan & Kebudayaan
				Program Pengembangan Kesenian Tradisional	Dinas Pendidikan & Kebudayaan
				Program Pembinaan Perpustakaan	Dinas Perpustakaan & Arsip

No	Sasaran	Prioritas	Indikator	Program	Perangkat Daerah
				Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Dinas Pertanian & Pangan
				Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	Dinas Pertanian & Pangan
				Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	Disporapar
				Program Penyuluhan Pertanian	Dinas Pertanian & Pangan

Sumber: Tim Penyusun, 2025

4.5 SASARAN DAN PRIORITAS DALAM MENDUKUNG PENGARUSUTAMAAN KERENTANAN BENCANA DAN PERUBAHAN IKLIM

Penanggulangan bencana menjadi salah satu isu strategis dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Berdasarkan Metadata Indikator TPB Edisi II Tahun 2023, pengurangan risiko bencana termuat dalam Tujuan 1, Tujuan 11, dan Tujuan 13. Pada tujuan 13 langsung berfokus pada penanganan perubahan iklim. Sasaran dan prioritas daerah dalam mendukung pengarusutamaan kerentanan bencana dan perubahan iklim disajikan pada tabel berikut.

Tabel 4.17 Dukungan Program terhadap Kerentanan Bencana dan Perubahan Iklim

No	Sasaran	Prioritas	Indikator	Program	Perangkat Daerah
5.2.1	Meningkatnya ketahanan terhadap bencana	Perwujudan keberdayaan masyarakat	Indeks Ketahanan Daerah	Program Penanggulangan Bencana	BPBD
				Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	Satpol PP
				Program Penataan Bangunan Gedung	DPUPR
				Program Pengembangan Jasa Konstruksi	DPUPR
				Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	DPUPR
				Program Pengembangan Perumahan	Dinas Perkim
				Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh	Dinas Perkim
				Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)	Dinas Perkim
				Program Penanganan Bencana	Dinas Sosial
				Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	DLH
				Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	DLH
				Program Pengelolaan Persampahan	DLH

Sumber: Tim Penyusun, 2025

Dalam upaya pengurangan risiko bencana, peningkatan ketahanan daerah terus diupayakan untuk ditingkatkan. Beberapa kondisi terkait peningkatan ketahanan daerah sampai dengan tahun 2024 diantaranya:

- Kajian Risiko Bencana telah disusun tetapi masih ada proses revisi;
- Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) dengan periode 2019-2023 belum dilakukan pembaruan di tahun 2024;
- Rencana kontingensi telah disusun untuk cuaca ekstrem dan tanah longsor di tahun 2023, dan tahun 2025 dilakukan penyusunan rencana kontingensi sebanyak 2 dokumen;

- Pembinaan kelurahan Tangguh bencana untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menghadapi bencana.

4.6 SASARAN DAN PRIORITAS DALAM MENDUKUNG PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal sebagaimana telah diubah dalam amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM).

Penerapan SPM dimaksudkan untuk menjamin hak masyarakat menerima pelayanan dasar dengan mutu tertentu, menjadi salah satu dasar penentuan kebutuhan pembiayaan daerah dan menentukan anggaran berbasis kinerja serta mendorong transparansi dan partisipasi masyarakat dalam proses penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar yang selanjutnya menjadi jenis SPM terdiri atas:

1. Bidang Pendidikan;
2. Bidang Kesehatan;
3. Bidang Pekerjaan Umum;
4. Bidang Perumahan Rakyat;
5. Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat; dan
6. Bidang Sosial.

Upaya pemenuhan SPM dilaksanakan melalui beberapa program di perangkat daerah. Program yang mendukung terlaksananya pemenuhan SPM sebagaimana tersebut dalam tabel berikut:

Tabel 4.18 Dukungan Program terhadap Pencapaian Standar Pelayanan Minimal

No	Bidang SPM/ Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Sasaran	Prioritas Pembangunan	Program
1	Bidang Pendidikan				
1.1	Pendidikan Anak Usia Dini	Jumlah Warga Negara Usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	Meningkatnya kualitas pendidikan dan literasi untuk masyarakat berdaya saing	<ul style="list-style-type: none">• Perwujudan kesejahteraan masyarakat• Perwujudan keberdayaan masyarakat	<ul style="list-style-type: none">• Program Pengelolaan Pendidikan• Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan
1.2	Pendidikan Dasar	Jumlah Warga Negara Usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar			
1.3	Pendidikan Kesetaraan	Jumlah Warga Negara Usia 7-18 Tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan			
2	Bidang Kesehatan				
2.1	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah ibu hamil yang mendapatkan layanan kesehatan	Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat	Perwujudan kesejahteraan masyarakat	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat
2.2	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan layanan kesehatan			
2.3	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan layanan kesehatan			
2.4	Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah balita yang mendapatkan layanan kesehatan			

No	Bidang SPM/ Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Sasaran	Prioritas Pembangunan	Program
2.5	Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah warga negara usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan			
2.6	Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah warga negara usia produktif yang mendapatkan layanan kesehatan			
2.7	Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah warga negara usia lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan			
2.8	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah warga negara penderita hipertensi yang mendapatkan layanan kesehatan			
2.9	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah warga negara penderita diabetes melitus yang mendapatkan layanan kesehatan			
2.10	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah warga negara dengan gangguan jiwa berat yang mendapatkan layanan kesehatan			
2.11	Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah warga negara terduga tuberkulosis yang mendapatkan layanan kesehatan			
2.12	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi Virus yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (<i>Human Immunodeficiency Virus</i>)	Jumlah warga negara dengan Risiko Terinfeksi Virus yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (<i>Human Immunodeficiency Virus</i>) yang mendapatkan layanan kesehatan			
3	Bidang Pekerjaan Umum				
3.1	Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari	Jumlah Warga Negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari	Meningkatnya kualitas infrastruktur kota	Perwujudan ruang kota layak huni	<ul style="list-style-type: none">• Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum• Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah
3.2	Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik			
4	Bidang Perumahan Rakyat				
4.1	Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	Meningkatnya kualitas lingkungan permukiman	Perwujudan ruang kota layak huni	<ul style="list-style-type: none">• Program Pengembangan Perumahan• Program Kawasan Permukiman
4.2	Fasilitasi Penyediaan Rumah Yang Layak Huni Bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Warga Negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah Kabupaten Kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni			
5	Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat				
5.1	Pelayanan ketentraman dan ketertiban umum	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkara	<ul style="list-style-type: none">• Meningkatnya ketenteraman dan ketertiban umum• Meningkatnya ketahanan terhadap bencana	Perwujudan keberdayaan masyarakat	<ul style="list-style-type: none">• Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum• Program Penanggulangan Bencana
5.2	Pelayanan informasi rawan bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana			

No	Bidang SPM/ Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Sasaran	Prioritas Pembangunan	Program
5.3	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana			<ul style="list-style-type: none">• Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran
5.4	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana			
5.5	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran			
6	Bidang Sosial				
6.1	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti	Jumlah Warga Negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	Meningkatnya kesejahteraan pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial	Perwujudan kesejahteraan masyarakat	<ul style="list-style-type: none">• Program Rehabilitasi Sosial• Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial• Program Pemberdayaan Sosial• Program Penanganan Bencana
6.2	Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar diluar panti	Jumlah anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti			
6.3	Rehabilitasi Sosial Dasar lanjut usia terlantar di luar panti	Jumlah Warga Negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti			
6.4	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti	Jumlah Warga Negara/ gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial diluar panti			
6.5	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap dan paska bencana bagi korban bencana kab/kota	Jumlah Warga Negara korban bencana kab/kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial			

Sumber: Tim Penyusun, 2025

4.7 SASARAN DAN PRIORITAS DALAM MENDUKUNG PENCAPAIAN TRANSFORMASI DIGITAL

Transformasi digital menjadi salah satu pengarusutamaan dalam RPJMN Tahun 2025-2029. Pengarusutamaan digital dilakukan melalui (1) meningkatkan akses dan kualitas pelayanan telekomunikasi dan digital; (2) mendorong pembangunan dan penguatan pusat data beserta ekosistemnya; (3) meningkatkan kualitas sumber daya manusia digital serta kegiatan dan pemanfaatan riset; (4) mendorong pendataan terpadu, pemanfaatan data, dan adopsi digital (termasuk aplikasi dan superapps), serta literasi digital secara luas; (5) membangun kedaulatan digital dengan meningkatkan keamanan dan perlindungan data pribadi serta mewujudkan ruang digital yang kondusif; (6) mendorong penguatan industri teknologi informasi dan komunikasi dalam negeri; dan (7) membangun dan mengembangkan tata kelola yang dapat menciptakan dan mengembangkan ekosistem digital yang kondusif bagi masyarakat, dunia usaha dan pemerintah. Transformasi digital di Kota Magelang dilakukan dengan arah kebijakan berupa penguatan data daerah dalam rencana aksi satu data, penguatan tata kelola pemerintahan, perwujudan layanan publik digital serta ekonomi digital. Perwujudan transformasi digital Kota Magelang berpedoman pada Peraturan Wali Kota Magelang Nomor 18 Tahun 2024 tentang Pedoman Manajemen Layanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Transformasi digital di Kota Magelang antara lain terwujud dalam kebijakan Satu Data Indonesia (SDI) Kota Magelang, Mall Pelayanan Publik Digital, serta inovasi pelayanan publik dengan pemanfaatan sistem informasi berbasis online.

Satu Data Indonesia (SDI) Kota Magelang merupakan wujud kebijakan daerah dalam mendukung terselenggaranya data terpadu daerah yang menjadi masukan dalam perumusan kebijakan dan sebagai informasi kepada masyarakat. SDI Kota Magelang sebagai transformasi digital yang mendukung penguatan data

daerah diwujudkan dalam portal DataGo Kota Magelang yang dapat diakses oleh masyarakat luas. Program yang mendukung tercapainya transformasi digital sebagaimana tersebut dalam tabel berikut:

Tabel 4.19 Dukungan Program terhadap Pencapaian Transformasi Digital

No	Sasaran	Prioritas	Indikator	Program	Perangkat Daerah
3.1.2	Menciptakan birokrasi yang kapabel	Perwujudan kesejahteraan masyarakat	Indeks SPBE	Program Aplikasi Informatika	Diskominsta
				Program Informasi dan Komunikasi Publik	Diskominsta
				Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Diskominsta
				Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	Diskominsta

Sumber: Tim Penyusun, 2025

BAB 5

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Rencana Kerja Pemerintah Daerah adalah Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Rencana Kerja adalah dokumen rencana yang memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan. Pendanaan daerah merupakan pemanfaatan sumber-sumber dana yang digunakan dalam pembangunan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam upaya mencapai Visi Misi Kepala Daerah serta dukungan pencapaian target pembangunan Provinsi dan target pembangunan Nasional.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Magelang Tahun 2026 memuat program-program prioritas yang akan dilaksanakan oleh perangkat daerah yang berfungsi sebagai pelaksana urusan daerah yang meliputi urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, urusan pemerintahan pilihan, serta urusan pendukung urusan pemerintahan. Pelaksanaannya didukung dengan pelaksanaan program yang dilaksanakan oleh perangkat daerah yang merupakan unsur pendukung dan unsur penunjang urusan pemerintahan.d

Program prioritas merupakan program utama yang harus diutamakan untuk dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan *outcome* yang mendukung capaian indikator kinerja program pembangunan daerah yang dilaksanakan tahun 2026 dalam upaya mencapai VISI Kepala Daerah yang tertuang dalam RPJMD Kota Magelang Tahun 2025-2029.

5.1 RENCANA KERJA

Dengan mengacu pada Permendagri 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang telah dimutakhirkan terakhir melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang Hasil Verifikasi Validasi; Implementasi program, kegiatan, dan sub kegiatan adalah dengan memperhatikan urgensi dan kapasitas kemampuan keuangan daerah sehingga penjabaran program dibedakan menjadi tiga prioritas, yaitu:

1. Prioritas I, merupakan program prioritas pembangunan daerah Tahun 2026 sesuai dengan pentahapan perencanaan tahun kelima yang merupakan tahun terakhir RPJMD Tahun 2025-2029, program unggulan kepala daerah, kesepakatan hasil musrenbang sebagaimana tertuang dalam Berita Acara, hasil telaahan terhadap Pokok-Pokok Pikiran DPRD, Forum Konsultasi Publik, Program Intervensi yang bersifat kebijakan, isu global, isu Nasional, Isu Provinsi, dan hasil-hasil Konsultasi Publik serta *Focused Group Discussion* (FGD).
2. Prioritas II, merupakan program daerah dalam rangka pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan daerah Tahun 2026 sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kota Magelang Tahun 2025-2029.
3. Prioritas III, merupakan prioritas program yang dilaksanakan Perangkat Daerah yang berhubungan dengan permasalahan pelayanan tugas fungsi sesuai urusan, bidang urusannya, atau sebagai unsur pendukung atau unsur penunjang pelaksanaan pemerintahan.

5.1.1 Dukungan Program RKPD Kota Magelang Tahun 2026 terhadap Prioritas Nasional dan Arah Kebijakan RKP 2026

Prioritas rencana pembangunan daerah wajib selaras dengan prioritas pembangunan nasional. Diketahui Tema RKP pada 2026 adalah "*Kedaulatan Pangan dan Energi serta Ekonomi yang Produktif dan Inklusif*". Dukungan program dan anggaran pada RKPD Kota Magelang Tahun 2026 terhadap prioritas Nasional RKP 2026 dijabarkan dalam tabel berikut.

Tabel 5.1 Rekapitulasi Dukungan Program dan Anggaran Terhadap Prioritas Nasional tahun 2026

No	Prioritas Nasional RKP Tahun 2026	Arah Kebijakan	Jumlah Program Mendukung	Pagu Anggaran (Rp)	Presentase Program	Perangkat Daerah
1.	Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi dan Hak Asasi Manusia (HAM)	Penguatan wawasan ideologi Pancasila di kalangan penyelenggara negara	12	15,753,247,750.00	4.45	Kecamatan Kesbangpol Dinsos DPM4KB
		Pengembangan wawasan kebangsaan Indonesia sebagai masyarakat plural melalui praktik pembelajaran multikulturalisme				
		Melindungi hak asasi manusia seluruh warga negara dan menghapus praktik diskriminasi sesuai dengan tata aturan yang berlaku				
		memperkuat perlindungan perempuan dan anak serta memperkuat penegakan hukumnya				
		Memberikan jaminan pemenuhan hak dasar masyarakat bagi fakir miskin, anak terlantar, lansia, penyandang disabilitas, kelompok rentan, dan marginal lainnya				
		Transformasi layanan akses terhadap keadilan terutama dan tidak terbatas bagi kelompok rentan				
2.	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Ene.rgi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau dan Ekonomi Biru	Penguatan keamanan negara	23	59,563,058,003.00	16.82	Disperta DLH DPUPR Satpol PP Kecamatan Kesbangpol Bapperida
		Swasembada pangan				
		Pekerjaan Hijau				
3.	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Melanjutkan pembangunan infrastruktur	28	28,571,008,631.00	8.07	DPPKUM Disnaker DPMP4KB Disperta Disporapar DPUPR Disperkim Dishub
		Mendorong kewirausahaan untuk menciptakan lapangan kerja seluas-luasnya				
		Mengembangkan industri kreatif				
		Penguatan Koperasi				
4.	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesenian, Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (generasi milenial dan generasi z), dan Penyandang Disabilitas	Memperkuat Sistem Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	17	85,137,166,430.00	24.04	Kecamatan Disporapar Disperpusip DPMP4KB Dinsos Dinkes Disdikbud
		Memperkuat Pendidikan, Sains, dan Teknologi				
		Memperkuat Sistem Kesehatan Nasional				
		Menguatkan Peran Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas				
		Meningkatkan Prestasi Olahraga				

No	Prioritas Nasional RKP Tahun 2026	Arah Kebijakan	Jumlah Program Mendukung	Pagu Anggaran (Rp)	Presentase Program	Perangkat Daerah
5.	Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	Pengembangan hilirisasi sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru	13	13,784,060,054.00	3.89	DPPKUM Disnaker DPMPTSP Disporapar DPPKUM
		Penguatan industri padat karya berkelanjutan, industri dasar, dan industri strategis nasional				
		Pengembangan integrasi ekonomi domestik dan global				
6.	Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi dan Pembebasan Kemiskinan	Membangun desa dan membangun dari desa;	13	98,480,215,147.00	27.80	Disdikbud Dinsos Dinkes Kecamatan DPMP4KB Disperkim
		Pemerataan ekonomi				
		Memberantas kemiskinan				
7.	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pembeantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	Reformasi hukum	9	23,228,725,313.00	6.56	Satpol PP Diskominsta BPKAD Inspektorat
		Reformasi tata kelola pemerintahan				
8.	Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur	Masyarakat adil, makmur, dan harmonis	19	29,685,499,792.00	8.38	Kecamatan DLH DPUPR Kesbangpol Disdikbud DPM4KB BPBD
		Melestarikan budaya				
		Penanganan bencana				
	Jumlah		123	354,202,981,120.00	100	

Sumber: diolah tim penyusun RKPD, 2025

Rincian program, kegiatan dan pagu anggaran dalam RKPD Kota Magelang Tahun 2026 yang mendukung masing-masing Prioritas Nasional dalam RKP Tahun 2026, sebagaimana diuraikan dalam tabel-tabel berikut ini:

Tabel 5.2 Dukungan Program-Kegiatan Pemerintah Kota Magelang terhadap Prioritas Nasional 1: Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi dan Hak Asasi Manusia (HAM)

Prioritas RKPD Kota Magelang 2026	Program	Indikator	Target	Kegiatan	Anggaran (Rp)	Perangkat Daerah
<ul style="list-style-type: none"> Penguatan ketahanan daerah dan sosial budaya Masyarakat Perwujudan layanan publik prima Pemantapan peran masyarakat sebagai mitra 	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Cakupan program koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	100%	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum (KMS)	539,374,400.00	Kecamatan
				Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum (KMU)	433,052,250.00	Kecamatan
				Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum (KMT)	710,338,890.00	Kecamatan
	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Jumlah Konflik Sosial	0	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	611,922,900.00	Badan Kesbangpol
	Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	Persentase Pembinaan Wawasan Kebangsaan	80%	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	1,282,488,110.00	Badan Kesbangpol
	Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Persentase Penduduk Usia Pemilih Pemula yang Berpartisipasi dalam Agenda Politik	12,51%	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	1,225,690,500.00	Badan Kesbangpol
	Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Persentase Organisasi Kemasyarakatan yang Diberdayakan	81,30%	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	313,703,200.00	Badan Kesbangpol
		Persentase Organisasi Kemasyarakatan yang Aktif	88,62%			
	Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	Persentase Pembinaan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	12,23%	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	364,023,400.00	Badan Kesbangpol
	Program Perlindungan Perempuan	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)*	53,77%	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	161,735,840.00	DPM4KB
	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Persentase capaian 4 (empat) kluster pemenuhan hak anak	73,08%	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	212,083,200.00	DPM4KB
	Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	Persentase PMKS yang menerima bantuan	100%	Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar	159,309,600.00	DINSOS
				Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	3,395,313,640.00	DINSOS

Prioritas RKPD Kota Magelang 2026	Program	Indikator	Target	Kegiatan	Anggaran (Rp)	Perangkat Daerah
	Program Pemberdayaan Sosial	Persentase PSKS yang diberdayakan	91,67%	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	196,246,710.00	DINSOS
	Program Rehabilitasi Sosial	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang mendapatkan rehabilitasi	100,00%	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	4,323,533,070.00	DINSOS
				Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	568,017,240.00	
				Jumlah	15,753,247,750.00	

Sumber: diolah tim penyusun RKPD, 2025

Tabel 5.3 Dukungan Program-Kegiatan Pemerintah Kota Magelang terhadap Prioritas Nasional 2: Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau dan Ekonomi Biru.

Prioritas RKPD Kota Magelang 2026	Program	Indikator	Target	Kegiatan	Anggaran (Rp)	Perangkat Daerah
<ul style="list-style-type: none"> Pemantapan kesejahteraan Masyarakat Pemantapan peran masyarakat sebagai mitra Pemantapan perlindungan sosial dalam penanganan fakir miskin Percepatan peningkatan kontribusi sektor unggulan dalam perekonomian daerah Penguatan perwujudan ruang kota layak huni Penguatan ketahanan daerah dan sosial budaya Masyarakat Pemantapan layanan publik prima Pemantapan daya saing daerah 	Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	Persentase Pembinaan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	12.23%	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	364,023,400.00	Badan Kesbangpol
	Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	Jumlah total produksi olahan perikanan (ton)	240	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	40,303,800.00	Dinas Pertanian dan Pangan
				Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	228,110,410.00	Dinas Pertanian dan Pangan
	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Persentase Peningkatan prasarana Peternakan	12.50%	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	1,015,505,100.00	Dinas Pertanian dan Pangan
				Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota	157,738,800.00	Dinas Pertanian dan Pangan
	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Persentase Peningkatan prasarana Peternakan	12.50%	Pembangunan Prasarana Pertanian	199,073,290.00	Dinas Pertanian dan Pangan
	Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Persentase luasan lahan bencana pertanian yang tertangani	86.00%	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	25,556,300.00	Dinas Pertanian dan Pangan

Prioritas RKPD Kota Magelang 2026	Program	Indikator	Target	Kegiatan	Anggaran (Rp)	Perangkat Daerah
	Program Perizinan Usaha Pertanian	Persentase peningkatan kelayakan usaha peternakan dan kesehatan hewan yang diawasi pelaksanaannya secara berkala	100.00%	Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	34,782,670.00	Dinas Pertanian dan Pangan
	Program Penyuluhan Pertanian	Persentase kelompok tani yang meningkat kapasitasnya	13,33%	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	37,237,200.00	Dinas Pertanian dan Pangan
		Persentase kelompok tani yang naik kelas	80,00%			
	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Presentase sarana distribusi perdagangan dalam kondisi baik	85.71%	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	3,318,322,456.00	DPPKUM
				Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	1,249,350,530.00	
	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	Persentase koefisien variasi harga antar waktu	8%	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	48,712,900.00	DPPKUM
	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Preentase Ketersediaan Pangan	100%	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	108,707,820.00	Dinas Pertanian dan Pangan
				Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	99,717,500.00	
				Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	110,232,600.00	
	Program Penanganan Kerawanan Pangan	Persentase Penanganan Daerah Rentan Rawan Pangan	100.00%	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	44,394,800.00	Dinas Pertanian dan Pangan
	Program Pengawasan Keamanan Pangan	Persentase Pangan Segar yang Aman	88.48%	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	69,333,390.00	Dinas Pertanian dan Pangan
	Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Persentase ketersediaan data pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan	100%	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	236,958,100.00	Dinas Lingkungan Hidup
				Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	88,150,000.00	
	Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Persentase ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan	50.00%	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	63,817,900.00	Dinas Lingkungan Hidup

Prioritas RKPD Kota Magelang 2026	Program	Indikator	Target	Kegiatan	Anggaran (Rp)	Perangkat Daerah
	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Persentase peningkatan lembaga masyarakat dan lembaga pendidikan yang mengikuti pendidikan pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup	22.22%	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	203,130,200.00	Dinas Lingkungan Hidup
	Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Persentase cakupan penghargaan yang diterima masyarakat	18.23%	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	210,421,600.00	Dinas Lingkungan Hidup
	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Persentase pengaduan kasus lingkungan hidup yang terselesaikan	100.00%	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	10,999,500.00	Dinas Lingkungan Hidup
	Program Pengelolaan Persampahan	Peningkatan persentase sampah yang terkelola	2.50%	Pengelolaan Sampah	8,806,974,199.00	Dinas Lingkungan Hidup
				Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Sampah yang Diselenggarakan oleh Pihak Swasta	7,382,000.00	Dinas Lingkungan Hidup
	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Persentase Panjang Jaringan Irigasi yang Kondisi Baik	81.00%	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	1,215,171,562.00	DPUPR
	Program Peningkatan Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Persentase penyelesaian pelanggaran perda	100.00%	Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	2,899,173,426.00	Satpol PP
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Cakupan program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	100.00%	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan (KMS)	11,466,022,626.00	Kecamatan
				Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan (KMU)	12,004,536,788.00	
				Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan (KMT)	13,951,098,236.00	
	Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Tingkat Implementasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	100.00%	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	415,108,100.00	Bapperida
		Tingkat Implementasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA	100.00%	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	137,927,500.00	
		Tingkat Implementasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	100.00%	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	114,233,400.00	
	Program Perekonomian Dan Pembangunan	Persentase progres fisik seluruh OPD	99.49%	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	297,804,400.00	Setda
		Persentase Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan di Bidang	100.00%	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	228,203,000.00	

Prioritas RKPD Kota Magelang 2026	Program	Indikator	Target	Kegiatan	Anggaran (Rp)	Perangkat Daerah
		Perekonomian dan SDA yang dilaksanakan				
		Tingkat kematangan UKPBJ	3			
				Jumlah	59,563,058,003.00	

Sumber: diolah tim penyusun RKPD, 2025

Tabel 5.4 Dukungan Program-Kegiatan Pemerintah Kota Magelang terhadap Prioritas Nasional 3: Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi

Prioritas RKPD Kota Magelang 2026	Program	Indikator	Target	Kegiatan	Anggaran (Rp)	Perangkat Daerah
<ul style="list-style-type: none"> Pemantapan kesejahteraan Masyarakat Percepatan peningkatan kontribusi sektor unggulan dalam perekonomian daerah Penguatan perwujudan ruang kota layak huni Pemantapan daya saing daerah 	Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Persentase koperasi aktif yang patuh terhadap perundang-undangan	53.75%	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	30,699,200.00	DPPKUM
	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)	Persentase wirausaha pemula yang diberdayakan	60,34%	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	1,517,685,300.00	DPPKUM
	Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase tenaga kerja bersertifikat kompetensi	95.25%	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	2,432,211,700.00	Dinas Tenaga kerja
		Persentase angkatan kerja yang mengikuti pelatihan kerja	80.00%	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	4,291,000.00	
	Program Penempatan Tenaga Kerja	Persentase pencari kerja yang mendapatkan fasilitasi penempatan kerja	87,27%	Pelayanan Antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	1,375,349,102.00	Dinas Tenaga kerja
		Persentase peserta pelatihan yang menjalankan wirausaha	75.00%	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	75,424,700.00	Dinas Tenaga kerja
	Program Hubungan Industrial	Persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)	50.00%	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	570,729,400.00	Dinas Tenaga kerja
	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Persentase Investor PMA/PMDN	100.00%	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Di Bidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	9,868,600.00	DPMPTSP
				Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	72,852,300.00	

Prioritas RKPD Kota Magelang 2026	Program	Indikator	Target	Kegiatan	Anggaran (Rp)	Perangkat Daerah
	Program Promosi Penanaman Modal	Persentase LOI yang ditindaklanjuti	100.00%	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	156,695,170.00	DPMPTSP
	Program Pelayanan Penanaman Modal	Persentase Penerbitan Perizinan dan Non Perizinan yang sesuai dengan SOP	98.82%	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu bidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	371,950,820.00	DPMPTSP
	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Persentase Pelaku Usaha yang memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku	35.00%	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	45,673,470.00	DPMPTSP
	Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Persentase pertumbuhan pemanfaatan data, informasi, dan Sistem Informasi PM	100.00%	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	21,209,600.00	DPMPTSP
	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Persentase peningkatan produksi perikanan budidaya	1.25	Pemberdayaan Pembudidaya Ikan Kecil	225,283,300.00	Dinas Pertanian dan Pangan
				Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	229,040,296.00	
	Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	Jumlah total produkso olahan perikanan	240	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	40,303,800.00	Dinas Pertanian dan Pangan
				Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	228,110,410.00	
	Program Pemasaran Pariwisata	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara	27,20%	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	1,068,345,300.00	Disporapar
		Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke kota	14,71%			
	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	Presentase SDM pariwisata yang meningkat kapasitasnya	7,86%	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	183,919,900.00	Disporapar
		Presentase peningkatan pelaku ekonomi kreatif yang meningkat kapasitasnya	66,67%			
	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Presentase sarana pembibitan yang terpelihara	73.51%	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	31,244,400.00	Dinas Pertanian dan Pangan
		Presentase peningkatan sarana peternakan	142.50%	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	1,015,505,100.00	Dinas Pertanian dan Pangan
				Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota	157,738,800.00	

Prioritas RKPD Kota Magelang 2026	Program	Indikator	Target	Kegiatan	Anggaran (Rp)	Perangkat Daerah
	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Persentase Peningkatan prasarana Peternakan	12,50%	Pembangunan Prasarana Pertanian	199,073,290.00	Dinas Pertanian dan Pangan
	Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Presentase penurunan jumlah kasus penyakit hewan	6.30%	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota	39,944,500.00	Dinas Pertanian dan Pangan
				Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota	76,079,670.00	
		Presentase peningkatan produk pangan asal hewan yang ASUH	2.20%	Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	307,689,822.00	
				Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	240,157,800.00	
				Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesejahteraan Hewan	10,249,200.00	
	Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Presentase luasan lahan bencana petanian yang tertangani	86.00%	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	25,556,300.00	Dinas Pertanian dan Pangan
	Program Perizinan Usaha Pertanian	Persentase peningkatan kelayakan usaha peternakan dan kesehatan hewan yang diawasi pelaksanaannya secara berkala	10.00%	Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahnya dalam Daerah Kabupaten/Kota	34,782,670.00	Dinas Pertanian dan Pangan
	Program Penyuluhan Pertanian	Presentase kelompok tani yang meningkat kapasitasnya	13.33%	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	37,237,200.00	Dinas Pertanian dan Pangan
		Presentasi kelompok tani yang naik kelas	80.00%			
	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Presentase sarana distribusi perdagangan dalam kondisi baik	85.71%	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	3,318,322,456.00	DPPKUM
				Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	1,249,350,530.00	
	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	Persentase koefisien variasi harga antar waktu	8.00%	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	48,712,900.00	DPPKUM
	Program Pengembangan Ekspor	Nilai ekspor	3.113.000	Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	443,146,840.00	DPPKUM

Prioritas RKPD Kota Magelang 2026	Program	Indikator	Target	Kegiatan	Anggaran (Rp)	Perangkat Daerah
	Program Standarisasi Dan Perlindungan Konsumen	Persentase Alat-alat Ukur, Alat Timbang dan Perlengkapan (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	98.93%	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	176,829,860.00	DPPKUM
	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah	8.73%	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	1,310,180,706.00	DPPKUM
	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Persentase Perwujudan Kesesuaian Pemanfaatan Ruang	83.34%	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	94,802,000.00	DPUPR
				Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	198,079,500.00	
	Program Penatagunaan Tanah	Presentase luas lahan bersertifikat	100.00%	Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota	189,657,000.00	Dinas Perumahan dan Permukiman
	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Kinerja lalu lintas kota (VC Ratio)	0.75	Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	20,849,500.00	Dinas Perhubungan
		Pengguna moda transportasi umum perkotaan (PPTUK)	8.29%	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	6,681,939,648.00	
				Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	296,465,970.00	
				Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	1,769,228,791.00	
				Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	423,793,200.00	
				Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	1,337,255,960.00	
				Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota	7,382,200.00	
Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan				28,260,050.00		
Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				91,128,500.00		
Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota				10,962,900.00		
Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	16,159,900.00					

Prioritas RKPD Kota Magelang 2026	Program	Indikator	Target	Kegiatan	Anggaran (Rp)	Perangkat Daerah
				Jumlah	28,571,008,631.00	

Sumber: diolah tim penyusun RKPD, 2025

Tabel 5.5 Dukungan Program-Kegiatan Pemerintah Kota Magelang terhadap Prioritas Nasional 4: Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesenjangan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas

Prioritas RKPD Kota Magelang 2026	Program	Indikator	Target	Kegiatan	Anggaran (Rp)	Perangkat Daerah
<ul style="list-style-type: none">• Pemantpan kesejahteraan Masyarakat• Pemantapan peran Masyarakat sebagai mitra• Pemantapan perlindungan social dalam penanganan fakir miskin• Pemantapan pelayanan publik	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Cakupan program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	100.00%	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan (KMS)	11,466,022,626.00	Kecamatan
				Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan (KMU)	12,004,536,788.00	
				Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan (KMT)	13,951,098,236.00	
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Cakupan program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100.00%	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (KMS)	4,999,900.00	Kecamatan
				Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (KMU)	1,860,900.00	
				Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (KMT)	4,999,900.00	
	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Persentase organisasi kepemudaan yang dikembangkan	88.64%	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota. Wirausaha Muda Pemula. dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	1,087,101,500.00	Disporapar
		Persentase peningkatan pemuda yang dibina	11.23%	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	150,000,000.00	
	Program Pembinaan Perpustakaan	Persentase pemerataan layanan perpustakaan	64,06%	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	530,139,760.00	Disperpusip
		Rasio ketercukupan koleksi perpustakaan	51,25%	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	156,554,200.00	
		Rasio ketercukupan tenaga perpustakaan	70,91%			
		Persentase peningkatan kunjungan masyarakat ke perpustakaan	100%			
		Persentase Perpustakaan ber-SNP	55,00%			
		Persentase peningkatan keterlibatan masyarakat dalam kegiatan perpustakaan	34,85%			

Prioritas RKPD Kota Magelang 2026	Program	Indikator	Target	Kegiatan	Anggaran (Rp)	Perangkat Daerah
		Persentase peningkatan anggota perpustakaan	32,67%			
	Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Persentase anggota keluarga tribina, UPPKS yang ber-KB	73.50%	Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	129,995,063.00	DPMP4KB
				Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	43,205,500.00	
	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Persentase capaian 4 (empat) kluster pemenuhan hak anak	73.08%	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	212,083,200.00	DPMP4KB
	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	Persentase kelurahan yang lembaga masyarakatnya diberdayakan	100%	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	252,143,300.00	DPMP4KB
	Program Pemberdayaan Sosial	Presentase PSKS yang diberdayakan	91.67%	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	196,246,710.00	Dinsos
	Program Rehabilitasi Sosial	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang mendapatkan rehabilitasi	100%	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar. Anak Terlantar. Lanjut Usia Terlantar. serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	4,323,533,070.00	Dinsos
				Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	568,017,240.00	
	Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	Presentase PSKS yang menerima bantuan	100%	Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar	159,309,600.00	Dinsos
				Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	3,395,313,640.00	
	Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	Persentase program perangkat daerah yang responsif gender	18,13 %	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	91,481,600.00	DPMP4KB
		Persentase perempuan kepala keluarga dan perempuan rentan terlatih dalam perekonomian keluarga	23,85 %	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik. Hukum. Sosial. dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	176,068,600.00	
		Persentase proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPRD	24%	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	988,864,600.00	
		Persentase lembaga yang anggotanya diberdayakan	22,22%			

Prioritas RKPD Kota Magelang 2026	Program	Indikator	Target	Kegiatan	Anggaran (Rp)	Perangkat Daerah
	Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak	Persentase PD yang mengelola data gender dan anak	39,29%	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	11,312,100.00	DPMP4KB
	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Persentase kelurahan siaga aktif strata mandiri	100%	Advokasi. Pemberdayaan. Kemitraan. Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	6,388,800.00	Dinkes
				Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	4,000,000.00	
				Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	4,928,000.00	
	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Cakupan penemuan dan pengobatan penyakit menular	100%	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	5,272,045,750.00	Dinkes
		Cakupan penemuan dan pengendalian penyakit tidak menular	100%	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	18,412,099,165.00	
		Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	100%	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	-	
		Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	100%	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	508,719,300.00	
		Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	100%			
		Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100%			
		Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	100%			
		Persentase Ketersediaan Obat yang Sesuai Standar	100%			
		Persentase Pemenuhan Fasilitas Kesehatan Sesuai Standar	100%			
		Indeks Keluarga Sehat	0,80			
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Persentase sumber daya manusia kesehatan yang memenuhi standar (sertifikat kompetensi)	100.00%	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	53,502,670.00	Dinkes
				Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota	9,459,900.00	

Prioritas RKPD Kota Magelang 2026	Program	Indikator	Target	Kegiatan	Anggaran (Rp)	Perangkat Daerah
				Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	24,164,800.00	Dinas Pendidikan dan kebudayaan
	Program Pengelolaan Pendidikan	APK PAUD	100,00%	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	4,208,220,964.00	
		APM SD/ MI	100,00%	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	3,669,495,008.00	
		APK SD/ MI	100,00%	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	2,406,948,430.00	
		Angka Putus Sekolah SD/MI	0,00%	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	557,490,810.00	
		APM SMP/MTs	100,00%			
		APK SMP/MTs	100,00%			
		Angka Putus Sekolah SMP/MTs	0,00%			
		Angka Kelulusan Warga Belajar Pendidikan Kesetaraan	100,00%			
		Persentase Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Terakreditasi	99,21%			
		Persentase SD Terakreditasi	100,00%			
		Persentase SMP Terakreditasi	100,00%			
		Persentase Satuan Pendidikan Kesetaraan Terakreditasi	100,00%			
	Program Pengembangan Kurikulum	Persentase satuan pendidikan yang mengembangkan kurikulum	100.00%	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	94,814,800.00	
				Jumlah	85,137,166,430.00	

Sumber: diolah tim penyusun RKPD, 2025

Tabel 5.6 Dukungan Program-Kegiatan Pemerintah Kota Magelang terhadap Prioritas Nasional 5: Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri

Prioritas RKPD Kota Magelang 2026	Program	Indikator	Target	Kegiatan	Anggaran (Rp)	Perangkat Daerah
Percepatan peningkatan kontribusi sektor unggulan dalam perekonomian daerah	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)	Persentase wirausaha pemula yang diberdayakan	60,34%	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	1,517,685,300.00	DPPKUM
	Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase tenaga kerja bersertifikat kompetensi	95,25%	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	2,432,211,700.00	

Prioritas RKPD Kota Magelang 2026	Program	Indikator	Target	Kegiatan	Anggaran (Rp)	Perangkat Daerah
		Persentase angkatan kerja yang mengikuti pelatihan kerja	80,00%	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	4,291,000.00	Dinas Tenaga Kerja
	Program Penempatan Tenaga Kerja	Persentase pencari kerja yang mendapatkan fasilitasi penempatan kerja	87,27%	Pelayanan Antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	1,375,349,102.00	Dinas Tenaga Kerja
		Persentase peserta pelatihan yang menjalankan wirausaha	75,00%	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	75,424,700.00	
	Program Hubungan Industrial	Persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)	50.00%	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	570,729,400.00	Dinas Tenaga Kerja
	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Persentase Investor PMA/PMDN	100.00%	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Di Bidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	9,868,600.00	DPMP TSP
				Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	72,852,300.00	
	Program Promosi Penanaman Modal	Persentase LOI yang ditindaklanjuti	100.00%	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	156,695,170.00	DPMP TSP
	Program Pelayanan Penanaman Modal	Persentase Penerbitan Perizinan dan Non Perizinan yang sesuai dengan SOP	98.82%	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu bidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	371,950,820.00	DPMP TSP
	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Persentase Pelaku Usaha yang memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku	35.00%	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	45,673,470.00	DPMP TSP
	Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Persentase pertumbuhan pemanfaatan data, informasi, dan Sistem Informasi PM	100,00%	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	21,209,600.00	DPMP TSP
	Program Pemasaran Pariwisata	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara	27,20%	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	1,068,345,300.00	Disporapar
		Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke kota	14,71%			
	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	Presentase SDM pariwisata yang meningkat kapasitasnya	7,86%	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	183,919,900.00	Disporapar
		Presentase peningkatan pelaku ekonomi kreatif yang meningkat kapasitasnya	66,67%			
	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Presentase sarana distribusi perdagangan dalam kondisi baik	85.71%	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	3,318,322,456.00	DPPKUM

Prioritas RKPD Kota Magelang 2026	Program	Indikator	Target	Kegiatan	Anggaran (Rp)	Perangkat Daerah
				Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	1,249,350,530.00	
	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah	8.73%	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	1,310,180,706.00	DPPKUM
				Jumlah	13,784,060,054.00	55

Sumber: diolah tim penyusun RKPD, 2025

Tabel 5.7 Dukungan Program-Kegiatan Pemerintah Kota Magelang terhadap Prioritas Nasional 6: Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pembebasan Kemiskinan

Prioritas RKPD Kota Magelang 2026	Program	Indikator	Target	Kegiatan	Anggaran (Rp)	Perangkat Daerah
<ul style="list-style-type: none">• Percepatan peningkatan kontribusi sektor unggulan dalam perekonomian daerah• Pemantapan perlindungan social dalam penanganan fakir miskin• Pemantapan layanan public prima	Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	Presentase PSKS yang menerima bantuan	100.00%	Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar	159,309,600.00	Dinsos
				Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	3,395,313,640.00	
	Program Pengelolaan Pendidikan	APK PAUD	100,00%	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	4,208,220,964.00	Dinas Pendidikan dan kebudayaan
		APM SD/ MI	100,00%	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	3,669,495,008.00	
		APK SD/ MI	100,00%	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	2,406,948,430.00	
		Angka Putus Sekolah SD/MI	0,00%	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	557,490,810.00	
		APM SMP/MTs	100,00%			
		APK SMP/MTs	100,00%			
		Angka Putus Sekolah SMP/MTs	0,00%			
		Angka Kelulusan Warga Belajar Pendidikan Kesetaraan	100,00%			
		Persentase Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Terakreditasi	99,21%			
		Persentase SD Terakreditasi	100,00%			
		Persentase SMP Terakreditasi	100,00%			
		Persentase Satuan Pendidikan Kesetaraan Terakreditasi	100,00%			
	Program Pengembangan Kurikulum	Persentase satuan pendidikan yang mengembangkan kurikulum	100.00%	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	94,814,800.00	Dinas Pendidikan dan kebudayaan

Prioritas RKPD Kota Magelang 2026	Program	Indikator	Target	Kegiatan	Anggaran (Rp)	Perangkat Daerah
	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Cakupan penemuan dan pengobatan penyakit menular	100.00%	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	5,272,045,750.00	Dinkes
		Cakupan penemuan dan pengendalian penyakit tidak menular	100.00%	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	18,412,099,165.00	
		Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	100.00%	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	-	
		Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	100.00%			
		Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	100.00%			
		Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100.00%			
		Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	100.00%			
		Persentase Ketersediaan Obat yang Sesuai Standar	100.00%			
		Persentase Pemenuhan Fasilitas Kesehatan Sesuai Standar	100.00%			
		Indeks Keluarga Sehat	0,80			
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Persentase sumber daya manusia kesehatan yang memenuhi standar (sertifikat kompetensi)	100.00%	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	53,502,670.00	Dinkes
				Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota	9,459,900.00	
				Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	24,164,800.00	
	Program Pemberdayaan Sosial	Presentase PSKS yang diberdayakan	91,67%	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	196,246,710.00	Dinsos
	Program Rehabilitasi Sosial	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang mendapatkan rehabilitasi	100.00%	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar. Anak Terlantar. Lanjut Usia Terlantar. serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	4,323,533,070.00	Dinsos
				Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	568,017,240.00	

Prioritas RKPD Kota Magelang 2026	Program	Indikator	Target	Kegiatan	Anggaran (Rp)	Perangkat Daerah
	Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Persentase anggota keluarga tribina, UPPKS yang ber-KB	73.50%	Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	129,995,063.00	DPMP4KB
				Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	43,205,500.00	
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Cakupan program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100.00%	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (KMS)	4,999,900.00	Kecamatan
				Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (KMU)	1,860,900.00	
				Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (KMT)	4,999,900.00	
				Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan (KMS)	104,080,600.00	
				Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan (KMU)	139,590,540.00	
				Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan (KMT)	220,272,880.00	
				Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat (KMU)	123,107,810.00	
				Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat (KMS)	75,336,200.00	
				Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat (KMT)	78,980,200.00	
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Cakupan program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	100.00%	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan (KMS)	11,466,022,626.00	Kecamatan
				Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan (KMU)	12,004,536,788.00	
				Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan (KMT)	13,951,098,236.00	
	Program Kawasan Permukiman	Persentase Kawasan permukiman kumuh yang ditata	100.00%	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	232,902,200.00	DISPERKIM
	Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh	Persentase rumah tidak layak huni di luar permukiman kumuh yang tertangani	100,00%	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	2,380,662,700.00	DISPERKIM

Prioritas RKPD Kota Magelang 2026	Program	Indikator	Target	Kegiatan	Anggaran (Rp)	Perangkat Daerah
	Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)	Persentase lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan PSU	100,00%	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	14,167,900,547.00	DISPERKIM
				Jumlah	98,480,215,147.00	

Sumber: diolah tim penyusun RKPD, 2025

Tabel 5.8 Dukungan Program-Kegiatan Pemerintah Kota Magelang terhadap Prioritas Nasional 7: Memperkuat Reformasi Politik, Hukum dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan

Prioritas RKPD Kota Magelang 2026	Program	Indikator	Target	Kegiatan	Anggaran (Rp)	Perangkat Daerah
<ul style="list-style-type: none"> • Pemantapan peran masyarakat sebagai mitra • penguatan ketahanan daerah dan sosial budsocialrakat • pemantapan layanan public prima • pemantapan daya saing daerah 	Program Peningkatan Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Persentase penyelesaian pelanggaran perda	100.00%	Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	2,899,173,426.00	Satpol PP
				Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	530,307,960.00	
				Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	7,085,700.00	
	Program Informasi Dan Komunikasi Publik	Tingkat keterbukaan Informasi Publik	5	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1,460,504,751.00	Diskominsta
	Program Aplikasi Informatika	Presentase pemanfaatan aplikasi informatika	100%	Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1,261,700.00	Diskominsta
				Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	8,287,652,240.00	
	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Nilai Tata Kelola Keamanan Informasi	109	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	259,418,350.00	Diskominsta
		Nilai Pengelolaan Risiko Keamanan Informasi	61			
		Nilai Kerangka Kerja Keamanan Informasi	106			
		Nilai Pengelolaan Aset Informasi	138			
		Nilai Teknologi dan Keamanan Informasi	80			
	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase capaian pengelolaan keuangan daerah bidang anggaran	100%	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	1,137,669,700.00	BPKAD

Prioritas RKPD Kota Magelang 2026	Program	Indikator	Target	Kegiatan	Anggaran (Rp)	Perangkat Daerah
		Persentase capaian pengelolaan keuangan daerah bidang perbendaharaan	100%	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	230,521,800.00	
		Persentase capaian pengelolaan keuangan daerah bidang akuntansi	100%	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	255,352,900.00	
	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Cakupan pengelolaan barang milik daerah	100%	Pengelolaan Barang Milik Daerah	2,477,955,246.00	BPKAD
	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Presentase penyelenggaraan pengawasan	100%	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	667,716,700.00	Inspektorat
				Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	176,532,000.00	
	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	Presentase entitas yang telah mendapatkan pendampingan dan asistensi	100%	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	37,711,700.00	Inspektorat
				Pendampingan dan Asistensi	3,117,095,600.00	
	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	cakupan program koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	100%	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum (KMS)	539,374,400.00	Kecamatan
				Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum (KMU)	433,052,250.00	
				Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum (KMT)	710,338,890.00	
				Jumlah	23,228,725,313.00	

Sumber: diolah tim penyusun RKPD, 2025

Tabel 5.9 Dukungan Program-Kegiatan Pemerintah Kota Magelang terhadap Prioritas Nasional 8: Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur

Prioritas RKPD Kota Magelang 2026	Program	Indikator	Target	Kegiatan	Anggaran (Rp)	Perangkat Daerah
	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	cakupan program koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	100%	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum (KMS)	539,374,400.00	Kecamatan
				Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum (KMU)	433,052,250.00	
				Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum (KMT)	710,338,890.00	
	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	Proporsi RTH publik untuk pengelolaan keanekaragaman hayati	32.41%	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	10,498,749,727.00	DLH

Prioritas RKPD Kota Magelang 2026	Program	Indikator	Target	Kegiatan	Anggaran (Rp)	Perangkat Daerah
	Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)	Persentase usaha dan atau kegiatan yang mempunyai rincian teknis penyimpanan sementara LB3	100,00%	Penyimpanan Sementara Limbah B3	9,910,200.00	DLH
	Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Persentase ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan	50.00%	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	63,817,900.00	DLH
	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Persentase peningkatan lembaga masyarakat dan lembaga pendidikan yang mengikuti pendidikan pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup	22.22%	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	203,130,200.00	DLH
	Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Presentase cakupan penghargaan yang diterima masyarakat	18.23%	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	210,421,600.00	DLH
	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Persentase pengaduan kasus lingkungan hidup yang terselesaikan	100%	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	10,999,500.00	DLH
	Program Pengelolaan Persampahan	Peningkatan persentase sampah yang dikelola	2.50%	Pengelolaan Sampah	8,806,974,199.00	DLH
				Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Sampah yang Diselenggarakan oleh Pihak Swasta	7,382,000.00	
	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Persentase Panjang Jaringan Irigasi yang Kondisi Baik	81.00%	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	1,215,171,562.00	DLH
	Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Persentase ketersediaan data pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan	100%	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	236,958,100.00	DLH
				Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	88,150,000.00	
	Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	Persentase Pembinaan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	12.23%	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	364,023,400.00	DLH
	Program Pengembangan Kebudayaan	Persentase kebudayaan lokal yang dikembangkan	100%	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	3,597,151,100.00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
				Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	90,000,000.00	

Prioritas RKPD Kota Magelang 2026	Program	Indikator	Target	Kegiatan	Anggaran (Rp)	Perangkat Daerah
	Program Pengembangan Kesenian Tradisional	Persentase kesenian tradisional yang dikembangkan	100%	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	498,855,300.00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Program Pembinaan Sejarah	Cakupan pembinaan sejarah	100.00%	Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	204,290,600.00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya	Persentase cagar budaya yang dilestarikan	35.29%	Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	233,395,000.00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Program Pengelolaan Permuseuman	Persentase peningkatan kunjungan museum	58.44%	Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota	408,317,084.00	
	Program Pemberdayaan Lembaga Masyarakat, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	Persentase kelurahan yang lembaga masyarakatnya diberdayakan	100%	Pemberdayaan Lembaga Masyarakat yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	252,143,300.00	DPM4KB
	Program Penanggulangan Bencana	Persentase layanan penanggulangan bencana	100%	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	23,260,800.00	BPBD
				Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	695,211,060.00	
				Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	234,012,620.00	
				Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	50,409,000.00	
				Jumlah	29,685,499,792.00	

Sumber: diolah tim penyusun RKPD, 2025

5.1.2 Dukungan Program RKPD Kota Magelang Tahun 2026 Terhadap Program Prioritas Pembangunan Kota Magelang Tahun 2026

Pelaksanaan program-program prioritas yang merupakan penerjemahan Visi Misi RPJMD tahun 2021-2026, harus sudah direncanakan secara utuh dalam RKPD Kota Magelang sesuai dengan pentahapan tahun 2026 untuk mencapai *Visi Kota Magelang Maju, Sehat, Bahagia*. Dengan berpedoman pada nomenklatur perencanaan pembangunan dan ketentuan regulasi yang terkait agar program dilaksanakan tepat sasaran, tepat guna, dan tepat manfaat.

Sustainable Development Goals (SDGs) adalah isu global yang harus dipastikan bahwa prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan yang sudah diintegrasikan ke dokumen perencanaan sudah ditindak lanjuti dengan program kegiatan dalam rangka upaya mencapai target tahunan menuju target akhirnya di tahun 2030. Demikian pula dengan program dan kegiatan untuk melaksanakan amanat PP 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah terkait.

Dalam melaksanakan prioritas pembangunan Kota Magelang, dilakukan dengan melibatkan seluruh pihak yang terkait secara langsung maupun tidak langsung. Hal tersebut guna mendapatkan hasil pembangunan yang implementatif dan tepat sasaran serta langsung berdampak pada masyarakat. Pihak yang terlibat diantaranya segenap Perangkat Daerah, lembaga non pemerintahan, Swasta, Akademisi, maupun masyarakat dan komunitas yang ada di Kota Magelang serta media massa.

Prioritas pembangunan Kota Magelang tahun 2026 berfokus pada Perwujudan kesejahteraan masyarakat, Perwujudan keberdayaan masyarakat, Perwujudan ruang kota layak huni. Gambaran prioritas pembangunan tersebut dijabarkan dalam tabel berikut.

5.1.2.1 Akomodasi Hasil Musrenbang

Hasil musrenbang yang dituangkan ke dalam Berita Acara menggambarkan kebutuhan masyarakat yang disepakati untuk ditindaklanjuti. Perangkat Daerah mengakomodir usulan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara sesuai dengan batasan dan kriteria kewenangan Perangkat Daerah dan menjadikannya sebagai prioritas usulan yang harus ditindaklanjuti. Adapun hasil Musrenbang nampak sebagai berikut:

Tabel 5.10 Akomodasi Hasil Musrenbang

Perangkat Daerah	Usulan disetujui	Usulan Ditolak	Grand Total
Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata	17	-	17
Dinas Kesehatan	123	-	123
Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik	32	-	32
Dinas Lingkungan Hidup	26	-	26
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	674	5	79
Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	100	-	100
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	5	24	29
Dinas Perhubungan	17	-	17
Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	73	5	78
Dinas Sosial	65	-	65
Dinas Tenaga Kerja	84	-	84
Kecamatan Magelang Selatan	53	-	53
Kecamatan Magelang Tengah	67	-	67

Perangkat Daerah	Usulan disetujui	Usulan Ditolak	Grand Total
Kecamatan Magelang Utara	125	-	125
Satuan Polisi Pamong Praja	1	-	1
Grand Total	862	34	896

Sumber: diolah tim penyusun RKPD, 2025

Tabel 5.11 Akomodasi Musrenbang per Kelurahan

Nama Kecamatan/Kelurahan	Usulan disetujui	Usulan ditolak	Grand Total
Magelang Selatan	321	-	321
Jurangombo Selatan	69	-	69
Jurangombo Utara	64	-	64
Magersari	47	-	47
Rejowinangun Selatan	50	-	50
Tidar Selatan	53	-	53
Tidar Utara	38	-	38
Magelang Tengah	264	-	264
Cacaban	52	-	52
Gelangan	34	-	34
Kemirirejo	41	-	41
Magelang	42	-	42
Panjang	41	-	41
Rejowinangun Utara	54	-	54
Magelang Utara	311	-	311
Kedungsari	134	-	134
Kramat Selatan	39	-	39
Kramat Utara	44	-	44
Potrobangsari	40	-	40
Wates	54	-	54
Grand Total	896	0	896

Sumber: diolah tim penyusun RKPD, 2025

5.1.2.2 Telaahan terhadap Pokok Pokok Pikiran DPRD

DPRD menyampaikan saran dan pendapatnya berupa pokok-pokok pikiran berdasarkan hasil reses/penjaringan aspirasi masyarakat yang dilaksanakan pada tahun 2025. Telaahan dalam hal ini merupakan kajian permasalahan pembangunan daerah yang diselaraskan dengan sasaran dan prioritas pembangunan serta kemampuan kapasitas riil anggaran. Pokok-pokok pikiran DPRD diterjemahkan oleh perangkat daerah terkait sesuai batasan dan kriterianya dengan menjadikannya sebagai bagian rencana kerja yang akan dilaksanakan pada tahun 2026.

Tabel 5.12 Akomodasi Pokok Pikiran DPRD

OPD	Disetujui	Ditolak/ Dikembalikan	Total
Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata	3	0	3
Dinas Kesehatan	0	2	2
Dinas Lingkungan Hidup	31	1	32
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	69	47	116
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	90	2	92
Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, dan Usaha Mikro	63	1	64
Dinas Perhubungan	92	0	92
Dinas Pertanian dan Pangan	62	4	66
Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	241	124	365
Dinas Sosial	1	0	1
Dinas Tenaga Kerja	66	7	73
Kecamatan Magelang Selatan	7	16	23
Kecamatan Magelang Tengah	35	3	38
Kecamatan Magelang Utara	0	6	6
Satuan Polisi Pamong Praja	2	0	2
Grand Total	763	213	976

Sumber: diolah tim penyusun RKPD, 2025

5.1.2.3 Forum Konsultasi Publik

Rancangan Awal RKPD dibahas bersama dengan Perangkat Daerah dan pemangku kepentingan untuk memperoleh saran masukan, aspirasi atau harapan pemangku kepentingan terhadap tujuan, sasaran, dan program pembangunan daerah yang dituangkan dalam Berita Acara. Selanjutnya, saran, masukan, dan aspirasi dimaksud menjadi bahan penyempurnaan Rancangan Awal untuk menjadi Rancangan RKPD. Saran masukan yang dapat ditindak lanjuti oleh perangkat daerah menjadi prioritas rencana kerja pemerintah daerah.

5.1.2.4 Program Prioritas Hasil FGD

Untuk lebih menggali saran, masukan, dan kebutuhan stakeholder dalam menyelesaikan permasalahan untuk bersama sama pemerintah membangun Kota Magelang, serta untuk lebih memperluas pendekatan perencanaan yang berorientasi pada proses, maka rangkaian proses penyusunan RKPD Kota Magelang tahun 2026 didukung juga dengan pelaksanaan FGD (*Focussed Group Discussion*). Proses tersebut menghasilkan saran dan masukan stakeholder yang disampaikan sesuai dengan tema FGD yang dibahas dengan menyesuaikan kebutuhan prioritas pembangunan dan tentu terkait dengan Visi Misi Walikota Magelang.

5.1.2.5 Akomodasi Hasil Program Unggulan

Dalam rangka percepatan program Unggulan dalam RPJMD Kota Magelang Tahun 2025-2029 utamanya untuk Tahapan Tahun 2026, maka beberapa akomodasi program unggulan dimaksud sebagai berikut:

1. Prodamai
2. Sahabat Usaha
3. Beridikarikan Disabilitas
4. Hunian Nyaman

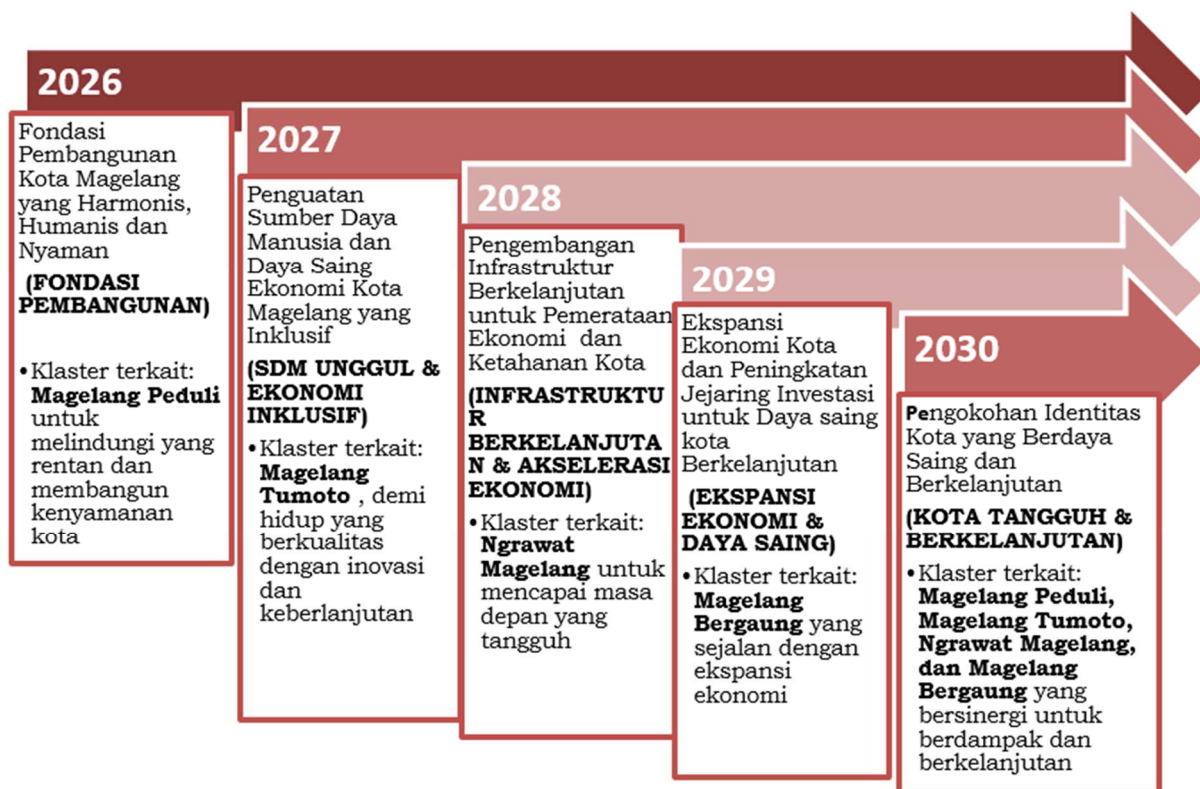
5. Zhub
6. Layanan Warga Miskin
7. Harapan Magelang
8. Anak Merdeka
9. Perempuan Berdaya, Lansia Mantap Nyaman dan Sejahtera
10. Angkot Pelajar Gratis
11. Dana Wibawa Kecamatan dan Kelurahan
12. KTPku
13. MakClinge
14. RS Puskesmas Pagi Sore
15. HomecarePusling
16. Kesehatan Memudahkan Rakyat
17. Rumah Sakit Tanpa Dinding
18. Hospital Tourism
19. RS ProRakyat

5.1.3 Dukungan Program RKPD Kota Magelang Tahun 2026 yang Menerapkan Konsep Tematik, Holistik, Integratif dan Spasial (THIS)

Dalam upaya memaksimalkan efektivitas kolaboratif pencapaian target prioritas pembangunan daerah, Pemerintah Kota Magelang menerapkan konsep tematik, holistik, integratif dan spasial dalam setiap kebijakan pembangunan daerah.

5.1.3.1 Konsep Tematik

Dalam perencanaan pembangunan, konsep tematik diskenariokan secara lima tahunan dan dibreakdown tiap tahunnya. Lebih lanjut dijabarkan dalam kerangka prioritas pembangunan daerah setiap tahunnya dan sesuai dengan arah kebijakan daerah. Konsep tematik dalam arah kebijakan pembangunan dapat dilihat pada gambar sebagai berikut:



Gambar 5.1 Tema dan arah Kebijakan Pembangunan Kota Magelang

Konsep tematik juga diwujudkan dalam penetapan prioritas pembangunan daerah di Kota Magelang pada tahun 2026 adalah:

1. Perwujudan Kesejahteraan Masyarakat
2. Perwujudan Keberdayaan Masyarakat
3. Perwujudan Ruang Kota Layak Huni

5.1.3.2 Konsep Holistik

Dalam perencanaan pembangunan daerah, Pemerintah Kota Magelang menerapkan konsep holistik yaitu perencanaan yang komprehensif dari hulu ke hilir, antara lain, gerakan penanganan kemiskinan, gerakan penanganan stunting.

5.1.3.3 Konsep Integratif

Penerapan konsep integratif juga dilakukan baik dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan daerah. Hal ini dilakukan secara kolaboratif yang melibatkan semua perangkat daerah, antara lain penanganan kemiskinan stunting dan dalam upaya mengatasi kekumuhan.

Selain itu perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan daerah juga dilaksanakan Pemerintah Kota Magelang berkolaborasi dengan aktor non pemerintah baik dari sisi anggaran, sumber daya manusia dan pelaksanaan kegiatan, yaitu kegiatan penanganan kemiskinan, pembangunan berkelanjutan (SDGs), penanganan stunting, penanganan anak usia sekolah tidak sekolah, TMMD dan sebagainya.

Dari sisi pentahelix non pemerintah yang dilibatkan adalah akademisi, tim penggerak PKK, lembaga amal zakat, BAZNAS, Mitra Perangkat Daerah, kelompok masyarakat, media massa, Forum CSR dan lainnya.

5.1.3.4 Konsep Spasial

Konsep Spasial juga diterapkan dalam kebijakan pembangunan daerah di Kota Magelang. Hal ini ditunjukkan dengan adanya kegiatan penanganan stunting, kemiskinan dan infrastruktur untuk mengurangi kesenjangan antar wilayah. Secara spasial dapat diakses pada: <https://geoportal.magelangkota.go.id>

Tabel 5.13 Kebijakan Pembangunan Daerah Tahun 2026 yang Menerapkan Konsep, Tematik, Holistik, Integratif dan Spasial (THIS)

No.	Program	Indikator Program	Target Tahun 2026	Anggaran	Perangkat Daerah
1	Program Pengembangan Perumahan	Persentase penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana	100%	2.807.540.215	DISPERKIM
		Persentase penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban relokasi program pemerintah kabupaten/kota	100%		
2	Program Kawasan Permukiman	Persentase Kawasan permukiman kumuh yang ditata	100%	349.730.500	DISPERKIM
3	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	Persentase rumah tidak layak huni di luar permukiman kumuh yang tertangani	100%	3.130.662.900	DISPERKIM
4	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Persentase lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan PSU	100%	19.872.286.282	DISPERKIM
5	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Persentase jumlah rumah tangga yang memiliki akses terhadap pelayanan sanitasi layak	100%	1.352.434.415	DPUPR
6	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap pelayanan sumber air minum layak	100%	497.057.900	DPUPR
		Proporsi populasi yang memiliki akses layanan sumber air minum, aman, dan berkelanjutan	87,74%		
7	Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional	Persentase Pembangunan TPST/3R	80,00%	2.000.000.000	DPUPR
8	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran	Persentase pencegahan, penanggulangan, penyelamatan	100%	1.117.404.140	SATPOL PP
		Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran	15 menit (SPM)		
9	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Persentase peningkatan lembaga masyarakat dan lembaga pendidikan yang mengikuti pendidikan pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup	22,22%	185.565.900	DLH
10	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Persentase pengaduan kasus lingkungan hidup yang terselesaikan	100%	14.516.400	DLH
11	Program Pengelolaan Persampahan	Peningkatan persentase sampah yang terkelola	2,50%	10.804.141.988	DLH
12	Program Pengelolaan Pendidikan	APK PAUD	100%	16.749.596.788	DISDIKBUD
		APM SD/MI	100%		
		APK SD/MI	100%		
		Angka Putus Sekolah SD/MI	0%		
		APM SMP/MTs	100%		
		APK SMP/MTs	100%		

No.	Program	Indikator Program	Target Tahun 2026	Anggaran	Perangkat Daerah
		Angka Putus Sekolah SMP/MTs	0%		
		Angka Kelulusan Warga Belajar Pendidikan Kesetaraan	100%		
		Persentase Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Terakreditasi	99,21%		
		Persentase SD Terakreditasi	100%		
		Persentase SMP Terakreditasi	100%		
		Persentase Satuan Pendidikan Kesetaraan Terakreditasi	100%		
13	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Cakupan Penemuan dan Pengobatan Penyakit Menular	100%	42.927.755.029	DKK
		Cakupan Penemuan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular	100%		
		Persentase Ibu Hamil Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	100%		
		Persentase Ibu Bersalin Mendapatkan Pelayanan Persalinan	100%		
		Cakupan Pelayanan Kesehatan Balita Sesuai Standar	100%		
		Persentase Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	100%		
		Persentase Bayi Baru Lahir Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	100%		
		Persentase Ketersediaan Obat yang Sesuai Standar	100%		
		Persentase Pemenuhan Fasilitas Kesehatan Sesuai Standar	100%		
		Indeks Keluarga Sehat	0,80		
14	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Persentase keluhan siaga aktif strata mandiri	100%	112.743.000	DKK
15	Program Pemberdayaan Sosial	Persentase PSKS yang diberdayakan	91,67%	291.024.000	DINSOS
16	Program Rehabilitasi Sosial	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang mendapatkan rehabilitasi	100%	4.196.502.700	DINSOS
17	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Persentase PMKS yang menerima bantuan	100%	4.486.746.800	DINSOS
18	Program Penanganan Bencana	Persentase korban bencana alam dan sosial yang tertangani	100%	64.609.800	DINSOS
19	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase tenaga kerja bersertifikat kompetensi	75,83%	2.089.820.900	DISNAKER
		Persentase angkatan kerja yang mengikuti pelatihan kerja	82,53%		
20	Program Penempatan Tenaga Kerja	Persentase pencari kerja yang mendapatkan fasilitasi penempatan kerja	95,25%	5.562.562.708	DISNAKER
		Persentase peserta pelatihan yang menjalankan wirausaha	80,00%		
21	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Persentase organisasi kepemudaan yang dikembangkan	88,64 %	901.554.800	DISPORAPAR
		Persentase peningkatan pemuda yang dibina	11,23%		

No.	Program	Indikator Program	Target Tahun 2026	Anggaran	Perangkat Daerah
22	Program pengembangan sumberdaya pariwisata dan ekonomi kreatif	Persentase SDM pariwisata yang meningkat kapasitasnya	7,86%	535.247.500	DISPORAPAR
		Persentase peningkatan pelaku ekonomi kreatif yang meningkat kapasitasnya	66,67%		
23	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)	Persentase wirausaha pemuda yang diberdayakan	60,34%	1.180.706.400	DISPERINDAG
24	Program Pengembangan UMKM	Persentase peningkatan omzet pelaku usaha mikro	3,00%	860.041.900	DISPERINDAG
25	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera	Persentase anggota keluarga tribina, UPPKS yang ber-KB	75,50%	256.903.900	DPMP4KB
26	Program Pembinaan Keluarga Berencana	Persentase Contraceptive Prevalance Rate (CPR)	71,04%		DPMP4KB
27	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Persentase peningkatan produksi perikanan budidaya	1,25	472.691.280	DISPERPA
28	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Persentase Ketersediaan Pangan	100%	920.270.220	DISPERPA
29	Program Pengawasan Keamanan Pangan	Persentase Pangan Segar yang Aman	88,48%	80.382.800	DISPERPA
30	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Persentase kelurahan yang lembaga masyarakatnya diberdayakan	100%	474.550.700	DPMP4KB
31	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Tingkat Keterbukaan Informasi Publik	5	1.112.194.420	DISKOMINSTA
32	Program Pengendalian Penduduk	Persentase penurunan angka kelahiran pada remaja usia 15-19 tahun (ASFR 15-19 th)	22,00%	305.198.000	DPMP4KB
JUMLAH				125.712.444.285	

Sumber: diolah tim penyusun RKPD, 2025

5.1.4 Dukungan Program RKPD Kota Magelang Tahun 2026 Terhadap Destinasi Pariwisata Super Prioritas Borobudur

Dalam rangka optimalisasi pariwisata Borobudur dan meningkatkan pariwisata di Provinsi Jawa Tengah, berdasarkan Perpres No 46 Tahun 2017 tentang Badan Otorita Pengelola Kawasan Pariwisata Borobudur, maka diperlukan pengembangan Kawasan Pariwisata Borobudur dengan target 2 juta kunjungan wisatawan mancanegara dan 55 juta pergerakan wisatawan nusantara dimulai tahun 2019. Adapun fungsi koordinatif dan otoritatif dikelola oleh Badan Otorita Borobudur dengan kawasan 3 destinasi wisata nasional yaitu Borobudur dan sekitarnya, Solo Sangiran dan Semarang-Karimun Jawa.

Kota Magelang berada di kawasan destinasi nasional Borobudur-Yogya dan Borobudur-Dieng yang dikembangkan pada tahun 2021. Dalam mewujudkan pengembangan destinasi Super Prioritas Borobudur menjadi destinasi *nomadic tourism* yang berkelas, Kota Magelang menjadi bagian dari salah satu kawasan destinasi pariwisata. Adapun dukungan Pemerintah Kota Magelang terhadap destinasi pariwisata super prioritas Borobudur sebagaimana terlihat pada program-program yang terdapat dalam RKPD Kota Magelang Tahun 2026 sebagaimana tabel berikut:

Tabel 5.14 Dukungan Program RKPD Kota Magelang Tahun 2026 Terhadap Destinasi Pariwisata Super Prioritas Borobudur

No.	Program	Indikator Program	Target Tahun 2026	Anggaran	Perangkat Daerah
1	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Persentase destinasi pariwisata yang dikelola dengan baik	93,33%	116.627.700	DISPORAPAR
2	Program pemasaran pariwisata	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara	27,20%	764.119.350	DISPORAPAR

No.	Program	Indikator Program	Target Tahun 2026	Anggaran	Perangkat Daerah
		Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke kota	14,71%		
3	Program pengembangan sumberdaya pariwisata dan ekonomi kreatif	Persentase SDM pariwisata yang meningkat kapasitasnya	7,86 %	535.247.500	DISPORAPAR
		Persentase peningkatan pelaku ekonomi kreatif yang meningkat kapasitasnya	66,67%		
4	Program Pelayanan Penanaman Modal	Persentase penerbitan perizinan dan non perizinan yang sesuai	98,82%	660.987.650	DPMPPTSP
5	Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Persentase pertumbuhan pemanfaatan data, informasi dan Sistem Informasi PM	100,00%	48.825.000	DPMPPTSP
6	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Persentase Investor PMA/PMDN	100%	166.000.000	DPMPPTSP
7	Program Promosi Penanaman Modal	Presentasi LOI yang ditindaklanjuti	100%	270.167.400	DPMPPTSP
8	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Persentase pelaku usaha yang memenuhi peraturan perundang-undangan	35,00%	91.919.700	DPMPPTSP
9	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	Proporsi RTH publik untuk pengelolaan keanekaragaman hayati	32,41%	6.547.770.810	DLH
10	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Kinerja lalu lintas kota (VC Ratio)	0,75	9.727.750.975	DISHUB
		Pengguna moda transportasi umum di perkotaan (PPTUK)	8,29		
11	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)	Persentase wirausaha pemula yang diberdayakan	60,34%	1.180.706.400	DISPERINDAG
12	Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	Persentase cagar budaya yang dilestarikan	35,29%	217.923.800	DISDIKBUD
13	Program Pengembangan Kebudayaan	Persentase kebudayaan lokal yang dikembangkan	100%	2.597.526.700	DISDIKBUD
14	Program Penyelenggaraan Jalan	Persentase Panjang jalan dalam kondisi mantab	95,00%	16.472.421.048	DPUPR
15	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Persentase perwujudan kesesuaian pemanfaatan ruang	83,34%	763.038.400	DPUPR
JUMLAH				40.161.032.433	

Sumber: diolah tim penyusun RKPD, 2025

Pada tahun 2026, direncanakan pengembangan pola *travel pattern* wisata Kota Magelang menjadi *travel pattern* menu paket wisata Kawasan Borobudur. Pengembangan sumber daya dan pelaku usaha pariwisata di Kota Magelang salah satunya adalah dengan pembentukan ASITA (*Association of The Indonesian Tours and Travel Agencies*) dimana pada tahun 2023 sudah ada rincian Perjanjian Kerja Sama dg ASITA Provinsi Jawa Tengah dan DIY.

Beberapa *event* kegiatan direncanakan dilaksanakan untuk mendukung *event* pariwisata di Borobudur dan sekitarnya. Selain itu direncanakan pada tahun 2024 telah terjalin kerja sama transportasi terintegrasi antar destinasi wisata di kawasan Provinsi Jawa Tengah. Dalam mengintegrasikan kegiatan wisata yang ada di Kota Magelang disusun rintisan *calendar event* untuk tahun 2026. Sedangkan program dan kegiatan lain seperti infrastruktur, sarana prasarana, kesiapan destinasi kawasan direncanakan dibeberapa urusan yang terkait.

5.1.5 Dukungan Program RKPD Kota Magelang Tahun 2026 Terhadap Pembangunan Jalan Tol Yogyakarta-Bawen

Salah satu Proyek Strategis Nasional (PSN) adalah pembangunan jalan tol Yogyakarta-Bawen. Adapun di Kota Magelang, melalui Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Magelang Tahun 2011-2031, terdapat rencana exit jalan tol, yang terletak di Kelurahan Tidar Utara. Pada tahun 2023, pembangunan

exit jalan tol di Kota Magelang sedang dalam proses pengadaan tanah. Pembangunan exit jalan tol di Kota Magelang diharapkan dapat menjadi akselerasi lalu lintas masuk ke kota. Lokasi exit jalan tol pada kawasan Soekarno Hatta harus selaras dengan fungsi kawasan sebagai salah satu kawasan strategis kota dengan fungsi dominan perdagangan dan jasa. Ketika exit jalan tol berfungsi nantinya, kawasan Soekarno Hatta menjadi titik koneksi sebagai simpul pengungkit pembangunan kota di sisi sebelah Tenggara. Untuk mendorong hal tersebut, akan dilakukan penyusunan RTBL kawasan strategis Soekarno Hatta untuk mengatur penataan kawasan agar dapat berfungsi sebagai simpul akselerasi dengan maksimal. Adapun dukungan program Pemerintah Kota Magelang terhadap pembangunan jalan tol Yogyakarta-Bawen adalah sebagai berikut:

Tabel 5.15 Dukungan Program RKPD Kota Magelang Tahun 2026 Terhadap Pembangunan Jalan Tol Yogyakarta-Bawen

No.	Program	Indikator Program	Target RPJMD Tahun 2026	Target Tahun 2026	Anggaran	Perangkat Daerah
1	Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya	Persentase Kawasan strategis yang ditata	100%	100%	382.293.800	DPUPR
JUMLAH					382.293.800	

Sumber: diolah tim penyusun RKPD, 2025

5.1.6 Dukungan Program RKPD Kota Magelang Tahun 2026 Terhadap Aksi Konvergensi Stunting

Pemerintah telah menetapkan stunting sebagai program prioritas nasional, mengingat dampaknya yang luas terhadap kualitas sumber daya manusia Indonesia. Stunting bukan hanya masalah perawakan tubuh yang pendek, tetapi merupakan akibat dari kurangnya asupan gizi yang berkepanjangan serta penyakit infeksi kronis yang berulang. Dampak jangka panjangnya dapat memengaruhi daya saing dan kualitas hidup masyarakat. Oleh karena itu, pencapaian target pembangunan kesehatan melalui percepatan penurunan stunting menjadi salah satu investasi utama dalam mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.

Komitmen pemerintah dalam menangani stunting diwujudkan dengan memasukkan program ini ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. Target penurunan stunting yang cukup signifikan telah ditetapkan, dari 27,7 persen pada tahun 2019 menjadi 24,4 persen pada tahun 2021. Presiden bahkan menargetkan prevalensi stunting turun hingga 14 persen pada tahun 2024. Untuk mencapai target tersebut, diperlukan upaya percepatan lintas program dan lintas sektor melalui penguatan deteksi dini serta intervensi yang tepat, baik secara spesifik maupun sensitif, dengan pendekatan kolaboratif.

Sebagai pedoman nasional, pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting dan Peraturan Kepala BKKBN Nomor 12 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Stunting (RAN PASTI). Regulasi ini menjadi dasar bagi berbagai upaya di tingkat daerah, termasuk di Kota Magelang. Berdasarkan data Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) Tahun 2022, prevalensi stunting di Kota Magelang tercatat sebesar 13,9 persen. Pemerintah daerah menargetkan penurunan sebesar 3,5 persen per tahun untuk mencapai target yang telah ditetapkan.

Upaya percepatan penurunan stunting di Kota Magelang didukung oleh ketersediaan regulasi yang menunjang aksi konvergensi dan intervensi yang efektif. Berbagai peraturan daerah, peraturan wali kota, dan keputusan wali kota telah disusun agar selaras dengan regulasi nasional. Saat ini, terdapat tiga Peraturan Daerah (Perda), delapan Peraturan Wali Kota, dan empat Keputusan Wali Kota yang mendukung program percepatan penurunan stunting. Dengan adanya dukungan regulasi yang kuat, diharapkan Kota Magelang dapat mencapai target penurunan stunting secara optimal.

Tabel 5.16 Dukungan Program RKPD Kota Magelang Tahun 2026 Terhadap Aksi Konvergensi Stunting

No.	Program	Indikator Program	Target Tahun 2026	Anggaran	Perangkat Daerah
1	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Cakupan Penemuan dan Pengobatan Penyakit Menular	100,00%	42.927.755.029	DKK
		Cakupan Penemuan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular	100,00%		
		Persentase Ibu Hamil Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	100,00%		

No.	Program	Indikator Program	Target Tahun 2026	Anggaran	Perangkat Daerah
		Persentase Ibu Bersalin Mendapatkan Pelayanan Persalinan	100,00%		
		Cakupan Pelayanan Kesehatan Balita Sesuai Standar	100,00%		
		Persentase Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	100,00%		
		Persentase Bayi Baru Lahir Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	100,00%		
		Persentase Ketersediaan Obat yang Sesuai Standar	100,00%		
		Persentase Pemenuhan Fasilitas Kesehatan Sesuai Standar	100,00%		
		Indeks Keluarga Sehat	0,80		
2	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Persentase peningkatan produksi perikanan budidaya	1,25	472.691.280	DISPERPA
3	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Persentase Ketersediaan Pangan	100%	920.270.220	DISPERPA
4	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap pelayanan sumber air minum layak	100,00%	497.057.900	DPUPR
		Proporsi populasi yang memiliki akses layanan sumber air minum, aman, dan berkelanjutan	87,74%		
5	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Persentase jumlah rumah tangga yang memiliki akses terhadap pelayanan sanitasi layak	100,00%	1.352.434.415	DPUPR
6	Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	Persentase PMKS yang menerima bantuan	100%	4.486.746.800	DINSOS
7	Program Pengawasan Keamanan Pangan	Persentase Pangan Segar yang Aman	88,48%	80.382.800	DISPERPA
8	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Persentase kelurahan siaga aktif strata mandiri	100%	112.743.000	DKK
9	Program pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan masyarakat hukum adat	Persentase kelurahan yang lembaga masyarakatnya diberdayakan	100,00%	474.550.700	DPMP4KB
10	Program Pengendalian Penduduk	Persentase penurunan angka kelahiran pada remaja usia 15-19 tahun (ASFR 15-19 th)	22%	305.198.000	DPMP4KB
11	Program pemberdayaan dan peningkatan keluarga sejahtera	Persentase anggota keluarga tribina, UPPKS yang ber-KB	73,50%	256.903.900	DPMP4KB
12	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Tingkat Keterbukaan Informasi Publik	5	1.112.194.420	DISKOMINSTA
JUMLAH				52.998.928.464	

Sumber: diolah tim penyusun RKPD, 2025

5.1.7 Dukungan Program RKPD Kota Magelang Tahun 2026 Untuk Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

Isu pembangunan berkelanjutan dalam pengelolaan sarana prasarana perkotaan berkembang sebagai respon terhadap amanat tujuan pembangunan berkelanjutan. Upaya konkrit Pemerintah Kota Magelang dalam RKPD 2026 terwujud dalam tabel di bawah ini:

Tabel 5.17 Program Daerah yang Mendukung Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)

Tujuan	PROGRAM	KEGIATAN	SUBKEG	OPD
Tujuan 1	TANPA KEMISKINAN			
1.1.1*	Tingkat kemiskinan ekstrim			
	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Kegiatan Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar	Sub Kegiatan Penjangkauan Anak-Anak Terlantar	DINSOS
			Sub Kegiatan Rujukan Anak-Anak Terlantar	DINSOS
			Sub Kegiatan Pemantauan Terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar	DINSOS
		Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Sub Kegiatan Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	DINSOS
			Sub Kegiatan Fasilitas Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	DINSOS
			Sub Kegiatan Fasilitas Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	DINSOS
	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Sub Kegiatan Penyediaan Permakanaan	DINSOS
			Sub Kegiatan Penyediaan Alat Bantu	DINSOS
			Sub Kegiatan Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	DINSOS
			Sub Kegiatan Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	DINSOS
		Kegiatan Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Sub Kegiatan Pemberian Layanan Kedaruratan	DINSOS
	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Kegiatan Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Sub Kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	DINSOS
			Sub Kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	DINSOS
			Sub Kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	DINSOS
			Sub Kegiatan Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	DINSOS
	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Kegiatan Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Sub Kegiatan Penyusunan/ Review/ Legalisasi Kebijakan Bidang PKP	DISPERKIM
		Kegiatan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/ Peremajaan Permukiman Kumuh	DISPERKIM
			Sub Kegiatan Pelaksanaan Peremajaan Kawasan Permukiman Kumuh	DISPERKIM
	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Kegiatan Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	Sub Kegiatan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh	DISPERKIM

Tujuan	PROGRAM	KEGIATAN	SUBKEG	OPD	
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Sub Kegiatan Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	DKK	
1.2.1*	Indikator 1.2.1* Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur				
	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Kegiatan Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar	Sub Kegiatan Penjangkauan Anak-Anak Terlantar	DINSOS	
			Sub Kegiatan Rujukan Anak-Anak Terlantar	DINSOS	
			Sub Kegiatan Pemantauan Terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar	DINSOS	
		Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Sub Kegiatan Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	DINSOS	
			Sub Kegiatan Fasilitas Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	DINSOS	
			Sub Kegiatan Fasilitas Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	DINSOS	
	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Sub Kegiatan Penyediaan Permakanan	DINSOS	
			Sub Kegiatan Penyediaan Alat Bantu	DINSOS	
			Sub Kegiatan Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	DINSOS	
			Sub Kegiatan Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	DINSOS	
		Kegiatan Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Sub Kegiatan Pemberian Layanan Kedaruratan	DINSOS	
	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Kegiatan Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Sub Kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	DINSOS	
			Sub Kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	DINSOS	
			Sub Kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	DINSOS	
			Sub Kegiatan Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	DINSOS	
	1.3.1*	Indikator 1.3.1* Proporsi penduduk yang menerima program perlindungan sosial, menurut jenis kelamin, untuk kategori kelompok semua anak, pengangguran, lansia, penyandang difabilitas, ibu hamil/ melahirkan, korban kecelakaan kerja, kelompok miskin dan rentan			
		PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Kegiatan Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar	Sub Kegiatan Penjangkauan Anak-Anak Terlantar	DINAS SOSIAL
				Sub Kegiatan Rujukan Anak-Anak Terlantar	DINAS SOSIAL
				Sub Kegiatan Pemantauan Terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar	DINAS SOSIAL
Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota			Sub Kegiatan Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	DINAS SOSIAL	
			Sub Kegiatan Fasilitas Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	DINAS SOSIAL	

Tujuan	PROGRAM	KEGIATAN	SUBKEG	OPD
			Sub Kegiatan Fasilitas Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	DINAS SOSIAL
1.3.1 (a)*	Indikator 1.3.1 (a)* Proporsi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan			
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Sub Kegiatan Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	DKK
1.3.1 (b)*	Indikator 1.3.1 (b)* Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan			
	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Kegiatan Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Sub Kegiatan Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	DISNAKER
1.4.1*	Indikator 1.4.1* Persentase penduduk hidup dalam rumah tangga yang mempunyai akses pada pelayanan dasar			
	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Kegiatan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	DISPERKIM
			Sub Kegiatan Pelaksanaan Peremajaan Kawasan Permukiman Kumuh	DISPERKIM
	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Kegiatan Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	Sub Kegiatan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh	DISPERKIM
	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	DPUPR
			Sub Kegiatan Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	DPUPR
			Sub Kegiatan Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	DPUPR
			Sub Kegiatan Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	DPUPR
	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Sub Kegiatan Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman	DPUPR
			Sub Kegiatan Peningkatan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman	DPUPR
			Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	DPUPR
			Sub Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	DPUPR
			Sub Kegiatan Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat	DPUPR
			Sub Kegiatan Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	DPUPR
			Sub Kegiatan Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	DPUPR
	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Kegiatan Pengelolaan Sampah	Sub Kegiatan Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	DLH

Tujuan	PROGRAM	KEGIATAN	SUBKEG	OPD
			Sub Kegiatan Pengoperasian dan Pemeliharaan sarana penanganan sampah	DLH
			Sub Kegiatan Penanganan sampah melalui pengangkutan	DLH
			Sub Kegiatan Penanganan sampah melalui pengoperasian dan pemeliharaan sarana dan prasarana penanganan sampah	DLH
			Sub Kegiatan Pengurangan sampah melalui pemanfaatan kembali sampah	DLH
			Sub Kegiatan Penanganan sampah melalui pengumpulan sampah	DLH
			Sub Kegiatan Penanganan sampah melalui pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/ PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan	DLH
	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Sub Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	DISHUB
			Sub Kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	DISHUB
			Sub Kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	DISHUB
		Kegiatan Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	Sub Kegiatan Pengawasan Operasional Terminal Penumpang Tipe C	DISHUB
			Sub Kegiatan Revitalisasi Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang)	DISHUB
		Kegiatan Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Sub Kegiatan Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	DISHUB
		Kegiatan Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penyusunan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	DISHUB
		Kegiatan Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Sub Kegiatan Fasilitas Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	DISHUB
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Sub Kegiatan Pengadaan Mebel Sekolah	DISDIKBUD
			Sub Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Sekolah	DISDIKBUD
			Sub Kegiatan Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	DISDIKBUD
			Sub Kegiatan Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	DISDIKBUD
			Sub Kegiatan Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	DISDIKBUD
			Sub Kegiatan Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	DISDIKBUD
			Sub Kegiatan Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	DISDIKBUD
			Sub Kegiatan Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	DISDIKBUD

Tujuan	PROGRAM	KEGIATAN	SUBKEG	OPD
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Sub Kegiatan Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	DISDIKBUD
			Sub Kegiatan Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	DISDIKBUD
			Sub Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	DISDIKBUD
			Sub Kegiatan Pengadaan Mebel Sekolah	DISDIKBUD
			Sub Kegiatan Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	DISDIKBUD
			Sub Kegiatan Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	DISDIKBUD
			Sub Kegiatan Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	DISDIKBUD
			Sub Kegiatan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	DISDIKBUD
			Sub Kegiatan Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	DISDIKBUD
			Sub Kegiatan Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	DISDIKBUD
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Sub Kegiatan Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	
			Sub Kegiatan Pengelolaan Dana BOP PAUD	DISDIKBUD
			Sub Kegiatan Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	DISDIKBUD
			Sub Kegiatan Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	DISDIKBUD
			Sub Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	DISDIKBUD
			Sub Kegiatan Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	DISDIKBUD
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan	Sub Kegiatan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/ Kesetaraan	DISDIKBUD
			Sub Kegiatan Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	DISDIKBUD
			Sub Kegiatan Fasilitas Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	DISDIKBUD
			Sub Kegiatan Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	DISDIKBUD
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Sub Kegiatan Pembangunan Puskesmas	DINKES
			Sub Kegiatan Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	DINKES
			Sub Kegiatan Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	DINKES
			Sub Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	DINKES
			Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	DINKES

Tujuan	PROGRAM	KEGIATAN	SUBKEG	OPD
			Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	DINKES
			Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	DINKES
			Sub kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	DINKES
			Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	DINKES
			Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	DINKES
			Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	DINKES
			Kegiatan Penerbitan Izin Rumah SakitKelas C, D dan Fasilitas Pelayanan KesehatanTingkat Daerah Kabupaten/Kota	DINKES
			Sub Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya	DINKES
			Sub Kegiatan Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	DINKES
1.a.2*	Indikator 1.a.2* Pengeluaran untuk layanan pokok (pendidikan, kesehatan, dan perlingungan sosial) sebagai persentase dari total belanja pemerintah			
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Sub kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	DISDIKBUD
			Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	DISDIKBUD
			Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	DISDIKBUD
			Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	DISDIKBUD
			Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	DISDIKBUD
			Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	DISDIKBUD
		Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	DISDIKBUD
			Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	DISDIKBUD
			Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	DISDIKBUD
			Sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	DISDIKBUD
		Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	DISDIKBUD
		Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Sub Kegiatan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	DISDIKBUD
			Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	DISDIKBUD
			Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	DISDIKBUD
			Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	DISDIKBUD

Tujuan	PROGRAM	KEGIATAN	SUBKEG	OPD
			Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	DISDIKBUD
			Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	DISDIKBUD
			Sub Kegiatan Penyediaan Bahan/Materia	DISDIKBUD
			Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu	DISDIKBUD
			Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	DISDIKBUD
			Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	DISDIKBUD
			Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	DISDIKBUD
			Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	DISDIKBUD
			Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	DISDIKBUD
		Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	DISDIKBUD
			Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapanga	DISDIKBUD
			Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	DISDIKBUD
			Sub Kegiatan Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	DISDIKBUD
			Sub kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	DISDIKBUD
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Sub Kegiatan Pengadaan Mebel Sekolah	DISDIKBUD
			Sub Kegiatan Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	DISDIKBUD
			Sub Kegiatan Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	DISDIKBUD
			Sub Kegiatan Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	DISDIKBUD
			Sub Kegiatan Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	DISDIKBUD
			Sub Kegiatan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	DISDIKBUD
			Sub Kegiatan Pengembangan konten digital untuk pendidikan	DISDIKBUD
			Sub Kegiatan Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	DISDIKBUD
			Sub kegiatan Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	DISDIKBUD
			Sub Kegiatan Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	DISDIKBUD
			Sub Kegiatan Fasilitas Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	DISDIKBUD

Tujuan	PROGRAM	KEGIATAN	SUBKEG	OPD
			Sub Kegiatan Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	DISDIKBUD
			Sub Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	DISDIKBUD
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Sub Kegiatan Pengelolaan Pendidikan	DISDIKBUD
			Sub Kegiatan Pengadaan Mebel Sekolah	DISDIKBUD
			Sub Kegiatan Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	DISDIKBUD
			Sub Kegiatan Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	DISDIKBUD
			Sub Kegiatan Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	DISDIKBUD
			Sub Kegiatan Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	DISDIKBUD
			Sub Kegiatan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	DISDIKBUD
			Sub Kegiatan Pengembangan konten digital untuk pendidikan	DISDIKBUD
			Sub Kegiatan Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	DISDIKBUD
			Sub kegiatan Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	DISDIKBUD
			Sub Kegiatan Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	DISDIKBUD
			Sub Kegiatan Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	DISDIKBUD
			Sub Kegiatan Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	DISDIKBUD
			Sub Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	DISDIKBUD
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Sub kegiatan Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	DISDIKBUD
			Sub Kegiatan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	DISDIKBUD
			Sub Kegiatan Pengelolaan Dana BOP PAUD	DISDIKBUD
			Sub Kegiatan 2 Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	DISDIKBUD
			Sub Kegiatan Pengembangan konten digital untuk pendidikan	DISDIKBUD
			Sub Kegiatan Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	DISDIKBUD
			Sub kegiatan Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	DISDIKBUD
			Sub Kegiatan Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	DISDIKBUD

Tujuan	PROGRAM	KEGIATAN	SUBKEG	OPD
			Sub Kegiatan Fasilitas Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	DISDIKBUD
			Sub Kegiatan Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	DISDIKBUD
			Sub Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	DISDIKBUD
	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Kegiatan Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Sub Kegiatan Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	
	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Kegiatan Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan	Sub Kegiatan Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan	DISDIKBUD
			Sub kegiatan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan	DISDIKBUD
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Sub Kegiatan Pembangunan Puskesmas	DINKES
			Sub Kegiatan Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	DINKES
			Sub Kegiatan Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	DINKES
		Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	DINKES
			Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	DINKES
			Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	DINKES
			Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	DINKES
			Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	DINKES
			Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	DINKES
			Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	DINKES
			Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	DINKES
			Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	DINKES
			Sub kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	DINKES
			Sub kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	DINKES
			Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	DINKES
			Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	DINKES
			Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	DINKES
			Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	DINKES

Tujuan	PROGRAM	KEGIATAN	SUBKEG	OPD
			Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	DINKES
			Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	DINKES
			Sub Kegiatan Pengelolaan Surveilans Kesehatan	DINKES
			Sub Kegiatan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	DINKES
			Sub kegiatan Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	DINKES
			Sub Kegiatan Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasyankes dan Sekolah	DINKES
			Sub Kegiatan Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	DINKES
			Sub Kegiatan Operasional Pelayanan Puskesmas	DINKES
			Sub Kegiatan Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	DINKES
			Sub Kegiatan Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	DINKES
			Sub kegiatan Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	DINKES
			Sub Kegiatan Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	DINKES
			Sub Kegiatan Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	DINKES
			Sub Kegiatan Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	DINKES
		Kegiatan Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Sub kegiatan Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya	DINKES
			Sub Kegiatan Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	DINKES
			Sub kegiatan Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	DINKES
	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Kegiatan Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota	Sub Kegiatan Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	DINKES
		Kegiatan Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Sub Kegiatan Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	DINKES
			Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	DINKES
		Kegiatan Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Sub Kegiatan Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	DINKES
	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Kegiatan Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Sub Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	DINKES

Tujuan	PROGRAM	KEGIATAN	SUBKEG	OPD
		Kegiatan Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Sub Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	DINKES
		Kegiatan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/ Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Sub Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/ Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	DINKES
		Kegiatan Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	Sub Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	DINKES
		Kegiatan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	Sub Kegiatan Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	DINKES
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Kegiatan Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Sub Kegiatan Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	DINKES
		Kegiatan Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	DINKES
		Kegiatan Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Sub Kegiatan Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	DINKES
	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Kegiatan Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar	Sub Kegiatan Penjangkauan Anak-Anak Terlantar	DINSOS
			Sub Kegiatan Rujukan Anak-Anak Terlantar	DINSOS
			Sub Kegiatan Pemantauan Terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar	DINSOS
		Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Sub Kegiatan Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	DINSOS
			Sub Kegiatan Fasilitas Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	DINSOS
			Sub Kegiatan Fasilitas Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	DINSOS
Tujuan 2	TANPA KELAPARAN			
2.1.1*	Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment)			
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	DINKES
2.1.2*	Prevalensi penduduk dengan kerawanan pangan sedang atau berat, berdasarkan Skala Pengalaman Kerawanan Pangan			
	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah	Sub Kegiatan Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	DISPERPA
			Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	DISPERPA

Tujuan	PROGRAM	KEGIATAN	SUBKEG	OPD
		Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga	Sub Kegiatan Penyediaan Informasi Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen Wilayah Kabupaten/Kota	DISPERPA
			Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan Pokok Strategis	DISPERPA
	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Sub Kegiatan Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	DISPERPA
2.2.1*	Indikator 2.2.1* Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah lima tahun/balita.			
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	DKK
2.2.2*	Indikator 2.2.2* Prevalensi wasting (berat badan/tinggi badan) anak pada usia kurang dari 5 tahun, berdasarkan tipe			
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	DKK
2.2.2(a)*	Indikator 2.2.2(a)* Kualitas konsumsi pangan yang diindikasikan oleh skor Pola Pangan Harapan (PPH)			
	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga	Sub Kegiatan Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	DISPERPA
			Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	DISPERPA
			Sub Kegiatan Penyediaan Informasi Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen Wilayah Kabupaten/Kota	DISPERPA
			Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan Pokok Strategis	DISPERPA
	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Sub Kegiatan Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	DISPERPA
2.2.3	Indikator 2.2.3 Prevalensi anemia pada ibu hamil usia 15-49 tahun			
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	DKK
Tujuan 3	KEHIDUPAN SEHAT DAN SEJAHTERA			
3.1.1*	Indikator 3.1.1* Angka Kematian Ibu (AKI)			
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	DINKES
			Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	DINKES
3.1.2*	Indikator 3.1.2 * Proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya (a) ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih (b) di fasilitas kesehatan;			
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	DINKES
3.2.1*	Indikator 3.2.1.(a)* Angka Kematian Balita (AKBa) per 1000 kelahiran hidup.			
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	DINKES

Tujuan	PROGRAM	KEGIATAN	SUBKEG	OPD
	Indikator 3.2.1 (b)* Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup.			
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	DINKES
3.2.2*	Indikator 3.2.2* Angka Kematian Neonatal (AKN) per 1000 kelahiran hidup.			
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	DINKES
3.3.1*	Indikator 3.3.1* Jumlah infeksi baru HIV per 1000 penduduk tidak terinfeksi			
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	DINKES
3.3.2*	Indikator 3.3.2* Insiden Tuberkulosis (ITB) per 100.000 penduduk			
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	DINKES
3.3.3*	Indikator 3.3.3* Kejadian Malaria per 1.000 orang			
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKM dan UKO Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Sub Kegiatan Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	DINKES
3.4.1.(b)	Indikator 3.4.1.(b) Prevalensi tekanan darah tinggi			
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKM dan UKO Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	DINKES
3.4.1 (c) *	Indikator 3.4.1 (c) * Prevalensi obesitas pada penduduk umur ≥18 tahun.			
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	DINKES
3.6.1	Indikator kematian akibat kecelakaan lalu lintas			
	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Kegiatan Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Sub Kegiatan Fasilitas Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	DISHUB
3.7.1*	Indikator 3.7.1* Proporsi perempuan usia reproduksi (15-19 tahun) yang memiliki kebutuhan keluarga berencana terpenuhi menurut metode kontrasepsi modern			
	PROGRAM PEMBINAAN KB	Kegiatan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal	Sub Kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK sesuai Kearifan Budaya Lokal	DPMP4KB
			Sub Kegiatan Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK	DPMP4KB
		Kegiatan Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)		DPMP4KB
		Kegiatan Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Sub Kegiatan Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	DPMP4KB

Tujuan	PROGRAM	KEGIATAN	SUBKEG	OPD
3.7.2	Mencegah pernikahan dini			
3.7.2.(a)	Indikator 3.7.2.(a) Total Fertility Rate (TFR)			
	PROGRAM PEMBINAAN KB	Kegiatan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal	Sub Kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK sesuai Kearifan Budaya Lokal	DPMP4KB
			Sub Kegiatan Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK	DPMP4KB
		Kegiatan Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Kegiatan Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	DPMP4KB
Sub Kegiatan Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)			DPMP4KB	
3.8.2.(a)	Indikator 3.8.2.(a) Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional			
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Sub Kegiatan Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	DINKES
3.b.1*	Indikator 3.b.1* Proporsi target populasi yang telah memperoleh vaksin program nasional			
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Sub Kegiatan Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	DINKES
		Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Sub Kegiatan Pengadaan Obat, Vaksin	DINKES
3.b.3*	Indikator 3.b.3* Proporsi fasilitas kesehatan dengan paket obat sessensial yang tersedia dan terjangkau secara berkelanjutan			
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Sub Kegiatan Pengadaan Obat, Vaksin	DINKES
Tujuan 4	PENDIDIKAN BERKUALITAS			
4.1.1.(a)	Indikator 4.1.1.(a) proporsi anak-anak dan remaja di (a) kelas 5 (b) kelas 8, dan (c) usia 15 tahun yang mencapai setidaknya tingkat kemahiran minimum dalam: (i) memcana, (ii) matematika			
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan	Sub Kegiatan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/ Kesetaraan	DISDIKBUD
			Sub Kegiatan Fasilitas Komunikasi Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	DISDIKBUD
			Sub Kegiatan Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	DISDIKBUD
			Sub Kegiatan Fasilitas Komunikasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	DISDIKBUD
			Sub Kegiatan Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	DISDIKBUD
			Sub Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	DISDIKBUD
4.1.2.(a)	Indikator 4.1.2.(a) angka anak tidak sekolah usia 7-12 tahun; usia 13-15 tahun; dan usia 16-18 tahun			
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan	Sub Kegiatan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/ Kesetaraan	DISDIKBUD
Sub Kegiatan Fasilitas Komunikasi Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan			DISDIKBUD	

Tujuan	PROGRAM	KEGIATAN	SUBKEG	OPD	
			Sub Kegiatan Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	DISDIKBUD	
			Sub Kegiatan Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	DISDIKBUD	
			Sub Kegiatan Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	DISDIKBUD	
			Sub Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	DISDIKBUD	
4.5.1*	Indikator 4.5.1* Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) pada tingkat SD/ sederajat, dan (ii) Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) pada tingkat SMP/ sederajat, SMA/SMK/ sederajat, dan Perguruan Tinggi untuk (a) perempuan/ laki-laki, (b) pedesaan/ perkotaan, (c) kuintil terbawah/ teratas, (d) disabilitas/ tanpa disabilitas				
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Sub Kegiatan Pengadaan Mebel Sekolah	DISDIKBUD	
			Sub Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Sekolah	DISDIKBUD	
			Sub Kegiatan Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	DISDIKBUD	
			Sub Kegiatan Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	DISDIKBUD	
			Sub Kegiatan Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	DISDIKBUD	
			Sub Kegiatan Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	DISDIKBUD	
			Sub Kegiatan Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	DISDIKBUD	
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Sub Kegiatan Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	DISDIKBUD	
			Sub Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Serba Guna/Aula	DISDIKBUD	
			Sub Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	DISDIKBUD	
			Sub Kegiatan Pengadaan Mebel Sekolah	DISDIKBUD	
			Sub Kegiatan Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	DISDIKBUD	
			Sub Kegiatan Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	DISDIKBUD	
			Sub Kegiatan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	DISDIKBUD	
			Sub Kegiatan Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	DISDIKBUD	
			Sub Kegiatan Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	DISDIKBUD	
	4.6.1.(a)	Indikator 4.6.1.(a) Persentase angka melek aksara penduduk umur ≥15 tahun			
		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan	Sub Kegiatan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/ Kesetaraan	DISDIKBUD
				Sub Kegiatan Fasilitasi Komunikasi Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	DISDIKBUD
				Sub Kegiatan Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	DISDIKBUD
	Sub Kegiatan Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan			DISDIKBUD	

Tujuan	PROGRAM	KEGIATAN	SUBKEG	OPD
			Sub Kegiatan Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	DISDIKBUD
			Sub Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	DISDIKBUD
4.c.1*	4.c.1* Indikator persentase guru yang memenuhi kualifikasi sesuai dengan standar nasional menurut jenjang pendidikan			
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Sub Kegiatan Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	DISDIKBUD
			Sub Kegiatan Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	DISDIKBUD
		Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Sub Kegiatan Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	DISDIKBUD
			Sub Kegiatan Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	DISDIKBUD
		Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Sub Kegiatan Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	DISDIKBUD
		Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan	Sub Kegiatan Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan	DISDIKBUD
		Tujuan 5	KESETARAAN GENDER	
5.2.1*	Indikator 5.2.1* proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan (fisik, seksual, atau emosional) oleh pasangan atau mantan pasangan dalam 12 bulan terakhir			
	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Kegiatan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Sub Kegiatan Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	DPMP4KB
		Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Sub Kegiatan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	DPMP4KB
Tujuan 6	AIR BERSIH DAN SANITASI LAYAK			
6.1.1*	Indikator 6.1.1* persentase rumah tangga yang menggunakan layanan air minum yang dikelola secara aman			
	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Sub Kegiatan Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	DPUPR
			Sub Kegiatan Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	DPUPR
			Sub Kegiatan Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	DPUPR
6.3.2.(a)	Indikator 6.3.2.(a) Indeks Kualitas Air (IKA)			
	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Sub Kegiatan Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman	DPUPR
			Sub Kegiatan Peningkatan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman	DPUPR
			Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	DPUPR

Tujuan	PROGRAM	KEGIATAN	SUBKEG	OPD
			Sub Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	DPUPR
			Sub Kegiatan Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	DPUPR
			Sub Kegiatan Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	DPUPR
	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Kegiatan Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	DLH
		Kegiatan Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Sub Kegiatan Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	DLH
Tujuan 8	MENINGKATKAN PERTUMBUHAN EKONOMI YANG INKLUSIF DAN BERKELANJUTAN, KESEMPATAN KERJA YANG PRODUKTIF DAN MENYELURUH, SERTA PEKERJAAN YANG LAYAK UNTUK SEMUA			
8.1.1*	Indikator 8.1.1* Laju pertumbuhan PDB per kapita			
	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, USAHA MIKRO (UMKM)	Kegiatan Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, penguatan kelembagaan dan Koordinasi dengan para Pemangku Kepentingan	Sub Kegiatan Pemulihan Usaha Mikro	DPPKUM
			Sub Kegiatan Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan	DPPKUM
	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SANG KEOLAHRAGAAN	Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga rekreasi	Sub Kegiatan Pemassalan olahraga dan penyelenggaraan festival Olahraga Rekreasi yang berjenjang dan berkelanjutan pada tingkat daerah, nasional, dan internasional	
	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Kegiatan Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Sub Kegiatan Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Disporapar
			Sub Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Disporapar
		Kegiatan Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Disporapar
	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Kegiatan Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Sub Kegiatan Penguatan Promosi melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Disporapar
			Sub Kegiatan Fasilitas Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik dalam dan Luar Negeri Kabupaten/Kota	Disporapar
			Sub Kegiatan Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	Disporapar
			Sub Kegiatan Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	Disporapar
	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Kegiatan Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Sub Kegiatan Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Disporapar
			Sub Kegiatan Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	Disporapar
			Sub Kegiatan Fasilitas Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	Disporapar

Tujuan	PROGRAM	KEGIATAN	SUBKEG	OPD	
	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Kegiatan Penetapan Pemberian Fasilitas/ Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Sub kegiatan Fasilitas Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota	DPMPTSP	
		Kegiatan Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Sub Kegiatan Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	DPMPTSP	
	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Sub Kegiatan Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	DPMPTSP	
8.5.2*	Indikator 8.5.2* tingkat pengangguran terbuka berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur				
	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Kegiatan Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Sub Kegiatan Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi		
			Sub Kegiatan Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota	DISNAKER	
		Kegiatan Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Sub Kegiatan Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	DISNAKER	
	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Kegiatan Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	Sub Kegiatan Penyediaan Sumber Daya Pelayanan antar Kerja	DISNAKER	
			Kegiatan Pelayanan antar Kerja	Sub Kegiatan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	DISNAKER
		Kegiatan Pelayanan antar Kerja	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan	DISNAKER	
			Sub kegiatan Perluasan Kesempatan Kerja	DISNAKER	
			Sub kegiatan Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	DISNAKER	
			Sub Kegiatan Job Fair/Bursa Kerja	DISNAKER	
			Sub kegiatan Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	DISNAKER	
	8.9.1.(a)	Indikator 8.9.1.(a) Jumlah wisatawan mancanegara.			
		PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Kegiatan Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Disporapar
		PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Kegiatan Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Sub Kegiatan Penguatan Promosi melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Disporapar
Sub Kegiatan Fasilitas Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik dalam dan Luar Negeri PariwisataKabupaten/Kota				Disporapar	
Sub Kegiatan Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri				Disporapar	
Sub Kegiatan Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri				Disporapar	
8.9.1.(b)	Indikator 8.9.1.(b) Jumlah kunjungan wisatawan nusantara.				
	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Kegiatan Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Sub Kegiatan Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Disporapar	
			Sub Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Disporapar	
		Kegiatan Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Disporapar	

Tujuan	PROGRAM	KEGIATAN	SUBKEG	OPD
	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Kegiatan Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Sub Kegiatan Penguatan Promosi melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Disporapar
			Sub Kegiatan Fasilitas Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	Disporapar
			Sub Kegiatan Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	Disporapar
			Sub Kegiatan Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	Disporapar
Tujuan 9	MEMBANGUN INFRASTRUKTUR YANG TANGGUH, MENINGKATKAN INDUSTRI INKLUSIF DAN BERKELANJUTAN, SERTA MENDORONG INOVASI			
9.1.2	Indikator 9.1.2 Jumlah penumpang dan barang berdasarkan moda transportasi			
	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Kegiatan Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	Sub Kegiatan Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal	DISHUB
			Sub Kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)	DISHUB
		Kegiatan Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Sub Kegiatan Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	DISHUB
		Kegiatan Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penyusunan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	DISHUB
		Kegiatan Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Sub Kegiatan Fasilitas Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	DISHUB
Tujuan 10	MENGURANGI KESENJANGAN INTRA DAN ANTAR NEGARA			
10.1.1.(b)	Indikator 10.1.1.(b) Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur			
	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Kegiatan Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar	Sub Kegiatan Penjangkauan Anak-Anak Terlantar	DINSOS
			Sub Kegiatan Rujukan Anak-Anak Terlantar	DINSOS
			Sub Kegiatan Pemantauan Terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar	DINSOS
		Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Sub Kegiatan Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	DINSOS
			Sub Kegiatan Fasilitas Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	DINSOS
			Sub Kegiatan Fasilitas Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	DINSOS
	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Sub Kegiatan Penyediaan Permakanan	DINSOS
			Sub Kegiatan Penyediaan Alat Bantu	DINSOS
			Sub Kegiatan Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	DINSOS
			Sub Kegiatan Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	DINSOS

Tujuan	PROGRAM	KEGIATAN	SUBKEG	OPD
		Kegiatan Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Sub Kegiatan Pemberian Layanan Kedaruratan	DINSOS
	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Kegiatan Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Sub Kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	DINSOS
			Sub Kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	DINSOS
			Sub Kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	DINSOS
			Sub Kegiatan Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	DINSOS
10.4.1.(b)	Indikator 10.4.1.(b) Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Kesejahteraan			
	PROGRAM PERLINDUNGAN JAMINAN SOSIAL	Kegiatan Pemeliharaan Anak- Anak Terlantar	Sub Kegiatan Penjangkauan Anak-Anak Terlantar	DINSOS
			Sub Kegiatan Rujukan Anak-Anak Terlantar	DINSOS
		Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Sub kegiatan Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	DINSOS
			Sub Kegiatan Fasilitas Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	DINSOS
			Sub Kegiatan Fasilitas Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	DINSOS
Tujuan 11	KOTA DAN PEMUKIMAN YANG BERKELANJUTAN			
11.1.1.(a)	Indikator 11.1.1(a) Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau			
	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Kegiatan Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Sub Kegiatan Penyusunan/ Review/ Legalisasi Kebijakan Bidang PKP	DISPERKIM
		Kegiatan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/ Peremajaan Permukiman Kumuh	DISPERKIM
			Sub Kegiatan Pelaksanaan Peremajaan Kawasan Permukiman Kumuh	DISPERKIM
	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Kegiatan Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	Sub Kegiatan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh	DISPERKIM
	11.2.1.(a)	Indikator 11.2.1.(a) Proporsi populasi yang mendapatkan akses yang nyaman pada transportasi publik		
	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Kegiatan Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	Sub Kegiatan Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal	DISHUB
			Sub Kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)	DISHUB
		Kegiatan Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Sub Kegiatan Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	DISHUB
		Kegiatan Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penyusunan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	DISHUB

Tujuan	PROGRAM	KEGIATAN	SUBKEG	OPD
		Kegiatan Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Sub Kegiatan Fasilitas Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	DISHUB
11.2.1.(b)	Indikator 11.2.1.(b) Persentase penduduk terlayani transportasi umum			
	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Kegiatan Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Sub Kegiatan Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	DISHUB
		Kegiatan Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penyusunan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	DISHUB
11.5.1*	Indikator 11.5.1* Jumlah korban meninggal, hilang, dan terkena dampak bencana per 100.000 orang			
	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Kegiatan Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Sub Kegiatan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)	BPBD
		Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	BPBD
			Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Kontijensi	BPBD
			Sub Kegiatan Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	BPBD
			Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota	BPBD
			Sub Kegiatan Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	BPBD
			Sub Kegiatan Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	BPBD
		Kegiatan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Sub Kegiatan Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/ Wabah Zoonosis Prioritas	BPBD
			Sub Kegiatan Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	BPBD
			Sub Kegiatan Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	BPBD
			Sub Kegiatan Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	BPBD
			Sub Kegiatan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	BPBD
		Kegiatan Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Sub Kegiatan Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	BPBD
	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Kegiatan Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Sub Kegiatan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	SATPOL PP (DAMKAR)
			Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	SATPOL PP (DAMKAR)
	11.6.1.(b)	Indikator 11.6.1.(b) Persentase rumah tangga yang mendapatkan akses pelayanan sampah		
PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN		Kegiatan Pengelolaan Sampah	Sub Kegiatan Penanganan sampah melalui pengangkutan	DLH
			Sub Kegiatan Penanganan sampah melalui pengoperasian dan pemeliharaan sarana dan prasarana penanganan sampah	DLH

Tujuan	PROGRAM	KEGIATAN	SUBKEG	OPD
			Sub Kegiatan Penanganan sampah melalui pengumpulan sampah	DLH
			Sub Kegiatan Penanganan sampah melalui pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan	DLH
11.6.2.(b)	Indikator 11.6.2.(b) Indeks Kualitas Udara			
	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Kegiatan Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	DLH
		Kegiatan Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Sub Kegiatan Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	DLH
	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Kegiatan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Sub Kegiatan Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	DLH
11.7.1.(a)	Indikator 11.7.1(a) Proporsi ruang terbuka perkotaan untuk semua			
	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Kegiatan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Sub Kegiatan Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	DLH
Tujuan 12	KONSUMSI DAN PRODUKSI YANG BERTANGGUNG JAWAB			
12.4.2*	Indikator 12.4.2* (a) Limbah B3 per kapita; dan (b) Proporsi limbah B3 yang ditangani/diolah berdasarkan jenis penanganannya/pengelolaannya			
	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Kegiatan Penyimpanan sementara Limbah B3	Sub Kegiatan Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan sementara Limbah B3	DLH
12.5.1.(a)	Indikator 12.5.1.(a) Jumlah timbulan sampah yang didaur ulang			
	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Kegiatan Pengelolaan Sampah	Sub Kegiatan Pengurangan sampah melalui pemanfaatan kembali sampah	DLH
			Sub Kegiatan Pengurangan sampah melalui pembatasan timbulan sampah	DLH
			Sub Kegiatan Pengurangan sampah melalui pendauran ulang sampah	DLH
Tujuan 13	PENANGANAN PERUBAHAN IKLIM			
13.2.2.(b)	Indikator 13.2.2.(b) Intessitas emisi gas rumah kaca (GRK)			
	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Kegiatan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Sub Kegiatan Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	DLH
	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Kegiatan Pengelolaan Sampah	Sub Kegiatan Pengurangan sampah melalui pemanfaatan kembali sampah	DLH
			Sub Kegiatan Pengurangan sampah melalui pembatasan timbulan sampah	DLH
			Sub Kegiatan Pengurangan sampah melalui pendauran ulang sampah	DLH
	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Kegiatan Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	DLH

Tujuan	PROGRAM	KEGIATAN	SUBKEG	OPD
		Kegiatan Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Sub Kegiatan Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	DLH
Tujuan 16	PERDAMAIAN, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh			
16.2.1.(b)	Indikator 16.2.1.(b) Prevalensi anak usia 13-17 tahun yang pernah mengalami kekerasan sepanjang hidupnya			
	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK	Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Sub Kegiatan Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	DPMP4KB
16.5.1.(a)	Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK)			
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Sub Kegiatan Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Inspektorat
			Sub Kegiatan Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Inspektorat
			Sub Kegiatan Reviu Laporan Kinerja	Inspektorat
			Sub Kegiatan Reviu Laporan Keuangan	Inspektorat
			Sub Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Inspektorat
16.6.1.(a)	Target 16.6.1.(a) Persentase instansi pemerintah yang mendapat opini wajar tanpa pengecualian			
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Sub Kegiatan Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Inspektorat
			Sub Kegiatan Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Inspektorat
			Sub Kegiatan Reviu Laporan Kinerja	Inspektorat
			Sub Kegiatan Reviu Laporan Keuangan	Inspektorat
			Sub Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Inspektorat
16.6.1.(b)	Indikator 16.6.1.(b) Persentase instansi pemerintah dengan skor sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) ≥B			
	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Sub kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	BAPPERIDA
			Sub kegiatan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	BAPPERIDA
			Sub kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	BAPPERIDA
			Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	BAPPERIDA
			Sub kegiatan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	BAPPERIDA
			Sub kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	BAPPERIDA

Tujuan	PROGRAM	KEGIATAN	SUBKEG	OPD
		Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	BAPPERIDA
			Sub kegiatan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	BAPPERIDA
			Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	BAPPERIDA
			Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	BAPPERIDA
			Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	BAPPERIDA
			Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	BAPPERIDA
		Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Sub kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	BAPPERIDA
			Sub kegiatan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	BAPPERIDA
			Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	BAPPERIDA
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kegiatan Penataan Organisasi	Sub Kegiatan Fasilitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	SETDA
			Sub kegiatan Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	SETDA
16.9.1*	Indikator 16.9.1* Proporsi anak umur di bawah 5 tahun yang kelahirannya dicatat oleh lembaga pencatatan sipil menurut umur			
	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Kegiatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Sub Kegiatan Penerbitan Dokumen Atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan	DISDUKCAPIL
	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Kegiatan Pelayanan Pencatatan Sipil	Sub kegiatan Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	DISDUKCAPIL
		Kegiatan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Sub Kegiatan Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil	DISDUKCAPIL
16.9.1.(a)	Indikator 16.9.1.(a) Persentase kepemilikan akta lahir untuk penduduk 0-17 tahun pada 40% berpendapatan bawah			
	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Kegiatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Sub Kegiatan Penerbitan Dokumen Atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan	DISDUKCAPIL
	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Kegiatan Pelayanan Pencatatan Sipil	Sub kegiatan Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	DISDUKCAPIL
		Kegiatan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Sub Kegiatan Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil	DISDUKCAPIL
16.9.1.(b)	Indikator 16.9.1.(b) Persentase cakupan kepemilikan akta kelahiran pada penduduk 0-17 tahun			
	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Kegiatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Sub Kegiatan Penerbitan Dokumen Atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan	DISDUKCAPIL

Tujuan	PROGRAM	KEGIATAN	SUBKEG	OPD
	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Kegiatan Pelayanan Pencatatan Sipil	Sub kegiatan Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	DISDUKCAPIL
		Kegiatan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Sub Kegiatan Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil	DISDUKCAPIL

Sumber: diolah tim penyusun RKPD, 2024

5.1.8 Dukungan Program RKPD Kota Magelang Tahun 2025 Terhadap Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim

Pada tahun 2024, dilaksanakan kajian adaptasi dan mitigasi perubahan iklim yg dielaborasikan dengan dokumen perencanaan kota. Salah satu kegiatan yang mendukung mitigasi perubahan iklim adalah dengan pembentukan kampung iklim baru dimana pada tahun 2024 terdapat 31 kampung iklim. Selain itu di 2023 disusun Rencana Induk Pengelolaan Keanekaragaman Hayati yang rencana aksinya pada tahun 2024 sebagai pendukung strategi adaptasi dan mitigasi perubahan iklim. Sedangkan dukungan program Pemerintah Kota Magelang terhadap adaptasi dan mitigasi perubahan iklim tersaji dalam tabel berikut ini.

Tabel 5.18 Dukungan Program RKPD Kota Magelang Tahun 2026 Terhadap Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim

No.	Program	Indikator Program	Target RPJMD Tahun 2026	Target Tahun 2026	Anggaran	Perangkat Daerah
1	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Persentase dokumen perencanaan lingkungan hidup yang tersusun	100%	100%	104.513.000	DLH
2	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Persentase ketersediaan data pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan	100%	100%	327.563.800	DLH
3	Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3)	Persentase usaha dan atau kegiatan yang mempunyai rincian teknis penyimpanan sementara LB3	100%	100%	6.150.200	DLH
4	Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Persentase ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan	50,00%	50,00%	87.745.000	DLH
5	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Persentase pengaduan kasus lingkungan hidup yang terselesaikan	75%	100%	14.516.400	DLH
6	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Persentase peningkatan lembaga masyarakat dan lembaga pendidikan yang mengikuti pendidikan pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup	10,59%	22,22%	185.565.900	DLH
7	Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Persentase cakupan penghargaan yang diterima masyarakat	18,23%	18,23%	346.493.500	DLH
8	Program Pengelolaan Persampahan	Peningkatan persentase sampah yang terkelola	2,50%	2,50%	10.804.141.988	DLH
9	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	Proporsi RTH public untuk pengelolaan keanekaragaman hayati	32,41%	32,41%	6.547.770.810	DLH
10	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Persentase peningkatan produksi perikanan budidaya	1,25	1,25	472.691.280	DISPERPA
JUMLAH					18.897.151.878	

Sumber: diolah tim penyusun RKPD, 2025

5.2 PENDANAAN DAERAH

Rencana kerja dan pendanaan RKPD Kota Magelang tahun 2026 disusun untuk menjalankan program kegiatan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan serta pelayanan kepada masyarakat. Program prioritas RKPD Kota Magelang tahun 2026 merupakan penjabaran dari prioritas daerah yang tertuang dalam RPJMD tahun 2021-2026 serta sinergis dengan prioritas nasional dan provinsi. Dalam penyusunan rencana kerja dan pendanaan sudah menyesuaikan dengan tema pembangunan Kota Magelang tahun 2026 yaitu **Peningkatan Produktivitas untuk Swasembada Pangan dan Energi, serta Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif**.

5.2.1 Indikator Kinerja per Program berdasarkan Urusan

Program, kegiatan, dan sub kegiatan pembangunan Kota Magelang tahun 2026, didukung dengan pembiayaan yang berasal dari berbagai sumber dana seperti DAU, DBHCHT, DBH Pajak Rokok, dan lain lain pendapatan yang sah. Kebutuhan penganggaran untuk membiayai pelaksanaan program hingga sub kegiatan untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan daerah, upaya pencapaian target capaian kinerja yang merupakan rangkaian upaya penerjemahan Visi Misi Walikota dilaksanakan secara bertahap. Pada tahun 2026, secara terperinci dipersiapkan kebutuhan anggaran per program sebagaimana tabel berikut:

Tabel 5.19 Hubungan Program Prioritas dan Dukungan ke Pusat dan Provinsi

No	Urusan / Bidang Urusan / Program	Indikator Program	Prioritas		Penanggung Jawab
			Nasional	Daerah	
A	URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR				
1-1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN				
1	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	APK PAUD APM SD/MI APK SD/MI APS SD/MI APM SMP/MTs APK SMP/MTs APS SMP/MTs Angka Kelulusan Warga Belajar Pendidikan Kesetaraan Persentase Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Terakreditasi Persentase SD Terakreditasi Persentase SMP Terakreditasi Persentase Satuan Pendidikan Kesetaraan Terakreditasi	Ya	Ya	DISDIKBUD
2	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Persentase satuan pendidikan yang mengembangkan kurikulum	Ya	Ya	DISDIKBUD
3	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Persentase guru di satuan Pendidikan Dasar yang berkualifikasi minimal S1 Persentase guru di satuan PAUD dan pendidikan nonformal/ kesetaraan yang berkualifikasi minimal S1			
4	PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	Persentase satuan pendidikan yang memiliki izin (memiliki izin rekomendasi dari dinas pendidikan dan kebudayaan)			
5	PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA	Persentase Pendidik pada Satuan Pendidikan Dasar yang membuat karya sastra (dalam bentuk buku)			

No	Urusan / Bidang Urusan / Program	Indikator Program	Prioritas		Penanggung Jawab
			Nasional	Daerah	
1-2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				
1	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Cakupan penemuan dan pengobatan penyakit menular Cakupan penemuan dan pengendalian penyakit tidak menular Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir Persentase Ketersediaan Obat yang Sesuai Standar Persentase Pemenuhan Fasilitas Kesehatan Sesuai Standar Indeks Keluarga Sehat	Ya	Ya	Dinas Kesehatan
2	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase sumber daya manusia kesehatan yang memenuhi standar (sertifikat kompetensi)	Ya	Ya	Dinas Kesehatan
3	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Cakupan perijinan, pengendalian dan pengawasan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman Persentase Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/ Restoran dan Depot Air Minum (DAM) yang bersertifikat layak hygiene	Ya	Ya	Dinas Kesehatan
4	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase kelurahan siaga aktif strata mandiri	Ya	Ya	Dinas Kesehatan
1-3	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG				
1	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase Panjang Jaringan Irigasi yang Kondisi Baik	Ya	Ya	DPUPR
2	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap pelayanan sumber air minum layak Proporsi populasi yang memiliki akses layanan sumber air minum, aman, dan berkelanjutan	Ya	Ya	DPUPR
3	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	Persentase Pembangunan TPST/3R	Tidak	Ya	DPUPR
4	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase jumlah rumah tangga yang memiliki akses terhadap pelayanan sanitasi layak	Ya	Ya	DPUPR
5	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase drainase dalam kondisi baik	Tidak	Ya	DPUPR
6	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Persentase bangunan yang memiliki PBG Persentase Progres Pembangunan Gedung Balai Kota	Ya	Ya	DPUPR
7	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Persentase kawasan strategis yang ditata	Tidak	Ya	DPUPR
8	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Persentase Panjang jalan dalam kondisi mantap	Ya	Ya	DPUPR

No	Urusan / Bidang Urusan / Program	Indikator Program	Prioritas		Penanggung Jawab
			Nasional	Daerah	
9	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Persentase proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi	Ya	Ya	DPUPR
10	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Persentase Perwujudan Kesesuaian Pemanfaatan Ruang	Ya	Ya	DPUPR
1-4	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN				
1	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Persentase penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana Persentase penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban relokasi program pemerintah kabupaten/ kota	Ya	Ya	DISPERKIM
2	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase kawasan permukiman kumuh yang ditata	Ya	Ya	DISPERKIM
3	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Persentase rumah tidak layak huni di luar permukiman kumuh yang tertangani	Ya	Ya	DISPERKIM
4	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Persentase lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan PSU	Ya	Ya	DISPERKIM
1-5	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT				
1	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Penyelesaian Pelanggaran K3	Tidak	Ya	SATPOLPP
2	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Persentase layanan penanggulangan bencana	Ya	Ya	SATPOLPP
3	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Persentase pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran*	Ya	Ya	SATPOLPP
1-6	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL				
1	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase PSKS yang diberdayakan	Ya	Ya	Dinas Sosial
2	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang mendapatkan rehabilitasi)	Ya	Ya	Dinas Sosial
3	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase PMKS yang menerima bantuan	Ya	Ya	Dinas Sosial
4	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase korban bencana alam dan sosial yang tertangani	Ya	Ya	Dinas Sosial
5	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Persentase luas taman makam pahlawan yang dipelihara	Tidak	Tidak	Dinas Sosial
B	URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR				
2-7	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA				
1	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase tenaga kerja bersertifikat kompetensi Persentase angkatan kerja yang mengikuti pelatihan kerja	Ya	Ya	Dinas Tenaga Kerja

No	Urusan / Bidang Urusan / Program	Indikator Program	Prioritas		Penanggung Jawab
			Nasional	Daerah	
2	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase pencari kerja yang mendapatkan fasilitasi penempatan kerja Persentase peserta pelatihan yang menjalankan wirausaha	Ya	Ya	Dinas Tenaga Kerja
3	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)	Ya	Ya	Dinas Tenaga Kerja
2-8	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK				
1	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase program perangkat daerah yang responsif gender Persentase perempuan kepala keluarga dan perempuan rentan terlatih dalam perekonomian keluarga Persentase proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPRD Persentase lembaga yang anggotanya diberdayakan	Ya	Ya	DPMP4KB
2	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)*	Ya	Ya	DPMP4KB
3	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Persentase Keluarga Berkualitas	Ya	Ya	DPMP4KB
4	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Persentase PD yang mengelola data gender dan anak	Ya	Ya	DPMP4KB
5	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Persentase capaian 4 (empat) kluster pemenuhan hak anak	Ya	Ya	DPMP4KB
2-9	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN				
1	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Persentase Ketersediaan Pangan	Ya	Ya	Dinas Pertanian Dan Pangan
2	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Persentase Penanganan Daerah Rentan Rawan Pangan	Ya	Ya	Dinas Pertanian Dan Pangan
3	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Persentase Pangan Segar yang Aman	Ya	Ya	Dinas Pertanian Dan Pangan
2-10	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN				
1	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	Persentase kasus sengketa tanah yang tertangani	Ya	Ya	Dinas Perumahan Dan Kawasan Pemukiman
2	PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG	Persentase masalah pada tanah kosong yang terselesaikan	Ya	Ya	Dinas Perumahan Dan Kawasan Pemukiman
3	PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	Persentase luas lahan bersertifikat	Ya	Ya	Dinas Perumahan Dan Kawasan Pemukiman
4	PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	Persentase kasus permasalahan pengadaan tanah yang mendapat penyelesaian ganti rugi/santunan tanah			
2-11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP				
1	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase dokumen perencanaan lingkungan hidup yang tersusun	Tidak	Ya	Dinas Lingkungan Hidup

No	Urusan / Bidang Urusan / Program	Indikator Program	Prioritas		Penanggung Jawab
			Nasional	Daerah	
2	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase ketersediaan data pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan	Ya	Ya	Dinas Lingkungan Hidup
3	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Proporsi RTH publik untuk pengelolaan keanekaragaman hayati	Tidak	Ya	Dinas Lingkungan Hidup
4	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Persentase usaha dan atau kegiatan yang mempunyai rincian teknis penyimpanan sementara LB3	Ya	Ya	Dinas Lingkungan Hidup
5	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Persentase ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan	Tidak	Ya	Dinas Lingkungan Hidup
6	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase peningkatan lembaga masyarakat dan lembaga pendidikan yang mengikuti pendidikan pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup	Tidak	Ya	Dinas Lingkungan Hidup
7	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase cakupan penghargaan yang diterima masyarakat	Tidak	Ya	Dinas Lingkungan Hidup
8	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase pengaduan kasus lingkungan hidup yang terselesaikan	Ya	Ya	Dinas Lingkungan Hidup
9	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Peningkatan persentase sampah yang terkelola	Tidak	Ya	Dinas Lingkungan Hidup
2-12	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL				
1	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Persentase Penduduk Usia Wajib KTP yang sudah melakukan Perekaman KTP-EL Persentase Kepemilikan KK Persentase Kepemilikan KIA	Ya	Ya	DISDUKCAPIL
2	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Persentase pasangan yang memiliki akta Perkawinan Persentase penduduk 0-18 tahun yang memiliki akta kelahiran Persentase penerbitan akta kematian Persentase penerbitan akta perceraian	Ya	Ya	DISDUKCAPIL
3	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Persentase data kependudukan dan pencatatan sipil yang terkelola berbasis Teknologi Informasi	Ya	Ya	DISDUKCAPIL
4	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Persentase Jenis Data yang Tersaji dalam Profil Kependudukan			
2-13	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA				
1	PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA	Persentase Kelurahan yang difasilitasi dalam program pemberdayaan masyarakat	Tidak	Ya	DPMP4KB
2	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Persentase kelurahan yang melakukan evaluasi perkembangan kelurahan sesuai dengan regulasi	Tidak	Ya	DPMP4KB
3	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Persentase kelurahan yang lembaga kemasyarakatannya diberdayakan	Tidak	Ya	DPMP4KB

No	Urusan / Bidang Urusan / Program	Indikator Program	Prioritas		Penanggung Jawab
			Nasional	Daerah	
2-14	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA				
1	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Persentase Penurunan Angka Kelahiran pada Remaja Usia 15-19 tahun (ASFR 15-19 th)*	Ya	Ya	DPMP4KB
2	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Persentase anggota keluarga tribina, UPPKS yang ber-KB	Ya	Ya	DPMP4KB
3	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA	Contraceptive Prevalence Rate (CPR)			
2-15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN				
1	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Kinerja lalu lintas kota (VC Ratio)* Pengguna moda transportasi umum di perkotaan (PPTUK)	Ya	Ya	Dinas Perhubungan
2-16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA				
1	PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Tingkat Keterbukaan Informasi Publik	Tidak	Ya	DISKOMINSTA
2	PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	Persentase pemanfaatan aplikasi informatika	Ya	Ya	DISKOMINSTA
2-17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH				
1	PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	Persentase jumlah KSP/USP yang memiliki ijin usaha simpan pinjam	Tidak	Ya	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan
2	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase koperasi aktif yang patuh terhadap perundang-undangan	Tidak	Ya	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan
3	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Persentase KSP/USP Koperasi yang meningkat status kesehatannya	Tidak	Ya	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan
4	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase SDM pengelola koperasi yang meningkat kapasitasnya	Ya	Ya	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan
5	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Persentase koperasi berkualitas	Ya	Ya	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan
6	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Persentase wirausaha pemula yang diberdayakan	Ya	Ya	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan
7	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Persentase peningkatan omzet pelaku usaha mikro	Ya	Ya	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan
2-18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL				
1	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Persentase Investor PMA/PMDN	Ya	Ya	DPMPPTSP
2	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Persentase LOI yang ditindaklanjuti	Tidak	Ya	DPMPPTSP
3	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Persentase Penerbitan Perizinan dan Non Perizinan yang Sesuai dengan SOP	Ya	Ya	DPMPPTSP
4	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Persentase Pelaku Usaha yang memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku	Tidak	Ya	DPMPPTSP
5	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Persentase pertumbuhan pemanfaatan data, Informasi dan Sistem Informasi PM	Tidak	Ya	DPMPPTSP

No	Urusan / Bidang Urusan / Program	Indikator Program	Prioritas		Penanggung Jawab
			Nasional	Daerah	
2-19	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA				
1	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Persentase organisasi kepemudaan yang dikembangkan Persentase peningkatan pemuda yang dibina	Ya	Ya	Dinas Kepemudaan, Olah Raga, Dan Pariwisata
2	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAH RAGAAN	Persentase peningkatan prestasi di bidang olahraga Persentase peningkatan atlet yang dibina Persentase pelatih yang bersertifikat	Ya	Ya	Dinas Kepemudaan, Olah Raga, Dan Pariwisata
3	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Persentase organisasi kepramukaan yang dibina	Tidak	Ya	Dinas Kepemudaan, Olah Raga, Dan Pariwisata
2-20	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK				
	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Persentase perkembangan publikasi data sektoral dalam portal open data	Tidak	Ya	Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik
2-21	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN				
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Nilai Tata Kelola Keamanan Informasi Nilai Pengelolaan Risiko Keamanan Informasi Nilai Kerangka Kerja Keamanan Informasi Nilai Pengelolaan Aset Informasi Nilai Teknologi dan Keamanan Informasi	Tidak	Ya	Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik
2-22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN				
1	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Persentase kebudayaan lokal yang dikembangkan	Ya	Ya	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
2	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	Persentase kesenian tradisional yang dikembangkan	Ya	Ya	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
3	PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	Persentase peningkatan kunjungan museum	Tidak	Ya	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
4	PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	Cakupan pembinaan sejarah			
5	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Persentase cagar budaya yang dilestarikan			
2-23	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN				
1	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Persentase pemerataan layanan perpustakaan Rasio ketercukupan koleksi perpustakaan Rasio ketercukupan tenaga perpustakaan Persentase peningkatan kunjungan masyarakat ke perpustakaan Persentase Perpustakaan ber-SNP Persentase peningkatan keterlibatan masyarakat dalam kegiatan perpustakaan Persentase peningkatan anggota perpustakaan	Ya	Ya	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan

No	Urusan / Bidang Urusan / Program	Indikator Program	Prioritas		Penanggung Jawab
			Nasional	Daerah	
2-24	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN				
1	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Persentase berkas yang dikelola sesuai ketentuan	Tidak	Ya	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan
2	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	Persentase arsip yang dilindungi dan terselamatkan	Tidak	Ya	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan
C	URUSAN PILIHAN				
3-25	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN				
1	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Persentase peningkatan produksi perikanan budidaya	Ya	Ya	Dinas Pertanian Dan Pangan
2	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Jumlah total produksi olahan perikanan (ton)	Ya	Ya	Dinas Pertanian Dan Pangan
3-26	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA				
1	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Presentase Destinasi pariwisata yang terkelola dengan baik	Ya	Ya	Dinas Kepemudaan, Olah Raga, Dan Pariwisata
2	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke kota	Ya	Ya	Dinas Kepemudaan, Olah Raga, Dan Pariwisata
3	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Persentase SDM Pariwisata yang meningkat kapasitasnya Persentase peningkatan Pelaku ekonomi kreatif yang meningkat kapasitasnya	Ya	Ya	Dinas Kepemudaan, Olah Raga, Dan Pariwisata
3-27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN				
1	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase sarana pembibitan yang terpelihara Persentase Peningkatan sarana Peternakan	Ya	Ya	Dinas Pertanian Dan Pangan
2	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Persentase penurunan jumlah kasus penyakit hewan Persentase peningkatan produk pangan asal hewan yang ASUH	Ya	Ya	Dinas Pertanian Dan Pangan
3	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Persentase luasan lahan bencana pertanian yang tertangani	Ya	Ya	Dinas Pertanian Dan Pangan
4	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	Persentase peningkatan kelayakan usaha peternakan dan kesehatan hewan yang diawasi pelaksanaannya secara berkala	Tidak	Ya	Dinas Pertanian Dan Pangan
5	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase kelompok tani yang meningkat kapasitasnya	Ya	Ya	Dinas Pertanian Dan Pangan
6	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Persentase Prasarana Pertanian Persentase Peningkatan prasarana Peternakan			
3-30	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN				
1	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Persentase pelaku usaha yang memiliki izin usaha	Tidak	Ya	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan
2	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Persentase sarana distribusi perdagangan dalam kondisi baik	Tidak	Ya	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan

No	Urusan / Bidang Urusan / Program	Indikator Program	Prioritas		Penanggung Jawab
			Nasional	Daerah	
3	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Persentase koefisien variasi harga antar waktu*	Ya	Ya	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan
4	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Nilai ekspor	Ya	Ya	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan
5	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	Tidak	Ya	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan
3-31	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN				
1	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah	Ya	Ya	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan
2	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN / KOTA	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah IUI yang dikeluarkan oleh instansi terkait Persentase jumlah IKM yang memiliki legalitas usaha	Tidak	Ya	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan
3	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Ketersediaan informasi industri terkini dan lengkap	Tidak	Ya	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan
D	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN				
4-1	SEKRETARIAT DAERAH				
1	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase Kebijakan administrasi tata pemerintahan yang terfasilitasi Persentase Kerjasama daerah yang terfasilitasi Persentase kebijakan di bidang kesejahteraan rakyat yang dilaksanakan Persentase Produk Hukum yang terfasilitasi	Tidak	Ya	Sekretariat Daerah
2	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase progres fisik seluruh OPD Persentase Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Perekonomian dan SDA yang dilaksanakan Tingkat kematangan UKPBJ	Tidak	Ya	Sekretariat Daerah
3	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA	Persentase Perangkat Daerah dengan Tingkat Kematangan Organisasi Sedang Indeks Kepuasan Pimpinan (Prokompim) Indeks Kepuasan Pimpinan (Umum)	Tidak	Ya	Sekretariat Daerah
4-2	SEKRETARIAT DPRD				
1	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Persentase Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD yang terlaksana	Tidak	Ya	Sekretariat DPRD
E	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				
5-1	PERENCANAAN				
1	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Cakupan perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah yang berkualitas	Tidak	Ya	BAPPEDA

No	Urusan / Bidang Urusan / Program	Indikator Program	Prioritas		Penanggung Jawab
			Nasional	Daerah	
2	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Tingkat Implementasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Tingkat Implementasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA Tingkat Implementasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Tidak	Ya	BAPPEDA
5-2	KEUANGAN				
1	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Persentase capaian pengelolaan keuangan daerah bidang anggaran Persentase capaian pengelolaan keuangan daerah bidang perbendaharaan Persentase capaian pengelolaan keuangan daerah bidang akuntansi	Tidak	Ya	BPKAD
2	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Cakupan pengelolaan barang milik daerah	Tidak	Ya	BPKAD
3	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah	Tidak	Ya	BPKAD
5-3	KEPEGAWAIAN				
1	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Persentase capaian target aspek sistem merit	Tidak	Ya	BKPSDM
5-4	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN				
1	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Persentase ASN yang mengikuti pengembangan kompetensi sesuai dengan jabatannya	Tidak	Ya	BKPSDM
5-5	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN				
1	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan Persentase pemanfaatan hasil inovasi	Ya	Ya	BAPPEDA
F	UNSUR PENGAWASAN				
6-1	INSPEKTORAT DAERAH				
1	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Persentase penyelenggaraan pengawasan	Tidak	Ya	Inspektorat
2	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Persentase entitas yang telah mendapatkan pendampingan dan asistensi	Tidak	Ya	Inspektorat
G	UNSUR KEWILAYAHAN				
7-1.1	KECAMATAN MAGELANG SELATAN				
1	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Cakupan program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Tidak	Ya	Kecamatan Magelang Selatan
2	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Tidak	Ya	Kecamatan Magelang Selatan
3	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Cakupan program koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	Tidak	Ya	Kecamatan Magelang Selatan

No	Urusan / Bidang Urusan / Program	Indikator Program	Prioritas		Penanggung Jawab
			Nasional	Daerah	
7-1.2	KECAMATAN MAGELANG TENGAH				
1	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Cakupan program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Tidak	Ya	Kecamatan Magelang Tengah
2	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Tidak	Ya	Kecamatan Magelang Tengah
3	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Cakupan program koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	Tidak	Ya	Kecamatan Magelang Tengah
7-1.3	KECAMATAN MAGELANG UTARA				
1	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Cakupan program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Tidak	Ya	Kecamatan Magelang Utara
2	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Tidak	Ya	Kecamatan Magelang Utara
3	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Cakupan program koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	Tidak	Ya	Kecamatan Magelang Utara
H	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM				
8-1	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK				
1	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Persentase Pembinaan Wawasan Kebangsaan	Ya	Ya	Badan Kesatuan Bangsa, Politik Dan Perlindungan Masyarakat
2	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Persentase Penduduk Usia Pemilih Pemula yang Berpartisipasi dalam Agenda Politik	Tidak	Ya	Badan Kesatuan Bangsa, Politik Dan Perlindungan Masyarakat
3	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Persentase Organisasi Kemasyarakatan yang Diberdayakan Persentase Organisasi Kemasyarakatan yang Aktif	Tidak	Ya	Badan Kesatuan Bangsa, Politik Dan Perlindungan Masyarakat
4	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Persentase Pembinaan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	Tidak	Ya	Badan Kesatuan Bangsa, Politik Dan Perlindungan Masyarakat
5	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Jumlah Konflik Sosial*	Tidak	Ya	Badan Kesatuan Bangsa, Politik Dan Perlindungan Masyarakat

Sumber: diolah tim penyusun RKPD, 2024

Dalam rangka efisiensi dan efektifitas pelaksanaan program pembangunan serta untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, maka pada RKPD Tahun 2026 dilakukan targetting indikator program tahun 2026 pada masing-masing urusan dengan mempertimbangkan realisasi tahun 2024 sebagaimana tersaji pada data berikut ini.

Tabel 5.20 Target Program Tahun 2026

No	Bidang Urusan / Program Prioritas		Indikator Kinerja	Target RPJMD s.d Tahun 2026	Realisasi Tahun 2024	Target Tahun 2026
	Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan					
1	Program Pengelolaan Pendidikan	APK PAUD		100,00%	81,89%	100,00%
		APM SD/ MI		100,00%	100,13%	100,00%

No	Bidang Urusan / Program Prioritas	Indikator Kinerja	Target RPJMD s.d Tahun 2026	Realisasi Tahun 2024	Target Tahun 2026
		APK SD/ MI	100,00%	126,80%	100,00%
		Angka Putus Sekolah SD/MI	0,00	0,00	0,00
		APM SMP/MTs	100,00%	145,59%	100,00%
		APK SMP/MTs	100,00%	186,76%	100,00%
		Angka Putus Sekolah SMP/MTs	0,00	0,00	0,00
		Angka Kelulusan Warga Belajar Pendidikan Kesetaraan	97,50%	100,00%	100,00%
		Persentase Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Terakreditasi	72,51%	99,21%	99,21%
		Persentase SD Terakreditasi	100,00%	100,00%	100,00%
		Persentase SMP Terakreditasi	100,00%	100,00%	100,00%
		Persentase Satuan Pendidikan Kesetaraan Terakreditasi	100,00%	75,00%	100,00%
2	Program Pengembangan Kurikulum	Persentase satuan pendidikan yang mengembangkan kurikulum	100,00%	100,00%	100,00%
3	Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Persentase guru di satuan Pendidikan Dasar yang berkualifikasi minimal S1	100,00%	98,95%	100,00%
		Persentase guru di satuan PAUD dan pendidikan nonformal/ kesetaraan yang berkualifikasi minimal S1	80,00%	66,33%	80,00%
4	Program Pengendalian Perizinan Pendidikan	Persentase satuan pendidikan yang memiliki izin (memiliki izin rekomendasi dari dinas pendidikan dan kebudayaan)	100,00%	100,00%	100,00%
5	Program Pengembangan Bahasa dan Sastra	Persentase Pendidik pada Satuan Pendidikan Dasar yang membuat karya sastra (dalam bentuk buku)	35,00%	20,90%	35,00%
Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan					
1	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Cakupan penemuan dan pengobatan penyakit menular	70,00%	100,00%	100,00%
		Cakupan penemuan dan pengendalian penyakit tidak menular	80,00%	100,00%	100,00%
		Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	100,00%	100,00%	100,00%
		Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	100,00%	100,00%	100,00%
		Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	100,00%	100,00%	100,00%
		Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100,00%	128,27%	100,00%
		Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	100,00%	100,00%	100,00%
		Persentase Ketersediaan Obat yang Sesuai Standar	100,00%	100,00%	100,00%
		Persentase Pemenuhan Fasilitas Kesehatan Sesuai Standar	100,00%	100,00%	100,00%
		Indeks Keluarga Sehat	0,80	0,41	0,80
2	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Persentase sumber daya manusia kesehatan yang memenuhi standar (sertifikat kompetensi)	100,00%	92,37%	100,00%

No	Bidang Urusan / Program Prioritas	Indikator Kinerja	Target RPJMD s.d Tahun 2026	Realisasi Tahun 2024	Target Tahun 2026
3	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	Cakupan perijinan, pengendalian dan pengawasan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman	100,00%	97,04%	100,00%
		Persentase Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/ Restoran dan Depot Air Minum (DAM) yang bersertifikat layak hygiene	100,00%	50,00%	100,00%
4	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Persentase kelurahan siaga aktif strata mandiri	100,00%	88,24%	100,00%
	Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang				
1	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Persentase Panjang Jaringan Irigasi yang Kondisi Baik	81,00%	58,00%	81,00%
2	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	Persentase drainase dalam kondisi baik	65,00%	34,75%	65,00%
3	Program Penataan Bangunan Gedung	Persentase bangunan yang memiliki PBG	27,50%	27,15%	27,50%
		Persentase Progres Pembangunan Gedung Balai Kota	100,00%	10,00%	100,00%
4	Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya	Persentase kawasan strategis yang ditata	100,00%	70,00%	100,00%
5	Program Penyelenggaraan Jalan	Persentase Panjang jalan dalam kondisi mantab	95,00%	85,69%	95,00%
6	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Persentase proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi	100,00%	100,00%	100,00%
7	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Persentase Perwujudan Kesesuaian Pemanfaatan Ruang	80,00%	83,34%	83,34%
8	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Persentase jumlah rumah tangga yang memiliki akses terhadap pelayanan sanitasi layak*	93,49%	101,97%	100,00%
9	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap pelayanan sumber air minum layak*	98,65%	108,47%	100,00%
		Proporsi populasi yang memiliki akses layanan sumber air minum, aman, dan berkelanjutan	35,00%	87,74%	87,74%
10	Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional	Persentase Pembangunan TPST/3R	80,00%	29.73%	80,00%
	Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman				
1	Program pengembangan perumahan	Persentase penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana	90,00%	100,00%	100,00%
		Persentase penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban relokasi program pemerintah kab/kota	46,78%	100,00%	100,00%
2	Program Kawasan Permukiman	Persentase kawasan permukiman kumuh yang ditata	100,00%	73,47%	100,00%
3	Program perumahan dan kawasan permukiman kumuh	Persentase rumah tidak layak huni di luar permukiman kumuh yang tertangani	100,00%	74,21%	100,00%
4	Program peningkatan prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU)	Persentase lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan PSU	100,00%	96,61%	100,00%

No	Bidang Urusan / Program Prioritas	Indikator Kinerja	Target RPJMD s.d Tahun 2026	Realisasi Tahun 2024	Target Tahun 2026
Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat					
1	Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase penyelesaian pelanggaran perda	100,00%	100,00%	100,00%
2	Program Penanggulangan Bencana	Persentase layanan penanggulangan bencana	100,00%	100,00	100,00%
3	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran	Persentase pencegahan, penanggulangan, penyelamatan	100,00%	100,00%	100,00%
		Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran*	15 menit	5,89 menit	15 menit
Urusan Pemerintahan Bidang Sosial					
1	Program Rehabilitasi Sosial	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang mendapatkan rehabilitasi	100,00%	100,00%	100,00%
2	Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	Persentase PMKS yang menerima bantuan	100,00%	100,00%	100,00%
3	Program Penanganan Bencana	Persentase korban bencana alam dan sosial yang tertangani	100,00%	100,00%	100,00%
4	Program Pemberdayaan Sosial	Persentase PSKS yang diberdayakan	91,67%	83,33%	91,67%
5	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Persentase luas taman makam pahlawan yang dipelihara	100,00%	100,00%	100,00%
Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja					
1	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase tenaga kerja bersertifikat kompetensi	75,00%	95,25%	95,25%
		Persentase angkatan kerja yang mengikuti pelatihan kerja	80,00%	74,91%	80,00%
2	Program Penempatan Tenaga Kerja	Persentase pencari kerja yang mendapatkan fasilitasi penempatan kerja	80,00%	87,27%	87,27%
		Persentase peserta pelatihan yang menjalankan wirausaha	75,00%	52,00%	75,00%
3	Program Hubungan Industrial	Persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)	50,00%	37,91%	50,00%
Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak					
1	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Persentase program perangkat daerah yang responsif gender	17,34%	18,13%	18,13%
		Persentase perempuan kepala keluarga dan perempuan rentan terlatih dalam perekonomian keluarga	20,00%	23,85%	23,85%
		Persentase proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPRD	20,00%	24,00%	24,00%
		Persentase lembaga yang anggotanya diberdayakan	20,90%	22,22%	22,22%
2	Program Perlindungan Perempuan	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)*	0,04%	53,77%	53,77%
3	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Persentase Keluarga Berkualitas	16,57%	18,22%	18,22%
4	Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	Persentase PD yang mengelola data gender dan anak	17,24%	39,29%	39,29%

No	Bidang Urusan / Program Prioritas	Indikator Kinerja	Target RPJMD s.d Tahun 2026	Realisasi Tahun 2024	Target Tahun 2026
5	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Persentase capaian 4 (empat) kluster pemenuhan hak anak	13,79%	73,08%	73,08%
	Urusan Pemerintahan Bidang Pangan				
1	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Persentase Ketersediaan Pangan	100,00%	114,85%	100,00%
2	Program Penanganan Kerawanan Pangan	Persentase Penanganan Daerah Rentan Rawan Pangan	100,00%	100,00%	100,00%
3	Program Pengawasan Keamanan Pangan	Persentase Pangan Segar yang Aman	88,00%	88,48%	88,48%
	Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan				
1	Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	Persentase kasus sengketa tanah yang tertangani	100,00%	33,33%	100,00%
2	Program Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan	Persentase kasus permasalahan pengadaan tanah yang mendapat penyelesaian ganti rugi/santunan tanah	100,00%	97,67%	100,00%
3	Program Pengelolaan Tanah Kosong	Persentase masalah pada tanah kosong yang terselesaikan	100,00%	0,00%	100,00%
4	Program Penatagunaan Tanah	Persentase luas lahan bersertifikat	100,00%	62,42%	100,00%
	Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup				
1	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Persentase dokumen perencanaan lingkungan hidup yang tersusun	100,00%	100,00%	100,00%
2	Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Persentase ketersediaan data pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan	100,00%	100,00%	100,00%
3	Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan	Persentase usaha dan atau kegiatan yang mempunyai rincian teknis penyimpanan sementara LB3	100,00%	66,67%	100,00%
4	Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Persentase ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan	50,00%	43,33%	50,00%
5	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Persentase pengaduan kasus lingkungan hidup yang terselesaikan	75,00%	100,00%	100,00%
6	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Persentase peningkatan lembaga masyarakat dan lembaga pendidikan yang mengikuti pendidikan pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup	10,59%	22,22%	22,22%
7	Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Persentase cakupan penghargaan yang diterima masyarakat	18,23%	14,06%	18,23%
8	Program Pengelolaan Persampahan	Peningkatan persentase sampah yang terkelola	2,50%	1,21%	2,50%
9	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	Proporsi RTH publik untuk pengelolaan keanekaragaman hayati	32,41%	30,25%	32,41%
	Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil				
1	Program Pendaftaran Penduduk.	Persentase penduduk usia wajib KTP yang sudah melakukan Perekaman KTP-el	100,00%	100,00%	100,00%
		Persentase kepemilikan KK	100,00%	100,00%	100,00%
		Persentase kepemilikan KIA	99,00%	100,00%	100,00%
2	Program Pencatatan Sipil	Persentase pasangan yang memiliki Akta Perkawinan	100,00%	100,00%	100,00%

No	Bidang Urusan / Program Prioritas	Indikator Kinerja	Target RPJMD s.d Tahun 2026	Realisasi Tahun 2024	Target Tahun 2026
		Persentase penduduk 0-18 tahun yang memiliki memiliki Akta kelahiran	100,00%	100,00%	100,00%
		Persentase penerbitan Akta kematian	100,00%	100,00%	100,00%
		Persentase penerbitan Akta Perceraian	100,00%	100,00%	100,00%
3	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase data kependudukan dan pencatatan sipil yang dikelola berbasis TI	100,00%	100,00%	100,00%
4	Program pengelolaan Profil Kependudukan	Persentase Jenis Data yang tersaji dalam Profil Kependudukan	100,00%	100,00%	100,00%
Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa					
1	Program peningkatan kerja sama desa	Persentase kelurahan yang difasilitasi dalam program pemberdayaan masyarakat	94,00%	100,00%	100,00%
2	Program administrasi pemerintahan desa	Persentase kelurahan yang melakukan evaluasi perkembangan kelurahan sesuai dengan regulasi	94,00%	100,00%	100,00%
3	Program pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan masyarakat hukum adat	Persentase kelurahan yang lembaga masyarakatnya diberdayakan	94,00%	100,00%	100,00%
Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana					
1	Program Pengendalian penduduk	Persentase penurunan angka kelahiran pada remaja usia 15-19 tahun (ASFR 15-19 th)	22%	2,53%	22%
2	Program pembinaan keluarga berencana	Persentase <i>Contraceptive Prevalance Rate</i> (CPR)	59,25%	71,04%	71,04%
3	Program pemberdayaan dan peningkatan keluarga sejahtera	Persentase anggota keluarga tribina, UPPKS yang ber-KB	73,50%	72,53%	73,50%
Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan					
1	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Kinerja lalu lintas kota (VC Ratio)	0,75	0,72%	0,75
		Pengguna moda transportasi umum di perkotaan (PPTUK)*	6,86	8,29%	8,29%
Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika					
1	Program Aplikasi Informatika	Persentase pemanfaatan aplikasi informatika	100%	100%	100%
2	Program Informasi dan Komunikasi Publik	Tingkat Keterbukaan Informasi Publik	5	5	5
Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah					
1	Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	Persentase jumlah KSP/USP yang memiliki ijin usaha simpan pinjam	63,52%	38,22%	63,52%
2	Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi	Persentase koperasi aktif yang patuh terhadap perundang-undangan	43,37%	53,75	53,75
3	Program Penilaian Kesehatan Ksp/Usip Koperasi	Persentase KSP/USP Koperasi yang meningkat status kesehatannya	27,87%	11,11%	27,87%
4	Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian	Persentase SDM pengelola koperasi yang meningkat kapasitasnya	29,81%	43,71%	43,71%
5	Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi	Persentase koperasi berkualitas	50,00%	38,33%	50,00%

No	Bidang Urusan / Program Prioritas	Indikator Kinerja	Target RPJMD s.d Tahun 2026	Realisasi Tahun 2024	Target Tahun 2026
6	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)	Persentase wirausaha pemula yang diberdayakan	20,00%	60,34%	60,34%
7	Program Pengembangan Umkm	Persentase peningkatan omzet pelaku usaha mikro	3,00%	2,61%	3,00%
Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal					
1	Program Pelayanan Penanaman Modal	Persentase Penerbitan Perizinan dan Non Perizinan yang sesuai dengan SOP	95,50%	98,82%	98,82%
2	Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Persentase pertumbuhan pemanfaatan data, informasi, dan Sistem Informasi PM	10,00%	177,99%	100,00%
3	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Persentase Investor PMA/PMDN	100,00%	83,36%	100,00%
4	Program Promosi Penanaman Modal	Persentase LOI yang ditindaklanjuti	100,00%	100,00%	100,00%
5	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Persentase Pelaku Usaha yang memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku	35,00%	26,64%	35,00%
Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olahraga					
1	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Persentase organisasi kepemudaan yang dikembangkan	88,64%	67,74%	88,64
		Persentase peningkatan pemuda yang dibina	8,70%	11,23%	11,23%
2	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Persentase peningkatan prestasi di bidang olahraga	25,00%	39,05%	39,05%
		Persentase peningkatan atlet yang dibina	10,53%	13,74%	13,74%
		Persentase pelatih yang bersertifikat	87,10%	80,6452%	87,10%
3	Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	Persentase organisasi kepramukaan yang dibina	100,00%	100,00%	100,00%
Urusan Pemerintahan Bidang Statistik					
1	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Persentase perkembangan publikasi data sektoral dalam portal open data	45,00%	33,33%	45,00%
Urusan Pemerintahan Bidang Persandian					
1	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Nilai Tata Kelola Keamanan Informasi	84	109,00	109,00
		Nilai Pengelolaan Risiko Keamanan Informasi	48	61,00	61,00
		Nilai Kerangka Kerja Keamanan Informasi	106	61,00	106
		Nilai Pengelolaan Aset Informasi	88	138,00	138,00
		Nilai Teknologi dan Keamanan Informasi	80	72,00	80
Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan					
1	Program Pengembangan Kebudayaan	Persentase kebudayaan lokal yang dikembangkan	100,00%	100,00%	100%
2	Program Pengembangan Kesenian Tradisional	Persentase kesenian tradisional yang dikembangkan	100,00%	91,67%	100%
3	Program Pembinaan Sejarah	Cakupan pembinaan sejarah	67,00%	100,00%	100,00%
4	Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya	Persentase cagar budaya yang dilestarikan	19,00%	35,29%	35,29%
5	Program Pengelolaan Permuseuman	Persentase peningkatan kunjungan museum	20,00%	58,44%	58,44%

No	Bidang Urusan / Program Prioritas	Indikator Kinerja	Target RPJMD s.d Tahun 2026	Realisasi Tahun 2024	Target Tahun 2026
	Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan				
1	Program Pembinaan Perpustakaan	Persentase pemerataan layanan perpustakaan	61,00%	64,06%	64,06%
		Rasio ketercukupan koleksi perpustakaan	51,25%	51,09%	51,25%
		Rasio ketercukupan tenaga perpustakaan	72,91%	68,18%	72,91%
		Persentase peningkatan kunjungan masyarakat ke perpustakaan	25,02%	248,76%	100%
		Persentase Perpustakaan ber-SNP	55,00%	45,89%	55,00%
		Persentase peningkatan keterlibatan masyarakat dalam kegiatan perpustakaan	21,36%	34,85%	34,85%
		Persentase peningkatan anggota perpustakaan	28,37%	32,67%	32,67%
	Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan				
1	Program Pengelolaan Arsip	Persentase berkas yang dikelola sesuai ketentuan	100,00%	100,00%	100,00%
2	Program Perlindungan Dan Penyelamatan Arsip	Persentase arsip yang dilindungi dan terselamatkan	100,00%	100,00%	100,00%
	Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan				
1	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Persentase peningkatan produksi perikanan budidaya	1,25	0,75	1,25
2	Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	Jumlah total produksi olahan perikanan (ton)	240	236	240
	Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata				
1	Program peningkatan daya Tarik destinasi pariwisata	Persentase destinasi pariwisata yang terkelola dengan baik	93,33%	86,67%	93,33%
2	Program pemasaran pariwisata	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara	12,50%	27,20%	27,20%
		Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke kota	14,71%	12,77%	14,71%
3	Program pengembangan sumberdaya pariwisata dan ekonomi kreatif	Persentase SDM pariwisata yang meningkat kapasitasnya	4,72%	7,86%	7,86%
		Persentase peningkatan pelaku ekonomi kreatif yang meningkat kapasitasnya	33,33%	66,67%	66,67%
	Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian				
1	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Persentase sarana pembibitan yang terpelihara	66,89%	73,51%	73,51%
		Persentase Peningkatan sarana Peternakan	10,00%	12,50%	12,50%
2	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Persentase Peningkatan Prasarana Pertanian	70,83%		
		Persentase Peningkatan prasarana Peternakan	9,09%	12,50%	12,50%
3	Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Persentase penurunan jumlah kasus penyakit hewan	4,00%	6,30%	6,30%
		Persentase peningkatan produk pangan asal hewan yang ASUH	2,00%	2,20%	2,20%
4	Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Persentase luasan lahan bencana pertanian yang tertangani	86,00%	83,28%	86,00%

No	Bidang Urusan / Program Prioritas	Indikator Kinerja	Target RPJMD s.d Tahun 2026	Realisasi Tahun 2024	Target Tahun 2026
5	Program Perizinan Usaha Pertanian	Persentase peningkatan kelayakan usaha peternakan dan kesehatan hewan yang diawasi pelaksanaannya secara berkala	10,00%	9,09%	10,00%
6	Program Penyuluhan Pertanian	Persentase kelompok tani yang meningkat kapasitasnya	13,33%	12%	13,33%
		Persentase kelompok tani yang naik kelas	28,00%	80%	80,00%
	Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan				
1	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase sarana distribusi perdagangan dalam kondisi baik	60,00%	85,71%	85,71%
2	Program Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang	Persentase koefisien variasi harga antar waktu	8,00%	1,34%	8,00%
3	Program pengembangan ekspor	Nilai ekspor	3.113.000	3.098.437	3.113.000
4	Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen	Persentase Alat-alat Ukur, Alat Timbang dan Perlengkapan (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	79,17%	98,93%	98,93%
5	Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan	Persentase pelaku usaha yang memiliki izin usaha	96,00%	96,08%	96,08%
	Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian				
1	Program Perencana dan Pembangunan Industri	Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah	3,35%	8,73%	8,73%
2	Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah IUI yang dikeluarkan oleh instansi terkait	90,00%	100,00%	100,00%
		Persentase jumlah IKM yang memiliki legalitas usaha	87,00%	67,18%	87,00%
3	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Ketersediaan informasi industri terkini dan lengkap	95,00%	100,00%	100,00%
	Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan - Sekretariat Daerah				
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Perangkat Daerah dengan Tingkat Kematangan Organisasi Sedang	31,00%	100%	100%
		Indeks Kepuasan Pimpinan (Prokompim)	86,00	84,00	86,00
		Indeks Kepuasan Pimpinan (Umum)	86,00	83,92	86,00
2	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Persentase Kebijakan administrasi tata pemerintahan yang terfasilitasi	100,00%	100,00%	100,00%
		Persentase Kerjasama daerah yang terfasilitasi	100,00%	100,00%	100,00%
		Persentase kebijakan di bidang kesejahteraan rakyat yang dilaksanakan	100,00%	100,00%	100,00%
		Persentase Produk Hukum yang terfasilitasi	100,00%	100,00%	100,00%
3	Program Perekonomian dan Pembangunan	Persentase progres fisik seluruh OPD	99,20%	99,49%	99,49%
		Persentase Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Perekonomian dan SDA yang dilaksanakan	100,00%	100,00%	100,00%
		Tingkat kematangan UKPBJ	3	3	3
	Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan - Sekretariat DPRD				
1	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Persentase dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD yang terlaksana	100,00%	100,00%	100%

No	Bidang Urusan / Program Prioritas	Indikator Kinerja	Target RPJMD s.d Tahun 2026	Realisasi Tahun 2024	Target Tahun 2026
	Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan - Perencanaan				
1	Program Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Cakupan perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah yang berkualitas	95,89%	77,81%	95,89%
2	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Tingkat Implementasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	100,00%	90,58%	100%
		Tingkat Implementasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA	100,00%	90,63%	100,00%
		Tingkat Implementasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	100,00%	70,83%	100,00%
	Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan - Keuangan				
1	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase capaian pengelolaan keuangan daerah bidang anggaran	100,00%	100,00%	100,00%
		Persentase capaian pengelolaan keuangan daerah bidang perbendaharaan	100,00%	100,00%	100,00%
		Persentase capaian pengelolaan keuangan daerah bidang akuntansi	100,00%	100,00%	100,00%
2	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Cakupan pengelolaan barang milik daerah	89,29%	100,00%	100,00%
3	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah	124,37%	160,98%	160,98%
	Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan - Kepegawaian				
1	Program Kepegawaian Daerah	Persentase capaian target aspek sistem merit	95,00%	100%	100%
	Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan - Pendidikan dan Pelatihan				
1	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Persentase ASN yang mengikuti pengembangan kompetensi	37,00%	42,92%	42,92%
	Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan - Penelitian dan Pengembangan				
1	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Persentase pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan	44,44%	41,18%	44,44%
		Persentase pemanfaatan hasil inovasi	24,00%	33,83%	33,83%
	Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan				
1	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Persentase penyelenggaraan pengawasan	97,50%	147,36%	100%
2	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Persentase entitas yang telah mendapatkan pendampingan	100,00%	100,00%	100,00%
	Unsur Kewilayahan - Kecamatan				
1	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Cakupan program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	100%	100%
2	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Cakupan program koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	100%	100%	100%
3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Cakupan program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	100%	100%	100%

No	Bidang Urusan / Program Prioritas	Indikator Kinerja	Target RPJMD s.d Tahun 2026	Realisasi Tahun 2024	Target Tahun 2026
Unsur Pemerintahan Umum - Kesatuan Bangsa dan Politik					
1	Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	Persentase Pembinaan Wawasan Kebangsaan	75,47%	80%	75,47%
2	Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Persentase Organisasi Kemasyarakatan yang Diberdayakan	81,30%	62,12%	81,30%
		Persentase Organisasi Kemasyarakatan yang Aktif	88,62%	86,74%	88,62%
3	Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	Persentase Pembinaan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	12,23%	9,09%	12,23%
4	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Jumlah Konflik Sosial	0	0	0
5	Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Persentase Penduduk Usia Pemilih Pemula yang Berpartisipasi dalam Agenda Politik	6,50%	12,51%	6,50%

Sumber: OPD se-Pemerintah Kota Magelang, 2025

5.2.2 Pagu Indikatif Berdasarkan Urusan dan Bidang

Pagu indikatif dijabarkan menurut urusan yang meliputi urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, urusan pemerintahan pilihan, unsur pendukung urusan pemerintah, unsur penunjang urusan pemerintah, unsur pengawasan urusan pemerintahan, unsur kewilayahan, serta unsur pemerintahan umum. Adapun rekapitulasi renja setiap Perangkat Daerah Tahun 2026 nampak sebagaimana tabel berikut:

Tabel 5.21 Rekapitulasi Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun 2026

Kode	Perangkat Daerah	Pagu Indikatif (Rp)
1.01.2.22.0.00.01.0000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	137.762.421.992,00
1.02.0.00.0.00.02.0000	Dinas Kesehatan	376.664.183.477,00
1.03.0.00.0.00.03.0000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	54.342.078.518,00
1.04.2.10.0.00.04.0000	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	58.454.525.055,00
1.05.0.00.0.00.05.0000	Satuan Polisi Pamong Praja	12.173.026.099,00
1.05.0.00.0.00.23.0000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	4.987.359.769,00
1.06.0.00.0.00.06.0000	Dinas Sosial	16.866.473.960,00
2.07.3.32.0.00.07.0000	Dinas Tenaga Kerja	13.695.473.268,00
2.11.0.00.0.00.08.0000	Dinas Lingkungan Hidup	32.222.626.485,00
2.12.0.00.0.00.09.0000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	6.895.325.558,00
2.13.2.08.2.14.10.0000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	11.124.233.323,00
2.15.0.00.0.00.11.0000	Dinas Perhubungan	24.225.369.776,00
2.16.2.20.2.21.12.0000	Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik	16.504.797.422,00
2.18.0.00.0.00.13.0000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	5.753.135.789,00

Kode	Perangkat Daerah	Pagu Indikatif (Rp)
2.19.3.26.0.00.14.0000	Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata	16.891.435.379,00
2.23.2.24.0.00.15.0000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	6.466.601.337,00
3.27.2.09.3.25.16.0000	Dinas Pertanian dan Pangan	10.345.644.918,00
3.31.3.30.2.17.17.0000	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, dan Usaha Mikro	26.540.659.073,00
4.01.0.00.0.00.18.0000	Sekretariat Daerah	42.204.295.808,00
4.02.0.00.0.00.19.0000	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	31.234.635.482,00
5.01.5.05.0.00.20.0000	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah	8.871.094.938,00
5.02.0.00.0.00.21.0000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	24.001.302.442,00
5.03.5.04.0.00.22.0000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	9.619.256.001,00
6.01.0.00.0.00.24.0000	Inspektorat	16.378.802.500,00
7.01.0.00.0.00.25.0000	Kecamatan Magelang Selatan	25.303.123.256,00
7.01.0.00.0.00.26.0000	Kecamatan Magelang Tengah	25.942.853.781,00
7.01.0.00.0.00.27.0000	Kecamatan Magelang Utara	22.654.228.233,00
8.01.0.00.0.00.28.0000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	7.857.390.530,00
	Jumlah	1.046.082.354.169,00

Sumber: SIPD-RI, 2025

Tabel 5.22 Penetapan Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD) Kota Magelang Tahun 2026

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN						137.762.421.992,00							20.361.255.034,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						131.658.742.636,00							13.061.255.034,00	
	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN						131.658.742.636,00							13.061.255.034,00	
1.	1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-			-	111.744.193.885,00						-	2.391.755.034,00	
	1.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	100 %			-	43.279.300,00			-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter	-	100 %	30.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	7.171.900,00	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter	-		30.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD														
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	17.259.800,00	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	-		0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD														
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	5.157.400,00	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing dan Berkarakter	-		0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD														
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	5.006.300,00	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	-		0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD														
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	5.034.200,00	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	-		0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	3.649.700,00	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	-		0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	100 %			-	110.329.260.760,00			-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing dan Berkarakter	-	100 %	0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				0Orang/ bulan	110.194.488.000,00	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing dan Berkarakter	-		0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verifkasi Keuangan SKPD				1 Dokumen	110.785.760,00	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	-		0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	9.747.200,00	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	-		0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD				1 Laporan	14.239.800,00	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	-		0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	100 %			-	75.478.792,00			-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	-	100 %	108.097.319,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD														
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				12 Laporan	75.478.792,00	Kota Magelang, Magelang Tengah, Magelang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	-		108.097.319,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	100 %			-	112.352.165,00			-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	-	100 %	239.686.711,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian														
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				1 Dokumen	112.352.165,00	Kota Magelang, Magelang Tengah, Magelang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	-		239.686.711,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	100 %			-	185.665.000,00			-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	-	100 %	359.105.096,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	13.666.400,00	Kota Magelang, Magelang Tengah, Magelang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	-		17.259.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	12.000.000,00	Kota Magelang, Magelang Tengah, Magelang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing dan Berkarakter	-		20.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	3.061.700,00	Kota Magelang, Magelang Tengah, Magelang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	-		3.733.092,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Paket	26.496.000,00	Kota Magelang, Magelang Tengah, Magelang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	-		35.731.663,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	5.902.500,00	Kota Magelang, Magelang Tengah, Magelang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	-		37.571.600,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	0,00	Kota Magelang, Magelang Tengah, Magelang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	-		8.566.800,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material														
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				12 Paket	15.298.400,00	Kota Magelang, Magelang Tengah, Magelang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	-		18.631.701,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	61.400.000,00	Kota Magelang, Magelang Tengah, Magelang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	-		101.688.400,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	47.840.000,00	Kota Magelang, Magelang Tengah, Magelang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	-		115.922.840,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	60 orang			-	597.241.368,00			-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	-	60 orang	844.439.973,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	235.085.700,00	Kota Magelang, Magelang Tengah, Magelang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	-		295.349.238,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	362.155.668,00	Kota Magelang, Magelang Tengah, Magelang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	-		549.090.735,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	100 %			-	400.916.500,00			-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	-	100 %	810.425.935,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				12 Unit	148.058.500,00	Kota Magelang, Magelang Tengah, Magelang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan	-		224.081.715,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
												Berintegritas dan Dinamistif				
	1.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				12 Unit	93.958.000,00	Kota Magelang, Magelang Tengah, Magelang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	-		171.323.900,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				12 Unit	78.900.000,00	Kota Magelang, Magelang Tengah, Magelang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	-		97.492.120,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi				12 Unit	80.000.000,00	Kota Magelang, Magelang Tengah, Magelang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	-		317.528.200,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
2.	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	-	-			-	19.777.059.151,00						-	10.527.000.000,00	
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	-	100 %			-	9.767.264.631,00			-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing dan Berkarakter	-	100 %	4.164.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0006	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah														
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun				7 Unit	856.705.120,00	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing dan Berkarakter	-		0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0014	Pengadaan Mebel Sekolah														
			Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia				61 Paket	84.716.800,00	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0016	Pengadaan Perlengkapan Sekolah														
			Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia				76 Paket	1.867.506.300,00	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing dan Berkarakter	-		0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0025	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa														
			Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik				1344 Peserta Didik	542.017.200,00	Kota Magelang, Magelang Tengah, Magelang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing dan Berkarakter	-		850.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0026	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar														
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar				144 Orang	2.856.879.120,00	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing dan Berkarakter	-		1.900.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0027	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar														
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi				74 Orang	371.006.700,00	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya	-		230.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
												Saing dan Berkarakter				
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar														
			Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				74 Satuan Pendidikan	64.780.390,00	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing dan Berkarakter	-		0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0035	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan														
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan				76 Orang	2.500.000,00	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing dan Berkarakter	-		5.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0036	Pengembangan konten digital untuk pendidikan														
			Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan				1Konten Digital	1.500.000,00	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing dan Berkarakter	-		2.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0037	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan														
			Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan				76 Orang	2.500.000,00	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing dan Berkarakter	-		5.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0038	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan				1 Dokumen	9.715.700,00	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing dan Berkarakter	-		0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0039	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan														
			Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan				12 Dokumen	114.847.650,00	Kota Magelang, Magelang Tengah, Magelang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing dan Berkarakter	-		100.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0041	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan														
			Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi				5 Komunitas	195.340.400,00	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing dan Berkarakter	-		45.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0043	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi														
			Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi				1 Kegiatan	19.510.400,00	Kota Magelang, Magelang Tengah, Magelang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing dan Berkarakter	-		22.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0048	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah														
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				60 Unit	1.147.135.000,00	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing dan Berkarakter	-		0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.01.02.2.01.0049	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan														
			Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan				76 Orang	2.500.000,00	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing dan Berkarakter	-		5.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0051	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah														
			Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				60 Ruang	244.160.000,00	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing dan Berkarakter	-		0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0054	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar														
			Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik				12971 Peserta Didik	1.383.943.851,00	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing dan Berkarakter	-		1.000.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	-	100 %			-	6.595.115.580,00			-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing dan Berkarakter	-	100 %	3.612.500.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0014	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah														
			Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				23 Ruang	645.280.000,00	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing dan Berkarakter	-		0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0021	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah														
			Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				2 Unit	0,00	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing dan Berkarakter	-		0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0024	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah														
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				23 Unit	109.000.000,00	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing dan Berkarakter	-		0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0025	Pengadaan Mebel Sekolah														
			Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia				23 Paket	96.819.200,00	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing dan Berkarakter	-		0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0027	Pengadaan Perlengkapan Sekolah														
			Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia				23 Paket	65.993.000,00	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing dan Berkarakter	-		0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0032	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama														
			Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik				11176 Peserta Didik	1.912.453.400,00	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Pembentukan	-		1.500.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
												Sumber Daya Manusia Berdaya Saing dan Berkarakter				
	1.01.02.2.02.0038	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa														
			Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik				989 Peserta Didik	342.619.600,00	Kota Magelang, Magelang Tengah, Magelang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing dan Berkarakter	-		390.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0039	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama														
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama				94 Orang	2.977.933.320,00	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing dan Berkarakter	-		1.500.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0040	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama														
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi				100 Orang	18.084.300,00	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing dan Berkarakter	-		60.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0041	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah														
			Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan				20 Satuan Pendidikan	272.830.700,00	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing dan Berkarakter	-		0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama														
			Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS				20 Satuan Pendidikan	5.833.800,00	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing dan Berkarakter	-		0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0048	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan														
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan				40 Orang	2.500.000,00	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing dan Berkarakter	-		5.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0049	Pengembangan konten digital untuk pendidikan														
			Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan				1Konten Digital	1.500.000,00	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing dan Berkarakter	-		2.500.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0050	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan														
			Jumlah peserta pelatthan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan				40 Orang	2.500.000,00	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing dan Berkarakter	-		5.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0051	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan				1 Dokumen	13.425.500,00	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya	-		0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
												Saing dan Berkarakter				
	1.01.02.2.02.0052	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan														
			Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan				2 Dokumen	92.820.560,00	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing dan Berkarakter	-		70.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0054	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan														
			Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi				13 Komunitas	13.022.200,00	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing dan Berkarakter	-		50.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0055	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi														
			Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi				2 Kegiatan	20.000.000,00	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing dan Berkarakter	-		25.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0060	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan														
			Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan				40 Orang	2.500.000,00	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing dan Berkarakter	-		5.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.03	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	-	100 %			-	2.331.299.630,00			-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing dan Berkarakter	-	100 %	2.700.500.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.03.0015	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD														
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada PAUD				6 Orang	1.744.654.200,00	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing dan Berkarakter	-		91.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.03.0016	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD														
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi				100 Orang	18.000.000,00	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing dan Berkarakter	-		20.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.03.0017	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD														
			Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen				125 Satuan Pendidikan	35.227.000,00	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		50.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.03.0018	Pengelolaan Dana BOP PAUD														
			Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP				125 Satuan Pendidikan	117.990.830,00	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		155.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.03.0022	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan														
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan				100 Orang	2.500.000,00	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing dan Berkarakter	-		5.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.01.02.2.03.0023	Pengembangan konten digital untuk pendidikan														
			Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan				1Konten Digital	1.500.000,00	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing dan Berkarakter	-		2.500.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.03.0024	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan														
			Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan				100 Orang	2.500.000,00	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing dan Berkarakter	-		5.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.03.0026	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan														
			Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan				2 Dokumen	7.500.000,00	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing dan Berkarakter	-		9.500.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.03.0029	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan														
			Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi				4 Komunitas	10.909.700,00	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing dan Berkarakter	-		2.000.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.03.0037	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi														
			Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi				1 Kegiatan	5.000.000,00	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing dan Berkarakter	-		7.500.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.03.0039	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan														
			Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan				100 Orang	2.500.000,00	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing dan Berkarakter	-		5.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.03.0047	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD														
			Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar				125 Satuan Pendidikan	383.017.900,00	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		350.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.04	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan	-	100 %			-	1.083.379.310,00			-	-	-	100 %	50.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.04.0010	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/ Kesetaraan														
			Jumlah Peserta Didik Nonformal/ Kesetaraan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik				200 Peserta Didik	54.000.000,00	-	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	-	-		0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.04.0014	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan														
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia bagi Satuan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan				25 Orang	0,00	Kota Magelang, Magelang Tengah, Magelang	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	-	-		0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.04.0015	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan														
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi				15 Orang	0,00	Kota Magelang, Magelang Tengah, Magelang	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	-	-		0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.04.0016	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/ Kesetaraan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Sekolah Nonformal/ Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen</i>				0 Satuan Pendidikan	272.256.400,00	Kota Magelang, Magelang Tengah, Magelang	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	-	-		0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.04.0017	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/ Kesetaraan														
			<i>Jumlah Sekolah Nonformal/ Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP</i>				4 Satuan Pendidikan	528.906.750,00	Kota Magelang, Magelang Tengah, Magelang	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	-	-		0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.04.0024	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan														
			<i>Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan</i>				30 Orang	2.500.000,00	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing dan Berkarakter	-		5.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.04.0025	Pengembangan konten digital untuk pendidikan														
			<i>Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan</i>				1Konten Digital	1.500.000,00	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing dan Berkarakter	-		2.500.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.04.0026	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan														
			<i>Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan</i>				30 Orang	2.500.000,00	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing dan Berkarakter	-		5.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.04.0027	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan</i>				1 Dokumen	9.995.300,00	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing dan Berkarakter	-		15.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.04.0030	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan														
			<i>Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi</i>				1 Komunitas	9.567.000,00	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing dan Berkarakter	-		15.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.04.0031	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi														
			<i>Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi</i>				1 Kegiatan	5.000.000,00	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing dan Berkarakter	-		7.500.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.04.0041	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah														
			<i>Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat</i>				1 Unit	197.153.860,00	Kota Magelang, Magelang Tengah, Magelang	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	-	-		0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
3.	1.01.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	-	-			-	119.999.800,00						-	120.000.000,00	
	1.01.03.2.01	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	-	100 %			-	119.999.800,00			-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing dan Berkarakter	-	100 %	120.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.03.2.01.0004	Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Penyusun Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Meningkatkan Kompetensinya</i>				570 Orang	119.999.800,00	Kota Magelang, Magelang Tengah, Magelang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing dan Berkarakter	-		120.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
4.	1.01.04	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	-	-			-	17.489.800,00						-	22.500.000,00	
	1.01.04.2.01	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan	-	-			-	17.489.800,00			-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing dan Berkarakter	-	-	22.500.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.04.2.01.0001	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan</i>				1 Dokumen	4.989.800,00	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing dan Berkarakter	-		7.500.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.04.2.01.0002	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan														
			<i>Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan</i>				2 Laporan	12.500.000,00	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing dan Berkarakter	-		15.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						6.103.679.356,00							7.300.000.000,00	
	2.22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN						6.103.679.356,00							7.300.000.000,00	
1.	2.22.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	-	-			-	3.999.999.500,00						-	4.800.000.000,00	
	2.22.02.2.01	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	-	82 %			-	2.499.999.900,00			-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamis	-	82 %	2.800.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2.22.02.2.01.0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan														
			<i>Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan</i>				10 Objek	2.499.999.900,00	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamis	-		2.800.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2.22.02.2.02	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	-	100 %			-	1.499.999.600,00			-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamis	-	100 %	2.000.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2.22.02.2.02.0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya														
			<i>Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan</i>				3 Objek	1.499.999.600,00	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamis	-		2.000.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
2.	2.22.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	-	-			-	1.239.999.900,00						-	1.300.000.000,00	
	2.22.03.2.01	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	-	24 %			-	1.239.999.900,00			-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing dan Berkarakter	-	24 %	1.300.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2.22.03.2.01.0001	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan (Ditingkatkan Kompetensinya)				250 Orang	740.000.000,00	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing dan Berkarakter	-		700.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2.22.03.2.01.0003	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional														
			Jumlah Lembaga Kesenian Tradisional yang Ditingkatkan Kapasitasnya				150 Lembaga	499.999.900,00	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing dan Berkarakter	-		600.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
3.	2.22.04	PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	-	-			-	310.000.000,00						-	450.000.000,00	
	2.22.04.2.01	Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	-	51 %			-	310.000.000,00			-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing dan Berkarakter	-	51 %	450.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2.22.04.2.01.0002	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Sejarah														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pembinaan Sejarah				4 Unit	310.000.000,00	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing dan Berkarakter	-		450.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
4.	2.22.05	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	-	-			-	150.000.000,00						-	200.000.000,00	
	2.22.05.2.01	Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	-	50 %			-	150.000.000,00			-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamis	-	50 %	200.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2.22.05.2.01.0001	Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya														
			Jumlah Objek Diduga Cagar Budaya yang Didaftarkan				10 Objek	150.000.000,00	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamis	-		200.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
5.	2.22.06	PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	-	-			-	403.679.956,00						-	550.000.000,00	
	2.22.06.2.01	Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota	-	100 %			-	403.679.956,00			-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamis	-	100 %	550.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2.22.06.2.01.0004	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Tersedia dan Terpelihara				4 Unit	403.679.956,00	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamis	-		550.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
		DINAS KESEHATAN						120.827.390.463,00							0,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						120.827.390.463,00							0,00	
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						120.827.390.463,00							0,00	
1.	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-			-	94.716.337.145,00						-	0,00	
	1.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	41.211.730,00			-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing dan Berkarakter	-	-	0,00	DINAS KESEHATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	3.389.500,00	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing dan Berkarakter	-		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD														
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1.036.100,00	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing dan Berkarakter	-		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD														
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	1.121.300,00	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing dan Berkarakter	-		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD														
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1.483.000,00	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing dan Berkarakter	-		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD														
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	1.389.300,00	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing dan Berkarakter	-		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				5 Laporan	32.792.530,00	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing dan Berkarakter	-		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	94.268.613.779,00			-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing dan Berkarakter	-	-	0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				905 Orang/ bulan	94.248.693.679,00	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing dan Berkarakter	-		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD				18 Laporan	19.920.100,00	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing dan Berkarakter	-		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-			-	1.184.300,00			-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan	-	-	0,00	DINAS KESEHATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
												Berintegritas dan Dinamis				
	1.02.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD														
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				12 Laporan	1.184.300,00	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamis	-		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-			-	1.001.200,00			-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing dan Berkarakter	-	-	0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian														
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				1 Dokumen	1.001.200,00	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing dan Berkarakter	-		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	77.664.700,00			-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing dan Berkarakter	-	-	0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	3.718.600,00	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing dan Berkarakter	-		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	9.940.500,00	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing dan Berkarakter	-		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	3.694.700,00	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamis	-		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	2.760.000,00	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing dan Berkarakter	-		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material														
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				1 Paket	4.666.900,00	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing dan Berkarakter	-		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	600.000,00	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya	-		0,00	DINAS KESEHATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
												Manusia Berdaya Saing dan Berkarakter				
	1.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	51.148.000,00	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing dan Berkarakter	-		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				1 Dokumen	1.136.000,00	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing dan Berkarakter	-		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	137.566.120,00			-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing dan Berkarakter	-	-	0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	4.128.200,00	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing dan Berkarakter	-		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	48.031.200,00	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing dan Berkarakter	-		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	85.406.720,00	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing dan Berkarakter	-		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	189.095.316,00			-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing dan Berkarakter	-	-	0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	55.265.520,00	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing dan Berkarakter	-		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				44 Unit	94.901.396,00	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamis	-		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				1 Unit	17.284.000,00	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing dan Berkarakter	-		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi				1 Unit	21.644.400,00	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing dan Berkarakter	-		0,00	DINAS KESEHATAN
2.	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-	-			-	23.575.576.116,00						-	0,00	
	1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	-	100 70 0.05 0.20 100 1 100			-	6.363.547.200,00			-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamis	-	100 70 0.05 0.20 100 1 100	0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan														
			Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan				10 Unit	3.893.729.100,00	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamis	-		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0023	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan														
			Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan				1 Paket	2.469.818.100,00	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamis	-		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	100 0 100 471 100 100 100 0 100 95 100 100 90 100 90 95 0 90 0,21 1 988 465 0 0 2 100 90 100 100 100			-	16.947.049.716,00			-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing dan Berkarakter	-	100 100 100 471 100 100 100 100 100 90 100 90 95 <50 90 0,21 1 988 465 0 0 2 100 90 100 100 100	0,00	DINAS KESEHATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
				96 1 <4,5 100 3.5 0.18 <15 96 17 0.5 90 0 0 100										96 1 <4,5 100 3.5 0.18 <15 96 17 0.5 90 100 95 100		
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil														
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				1057 Orang	66.768.300,00	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing dan Berkarakter	-		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin														
			Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				1013 Orang	2.518.300,00	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing dan Berkarakter	-		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir														
			Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				1015 Orang	139.567.500,00	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT)	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing dan Berkarakter	-		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita														
			Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				4816 Orang	9.048.600,00	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing dan Berkarakter	-		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar														
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				24154 Orang	7.174.600,00	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing dan Berkarakter	-		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif														
			Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				83302 Orang	11.724.500,00	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT)	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing dan Berkarakter	-		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut														
			Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				20921 Orang	10.764.700,00	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing dan Berkarakter	-		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar</i>				26572 Orang	13.934.600,00	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing dan Berkarakter	-		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus														
			<i>Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar</i>				4018 Orang	9.659.600,00	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT)	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing dan Berkarakter	-		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat														
			<i>Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar</i>				317 Orang	9.184.600,00	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing dan Berkarakter	-		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis														
			<i>Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar</i>				5,565 Orang	35.704.300,00	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamis	-		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV														
			<i>Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar</i>				3,073 Orang	215.403.800,00	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamis	-		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0013	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar</i>				1 Dokumen	691.600,00	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing dan Berkarakter	-		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0014	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar</i>				1 Dokumen	3.633.100,00	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing dan Berkarakter	-		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat</i>				1 Dokumen	1.371.959.416,00	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamis	-		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga</i>				1 Dokumen	9.008.900,00	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing dan Berkarakter	-		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan</i>				1 Dokumen	47.447.000,00	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya	-		0,00	DINAS KESEHATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
												Saing dan Berkarakter				
	1.02.02.2.02.0019	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya				1 Dokumen	10.808.400,00	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamis	-		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				1 Dokumen	51.576.400,00	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing dan Berkarakter	-		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0022	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA														
			Jumlah Penyalahguna NAPZayang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan				9 Orang	6.134.600,00	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing dan Berkarakter	-		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular														
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				1 Dokumen	5.515.300,00	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing dan Berkarakter	-		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat				1 Dokumen	14.793.411.000,00	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT), PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing dan Berkarakter	-		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0027	Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasyankes dan Sekolah														
			Jumlah Orang yang Menerima Layanan Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) dan Sekolah				2,250 Orang	3.125.000,00	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamis	-		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0028	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional														
			Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan				15 Paket	481.800,00	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing dan Berkarakter	-		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)														
			Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)				1 Laporan	3.240.000,00	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing dan Berkarakter	-		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0037	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah														
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah				1 Dokumen	72.709.000,00	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing dan Berkarakter	-		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				1,031 Orang	20.926.800,00	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamis	-		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)														
			Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				531 Orang	4.987.700,00	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamis	-		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria														
			Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria				40 Orang	2.124.000,00	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamis	-		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0043	Pengelolaan Kawasan tanpa rokok														
			Jumlah tatanan kawasan tanpa rokok yang tidak ditemukan aktifitas merokok				4 Tatanan	1.659.600,00	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamis	-		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi														
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi				1 Dokumen	2.433.000,00	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing dan Berkarakter	-		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi				1 Dokumen	1.151.100,00	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing dan Berkarakter	-		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0050	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji														
			Jumlah dokumen hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji				1 Dokumen	2.572.600,00	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing dan Berkarakter	-		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.04	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	100 100			-	264.979.200,00			-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing dan Berkarakter	-	100 100	0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.04.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya														
			Jumlah Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan, Diawasi dan Ditindaklanjuti Perizinannya				36 Unit	10.328.300,00	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing dan Berkarakter	-		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.04.0003	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan														
			Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan				20 Unit	252.950.900,00	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing dan Berkarakter	-		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.04.0004	Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan</i>				1 Dokumen	1.700.000,00	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing dan Berkarakter	-		0,00	DINAS KESEHATAN
3.	1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	-	-			-	53.029.630,00						-	0,00	
	1.02.03.2.01	Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota	-	-			-	3.486.300,00			-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing dan Berkarakter	-	-	0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.03.2.01.0001	Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan</i>				1 Dokumen	3.486.300,00	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing dan Berkarakter	-		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	-	-			-	41.029.430,00			-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing dan Berkarakter	-	-	0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.03.2.02.0001	Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan</i>				1 Dokumen	21.556.830,00	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing dan Berkarakter	-		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.03.2.02.0003	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan</i>				1 Dokumen	19.472.600,00	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing dan Berkarakter	-		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.03.2.03	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	8.513.900,00			-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing dan Berkarakter	-	-	0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.03.2.03.0001	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota														
			<i>Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya</i>				210 Orang	8.513.900,00	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing dan Berkarakter	-		0,00	DINAS KESEHATAN
4.	1.02.04	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	-	-			-	51.480.300,00						-	0,00	
	1.02.04.2.01	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	-	-			-	8.168.200,00			-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing dan Berkarakter	-	-	0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.04.2.01.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)				1 Dokumen	8.168.200,00	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing dan Berkarakter	-		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.04.2.03	Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	-	-			-	11.414.800,00			-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing dan Berkarakter	-	-	0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.04.2.03.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga				1 Dokumen	11.414.800,00	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing dan Berkarakter	-		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.04.2.04	Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	-	-			-	3.123.800,00			-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing dan Berkarakter	-	-	0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.04.2.04.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)				1 Dokumen	3.123.800,00	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing dan Berkarakter	-		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.04.2.05	Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	-	-			-	18.989.600,00			-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing dan Berkarakter	-	-	0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.04.2.05.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan				1 Dokumen	18.989.600,00	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing dan Berkarakter	-		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.04.2.06	Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	-	-			-	9.783.900,00			-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing dan Berkarakter	-	-	0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.04.2.06.0001	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan														
			Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan				1 Unit	9.783.900,00	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing dan Berkarakter	-		0,00	DINAS KESEHATAN
5.	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	-	-			-	2.430.967.272,00						-	0,00	
	1.02.05.2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	2.428.945.572,00			-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing dan Berkarakter	-	-	0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.01.0001	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat				1 Dokumen	2.428.945.572,00	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing dan Berkarakter	-		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.02	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	2.021.700,00			-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing dan Berkarakter	-	-	0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.02.0001	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat				1 Dokumen	2.021.700,00	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing dan Berkarakter	-		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	0,00			-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamis	-	-	0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)														
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				1 Dokumen	0,00	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamis	-		0,00	DINAS KESEHATAN
		PUSKESMAS MAGELANG SELATAN						2.643.948.780,00							0,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						2.643.948.780,00							0,00	
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						2.643.948.780,00							0,00	
1.	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-			-	2.220.000.000,00						-	0,00	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	-	-			-	2.220.000.000,00			-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing dan Berkarakter	-	-	0,00	PUSKESMAS MAGELANG SELATAN
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD														
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	2.220.000.000,00	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI BLUD	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing dan Berkarakter	-		0,00	PUSKESMAS MAGELANG SELATAN
2.	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-	-			-	423.948.780,00						-	0,00	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	100 0 100 471 100 100 100 0 100 95 100 100 90			-	423.948.780,00			-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing dan Berkarakter	-	100 100 100 471 100 100 100 95 100 100 90	0,00	PUSKESMAS MAGELANG SELATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
				100 90 95 0 90 0,21 1 988 465 0 0 2 100 90 100 100 100 96 1 <4,5 100 3.5 0.18 <15 96 17 0.5 90 0 0 100									100 90 95 <50 90 0,21 1 988 465 0 0 2 100 90 100 100 100 96 1 <4,5 100 3.5 0.18 <15 96 17 0.5 90 100 95 100			
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas														
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				1 Dokumen	423.948.780,00	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing dan Berkarakter	-		0,00	PUSKESMAS MAGELANG SELATAN
		PUSKESMAS JURANGOMBO						2.437.632.520,00							0,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						2.437.632.520,00							0,00	
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						2.437.632.520,00							0,00	
1.	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-			-	2.050.000.000,00						-	0,00	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	-	-			-	2.050.000.000,00			-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing dan Berkarakter	-	-	0,00	PUSKESMAS JURANGOMBO
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD														
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	2.050.000.000,00	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI BLUD	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing dan Berkarakter	-		0,00	PUSKESMAS JURANGOMBO
2.	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-	-			-	387.632.520,00						-	0,00	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	100 0 100 471 100			-	387.632.520,00			-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya	-	100 100 100 471 100	0,00	PUSKESMAS JURANGOMBO

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
				100 100 0 100 95 100 100 90 100 90 95 0 90 0,21 1 988 465 0 0 2 100 90 100 100 100 96 1 <4,5 100 3.5 0.18 <15 96 17 0.5 90 0 0 100							Saing dan Berkarakter		100 100 100 100 95 100 100 90 100 90 95 <50 90 0,21 1 988 465 0 0 2 100 90 100 100 100 96 1 <4,5 100 3.5 0.18 <15 96 17 0.5 90 100 95 100			
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas														
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				1 Dokumen	387.632.520,00	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing dan Berkarakter	-		0,00	PUSKESMAS JURANGOMBO
		PUSKESMAS MAGELANG TENGAH (BOTTON)						2.403.948.780,00							0,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						2.403.948.780,00							0,00	
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						2.403.948.780,00							0,00	
1.	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-			-	1.980.000.000,00						-	0,00	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	-	-			-	1.980.000.000,00			-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing dan Berkarakter	-	-	0,00	PUSKESMAS MAGELANG TENGAH (BOTTON)
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD														
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1.980.000.000,00	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI BLUD	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing dan Berkarakter	-		0,00	PUSKESMAS MAGELANG TENGAH (BOTTON)

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2.	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-	-			-	423.948.780,00						-	0,00	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	100 0 100 471 100 100 100 0 100 95 100 100 90 100 90 95 0 90 0,21 1 988 465 0 0 2 100 90 100 100 100 96 1 <4,5 100 3.5 0.18 <15 96 17 0.5 90 0 0 100			-	423.948.780,00			-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamis	-	100 100 100 471 100 100 100 100 100 95 100 100 90 100 90 95 <50 90 0,21 1 988 465 0 0 2 100 90 100 100 100 96 1 <4,5 100 3.5 0.18 <15 96 17 0.5 90 100 95 100	0,00	PUSKESMAS MAGELANG TENGAH (BOTTON)
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas														
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				1 Dokumen	423.948.780,00	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamis	-		0,00	PUSKESMAS MAGELANG TENGAH (BOTTON)
		PUSKESMAS KERPAPAN						1.675.790.650,00							0,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						1.675.790.650,00							0,00	
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						1.675.790.650,00							0,00	
1.	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-			-	1.270.000.000,00						-	0,00	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	-	-			-	1.270.000.000,00			-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya	-	-	0,00	PUSKESMAS KERPAPAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
												Saing dan Berkarakter					
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD															
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1.270.000.000,00	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI BLUD	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing dan Berkarakter	-		0,00	PUSKESMAS KERKOPAN	
2.	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-	-			-	405.790.650,00						-	0,00		
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	100 0 100 471 100 100 100 0 100 95 100 100 90 100 90 95 0 90 0,21 1 988 465 0 0 2 100 90 100 100 100 96 1 <4,5 100 3.5 0.18 <15 96 17 0.5 90 0 0 100			-	405.790.650,00			-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing dan Berkarakter	-	100 100 100 471 100 100 100 100 100 90 100 90 95 <50 90 0,21 1 988 465 0 0 2 100 90 100 100 100 96 1 <4,5 100 3.5 0.18 <15 96 17 0.5 90 100 95 100	0,00	PUSKESMAS KERKOPAN	
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas															
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				1 Dokumen	405.790.650,00	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing dan Berkarakter	-		0,00	PUSKESMAS KERKOPAN	
		PUSKESMAS MAGELANG UTARA						2.822.106.910,00								0,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						2.822.106.910,00							0,00		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						2.822.106.910,00							0,00	
1.	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-			-	2.380.000.000,00						-	0,00	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	-	-			-	2.380.000.000,00			-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing dan Berkarakter	-	-	0,00	PUSKESMAS UTARA
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD														
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	2.380.000.000,00	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI BLUD	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing dan Berkarakter	-		0,00	PUSKESMAS MAGELANG UTARA
2.	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-	-			-	442.106.910,00						-	0,00	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	100 0 100 471 100 100 100 0 100 95 100 100 90 100 90 95 95 0 90 0,21 1 988 465 0 0 2 100 90 100 100 100 96 1 <4,5 100 3.5 0.18 <15 96 17 0.5 90 0 0 100			-	442.106.910,00			-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing dan Berkarakter	-	100 100 100 471 100 100 100 100 100 95 100 100 90 100 90 95 95 <50 90 0,21 1 988 465 0 0 2 100 90 100 100 100 96 1 <4,5 100 3.5 0.18 <15 96 17 0.5 90 100 95 100	0,00	PUSKESMAS MAGELANG UTARA
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				1 Dokumen	442.106.910,00	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing dan Berkarakter	-		0,00	PUSKESMAS MAGELANG UTARA
		LABORATORIUM KESEHATAN						2.780.153.395,00							0,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						2.780.153.395,00							0,00	
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						2.780.153.395,00							0,00	
1.	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-			-	1.200.000.000,00						-	0,00	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	-	-			-	1.200.000.000,00			-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing dan Berkarakter	-	-	0,00	LABORATORIUM KESEHATAN
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD														
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1.200.000.000,00	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI BLUD	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing dan Berkarakter	-		0,00	LABORATORIUM KESEHATAN
2.	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-	-			-	1.532.165.295,00						-	0,00	
	1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	-	100 70 0.05 0.20 100 1 100			-	527.197.400,00			-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamis	-	100 70 0.05 0.20 100 1 100	0,00	LABORATORIUM KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0023	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan														
			Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan				1 Paket	527.197.400,00	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamis	-		0,00	LABORATORIUM KESEHATAN
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	100 0 100 471 100 100 100 0 100 95 100 100 90 100 90 95 0 90 0,21 1 988 465 0			-	879.878.795,00			-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing dan Berkarakter	-	100 100 100 471 100 100 100 100 100 90 100 90 95 1 988 465 0	0,00	LABORATORIUM KESEHATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
				0 2 100 90 100 100 100 96 1 <4,5 100 3.5 0.18 <15 96 17 0.5 90 0 0 100										0 2 100 90 100 100 100 96 1 <4,5 100 3.5 0.18 <15 96 17 0.5 90 100 95 100		
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				1 Dokumen	300.086.300,00	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing dan Berkarakter	-		0,00	LABORATORIUM KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya														
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya				1 Dokumen	536.792.495,00	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing dan Berkarakter	-		0,00	LABORATORIUM KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0035	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota														
			Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota				1 Unit	43.000.000,00	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing dan Berkarakter	-		0,00	LABORATORIUM KESEHATAN
	1.02.02.2.04	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	100 100			-	125.089.100,00			-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing dan Berkarakter	-	100 100	0,00	LABORATORIUM KESEHATAN
	1.02.02.2.04.0003	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan														
			Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan				1 Unit	125.089.100,00	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing dan Berkarakter	-		0,00	LABORATORIUM KESEHATAN
3.	1.02.04	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	-	-			-	47.988.100,00						-	0,00	
	1.02.04.2.06	Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	-	-			-	47.988.100,00			-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing dan Berkarakter	-	-	0,00	LABORATORIUM KESEHATAN
	1.02.04.2.06.0001	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan				600 Unit	47.988.100,00	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing dan Berkarakter	-		0,00	LABORATORIUM KESEHATAN
		INSTALASI FARMASI						335.753.504,00							0,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						335.753.504,00							0,00	
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						335.753.504,00							0,00	
1.	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-			-	82.785.700,00						-	0,00	
	1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	50.360.000,00			-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing dan Berkarakter	-	-	0,00	INSTALASI FARMASI
	1.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	50.360.000,00	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing dan Berkarakter	-		0,00	INSTALASI FARMASI
	1.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	32.425.700,00			-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing dan Berkarakter	-	-	0,00	INSTALASI FARMASI
	1.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				3 Unit	32.425.700,00	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing dan Berkarakter	-		0,00	INSTALASI FARMASI
2.	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-	-			-	252.967.804,00						-	0,00	
	1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	-	100 70 0.05 0.20 100 1 100			-	76.250.000,00			-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing dan Berkarakter	-	100 70 0.05 0.20 100 1 100	0,00	INSTALASI FARMASI
	1.02.02.2.01.0026	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan														
			Jumlah distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan ke Fasilitas Kesehatan				1 Paket	76.250.000,00	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing dan Berkarakter	-		0,00	INSTALASI FARMASI
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	100 0 100 471 100 100 100 0 100 100 95			-	176.717.804,00			-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing dan Berkarakter	-	100 100 100 471 100 100 100 100 95	0,00	INSTALASI FARMASI

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
				100 100 90 100 90 95 0 90 0,21 1 988 465 0 0 2 100 90 100 100 100 96 1 <4,5 100 3.5 0.18 <15 96 17 0.5 90 0 0 100									100 100 90 100 90 95 <50 90 0,21 1 988 465 0 0 2 100 90 100 100 100 100 96 1 <4,5 100 3.5 0.18 <15 96 17 0.5 90 100 95 100			
	1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya														
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya				1 Dokumen	176.717.804,00	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing dan Berkarakter	-		0,00	INSTALASI FARMASI
		RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TIDAR						230.000.000.000,00							0,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						230.000.000.000,00							0,00	
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						230.000.000.000,00							0,00	
1.	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-			-	230.000.000.000,00						-	0,00	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	-	-			-	230.000.000.000,00			-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing dan Berkarakter	-	-	0,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TIDAR
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD														
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	230.000.000.000,00	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI BLUD	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing dan Berkarakter	-		0,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TIDAR
		RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BUDI RAHAYU						9.661.554.177,00							11.726.800.683,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						9.661.554.177,00							11.726.800.683,00	
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						9.661.554.177,00							11.726.800.683,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-			-	6.403.260.000,00						-	7.443.586.000,00	
	1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	403.260.000,00			-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing dan Berkarakter	-	-	443.586.000,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BUDI RAHAYU
	1.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				4 Laporan	403.260.000,00	Kota Magelang, Magelang Utara, Wates	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing dan Berkarakter	-		443.586.000,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BUDI RAHAYU
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	-	-			-	6.000.000.000,00			-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing dan Berkarakter	-	-	7.000.000.000,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BUDI RAHAYU
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD														
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				4 Unit Kerja	6.000.000.000,00	Kota Magelang, Magelang Utara, Wates	PENDAPATAN DARI BLUD	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing dan Berkarakter	-		7.000.000.000,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BUDI RAHAYU
2.	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-	-			-	3.258.294.177,00						-	4.283.214.683,00	
	1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	-	100 70 0.05 0.20 100 1 100			-	499.997.400,00			-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing dan Berkarakter	-	100 70 0.05 0.20 100 1 100	549.997.140,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BUDI RAHAYU
	1.02.02.2.01.0023	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan														
			Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan				10 Paket	499.997.400,00	Kota Magelang, Magelang Utara, Wates	DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT)	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing dan Berkarakter	-		549.997.140,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BUDI RAHAYU
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	100 0 100 471 100 100 100 0 100 95 100 100 90 100 90 95 0 90 0,21 1			-	2.758.296.777,00			-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing dan Berkarakter	-	100 100 100 471 100 100 100 100 90 100 90 95 0 90 0,21 1	3.733.217.543,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BUDI RAHAYU

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
				988 465 0 0 2 100 90 100 100 100 96 1 <4,5 100 3.5 0.18 <15 96 17 0.5 90 0 0 100										988 465 0 0 2 100 90 100 100 100 96 1 <4,5 100 3.5 0.18 <15 96 17 0.5 90 100 95 100		
	1.02.02.2.02.0032	Operasional Pelayanan Rumah Sakit														
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit				7 Dokumen	2.758.296.777,00	Kota Magelang, Magelang Utara, Wates	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing dan Berkarakter	-		3.733.217.543,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BUDI RAHAYU
		PUBLIC SAFETY CENTER 119						1.075.904.298,00							0,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						1.075.904.298,00							0,00	
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						1.075.904.298,00							0,00	
1.	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-			-	321.864.000,00						-	0,00	
	1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	39.366.000,00			-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing dan Berkarakter	-	-	0,00	PUBLIC SAFETY CENTER 119
	1.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	39.366.000,00	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing dan Berkarakter	-		0,00	PUBLIC SAFETY CENTER 119
	1.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	282.498.000,00			-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing dan Berkarakter	-	-	0,00	PUBLIC SAFETY CENTER 119
	1.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				10 Unit	222.863.000,00	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing dan Berkarakter	-		0,00	PUBLIC SAFETY CENTER 119
	1.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				17 Unit	33.685.000,00	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing dan Berkarakter	-		0,00	PUBLICSAFETYCENTER 119
	1.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi				1 Unit	25.950.000,00	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing dan Berkarakter	-		0,00	PUBLICSAFETYCENTER 119
2.	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-	-			-	754.040.298,00						-	0,00	
	1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	-	100 70 0.05 0.20 100 1 100			-	7.309.000,00			-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing dan Berkarakter	-	100 70 0.05 0.20 100 1 100	0,00	PUBLICSAFETYCENTER 119
	1.02.02.2.01.0020	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan														
			Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar				22 Unit	7.309.000,00	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing dan Berkarakter	-		0,00	PUBLICSAFETYCENTER 119
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	100 0 100 471 100 100 100 0 100 95 100 100 90 100 90 95 0 90 0,21 1 988 465 0 0 2 100 90 100 100 100 96 1 <4,5 100 3.5			-	746.731.298,00			-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing dan Berkarakter	-	100 100 100 471 100 100 100 100 100 90 100 90 95 <50 90 0,21 1 988 465 0 0 2 100 90 100 100 100 96 1 <4,5 100 3.5	0,00	PUBLICSAFETYCENTER 119

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
				0.18 <15 96 17 0.5 90 0 0 100										0.18 <15 96 17 0.5 90 100 95 100		
	1.02.02.2.02.0038	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)														
			Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersediaan, Terkelolaan dan Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)				1 Unit	746.731.298,00	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing dan Berkarakter	-		0,00	PUBLICSAFETYCENTER 119
		DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG						54.342.078.518,00							30.636.817.350,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						54.342.078.518,00							30.636.817.350,00	
	1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG						54.342.078.518,00							30.636.817.350,00	
1.	1.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan ketersediaan dokumen perencanaan, pengangguran evaluasi kinerja dan administrasi perkantoran	100,00 %			100,00 %	9.481.345.834,00						100,00 %	10.260.771.390,00	
	1.03.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	% pemenuhan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	-			100 %	49.653.030,00			-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamis	-	-	76.670.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	10.851.800,00	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamis	-		16.500.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD														
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	3.970.200,00	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamis	-		7.150.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD														
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	1.925.700,00	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamis	-		3.630.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD														
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	3.943.400,00	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamis	-		4.950.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD														
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	1.218.900,00	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamis	-		2.090.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				12 Laporan	27.743.030,00	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamis	-		42.350.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	% pemenuhan layanan administrasi keuangan	-			100 %	7.783.222.199,00			-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamis	-	-	7.982.501.390,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				48 Orang/ bulan	7.731.358.739,00	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamis	-		7.920.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD				1 Dokumen	47.255.960,00	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamis	-		55.901.390,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	2.525.100,00	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamis	-		3.300.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran														
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				1 Dokumen	2.082.400,00	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamis	-		3.300.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-			-	98.008.400,00			-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamis	-	-	125.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD														
			Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				3 Dokumen	98.008.400,00	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamis	-		125.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	% pemenuhan layanan administrasi umum	-			100 %	126.511.000,00			-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamis	-	-	190.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				2 Paket	8.000.000,00	Kota Magelang, Magelang Selatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamis	-		10.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				4 Paket	21.062.000,00	Kota Magelang, Magelang Selatan, Semua Kel/Desa Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamis	-		22.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	10.500.000,00	Kota Magelang, Magelang Utara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamis	-		15.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.03.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				6 Dokumen	3.000.000,00	Kota Magelang, Magelang Selatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamis	-		3.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material														
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				4 Paket	25.000.000,00	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamis	-		26.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				4 Laporan	2.700.000,00	Kota Magelang, Magelang Selatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamis	-		4.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	56.249.000,00	Kota Magelang, Magelang Selatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamis	-		110.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	10.000.000,00			-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamis	-	-	20.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel														
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				50 Unit	10.000.000,00	Kota Magelang, Magelang Selatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamis	-		20.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	756.424.299,00			-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamis	-	-	970.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	83.671.049,00	Kota Magelang, Magelang Selatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamis	-		125.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	208.800.000,00	Kota Magelang, Magelang Selatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamis	-		280.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Laporan	10.000.000,00	Kota Magelang, Magelang Selatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamis	-		65.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	453.953.250,00	Kota Magelang, Magelang Selatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan	-		500.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
												Berintegritas dan Dinamis				
	1.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	% pemeliharaan barang milik daerah	-			100 %	657.526.906,00			-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamis	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-	896.600.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				18 Unit	158.750.000,00	Kota Magelang, Magelang Selatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamis	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		250.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				17 Unit	266.364.500,00	Kota Magelang, Magelang Selatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamis	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		330.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.09.0003	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar														
			Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya				9 Unit	98.832.406,00	Kota Magelang, Magelang Selatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamis	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		100.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				22 Unit	29.080.000,00	Kota Magelang, Magelang Selatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamis	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		85.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.09.0008	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud														
			Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara				1 Unit	4.500.000,00	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamis	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		6.600.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi				3 Unit	100.000.000,00	Kota Magelang, Magelang Selatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamis	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		125.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
2.	1.03.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	% Panjang saluran irigasi dalam kondisi baik	59,58 %			59,58 %	1.561.879.030,00						59,58 %	0,00	
	1.03.02.2.02	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	% jaringan irigasi kota dalam kondisi baik	-			59,58 %	1.561.879.030,00			-	-	-	-	0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.02.2.02.0008	Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan														
			Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Ditingkatkan				0.070 KM	1.118.299.600,00	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.02.2.02.0021	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan														
			Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara				16,55 KM	443.579.430,00	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
3.	1.03.03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Proporsi populasi yang memiliki akses layanan sumber air minum, aman, dan berkelanjutan Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap pelayanan sumber air minum layak	98,65 % 35 %			35 % 98,65 %	1.139.677.600,00						98,65 % 35 %	0,00	
	1.03.03.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	% rumah tangga yang memiliki akses terhadap pelayanan sumber air minum layak	-			98,65 %	1.139.677.600,00			-	Penguatan Landasan Perekonomian yang Berdaya	-	-	0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
												Saing, Inklusif, dan Berkelanjutan				
	1.03.03.2.01.0024	Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)														
			Jumlah Masyarakat yang dibina dan diberdayakan dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)				100 Orang	8.137.800,00	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Perekonomian yang Berdaya Saing, Inklusif, dan Berkelanjutan	-		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.03.2.01.0028	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan														
			Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dibangun				1,5 Liter/Detik	982.673.000,00	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Perekonomian yang Berdaya Saing, Inklusif, dan Berkelanjutan	-		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.03.2.01.0029	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)														
			Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang Dioperasikan dan Dipelihara				3 Unit	148.866.800,00	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Perekonomian yang Berdaya Saing, Inklusif, dan Berkelanjutan	-		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
4.	1.03.05	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	%jumlah rumah tangga yang memiliki akses terhadap pelayanan sanitasi layak	93,49 %			93,49 %	1.663.351.720,00						93,49 %	0,00	
	1.03.05.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	% pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah domestik kota	-			100 %	1.663.351.720,00			-	Penguatan Landasan Perekonomian yang Berdaya Saing, Inklusif, dan Berkelanjutan	-	-	0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.05.2.01.0029	Optimalisasi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman														
			Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman yang dioptimalisasi				6 Unit	228.296.320,00	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Perekonomian yang Berdaya Saing, Inklusif, dan Berkelanjutan	-		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.05.2.01.0038	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)														
			Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang Dioperasikan dan Dipelihara				1 Unit	255.724.870,00	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Perekonomian yang Berdaya Saing, Inklusif, dan Berkelanjutan	-		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.05.2.01.0040	Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)														
			Jumlah Masyarakat yang dibina dan diberdayakan dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)				400 Orang	37.781.630,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Perekonomian yang Berdaya Saing, Inklusif, dan Berkelanjutan	-		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.05.2.01.0043	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Pelaksana Penyelenggara Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)														
			Jumlah Pelaksanaan Penyelenggara Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang Ditingkatkan Kapasitasnya				16 Penyelenggara	27.197.200,00	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Perekonomian yang Berdaya Saing, Inklusif, dan Berkelanjutan	-		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.05.2.01.0044	Penyediaan Unit pengolahan setempat														
			Jumlah Rumah Tangga yang memiliki fasilitas buang air besar individual dengan kloset leher angsa dan unit pengolahan setempat anaerob (yang dapat berupa tangki septik dengan pengolahan lanjutan/sesuai SNI 2398) atau unit pengolahan setempat aerob.				27 Rumah Tangga	1.114.351.700,00	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Perekonomian yang Berdaya Saing, Inklusif, dan Berkelanjutan	-		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.05.2.01.0045	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)														
			Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang disusun				1 Dokumen	0,00	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Perekonomian yang Berdaya Saing, Inklusif, dan Berkelanjutan	-		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
												Saing, Inklusif, dan Berkelanjutan				
5.	1.03.06	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase drainase dalam kondisi baik	35,34 %			35,34 %	1.575.861.030,00						35,34 %	0,00	
	1.03.06.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	% drainase primer dalam kondisi baik	-			35,34 %	1.575.861.030,00			-	-	-	-	0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.06.2.01.0024	Peningkatan Sistem Drainase Perkotaan														
			Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Ditingkatkan				3 Sistem Drainase Perkotaan	1.111.810.000,00	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.06.2.01.0031	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Perkotaan														
			Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Beroperasi dan Terpelihara				29 Sistem Drainase Perkotaan	464.051.030,00	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
6.	1.03.08	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	% bangunan yang memiliki dokumen PBG Persentase Progres Pembangunan Gedung Balai Kota	100 % 27,5 %			27,5 % 100 %	22.543.920.514,00						100 % 27,5 %	343.390.960,00	
	1.03.08.2.01	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	% bangunan gedung yang memiliki PBG	-			27,5 %	22.543.920.514,00			-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamis	-	-	343.390.960,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.08.2.01.0021	Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota				1 dokumen Dokumen	22.346.098.314,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamis	-		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.08.2.01.0023	Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG														
			Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG				80 Dokumen	197.822.200,00	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		343.390.960,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
7.	1.03.09	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	-	-			-	6.477.022.400,00						-	0,00	
	1.03.09.2.01	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	6.477.022.400,00			-	-	-	-	0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.09.2.01.0010	Penyusunan Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Dokumen Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan yang Disusun di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota				1 Dokumen	6.459.368.100,00	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.09.2.01.0012	Pembinaan dan pengawasan penataan bangunan dan lingkungan														
			Jumlah penyelenggara bangunan gedung yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan penataan bangunan dan lingkungan				150 Orang	17.654.300,00	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
8.	1.03.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	% panjang jalan dalam keadaan mantap Persentase Panjang jalan dalam kondisi mantab	95,00 % 94 %			94 % 95,00 %	9.196.482.690,00						95,00 % 94 %	19.200.000.000,00	
	1.03.10.2.01	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	% panjang jalan dalam keadaan mantap	-			94 %	9.196.482.690,00			-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamis	-	-	19.200.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.10.2.01.0029	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan														
			Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang Disusun				5 Dokumen	345.000.000,00	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamis	-		350.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.10.2.01.0051	Pemeliharaan Rutin Jalan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin				84 KM	1.116.300.900,00	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamis	-		1.200.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.10.2.01.0056	Pemeliharaan Berkala Jalan														
			Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala				3 KM	7.607.260.000,00	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamis	-		17.500.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.10.2.01.0067	Pemeliharaan Rutin Jembatan														
			Jumlah Jembatan yang Dipelihara Secara Rutin				79 Jembatan	127.921.790,00	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamis	-		150.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
9.	1.03.11	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	undefined	undefined undefined			undefined undefined	255.731.600,00						undefined undefined	329.000.000,00	
	1.03.11.2.01	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	% tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	-			30 %	150.810.000,00			-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamis	-	-	183.800.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.11.2.01.0010	Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis														
			Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Difasilitasi Sertifikasi				60 Orang	115.076.100,00	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamis	-		131.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.11.2.01.0011	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Jasa Konstruksi														
			Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina dan Ditingkatkan Kapasitasnya				110 Lembaga	35.733.900,00	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamis	-		52.800.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.11.2.04	Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	% jumlah pengawasan yang sesuai jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan atau kualifikasi usaha dengan kegiatan usaha jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya	-			100 %	104.921.600,00			-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamis	-	-	145.200.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.11.2.04.0006	Pembinaan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi														
			Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk				85 Lembaga	11.263.800,00	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamis	-		24.200.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.11.2.04.0010	Penyusunan Produk Hukum Daerah terkait Penyelenggaraan Jasa Konstruksi di Kabupaten/Kota														
			Jumlah Produk Hukum Daerah terkait Penyelenggaraan Jasa Konstruksi di Kabupaten/Kota				1 Dokumen	93.657.800,00	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	-		121.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
10.	1.03.12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	% kesesuaian pemanfaatan ruang sesuai dengan KKPR yang diterbitkan Persentase Perwujudan Kesesuaian Pemanfaatan Ruang	80 % 100 %			100 % 80 %	446.806.100,00						80 % 100 %	503.655.000,00	
	1.03.12.2.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	% dokumen perencanaan tata ruang yang tersusun Tersedianya materi teknis dan ranperda RTRW Provinsi sesuai dengan pedoman	-			100 % 1 Dokumen	263.682.100,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamis	Stakeholder di Kota Magelang	-	250.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)			
											NASIONAL	DAERAH						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
	1.03.12.2.02.0007	Penyusunan RTRW Kabupaten/Kota																
			<i>Jumlah materi teknis dan ranperda RTRW Kabupaten/Kota</i>				1 Dokumen	263.682.100,00	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamis	Stakeholder di Kota Magelang		250.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG		
	1.03.12.2.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	<i>Tersedianya dokumen Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang Tersedia dan terlaksananya pengembangan sistem informasi dan komunikasi penataan ruang %sinkronisasi pemanfaatan ruang</i>	-			1 Dokumen 1 Unit 100 %	38.279.600,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamis	Stakeholder di Kota Magelang	-	92.188.500,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG		
	1.03.12.2.03.0005	Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang																
			<i>Jumlah dokumen sinkronisasi program pemanfaatan ruang</i>				1 Dokumen	38.279.600,00	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamis	Stakeholder di Kota Magelang		46.320.100,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG		
	1.03.12.2.03.0007	Sistem informasi dan komunikasi penataan ruang																
			<i>Jumlah sistem informasi dan komunikasi penataan ruang</i>				1 Sistem Informasi	0,00	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamis	Stakeholder di Kota Magelang		45.868.400,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG		
	1.03.12.2.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	<i>%pengendalian tat ruang kota tersedianya dokumen pengendalian pemanfaatan Ruang Daerah Kota Magelang</i>	-			100 % 1 Dokumen	144.844.400,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamis	Stakeholder di Kota Magelang	-	161.466.500,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG		
	1.03.12.2.04.0004	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang																
			<i>Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang</i>				12 Dokumen	85.972.300,00	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamis	Stakeholder di Kota Magelang		57.431.400,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG		
	1.03.12.2.04.0008	Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan/atau pernyataan mandiri pelaku UMK																
			<i>Dokumen tekstual dan spasial hasil Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang</i>				12 Dokumen	49.619.000,00	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamis	Stakeholder di Kota Magelang		58.831.400,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG		
	1.03.12.2.04.0015	Pemberian insentif dan/atau disinsentif non fiskal																
			<i>Jumlah berita acara pemberian insentif dan/atau disinsentif non fiskal</i>				1 Berita Acara	9.253.100,00	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamis	Stakeholder di Kota Magelang		45.203.700,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG		
		DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN							56.973.509.055,00							34.370.716.451,00		
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							56.957.388.555,00							34.250.716.451,00		
	1.04	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN							56.957.388.555,00							34.250.716.451,00		
1.	1.04.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	<i>Meningkatnya Nilai SAKIP</i>	-			A	30.599.708.688,00						-	4.719.199.000,00			
	1.04.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	<i>Cakupan Ketersediaan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja PD</i>	-			100 %	27.571.265,00			-	-	-	-	34.200.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN		
	1.04.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	12.910.750,00	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		14.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD														
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	2.272.600,00	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		3.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD														
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	2.157.915,00	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		3.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD														
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	2.729.300,00	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		3.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD														
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	1.813.600,00	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		3.200.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				5 Laporan	5.687.100,00	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		8.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Laporan administrasi Keuangan PD sesuai aturan	-			100 %	4.372.262.928,00			-	-	-	-	4.105.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				25 Orang/ bulan	4.313.527.168,00	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		4.000.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				25 Dokumen	7.783.800,00	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		8.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	3.022.275,00	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		4.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD				12 Laporan	46.236.560,00	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		90.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran														
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				1 Dokumen	1.693.125,00	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		3.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Cakupan administrasi kepegawaian PD	-			100 %	1.424.700,00			-	-	-	-	1.500.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya														
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				3 Paket	1.424.700,00	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		1.500.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	124.780.955,00			-	-	-	-	142.699.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	6.146.755,00	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		6.450.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				25 Paket	19.042.500,00	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		20.519.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	11.092.700,00	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		11.500.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				3 Dokumen	6.450.000,00	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		6.930.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material														
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				1 Paket	19.017.000,00	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		19.200.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														
			Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu				12 Laporan	4.320.000,00	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		4.500.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	58.712.000,00	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		73.600.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	25.700.000.000,00			-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	-	-	0,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	25.700.000.000,00	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	-		0,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	178.911.840,00			-	-	-	-	224.800.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	549.510,00	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		1.300.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	42.536.520,00	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		43.500.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	135.825.810,00	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		180.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	194.757.000,00			-	-	-	-	211.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				4 Unit	77.274.700,00	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		88.700.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				9 Unit	84.441.300,00	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		84.600.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel														
			Jumlah Mebel yang Dipelihara				5 Unit	5.000.000,00	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		5.200.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				26 Unit	16.041.000,00	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		20.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.04.01.2.09.0008	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud														
			Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara				1 Unit	12.000.000,00	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		12.500.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
2.	1.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	-	-			-	216.479.600,00						-	100.000.000,00	
	1.04.02.2.01	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	-	-			-	216.479.600,00			-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamis	-	-	100.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.02.2.01.0006	Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus														
			Jumlah Dokumen Data Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun, dan Rumah Khusus				17 Dokumen	216.479.600,00	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamis	-		100.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
3.	1.04.03	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	-	-			-	181.333.678,00						-	314.803.126,00	
	1.04.03.2.02	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	-	-			-	26.736.150,00			-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamis	-	-	34.195.260,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.03.2.02.0008	Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP														
			Jumlah Dokumen Kebijakan Bidang PKP yang Tersusun/T erreview/Terlegalisasi				12 Dokumen	26.736.150,00	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamis	-		34.195.260,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.03.2.03	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	-	-			-	154.597.528,00			-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamis	-	-	280.607.866,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.03.2.03.0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh														
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh				12 Laporan	136.686.600,00	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamis	-		253.440.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.03.2.03.0009	Pelaksanaan Peremajaan Kawasan Permukiman Kumuh														
			Luas Kawasan Permukiman Kumuh yang Diremajakan				10 Ha	17.910.928,00	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamis	-		27.167.866,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
4.	1.04.04	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	-	-			-	6.018.660.100,00						-	5.750.000.000,00	
	1.04.04.2.01	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	6.018.660.100,00			-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamis	-	-	5.750.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.04.2.01.0001	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha														
			Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki				411 Unit Rumah	6.018.660.100,00	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamis	-		5.750.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
5.	1.04.05	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	-	-			-	19.941.206.489,00						-	23.366.714.325,00	
	1.04.05.2.01	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	-	-			-	19.941.206.489,00			-	-	-	-	23.366.714.325,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.04.05.2.01.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan														
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan				1 Laporan	46.717.310,00	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		75.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.05.2.01.0010	Verifikasi dan Penyerahan PSU Perumahan dari Pengembang														
			Jumlah Laporan Hasil Serah Terima PSU Perumahan yang Terverifikasi dari Pengembang				1 Laporan	378.987.460,00	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	-		640.332.726,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.05.2.01.0012	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan														
			Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum				17 Lokasi	19.515.501.719,00	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamis	-		22.651.381.599,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						16.120.500,00							120.000.000,00	
	2.10	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN						16.120.500,00							120.000.000,00	
1.	2.10.06	PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, DAN GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE	-	-			-	0,00						-	75.000.000,00	
	2.10.06.2.01	Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	0,00			-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	-	-	75.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	2.10.06.2.01.0002	Inventarisasi dan Rekomendasi Objek Redistribusi Tanah														
			Jumlah Data Inventarisasi dan Rekomendasi Obyek Redistribusi Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota				1 Dokumen	0,00	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	-		75.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
2.	2.10.10	PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	Persentase luas lahan bersertifikat	100,00 %			100,00 %	16.120.500,00						100,00 %	45.000.000,00	
	2.10.10.2.01	Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota	Prenstase jumlah data dan informasi spasial yang berbasis wilayah	-			100 %	16.120.500,00			-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	-	-	45.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	2.10.10.2.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah														
			Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota				1 Laporan	16.120.500,00	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	-		45.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
		RUMAH SUSUN						1.581.016.000,00							2.100.000.000,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						1.581.016.000,00							2.100.000.000,00	
	1.04	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN						1.581.016.000,00							2.100.000.000,00	
1.	1.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Persentase penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana Persentase penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban relokasi program pemerintah kabupaten/kota	90 % 46,87 %			90 % 46,87 %	1.581.016.000,00						90 % 46,87 %	2.100.000.000,00	
	1.04.02.2.05	Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Presentase pembinaan rumah susun dan rumah khusus	-			100 %	1.581.016.000,00			-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamis	-	-	2.100.000.000,00	RUMAH SUSUN
	1.04.02.2.05.0002	Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus														
			Jumlah Dokumen Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus				5 Dokumen	1.581.016.000,00	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan	-		2.100.000.000,00	RUMAH SUSUN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
												Berintegritas dan Dinamis				
		SATUAN POLISI PAMONG PRAJA						11.468.428.771,00							13.341.094.053,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						11.468.428.771,00							13.341.094.053,00	
	1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT						11.468.428.771,00							13.341.094.053,00	
1.	1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Terwujudnya pelayanan kantor, pengelolaan keuangan, perencanaan dan capaian kinerja sesuai peraturan yang berlaku	-			100,00 %	8.569.428.311,00						-	9.256.883.024,00	
	1.05.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terwujudnya dokumen perencanaan, penganggaran dan laporan capaian kinerja	-			100 %	37.197.200,00			-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamis	OPD	-	37.044.810,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	15.021.100,00	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamis	OPD		17.073.650,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD														
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	2.954.300,00	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamis	OPD		2.342.890,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD														
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	3.418.700,00	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamis	OPD		2.302.190,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD														
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	2.941.700,00	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamis	OPD		2.255.550,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD														
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	3.302.300,00	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamis	OPD		2.555.520,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				4 Laporan	9.559.100,00	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamis	OPD		10.515.010,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tertiba Laporan kinerja dan keuangan	-			100 %	7.391.865.088,00			-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamis	OPD	-	7.896.289.531,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				53 Orang/ bulan	7.382.315.888,00	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamis	OPD		7.886.531.541,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD</i>				5 Laporan	2.684.900,00	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamis	OPD		2.206.820,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD</i>				18 Laporan	6.864.300,00	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamis	OPD		7.551.170,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	<i>Terlaksananya pengadministrasi kepegawaian perangkat daerah</i>	-			100 %	411.202.400,00			-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamis	OPD	-	507.038.290,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya														
			<i>Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan</i>				200 Paket	411.202.400,00	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamis	OPD		507.038.290,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	<i>Tersedianya peralatan untuk menunjang kelancaran administrasi perkantoran</i>	-			100 %	118.490.400,00			-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamis	OPD	-	129.986.340,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor														
			<i>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan</i>				10 Paket	6.580.500,00	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamis	OPD		7.238.550,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			<i>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>				6 Paket	7.090.100,00	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamis	OPD		7.799.110,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			<i>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan</i>				10 Paket	59.734.200,00	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamis	OPD		65.717.740,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			<i>Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan</i>				10 Paket	4.794.500,00	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamis	OPD		4.910.730,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
			<i>Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan</i>				12 Dokumen	2.880.000,00	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamis	OPD		3.168.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material														
			<i>Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan</i>				12 Paket	5.684.100,00	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamis	OPD		6.252.510,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.05.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				10 Laporan	7.200.000,00	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamis	OPD		7.920.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	24.527.000,00	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamis	OPD		26.979.700,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya jasa untuk menunjang kelancaran administrasi perkantoran	-			100 %	144.594.448,00			-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamis	OPD	-	173.816.018,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				10 Laporan	12.559.500,00	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamis	OPD		8.783.390,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	71.724.184,00	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamis	OPD		78.896.845,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	60.310.764,00	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamis	OPD		86.135.783,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya barang milik daerah	-			100 %	466.078.775,00			-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamis	OPD	-	512.708.035,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				12 Unit	140.861.922,00	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamis	OPD		154.949.911,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				18 Unit	290.907.812,00	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamis	OPD		320.014.189,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				10 Unit	28.304.796,00	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamis	OPD		31.136.219,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi				2 Unit	6.004.245,00	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan	OPD		6.607.716,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
												Berintegritas dan Dinamis				
2.	1.05.02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Presentase Penyelesaian Pelanggaran K3	100,00 %			100,00 %	2.899.000.460,00						100,00 %	4.084.211.029,00	
	1.05.02.2.01	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Kasus Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	-			100 %	2.583.762.500,00			-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamis	Masyarakat	-	3.547.450.913,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.2.01.0003	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota														
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota				2 Dokumen	7.383.100,00	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamis	Masyarakat		8.121.410,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.2.01.0004	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum														
			Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum				12 Dokumen	703.950.000,00	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamis	Masyarakat		774.345.220,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.2.01.0006	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum														
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan				2 Dokumen	91.220.400,00	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamis	Masyarakat		100.342.440,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.2.01.0015	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan														
			Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan				12 laporan	1.483.582.400,00	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamis	Masyarakat		2.105.305.893,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.2.01.0016	Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa														
			Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan				12 Laporan	293.289.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamis	Masyarakat		322.618.450,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.2.01.0017	Penyediaan Layanan dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perturan kepala daerah														
			Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani				1 Laporan	950.000,00	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamis	Masyarakat		1.045.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.2.01.0025	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja														
			Jumlah Aparatur Satpol PP yang mengikuti peningkatan kapasitas				40 Orang	3.387.100,00	Kota Magelang, Magelang Selatan, Magersari	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamis	Masyarakat		235.672.500,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.2.02	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Presentase penegakan perda	-			75 %	306.978.560,00			-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamis	Masyarakat	-	525.760.776,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.2.02.0011	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah														
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP				12 Laporan	37.036.400,00	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamis	Masyarakat		228.824.400,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.05.02.2.02.0012	Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah														
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah				12 Laporan	269.942.160,00	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamis	Masyarakat		296.936.376,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.2.03	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	-	-			-	8.259.400,00			-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamis	Masyarakat	-	10.999.340,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.2.03.0006	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS														
			Jumlah Laporan Hasil Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS Penegak Perda				4 Laporan	8.259.400,00	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamis	Masyarakat		10.999.340,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
		PEMADAM KEBAKARAN						704.597.328,00							955.647.547,80	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						704.597.328,00							955.647.547,80	
	1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT						704.597.328,00							955.647.547,80	
1.	1.05.04	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran 3. Persentase pencegah penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran	100,00 % 15 menit			15 menit 100,00 %	704.597.328,00						100,00 % 15 menit	955.647.547,80	
	1.05.04.2.01	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan wilayah pelayanan penanggulangan kebakaran	-			100 %	672.152.828,00			Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamis	Masyarakat	-	919.133.597,80	PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.04.2.01.0003	Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran														
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Penyelamatan/Evakuasi Saat Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran				4 Dokumen	628.804.986,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamis	Masyarakat		871.450.971,60	PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.04.2.01.0017	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait				12 Unit	43.347.842,00	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamis	Masyarakat		47.682.626,20	PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.04.2.04	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	Cakupan pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan kebakaran	-			100 %	25.662.350,00			Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamis	Masyarakat	-	28.228.585,00	PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.04.2.04.0001	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat														
			Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya				50 Orang	8.268.450,00	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamis	Masyarakat		9.095.295,00	PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.04.2.04.0003	Dukungan Pemberdayaan Masyarakat/Relawan Pemadam Kebakaran Melalui Penyediaan Sarana dan PraSarana														
			Jumlah Dokumen yang Memuat Jumlah SKKL Desa/Kelurahan yang Telah Tersedia Dukungan Sapras Damkar				6 Dokumen	17.393.900,00	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamis	Masyarakat		19.133.290,00	PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.04.2.05	Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia	-	-			-	6.782.150,00			Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamis	Masyarakat	-	8.285.365,00	PEMADAM KEBAKARAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.05.04.2.05.0004	Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi														
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi yang Sah dan Legal				3 Laporan	6.782.150,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamis	Masyarakat		8.285.365,00	PEMADAM KEBAKARAN
		BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH						4.987.359.769,00							5.525.354.380,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						4.987.359.769,00							5.525.354.380,00	
	1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT						4.987.359.769,00							5.525.354.380,00	
1.	1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-			-	4.203.910.281,00						-	4.229.432.562,00	
	1.05.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	4.585.100,00			-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamis	-	-	11.614.388,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	1.257.800,00	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamis	-		2.581.500,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD														
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	373.300,00	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		634.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD														
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	373.300,00	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		634.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD														
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	495.000,00	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		754.800,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD														
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	423.500,00	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		754.800,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				13 Laporan	1.662.200,00	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		6.255.288,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	3.887.984.533,00			-	-	-	-	3.687.683.128,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				18 Orang/ bulan	3.882.968.433,00	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		3.679.509.028,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	333.700,00	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		571.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD				12 Laporan	4.682.400,00	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		7.603.100,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	75.428.400,00			-	-	-	-	155.287.200,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.05.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				4 Paket	2.386.600,00	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		3.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	798.000,00	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		3.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Paket	24.811.000,00	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		32.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				6 Paket	6.061.600,00	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		10.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				3 Dokumen	3.240.000,00	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		5.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material														
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				12 Paket	10.155.200,00	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		20.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	720.000,00	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		1.050.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	27.256.000,00	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		81.237.200,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	4.000.000,00			-	-	-	-	25.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				4 Unit	4.000.000,00	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		25.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	114.828.560,00			-	-	-	-	147.802.446,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	12.634.700,00	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		25.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	59.277.600,00	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		80.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	42.916.260,00	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		42.802.446,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	117.083.688,00			-	-	-	-	202.045.400,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				11 Unit	69.738.888,00	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		100.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				2 Unit	38.380.800,00	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		55.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				7 Unit	8.964.000,00	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		2.045.400,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.09.0008	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud														
			Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara				1 Unit	0,00	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		45.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
2.	1.05.03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	-	-			-	783.449.488,00						-	1.295.921.818,00	
	1.05.03.2.01	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	-	-			-	14.807.100,00			-	Penguatan Landasan Perekonomian yang Berdaya Saing, Inklusif, dan Berkelanjutan	-	-	33.770.880,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.01.0007	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)														
			Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana bencana Kabupaten/Kota yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya selama 1 (satu) tahun				60 Orang	14.807.100,00	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Perekonomian yang Berdaya Saing, Inklusif, dan Berkelanjutan	-		33.770.880,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.02	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	-	-			-	576.572.128,00			-	-	-	-	847.041.040,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.02.0015	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota														
			Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas sesuai dengan jenis ancaman bencana di kawasan tempat tinggalnya				18 Unit	48.255.510,00	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		231.010.450,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.02.0018	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota														
			Jumlah warga negara yang mengikuti gladi kesiapsiagaan untuk menguji efektivitas SOP dan keberfungsian sarana prasarana dalam pengendalian operasi penanganan darurat bencana (per jenis ancaman) Kabupaten/Kota				120 Orang	8.462.900,00	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Perekonomian yang Berdaya Saing, Inklusif, dan Berkelanjutan	-		12.982.310,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.02.0020	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana														
			Jumlah kawasan rawan bencana (per jenis ancaman bencana) dan/atau kawasan-kawasan strategis Kabupaten/Kota yang memiliki mekanisme dan prosedur tetap kesiapsiagaan menghadapi bencana				1 Kawasan	12.701.300,00	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Perekonomian yang Berdaya Saing, Inklusif, dan Berkelanjutan	-		42.296.540,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.02.0021	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota														
			Jumlah personil Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana (TRC PB) Kabupaten/Kota yang berasal dari lintas sektor yang memiliki kompetensi untuk penanganan awal darurat bencana				30 Orang	19.730.300,00	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		31.133.520,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.02.0022	Penyusunan Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota														
			Jumlah Dokumen Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota (per jenis ancaman bencana) sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun				1 Dokumen	71.000.000,00	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Perekonomian yang Berdaya Saing, Inklusif, dan Berkelanjutan	-		94.445.560,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.02.0026	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota														
			Jumlah laporan layanan pusat pengendalian operasi (pusdalops) dengan Maklumat Pelayanan yang sah dan legal sesuai dengan jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya				12 laporan	163.465.818,00	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		285.172.660,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.02.0027	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota														
			Jumlah dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun				1 Dokumen	234.641.200,00	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Perekonomian yang Berdaya	-		0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
												Saing, Inklusif, dan Berkelanjutan				
	1.05.03.2.02.0028	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota														
			Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana				2 Kawasan	18.315.100,00	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		150.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.03	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	-	-			-	177.319.060,00			-	-	-	-	354.073.428,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.03.0001	Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas														
			Jumlah Laporan Koordinasi Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Prioritas				4 Laporan	4.286.940,00	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		6.695.794,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.03.0002	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota														
			Jumlah Dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat				2 Dokumen	133.907.220,00	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		225.275.974,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.03.0003	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota														
			Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana				1 Orang	3.900.000,00	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		21.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.03.0009	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota														
			Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana				20 Orang	28.857.200,00	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		73.374.950,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.03.0012	Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana														
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana Kanupaten/Kota				1 Laporan	6.367.700,00	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		27.726.710,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.04	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	-	-			-	14.751.200,00			-	-	-	-	61.036.470,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.04.0010	Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota														
			Jumlah penyelesaian kegiatan pascabencana di semua sektor sesuai berdasarkan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kabupaten/Kota yang dilegalikan				12 Kegiatan	14.751.200,00	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		61.036.470,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
		DINAS SOSIAL						16.866.473.960,00							15.397.435.433,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						16.866.473.960,00							15.397.435.433,00	
	1.06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL						16.866.473.960,00							15.397.435.433,00	
1.	1.06.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-			-	4.275.688.810,00						-	4.691.435.433,00	
	1.06.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	12.004.700,00			-	-	-	-	17.918.550,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	5.286.300,00	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		7.661.940,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD														
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	766.900,00	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		1.057.320,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD														
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	628.500,00	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		923.340,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD														
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	799.000,00	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		878.900,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	411.700,00	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		897.050,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				20 Laporan	4.112.300,00	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		6.500.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	3.811.607.925,00			-	-	-	-	4.108.500.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				22 Orang/ bulan	3.805.612.625,00	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		4.100.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD				150 Laporan	5.995.300,00	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		8.500.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-			-	7.711.900,00			-	-	-	-	11.503.470,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian														
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				6 Dokumen	7.711.900,00	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		11.503.470,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	126.935.900,00			-	-	-	-	148.598.676,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	4.989.100,00	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		5.488.010,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				2 Paket	4.785.500,00	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		5.264.050,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				2 Paket	12.437.200,00	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		13.680.926,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	8.201.500,00	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		11.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	1.440.000,00	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		1.584.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material														
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				1 Paket	7.569.600,00	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		8.326.890,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	3.600.000,00	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		5.500.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				36 Laporan	83.913.000,00	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		97.754.800,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	150.955.720,00			-	-	-	-	191.942.581,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	5.122.100,00	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		6.546.650,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	71.859.000,00	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		87.210.200,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	73.974.620,00	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		98.185.731,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	166.472.665,00			-	-	-	-	212.972.156,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				11 Unit	73.543.750,00	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		95.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				6 Unit	50.604.500,00	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		71.415.300,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				26 Unit	17.398.000,00	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		19.137.800,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi				2 Unit	24.926.415,00	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		27.419.056,00	DINAS SOSIAL
2.	1.06.02	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	-	-			-	205.602.890,00						-	0,00	
	1.06.02.2.03	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	205.602.890,00			-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing dan Berkarakter	-	-	0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.02.2.03.0004	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota														
			Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota				6 Lembaga	92.292.000,00	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing dan Berkarakter	-		0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.02.2.03.0014	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Perseorangan Kewenangan Kabupaten/Kota														
			Jumlah Penyuluh Sosial, Penyuluh Sosial Masyarakat, Pekerja Sosial, Pekerja Sosial Masyarakat dan/atau Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan yang Meningkatkan Kapasitasnya				25 Orang	113.310.890,00	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing dan Berkarakter	-		0,00	DINAS SOSIAL
3.	1.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	-	-			-	10.097.118.320,00						-	10.330.000.000,00	
	1.06.04.2.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	-	-			-	8.816.317.160,00			-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing dan Berkarakter	-	-	9.010.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.2.01.0001	Penyediaan Permakanan														
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota				1946 Orang	6.107.694.500,00	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing dan Berkarakter	-		6.200.000.000,00	DINAS SOSIAL

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.06.04.2.01.0003	Penyediaan Alat Bantu														
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota				265 Orang	0,00	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing dan Berkarakter	-		0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.2.01.0004	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga														
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota				100 Orang	197.026.030,00	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing dan Berkarakter	-		210.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.2.01.0006	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat														
			Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota				1256 Orang	2.511.596.630,00	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing dan Berkarakter	-		2.600.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.2.02	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	-	-			-	1.280.801.160,00			-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing dan Berkarakter	-	-	1.320.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.2.02.0002	Pemberian Layanan Kedaruratan														
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota				50 Orang	100.827.960,00	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing dan Berkarakter	-		120.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.2.02.0003	Penyediaan Permakanan														
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota				1465 Orang	1.179.973.200,00	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing dan Berkarakter	-		1.200.000.000,00	DINAS SOSIAL
4.	1.06.05	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	-	-			-	2.037.244.780,00						-	376.000.000,00	
	1.06.05.2.01	Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar	-	-			-	224.603.250,00			-	-	-	-	376.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.05.2.01.0001	Penjangkauan Anak-Anak Terlantar														
			Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Dijangkau Kewenangan Kabupaten/Kota				129 Orang	204.827.000,00	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		350.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.05.2.01.0002	Rujukan Anak-Anak Terlantar														
			Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Mendapat Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota				12 Orang	8.536.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		11.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.05.2.01.0003	Pemantauan Terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar														
			Jumlah Anak Terlantar yang Terpantau dan Terpelihara Kewenangan Kabupaten/Kota				129 Orang	11.240.250,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		15.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.05.2.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	1.812.641.530,00			-	-	-	-	0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.05.2.02.0001	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata				15.000 Orang	197.422.830,00	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.05.2.02.0004	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota				20 Orang	12.623.000,00	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.05.2.02.0006	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga														
			Jumlah Penerima Manfaat (PM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota				39 Orang	1.602.595.700,00	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT)	-	-	-		0,00	DINAS SOSIAL
5.	1.06.06	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	-	-			-	143.208.200,00						-	0,00	
	1.06.06.2.01	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	-	-			-	21.207.100,00			-	-	-	-	0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.06.2.01.0004	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan														
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota				50 Orang	21.207.100,00	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.06.2.02	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	-	-			-	122.001.100,00			-	-	-	-	0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.06.2.02.0002	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana														
			Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota				30 Orang	122.001.100,00	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	DINAS SOSIAL
6.	1.06.07	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	-	-			-	107.610.960,00						-	0,00	
	1.06.07.2.01	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	-	-			-	107.610.960,00			-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	-	-	0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.07.2.01.0002	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota														
			Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharaannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota				1089 Makam	107.610.960,00	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	-		0,00	DINAS SOSIAL
		DINAS TENAGA KERJA						13.695.473.268,00							5.319.589.160,00	
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						13.695.473.268,00							5.319.589.160,00	
	2.07	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA						13.695.473.268,00							5.319.589.160,00	
1.	2.07.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-			-	5.561.092.998,00						-	10.880.460,00	
	2.07.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	7.798.600,00			-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamis	-	-	0,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2.260.000,00	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamis	-		0,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD														
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1.187.400,00	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamis	-		0,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD														
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	1.038.800,00	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamis	-		0,00	DINAS TENAGA KERJA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.07.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD														
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	921.800,00	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamis	-		0,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD														
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	867.000,00	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamis	-		0,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				12 Laporan	1.523.600,00	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamis	-		0,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	4.815.315.793,00			-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamis	-	-	0,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				24 Orang/ bulan	4.814.310.793,00	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamis	-		0,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran														
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				1 Dokumen	1.005.000,00	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamis	-		0,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-			-	1.912.100,00			-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamis	-	-	0,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD														
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				14 Laporan	1.912.100,00	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamis	-		0,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	100.892.100,00			-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamis	-	-	0,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				12 Paket	15.000.000,00	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamis	-		0,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Paket	15.999.100,00	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamis	-		0,00	DINAS TENAGA KERJA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.07.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	6.928.000,00	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamis	-		0,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	3.600.000,00	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamis	-		0,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material														
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				12 Paket	17.999.000,00	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamis	-		0,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	4.400.000,00	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamis	-		0,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	36.966.000,00	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamis	-		0,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	352.559.105,00			-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamis	-	-	10.880.460,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	9.826.345,00	Kota Magelang, Magelang Utara, Kedungsari	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamis	-		10.880.460,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	124.835.200,00	Kota Magelang, Magelang Utara, Kedungsari	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamis	-		0,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	217.897.560,00	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamis	-		0,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	282.615.300,00			-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamis	-	-	0,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				8 Unit	101.945.500,00	Kota Magelang, Magelang Utara, Kedungsari	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan	-		0,00	DINAS TENAGA KERJA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
												Berintegritas dan Dinamis				
	2.07.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				10 Unit	61.666.800,00	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamis	-		0,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				60 Unit	80.770.000,00	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamis	-		0,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi				1 Unit	38.233.000,00	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamis	-		0,00	DINAS TENAGA KERJA
2.	2.07.03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	-	-			-	3.213.214.850,00						-	36.905.600,00	
	2.07.03.2.01	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	-	-			-	3.199.787.950,00			-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing dan Berkarakter	-	-	0,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.03.2.01.0001	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi														
			Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n				354 Orang	2.690.114.000,00	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT)	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing dan Berkarakter	-		0,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.03.2.01.0004	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Vokasi bagi Pencari Kerja berdasarkan Unit Kompetensi														
			Jumlah tenaga kerja yang mendapat pelatihan berbasis kompetensi pada tahun n				140 Orang	509.673.950,00	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing dan Berkarakter	-		0,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.03.2.02	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	-	-			-	4.387.300,00			-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing dan Berkarakter	-	-	8.192.500,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.03.2.02.0001	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta														
			Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina				15 Lembaga	4.387.300,00	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing dan Berkarakter	-		8.192.500,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.03.2.04	Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Kecil	-	-			-	9.039.600,00			-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing dan Berkarakter	-	-	28.713.100,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.03.2.04.0001	Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil														
			Jumlah Perusahaan Kecil yang Mendapat Konsultansi Peningkatan Produktivitas				100 Perusahaan	9.039.600,00	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya	-		28.713.100,00	DINAS TENAGA KERJA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
												Manusia Berdaya Saing dan Berkarakter				
3.	2.07.04	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	-	-			-	4.313.927.970,00						-	5.034.000.000,00	
	2.07.04.2.01	Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	4.237.383.270,00			-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing dan Berkarakter	-	-	4.950.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.04.2.01.0001	Penyediaan Sumber Daya Pelayanan antar Kerja														
			Jumlah SDM Pelayanan antar Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Melalui Bimtek dan lain-lain untuk Peningkatan Kompetensi				24 Orang	5.668.500,00	Kota Magelang, Magelang Utara, Kedungsari	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing dan Berkarakter	-		8.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.04.2.01.0002	Pelayanan antar Kerja														
			Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan Melalui Layanan AKAD dan AKL				600 Orang	10.090.400,00	Kota Magelang, Magelang Utara, Kedungsari	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamis	-		22.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.04.2.01.0003	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja														
			Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan				250 Orang	15.359.550,00	Kota Magelang, Magelang Utara, Kedungsari	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing dan Berkarakter	-		30.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.04.2.01.0004	Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan														
			Jumlah Tenaga Kerja Disabilitas yang Mendapatkan Fasilitas Layanan ULD				60 Orang	262.003.400,00	Kota Magelang, Magelang Utara, Kedungsari	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing dan Berkarakter	-		180.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.04.2.01.0005	Perluasan Kesempatan Kerja														
			Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja				1100 Orang	3.944.261.420,00	Kota Magelang, Magelang Utara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing dan Berkarakter	-		4.710.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.04.2.03	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	-	-			-	76.544.700,00			-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing dan Berkarakter	-	-	84.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.04.2.03.0002	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online														
			Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Teraftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub)				900 Orang	4.636.700,00	Kota Magelang, Magelang Utara, Kedungsari	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing dan Berkarakter	-		9.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.04.2.03.0003	Job Fair/Bursa Kerja														
			Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja				100 Orang	71.908.000,00	Kota Magelang, Magelang Utara, Kedungsari	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing dan Berkarakter	-		75.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
4.	2.07.05	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	-	-			-	607.237.450,00						-	237.803.100,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.07.05.2.02	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	607.237.450,00			-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing dan Berkarakter	-	-	237.803.100,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.05.2.02.0001	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Perselisihan yang Dicegah				373 Perkara	90.601.725,00	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing dan Berkarakter	-		192.803.600,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.05.2.02.0002	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Perkara Perselisihan yang Terselamatkan				10 Perkara	5.080.125,00	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing dan Berkarakter	-		9.186.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.05.2.02.0004	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah LKS Tripartit yang Dibina				1 Lembaga	29.170.600,00	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing dan Berkarakter	-		35.813.500,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.05.2.02.0005	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja														
			Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja				2300 Orang	482.385.000,00	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT)	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing dan Berkarakter	-		0,00	DINAS TENAGA KERJA
		DINAS LINGKUNGAN HIDUP						25.767.199.348,00							29.699.750.000,00	
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						25.767.199.348,00							29.699.750.000,00	
	2.11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP						25.767.199.348,00							29.699.750.000,00	
1.	2.11.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-			-	12.969.434.443,00						-	13.935.750.000,00	
	2.11.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	22.319.700,00			-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	-	-	35.250.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	11.806.000,00	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	-		19.200.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD														
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1.702.900,00	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	-		2.650.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD														
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	1.336.300,00	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	-		2.500.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	2.082.000,00	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	-		2.750.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD														
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	1.565.100,00	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	-		2.500.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				13 Laporan	3.827.400,00	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	-		5.650.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	10.180.629.158,00			-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	-	-	11.040.650.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				67 Orang/ bulan	10.153.447.858,00	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	-		11.000.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	2.889.200,00	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	-		4.500.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD				1 Laporan	22.035.300,00	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	-		33.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran														
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				1 Dokumen	2.256.800,00	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	-		3.150.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-			-	1.735.150,00			-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	-	-	2.750.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD														
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				4 Laporan	1.735.150,00	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	-		2.750.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	109.018.450,00			-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	-	-	207.100.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				14 Paket	2.569.650,00	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	-		10.500.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Paket	17.810.200,00	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	-		18.250.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	12.799.600,00	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	-		18.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	2.640.000,00	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	-		3.250.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material														
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				28 Paket	11.543.000,00	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	-		11.850.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	4.500.000,00	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	-		7.500.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	57.156.000,00	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	-		135.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				1000 Dokumen	0,00	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	-		2.750.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	259.577.200,00			-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	-	-	30.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				3 Unit	26.552.200,00	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	-		30.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	233.025.000,00	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan	-		0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
												Berintegritas dan Dinamistif				
	2.11.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	838.243.070,00			-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	-	-	970.500.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	4.850.600,00	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	-		10.500.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	476.190.000,00	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	-		485.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	357.202.470,00	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	-		475.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	1.557.911.715,00			-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	-	-	1.649.500.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				22 Unit	245.053.450,00	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	-		225.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				79 Unit	1.253.286.800,00	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	-		1.350.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel														
			Jumlah Mebel yang Dipelihara				10 Unit	3.000.000,00	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	-		4.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				42 Unit	17.400.000,00	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	-		18.500.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi				3 Unit	39.171.465,00	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	-		52.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.	2.11.02	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	-	-			-	0,00						-	115.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.11.02.2.01	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	-	-			-	0,00			-	Penguatan Landasan Perekonomian yang Berdaya Saing, Inklusif, dan Berkelanjutan	-	-	115.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.02.2.01.0006	Penyusunan RPPLH Kabupaten/Kota														
			jumlah dokumen RPPLH di kabupaten/kota yang berisi arahan/muatan RPPLH kabupaten/kota dan mengakomodir arahan RPPLH Provinsi				1 Dokumen	0,00	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Perekonomian yang Berdaya Saing, Inklusif, dan Berkelanjutan	-		115.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
3.	2.11.03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	-	-			-	276.489.000,00						-	353.500.000,00	
	2.11.03.2.01	PencegahanPencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	-	-			-	211.115.700,00			-	Penguatan Landasan Perekonomian yang Berdaya Saing, Inklusif, dan Berkelanjutan	-	-	260.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.03.2.01.0001	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut														
			Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut				1 Dokumen	144.279.500,00	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Perekonomian yang Berdaya Saing, Inklusif, dan Berkelanjutan	-		155.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.03.2.01.0002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan				1 Dokumen	53.361.200,00	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Perekonomian yang Berdaya Saing, Inklusif, dan Berkelanjutan	-		87.500.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.03.2.01.0015	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup kabupaten/kota														
			Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan				1 Dokumen	13.475.000,00	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Perekonomian yang Berdaya Saing, Inklusif, dan Berkelanjutan	-		17.500.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.03.2.02	Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	-	-			-	65.373.300,00			-	Penguatan Landasan Perekonomian yang Berdaya Saing, Inklusif, dan Berkelanjutan	-	-	93.500.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.03.2.02.0001	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat														
			Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan				2 Laporan	65.373.300,00	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Perekonomian yang Berdaya Saing, Inklusif, dan Berkelanjutan	-		93.500.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
4.	2.11.04	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	-	-			-	6.315.656.655,00						-	9.000.000.000,00	
	2.11.04.2.01	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	-	-			-	6.315.656.655,00			-	Penguatan Landasan Perekonomian yang Berdaya Saing, Inklusif, dan Berkelanjutan	-	-	9.000.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.04.2.01.0004	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)														
			Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota				90,81 Ha	6.315.656.655,00	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Perekonomian yang Berdaya Saing, Inklusif, dan Berkelanjutan	-		9.000.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
5.	2.11.05	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3)	-	-			-	7.217.000,00						-	10.500.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)														
	2.11.05.2.01	Penyimpanan sementara Limbah B3	-	-			-	7.217.000,00			-	Penguatan Landasan Perekonomian yang Berdaya Saing, Inklusif, dan Berkelanjutan	-	-	10.500.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.05.2.01.0005	Fasilitasi Pemenuhan Rincian Teknis Penyimpanan sementara Limbah B3 untuk di integrasikan dengan persetujuan lingkungan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission)														
			Jumlah Fasilitasi Pemenuhan Rincian Teknis untuk di Integrasikan dengan persetujuan lingkungan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission)				5 Dokumen	7.217.000,00	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Perekonomian yang Berdaya Saing, Inklusif, dan Berkelanjutan	-		10.500.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
6.	2.11.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	-	-			-	53.518.600,00						-	68.500.000,00	
	2.11.06.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	53.518.600,00			-	Penguatan Landasan Perekonomian yang Berdaya Saing, Inklusif, dan Berkelanjutan	-	-	68.500.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.06.2.01.0001	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH														
			Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan				5 Dokumen	15.347.900,00	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Perekonomian yang Berdaya Saing, Inklusif, dan Berkelanjutan	-		23.500.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.06.2.01.0009	Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup														
			Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi				30Badan Usaha	38.170.700,00	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Perekonomian yang Berdaya Saing, Inklusif, dan Berkelanjutan	-		45.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
7.	2.11.08	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	-	-			-	171.546.500,00						-	213.000.000,00	
	2.11.08.2.01	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	171.546.500,00			-	Penguatan Landasan Perekonomian yang Berdaya Saing, Inklusif, dan Berkelanjutan	-	-	213.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.08.2.01.0002	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup														
			Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan				1 Dokumen	55.441.500,00	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Perekonomian yang Berdaya Saing, Inklusif, dan Berkelanjutan	-		70.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.08.2.01.0003	Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup														
			Jumlah Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/Kegiatan yang terlibat				480 Orang	116.105.000,00	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Perekonomian yang Berdaya Saing, Inklusif, dan Berkelanjutan	-		143.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
8.	2.11.09	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	-	-			-	263.762.300,00						-	225.000.000,00	
	2.11.09.2.01	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	263.762.300,00			-	Penguatan Landasan Perekonomian yang Berdaya Saing, Inklusif, dan Berkelanjutan	-	-	225.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.09.2.01.0001	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH</i>				10 Entitas	263.762.300,00	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Perekonomian yang Berdaya Saing, Inklusif, dan Berkelanjutan	-		225.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
9.	2.11.10	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	-	-			-	8.709.700,00						-	12.500.000,00	
	2.11.10.2.01	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	-	-			-	8.709.700,00			-	Penguatan Landasan Perekonomian yang Berdaya Saing, Inklusif, dan Berkelanjutan	-	-	12.500.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.10.2.01.0009	Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota														
			<i>Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti/dikelola</i>				4 Pengaduan	8.709.700,00	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Perekonomian yang Berdaya Saing, Inklusif, dan Berkelanjutan	-		12.500.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
10.	2.11.11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	-	-			-	5.700.865.150,00						-	5.766.000.000,00	
	2.11.11.2.01	Pengelolaan Sampah	-	-			-	5.619.405.950,00			-	Penguatan Landasan Perekonomian yang Berdaya Saing, Inklusif, dan Berkelanjutan	-	-	5.757.500.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.11.2.01.0004	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan														
			<i>Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat</i>				17 Kelompok	637.448.950,00	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Perekonomian yang Berdaya Saing, Inklusif, dan Berkelanjutan	-		525.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.11.2.01.0012	Penanganan sampah melalui pengangkutan														
			<i>Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pengangkutan</i>				7300 Ton	2.032.170.360,00	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Perekonomian yang Berdaya Saing, Inklusif, dan Berkelanjutan	-		2.000.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.11.2.01.0015	Penanganan sampah melalui pengoperasian dan pemeliharaan sarana dan prasarana penanganan sampah														
			<i>Jumlah sarana dan prasarana penanganan sampah yang beroperasi dan terpelihara dengan baik</i>				20 Unit	67.377.790,00	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Perekonomian yang Berdaya Saing, Inklusif, dan Berkelanjutan	-		70.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.11.2.01.0016	Penanganan sampah melalui pengumpulan sampah														
			<i>Persentase luas layanan pengumpulan sampah</i>				65 %	2.248.468.890,00	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Perekonomian yang Berdaya Saing, Inklusif, dan Berkelanjutan	-		2.500.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.11.2.01.0017	Penanganan sampah melalui pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan														
			<i>Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan</i>				1500 Ton	578.599.360,00	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Perekonomian yang Berdaya Saing, Inklusif, dan Berkelanjutan	-		600.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.11.2.01.0018	Pengurangan sampah melalui pembatasan timbulan sampah														
			<i>Jumlah laporan hasil kegiatan pengurangan sampah melalui pembatasan timbulan sampah</i>				2 Laporan	11.198.100,00	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Perekonomian yang Berdaya Saing, Inklusif, dan Berkelanjutan	-		17.500.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.11.2.01.0024	Pengurangan sampah melalui pemanfaatan kembali sampah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah sampah yang dimanfaatkan kembali				20 Ton	44.142.500,00	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Perekonomian yang Berdaya Saing, Inklusif, dan Berkelanjutan	-		45.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.11.2.03	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Sampah yang Diselenggarakan oleh Pihak Swasta	-	-			-	81.459.200,00			-	Penguatan Landasan Perekonomian yang Berdaya Saing, Inklusif, dan Berkelanjutan	-	-	8.500.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.11.2.03.0003	Monitoring dan Evaluasi Pemenuhan Target dan Standar Pelayanan Pengelolaan Sampah														
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pemenuhan Target dan Standar Pelayanan Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota				3 Laporan	81.459.200,00	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Perekonomian yang Berdaya Saing, Inklusif, dan Berkelanjutan	-		8.500.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
		KEBUN RAYA GUNUNG TIDAR						2.313.491.870,00							2.250.000.000,00	
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						2.313.491.870,00							2.250.000.000,00	
	2.11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP						2.313.491.870,00							2.250.000.000,00	
1.	2.11.04	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	-	-			-	2.313.491.870,00						-	2.250.000.000,00	
	2.11.04.2.01	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	-	-			-	2.313.491.870,00			-	Penguatan Landasan Perekonomian yang Berdaya Saing, Inklusif, dan Berkelanjutan	-	-	2.250.000.000,00	KEBUN RAYA GUNUNG TIDAR
	2.11.04.2.01.0003	Pengelolaan Kebun Raya														
			Luas Kebun Raya yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota				69 Ha	2.313.491.870,00	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Perekonomian yang Berdaya Saing, Inklusif, dan Berkelanjutan	-		2.250.000.000,00	KEBUN RAYA GUNUNG TIDAR
		TEMPAT PENGELOLAAN SAMPAH AKHIR						4.141.935.267,00							3.750.000.000,00	
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						4.141.935.267,00							3.750.000.000,00	
	2.11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP						4.141.935.267,00							3.750.000.000,00	
1.	2.11.11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	-	-			-	4.141.935.267,00						-	3.750.000.000,00	
	2.11.11.2.01	Pengelolaan Sampah	-	-			-	4.141.935.267,00			-	Penguatan Landasan Perekonomian yang Berdaya Saing, Inklusif, dan Berkelanjutan	-	-	3.750.000.000,00	TEMPAT PENGELOLAAN SAMPAH AKHIR
	2.11.11.2.01.0020	Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional														
			jumlah sampah yang tertangani melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPSTkabupaten/kota atau TPA/TPST Regional				23725 Ton	4.141.935.267,00	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Perekonomian yang Berdaya Saing, Inklusif, dan Berkelanjutan	-		3.750.000.000,00	TEMPAT PENGELOLAAN SAMPAH AKHIR
		DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL						6.895.325.558,00							7.798.020.893,00	
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						6.895.325.558,00							7.798.020.893,00	
	2.12	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL						6.895.325.558,00							7.798.020.893,00	
1.	2.12.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-			-	6.240.244.468,00						-	6.966.376.161,00	
	2.12.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	43.160.400,00			-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	-	-	47.900.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	17.515.900,00	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	-		21.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD														
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	3.026.400,00	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	-		3.100.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD														
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	2.782.400,00	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	-		2.900.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD														
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1.484.700,00	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	-		1.600.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD														
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	1.378.500,00	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	-		1.500.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				6 Laporan	4.406.300,00	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	-		5.200.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				7 Laporan	12.566.200,00	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	-		12.600.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	4.947.322.205,00			-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	-	-	4.813.100.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				29 Orang/ bulan	4.934.839.005,00	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	-		4.800.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD				55 Dokumen	11.438.200,00	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	-		12.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1.045.000,00	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan	-		1.100.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
												Berintegritas dan Dinamistif				
	2.12.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-			-	153.887.216,00			-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	-	-	181.450.280,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.05.0001	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai														
			Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai				19 Unit	2.829.500,00	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	-		3.112.450,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya														
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	9.409.500,00	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	-		10.350.450,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian														
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				29 Dokumen	3.849.700,00	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	-		4.234.670,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				48 Orang	137.798.516,00	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	-		163.752.710,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	340.900.923,00			-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	-	-	419.967.460,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	4.700.500,00	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	-		5.170.550,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	198.658.200,00	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	-		218.524.020,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	2.541.300,00	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	-		2.795.430,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	29.690.400,00	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	-		32.659.440,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	15.291.000,00	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	-		16.820.100,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	4.200.000,00	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	-		4.620.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material														
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				1 Paket	12.999.800,00	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	-		14.299.780,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				4 Laporan	4.310.000,00	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	-		4.741.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				9 Laporan	57.821.323,00	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	-		108.579.900,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				2 Dokumen	10.688.400,00	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	-		11.757.240,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	263.844.900,00			-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	-	-	924.518.041,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				24 Unit	263.844.900,00	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	-		924.518.041,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	323.072.754,00			-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	-	-	394.578.703,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1500 Laporan	5.689.000,00	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	-		6.257.900,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				4 Laporan	200.107.600,00	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	-		220.118.360,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.12.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	117.276.154,00	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	-		168.202.443,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	168.056.070,00			-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	-	-	184.861.677,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				4 Unit	54.498.970,00	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	-		59.948.867,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				7 Unit	46.259.600,00	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	-		50.885.560,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				50 Unit	42.297.500,00	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	-		46.527.250,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi				3 Unit	25.000.000,00	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	-		27.500.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.	2.12.02	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Persentase Penduduk Usia Wajib KTP yang sudah melakukan Perekaman KTP-EL Persentase Kepemilikan KK Persentase Kepemilikan KIA	100 % 99 % 100,00 %			100,00 % 100 % 99 %	361.228.070,00						100 % 99 % 100,00 %	440.976.471,00	
	2.12.02.2.01	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah penduduk yang direkam KTP-el Jumlah penerbitan KK Jumlah penerbitan KTP-el	-			1950 penduduk 6500 dokumen 11500 keping	277.123.370,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	Masyarakat Kota Magelang	-	331.459.701,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.02.2.01.0001	Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan														
			Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan				1 Dokumen	6.674.100,00	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	Masyarakat Kota Magelang		7.341.510,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.02.2.01.0002	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk														
			Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk				36.600 Dokumen	126.422.350,00	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	Masyarakat Kota Magelang		160.966.120,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.02.2.01.0003	Penyelesaian Masalah Pendaftaran Penduduk														
			Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Pelayanan Penyelesaian Masalah Pendaftaran Penduduk				100 Orang	2.920.000,00	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	Masyarakat Kota Magelang		4.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.02.2.01.0004	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk				48 Laporan	35.004.800,00	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	Masyarakat Kota Magelang		37.500.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.02.2.01.0007	Penerbitan Dokumen Atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan														
			Jumlah Laporan Penerbitan Dokumen Atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan				12 Laporan	106.102.120,00	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	Masyarakat Kota Magelang		121.652.071,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.02.2.02	Penataan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Penerbitan KIA	-			2600 keping	25.620.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	Masyarakat Kota Magelang	-	28.182.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.02.2.02.0002	Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-EI, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan														
			Jumlah Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-EI, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan yang Tersedia				2 Dokumen	25.620.000,00	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	Masyarakat Kota Magelang		28.182.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.02.2.03	Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	Jumlah fasilitasi penyelenggaraan pendaftaran penduduk	-			78 kali	49.236.800,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	Masyarakat Kota Magelang	-	71.162.080,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.02.2.03.0003	Fasilitasi Pendaftaran Penduduk														
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi pendaftaran penduduk				75 Laporan	4.280.000,00	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	Masyarakat Kota Magelang		4.708.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.02.2.03.0005	Sosialisasi Pendaftaran Penduduk														
			Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pendaftaran Penduduk				3 Laporan	44.956.800,00	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	Masyarakat Kota Magelang		66.454.080,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.02.2.04	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	Jumlah pembinaan admiduk pada aparat kelurahan dan kecamatan	-			4 kali	9.247.900,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	Masyarakat Kota Magelang	-	10.172.690,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.02.2.04.0002	Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pendaftaran Penduduk														
			Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pendataran Penduduk				4 Laporan	9.247.900,00	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	Masyarakat Kota Magelang		10.172.690,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
3.	2.12.03	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	-	-			-	210.736.420,00						-	282.284.661,00	
	2.12.03.2.01	Pelayanan Pencatatan Sipil	-	-			-	133.911.220,00			-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	-	-	173.420.891,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.03.2.01.0001	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting														
			Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting				4000 Dokumen	117.011.220,00	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	-		154.830.891,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.03.2.01.0005	Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-EI, Formulir, dan Buku Terkait Pencatatan Sipil Sesuai dengan Kebutuhan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pencatatan Sipil Sesuai dengan Kebutuhan yang Tersedia</i>				1 Paket	16.900.000,00	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	-		18.590.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.03.2.02	Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	-	-			-	76.825.200,00			-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	-	-	108.863.770,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.03.2.02.0003	Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pencatatan Sipil														
			<i>Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pencatatan Sipil</i>				3 Laporan	6.186.800,00	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	-		6.186.800,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.03.2.02.0004	Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil														
			<i>Jumlah Laporan Hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil</i>				24 Laporan	7.522.000,00	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	-		8.274.200,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.03.2.02.0006	Fasilitasi Terkait Pencatatan Sipil														
			<i>Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pencatatan Sipil</i>				1 Laporan	63.116.400,00	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	-		94.402.770,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
4.	2.12.04	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	<i>Persentase data kependudukan dan pencatatan sipil yang terkelola berbasis Teknologi Informasi</i>	100 %			100 %	76.585.800,00						100 %	99.316.300,00	
	2.12.04.2.01	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	<i>Persentase pengelolaan data kependudukan yang dimanfaatkan</i>	-			100% %	11.143.400,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	Masyarakat Kota Magelang	-	14.916.300,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.04.2.01.0001	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan														
			<i>Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Diolah dan Disajikan</i>				12 Dokumen	3.453.000,00	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	Masyarakat Kota Magelang		3.798.300,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.04.2.01.0002	Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan														
			<i>Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan</i>				2 Dokumen	7.690.400,00	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	Masyarakat Kota Magelang		11.118.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.04.2.03	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	-	-			-	65.442.400,00			-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	-	-	84.400.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.04.2.03.0003	Fasilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan														
			<i>Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan</i>				2 Laporan	6.338.000,00	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	-		9.400.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.04.2.03.0007	Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat</i>				2 Laporan	59.104.400,00	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan	-		75.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
												Berintegritas dan Dinamistif				
5.	2.12.05	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	-	-			-	6.530.800,00						-	9.067.300,00	
	2.12.05.2.01	Penyusunan Profil Kependudukan	-	-			-	6.530.800,00			-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	-	-	9.067.300,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.05.2.01.0002	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain														
			Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain yang tersusun				1 Dokumen	6.530.800,00	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	-		9.067.300,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
		DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA						11.124.233.323,00							12.064.471.000,00	
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						11.124.233.323,00							12.064.471.000,00	
	2.08	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK						6.525.825.704,00							7.296.471.000,00	
1.	2.08.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pelayanan internal perangkat daerah yang berkualitas	100,00 %			100,00 %	4.859.816.794,00						100,00 %	4.771.471.000,00	
	2.08.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Cakupan ketersediaan (CK) dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja PD	-			100 %	18.768.300,00			-	-	-	-	23.600.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	13.927.800,00	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		16.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD														
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1.252.000,00	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		1.800.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD														
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	646.600,00	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	-		1.200.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD														
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	942.000,00	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	-		1.400.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD														
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	937.600,00	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		1.500.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				5 Laporan	1.062.300,00	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	-		1.700.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN, ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan laporan (CL) administrasi keuangan PD sesuai aturan	-			100 %	3.957.384.665,00			-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	-	-	3.750.871.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN, ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				20 Orang/ bulan	3.953.432.265,00	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	-		3.745.521.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN, ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verifkasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	999.200,00	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		1.700.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN, ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	749.200,00	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		850.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN, ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD				12 Laporan	2.204.000,00	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		2.800.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN, ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Cakupan barang milik daerah yang teradministrasi dengan baik	-			100 %	2.125.300,00			-	-	-	-	2.300.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN, ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD														
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	2.125.300,00	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		2.300.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN, ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Cakupan pegawai yang data kepegawaiannya teradministrasi	-			100 %	2.443.180,00			-	-	-	-	2.900.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN, ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian														
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				12 Dokumen	2.443.180,00	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		2.900.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN, ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.08.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terpenuhinya kebutuhan administrasi umum OPD Daerah	-			100 %	80.277.100,00			-	-	-	-	85.600.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN, ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				4 Paket	5.621.200,00	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		7.200.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN, ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				4 Paket	16.535.000,00	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		19.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN, ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				4 Paket	3.995.800,00	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		7.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN, ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material														
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				4 Paket	16.736.500,00	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		17.200.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN, ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														
			Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu				4 Laporan	5.250.000,00	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		6.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN, ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				4 Laporan	29.786.000,00	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		25.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN, ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				4 Dokumen	2.352.600,00	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		4.200.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN, ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Penyedia Jasa Penunjang (CPJP) Urusan Pemerintahan Daerah	-			100 %	529.743.349,00			-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	-	-	574.700.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN, ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				4 Laporan	2.098.700,00	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan	-		2.700.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN, ANAK, PENGENDALIAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
												Berintegritas dan Dinamistif				PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	290.652.000,00	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		252.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN, ANAK, PERLINDUNGAN, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	236.992.649,00	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		320.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN, ANAK, PERLINDUNGAN, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan pemeliharaan barang milik daerah (CPBMD) penunjang urusan pemerintahan daerah	-			100 %	269.074.900,00			-	-	-	-	331.500.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN, ANAK, PERLINDUNGAN, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				7 Unit	107.000.000,00	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		110.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN, ANAK, PERLINDUNGAN, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				46 Unit	89.999.900,00	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		93.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN, ANAK, PERLINDUNGAN, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel														
			Jumlah Mebel yang Dipelihara				5 Unit	0,00	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		5.500.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN, ANAK, PERLINDUNGAN, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				10 Unit	22.075.000,00	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		23.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN, ANAK, PERLINDUNGAN, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi				6 Unit	50.000.000,00	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		100.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN, ANAK, PERLINDUNGAN, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
2.	2.08.02	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	-	-			-	726.698.800,00						-	1.487.000.000,00	
	2.08.02.2.01	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Perangkat Daerah yang menyusun Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG	-			29 OPD	24.057.000,00			-	-	-	-	35.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN, ANAK, PERLINDUNGAN, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.08.02.2.01.0007	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota														
			Jumlah laporan hasil koordinasi dan sinkronisasi penyelenggaraan PUG				1 Laporan	24.057.000,00	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		35.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.02.2.02	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Pemberdayaan Perempuan dibidang politik dan ekonomi	-			20 %	577.642.200,00			-	-	-	-	595.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.02.2.02.0003	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi														
			Jumlah organisasi kemasyarakatan/ profesi/ dunia usaha/ media yg diadvokasi dan didampingi dalam rangka peningkatan partisipasi perempuan di bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi				1 Lembaga	46.228.500,00	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		55.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.02.2.02.0008	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota														
			jumlah SDM lembaga masyarakat dan perempuan yang mendapatkan sosialisasi tentang pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial, ekonomi				203 orang	531.413.700,00	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT)	-	-	-		540.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.02.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga yang anggotanya diberdayakan	-			3 lembaga	124.999.600,00			-	-	-	-	857.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.02.2.03.0007	pendampingan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan Kabupaten/Kota														
			jumlah lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan yang mendapatkan pendampingan				1 Lembaga	0,00	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		730.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.02.2.03.0008	penguatan kerjasama antar lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan Kabupaten/Kota														
			Jumlah kerjasama antar lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan				2 dokumen	124.999.600,00	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		127.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
3.	2.08.03	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	0,04 %			0,04 %	165.115.860,00						0,04 %	170.000.000,00	
	2.08.03.2.02	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	-	-			-	165.115.860,00			-	-	-	-	170.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.03.2.02.0009	Layanan pendampingan korban bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota														
			Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan pendampingan korban Tingkat Kabupaten/Kota				35 orang	165.115.860,00	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		170.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
4.	2.08.04	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Persentase Keluarga Berkualitas	16,57 %			16,57 %	337.927.200,00						16,57 %	370.000.000,00	
	2.08.04.2.03	Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak	Persentase anak sekolah yang mendapatkan peningkatan gizi	-			0.05 %	337.927.200,00			-	-	-	-	370.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN,

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota														PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.04.2.03.0006	Layanan bimbingan masyarakat keluarga dalam Mewujudkan KG dan PA Lingkup Kabupaten/Kota														
			Jumlah keluarga yang mendapatkan Layanan bimbingan masyarakat Lingkup Kabupaten/Kota				1657 Orang	337.927.200,00	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		370.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
5.	2.08.05	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Persentase PD yang mengelola data gender dan anak	100 %			100 %	4.680.500,00						100 %	8.000.000,00	
	2.08.05.2.01	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase PD yang menyediakan data gender dan anak	-			100 %	4.680.500,00			-	-	-	-	8.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.05.2.01.0003	Penyediaan, Penyajian, dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota														
			Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia				1 Dokumen	4.680.500,00	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		8.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
6.	2.08.06	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Persentase capaian 4 (empat) kluster pemenuhan hak anak	13,79 %			13,79 %	253.037.200,00						13,79 %	280.000.000,00	
	2.08.06.2.01	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah RW yang telah ditetapkan sebagai RW layak anak	-			32 RW Ramah Anak	167.932.200,00			-	-	-	-	185.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.06.2.01.0005	Pendampingan Penyelenggaraan Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota														
			jumlah OPD kab/kota yang mendapatkan pendampingan Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota				20 Lembaga	167.932.200,00	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		185.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.06.2.02	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Terbentuknya lembaga pelayanan	-			0 %	85.105.000,00			-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing dan Berkarakter	-	-	95.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.06.2.02.0005	Peningkatan Kapasitas lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota														
			jumlah SDM lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota yang mendapatkan bimtek				25 Orang	85.105.000,00	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing dan Berkarakter	-		95.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
7.	2.08.07	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	-	-			-	178.549.350,00						-	210.000.000,00	
	2.08.07.2.02	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	123.590.450,00			-	-	-	-	150.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.07.2.02.0013	Layanan pendampingan korban bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota														
			Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan pendampingan korban Tingkat Kabupaten/Kota				30 Orang	123.590.450,00	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		150.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
																PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.07.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	54.958.900,00			-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing dan Berkarakter	-	-	60.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN, ANAK, PERLINDUNGAN, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.07.2.03.0007	Pengembangan KIE (komunikasi, informasi, dan edukasi) perlindungan khusus anak tingkat daerah kabupaten/kota														
			Jumlah KIE Perlindungan khusus anak				1 Dokumen	54.958.900,00	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing dan Berkarakter	-		60.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN, ANAK, PERLINDUNGAN, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
	2.13	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA						3.898.579.071,00							3.938.000.000,00	
1.	2.13.03	PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA	Persentase Kelurahan yang difasilitasi dalam program pemberdayaan masyarakat	94,00 %			94,00 %	2.310.849.433,00						94,00 %	2.300.000.000,00	
	2.13.03.2.01	Fasilitasi Kerja Sama antar Desa	Persentase kelurahan yang difasilitasi dalam Program TMMD (TNI manunggal Membangun kelurahan) Persentase kelurahan yang difasilitasi dalam Program Pemberdayaan Masyarakat	-			100 % 100 %	2.310.849.433,00			-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamis	-	-	2.300.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN, ANAK, PERLINDUNGAN, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
	2.13.03.2.01.0002	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota														
			Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota				4 Dokumen	424.278.883,00	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamis	-		0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN, ANAK, PERLINDUNGAN, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
	2.13.03.2.01.0003	Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan														
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan				1 Dokumen	1.886.570.550,00	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamis	-		2.300.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN, ANAK, PERLINDUNGAN, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
2.	2.13.04	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Persentase kelurahan yang melakukan evaluasi perkembangan kelurahan sesuai dengan regulasi	94,00 %			94,00 %	22.487.000,00						94,00 %	28.000.000,00	
	2.13.04.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah kelurahan yang melakukan evaluasi perkembangan kelurahan sesuai dengan regulasi	-			16 kelurahan	22.487.000,00			-	-	-	-	28.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN, ANAK, PERLINDUNGAN, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
	2.13.04.2.01.0011	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa														
			Jumlah Dokumen Profil Desa yang tersusun				17 Dokumen	11.403.700,00	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		16.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN, ANAK, PERLINDUNGAN, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
	2.13.04.2.01.0018	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan														
			Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan				17 Dokumen	11.083.300,00	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		12.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN, ANAK, PERLINDUNGAN, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
3.	2.13.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Persentase kelurahan yang lembaga kemasyarakatannya diberdayakan (yang di hitung adalah kelurahannya, kelurahan yang mampu memberdayakan lembaga kemasyarakatannya)	100,00 %			100,00 %	1.565.242.638,00						100,00 %	1.610.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.13.05.2.01	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Lembaga kemasyarakatan kelurahan yang telah diberdayakan (yang di hitung adalah lembaga kemasyarakatannya)	-			94 %	1.565.242.638,00			-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing dan Berkarakter	-	-	1.610.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
	2.13.05.2.01.0002	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat														
			Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat				2 Dokumen	706.021.790,00	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing dan Berkarakter	-		710.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
	2.13.05.2.01.0003	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat														
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya				17 Lembaga	109.281.028,00	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing dan Berkarakter	-		120.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
	2.13.05.2.01.0007	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat														
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat				1 Laporan	26.755.120,00	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		30.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
	2.13.05.2.01.0009	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga														
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga				1 Dokumen	723.184.700,00	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing dan Berkarakter	-		750.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA						699.828.548,00							830.000.000,00	
1.	2.14.02	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Persentase Penurunan Angka Kelahiran pada Remaja Usia 15-19 tahun (ASFR 15-19 th)	22,00 %			22,00 %	218.198.346,00						22,00 %	190.000.000,00	
	2.14.02.2.02	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase data kependudukan yang diintegrasikan dalam program KKBPK	-			100 %	218.198.346,00			-	-	-	-	190.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.02.2.02.0011	Penyediaan Data dan Informasi Keluarga														
			Jumlah Data dan Informasi Keluarga yang Tersedianya				1 Dokumen	168.198.346,00	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		190.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.02.2.02.0023	Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (Bangga Kencana) melalui Sistem Informasi Keluarga														
			Jumlah Dokumen Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan, Kleuarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (Bangga Kencana) mellaui Sistem Informasi Keluarga				1 Dokumen	50.000.000,00	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	-		0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
2.	2.14.03	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	-	-			-	56.284.812,00						-	0,00	
	2.14.03.2.01	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	-	-			-	56.284.812,00			-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	-	-	0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.14.03.2.01.0010	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana														
			Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)				3 Laporan	56.284.812,00	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	-		0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN, ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
3.	2.14.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Persentase anggota keluarga tribina, UPPKS yang ber-KB	73,50 %			73,50 %	425.345.390,00						73,50 %	640.000.000,00	
	2.14.04.2.01	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah kelompok ketahanan dan kesejahteraan keluarga yang dibina	-			51 kelompok	425.345.390,00			-	-	-	-	640.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN, ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.04.2.01.0017	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))														
			Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)				1 Laporan	118.684.500,00	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		130.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN, ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.04.2.01.0026	Penyediaan Biaya Operasional bagi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))														
			Jumlah Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)) yang mendapat biaya operasional kegiatan				1 Kelompok	306.660.890,00	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Perekonomian yang Berdaya Saing, Inklusif, dan Berkelanjutan	-		510.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN, ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
		DINAS PERHUBUNGAN						24.225.369.776,00							0,00	
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						24.225.369.776,00							0,00	
	2.15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN						24.225.369.776,00							0,00	
1.	2.15.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-			-	7.171.528.537,00						-	0,00	
	2.15.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	16.682.200,00			-	-	-	-	0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	4.298.000,00	Kota Magelang, Magelang Selatan, Tidar Selatan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD														
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	2.842.700,00	Kota Magelang, Magelang Selatan, Tidar Selatan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD														
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	1.757.000,00	Kota Magelang, Magelang Selatan, Tidar Selatan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	5.143.500,00	Kota Magelang, Magelang Selatan, Tidar Selatan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	2.641.000,00	Kota Magelang, Magelang Selatan, Tidar Selatan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	6.160.153.752,00			-	-	-	-	0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				46Orang/ bulan	6.147.155.352,00	Kota Magelang, Magelang Selatan, Tidar Selatan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	7.613.000,00	Kota Magelang, Magelang Selatan, Tidar Selatan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD				2 Laporan	5.385.400,00	Kota Magelang, Magelang Selatan, Tidar Selatan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-			-	29.410.500,00			-	-	-	-	0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya														
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				30 Paket	26.202.000,00	Kota Magelang, Magelang Selatan, Tidar Selatan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai														
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				2 Dokumen	3.208.500,00	Kota Magelang, Magelang Selatan, Tidar Selatan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	111.151.212,00			-	-	-	-	0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	5.232.600,00	Kota Magelang, Magelang Selatan, Tidar Selatan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	2.656.150,00	Kota Magelang, Magelang Selatan, Tidar Selatan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	23.230.000,00	Kota Magelang, Magelang Selatan, Tidar Selatan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	2.189.100,00	Kota Magelang, Magelang Selatan, Tidar Selatan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material														
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				1 Paket	5.802.800,00	Kota Magelang, Magelang Selatan, Tidar Selatan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	6.700.000,00	Kota Magelang, Magelang Selatan, Tidar Selatan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	65.340.562,00	Kota Magelang, Magelang Selatan, Tidar Selatan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	7.694.500,00			-	-	-	-	0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel														
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				12 Unit	4.616.700,00	Kota Magelang, Magelang Selatan, Tidar Selatan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				1 Unit	3.077.800,00	Kota Magelang, Magelang Selatan, Tidar Selatan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	DINAS PERHUBUNGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.15.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	372.246.273,00			-	-	-	-	0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	574.200,00	Kota Magelang, Magelang Selatan, Tidar Selatan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				4 Laporan	185.042.000,00	Kota Magelang, Magelang Selatan, Tidar Selatan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	186.630.073,00	Kota Magelang, Magelang Selatan, Tidar Selatan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	474.190.100,00			-	-	-	-	0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				10 Unit	83.444.500,00	Kota Magelang, Magelang Selatan, Tidar Selatan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				21 Unit	183.023.600,00	Kota Magelang, Magelang Selatan, Tidar Selatan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				65 Unit	75.170.000,00	Kota Magelang, Magelang Selatan, Tidar Selatan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi				4 Unit	132.552.000,00	Kota Magelang, Magelang Selatan, Tidar Selatan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	DINAS PERHUBUNGAN
2.	2.15.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	-	-			-	17.053.841.239,00						-	0,00	
	2.15.02.2.01	Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	-	97 %			-	17.752.800,00			-	-	-	97 %	0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.01.0002	Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota														
			Jumlah Dokumen Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota				3 Dokumen	17.752.800,00	Kota Magelang, Magelang Selatan, Tidar Selatan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	-	97 %			-	9.734.590.322,00			-	-	-	97 %	0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.02.0002	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota														
			Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia				225 Unit	8.749.292.301,00	Kota Magelang, Magelang Selatan, Tidar Selatan	PBJT-KONSUMS I TENAGA LISTRIK DARI SUMBER LAIN	-	-	-		0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.02.0003	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan														
			Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara				1800 Unit	862.247.121,00	Kota Magelang, Magelang Selatan, Tidar Selatan	OPSEN PKB	-	-	-		0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.02.0004	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan														
			Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara				50 Unit	123.050.900,00	Kota Magelang, Magelang Selatan, Tidar Selatan	OPSEN PKB	-	-	-		0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.03	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	-	85 %			-	416.684.298,00			-	-	-	85 %	0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.03.0006	Pengawasan Operasional Terminal Penumpang Tipe C														
			Jumlah Terminal Penumpang Tipe C yang diawasi				12 Dokumen	227.723.310,00	Kota Magelang, Magelang Selatan, Magersari	OPSEN PKB	-	-	-		0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.03.0007	Revitalisasi Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang)														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Terminal yang direvitalisasi (Fasilitas Utama dan Penunjang)				1 Unit	188.960.988,00	Kota Magelang, Magelang Selatan, Magersari	OPSEN PKB	-	-	-		0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.04	Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	-	91 %			-	1.265.851.137,00			-	-	-	91 %	0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.04.0001	Fasilitas Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik														
			Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik				1 Dokumen	1.243.688.242,00	Kota Magelang, Magelang Selatan, Tidar Selatan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.04.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota														
			Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota				24 Laporan	22.162.895,00	Kota Magelang, Magelang Selatan, Tidar Selatan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.05	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	-	100 % 0 % 100 %			-	516.916.100,00			-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamis	-	100 % 0 % 100 %	0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.05.0001	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia				3 Unit	194.303.300,00	Kota Magelang, Magelang Selatan, Tidar Selatan	OPSEN PKB	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamis	-		0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.05.0002	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor														
			Jumlah Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Ditingkatkan Kapasitasnya				12 Orang	2.443.000,00	Kota Magelang, Magelang Selatan, Tidar Selatan	OPSEN PKB	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing dan Berkarakter	-		0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.05.0003	Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor														
			Jumlah Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor yang Terdaftar				4200 Unit	76.495.200,00	Kota Magelang, Magelang Selatan, Tidar Selatan	OPSEN PKB	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamis	-		0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.05.0004	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor														
			Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor				4200 Dokumen	119.313.400,00	Kota Magelang, Magelang Selatan, Tidar Selatan	OPSEN PKB	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamis	-		0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.05.0007	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara				11 Unit	101.171.300,00	Kota Magelang, Magelang Selatan, Tidar Selatan	OPSEN PKB	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamis	-		0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.05.0008	Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor														
			Jumlah Laporan Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor				4 Laporan	23.189.900,00	Kota Magelang, Magelang Selatan, Tidar Selatan	OPSEN PKB	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamis	-		0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.06	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	-	97 %			-	3.219.728.007,00			-	-	-	97 %	0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.06.0004	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota														
			Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota				24 Laporan	694.197.207,00	Kota Magelang, Magelang Selatan, Tidar Selatan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	DINAS PERHUBUNGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.15.02.2.06.0014	Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan ReKayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota														
			Jumlah Laporan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan ReKayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota				5 Dokumen	67.682.500,00	Kota Magelang, Magelang Selatan, Tidar Selatan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.06.0015	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota														
			Jumlah laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota				12 Laporan	3.474.500,00	Kota Magelang, Magelang Selatan, Tidar Selatan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.06.0016	Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan ReKayasa Lalu Lintas														
			Jumlah Perlengkapan Jalan dalam Rangka Manajemen dan ReKayasa Lalu Lintas yang dilaksanakan pengadaan dan Pemasangan				9 Dokumen	2.454.373.800,00	Kota Magelang, Magelang Selatan, Tidar Selatan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.07	Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota	-	97 %			-	5.374.900,00			-	-	-	97 %	0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.07.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin														
			Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin				6 Laporan	1.709.200,00	Kota Magelang, Magelang Selatan, Tidar Selatan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.07.0006	Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Persetujuan Teknis Andalalin														
			Jumlah laporan Rekomendasi Persetujuan Teknis Andalalin yang terawasi				6 Laporan	3.665.700,00	Kota Magelang, Magelang Selatan, Tidar Selatan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.08	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	-	75 %			-	24.904.650,00			-	-	-	75 %	0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.08.0004	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota														
			Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota				3 Laporan	24.904.650,00	Kota Magelang, Magelang Selatan, Magersari	OPSEN PKB	-	-	-		0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.09	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	-	35,55 %			-	1.829.253.525,00			-	-	-	35,55 %	0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.09.0003	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Armada Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia				3 Unit	1.829.253.525,00	Kota Magelang, Magelang Selatan, Magersari	OPSEN PKB	-	-	-		0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.11	Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	-	100 %			-	10.232.900,00			-	-	-	100 %	0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.11.0001	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Dokumen Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				1 Dokumen	10.232.900,00	Kota Magelang, Magelang Selatan, Magersari	OPSEN PKB	-	-	-		0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.14	Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	-	100 %			-	12.552.600,00			-	-	-	100 %	0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.14.0003	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik														
			Jumlah Laporan Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik				300 Unit	12.552.600,00	Kota Magelang, Magelang Selatan, Magersari	OPSEN PKB	-	-	-		0,00	DINAS PERHUBUNGAN
		DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, DAN STATISTIK						16.504.797.422,00						762.275.548,00		
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						16.504.797.422,00						762.275.548,00		
	2.16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA						15.948.469.928,00						762.275.548,00		
1.	2.16.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pelayanan internal perangkat daerah yang berkualitas	100 %			100 %	5.682.710.478,00						100 %	762.275.548,00	
	2.16.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar	100 %			100 % 100 % 100 %	10.723.800,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi,	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan	Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %	14.690.400,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, DAN STATISTIK

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Realisasi Kinerja SKPD Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD				100 % 100 % 100 %				narkoba, judi, dan penyeludupan.	Berintegritas dan Dinamistif				
	2.16.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				3 Dokumen	3.502.350,00	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		4.669.800,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, DAN STATISTIK
	2.16.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD														
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1.099.500,00	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		1.466.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, DAN STATISTIK
	2.16.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD														
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	1.325.175,00	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		1.766.900,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, DAN STATISTIK
	2.16.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD														
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1.633.350,00	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		2.177.800,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, DAN STATISTIK
	2.16.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD														
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	816.675,00	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		1.480.900,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, DAN STATISTIK
	2.16.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				21 Laporan	2.346.750,00	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		3.129.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, DAN STATISTIK
	2.16.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD Cakupan laporan administrasi keuangan Perangkat Daerah sesuai aturan Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Terlaksananya Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	100 %			100 % 100 % 100 % 100 %	5.043.073.238,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	Dokumen Administrasi, Pelaporan Keuangan dan Gaji ASN	100 %	17.197.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, DAN STATISTIK
	2.16.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				35 Orang/ bulan	5.029.885.488,00	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	Dokumen Administrasi, Pelaporan Keuangan dan Gaji ASN		0,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, DAN STATISTIK
	2.16.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	10.841.000,00	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	Dokumen Administrasi, Pelaporan Keuangan dan Gaji ASN		14.068.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, DAN STATISTIK
	2.16.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	2.346.750,00	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi,	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan	Dokumen Administrasi, Pelaporan Keuangan dan Gaji ASN		3.129.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, DAN STATISTIK

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
											narkoba, judi, dan penyeludupan.	Berintegritas dan Dinamistif				
	2.16.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terwujudnya tertib administrasi kepegawaian OPD	100 %			100 %	6.472.500,00			-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	ASN Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik	100 %	8.630.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, DAN STATISTIK
	2.16.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian														
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				12 Dokumen	6.472.500,00	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	ASN Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik		8.630.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, DAN STATISTIK
	2.16.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan pengelolaan administrasi umum perangkat daerah	100 %			100 %	145.978.400,00			-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik	100 %	196.449.800,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, DAN STATISTIK
	2.16.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				12 Paket	8.642.000,00	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik		8.642.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, DAN STATISTIK
	2.16.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1.482.400,00	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik		1.482.400,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, DAN STATISTIK
	2.16.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Paket	21.275.700,00	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik		21.275.700,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, DAN STATISTIK
	2.16.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	8.076.750,00	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik		10.769.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, DAN STATISTIK
	2.16.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	7.620.000,00	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik		7.620.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, DAN STATISTIK
	2.16.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material														
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				12 Paket	14.358.100,00	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik		14.358.100,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, DAN STATISTIK
	2.16.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				2 Laporan	8.500.000,00	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik		11.400.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, DAN STATISTIK
	2.16.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				4 Laporan	72.468.000,00	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik		116.162.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, DAN STATISTIK
	2.16.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				12 Dokumen	3.555.450,00	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik		4.740.600,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, DAN STATISTIK
	2.16.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya sarana prasarana kantor yang memadai	-			100 %	16.000.000,00			-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik	-	37.083.300,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, DAN STATISTIK
	2.16.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				3 Unit	16.000.000,00	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik		37.083.300,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, DAN STATISTIK
	2.16.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %			100 %	174.082.390,00			-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik	100 %	192.240.448,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, DAN STATISTIK
	2.16.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	720.000,00	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik		720.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, DAN STATISTIK
	2.16.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	118.888.000,00	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik		118.888.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, DAN STATISTIK
	2.16.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	54.474.390,00	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik		72.632.448,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, DAN STATISTIK
	2.16.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-			100 %	286.380.150,00			-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik	-	295.984.600,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, DAN STATISTIK
	2.16.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas labatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				13 Unit	117.933.400,00	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik		154.203.600,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, DAN STATISTIK
	2.16.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				6 Unit	35.508.750,00	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik		42.578.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, DAN STATISTIK
	2.16.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Mebel yang Dipelihara				5 Unit	3.460.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik		0,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, DAN STATISTIK
	2.16.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				80 Unit	99.203.000,00	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik		99.203.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, DAN STATISTIK
	2.16.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi				1 Unit	30.275.000,00	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik		0,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, DAN STATISTIK
2.	2.16.02	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Tingkat Keterbukaan Informasi Publik	Informatif undefined			Informatif undefined	1.071.030.100,00						Informatif undefined	0,00	
	2.16.02.2.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase komunitas masyarakat/mitra strategis pemerintah daerah provinsi yang menyebarkan informasi dan kebijakan pemerintah kab/kota Persentase diseminasi dan layanan informasi publik yang dilaksanakan sesuai dengan strategi komunikasi (STARKOM) dan SOP yang telah ditetapkan	100 % 100 %			100 % 100 %	1.071.030.100,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	Komunitas masyarakat/mitra strategis pemerintah daerah provinsi yang menyebarkan informasi dan kebijakan pemerintah kab/kota	100 % 100 %	0,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, DAN STATISTIK
	2.16.02.2.01.0015	Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat														
			Jumlah Komunitas Informasi yang aktif mendiseminasikan informasi dan terdaftar di Dinas Kominfo				18 Komunitas	100.749.100,00	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	Komunitas masyarakat/mitra strategis pemerintah daerah provinsi yang menyebarkan informasi dan kebijakan pemerintah kab/kota		0,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, DAN STATISTIK
	2.16.02.2.01.0017	Pelayanan Informasi Publik														
			Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan				2Permohonan	44.697.300,00	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	Komunitas masyarakat/mitra strategis pemerintah daerah provinsi yang menyebarkan informasi dan kebijakan pemerintah kab/kota		0,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, DAN STATISTIK
	2.16.02.2.01.0019	Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik														
			Jumlah rekomendasi komunikasi terhadap isu publik yang berkembang dan usulan agenda komunikasi prioritas Pemerintah Daerah				100 Rekomendasi	143.684.400,00	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	Komunitas masyarakat/mitra strategis pemerintah daerah provinsi yang menyebarkan informasi dan kebijakan pemerintah kab/kota		0,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, DAN STATISTIK
	2.16.02.2.01.0020	Diseminasi Informasi														
			Persentase khalayak yang terpapar informasi publik				100%	216.743.360,00	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	Komunitas masyarakat/mitra strategis pemerintah daerah provinsi yang menyebarkan informasi dan kebijakan pemerintah kab/kota		0,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, DAN STATISTIK
	2.16.02.2.01.0021	Pengelolaan Media Komunikasi Publik														
			Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis				3 Media	359.542.940,00	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	Komunitas masyarakat/mitra strategis pemerintah daerah provinsi yang menyebarkan informasi dan kebijakan pemerintah kab/kota		0,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, DAN STATISTIK
	2.16.02.2.01.0023	Penyusunan Konten														
			Jumlah Konten Informasi Publik				84 Konten	205.613.000,00	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi,	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan	Komunitas masyarakat/mitra strategis pemerintah daerah provinsi yang		0,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, DAN STATISTIK

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
											narkoba, judi, dan penyeludupan.	Berintegritas dan Dinamistif	menyebarkan informasi dan kebijakan pemerintah kab/kota			
3.	2.16.03	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Persentase pemanfaatan aplikasi informatika	100 %			100 %	9.194.729.350,00						100 %	0,00	
	2.16.03.2.01	Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase OPD yang terintegrasi dalam sistem jaringan intra pemerintah daerah	100 %			100 %	943.100,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	OPD yang terintegrasi dalam sistem jaringan intra pemerintah daerah	100 %	0,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, DAN STATISTIK
	2.16.03.2.01.0004	Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pengelolaan Nama Domain Pemerintah Desa														
			Jumlah Dokumen Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Pemerintah Daerah serta Domain Pemerintah Desa				1 Dokumen	943.100,00	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	OPD yang terintegrasi dalam sistem jaringan intra pemerintah daerah		0,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, DAN STATISTIK
	2.16.03.2.02	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah perangkat daerah yang menggunakan layanan SPBE	29 opd			29 OPD	9.193.786.250,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	OPD yang terintegrasi dalam sistem jaringan intra pemerintah daerah	29 opd	0,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, DAN STATISTIK
	2.16.03.2.02.0019	Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE														
			Jumlah Dokumen Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE				2 Dokumen	8.429.600,00	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	OPD yang terintegrasi dalam sistem jaringan intra pemerintah daerah		0,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, DAN STATISTIK
	2.16.03.2.02.0024	Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota														
			Jumlah perangkat daerah di pemerintah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota				29 Perangkat Daerah	1.208.603.660,00	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	OPD yang terintegrasi dalam sistem jaringan intra pemerintah daerah		0,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, DAN STATISTIK
	2.16.03.2.02.0034	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah dalam rangka interoperabilitas data dan integrasi layanan														
			Jumlah Aplikasi SPBE yang terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah				6 Aplikasi	121.058.390,00	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	OPD yang terintegrasi dalam sistem jaringan intra pemerintah daerah		0,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, DAN STATISTIK
	2.16.03.2.02.0036	Penyediaan Akses Internet														
			Jumlah Perangkat Daerah dan UPTD yang memanfaatkan akses internet yang disediakan oleh Dinas				29 Perangkat Daerah	6.553.434.800,00	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	OPD yang terintegrasi dalam sistem jaringan intra pemerintah daerah		0,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, DAN STATISTIK
	2.16.03.2.02.0037	Koordinasi penyusunan kebijakan tata kelola SPBE meliputi arsitektur, peta rencana, proses bisnis, serta penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah														
			Jumlah dokumen kebijakan tata kelola SPBE meliputi arsitektur, peta rencana, proses bisnis, serta penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah				1 Dokumen	238.382.600,00	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	OPD yang terintegrasi dalam sistem jaringan intra pemerintah daerah		0,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, DAN STATISTIK
	2.16.03.2.02.0038	Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten atau Kota Cerdas														
			Jumlah laporan pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan Kabupaten/Kota Cerdas				2 Dokumen	1.063.877.200,00	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	OPD yang terintegrasi dalam sistem jaringan intra pemerintah daerah		0,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, DAN STATISTIK
	2.20	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK						336.367.664,00							0,00	
1.	2.20.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Persentase perkembangan publikasi data sektoral dalam portal open data	45 %			45 %	336.367.664,00						45 %	0,00	
	2.20.02.2.01	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Persentase produsen data yang berkontribusi pada portal satu data	-			100 %	336.367.664,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi,	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan	Produsen data yang berkontribusi pada portal satu data	-	0,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, DAN STATISTIK

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
											narkoba, judi, dan penyeludupan.	Berintegritas dan Dinamistif				
	2.20.02.2.01.0017	Pengelolaan Kegiatan Statistik Sektoral Dalam Sistem Statistik Nasional														
			Persentase kegiatan statistik sektoral yang sudah mendapatkan rekomendasi dari pembina data statistik				100 %	119.959.264,00	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	Produsen data yang berkontribusi pada portal satu data		0,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, DAN STATISTIK
	2.20.02.2.01.0018	Pemenuhan Prinsip Satu Data Indonesia														
			Persentase kegiatan statistik sektoral yang telah memenuhi standar data, metadata, interoperabilitas data dan kode referensi dan/atau data induk				100 %	42.274.200,00	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	Produsen data yang berkontribusi pada portal satu data		0,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, DAN STATISTIK
	2.20.02.2.01.0019	Peningkatan Kualitas Statistik Sektoral														
			Persentase kegiatan statistik sektoral yang hasilnya dapat diakses oleh pengguna data.				100 %	117.827.600,00	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	Produsen data yang berkontribusi pada portal satu data		0,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, DAN STATISTIK
	2.20.02.2.01.0020	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral														
			Jumlah pegawai yang mendapatkan pelatihan di bidang statistik				80 Orang	56.306.600,00	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	Produsen data yang berkontribusi pada portal satu data		0,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, DAN STATISTIK
	2.21	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN						219.959.830,00							0,00	
1.	2.21.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Nilai Kerangka Kerja Keamanan Informasi Nilai Tata Kelola Keamanan Informasi Nilai Pengelolaan Aset Keamanan Informasi Nilai Teknologi dan Keamanan Informasi	84 nilai 48 nilai 88 nilai 106 nilai 80 nilai			61 Level 108 Level 138 Level 72 Level	219.959.830,00						84 nilai 48 nilai 88 nilai 106 nilai 80 nilai	0,00	
	2.21.02.2.01	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Kota	4 opd			29 OPD	219.959.830,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	Perangkata daerah yang telah menggunakan layanan keamanan informasi	4 opd	0,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, DAN STATISTIK
	2.21.02.2.01.0005	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Berbasis Elektronik dan Non Elektronik														
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik				1 Laporan	160.466.500,00	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	Perangkata daerah yang telah menggunakan layanan keamanan informasi		0,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, DAN STATISTIK
	2.21.02.2.01.0007	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah														
			Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi dan Persandian				29 Perangkat Daerah	59.493.330,00	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	Perangkata daerah yang telah menggunakan layanan keamanan informasi		0,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, DAN STATISTIK
		DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU						5.753.135.789,00							6.476.113.985,00	
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						5.753.135.789,00							6.476.113.985,00	
	2.18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL						5.753.135.789,00							6.476.113.985,00	
1.	2.18.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-			-	5.006.811.419,00						-	5.463.000.000,00	
	2.18.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	15.009.100,00			-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	-	-	17.100.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	6.469.900,00	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	-		7.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD														
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1.048.800,00	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	-		1.500.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD														
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	929.100,00	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	-		1.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD														
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1.307.100,00	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	-		1.500.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD														
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	1.044.200,00	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	-		1.300.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	1.080.100,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	-		1.300.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				16 Dokumen Laporan	3.129.900,00	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	-		3.500.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	4.010.506.427,00			-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	-	-	4.310.400.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				21 Orang/ bulan	4.003.567.327,00	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	-		4.300.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1.475.200,00	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	-		1.600.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD				13 Laporan	4.723.200,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan	-		8.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
												Berintegritas dan Dinamistif				
	2.18.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran														
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				1 Dokumen	740.700,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	-		800.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-			-	2.886.600,00			-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	-	-	15.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian														
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				12 Dokumen	2.886.600,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	-		15.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	125.258.700,00			-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	-	-	169.500.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				5 Paket	4.093.600,00	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	-		5.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				4 Paket	28.514.900,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	-		35.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				8 Paket	6.107.600,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	-		6.500.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				3 Dokumen	4.190.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	-		7.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material														
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				27 Paket	23.449.600,00	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	-		35.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	5.700.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	-		6.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	53.203.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		75.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	20.000.000,00			-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	-	-	30.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				1 Unit	20.000.000,00	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	-		30.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	693.762.908,00			-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	-	-	735.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	4.359.600,00	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	-		5.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	509.237.988,00	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	-		550.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	180.165.320,00	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	-		180.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	139.387.684,00			-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	-	-	186.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				3 Unit	38.674.820,00	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	-		50.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				20 Unit	49.813.509,00	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	-		65.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel														
			Jumlah Mebel yang Dipelihara				7 Unit	3.749.445,00	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	-		6.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				62 Unit	47.149.910,00	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola	-		65.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
												Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif				
2.	2.18.02	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	-	-			-	66.975.600,00						-	90.992.960,00	
	2.18.02.2.01	Penetapan Pemberian Fasilitas/InsentifDibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	4.918.900,00			-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamis	-	-	10.855.460,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.02.2.01.0003	Fasilitasi Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Kesepakatan Kemitraan antara Usaha Besar (PMA/PMDN) dengan UMKM di daerah				10 Dokumen	4.918.900,00	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamis	-		10.855.460,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.02.2.02	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	-	-			-	62.056.700,00			-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamis	-	-	80.137.500,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.02.2.02.0001	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota				1 Dokumen	55.800.000,00	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamis	-		0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.02.2.02.0004	Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota														
			Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota				1 Dokumen	6.256.700,00	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamis	-		80.137.500,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
3.	2.18.03	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	-	-			-	193.041.800,00						-	247.176.700,00	
	2.18.03.2.01	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	193.041.800,00			-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamis	-	-	247.176.700,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.03.2.01.0002	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota				13 Dokumen	193.041.800,00	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamis	-		247.176.700,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
4.	2.18.04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	-	-			-	331.609.940,00						-	475.000.000,00	
	2.18.04.2.01	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	-	100 %			-	331.609.940,00			-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	-	100 %	475.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.04.2.01.0005	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah														
			Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif yang menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota				2 Dokumen	10.692.000,00	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	-		15.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.04.2.01.0006	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik														
			Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik				3500 Pelaku Usaha	257.009.080,00	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan	-		350.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)			
											NASIONAL	DAERAH						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
												Berintegritas dan Dinamistif						
	2.18.04.2.01.0007	Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko																
			Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik				250 Pelaku Usaha	47.855.460,00	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	-		65.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU		
	2.18.04.2.01.0008	Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko																
			Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha				100 Kegiatan Usaha	16.053.400,00	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	-		45.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU		
5.	2.18.05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	-	-			-	135.802.830,00						-	176.613.825,00			
	2.18.05.2.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	135.802.830,00			-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamis	-	-	176.613.825,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU		
	2.18.05.2.01.0004	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya																
			Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya				3 Kegiatan Usaha.	13.498.200,00	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamis	-		20.605.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU		
	2.18.05.2.01.0005	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha																
			Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko				300 Pelaku Usaha	54.807.500,00	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamis	-		67.701.900,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU		
	2.18.05.2.01.0006	Pengawasan Penanaman Modal																
			Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dilakukan Inspeksi Lapangan ;serta Dilakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha				100 Kegiatan Usaha	67.497.130,00	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamis	-		88.306.925,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU		
6.	2.18.06	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	-	-			-	18.894.200,00						-	23.330.500,00			
	2.18.06.2.01	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	100 %			-	18.894.200,00			-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamis	-	100 %	23.330.500,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU		
	2.18.06.2.01.0002	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik																
			Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Dialah, Dikaji dan Dimanfaatkan				5 Dokumen	18.894.200,00	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamis	-		23.330.500,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU		
		DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA, DAN PARIWISATA							13.889.813.979,00							24.576.300.226,00		
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							12.381.478.399,00						23.080.607.156,00			
	2.19	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA							12.381.478.399,00						23.080.607.156,00			
1.	2.19.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-			-	4.969.048.674,00						-	5.054.827.124,00			
	2.19.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	23.215.500,00			-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan	-	-	34.053.000,00	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA, DAN PARIWISATA		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
												Berintegritas dan Dinamistif				
	2.19.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				6 Dokumen	10.415.250,00	Kota Magelang, Magelang Tengah, Cacaban	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	-		16.184.000,00	DINAS KEPEMUDAAN, LAHRAGA, DAN PARIWISATA
	2.19.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD														
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	2.151.000,00	Kota Magelang, Magelang Tengah, Cacaban	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		3.155.000,00	DINAS KEPEMUDAAN, LAHRAGA, DAN PARIWISATA
	2.19.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD														
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	2.229.000,00	Kota Magelang, Magelang Tengah, Cacaban	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		3.270.000,00	DINAS KEPEMUDAAN, LAHRAGA, DAN PARIWISATA
	2.19.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD														
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	2.475.000,00	Kota Magelang, Magelang Tengah, Cacaban	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		2.723.000,00	DINAS KEPEMUDAAN, LAHRAGA, DAN PARIWISATA
	2.19.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD														
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	2.013.000,00	Kota Magelang, Magelang Tengah, Cacaban	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		2.953.000,00	DINAS KEPEMUDAAN, LAHRAGA, DAN PARIWISATA
	2.19.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				20 Laporan	3.932.250,00	Kota Magelang, Magelang Tengah, Cacaban	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		5.768.000,00	DINAS KEPEMUDAAN, LAHRAGA, DAN PARIWISATA
	2.19.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	4.249.421.614,00			-	-	-	-	4.357.158.164,00	DINAS KEPEMUDAAN, LAHRAGA, DAN PARIWISATA
	2.19.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				23 Orang/ bulan	4.206.835.659,00	Kota Magelang, Magelang Tengah, Cacaban	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		4.301.860.581,00	DINAS KEPEMUDAAN, LAHRAGA, DAN PARIWISATA
	2.19.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	4.500.000,00	Kota Magelang, Magelang Tengah, Cacaban	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		4.950.000,00	DINAS KEPEMUDAAN, LAHRAGA, DAN PARIWISATA
	2.19.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD				15 Laporan	38.085.955,00	Kota Magelang, Magelang Tengah, Cacaban	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		50.347.583,00	DINAS KEPEMUDAAN, LAHRAGA, DAN PARIWISATA
	2.19.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	96.328.300,00			-	-	-	-	153.500.000,00	DINAS KEPEMUDAAN, LAHRAGA, DAN PARIWISATA
	2.19.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				12 Paket	7.192.500,00	Kota Magelang, Magelang Tengah, Cacaban	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		8.500.000,00	DINAS KEPEMUDAAN, LAHRAGA, DAN PARIWISATA
	2.19.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Paket	12.494.200,00	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		14.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN, LAHRAGA, DAN PARIWISATA
	2.19.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	6.000.000,00	Kota Magelang, Magelang Tengah, Cacaban	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		9.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN, LAHRAGA, DAN PARIWISATA
	2.19.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	3.000.000,00	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		4.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN, LAHRAGA, DAN PARIWISATA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.19.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material														
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				12 Paket	20.925.600,00	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		26.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN, LAHRAGA, DAN PARIWISATA
	2.19.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	9.000.000,00	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		12.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN, LAHRAGA, DAN PARIWISATA
	2.19.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	37.716.000,00	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		80.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN, LAHRAGA, DAN PARIWISATA
	2.19.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	13.789.600,00			-	-	-	-	50.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN, LAHRAGA, DAN PARIWISATA
	2.19.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				2 Unit	13.789.600,00	Kota Magelang, Magelang Tengah, Cacaban	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		50.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN, LAHRAGA, DAN PARIWISATA
	2.19.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	413.188.960,00			-	-	-	-	113.483.200,00	DINAS KEPEMUDAAN, LAHRAGA, DAN PARIWISATA
	2.19.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	10.667.400,00	Kota Magelang, Magelang Tengah, Cacaban	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		13.483.200,00	DINAS KEPEMUDAAN, LAHRAGA, DAN PARIWISATA
	2.19.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	92.059.720,00	Kota Magelang, Magelang Tengah, Cacaban	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		100.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN, LAHRAGA, DAN PARIWISATA
	2.19.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	310.461.840,00	Kota Magelang, Magelang Tengah, Cacaban	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	DINAS KEPEMUDAAN, LAHRAGA, DAN PARIWISATA
	2.19.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	173.104.700,00			-	-	-	-	346.632.760,00	DINAS KEPEMUDAAN, LAHRAGA, DAN PARIWISATA
	2.19.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				8 Unit	74.525.000,00	Kota Magelang, Magelang Tengah, Cacaban	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		116.706.000,00	DINAS KEPEMUDAAN, LAHRAGA, DAN PARIWISATA
	2.19.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				10 Unit	63.060.200,00	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		109.926.760,00	DINAS KEPEMUDAAN, LAHRAGA, DAN PARIWISATA
	2.19.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				21 Unit	17.493.000,00	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		20.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN, LAHRAGA, DAN PARIWISATA
	2.19.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi				3 Unit	18.026.500,00	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		100.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN, LAHRAGA, DAN PARIWISATA
2.	2.19.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	-	-			-	2.409.647.425,00						-	8.474.194.630,00	
	2.19.02.2.01	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	-	28,57 %			-	2.209.647.425,00			-	-	-	28,57 %	8.274.194.630,00	DINAS KEPEMUDAAN, LAHRAGA, DAN PARIWISATA
	2.19.02.2.01.0011	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha pemuda Tingkat Kabupaten/kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Wirausaha Muda Tingkat kabupaten/kota Yang Difasilitasi Pengembangan Kewirausahaan Pemuda				200 Orang	1.059.278.675,00	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT)	-	-	-		563.037.930,00	DINAS KEPEMUDAAN, LAHRAGA, DAN PARIWISATA
	2.19.02.2.01.0012	Pemberian Penghargaan Kepemudaan bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan potensi pemuda														
			Jumlah yang menerima penghargaan pemuda				200 Orang	618.582.450,00	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		7.211.156.700,00	DINAS KEPEMUDAAN, LAHRAGA, DAN PARIWISATA
	2.19.02.2.01.0015	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat Kabupaten/kota														
			Jumlah Pemuda Pelopor Tingkat kabupaten/kota dari Seluruh Kabupaten/Kota yang difasilitasi dalam Pengembangan Kepeloporan Pemuda				454 Orang	531.786.300,00	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		500.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN, LAHRAGA, DAN PARIWISATA
	2.19.02.2.02	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	44,96 %			-	200.000.000,00			-	-	-	44,96 %	200.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN, LAHRAGA, DAN PARIWISATA
	2.19.02.2.02.0003	Koordinasi, sinkronisasi, dan penyelenggaran pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota														
			Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkatkan Kapasitasnya				1 Organisasi	200.000.000,00	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		200.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN, LAHRAGA, DAN PARIWISATA
3.	2.19.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	-	-			-	5.002.782.300,00						-	9.551.585.402,00	
	2.19.03.2.01	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	-	50,00 % 47,24 %			-	675.662.000,00			-	-	-	50,00 % 47,24 %	1.135.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN, LAHRAGA, DAN PARIWISATA
	2.19.03.2.01.0004	Koordinasi, Sinkronisasi dan penyelenggaraan pembentukan dan pengembangan sekolah khusus olahragawan di tingkat kabupaten/kota														
			Jumlah Sekolah Olahraga yang dibentuk dan dikembangkan di tingkat kabupaten/kota				4 Unit	675.662.000,00	Kota Magelang, Magelang Tengah, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		1.135.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN, LAHRAGA, DAN PARIWISATA
	2.19.03.2.02	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	12,50 %			-	1.424.636.800,00			-	-	-	12,50 %	2.713.965.602,00	DINAS KEPEMUDAAN, LAHRAGA, DAN PARIWISATA
	2.19.03.2.02.0004	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota														
			Jumlah Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota				2 Kegiatan	506.474.200,00	Kota Magelang, Magelang Tengah, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		679.428.700,00	DINAS KEPEMUDAAN, LAHRAGA, DAN PARIWISATA
	2.19.03.2.02.0006	Keikutsertaan anggota kontingen kabupaten/kota dalam Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga														
			Jumlah Peserta pada Penyelenggaraan Kejuaraan Tingkat kabupaten/kota				478 Orang	918.162.600,00	Kota Magelang, Magelang Tengah, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		2.034.536.902,00	DINAS KEPEMUDAAN, LAHRAGA, DAN PARIWISATA
	2.19.03.2.03	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	-	15,00 %			-	2.268.266.100,00			-	-	-	15,00 %	4.000.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN, LAHRAGA, DAN PARIWISATA
	2.19.03.2.03.0009	Pembinaan dan Pengembangan Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota														
			Jumlah Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota yang Dibina dan Diberikan Pengembangan				230 Orang	2.268.266.100,00	Kota Magelang, Magelang Tengah, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		4.000.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN, LAHRAGA, DAN PARIWISATA
	2.19.03.2.05	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	-	2 buah 3,65 % 47,24 %			-	634.217.400,00			-	-	-	2 buah 3,65 % 47,24 %	1.702.619.800,00	DINAS KEPEMUDAAN, LAHRAGA, DAN PARIWISATA
	2.19.03.2.05.0010	Pemassalan olahraga dan penyelenggaraan festival Olahraga Rekreasi yang berjenjang dan berkelanjutan pada tingkat daerah, nasional, dan internasional														
			Jumlah Lembaga yang terfasilitasi dalam Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi				1 Lembaga	634.217.400,00	Kota Magelang, Magelang Tengah, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		1.702.619.800,00	DINAS KEPEMUDAAN, LAHRAGA, DAN PARIWISATA
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN							1.508.335.580,00						1.495.693.070,00	
	3.26	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA							1.508.335.580,00						1.495.693.070,00	
1.	3.26.02	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	-	-			-	24.778.000,00						-	99.250.000,00	
	3.26.02.2.03	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	-	6 buah			-	24.778.000,00			-	-	-	6 buah	99.250.000,00	DINAS KEPEMUDAAN, LAHRAGA, DAN PARIWISATA
	3.26.02.2.03.0006	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota														
			Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota				1 Laporan	24.778.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		99.250.000,00	DINAS KEPEMUDAAN, LAHRAGA, DAN PARIWISATA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
2.	3.26.03	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	-	-			-	1.102.746.580,00						-	1.090.462.200,00		
	3.26.03.2.01	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	-	1 buah			-	1.102.746.580,00			-	-	-	1 buah	1.090.462.200,00	DINAS KEPEMUDAAN, LAHRAGA, DAN PARIWISATA	
	3.26.03.2.01.0003	Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri															
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri				1 Dokumen	12.011.100,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		20.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN, LAHRAGA, DAN PARIWISATA	
	3.26.03.2.01.0004	Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri															
			Jumlah Dokumen Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri				1 Dokumen	58.387.950,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		99.891.500,00	DINAS KEPEMUDAAN, LAHRAGA, DAN PARIWISATA	
	3.26.03.2.01.0006	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota															
			Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri				1 Kegiatan	898.855.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		952.141.400,00	DINAS KEPEMUDAAN, LAHRAGA, DAN PARIWISATA	
	3.26.03.2.01.0007	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri															
			Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri				1 Promosi	133.492.530,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		18.429.300,00	DINAS KEPEMUDAAN, LAHRAGA, DAN PARIWISATA	
3.	3.26.04	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	-	-			-	50.000.000,00						-	123.635.500,00		
	3.26.04.2.02	Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	-	-			-	50.000.000,00			-	-	-	-	123.635.500,00	DINAS KEPEMUDAAN, LAHRAGA, DAN PARIWISATA	
	3.26.04.2.02.0009	Penyusunan Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif															
			Jumlah Dokumen Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif				1 Dokumen	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		123.635.500,00	DINAS KEPEMUDAAN, LAHRAGA, DAN PARIWISATA	
4.	3.26.05	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	-	-			-	330.811.000,00						-	182.345.370,00		
	3.26.05.2.01	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	-	7 buah			-	330.811.000,00			-	-	-	7 buah	182.345.370,00	DINAS KEPEMUDAAN, LAHRAGA, DAN PARIWISATA	
	3.26.05.2.01.0006	Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif															
			Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang Mengikuti Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif				40 Orang	42.541.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		45.761.400,00	DINAS KEPEMUDAAN, LAHRAGA, DAN PARIWISATA	
	3.26.05.2.01.0008	Pengembangan Kapasitas SDM Pariwisata Berbasis SKKNI															
			Jumlah SDM Pariwisata yang Dikembangkan Kapasitasnya Berdasarkan pada SKKNI				40 Orang	42.532.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		55.613.370,00	DINAS KEPEMUDAAN, LAHRAGA, DAN PARIWISATA	
	3.26.05.2.01.0009	Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata															
			Jumlah Masyarakat yang memperoleh Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk pengembangan Pariwisata				20 Orang	245.738.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		80.970.600,00	DINAS KEPEMUDAAN, LAHRAGA, DAN PARIWISATA	
		PENGELOLAAN SPORT CENTER						3.001.621.400,00								2.911.544.686,00	
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						3.001.621.400,00							2.911.544.686,00		
	2.19	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN LAHRAGA						3.001.621.400,00							2.911.544.686,00		
1.	2.19.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	-	-			-	3.001.621.400,00						-	2.911.544.686,00		
	2.19.03.2.01	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	-	50,00 % 47,24 %			-	3.001.621.400,00			-	-	-	50,00 % 47,24 %	2.911.544.686,00	PENGELOLAAN SPORT CENTER	
	2.19.03.2.01.0005	Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Prasarana Olahraga di tingkat kabupaten/kota															

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah sarana dan prasarana olahraga di tingkat kabupaten/kota yang tersedia				4 Unit	3.001.621.400,00	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		2.911.544.686,00	PENGLOLAAN SPORT CENTER
		DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN						6.466.601.337,00							7.192.176.507,00	
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						6.466.601.337,00							7.192.176.507,00	
	2.23	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN						6.137.936.129,00							6.735.476.507,00	
1.	2.23.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-			-	5.520.955.834,00						-	5.915.531.507,00	
	2.23.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	35.168.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing dan Berkarakter	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	-	52.881.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				3 Dokumen	16.639.000,00	Kota Magelang, Magelang Tengah, Magelang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing dan Berkarakter	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan		23.124.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD														
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	2.048.000,00	Kota Magelang, Magelang Tengah, Magelang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing dan Berkarakter	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan		3.250.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD														
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	2.093.000,00	Kota Magelang, Magelang Tengah, Magelang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing dan Berkarakter	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan		3.189.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD														
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	2.113.500,00	Kota Magelang, Magelang Tengah, Magelang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing dan Berkarakter	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan		3.378.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD														
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	1.871.700,00	Kota Magelang, Magelang Tengah, Magelang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing dan Berkarakter	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan		3.175.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				22 Laporan	10.402.800,00	Kota Magelang, Magelang Tengah, Magelang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing dan Berkarakter	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan		16.765.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
											generasi Z), dan penyandang disabilitas.					
	2.23.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	4.689.362.026,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing dan Berkarakter	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	-	4.887.517.507,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				28 Orang/ bulan	4.626.525.866,00	Kota Magelang, Magelang Tengah, Magelang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing dan Berkarakter	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan		4.801.862.507,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	22.530.200,00	Kota Magelang, Magelang Tengah, Magelang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing dan Berkarakter	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan		45.405.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD				2 Laporan	40.305.960,00	Kota Magelang, Magelang Tengah, Magelang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing dan Berkarakter	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan		40.250.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-			-	1.956.100,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing dan Berkarakter	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	-	3.850.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD														
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				12 Laporan	1.956.100,00	Kota Magelang, Magelang Tengah, Magelang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing dan Berkarakter	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan		3.850.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-			-	776.385,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing dan Berkarakter	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	-	3.150.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian														
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				27 Dokumen	776.385,00	Kota Magelang, Magelang Tengah, Magelang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing dan Berkarakter	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan		3.150.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.23.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	72.740.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing dan Berkarakter	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	-	134.397.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	8.524.200,00	Kota Magelang, Magelang Tengah, Magelang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing dan Berkarakter	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan		13.645.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1.440.700,00	Kota Magelang, Magelang Tengah, Magelang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing dan Berkarakter	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan		3.792.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				2 Paket	543.200,00	Kota Magelang, Magelang Tengah, Magelang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing dan Berkarakter	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan		4.765.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				4 Paket	14.889.600,00	Kota Magelang, Magelang Tengah, Magelang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing dan Berkarakter	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan		28.654.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	2.500.200,00	Kota Magelang, Magelang Tengah, Magelang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing dan Berkarakter	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan		3.365.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material														
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				1 Paket	13.704.100,00	Kota Magelang, Magelang Tengah, Magelang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing dan Berkarakter	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan		16.888.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				21 Laporan	31.138.000,00	Kota Magelang, Magelang Tengah, Magelang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing dan Berkarakter	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan		63.288.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
											generasi Z), dan penyandang disabilitas.					
	2.23.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	483.245.288,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing dan Berkarakter	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	-	500.426.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	3.260.600,00	Kota Magelang, Magelang Tengah, Magelang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing dan Berkarakter	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan		5.776.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	261.187.128,00	Kota Magelang, Magelang Tengah, Magelang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing dan Berkarakter	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan		275.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	218.797.560,00	Kota Magelang, Magelang Tengah, Magelang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing dan Berkarakter	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan		219.650.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	237.708.035,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing dan Berkarakter	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	-	333.310.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				17 Unit	57.556.000,00	Kota Magelang, Magelang Tengah, Magelang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing dan Berkarakter	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan		78.250.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				6 Unit	73.902.500,00	Kota Magelang, Magelang Tengah, Magelang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing dan Berkarakter	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan		102.850.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel														
			Jumlah Mebel yang Dipelihara				15 Unit	3.000.000,00	Kota Magelang, Magelang Tengah, Magelang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing dan Berkarakter	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan		3.800.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
											generasi Z), dan penyandang disabilitas.					
	2.23.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				15 Unit	32.674.960,00	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing dan Berkarakter	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan		48.866.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi				2 Unit	70.574.575,00	Kota Magelang, Magelang Tengah, Magelang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing dan Berkarakter	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan		99.544.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2.	2.23.02	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	-	-			-	616.980.295,00						-	819.945.000,00	
	2.23.02.2.01	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perpustakaan pada satuan pendidikan dasar dan yang di lakukan pembinaan dalam mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan	-			60 Perpustakaan	486.631.210,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing dan Berkarakter	Masyarakat Kota Magelang	-	642.250.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.02.2.01.0004	Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan														
			Jumlah Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar dan yang Dilakukan Pembinaan dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan				60 Perpustakaan	19.752.300,00	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing dan Berkarakter	Masyarakat Kota Magelang		158.500.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.02.2.01.0016	Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah tenaga perpustakaan yang ditingkatkan kapasitasnya dan mendapat sertifikasi Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				40 Orang	11.597.900,00	Kota Magelang, Magelang Tengah, Magelang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing dan Berkarakter	Masyarakat Kota Magelang		23.500.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.02.2.01.0017	Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan														
			Jumlah Data dan informasi Perpustakaan				1 Dokumen	48.280.460,00	Kota Magelang, Magelang Tengah, Magelang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing dan Berkarakter	Masyarakat Kota Magelang		57.250.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.02.2.01.0018	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Perpustakaan														
			Jumlah Bahan Perpustakaan yang dikelola dan dikembangkan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan				500 Eksemplar	85.029.600,00	Kota Magelang, Magelang Tengah, Magelang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing dan Berkarakter	Masyarakat Kota Magelang		78.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.02.2.01.0020	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik														
			Jumlah Layanan Perpustakaan Elektronik yang Dikembangkan dengan Manajemen Layanan TIK				19 Perpustakaan	321.970.950,00	Kota Magelang, Magelang Tengah, Magelang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan,	Penguatan Landasan Pembentukan	Masyarakat Kota Magelang		325.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
											kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Sumber Daya Manusia Berdaya Saing dan Berkarakter				
	2.23.02.2.02	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan kegemaran membaca dan literasi pada satuan pendidikan dasar dan masyarakat	-			12 Kegiatan	130.349.085,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing dan Berkarakter	Masyarakat Kota Magelang	-	177.695.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.02.2.02.0006	Pemilihan Duta Baca/Bunda Baca/Bunda Literasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Duta Baca/Bunda Baca/Bunda Literasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang dipilih dan didukung kegiatannya				3 Orang	33.283.525,00	Kota Magelang, Magelang Tengah, Magelang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing dan Berkarakter	Masyarakat Kota Magelang		37.945.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.02.2.02.0007	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial														
			Jumlah layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial di wilayah Kabupaten/Kota yang dikembangkan				10 Perpustakaan	20.529.560,00	Kota Magelang, Magelang Tengah, Magelang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing dan Berkarakter	Masyarakat Kota Magelang		33.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.02.2.02.0010	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat														
			Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat				3 Lokus	76.536.000,00	Kota Magelang, Magelang Tengah, Magelang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing dan Berkarakter	Masyarakat Kota Magelang		106.750.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.24	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN						328.665.208,00							456.700.000,00	
1.	2.24.02	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Prosentase pengelolaan arsip dinamis Persentase berkas yang dikelola sesuai ketentuan	100,00 %			100 % 100,00 %	240.840.370,00						100,00 %	336.500.000,00	
	2.24.02.2.01	Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penataan berkas Arsip Dinamis sesuai ketentuan	-			100 %	120.998.310,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing dan Berkarakter	27 OPD, 50 masyarakat, 5 BUMD, 10 Organisasi politik, 2 organisasi masyarakat	-	171.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.24.02.2.01.0002	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis														
			Jumlah Naskah Dinas yang Dilakukan Pemeliharaan dan Penyusutan				3000 Berkas	46.466.760,00	Kota Magelang, Magelang Tengah, Magelang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing dan Berkarakter	27 OPD, 50 masyarakat, 5 BUMD, 10 Organisasi politik, 2 organisasi masyarakat		59.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.24.02.2.01.0003	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota														
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota				27 Laporan	19.172.900,00	Kota Magelang, Magelang Tengah, Magelang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing dan Berkarakter	27 OPD, 50 masyarakat, 5 BUMD, 10 Organisasi politik, 2 organisasi masyarakat		30.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.24.02.2.01.0009	Monitoring dan evaluasi penyelenggaraan kearsipan yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota														
			Jumlah laporan hasil monitoring dan evaluasi penyelenggaraan kearsipan				1 Laporan	22.358.600,00	Kota Magelang, Magelang Tengah, Magelang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi,	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya	27 OPD, 50 masyarakat, 5 BUMD, 10		31.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
											narkoba, judi, dan penyeludupan.	Saing dan Berkarakter	Organisasi politik, 2 organisasi masyarakat			
	2.24.02.2.01.0010	Pembinaan Kearsipan kewenangan Kabupaten/Kota														
			Jumlah OPD kab/kota, BUMD kab/kota, ORMAS/ORPOL kab/kota, dan LKD kab/kota telah mengimplementasi pengelolaan arsip dinamis				17 Instansi	33.000.050,00	Kota Magelang, Magelang Tengah, Magelang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing dan Berkarakter	27 OPD, 50 masyarakat, 5 BUMD, 10 Organisasi politik, 2 organisasi masyarakat		51.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.24.02.2.02	Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	56.644.760,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing dan Berkarakter	3300 berkas	-	82.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.24.02.2.02.0004	Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis														
			Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis				3300 Arsip	56.644.760,00	Kota Magelang, Magelang Tengah, Magelang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing dan Berkarakter	3300 berkas		82.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.24.02.2.03	Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota	-	-			-	63.197.300,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing dan Berkarakter	600 berkas, 1 pameran, 27 OPD	-	83.500.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.24.02.2.03.0001	Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN														
			Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN				60 Pengguna	55.867.200,00	Kota Magelang, Magelang Tengah, Magelang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing dan Berkarakter	600 berkas, 1 pameran, 27 OPD		74.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.24.02.2.03.0002	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota				2 Laporan	7.330.100,00	Kota Magelang, Magelang Tengah, Magelang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing dan Berkarakter	600 berkas, 1 pameran, 27 OPD		9.500.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2.	2.24.03	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	Prosentase pemusnahan arsip di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	100 %			100 %	87.824.838,00						100 %	120.200.000,00	
	2.24.03.2.01	Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	-	-			-	1.594.700,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing dan Berkarakter	500 berkas	-	2.200.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.24.03.2.01.0003	Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun														
			Jumlah Arsip yang Memiliki Retensi Di Bawah 10 Tahun yang Dimusnahkan				500 Berkas	1.594.700,00	Kota Magelang, Magelang Tengah, Magelang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing dan Berkarakter	500 berkas		2.200.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.24.03.2.04	Autentikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media Kabupaten/Kota	-	-			-	86.230.138,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing dan Berkarakter	4000 berkas	-	118.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.24.03.2.04.0001	Penilaian dan Penetapan Autentisitas Arsip Statis Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Daftar Autentisitas Arsip Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip yang Dinilai dan Ditetapkan				3000 Arsip	55.646.808,00	Kota Magelang, Magelang Tengah, Magelang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing dan Berkarakter	4000 berkas		71.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.24.03.2.04.0002	Penilaian dan Penetapan Hasil Alih Media Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip														
			Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Penilaian dan Penetapan Alih Media Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip				1000 Arsip	30.583.330,00	Kota Magelang, Magelang Tengah, Magelang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing dan Berkarakter	4000 berkas		47.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
		DINAS PERTANIAN DAN PANGAN						9.844.502.157,00							8.539.530.900,00	
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						352.858.550,00							697.030.900,00	
	2.09	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN						352.858.550,00							697.030.900,00	
1.	2.09.03	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	-	-			-	255.077.746,00						-	499.030.900,00	
	2.09.03.2.01	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	-	13326 ton			-	111.116.746,00			-	-	-	13326 ton	175.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
	2.09.03.2.01.0009	Pengembangan usaha pengolahan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal														
			Jumlah laporan pengembangan usaha pengolahan pangan berbasis sumber daya lokal				1 Laporan	25.485.800,00	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		65.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
	2.09.03.2.01.0012	Penyediaan Informasi Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen Wilayah Kabupaten/Kota														
			Informasi harga pangan tingkat Produsen dan Konsumen wilayah Kabupaten/Kota				12 Laporan	5.218.000,00	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Perekonomian yang Berdaya Saing, Inklusif, dan Berkelanjutan	-		12.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
	2.09.03.2.01.0014	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan Pokok Strategis														
			Jumlah koordinasi dan sinkronisasi pemantauan stok pangan, pasokan pangan dan harga pangan Pokok Strategis				12 Laporan	80.412.946,00	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Perekonomian yang Berdaya Saing, Inklusif, dan Berkelanjutan	-		98.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
	2.09.03.2.02	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	-	23 ton			-	61.011.600,00			-	-	-	23 ton	199.030.900,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
	2.09.03.2.02.0003	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota				17,32 Ton	51.820.700,00	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		60.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
	2.09.03.2.02.0005	Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Kab/Kota														
			Jumlah penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Kab/Kota				8 Ton	9.190.900,00	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Perekonomian yang Berdaya Saing, Inklusif, dan Berkelanjutan	-		139.030.900,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
	2.09.03.2.04	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	-	56,93 gram/ kap/ hari 1959,30 Kkal/ kap/ hari			-	82.949.400,00			-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamis	-	56,93 gram/ kap/ hari 1959,30 Kkal/ kap/ hari	125.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
	2.09.03.2.04.0002	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal														
			Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal				3 Laporan	82.949.400,00	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamis	-		125.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2.	2.09.04	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	-	-			-	60.085.900,00						-	100.000.000,00	
	2.09.04.2.02	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	-	2 kegiatan			-	60.085.900,00			-	Penguatan Landasan Perekonomian yang Berdaya Saing, Inklusif, dan Berkelanjutan	-	2 kegiatan	100.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
	2.09.04.2.02.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota														
			Jumlah koordinasi dan sinkronisasi penanganan kerawanan pangan dan gizi kabupaten/kota				2 Laporan	60.085.900,00	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Perekonomian yang Berdaya Saing, Inklusif, dan Berkelanjutan	-		100.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
3.	2.09.05	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	-	-			-	37.694.904,00						-	98.000.000,00	
	2.09.05.2.01	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	-	83 %			-	37.694.904,00			-	Penguatan Landasan Perekonomian yang Berdaya Saing, Inklusif, dan Berkelanjutan	-	83 %	98.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
	2.09.05.2.01.0004	Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota				2 Dokumen	37.694.904,00	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Perekonomian yang Berdaya Saing, Inklusif, dan Berkelanjutan	-		98.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN							9.491.643.607,00						7.842.500.000,00	
	3.25	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN							992.988.880,00						0,00	
1.	3.25.04	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	-	-			-	842.858.290,00						-	0,00	
	3.25.04.2.02	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	-	770 kg			-	435.980.100,00			-	-	-	770 kg	0,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
	3.25.04.2.02.0001	Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil														
			Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas				25 Kelompok	57.041.300,00	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
	3.25.04.2.02.0002	Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil														
			Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan				30 Kelompok	378.938.800,00	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
	3.25.04.2.04	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	-	165000 kg			-	406.878.190,00			-	-	-	165000 kg	0,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
	3.25.04.2.04.0002	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				2 Unit	406.878.190,00	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
2.	3.25.06	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	-	-			-	150.130.590,00						-	0,00	
	3.25.06.2.02	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	-	36 kali			-	16.334.600,00			-	-	-	36 kali	0,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
	3.25.06.2.02.0002	Pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko														
			Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang mendapatkan pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko				0 Unit Usaha	16.334.600,00	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
	3.25.06.2.03	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	-	-			-	133.795.990,00			-	-	-	-	0,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
	3.25.06.2.03.0001	Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				239 Ton	133.795.990,00	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
	3.27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN						8.498.654.727,00							7.842.500.000,00	
1.	3.27.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-			-	6.361.761.685,00						-	6.371.500.000,00	
	3.27.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	16.206.800,00			-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	-	-	15.500.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
	3.27.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	7.101.300,00	Kota Magelang, Magelang Tengah, Cacaban	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	-		0,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
	3.27.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD														
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				2 Dokumen	3.459.300,00	Kota Magelang, Magelang Tengah, Cacaban	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	-		6.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
	3.27.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD														
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				0 Dokumen	3.427.700,00	Kota Magelang, Magelang Tengah, Cacaban	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	-		6.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
	3.27.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				12 Laporan	2.218.500,00	Kota Magelang, Magelang Tengah, Cacaban	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	-		3.500.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
	3.27.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	5.729.048.740,00			-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	-	-	5.520.500.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
	3.27.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				490 Orang/ bulan	5.716.523.240,00	Kota Magelang, Magelang Tengah, Cacaban	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	-		5.500.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
	3.27.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1.349.800,00	Kota Magelang, Magelang Tengah, Cacaban	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	-		3.500.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
	3.27.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD				13 Laporan	9.676.000,00	Kota Magelang, Magelang Tengah, Cacaban	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	-		14.500.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
	3.27.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran														
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				1 Dokumen	1.499.700,00	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan	-		2.500.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
												Berintegritas dan Dinamistif				
	3.27.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-			-	1.940.100,00			-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	-	-	4.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
	3.27.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD														
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				2 Dokumen	1.940.100,00	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	-		4.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
	3.27.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	79.882.225,00			-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	-	-	149.500.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
	3.27.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				3 Paket	7.530.000,00	Kota Magelang, Magelang Tengah, Cacaban	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	-		9.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
	3.27.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				2 Paket	2.800.000,00	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	-		4.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
	3.27.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				2 Paket	2.030.000,00	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	-		3.500.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
	3.27.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				4 Paket	29.192.200,00	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	-		31.500.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
	3.27.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				9 Paket	3.144.400,00	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	-		6.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
	3.27.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material														
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				15 Paket	7.651.625,00	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	-		10.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
	3.27.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				10 Laporan	2.960.000,00	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	-		5.500.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
	3.27.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				24 Laporan	24.574.000,00	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	-		80.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
	3.27.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	38.577.000,00			-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	-	-	50.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
	3.27.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				2 Unit	38.577.000,00	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	-		50.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
	3.27.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	315.860.420,00			-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	-	-	361.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
	3.27.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	2.961.600,00	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	-		6.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
	3.27.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	136.517.150,00	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	-		145.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
	3.27.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Laporan	8.830.000,00	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	-		10.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
	3.27.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantar yang Disediakan				12 Laporan	167.551.670,00	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	-		200.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
	3.27.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	180.246.400,00			-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	-	-	271.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
	3.27.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas labatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				14 Unit	55.438.400,00	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	-		100.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
	3.27.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				29 Unit	114.058.000,00	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	-		150.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
	3.27.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				26 Unit	10.750.000,00	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	-		21.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
2.	3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	-	-			-	1.051.032.495,00						-	1.225.000.000,00	
	3.27.02.2.01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	-	50 Orang			-	12.583.000,00			-	Penguatan Landasan Perekonomian yang Berdaya Saing, Inklusif, dan Berkelanjutan	-	50 Orang	45.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
	3.27.02.2.01.0001	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi														
			Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi				4 Laporan	12.583.000,00	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Perekonomian yang Berdaya Saing, Inklusif, dan Berkelanjutan	-		45.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
	3.27.02.2.02	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	-	88,00 %			-	903.744.995,00			-	Penguatan Landasan Perekonomian yang Berdaya Saing, Inklusif, dan Berkelanjutan	-	88,00 %	1.180.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
	3.27.02.2.02.0002	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman														
			Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman				12 Dokumen	611.729.575,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Perekonomian yang Berdaya Saing, Inklusif, dan Berkelanjutan	-		750.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
	3.27.02.2.02.0004	Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Tanaman														
			Jumlah SDG tanaman yang dilakukan pelestarian dan pemurnian				2 Varietas Unggul Baru (VUB)	292.015.420,00	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Perekonomian yang Berdaya Saing, Inklusif, dan Berkelanjutan	-		430.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
	3.27.02.2.05	Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota	-	10 %			-	134.704.500,00			-	-	-	10 %	0,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
	3.27.02.2.05.0002	Pengujian Mutu Benih dan Bibit Ternak														
			Hasil Pengujian Mutu Benih dan Bibit Ternak				3 Dokumen	134.704.500,00	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
3.	3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	-	-			-	8.000.000,00						-	30.000.000,00	
	3.27.03.2.01	Pengembangan Prasarana Pertanian	-	1 dokumen			-	8.000.000,00			-	Penguatan Landasan Perekonomian yang Berdaya Saing, Inklusif, dan Berkelanjutan	-	1 dokumen	30.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
	3.27.03.2.01.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya														
			Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya				12 Laporan	8.000.000,00	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Perekonomian yang Berdaya Saing, Inklusif, dan Berkelanjutan	-		30.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
4.	3.27.04	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	-	-			-	751.522.877,00						-	0,00	
	3.27.04.2.01	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota	-	5 kasus			-	50.340.800,00			-	-	-	5 kasus	0,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.27.04.2.01.0005	Pelaksanaan Surveilans Penyakit Hewan dan Zoonosis pada Hewan														
			Jumlah wilayah yang dilakukan surveilans dan zoonosis pada Hewan				17 Wilayah	50.340.800,00	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
	3.27.04.2.02	Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota	-	6,25 Kg/ Kapita/ Tahun			-	57.125.977,00			-	-	-	6,25 Kg/Kapita/Tahun	0,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
	3.27.04.2.02.0007	Analisis Risiko Penyakit Hewan, zoonosis, produk hewan dan media pembawa penyakit hewan lainnya														
			Jumlah analisis Risiko Penyakit Hewan, zoonosis, produk hewan dan media pembawa penyakit hewan lainnya				4 Laporan	57.125.977,00	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
	3.27.04.2.04	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	-	97 %			-	637.683.500,00			-	-	-	97 %	0,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
	3.27.04.2.04.0002	Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan														
			Jumlah Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan				4 Laporan	27.404.900,00	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
	3.27.04.2.04.0004	Pengujian Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner														
			Jumlah Pengujian Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner				2 Dokumen	24.056.900,00	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
	3.27.04.2.04.0005	Pembinaan Penerapan persyaratan higiene sanitasi pada unit usaha produk hewan														
			Jumlah unit usaha produk hewan yang telah dibina untuk penerapan persyaratan higiene sanitasi				4 Unit Usaha	586.221.700,00	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
	3.27.04.2.05	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesejahteraan Hewan	-	2 %			-	6.372.600,00			-	-	-	2 %	0,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
	3.27.04.2.05.0003	Pembinaan Penerapan Kesejahteraan Hewan pada Unit Usaha														
			Jumlah unit usaha yang dibina terhadap penerapan kesejahteraan hewan				1 Unit	6.372.600,00	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
5.	3.27.05	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	-	-			-	10.764.700,00						-	50.000.000,00	
	3.27.05.2.01	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	-	-			-	10.764.700,00			-	Penguatan Landasan Perekonomian yang Berdaya Saing, Inklusif, dan Berkelanjutan	-	-	50.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
	3.27.05.2.01.0001	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan														
			Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan				8,3 Ha	10.764.700,00	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Perekonomian yang Berdaya Saing, Inklusif, dan Berkelanjutan	-		50.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
6.	3.27.06	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	-	-			-	42.066.080,00						-	0,00	
	3.27.06.2.01	Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	-	10 %			-	42.066.080,00			-	-	-	10 %	0,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
	3.27.06.2.01.0002	Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian														
			Jumlah Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian				12 Dokumen	42.066.080,00	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
7.	3.27.07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	-	-			-	273.506.890,00						-	166.000.000,00	
	3.27.07.2.01	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	-	10 %			-	273.506.890,00			-	Penguatan Landasan Perekonomian yang Berdaya Saing, Inklusif, dan Berkelanjutan	-	10 %	166.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
	3.27.07.2.01.0001	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya				1 Unit	18.819.800,00	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Perekonomian yang Berdaya Saing, Inklusif, dan Berkelanjutan	-		30.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
	3.27.07.2.01.0002	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa														
			Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya				2 Unit	227.369.050,00	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Perekonomian yang Berdaya Saing, Inklusif, dan Berkelanjutan	-		100.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
	3.27.07.2.01.0003	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian				1 Unit	27.318.040,00	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Perekonomian yang Berdaya Saing, Inklusif, dan Berkelanjutan	-		36.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
		RUMAH PEMOTONGAN HEWAN DAN LABORATORIUM KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER						209.050.940,00							0,00	
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN						209.050.940,00							0,00	
	3.27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN						209.050.940,00							0,00	
1.	3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	-	-			-	183.239.940,00						-	0,00	
	3.27.03.2.02	Pembangunan Prasarana Pertanian	-	50 % 1,00 unit			-	183.239.940,00			-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamis	-	50 % 1,00 unit	0,00	RUMAH PEMOTONGAN HEWAN DAN LABORATORIUM KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER
	3.27.03.2.02.0015	Pembangunan, Rehabilitasi, Pemeliharaan dan operasionalisasi Rumah Potong Hewan														
			Jumlah rumah potong hewan yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara serta beroperasi				1 Unit	183.239.940,00	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamis	-		0,00	RUMAH PEMOTONGAN HEWAN DAN LABORATORIUM KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER
2.	3.27.04	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	-	-			-	25.811.000,00						-	0,00	
	3.27.04.2.03	Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	25.811.000,00			-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamis	-	-	0,00	RUMAH PEMOTONGAN HEWAN DAN LABORATORIUM KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER
	3.27.04.2.03.0001	Penyediaan Pelayanan Jasa Laboratorium														
			Jumlah Pelayanan Jasa Laboratorium				12 Laporan	25.811.000,00	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamis	-		0,00	RUMAH PEMOTONGAN HEWAN DAN LABORATORIUM KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER
		PUSAT KESEHATAN HEWAN						292.091.821,00							343.000.000,00	
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN						292.091.821,00							343.000.000,00	
	3.27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN						292.091.821,00							343.000.000,00	
1.	3.27.04	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	-	-			-	292.091.821,00						-	343.000.000,00	
	3.27.04.2.02	Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota	-	6,25 Kg/ Kapita/ Tahun			-	32.548.075,00			-	-	-	6,25 Kg/ Kapi ta/Tahun	43.000.000,00	PUSAT KESEHATAN HEWAN
	3.27.04.2.02.0006	Pengawasan dan Pemeriksaan Kesehatan Hewan, Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM) di Perbatasan Tempat Pemeriks HPM														
			Jumlah pengawasan dan pemeriksaan kesehatan HPM di Perbatasan Tempat Pemeriks HPM				12 Laporan	32.548.075,00	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		43.000.000,00	PUSAT KESEHATAN HEWAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.27.04.2.03	Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	259.543.746,00			-	-	-	-	300.000.000,00	PUSAT KESEHATAN HEWAN
	3.27.04.2.03.0002	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner														
			Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner				12 Laporan	259.543.746,00	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		300.000.000,00	PUSAT KESEHATAN HEWAN
		DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, KOPERASI, DAN USAHA MIKRO						26.417.822.397,00							29.182.182.166,00	
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						8.484.284.820,00							8.573.000.000,00	
	2.17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH						8.484.284.820,00							8.573.000.000,00	
1.	2.17.03	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	-	-			-	21.636.300,00						-	35.000.000,00	
	2.17.03.2.01	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	-	-			-	21.636.300,00			-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamis	-	-	35.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, KOPERASI, DAN USAHA MIKRO
	2.17.03.2.01.0004	Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan				80 Unit Usaha	21.636.300,00	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamis	-		35.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, KOPERASI, DAN USAHA MIKRO
2.	2.17.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	-	-			-	22.252.000,00						-	48.000.000,00	
	2.17.05.2.01	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	22.252.000,00			-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing dan Berkarakter	-	-	48.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, KOPERASI, DAN USAHA MIKRO
	2.17.05.2.01.0001	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi														
			Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian				25 Orang	22.252.000,00	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing dan Berkarakter	-		48.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, KOPERASI, DAN USAHA MIKRO
3.	2.17.07	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	-	-			-	8.440.396.520,00						-	8.490.000.000,00	
	2.17.07.2.01	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	-	-			-	8.440.396.520,00			-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamis	-	-	8.490.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, KOPERASI, DAN USAHA MIKRO
	2.17.07.2.01.0004	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro														
			Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro				2000 Unit Usaha	348.902.920,00	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamis	-		500.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, KOPERASI, DAN USAHA MIKRO
	2.17.07.2.01.0008	Pemulihan Usaha Mikro														
			Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi				500 Unit Usaha	7.972.776.300,00	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamis	-		7.690.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, KOPERASI, DAN USAHA MIKRO
	2.17.07.2.01.0015	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan														
			Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Usaha Mikro dan Kewirausahaan				290 Orang	118.717.300,00	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan	-		300.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, KOPERASI, DAN USAHA MIKRO

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
												Berintegritas dan Dinamis				
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN						17.933.537.577,00							20.609.182.166,00	
	3.30	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN						4.806.315.223,00							6.945.000.000,00	
1.	3.30.03	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	-	-			-	4.374.312.850,00						-	6.000.000.000,00	
	3.30.03.2.01	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	-	-			-	3.079.183.140,00			-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamis	-	-	5.100.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, KOPERASI, DAN USAHA MIKRO
	3.30.03.2.01.0001	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan														
			Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan				4 Unit	499.000.000,00	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamis	-		600.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, KOPERASI, DAN USAHA MIKRO
	3.30.03.2.01.0002	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan														
			Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan				5 Unit	2.580.183.140,00	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamis	-		4.500.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, KOPERASI, DAN USAHA MIKRO
	3.30.03.2.02	Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	-	-			-	1.295.129.710,00			-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamis	-	-	900.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, KOPERASI, DAN USAHA MIKRO
	3.30.03.2.02.0001	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan														
			Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan				6 Dokumen	1.226.279.110,00	Kota Magelang, Magelang Selatan, Tidar Selatan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamis	-		750.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, KOPERASI, DAN USAHA MIKRO
	3.30.03.2.02.0002	Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan														
			Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan				4 Dokumen	68.850.600,00	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamis	-		150.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, KOPERASI, DAN USAHA MIKRO
2.	3.30.04	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	-	-			-	45.816.100,00						-	85.000.000,00	
	3.30.04.2.02	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	-	-			-	45.816.100,00			-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamis	-	-	85.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, KOPERASI, DAN USAHA MIKRO
	3.30.04.2.02.0002	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan														
			Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan				12 Laporan	45.816.100,00	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamis	-		85.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, KOPERASI, DAN USAHA MIKRO
3.	3.30.05	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	-	-			-	386.186.273,00						-	860.000.000,00	
	3.30.05.2.01	Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	386.186.273,00			-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamis	-	-	860.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, KOPERASI, DAN USAHA MIKRO
	3.30.05.2.01.0002	Pameran Dagang Nasional														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang				3 Pelaku Usaha	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamis	-		250.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, KOPERASI, DAN USAHA MIKRO
	3.30.05.2.01.0003	Pameran Dagang Lokal														
			Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang Lokal				76 Pelaku Usaha	386.186.273,00	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamis	-		600.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, KOPERASI, DAN USAHA MIKRO
	3.30.05.2.01.0005	Peningkatan Citra Produk Ekspor														
			Jumlah Produk Unggulan Ekspor Daerah yang Disusun Menjadi Materi Promosi				2 Produk	0,00	Kota Magelang, Magelang Selatan, Tidar Selatan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamis	-		10.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, KOPERASI, DAN USAHA MIKRO
	3.31	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN						13.127.222.354,00							13.664.182.166,00	
1.	3.31.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-			-	11.672.354.321,00						-	11.899.182.166,00	
	3.31.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	8.613.600,00			-	-	-	-	14.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, KOPERASI, DAN USAHA MIKRO
	3.31.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	3.903.400,00	Kota Magelang, Magelang Selatan, Tidar Selatan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		5.500.000,00	DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, KOPERASI, DAN USAHA MIKRO
	3.31.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD														
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	368.900,00	Kota Magelang, Magelang Selatan, Tidar Selatan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	-		1.750.000,00	DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, KOPERASI, DAN USAHA MIKRO
	3.31.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD														
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	344.600,00	Kota Magelang, Magelang Selatan, Tidar Selatan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	-		1.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, KOPERASI, DAN USAHA MIKRO
	3.31.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD														
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	437.300,00	Kota Magelang, Magelang Selatan, Tidar Selatan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	-		1.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, KOPERASI, DAN USAHA MIKRO
	3.31.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD														
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	532.400,00	Kota Magelang, Magelang Selatan, Tidar Selatan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		1.500.000,00	DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, KOPERASI, DAN USAHA MIKRO
	3.31.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				19 Laporan	3.027.000,00	Kota Magelang, Magelang Selatan, Tidar Selatan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	-		3.250.000,00	DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, KOPERASI, DAN USAHA MIKRO
	3.31.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	10.385.467.536,00			-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	-	-	10.066.728.046,00	DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, KOPERASI, DAN USAHA MIKRO

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.31.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				55 Orang/ bulan	10.368.333.036,00	Kota Magelang, Magelang Selatan, Tidar Selatan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	-		10.004.228.046,00	DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, KOPERASI, DAN USAHA MIKRO
	3.31.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD				1200 Dokumen	2.832.600,00	Kota Magelang, Magelang Selatan, Tidar Selatan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	-		5.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, KOPERASI, DAN USAHA MIKRO
	3.31.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1.587.500,00	Kota Magelang, Magelang Selatan, Tidar Selatan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	-		2.500.000,00	DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, KOPERASI, DAN USAHA MIKRO
	3.31.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD				12 Laporan	12.714.400,00	Kota Magelang, Magelang Selatan, Tidar Selatan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	-		55.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, KOPERASI, DAN USAHA MIKRO
	3.31.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	91.308.325,00			-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	-	-	196.454.120,00	DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, KOPERASI, DAN USAHA MIKRO
	3.31.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	3.039.325,00	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	-		4.564.120,00	DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, KOPERASI, DAN USAHA MIKRO
	3.31.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				2 Paket	12.328.000,00	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	-		18.083.400,00	DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, KOPERASI, DAN USAHA MIKRO
	3.31.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	8.129.200,00	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	-		12.652.000,00	DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, KOPERASI, DAN USAHA MIKRO
	3.31.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material														
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				1 Paket	8.999.800,00	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	-		14.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, KOPERASI, DAN USAHA MIKRO
	3.31.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				10 Laporan	3.000.000,00	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	-		10.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, KOPERASI, DAN USAHA MIKRO
	3.31.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				23 Laporan	55.812.000,00	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola	-		137.154.600,00	DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN,

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
												Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif				KOPERASI, DAN USAHA MIKRO
	3.31.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	709.020.660,00			-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	-	-	883.500.000,00	DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, KOPERASI, DAN USAHA MIKRO
	3.31.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	475.400,00	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	-		1.500.000,00	DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, KOPERASI, DAN USAHA MIKRO
	3.31.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	482.141.184,00	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	-		532.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, KOPERASI, DAN USAHA MIKRO
	3.31.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	226.404.076,00	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	-		350.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, KOPERASI, DAN USAHA MIKRO
	3.31.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	477.944.200,00			-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	-	-	738.500.000,00	DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, KOPERASI, DAN USAHA MIKRO
	3.31.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				18 Unit	91.697.250,00	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	-		135.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, KOPERASI, DAN USAHA MIKRO
	3.31.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				55 Unit	275.438.000,00	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	-		400.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, KOPERASI, DAN USAHA MIKRO
	3.31.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				26 Unit	13.515.000,00	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	-		20.500.000,00	DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, KOPERASI, DAN USAHA MIKRO
	3.31.01.2.09.0008	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud														
			Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara				1 Unit	7.500.000,00	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	-		15.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, KOPERASI, DAN USAHA MIKRO
	3.31.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi				3 Unit	89.793.950,00	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	-		168.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, KOPERASI, DAN USAHA MIKRO
2.	3.31.02	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	-	-			-	1.444.868.033,00						-	1.735.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)			
											NASIONAL	DAERAH						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
	3.31.02.2.01	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	-	-			-	1.444.868.033,00			-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamis	-	-	1.735.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, KOPERASI, DAN USAHA MIKRO		
	3.31.02.2.01.0003	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri																
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri				1 Dokumen	68.205.300,00	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamis	-		100.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, KOPERASI, DAN USAHA MIKRO		
	3.31.02.2.01.0004	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri																
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri				2 Dokumen	630.301.338,00	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamis	-		750.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, KOPERASI, DAN USAHA MIKRO		
	3.31.02.2.01.0005	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat																
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat				7 Dokumen	723.841.195,00	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamis	-		850.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, KOPERASI, DAN USAHA MIKRO		
	3.31.02.2.01.0006	Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri																
			Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri				3 Dokumen	22.520.200,00	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamis	-		35.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, KOPERASI, DAN USAHA MIKRO		
3.	3.31.04	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	-	-			-	10.000.000,00						-	30.000.000,00			
	3.31.04.2.01	Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	-	-			-	10.000.000,00			-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamis	-	-	30.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, KOPERASI, DAN USAHA MIKRO		
	3.31.04.2.01.0001	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)																
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)				1 Dokumen	10.000.000,00	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamis	-		30.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, KOPERASI, DAN USAHA MIKRO		
		METROLOGI LEGAL							122.836.676,00								191.000.000,00	
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN							122.836.676,00						191.000.000,00			
	3.30	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN							122.836.676,00						191.000.000,00			
1.	3.30.06	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	-	-			-	122.836.676,00						-	191.000.000,00			
	3.30.06.2.01	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	-	-			-	122.836.676,00			-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamis	-	-	191.000.000,00	METROLOGI LEGAL		
	3.30.06.2.01.0001	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang																
			Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang				7430 Unit	101.811.676,00	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamis	-		150.000.000,00	METROLOGI LEGAL		
	3.30.06.2.01.0002	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal																
			Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina				100 Orang	21.025.000,00	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DAERAH (PAD) ASLI	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan	-		41.000.000,00	METROLOGI LEGAL		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
												Berintegritas dan Dinamis				
		BAGIAN PEMERINTAHAN						1.142.608.400,00							1.138.521.400,00	
	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN						1.142.608.400,00							1.138.521.400,00	
	4.01	SEKRETARIAT DAERAH						1.142.608.400,00							1.138.521.400,00	
1.	4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-			-	28.471.100,00						-	73.495.600,00	
	4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	25.101.100,00			-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	-	-	67.675.600,00	BAGIAN PEMERINTAHAN
	4.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	2.919.000,00	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	-		3.200.000,00	BAGIAN PEMERINTAHAN
	4.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				3 Paket	2.037.100,00	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	-		2.915.600,00	BAGIAN PEMERINTAHAN
	4.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	675.000,00	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	-		1.100.000,00	BAGIAN PEMERINTAHAN
	4.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				2 Laporan	19.470.000,00	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	-		60.460.000,00	BAGIAN PEMERINTAHAN
	4.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	0,00			-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	-	-	0,00	BAGIAN PEMERINTAHAN
	4.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				1 Unit	0,00	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	-		0,00	BAGIAN PEMERINTAHAN
	4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	3.370.000,00			-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	-	-	5.820.000,00	BAGIAN PEMERINTAHAN
	4.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				4 Unit	3.370.000,00	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	-		5.820.000,00	BAGIAN PEMERINTAHAN
2.	4.01.02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	-	-			-	1.114.137.300,00						-	1.065.025.800,00	
	4.01.02.2.01	Administrasi Tata Pemerintahan	Persentase capaian pelaksanaan administrasi pemerintahan	-			100 %	1.072.624.100,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan	Penguatan Landasan Tata Kelola	OPD	-	1.020.747.200,00	BAGIAN PEMERINTAHAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
											pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif					
	4.01.02.2.01.0001	Penataan Administrasi Pemerintahan															
			Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan				1 Dokumen	728.069.000,00	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	OPD		731.179.400,00	BAGIAN PEMERINTAHAN	
	4.01.02.2.01.0002	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan															
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan				1 Dokumen	99.006.900,00	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	OPD		44.013.600,00	BAGIAN PEMERINTAHAN	
	4.01.02.2.01.0003	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah															
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah				5 Dokumen	245.548.200,00	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	OPD		245.554.200,00	BAGIAN PEMERINTAHAN	
	4.01.02.2.04	Fasilitasi Kerja Sama Daerah	Persentase penyusunan kebijakan terkait kerjasama Capaian kinerja TKKSD (%)	-			100 Persen 100 Persen	41.513.200,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	OPD	-	44.278.600,00	BAGIAN PEMERINTAHAN	
	4.01.02.2.04.0001	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri															
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri				20 Dokumen	24.144.200,00	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	OPD		28.689.600,00	BAGIAN PEMERINTAHAN	
	4.01.02.2.04.0002	Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri															
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri				1 Dokumen	17.369.000,00	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	OPD		15.589.000,00	BAGIAN PEMERINTAHAN	
		BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT							2.256.758.392,00							3.935.563.000,00	
	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN							2.256.758.392,00						3.935.563.000,00		
	4.01	SEKRETARIAT DAERAH							2.256.758.392,00						3.935.563.000,00		
1.	4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-			-	28.871.297,00						-	30.588.000,00		
	4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	25.421.297,00			-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	-	-	27.138.000,00	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	
	4.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor															
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				5 Paket	3.794.000,00	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	-		4.000.000,00	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	
	4.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan															
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	2.788.000,00	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	-		3.000.000,00	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	
	4.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan															

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	1.440.000,00	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	-		1.440.000,00	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
	4.01.01.2.06.0008	Fasilitas Kunjungan Tamu														
			Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu				1 Laporan	675.000,00	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	-		900.000,00	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
	4.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				2 Laporan	16.724.297,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	-		17.798.000,00	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
	4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	3.450.000,00			-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	-	-	3.450.000,00	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
	4.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				5 Unit	3.450.000,00	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	-		3.450.000,00	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
2.	4.01.02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	undefined	undefined undefined			undefined undefined	2.227.887.095,00						undefined undefined	3.904.975.000,00	
	4.01.02.2.02	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Cakupan kebijakan kesejahteraan rakyat	-			100 %	2.227.887.095,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	OPD	-	3.904.975.000,00	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
	4.01.02.2.02.0001	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual														
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Pengelolaan Bina Mental Spiritual				2 Dokumen	2.054.090.522,00	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	OPD		3.610.498.000,00	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
	4.01.02.2.02.0002	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial														
			Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB				2 Dokumen	140.863.673,00	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	OPD		187.688.000,00	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
	4.01.02.2.02.0003	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat														
			Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas				2 Dokumen	32.932.900,00	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	OPD		106.789.000,00	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
		BAGIAN HUKUM						777.526.000,00							1.035.500.000,00	
	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN						777.526.000,00							1.035.500.000,00	
	4.01	SEKRETARIAT DAERAH						777.526.000,00							1.035.500.000,00	
1.	4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-			-	36.285.600,00						-	85.500.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	27.825.600,00			-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	-	-	47.200.000,00	BAGIAN HUKUM
	4.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Paket	2.965.600,00	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	-		3.500.000,00	BAGIAN HUKUM
	4.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				7 Paket	3.990.000,00	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	-		4.200.000,00	BAGIAN HUKUM
	4.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				2 Dokumen	1.200.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	-		2.000.000,00	BAGIAN HUKUM
	4.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				6 Laporan	1.920.000,00	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	-		2.500.000,00	BAGIAN HUKUM
	4.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				2 Laporan	17.750.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	-		35.000.000,00	BAGIAN HUKUM
	4.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	0,00			-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	-	-	25.000.000,00	BAGIAN HUKUM
	4.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				2 Unit	0,00	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	-		25.000.000,00	BAGIAN HUKUM
	4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	8.460.000,00			-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	-	-	13.300.000,00	BAGIAN HUKUM
	4.01.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel														
			Jumlah Mebel yang Dipelihara				6 Unit	2.250.000,00	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	-		4.500.000,00	BAGIAN HUKUM
	4.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				8 Unit	6.210.000,00	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	-		8.800.000,00	BAGIAN HUKUM

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2.	4.01.02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	-	-			-	741.240.400,00						-	950.000.000,00	
	4.01.02.2.03	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	-	-			-	741.240.400,00			-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	-	-	950.000.000,00	BAGIAN HUKUM
	4.01.02.2.03.0001	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah														
			Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun				800 Dokumen	255.405.000,00	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	-		380.000.000,00	BAGIAN HUKUM
	4.01.02.2.03.0002	Fasilitasi Bantuan Hukum														
			Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum				7 Kasus	343.516.900,00	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	-		350.000.000,00	BAGIAN HUKUM
	4.01.02.2.03.0003	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum														
			Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi				800 Dokumen	142.318.500,00	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	-		220.000.000,00	BAGIAN HUKUM
		BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM							612.318.600,00							
	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN							612.318.600,00							
	4.01	SEKRETARIAT DAERAH							612.318.600,00							
1.	4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-			-	77.783.800,00						-	170.000.000,00	
	4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	51.216.000,00			-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	-	-	72.000.000,00	BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM
	4.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				6 Paket	3.681.000,00	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	-		6.000.000,00	BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM
	4.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	1.873.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	-		3.000.000,00	BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM
	4.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				2 Dokumen	2.400.000,00	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	-		3.000.000,00	BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM
	4.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				2 Laporan	43.262.000,00	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	-		60.000.000,00	BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM
	4.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	21.857.800,00			-	Penguatan Landasan Tata Kelola	-	-	90.000.000,00	BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
												Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif				
	4.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				6 Unit	21.857.800,00	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	-		90.000.000,00	BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM
	4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	4.710.000,00			-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	-	-	8.000.000,00	BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM
	4.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				8 Unit	4.710.000,00	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	-		8.000.000,00	BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM
2.	4.01.03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	-	-			-	534.534.800,00						-	835.000.000,00	
	4.01.03.2.01	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	-	-			-	236.673.600,00			-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	-	-	350.000.000,00	BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM
	4.01.03.2.01.0001	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD				2 Dokumen	132.725.600,00	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	-		180.000.000,00	BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM
	4.01.03.2.01.0002	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian														
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian				2 Laporan	77.337.000,00	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	-		100.000.000,00	BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM
	4.01.03.2.01.0003	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil														
			Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil				3 Dokumen	26.611.000,00	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	-		70.000.000,00	BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM
	4.01.03.2.04	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	-	-			-	297.861.200,00			-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	-	-	485.000.000,00	BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM
	4.01.03.2.04.0001	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja				2 Dokumen	180.860.000,00	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	-		350.000.000,00	BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM
	4.01.03.2.04.0002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik, Persandian				12 Dokumen	96.263.200,00	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	-		90.000.000,00	BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM
	4.01.03.2.04.0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan				2 Dokumen	20.738.000,00	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	-		45.000.000,00	BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM
		BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN						669.266.350,00							926.084.000,00	
	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN						669.266.350,00							926.084.000,00	
	4.01	SEKRETARIAT DAERAH						669.266.350,00							926.084.000,00	
1.	4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-			-	64.045.225,00						-	119.270.000,00	
	4.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	15.724.725,00			-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	-	-	33.500.000,00	BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
	4.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2.800.500,00	Kota Magelang, Magelang Selatan, Magersari Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	-		6.000.000,00	BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
	4.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD														
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	2.324.475,00	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	-		5.000.000,00	BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
	4.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD														
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	2.037.000,00	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	-		5.500.000,00	BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
	4.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD														
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	2.004.750,00	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	-		3.000.000,00	BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
	4.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD														
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	2.089.500,00	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	-		4.000.000,00	BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
	4.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				12 Laporan	4.468.500,00	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	-		10.000.000,00	BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
	4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	20.560.500,00			-	-	-	-	51.400.000,00	BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
	4.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Paket	3.681.000,00	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		6.000.000,00	BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
	4.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	1.708.500,00	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan	-		3.000.000,00	BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
												Berintegritas dan Dinamistif				
	4.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	1.400.000,00	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		2.400.000,00	BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
	4.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	13.771.000,00	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	-		40.000.000,00	BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
	4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	27.760.000,00			-	-	-	-	34.370.000,00	BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
	4.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				4 Unit	2.760.000,00	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		4.370.000,00	BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
	4.01.01.2.09.0008	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud														
			Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara				1 Unit	25.000.000,00	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	-		30.000.000,00	BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
2.	4.01.03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Perekonomian dan SDA yang dilaksanakan Persentase progres fisik seluruh OPD Tingkat kematangan UKPBJ Persentase Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Perekonomian dan SDA yang dilaksanakan	99,20 % 3 level			100,00 % 99,20 % 3 level 100,00 %	605.221.125,00						99,20 % 3 level	806.814.000,00	
	4.01.03.2.02	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Cakupan Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	-			100 %	605.221.125,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	OPD	-	806.814.000,00	BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
	4.01.03.2.02.0001	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan														
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah				1 Dokumen	158.810.275,00	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	OPD		81.814.000,00	BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
	4.01.03.2.02.0002	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan														
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan				12 Laporan	395.741.950,00	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	OPD		650.000.000,00	BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
	4.01.03.2.02.0003	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan														
			Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan				36 Laporan	50.668.900,00	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra	-	OPD		75.000.000,00	BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
											produksi melalui peran aktif koperasi.					
		BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA						383.854.246,00							948.004.519,00	
	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN						383.854.246,00							948.004.519,00	
	4.01	SEKRETARIAT DAERAH						383.854.246,00							948.004.519,00	
1.	4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-			-	122.037.900,00						-	604.518.000,00	
	4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	100.557.900,00			-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	-	-	580.888.000,00	BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA
	4.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Paket	14.791.000,00	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	-		33.657.000,00	BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA
	4.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				7 Paket	8.926.900,00	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	-		31.912.000,00	BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA
	4.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	2.400.000,00	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	-		9.369.000,00	BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA
	4.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	2.000.000,00	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	-		2.200.000,00	BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA
	4.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				2 Laporan	72.440.000,00	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	-		503.750.000,00	BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA
	4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	21.480.000,00			-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	-	-	23.630.000,00	BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA
	4.01.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel														
			Jumlah Mebel yang Dipelihara				2 Unit	1.500.000,00	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	-		1.650.000,00	BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA
	4.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				20 Unit	19.980.000,00	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	-		21.980.000,00	BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA
2.	4.01.03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	-	-			-	261.816.346,00						-	343.486.519,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.01.03.2.03	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	-	-			-	261.816.346,00			-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	-	-	343.486.519,00	BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA
	4.01.03.2.03.0001	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa				12 Dokumen	110.355.346,00	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	-		180.343.519,00	BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA
	4.01.03.2.03.0002	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik														
			Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik				12 Dokumen	85.081.600,00	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	-		95.081.600,00	BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA
	4.01.03.2.03.0003	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa				54 Orang	66.379.400,00	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	-		68.061.400,00	BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA
		BAGIAN UMUM						34.257.720.079,00							34.787.188.777,00	
	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN						34.257.720.079,00							34.787.188.777,00	
	4.01	SEKRETARIAT DAERAH						34.257.720.079,00							34.787.188.777,00	
1.	4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah Persentase Perangkat Daerah dengan Tingkat Kematangan Organisasi Sedang Indeks Kepuasan Pimpinan (Prokompim) Indeks Kepuasan Pimpinan (Umum) Cakupan pelayanan administrasi umum	86,00 A Nilai 100 % 31,00 % 86,00 Nilai			A Nilai 31,00 % 86,00 Nilai 86,00 100 %	34.257.720.079,00						86,00 A Nilai 100 % 31,00 % 86,00 Nilai	34.787.188.777,00	
	4.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	23.741.457.660,00			-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	-	-	23.789.158.447,00	BAGIAN UMUM
	4.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				148 Orang/ bulan	23.674.459.660,00	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	-		23.712.158.447,00	BAGIAN UMUM
	4.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD				28 Laporan	66.998.000,00	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	-		77.000.000,00	BAGIAN UMUM
	4.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-			-	30.300.300,00			-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	-	-	33.330.330,00	BAGIAN UMUM
	4.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya														
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				5 Paket	16.300.300,00	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	-		17.930.330,00	BAGIAN UMUM
	4.01.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				12 Dokumen	14.000.000,00	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	-		15.400.000,00	BAGIAN UMUM
	4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	3.348.689.800,00			-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	-	-	3.595.700.000,00	BAGIAN UMUM
	4.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				12 Paket	69.994.800,00	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	-		77.000.000,00	BAGIAN UMUM
	4.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	397.975.900,00	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	-		437.800.000,00	BAGIAN UMUM
	4.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				12 Paket	79.998.600,00	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	-		85.000.000,00	BAGIAN UMUM
	4.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				4 Paket	42.998.800,00	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	-		47.300.000,00	BAGIAN UMUM
	4.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				3 Paket	73.000.000,00	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	-		80.300.000,00	BAGIAN UMUM
	4.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				2 Dokumen	2.970.000,00	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	-		3.300.000,00	BAGIAN UMUM
	4.01.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material														
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				1 Paket	98.999.700,00	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	-		100.000.000,00	BAGIAN UMUM
	4.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	1.400.000.000,00	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	-		1.410.000.000,00	BAGIAN UMUM
	4.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	1.182.752.000,00	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan	-		1.355.000.000,00	BAGIAN UMUM

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
												Berintegritas dan Dinamistif				
	4.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	117.500.000,00			-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	-	-	220.000.000,00	BAGIAN UMUM
	4.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel														
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				4 Unit	80.000.000,00	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	-		90.000.000,00	BAGIAN UMUM
	4.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				20 Unit	37.500.000,00	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	-		130.000.000,00	BAGIAN UMUM
	4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	2.732.044.881,00			-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	-	-	2.852.000.000,00	BAGIAN UMUM
	4.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	37.999.500,00	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	-		40.000.000,00	BAGIAN UMUM
	4.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	1.804.997.250,00	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	-		1.810.000.000,00	BAGIAN UMUM
	4.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	889.048.131,00	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	-		1.002.000.000,00	BAGIAN UMUM
	4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	2.290.208.000,00			-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	-	-	2.370.000.000,00	BAGIAN UMUM
	4.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				45 Unit	770.000.000,00	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	-		780.000.000,00	BAGIAN UMUM
	4.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				65 Unit	520.000.000,00	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	-		525.000.000,00	BAGIAN UMUM
	4.01.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel														
			Jumlah Mebel yang Dipelihara				30 Unit	30.000.000,00	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan	-		35.000.000,00	BAGIAN UMUM

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
												Berintegritas dan Dinamistif				
	4.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				60 Unit	70.000.000,00	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	-		75.000.000,00	BAGIAN UMUM
	4.01.01.2.09.0008	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud														
			Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara				1 Unit	0,00	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	-		5.000.000,00	BAGIAN UMUM
	4.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi				8 Unit	900.208.000,00	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	-		950.000.000,00	BAGIAN UMUM
	4.01.01.2.11	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	-	-			-	897.705.492,00			-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	-	-	962.000.000,00	BAGIAN UMUM
	4.01.01.2.11.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				2Orang/ bulan	182.705.492,00	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	-		190.000.000,00	BAGIAN UMUM
	4.01.01.2.11.0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah														
			Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan				4 Paket	105.000.000,00	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	-		110.000.000,00	BAGIAN UMUM
	4.01.01.2.11.0003	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				4 Orang	10.000.000,00	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	-		12.000.000,00	BAGIAN UMUM
	4.01.01.2.11.0004	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah														
			Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				2Orang/ bulan	600.000.000,00	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	-		650.000.000,00	BAGIAN UMUM
	4.01.01.2.12	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	-	-			-	1.099.813.946,00			-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	-	-	965.000.000,00	BAGIAN UMUM
	4.01.01.2.12.0001	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah														
			Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan				12 Paket	599.352.246,00	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	-		510.000.000,00	BAGIAN UMUM
	4.01.01.2.12.0002	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan				12 Paket	324.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	-		270.000.000,00	BAGIAN UMUM
	4.01.01.2.12.0003	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah														
			Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan				9 Paket	176.461.700,00	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	-		185.000.000,00	BAGIAN UMUM
		BAGIAN ORGANISASI						468.118.700,00							746.039.000,00	
	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN						468.118.700,00							746.039.000,00	
	4.01	SEKRETARIAT DAERAH						468.118.700,00							746.039.000,00	
1.	4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-			-	468.118.700,00						-	746.039.000,00	
	4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	41.073.500,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	Bagian Organisasi	-	66.909.000,00	BAGIAN ORGANISASI
	4.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				4 Paket	6.391.000,00	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	Bagian Organisasi		6.715.000,00	BAGIAN ORGANISASI
	4.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				4 Paket	1.666.500,00	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	Bagian Organisasi		2.333.000,00	BAGIAN ORGANISASI
	4.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				2 Dokumen	2.640.000,00	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	Bagian Organisasi		2.772.000,00	BAGIAN ORGANISASI
	4.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				4 Laporan	2.280.000,00	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	Bagian Organisasi		3.192.000,00	BAGIAN ORGANISASI
	4.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				4 Laporan	28.096.000,00	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	Bagian Organisasi		51.897.000,00	BAGIAN ORGANISASI
	4.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	0,00			-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	-	-	0,00	BAGIAN ORGANISASI
	4.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				1 Unit	0,00	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	-		0,00	BAGIAN ORGANISASI

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan pemeliharaan barang milik daerah (CPBMD) penunjang urusan pemerintahan daerah	-			100 %	4.180.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	Bagian Organisasi	-	5.600.000,00	BAGIAN ORGANISASI
	4.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				8 Unit	4.180.000,00	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	Bagian Organisasi		5.600.000,00	BAGIAN ORGANISASI
	4.01.01.2.13	Penataan Organisasi	-	-			-	422.865.200,00			-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	OPD	-	673.530.000,00	BAGIAN ORGANISASI
	4.01.01.2.13.0001	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan														
			Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan				2 Dokumen	103.578.500,00	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	OPD		244.575.000,00	BAGIAN ORGANISASI
	4.01.01.2.13.0002	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana														
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana				2 Laporan	78.358.000,00	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	OPD		147.136.000,00	BAGIAN ORGANISASI
	4.01.01.2.13.0003	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi														
			Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi				2 Dokumen	240.928.700,00	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	OPD		281.819.000,00	BAGIAN ORGANISASI
		BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN						1.636.125.041,00							2.277.000.000,00	
	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN						1.636.125.041,00							2.277.000.000,00	
	4.01	SEKRETARIAT DAERAH						1.636.125.041,00							2.277.000.000,00	
1.	4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-			-	1.636.125.041,00						-	2.277.000.000,00	
	4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	79.596.600,00			-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	-	-	114.000.000,00	BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN
	4.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	3.690.000,00	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	-		4.000.000,00	BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN
	4.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	3.026.600,00	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	-		6.000.000,00	BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN
	4.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	39.740.000,00	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	-		42.000.000,00	BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				2 Laporan	950.000,00	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	-		2.000.000,00	BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN
	4.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	32.190.000,00	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	-		60.000.000,00	BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN
	4.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	0,00			-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	-	-	50.000.000,00	BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN
	4.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				2 Unit	0,00	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	-		50.000.000,00	BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN
	4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	11.364.000,00			-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	-	-	13.000.000,00	BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN
	4.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				15 Unit	11.364.000,00	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	-		13.000.000,00	BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN
	4.01.01.2.14	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	-	-			-	1.545.164.441,00			-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	-	-	2.100.000.000,00	BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN
	4.01.01.2.14.0001	Fasilitasi Keprotokolan														
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan				12 Laporan	484.947.373,00	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	-		500.000.000,00	BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN
	4.01.01.2.14.0002	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan														
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan				12 Laporan	799.342.803,00	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	-		1.200.000.000,00	BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN
	4.01.01.2.14.0003	Pendokumentasian Tugas Pimpinan														
			Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan				12 Laporan	260.874.265,00	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	-		400.000.000,00	BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN
		SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH						31.234.635.482,00							50.699.847.000,00	
	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN						31.234.635.482,00							50.699.847.000,00	
	4.02	SEKRETARIAT DPRD						31.234.635.482,00							50.699.847.000,00	
1.	4.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-			-	26.077.411.482,00						-	40.191.515.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	4.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	19.466.000,00			-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	-	-	20.550.000,00	SEKRETARIAT PERWAKILAN DAERAH	DEWAN RAKYAT
	4.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah															
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	4.298.000,00	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	-		4.590.000,00	SEKRETARIAT PERWAKILAN DAERAH	DEWAN RAKYAT
	4.02.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD															
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	2.328.000,00	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	-		2.550.000,00	SEKRETARIAT PERWAKILAN DAERAH	DEWAN RAKYAT
	4.02.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD															
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	2.895.000,00	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	-		2.970.000,00	SEKRETARIAT PERWAKILAN DAERAH	DEWAN RAKYAT
	4.02.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD															
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	2.597.000,00	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	-		2.790.000,00	SEKRETARIAT PERWAKILAN DAERAH	DEWAN RAKYAT
	4.02.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD															
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	1.927.000,00	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	-		1.950.000,00	SEKRETARIAT PERWAKILAN DAERAH	DEWAN RAKYAT
	4.02.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD															
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				17 Laporan	5.421.000,00	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	-		5.700.000,00	SEKRETARIAT PERWAKILAN DAERAH	DEWAN RAKYAT
	4.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	4.172.442.106,00			-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	-	-	3.982.900.000,00	SEKRETARIAT PERWAKILAN DAERAH	DEWAN RAKYAT
	4.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN															
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				22 Orang/ bulan	4.055.630.046,00	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	-		3.850.000.000,00	SEKRETARIAT PERWAKILAN DAERAH	DEWAN RAKYAT
	4.02.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD															
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	894.300,00	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	-		900.000,00	SEKRETARIAT PERWAKILAN DAERAH	DEWAN RAKYAT
	4.02.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD															
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD				13 Laporan	115.917.760,00	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan	-		132.000.000,00	SEKRETARIAT PERWAKILAN DAERAH	DEWAN RAKYAT

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
												Berintegritas dan Dinamistif					
	4.02.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-			-	7.372.000,00			-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	-	-	7.470.000,00	SEKRETARIAT PERWAKILAN DAERAH	DEWAN RAKYAT
	4.02.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD															
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				14 Laporan	7.372.000,00	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	-		7.470.000,00	SEKRETARIAT PERWAKILAN DAERAH	DEWAN RAKYAT
	4.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-			-	155.513.000,00			-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	-	-	240.600.000,00	SEKRETARIAT PERWAKILAN DAERAH	DEWAN RAKYAT
	4.02.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian															
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				22 Dokumen	5.513.000,00	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	-		5.600.000,00	SEKRETARIAT PERWAKILAN DAERAH	DEWAN RAKYAT
	4.02.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi															
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				16 Orang	150.000.000,00	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	-		235.000.000,00	SEKRETARIAT PERWAKILAN DAERAH	DEWAN RAKYAT
	4.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	970.753.400,00			-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	-	-	3.455.600.000,00	SEKRETARIAT PERWAKILAN DAERAH	DEWAN RAKYAT
	4.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor															
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				12 Paket	21.113.000,00	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	-		25.000.000,00	SEKRETARIAT PERWAKILAN DAERAH	DEWAN RAKYAT
	4.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor															
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Paket	158.662.500,00	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	-		229.600.000,00	SEKRETARIAT PERWAKILAN DAERAH	DEWAN RAKYAT
	4.02.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga															
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				6 Paket	6.018.400,00	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	-		6.500.000,00	SEKRETARIAT PERWAKILAN DAERAH	DEWAN RAKYAT
	4.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor															
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Paket	50.836.000,00	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	-		54.000.000,00	SEKRETARIAT PERWAKILAN DAERAH	DEWAN RAKYAT
	4.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan															
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	23.062.500,00	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan	-		25.000.000,00	SEKRETARIAT PERWAKILAN DAERAH	DEWAN RAKYAT

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
												Berintegritas dan Dinamistif					
	4.02.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan															
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	7.200.000,00	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	-		7.300.000,00	SEKRETARIAT PERWAKILAN DAERAH	DEWAN RAKYAT
	4.02.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material															
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				12 Paket	74.421.000,00	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	-		76.000.000,00	SEKRETARIAT PERWAKILAN DAERAH	DEWAN RAKYAT
	4.02.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu															
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	124.490.000,00	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	-		126.700.000,00	SEKRETARIAT PERWAKILAN DAERAH	DEWAN RAKYAT
	4.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD															
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	499.892.000,00	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	-		2.900.000.000,00	SEKRETARIAT PERWAKILAN DAERAH	DEWAN RAKYAT
	4.02.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD															
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				12 Dokumen	5.058.000,00	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	-		5.500.000,00	SEKRETARIAT PERWAKILAN DAERAH	DEWAN RAKYAT
	4.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	33.858.200,00			-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	-	-	320.000.000,00	SEKRETARIAT PERWAKILAN DAERAH	DEWAN RAKYAT
	4.02.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel															
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				1 Unit	3.858.200,00	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	-		50.000.000,00	SEKRETARIAT PERWAKILAN DAERAH	DEWAN RAKYAT
	4.02.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya															
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				2 Unit	30.000.000,00	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	-		270.000.000,00	SEKRETARIAT PERWAKILAN DAERAH	DEWAN RAKYAT
	4.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	818.710.616,00			-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	-	-	998.150.000,00	SEKRETARIAT PERWAKILAN DAERAH	DEWAN RAKYAT
	4.02.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat															
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	6.663.000,00	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	-		7.250.000,00	SEKRETARIAT PERWAKILAN DAERAH	DEWAN RAKYAT
	4.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik															

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>				12 Laporan	240.915.816,00	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	-		270.000.000,00	SEKRETARIAT PERWAKILAN DAERAH	DEWAN RAKYAT
	4.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor															
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>				12 Laporan	571.131.800,00	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	-		720.900.000,00	SEKRETARIAT PERWAKILAN DAERAH	DEWAN RAKYAT
	4.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	530.308.750,00			-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	-	-	1.105.045.000,00	SEKRETARIAT PERWAKILAN DAERAH	DEWAN RAKYAT
	4.02.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan															
			<i>Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya</i>				13 Unit	220.108.750,00	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	-		226.800.000,00	SEKRETARIAT PERWAKILAN DAERAH	DEWAN RAKYAT
	4.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan															
			<i>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya</i>				16 Unit	116.910.000,00	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	-		134.800.000,00	SEKRETARIAT PERWAKILAN DAERAH	DEWAN RAKYAT
	4.02.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel															
			<i>Jumlah Mebel yang Dipelihara</i>				4 Unit	6.600.000,00	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	-		6.600.000,00	SEKRETARIAT PERWAKILAN DAERAH	DEWAN RAKYAT
	4.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya															
			<i>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara</i>				58 Unit	83.374.000,00	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	-		86.845.000,00	SEKRETARIAT PERWAKILAN DAERAH	DEWAN RAKYAT
	4.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya															
			<i>Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi</i>				2 Unit	103.316.000,00	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	-		650.000.000,00	SEKRETARIAT PERWAKILAN DAERAH	DEWAN RAKYAT
	4.02.01.2.15	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	-	-			-	17.558.813.790,00			-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	-	-	17.647.500.000,00	SEKRETARIAT PERWAKILAN DAERAH	DEWAN RAKYAT
	4.02.01.2.15.0001	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD															
			<i>Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD</i>				25 Orang/ bulan	17.295.674.790,00	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	-		17.270.000.000,00	SEKRETARIAT PERWAKILAN DAERAH	DEWAN RAKYAT
	4.02.01.2.15.0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD															
			<i>Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan</i>				4 Paket	223.139.000,00	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	-		315.000.000,00	SEKRETARIAT PERWAKILAN DAERAH	DEWAN RAKYAT

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	4.02.01.2.15.0003	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD															
			Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD				25 Orang	40.000.000,00	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	-		62.500.000,00	SEKRETARIAT PERWAKILAN DAERAH	DEWAN RAKYAT
	4.02.01.2.16	Layanan Administrasi DPRD	-	-			-	1.810.173.620,00			-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	-	-	12.413.700.000,00	SEKRETARIAT PERWAKILAN DAERAH	DEWAN RAKYAT
	4.02.01.2.16.0001	Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD															
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD				3 Dokumen	104.825.000,00	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	-		105.700.000,00	SEKRETARIAT PERWAKILAN DAERAH	DEWAN RAKYAT
	4.02.01.2.16.0003	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD															
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD				12 Laporan	1.420.950.620,00	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	-		12.000.000.000,00	SEKRETARIAT PERWAKILAN DAERAH	DEWAN RAKYAT
	4.02.01.2.16.0004	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD															
			Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang Disediakan				12 Paket	284.398.000,00	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	-		308.000.000,00	SEKRETARIAT PERWAKILAN DAERAH	DEWAN RAKYAT
2.	4.02.02	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	-	-			-	5.157.224.000,00						-	10.508.332.000,00		
	4.02.02.2.01	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	-	-			-	731.110.500,00			-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	-	-	2.906.462.000,00	SEKRETARIAT PERWAKILAN DAERAH	DEWAN RAKYAT
	4.02.02.2.01.0001	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah															
			Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah				7 Dokumen	23.819.000,00	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	-		225.000.000,00	SEKRETARIAT PERWAKILAN DAERAH	DEWAN RAKYAT
	4.02.02.2.01.0002	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah															
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah				7 Dokumen	613.877.500,00	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	-		2.587.512.000,00	SEKRETARIAT PERWAKILAN DAERAH	DEWAN RAKYAT
	4.02.02.2.01.0003	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan															
			Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan				1 Dokumen	93.414.000,00	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	-		93.950.000,00	SEKRETARIAT PERWAKILAN DAERAH	DEWAN RAKYAT
	4.02.02.2.02	Pembahasan Kebijakan Anggaran	-	-			-	98.421.000,00			-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	-	-	99.370.000,00	SEKRETARIAT PERWAKILAN DAERAH	DEWAN RAKYAT
	4.02.02.2.02.0001	Pembahasan KUA dan PPAS															
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS				1 Dokumen	27.103.000,00	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola	-		27.500.000,00	SEKRETARIAT PERWAKILAN DAERAH	DEWAN RAKYAT

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
												Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif					
	4.02.02.2.02.0002	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS															
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS				1 Dokumen	27.200.000,00	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	-		27.500.000,00	SEKRETARIAT PERWAKILAN DAERAH	DEWAN RAKYAT
	4.02.02.2.02.0003	Pembahasan APBD															
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD				1 Dokumen	13.746.000,00	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	-		13.800.000,00	SEKRETARIAT PERWAKILAN DAERAH	DEWAN RAKYAT
	4.02.02.2.02.0004	Pembahasan APBD Perubahan															
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan				1 Dokumen	13.773.000,00	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	-		13.870.000,00	SEKRETARIAT PERWAKILAN DAERAH	DEWAN RAKYAT
	4.02.02.2.02.0006	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD															
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD				1 Dokumen	16.599.000,00	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	-		16.700.000,00	SEKRETARIAT PERWAKILAN DAERAH	DEWAN RAKYAT
	4.02.02.2.03	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	-	-			-	396.846.000,00			-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	-	-	399.500.000,00	SEKRETARIAT PERWAKILAN DAERAH	DEWAN RAKYAT
	4.02.02.2.03.0001	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum															
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum				1 Laporan	96.932.000,00	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	-		97.500.000,00	SEKRETARIAT PERWAKILAN DAERAH	DEWAN RAKYAT
	4.02.02.2.03.0002	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur															
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur				1 Laporan	96.932.000,00	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	-		97.500.000,00	SEKRETARIAT PERWAKILAN DAERAH	DEWAN RAKYAT
	4.02.02.2.03.0004	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian															
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian				1 Laporan	96.932.000,00	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	-		97.500.000,00	SEKRETARIAT PERWAKILAN DAERAH	DEWAN RAKYAT
	4.02.02.2.03.0006	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan															
			Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan				1 Dokumen	9.118.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	-		9.500.000,00	SEKRETARIAT PERWAKILAN DAERAH	DEWAN RAKYAT
	4.02.02.2.03.0007	Pengawasan Penggunaan Anggaran															
			Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran				1 Dokumen	96.932.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	-		97.500.000,00	SEKRETARIAT PERWAKILAN DAERAH	DEWAN RAKYAT

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	4.02.02.2.04	Peningkatan Kapasitas DPRD	-	-			-	2.219.789.000,00			-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	-	-	4.106.800.000,00	SEKRETARIAT PERWAKILAN DAERAH	DEWAN RAKYAT
	4.02.02.2.04.0002	Pendalaman Tugas DPRD															
			Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD				6 Dokumen	1.188.970.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	-		2.200.000.000,00	SEKRETARIAT PERWAKILAN DAERAH	DEWAN RAKYAT
	4.02.02.2.04.0004	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli															
			Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli				57 Orang	257.862.000,00	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	-		270.000.000,00	SEKRETARIAT PERWAKILAN DAERAH	DEWAN RAKYAT
	4.02.02.2.04.0005	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi															
			Jumlah Tenaga Ahli Fraksi				6 Orang	268.761.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	-		280.000.000,00	SEKRETARIAT PERWAKILAN DAERAH	DEWAN RAKYAT
	4.02.02.2.04.0007	Penyusunan Program Kerja DPRD															
			Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD				2 Dokumen	6.722.000,00	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	-		6.800.000,00	SEKRETARIAT PERWAKILAN DAERAH	DEWAN RAKYAT
	4.02.02.2.04.0008	Publikasi dan Dokumentasi DPRD															
			Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD				12 Dokumen	497.474.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	-		1.350.000.000,00	SEKRETARIAT PERWAKILAN DAERAH	DEWAN RAKYAT
	4.02.02.2.05	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	-	-			-	1.098.085.500,00			-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	-	-	1.190.000.000,00	SEKRETARIAT PERWAKILAN DAERAH	DEWAN RAKYAT
	4.02.02.2.05.0002	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD															
			Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun				2 Dokumen	409.832.500,00	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	-		440.000.000,00	SEKRETARIAT PERWAKILAN DAERAH	DEWAN RAKYAT
	4.02.02.2.05.0003	Pelaksanaan Reses															
			Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses				3 Dokumen	688.253.000,00	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	-		750.000.000,00	SEKRETARIAT PERWAKILAN DAERAH	DEWAN RAKYAT
	4.02.02.2.08	Fasilitasi Tugas DPRD	-	-			-	612.972.000,00			-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	-	-	1.806.200.000,00	SEKRETARIAT PERWAKILAN DAERAH	DEWAN RAKYAT
	4.02.02.2.08.0001	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD															
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD				12 Dokumen	607.140.000,00	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	-		1.800.000.000,00	SEKRETARIAT PERWAKILAN DAERAH	DEWAN RAKYAT

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.02.02.2.08.0002	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD														
			Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun				1 Laporan	5.832.000,00	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	-		6.200.000,00	SEKRETARIAT PERWAKILAN DAERAH DEWAN RAKYAT
		BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET, DAN INOVASI DAERAH						8.871.094.938,00							8.519.418.885,00	
	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN						8.871.094.938,00							8.519.418.885,00	
	5.01	PERENCANAAN						8.155.202.478,00							7.803.418.885,00	
1.	5.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pelayanan internal perangkat daerah yang berkualitas	-			85,00 %	7.553.644.688,00						-	7.042.648.552,00	
	5.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Cakupan ketersediaan dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja PD	-			100 %	4.310.300,00			-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	-	-	0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET, DAN INOVASI DAERAH
	5.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2.107.400,00	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	-		0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET, DAN INOVASI DAERAH
	5.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD														
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	211.800,00	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	-		0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET, DAN INOVASI DAERAH
	5.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD														
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	211.800,00	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	-		0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET, DAN INOVASI DAERAH
	5.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD														
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	489.100,00	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	-		0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET, DAN INOVASI DAERAH
	5.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD														
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	266.100,00	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	-		0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET, DAN INOVASI DAERAH
	5.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				6 Laporan	1.024.100,00	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	-		0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET, DAN INOVASI DAERAH
	5.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan laporan administrasi keuangan Perangkat Daerah sesuai aturan	-			100 %	6.759.218.951,00			-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	-	-	7.042.648.552,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET, DAN INOVASI DAERAH
	5.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				38 Orang/ bulan	6.716.801.321,00	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan	-		7.000.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET, DAN INOVASI DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
												Berintegritas dan Dinamistif				
	5.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	40.613.630,00	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	-		40.131.552,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET, DAN INOVASI DAERAH
	5.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1.274.000,00	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	-		1.274.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET, DAN INOVASI DAERAH
	5.01.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran														
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				1 Dokumen	530.000,00	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	-		1.243.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET, DAN INOVASI DAERAH
	5.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-			-	3.764.200,00			-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	-	-	0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET, DAN INOVASI DAERAH
	5.01.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD														
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	3.764.200,00	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	-		0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET, DAN INOVASI DAERAH
	5.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-			-	4.944.200,00			-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	-	-	0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET, DAN INOVASI DAERAH
	5.01.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian														
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				1 Dokumen	4.944.200,00	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	-		0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET, DAN INOVASI DAERAH
	5.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Penyelenggaraan administrasi umum perangkat daerah	-			100 %	165.464.850,00			-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	-	-	0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET, DAN INOVASI DAERAH
	5.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				28 Paket	12.341.450,00	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	-		0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET, DAN INOVASI DAERAH
	5.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				49 Paket	36.288.000,00	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	-		0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET, DAN INOVASI DAERAH
	5.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				15 Paket	7.438.100,00	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan	-		0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET, DAN INOVASI DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
												Berintegritas dan Dinamistif				
	5.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				3 Dokumen	5.640.000,00	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	-		0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET, DAN INOVASI DAERAH
	5.01.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material														
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				30 Paket	14.799.500,00	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	-		0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET, DAN INOVASI DAERAH
	5.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	4.320.000,00	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	-		0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET, DAN INOVASI DAERAH
	5.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				78 Laporan	81.194.000,00	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	-		0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET, DAN INOVASI DAERAH
	5.01.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				12 Dokumen	3.443.800,00	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	-		0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET, DAN INOVASI DAERAH
	5.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-			100 %	253.630.587,00			-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	-	-	0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET, DAN INOVASI DAERAH
	5.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				4 Laporan	1.552.200,00	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	-		0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET, DAN INOVASI DAERAH
	5.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				3 Laporan	119.971.477,00	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	-		0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET, DAN INOVASI DAERAH
	5.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				8 Laporan	132.106.910,00	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	-		0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET, DAN INOVASI DAERAH
	5.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	-			100 %	362.311.600,00			-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	-	-	0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET, DAN INOVASI DAERAH
	5.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				9 Unit	205.864.000,00	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	-		0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET, DAN INOVASI DAERAH
	5.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				19 Unit	64.403.000,00	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	-		0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET, DAN INOVASI DAERAH
	5.01.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel														
			Jumlah Mebel yang Dipelihara				5 Unit	3.000.000,00	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	-		0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET, DAN INOVASI DAERAH
	5.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				14 Unit	49.464.600,00	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	-		0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET, DAN INOVASI DAERAH
	5.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi				2 Unit	39.580.000,00	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	-		0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET, DAN INOVASI DAERAH
2.	5.01.02	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Cakupan perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah yang berkualitas	95,89 %			95,89 %	232.267.530,00						95,89 %	275.550.010,00	
	5.01.02.2.01	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Persentase elemen pembangunan yang terlibat dalam penyusunan rencana pembangunan	85 %			85 %	164.947.330,00			-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	-	85 %	194.440.520,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET, DAN INOVASI DAERAH
	5.01.02.2.01.0003	Pelaksanaan Konsultasi Publik														
			Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik				1 Berita Acara	21.082.600,00	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	-		24.757.590,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET, DAN INOVASI DAERAH
	5.01.02.2.01.0004	Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah														
			Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah				1 Berita Acara	4.025.000,00	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	-		4.427.500,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET, DAN INOVASI DAERAH
	5.01.02.2.01.0005	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota														
			Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota				1 Berita Acara	49.942.600,00	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	-		57.168.430,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET, DAN INOVASI DAERAH
	5.01.02.2.01.0007	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)				2 Dokumen	89.897.130,00	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	-		108.087.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET, DAN INOVASI DAERAH
	5.01.02.2.02	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase ketersediaan data dukung perencanaan	96 %			96 %	52.460.200,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan,	Penguatan Landasan Tata Kelola	Produsen Data, Pengguna Data	96 %	69.784.550,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET, DAN INOVASI DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
											kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif				
	5.01.02.2.02.0002	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah														
			Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi				60 Orang	52.460.200,00	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	Produsen Data, Pengguna Data		69.784.550,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET, DAN INOVASI DAERAH
	5.01.02.2.03	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase rekomendasi yang dihasilkan dalev	85 %			85 %	14.860.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	-	85 %	11.324.940,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET, DAN INOVASI DAERAH
	5.01.02.2.03.0001	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota														
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan				2 Laporan	14.860.000,00	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	-		11.324.940,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET, DAN INOVASI DAERAH
3.	5.01.03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	-	-			-	369.290.260,00						-	485.220.323,00	
	5.01.03.2.01	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	-	100 %			-	195.994.130,00			-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	-	100 %	241.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET, DAN INOVASI DAERAH
	5.01.03.2.01.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)				2 Dokumen	22.189.000,00	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	-		24.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET, DAN INOVASI DAERAH
	5.01.03.2.01.0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan														
			Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan				1 Laporan	47.774.700,00	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	-		85.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET, DAN INOVASI DAERAH
	5.01.03.2.01.0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)				2 Dokumen	34.874.000,00	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing dan Berkarakter	-		37.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET, DAN INOVASI DAERAH
	5.01.03.2.01.0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia														
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia				1 Laporan	91.156.430,00	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing dan Berkarakter	-		95.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET, DAN INOVASI DAERAH
	5.01.03.2.02	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	-	100 %			-	81.849.500,00			-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamis	-	100 %	137.375.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET, DAN INOVASI DAERAH
	5.01.03.2.02.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)				1 Dokumen	18.261.800,00	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamis	-		25.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET, DAN INOVASI DAERAH
	5.01.03.2.02.0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian														
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian				1 Laporan	21.661.600,00	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamis	-		53.375.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET, DAN INOVASI DAERAH
	5.01.03.2.02.0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)				1 Dokumen	12.462.800,00	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Perekonomian yang Berdaya Saing, Inklusif, dan Berkelanjutan	-		20.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET, DAN INOVASI DAERAH
	5.01.03.2.02.0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA														
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA				1 Laporan	29.463.300,00	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Perekonomian yang Berdaya Saing, Inklusif, dan Berkelanjutan	-		39.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET, DAN INOVASI DAERAH
	5.01.03.2.03	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	-	100 %			-	91.446.630,00			-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamis	-	100 %	106.845.323,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET, DAN INOVASI DAERAH
	5.01.03.2.03.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)				1 Dokumen	16.289.300,00	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamis	-		22.248.700,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET, DAN INOVASI DAERAH
	5.01.03.2.03.0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur														
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur				1 Laporan	75.157.330,00	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamis	-		84.596.623,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET, DAN INOVASI DAERAH
	5.05	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN						715.892.460,00							716.000.000,00	
1.	5.05.02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	-	-			-	715.892.460,00						-	716.000.000,00	
	5.05.02.2.01	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	-	-			-	339.494.500,00			-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	-	-	316.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET, DAN INOVASI DAERAH
	5.05.02.2.01.0005	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi														
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi				2 Laporan	83.283.500,00	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	-		86.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET, DAN INOVASI DAERAH
	5.05.02.2.01.0013	Perumusan Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan														
			Jumlah Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan yang Diterbitkan				4 Rekomendasi	256.211.000,00	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	-		230.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET, DAN INOVASI DAERAH
	5.05.02.2.04	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	-	-			-	376.397.960,00			-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan	-	-	400.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET, DAN INOVASI DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
												Berintegritas dan Dinamistif				
	5.05.02.2.04.0001	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi</i>				1 Dokumen	130.616.030,00	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	-		150.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET, DAN INOVASI DAERAH
	5.05.02.2.04.0003	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif														
			<i>Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif</i>				2 Laporan	150.267.000,00	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	-		140.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET, DAN INOVASI DAERAH
	5.05.02.2.04.0004	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan														
			<i>Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan</i>				2 Laporan	71.143.930,00	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	-		80.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET, DAN INOVASI DAERAH
	5.05.02.2.04.0005	Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual														
			<i>Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual</i>				1 Laporan	24.371.000,00	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	-		30.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET, DAN INOVASI DAERAH
		BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH						24.001.302.442,00							22.849.630.361,00	
	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN						24.001.302.442,00							22.849.630.361,00	
	5.02	KEUANGAN						24.001.302.442,00							22.849.630.361,00	
1.	5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	<i>Tingkat Pemenuhan Kebutuhan (TPK) Perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja, administrasi keuangan, administrasi kepegawaian, administrasi umum, penyediaan jasa penunjang urusan Pemda, serta pemeliharaan BMD OPD dan Barang Pengelola penunjang urusan Pemda sesuai ketentuan</i>	100,00 %			100,00 %	15.414.730.066,00						100,00 %	13.016.359.960,00	
	5.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	<i>Cakupan ketersediaan (CK) dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja PD</i>	-			100 %	20.661.200,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	BPKAD Kota Magelang	-	29.944.320,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>				6 Dokumen	5.143.200,00	Kota Magelang, Magelang Selatan, Magersari	PENDAPATAN DAERAH (PAD) ASLI	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	BPKAD Kota Magelang		7.401.345,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD														
			<i>Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD</i>				1 Dokumen	1.622.000,00	Kota Magelang, Magelang Selatan, Magersari	PENDAPATAN DAERAH (PAD) ASLI	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	BPKAD Kota Magelang		2.734.935,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD														
			<i>Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD</i>				1 Dokumen	2.303.400,00	Kota Magelang, Magelang Selatan, Magersari	PENDAPATAN DAERAH (PAD) ASLI	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	BPKAD Kota Magelang		3.289.545,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD														
			<i>Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD</i>				1 Dokumen	2.289.500,00	Kota Magelang, Magelang Selatan, Magersari	PENDAPATAN DAERAH (PAD) ASLI	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi,	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan	BPKAD Kota Magelang		3.046.575,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
											narkoba, judi, dan penyeludupan.	Berintegritas dan Dinamistif				
	5.02.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD														
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	2.119.700,00	Kota Magelang, Magelang Selatan, Magersari	PENDAPATAN DAERAH (PAD) ASLI	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	BPKAD Kota Magelang		3.099.180,00	BADAN KEUANGAN DAERAH PENGELOLA DAN ASET
	5.02.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				30 Laporan	7.183.400,00	Kota Magelang, Magelang Selatan, Magersari	PENDAPATAN DAERAH (PAD) ASLI	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	BPKAD Kota Magelang		10.372.740,00	BADAN KEUANGAN DAERAH PENGELOLA DAN ASET
	5.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Laporan (CL) administrasi keuangan Perangkat Daerah sesuai aturan	-			100 %	14.415.284.461,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	BPKAD Kota Magelang	-	11.647.143.823,00	BADAN KEUANGAN DAERAH PENGELOLA DAN ASET
	5.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				38 Orang/ bulan	14.381.309.731,00	Kota Magelang, Magelang Selatan, Magersari	PENDAPATAN DAERAH (PAD) ASLI	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	BPKAD Kota Magelang		11.598.915.521,00	BADAN KEUANGAN DAERAH PENGELOLA DAN ASET
	5.02.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD				24 Dokumen	7.831.700,00	Kota Magelang, Magelang Selatan, Magersari	PENDAPATAN DAERAH (PAD) ASLI	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	BPKAD Kota Magelang		11.026.260,00	BADAN KEUANGAN DAERAH PENGELOLA DAN ASET
	5.02.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD				18 Laporan	26.143.030,00	Kota Magelang, Magelang Selatan, Magersari	PENDAPATAN DAERAH (PAD) ASLI	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	BPKAD Kota Magelang		37.202.042,00	BADAN KEUANGAN DAERAH PENGELOLA DAN ASET
	5.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Cakupan laporan (CL) administrasi kepegawaian PD sesuai aturan	-			100 %	1.772.900,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	BPKAD Kota Magelang	-	1.552.950,00	BADAN KEUANGAN DAERAH PENGELOLA DAN ASET
	5.02.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian														
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				12 Dokumen	1.772.900,00	Kota Magelang, Magelang Selatan, Magersari	PENDAPATAN DAERAH (PAD) ASLI	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	BPKAD Kota Magelang		1.552.950,00	BADAN KEUANGAN DAERAH PENGELOLA DAN ASET
	5.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	116.123.085,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	BPKAD Kota Magelang	-	145.191.149,00	BADAN KEUANGAN DAERAH PENGELOLA DAN ASET
	5.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				11 Paket	4.480.485,00	Kota Magelang, Magelang Selatan, Magersari	PENDAPATAN DAERAH (PAD) ASLI	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	BPKAD Kota Magelang		4.704.509,00	BADAN KEUANGAN DAERAH PENGELOLA DAN ASET
	5.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				67 Paket	17.036.400,00	Kota Magelang, Magelang Selatan, Magersari	PENDAPATAN DAERAH (PAD) ASLI	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi,	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan	BPKAD Kota Magelang		17.888.220,00	BADAN KEUANGAN DAERAH PENGELOLA DAN ASET

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
											narkoba, judi, dan penyeludupan.	Berintegritas dan Dinamistif				
	5.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				14 Paket	5.999.600,00	Kota Magelang, Magelang Selatan, Magersari	PENDAPATAN DAERAH (PAD) ASLI	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	BPKAD Kota Magelang		7.524.090,00	BADAN KEUANGAN DAERAH PENGELOLA DAN ASET
	5.02.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				2 Dokumen	4.200.000,00	Kota Magelang, Magelang Selatan, Magersari	PENDAPATAN DAERAH (PAD) ASLI	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	BPKAD Kota Magelang		4.410.000,00	BADAN KEUANGAN DAERAH PENGELOLA DAN ASET
	5.02.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material														
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				21 Paket	4.892.600,00	Kota Magelang, Magelang Selatan, Magersari	PENDAPATAN DAERAH (PAD) ASLI	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	BPKAD Kota Magelang		5.137.230,00	BADAN KEUANGAN DAERAH PENGELOLA DAN ASET
	5.02.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				13 Laporan	7.800.000,00	Kota Magelang, Magelang Selatan, Magersari	PENDAPATAN DAERAH (PAD) ASLI	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	BPKAD Kota Magelang		10.920.000,00	BADAN KEUANGAN DAERAH PENGELOLA DAN ASET
	5.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				40 Laporan	71.714.000,00	Kota Magelang, Magelang Selatan, Magersari	PENDAPATAN DAERAH (PAD) ASLI	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	BPKAD Kota Magelang		94.607.100,00	BADAN KEUANGAN DAERAH PENGELOLA DAN ASET
	5.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan pengadaan barang milik daerah (CPBMD) penunjang urusan pemerintahan daerah	-			100 %	19.750.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	BPKAD Kota Magelang	-	76.177.500,00	BADAN KEUANGAN DAERAH PENGELOLA DAN ASET
	5.02.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				3 Unit	19.750.000,00	Kota Magelang, Magelang Selatan, Magersari	PENDAPATAN DAERAH (PAD) ASLI	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	BPKAD Kota Magelang		76.177.500,00	BADAN KEUANGAN DAERAH PENGELOLA DAN ASET
	5.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang (CPJP) Urusan Pemerintahan Daerah	-			100 %	368.998.110,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	BPKAD Kota Magelang	-	472.267.576,00	BADAN KEUANGAN DAERAH PENGELOLA DAN ASET
	5.02.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	12.192.100,00	Kota Magelang, Magelang Selatan, Magersari	PENDAPATAN DAERAH (PAD) ASLI	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	BPKAD Kota Magelang		24.483.800,00	BADAN KEUANGAN DAERAH PENGELOLA DAN ASET
	5.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	266.015.360,00	Kota Magelang, Magelang Selatan, Magersari	PENDAPATAN DAERAH (PAD) ASLI	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	BPKAD Kota Magelang		320.676.992,00	BADAN KEUANGAN DAERAH PENGELOLA DAN ASET
	5.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>				12 Laporan	90.790.650,00	Kota Magelang, Magelang Selatan, Magersari	PENDAPATAN DAERAH (PAD) ASLI	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	BPKAD Kota Magelang		127.106.784,00	BADAN KEUANGAN DAERAH PENGELOLA DAN ASET
	5.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Cakupan pemeliharaan barang milik daerah (CPBMD) penunjang urusan pemerintahan daerah</i>	-			100 %	472.140.310,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	BPKAD Kota Magelang	-	644.082.642,00	BADAN KEUANGAN DAERAH PENGELOLA DAN ASET
	5.02.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			<i>Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya</i>				24 Unit	174.802.960,00	Kota Magelang, Magelang Selatan, Magersari	PENDAPATAN DAERAH (PAD) ASLI	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	BPKAD Kota Magelang		235.395.888,00	BADAN KEUANGAN DAERAH PENGELOLA DAN ASET
	5.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			<i>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya</i>				20 Unit	82.011.200,00	Kota Magelang, Magelang Selatan, Magersari	PENDAPATAN DAERAH (PAD) ASLI	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	BPKAD Kota Magelang		102.605.160,00	BADAN KEUANGAN DAERAH PENGELOLA DAN ASET
	5.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			<i>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara</i>				36 Unit	33.370.000,00	Kota Magelang, Magelang Selatan, Magersari	PENDAPATAN DAERAH (PAD) ASLI	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	BPKAD Kota Magelang		38.138.034,00	BADAN KEUANGAN DAERAH PENGELOLA DAN ASET
	5.02.01.2.09.0008	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud														
			<i>Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara</i>				3 Unit	142.025.000,00	Kota Magelang, Magelang Selatan, Magersari	PENDAPATAN DAERAH (PAD) ASLI	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	BPKAD Kota Magelang		201.626.250,00	BADAN KEUANGAN DAERAH PENGELOLA DAN ASET
	5.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			<i>Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi</i>				1 Unit	39.931.150,00	Kota Magelang, Magelang Selatan, Magersari	PENDAPATAN DAERAH (PAD) ASLI	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	BPKAD Kota Magelang		66.317.310,00	BADAN KEUANGAN DAERAH PENGELOLA DAN ASET
2.	5.02.02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	<i>Persentase Capaian Pengelolaan Keuangan Daerah Bidang Anggaran; Persentase Capaian Pengelolaan Keuangan Daerah Bidang Perbendaharaan; Persentase Capaian Pengelolaan Keuangan Daerah Bidang Akuntansi</i>	100 %			100 %	4.354.348.955,00						100 %	5.105.266.685,00	
	5.02.02.2.01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	<i>Presentase Penganggaran sesuai ketentuan</i>	-			100 %	959.699.165,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	Pemerintah Kota Magelang	-	1.459.189.100,00	BADAN KEUANGAN DAERAH PENGELOLA DAN ASET
	5.02.02.2.01.0001	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS														
			<i>Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun</i>				2 Dokumen	343.292.500,00	Kota Magelang, Magelang Selatan, Magersari	PENDAPATAN DAERAH (PAD) ASLI	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	Pemerintah Kota Magelang		646.960.320,00	BADAN KEUANGAN DAERAH PENGELOLA DAN ASET
	5.02.02.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS														
			<i>Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun</i>				2 Dokumen	70.497.000,00	Kota Magelang, Magelang Selatan, Magersari	PENDAPATAN DAERAH (PAD) ASLI	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	Pemerintah Kota Magelang		80.118.885,00	BADAN KEUANGAN DAERAH PENGELOLA DAN ASET
	5.02.02.2.01.0003	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi				28 Dokumen	32.558.650,00	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DAERAH (PAD) ASLI	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	Pemerintah Kota Magelang		45.604.230,00	BADAN KEUANGAN DAERAH PENGELOLA DAN ASET
	5.02.02.2.01.0004	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD														
			Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi				28 Dokumen	16.862.000,00	Kota Magelang, Magelang Selatan, Magersari	PENDAPATAN DAERAH (PAD) ASLI	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	Pemerintah Kota Magelang		24.760.890,00	BADAN KEUANGAN DAERAH PENGELOLA DAN ASET
	5.02.02.2.01.0005	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD														
			Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi				28 Dokumen	2.558.200,00	Kota Magelang, Magelang Selatan, Magersari	PENDAPATAN DAERAH (PAD) ASLI	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	Pemerintah Kota Magelang		3.200.000,00	BADAN KEUANGAN DAERAH PENGELOLA DAN ASET
	5.02.02.2.01.0006	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD														
			Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi				28 Dokumen	5.649.300,00	Kota Magelang, Magelang Selatan, Magersari	PENDAPATAN DAERAH (PAD) ASLI	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	Pemerintah Kota Magelang		7.724.325,00	BADAN KEUANGAN DAERAH PENGELOLA DAN ASET
	5.02.02.2.01.0007	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD														
			Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD				2 Dokumen	259.728.600,00	Kota Magelang, Magelang Selatan, Magersari	PENDAPATAN DAERAH (PAD) ASLI	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	Pemerintah Kota Magelang		324.628.920,00	BADAN KEUANGAN DAERAH PENGELOLA DAN ASET
	5.02.02.2.01.0008	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD														
			Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD				2 Dokumen	204.934.100,00	Kota Magelang, Magelang Selatan, Magersari	PENDAPATAN DAERAH (PAD) ASLI	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	Pemerintah Kota Magelang		245.203.875,00	BADAN KEUANGAN DAERAH PENGELOLA DAN ASET
	5.02.02.2.01.0009	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran														
			Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran				2 Dokumen	23.618.815,00	Kota Magelang, Magelang Selatan, Magersari	PENDAPATAN DAERAH (PAD) ASLI	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	Pemerintah Kota Magelang		80.987.655,00	BADAN KEUANGAN DAERAH PENGELOLA DAN ASET
	5.02.02.2.02	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Persentase penatausahaan keuangan sesuai ketentuan	-			100 %	195.126.800,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	Pemerintah Kota Magelang	-	244.779.800,00	BADAN KEUANGAN DAERAH PENGELOLA DAN ASET
	5.02.02.2.02.0001	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah				36 Dokumen	6.732.000,00	Kota Magelang, Magelang Selatan, Magersari	PENDAPATAN DAERAH (PAD) ASLI	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	Pemerintah Kota Magelang		8.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAERAH PENGELOLA DAN ASET
	5.02.02.2.02.0003	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD				112 Dokumen	4.827.600,00	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DAERAH (PAD) ASLI	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	Pemerintah Kota Magelang		6.112.100,00	BADAN KEUANGAN DAERAH PENGELOLA DAN ASET
	5.02.02.2.02.0004	Penatausahaan Pembiayaan Daerah														
			Jumlah Dokumen Hasil Penatausahaan Pembiayaan Daerah				12 Dokumen	6.834.400,00	Kota Magelang, Magelang Selatan, Magersari	PENDAPATAN DAERAH (PAD) ASLI	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi,	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan	Pemerintah Kota Magelang		10.400.100,00	BADAN KEUANGAN DAERAH PENGELOLA DAN ASET

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
											narkoba, judi, dan penyeludupan.	Berintegritas dan Dinamistif				
	5.02.02.2.02.0005	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya				130 Dokumen	22.827.400,00	Kota Magelang, Magelang Selatan, Magersari	PENDAPATAN DAERAH (PAD) ASLI	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	Pemerintah Kota Magelang		39.426.000,00	BADAN KEUANGAN DAERAH PENGELOLA DAN ASET
	5.02.02.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pematongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)														
			Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pematongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pematongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)				22 Laporan	51.388.600,00	Kota Magelang, Magelang Selatan, Magersari	PENDAPATAN DAERAH (PAD) ASLI	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	Pemerintah Kota Magelang		59.841.600,00	BADAN KEUANGAN DAERAH PENGELOLA DAN ASET
	5.02.02.2.02.0008	Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas				2 Dokumen	5.316.000,00	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DAERAH (PAD) ASLI	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	Pemerintah Kota Magelang		6.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAERAH PENGELOLA DAN ASET
	5.02.02.2.02.0009	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pematongan atas SP2D dengan Instansi Terkait														
			Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pematongan atas SP2D dengan Instansi Terkait				12 Dokumen	84.733.000,00	Kota Magelang, Magelang Selatan, Magersari	PENDAPATAN DAERAH (PAD) ASLI	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	Pemerintah Kota Magelang		100.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAERAH PENGELOLA DAN ASET
	5.02.02.2.02.0010	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan														
			Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan				1 Dokumen	12.467.800,00	Kota Magelang, Magelang Selatan, Magersari	PENDAPATAN DAERAH (PAD) ASLI	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	Pemerintah Kota Magelang		15.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAERAH PENGELOLA DAN ASET
	5.02.02.2.03	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Persentase LK OPD yang sesuai dengan ketentuan	-			100 %	199.522.990,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	Pemerintah	-	251.297.785,00	BADAN KEUANGAN DAERAH PENGELOLA DAN ASET
	5.02.02.2.03.0002	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban														
			Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban				102 Dokumen	35.594.930,00	Kota Magelang, Magelang Selatan, Magersari	PENDAPATAN DAERAH (PAD) ASLI	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	Pemerintah		49.613.932,00	BADAN KEUANGAN DAERAH PENGELOLA DAN ASET
	5.02.02.2.03.0004	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah														
			Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi				12 Laporan	51.659.500,00	Kota Magelang, Magelang Selatan, Magersari	PENDAPATAN DAERAH (PAD) ASLI	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	Pemerintah		57.754.305,00	BADAN KEUANGAN DAERAH PENGELOLA DAN ASET
	5.02.02.2.03.0005	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota														
			Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota				2 Dokumen	53.446.700,00	Kota Magelang, Magelang Selatan, Magersari	PENDAPATAN DAERAH (PAD) ASLI	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	Pemerintah		60.418.995,00	BADAN KEUANGAN DAERAH PENGELOLA DAN ASET
	5.02.02.2.03.0009	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah														
			Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah				1 Dokumen	6.560.300,00	Kota Magelang, Magelang Selatan, Magersari	PENDAPATAN DAERAH (PAD) ASLI	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	Pemerintah		8.431.710,00	BADAN KEUANGAN DAERAH PENGELOLA DAN ASET

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	5.02.02.2.03.0011	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota															
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota				204 Orang	52.261.560,00	Kota Magelang, Magelang Selatan, Magersari	PENDAPATAN DAERAH (PAD) ASLI	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	Pemerintah		75.078.843,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	PENGELOLA
	5.02.02.2.04	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku	-			100 %	3.000.000.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	Pemerintah Kota Magelang	-	3.150.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAERAH	PENGELOLA DAN ASET
	5.02.02.2.04.0009	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak															
			Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak				12 Laporan	3.000.000.000,00	Kota Magelang, Magelang Selatan, Magersari	PENDAPATAN DAERAH (PAD) ASLI	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	Pemerintah Kota Magelang		3.150.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAERAH	PENGELOLA DAN ASET
3.	5.02.03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Cakupan Pengelolaan BMD	100 %			100 %	1.860.390.432,00						100 %	2.212.755.231,00		
	5.02.03.2.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Cakupan perencanaan, pemanfaatan, pengamanan, penatausahaan, dan pemindahtanganan BMD	-			81.51 %	1.860.390.432,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	Barang Milik Daerah	-	2.212.755.231,00	BADAN KEUANGAN DAERAH	PENGELOLA DAN ASET
	5.02.03.2.01.0001	Penyusunan Standar Harga															
			Jumlah Standar Harga yang Disusun				1 Dokumen	92.051.800,00	Kota Magelang, Magelang Selatan, Magersari	PENDAPATAN DAERAH (PAD) ASLI	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	Barang Milik Daerah		115.984.365,00	BADAN KEUANGAN DAERAH	PENGELOLA DAN ASET
	5.02.03.2.01.0003	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah															
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah				7 Dokumen	13.816.400,00	Kota Magelang, Magelang Selatan, Magersari	PENDAPATAN DAERAH (PAD) ASLI	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	Barang Milik Daerah		19.672.695,00	BADAN KEUANGAN DAERAH	PENGELOLA DAN ASET
	5.02.03.2.01.0005	Penatausahaan Barang Milik Daerah															
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah				1 Laporan	179.171.820,00	Kota Magelang, Magelang Selatan, Magersari	PENDAPATAN DAERAH (PAD) ASLI	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	Barang Milik Daerah		192.151.310,00	BADAN KEUANGAN DAERAH	PENGELOLA DAN ASET
	5.02.03.2.01.0006	Inventarisasi Barang Milik Daerah															
			Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah				2 Laporan	54.315.300,00	Kota Magelang, Magelang Selatan, Magersari	PENDAPATAN DAERAH (PAD) ASLI	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	Barang Milik Daerah		57.582.315,00	BADAN KEUANGAN DAERAH	PENGELOLA DAN ASET
	5.02.03.2.01.0007	Pengamanan Barang Milik Daerah															
			Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah				12 Laporan	287.353.600,00	Kota Magelang, Magelang Selatan, Magersari	PENDAPATAN DAERAH (PAD) ASLI	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	Barang Milik Daerah		344.831.970,00	BADAN KEUANGAN DAERAH	PENGELOLA DAN ASET
	5.02.03.2.01.0008	Penilaian Barang Milik Daerah															
			Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah				6 Laporan	149.806.700,00	Kota Magelang, Magelang Selatan, Magersari	PENDAPATAN DAERAH (PAD) ASLI	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	Barang Milik Daerah		160.563.585,00	BADAN KEUANGAN DAERAH	PENGELOLA DAN ASET
	5.02.03.2.01.0010	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah															

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah</i>				4 Dokumen	985.270.622,00	Kota Magelang, Magelang Selatan, Magersari	PENDAPATAN DAERAH (PAD) ASLI	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	Barang Milik Daerah		1.150.958.229,00	BADAN KEUANGAN DAERAH PENGELOLA DAN ASET
	5.02.03.2.01.0012	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah														
			<i>Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun</i>				14 Laporan	77.664.990,00	Kota Magelang, Magelang Selatan, Magersari	PENDAPATAN DAERAH (PAD) ASLI	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	Barang Milik Daerah		141.852.892,00	BADAN KEUANGAN DAERAH PENGELOLA DAN ASET
	5.02.03.2.01.0013	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota														
			<i>Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota</i>				200 Orang	20.939.200,00	Kota Magelang, Magelang Selatan, Magersari	PENDAPATAN DAERAH (PAD) ASLI	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	Barang Milik Daerah		29.157.870,00	BADAN KEUANGAN DAERAH PENGELOLA DAN ASET
4.	5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	<i>Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah</i>	160,98 %			160,98 %	2.371.832.989,00						160,98 %	2.515.248.485,00	
	5.02.04.2.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	<i>Persentase Realisasi Pendapatan Asli Daerah</i>	-			100 %	2.371.832.989,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	Pendapatan Asli Daerah Kota Magelang	-	2.515.248.485,00	BADAN KEUANGAN DAERAH PENGELOLA DAN ASET
	5.02.04.2.01.0001	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah														
			<i>Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah</i>				1 Dokumen	1.522.838.389,00	Kota Magelang, Magelang Selatan, Magersari	PENDAPATAN DAERAH (PAD) ASLI	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	Pendapatan Asli Daerah Kota Magelang		1.629.541.250,00	BADAN KEUANGAN DAERAH PENGELOLA DAN ASET
	5.02.04.2.01.0003	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah														
			<i>Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah</i>				4 Laporan	72.370.400,00	Kota Magelang, Magelang Selatan, Magersari	PENDAPATAN DAERAH (PAD) ASLI	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	Pendapatan Asli Daerah Kota Magelang		80.367.630,00	BADAN KEUANGAN DAERAH PENGELOLA DAN ASET
	5.02.04.2.01.0006	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah														
			<i>Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah</i>				18 Laporan	292.837.100,00	Kota Magelang, Magelang Selatan, Magersari	PENDAPATAN DAERAH (PAD) ASLI	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	Pendapatan Asli Daerah Kota Magelang		289.629.375,00	BADAN KEUANGAN DAERAH PENGELOLA DAN ASET
	5.02.04.2.01.0007	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)														
			<i>Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya</i>				1200 Obyek Pajak	19.788.000,00	Kota Magelang, Magelang Selatan, Magersari	PENDAPATAN DAERAH (PAD) ASLI	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	Pendapatan Asli Daerah Kota Magelang		20.777.505,00	BADAN KEUANGAN DAERAH PENGELOLA DAN ASET
	5.02.04.2.01.0008	Penetapan Wajib Pajak Daerah														
			<i>Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah</i>				36000 Dokumen	104.134.500,00	Kota Magelang, Magelang Selatan, Magersari	PENDAPATAN DAERAH (PAD) ASLI	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	Pendapatan Asli Daerah Kota Magelang		109.341.435,00	BADAN KEUANGAN DAERAH PENGELOLA DAN ASET
	5.02.04.2.01.0010	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah														
			<i>Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi</i>				12 Dokumen	7.878.700,00	Kota Magelang, Magelang Selatan, Magersari	PENDAPATAN DAERAH (PAD) ASLI	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	Pendapatan Asli Daerah Kota Magelang		8.272.845,00	BADAN KEUANGAN DAERAH PENGELOLA DAN ASET
	5.02.04.2.01.0011	Penagihan Pajak Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah</i>				10 Dokumen	225.355.600,00	Kota Magelang, Magelang Selatan, Magersari	PENDAPATAN DAERAH (PAD) ASLI	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	Pendapatan Asli Daerah Kota Magelang		251.533.485,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH PENGELOLA
	5.02.04.2.01.0013	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah</i>				12 Dokumen	49.613.100,00	Kota Magelang, Magelang Selatan, Magersari	PENDAPATAN DAERAH (PAD) ASLI	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	Pendapatan Asli Daerah Kota Magelang		69.853.770,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH PENGELOLA
	5.02.04.2.01.0014	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah														
			<i>Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah</i>				4 Laporan	54.430.400,00	Kota Magelang, Magelang Selatan, Magersari	PENDAPATAN DAERAH (PAD) ASLI	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	Pendapatan Asli Daerah Kota Magelang		20.832.840,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH PENGELOLA
	5.02.04.2.01.0015	Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah														
			<i>Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah</i>				1 Laporan	22.586.800,00	Kota Magelang, Magelang Selatan, Magersari	PENDAPATAN DAERAH (PAD) ASLI	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	Pendapatan Asli Daerah Kota Magelang		35.098.350,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH PENGELOLA
		BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA						9.619.256.001,00							9.601.551.590,00	
	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN						9.619.256.001,00							9.601.551.590,00	
	5.03	KEPEGAWAIAN						7.662.354.801,00							7.635.290.390,00	
1.	5.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	<i>Presentase cakupan pelayanan kantor, pengelolaan keuangan, perencanaan, penganggaran, dan capaian kinerja</i>	-			100 %	6.281.822.101,00						-	6.171.173.690,00	
	5.03.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	<i>Cakupan penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja</i>	-			100 %	14.963.450,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	Pengelolaan Perencanaan, Penganggaran dan Pelaporan SKPD	-	14.963.450,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>				2 Dokumen	2.514.000,00	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	Pengelolaan Perencanaan, Penganggaran dan Pelaporan SKPD		2.514.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD														
			<i>Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD</i>				1 Dokumen	1.518.200,00	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	Pengelolaan Perencanaan, Penganggaran dan Pelaporan SKPD		1.518.200,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD														
			<i>Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD</i>				1 Dokumen	1.518.200,00	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	Pengelolaan Perencanaan, Penganggaran dan Pelaporan SKPD		1.518.200,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD														
			<i>Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD</i>				1 Dokumen	1.899.800,00	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	Pengelolaan Perencanaan, Penganggaran dan Pelaporan SKPD		1.899.800,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD														
			<i>Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD</i>				1 Dokumen	1.865.400,00	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi,	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan	Pengelolaan Perencanaan, Penganggaran dan Pelaporan SKPD		1.865.400,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
											narkoba, judi, dan penyeludupan.	Berintegritas dan Dinamistif				
	5.03.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				16 Laporan	4.140.350,00	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	Pengelolaan Perencanaan, Penganggaran dan Pelaporan SKPD		4.140.350,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	1.507.500,00	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	Pengelolaan Perencanaan, Penganggaran dan Pelaporan SKPD		1.507.500,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan laporan administrasi keuangan PD sesuai aturan	-			100 %	5.900.154.671,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	Pengelolaan Keuangan SKPD	-	5.779.672.492,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				840 Orang/ bulan	5.895.602.171,00	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	Pengelolaan Keuangan SKPD		5.775.119.992,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD				14 Laporan	4.552.500,00	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	Pengelolaan Keuangan SKPD		4.552.500,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Cakupan penyediaan administrasi kepegawaian	-			100 %	1.687.200,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	Pengelolaan Kepegawaian OPD	-	1.687.300,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian														
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				12 Dokumen	1.687.200,00	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	Pengelolaan Kepegawaian OPD		1.687.300,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan penyediaan administrasi umum perkantoran	-			100 %	103.966.700,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	Pengelolaan administrasi umum perkantoran	-	101.846.700,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				12 Paket	1.032.200,00	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	Pengelolaan administrasi umum perkantoran		1.032.200,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Paket	13.285.500,00	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	Pengelolaan administrasi umum perkantoran		13.285.500,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	9.184.900,00	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi,	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan	Pengelolaan administrasi umum perkantoran		9.184.900,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
											narkoba, judi, dan penyeludupan.	Berintegritas dan Dinamistif				
	5.03.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	3.000.000,00	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	Pengelolaan administrasi umum perkantoran		3.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material														
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				12 Paket	9.423.500,00	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	Pengelolaan administrasi umum perkantoran		9.423.500,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	2.000.000,00	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	Pengelolaan administrasi umum perkantoran		2.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	59.790.000,00	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	Pengelolaan administrasi umum perkantoran		57.670.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				12 Dokumen	6.250.600,00	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	Pengelolaan administrasi umum perkantoran		6.250.600,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	-			100 %	67.325.960,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	Penyediaan jasa penunjang BKPSDM	-	79.279.628,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	7.949.700,00	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	Penyediaan jasa penunjang BKPSDM		7.949.700,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah LaporanPenyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	23.060.000,00	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	Penyediaan jasa penunjang BKPSDM		23.060.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	36.316.260,00	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	Penyediaan jasa penunjang BKPSDM		48.269.928,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	-			100 %	193.724.120,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	Pengelolaan barang milik daerah OPD	-	193.724.120,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				12 Unit	118.905.000,00	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	Pengelolaan barang milik daerah OPD		118.905.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				4 Unit	35.549.120,00	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	Pengelolaan barang milik daerah OPD		35.549.120,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel														
			Jumlah Mebel yang Dipelihara				15 Unit	3.960.000,00	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	Pengelolaan barang milik daerah OPD		3.960.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				34 Unit	35.310.000,00	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	Pengelolaan barang milik daerah OPD		35.310.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
2.	5.03.02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Persentase rata-rata capaian target Aspek Sistem Merit	100 %			100 %	1.380.532.700,00						100 %	1.464.116.700,00	
	5.03.02.2.01	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Nilai Aspek Perlindungan dan Pelayanan Nilai Aspek Sistem Informasi Nilai Aspek Pengadaan ASN Nilai Aspek Perencanaan Kebutuhan	21 48 36 Skor			13 Skor 20 Skor 40 Skor 40 Skor	686.314.400,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	Pegawai ASN Kota Magelang	21 48 36 Skor	742.936.400,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.01.0002	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN				2 Dokumen	22.009.300,00	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	Pegawai ASN Kota Magelang		22.009.300,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.01.0003	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK														
			Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK				4 Dokumen	486.312.600,00	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	Pegawai ASN Kota Magelang		486.312.600,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.01.0006	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian														
			Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian				12 Dokumen	68.068.700,00	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	Pegawai ASN Kota Magelang		124.690.700,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.01.0010	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian				12 Dokumen	87.149.400,00	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	Pegawai ASN Kota Magelang		87.149.400,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.01.0011	Pengelolaan Data Kepegawaian														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian				12 Dokumen	11.375.000,00	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	Pegawai ASN Kota Magelang		11.375.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.01.0012	Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian				12 Laporan	11.399.400,00	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	Pegawai ASN Kota Magelang		11.399.400,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.02	Mutasi dan Promosi ASN	Nilai Aspek Promosi dan Mutasi ASN	27 Skor			34 Skor	125.011.900,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	Pegawai ASN Kota Magelang	27 Skor	127.331.900,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.02.0001	Pengelolaan Mutasi ASN														
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah				12 Dokumen	7.950.200,00	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	Pegawai ASN Kota Magelang		7.950.200,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.02.0002	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN														
			Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN				6 Dokumen	11.202.100,00	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	Pegawai ASN Kota Magelang		11.202.100,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.02.0003	Pengelolaan Promosi ASN														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN				12 Dokumen	105.859.600,00	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	Pegawai ASN Kota Magelang		108.179.600,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.03	Pengembangan Kompetensi ASN	Nilai Aspek Pengembangan Karir	75 Skor			90 Skor	262.494.700,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	Pegawai ASN Kota Magelang	75 Skor	270.310.700,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.03.0002	Pengelolaan Assessment Center														
			Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment Center				12 Dokumen	216.615.700,00	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	Pegawai ASN Kota Magelang		222.651.700,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.03.0003	Pengeloaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN				1 Dokumen	14.139.300,00	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	Pegawai ASN Kota Magelang		14.139.300,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.03.0004	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN														
			Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan				60 Orang	31.739.700,00	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	Pegawai ASN Kota Magelang		33.519.700,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.04	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Nilai Aspek Manajemen Kinerja Nilai Aspek Perlindungan dan Pelayanan Nilai Aspek Penggajian, Penghargaan dan Disiplin	53 24 8 Skor			69 Skor 13 Skor 40 Skor	306.711.700,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	Pegawai ASN Kota Magelang	53 24 8 Skor	323.537.700,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.04.0002	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur														
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur				348 Dokumen	27.950.200,00	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	Pegawai ASN Kota Magelang		30.626.200,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.04.0003	Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur				12 Laporan	63.141.900,00	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	Pegawai ASN Kota Magelang		72.483.900,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.04.0004	Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai														
			Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan				182 Orang	159.037.300,00	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	Pegawai ASN Kota Magelang		159.037.300,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.04.0005	Pengelolaan Tanda Jasa bagi Pegawai														
			Jumlah ASN yang Diberikan Tanda Jasa				100 Orang	19.585.300,00	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	Pegawai ASN Kota Magelang		23.553.300,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.04.0007	Pembinaan Disiplin ASN														
			Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan				6 Orang	10.231.100,00	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	Pegawai ASN Kota Magelang		10.231.100,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.04.0008	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN														
			Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN				5 Laporan	9.552.300,00	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	Pegawai ASN Kota Magelang		9.552.300,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.04.0009	Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai														
			Jumlah Dokumen Proses Izin Perceraian Pegawai yang Dilayani				4 Dokumen	6.816.100,00	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	Pegawai ASN Kota Magelang		6.816.100,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.04.0010	Evaluasi Disiplin ASN														
			Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Disiplin ASN				348 Laporan	10.397.500,00	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	Pegawai ASN Kota Magelang		11.237.500,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.04	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN						1.956.901.200,00							1.966.261.200,00	
1.	5.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Persentase ASN yang mengikuti pengembangan kompetensi sesuai dengan jabatannya	37 %			37 %	1.956.901.200,00						37 %	1.966.261.200,00	
	5.04.02.2.01	Pengembangan Kompetensi Teknis	Persentase pegawai ASN yang mengikuti pelatihan teknis	18 Persen			18 Persen	593.754.500,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	Pegawai ASN Kota Magelang	18 Persen	593.754.500,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.04.02.2.01.0003	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum														
			Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi				600 Orang	593.754.500,00	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	Pegawai ASN Kota Magelang		593.754.500,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.04.02.2.02	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Persentase Pegawai ASN yang Mengikuti Pelatihan Manajerial dan Fungsional	19 Persen			19 %	1.363.146.700,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	Pegawai ASN Kota Magelang	19 Persen	1.372.506.700,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.04.02.2.02.0007	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan				12 Laporan	1.363.146.700,00	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	Pegawai ASN Kota Magelang		1.372.506.700,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
		INSPEKTORAT DAERAH						16.378.802.500,00							21.256.236.456,00	
	6	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN						16.378.802.500,00							21.256.236.456,00	
	6.01	INSPEKTORAT DAERAH						16.378.802.500,00							21.256.236.456,00	
1.	6.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Penunjang Kinerja OPD	100,00 %			100,00 %	10.796.117.415,00						100,00 %	13.756.004.256,00	
	6.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Cakupan ketersediaan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja	-			100 %	47.612.400,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	Inspektorat Daerah Kota Magelang	-	73.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				10 Dokumen	19.338.700,00	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	Inspektorat Daerah Kota Magelang		30.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD														
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1.247.900,00	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	Inspektorat Daerah Kota Magelang		2.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD														
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	1.248.000,00	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	Inspektorat Daerah Kota Magelang		2.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD														
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1.609.400,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	Inspektorat Daerah Kota Magelang		2.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD														
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	1.625.400,00	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	Inspektorat Daerah Kota Magelang		2.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				2 Laporan	22.543.000,00	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	Inspektorat Daerah Kota Magelang		35.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan laporan administrasi keuangan Pemerintah Daerah sesuai aturan	-			100 %	9.277.196.309,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	Inspektorat Daerah Kota Magelang	-	12.011.500.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				36 Orang/ bulan	9.269.387.809,00	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	Inspektorat Daerah Kota Magelang		12.000.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	6.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	4.129.600,00	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	Inspektorat Daerah Kota Magelang		7.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	2.069.800,00	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	Inspektorat Daerah Kota Magelang		2.500.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran														
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				1 Dokumen	1.609.100,00	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	Inspektorat Daerah Kota Magelang		2.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	persentase pemenuhan laporan administrasi kepegawaian perangkat daerah	-			100 %	6.795.400,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	Inspektorat Daerah Kota Magelang	-	9.500.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian														
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				2 Dokumen	6.795.400,00	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	Inspektorat Daerah Kota Magelang		9.500.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan penyediaan administrasi umum perangkat daerah	-			100 %	356.866.400,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	Inspektorat Daerah Kota Magelang	-	384.500.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				10 Paket	5.673.400,00	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	Inspektorat Daerah Kota Magelang		10.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Paket	19.899.800,00	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	Inspektorat Daerah Kota Magelang		22.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	13.132.700,00	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	Inspektorat Daerah Kota Magelang		16.500.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material														
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				12 Paket	25.191.500,00	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	Inspektorat Daerah Kota Magelang		26.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	36.137.000,00	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi,	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan	Inspektorat Daerah Kota Magelang		50.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
											narkoba, judi, dan penyeludupan.	Berintegritas dan Dinamistif				
	6.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	256.832.000,00	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	Inspektorat Daerah Kota Magelang		260.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan pengadaan BMD	-			undefined undefined	650.347.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	Inspektorat Daerah Kota Magelang	-	666.380.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel														
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				20 Unit	300.000.000,00	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	Inspektorat Daerah Kota Magelang		300.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				25 Unit	350.347.000,00	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	Inspektorat Daerah Kota Magelang		366.380.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-			100 %	233.286.566,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	Inspektorat Daerah Kota Magelang	-	284.374.256,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	14.910.600,00	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	Inspektorat Daerah Kota Magelang		18.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	145.743.446,00	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	Inspektorat Daerah Kota Magelang		170.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	72.632.520,00	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	Inspektorat Daerah Kota Magelang		96.374.256,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	-			100 %	224.013.340,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	Inspektorat Daerah Kota Magelang	-	326.750.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				8 Unit	91.931.200,00	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	Inspektorat Daerah Kota Magelang		143.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				16 Unit	95.673.360,00	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi,	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan	Inspektorat Daerah Kota Magelang		140.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
											narkoba, judi, dan penyeludupan.	Berintegritas dan Dinamistif				
	6.01.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel														
			Jumlah Mebel yang Dipelihara				5 Unit	3.750.000,00	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	Inspektorat Daerah Kota Magelang		3.750.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				32 Unit	22.990.000,00	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	Inspektorat Daerah Kota Magelang		30.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi				1 Unit	9.668.780,00	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	Inspektorat Daerah Kota Magelang		10.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
2.	6.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Persentase penyelenggaraan pengawasan	97,50 %			97,50 %	704.137.350,00						97,50 %	976.991.760,00	
	6.01.02.2.01	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Persentase entitas yang sudah menindaklanjuti hasil pemeriksaan	-			97.5 %	554.651.150,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	Inspektorat Daerah Kota Magelang	-	791.459.760,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.02.2.01.0001	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah														
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah				4 Laporan	101.137.600,00	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	Inspektorat Daerah Kota Magelang		125.757.060,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.02.2.01.0002	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah														
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah				22 Laporan	72.640.400,00	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	Inspektorat Daerah Kota Magelang		130.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.02.2.01.0003	Reviu Laporan Kinerja														
			Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja				63 Laporan	144.671.450,00	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	Inspektorat Daerah Kota Magelang		155.510.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.02.2.01.0004	Reviu Laporan Keuangan														
			Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan				29 Laporan	44.053.900,00	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	Inspektorat Daerah Kota Magelang		75.192.700,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.02.2.01.0007	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP														
			Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP				12 Dokumen	192.147.800,00	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	Inspektorat Daerah Kota Magelang		305.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.02.2.02	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	persentase laporan penyelenggaraan pengawasan dengan tujuan tertentu yang tepat waktu	-			95 %	149.486.200,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	Inspektorat Daerah Kota Magelang	-	185.532.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.02.2.02.0001	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
			<i>Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani</i>				2 Laporan	30.000.000,00	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	Inspektorat Daerah Kota Magelang		35.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH	
	6.01.02.2.02.0002	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu															
			<i>Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu</i>				23 Laporan	119.486.200,00	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	Inspektorat Daerah Kota Magelang		150.532.000,00	INSPEKTORAT DAERAH	
3.	6.01.03	PROGRAM PERUMUSAN KEBUJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	<i>Persentase entitas yang telah mendapatkan pendampingan dan asistensi</i>	100,00 %			100,00 %	4.878.547.735,00						100,00 %	6.523.240.440,00		
	6.01.03.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	<i>Persentase Kebijakan Teknis yang dirumuskan tepat waktu</i>	-			100 persen	27.032.300,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	Inspektorat Daerah Kota Magelang	-	30.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH	
	6.01.03.2.01.0001	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan															
			<i>Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun</i>				2 Rekomendasi	27.032.300,00	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	Inspektorat Daerah Kota Magelang		30.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH	
	6.01.03.2.02	Pendampingan dan Asistensi	<i>Persentase jumlah Perangkat Daerah yang nilai SAKIP nya meningkat</i>	-			16.67 %	4.851.515.435,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	Inspektorat Daerah Kota Magelang	-	6.493.240.440,00	INSPEKTORAT DAERAH	
	6.01.03.2.02.0001	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah															
			<i>Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah</i>				28 perangkat daerah	52.206.700,00	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	Inspektorat Daerah Kota Magelang		108.240.440,00	INSPEKTORAT DAERAH	
	6.01.03.2.02.0002	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi															
			<i>Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi</i>				28 perangkat daerah	851.583.275,00	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	Inspektorat Daerah Kota Magelang		1.700.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH	
	6.01.03.2.02.0003	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi															
			<i>Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi</i>				40 Kegiatan	3.865.696.660,00	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	Inspektorat Daerah Kota Magelang		4.575.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH	
	6.01.03.2.02.0004	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas															
			<i>Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas</i>				28 perangkat daerah	82.028.800,00	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	Inspektorat Daerah Kota Magelang		110.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH	
		KECAMATAN MAGELANG SELATAN							11.597.013.597,00							10.761.859.058,00	
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							11.597.013.597,00						10.761.859.058,00		
	7.01	KECAMATAN							11.597.013.597,00						10.761.859.058,00		
1.	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-			-	10.814.780.797,00						-	9.993.486.758,00		
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	30.303.500,00			-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan	-	-	46.000.000,00	KECAMATAN MAGELANG SELATAN	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
												Berintegritas dan Dinamistif				
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	11.250.000,00	Kota Magelang, Magelang Selatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	-		15.000.000,00	KECAMATAN MAGELANG SELATAN
	7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD														
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	3.550.000,00	Kota Magelang, Magelang Selatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	-		5.000.000,00	KECAMATAN MAGELANG SELATAN
	7.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD														
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	3.550.000,00	Kota Magelang, Magelang Selatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	-		5.000.000,00	KECAMATAN MAGELANG SELATAN
	7.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD														
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	2.700.000,00	Kota Magelang, Magelang Selatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	-		3.000.000,00	KECAMATAN MAGELANG SELATAN
	7.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD														
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	2.700.000,00	Kota Magelang, Magelang Selatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	-		3.000.000,00	KECAMATAN MAGELANG SELATAN
	7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				4 Laporan	6.553.500,00	Kota Magelang, Magelang Selatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	-		15.000.000,00	KECAMATAN MAGELANG SELATAN
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	10.351.627.790,00			-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	-	-	9.383.672.082,00	KECAMATAN MAGELANG SELATAN
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				60 Orang/ bulan	10.327.948.790,00	Kota Magelang, Magelang Selatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	-		9.356.672.082,00	KECAMATAN MAGELANG SELATAN
	7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	23.679.000,00	Kota Magelang, Magelang Selatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	-		27.000.000,00	KECAMATAN MAGELANG SELATAN
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	45.737.400,00			-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	-	-	70.100.000,00	KECAMATAN MAGELANG SELATAN
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				8 Paket	2.018.900,00	Kota Magelang, Magelang Selatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	-		3.000.000,00	KECAMATAN MAGELANG SELATAN
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1.645.500,00	Kota Magelang, Magelang Selatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	-		2.500.000,00	KECAMATAN MAGELANG SELATAN
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				4 Paket	7.320.000,00	Kota Magelang, Magelang Selatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	-		8.500.000,00	KECAMATAN MAGELANG SELATAN
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	2.100.000,00	Kota Magelang, Magelang Selatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	-		3.000.000,00	KECAMATAN MAGELANG SELATAN
	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	1.800.000,00	Kota Magelang, Magelang Selatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	-		2.500.000,00	KECAMATAN MAGELANG SELATAN
	7.01.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material														
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				12 Paket	6.000.000,00	Kota Magelang, Magelang Selatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	-		6.000.000,00	KECAMATAN MAGELANG SELATAN
	7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	3.440.000,00	Kota Magelang, Magelang Selatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	-		4.600.000,00	KECAMATAN MAGELANG SELATAN
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	21.413.000,00	Kota Magelang, Magelang Selatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	-		40.000.000,00	KECAMATAN MAGELANG SELATAN
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	46.597.400,00			-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	-	-	85.000.000,00	KECAMATAN MAGELANG SELATAN
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				7 Unit	46.597.400,00	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	-		85.000.000,00	KECAMATAN MAGELANG SELATAN
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	213.671.007,00			-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	-	-	268.214.676,00	KECAMATAN MAGELANG SELATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	50.760.000,00	Kota Magelang, Magelang Selatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	-		51.000.000,00	KECAMATAN MAGELANG SELATAN
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				9 Laporan	162.911.007,00	Kota Magelang, Magelang Selatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	-		217.214.676,00	KECAMATAN MAGELANG SELATAN
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	126.843.700,00			-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	-	-	140.500.000,00	KECAMATAN MAGELANG SELATAN
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				8 Unit	47.481.000,00	Kota Magelang, Magelang Selatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	-		65.000.000,00	KECAMATAN MAGELANG SELATAN
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				5 Unit	34.977.000,00	Kota Magelang, Magelang Selatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	-		47.000.000,00	KECAMATAN MAGELANG SELATAN
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				15 Unit	23.500.000,00	Kota Magelang, Magelang Selatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	-		23.500.000,00	KECAMATAN MAGELANG SELATAN
	7.01.01.2.09.0008	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud														
			Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara				1 Unit	5.000.000,00	Kota Magelang, Magelang Selatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	-		5.000.000,00	KECAMATAN MAGELANG SELATAN
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi				1 Unit	15.885.700,00	Kota Magelang, Magelang Selatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	-		0,00	KECAMATAN MAGELANG SELATAN
2.	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-	-			-	113.209.900,00						-	139.336.200,00	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	-	-			-	4.320.000,00			-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	-	-	6.500.000,00	KECAMATAN MAGELANG SELATAN
	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan														
			Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				1 Dokumen	4.320.000,00	Kota Magelang, Magelang Selatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	-		6.500.000,00	KECAMATAN MAGELANG SELATAN
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja	-	-			-	56.216.300,00			-	Penguatan Landasan Tata Kelola	-	-	57.500.000,00	KECAMATAN MAGELANG SELATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan										Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif				
	7.01.02.2.02.0001	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan				1 Dokumen	24.065.200,00	Kota Magelang, Magelang Selatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	-		25.000.000,00	KECAMATAN SELATAN MAGELANG
	7.01.02.2.02.0002	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan														
			Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan				12 Laporan	4.200.000,00	Kota Magelang, Magelang Selatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	-		4.500.000,00	KECAMATAN SELATAN MAGELANG
	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan														
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				2 Laporan	27.951.100,00	Kota Magelang, Magelang Selatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	-		28.000.000,00	KECAMATAN SELATAN MAGELANG
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	-	-			-	52.673.600,00			-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	-	-	75.336.200,00	KECAMATAN SELATAN MAGELANG
	7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan														
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				1 Laporan	52.673.600,00	Kota Magelang, Magelang Selatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	-		75.336.200,00	KECAMATAN SELATAN MAGELANG
3.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	-			-	130.646.400,00						-	80.646.400,00	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-			-	50.000.000,00			-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamis	-	-	0,00	KECAMATAN SELATAN MAGELANG
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				1 Unit	50.000.000,00	Kota Magelang, Magelang Selatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamis	-		0,00	KECAMATAN SELATAN MAGELANG
	7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	-	-			-	80.646.400,00			-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	-	-	80.646.400,00	KECAMATAN SELATAN MAGELANG
	7.01.03.2.06.0002	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat														
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat				150 Keluarga	80.646.400,00	Kota Magelang, Magelang Selatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	-		80.646.400,00	KECAMATAN SELATAN MAGELANG
4.	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	-	-			-	518.526.500,00						-	528.539.700,00	
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	-	-			-	518.526.500,00			-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	-	-	528.539.700,00	KECAMATAN SELATAN MAGELANG

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan														
			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				12 Laporan	518.526.500,00	Kota Magelang, Magelang Selatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	-		528.539.700,00	KECAMATAN MAGELANG SELATAN
5.	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	-	-			-	19.850.000,00						-	19.850.000,00	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	-	-			-	19.850.000,00			-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	-	-	19.850.000,00	KECAMATAN MAGELANG SELATAN
	7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia				105 Orang	9.350.000,00	Kota Magelang, Magelang Selatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	-		9.350.000,00	KECAMATAN MAGELANG SELATAN
	7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan														
			Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan				12 Dokumen	10.500.000,00	Kota Magelang, Magelang Selatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	-		10.500.000,00	KECAMATAN MAGELANG SELATAN
		KELURAHAN JURANGOMBO SELATAN						1.925.173.972,00							2.108.957.472,00	
	7	UNSUR KEWILAYAHAN						1.925.173.972,00							2.108.957.472,00	
	7.01	KECAMATAN						1.925.173.972,00							2.108.957.472,00	
1.	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-			-	325.333.974,00						-	402.593.475,00	
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	34.338.698,00			-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	-	-	38.173.397,00	KELURAHAN JURANGOMBO SELATAN
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1.500.000,00	Kota Magelang, Magelang Selatan, Jurangombo Selatan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	-		1.650.000,00	KELURAHAN JURANGOMBO SELATAN
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	873.700,00	Kota Magelang, Magelang Selatan, Jurangombo Selatan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	-		961.070,00	KELURAHAN JURANGOMBO SELATAN
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	6.692.800,00	Kota Magelang, Magelang Selatan, Jurangombo Selatan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	-		7.368.680,00	KELURAHAN JURANGOMBO SELATAN
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	3.149.598,00	Kota Magelang, Magelang Selatan, Jurangombo Selatan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	-		3.464.587,00	KELURAHAN JURANGOMBO SELATAN
	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				36 Dokumen	3.060.000,00	Kota Magelang, Magelang Selatan, Jurangombo Selatan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	-		3.366.000,00	KELURAHAN JURANGOMBO SELATAN
	7.01.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material														
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				1 Paket	4.134.600,00	Kota Magelang, Magelang Selatan, Jurangombo Selatan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	-		4.655.600,00	KELURAHAN JURANGOMBO SELATAN
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	14.928.000,00	Kota Magelang, Magelang Selatan, Jurangombo Selatan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	-		16.707.460,00	KELURAHAN JURANGOMBO SELATAN
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	0,00			-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	-	-	0,00	KELURAHAN JURANGOMBO SELATAN
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				0 Unit	0,00	Kota Magelang, Magelang Selatan, Jurangombo Selatan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	-		0,00	KELURAHAN JURANGOMBO SELATAN
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	193.756.276,00			-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	-	-	250.958.278,00	KELURAHAN JURANGOMBO SELATAN
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	27.911.100,00	Kota Magelang, Magelang Selatan, Jurangombo Selatan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	-		30.702.210,00	KELURAHAN JURANGOMBO SELATAN
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	165.845.176,00	Kota Magelang, Magelang Selatan, Jurangombo Selatan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	-		220.256.068,00	KELURAHAN JURANGOMBO SELATAN
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	97.239.000,00			-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	-	-	113.461.800,00	KELURAHAN JURANGOMBO SELATAN
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				5 Unit	15.411.500,00	Kota Magelang, Magelang Selatan, Jurangombo Selatan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	-		16.952.650,00	KELURAHAN JURANGOMBO SELATAN
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				3 Unit	42.827.500,00	Kota Magelang, Magelang Selatan, Jurangombo Selatan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	-		42.827.500,00	KELURAHAN JURANGOMBO SELATAN
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				13 Unit	9.000.000,00	Kota Magelang, Magelang Selatan, Jurangombo Selatan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	-		9.900.000,00	KELURAHAN JURANGOMBO SELATAN
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi				1 Unit	30.000.000,00	Kota Magelang, Magelang Selatan, Jurangombo Selatan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	-		43.781.650,00	KELURAHAN JURANGOMBO SELATAN
2.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	-			-	1.599.839.998,00						-	1.706.363.997,00	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-			-	1.599.839.998,00			-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing dan Berkarakter	-	-	1.706.363.997,00	KELURAHAN JURANGOMBO SELATAN
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan														
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				12 Lembaga Kemasyarakatan	18.186.100,00	Kota Magelang, Magelang Selatan, Jurangombo Selatan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing dan Berkarakter	-		20.004.710,00	KELURAHAN JURANGOMBO SELATAN
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				40 Unit	765.459.364,00	Kota Magelang, Magelang Selatan, Jurangombo Selatan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamis	-		787.005.300,00	KELURAHAN JURANGOMBO SELATAN
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan														
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				2 Pokmas / Ormas	808.477.234,00	Kota Magelang, Magelang Selatan, Jurangombo Selatan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing dan Berkarakter	-		890.864.957,00	KELURAHAN JURANGOMBO SELATAN
	7.01.03.2.02.0004	Evaluasi Kelurahan														
			Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan				1 Laporan	7.717.300,00	Kota Magelang, Magelang Selatan, Jurangombo Selatan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing dan Berkarakter	-		8.489.030,00	KELURAHAN JURANGOMBO SELATAN
		KELURAHAN JURANGOMBO UTARA						1.574.571.413,00							1.772.492.598,00	
	7	UNSUR KEWILAYAHAN						1.574.571.413,00							1.772.492.598,00	
	7.01	KECAMATAN						1.574.571.413,00							1.772.492.598,00	
1.	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-			-	349.020.545,00						-	452.723.193,00	
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	42.794.200,00			-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	-	-	49.502.880,00	KELURAHAN JURANGOMBO UTARA
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1.960.400,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	-		2.156.000,00	KELURAHAN JURANGOMBO UTARA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1.000.000,00	Kota Magelang, Magelang Selatan, Jurangombo Utara	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	-		1.100.000,00	KELURAHAN JURANGOMBO UTARA
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				5 Paket	12.605.400,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	-		14.140.940,00	KELURAHAN JURANGOMBO UTARA
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				3 Paket	4.204.000,00	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	-		4.624.400,00	KELURAHAN JURANGOMBO UTARA
	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				36 Dokumen	3.060.000,00	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	-		3.366.000,00	KELURAHAN JURANGOMBO UTARA
	7.01.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material														
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				4 Paket	5.829.400,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	-		6.901.290,00	KELURAHAN JURANGOMBO UTARA
	7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	675.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	-		1.114.650,00	KELURAHAN JURANGOMBO UTARA
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	13.460.000,00	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	-		16.099.600,00	KELURAHAN JURANGOMBO UTARA
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	208.430.020,00			-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	-	-	295.644.355,00	KELURAHAN JURANGOMBO UTARA
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	24.797.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	-		27.277.250,00	KELURAHAN JURANGOMBO UTARA
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	183.632.520,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	-		268.367.105,00	KELURAHAN JURANGOMBO UTARA
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	97.796.325,00			-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan	-	-	107.575.958,00	KELURAHAN JURANGOMBO UTARA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
												Berintegritas dan Dinamistif					
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan															
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				4 Unit	13.740.000,00	Kota Magelang, Magelang Selatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	-		15.114.000,00	KELURAHAN JURANGOMBO UTARA	
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan															
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				unit Unit	36.881.525,00	Kota Magelang, Magelang Selatan, Jurangombo Utara	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	-		40.569.678,00	KELURAHAN JURANGOMBO UTARA	
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya															
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				15 Unit	14.674.800,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	-		16.142.280,00	KELURAHAN JURANGOMBO UTARA	
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya															
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi				1 Unit	32.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	-		35.750.000,00	KELURAHAN JURANGOMBO UTARA	
2.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	-			-	1.225.550.868,00						-	1.319.769.405,00		
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-			-	1.225.550.868,00			-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing dan Berkarakter	-	-	1.319.769.405,00	KELURAHAN JURANGOMBO UTARA	
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan															
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				6 Lembaga Kemasyarakatan	19.020.500,00	Kota Magelang, Magelang Selatan, Jurangombo Utara	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing dan Berkarakter	-		21.571.000,00	KELURAHAN JURANGOMBO UTARA	
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan															
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				37 Unit	523.589.568,00	Kota Magelang, Magelang Selatan, Jurangombo Utara	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamis	-		520.948.525,00	KELURAHAN JURANGOMBO UTARA	
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan															
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				5 Pokmas / Ormas	675.440.800,00	Kota Magelang, Magelang Selatan, Jurangombo Utara	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing dan Berkarakter	-		768.999.880,00	KELURAHAN JURANGOMBO UTARA	
	7.01.03.2.02.0004	Evaluasi Kelurahan															
			Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan				0 Laporan	7.500.000,00	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing dan Berkarakter	-		8.250.000,00	KELURAHAN JURANGOMBO UTARA	
		KELURAHAN TIDAR SELATAN							2.174.257.073,00							2.265.785.800,00	
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							2.174.257.073,00							2.265.785.800,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01	KECAMATAN						2.174.257.073,00							2.265.785.800,00	
1.	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-			-	341.740.840,00						-	420.600.000,00	
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	42.194.400,00			-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	-	-	45.600.000,00	KELURAHAN SELATAN TIDAR
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				4 Paket	3.000.000,00	Kota Magelang, Magelang Selatan, Tidar Selatan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	-		3.500.000,00	KELURAHAN SELATAN TIDAR
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				6 Paket	7.892.800,00	Kota Magelang, Magelang Selatan, Tidar Selatan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	-		8.000.000,00	KELURAHAN SELATAN TIDAR
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				3 Paket	3.926.000,00	Kota Magelang, Magelang Selatan, Tidar Selatan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	-		4.200.000,00	KELURAHAN SELATAN TIDAR
	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	3.060.000,00	Kota Magelang, Magelang Selatan, Tidar Selatan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	-		3.400.000,00	KELURAHAN SELATAN TIDAR
	7.01.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material														
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				12 Paket	3.115.600,00	Kota Magelang, Magelang Selatan, Tidar Selatan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	-		3.500.000,00	KELURAHAN SELATAN TIDAR
	7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				6 Laporan	3.600.000,00	Kota Magelang, Magelang Selatan, Tidar Selatan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	-		4.000.000,00	KELURAHAN SELATAN TIDAR
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				13 Laporan	17.600.000,00	Kota Magelang, Magelang Selatan, Tidar Selatan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	-		19.000.000,00	KELURAHAN SELATAN TIDAR
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	221.993.440,00			-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	-	-	296.000.000,00	KELURAHAN SELATAN TIDAR
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	25.667.400,00	Kota Magelang, Magelang Selatan, Tidar Selatan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	-		26.000.000,00	KELURAHAN SELATAN TIDAR
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	196.326.040,00	Kota Magelang, Magelang Selatan, Tidar Selatan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	-		270.000.000,00	KELURAHAN SELATAN TIDAR
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	77.553.000,00			-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	-	-	79.000.000,00	KELURAHAN SELATAN TIDAR
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				5 Unit	18.880.000,00	Kota Magelang, Magelang Selatan, Tidar Selatan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	-		19.000.000,00	KELURAHAN SELATAN TIDAR
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				5 Unit	19.523.400,00	Kota Magelang, Magelang Selatan, Tidar Selatan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	-		20.000.000,00	KELURAHAN SELATAN TIDAR
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				18 Unit	12.730.000,00	Kota Magelang, Magelang Selatan, Tidar Selatan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	-		13.000.000,00	KELURAHAN SELATAN TIDAR
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi				1 Unit	26.419.600,00	Kota Magelang, Magelang Selatan, Tidar Selatan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	-		27.000.000,00	KELURAHAN SELATAN TIDAR
2.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	-			-	1.832.516.233,00						-	1.845.185.800,00	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-			-	1.832.516.233,00			-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing dan Berkarakter	-	-	1.845.185.800,00	KELURAHAN SELATAN TIDAR
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan														
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				8 Lembaga Kemasyarakatan	24.685.800,00	Kota Magelang, Magelang Selatan, Tidar Selatan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing dan Berkarakter	-		25.185.800,00	KELURAHAN SELATAN TIDAR
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				3 Unit	905.570.833,00	Kota Magelang, Magelang Selatan, Tidar Selatan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamis	-		900.000.000,00	KELURAHAN SELATAN TIDAR
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan														
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				2 Pokmas / Ormas	892.759.600,00	Kota Magelang, Magelang Selatan, Tidar Selatan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing dan Berkarakter	-		910.000.000,00	KELURAHAN SELATAN TIDAR
	7.01.03.2.02.0004	Evaluasi Kelurahan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan				1 Laporan	9.500.000,00	Kota Magelang, Magelang Selatan, Tidar Selatan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing dan Berkarakter	-		10.000.000,00	KELURAHAN SELATAN TIDAR
		KELURAHAN TIDAR UTARA						2.639.559.303,00							2.738.960.000,00	
	7	UNSUR KEWILAYAHAN						2.639.559.303,00							2.738.960.000,00	
	7.01	KECAMATAN						2.639.559.303,00							2.738.960.000,00	
1.	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-			-	250.098.280,00						-	302.960.000,00	
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	44.007.650,00			-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	-	-	50.960.000,00	KELURAHAN TIDAR UTARA
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				4 Paket	3.417.250,00	Kota Magelang, Magelang Selatan, Tidar Utara	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	-		3.500.000,00	KELURAHAN TIDAR UTARA
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				2 Paket	1.725.000,00	Kota Magelang, Magelang Selatan, Tidar Utara	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	-		2.000.000,00	KELURAHAN TIDAR UTARA
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				4 Paket	7.231.000,00	Kota Magelang, Magelang Selatan, Tidar Utara	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	-		7.500.000,00	KELURAHAN TIDAR UTARA
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				3 Paket	4.901.000,00	Kota Magelang, Magelang Selatan, Tidar Utara	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	-		5.500.000,00	KELURAHAN TIDAR UTARA
	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	3.060.000,00	Kota Magelang, Magelang Selatan, Tidar Utara	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	-		3.060.000,00	KELURAHAN TIDAR UTARA
	7.01.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material														
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				4 Paket	2.893.400,00	Kota Magelang, Magelang Selatan, Tidar Utara	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	-		3.000.000,00	KELURAHAN TIDAR UTARA
	7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				6 Laporan	2.280.000,00	Kota Magelang, Magelang Selatan, Tidar Utara	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	-		2.400.000,00	KELURAHAN TIDAR UTARA
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				11 Laporan	18.500.000,00	Kota Magelang, Magelang Selatan, Tidar Utara	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola	-		24.000.000,00	KELURAHAN TIDAR UTARA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
												Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif				
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	129.989.430,00			-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	-	-	169.000.000,00	KELURAHAN TIDAR UTARA
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	28.033.200,00	Kota Magelang, Magelang Selatan, Tidar Utara	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	-		29.000.000,00	KELURAHAN TIDAR UTARA
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	101.956.230,00	Kota Magelang, Magelang Selatan, Tidar Utara	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	-		140.000.000,00	KELURAHAN TIDAR UTARA
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	76.101.200,00			-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	-	-	83.000.000,00	KELURAHAN TIDAR UTARA
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				5 Unit	13.180.000,00	Kota Magelang, Magelang Selatan, Tidar Utara	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	-		17.500.000,00	KELURAHAN TIDAR UTARA
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				5 Unit	21.441.200,00	Kota Magelang, Magelang Selatan, Tidar Utara	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	-		24.000.000,00	KELURAHAN TIDAR UTARA
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				9 Unit	6.480.000,00	Kota Magelang, Magelang Selatan, Tidar Utara	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	-		6.500.000,00	KELURAHAN TIDAR UTARA
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi				1 Unit	35.000.000,00	Kota Magelang, Magelang Selatan, Tidar Utara	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	-		35.000.000,00	KELURAHAN TIDAR UTARA
2.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	-			-	2.389.461.023,00						-	2.436.000.000,00	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-			-	2.389.461.023,00			-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamis	-	-	2.436.000.000,00	KELURAHAN TIDAR UTARA
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan														
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				12 Lembaga Kemasyarakatan	26.180.000,00	Kota Magelang, Magelang Selatan, Tidar Utara	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamis	-		27.000.000,00	KELURAHAN TIDAR UTARA
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				8 Unit	1.104.722.023,00	Kota Magelang, Magelang Selatan, Tidar Utara	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamis	-		1.100.000.000,00	KELURAHAN TIDAR UTARA	
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan															
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				2 Pokmas / Ormas	1.250.411.400,00	Kota Magelang, Magelang Selatan, Tidar Utara	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamis	-		1.300.000.000,00	KELURAHAN TIDAR UTARA	
	7.01.03.2.02.0004	Evaluasi Kelurahan															
			Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan				1 Laporan	8.147.600,00	Kota Magelang, Magelang Selatan, Tidar Utara	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing dan Berkarakter	-		9.000.000,00	KELURAHAN TIDAR UTARA	
		KELURAHAN REJOWINANGUN SELATAN							2.505.561.584,00							2.611.735.872,00	
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							2.505.561.584,00						2.611.735.872,00		
	7.01	KECAMATAN							2.505.561.584,00						2.611.735.872,00		
1.	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-			-	295.371.310,00						-	355.235.872,00		
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	46.362.100,00			-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	-	-	54.200.000,00	KELURAHAN REJOWINANGUN SELATAN	
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor															
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				12 Paket	3.199.600,00	Kota Magelang, Magelang Selatan, Rejowinangun Selatan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	-		3.500.000,00	KELURAHAN REJOWINANGUN SELATAN	
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor															
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				3 Paket	8.761.800,00	Kota Magelang, Magelang Selatan, Rejowinangun Selatan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	-		9.500.000,00	KELURAHAN REJOWINANGUN SELATAN	
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan															
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	6.421.000,00	Kota Magelang, Magelang Selatan, Rejowinangun Selatan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	-		6.500.000,00	KELURAHAN REJOWINANGUN SELATAN	
	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan															
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	3.000.000,00	Kota Magelang, Magelang Selatan, Rejowinangun Selatan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	-		3.500.000,00	KELURAHAN REJOWINANGUN SELATAN	
	7.01.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material															
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				12 Paket	2.999.700,00	Kota Magelang, Magelang Selatan, Rejowinangun Selatan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	-		3.500.000,00	KELURAHAN REJOWINANGUN SELATAN	
	7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu															
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				6 Laporan	2.280.000,00	Kota Magelang, Magelang Selatan,	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola	-		2.700.000,00	KELURAHAN REJOWINANGUN SELATAN	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
									Rejowinangun Selatan			Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif				
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	19.700.000,00	Kota Magelang, Magelang Selatan, Rejowinangun Selatan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	-		25.000.000,00	KELURAHAN REJOWINANGUN SELATAN
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	164.996.210,00			-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	-	-	211.535.872,00	KELURAHAN REJOWINANGUN SELATAN
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	25.994.000,00	Kota Magelang, Magelang Selatan, Rejowinangun Selatan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	-		26.200.000,00	KELURAHAN REJOWINANGUN SELATAN
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	139.002.210,00	Kota Magelang, Magelang Selatan, Rejowinangun Selatan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	-		185.335.872,00	KELURAHAN REJOWINANGUN SELATAN
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	84.013.000,00			-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	-	-	89.500.000,00	KELURAHAN REJOWINANGUN SELATAN
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				5 Unit	19.960.000,00	Kota Magelang, Magelang Selatan, Rejowinangun Selatan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	-		21.000.000,00	KELURAHAN REJOWINANGUN SELATAN
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				5 Unit	10.950.000,00	Kota Magelang, Magelang Selatan, Rejowinangun Selatan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	-		12.000.000,00	KELURAHAN REJOWINANGUN SELATAN
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				12 Unit	9.050.000,00	Kota Magelang, Magelang Selatan, Rejowinangun Selatan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	-		9.500.000,00	KELURAHAN REJOWINANGUN SELATAN
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi				2 Unit	44.053.000,00	Kota Magelang, Magelang Selatan, Rejowinangun Selatan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	-		47.000.000,00	KELURAHAN REJOWINANGUN SELATAN
2.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	-			-	2.210.190.274,00						-	2.256.500.000,00	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-			-	2.210.190.274,00			-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing dan Berkarakter	-	-	2.256.500.000,00	KELURAHAN REJOWINANGUN SELATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan														
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				10 Lembaga Kemasyarakatan	25.326.400,00	Kota Magelang, Magelang Selatan, Rejowinangun Selatan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing dan Berkarakter	-		26.500.000,00	KELURAHAN REJOWINANGUN SELATAN
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				6 Unit	1.052.728.274,00	Kota Magelang, Magelang Selatan, Rejowinangun Selatan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamis	-		1.020.000.000,00	KELURAHAN REJOWINANGUN SELATAN
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan														
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				2 Pokmas / Ormas	1.123.591.600,00	Kota Magelang, Magelang Selatan, Rejowinangun Selatan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing dan Berkarakter	-		1.200.000.000,00	KELURAHAN REJOWINANGUN SELATAN
	7.01.03.2.02.0004	Evaluasi Kelurahan														
			Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan				1 Laporan	8.544.000,00	Kota Magelang, Magelang Selatan, Rejowinangun Selatan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing dan Berkarakter	-		10.000.000,00	KELURAHAN REJOWINANGUN SELATAN
		KELURAHAN MAGERSARI						2.886.986.314,00							2.542.700.000,00	
	7	UNSUR KEWILAYAHAN						2.886.986.314,00							2.542.700.000,00	
	7.01	KECAMATAN						2.886.986.314,00							2.542.700.000,00	
1.	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-			-	546.178.850,00						-	69.500.000,00	
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	31.968.100,00			-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	-	-	24.000.000,00	KELURAHAN MAGERSARI
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	2.000.000,00	Kota Magelang, Magelang Selatan, Magersari	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	-		0,00	KELURAHAN MAGERSARI
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	854.500,00	Kota Magelang, Magelang Selatan, Magersari	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	-		0,00	KELURAHAN MAGERSARI
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				4 Paket	5.975.300,00	Kota Magelang, Magelang Selatan, Magersari	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	-		0,00	KELURAHAN MAGERSARI
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	3.000.000,00	Kota Magelang, Magelang Selatan, Magersari	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	-		3.100.000,00	KELURAHAN MAGERSARI
	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	1.800.000,00	Kota Magelang, Magelang Selatan, Magersari	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	-		0,00	KELURAHAN MAGERSARI
	7.01.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material														
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				12 Paket	2.998.300,00	Kota Magelang, Magelang Selatan, Magersari	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	-		3.000.000,00	KELURAHAN MAGERSARI
	7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														
			Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu				6 Laporan	2.840.000,00	Kota Magelang, Magelang Selatan, Magersari	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	-		3.900.000,00	KELURAHAN MAGERSARI
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				2 Laporan	12.500.000,00	Kota Magelang, Magelang Selatan, Magersari Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	-		14.000.000,00	KELURAHAN MAGERSARI
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	230.789.050,00			-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	-	-	0,00	KELURAHAN MAGERSARI
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				4 Laporan	29.000.900,00	Kota Magelang, Magelang Selatan, Magersari	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	-		0,00	KELURAHAN MAGERSARI
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	201.788.150,00	Kota Magelang, Magelang Selatan, Magersari	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	-		0,00	KELURAHAN MAGERSARI
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	283.421.700,00			-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	-	-	45.500.000,00	KELURAHAN MAGERSARI
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				4 Unit	12.266.000,00	Kota Magelang, Magelang Selatan, Magersari	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	-		13.000.000,00	KELURAHAN MAGERSARI
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				4 Unit	25.565.700,00	Kota Magelang, Magelang Selatan, Magersari	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	-		26.000.000,00	KELURAHAN MAGERSARI
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				9 Unit	6.480.000,00	Kota Magelang, Magelang Selatan, Magersari	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	-		6.500.000,00	KELURAHAN MAGERSARI

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi				1 Unit	239.110.000,00	Kota Magelang, Magelang Selatan, Magersari	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	-		0,00	KELURAHAN MAGERSARI
2.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	-			-	2.340.807.464,00						-	2.473.200.000,00	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-			-	2.340.807.464,00			-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing dan Berkarakter	-	-	2.473.200.000,00	KELURAHAN MAGERSARI
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan														
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				8 Lembaga Kemasyarakatan	24.186.300,00	Kota Magelang, Magelang Selatan, Magersari	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing dan Berkarakter	-		24.200.000,00	KELURAHAN MAGERSARI
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				3 Unit	1.177.803.064,00	Kota Magelang, Magelang Selatan, Magersari	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamis	-		1.313.000.000,00	KELURAHAN MAGERSARI
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan														
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				2 Pokmas / Ormas	1.133.811.500,00	Kota Magelang, Magelang Selatan, Magersari	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamis	-		1.136.000.000,00	KELURAHAN MAGERSARI
	7.01.03.2.02.0004	Evaluasi Kelurahan														
			Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan				1 Laporan	5.006.600,00	Kota Magelang, Magelang Selatan, Magersari	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing dan Berkarakter	-		0,00	KELURAHAN MAGERSARI
		KECAMATAN MAGELANG TENGAH						11.960.119.866,00							12.853.639.961,00	
	7	UNSUR KEWILAYAHAN						11.960.119.866,00							12.853.639.961,00	
	7.01	KECAMATAN						11.960.119.866,00							12.853.639.961,00	
1.	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-			-	10.753.047.526,00						-	11.384.639.961,00	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	71.031.700,00			-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	-	-	69.518.900,00	KECAMATAN MAGELANG TENGAH
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				3 Dokumen	6.536.400,00	Kota Magelang, Magelang Tengah, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	-		9.594.000,00	KECAMATAN MAGELANG TENGAH
	7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD														
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	4.201.100,00	Kota Magelang, Magelang Tengah, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	-		5.375.000,00	KECAMATAN MAGELANG TENGAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD														
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	4.897.300,00	Kota Magelang, Magelang Tengah, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	-		6.329.000,00	KECAMATAN MAGELANG TENGAH
	7.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD														
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	2.727.400,00	Kota Magelang, Magelang Tengah, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	-		4.612.300,00	KECAMATAN MAGELANG TENGAH
	7.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD														
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	2.985.300,00	Kota Magelang, Magelang Tengah, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	-		4.247.000,00	KECAMATAN MAGELANG TENGAH
	7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				12 Laporan	49.684.200,00	Kota Magelang, Magelang Tengah, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	-		39.361.600,00	KECAMATAN MAGELANG TENGAH
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	10.377.350.826,00			-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	-	-	10.912.903.461,00	KECAMATAN MAGELANG TENGAH
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				65 Orang/ bulan	10.361.402.226,00	Kota Magelang, Magelang Tengah, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	-		10.892.769.961,00	KECAMATAN MAGELANG TENGAH
	7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verifkasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	15.948.600,00	Kota Magelang, Magelang Tengah, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	-		20.133.500,00	KECAMATAN MAGELANG TENGAH
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	61.783.100,00			-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	-	-	91.367.600,00	KECAMATAN MAGELANG TENGAH
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				3 Paket	4.497.000,00	Kota Magelang, Magelang Tengah, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	-		4.947.000,00	KECAMATAN MAGELANG TENGAH
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				3 Paket	13.909.500,00	Kota Magelang, Magelang Tengah, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	-		15.300.000,00	KECAMATAN MAGELANG TENGAH
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	4.430.000,00	Kota Magelang, Magelang Tengah, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan	-		4.597.900,00	KECAMATAN MAGELANG TENGAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
												Berintegritas dan Dinamistif				
	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				2 Dokumen	4.440.000,00	Kota Magelang, Magelang Tengah, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	-		10.770.000,00	KECAMATAN MAGELANG TENGAH
	7.01.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material														
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				3 Paket	9.790.600,00	Kota Magelang, Magelang Tengah, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	-		10.769.700,00	KECAMATAN MAGELANG TENGAH
	7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	7.200.000,00	Kota Magelang, Magelang Tengah, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	-		10.560.000,00	KECAMATAN MAGELANG TENGAH
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				2 Laporan	17.516.000,00	Kota Magelang, Magelang Tengah, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	-		34.423.000,00	KECAMATAN MAGELANG TENGAH
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	16.839.200,00			-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	-	-	31.000.000,00	KECAMATAN MAGELANG TENGAH
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				3 Unit	16.839.200,00	Kota Magelang, Magelang Tengah, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	-		31.000.000,00	KECAMATAN MAGELANG TENGAH
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	138.329.800,00			-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	-	-	167.000.000,00	KECAMATAN MAGELANG TENGAH
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	2.339.800,00	Kota Magelang, Magelang Tengah, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	-		3.000.000,00	KECAMATAN MAGELANG TENGAH
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	63.000.000,00	Kota Magelang, Magelang Tengah, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	-		65.000.000,00	KECAMATAN MAGELANG TENGAH
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	72.990.000,00	Kota Magelang, Magelang Tengah, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	-		99.000.000,00	KECAMATAN MAGELANG TENGAH
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	87.712.900,00			-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan	-	-	112.850.000,00	KECAMATAN MAGELANG TENGAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
												Berintegritas dan Dinamistif				
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				9 Unit	38.277.000,00	Kota Magelang, Magelang Tengah, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	-		55.000.000,00	KECAMATAN MAGELANG TENGAH
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				5 Unit	27.680.400,00	Kota Magelang, Magelang Tengah, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	-		36.000.000,00	KECAMATAN MAGELANG TENGAH
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				5 Unit	13.850.000,00	Kota Magelang, Magelang Tengah, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	-		13.850.000,00	KECAMATAN MAGELANG TENGAH
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi				1 Unit	7.905.500,00	Kota Magelang, Magelang Tengah, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	-		8.000.000,00	KECAMATAN MAGELANG TENGAH
2.	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-	-			-	230.389.100,00						-	379.000.000,00	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	-	-			-	3.905.400,00			-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	-	-	6.000.000,00	KECAMATAN MAGELANG TENGAH
	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan														
			Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				12 Dokumen	3.905.400,00	Kota Magelang, Magelang Tengah, Semua Kel/Desa Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	-		6.000.000,00	KECAMATAN MAGELANG TENGAH
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	-	-			-	153.877.200,00			-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	-	-	298.000.000,00	KECAMATAN MAGELANG TENGAH
	7.01.02.2.02.0001	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan				1 Dokumen	32.757.700,00	Kota Magelang, Magelang Tengah, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	-		32.000.000,00	KECAMATAN MAGELANG TENGAH
	7.01.02.2.02.0002	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan														
			Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan				12 Laporan	107.250.400,00	Kota Magelang, Magelang Tengah, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	-		250.000.000,00	KECAMATAN MAGELANG TENGAH
	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan														
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				12 Laporan	13.869.100,00	Kota Magelang, Magelang Tengah, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	-		16.000.000,00	KECAMATAN MAGELANG TENGAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	-	-			-	72.606.500,00			-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	-	-	75.000.000,00	KECAMATAN MAGELANG TENGAH
	7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan														
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				2 Laporan	72.606.500,00	Kota Magelang, Magelang Tengah, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	-		75.000.000,00	KECAMATAN MAGELANG TENGAH
3.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	-			-	261.442.500,00						-	299.000.000,00	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-			-	50.000.000,00			-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamis	-	-	50.000.000,00	KECAMATAN MAGELANG TENGAH
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				7 Unit	50.000.000,00	Kota Magelang, Magelang Tengah, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamis	-		50.000.000,00	KECAMATAN MAGELANG TENGAH
	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	-	-			-	18.853.200,00			-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	-	-	19.000.000,00	KECAMATAN MAGELANG TENGAH
	7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan														
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan				6 Lembaga Kemasyarakatan	18.853.200,00	Kota Magelang, Magelang Tengah, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	-		19.000.000,00	KECAMATAN MAGELANG TENGAH
	7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	-	-			-	192.589.300,00			-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	-	-	230.000.000,00	KECAMATAN MAGELANG TENGAH
	7.01.03.2.06.0002	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat														
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat				180 Keluarga	192.589.300,00	Kota Magelang, Magelang Tengah, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	-		230.000.000,00	KECAMATAN MAGELANG TENGAH
4.	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	-	-			-	702.774.340,00						-	775.000.000,00	
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	-	-			-	702.774.340,00			-	-	-	-	775.000.000,00	KECAMATAN MAGELANG TENGAH
	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan														
			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				12 Laporan	517.774.400,00	Kota Magelang, Magelang Tengah, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		590.000.000,00	KECAMATAN MAGELANG TENGAH
	7.01.04.2.01.0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat														
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat				3 Laporan	184.999.940,00	Kota Magelang, Magelang Tengah, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	-		185.000.000,00	KECAMATAN MAGELANG TENGAH
5.	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	-	-			-	12.466.400,00						-	16.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	-	-			-	12.466.400,00			-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	-	-	16.000.000,00	KECAMATAN MAGELANG TENGAH
	7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan														
			Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan				12 Dokumen	12.466.400,00	Kota Magelang, Magelang Tengah, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	-		16.000.000,00	KECAMATAN MAGELANG TENGAH
		KELURAHAN KEMIRIREJO						2.119.966.733,00							2.259.418.402,00	
	7	UNSUR KEWILAYAHAN						2.119.966.733,00							2.259.418.402,00	
	7.01	KECAMATAN						2.119.966.733,00							2.259.418.402,00	
1.	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-			-	331.235.292,00						-	462.060.300,00	
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	46.730.700,00			-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	-	-	53.770.700,00	KELURAHAN KEMIRIREJO
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1.952.200,00	Kota Magelang, Magelang Tengah, Kemirirejo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	-		2.000.000,00	KELURAHAN KEMIRIREJO
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	4.704.600,00	Kota Magelang, Magelang Tengah, Kemirirejo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	-		4.714.800,00	KELURAHAN KEMIRIREJO
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	7.061.100,00	Kota Magelang, Magelang Tengah, Kemirirejo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	-		0,00	KELURAHAN KEMIRIREJO
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	4.279.100,00	Kota Magelang, Magelang Tengah, Kemirirejo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	-		5.701.600,00	KELURAHAN KEMIRIREJO
	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	4.800.000,00	Kota Magelang, Magelang Tengah, Kemirirejo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	-		6.120.000,00	KELURAHAN KEMIRIREJO
	7.01.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material														
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				1 Paket	3.075.100,00	Kota Magelang, Magelang Tengah, Kemirirejo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	-		3.074.300,00	KELURAHAN KEMIRIREJO
	7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	3.870.000,00	Kota Magelang, Magelang Tengah, Kemirirejo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan	-		5.160.000,00	KELURAHAN KEMIRIREJO

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
												Berintegritas dan Dinamistif				
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				3 Laporan	16.988.600,00	Kota Magelang, Magelang Tengah, Kemirirejo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	-		27.000.000,00	KELURAHAN KEMIRIREJO
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	0,00			-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	-	-	21.857.800,00	KELURAHAN KEMIRIREJO
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				2 Unit	0,00	Kota Magelang, Magelang Tengah, Kemirirejo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	-		21.857.800,00	KELURAHAN KEMIRIREJO
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	202.024.092,00			-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	-	-	294.228.800,00	KELURAHAN KEMIRIREJO
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	810.900,00	Kota Magelang, Magelang Tengah, Kemirirejo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	-		1.500.000,00	KELURAHAN KEMIRIREJO
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	17.397.792,00	Kota Magelang, Magelang Tengah, Kemirirejo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	-		20.000.000,00	KELURAHAN KEMIRIREJO
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	183.815.400,00	Kota Magelang, Magelang Tengah, Kemirirejo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	-		272.728.800,00	KELURAHAN KEMIRIREJO
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	82.480.500,00			-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	-	-	92.203.000,00	KELURAHAN KEMIRIREJO
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				5 Unit	17.870.000,00	Kota Magelang, Magelang Tengah, Kemirirejo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	-		17.870.000,00	KELURAHAN KEMIRIREJO
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				6 Unit	43.743.000,00	Kota Magelang, Magelang Tengah, Kemirirejo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	-		43.743.000,00	KELURAHAN KEMIRIREJO
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				8 Unit	5.590.000,00	Kota Magelang, Magelang Tengah, Kemirirejo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan	-		5.590.000,00	KELURAHAN KEMIRIREJO

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
												Berintegritas dan Dinamistif				
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi				1 Unit	15.277.500,00	Kota Magelang, Magelang Tengah, Kemirirejo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	-		25.000.000,00	KELURAHAN KEMIRIREJO
2.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	-			-	1.788.731.441,00						-	1.797.358.102,00	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-			-	1.788.731.441,00			-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	-	-	1.797.358.102,00	KELURAHAN KEMIRIREJO
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan														
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				65 Lembaga Kemasyarakatan	28.218.100,00	Kota Magelang, Magelang Tengah, Kemirirejo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	-		28.218.100,00	KELURAHAN KEMIRIREJO
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				56 Unit	1.170.952.041,00	Kota Magelang, Magelang Tengah, Kemirirejo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	-		1.173.276.202,00	KELURAHAN KEMIRIREJO
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan														
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				2 Pokmas / Ormas	581.781.300,00	Kota Magelang, Magelang Tengah, Kemirirejo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	-		587.863.800,00	KELURAHAN KEMIRIREJO
	7.01.03.2.02.0004	Evaluasi Kelurahan														
			Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan				1 Laporan	7.780.000,00	Kota Magelang, Magelang Tengah, Kemirirejo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	-		8.000.000,00	KELURAHAN KEMIRIREJO
		KELURAHAN CACABAN						650.373.750,00							3.310.606.800,00	
	7	UNSUR KEWILAYAHAN						650.373.750,00							3.310.606.800,00	
	7.01	KECAMATAN						650.373.750,00							3.310.606.800,00	
1.	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan Magelang Tengah	-			100,00 %	217.487.350,00						-	377.606.800,00	
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Pengelaaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	-			100 %	37.971.500,00			-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	-	-	65.366.800,00	KELURAHAN CACABAN
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	2.500.000,00	Kota Magelang, Magelang Tengah, Cacaban	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	-		3.300.000,00	KELURAHAN CACABAN
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	0,00	Kota Magelang, Magelang Tengah, Cacaban	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	-		5.000.000,00	KELURAHAN CACABAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				4 Paket	8.000.000,00	Kota Magelang, Magelang Tengah, Cacaban	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	-		8.800.000,00	KELURAHAN CACABAN
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	4.903.500,00	Kota Magelang, Magelang Tengah, Cacaban	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	-		7.191.800,00	KELURAHAN CACABAN
	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	4.000.000,00	Kota Magelang, Magelang Tengah, Cacaban	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	-		5.900.000,00	KELURAHAN CACABAN
	7.01.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material														
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				12 Paket	4.000.000,00	Kota Magelang, Magelang Tengah, Cacaban	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	-		4.400.000,00	KELURAHAN CACABAN
	7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				6 Laporan	5.800.000,00	Kota Magelang, Magelang Tengah, Cacaban	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	-		10.560.000,00	KELURAHAN CACABAN
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				6 Laporan	8.768.000,00	Kota Magelang, Magelang Tengah, Cacaban	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	-		20.215.000,00	KELURAHAN CACABAN
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	15.500.000,00			-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	-	-	55.000.000,00	KELURAHAN CACABAN
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				16 Unit	15.500.000,00	Kota Magelang, Magelang Tengah, Cacaban	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	-		55.000.000,00	KELURAHAN CACABAN
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	111.614.600,00			-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	-	-	151.740.000,00	KELURAHAN CACABAN
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	2.882.100,00	Kota Magelang, Magelang Tengah, Cacaban	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	-		3.740.000,00	KELURAHAN CACABAN
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	25.775.000,00	Kota Magelang, Magelang Tengah, Cacaban	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan	-		28.000.000,00	KELURAHAN CACABAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
												Berintegritas dan Dinamistif				
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>				12 Laporan	82.957.500,00	Kota Magelang, Magelang Tengah, Cacaban	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	-		120.000.000,00	KELURAHAN CACABAN
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	52.401.250,00			-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	-	-	105.500.000,00	KELURAHAN CACABAN
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			<i>Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya</i>				4 Unit	13.371.000,00	Kota Magelang, Magelang Tengah, Cacaban	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	-		17.000.000,00	KELURAHAN CACABAN
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			<i>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya</i>				6 Unit	16.670.250,00	Kota Magelang, Magelang Tengah, Cacaban	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	-		22.500.000,00	KELURAHAN CACABAN
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			<i>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara</i>				0 Unit	10.360.000,00	Kota Magelang, Magelang Tengah, Cacaban	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	-		11.000.000,00	KELURAHAN CACABAN
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			<i>Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi</i>				2 Unit	12.000.000,00	Kota Magelang, Magelang Tengah, Cacaban	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	-		55.000.000,00	KELURAHAN CACABAN
2.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	-			-	432.886.400,00						-	2.933.000.000,00	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-			-	432.886.400,00			-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	-	-	2.933.000.000,00	KELURAHAN CACABAN
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan														
			<i>Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan</i>				74 Lembaga Kemasyarakatan	31.899.800,00	Kota Magelang, Magelang Tengah, Cacaban	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	-		33.000.000,00	KELURAHAN CACABAN
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan														
			<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun</i>				74 Unit	0,00	Kota Magelang, Magelang Tengah, Cacaban	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	-		1.500.000.000,00	KELURAHAN CACABAN
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan														
			<i>Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan</i>				2 Pokmas / Ormas	400.986.600,00	Kota Magelang, Magelang Tengah, Cacaban	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	-		1.400.000.000,00	KELURAHAN CACABAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		KELURAHAN MAGELANG						2.480.224.670,00							2.498.344.450,00	
	7	UNSUR KEWILAYAHAN						2.480.224.670,00							2.498.344.450,00	
	7.01	KECAMATAN						2.480.224.670,00							2.498.344.450,00	
1.	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-			-	560.477.000,00						-	612.794.600,00	
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	51.497.700,00			-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	-	-	56.886.600,00	KELURAHAN MAGELANG
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				7 Paket	2.484.400,00	Kota Magelang, Magelang Tengah, Magelang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	-		2.000.000,00	KELURAHAN MAGELANG
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				2 Paket	993.300,00	Kota Magelang, Magelang Tengah, Magelang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		2.000.000,00	KELURAHAN MAGELANG
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				4 Paket	7.323.000,00	Kota Magelang, Magelang Tengah, Magelang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	-		7.188.600,00	KELURAHAN MAGELANG
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				3 Paket	9.938.000,00	Kota Magelang, Magelang Tengah, Magelang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		9.938.000,00	KELURAHAN MAGELANG
	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	1.560.000,00	Kota Magelang, Magelang Tengah, Magelang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		1.560.000,00	KELURAHAN MAGELANG
	7.01.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material														
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				15 Paket	3.599.000,00	Kota Magelang, Magelang Tengah, Magelang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		3.600.000,00	KELURAHAN MAGELANG
	7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	8.000.000,00	Kota Magelang, Magelang Tengah, Magelang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		8.000.000,00	KELURAHAN MAGELANG
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	17.600.000,00	Kota Magelang, Magelang Tengah, Magelang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		22.600.000,00	KELURAHAN MAGELANG
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	277.265.000,00			-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamis	-	-	277.265.000,00	KELURAHAN MAGELANG
	7.01.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				1 Unit	277.265.000,00	Kota Magelang, Magelang Tengah, Magelang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamis	-		277.265.000,00	KELURAHAN MAGELANG
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	154.571.300,00			-	-	-	-	200.500.000,00	KELURAHAN MAGELANG
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)			
											NASIONAL	DAERAH						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1.000.000,00	Kota Magelang, Magelang Tengah, Magelang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		1.000.000,00	KELURAHAN MAGELANG		
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	24.100.000,00	Kota Magelang, Magelang Tengah, Magelang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		24.500.000,00	KELURAHAN MAGELANG		
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	129.471.300,00	Kota Magelang, Magelang Tengah, Magelang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		175.000.000,00	KELURAHAN MAGELANG		
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	77.143.000,00			-	-	-	-	78.143.000,00	KELURAHAN MAGELANG		
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				6 Unit	24.084.000,00	Kota Magelang, Magelang Tengah, Magelang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		25.084.000,00	KELURAHAN MAGELANG		
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				1 Unit	32.465.000,00	Kota Magelang, Magelang Tengah, Magelang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		32.465.000,00	KELURAHAN MAGELANG		
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				15 Unit	10.594.000,00	Kota Magelang, Magelang Tengah, Magelang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		10.594.000,00	KELURAHAN MAGELANG		
	7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi				1 Unit	10.000.000,00	Kota Magelang, Magelang Tengah, Magelang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		10.000.000,00	KELURAHAN MAGELANG		
2.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	-			-	1.919.747.670,00						-	1.885.549.850,00			
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-			-	1.919.747.670,00			-	-	-	-	1.885.549.850,00	KELURAHAN MAGELANG		
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan																
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				12 Lembaga Kemasyarakatan	21.300.000,00	Kota Magelang, Magelang Tengah, Magelang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		21.300.000,00	KELURAHAN MAGELANG		
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				13 Unit	940.760.670,00	Kota Magelang, Magelang Tengah, Magelang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		942.539.750,00	KELURAHAN MAGELANG		
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				2 Pokmas / Ormas	950.187.000,00	Kota Magelang, Magelang Tengah, Magelang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		914.210.100,00	KELURAHAN MAGELANG		
	7.01.03.2.02.0004	Evaluasi Kelurahan																
			Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan				1 Laporan	7.500.000,00	Kota Magelang, Magelang Tengah, Magelang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		7.500.000,00	KELURAHAN MAGELANG		
		KELURAHAN REJOWINANGUN UTARA							3.882.803.438,00								4.647.637.238,00	
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							3.882.803.438,00						4.647.637.238,00			
	7.01	KECAMATAN							3.882.803.438,00						4.647.637.238,00			
1.	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-			-	207.799.700,00						-	376.207.000,00			
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	36.935.200,00			-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	-	-	38.747.000,00	KELURAHAN REJOWINANGUN UTARA		
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor																

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				4 Paket	1.692.000,00	Kota Magelang, Magelang Tengah, Rejowinangun Utara	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	-		1.700.000,00	KELURAHAN REJOWINANGUN UTARA
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				4 Paket	9.882.200,00	Kota Magelang, Magelang Tengah, Rejowinangun Utara	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	-		9.950.000,00	KELURAHAN REJOWINANGUN UTARA
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	4.421.000,00	Kota Magelang, Magelang Tengah, Rejowinangun Utara	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	-		5.950.000,00	KELURAHAN REJOWINANGUN UTARA
	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	2.400.000,00	Kota Magelang, Magelang Tengah, Rejowinangun Utara	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	-		2.550.000,00	KELURAHAN REJOWINANGUN UTARA
	7.01.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material														
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				10 Paket	1.628.000,00	Kota Magelang, Magelang Tengah, Rejowinangun Utara	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	-		1.685.000,00	KELURAHAN REJOWINANGUN UTARA
	7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	4.400.000,00	Kota Magelang, Magelang Tengah, Rejowinangun Utara	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	-		4.400.000,00	KELURAHAN REJOWINANGUN UTARA
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12.512.000,00	Kota Magelang, Magelang Tengah, Rejowinangun Utara	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	-		12.512.000,00	KELURAHAN REJOWINANGUN UTARA
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	120.537.500,00			-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	-	-	151.550.000,00	KELURAHAN REJOWINANGUN UTARA
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	1.000.000,00	Kota Magelang, Magelang Tengah, Rejowinangun Utara	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	-		1.200.000,00	KELURAHAN REJOWINANGUN UTARA
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	28.300.000,00	Kota Magelang, Magelang Tengah, Rejowinangun Utara	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	-		28.350.000,00	KELURAHAN REJOWINANGUN UTARA
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	91.237.500,00	Kota Magelang, Magelang Tengah, Rejowinangun Utara	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan	-		122.000.000,00	KELURAHAN REJOWINANGUN UTARA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
												Berintegritas dan Dinamistif				
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	50.327.000,00			-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	-	-	185.910.000,00	KELURAHAN REJOWINANGUN UTARA
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				10 Unit	16.788.000,00	Kota Magelang, Magelang Tengah, Rejowinangun Utara	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	-		16.788.000,00	KELURAHAN REJOWINANGUN UTARA
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				1 Unit	9.522.000,00	Kota Magelang, Magelang Tengah, Rejowinangun Utara	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	-		9.522.000,00	KELURAHAN REJOWINANGUN UTARA
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				13 Unit	12.017.000,00	Kota Magelang, Magelang Tengah, Rejowinangun Utara	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	-		12.100.000,00	KELURAHAN REJOWINANGUN UTARA
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi				3 Unit	12.000.000,00	Kota Magelang, Magelang Tengah, Rejowinangun Utara	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	-		147.500.000,00	KELURAHAN REJOWINANGUN UTARA
2.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	-			-	3.675.003.738,00						-	4.271.430.238,00	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-			-	3.675.003.738,00			-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	-	-	4.271.430.238,00	KELURAHAN REJOWINANGUN UTARA
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan														
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				12 Lembaga Kemasyarakatan	35.179.000,00	Kota Magelang, Magelang Tengah, Rejowinangun Utara	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	-		36.900.000,00	KELURAHAN REJOWINANGUN UTARA
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				78 Unit	2.226.498.038,00	Kota Magelang, Magelang Tengah, Rejowinangun Utara	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	-		2.802.956.038,00	KELURAHAN REJOWINANGUN UTARA
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan														
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				2 Pokmas / Ormas	1.403.976.700,00	Kota Magelang, Magelang Tengah, Rejowinangun Utara	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	-		1.422.224.200,00	KELURAHAN REJOWINANGUN UTARA
	7.01.03.2.02.0004	Evaluasi Kelurahan														
			Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan				1 Laporan	9.350.000,00	Kota Magelang, Magelang Tengah, Rejowinangun Utara	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	-		9.350.000,00	KELURAHAN REJOWINANGUN UTARA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		KELURAHAN PANJANG						2.248.079.125,00							400.013.200,00	
	7	UNSUR KEWILAYAHAN						2.248.079.125,00							400.013.200,00	
	7.01	KECAMATAN						2.248.079.125,00							400.013.200,00	
1.	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-			-	365.345.950,00						-	400.013.200,00	
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	41.426.100,00			-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	-	-	27.600.000,00	KELURAHAN PANJANG
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				2 Paket	1.974.900,00	Kota Magelang, Magelang Tengah, Panjang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	-		2.000.000,00	KELURAHAN PANJANG
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				4 Paket	4.616.200,00	Kota Magelang, Magelang Tengah, Panjang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	-		0,00	KELURAHAN PANJANG
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Paket	6.000.000,00	Kota Magelang, Magelang Tengah, Panjang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	-		10.000.000,00	KELURAHAN PANJANG
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	2.000.000,00	Kota Magelang, Magelang Tengah, Panjang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	-		3.500.000,00	KELURAHAN PANJANG
	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				0 Dokumen	1.200.000,00	Kota Magelang, Magelang Tengah, Panjang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	-		2.000.000,00	KELURAHAN PANJANG
	7.01.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material														
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				12 Paket	4.500.000,00	Kota Magelang, Magelang Tengah, Panjang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	-		4.500.000,00	KELURAHAN PANJANG
	7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	1.800.000,00	Kota Magelang, Magelang Tengah, Panjang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	-		5.600.000,00	KELURAHAN PANJANG
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	19.335.000,00	Kota Magelang, Magelang Tengah, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	-		0,00	KELURAHAN PANJANG
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	36.180.000,00			-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan	-	-	0,00	KELURAHAN PANJANG

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
												Berintegritas dan Dinamistif				
	7.01.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				1 Unit	0,00	Kota Magelang, Magelang Tengah, Panjang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	-		0,00	KELURAHAN PANJANG
	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel														
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				50 Unit	24.180.000,00	Kota Magelang, Magelang Tengah, Panjang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	-		0,00	KELURAHAN PANJANG
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				4 Unit	12.000.000,00	Kota Magelang, Magelang Tengah, Panjang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	-		0,00	KELURAHAN PANJANG
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	209.542.400,00			-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	-	-	276.179.200,00	KELURAHAN PANJANG
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1.000.000,00	Kota Magelang, Magelang Tengah, Panjang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	-		0,00	KELURAHAN PANJANG
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	26.800.000,00	Kota Magelang, Magelang Tengah, Panjang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	-		25.000.000,00	KELURAHAN PANJANG
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	181.742.400,00	Kota Magelang, Magelang Tengah, Panjang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	-		251.179.200,00	KELURAHAN PANJANG
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	78.197.450,00			-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	-	-	96.234.000,00	KELURAHAN PANJANG
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				5 Unit	12.448.500,00	Kota Magelang, Magelang Tengah, Panjang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	-		25.000.000,00	KELURAHAN PANJANG
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				2 Unit	22.514.950,00	Kota Magelang, Magelang Tengah, Panjang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	-		35.000.000,00	KELURAHAN PANJANG
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
			<i>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara</i>				17 Unit	23.234.000,00	Kota Magelang, Magelang Tengah, Panjang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	-		11.234.000,00	KELURAHAN PANJANG	
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya															
			<i>Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi</i>				1 Unit	20.000.000,00	Kota Magelang, Magelang Tengah, Panjang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	-		25.000.000,00	KELURAHAN PANJANG	
2.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	-			-	1.882.733.175,00						-	0,00		
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-			-	1.882.733.175,00			-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing dan Berkarakter	-	-	0,00	KELURAHAN PANJANG	
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan															
			<i>Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan</i>				68 Lembaga Kemasyarakatan	25.962.500,00	Kota Magelang, Magelang Tengah, Panjang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing dan Berkarakter	-		0,00	KELURAHAN PANJANG	
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan															
			<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun</i>				2 Unit	879.301.775,00	Kota Magelang, Magelang Tengah, Panjang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamis	-		0,00	KELURAHAN PANJANG	
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan															
			<i>Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan</i>				2 Pokmas / Ormas	969.232.300,00	Kota Magelang, Magelang Tengah, Panjang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamis	-		0,00	KELURAHAN PANJANG	
	7.01.03.2.02.0004	Evaluasi Kelurahan															
			<i>Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan</i>				1 Laporan	8.236.600,00	Kota Magelang, Magelang Tengah, Panjang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamis	-		0,00	KELURAHAN PANJANG	
		KELURAHAN GELANGAN						2.601.286.199,00								3.183.837.099,00	
	7	UNSUR KEWILAYAHAN						2.601.286.199,00							3.183.837.099,00		
	7.01	KECAMATAN						2.601.286.199,00							3.183.837.099,00		
1.	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-			-	237.439.600,00						-	292.950.000,00		
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	45.160.000,00			-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	-	-	50.250.000,00	KELURAHAN GELANGAN	
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor															
			<i>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan</i>				7 Paket	1.500.000,00	Kota Magelang, Magelang Tengah, Gelangan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	-		1.650.000,00	KELURAHAN GELANGAN	
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor															

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				4 Paket	8.500.000,00	Kota Magelang, Magelang Tengah, Gelangan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	-		9.000.000,00	KELURAHAN GELANGAN
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	6.188.000,00	Kota Magelang, Magelang Tengah, Gelangan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	-		7.200.000,00	KELURAHAN GELANGAN
	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	6.120.000,00	Kota Magelang, Magelang Tengah, Gelangan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	-		6.800.000,00	KELURAHAN GELANGAN
	7.01.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material														
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				19 Paket	2.750.000,00	Kota Magelang, Magelang Tengah, Gelangan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	-		3.000.000,00	KELURAHAN GELANGAN
	7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	6.000.000,00	Kota Magelang, Magelang Tengah, Gelangan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	-		6.600.000,00	KELURAHAN GELANGAN
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				2 Laporan	14.102.000,00	Kota Magelang, Magelang Tengah, Gelangan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	-		16.000.000,00	KELURAHAN GELANGAN
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	12.000.000,00			-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	-	-	14.500.000,00	KELURAHAN GELANGAN
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				1 Unit	12.000.000,00	Kota Magelang, Magelang Tengah, Gelangan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	-		14.500.000,00	KELURAHAN GELANGAN
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	125.648.600,00			-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	-	-	168.000.000,00	KELURAHAN GELANGAN
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	890.000,00	Kota Magelang, Magelang Tengah, Gelangan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	-		1.000.000,00	KELURAHAN GELANGAN
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				4 Laporan	15.273.600,00	Kota Magelang, Magelang Tengah, Gelangan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	-		17.000.000,00	KELURAHAN GELANGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>				12 Laporan	109.485.000,00	Kota Magelang, Magelang Tengah, Gelangan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	-		150.000.000,00	KELURAHAN GELANGAN
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	54.631.000,00			-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	-	-	60.200.000,00	KELURAHAN GELANGAN
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			<i>Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya</i>				7 Unit	18.606.000,00	Kota Magelang, Magelang Tengah, Gelangan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	-		20.000.000,00	KELURAHAN GELANGAN
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			<i>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya</i>				1 Unit	17.257.000,00	Kota Magelang, Magelang Tengah, Gelangan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	-		19.000.000,00	KELURAHAN GELANGAN
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			<i>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara</i>				12 Unit	7.518.000,00	Kota Magelang, Magelang Tengah, Gelangan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	-		8.200.000,00	KELURAHAN GELANGAN
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			<i>Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi</i>				1 Unit	11.250.000,00	Kota Magelang, Magelang Tengah, Gelangan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	-		13.000.000,00	KELURAHAN GELANGAN
2.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	<i>Cakupan program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan</i>	100,00 %			100,00 %	2.363.846.599,00						100,00 %	2.890.887.099,00	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	<i>Cakupan Kegiatan Pelayanan Masyarakat Melalui Pemberdayaan Maszarakat Desa dan Kelurahan</i>	-			100 %	2.363.846.599,00			-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	-	-	2.890.887.099,00	KELURAHAN GELANGAN
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan														
			<i>Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan</i>				10 Lembaga Kemasyarakatan	28.572.000,00	Kota Magelang, Magelang Tengah, Gelangan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	-		30.500.000,00	KELURAHAN GELANGAN
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan														
			<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun</i>				65 Unit	1.295.107.599,00	Kota Magelang, Magelang Tengah, Gelangan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	-		1.672.455.099,00	KELURAHAN GELANGAN
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan														
			<i>Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan</i>				10 Pokmas / Ormas	1.032.235.000,00	Kota Magelang, Magelang Tengah, Gelangan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	-		1.180.000.000,00	KELURAHAN GELANGAN
	7.01.03.2.02.0004	Evaluasi Kelurahan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan				1 Laporan	7.932.000,00	Kota Magelang, Magelang Tengah, Gelangan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	-		7.932.000,00	KELURAHAN GELANGAN
		KECAMATAN MAGELANG UTARA						10.377.800.922,00							10.570.000.000,00	
	7	UNSUR KEWILAYAHAN						10.377.800.922,00							10.570.000.000,00	
	7.01	KECAMATAN						10.377.800.922,00							10.570.000.000,00	
1.	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan Magelang Utara	-			100,00 %	9.508.892.732,00						-	9.558.000.000,00	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Cakupan ketersediaan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	-			100 %	24.953.500,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	Aparat Pemerintahan	-	49.000.000,00	KECAMATAN MAGELANG UTARA
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	7.216.500,00	Kota Magelang, Magelang Utara, Semua Kel/Desa Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	Aparat Pemerintahan		12.000.000,00	KECAMATAN MAGELANG UTARA
	7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD														
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	4.585.300,00	Kota Magelang, Magelang Utara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	Aparat Pemerintahan		9.000.000,00	KECAMATAN MAGELANG UTARA
	7.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD														
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	4.302.100,00	Kota Magelang, Magelang Utara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	Aparat Pemerintahan		8.000.000,00	KECAMATAN MAGELANG UTARA
	7.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD														
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	2.479.600,00	Kota Magelang, Magelang Utara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	Aparat Pemerintahan		7.000.000,00	KECAMATAN MAGELANG UTARA
	7.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD														
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	2.361.100,00	Kota Magelang, Magelang Utara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	Aparat Pemerintahan		7.000.000,00	KECAMATAN MAGELANG UTARA
	7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				2 Laporan	4.008.900,00	Kota Magelang, Magelang Utara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	Aparat Pemerintahan		6.000.000,00	KECAMATAN MAGELANG UTARA
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan laporan administrasi keuangan Perangkat Daerah sesuai aturan	-			100 %	9.147.993.370,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	Aparat Pemerintahan	-	9.050.000.000,00	KECAMATAN MAGELANG UTARA
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				55 Orang/ bulan	9.123.566.970,00	Kota Magelang, Magelang Utara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	Aparat Pemerintahan		9.000.000.000,00	KECAMATAN MAGELANG UTARA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD				1 Laporan	24.426.400,00	Kota Magelang, Magelang Utara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	Aparat Pemerintahan		50.000.000,00	KECAMATAN MAGELANG UTARA
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan administrasi umum Perangkat Daerah Kecamatan Magelang Utara	-			100 %	63.572.142,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	Unit Kerja Kecamatan	-	93.000.000,00	KECAMATAN MAGELANG UTARA
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	2.387.250,00	Kota Magelang, Magelang Utara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	Unit Kerja Kecamatan		3.000.000,00	KECAMATAN MAGELANG UTARA
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				2 Paket	1.584.592,00	Kota Magelang, Magelang Utara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	Unit Kerja Kecamatan		2.000.000,00	KECAMATAN MAGELANG UTARA
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				4 Paket	12.702.400,00	Kota Magelang, Magelang Utara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	Unit Kerja Kecamatan		13.000.000,00	KECAMATAN MAGELANG UTARA
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	2.624.000,00	Kota Magelang, Magelang Utara, Semua Kel/Desa Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	Unit Kerja Kecamatan		4.000.000,00	KECAMATAN MAGELANG UTARA
	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	3.000.000,00	Kota Magelang, Magelang Utara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	Unit Kerja Kecamatan		4.000.000,00	KECAMATAN MAGELANG UTARA
	7.01.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material														
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				2 Paket	4.585.900,00	Kota Magelang, Magelang Utara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	Unit Kerja Kecamatan		5.000.000,00	KECAMATAN MAGELANG UTARA
	7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	1.520.000,00	Kota Magelang, Magelang Utara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	Unit Kerja Kecamatan		3.000.000,00	KECAMATAN MAGELANG UTARA
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	15.168.000,00	Kota Magelang, Magelang Utara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	Unit Kerja Kecamatan		29.000.000,00	KECAMATAN MAGELANG UTARA
	7.01.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD														
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				1 Dokumen	20.000.000,00	Kota Magelang, Magelang Utara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan	Penguatan Landasan Tata Kelola	Unit Kerja Kecamatan		30.000.000,00	KECAMATAN MAGELANG UTARA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
											pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif				
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah Kecamatan Magelang utara	-			100 %	0,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	Unit Kerja Kecamatan	-	110.000.000,00	KECAMATAN MAGELANG UTARA
	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel														
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				66 Unit	0,00	Kota Magelang, Magelang Utara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	Unit Kerja Kecamatan		60.000.000,00	KECAMATAN MAGELANG UTARA
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				3 Unit	0,00	Kota Magelang, Magelang Utara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	Unit Kerja Kecamatan		50.000.000,00	KECAMATAN MAGELANG UTARA
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah kecamatan Magelang Utara	-			100 %	124.572.090,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	Unit Kerja Kecamatan	-	132.000.000,00	KECAMATAN MAGELANG UTARA
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				4 Laporan	9.333.300,00	Kota Magelang, Magelang Utara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	Unit Kerja Kecamatan		13.000.000,00	KECAMATAN MAGELANG UTARA
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				4 Laporan	60.764.400,00	Kota Magelang, Magelang Utara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	Unit Kerja Kecamatan		59.000.000,00	KECAMATAN MAGELANG UTARA
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	54.474.390,00	Kota Magelang, Magelang Utara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	Unit Kerja Kecamatan		60.000.000,00	KECAMATAN MAGELANG UTARA
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan pemeliharaan Barang Milik Daerah penunjang urusan Pemerintah daerah Kecamatan magelang utara	-			100 %	147.801.630,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	Unit Kerja Kecamatan	-	124.000.000,00	KECAMATAN MAGELANG UTARA
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				14 Unit	54.305.000,00	Kota Magelang, Magelang Utara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	Unit Kerja Kecamatan		65.000.000,00	KECAMATAN MAGELANG UTARA
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				2 Unit	9.850.000,00	Kota Magelang, Magelang Utara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	Unit Kerja Kecamatan		11.000.000,00	KECAMATAN MAGELANG UTARA
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				14 Unit	9.593.000,00	Kota Magelang, Magelang Utara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi,	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan	Unit Kerja Kecamatan		12.000.000,00	KECAMATAN MAGELANG UTARA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
											narkoba, judi, dan penyeludupan.	Berintegritas dan Dinamistif				
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi				2 Unit	74.053.630,00	Kota Magelang, Magelang Utara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	Unit Kerja Kecamatan		36.000.000,00	KECAMATAN MAGELANG UTARA
2.	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Cakupan program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100 %			100 %	234.107.190,00						100 %	364.000.000,00	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Cakupan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	-			100 %	1.422.900,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	Aparat Pemerintahan	-	2.000.000,00	KECAMATAN MAGELANG UTARA
	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan														
			Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				2 Dokumen	1.422.900,00	Kota Magelang, Magelang Utara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	Aparat Pemerintahan		2.000.000,00	KECAMATAN MAGELANG UTARA
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintah an yang tidak Dilaksanak an oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	100 %			100 %	139.363.230,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	Warga masyarakat	100 %	237.000.000,00	KECAMATAN MAGELANG UTARA
	7.01.02.2.02.0001	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan				1 Dokumen	28.578.800,00	Kota Magelang, Magelang Utara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	Warga masyarakat		32.000.000,00	KECAMATAN MAGELANG UTARA
	7.01.02.2.02.0002	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan														
			Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan				1 Laporan	20.221.030,00	Kota Magelang, Magelang Utara, Semua Kel/Desa Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	Warga masyarakat		45.000.000,00	KECAMATAN MAGELANG UTARA
	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan														
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				5 Laporan	90.563.400,00	Kota Magelang, Magelang Utara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing dan Berkarakter	Warga masyarakat		160.000.000,00	KECAMATAN MAGELANG UTARA
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Cakupan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	-			100 %	93.321.060,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	warga masyarakat	-	125.000.000,00	KECAMATAN MAGELANG UTARA
	7.01.02.2.04.0002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan														
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan				1 Laporan	37.478.660,00	Kota Magelang, Magelang Utara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	warga masyarakat		60.000.000,00	KECAMATAN MAGELANG UTARA
	7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
			<i>Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan</i>				2 Laporan	55.842.400,00	Kota Magelang, Magelang Utara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing dan Berkarakter	warga masyarakat		65.000.000,00	KECAMATAN MAGELANG UTARA	
3.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	-			-	70.501.000,00						-	85.000.000,00		
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	100 %			-	50.000.000,00			-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamis	-	100 %	60.000.000,00	KECAMATAN MAGELANG UTARA	
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan															
			<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun</i>				1 Unit	50.000.000,00	Kota Magelang, Magelang Utara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamis	-		60.000.000,00	KECAMATAN MAGELANG UTARA	
	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	-	-			-	20.501.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing dan Berkarakter	Aparat Pemerintahan dan Lembaga Kemasyarakatan	-	25.000.000,00	KECAMATAN MAGELANG UTARA	
	7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan															
			<i>Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan</i>				5 Lembaga Kemasyarakatan	20.501.000,00	Kota Magelang, Magelang Utara, Semua Kel/Desa Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing dan Berkarakter	Aparat Pemerintahan dan Lembaga Kemasyarakatan		25.000.000,00	KECAMATAN MAGELANG UTARA	
4.	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	<i>Cakupan program koordinasi ketentraman dan ketertiban umum</i>	100 %			100 %	551.309.600,00						100 %	550.000.000,00		
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	<i>Cakupan koordinasi upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum</i>	-			100 %	551.309.600,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	warga masyarakat dan aparat keamanan	-	550.000.000,00	KECAMATAN MAGELANG UTARA	
	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan															
			<i>Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan</i>				12 Laporan	551.309.600,00	Kota Magelang, Magelang Utara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	warga masyarakat dan aparat keamanan		550.000.000,00	KECAMATAN MAGELANG UTARA	
5.	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	<i>Cakupan program penyelenggaraan pemerintahan umum</i>	100 %			100 %	12.990.400,00						100 %	13.000.000,00		
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	<i>Cakupan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah</i>	-			100 %	12.990.400,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	Forkompimcam	-	13.000.000,00	KECAMATAN MAGELANG UTARA	
	7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan															
			<i>Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan</i>				1 Dokumen	12.990.400,00	Kota Magelang, Magelang Utara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	Forkompimcam		13.000.000,00	KECAMATAN MAGELANG UTARA	
		KELURAHAN KRAMAT UTARA							1.984.135.480,00							0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7	UNSUR KEWILAYAHAN						1.984.135.480,00							0,00	
	7.01	KECAMATAN						1.984.135.480,00							0,00	
1.	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan Magelang Utara	-			100,00 %	270.523.130,00						-	0,00	
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan administrasi umum Perangkat Daerah Kecamatan Magelang Utara	-			100 %	52.695.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	Unit Kerja Kelurahan Kramat Utara	-	0,00	KELURAHAN KRAMAT UTARA
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				2 Paket	1.683.500,00	Kota Magelang, Magelang Utara, Kramat Utara	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	Unit Kerja Kelurahan Kramat Utara		0,00	KELURAHAN KRAMAT UTARA
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				2 Paket	2.308.100,00	Kota Magelang, Magelang Utara, Kramat Utara	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	Unit Kerja Kelurahan Kramat Utara		0,00	KELURAHAN KRAMAT UTARA
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	1.963.200,00	Kota Magelang, Magelang Utara, Kramat Utara	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	Unit Kerja Kelurahan Kramat Utara		0,00	KELURAHAN KRAMAT UTARA
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				4 Paket	14.144.200,00	Kota Magelang, Magelang Utara, Kramat Utara	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	Unit Kerja Kelurahan Kramat Utara		0,00	KELURAHAN KRAMAT UTARA
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	3.750.000,00	Kota Magelang, Magelang Utara, Kramat Utara	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	Unit Kerja Kelurahan Kramat Utara		0,00	KELURAHAN KRAMAT UTARA
	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	3.600.000,00	Kota Magelang, Magelang Utara, Kramat Utara	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	Unit Kerja Kelurahan Kramat Utara		0,00	KELURAHAN KRAMAT UTARA
	7.01.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material														
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				3 Paket	7.356.000,00	Kota Magelang, Magelang Utara, Kramat Utara	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	Unit Kerja Kelurahan Kramat Utara		0,00	KELURAHAN KRAMAT UTARA
	7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	4.500.000,00	Kota Magelang, Magelang Utara, Kramat Utara	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	Unit Kerja Kelurahan Kramat Utara		0,00	KELURAHAN KRAMAT UTARA
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				2 Laporan	13.390.000,00	Kota Magelang, Magelang Utara, Kramat Utara	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi,	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan	Unit Kerja Kelurahan Kramat Utara		0,00	KELURAHAN KRAMAT UTARA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
											narkoba, judi, dan penyeludupan.	Berintegritas dan Dinamistif				
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah kecamatan Magelang Utara	-			100 %	116.173.930,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	Unit Kerja Kelurahan Kramat Utara	-	0,00	KELURAHAN UTARA KRAMAT
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				2 Laporan	5.660.000,00	Kota Magelang, Magelang Utara, Kramat Utara	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	Unit Kerja Kelurahan Kramat Utara		0,00	KELURAHAN UTARA KRAMAT
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				4 Laporan	17.828.000,00	Kota Magelang, Magelang Utara, Kramat Utara	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	Unit Kerja Kelurahan Kramat Utara		0,00	KELURAHAN UTARA KRAMAT
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				5 Laporan	92.685.930,00	Kota Magelang, Magelang Utara, Kramat Utara	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	Unit Kerja Kelurahan Kramat Utara		0,00	KELURAHAN UTARA KRAMAT
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan pemeliharaan Barang Milik Daerah penunjang urusan Pemerintah daerah Kecamatan magelang utara	-			100 %	101.654.200,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	Unit Kerja Kelurahan Kramat Utara	-	0,00	KELURAHAN UTARA KRAMAT
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Blaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				7 Unit	31.962.000,00	Kota Magelang, Magelang Utara, Kramat Utara	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	Unit Kerja Kelurahan Kramat Utara		0,00	KELURAHAN UTARA KRAMAT
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Blaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				3 Unit	40.821.200,00	Kota Magelang, Magelang Utara, Kramat Utara	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	Unit Kerja Kelurahan Kramat Utara		0,00	KELURAHAN UTARA KRAMAT
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				14 Unit	9.530.000,00	Kota Magelang, Magelang Utara, Kramat Utara	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	Unit Kerja Kelurahan Kramat Utara		0,00	KELURAHAN UTARA KRAMAT
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi				2 Unit	19.341.000,00	Kota Magelang, Magelang Utara, Kramat Utara	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	Unit Kerja Kelurahan Kramat Utara		0,00	KELURAHAN UTARA KRAMAT
2.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	100 %			100 %	1.713.612.350,00						100 %	0,00	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Cakupan kegiatan pemberdayaan Kelurahan	100 %			100 %	1.713.612.350,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamis	warga masyarakat	100 %	0,00	KELURAHAN UTARA KRAMAT
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				8 Lembaga Kemasyarakatan	26.171.600,00	Kota Magelang, Magelang Utara, Kramat Utara Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamis	warga masyarakat		0,00	KELURAHAN UTARA KRAMAT	
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan															
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				1 Unit	870.237.150,00	Kota Magelang, Magelang Utara, Kramat Utara	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamis	warga masyarakat		0,00	KELURAHAN UTARA KRAMAT	
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan															
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				2 Pokmas / Ormas	809.203.600,00	Kota Magelang, Magelang Utara, Kramat Utara	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamis	warga masyarakat		0,00	KELURAHAN UTARA KRAMAT	
	7.01.03.2.02.0004	Evaluasi Kelurahan															
			Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan				1 Laporan	8.000.000,00	Kota Magelang, Magelang Utara, Kramat Utara	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamis	warga masyarakat		0,00	KELURAHAN UTARA KRAMAT	
		KELURAHAN KRAMAT SELATAN							2.439.487.012,00							2.731.703.418,00	
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							2.439.487.012,00						2.731.703.418,00		
	7.01	KECAMATAN							2.439.487.012,00						2.731.703.418,00		
1.	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan Magelang Utara	-			100,00 %	211.843.215,00						-	299.251.953,00		
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan administrasi umum Perangkat Daerah Kecamatan Magelang Utara	-			100 %	46.001.550,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	Unit Kerja Kelurahan Kramat Selatan	-	47.662.560,00	KELURAHAN SELATAN KRAMAT	
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor															
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	6.889.250,00	Kota Magelang, Magelang Utara, Kramat Selatan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	Unit Kerja Kelurahan Kramat Selatan		2.171.950,00	KELURAHAN SELATAN KRAMAT	
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor															
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	996.300,00	Kota Magelang, Magelang Utara, Kramat Selatan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	Unit Kerja Kelurahan Kramat Selatan		1.095.930,00	KELURAHAN SELATAN KRAMAT	
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga															
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	1.917.400,00	Kota Magelang, Magelang Utara, Kramat Selatan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	Unit Kerja Kelurahan Kramat Selatan		2.109.140,00	KELURAHAN SELATAN KRAMAT	
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor															
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				3 Paket	9.507.900,00	Kota Magelang, Magelang Utara, Kramat Selatan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	Unit Kerja Kelurahan Kramat Selatan		12.925.770,00	KELURAHAN SELATAN KRAMAT	
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan															
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1.500.000,00	Kota Magelang, Magelang Utara, Kramat Selatan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi,	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan	Unit Kerja Kelurahan Kramat Selatan		1.650.000,00	KELURAHAN SELATAN KRAMAT	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
											narkoba, judi, dan penyeludupan.	Berintegritas dan Dinamistif				
	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				2 Dokumen	5.400.000,00	Kota Magelang, Magelang Utara, Kramat Selatan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	Unit Kerja Kelurahan Kramat Selatan		5.940.000,00	KELURAHAN SELATAN KRAMAT
	7.01.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material														
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				2 Paket	3.290.700,00	Kota Magelang, Magelang Utara, Kramat Selatan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	Unit Kerja Kelurahan Kramat Selatan		3.619.770,00	KELURAHAN SELATAN KRAMAT
	7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	1.500.000,00	Kota Magelang, Magelang Utara, Kramat Selatan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	Unit Kerja Kelurahan Kramat Selatan		1.650.000,00	KELURAHAN SELATAN KRAMAT
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				2 Laporan	15.000.000,00	Kota Magelang, Magelang Utara, Kramat Selatan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	Unit Kerja Kelurahan Kramat Selatan		16.500.000,00	KELURAHAN SELATAN KRAMAT
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah Kecamatan Magelang utara	-			100 %	18.535.700,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	Unit Kerja Kelurahan Kramat Selatan	-	33.688.270,00	KELURAHAN SELATAN KRAMAT
	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel														
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				50 Unit	12.090.000,00	Kota Magelang, Magelang Utara, Kramat Selatan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	Unit Kerja Kelurahan Kramat Selatan		26.598.000,00	KELURAHAN SELATAN KRAMAT
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				1 Unit	6.445.700,00	Kota Magelang, Magelang Utara, Kramat Selatan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	Unit Kerja Kelurahan Kramat Selatan		7.090.270,00	KELURAHAN SELATAN KRAMAT
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah kecamatan Magelang Utara	-			100 %	74.551.465,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	Unit Kerja Kelurahan Kramat Selatan	-	157.912.623,00	KELURAHAN SELATAN KRAMAT
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	3.007.650,00	Kota Magelang, Magelang Utara, Kramat Selatan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	Unit Kerja Kelurahan Kramat Selatan		3.372.215,00	KELURAHAN SELATAN KRAMAT
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				3 Laporan	16.735.200,00	Kota Magelang, Magelang Utara, Kramat Selatan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	Unit Kerja Kelurahan Kramat Selatan		20.965.560,00	KELURAHAN SELATAN KRAMAT
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>				12 Laporan	54.808.615,00	Kota Magelang, Magelang Utara, Kramat Selatan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	Unit Kerja Kelurahan Kramat Selatan		133.574.848,00	KELURAHAN SELATAN KRAMAT	
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Cakupan pemeliharaan Barang Milik Daerah penunjang urusan Pemerintah daerah Kecamatan magelang utara</i>	-			100 %	72.754.500,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	Unit Kerja Kelurahan Kramat Selatan	-	59.988.500,00	KELURAHAN SELATAN KRAMAT	
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan															
			<i>Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya</i>				6 Unit	23.732.000,00	Kota Magelang, Magelang Utara, Kramat Selatan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	Unit Kerja Kelurahan Kramat Selatan		21.153.000,00	KELURAHAN SELATAN KRAMAT	
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan															
			<i>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya</i>				1 Unit	19.957.500,00	Kota Magelang, Magelang Utara, Kramat Selatan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	Unit Kerja Kelurahan Kramat Selatan		18.925.500,00	KELURAHAN SELATAN KRAMAT	
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya															
			<i>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara</i>				15 Unit	4.515.000,00	Kota Magelang, Magelang Utara, Kramat Selatan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	Unit Kerja Kelurahan Kramat Selatan		9.240.000,00	KELURAHAN SELATAN KRAMAT	
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya															
			<i>Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi</i>				1 Unit	24.550.000,00	Kota Magelang, Magelang Utara, Kramat Selatan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	Unit Kerja Kelurahan Kramat Selatan		10.670.000,00	KELURAHAN SELATAN KRAMAT	
2.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	-			-	2.227.643.797,00						-	2.432.451.465,00		
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	100 %			-	2.227.643.797,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamis	warga masyarakat	100 %	2.432.451.465,00	KELURAHAN SELATAN KRAMAT	
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan															
			<i>Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan</i>				11 Lembaga Kemasyarakatan	23.630.600,00	Kota Magelang, Magelang Utara, Kramat Selatan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamis	warga masyarakat		25.993.660,00	KELURAHAN SELATAN KRAMAT	
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan															
			<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun</i>				11 Unit	1.015.063.287,00	Kota Magelang, Magelang Utara, Kramat Selatan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamis	warga masyarakat		1.061.569.615,00	KELURAHAN SELATAN KRAMAT	
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan															
			<i>Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan</i>				11 Pokmas / Ormas	1.184.367.810,00	Kota Magelang, Magelang Utara, Kramat Selatan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamis	warga masyarakat		1.339.847.880,00	KELURAHAN SELATAN KRAMAT	
	7.01.03.2.02.0004	Evaluasi Kelurahan															
			<i>Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan</i>				1 Laporan	4.582.100,00	Kota Magelang, Magelang Utara, Kramat Selatan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi	Penguatan Landasan Tata Kelola	warga masyarakat		5.040.310,00	KELURAHAN SELATAN KRAMAT	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
											dan pemberantasan kemiskinan.	Pemerintahan Berintegritas dan Dinamis				
		KELURAHAN KEDUNGSARI						2.104.196.342,00							0,00	
	7	UNSUR KEWILAYAHAN						2.104.196.342,00							0,00	
	7.01	KECAMATAN						2.104.196.342,00							0,00	
1.	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan Magelang Utara	-			100,00 %	387.004.550,00						-	0,00	
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan administrasi umum Perangkat Daerah Kecamatan Magelang Utara	-			100 %	27.058.710,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	Unit Kerja Kelurahan Kedungsari	-	0,00	KELURAHAN KEDUNGSARI
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1.577.410,00	Kota Magelang, Magelang Utara, Kedungsari	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	Unit Kerja Kelurahan Kedungsari		0,00	KELURAHAN KEDUNGSARI
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	603.200,00	Kota Magelang, Magelang Utara, Kedungsari	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	Unit Kerja Kelurahan Kedungsari		0,00	KELURAHAN KEDUNGSARI
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				3 Paket	6.013.200,00	Kota Magelang, Magelang Utara, Kedungsari	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	Unit Kerja Kelurahan Kedungsari		0,00	KELURAHAN KEDUNGSARI
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1.800.000,00	Kota Magelang, Magelang Utara, Kedungsari	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	Unit Kerja Kelurahan Kedungsari		0,00	KELURAHAN KEDUNGSARI
	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	2.400.000,00	Kota Magelang, Magelang Utara, Kedungsari	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	Unit Kerja Kelurahan Kedungsari		0,00	KELURAHAN KEDUNGSARI
	7.01.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material														
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				1 Paket	2.966.900,00	Kota Magelang, Magelang Utara, Kedungsari	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	Unit Kerja Kelurahan Kedungsari		0,00	KELURAHAN KEDUNGSARI
	7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	1.600.000,00	Kota Magelang, Magelang Utara, Kedungsari	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	Unit Kerja Kelurahan Kedungsari		0,00	KELURAHAN KEDUNGSARI
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				2 Laporan	10.098.000,00	Kota Magelang, Magelang Utara, Kedungsari	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	Unit Kerja Kelurahan Kedungsari		0,00	KELURAHAN KEDUNGSARI

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah Kecamatan Magelang utara	-			100 %	15.511.900,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	Unit Kerja Kelurahan Kedungsari	-	0,00	KELURAHAN KEDUNGSARI
	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel														
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				48 Unit	10.357.800,00	Kota Magelang, Magelang Utara, Kedungsari	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	Unit Kerja Kelurahan Kedungsari		0,00	KELURAHAN KEDUNGSARI
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				3 Unit	5.154.100,00	Kota Magelang, Magelang Utara, Kedungsari	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	Unit Kerja Kelurahan Kedungsari		0,00	KELURAHAN KEDUNGSARI
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah kecamatan Magelang Utara	-			100 %	87.605.940,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	Unit Kerja Kelurahan Kedungsari	-	0,00	KELURAHAN KEDUNGSARI
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	3.687.100,00	Kota Magelang, Magelang Utara, Kedungsari	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	Unit Kerja Kelurahan Kedungsari		0,00	KELURAHAN KEDUNGSARI
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				4 Laporan	20.632.350,00	Kota Magelang, Magelang Utara, Kedungsari	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	Unit Kerja Kelurahan Kedungsari		0,00	KELURAHAN KEDUNGSARI
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				2 Laporan	63.286.490,00	Kota Magelang, Magelang Utara, Kedungsari	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	Unit Kerja Kelurahan Kedungsari		0,00	KELURAHAN KEDUNGSARI
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan pemeliharaan Barang Milik Daerah penunjang urusan Pemerintah daerah Kecamatan magelang utara	-			100 %	256.828.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	Unit Kerja Kelurahan Kedungsari	-	0,00	KELURAHAN KEDUNGSARI
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas labatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	22.340.000,00	Kota Magelang, Magelang Utara, Kedungsari	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	Unit Kerja Kelurahan Kedungsari		0,00	KELURAHAN KEDUNGSARI
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				1 Unit	14.515.000,00	Kota Magelang, Magelang Utara, Kedungsari	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	Unit Kerja Kelurahan Kedungsari		0,00	KELURAHAN KEDUNGSARI
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				25 Unit	19.973.000,00	Kota Magelang, Magelang Utara, Kedungsari	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	Unit Kerja Kelurahan Kedungsari		0,00	KELURAHAN KEDUNGSARI

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi				1 Unit	200.000.000,00	Kota Magelang, Magelang Utara, Kedungsari	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	Unit Kerja Kelurahan Kedungsari		0,00	KELURAHAN KEDUNGSARI
2.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	100 %			100 %	1.717.191.792,00						100 %	0,00	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Cakupan kegiatan pemberdayaan Kelurahan	100 %			100 %	1.717.191.792,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	warga masyarakat	100 %	0,00	KELURAHAN KEDUNGSARI
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan														
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				15 Lembaga Kemasyarakatan	24.200.000,00	Kota Magelang, Magelang Utara, Kedungsari	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	warga masyarakat		0,00	KELURAHAN KEDUNGSARI
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				58 Unit	769.848.962,00	Kota Magelang, Magelang Utara, Kedungsari	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamis	warga masyarakat		0,00	KELURAHAN KEDUNGSARI
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan														
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				10 Pokmas / Ormas	922.444.030,00	Kota Magelang, Magelang Utara, Kedungsari	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing dan Berkarakter	warga masyarakat		0,00	KELURAHAN KEDUNGSARI
	7.01.03.2.02.0004	Evaluasi Kelurahan														
			Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan				1 Laporan	698.800,00	Kota Magelang, Magelang Utara, Kedungsari Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	warga masyarakat		0,00	KELURAHAN KEDUNGSARI
		KELURAHAN WATES						3.375.181.083,00							4.212.500.000,00	
	7	UNSUR KEWILAYAHAN						3.375.181.083,00							4.212.500.000,00	
	7.01	KECAMATAN						3.375.181.083,00							4.212.500.000,00	
1.	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan Magelang Utara	-			100,00 %	213.657.000,00						-	417.500.000,00	
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan administrasi umum Perangkat Daerah Kecamatan Magelang Utara	-			100 %	40.458.600,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	Unit Kerja Kelurahan Wates	-	94.000.000,00	KELURAHAN WATES
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1.900.600,00	Kota Magelang, Magelang Utara, Wates	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	Unit Kerja Kelurahan Wates		3.000.000,00	KELURAHAN WATES
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1.347.300,00	Kota Magelang, Magelang Utara, Wates	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	Unit Kerja Kelurahan Wates		3.000.000,00	KELURAHAN WATES
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan</i>				1 Paket	672.400,00	Kota Magelang, Magelang Utara, Wates	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	Unit Kerja Kelurahan Wates		2.000.000,00	KELURAHAN WATES
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			<i>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan</i>				1 Paket	11.370.200,00	Kota Magelang, Magelang Utara, Wates	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	Unit Kerja Kelurahan Wates		17.500.000,00	KELURAHAN WATES
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			<i>Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan</i>				1 Paket	3.000.000,00	Kota Magelang, Magelang Utara, Wates	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	Unit Kerja Kelurahan Wates		6.000.000,00	KELURAHAN WATES
	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
			<i>Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan</i>				1 Dokumen	5.280.000,00	Kota Magelang, Magelang Utara, Wates	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	Unit Kerja Kelurahan Wates		7.500.000,00	KELURAHAN WATES
	7.01.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material														
			<i>Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan</i>				1 Paket	3.984.500,00	Kota Magelang, Magelang Utara, Wates	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	Unit Kerja Kelurahan Wates		5.500.000,00	KELURAHAN WATES
	7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														
			<i>Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu</i>				1 Laporan	1.515.000,00	Kota Magelang, Magelang Utara, Wates	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	Unit Kerja Kelurahan Wates		4.500.000,00	KELURAHAN WATES
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>				4 Laporan	11.388.600,00	Kota Magelang, Magelang Utara, Wates	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	Unit Kerja Kelurahan Wates		45.000.000,00	KELURAHAN WATES
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	<i>Cakupan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah Kecamatan Magelang utara</i>	-			100 %	0,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	Unit Kerja Kelurahan Wates	-	45.000.000,00	KELURAHAN WATES
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			<i>Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan</i>				1 Unit	0,00	Kota Magelang, Magelang Utara, Wates	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	Unit Kerja Kelurahan Wates		45.000.000,00	KELURAHAN WATES
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Cakupan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah kecamatan Magelang Utara</i>	-			100 %	97.902.890,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	Unit Kerja Kelurahan Wates	-	148.000.000,00	KELURAHAN WATES
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>				12 Laporan	3.814.600,00	Kota Magelang, Magelang Utara, Wates	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	Unit Kerja Kelurahan Wates		8.000.000,00	KELURAHAN WATES

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	39.312.600,00	Kota Magelang, Magelang Utara, Wates	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	Unit Kerja Kelurahan Wates		55.000.000,00	KELURAHAN WATES
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	54.775.690,00	Kota Magelang, Magelang Utara, Wates	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	Unit Kerja Kelurahan Wates		85.000.000,00	KELURAHAN WATES
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	75.295.510,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	Unit Kerja Kelurahan Wates	-	130.500.000,00	KELURAHAN WATES
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				7 Unit	28.053.000,00	Kota Magelang, Magelang Utara, Wates	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	Unit Kerja Kelurahan Wates		45.000.000,00	KELURAHAN WATES
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				1 Unit	3.680.500,00	Kota Magelang, Magelang Utara, Wates	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	Unit Kerja Kelurahan Wates		15.000.000,00	KELURAHAN WATES
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				13 Unit	6.940.000,00	Kota Magelang, Magelang Utara, Wates	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	Unit Kerja Kelurahan Wates		10.500.000,00	KELURAHAN WATES
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi				1 Unit	36.622.010,00	Kota Magelang, Magelang Utara, Wates	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	Unit Kerja Kelurahan Wates		60.000.000,00	KELURAHAN WATES
2.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	100 %			100 %	3.161.524.083,00						100 %	3.795.000.000,00	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Cakupan kegiatan pemberdayaan Kelurahan	100 %			100 %	3.161.524.083,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	warga masyarakat	100 %	3.795.000.000,00	KELURAHAN WATES
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan														
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				11 Lembaga Kemasyarakatan	21.660.800,00	Kota Magelang, Magelang Utara, Wates	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	warga masyarakat		30.000.000,00	KELURAHAN WATES
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				15 Unit	1.574.143.423,00	Kota Magelang, Magelang Utara, Wates	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamis	warga masyarakat		1.950.000.000,00	KELURAHAN WATES
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				2 Pokmas / Ormas	1.555.719.860,00	Kota Magelang, Magelang Utara, Wates	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing dan Berkarakter	warga masyarakat		1.800.000.000,00	KELURAHAN WATES
	7.01.03.2.02.0004	Evaluasi Kelurahan														
			Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan				1 Laporan	10.000.000,00	Kota Magelang, Magelang Utara, Wates	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamis	warga masyarakat		15.000.000,00	KELURAHAN WATES
		KELURAHAN POTROBANGSAN						2.373.427.394,00							2.825.417.952,00	
	7	UNSUR KEWILAYAHAN						2.373.427.394,00							2.825.417.952,00	
	7.01	KECAMATAN						2.373.427.394,00							2.825.417.952,00	
1.	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan Magelang Utara	-			100,00 %	310.600.267,00						-	379.453.219,00	
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan administrasi umum Perangkat Daerah Kecamatan Magelang Utara	-			100 %	34.307.925,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	Unit Kerja Kelurahan Potrobangsang	-	37.461.175,00	KELURAHAN POTROBANGSAN
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	2.116.825,00	Kota Magelang, Magelang Utara, Potrobangsang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	Unit Kerja Kelurahan Potrobangsang		3.116.825,00	KELURAHAN POTROBANGSAN
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				3 Paket	1.117.200,00	Kota Magelang, Magelang Utara, Potrobangsang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	Unit Kerja Kelurahan Potrobangsang		2.117.200,00	KELURAHAN POTROBANGSAN
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				8 Paket	7.569.200,00	Kota Magelang, Magelang Utara, Potrobangsang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	Unit Kerja Kelurahan Potrobangsang		9.231.600,00	KELURAHAN POTROBANGSAN
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	2.657.000,00	Kota Magelang, Magelang Utara, Potrobangsang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	Unit Kerja Kelurahan Potrobangsang		3.657.250,00	KELURAHAN POTROBANGSAN
	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	4.680.000,00	Kota Magelang, Magelang Utara, Potrobangsang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	Unit Kerja Kelurahan Potrobangsang		5.680.000,00	KELURAHAN POTROBANGSAN
	7.01.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material														
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				1 Paket	3.869.700,00	Kota Magelang, Magelang Utara, Potrobangsang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	Unit Kerja Kelurahan Potrobangsang		4.869.700,00	KELURAHAN POTROBANGSAN
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	12.298.000,00	Kota Magelang, Magelang Utara, Potrobangsang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan	Penguatan Landasan Tata Kelola	Unit Kerja Kelurahan Potrobangsang		8.788.600,00	KELURAHAN POTROBANGSAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
											pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif				
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah kecamatan Magelang Utara	-			100 %	154.598.842,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	Unit Kerja Kelurahan Potrobangsari	-	209.092.044,00	KELURAHAN POTROBANGSAN
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	3.799.300,00	Kota Magelang, Magelang Utara, Potrobangsari	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	Unit Kerja Kelurahan Potrobangsari		4.923.700,00	KELURAHAN POTROBANGSAN
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	23.692.632,00	Kota Magelang, Magelang Utara, Potrobangsari	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	Unit Kerja Kelurahan Potrobangsari		24.692.632,00	KELURAHAN POTROBANGSAN
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	127.106.910,00	Kota Magelang, Magelang Utara, Potrobangsari	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	Unit Kerja Kelurahan Potrobangsari		179.475.712,00	KELURAHAN POTROBANGSAN
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	121.693.500,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	Unit Kerja Kelurahan Potrobangsari	-	132.900.000,00	KELURAHAN POTROBANGSAN
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				6 Unit	43.082.000,00	Kota Magelang, Magelang Utara, Potrobangsari	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	Unit Kerja Kelurahan Potrobangsari		44.082.000,00	KELURAHAN POTROBANGSAN
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				2 Unit	43.070.000,00	Kota Magelang, Magelang Utara, Potrobangsari	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	Unit Kerja Kelurahan Potrobangsari		44.070.000,00	KELURAHAN POTROBANGSAN
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				19 Unit	10.456.500,00	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	Unit Kerja Kelurahan Potrobangsari		18.748.000,00	KELURAHAN POTROBANGSAN
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi				1 Unit	25.085.000,00	Kota Magelang, Magelang Utara, Potrobangsari	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif	Unit Kerja Kelurahan Potrobangsari		26.000.000,00	KELURAHAN POTROBANGSAN
2.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	100 %			100 %	2.062.827.127,00						100 %	2.445.964.733,00	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Cakupan kegiatan pemberdayaan Kelurahan	100 %			100 %	2.062.827.127,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamis	warga masyarakat	100 %	2.445.964.733,00	KELURAHAN POTROBANGSAN
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				7Lembaga Kemasyarakatan	24.652.900,00	Kota Magelang, Magelang Utara, Potrobangsan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamis	warga masyarakat		25.652.900,00	KELURAHAN POTROBANGSAN
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				1 Unit	1.071.517.237,00	Kota Magelang, Magelang Utara, Potrobangsan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamis	warga masyarakat		1.102.924.328,00	KELURAHAN POTROBANGSAN
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan														
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				2 Pokmas / Ormas	956.656.990,00	Kota Magelang, Magelang Utara, Potrobangsan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamis	warga masyarakat		1.306.387.505,00	KELURAHAN POTROBANGSAN
	7.01.03.2.02.0004	Evaluasi Kelurahan														
			Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan				1 Laporan	10.000.000,00	Kota Magelang, Magelang Utara, Potrobangsan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing dan Berkarakter	warga masyarakat		11.000.000,00	KELURAHAN POTROBANGSAN
		BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK						7.857.390.530,00							7.434.418.737,00	
	8	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM						7.857.390.530,00							7.434.418.737,00	
	8.01	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK						7.857.390.530,00							7.434.418.737,00	
1.	8.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan ketersediaan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	-			100 %	4.730.588.065,00						-	4.953.306.147,00	
	8.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terwujudnya pelayanan kantor, pengelolaan keuangan, perencanaan dan capaian kinerja sesuai peraturan yang berlaku	-			100 %	14.439.900,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing dan Berkarakter	Dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja PD Kota Magelang	-	14.440.750,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	8.428.900,00	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing dan Berkarakter	Dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja PD Kota Magelang		8.429.125,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD														
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	856.000,00	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing dan Berkarakter	Dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja PD Kota Magelang		856.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD														
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	598.500,00	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing dan Berkarakter	Dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja PD Kota Magelang		598.775,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD														
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1.041.000,00	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing dan Berkarakter	Dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja PD Kota Magelang		1.041.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	8.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD														
			<i>Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD</i>				1 Dokumen	800.700,00	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing dan Berkarakter	Dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja PD Kota Magelang		801.050,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD</i>				21 Laporan	2.714.800,00	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing dan Berkarakter	Dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja PD Kota Magelang		2.714.800,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	<i>Cakupan laporan administrasi keuangan PD sesuai aturan</i>	-			100 %	4.213.946.188,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing dan Berkarakter	OPD Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Magelang	-	4.192.328.707,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			<i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</i>				22 Orang/ bulan	4.207.142.388,00	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing dan Berkarakter	OPD Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Magelang		4.185.524.207,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD														
			<i>Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD</i>				12 Dokumen	6.202.300,00	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing dan Berkarakter	OPD Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Magelang		6.202.550,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD</i>				3 Laporan	601.500,00	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing dan Berkarakter	OPD Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Magelang		601.950,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	<i>Cakupan laporan administrasi umum PD</i>	-			100 %	65.238.900,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing dan Berkarakter	OPD Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Magelang	-	101.014.635,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor														
			<i>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan</i>				1 Paket	1.693.600,00	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing dan Berkarakter	OPD Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Magelang		2.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			<i>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan</i>				3 Paket	11.638.500,00	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing dan Berkarakter	OPD Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Magelang		12.220.400,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			<i>Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan</i>				2 Paket	6.391.400,00	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi,	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya	OPD Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Magelang		8.987.265,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
											narkoba, judi, dan penyeludupan.	Saing dan Berkarakter				
	8.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				24 Dokumen	4.800.000,00	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing dan Berkarakter	OPD Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Magelang Kota Magelang		5.040.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material														
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				1 Paket	6.743.400,00	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing dan Berkarakter	OPD Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Magelang Kota Magelang		7.080.500,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	7.200.000,00	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing dan Berkarakter	OPD Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Magelang Kota Magelang		7.200.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				33 Laporan	26.772.000,00	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing dan Berkarakter	OPD Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Magelang Kota Magelang		58.486.470,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan ketersediaan barang milik daerah penunjang urusan Pemerintahan daerah	-			100 %	69.565.200,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing dan Berkarakter	OPD Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Magelang Kota Magelang	-	110.528.700,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				1 Unit	0,00	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing dan Berkarakter	OPD Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Magelang Kota Magelang		0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				33 Unit	24.565.200,00	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing dan Berkarakter	OPD Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Magelang Kota Magelang		110.528.700,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	45.000.000,00	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	OPD Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Magelang Kota Magelang		0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan ketersediaan jasa penunjang urusan pemernitahan daerah	-			100 %	201.690.952,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing dan Berkarakter	OPD Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Magelang Kota Magelang	-	205.149.955,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	7.664.700,00	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi,	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya	OPD Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Magelang Kota Magelang		10.167.255,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
											narkoba, judi, dan penyeludupan.	Saing dan Berkarakter				
	8.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	66.561.100,00	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing dan Berkarakter	OPD Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Magelang		53.837.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	127.465.152,00	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing dan Berkarakter	OPD Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Magelang		141.145.700,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan terpeliharanya barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	-			100 %	165.706.925,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing dan Berkarakter	OPD Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Magelang	-	329.843.400,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				11 Unit	95.015.650,00	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing dan Berkarakter	OPD Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Magelang		133.865.700,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				3 Unit	21.536.275,00	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing dan Berkarakter	OPD Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Magelang		133.865.700,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				23 Unit	14.175.000,00	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing dan Berkarakter	OPD Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Magelang		14.883.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi				1 Unit	34.980.000,00	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing dan Berkarakter	OPD Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Magelang		47.229.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
2.	8.01.02	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Jumlah Konflik SARA	-			0 Angka	913.594.055,00						-	1.011.473.582,00	
	8.01.02.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persentase Fasilitasi Peningkatan Wawasan Kebangsaan	-			100 %	913.594.055,00			Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing dan Berkarakter	Masyarakat Kota Magelang	-	1.011.473.582,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.02.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan				1450 Orang	263.553.300,00	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing dan Berkarakter	Masyarakat Kota Magelang		213.553.725,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	8.01.02.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan				1320 Orang	193.712.500,00	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing dan Berkarakter	Masyarakat Kota Magelang		224.374.575,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.02.2.01.0005	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan														
			Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan				4 Laporan	86.727.600,00	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing dan Berkarakter	Masyarakat Kota Magelang		161.740.425,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.02.2.01.0007	Pembinaan terhadap aktivitas kepaskibrakaan dan Purnapaskibraka														
			Laporan Hasil Pembinaan Aktivitas Kepaskibrakaan dan Laporan Hasil Pembinaan Purnapaskibraka				1 Dokumen	101.340.250,00	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing dan Berkarakter	Masyarakat Kota Magelang		106.928.250,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.02.2.01.0008	Pembentukan Paskibraka														
			Jumlah Paskibraka				45 Orang	181.997.100,00	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing dan Berkarakter	Masyarakat Kota Magelang		179.563.360,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.02.2.01.0009	Pembinaan Lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila														
			Laporan Hasil Pembinaan Lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila				1 Dokumen	42.887.300,00	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing dan Berkarakter	Masyarakat Kota Magelang		62.749.472,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.02.2.01.0010	Pelaksanaan tugas Purnapaskibraka Duta Pancasila														
			Laporan Hasil Pelaksanaan Tugas Purnapaskibraka Duta Pancasila				1 Dokumen	12.751.705,00	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing dan Berkarakter	Masyarakat Kota Magelang		26.041.425,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.02.2.01.0011	Pengangkatan Purnapaskibraka Duta Pancasila														
			Jumlah Purnapaskibraka Duta Pancasila				70 Orang	30.624.300,00	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing dan Berkarakter	Masyarakat Kota Magelang		36.522.350,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
3.	8.01.03	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Persentase Penduduk Usia Pemilih Pemula yang Berpartisipasi dalam Agenda Politik	-			6.5 %	1.177.047.750,00						-	568.864.063,00	
	8.01.03.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Cakupan pemberdayaan Parpol	-			100 %	1.177.047.750,00			Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing dan Berkarakter	Partai Politik di Wilayah Kota Magelang dan Masyarakat Kota Magelang	-	568.864.063,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.03.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik,				400 Orang	213.085.300,00	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing dan Berkarakter	Partai Politik di Wilayah Kota Magelang dan Masyarakat Kota Magelang		248.795.400,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah									Saing dan Berkarakter				
	8.01.03.2.01.0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah														
			Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah				2 Laporan	643.897.750,00	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing dan Berkarakter	Partai Politik di Wilayah Kota Magelang dan Masyarakat Kota Magelang		0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.03.2.01.0006	Pelaksanaan tugas Paskibraka														
			Jumlah Laporan Kegiatan Pelaksanaan Tugas Paskibraka				1 Kegiatan	320.064.700,00	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing dan Berkarakter	Partai Politik di Wilayah Kota Magelang dan Masyarakat Kota Magelang		320.068.663,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
4.	8.01.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Persentase Oganisasi Kemasyarak atan yang dibina dan dipantau Persentase Organisasi Kemasyarak atan yang Aktif	-			81.30 % 88.62 %	236.975.300,00						-	293.144.720,00	
	8.01.04.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Cakupan pembinaan dan pemantauan Ormas	-			100 %	236.975.300,00			Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing dan Berkarakter	Organisasi Masyarakat Kota Magelang	-	293.144.720,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.04.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah				385 Orang	93.269.900,00	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing dan Berkarakter	Organisasi Masyarakat Kota Magelang		98.302.300,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.04.2.01.0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah														
			Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah				8 Laporan	143.705.400,00	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing dan Berkarakter	Organisasi Masyarakat Kota Magelang		194.842.420,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
5.	8.01.05	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Persentase Pembinaan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	-			12.23 %	319.983.860,00						-	322.510.550,00	
	8.01.05.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Cakupan pemantapan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya	-			100 %	319.983.860,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing dan Berkarakter	Masyarakat Kota Magelang	-	322.510.550,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.05.2.01.0002	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah														
			Jumlah Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Disusun				1 Dokumen	35.687.000,00	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing dan Berkarakter	Masyarakat Kota Magelang		35.687.050,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.05.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah				300 Orang	35.158.000,00	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing dan Berkarakter	Masyarakat Kota Magelang		37.684.025,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.05.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika,				20 Orang	207.067.900,00	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan	Penguatan Landasan Pembentukan	Masyarakat Kota Magelang		207.068.225,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah</i>								budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Sumber Daya Manusia Berdaya Saing dan Berkarakter				
	8.01.05.2.01.0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah														
			<i>Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah</i>				4 Laporan	42.070.960,00	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing dan Berkarakter	Masyarakat Kota Magelang		42.071.250,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
6.	8.01.06	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	<i>Jumlah Konflik Sosial</i>	-			0 Angka	479.201.500,00						-	285.119.675,00	
	8.01.06.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	<i>Cakupan Pemantapan Kewaspadaan Daerah dan Penanganan Konflik Sosial</i>	-			100 %	479.201.500,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing dan Berkarakter	Wilayah Kota Magelang	-	285.119.675,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.06.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah														
			<i>Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah</i>				400 Orang	36.785.700,00	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing dan Berkarakter	Wilayah Kota Magelang		41.383.600,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.06.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah														
			<i>Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah</i>				120 Orang	242.621.200,00	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing dan Berkarakter	Wilayah Kota Magelang		243.736.075,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.06.2.01.0006	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota</i>				12 Dokumen	199.794.600,00	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing dan Berkarakter	Wilayah Kota Magelang		0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	J U M L A H							1.046.082.354.169,00							516.926.689.047,80	

BAB 6

KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Indikator kinerja adalah alat ukur spesifik untuk masukan, proses, keluaran (*output*), hasil (*outcome*), manfaat, dan/atau dampak (*impact*) yang menggambarkan tingkat capaian kinerja yang akan dicapai suatu program, atau kegiatan. Hal ini menjadi dasar penilaian kinerja baik dalam proses perencanaan, pelaksanaan maupun hasil perencanaan pembangunan yang sekaligus sebagai petunjuk kemajuan dalam rangka mencapai tujuan atau sasaran.

Indikator tersebut akan menjadi parameter prioritas pembangunan sekaligus sebagai instrumen pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RKPD. Pada dasarnya penyusunan indikator kinerja daerah dirumuskan berdasarkan tujuan pembangunan, yang merupakan upaya untuk mengatasi permasalahan daerah baik yang menyangkut pelayanan dasar maupun non pelayanan dasar, serta penjabaran strategi yang diturunkan dari visi dan misi RPJMD Kota Magelang Tahun 2025-2029, tanpa mengabaikan kebijakan eksternal yang termuat dalam RPJP Nasional, RPJM Nasional, dan RPJMD Provinsi Jawa Tengah dan RPJPD Kota Magelang 2025-2045.

Sebagai alat ukur pencapaian kinerja tujuan, sasaran, yang diimplementasikan ke dalam program, kegiatan, dan sub kegiatan, Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah disusun sebagai satu BAB tersendiri dalam dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Substansi Bab ini memuat rincian indikator kinerja beserta target yang direncanakan untuk dapat dicapai di akhir pelaksanaan perencanaan tahun 2026 sebagai panduan dalam pencapaian kinerja tahunan yang ditetapkan sebagai Indikator Kinerja Utama (IKU) yang merupakan ukuran keberhasilan suatu tujuan dan sasaran strategis sebagai suatu prioritas program dan kegiatan yang mengacu pada sasaran strategis rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta Indikator Kinerja Kunci (IKK) yang **menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan**, digunakan untuk mengukur keberhasilan upaya mencapai tujuan jangka pendek yang merupakan upaya untuk mencapai tujuan jangka menengah dan jangka panjang.

Dalam rangka efisiensi dan efektifitas pencapaian kinerja pembangunan daerah, maka dalam RKPD tahun 2026 disusun program, kegiatan, sampai dengan sub kegiatan serta indikator kinerja pembangunan daerah yang disusun dengan berpedoman pada peraturan perundang undangan yang terkait. Penetapan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah tahun 2026 memuat dua hal, yaitu Indikator Kinerja Utama Daerah dan Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah Kota Magelang Tahun 2026 sebagaimana tersaji dalam Tabel 6.1, Tabel 6.2 dan Tabel 6.3 berikut ini.

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan dalam mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan dalam RPJMD, selaras dengan visi dan misi kepala daerah. IKU ditentukan berdasarkan analisis terhadap tujuan dan sasaran pembangunan daerah serta hasil penjenjangan kinerja untuk memastikan pencapaian visi dan misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Magelang periode 2025-2029. Dengan mempertimbangkan faktor-faktor tersebut, IKU untuk 5 (lima) tahun ke depan ditetapkan sebagai berikut:

Tabel 6.1 *Indikator Kinerja Utama Daerah Kota Magelang Tahun 2026*

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KET
			2025	2026	2027	2028	2029	2030*)	
1	Tingkat Kemiskinan	%	5,53 - 5,80	5,11 - 5,38	4,70 - 5,09	4,29 - 4,81	3,80 - 4,50	3,47 - 4,25	
2	Gini Rasio	Rasio	0,447	0,432	0,417	0,402	0,387	0,372	
3	Penurunan Emisi GRK Kumulatif	Ton CO2eq	154.992,13	818.750,71	1.482.509,30	2.146.267,88	2.810.026,46	3.186.040,96	
4	Indeks Risiko Bencana	Indeks	92,85-89,10	90,02-88,80	89,05 - 87,46	88,07 - 86,13	87,10 - 84,79	86,12 - 83,45	
5	Indeks Pembangunan Manusia	Indeks	82,58	82,97	83,48	83,98	84,47	84,94	
6	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	4,20 - 4,80	4,12 - 4,66	4,04 - 4,52	3,96 - 4,38	3,88 - 4,24	3,80 - 4,10	

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KET
			2025	2026	2027	2028	2029	2030*)	
7	Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	5,25 - 5,68	5,28 - 5,70	5,30 - 5,74	5,32 - 5,76	5,29 - 5,79	5,23 - 5,87	
8	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	85	86	87	88	89	90	

Keterangan: *) Tahun 2030 merupakan kinerja kepala daerah periode berikutnya

Sumber: RPJMD Kota Magelang 2025-2029

Indikator Kinerja Daerah (IKD) adalah ukuran keberhasilan pencapaian penyelenggaraan pemerintahan daerah yang mencakup indikator makro pembangunan dan indikator kinerja kunci. Indikator Kinerja Kunci (IKK) merupakan indikator yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan sesuai dengan kewenangan daerah. Penetapan IKD beserta targetnya telah mempertimbangkan berbagai peraturan perundang-undangan yang memuat mandat dalam pencapaian kinerja pada urusan pemerintahan daerah. Selain itu, potensi daerah juga dipandang sebagai modal dalam pencapaian kinerja, dengan tetap memperhatikan kemampuan masing-masing Organisasi Perangkat Daerah dalam mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya. Dengan demikian, setiap OPD dapat berkontribusi secara maksimal dalam mencapai target kinerja yang telah ditetapkan. Berikut IKD yang ditetapkan untuk lima tahun ke depan:

Tabel 6.2 Indikator Kinerja Daerah Kota Magelang Tahun 2026

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KET
			2025	2026	2027	2028	2029	2030*)	
I	ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI								
1	Indeks Ketahanan Pangan	Angka	91,56	91,80	92,03	92,27	92,50	92,74	
2	Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan	%	8,54	8,4	8,26	8,12	7,98	7,84	
3	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Angka	71,44	71,48	71,53	71,57	71,62	71,62	
4	Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman	%	17,22	33,165	49,11	65,055	81,00	83,75	
5	Penurunan Intensitas Emisi GRK	TonCO2eq	154.992,13	818.750,71	1.482.509,30	2.146.267,88	2.810.026,46	3.186.040,96	
6	Indeks Risiko Bencana	Angka	92,85-89,10	90,02-88,80	89,05 - 87,46	88,07 - 86,13	87,10 - 84,79	86,12 - 83,45	
II	ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT								
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	5,25 - 5,68	5,28 - 5,70	5,30 - 5,74	5,32 - 5,76	5,29 - 5,79	5,23 - 5,87	
2	Tingkat Kemiskinan	%	5,53 - 5,80	5,11 - 5,38	4,70 - 5,09	4,29 - 4,81	3,80 - 4,50	3,47 - 4,25	
3	PDRB Per Kapita	Rp Juta	98,58 - 104,62	109,09 - 113,97	119,59 - 123,31	130,10 - 132,66	140,60 - 142,00	153,18 - 155,50	
4	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	4,20 - 4,80	4,12 - 4,66	4,04 - 4,52	3,96 - 4,38	3,88 - 4,24	3,80 - 4,10	
5	Indeks Gini	Angka	0,447	0,432	0,417	0,402	0,387	0,372	
6	Indeks Pembangunan Manusia	Angka	82,58	82,97	83,48	83,98	84,47	84,94	
7	Prevalensi Stunting	%	12,56	11,98	11,40	10,82	10,25	9,72	
8	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Angka	100	100	100	100	100	100	
9	Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja	%	46,53	47,78	49,03	50,28	51,53	52,68	
10	Indeks Perlindungan Anak	Angka	70,22	71,14	72,03	73,07	74,11	75,18	
11	Indeks Ketimpangan Gender	Angka	0,137-0,131	0,136 - 0,124	0,135 - 0,118	0,134 - 0,111	0,133 - 0,105	0,132 - 0,099	
III	ASPEK DAYA SAING DAERAH								
1	Rasio PDRB Industri Pengolahan	%	16,52	16,57	16,62	16,65	16,69	16,73	
2	Rasio PDRB Akomodasi Makan dan Minum	%	6,73	6,86	7,00	7,13	7,27	7,40	
3	Rasio Kewirausahaan	%	4,95	5,70	6,45	7,20	7,96	8,71	
4	Kapabilitas Inovasi	Angka	3,70	3,80	3,90	3,95	4,00	4,05	
5	Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak	%	76,16	76,62	77,08	77,54	78	78,46	
6	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB	%	0,71	0,77	0,83	0,88	0,93	0,96	

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KET
			2025	2026	2027	2028	2029	2030*)	
7	Persentase Rumah Tangga dengan Akses Internet	%	96,59	96,72	96,93	97,34	97,69	97,84	
8	Angka Kriminalitas	Angka	75,01	74,83	74,22	73,90	73,25	72,94	
IV	ASPEK PELAYANAN UMUM								
1	Indeks Reformasi Hukum	Angka	80	81,25	82,50	83,75	85	86,25	
2	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Angka	3,70	3,71	3,72	3,73	3,74	3,75	
3	Indeks Pelayanan Publik	Angka	3,72	3,92	4,11	4,29	4,51	4,68	
4	Indeks Integritas Nasional	Angka	82,34	83,00	83,67	84,34	85,00	85,67	
5	Indeks Daya Saing Daerah	Angka							
6	Indeks Reformasi Birokrasi	Angka	85	86	87	88	89	90	
	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DAN KUNCI (IKK) PERANGKAT DAERAH								
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan								
1	Indeks Pendidikan	Nilai	78,73	80,08	81,61	83,13	84,66	86,61	
2	Harapan Lama Sekolah (HLS)	Tahun	14,76	14,90	15,04	15,18	15,30	15,44	
3	Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	Tahun	11,43	11,65	11,90	12,15	12,40	12,65	
4	Indeks Capaian SPM Pendidikan	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
5	Angka Partisipasi Sekolah (APS) PAUD (5-6 tahun)	%	95,38	96,25	96,75	97,00	97,25	97,50	
6	Angka Partisipasi Sekolah (APS) Sekolah Dasar (7 - 12 tahun)	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
7	Angka Partisipasi Sekolah (APS) Sekolah Menengah Pertama (13-15 tahun)	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
8	Angka partisipasi sekolah (7-18 tahun) kesetaraan	%	61,69	63,50	66,50	69,50	72,50	75,50	
9	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/Paket A	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
10	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/Paket B	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
11	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
12	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
13	Rerata kemampuan literasi sekolah dasar (SD) berdasarkan Asesmen Nasional	%	96,98	97,23	97,48	97,73	97,98	98,23	
14	Rerata kemampuan literasi sekolah menengah pertama (SMP) berdasarkan Asesmen Nasional	%	96,34	96,59	96,84	97,09	97,34	97,59	
15	Rerata kemampuan numerasi sekolah dasar (SD) berdasarkan Asesmen Nasional	%	94,09	94,39	94,69	94,99	95,29	95,59	
16	Rerata kemampuan numerasi sekolah menengah pertama (SMP) berdasarkan Asesmen Nasional	%	95,06	95,36	95,66	95,96	96,26	96,56	
17	Indeks iklim keamanan Sekolah Dasar (SD)	%	79,06	80,56	82,06	83,56	85,06	86,56	
18	Indeks iklim keamanan Sekolah Menengah Pertama (SMP)	%	75,34	76,54	77,74	78,94	79,14	80,34	
19	Indeks iklim kebhinekaan Sekolah Dasar (SD)	%	75,51	75,71	75,91	76,11	76,31	76,51	
20	Indeks iklim kebhinekaan Sekolah Menengah Pertama (SMP)	%	76	76,5	77	77,5	78	78,5	
21	Indeks iklim inklusivitas Sekolah Dasar (SD)	%	62,96	63,96	64,96	65,96	66,96	67,96	
22	Indeks iklim inklusivitas Sekolah Menengah Pertama (SMP)	%	65,31	67,5	69,5	71,5	73,5	75,5	
23	Peningkatan proporsi jumlah satuan PAUD yang mendapatkan minimal akreditasi B	%	63,29	64	64	64,8	64,8	64,8	
24	Proporsi guru PAUD dengan kualifikasi Sarjana (S1)/ Diploma empat (D-IV)	%	80,06	81,5	82,5	83,5	84,5	85	

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KET
			2025	2026	2027	2028	2029	2030*)	
25	Hasil Penilaian Mandiri AKIP oleh Inspektorat	Nilai	A	A	A	A	A	A	
26	Nilai Pemajuan Kebudayaan	%	100	100	100	100	100	100	
27	Persentase kebudayaan lokal yang dikembangkan	%	100	100	100	100	100	100	
28	Persentase kesenian tradisional yang dikembangkan	%	92	92	92	92	92	92	
29	Cakupan pembinaan sejarah lokal	%	67	67	67	67	67	67	
30	Persentase cagar budaya yang dilindungi dan dilestarikan	%	17	19	21	23	25	27	
31	Persentase peningkatan kunjungan museum	%	20	20	20	20	20	20	
2	Dinas Kesehatan								
1	Usia Harapan Hidup (UHH)	Tahun	77,83	77,94	78,16	78,39	78,62	79,01	
2	Jumlah Kematian Ibu (AKI)		0	0	0	0	0	0	
3	Prevalensi Stunting	%	12,56	11,98	11,4	10,82	10,25	9,72	
4	Cakupan penemuan kasus TBC (Notifikasi Kasus TBC)	%	90	90	90	90	90	90	
5	Insidens tuberculosis (TBC)	%	90	90	90	90	90	90	
6	Cakupan Kepeserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)	%	99	99	99	99	99	99	
3	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang								
1	Persentase infrastruktur bidang pekerjaan umum dalam kondisi baik	%	66,40	66,63	66,87	67,09	67,34	67,6	
2	Persentase infrastruktur bina marga dalam kondisi baik	%	59,86	60,26	60,65	61,02	61,45	61,9	
3	Persentase panjang jalan dalam kondisi mantap	%	85,77	85,86	85,95	86,03	86,12	86,2	
4	Persentase bangunan gedung yang laik fungsi	%	63,61	63,63	63,66	63,69	63,71	63,74	
5	Persentase infrastruktur sektor penyehatan lingkungan dalam kondisi baik	%	75,74	76	76,29	76,58	76,87	77,15	
6	Persentase Rumah Tangga dengan Akses Air Minum Aman (Keseluruhan)	%	89,10	89,64	90,18	90,72	91,26	91,80	
7	Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang dan kawasan strategis	%	80,42	81,76	83,09	84,43	85,76	87,09	
8	Persentase perwujudan kesesuaian pemanfaatan ruang	%	83,34	83,51	83,68	83,85	84,02	84,19	
9	Persentase kawasan strategis yang ditata	%	77,5	80	82,5	85	87,5	90	
10	Persentase peningkatan nilai SAKIP	%	78,5	80	81,5	83	84,5	85	
11	Persentase penilaian nilai SAKIP OPD	%	78,5	80	81,5	83	84,5	85	
4	Perumahan dan Kawasan Permukiman								
1	Jumlah luasan kawasan permukiman kumuh dibawah 10Ha	%	0.40	0.23	0.05	0	0	0	
2	Jumlah luasan penanganan infrastruktur kawasan kumuh	%	30.22	60.43	90.65	100.00	100.00	100.00	
3	Persentase rumah tangga dengan akses hunian layak	%	76,16	76,62	77,08	77,54	78	78,46	
4	Persentase permukiman yang didukung PSU	%	97.67	98.64	99.61	100.00	100.00	100.00	
5	Persentase akses masyarakat terhadap tanah	%	-	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	
6	Nilai SAKIP		81.5	81.6	81.7	81.8	81.9	82	

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KET
			2025	2026	2027	2028	2029	2030*)	
5	Satuan Polisi Pamong Praja								
1	Presentase Penurunan Gangguan Trantibum	%	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	
2	Presentase Pelayanan Penanganan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
3	Presentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	%	80	80	82	83	84	85	
4	waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran	menit							
6	Badan Penanggulangan Bencana Daerah								
1	Indeks Risiko Bencana Daerah	Nilai	92,85-89,10	90,02-88,80	89,05 - 87,46	88,07 - 86,13	87,10 - 84,79	86,12 - 83,45	
2	Indeks Kapasitas Daerah	Nilai	0,43	0,45	0.47	0.49	0.51	0.52	
3	Indeks Ketahanan Daerah	Nilai	0,43	0,45	0.47	0.49	0.51	0.52	
4	Indeks Prioritas 1 Perkuatan Kebijakan dana Kelembagaan	Nilai	0.79	0.79	0.79	0.81	0.81	0.81	
5	Indeks Prioritas 2 Pengkajian Risiko dan Perencanaan Terpadu	Nilai	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	
6	Indeks Prioritas 3 Pengembangan Sistem Informasi, Diklat dan Logistik	Nilai	0.58	0.58	0.58	0.7	0.7	0.7	
7	Indeks Prioritas 4 Penanganan Tematik Kawasan Rawan Bencana	Nilai	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	
8	Indeks Prioritas 5 Efektivitas Pencegahan dan Mitigasi Bencana	Nilai	0.49	0.49	0.49	0.49	0.49	0.49	
9	Indeks Prioritas 6 Kesiapsiagaan dan Penanganan Darurat Bencana	Nilai	0.27	0.33	0.33	0.34	0.38	0.38	
10	Indeks Prioritas 7 Pengembangan Sistem Pemulihan Bencana	Nilai	0.2	0.2	0.36	0.36	0.42	0.47	
7	Dinas Sosial								
1	Persentase PMKS/ PPKS	%	4,49	4,49	4,49	4,49	4,49	4,49	
2	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (indikator SPM)	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
3	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
8	Dinas Tenaga Kerja								
1	Presentase Tenaga Kerja yang Bekerja	%	95.75	95.9	96.12	96.25	96.34	96.4	
2	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	%	31.5	41.75	44.5	47	49.75	49.75	
3	Prosentase Pencari Kerja Terdaftar yang ditempatkan	%	60	65	70	75	80	80	
9	Dinas Lingkungan Hidup								
1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	angka	71,44	71,48	71,53	71,57	71,62	71,62	
2	Indeks Kualitas Udara	angka	84,63	84,64	84,65	84,66	84,67	84,67	
3	Indeks Kualitas Air	angka	76,39	76,49	76,59	76,69	76,79	76,79	
4	Indeks Kualitas Lahan	angka	38,55	38,56	38,57	38,58	38,59	38,59	
10	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil								
1	Nilai kualitas layanan kependudukan dan pencatatan sipil	Nilai	96,10	96,25	96,40	96,60	96,80	97,00	
2	Persentase kepemilikan dokumen pendaftaran penduduk	%	99,98	99,99	99,99	99,99	99,99	99,99	

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KET
			2025	2026	2027	2028	2029	2030*)	
3	Persentase kepemilikan dokumen pencatatan sipil	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
4	Persentase informasi adminduk yang dikelola	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
5	Nilai SAKIP OPD	Nilai	A	A	A	A	A	A	
6	Perekaman KTP-el	%	99,98	99,99	99,99	99,99	99,99	99,99	
7	Persentase anak usia 0-17 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
8	Kepemilikan akta kelahiran	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
9	Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
10	Penerbitan akta perkawinan	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
11	Penerbitan akta perceraian	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
12	Penerbitan akta kematian	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
11	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana								
1	Tingkat swadaya masyarakat	%	40%	40%	60%	60%	80%	100%	
2	Persentase partisipasi masyarakat dalam program pemberdayaan masyarakat	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
3	Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	Nilai	66,45-67,10	67,86 - 67,90	68,63 - 68,70	69,41 - 69,50	70,19 - 70,30	70,97 - 71,10	
12	Dinas Perhubungan								
1	Persentase pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan Kabupaten/ Kota	%	87	87,25	87,5	87,75	88	88,25	
2	Persentase Pengguna Moda Transportasi Umum Perkotaan	%	95,80%	96,41	97,01	97,21	97,61	98,02	
13	Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik								
1	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Nilai	3,70	3,71	3,72	3,73	3,74	3,75	
2	Tingkat kematangan Pembangunan Aplikasi SPBE	level	3	3	3	3	3	3	
3	Tingkat kematangan layanan jaringan intra instansi pusat/ pemerintah daerah	level	4	4	4	4	4	4	
4	Tingkat kematangan penggunaan sistem penghubung layanan instansi pusat/ pemerintah daerah	level	3	3	3	3	3	3	
5	Tingkat Kematangan Penerapan manajemen Keamanan SPBE	level	4	4	4	4	4	4	
6	Tingkat kematangan Pelaksanaan audit infrastruktur SPBE	level	3	3	3	3	3	3	
7	Tingkat kematangan Pelaksanaan audit Aplikasi SPBE	level	3	3	3	3	3	3	
8	Tingkat kematangan Pelaksanaan audit Keamanan SPBE	level	2	2	2	2	2	2	
9	Tingkat kematangan layanan data terbuka	level	5	5	5	5	5	5	
10	Tingkat kematangan layanan pengaduan pelayanan publik	level	4	4	4	4	4	4	
11	Nilai SAKIP OPD	Nilai	82	82,5	83	83,5	84	84,5	
14	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu								
1	Pertumbuhan Realisasi Investasi	%	16	16	14	14	14	14	
2	Pertumbuhan Investor PMA/PMDN	%	1	1	1	1	1	1	
3	Nilai IKM	Angka	92	92	93	93	93	94	

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KET
			2025	2026	2027	2028	2029	2030*)	
4	Perda mengenai pemberian fasilitas/ insentif penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah Kab/Kota	Dokumen	-	-	-	-	1	-	
5	Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan pemberian fasilitas/ insentif penanaman modal	Dokumen	1	-	-	-	-	1	
6	Laporan Evaluasi pelaksanaan pemberian fasilitas/ insentif penanaman modal	Laporan	1	1	1	1	1	1	
7	Kegiatan seminar bisnis forum, one on one meeting	Kegiatan	-	1	1	1	1	1	
8	Kegiatan Pameran Penanaman Modal	pameran	1	-	1	1	1	1	
9	Kegiatan penerimaan misi penanaman modal	Kegiatan	1	1	1	1	1	1	
10	Konsultasi perizinan dan non perizinan penanaman modal	Orang	900	900	925	925	930	930	
11	Penerbitan perizinan dan non perizinan penanaman modal	Izin	7000	7000	7010	7010	7020	7020	
12	Laporan realisasi penanaman modal	Laporan	4	4	4	4	4	4	
13	Pembinaan aparaturnya penanaman modal tingkat Kabupaten/Kota	Orang	11	17	17	17	17	17	
14	Pembinaan penanaman modal PMA dan PMDN	Kegiatan Usaha	100	100	110	110	120	120	
15	Tersedianya data dan informasi perizinan dan non perizinan	Dokumen	37	38	39	40	41	42	
15	Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata								
1	Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap PAD	%	6.315	6.338	6.376	6.379	6.392	6.398	
2	Persentase Peningkatan Wisatawan (Nusantara dan Mancanegara)	%	13.33	14	15	17	18	19	
3	Tingkat Hunian Akomodasi	%	40.13	40.65	41	41.35	41.75	41.95	
4	Persentase Prestasi di Bidang Kepemudaan dan Keolahragaan	%	51.79	53.45	55.11	56.83	58.49	60.15	
5	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan	%	0.9	0.99	1.09	1.2	1.45	1.6	
6	Tingkat Partisipasi Aktif Masyarakat dalam kegiatan Olahraga	angka	0.472	0.473	0.474	0.475	0.476	0.477	
16	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan								
1	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Nilai	100	100	100	100	100	100	
2	Nilai pengawasan kearsipan	Nilai	86,81	87,15	87,50	87,85	88,20	88,56	
3	Nilai SAKIP OPD	Nilai	84.71						
17	Dinas Pertanian dan Pangan								
1	Skor PPH Ketersediaan	Angka	94,25	94,30	94,40	94,50	94,65	94,85	
2	Persentase Penanganan Daerah Rentan Rawan Pangan	%	100	100,00	100,00	100	100	100	
3	Persentase Pangan Yang Aman	%	89	90,00	91,00	92	93	94	
4	Jumlah produksi ikan konsumsi	Angka	1	1,25	1,3	1,35	1,4	1,5	
5	Jumlah produksi ikan hias	Angka	87	87	87	87	87	87	
6	Jumlah produksi olahan perikanan	Angka	238	238,5	239	239,5	240	240,5	
7	Data sarana pertanian	Angka	4	4	4	4	4	4	
8	Data sarana peternakan	Angka							
9	Data prasarana pertanian	Angka	2	2	2	4	2	2	
10	Data prasarana Puskesmas	Angka	1	1	1	1	1	1	
11	Data prasarana RPH	Angka	1	1	1	1	1	1	
12	Peningkatan pangan asal hewan yang ASUH	Angka	3	3	3	3	3	3	

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KET
			2025	2026	2027	2028	2029	2030*)	
13	Persentase produksi daging asal RPH yang ASUH	%	996.598	996.575	996.621	996.643	996.666	996.689	
14	Penurunan jumlah kasus Penyakit hewan	Angka	6	6	6	6	6	6	
15	Persentase jumlah kasus penyakit hewan di Puskesmas yang Tertangani	%							
16	Luasan bencana pertanian yang terkendali	Angka	7	7	7	7	7	7	
17	Jumlah rekomendasi izin usaha Peternakan	Angka	11	12	13	14	15	16	
18	Persentase kelompok tani yang naik kelas	\$	12,12%	15,15%	18,18%	21,21%	24,24%	27,27%	
18	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, dan Usaha Mikro								
1	Volume usaha koperasi	Rp	155,539,270,000	160,205,448,100	165,011,611,543	169,961,959,889	175,060,818,685	180,312,643,245	
2	Omzet pelaku usaha mikro	Rp	851,228,386,583	876,765,238,180	903,068,195,325	930,160,241,185	958,065,048,421	986,806,999,874	
3	Indeks Kinerja Perdagangan	%	49.55	53.9	57.91	57.92	57.94	57.95	
4	Persentase peningkatan omzet pelaku usaha industri kecil	%	1.6	1.66	1.72	1.77	1.82	1.86	
5	Meningkatnya Koperasi yang berkualitas	%	65.79	66.67	67.54	68.42	69.3	70.18	
6	Meningkatnya Usaha Mikro yang menjadi wirasausaha	%	56.71	62.93	69.14	75.35	81.57	87.78	
7	Persentase Kinerja realisasi pupuk	%	22.6	22.75	23.1	23.5	24	24.5	
8	Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	%	98.97	98.99	99	99	99.01	99.03	
9	Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di kabupaten/kota	%	0.23	0.23	0.23	0.23	0.23	0.23	
10	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIP	%	84	88	90	92	94	95	
11	Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini	%	100	100	100	100	100	100	
19	Sekretariat Daerah								
A	Bagian Pemerintahan								
1	Persentase Kebijakan administrasi tata pemerintahan yang terfasilitasi	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
2	Persentase Kerjasama daerah yang terfasilitasi	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
B	Bagian Kesejahteraan Rakyat								
1	Persentase kebijakan bidang Kesejahteraan Rakyat yang terpenuhi	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
C	Bagian Hukum								
1	Prosentase Produk Hukum yang terfasilitasi	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
D	Bagian Perekonomian & SDA								
1	Persentase Kebijakan di Bidang Perekonomian dan SDA yang dilaksanakan	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
E	Bagian Administrasi Pembangunan								
1	Kemajuan pekerjaan fisik yang dilakukan oleh seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD)	%	98.60	98.70	98.80	98.90	99.00	99.10	
F	Bagian Pengadaan Barang/Jasa								
1	Indeks Tata Kelola Pengadaan (ITKP) Maksimal Bernilai Baik	Nilai	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	
G	Bagian Umum								
1	Indeks Kepuasan Pimpinan	Nilai	85 (Baik)	86 (Baik)	86,5 (Baik)	86,8 (Baik)	87 (Baik)	87,5 (Baik)	

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KET
			2025	2026	2027	2028	2029	2030*)	
H	Bagian Organisasi								
1	Indeks Reformasi Birokrasi	Angka	85	86	87	88	89	90	
2	Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	92.58	93	93.25	93.5	93.75	94	
3	Nilai SAKIP	Nilai	80.25	80.5	82.05	85	87.05	90.01	
I	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan								
1	Indeks Kepuasan Pimpinan	Nilai	85 (Baik)	86 (Baik)	86,5 (Baik)	86,8 (Baik)	87 (Baik)	87,5 (Baik)	
20	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah								
1	Indeks Kepuasan Anggota DPRD terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD	Angka	80,89	80,91	80,93	80,95	80,97	80,98	
2	Nilai SAKIP OPD	Nilai	80,82	80,84	80,85	80,87	80,89	80,90	
21	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah								
1	Nilai SAKIP dari aspek perencanaan dan aspek pengukuran	Angka	25	25,5	26	26,5	27	27,5	
2	Persentase Tingkat efektivitas proses perencanaan pembangunan daerah dan kualitas dokumen perencanaan	%	82.05	83	83.5	84	84.5	85	
22	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah								
1	Persentase Capaian Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah dan Barang Milik Daerah	%	86.91	87.33	88	88.04	88.21	88.21	
2	Persentase Capaian Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
3	Persentase Capaian Akuntabilitas Pengelolaan Barang Milik Daerah	%	73.82	74.66	75.99	76.08	76.41	76.41	
4	Rasio PAD terhadap Pendapatan Daerah	%	36.61	36.93	37.19	38.28	39.41	39.79	
5	Persentase peningkatan Pendapatan Asli Daerah	%	2.25	2.55	5	5	5	5	
23	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia								
1	Indeks sistem merit	Angka	0,84	0.86	0.89	0.91	0.93	0.93	
2	Nilai sistem merit	Angka	346	354	364	373	380	380	
24	Inspektorat								
1	Survey Kepuasan Masyarakat/ Mitra (SKM)	Angka	86,22	86,3	86,4	86,5	86,6	86,7	
2	Kapabilitas APIP	Angka	3,10	3,11	3,12	3,13	3,14	3,15	
25	Kecamatan Magelang Selatan								
1	Persentase upaya kemandirian masyarakat	%	85	86	87	88	89	90	
2	Persentase penanganan gangguan trantibum	%	85	86	87	88	89	90	
3	Persentase sarpras pelayanan dalam kondisi baik	%	85	86	87	88	89	90	
4	Persentase urusan pemerintahan umum yang dikoordinasikan	%	85	86	87	88	89	90	
26	Kecamatan Magelang Tengah								
1	Persentase upaya kemandirian masyarakat	%	85	86	87	88	89	90	
2	Persentase penanganan gangguan trantibum	%	85	86	87	88	89	90	
3	Persentase sarpras pelayanan dalam kondisi baik	%	85	86	87	88	89	90	

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KET
			2025	2026	2027	2028	2029	2030*)	
4	Persentase urusan pemerintahan umum yang dikoordinasikan	%	85	86	87	88	89	90	
27	Kecamatan Magelang Utara								
1	Persentase upaya kemandirian masyarakat	%	85	86	87	88	89	90	
2	Persentase penanganan gangguan trantibum	%	85	86	87	88	89	90	
3	Persentase sarpras pelayanan dalam kondisi baik	%	85	86	87	88	89	90	
4	Persentase urusan pemerintahan umum yang dikoordinasikan	%	85	86	87	88	89	90	
28	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik								
1	Indeks Harmoni Ekonomi, Sosial, Budaya dan Keberagaman	Angka	6.1	6.15	6.2	6.25	6.3	6.35	
2	Indeks Demokrasi Indonesia	Angka	6.1	6.15	6.2	6.25	6.3	6.35	
3	Indeks Kinerja Ormas	Angka	61	61.5	62	62.5	63	63.5	
4	Indeks Kewaspadaan Nasional	Angka	6.1	61.5	6.2	6.5	6.3	63.5	

Keterangan: *) Tahun 2030 merupakan kinerja kepala daerah periode berikutnya

Tabel 6.3 Indikator Utama Pembangunan Kota Magelang Tahun 2026

No	Indikator	Satuan	Baseline	Target					Perangkat Daerah Koordinator
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1.	Tingkat Kemiskinan	%	5,53 - 5,80	5,11 - 5,38	4,70 - 5,09	4,29 - 4,81	3,80 - 4,50	3,47 - 4,25	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
2.	Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan (<i>Prevalence of Undernourishment</i>)	%	8,54	8,4	8,26	8,12	7,98	7,84	Dinas Pertanian dan Pangan
3.	Indeks Ketahanan Pangan (IKP)	Angka	91,56	91,80	92,03	92,27	92,50	92,74	Dinas Pertanian dan Pangan
4.	Usia Harapan Hidup (UHH)	Tahun	77,83	77,94	78,16	78,39	78,62	79,01	Dinas Kesehatan
5.	Jumlah Kasus Kematian Ibu	Kasus	0	0	0	0	0	0	Dinas Kesehatan
6.	Prevalensi Stunting (Pendek dan Sangat Pendek) pada Balita	%	12,56	11,98	11,4	10,82	10,25	9,72	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
7.	Cakupan Penemuan dan Pengobatan Kasus Tuberkulosis (<i>Treatment Coverage</i>) (angka eksisting hanya penemuan)	%	90	90	90	90	90	90	Dinas Kesehatan
8.	Angka Keberhasilan Pengobatan Tuberkulosis (<i>Treatment Success Rate</i>)	%	90	90	90	91	91	91	Dinas Kesehatan
9.	Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional	%	99	99	99	99	99	99	Dinas Kesehatan
10	Persentase Siswa yang Mencapai Standar Kompetensi Minimum pada Asesmen Tingkat Nasional (Seluruh Jenjang):								
	- Literasi Membaca SD/ Sederajat	%	96,98	97,23	97,48	97,73	97,98	98,23	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	- Literasi Membaca SMP/ Sederajat	%	96,34	96,59	96,84	97,09	97,34	97,59	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	- Numerasi SD/Sederajat	%	94,09	94,39	94,69	94,99	95,29	95,59	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	- Numerasi SMP/ Sederajat	%	95,06	95,36	95,66	95,96	96,26	96,56	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
11	Rata-Rata Lama Sekolah Penduduk Usia di Atas 15 Tahun	Tahun	11,13	11,22	11,32	11,41	11,50	11,59	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

No	Indikator	Satuan	Baseline	Target					Perangkat Daerah Koordinator
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
12	Harapan Lama Sekolah	Tahun	14,76	14,90	15,04	15,18	15,30	15,44	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
13	Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi	%	20,89	21,44	21,99	22,54	23,09	23,64	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
14	Angka Partisipasi Sekolah 5-6 Tahun	%	95,38	96,25	96,75	97,00	97,25	97,50	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
15	Persentase Satuan Pendidikan yang Mempunyai Guru Mengajar Mulok Bahasa Daerah/Seni Budaya dan Mengarusutamakan Kebudayaan	%	21,28	26,59	31,92	37,23	42,55	47,87	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
16	Persentase Cagar Budaya (CB) dan Warisan Budaya Tak Benda (WBTB) yang Dilestarikan (angka eksisting hanya cagar budaya)	%	17	19	21	23	25	27	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
17	Jumlah Pengunjung Tempat Bersejarah	Orang	440000	462500	485000	507500	530000	552500	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
18	Persentase Kelompok Kesenian yang Aktif Terlibat/ Mengadakan Pertunjukan Kesenian dalam Satu Tahun Terakhir	%	27,36	27,95	28,54	29,13	29,72	30,31	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
19	Tingkat Pemanfaatan Perpustakaan	%	2,91	3,06	3,20	3,35	3,49	3,64	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
20	Jumlah Kejadian Konflik SARA	Kali	0	0	0	0	0	0	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
21	Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	Angka	66,45-67,10	67,86 - 67,90	68,63 - 68,70	69,41 - 69,50	70,19 - 70,30	70,97 - 71,10	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
22	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	Angka	0,137-0,131	0,136 - 0,124	0,135 - 0,118	0,134 - 0,111	0,133 - 0,105	0,132 - 0,099	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
23	Rasio PDRB Industri Pengolahan	%	16,52	16,57	16,62	16,65	16,69	16,73	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Mikro
24	Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum	%	6,73	6,86	7,00	7,13	7,27	7,4	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
25	Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara	Orang	1800	3740	5680	7620	9558	11400	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
26	Rasio Kewirausahaan	%	4,95	5,7	6,45	7,2	7,96	8,71	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Mikro
27	Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB	%	3,63	4,05	4,48	4,89	5,32	5,74	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Mikro
28	Return on Asset (ROA) BUMD	%	1,42	1,57	1,71	1,86	2,00	2,15	Sekretariat Daerah
29	Disparitas Harga	%	10	10	10	10	10	10	Sekretariat Daerah
30	Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDRB)	%	47,72	47,42	47,12	46,83	46,53	46,23	Sekretariat Daerah
31	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB	%	0,71	0,77	0,83	0,88	0,93	0,96	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
32	Total Dana Pihak Ketiga pada Bank Milik Kabupaten Per PDRB	%	0,019	0,020	0,021	0,022	0,024	0,025	Sekretariat Daerah
33	Total Kredit pada Bank Milik Kabupaten Per PDRB	%	0,015	0,016	0,017	0,018	0,020	0,021	Sekretariat Daerah
34	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	4,20 - 4,80	4,12 - 4,66	4,04 - 4,52	3,96 - 4,38	3,88 - 4,24	3,80 - 4,10	Dinas Tenaga Kerja
35	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan	%	59,86	59,97	60,08	60,19	60,30	60,41	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
36	Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	%	46,53	47,78	49,03	50,28	51,53	52,68	Dinas Tenaga Kerja
37	Persentase Rumah Tangga dengan Akses Internet	%	96,59	96,72	96,93	97,34	97,69	97,84	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
38	Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak	%	76,16	76,62	77,08	77,54	78	78,46	Dinas Perumahan dan Permukiman

No	Indikator	Satuan	Baseline	Target					Perangkat Daerah Koordinator
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
39	Persentase Panjang Jalan Kondisi Permukaan Mantap Kewenangan Kabupaten	%	85,77	85,86	85,95	86,03	86,12	86,20	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
40	Persentase Kelengkapan Jalan yang Telah Terpasang terhadap Kondisi Ideal pada Jalan Kabupaten	%	86,00	86,25	86,50	86,75	87,00	87,25	Dinas Perhubungan
41	Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman	%	17,22	33,165	49,11	65,055	81,00	83,75	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
42	Persentase Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipa	%	89,10	89,64	90,18	90,72	91,26	91,80	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
43	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Angka	71,44	71,48	71,53	71,57	71,62	71,62	Dinas Lingkungan Hidup
44	Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah	%	19,95	24,34	28,73	33,11	37,50	41,88	Dinas Lingkungan Hidup
45	Indeks Risiko Bencana (IRB)	Angka	92,85-89,10	90,02-88,80	89,05 - 87,46	88,07 - 86,13	87,10 - 84,79	86,12 - 83,45	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
46	Penurunan Emisi GRK	TonCO2eq	154.992,13	818.750,71	1.482.509,30	2.146.267,88	2.810.026,46	3.186.040,96	Dinas Lingkungan Hidup
47	Indeks Reformasi Birokrasi	Angka	85	86	87	88	89	90	Sekretariat Daerah
48	Indeks Reformasi Hukum	Angka	80	81,25	82,50	83,75	85	86,25	Sekretariat Daerah
49	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Angka	3,70	3,71	3,72	3,73	3,74	3,75	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
50	Indeks Pelayanan Publik	Angka	3,72	3,92	4,11	4,29	4,51	4,68	Sekretariat Daerah
51	Indeks Integritas Nasional	Angka	82,34	83,00	83,67	84,34	85,00	85,67	Inspektorat Daerah
52	Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Per Kapita Kabupaten	Juta Rupiah	98,58 - 104,62	109,09 - 113,97	119,59 - 123,31	130,10 - 132,66	140,60 - 142,00	153,18 - 155,50	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
53	Distribusi Pengeluaran Berdasarkan Kriteria Bank Dunia	%	16,67-16,87	17,05-17,70	17,42-18,52	17,80-19,35	18,17-20,17	18,55-21,00	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah

BAB 7 PENUTUP

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Magelang Tahun 2026 disusun dengan mengacu pada RPJMD Kota Magelang Tahun 2025-2029 dan Visi Misi Walikota dan Wakil Walikota Magelang Tahun 2025-2029. Dalam penyusunannya, RKPD 2026 mengakomodir berbagai dokumen perencanaan, yaitu RPJMD Provinsi Jawa Tengah tahun 2025-2029, berpedoman kepada RPJMN Tahun 2025-2029, Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2026, Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026, Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Magelang Tahun 2011-2031, serta dokumen perencanaan sektoral lainnya. Adapun regulasi dasar penyusunan perencanaan adalah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Raperda tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD. Kedua regulasi tersebut mengamanatkan bahwa:

1. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang ditetapkan dengan Peraturan Walikota menjadi pedoman penyusunan Rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS);
2. Rancangan KUA dan PPAS disampaikan kepada DPRD untuk dibahas sebagai landasan penyusunan rancangan APBD.

Dengan demikian maka dokumen RKPD Kota Magelang ini dimaksudkan sebagai acuan resmi bagi Pemerintah Daerah dan DPRD dalam menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), serta sebagai acuan dan pedoman Perangkat Daerah dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan umum, sekaligus mendorong masyarakat untuk mewujudkan partisipasinya dan juga untuk mengevaluasi penyelenggaraan pemerintahan. RKPD tahun 2026 ini merupakan bagian dari keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan program kegiatan perangkat daerah di Kota Magelang tahun 2026 sehingga akan menjadi landasan setiap perangkat daerah dalam menyusun rencana kerja dan anggaran tahun 2026. Usulan kegiatan yang menjadi bagian dari RKPD ini telah mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah, sehingga pembiayaannya diusulkan ke APBD Pemerintah Kota Magelang, APBD Provinsi Jawa Tengah, dan kepada Pemerintah Pusat melalui APBN.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 pula maka penyusunan RKPD 2026 dilaksanakan dengan koordinasi antar instansi dan perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Magelang, melibatkan partisipasi masyarakat dan seluruh pelaku kepentingan (*stakeholder*) melalui Forum Perangkat Daerah dan *Focused Group Discussion* (FGD), serta musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) yang dilaksanakan secara berjenjang dari tingkat Kelurahan, tingkat Kecamatan, dan tingkat Kota Magelang, yang berfungsi sebagai forum untuk menghasilkan kesepakatan terutama sinkronisasi dan penyelarasan rencana program dan kegiatan yang telah ditentukan menjadi prioritas untuk dilaksanakan di tahun 2026.

RKPD Kota Magelang ini juga memuat evaluasi hasil pelaksanaan RKPD tahun 2024 dan capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan, rancangan kerangka ekonomi daerah tahun 2026, kebijakan umum dan prioritas pembangunan, serta rencana kerja dan pendanaannya yang bersifat indikatif yang dilaksanakan pada tahun 2026.

Dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan RKPD tahun 2026, Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (BAPPERIDA) Kota Magelang berkewajiban untuk melakukan pemantauan, pengendalian, evaluasi, dan melakukan analisa terhadap penjabaran dan sinergitas RKPD tahun 2026 ke dalam Renja Perangkat Daerah tahun 2026 serta prioritas dan pagu indikatif perangkat daerah tahun 2026, terutama untuk target indikator yang perlu upaya keras untuk mencapainya.

Demikian agar dokumen perencanaan tahunan RKPD tahun 2026 ini dapat dilaksanakan sebagaimana ketentuan yang berlaku dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

WALI KOTA MAGELANG,



DAMAR PRASETYONO

